

Beradaptasi dengan Cepat Menghadapi Perubahan

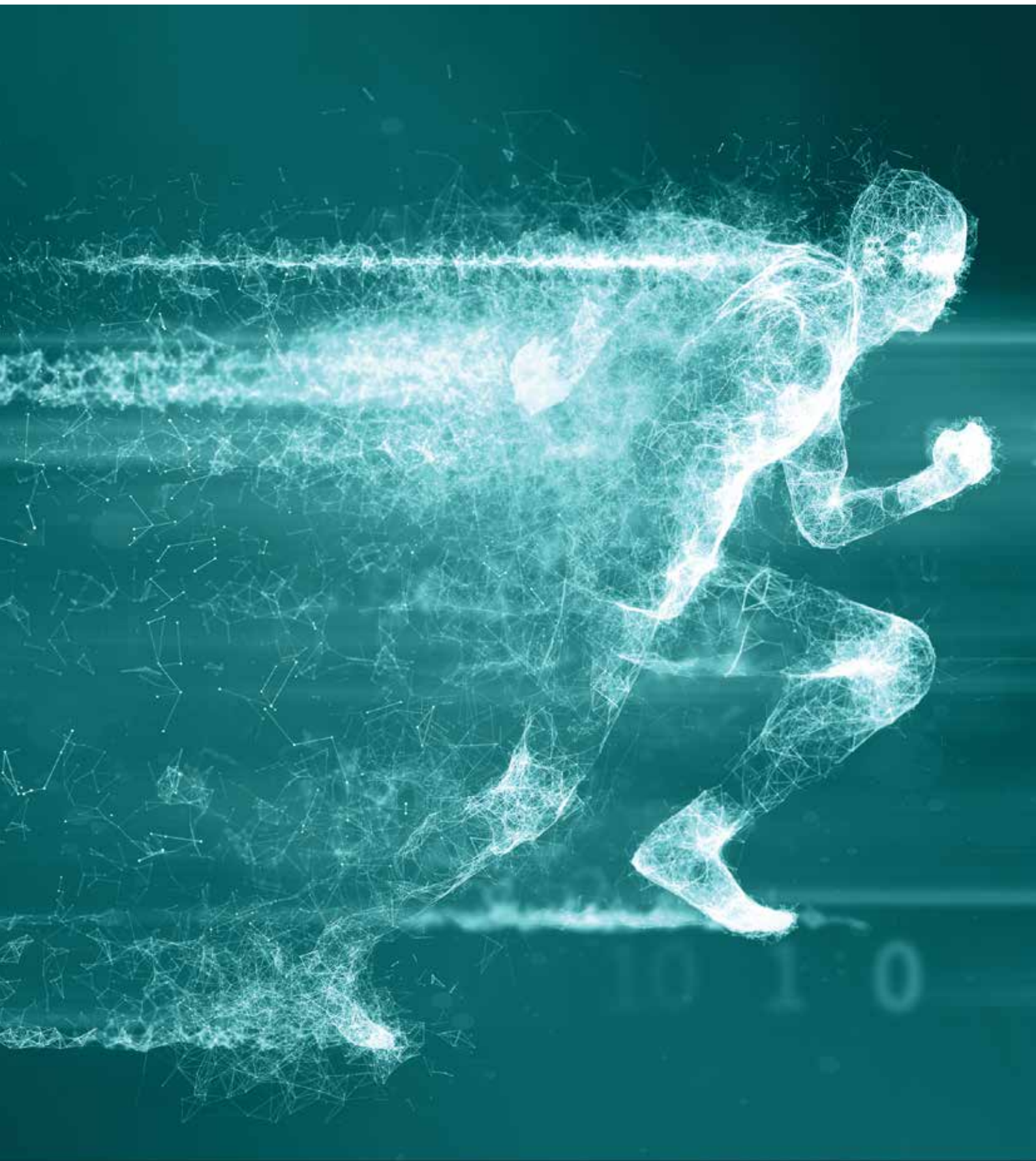


TEMA DAN ARTI TEMA

Beradaptasi dengan Cepat Menghadapi Perubahan

Kinerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di 2018 semakin mantap dengan mencatatkan pencapaian yang melampaui standar perbankan. BNI terus bertransformasi sehingga mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan industri perbankan modern saat ini.

Pada era disrupsi teknologi, BNI telah menjadi salah satu Bank yang memiliki keunggulan berbasis teknologi digital. Hal ini dilakukan melalui Transformasi Digital, mulai dari perbaikan proses internal, mempersiapkan *human capital* yang kompeten dalam penguasaan teknologi, hingga menawarkan berbagai layanan dan produk elektronik serta digital kepada nasabah, seperti BNI DigiCare, DigiDeal, DigiMaster, hingga DigiSport. Bagi BNI, transformasi menuju layanan digital ini merupakan keharusan guna menghadapi tantangan untuk menjadi bank yang tetap relevan serta menawarkan solusi layanan yang serba cepat, fleksibel, dan *mobile* kepada nasabahnya.



KESINAMBUNGAN TEMA



2012

Rising to the Challenge

BNI juga telah tumbuh dan berkembang menjadi bank nasional yang solid dengan pertumbuhan keuangan berkelanjutan. Sebagai bank yang Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa, tantangan BNI adalah untuk terus melanjutkan dan meningkatkan kontribusi nyata BNI terhadap kemajuan Bangsa dan Negara, saat ini dan di masa mendatang.



2013

Bigger, Better, Together

Dengan fokus pada pertumbuhan kualitas, BNI dengan basis nasabah yang luas terus mempertahankan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada segmen bisnis perbankan, BNI mendukung nasabah segmen bisnis di 8 (delapan) sektor industri terdepan, termasuk para pengusaha di sektor usaha Unit Kecil Menengah. Pada sektor konsumen dan ritel, BNI berupaya untuk menjadi mitra yang setia dan terpercaya bagi seluruh nasabah melalui produk dan layanan yang unggul, layanan, *service coverage* serta *electronic channels*.



2014

Advancing on The Right Track

BNI telah mencapai banyak kemajuan maupun prestasi penting di berbagai bidang. Pencapaian dan kemajuan tersebut dapat langsung diukur, disajikan dalam grafik, ataupun dilaporkan dalam laporan keuangan BNI, seperti pertumbuhan jumlah kantor cabang dan ATM, tingkat Rasio Kecukupan Modal yang tinggi, serta perolehan Laba Bersih sebesar Rp10,8 triliun pada tahun 2014.



2015

Working to Build the Nation

Bangsa Indonesia memiliki cita-cita luhur untuk menjadi bangsa yang mandiri dan unggul dalam persaingan global.

Untuk mendukung tercapainya cita-cita tersebut, BNI berperan aktif sebagai *Agent of Development* dengan melaksanakan fungsi intermediasi dalam menunjang kebutuhan perbankan nasional, dan terus menunjukkan semangat berprestasi membangun bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab.



2016

Melangkah Lebih Cepat dan Menangkan Persaingan

Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 telah meningkatkan persaingan terutama pada sektor riil. Penguasaan pasar domestik menjadi jawaban bagi implementasi MEA terkait dengan peningkatan daya saing perbankan nasional.

Pendekatan *value chain* yang menjadi fokus BNI dalam strateginya diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan di masa yang akan datang yaitu dengan melayani seluruh aspek dan elemen pendukung pembangunan mulai dari institusi/korporasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta menjangkau individu-individu yang terlibat di dalamnya.



2017

Memperkokoh Keunggulan Kompetitif

Sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan, BNI berusaha untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal tersebut dilaksanakan, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan institusi lain yang berasal dari negara, pemerintah, individu, masyarakat, sesama perusahaan keuangan, maupun badan partikelir lainnya.

Selain kontribusi terhadap bangsa dan negara tersebut, BNI berusaha menegaskan eksistensinya dengan berusaha untuk menjadi salah satu pemain utama di sektor keuangan khususnya perbankan melalui layanan keuangan yang menyeluruh kepada semua nasabah perbankan dan nilai tambah bermanfaat bagi seluruh *stakeholder* yaitu nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri keuangan.

HIGHLIGHT KINERJA

Pendapatan Bunga
dan Syariah Bersih
meningkat

11,0%
menjadi
Rp**35.446**
miliar

Pinjaman yang
diberikan meningkat

16,2%
menjadi
Rp**512.778**
miliar

Total Aset
meningkat

14,0%
menjadi
Rp**808.572**
miliar

Simpanan Nasabah
meningkat

12,1%
menjadi
Rp**578.775**
miliar

Laba
meningkat

10,3%
menjadi
Rp**15.015**
miliar

Ekuitas
meningkat

9,4%
menjadi
Rp**110.374**
miliar

NPL Bruto mengalami penurunan menjadi

1,9%
di 2018

Coverage Ratio naik menjadi

152,9%
di 2018

Skor ACGS di tahun 2018 sebesar

91,58
(Very Good) naik dari
88,60
(Good) di tahun sebelumnya

The Best State Owned Enterprise dan Top 50 Public Listed Companies dalam acara Good Corporate Governance Award yang diselenggarakan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada Good Corporate Governance Award 2018.

JEJAK LANGKAH



Berdirinya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank pertama milik Negara, berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum.

1946 >>>

BNI diubah menjadi bank umum dan membuka cabang pertama di luar negeri yang terletak di Singapura.

1955 >>>



BNI sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa.

1950 >>>

Sebagai bank umum dengan nama "Bank Negara Indonesia 1946", BNI mendapatkan tugas memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan memberdayakan berbagai sektor industri di Indonesia.

1968 >>>

BNI mendukung perekonomian Indonesia dan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti Bank Terapung dan Bank Keliling.

1960 >>>



USD 500

BNI menerbitkan *Global Bond* melalui kantor cabang London senilai USD500 juta. *Global Bond* ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

2012 <<<



40%

BNI menerbitkan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*) sehingga kepemilikan publik meningkat menjadi 40%.

2010 <<<

BNI Syariah

Pemegang saham BNI menyetujui untuk memisahkan Unit Usaha Syariah BNI menjadi entitas bisnis yang independen.

2009 <<<



BNI melakukan kemitraan strategis dengan Sumitomo Life Insurance Company yang membeli saham baru yang diterbitkan PT BNI Life Insurance senilai Rp4,2 triliun.

2013 >>>



Rp10,8 triliun

Laba Bersih BNI untuk pertama kalinya menembus angka dua digit (Rp10,8 triliun), sebagai salah satu hasil program transformasi BNI yang dilakukan sejak 2008.

2014 >>>



2015 >>>

Dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan usaha yang dinamis, memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, dan menyelaraskan dengan regulasi terkait pengelolaan konglomerasi lembaga keuangan, BNI melakukan *restatement* visinya: "**Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja**".



Peluncuran logo baru BNI berupa "bahtera berlayar di tengah samudra" sebagai cerminan dan ungkapan harapan Bank.

1989

BNI melaksanakan restrukturisasi operasional dan pembenahan korporasi, termasuk menyusun visi dan misi serta *Performance Improvement Program* (PIP).

1986 >>>

BNI menawarkan saham perdana kepada masyarakat dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Hal ini menjadikan BNI sebagai bank pemerintah pertama yang menjadi perusahaan terbuka.

1996

Bentuk hukum BNI diubah menjadi PT (Persero) sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan.

1992 >>>



BNI memperoleh tambahan modal dari Pemerintah melalui program rekapitalisasi perbankan. BNI berhasil memperoleh sertifikat ISO 9002 sebagai pengakuan standar kualitas yang meliputi Unit Pemrosesan Bersama (UPB).

1999

Krisis moneter melanda Asia dan Indonesia. Sebagaimana bank-bank lain, BNI juga terkena dampak negatif krisis tersebut, hal ini tercermin dari menurunnya indikator kinerja finansial.

1997 >>>



Di bawah tim Manajemen yang baru, BNI melangkah meningkatkan nilai di tengah tantangan krisis ekonomi global, dengan memperkuat landasan finansial melalui 5 (lima) strategi utama yaitu kecukupan pencadangan kerugian, peningkatan kualitas aktiva, fokus pada profitabilitas, menciptakan model bisnis yang berkelanjutan, serta mempertahankan struktur biaya yang efisien.

2008 <<<



BNI menerbitkan saham baru yang dicatitkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bersamaan dengan program divestasi saham pemerintah. Dengan selesainya kedua program tersebut, kepemilikan publik meningkat menjadi 23,64%.

2007 <<<



Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

BNI meluncurkan logo dan identitas korporat baru sejalan dengan upaya membangun citra Bank yang kokoh dalam menghadapi persaingan.

2004

coverage ratio

146% ▲
CAR 19,4% ▲



Untuk kedua kalinya BNI mencatat laba double digit sebesar Rp11,4 triliun dengan fundamental yang lebih baik, ditunjukkan dengan *coverage ratio* mencapai 146% dan CAR 19,4%.

2016 >>>



Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017 dengan nilai Rp3 triliun jangka waktu 5 tahun dengan kupon sebesar 8% per annum. Obligasi BNI diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan listing di BEI pada tanggal 12 Juli 2017.

2017 >>>

Penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) Subordinasi I BNI Tahun 2018 dengan nilai Rp100 miliar jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per annum. MTN telah dicatat oleh OJK dengan tanggal efektif 8 Juni 2018.

2018

KEUNGGULAN KAMI

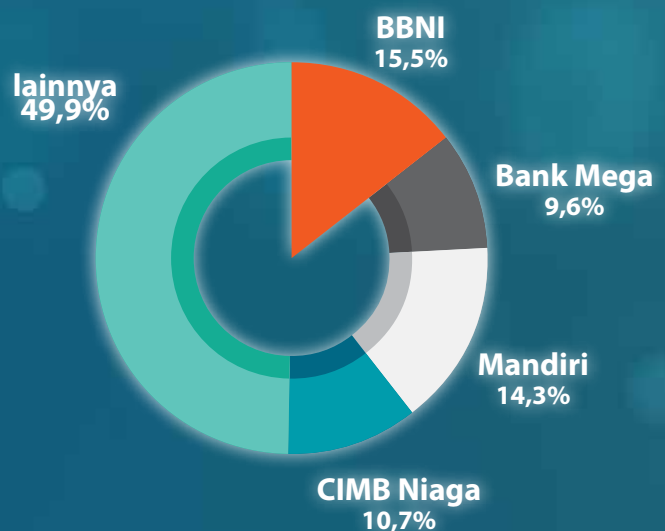
PERTUMBUHAN SEGMENT KORPORASI LEBIH CEPAT DIBANDINGKAN DENGAN PESAING



PENETRASI KARTU KREDIT YANG KUAT

Pangsa pasar kartu kredit BNI tahun 2018 mencapai 15,5% dari total pinjaman kartu kredit di Indonesia, meningkat dibandingkan pangsa pasar tahun 2017 yaitu sebesar 14,60%. Rata-rata pertumbuhan kartu kredit BNI selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 18,7%, merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan bank lainnya. Pertumbuhan jumlah kartu dan peningkatan *sales volume* kartu kredit melalui penetrasi pada program-program *e-commerce* dan penerbitan produk baru yang berdampak pada kenaikan *outstanding* Kartu Kredit BNI pada akhir tahun 2018. Adapun perolehan *sales volume* kartu kredit di tahun 2018 sebesar Rp38.924 miliar atau naik 11,3% dibandingkan tahun 2017, sedangkan perolehan *outstanding* kartu kredit di tahun 2018 sebesar Rp12.558 miliar atau meningkat 7,9% dibanding akhir tahun 2017.

PANGSA PASAR KARTU KREDIT



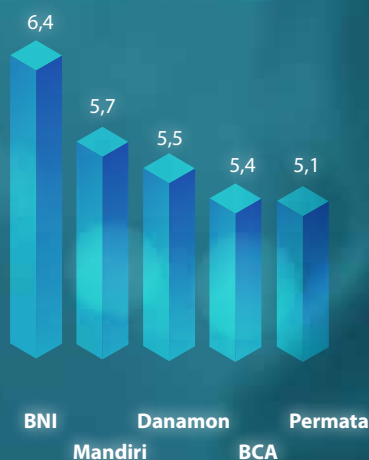
PERTUMBUHAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) YANG TINGGI

Sampai dengan 31 Desember 2018, BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp66,1 triliun meningkat 16,9% dari tahun 2017 yang sebesar Rp61,3 triliun. Penyaluran KUR yang terus meningkat dan di atas target proporsional diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis. Pengembangan bisnis UMKM akan berdampak kepada meningkatnya perekonomian Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, BNI diharapkan dapat meningkatkan bisnisnya.

KEMAMPUAN CASH MANAGEMENT YANG BAIK

Berdasarkan Majalah AsiaMoney, BNI terpilih sebagai bank dengan peringkat pertama dalam *cash management* segmen korporasi dan menengah. BNI juga berada pada peringkat kedua untuk segmen kecil. Berikut hasil penilaian AsiaMoney terhadap *cash management* BNI dan bank lainnya:

CORPORATE



MIDDLE



SMALL



DAFTAR ISI

2	TEMA DAN ARTI TEMA
4	KESINAMBUNGAN TEMA

6	<i>HIGHLIGHT</i> KINERJA
8	JEJAK LANGKAH

10	KEUNGGULAN KAMI
12	DAFTAR ISI

KILAS KINERJA 2018

16	IKHTISAR KEUANGAN
22	IKHTISAR OPERASIONAL
24	INFORMASI HARGA SAHAM
27	AKSI KORPORASI

27	AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (<i>SUSPENSION</i>) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (<i>DELISTING</i>)
----	---

28	INFORMASI OBLIGASI, SUKUK DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI
29	INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA
30	PERISTIWA PENTING DI TAHUN 2018

LAPORAN MANAJEMEN

37	LAPORAN DEWAN KOMISARIS
----	-------------------------

46	LAPORAN DIREKSI
----	-----------------

56	LEMBAR PENGESAHAN
----	-------------------

PROFIL PERUSAHAAN

60	IDENTITAS PERUSAHAAN
62	RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
64	<i>BRAND</i> PERUSAHAAN
65	BIDANG USAHA
66	PRODUK DAN JASA
70	PETA WILAYAH USAHA
74	STRUKTUR ORGANISASI
76	VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
78	<i>REVIEW</i> VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
79	BUDAYA PERUSAHAAN
80	PROFIL DEWAN KOMISARIS
89	PROFIL DIREKSI
100	PROFIL <i>SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT</i>
101	PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

117	PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
128	KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
131	DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI
136	STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
137	KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM
139	KRONOLOGIS PENERBITAN OBLIGASI
142	KRONOLOGIS PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA
143	NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PENERBITAN SAHAM
144	PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

151	NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, KANTOR CABANG DAN PERWAKILAN LUAR NEGERI SERTA KANTOR WILAYAH
152	KANTOR CABANG, <i>SUB BRANCH</i> , PERWAKILAN LUAR NEGERI DAN KANTOR WILAYAH
154	INFORMASI YANG TERSEDIA DI <i>WEBSITE</i>
156	PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

174	TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI
178	TINJAUAN OPERASIONAL
224	ASPEK PEMASARAN

236	TINJAUAN KEUANGAN
297	PERPAJAKAN
300	<i>TRANSFER PRICING DOCUMENT</i>

303	<i>FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)</i>
305	INFORMASI MATERIAL LAINNYA

UNIT PENDUKUNG BISNIS

320 PENGELOLAAN RISIKO KREDIT
325 JARINGAN DAN LAYANAN
328 BNI *CONTACT CENTER*
331 UNIT KUALITAS LAYANAN
332 TEKNOLOGI INFORMASI
335 PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI

339 TATA KELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI
340 RENCANA PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN
343 *DIGITAL BANKING*
344 *ELECTRONIC BANKING*
351 *HUMAN CAPITAL*

352 *HUMAN CAPITAL
ARCHITECTURE*
353 *KEBIJAKAN TALENT MANAGEMENT
UNTUK MENGAKSELERASI
LEADERSHIP DEVELOPMENT*

TATA KELOLA PERUSAHAAN

362 *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
365 KETERKAITAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* DENGAN
KINERJA PERUSAHAAN
366 LANDASAN HUKUM PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
367 PENERAPAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE*
371 UPAYA PENINGKATAN KUALITAS
IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE*

374 *MONITORING* IMPLEMENTASI GCG
375 *GOOD CORPORATE GOVERNANCE
ASSESSMENT*
383 ORGAN PERUSAHAAN DAN
PROSES PENERAPAN *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE*
576 MANAJEMEN RISIKO
608 PROGRAM ANTI PENCUCIAN
UANG (APU) DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME (PPT)
610 PERKARA PENTING

624 AKSES INFORMASI DAN
DATA PERUSAHAAN
643 *KEBIJAKAN GRATIFIKASI*
646 *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
658 INFORMASI PEMEGANG SAHAM
UTAMA DAN PENGENDALI
670 PELAKSANAAN PENERAPAN
*ASEAN CORPORATE GOVERNANCE
SCORECARD*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

688 TATA KELOLA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
693 TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN
HAK ASASI MANUSIA
695 TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN
OPERASI YANG ADIL
696 PELAKSANAAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL BERLANDASKAN
KONSEP KEUANGAN
BERKELANJUTAN

698 DASAR PENERAPAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
699 STRUKTUR PENGELOLA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN
700 TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN
LINGKUNGAN HIDUP
705 TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN
KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN
DAN KESELAMATAN KERJA

708 TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN
PENGEMBANGAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN
715 TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN
TANGGUNG JAWAB KEPADA
KONSUMEN

PERMODALAN & PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

723 PERMODALAN

727 PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

FINANCIAL REPORT

1072 REFERENSI SILANG
KRITERIA ARA 2018

Kilas Kinerja 2018

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 16 | IKHTISAR KEUANGAN | 28 | INFORMASI OBLIGASI, SUKUK DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI |
| 22 | IKHTISAR OPERASIONAL | 29 | INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA |
| 24 | INFORMASI HARGA SAHAM | 30 | PERISTIWA PENTING DI TAHUN 2018 |
| 27 | AKSI KORPORASI | | |
| 27 | AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (<i>SUSPENSION</i>) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (<i>DELISTING</i>) | | |



IKHTISAR KEUANGAN

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
Laporan Posisi Keuangan					
Aset					
Kas	14.044	11.578	11.168	12.890	11.436
Giro pada Bank Indonesia	35.591	32.701	30.147	30.932	24.598
Giro pada bank lain - neto	13.134	21.335	6.298	8.999	4.496
Penempatan pada bank lain dan BI - neto	39.325	28.593	33.662	33.417	14.527
Efek-efek - neto	32.044	36.050	23.765	9.927	12.738
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	679	1.665	376	6.237
Wesel ekspor dan tagihan lainnya - neto	24.587	15.701	8.932	8.831	2.301
Tagihan akseptasi - neto	20.295	18.106	14.724	10.821	12.467
Tagihan derivatif - neto	606	217	250	441	165
Pinjaman yang diberikan	512.779	441.314	393.275	326.105	277.622
Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan	(14.892)	(14.524)	(16.681)	(12.039)	(6.970)
Obligasi Pemerintah	86.791	79.849	63.006	47.222	43.830
Pajak dibayar dimuka	1.624	623	620	2.299	1.437
Beban dibayar dimuka	2.337	2.318	2.411	1.633	1.392
Penyertaan saham - neto	604	713	57	36	37
Aset lain-lain - neto	11.900	10.381	6.429	4.482	3.370
Aset tetap - neto	26.127	22.805	21.972	20.757	6.222
Aset pajak tangguhan - neto	1.676	891	1.332	1.465	668
TOTAL ASET	808.572	709.330	603.032	508.595	416.574



Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
LIABILITAS					
Liabilitas segera	4.160	4.868	3.276	1.805	1.813
Simpanan Nasabah*	578.775	516.098	435.545	370.420	313.893
Simpanan dari Bank Lain*	14.233	12.228	10.801	4.698	3.177
Liabilitas derivatif	322	114	411	1.162	662
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	21.524	2.390	3.765	3.163	2.492
Liabilitas akseptasi	4.417	4.507	4.359	6.188	6.469
Beban yang masih harus dibayar	876	972	1.047	917	660
Utang pajak	481	80	151	749	318
Imbalan kerja	3.512	4.094	3.503	3.481	3.393
Penyisihan	178	192	156	99	87
Liabilitas lain-lain	14.608	14.731	11.149	7.584	5.219
Efek-efek yang diterbitkan*	2.987	3.482	7.227	7.367	6.158
Pinjaman yang diterima	52.025	44.671	32.389	22.524	11.212
Efek-efek subordinasi	100	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS	698.198	608.427	513.778	430.157	355.552
DANA SYIRKAH TEMPORER					
Simpanan Nasabah	26.603	23.350	20.092	16.484	13.629
Simpanan dari Bank Lain	358	494	489	449	775
Sukuk Mudharabah yang diterbitkan	-	496	496	496	-
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	26.961	24.340	21.077	17.429	14.404



Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
EKUITAS					
Modal Saham	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055
Tambahan Modal Disetor/Agio Saham	14.568	14.568	14.568	14.568	14.568
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	85	93	82	76	58
Selisih Transaksi dengan Pihak Non Pengendali	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257
Kerugian Bersih yang Belum Direalisasikan dari Penurunan Nilai Wajar Efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	(3.914)	22	(1.888)	(2.519)	(1.945)
Selisih Bersih Revaluasi Aset Tetap Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	14.979	12.283	12.285	12.190	-
Saldo Laba	71.047	60.314	50.798	41.538	35.078
Kepentingan Non Pengendali Atas Aset Bersih Entitas Anak Perusahaan yang Dikonsolidasikan	2.297	2.311	2.097	2.023	1.950
TOTAL EKUITAS	110.374	100.903	89.254	78.438	61.021
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	808.572	709.330	603.032	508.595	416.574

*termasuk Dana Syirkah Temporer

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah	54.138	48.177	43.768	36.895	33.750
Beban Bunga dan Beban Syariah	(18.692)	(16.240)	(13.773)	(11.335)	(10.989)
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah - Neto	35.446	31.937	29.995	25.560	22.761
Pendapatan Premi dan Hasil Investasi	5.997	6.871	5.597	3.618	1.476
Beban Klaim	(4.285)	(5.104)	(4.255)	(2.485)	(1.343)
Pendapatan Premi dan Hasil Investasi - Neto	1.712	1.767	1.342	1.133	607
Pendapatan Operasional Lainnya (Incl. Recovery)	11.613	11.040	9.552	8.274	8.145
- Pendapatan Operasional Lainnya	9.616	9.308	8.174	6.684	6.559
- Recovery	1.997	1.732	1.378	1.590	1.856
Total Pendapatan Operasional	48.771	44.744	40.888	34.967	31.783
Beban Operasional Lainnya	(21.783)	(20.396)	(18.806)	(16.218)	(14.576)
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(7.388)	(7.126)	(7.853)	(7.336)	(3.642)
Laba Operasional	19.599	17.222	14.229	11.412	13.566
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Neto	221	(57)	74	54	178
Laba Sebelum Beban Pajak	19.821	17.165	14.303	11.466	13.744
Beban Pajak	(4.729)	(3.394)	(2.893)	(2.326)	(2.695)
Laba Tahun Berjalan	15.092	13.771	11.410	9.141	11.049
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:					
- Kepentingan Non Pengendali	77	154	71	74	47
- Pemilik Entitas Induk	15.015	13.617	11.339	9.067	10.783



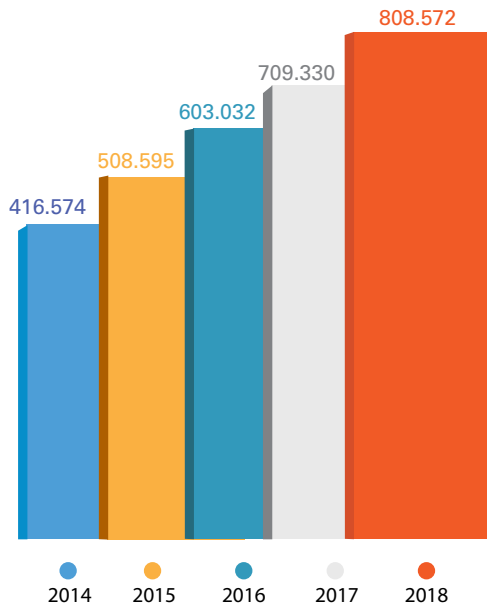
Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
Labas Rugi - Komprehensif					
Pendapatan/(Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	(856)	1.847	922	11.722	1.085
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	14.236	15.617	12.333	20.863	11.915
Labas Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
- Kepentingan Non Pengendali	(14)	215	73	74	47
- Pemilik Entitas Induk	14.250	15.403	12.260	20.789	11.868
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)	805	730	610	487	578
LAPORAN ARUS KAS					
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(4.274)	33.677	15.999	24.357	(610)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(9.612)	(23.274)	(29.400)	(3.516)	(2.406)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	20.609	3.194	8.060	9.250	(4.454)
Dampak Selisih Kurs	222	96	17	5	(78)
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	91.977	78.284	83.606	53.512	61.061
Arus Kas Bersih	6.723	13.597	(5.341)	30.090	(7.471)
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	98.922	91.977	78.284	83.606	53.512
RASIO KEUANGAN					
PERMODALAN (%)					
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	18,5	18,5	19,4	19,5	16,2
KPMM dengan Memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Operasional	18,6	18,6	19,5	19,6	16,3
KPMM dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Pasar	18,5	18,5	19,4	19,5	16,2
Aset Tetap terhadap Modal	24,6	23,7	25,7	27,7	10,4
KUALITAS ASET (%)					
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	1,3	1,5	2,1	1,9	1,5
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	1,3	1,5	2,0	1,9	1,4
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	1,9	2,1	2,7	2,5	1,7
Pemenuhan CKPN Aset Produktif	1,9	2,1	2,7	2,4	1,7
Pemenuhan CKPN Aset Non Produktif	4,1	19,9	42,3	33,5	98,3
NPL Bruto	1,9	2,3	3,0	2,7	2,0
NPL Neto	0,8	0,7	0,4	0,9	0,4
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif	62,1	59,2	61,7	63,2	67,0
Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit	20,2	26,6	29,6	26,2	23,4
Rasio Agunan yang Diambil Alih terhadap Total Kredit	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1



Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
PROFITABILITAS (%)					
<i>Return on Assets (ROA)</i>	2,8	2,7	2,7	2,6	3,5
<i>Return on Equity (ROE)</i>	16,1	15,6	15,5	17,2	23,6
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	5,3	5,5	6,2	6,4	6,2
<i>Other Operating Income to Operating Income</i>	26,5	27,3	25,7	26,0	27,7
BOPO (Biaya Operasi/Pendapatan Operasional)	70,1	71,0	73,6	75,5	69,8
Rasio Laba (Rugi) terhadap Total Aset	2,0	2,1	1,9	1,8	2,7
Rasio Laba (Rugi) terhadap Total Ekuitas	14,5	14,5	12,9	11,7	18,7
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset	86,3	85,8	85,2	84,7	85,7
Rasio Liabilitas terhadap Total Ekuitas	628,4	603,8	576,1	551,8	598,7
Rasio <i>Fee Based Income</i> terhadap Total Pendapatan Operasional Lainnya	82,8	84,9	85,7	81,0	77,4
Laba Bersih per Saham (EPS) (dalam Rupiah penuh)	805	730	610	487	578
LIKUIDITAS (%)					
Pinjaman Terhadap Total Simpanan (LDR)	88,8	85,6	90,4	87,8	87,8
Pinjaman terhadap Total Pendanaan (LFR)	85,6	85,3	90,4	87,8	87,8
Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset	19,7	20,2	19,0	21,0	18,6
Rasio Total Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek	-	-	-	-	-
Rasio Total Kredit kepada UMKM terhadap Total Kredit	17,6	18,3	17,7	16,0	16,2
KEPATUHAN (%)					
Persentase Pelanggaran BMPK					
- Pihak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak Tidak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Persentase Pelampauan BMPK					
- Pihak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak Tidak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Giro Wajib Minimum (GWM)					
- GWM Utama Rupiah	6,5	6,6	6,8	9,2	8,1
- GWM Valuta Asing	8,0	8,0	8,0	8,0	8,3
Posisi Devisa Neto (PDN)	2,0	2,5	3,4	1,7	1,6
RASIO LAINNYA					
<i>Provisioning/NPL Gross (Coverage Ratio) - (%)</i>	152,9	148,0	146,0	140,4	130,1
CIR (Rasio Biaya Terhadap Pendapatan) - (%)	42,5	43,9	44,0	44,2	43,8
<i>Operating Income/Employee</i> (dalam Juta Rp)	1.657	1.496	1.330	1.196	1.115
Jumlah <i>Outlet</i> (nilai penuh, tidak diaudit, dalam unit)	2.262	2.150	1.990	1.826	1.766
Jumlah ATM (nilai penuh, tidak diaudit, dalam unit)	18.311	17.966	17.056	16.071	14.071
Jumlah Pegawai (nilai penuh, tidak diaudit, dalam orang)	27.224	27.209	28.184	26.875	26.536

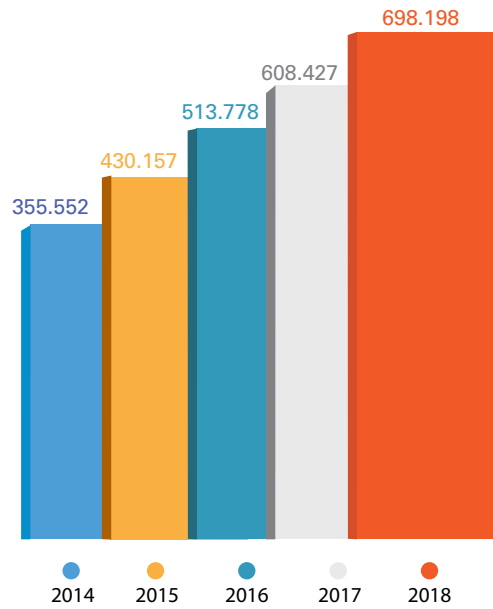
Aset

dalam miliar Rupiah



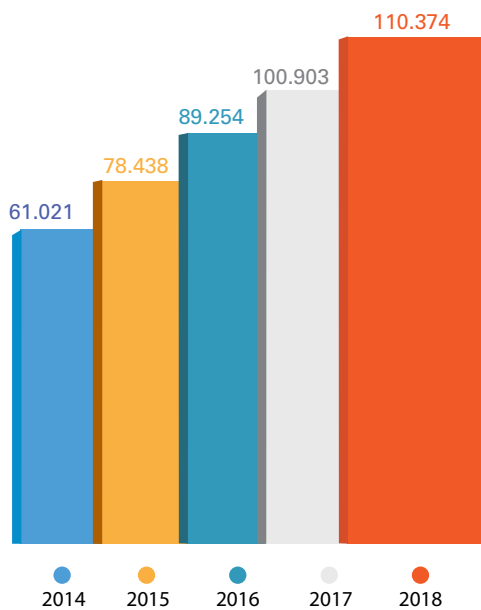
Liabilitas

dalam miliar Rupiah



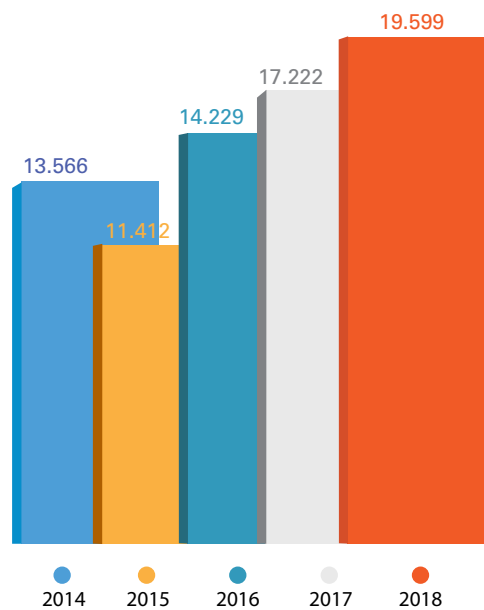
Ekuitas

dalam miliar Rupiah



Laba Operasional

dalam miliar Rupiah



IKHTISAR OPERASIONAL

Tabel Kinerja Produk Pinjaman *Business Banking*

(dalam miliar Rupiah)

Segmen	2018	2017	2016	2015	2014
Korporasi	222.910	188.026	174.073	137.909	119.715
Komersial Menengah	74.731	70.261	61.330	51.147	40.324
Kecil	66.063	56.479	50.684	42.076	40.374
Luar Negeri	39.789	30.734	21.237	19.538	10.082
TOTAL	403.493	345.499	307.323	250.670	277.622

Tabel Kinerja Produk Pinjaman *Consumer*

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2018	2017	2016	2015	2014
<i>Mortgage</i>	40.753	37.066	36.396	34.664	33.341
<i>Credit Card</i>	12.558	11.635	10.549	9.795	7.777
<i>Payroll</i>	23.744	17.687	12.026	7.048	4.290
<i>Others</i>	2.680	5.057	6.097	6.032	6.617
TOTAL	79.735	71.445	65.069	57.540	52.024

Tabel Kinerja Produk Pinjaman Segmen Korporasi Termasuk Luar Negeri Berdasarkan Sektor

(dalam miliar Rupiah)

Sektor	2018	2017	2016	2015	2014
Perindustrian	69.350	55.941	54.034	50.703	36.625
Pertanian	38.189	38.840	35.706	23.307	19.779
Jasa Dunia Usaha	35.235	27.842	18.222	13.868	13.283
Listrik, Gas dan Air	22.328	25.232	27.387	17.605	13.682
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	20.479	17.439	17.648	17.694	14.921
Konstruksi	22.200	16.869	8.907	6.643	2.477
Perdagangan, Restoran dan Hotel	26.591	16.490	9.207	7.838	7.462
Pertambangan	15.704	9.496	12.472	13.064	16.435
Jasa Pelayanan Sosial	7.623	5.496	7.292	1.801	1.392
Lainnya	4.999	5.115	4.435	4.924	3.741
TOTAL	262.699	218.760	195.310	157.447	129.797



Tabel Kinerja Produk Pinjaman Kecil

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2018	2017	2016	2015	2014
BCM	39.521	36.095	34.405	31.958	30.084
KUR	20.289	14.194	10.964	4.326	3.186
KCLK	1.459	2.019	2.457	3.164	3.807
BWU	4.794	4.171	2.859	2.628	3.297
TOTAL	66.063	56.479	50.684	42.076	40.374

Tabel Kinerja Jumlah Dana Pihak Ketiga

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2018	2017	2016	2015	2014
Giro *	169.274	143.162	122.652	91.194	82.743
Tabungan *	206.056	182.295	158.662	135.065	119.779
Deposito *	203.445	190.641	154.230	144.161	111.371
TOTAL	578.775	516.098	435.545	370.421	313.893

*termasuk Dana Syirkah Temporer

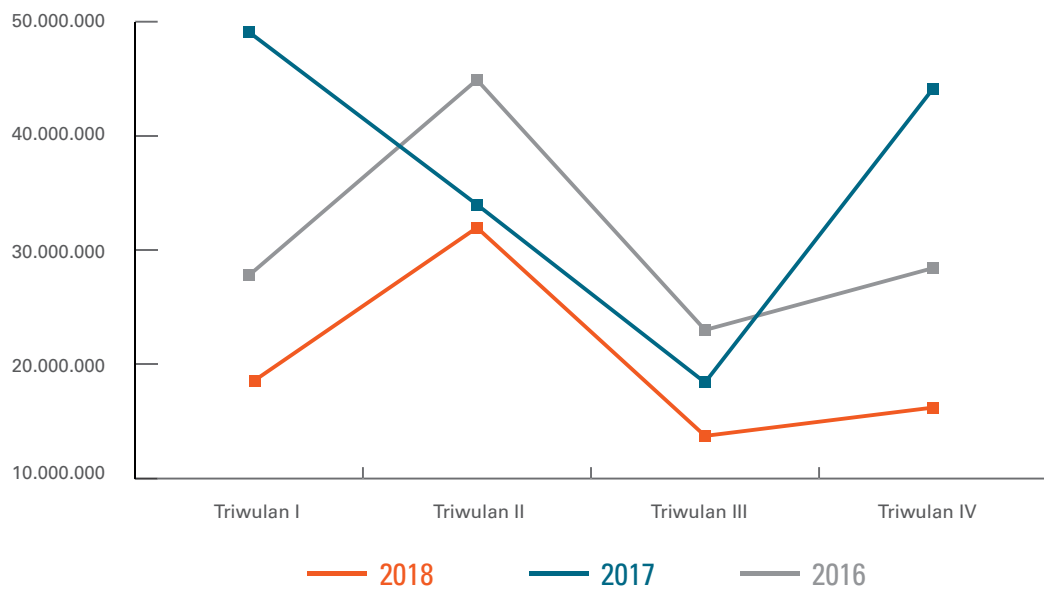
INFORMASI

HARGA SAHAM

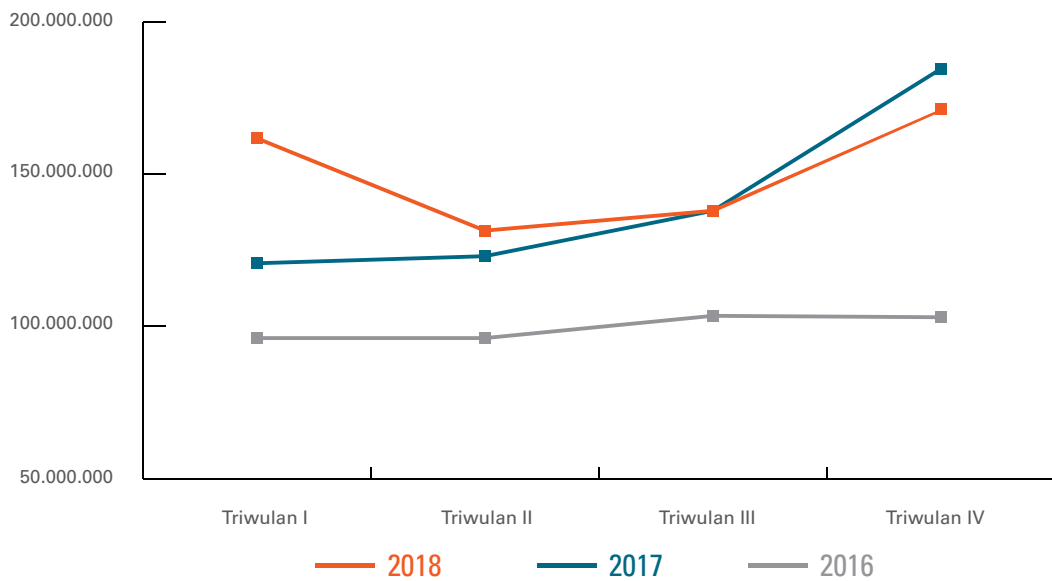
Tabel Harga, Volume dan Kapitalisasi Saham BNI 2016-2018

Tahun	Harga per saham (Rp)				Jumlah Saham (saham)	Volume Transaksi (saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp Juta)
	Pembukaan	Penutupan Tertinggi	Penutupan Terendah	Penutupan			
2018							
Triwulan I	9.775	10.175	8.650	8.675	18.648.656.458	19.135.000	161.777.095
Triwulan II	8.725	9.000	6.800	7.050		31.968.800	131.473.028
Triwulan III	7.125	8.300	6.750	7.400		13.735.400	138.000.058
Triwulan IV	7.425	9.050	6.675	8.800		16.215.800	164.621.699
2017							
Triwulan I	5.525	6.900	5.450	6.475	18.648.656.458	49.095.300	120.750.049
Triwulan II	6.400	6.825	6.150	6.600		33.985.100	123.081.131
Triwulan III	6.600	7.500	6.575	7.400		18.413.500	138.000.057
Triwulan IV	7.500	9.925	7.300	9.900		44.149.300	184.621.698
2016							
Triwulan I	4.990	4.835	4.675	5.200	18.648.656.458	27.788.000	96.192.494
Triwulan II	5.100	4.270	5.300	5.200		44.907.800	96.192.494
Triwulan III	5.225	5.100	5.975	5.200		23.008.500	103.500.043
Triwulan IV	5.625	5.450	5.650	5.525		28.428.000	103.033.826

Grafik Volume Transaksi Saham

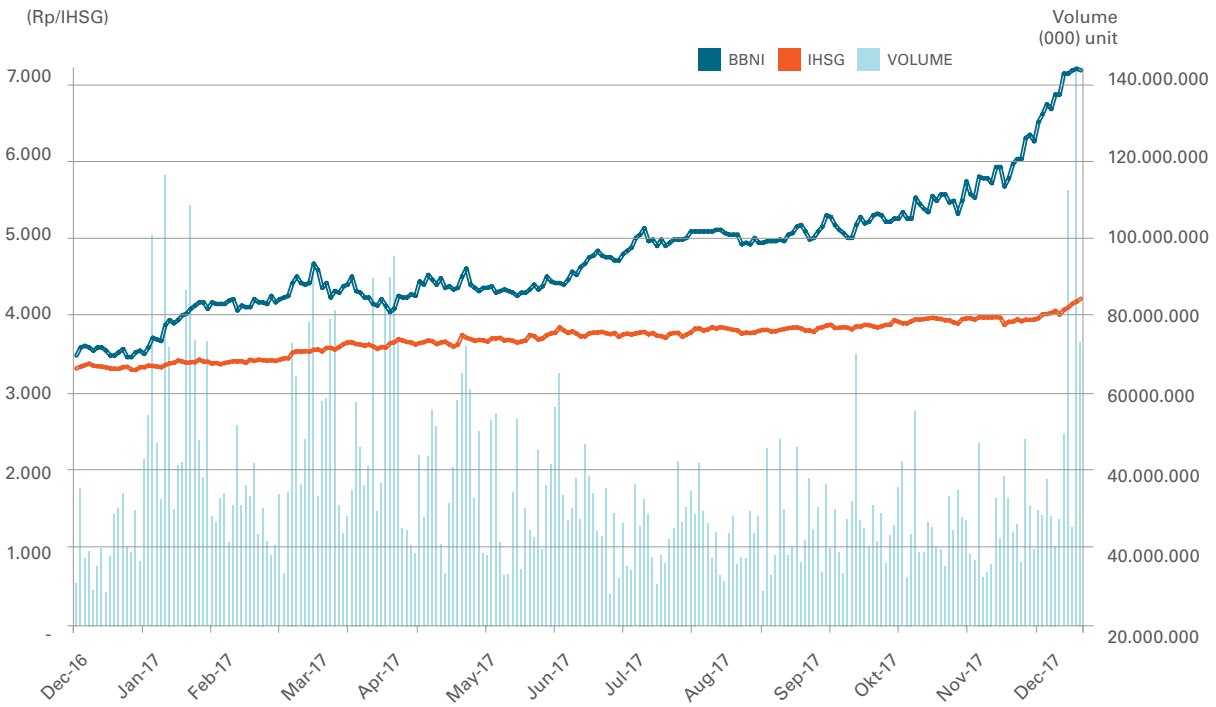


Grafik Kapitalisasi Pasar

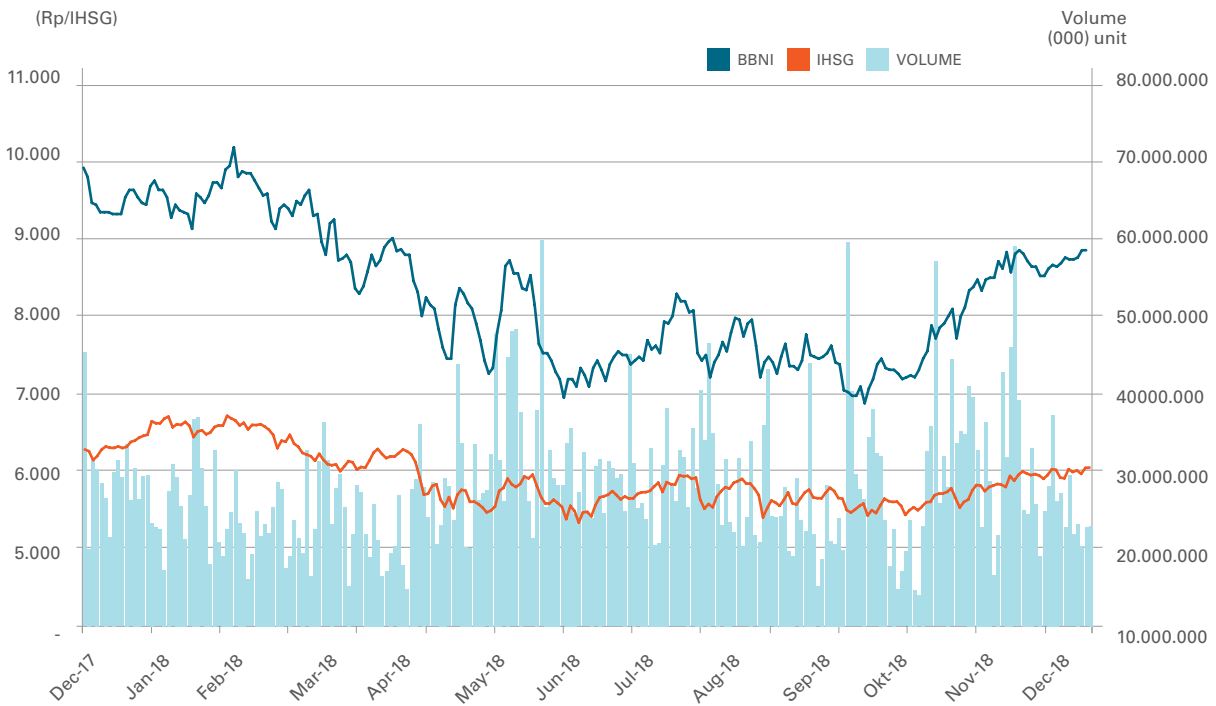




Grafik Harga Saham BBNI Tahun 2017



Grafik Harga Saham BBNI Tahun 2018





Kilas Kinerja 2018



AKSI KORPORASI

Selama 2018, Bank tidak melakukan aksi korporasi.

AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU **PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)**

Sampai dengan Desember 2018, BNI tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

INFORMASI OBLIGASI

Tabel Obligasi BNI

Uraian	Tanggal Terbit	Tanggal Efektif	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
										2018	2017	
Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017	11 Juli 2017	22 Juni 2017	5 tahun	IDR	3.000.000.000.000	100,00	11 Juli 2022	8,00% p.a	Belum Lunas	idAAA (Pefindo)	idAAA (Pefindo)	BRI

Tabel Medium Term Notes (MTN) BNI

Uraian	Tanggal Terbit	Tanggal Efektif	Tenor	Mata Uang	Nilai (juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Diskonto	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
									2018	2017	
<i>Medium Term Notes (MTN)</i>											
MTN Subordinasi I BNI Tahun 2018	10 Agustus 2018	-	60 bulan	Rp	100.000.000	10 Agustus 2023	8,00%	Belum Lunas	idAAA	*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

*Obligasi baru diterbitkan di tahun 2018.

Tabel Realisasi Hasil Penggunaan Dana Hasil Obligasi BNI

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Ekspansi Kredit	Total	Ekspansi Kredit	Total	
Obligasi Berkelanjutan I BNI tahap I tahun 2017	22 Juni 2017	Rp3	Rp0.0074	Rp2.992	Rp2.992	Rp2.992	Rp2.992	Rp2.992	-

INFORMASI SUKUK

Sampai dengan Desember 2018, BNI tidak pernah menerbitkan Sukuk sehingga tidak terdapat informasi mengenai Sukuk.

INFORMASI OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan Desember 2018, BNI tidak pernah melakukan Obligasi Konversi sehingga tidak terdapat informasi mengenai Obligasi Konversi.


INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Tabel Negotiable Certificates of Deposit (NCD) BNI

Uraian	Tanggal Terbit	Tanggal Efektif	Tenor	Mata Uang	Nilai (juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Diskonto	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
									2018	2017	
NCD Tahap I											
NCD Tahap I Seri F	16 Juni 2016	-	36 bulan	Rp	925.000	14 Juni 2019	8,40%	Belum Lunas	-	-	-
NCD Tahap II											
NCD Tahap II Seri D	27 September 2016	-	36 bulan	Rp	815.000	26 September 2019	8,10%	Belum Lunas	-	-	-
NCD Tahap III											
NCD Tahap III Seri C	10 Maret 2017	-	24 bulan	Rp	150.000	28 Februari 2019	8,05%	Belum Lunas	-	-	-
NCD Tahap III Seri D		-	36 bulan	Rp	5.000	24 Februari 2020	8,35%	Belum Lunas	-	-	-

PERISTIWA PENTING DI TAHUN 2018

bni 46 26 Januari 2018



46.000 likes

BNI Yap! Diluncurkan, Sistem Pembayaran Mudah, Aman, dan Kekinian

12 Januari 2018
Jakarta BNI Taplus Siapkan Tim Terbaik untuk Menjadi Juara

21 Januari 2018
Layani Pembayaran Paspor, BNI Jadi Bank Terbanyak Layani Setoran PNBPN Online

31 Januari 2018
Jadi Mitra Tunggal, Bayar Ujian Masuk PTKIN Lebih Mudah Lewat BNI

#bni46 #AnnualReport2018

bni 46 28 Februari 2018



46.000 likes

KERJA SAMA BNI - Kementerian Keuangan, BNI Corporate Card Disiapkan Sebagai Alat Bayar Pemerintah

08 Februari 2018
Peringati Hari Pers Nasional, BNI Ajak 100 Wartawan Berlatih Kewirausahaan

16 Februari 2018
BNI Gandeng 4 Maskapai Gelar *Travel Experience*

#bni46 #AnnualReport2018

bni 46 22 Maret 2018



46.000 likes

BNI dan BNI Life (Entitas Anak) Dukung Penerbitan Kartu Sehat BUMN

01 Maret 2018
BNI Java Jazz Festival 2018

09 Maret 2018
KUR BNI Sentuh 1.700 Petani di Jawa Timur

11 Maret 2018
BNI meluncurkan BNI MoRe di Singapura

29 Maret 2018
BNI Gandeng ITS, Terbitkan Kredit Pendidikan di Surabaya

#bni46 #AnnualReport2018

bni 46 25 April 2018



46.000 likes

#BNITuDigital Meramaikan Inacraft 2018 serta Mengajak 35 Mitra Binaan Pameran


03 April 2018
Jelang Asian Games 2018, BNI Undang Media Peliput Kenali Perbankan Indonesia

06 April 2018
Sergab46 BNI Serap 700 Ton Gabah Petani Jatim di Banyuwangi

26 April 2018
Garuda Indonesia dan BNI Gelar *Online Travel Fair (GOTF)* di Cengkareng

#bni46 #AnnualReport2018

bni 46 09 Mei 2018



46.000 likes

Jelang HUT ke-72 BNI, Nasabah BNI Emerald Dimanjakan oleh Layanan BNI *Helicity Service*

07 Mei 2018
BNI Dukung Transaksi *Online*, Pembayaran Tiket Kapal dan *Top Up* Agen PELNI di Jakarta

17 Mei 2018
BNI Salurkan 6.000 Paket Sembako Murah untuk Keluarga PMI di Pamekasan

25 Mei 2018
BNI dan Angkasa Pura Kargo Perluas Kerja Sama, Ragam Implementasi Transaksi *Cashless* Diperbanyak

#bni46 #AnnualReport2018

bni 46 08 Juni 2018



46.000 likes

BNI Lepas Pemudik Bus di Taman Mini Indonesia Indah

05 Juni 2018
BNI Tawarkan Pembiayaan Perumahan Aparatur Sipil Negara di Jakarta

22 Juni 2018
Pasca Penurunan Tarif, BNI Siap Tampung Pembayaran Pajak UMKM di Surabaya

29 Juni 2018
BNI Lepas Pemudik Kereta di Stasiun Gambir Gandeng BNI, TNI AL Salurkan Gaji Prajurit Secara *Cashless*

#bni46 #AnnualReport2018



Kilas Kinerja 2018



bni 46 08 Juli 2018

♥ 46.000 likes

BNI Rayakan HUT ke-72

17 Juli 2018
BNI Turut Biayai Ruas Tol Pertama di Sulawesi Utara

18 Juli 2018
Dukung Asian Games 2018, BNI Luncurkan Virtual Account Debit Combo Card di Yogyakarta

20 Juli 2018
Dorong Ekspor RI, BNI Salurkan Pinjaman Berdenominasi Yen

#bni46 #AnnualReport2018

bni 46 12 Agustus 2018

♥ 46.000 likes

BNI Menghadiahkan 2.000 Taplus Anak, untuk Memperkuat Literasi Keuangan serta Mengkampanyekan Asian Games 2018

07 Agustus 2018
Dukung IPC, BNI Salurkan Port Service Financing dan IPC Smart Card di Jakarta

14 Agustus 2018
Dimulai di NTT, BNI Pionir Penyaluran KUR untuk Petani Garam di Kupang

15 Agustus 2018
Bangun Fasilitas Air Minum di Lampung, BNI dan IIF Kucurkan Rp550 Miliar di Jakarta

19 Agustus 2018
Dimulainya Asian Games 2018, BNI Berperan Serta Memaksimalkan Layanan

#bni46 #AnnualReport2018

bni 46 10 September 2018

♥ 46.000 likes

Perkuat Layanan di Sektor Logistik, BNI dan Triplogic Bangun Sistem Transaksi Digital

04 September 2018
Program BNI Traktir Anak Milenial, salah satu wujud untuk memperkuat literasi keuangan di Kalangan Milenial

18 September 2018
BNI Pertahankan Keunggulan Layanan Trade Finance, BNI Syariah Jadi Bank Syariah Terbaik

24 September 2018
BI, BNI, dan BRI Gandeng 50 Top Eksporier Melalui Program Lindung Nilai di Jakarta

#bni46 #AnnualReport2018

bni 46 14 Oktober 2018

♥ 46.000 likes

Berperan untuk Ekonomi Dunia yang Lebih Baik, BNI Luncurkan Kartu GPN (Gerbang Pembayaran Nasional)

03 Oktober 2018
Ramaikan IBDEXpo 2018, BNI Usung Digital Ecoservices

12 Oktober 2018
BNI ITB Ultra Marathon, Menpora Lepas Pelari dari Lobi Kantor BNI, Kampanyekan Literasi Keuangan Sambil Olahraga

25 Oktober 2018
Dengan Mewujudkan Belanja Cashless dan Cardless di Supermarket, Produk BNI Yap!! Hadir di Ranch Market

#bni46 #AnnualReport2018

bni 46 13 November 2018

♥ 46.000 likes

BNI Rintis Aku Saudagar Muda Cetak Siswa SMK Berjiwa Bisnis di Tegal

07 November 2018
BNI Dukung Program Cashless di SPBU Pertamina, Beragam Promo Siap Manjakan Customer di Jakarta

07 November 2018
Dukung Perdagangan dan Investasi AS di Indonesia, Trade Finance BNI Cabang New York Tumbuh 25%

#bni46 #AnnualReport2018

bni 46 13 Desember 2018

♥ 46.000 likes

Saksansin Memperoleh Gelar BNI Indonesian Masters di Jakarta

03 Desember 2018
Mensos Sebut BNI Bank Ramah Penyandang Disabilitas

21 Desember 2018
Lampau Target FLPP 2018, BNI Akan Salurkan KPR Subsidi untuk 10 Ribu Rumah Tahun 2019 di Jakarta

22 Desember 2018
Kini BUMDes Bisa Buka BUMN Shop, Harga Pasti & Pasokan Terjamin

#bni46 #AnnualReport2018



Laporan Manajemen

37 LAPORAN DEWAN KOMISARIS
46 LAPORAN DIREKSI
56 LEMBAR PENGESAHAN





Revisond Baswir
(Komisaris Independen)

Joni Swastanto
(Komisaris)

Pataniari Siahaan
(Komisaris Independen)

Ari Kuncoro
(Komisaris Utama/Komisaris
Independen)

Wahyu Kuncoro
(Wakil Komisaris Utama)



Bistok Simbolon
(Komisaris)

Sigit Widyawan
(Komisaris Independen)

Ahmad Fikri Assegaf
(Komisaris Independen)

Marwanto Harjowiryono
(Komisaris)



Di tengah desakan dari eksternal, situasi ekonomi Indonesia tidak mengalami perubahan secara signifikan di tahun 2018. Dewan Komisaris menilai bahwa semangat Direksi BNI beserta jajarannya untuk terus tumbuh di tengah tantangan perekonomian sangat tinggi sehingga mampu terus bertahan dalam persaingan usaha perbankan yang kian kompetitif.

Ari Kuncoro
Komisaris Utama/Komisaris Independen



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2018, BNI berhasil mempertahankan pertumbuhannya pada sektor yang prospektif, hal ini tercermin dari meningkatnya **total aset** sebesar **Rp99,2 triliun**. **Pinjaman** yang diberikan BNI **tumbuh** sebesar **16,2%**, lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 12,2%. Selama tahun 2018, **simpanan nasabah** naik **Rp62,7 triliun** atau **12,1%** menjadi **Rp578,8 triliun** dari posisi 2017 yang tercatat sebesar Rp516,1 triliun.

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati,

Melalui laporan ini, kami sampaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris selama tahun buku 2018. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mendasarkan pada Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan, sehingga jalannya Perseroan bisa efektif sesuai dengan harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Selama Tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Bank yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang telah ditetapkan di awal tahun.

Beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris disajikan sebagai berikut:



PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), telah ditetapkan strategi-strategi kunci yang dituangkan dalam *Corporate Plan* BNI. Hal tersebut telah menjadi salah satu fokus utama dari pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank tahun 2018, antara lain evaluasi terhadap *Corporate Plan* BNI dan RBB serta kinerja keuangan tahun 2018 setiap bulan. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap upaya pencapaian RBB, khususnya terhadap pencapaian beberapa aspek penting rencana bisnis seperti penyaluran kredit, perbaikan kualitas aset, penghimpunan dana pihak ketiga, produktivitas dan efisiensi.

Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester serta menyampaikan laporan pengawasan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal diperlukan revisi, Dewan Komisaris melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan revisi RBB yang terkait. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan RBB tahun berikutnya, yaitu RBB tahun 2019-2021 dan *Corporate Plan* BNI 2019-2023.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Melalui Rapat Dewan Komisaris
Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara internal Dewan Komisaris, atau dengan mengundang Direktur Sektor atau Senior *Executive Vice President* yang terkait dengan agenda rapat, serta rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara rutin.
2. Peran aktif Komite-komite di bawah Dewan komisaris dalam membantu dan mendukung kelancaran tugas Dewan Komisaris antara lain melalui pelaksanaan rapat-rapat Komite serta evaluasi, kajian atau penelaahan terhadap hal-hal yang menjadi tugas Dewan Komisaris.
3. Pemberian arahan dan pendapat Dewan Komisaris secara tertulis kepada Direksi sebagai tanggapan terhadap laporan pelaksanaan tugas Direksi, permohonan persetujuan atau konsultasi yang disampaikan oleh Direksi serta terhadap informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang bersifat strategis dan signifikan.
4. Pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke lingkungan unit kerja BNI serta pemberian arahan dan pendapat Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan hasil kunjungan kerja Dewan Komisaris dimaksud.

Selama tahun 2018, telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris yang dilakukan secara internal Dewan Komisaris, atau dengan mengundang Direktur Sektor atau Senior *Executive Vice President* yang terkait sebanyak 41 (empat puluh satu) kali. Sedangkan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali. Seluruh rapat telah dilaksanakan dengan efektif, dengan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi yang tinggi.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian kinerja Direksi yang telah mampu menjalankan kepengurusan Bank dengan sangat baik sehingga kinerja Bank di 2018 telah melampaui yang telah ditargetkan. Beberapa hal yang dipertimbangkan oleh Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi disajikan sebagai berikut.

KONDISI PEREKONOMIAN DAN KINERJA PERSEROAN

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 mencapai kisaran 5,17%. Tingkat inflasi per November 2018 sebesar 3,23% (yoy), sesuai yang ditargetkan Bank Indonesia yaitu sebesar 3,5% ± 1%. Struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama, yaitu pertanian, kehutanan/ perikanan, dan perdagangan. Sampai dengan triwulan II 2018, industri pengolahan memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 0,91%, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 0,69%, dan konstruksi sebesar 0,57%.

Semakin tertekannya rupiah terhadap dolar Amerika di pertengahan 2018 yang masih terus berlanjut sampai dengan akhir tahun menyebabkan berpindahannya modal asing dari sistem keuangan Indonesia, dengan defisit neraca transaksi terus bergulir yang ditandai oleh defisit neraca ekspor impor yang mendominasi perekonomian Indonesia sepanjang 2018. Kondisi ini tidak lepas dari faktor eksternal seperti *Fed Fund Rate* (FFR) dan perang dagang Amerika dan China.

Di tengah desakan dari eksternal, situasi ekonomi Indonesia tidak mengalami perubahan secara signifikan di tahun 2018. Dewan Komisaris menilai bahwa semangat Direksi BNI beserta jajarannya untuk terus tumbuh di tengah tantangan perekonomian sangat tinggi sehingga mampu terus bertahan dalam persaingan usaha perbankan yang kian kompetitif. Hal ini terus dijaga oleh BNI sepanjang tahun 2018 dalam mempertimbangkan pertumbuhan bisnis, antara lain dengan lebih selektif pada pemilihan sektor industri yang tepat. Dewan Komisaris juga menilai bahwa Direksi telah mampu menghadapi era *disruptive economy* yang sudah dimulai di tahun 2017 dan beradaptasi dengan baik khususnya dari sisi teknologi dan inovasi layanan.



Pada tahun 2018, BNI berhasil mempertahankan pertumbuhan asetnya pada sektor yang prospektif, hal ini tercermin dari meningkatnya total aset sebesar Rp99,2 triliun. Dengan komposisi pinjaman yang diberikan sebagai bisnis utama bank berkontribusi 63,4% dari total aset di tahun 2018. Pinjaman yang diberikan BNI tumbuh sebesar 16,2%, lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 12,2%. Peningkatan pertumbuhan tersebut dikarenakan BNI secara agresif melakukan ekspansi kredit dengan tetap selektif khususnya terhadap kualitas aset dan memperhatikan prinsip *prudential banking*. Pertumbuhan terutama terdapat pada kredit kepada BUMN yang tumbuh sebesar 31,6% serta kredit korporasi swasta yang tumbuh 12,9%, dengan kontribusi terbesar pada sektor industri manufaktur, perdagangan restoran dan hotel, serta jasa dunia usaha. *Absolute NPL* (Bank saja) tercatat mengalami penurunan dari Rp9,4 triliun di tahun 2017 menjadi Rp9,2 triliun di tahun 2018 atau turun sebesar 2,4%. Hal ini menunjukkan komitmen BNI untuk tetap menjaga kualitas pinjaman yang diberikan di tengah ekspansi yang agresif.

Dari sisi Dana Pihak Ketiga, BNI mampu menunjukkan pertumbuhan simpanan nasabah yang sangat baik selama 2018. Layanan transaksional perbankan yang berbasis *digital* menjadi pendorong utama pertumbuhan DPK. Di samping itu, dalam menghimpun dana murah BNI terus meningkatkan kemitraan dengan nasabah institusi atau kelembagaan, baik swasta, BUMN, maupun pemerintahan.

Selama tahun 2018, simpanan nasabah naik Rp62,7 triliun atau 12,1% menjadi Rp578,8 triliun dari posisi 2017 yang tercatat sebesar Rp516,1 triliun. Produk giro mencatatkan pertumbuhan 18,2% atau Rp26,1 triliun dari posisi 2017 sebesar Rp143,2 triliun menjadi Rp169,3 triliun di 2018. Produk tabungan juga mencatatkan pertumbuhan agresif sebesar Rp23,8 triliun dari posisi Rp182,3 triliun di 2017 menjadi Rp206,1 triliun. Di sisi lain, produk deposito mampu tumbuh 6,7% atau Rp12,8 triliun selama 2018 menjadi Rp203,4 triliun. Pertumbuhan deposito yang tidak seagresif pertumbuhan produk giro dan tabungan merupakan implementasi strategi BNI yang fokus pada pendanaan yang bersumber dari CASA.

Kinerja operasional yang sangat baik, telah mampu menghasilkan pertumbuhan laba bersih mencapai 10,3% dibandingkan dengan tahun 2017. Hal tersebut dipicu oleh meningkatnya komposisi pendapatan seperti pendapatan bunga dan syariah yang merupakan motor penggerak utama kegiatan operasional perbankan.

TINGKAT KESEHATAN BANK

Salah satu hal penting yang mendapat perhatian Dewan Komisaris adalah Tingkat Kesehatan Bank yang merupakan hasil penilaian kondisi Bank berdasarkan risiko (*risk based rating*) dan kinerja Bank. Tingkat Kesehatan Bank (TKB) merupakan sarana bagi BNI untuk melakukan identifikasi dini permasalahan, menyusun dan melaksanakan *corrective action*, dan menetapkan strategi bisnis di waktu yang akan datang.

Penilaian Tingkat Kesehatan BNI dilakukan berdasarkan 4 (empat) faktor sebagai berikut:

1. **Profil Risiko (*Risk Profile*)**
Penilaian Profil Risiko dilakukan dengan menilai Risiko Inheren (risiko yang melekat pada aktivitas BNI) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terhadap 8 (delapan) jenis risiko.
2. **Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)**
Penilaian Tata Kelola Perusahaan merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen BNI atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
3. **Rentabilitas (*Earnings*)**
Penilaian atas faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas.
4. **Permodalan (*Capital*)**
Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, BNI mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risikonya.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dilaporkan kepada regulator (OJK) setiap 6 (enam) bulan (semesteran) pada periode Juni dan Desember. Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank BNI periode 31 Desember 2018 berada pada peringkat "**Sehat**" yang berarti bahwa:

1. Kondisi Bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Peringkat faktor-faktor penilaian (Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan) secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Profil risiko BNI, sebagai salah satu faktor penilaian TKB periode 31 Desember 2018 berada pada peringkat 2 (*low to moderate*). Sebagai dampak dari profil risiko BNI yang berada pada tingkat *low to moderate* dan sesuai perhitungan menggunakan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), maka CAR minimum sesuai profil risiko sebesar 9,9%. Jika ditambah dengan modal penyangga (*buffer*) yaitu *Conservation Buffer* 1,875%, *Countercyclical Buffer* 0% dan *Capital Surcharge* 1,125%, maka batas rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah 12,9%. Pada tahun 2018, KPMM BNI sebesar 18,5% telah melebihi batas minimum yang ditentukan.



PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERSEROAN YANG DISUSUN DIREKSI

Kelangsungan usaha dalam jangka panjang merupakan tujuan yang harus senantiasa dianalisis dengan baik oleh Direksi. Kemampuan Direksi dalam memprediksi prospek usaha di masa depan merupakan hal penting yang menjadi perhatian Dewan Komisaris. Berdasarkan kondisi eksternal dan internal, Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha yang telah disusun Direksi sudah tepat, sesuai dengan asumsi-asumsi yang realistis.

Meskipun kondisi perekonomian global masih belum bisa terlepas dari kondisi sulit, Pemerintah Indonesia terus berfokus mendorong terjaganya daya beli masyarakat dengan berbagai program subsidi, baik subsidi energi maupun non-energi. Upaya-upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Hal tersebut merupakan peluang bagi BNI untuk mengembangkan bisnisnya yang didukung dengan kapabilitas inti. Kemampuan BNI untuk mengerahkan dan mengalokasikan sumber daya serta mempertahankan dan mengembangkan kapabilitas inti yang dimiliki menjadi faktor penting dalam mengantisipasi dan mengambil peluang bisnis dari kondisi eksternal yang ada.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa BNI akan tetap mampu melakukan yang terbaik. Dewan Komisaris optimis bahwa Direksi akan selalu dapat mencapai target kinerjanya. Kemampuan adaptasi BNI terlihat bahwa BNI mampu tumbuh lebih tinggi dari pada industri dalam tiga tahun terakhir.



Dewan Komisaris optimis bahwa Direksi akan selalu dapat mencapai target kinerjanya. Kemampuan adaptasi BNI terlihat bahwa BNI mampu tumbuh lebih tinggi dari pada industri dalam tiga tahun terakhir.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Kinerja Bank tidak dapat dipisahkan dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Efektivitas penerapan GCG merupakan syarat dicapainya kinerja Bank yang unggul. Oleh karena itu, Dewan Komisaris sangat menitik beratkan pengawasannya pada penerapan GCG Bank. Secara umum, penerapan GCG Bank sudah berjalan dengan baik. Hasil asesmen GCG yang dilakukan oleh pihak independen yaitu Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) di 2018 menunjukkan bahwa BNI telah menerapkan GCG dengan sangat baik yang ditunjukkan dengan nilai skor *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS) sebesar 91,58.

Beberapa komponen kunci penerapan GCG yang mendapat perhatian utama dari Dewan Komisaris meliputi sistem manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system*.

MANAJEMEN RISIKO

Sebagai bagian dari penerapan GCG, manajemen risiko BNI telah berjalan dengan efektif dan terintegrasi, yang mampu mendukung pencapaian dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan. Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko antara lain melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko BNI termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
2. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko BNI.
4. Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko BNI secara keseluruhan.



Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris (Radikom), maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Audit.

Agar implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif, maka pelaksanaannya didasarkan pada Tata Kelola Risiko yang telah ditetapkan. Tata Kelola Risiko mengatur dengan jelas peran dan tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, keterkaitan antar fungsi-fungsi pengelolaan Risiko, serta penetapan kebijakan yang memastikan bahwa Risiko dikelola dengan baik.

BNI telah memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai kebijakan yang menjadi acuan dasar yang bersifat strategis dan komprehensif dalam penerapan Manajemen Risiko. Prosedur Manajemen Risiko merupakan tata cara yang menjadi panduan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko. Sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko, BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan terhadap masing-masing Risiko.

Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan BNI memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing Lembaga Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Pakta Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama segenap Lembaga Jasa Keuangan Anggota Konglomerasi Keuangan BNI.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa pelaksanaan manajemen risiko Bank maupun manajemen risiko terintegrasi sudah berjalan dengan baik. Bank telah memiliki kecukupan kebijakan, risiko dan limit risiko yang secara berkala di-*review* dengan mendapat persetujuan Direksi. BNI juga telah memiliki kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, khususnya terkait hasil *review* dari Satuan Kerja Audit Internal yang berfungsi sebagai *third line of defense*.

Sistem Pengendalian Internal BNI telah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum, dan telah sejalan dengan kerangka COSO dan *Basel Committee – Internal Control*, dengan mencakup 5 (lima) elemen utama yang saling berkaitan dalam sistem pengendalian internal Bank, yaitu:

1. Pengawasan manajemen dan budaya pengendalian
2. Identifikasi dan penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Mekanisme kunci dari Program Anti Korupsi yang dimiliki oleh Bank adalah mekanisme *whistleblowing system* (WBS). Implementasi WBS yang dinamakan "*WBS to CEO*" merupakan salah satu mekanisme deteksi dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran di BNI yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak *image* BNI. WBS merupakan bentuk partisipasi aktif Insan BNI untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI. Pengelolaan WBS telah dilakukan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu Deloitte. Dengan demikian, tujuan WBS untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas menjadi lebih efektif.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa pengelolaan WBS yang dilaksanakan oleh pihak eksternal akan dapat meningkatkan partisipasi Insan BNI untuk melaporkan pelanggaran karena merasa lebih bebas dalam menyampaikan tanpa ada ketakutan akan tindakan balik dari terlapor, khususnya jika yang dilaporkan adalah atasannya. Dengan demikian, pengelolaan WBS menjadi lebih independen. Selama tahun 2018, laporan tindak pelanggaran yang diterima melalui WBS adalah sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) laporan. Laporan tindak pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses investigasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan SPI terhadap pelaporan WBS, terdapat 21 (dua puluh satu) laporan yang dinyatakan terbukti dan telah diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan BNI.

Secara umum, Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan WBS telah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris memberikan arahan agar sosialisasi dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dalam melaporkan tindak pelanggaran melalui WBS sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.



PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada periode 2018, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris BNI mengalami 2 (dua) kali perubahan sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

PERIODE 1 JANUARI 2018 – 20 MARET 2018

Periode 1 Januari 2018 – 20 Maret 2018, Dewan Komisaris berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris.

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Efektif
Ari Kuncoro	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Jakarta	2 November 2017	14 Maret 2018
Wahyu Kuncoro	Komisaris Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	Jakarta	10 Maret 2016 16 Maret 2017	25 Januari 2017 29 Mei 2017
Revisond Baswir	Komisaris Komisaris Independen	Jogjakarta	17 Maret 2015 10 Maret 2016	24 Juni 2015 25 Januari 2017
Pataniari Siahaan	Komisaris Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015 10 Maret 2016	25 Juni 2016 25 Januari 2017
Bistok Simbolon	Komisaris	Jakarta	12 Januari 2016	10 Mei 2016
Joni Swastanto	Komisaris	Jakarta	10 Maret 2016	20 April 2016
Marwanto Harjowiryono	Komisaris	Jakarta	16 Maret 2017	19 Juli 2017
Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen	Jakarta	16 Maret 2017	19 Juli 2017

PERIODE 20 MARET 2018 – 31 DESEMBER 2018

Periode 20 Maret 2018 – 31 Desember 2018, Dewan Komisaris berjumlah 9 (sembilan) terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris.

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Efektif
Ari Kuncoro	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Jakarta	2 November 2017	14 Maret 2018
Wahyu Kuncoro	Komisaris Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	Jakarta	10 Maret 2016 16 Maret 2017	25 Januari 2017 29 Mei 2017
Revisond Baswir	Komisaris Komisaris Independen	Jogjakarta	17 Maret 2015 10 Maret 2016	24 Juni 2015 25 Januari 2017
Pataniari Siahaan	Komisaris Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015 10 Maret 2016	25 Juni 2016 25 Januari 2017
Bistok Simbolon	Komisaris	Jakarta	12 Januari 2016	10 Mei 2016
Joni Swastanto	Komisaris	Jakarta	10 Maret 2016	20 April 2016
Marwanto Harjowiryono	Komisaris	Jakarta	16 Maret 2017	19 Juli 2017
Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen	Jakarta	16 Maret 2017	19 Juli 2017
Sigit Widyawan	Komisaris Independen	Jakarta	20 Maret 2018	7 September 2018

Perubahan komposisi Dewan Komisaris dilakukan atas dasar kebutuhan usaha Bank, berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.



PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite – komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Penilaian Kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris tersebut tercermin dari telah dilaksanakannya seluruh program/rencana kerja komite-komite yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan baik. Pelaksanaan Program/Rencana kerja komite-komite tersebut dilakukan melalui mekanisme:

1. Pelaksanaan Rapat komite termasuk dengan mengundang Direktur Sektor atau divisi-divisi/satuan kerja terkait.
2. Penelaahan/evaluasi/review komite di luar forum rapat yang hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan realisasi penyelesaian seluruh program/rencana kerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang ditetapkan pada awal tahun dapat dilihat bahwa frekuensi dan tingkat kehadiran rapat dan laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi menunjukkan bahwa tiap-tiap komite telah menjalankan tugasnya dengan baik.

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris atas jalannya kepengurusan BNI selama tahun 2018. Kepada seluruh jajaran Direksi dan manajemen BNI, Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian yang memuaskan di tahun 2018. Semoga di masa yang akan datang, BNI dapat terus memberikan kontribusinya bagi bangsa Indonesia melalui perannya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Jakarta, April 2019
Atas Nama Dewan Komisaris

Ari Kuncoro
Komisaris Utama



Anggoro Eko Cahyo
(Direktur Keuangan)

Endang Hidayatullah
(Direktur Kepatuhan)

Tambok P. Setyawati
(Direktur Retail Banking)

Dadang Setiabudi
(Direktur Teknologi Informasi dan Operasi)

Herry Sidharta
(Wakil Direktur Utama)



Adi Sulistyowati
(Direktur Hubungan Kelembagaan)

Bob Tyasika Ananta
(Direktur Manajemen Risiko)

Rico Rizal Budidarmo
(Direktur *Treasury* dan *International Banking*)

Achmad Baiquni
(Direktur Utama)

Putrama Wahyu Setyawan
(Direktur Bisnis Korporasi)

Catur Budi Harto
(Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan)

LAPORAN DIREKSI

Dibandingkan dengan industri perbankan dan *peers group*, BNI tumbuh lebih agresif baik dari segi aset dan pendanaan. **Pinjaman** yang diberikan BNI **tumbuh 15,3%** per September 2018, sedangkan **simpanan nasabah** BNI **tumbuh 13,7%** lebih tinggi dibandingkan industri dan juga *peers group* per periode September 2018. Dengan pertumbuhan pinjaman yang diberikan dan simpanan nasabah tersebut, maka pada periode yang sama, **aset BNI** dapat **tumbuh** sebesar **14,3%**, lebih tinggi dibandingkan industri dan *peers group*.

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Pada laporan ini, perkenankanlah kami menyampaikan hasil kepengurusan BNI selama 2018 yang telah dilakukan oleh Direksi. Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada tahun yang penuh tantangan ini, Direksi beserta jajaran manajemen dan seluruh karyawan telah mampu menghasilkan kinerja sesuai dengan yang diharapkan, melampaui yang telah ditargetkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Dalam laporan ini, akan kami sampaikan analisis kinerja Bank serta prospek usaha BNI ke depan. Laporan ini juga akan menyampaikan perkembangan penerapan tata kelola perusahaan dan informasi perubahan komposisi Direksi di tahun 2018.



10,3%

Peningkatan kinerja BNI telah berhasil mendorong pertumbuhan laba bersih mencapai 10,3% dibandingkan dengan tahun 2017 yang dipicu oleh meningkatnya komposisi pendapatan seperti pendapatan bunga dan syariah yang merupakan motor penggerak utama kegiatan operasional perbankan.



Achmad Baiquni
Direktur Utama

ANALISIS ATAS KINERJA PERSEROAN

Pencapaian kinerja BNI di 2018 sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Pemilihan strategi yang tepat sangat diperlukan dalam menghadapi kondisi perekonomian yang masih penuh dengan tantangan. Pada bagian ini, akan kami sampaikan analisis perekonomian makro dan industri perbankan serta kebijakan strategis yang telah diterapkan dan dilanjutkan dengan kinerja Bank yang dihasilkan.

ANALISIS EKONOMI DAN INDUSTRI PERBANKAN

Dalam perekonomian global, kondisi yang terjadi di Amerika Serikat tetap menjadi perhatian utama. Selama tahun 2018, kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed) menyita perhatian dunia. The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar 25 bps sehingga *Fed Fund Rate* (FFR) di akhir 2018 berada di level 2,50%. Kenaikan tersebut dilakukan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2018 setelah mempertimbangkan kenaikan inflasi AS yang telah melewati batas nyaman 2% serta angka pengangguran hingga akhir tahun 2018 berada pada level 3,9%.

Dari kawasan Eropa, perekonomian Eurozone (EZ) yang kian membaik ditandai dengan membaiknya inflasi mendorong bank sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) untuk menurunkan stimulus pembelian surat berharga. Sedangkan perekonomian China berkontraksi di tahun 2018. Setelah tumbuh moderat 6,8% (YoY) pada triwulan I – 2018, ekonomi China melambat menjadi 6,7% (YoY) di triwulan II – 2018 kemudian turun menjadi 6,5% (YoY) pada triwulan III – 2018 dan tercatat 6,4% (YoY) atau lebih rendah lagi pada triwulan IV 2018. Perang tarif dengan AS menyebabkan kinerja ekspor China tertekan, karena AS merupakan pasar tujuan ekspor utama China. Dari Jepang, kebijakan *negative interest rate* belum secara konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang. Setelah sempat berkontraksi 1,2% (YoY) di triwulan I – 2018, perekonomian Jepang tumbuh 1,4% (YoY) di triwulan II – 2018 tetapi kembali turun hingga 0,0% (YoY) di triwulan III – 2018. Inflasi Jepang memang terus membaik meninggalkan era deflasi yang terjadi pada tahun 2016 dan era *low inflation* di tahun 2017. Pada tahun 2018 inflasi Jepang lebih mendekati 2%. Inflasi Jepang tercatat tertinggi pada bulan Februari 2018 pada level 1,5%. Peningkatan inflasi secara umum disebabkan kenaikan harga pangan dan energi, sementara inflasi inti masih tergolong rendah. Kondisi inilah yang nampaknya mendorong Bank of Japan (BOJ) sebagai bank sentral Jepang untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan di level -0,10%.

Di tengah kondisi perekonomian dunia yang belum stabil, di tahun 2018, ekonomi Indonesia tumbuh moderat dan mencapai 5,17% (YoY) pada triwulan III – 2018. Sebelumnya, pada triwulan I – 2018 ekonomi mampu tumbuh 5,06% (YoY) dan kemudian naik menjadi 5,27% (YoY) di triwulan II – 2018. Inflasi Indonesia sepanjang tahun 2018 berada pada level 3,13%, yaitu pada kisaran target BI sebesar $3,5 \pm 1\%$ di tahun 2018. Terkendalnya inflasi dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti serta inflasi *volatile food* yang cenderung rendah dan inflasi *administered price* yang relatif terjaga. Keberhasilan BI menjaga inflasi tidak terlepas dari fungsi koordinasi bersama dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu persoalan serius di tahun 2018 adalah permasalahan defisit transaksi berjalan atau *Current Account Deficit* (CAD). Rasio CAD terhadap PDB Indonesia cenderung terus meningkat selama tahun 2018. Pada triwulan I – 2018, CAD mencapai 2,17% dari PDB kemudian meningkat menjadi 3,02% pada triwulan II – 2018 hingga melebar menjadi 3,37% dari PDB pada triwulan III – 2018. Pengelolaan CAD menjadi fokus Pemerintah karena CAD dapat berdampak negatif terhadap nilai tukar rupiah.

Dampak negatif CAD mendorong BI bersikap *pre-emptive* dan *ahead the curve* terhadap suku bunga acuan, dalam hal ini adalah BI *7 days Repo Rate* yang telah mengalami kenaikan sebesar 175bps (*basis points*) di tahun 2018. Faktor yang menjadi pertimbangan BI selain melebarnya CAD adalah defisit neraca perdagangan. Secara kumulatif, defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai US\$8,57 miliar, jauh lebih rendah daripada perdagangan pada tahun 2017 yang surplus senilai US\$11,84 miliar. Nilai ekspor Indonesia secara kumulatif sepanjang tahun 2018 mencapai US\$180,06 miliar atau tumbuh 6,65% sedangkan nilai impor mencapai US\$188,63 miliar dengan pertumbuhan 20,15%.

Sampai dengan September 2018, kredit atau pinjaman perbankan tumbuh sebesar 12,7% (YoY) lebih tinggi dari Desember 2017 yang sebesar 8,2%. Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga perbankan per September 2018 tumbuh sebesar 6,6% lebih rendah dari Desember 2017 yang sebesar 9,4%. Perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga tersebut berdampak pada pertumbuhan aset perbankan per September 2018 yang sebesar 8,6% atau lebih rendah dari Desember 2017 yang sebesar 9,8%.



Apabila dibandingkan dengan industri perbankan dan *peers group*, BNI tumbuh lebih agresif baik dari segi aset dan pendanaan. Pinjaman yang diberikan BNI tumbuh 15,3% per September 2018, sedangkan simpanan nasabah BNI tumbuh 13,7% lebih tinggi dibandingkan industri dan juga *peers group* per periode September 2018. Dengan pertumbuhan pinjaman yang diberikan dan simpanan nasabah tersebut, maka pada periode yang sama, aset BNI dapat tumbuh sebesar 14,3%, lebih tinggi dibandingkan industri dan *peers group*.

KEBIJAKAN STRATEGIS

BNI senantiasa berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal tersebut dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan institusi lain yang berasal dari negara, pemerintah, individu, masyarakat, sesama perusahaan keuangan, maupun badan partikelir lainnya. BNI berusaha menegaskan eksistensinya dengan berusaha untuk menjadi salah satu pemain utama di sektor keuangan khususnya perbankan melalui layanan keuangan yang menyeluruh kepada semua nasabah perbankan dan nilai tambah bermanfaat bagi seluruh *stakeholder* yaitu nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri keuangan. Oleh karena itu, BNI telah menyusun Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Pendek yang disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal terkini. Selama tahun 2018, BNI telah berhasil menjalankan rencana-rencananya dengan 4 (empat) fokus tema utama yaitu *Selective, Digitalize, Market Penetration, dan Organization Capabilities*.

Strategi tahun 2018 tersebut secara umum dapat terlaksana dengan baik. Pertumbuhan kredit BNI yang tumbuh di atas pertumbuhan rata-rata industri didorong oleh pertumbuhan kredit

segmen korporasi yang fokus pada infrastruktur dan sektor pengolahan. Pada segmen menengah, peningkatan kredit didukung oleh optimalisasi *value chain* nasabah Korporasi dan *take over customer* pada industri selektif sesuai potensi daerah. Ekspansi kredit pada segmen kecil didukung oleh pengoptimalan *value chain* dan *supply chain financing* dan memaksimalkan peran program pemerintah (KUR) sebagai basis pertumbuhan. Selain itu, untuk mendukung pencapaian kredit segmen kecil terdapat penambahan *channel* yaitu Agen46 dan penyaluran kredit berbasis *digital* untuk mempermudah pengajuan kredit. Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sehingga *Non-Performing Loan* (NPL) dapat terjaga dan mengalami penurunan serta menghasilkan imbal hasil yang relatif tinggi.

Peningkatan terhadap bisnis konsumer dilakukan dengan cara penjualan BNI Griya, BNI Fleksi, Kartu Kredit dan kredit lainnya dengan menggarap potensi *millennial* melalui pengembangan *digital*. Untuk menumbuhkan bisnis *digital* dan menggarap potensi *millennial*, BNI telah meluncurkan *mobile payment* berbasis QR yaitu Yap!, *chat banking* Cinta, dan aplikasi BNI Call (1500046 *Virtual Assistant*). Untuk memberikan *user experience* yang lebih bagi nasabah, BNI membuka 8 (delapan) *digital branch*.

Strategi untuk peningkatan DPK yang fokus pada *closedloop transaction* adalah memastikan seluruh transaksi nasabah berada di BNI. Pengembangan *closedloop transaction* pada nasabah Korporasi dan Komersial beserta *supply chain*-nya dilakukan melalui utilisasi solusi produk dan *service* salah satunya peningkatan transaksi *cash management*. Selain itu, untuk meningkatkan transaksi nasabah melalui *e-commerce*, telah dilakukan beberapa pengembangan fitur dan *strategic partnership*.



Pendapatan bunga dan pendapatan syariah mengalami peningkatan dari Rp31,9 triliun di tahun 2017 menjadi Rp35,4 triliun di tahun 2018 atau sebesar 11,0%, dengan peningkatan terbesar pada pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan sebesar Rp3,9 triliun.



PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERSEROAN

Pemilihan strategi yang tepat telah menghasilkan kinerja yang memuaskan di tahun 2018.

Pada tahun 2018, BNI berhasil mempertahankan pertumbuhan asetnya pada sektor yang prospektif, hal ini tercermin dari meningkatnya total aset sebesar Rp99,2 triliun. Dengan komposisi pinjaman yang diberikan sebagai bisnis utama bank berkontribusi 63,4% dari total aset di tahun 2018. Pinjaman yang diberikan BNI tumbuh sebesar 16,2%, lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 12,2%. Peningkatan pertumbuhan tersebut dikarenakan BNI secara agresif melakukan ekspansi kredit dengan tetap selektif khususnya terhadap kualitas aset dan memperhatikan prinsip *prudential banking*. Pertumbuhan terutama terdapat pada kredit kepada BUMN yang tumbuh sebesar 31,6% serta kredit korporasi swasta yang tumbuh 12,9%, dengan kontribusi terbesar pada sektor industri manufaktur, perdagangan restoran dan hotel, serta jasa dunia usaha.

BNI sebagai salah satu bank BUMN kembali berperan penting guna memperkuat strategi pemerintah yang kemudian berdampak pada meningkatnya pinjaman yang diberikan kepada BUMN sebesar 31,6% serta pinjaman yang diberikan kepada korporasi swasta yang tumbuh 12,9%, peningkatan tersebut dikontribusi oleh sektor industri manufaktur, perdagangan restoran dan hotel, jasa dunia usaha dan konstruksi. Peningkatan ini kemudian berdampak pada meningkatnya komposisi pinjaman yang diberikan sebagai bisnis utama bank dari 62,2% di tahun 2017 menjadi 63,4% di tahun 2018.

Rasio NPL bruto tercatat sebesar 1,9% di 2018 membaik dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,3%. NPL neto tercatat 0,8% di tahun 2018, sementara pada tahun 2017 sebesar 0,7%. Kondisi ini merupakan dampak dari implementasi strategi BNI dengan ekspansi selektif pada sektor-sektor yang memiliki risiko rendah dan merupakan pemain utama pada *region* tersebut. Di samping itu BNI juga melakukan restrukturisasi dan remedial untuk debitur-debitur bermasalah yang masih memiliki potensi perbaikan secara keuangan dan operasional.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi makro ekonomi yang masih fluktuatif, BNI melakukan mitigasi risiko atas pinjaman yang diberikan dengan membentuk pencadangan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercermin dari *coverage ratio* 152,9% pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 148,0%.

Absolute NPL (Bank saja) tercatat mengalami penurunan dari Rp9,4 triliun di tahun 2017 menjadi Rp9,2 triliun di tahun 2018 atau turun sebesar 2,4%. Hal ini menunjukkan komitmen BNI untuk tetap menjaga kualitas pinjaman yang diberikan di tengah ekspansi yang agresif.

Likuiditas menjadi salah satu isu dalam industri perbankan selama tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit industri perbankan yang lebih tinggi dari pertumbuhan simpanan nasabah serta *Loan to Deposit Ratio* (LDR) industri yang berada di atas 90%. Di tengah ketatnya likuiditas perbankan, BNI mampu menunjukkan pertumbuhan simpanan nasabah yang menggembirakan selama 2018. Layanan transaksional perbankan yang berbasis *digital* menjadi senjata utama BNI dalam mendorong pertumbuhan ini. Di samping itu, dalam menghimpun dana murah BNI terus meningkatkan kemitraan dengan nasabah institusi atau kelembagaan, baik swasta, BUMN, maupun pemerintahan.

Selama tahun 2018, simpanan nasabah naik Rp62,7 triliun atau 12,1% menjadi Rp578,8 triliun dari posisi 2017 yang tercatat sebesar Rp516,1 triliun. Produk giro mencatatkan pertumbuhan 18,2% atau Rp26,1 triliun dari posisi 2017 sebesar Rp143,2 triliun menjadi Rp169,3 triliun di 2018. Produk tabungan juga mencatatkan pertumbuhan agresif sebesar Rp23,8 triliun dari posisi Rp182,3 triliun di 2017 menjadi Rp206,1 triliun. Di sisi lain, produk deposito mampu tumbuh 6,7% atau Rp12,8 triliun selama 2018 menjadi Rp203,4 triliun. Pertumbuhan deposito yang tidak seagresif pertumbuhan produk giro dan tabungan merupakan implementasi strategi BNI yang fokus pada pendanaan yang bersumber dari CASA.

Penerapan strategi ini berdampak pada membaiknya rasio CASA BNI dari 63,1% di tahun 2017 menjadi 64,8% di tahun 2018. Kondisi ini juga mendorong turunnya biaya simpanan nasabah (*Cost of Fund*) sebesar 0,2% dari 3,0% di 2017 menjadi 2,8% di 2018.

Peningkatan kinerja BNI telah berhasil mendorong pertumbuhan laba bersih mencapai 10,3% dibandingkan dengan tahun 2017 yang dipicu oleh meningkatnya komposisi pendapatan seperti pendapatan bunga dan syariah yang merupakan motor penggerak utama kegiatan operasional perbankan. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah neto mengalami peningkatan dari Rp31,9 triliun di tahun 2017 menjadi Rp35,4 triliun di tahun 2018 atau sebesar 11,0%, dengan peningkatan terbesar pada pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan sebesar Rp3,7 triliun.

Pencapaian yang telah diperoleh di 2018, secara umum menunjukkan bahwa kinerja Perseroan telah memenuhi yang telah ditargetkan.



KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DAN LANGKAH PENYELESAIANNYA

Unggulannya kinerja yang telah diperoleh di 2018, tidak terlepas dari upaya Direksi dan jajaran manajemen dalam mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi. Seperti halnya entitas bisnis lainnya, BNI menghadapi berbagai tantangan dari lingkungan eksternal dan memiliki beberapa kendala di internal Bank. Kenaikan suku bunga acuan dan tren pelemahan nilai tukar, serta adanya kenaikan NPL Perbankan merupakan tantangan eksternal yang harus dihadapi dengan berbagai strategi yang tepat. Seperti halnya perusahaan perbankan lainnya, ancaman *cyber crime* juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh BNI.

Di samping itu, dari sisi internal juga terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait kolektibilitas kredit. Kontribusi Perusahaan Anak juga merupakan hal penting yang perlu untuk ditingkatkan, agar tercapai sinergi yang signifikan.

Terkait dengan beberapa tantangan dan kendala internal yang dimiliki, Direksi senantiasa berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Hal-hal yang telah dilakukan adalah secara selektif menyalurkan pembiayaan yang fokus pada industri prioritas dan mengoptimalkan peran program pemerintah sebagai basis pertumbuhan. BNI juga telah memperkuat bisnis konsumer bekerja sama dengan mitra bisnis dan memberikan solusi transaksi keuangan dengan fokus pada *e-commerce* dan generasi *millennial* melalui pengembangan akuisisi *digital channel* dan pengembangan fitur melalui *strategic partnership*. Hal penting lainnya yang dilakukan BNI dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala adalah mengoptimalkan kapabilitas organisasi untuk mendukung pencapaian bisnis dengan meningkatkan produktivitas pegawai, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan mengembangkan teknologi informasi yang mendukung bisnis Bank.

Berbagai strategi tersebut telah diterapkan dengan tepat, sehingga BNI mampu menghasilkan kinerja yang membanggakan di 2018. BNI telah mampu meningkatkan laba bersihnya dan menurunkan NPL di tahun 2018, sesuai dengan yang telah ditargetkan.

ANALISIS PROSPEK USAHA

Kondisi perekonomian dunia maupun Indonesia di 2019 diprediksi masih mengalami banyak tantangan. Pada tahun 2019, beberapa lembaga dunia sepakat bahwa perekonomian global akan ditopang oleh AS dan negara-negara berkembang seperti India, ASEAN-5 (terutama Indonesia dan Philipina), Brasil serta Mexico (*Economic Outlook 2019*, IMF). Dari faktor eksternal, terdapat potensi kenaikan FFR di tahun 2019 apabila perekonomian Amerika terus melanjutkan pertumbuhan sesuai dengan harapan dan realisasi inflasi Amerika yang telah mencapai target 2%. Selain itu, penghentian *Quantitative Easing* (QE) baik di Eropa maupun Jepang akan berdampak pada minimnya dana asing yang masuk di pasar keuangan Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya. Perang dagang Amerika Serikat dan China juga akan terus berlangsung dan menimbulkan dampak ikutan.

Mengingat pertumbuhan ekonomi global masih bermasalah, maka sumber pertumbuhan ekonomi yang utama Indonesia berasal dari dalam negeri. Pemerintah akan terus berfokus mendorong terjaganya daya beli masyarakat dengan berbagai program subsidi, baik subsidi energi maupun non-energi.

Terkait dengan kondisi likuiditas domestik, diperkirakan cenderung ketat karena beberapa hal. Pertama, pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK yang tercermin dari tingginya *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Berdasarkan peraturan No. 17/11/PBI/2015, batas bawah LDR adalah sebesar 78% dan batas atasnya sebesar 92%. Kedua, Pemerintah semakin aktif menerbitkan obligasi ritel yang dapat dibeli oleh perorangan sehingga terdapat potensi *switching* dari simpanan di bank (baik deposito maupun tabungan) menjadi obligasi ritel. Saat ini obligasi ritel yang dimiliki Pemerintah terdiri dari Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST). Jumlah penerbitan obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) ritel di tahun 2019 akan mencapai Rp60 triliun. Untuk mempermudah masyarakat, Pemerintah akan menerbitkan SBN secara *online* dengan sistem *first come first served*. Apabila likuiditas mengetat maka akan timbul persaingan merebutkan DPK antar perbankan. Hal ini akan memengaruhi pertumbuhan dana di tahun 2019 mendatang.

Sejalan dengan penerapan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), BI terus mendorong penyaluran kredit perbankan sekaligus memperluas sumber pendanaan dan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga. Beragam alternatif pembiayaan ini menjadi tantangan bagi perbankan dalam melakukan fungsi intermediasi. Rendahnya biaya penerbitan obligasi akan mendorong perusahaan memilih pembiayaan melalui obligasi. Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan nasional menjadi persoalan jika tidak tumbuh seperti tahun 2018 yang hingga September 2018 mampu tumbuh sebesar 12,6%.

Kondisi perekonomian, khususnya dalam industri keuangan yang masih menghadapi berbagai tantangan, tentu saja memberikan dampak terhadap kegiatan usaha BNI. Kemampuan BNI untuk mengerahkan dan mengalokasikan sumber daya serta mempertahankan dan mengembangkan kapabilitas inti yang dipunyai menjadi faktor penting dalam mengantisipasi dan mengambil peluang bisnis dari kondisi eksternal yang ada. BNI tetap yakin akan tetap mampu melakukan yang terbaik.

BNI optimis akan selalu dapat mencapai target kinerjanya, dunia usaha menawarkan banyak peluang pertumbuhan yang sangat baik pada tahun-tahun mendatang bagi perusahaan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan lincah dalam memanfaatkan peluang tersebut. Kemampuan adaptasi dan kelincahan BNI tersebut telah dibuktikan dalam data historis beberapa tahun terakhir. Pada beberapa tahun terakhir dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan industri keuangan yang moderat, BNI mampu tumbuh lebih tinggi daripada industri.

Dari struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulanan tahun 2017-2018, kontribusi pertumbuhan terbesar selain dari Sektor Industri Perdagangan adalah dari Sektor Industri Pengolahan, Pertanian (termasuk Kehutanan dan Perikanan), Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, dan Informasi Komunikasi dengan kontribusi pertumbuhan rata-rata masing-masing adalah 20%, 13%, 10,5%, 5,5%, dan 3,8% secara berurutan. Sebagai perbandingan, Sektor Industri Perdagangan berkontribusi rata-rata sebesar 13% terhadap pertumbuhan ekonomi. Struktur ekonomi tersebut merupakan peluang bagi BNI untuk mengembangkan bisnisnya yang didukung dengan kapabilitas inti. Dalam realisasi 2018, pembiayaan Segmen Korporasi BNI terbesar diberikan kepada Sektor Industri Manufaktur, Pertanian, dan Jasa Dunia Usaha dengan komposisi terhadap portofolio masing-masing adalah 26%, 15%, dan 13%. Sektor Industri Jasa Dunia Usaha merupakan sektor industri dengan pertumbuhan tertinggi ketiga setelah Sektor Industri Informasi dan Komunikasi dan Sektor Industri Transportasi dan Pergudangan. Pada periode yang sama, Segmen Menengah BNI memberikan pembiayaan terbesar kepada Sektor Industri Perdagangan, Manufaktur, dan Transportasi dan Pergudangan dengan komposisi portofolio masing-masing 31%, 26%, dan 11%. Segmen Kecil BNI mempunyai pembiayaan terbesar pada Perdagangan, Manufaktur, dan Pertanian dengan komposisi pembiayaan sebesar 57%, 11%, dan 10%.

Dalam upaya untuk selalu relevan dalam era perubahan teknologi termasuk upaya menjadi pionir dalam pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan perubahan preferensi nasabah akibat penetrasi internet dan gawai, maka BNI telah dan akan terus melakukan investasi yang signifikan dalam pengembangan teknologi. Aplikasi teknologi informasi akan dapat dirasakan keunggulannya oleh nasabah baik perorangan maupun badan usaha atau lembaga lain pada saat menggunakan jasa keuangan BNI dan diharapkan akan meningkatkan keterikatan pada BNI sehingga dapat memberikan nilai tambah tidak hanya bagi BNI namun juga nasabahnya pada jangka panjang. Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan antara lain digitalisasi proses bisnis yang akan berdampak pada peningkatan kualitas, kecepatan layanan, transparansi proses, interoperabilitas sistem. Selain digitalisasi proses, pengembangan *platform* dan aplikasi transaksi yang memungkinkan interaksi antar nasabah baik *Business to Business (B to B)*, *Business to Customer (B to C)*, maupun *Customer to Customer (C to C)* akan dikembangkan sehingga akan meningkatkan *user experience* dalam setiap perjalanan nasabah berhubungan dengan BNI. Pengembangan fitur dan aplikasi seperti *Yap!* ataupun *cash management system* akan terus dilakukan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan mengoptimalkan kemampuan data *analytics*.

Dukungan terhadap program-program Pemerintah akan terus dilaksanakan karena selain BNI adalah salah satu *national agent of development*, namun juga program pemerintah tersebut dan seluruh masyarakat sebagai pelakunya dapat menjadi potensi bisnis bagi BNI. Dukungan terhadap strategi pembangunan pemerintah lintas sektor seperti pembangunan infrastruktur, pariwisata, transportasi, ataupun pertanian akan terus dilakukan. Kontribusi bisnis dari dukungan tersebut cukup signifikan bagi BNI baik untuk penyaluran pembiayaan maupun untuk penghimpunan dana serta *fee based income*. Program-program Pemerintah lain seperti Kredit Usaha Rakyat, Inklusi Keuangan, Laku Pandai, dan bantuan sosial akan dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan meningkatkan bisnis BNI secara keseluruhan.



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

BNI berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di seluruh aspek kegiatan usaha bisnisnya termasuk pada perusahaan anak secara terintegrasi. Seiring berkembangnya *best practices* pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), baik pada industri perbankan maupun industri jasa keuangan, sebagai bank BUMN yang terdaftar di pasar modal BNI memahami bahwa penerapan dan pengembangan GCG memiliki manfaat yang sangat besar bagi BNI. Dengan adanya penerapan dan pengembangan GCG, BNI memiliki pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha bisnisnya agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebutuhan setiap *stakeholder*. Keselarasan antara *stakeholder* dan BNI akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan perusahaan yang berujung pada timbul dan meningkatnya sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap Insan BNI.

BNI juga menyadari bahwa tata kelola perusahaan akan semakin meningkatkan kepercayaan dan rasa aman investor atas investasi dalam era global saat ini. Secara berkelanjutan, selain menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG, BNI terus mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik yang berlaku di regional maupun internasional antara lain meliputi ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012, Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Di tahun 2018, BNI kembali meraih penghargaan sebagai *The Best State Owned Enterprise* dan *Top 50 Public Listed Companies* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dan *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Index (CGPI)* pada *Good Corporate Governance Award 2018*.

Beberapa perkembangan penerapan GCG yang telah dilakukan di tahun 2018 antara lain:

1. Penandatanganan Komitmen GCG oleh seluruh Insan BNI.
2. Sosialisasi Anti *Fraud* kepada seluruh pegawai BNI.
3. Publikasi Anti Gratifikasi di Harian Kompas dan Bisnis Indonesia tanggal 30 Mei 2018 dan 21 Desember 2018.
4. Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/228/DIR/R tanggal 29 Juni 2018.
5. Pelaksanaan Sosialisasi GCG Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan, Kantor Wilayah Makasar (WМК), Kantor Wilayah Malang (WMA), Kantor Cabang Singkawang dan Pontianak serta segenap perwakilan Perusahaan Anak.
6. Pelaksanaan *Compliance* Forum Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan tanggal 30 Agustus 2018.
7. Sebagai salah satu cara meningkatkan implementasi prinsip GCG di lingkungan kerja BNI, diselenggarakan kegiatan internal berupa kompetisi *Vlog* GCG dengan tema "Integritas Sebagai Gaya Hidup Insan BNI #IniIntegritasGue". Maksud dan tujuan dari diadakannya kompetisi tersebut adalah untuk menumbuhkan *awareness* segenap Insan BNI untuk menjadikan sikap integritas sebagai gaya hidup serta meningkatkan kesertaan segenap Insan BNI untuk berperan aktif dan kreatif dalam *campaign* integritas sebagai gaya hidup Insan BNI.

Pada prinsipnya, pelaksanaan penerapan GCG di BNI berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Bank, *shareholders* dan *stakeholders*. BNI senantiasa melakukan evaluasi penerapan GCG secara berkelanjutan, sehingga penerapan GCG akan selalu mengalami peningkatan.



PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada periode 2018, jumlah dan komposisi Direksi mengalami perubahan dengan komposisi sebagai berikut:

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI SEBELUM RUPS TAHUNAN 20 MARET 2018

Jumlah dan komposisi Direksi sebelum RUPS Tahunan 20 Maret 2018 berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 8 (delapan) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BNI.

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Efektif
Achmad Baiquni	Direktur Utama	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama	Jakarta	17 Maret 2015 (pengangkatan sebagai Direktur) 16 Maret 2017 (pengalihan menjadi Wakil Direktur Utama)	22 Mei 2015 29 Mei 2017
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan & Risiko Kredit	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Bob Tyasika Ananta	Direktur Perencanaan & Operasional	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Bisnis Konsumer	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Panji Irawan	Direktur Tresuri & Internasional	Jakarta	12 Januari 2016	11 April 2016
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur Bisnis Menengah	Jakarta	10 Maret 2016	15 Juli 2016
Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil & Jaringan	Jakarta	16 Maret 2017	19 Juli 2017

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI SETELAH RUPS TAHUNAN 20 MARET 2018

Jumlah dan komposisi Direksi setelah RUPS Tahunan 20 Maret 2018 berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 9 (sembilan) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BNI.

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Efektif
Achmad Baiquni	Direktur Utama	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama	Jakarta	17 Maret 2015 (pengangkatan sebagai Direktur). 16 Maret 2017 (pengalihan menjadi Wakil Direktur Utama)	22 Mei 2015 29 Mei 2017
Rico Rizal Budidarmo	Direktur <i>Treasury & International Banking</i>	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Bob Tyasika Ananta	Direktur Manajemen Risiko	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Keuangan	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Tambok P. Setyawati	Direktur <i>Retail Banking</i>	Jakarta	20 Maret 2018	5 Juli 2018



Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Efektif
Dadang Setiabudi	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Jakarta	20 Maret 2018	5 Juli 2018
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur <i>Corporate Banking</i>	Jakarta	10 Maret 2016	15 Juli 2016
Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil & Jaringan	Jakarta	16 Maret 2017	19 Juli 2017
Endang Hidayatullah	Direktur Kepatuhan	Jakarta	20 Maret 2018	5 Juli 2018

Perubahan komposisi Direksi didasarkan pada kebutuhan Perseroan, yang telah diputuskan oleh Pemegang Saham.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis BNI dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional, di antaranya:

1. Komite Kredit.
2. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Komite Manajemen Risiko dan Kapital.
4. Komite Produk.
5. Komite Manajemen Kinerja.
6. Komite Manajemen Teknologi.
7. Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan.
8. Komite Sumber Daya Manusia.

Penilaian Anggota Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi dengan menilai tugas sesuai Piagam Komite, Kompetensi dan *Skill* serta tingkat kehadiran Anggota Komite tersebut. Direksi secara berkala melakukan penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi. Selama tahun 2018, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi secara keseluruhan memuaskan.

PENUTUP

Demikian laporan Direksi atas jalannya kepengurusan BNI di tahun 2018. Direksi mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan seluruh jajaran manajemen dan pegawai atas kontribusi terbaiknya dalam pencapaian kinerja Bank yang memuaskan di 2018. Kepada Dewan Komisaris, Direksi mengucapkan terima kasih atas pengawasan dan arahan yang telah diberikan. Direksi juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Pemegang Saham serta para pemangku kepentingan lainnya, sehingga BNI dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Jakarta, April 2019
Atas Nama Direksi

Achmad Baiquni



LEMBAR PENGESAHAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Tahunan 2018 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, April 2019

DEWAN KOMISARIS

ARI KUNCORO

Komisaris Utama/Komisaris Independen

WAHYU KUNCORO

Wakil Komisaris Utama

PATANIARI SIAHAAN

Komisaris Independen

REVRISOND BASWIR

Komisaris Independen

AHMAD FIKRI ASSEGAF

Komisaris Independen

SIGIT WIDYAWAN

Komisaris Independen

BISTOK SIMBOLON

Komisaris

JONI SWASTANTO

Komisaris

MARWANTO HARJOWIRYONO

Komisaris



Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Tahunan 2018 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, April 2019

DIREKSI

ACHMAD BAIQUNI
Direktur Utama

HERRY SIDHARTA
Wakil Direktur Utama

PUTRAMA WAHJU SETYAWAN
Direktur Bisnis Korporasi

ADI SULISTYOWATI
Direktur Hubungan Kelembagaan

RICO RIZAL BUDIDARMO
Direktur *Treasury & International Banking*

ANGGORO EKO CAHYO
Direktur Keuangan

CATUR BUDI HARTO
Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan

BOB TYASIKA ANANTA
Direktur Manajemen Risiko

ENDANG HIDAYATULLAH
Direktur Kepatuhan

TAMBOK P. SETYAWATI
Direktur *Retail Banking*

DADANG SETIABUDI
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi

Profil Perusahaan

- 60 IDENTITAS PERUSAHAAN
- 62 RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
- 64 BRAND PERUSAHAAN
- 65 BIDANG USAHA
- 66 PRODUK DAN JASA
- 70 PETA WILAYAH USAHA
- 74 STRUKTUR ORGANISASI
- 76 VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
- 78 REVIEW VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
- 79 BUDAYA PERUSAHAAN
- 80 PROFIL DEWAN KOMISARIS
- 89 PROFIL DIREKSI
- 100 PROFIL *SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT*
- 101 PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
- 117 PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
- 128 KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
- 131 DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI
- 136 STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
- 137 KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM
- 139 KRONOLOGIS PENERBITAN OBLIGASI
- 142 KRONOLOGIS PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA
- 143 NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PENERBITAN SAHAM
- 144 PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
- 151 NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, KANTOR CABANG DAN PERWAKILAN LUAR NEGERI SERTA KANTOR WILAYAH
- 152 KANTOR CABANG, *SUB BRANCH*, PERWAKILAN LUAR NEGERI DAN KANTOR WILAYAH
- 154 INFORMASI YANG TERSEDIA DI *WEBSITE*
- 156 PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL



IDENTITAS PERUSAHAAN



“ Saat ini BNI memiliki **1 (satu) Kantor Pusat**, **17 Kantor Wilayah** dan **2.245 jaringan kantor** yang terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor luar negeri, kantor kas dan jaringan kantor lainnya seperti *payment point* dan *O-Branch*. Selain itu, BNI juga memiliki **Agen46 di seluruh provinsi di Indonesia.** ”



Profil Perusahaan



Nama Perusahaan
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

Nama Panggilan
BNI



Kegiatan Usaha

Bergerak di bidang usaha perbankan sesuai dengan Anggaran Dasar No. 52 tanggal 22 Mei 2018

Tanggal Pendirian

5 Juli 1946

Segmen Usaha

- Perbankan Bisnis Koperasi, Menengah dan Kecil
- Perbankan Konsumer
- Perbankan Internasional dan Tresuri



Agen46

- 2018: 111.836
- 2017: 69.589



Dasar Hukum Pendirian

- Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 1946
- Lembaran Negara RI No. 70 Tahun 1968
- UU No. 17 Tahun 1968
- PP No.19 Tahun 1992 (Penyesuaian Bentuk Hukum BNI)

Alamat

Graha BNI
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
 Jakarta 10220
 Telepon : (62-21) 251 1946
 I-Telex : 765185 BNI DLN IA
 Faks. : (62-21) 251 1214
 E-mail : bni@bni.co.id
 Website : www.bni.co.id
 PO Box 1946
 Jakarta Pusat 10220



Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Data Jaringan Kantor

- 1 Kantor Pusat
- 17 Kantor Wilayah
- 201 Kantor Cabang
- 5 Entitas Anak
- 1.109 Kantor Cabang Pembantu
- 605 Kantor Kas
- 128 Payment Point
- 18.311 ATM
- 196 O-Branch
- 6 Kantor Cabang Luar Negeri

Akses Informasi

Call Center:
 Layanan 24 jam BNI Call
 1500046
 E-mail: bnical@bni.co.id

Twitter: @BNI
 Facebook: BNI
 Instagram: @BNI46



Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

28 Oktober 1996

Kode Saham

BBNI

Jumlah Pegawai

27.224



Hubungan Investor

Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan
 Graha BNI, Lt. 24
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
 Jakarta 10220
 Telepon: (62-21) 2511 946, 572 8387
 Faks.: (62-21) 572 8295, 572 8053
 E-mail: investor.relations@bni.co.id

Anak Perusahaan

- Bank BNI Syariah
- BNI Multifinance
- BNI Sekuritas
- BNI Life Insurance
- BNI Remittance Ltd.



Modal Dasar

15.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

9.054.806.974.125



Kepemilikan

Negara Republik Indonesia: 60%
Masyarakat: 40%



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BNI” atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi perusahaan perseroan terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

Pada tahun 1996, BNI sebagai bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI). Dalam upaya memperkuat struktur keuangan dan meningkatkan persaingan usaha di dunia perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Perubahan Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 25 April 2017 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-0010821.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang perubahan anggaran dasar Bank sesuai dengan Akta No. 52 tanggal 22 Mei 2018 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 25 Juni 2018.

Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga.

Untuk memperkuat layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Securities, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance Ltd. BNI juga menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun.



KETERANGAN PERUBAHAN NAMA



Sesuai dengan uraian riwayat singkat Perusahaan, BNI pernah mengganti nama sebanyak 1 (satu) kali, sejak pertama kali berdiri, dari semula bernama Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia 1946 sejak tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Di samping itu, BNI juga mengalami penyesuaian bentuk hukum dari semula bernama Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) efektif berlaku 29 April 1992, serta mengalami perubahan status perusahaan dari sebelumnya Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka yang efektif berlaku pada tanggal 06 Agustus 1996.

BRAND PERUSAHAAN



Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Logo BNI menggunakan warna *Orange* dan *Turquoise* sebagai warna *signature* korporat yang dikembangkan untuk memberikan kesan modern dan *fresh*. Angka 46 merupakan bagian dari sejarah pendirian BNI sebagai bank pertama Indonesia dan telah terbukti memberikan kontribusi tanpa henti untuk membangun bangsa.

Slogan "**Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa**" merupakan penguat filosofi dan visi Perusahaan.

Value Proposition 2018 adalah BNI merupakan *Digital Financial Institution* yang komprehensif dan terpercaya yang akan terus memberikan pengalaman inovasi digital ke semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, baik korporasi besar maupun sangat kecil, individual segala usia, bahkan untuk mereka yang masih belum tersentuh bank (*unbank*).

Value Proposition 2018 adalah BNI sebagai *Digital Banking*.



Profil Perusahaan



BIDANG USAHA

BNI menjalankan usaha dan kegiatannya di bidang perbankan sesuai dengan Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 52, tanggal 22 Mei 2018. Berikut adalah uraian mengenai kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang telah maupun yang belum dijalankan oleh Bank:

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR	KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN BNI	
	Sudah Dijalankan	Belum Dijalankan
Kegiatan Usaha Utama		
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.	√	
Memberikan kredit.	√	
Menerbitkan surat pengakuan utang.	√	
Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah (seperti wesel, surat pengakuan utang/kertas dagang lainnya, kertas perbendaharaan Negara, surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu, dan instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu).	√	
Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.	√	
Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.	√	
Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.	√	
Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.	√	
Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.	√	
Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek.	√	
Melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.	√	
Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.	√	
Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.	√	
Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan.	√	
Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegiatan kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.	√	
Bertindak sebagai Pendiri Dana Pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.	√	
Melakukan kegiatan jasa keuangan, <i>commercial banking</i> , <i>investment banking</i> lainnya.	√	
Melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	√	
Melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	√	

PRODUK DAN JASA

Kegiatan usaha BNI meliputi berbagai produk simpanan, produk pinjaman, serta berbagai layanan yang dijelaskan sebagai berikut:

KONSUMER

SIMPANAN

- BNI Taplus
- BNI Taplus Muda
- BNI Taplus Bisnis
- BNI Tappa (Taplus Pegawai/ Taplus Anggota)
- BNI Tapma (Taplus Mahasiswa)
- BNI Tapenas
- BNI Taplus Anak
- BNI Taplus Anak Co-Brand
- BNI Simpanan Pelajar
- BNI Pandai
- Tabunganku
- BNI Giro
- BNI Dolar
- BNI Deposito
- BNI Simponi
- Tabungan Indonesia Pintar (PIP)

PINJAMAN

- BNI Griya
- BNI Griya Multiguna
- BNI Fleksi
- BNI Fleksi Pensiun
- BNI Oto
- BNI Instan

KARTU KREDIT

- Kartu Kredit Reguler
 - » Kartu Kredit Visa *Silver*
 - » Kartu Kredit Visa *Gold*
 - » Kartu Kredit *Mastercard Silver*
 - » Kartu Kredit *Mastercard Gold*
- Kartu Kredit BNI JCB *Gold*
- Kartu Kredit *Premium*
 - » BNI *Style Titanium*
 - » BNI *Visa Platinum Card*
 - » BNI *JCB Precious*
 - » BNI *MasterCard World*
 - » BNI *Visa Infinite*
- Kartu Kredit *Affinity*
 - » Kartu Kredit BNI *Affinity – Universitas*
 - » Kartu Kredit BNI *Affinity – Ikatan Alumni*
 - » Kartu Kredit BNI *Affinity – Organisasi/Komunitas*
- Kartu Kredit *Corporate*
 - » BNI *Corporate Card Gold*
 - » BNI *Corporate Card Platinum*
 - » BNI *American Express Business Card*
- Kartu Kredit *Co-Branding*
 - » BNI – *Garuda Card*
 - » BNI – *Lotte Mart Card*
 - » BNI – *Bank Sumsel babel Card*
 - » BNI – *Bank Jabar Banten Card*
 - » BNI – *Bank DKI Card*
 - » BNI – *Pertamina Card*

- Kartu Kredit *Private Label*
 - » BNI *Travelling Card*
 - » BNI *Distribution Card*
- BNI Kartu Tunai

KARTU DEBIT

- Kartu Debit Reguler
 - » Kartu Debit *Silver*
 - » Kartu Debit *Gold*
- Kartu Debit *Premium*
 - » Kartu Debit *Platinum*
- Kartu Debit *Co-Branding*
 - » Kartu Debit *Garuda*
 - » Kartu Debit *Ferrari by BNI*
 - » Kartu Debit *Co-Branding Multimart*
 - » Kartu Debit *Co-Branding Indogrosir*
- Kartu BNI *Emerald World MasterCard*

E-BANKING

- BNI ATM Reguler
- BNI ATM Non Tunai
- BNI ATM Setoran Tunai
- BNI ATM *Drive Thru*
- BNI *SMS Banking*
- BNI *Internet Banking*
- BNI *Phone Banking*
- BNI *Mobile Banking*
- BNI *O-Branch*
- BNI *Debit Online*
- *Tap Cash*
- Agen 46
- Unikqu
- *EDC*
- *EDC Mini ATM*
- BNI *iPay*
- BNI *SmartPay*

JASA-JASA

- Kiriman Uang Dalam Negeri (BNITRANSFER)
- Kiriman Uang Internasional
- *Safe Deposit Box*
- Inkaso
- BNI Surat Keterangan Bank
- *Traveller's Cheque*
- Uang Kertas Asing
- *Electronic Data Capture (EDC)*

SIMPANAN PENSIUN

- BNI Simponi

BANCASSURANCE

- *In Branch and Telemarketing*
- Solusi Abadi Plus
- *B-Life Plan Multipro*
- *B-Life Cash Pro*
- Prima Proteksi
- Pro Maxima
- Pro Medika
- *Blife Medplus*
- Rencana Pintar
- Rencana Sehat



PRIORITY BANKING

LAYANAN EMERALD

- BNI Emerald Card
- BNI Infinite Card
- BNI Emerald Saving
- Layanan BNI Emerald

PRODUK INVESTASI

- BNI Supermarket Investment
- Supermarket Reksa Dana
 - » Reksa Dana Pasar Uang
 - » Reksa Dana Pendapatan Tetap
 - » Reksa Dana Saham
 - » Reksa Dana Campuran
 - » Reksa Dana Terproteksi

PRODUK ASURANSI

- In Branch and Telemarketing
- Solusi Abadi Plus
- BNI Life Multi Pro
- BNI Life Cash Pro
- Prima Proteksi
- Pro Maxima
- Pro Medika
- Blife MedPlus
- Rencana Pintar
- Rencana Sehat

E-BANKING

- BNI ATM
- ATM Drive Thru
- SMS Banking
- Internet Banking
- Phone Banking
- O-Branch
- Mobile Banking
- Tapcash
- Unikqu
- EDC
- EDC Mini ATM

BUSINESS BANKING

SEKTOR INDUSTRI

- Agribisnis
- Telekomunikasi
- Makanan dan Minuman
- Minyak, Gas, dan Pertambangan
- Industri Kimia
- Konstruksi
- Kelistrikan
- Perdagangan Besar dan Eceran

BNI BUSINESS BANKING

- Local Corporate and Multinational Company 1
- Local Corporate and Multinational Company 2
- Transactional Banking Services
 - » BNI Direct (Payment Management, Collection Management, Liquidity Management, Information Management)
 - » Supply Chain Financing
 - » Custody and Securities Services
- Commercial and Small
 - » Kredit Modal Kerja (KMK)
 - » Kredit Investasi (KI)
 - » Garansi Bank (GB)
 - » Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
 - » Letter of Credit (LC)
 - » Kredit Usaha rakyat (KUR)
 - » Kredit Program
 - » Marketing Intelligence and Business Portfolio

FUNDING

- BNI Giro Non-Perorangan
- Deposito Berjangka Perusahaan
- Single Currency

LENDING

- Kredit Modal Kerja
- Kredit Investasi
- Kredit Supply Chain
- Kredit Kepada Lembaga Keuangan (KKLK)
- Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Two Step Loan
- Two Step Loan – IEPC 2
- Kredit Beragun Deposito Berjangka
- Cash Collateral Credit
- Kredit Ekspor
- Kredit Impor
- Kredit Koperasi Primer
- Kredit Sindikasi
- Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)
- Kredit Program Revitalisasi Perkebunan-Pola Kemitraan

SERVICES

- Cash Management
 - » Transfer Management
 - » Collection Management (Auto Collection, Pickup Services, BNI Virtual Account)
 - » Payment Management (Bulk Payment, Payroll Management, BNI e-Tax)
 - » Liquidity management
- Sindikasi
 - » Arrangement
 - » keagenan
- Agen Fasilitas (Facility Agent)
- Agen Jaminan (Security Agent)
- Agen Penampungan (Escrow Agent)
- Fund Services
 - » Fund Accounting, Fund Administration, Pengawasan Pelaporan dan Publikasi
 - » Core Banking BNI
 - » Agen Transfer (Transfer Agency)
- Custody Service
- Wali Amanat
- Garansi Bank
 - » Big Bond/Jaminan Tender
 - » Advance Payment Bond/Jaminan Uang Muka
 - » Performance Bond (Garansi Bank Pelaksana/ Performance Bond, Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan/ Maintenance Bond/ Retention Bond, Garansi Bank Pembayaran)
 - » Custom Bond
- Agen Pembayaran (Paying Agent)

INTERNASIONAL

PRODUK TRADE FINANCE

- *Import LC Issuance*
 - » *Sight LC*
 - » *Usance LC*
 - » *Back to Back LC (BBLC)*
 - » *Transferable Letter of Credit*
- *Export LC Negotiation*
- *Inward Documentary Collection*
- *Outward Documentary Collection*
- *Shipping Guarantee*
- *Trust Receipt*
- *Advances Under Collection Bills*
- *Open Account Financing*
- *Bills Discounting*
- *"UPAS" LC Refinancing*
- *Standby Letters of Credit*

PRODUK PINJAMAN

- *Corporate Loan (Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi)*
- *Kredit Term Loan*
- *Overdraft Facility*
- *Pembiayaan Trade*
- *Kredit Sindikasi*
- *Pembiayaan Proyek*
- *Discount Bills*
- *Loan on Bills*
- *Housing Loan*
- *Two Steps and Channeling Loan kepada Perusahaan Lokal dari Indonesia*

PRODUK JASA RITEL

- *BNI Current Account*
- *BNI Fixed Deposit*
- *BNI SingPlus Saving Account*
- *BNI Simpanan Hong Kong Dolar*
- *BNI Giro Hong Kong Dolar & US Dolar*
- *Demand Deposits*
- *Negotiable Deposits*
- *Remittance*
- *Hospital Guarantee*
- *Bank BNI Singapore | MAS Electronic Payment System (MEPS)*
- *Escrow Agent*
- *Safe Deposit Box*

PRODUK FINANCIAL INSTITUTION

- *Bank Guarantee based on Counter Guarantee*
- *Confirm LC/SKBDN*
- *Nostro Account*
- *Foreign Exchange*
- *Today, Tom, and Spot*
- *Forward Transaction*
- *Swap Transaction*
- *Penempatan Dana*
- *Money Market Account*
- *Deposit on Call*
- *Billateral Trade Financing*
- *Risk Participation and Forfaiting*
- *Custodian Services*
- *Bankers Acceptance*
- *Derivatif*
- *Interest Rate Swap*
- *Option*
- *Cross Currency Swap*
- *Bank Notes*
- *Plain Vanilla Option*
- *Repo Obligasi/Reverse Repo*

TRESURI

- *Foreign Exchange*
 - » *Today, Tom, and Spot*
- *Forward Transaction*
- *Penempatan Dana*
 - » *Money Market Account*
 - » *Deposit on Call*
- *Derivatif*
 - » *Interest Rate Swap*
 - » *Option*
 - » *Cross Currency Swap*
- *Bank Notes*
- *Plain Vanilla Option*
- *Repo Obligasi/Reverse Repo*

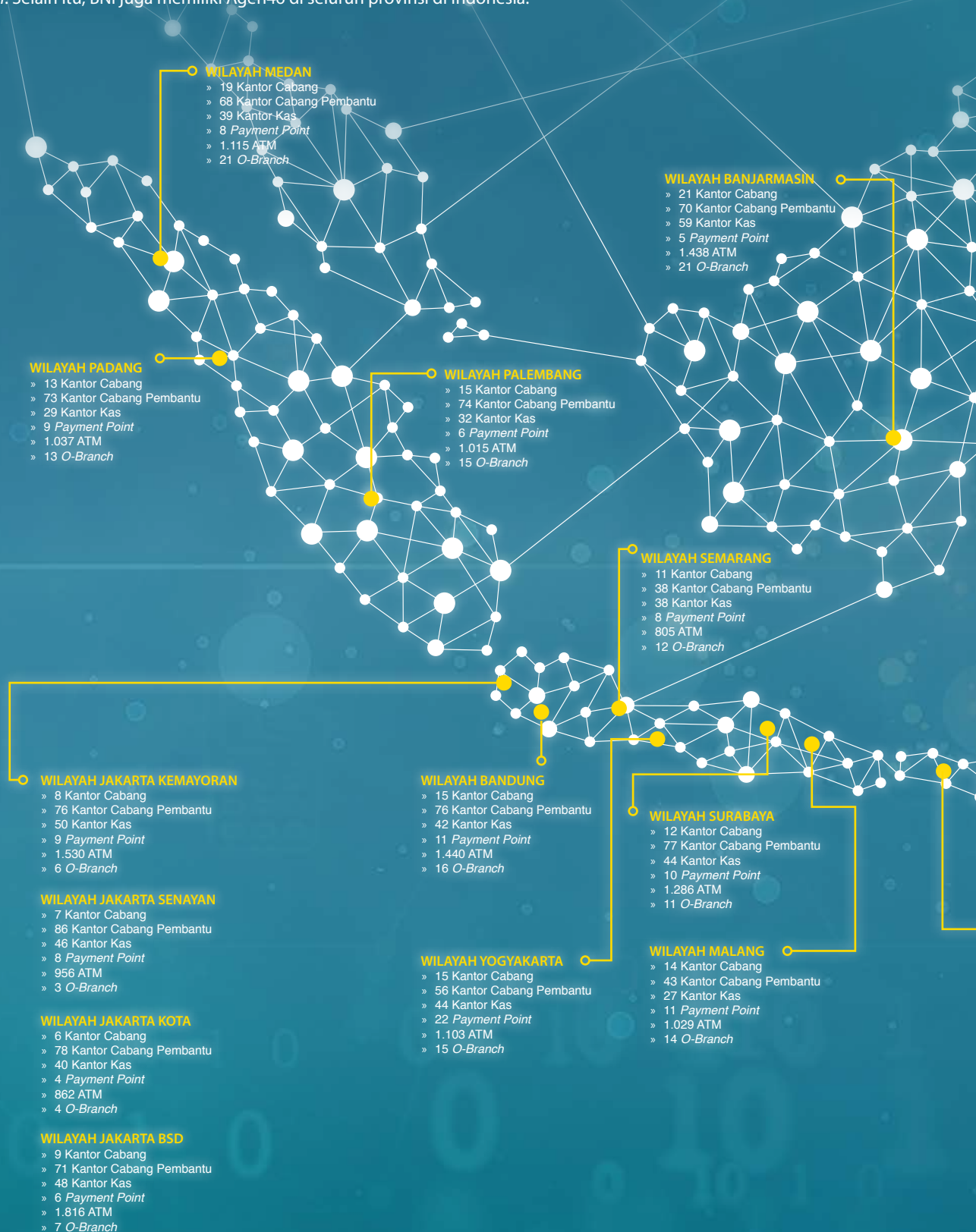


 BNI

Lenovo

PETA WILAYAH USAHA

Saat ini BNI memiliki 1 (satu) Kantor Pusat, 17 Kantor Wilayah dan 2.245 jaringan kantor yang terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor luar negeri, kantor kas dan jaringan kantor lainnya seperti *payment point* dan *O-Branch*. Selain itu, BNI juga memiliki Agen46 di seluruh provinsi di Indonesia.



1

Kantor Pusat

17

Kantor Wilayah

201

Kantor Cabang

1.109

Kantor Cabang Pembantu

605

Kantor Kas

128

Payment Point

196

O-Branch

18.311

ATM

LUAR NEGERI

» 8 ATM

WILAYAH MANADO

- » 11 Kantor Cabang
- » 43 Kantor Cabang Pembantu
- » 12 Kantor Kas
- » 544 ATM
- » 11 O-Branch

WILAYAH PAPUA

- » 5 Kantor Cabang
- » 18 Kantor Cabang Pembantu
- » 19 Kantor Kas
- » 223 ATM
- » 5 O-Branch

WILAYAH MAKASAR

- » 11 Kantor Cabang
- » 71 Kantor Cabang Pembantu
- » 29 Kantor Kas
- » 10 Payment Point
- » 1.042 ATM
- » 12 O-Branch

WILAYAH DENPASAR

- » 9 Kantor Cabang
- » 91 Kantor Cabang Pembantu
- » 7 Kantor Kas
- » 1 Payment Point
- » 1.062 ATM
- » 10 O-Branch

JARINGAN KANTOR BNI TAHUN 2014 – 2018

Jenis Kantor	2018	2017	2016	2015	2014
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Wilayah	17	17	17	15	15
Kantor Cabang Luar Negeri	6	6	6	6	5
Kantor Cabang	201	200	196	169	168
Kantor Cabang Pembantu	1.109	1.085	948	911	912
Kantor Kas	605	595	623	545	495
Payment Point	128	130	110	105	92
Jaringan Kantor Lainnya					
ATM	18.311	17.966	17.056	16.071	14.071
O-Branch	196	122	86	81	78



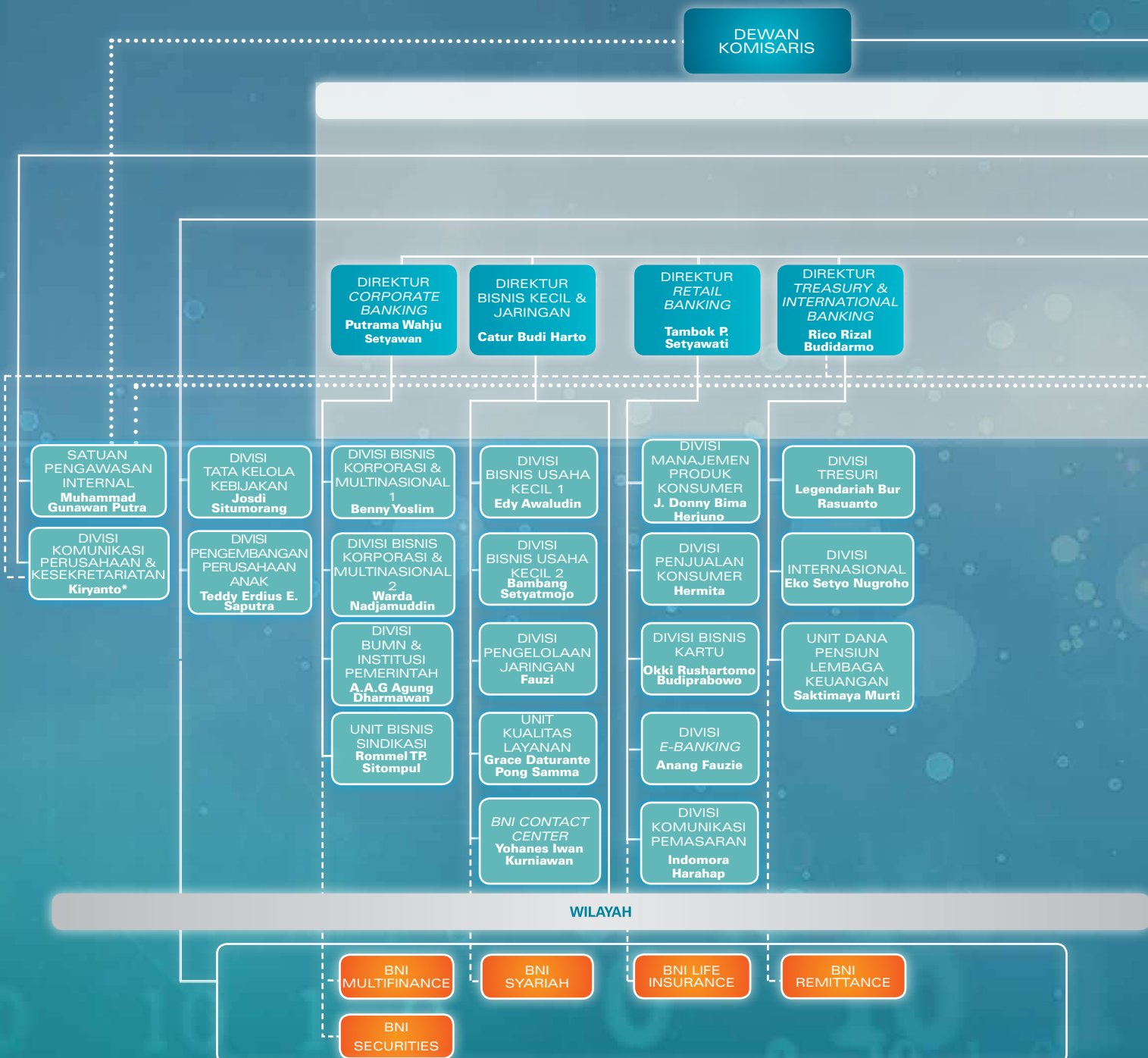
Outlet *Digital Branch* BNI telah terimplementasi di 8 (delapan) unit *outlet* di tahun 2017, adanya penambahan *outlet* sebanyak 6 (enam) unit *outlet* serta 1 (satu) set perangkat *Digital Branch* di tahun 2018.

Tabel Jaringan *D-Branch* Per Wilayah Tahun 2018

No.	Nama Outlet	Kantor Cabang	Lokasi	Tahun Development
1.	<i>D-Branch</i> 23 Paskal	KC Jl. Perintis Kemerdekaan Bandung	Mall 23 Paskal Bandung, Jawa Barat	2017
2.	<i>D-Branch</i> Hartono Mall	KC UGM Yogyakarta	Hartono Mall Yogyakarta, D.I. Yogyakarta	2017
3.	<i>D-Branch</i> Grand City Mall	KC Surabaya	Grand City Mall Surabaya, Jawa Timur	2017
4.	<i>D-Branch</i> Plaza Medan Fair	KC Medan	Plaza Medan Fair, Sumatera Utara	2017
5.	<i>D-Branch</i> Bandara Ngurah Rai	KC Renon	Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali	2017
6.	<i>D-Branch</i> Gandaria City	KC Pasar Mayestik	Gandaria City, Jakarta	2017
7.	<i>D-Branch</i> Pacific Place	KC Melawai Raya	Pacific Place, Jakarta	2017
8.	<i>D-Branch</i> Kota Kasablanka	KC Tebet	Kota Kasablanka, Jakarta	2017
9.	<i>D-Branch</i> Pejompongan	KC Mega Kuningan	Menara BNI Pejompongan, Jakarta	2018
10.	<i>D-Branch</i> Stasiun BNI City	KC Mega Kuningan	Stasiun BNI City, Jakarta	2018
11.	<i>D-Branch</i> Pondok Indah Mall 2	KC Fatmawati	Pondok Indah Mall 2, Jakarta	2018
12.	<i>D-Branch</i> Nipah Mall Makassar	KC Makassar	Nipah Mall Makassar, Sulawesi Selatan	2018
13.	<i>D-Branch</i> Manado Town Square	KC Manado	Manado Town Square Sulawesi Utara	2018
14.	<i>D-Branch</i> Ciputra World	KC Surabaya	Ciputra World Surabaya, Jawa Timur	2018

STRUKTUR ORGANISASI

Dengan semakin berkembangnya bisnis Bank, Struktur Organisasi BNI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan struktur organisasi terakhir terjadi pada tanggal 09 November 2018 dengan berdasarkan surat KEPDIR No. KP/384/DIR/R tanggal 09 November 2018.



*Menjabat sampai dengan 28 Januari 2019.

KETERANGAN

- Garis supervisi
- Garis koordinasi
- Garis komunikasi & penyampaian informasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

KOMITE DEWAN KOMISARIS



DIREKSI & SEVP

DIREKTUR UTAMA
Achmad Baiquni

WAKIL DIREKTUR UTAMA
Herry Sidharta

DIREKTUR HUBUNGAN KELEMBAGAAN
Adi Sulistyowati

DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO
Bob Tyasika Ananta

DIREKTUR KEUANGAN
Anggoro Eko Cahyo

DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI & OPERASI
Dadang Setiabudi

DIREKTUR KEPATUHAN
Endang Hidayatullah

SEVP BISNIS MENENGAH
Ronny Venir

SEVP PENYELAMATAN & PENYELESAIAN KREDIT
Yuddy Renaldi

DIVISI HUBUNGAN KELEMBAGAAN
G. C. Koen Yulianto

DIVISI JASA TRANSAKSIONAL PERBANKAN
Teddy Wishadi

DIVISI MANAJEMEN WEALTH
Neny Asriani

DIVISI MANAJEMEN RISIKO BANK
Aryanto Purwadi

DIVISI RISIKO KREDIT KORPORASI
Retno Murwani

DIVISI RISIKO KREDIT MENENGAH & USAHA KECIL
Babas Bastaman

DIVISI PEMROSESAN & PENAGIHAN KREDIT KONSUMER
Moh. Hisyam

DIVISI ADMINISTRASI KREDIT
Anang Basuki

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS
Mucharom

DIVISI PENGANGGARAN & PENGENDALIAN KEUANGAN
Putu Bagus Kresna

DIVISI PENGELOLAAN ASET & PENGADAAN
Dandy Perwandi Sjamsudin

DIVISI MANAJEMEN DATA
Sigit Eri Soelistianto

DIVISI SOLUSI & KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI
Muhammad Faisal Jazuli

DIVISI OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI
Afthon Shodaq Noor

DIVISI OPERASIONAL
Ahmad Fikri

UNIT E-CHANNEL
Tennisiana Soekesi

DIVISI KEPATUHAN
Risang Widoyoko

DIVISI HUKUM
Johansyah

DIVISI MANAJEMEN MODAL MANUSIA
Efita Praharani

BNI CORPORATE UNIVERSITY
Wicaksono Sarwo Edi

DIVISI BISNIS MENENGAH
Eko Setiawan

UNIT ANALISA NASABAH & MANAJEMEN PORTOFOLIO
Syafrudin

DIVISI PENYELAMATAN & PENYELESAIAN KREDIT KORPORASI
Iwan Setiawan

DIVISI PENYELAMATAN & PENYELESAIAN KREDIT MENENGAH & USAHA KECIL
Julius D. Arintonang

KOMITE DIREKSI





VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

MENJADI LEMBAGA KEUANGAN YANG UNGGUL DALAM LAYANAN DAN KINERJA

VISI

Dengan penjelasan Visi adalah sebagai berikut:

“Lembaga Keuangan”

- Kebutuhan nasabah terhadap layanan jasa keuangan akan semakin kompleks, meliputi kebutuhan pembiayaan, transaksi, syariah, investasi, asuransi, dan alternatif pembiayaan selain kredit.
- Kebutuhan nasabah yang semakin kompleks tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan perubahan preferensi nasabah. Kemudahan yang diberikan oleh teknologi informasi menyebabkan nasabah membutuhkan produk dan layanan jasa keuangan yang memudahkan dan cepat. Pada saat yang sama, pihak lembaga keuangan harus dapat mengelola risiko yang muncul dengan tepat. Dampak perubahan preferensi nasabah tersebut adalah industri jasa keuangan akan semakin terintegrasi dengan industri non-jasa keuangan.
- Adanya kebijakan bagi pelaku industri jasa keuangan untuk melaksanakan tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi yang melibatkan lembaga jasa keuangan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan di bidang moneter dan fiskal serta pengawasan industri jasa keuangan.

“Unggul dalam Layanan”

- Layanan merupakan nilai utama yang ditawarkan kepada nasabah dari perusahaan penyedia jasa keuangan.

- Layanan yang unggul akan menjadi nilai tambah bagi nasabah dalam memilih lembaga keuangan.
- Layanan dalam lembaga keuangan dituntut untuk dapat memenuhi semua aspek kebutuhan nasabah yang relevan sehingga menjadikan lembaga keuangan sebagai *lifetime financial partner* dan mampu menyediakan *total financial solution*, termasuk dalam melayani ekosistem bisnis secara terintegrasi.

“Unggul dalam Kinerja”

- Kinerja keuangan adalah sebagai indikator keberhasilan Perusahaan dalam melakukan operasinya dalam bentuk nilai kembali keuangan (*financial return*). Kinerja keuangan yang berkualitas akan meyakinkan investor, nasabah, karyawan, industri bahwa investasi dan risikonya dikelola dengan baik, menghasilkan nilai tambah, dan berkembang secara berkelanjutan.
- Kinerja non-keuangan yang unggul akan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan yang lebih luas. Indikator kinerja non-keuangan yang dapat dipakai antara lain dukungan terhadap program-program Pemerintah seperti inklusi keuangan atau program kemitraan, kontribusi terhadap lingkungan dan komunitas seperti penerapan keuangan berkelanjutan atau bina lingkungan, dan indikator non-keuangan lain seperti kualitas dan kecepatan layanan atau jangkauan operasional lembaga keuangan.



- **Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama.**
- **Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.**
- **Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.**
- **Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas.**
- **Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri.**

MISI

Adapun penjabaran atas Misi BNI tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama dengan penjabaran sebagai berikut:
 - a. Menyediakan produk/jasa-jasa lembaga keuangan yang lengkap, terpadu, berkualitas, terpercaya, dan dapat diandalkan;
 - b. Memberikan layanan "one stop solution" baik untuk nasabah bisnis maupun individual;
 - c. Memberikan kualitas produk dan layanan yang *best-in-class*;
 - d. Meningkatkan *customer experience* dalam proses-proses yang dianggap kritical oleh nasabah;
 - e. Secara proaktif melakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan nasabah akan kualitas produk/jasa yang ditawarkan BNI;
 - f. Memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi.
2. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor, yang dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pencapaian laba (profitabilitas) usaha maksimal;
 - b. Pertumbuhan yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan (*sustainable growth*);
 - c. Lembaga Keuangan yang sehat;
 - d. Pengendalian biaya (*cost effectiveness*);
 - e. Harga saham yang stabil dan terus meningkat.
3. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi, yang dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pemberian kesempatan yang sama dan luas bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepastian jenjang Karier;
 - b. Menciptakan dan mendukung program *talent mangement* untuk mencetak pemimpin di masa yang akan datang baik untuk BNI maupun untuk Indonesia;
 - c. Menyediakan fasilitas dan lingkungan kerja yang aman, nyaman, harmonis sehingga menunjang sasaran peningkatan produktivitas.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas, yang dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Aktif melayani kebutuhan perbankan segenap lapisan masyarakat;
 - b. Aktif mencari dan memasuki bisnis baru yang sejalan dengan peraturan dan regulasi terbaru;
 - c. Aktif mengembangkan bisnis internasional untuk perluasan bisnis di negara yang prospektif;
 - d. Aktif meningkatkan kualitas lingkungan dan komunitas yang sejalan dengan pengembangan bisnis.
5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri, yang dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan manajemen risiko yang terintegrasi;
 - b. Mengakomodasi *whistle blower* untuk melindungi kepentingan Perusahaan dan masyarakat;
 - c. Komunikasi aktif antara Manajemen Perusahaan dengan seluruh pegawai dan pemimpin yang dapat menjadi *role model*;
 - d. Aktif meng-*update* ketentuan, peraturan, serta melaksanakannya secara disiplin dan tersistem, untuk menjadi lembaga keuangan yang terpercaya.



REVIEW VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang BNI 2019-2023 (*Corporate Plan 2019-2023*) yang dimulai sejak awal 2018, telah dilaksanakan peninjauan kembali terhadap Visi dan Misi perusahaan. Penyusunan rencana jangka panjang tersebut telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan BNI antara lain Dewan Komisaris, Manajemen, perusahaan anak, perwakilan semua lapisan pegawai, dan masyarakat serta ahli-ahli terkait industri keuangan melalui metode survei, wawancara, dan diskusi bersama. Dari aspirasi pemangku kepentingan tersebut dan diselaraskan dengan kondisi eksternal serta internal terkini maka dapat disarikan bahwa BNI dalam jangka panjang diharapkan "Menjadi Salah Satu Lembaga Keuangan Paling *Profitable* di Indonesia".

Dengan mempertimbangkan aspirasi tersebut, Manajemen telah menetapkan bahwa Visi dan Misi BNI yang ada saat ini masih sangat relevan dalam jangka panjang. Penjabaran Visi dan Misi dalam rangka mewujudkan aspirasi tersebut dapat dijelaskan pada bagian lain Laporan Tahunan ini mengenai Penjabaran Visi dan Misi. Visi dan Misi tersebut secara resmi telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang BNI 2019-2023 sesuai persetujuan Dewan Komisaris No. DK/117 tanggal 22 Oktober 2018 yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/385/DIR/R tanggal 9 November 2018.



BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Kerja BNI yang disebut dengan “PRINSIP 46” merupakan tuntunan perilaku bagi Insan BNI

PRINSIP 46

4 NILAI BUDAYA KERJA BNI

PROFESIONALISME

Memiliki kompetensi andal dan berkomitmen memberikan hasil terbaik.

INTEGRITAS

Berkomitmen untuk selalu konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh kata hati dan kepercayaan pada prinsip-prinsip kebenaran yang hakiki.

ORIENTASI PELANGGAN

Senantiasa mengutamakan kepentingan pelanggan dengan dilandasi sikap saling menghargai dan hubungan yang sinergis.

PERBAIKAN TIADA HENTI

Senantiasa mencari peluang dan solusi untuk meningkatkan layanan dan kinerja yang melampaui harapan Pelanggan.

6 PERILAKU UTAMA INSAN BNI

- Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik
- Jujur, Tulus dan Ikhlas
- Disiplin, Konsisten dan Bertanggung jawab
- Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis
- Senantiasa Melakukan Penyempurnaan
- Kreatif dan Inovatif



PROFIL

DEWAN KOMISARIS



Ari Kuncoro
(Komisaris Utama/Komisaris Independen)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada tahun 1962, saat ini berusia 56 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia, pada tahun 1986 dan gelar *Master of Art* dari University of Minnesota, USA pada tahun 1990, serta gelar Ph.D. di bidang Ekonomi dari Brown University, USA pada tahun 1994. Beliau pernah mengikuti Pelatihan *English to Academic Teaching* pada tahun 1992 di Brown University (Universitas Brunensis), serta memberikan Kuliah Umum Kursus Keuangan Daerah pada tahun 2014 di LPEM FEB UI, *Cooperative and Attachment AACSB* pada tahun 2015 sampai sekarang dari Lembaga Akreditasi Internasional AACSB International. Tahun 2018, aktif mengikuti Seminar *1st Roundtable on Southeast Asian Economic and Trade* dan *CSIS Global Leaders Forum* di Washington DC serta Pelatihan *Key Risk Management Challenges* pada tahun 2018. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2017 (Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Komisaris Independen maksimal level 2).

Riwayat Jabatan

Sejak 1986, Beliau mengawali Karier di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Dalam sepanjang Kariernya, Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi periode 1995 - 1998, Wakil Dekan Bidang Pengajaran, Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat periode 1998 - 2001.

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen di BNI, saat ini Beliau juga menjabat sebagai Direktur *East Asian Economist Association* sejak 2013 dan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 2013, serta sebagai Anggota Forum Komunikasi Riset Kestabilan Sistem Keuangan Bank Indonesia sejak tahun 2017. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Dasar Pengangkatan

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama BNI dalam Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 2 November 2017, berdasarkan Akta Keputusan RUPSLB No. 2 tanggal 2 November 2017 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 14 Maret 2018. Sejak 5 April 2018, mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Periode Menjabat

2 November 2017 – sampai penutupan RUPS 2022 (Periode Pertama).



Wahyu Kuncoro
(Wakil Komisaris Utama)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Surakarta pada tahun 1969, saat ini berusia 49 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana bidang Pertanian dari Universitas Sebelas Maret, pada tahun 1993 dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas YAI pada tahun 2003, kemudian memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005. Aktif mengikuti Pelatihan *Risk Management on Credit Process* di tahun 2018. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) pada tahun 2016 (Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Komisaris maksimal level 2).

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali Karier di Kementerian Keuangan sejak 1996 dan sepanjang kariernya Beliau pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III, Kementerian BUMN (2013), Asisten Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Asuransi, Kementerian BUMN (2014), Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Kementerian BUMN (2015), Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN (2016) dan Komisaris PT Angkasa Pura II (Persero) (2012-2016).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai anggota Komisaris di BNI, saat ini Beliau juga menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi sejak 2016. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan Akta RUPS No. 8 tanggal 10 Maret 2016 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 25 Januari 2017. Selanjutnya dalam RUPS tanggal 16 Maret 2017 dialih tugaskan menjadi Wakil Komisaris Utama BNI berdasarkan akta RUPS No. 42 tanggal 16 Maret 2017. Sejak tanggal 14 Februari 2017 mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Periode Menjabat

10 Maret 2016 – sampai penutupan RUPS 2021 (Periode Pertama).



Revrisond Baswir
(Komisaris Independen)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Yogyakarta. lahir di Pekanbaru pada tahun 1958, saat ini berusia 60 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana pada bidang Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1983, gelar *Master of Business Administration* dari Western Michigan University, Amerika Serikat pada tahun 1991 dan gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2011. Beliau aktif mengikuti pelatihan *Executive Risk Management Refreshment Program* serta mengikuti seminar "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan" pada tahun 2018. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) pada tahun 2016 (Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Komisaris Independen maksimal level 2).

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali kariernya sebagai Dosen di FEB UGM sejak 1983. Sepanjang kariernya Beliau pernah menjabat sebagai Staf Ahli Kementerian HAM RI (2000), Staf Ahli Dewan Perwakilan Daerah RI (2005), Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM (2005-2007 dan 2013-2014), Anggota Komite Kebijakan Publik Kementerian BUMN (2006-2011 dan 2015-2016), Komisaris dan Ketua Komite Audit PTPN XIII, Pontianak (2008-2013), Komisaris PTPN VIII, Bandung (2013-2014), Komisaris dan Ketua Komite Audit PTPN XI, Surabaya (2014-2015).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai anggota Komisaris Independen di BNI, saat ini Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di Perusahaan maupun lembaga lain. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Dasar Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Akta RUPS No. 34 tanggal 17 Maret 2015 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 24 Juni 2015. Kemudian dalam RUPS tanggal 10 Maret 2016 dialihugaskan menjadi Komisaris Independen dan mendapatkan persetujuan OJK pada tanggal 25 Januari 2017. Sejak tanggal 24 Juni 2015 mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Selanjutnya, masing-masing sejak tanggal 14 Februari 2017 dan 30 Maret 2017, mendapat penugasan khusus sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Periode Menjabat

10 Maret 2016 – sampai penutupan RUPS 2021 (Periode Pertama).



Pataniari Siahaan
(Komisaris Independen)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Balige pada tahun 1946, saat ini berusia 72 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil dari Universitas Trisakti pada tahun 1978 dan gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil Transportasi dari Universitas Krisnadipayana pada tahun 2006, kemudian memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti pada tahun 2007 serta gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti pada tahun 2011. Aktif mengikuti pelatihan *Executive Risk Management Refreshment Program* di Frankfurt&Bern, Jerman serta Seminar “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” di tahun 2018. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) pada tahun 2016 (Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Komisaris Independen maksimal level 2).

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali Karier sebagai anggota DPR/MPR RI sejak 1999. Sepanjang kariernya Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Tim Sosialisasi Putusan MPR RI bidang Undang-undang Dasar RI tahun 1945, Pimpinan bidang Legislasi DPR RI dan berbagai jabatan ketua dan anggota pada DPR/MPR RI.

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai anggota Komisaris Independen di BNI, saat ini Beliau juga menduduki jabatan sebagai Anggota Lembaga Pengkajian MPR-RI sejak 2015-sekarang, Dewan Redaksi Jurnal Hukum Prioris sejak 2013-Sekarang, dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta sejak 2011-Sekarang. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Dasar Pengangkatan

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Akta RUPS No. 34 tanggal 17 Maret 2015 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 25 Juni 2015. Kemudian dalam RUPS tanggal 10 Maret 2016 dialih tugaskan menjadi Komisaris Independen berdasarkan Akta RUPS Tahunan No. 8 tanggal 10 Maret 2016 dan mendapatkan persetujuan OJK pada tanggal 25 Januari 2017. Sejak tanggal 25 Juni 2015 mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dan sejak tanggal 30 Maret 2017 mendapat penugasan khusus sebagai Ketua Komite Audit.

Periode Menjabat

10 Maret 2016 – sampai penutupan RUPS 2021 (Periode Pertama).



Ahmad Fikri Assegaf
(Komisaris Independen)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada tahun 1968, saat ini berusia 50 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, pada tahun 1991 dan gelar Magister Hukum dari Cornell Law School, Ithaca, New York pada tahun 1994. Aktif mengikuti Seminar “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” di tahun 2018. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2017 (Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Komisaris Independen maksimal level 2).

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali Karier sebagai advokat di salah satu kantor hukum di Jakarta pada tahun 1993. Pada tahun 2000 turut mendirikan www.hukumonline.com, portal hukum terbesar di Indonesia. Kemudian pada tahun 2001 turut mendirikan kantor hukum Assegaf, Hamzah & Partners. Beliau pernah menjabat sebagai Managing Partner di Assegaf Hamzah & Partner (2008 - 2016), Anggota Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (2015-2017).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai anggota Komisaris Independen di BNI, saat ini Beliau juga menjabat sebagai *Vice Chairman Regional Management Council* di Rajah Tann Asia (tahun 2016 - sekarang) dan *Co-Managing Partner* Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners (2017-sekarang). Beliau juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (2015-2020), Anggota Panitia Seleksi Anggota Komisi Yudisial (2015-sekarang) dan Anggota Dewan Kehormatan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (2015-2018). Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Dasar Pengangkatan

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 Maret 2017 berdasarkan Akta RUPS No. 42 tanggal 16 Maret 2017 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 19 Juli 2017. Sejak tanggal 31 Juli 2017 mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Audit, dan sejak tanggal 5 April 2018 mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Periode Menjabat

16 Maret 2017 – sampai penutupan RUPS 2022 (Periode Pertama)



Sigit Widyawan
(Komisaris Independen)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Solo. Lahir di Wonogiri pada tahun 1965, saat ini berusia 53 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Negeri Sebelas Maret pada tahun 1988, gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2001. Aktif mengikuti Seminar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta pelatihan *Key Risk Management Challenges in 2018*. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2018 (Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Komisaris Independen maksimal level 2).

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali Karier di PT Wijaya Karya (Persero) sebagai Staf Keuangan Divisi Perdagangan sejak 1989 dan sepanjang kariernya Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perpajakan pada Divisi Produk Beton PT Wijaya Karya (Persero) (tahun 1994 - 1997), Kepala Bagian Keuangan PT Wijaya Karya Beton (tahun 1997 - 2001), Direktur Keuangan Roda Jati Grup (tahun 2002 - 2013), Direktur PT Roda Pembangunan Jaya (2003 - 2015), dan Komisaris Independen PT Jasamarga (Persero) Tbk (2015 - 2018).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai anggota Komisaris Independen di BNI, saat ini Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di Perusahaan maupun lembaga lain. Dimulai tanggal 13 September 2018, mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat pertama kali sebagai anggota Komisaris Independen BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Maret 2018 sebagai Komisaris BNI berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 20 Maret 2018 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 7 September 2018. Sejak tanggal 13 September mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Periode Menjabat

20 Maret 2018 – sampai penutupan RUPS 2023 (Periode Pertama).



Bistok Simbolon
(Komisaris)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Tapanuli Utara pada tahun 1956, saat ini berusia 62 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara, pada tahun 1984 dan gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2004. Aktif mengikuti pelatihan *Key Risk Management Challenges in 2018* dan mengikuti Seminar "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan" pada tahun 2018. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2017 (Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Komisaris maksimal level 2).

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali Karier di Sekretariat Kabinet sejak 1986. Sepanjang kariernya Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Polkam, Pertahanan, Ratifikasi dan Permasalahan Hukum Sekretariat Kabinet (2006-2011), Deputy Sekretariat Kabinet Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (2011-2015) dan terakhir sebagai Wakil Sekretaris Kabinet (2015-Januari 2017).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai Komisaris di BNI, saat ini Beliau juga menjabat sebagai Staf Khusus Sekretariat Kabinet sejak Februari 2017. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 12 Januari 2016 berdasarkan Akta RUPSLB No. 1 tanggal 12 Januari 2016 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 10 Mei 2016. Pada tanggal 10 Mei 2016 mengemban tugas sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Pada tanggal 14 Februari 2017 memperoleh tugas khusus sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

Periode Menjabat

12 Januari 2016 – sampai penutupan RUPS 2021 (Periode Pertama).



Joni Swastanto
(Komisaris)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Yogyakarta pada tahun 1956, saat ini berusia 62 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1981 dan Magister jurusan ekonomi dari Colorado State University, USA pada tahun 1985 serta gelar Doktor jurusan Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Aktif mengikuti pelatihan *Key Risk Management Challenges in 2018* dan mengikuti Seminar “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” pada tahun 2018. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2015 dan Refreshmentnya pada tahun 2017 (Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Komisaris maksimal level 2).

Riwayat Jabatan

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Departemen Pengawasan Bank 3, Bank Indonesia (2008), Direktur Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia (2008-2011), Kepala Perwakilan Semarang, Bank Indonesia (2011-2013), Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia (2013), Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (2013-2015), Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB, Otoritas Jasa Keuangan (Juni 2015-2016).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai anggota Komisaris di BNI, saat ini Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di Perusahaan maupun lembaga lain. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 10 Maret 2016 sebagai Komisaris BNI berdasarkan Akta RUPS No. 8 tanggal 10 Maret 2016 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 20 April 2016. Dimulai tanggal 20 April 2016 mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Kemudian, tanggal 14 Februari 2017 mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan tanggal 14 September 2017 mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Tata Kelola Terintegrasi.

Periode Menjabat

10 Maret 2016 – sampai penutupan RUPS 2021 (Periode Pertama).



Marwanto Harjowiryo
(Komisaris)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Yogyakarta pada tahun 1959, saat ini berusia 59 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1983 dan gelar *Master of Arts* dari Vanderbilt University, USA pada tahun 1991 serta gelar Doktor bidang Ekonomi Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009. Beliau mengikuti pelatihan *A Three-day program of the Training and Directorship Certification for Commissioners and Directors*, Kementerian BUMN di Jakarta Tahun 2007, Pelatihan *Executive Education Training Program: Senior Leadership Program*, University of Melbourne di Australia Tahun 2011 serta Pelatihan *Leadership Decision Making*, Harvard Kennedy School di Amerika Serikat tahun 2013, dan berbagai *short course* yang berkaitan dengan *fiscal policy* di IMF, World Bank maupun di Harvard University. Pada tahun 2018, aktif mengikuti Pelatihan *Executive Risk Management Refreshment Program* di Jerman dan Pelatihan *Key Risk Management Challenges in 2018* di Makassar. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2017 (Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Komisaris maksimal level 2).

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali Karier di Kementerian Keuangan sejak 1983 dan sepanjang kariernya Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Analisa APBN, Departemen Keuangan (1998-2001), Kepala Biro Kerja

sama Luar Negeri, Departemen Keuangan (2003-2004), Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Departemen Keuangan (2004-2006), Ketua Pelaksana Harian merangkap Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi, Departemen Keuangan (2007-2009), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara (2006-2009), *Executive Director, Asian Development Bank* (2009-2011) dan sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (2011-2013).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai anggota Komisaris di BNI, saat ini Beliau juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sejak 2013. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 Maret 2017 berdasarkan Akta RUPS No. 42 tanggal 16 Maret 2017 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 19 Juli 2017. Sejak tanggal 31 Juli 2017 mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Periode Menjabat

16 Maret 2017 – sampai penutupan RUPS 2021 (Periode Pertama).



PROFIL DIREKSI



Achmad Baiquni
(Direktur Utama)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Surabaya pada tahun 1957, saat ini berusia 61 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Studi Pembangunan dari Universitas Padjadjaran, pada tahun 1982 dan gelar *Master of Business Management* dari Asian Institute of Management, Makati, Filipina pada tahun 1992. Pada tahun 2018 beliau aktif mengikuti pelatihan *Discovery and Dream Workshop* dalam rangka penyusunan *Corporate Plan* BNI 2019-2023 yang diselenggarakan oleh BNI dan MC Kinsey serta mengikuti *Compliance Forum* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang diselenggarakan BNI. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 5 pada Program Eksekutif yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) pada tahun 2006 beserta *Refreshment* terakhirnya pada tahun 2017.

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali Karier di BNI sejak tahun 1984 dan sepanjang kariernya Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2003-2006), Direktur Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006-2008), Direktur Bisnis Usaha Kecil Menengah dan Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2008-2010), dan Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2015).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai Direktur Utama BNI, saat ini Beliau tidak merangkap jabatan baik di Perusahaan maupun lembaga lainnya. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Utama BNI sejak 17 Maret 2015, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 34 tanggal 17 Maret 2015 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-63/D.03/2015 tanggal 16 April 2015.

Periode Menjabat

17 Maret 2015 – sampai penutupan RUPS 2020 (Periode Pertama).



Herry Sidharta
(Wakil Direktur Utama)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Yogyakarta pada tahun 1957, saat ini berusia 61 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Pancasila Jakarta, pada tahun 1982 dan gelar *Master of Business Administration* dari Rensselaer Polytechnic Institute, New York, USA pada tahun 1995. Pada tahun 2018 beliau aktif mengikuti pelatihan *Discovery and Dream Workshop* dalam rangka penyusunan *Corporate Plan* BNI 2019-2023, *Design Workshop* dalam rangka penyusunan *Corporate* oleh BNI 2019-2023 yang diselenggarakan oleh BNI dan MC Kinsey, Peluncuran dan bedah buku "Turbulensi Sport di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga, serta mengikuti *Workshop Delivery* dalam rangka penyusunan *Corporate Plan* BNI 2019-2023, *Digital Leadership Forum*, *Business Meeting* BNI Semester II 2018, *Refreshment* APU PPT, *Corporate Governance Perception Index* yang diselenggarakan oleh BNI, pembicara dalam kegiatan Festival *Entrepreneurship* Pancasila yang diselenggarakan oleh BSMR yang diselenggarakan BNI pada Tahun 2018. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 5 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2015 beserta *Refreshment*nya pada tahun 2017.

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali karier di BNI sejak 1983 dan sepanjang kariernya Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Korporasi (2008-2009), Pemimpin Divisi Usaha Menengah (2009-2010), Pemimpin Divisi Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010), Direktur Keuangan Perum Jamkrindo (2011-2013), Direktur Operasi Perum Jamkrindo (2013-2014), Direktur SDM dan Umum Perum Jamkrindo (2014-2015), dan Direktur Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BNI, saat ini Beliau tidak merangkap jabatan baik di Perusahaan maupun lembaga lainnya. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur BNI sejak 17 Maret 2015, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 34 tanggal 17 Maret 2015 dan pengalihan menjadi Wakil Direktur Utama dengan meneruskan masa jabatan Direktur yang diangkat pada RUPS Tahunan 17 Maret 2015.

Periode Menjabat

17 Maret 2015 – sampai penutupan RUPS 2020 (Periode Pertama).



Putrama Wahyu Setyawan
(Direktur Bisnis Korporasi)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bekasi. Lahir di Yogyakarta pada tahun 1969, saat ini berusia 49 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana bidang Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada, pada tahun 1994 dan gelar Master Akuntansi Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1996. Pada tahun 2018 beliau aktif mengikuti pendidikan non formal, antara lain pelatihan *Discovery and Dream Workshop* dalam rangka penyusunan *Corporate Plan* BNI 2019-2023 yang diselenggarakan oleh BNI dan MC Kinsey. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) pada tahun 2016 dan telah mengikuti *Refreshmentnya* pada tahun 2018.

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali Karier di BNI sejak 1998 dan sepanjang kariernya Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011-2014), Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2014 – 2015), Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial dan Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015 – 2016), dan *Senior Executive Vice President (SEVP) Bisnis Menengah* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai Direktur BNI, saat ini Beliau tidak merangkap jabatan baik di perusahaan maupun lembaga lainnya. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur BNI sejak 10 Maret 2016, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 8 tanggal 10 Maret 2016 dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-121/D.03/2016 tanggal 15 Juli 2016.

Periode Menjabat

10 Maret 2016 – sampai penutupan RUPS 2021 (Periode Pertama).



Adi Sulistyowati
(Direktur Hubungan Kelembagaan)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Purbalingga pada tahun 1967, saat ini berusia 51 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana, pada tahun 1993. Aktif mengikuti pelatihan antara lain *Discovery and Dream Workshop* dalam rangka penyusunan *Corporate Plan* BNI 2019-2023 yang diselenggarakan oleh BNI dan MC Kinsey, berpartisipasi *Focus Group Discussion (FGD)* pada "Implementasi Produk Unggulan Kawasan Pedesaan dengan Pola Kemitraan Kementerian Desa" yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2015 dan *refreshmentnya* pada tahun 2017.

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali Karier di BNI sejak 1990 dan sepanjang kariernya Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Wilayah Jakarta Senayan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010-2012) dan Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2012 -2015).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai Direktur BNI, saat ini Beliau tidak merangkap jabatan baik di BNI maupun lembaga lainnya. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur BNI sejak 17 Maret 2015, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 34 tanggal 17 Maret 2015 dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-92/D.03/2015 tanggal 22 Mei 2015.

Periode Menjabat

17 Maret 2015 – sampai penutupan RUPS 2020 (Periode Pertama).



Rico Rizal Budidarmo

(Direktur *Treasury & International Banking*)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Bandung pada tahun 1963, saat ini berusia 55 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, pada tahun 1987 meraih gelar *Magister of Business Administration (MBA) in Finance & MIS* pada Stern Business School dari New York University pada tahun 1996, dan meraih gelar Doktor Manajemen Bisnis pada bidang *Artificial Intelligence* dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2010, serta meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017. Pada tahun 2018, aktif mengikuti pelatihan *Discovery and Dream Workshop* dalam rangka penyusunan *Corporate Plan BNI 2019-2023* yang diselenggarakan oleh BNI dan MC Kinsey, Pelatihan Sertifikasi *Treasury Level Advance* yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan serta berpartisipasi pada konferensi "*Daiwa Investment Conference Tokyo 2018*" di Tokyo yang diselenggarakan oleh Daiwa Capital Markets America Inc. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2012 dan telah mengikuti *Refreshment Manajemen Risiko* pada tahun 2017.

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali Karier di BRI sejak tahun 1989 dan sepanjang Kariernya Beliau pernah menjabat sebagai GM/ EVP *Risk Management Division* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009-2013), GM/EVP *Treasury* PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2013-2014), Direktur *Risk and Compliance* PT Bank Tabungan Negara Tbk (2014 - 2015).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai Direktur BNI, saat ini Beliau juga menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan *Bank's Risk Management (BaRa)*. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur BNI sejak 17 Maret 2015, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 34 tanggal 17 Maret 2015 dan Keputusan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-65/D.03/2015 tanggal 16 April 2015.

Periode Menjabat

17 Maret 2015– sampai penutupan RUPS 2020 (Periode Pertama).



Anggoro Eko Cahyo
(Direktur Keuangan)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Tangerang. Lahir di Jakarta pada tahun 1969, saat ini berusia 49 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Insinyur bidang Teknik dan Manajemen Industri dari Institut Teknologi Indonesia, pada tahun 1992 dan gelar Master Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002. Pada tahun 2018 beliau aktif mengikuti pelatihan antara lain mengikuti *Discovery and Dream Workshop* dalam rangka Penyusunan *Corporate Plan* BNI 2019-2023 yang diselenggarakan oleh BNI dan McKinsey, mengikuti Program *Executive Education "Talent Management"* di Harvard Business School Boston, mengikuti Program *Executive Education "Design Thinking Program"* di Stanford University San Fransisco, serta berpartisipasi sebagai pembicara pada Seminar "Tren Ekonomi Digital : Era Transaksi Elektronik, Peluang dan Tantangan" yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia pada tahun 2018, berpartisipasi dalam *Focus Group Discussion (FGD) "Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia"* yang diselenggarakan oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2017.

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali karier di BNI sejak 1996 dan sepanjang kariernya Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Kota PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

(2010-2011), Pemimpin Wilayah Jakarta BSD PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011), Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011-2012) dan Pemimpin Divisi *Human Capital* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2012-2015).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai Direktur BNI, saat ini Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sejak 2016. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur BNI pada tanggal 17 Maret 2015, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 53 Tanggal 27 Mei dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-90/D.03/2015 tanggal 22 Mei 2015.

Periode Menjabat

17 Maret 2015– sampai penutupan RUPS 2020 (Periode Pertama).



Catur Budi Harto
(Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Demak pada tanggal 13 tahun 1964, saat ini berusia 54 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Agronomi dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1986 dan gelar Master Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya pada tahun 2002. Aktif mengikuti pelatihan antara lain *Discovery and Dream Workshop* dalam rangka penyusunan *Corporate Plan* BNI 2019-2023 yang diselenggarakan oleh BNI dan MC Kinsey, serta mengikuti *National Startup Agritech Conference 2018* yang diselenggarakan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2018. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) pada tahun 2016.

Riwayat Jabatan

Beliau memulai karier di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan selama mengemban tugas, Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Kartu Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011-2013), Pemimpin Wilayah Banjarmasin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2013-2014), Kepala Divisi *Mass Banking* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015), *Senior Executive Vice President*

Jaringan dan Layanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016), dan Direktur *Commercial Funding, Digital Banking & Distribution* PT Bank Tabungan Negara (2016-2017).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai Direktur BNI, saat ini Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Certified Wealth Manager's Association sejak 25 April 2017. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BNI sejak 16 Maret 2017, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 42 tanggal 16 Maret 2017 dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-136/D.03/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Periode Menjabat

16 Maret 2017 – sampai penutupan RUPS 2022 (Periode Pertama).



Bob Tyasika Ananta
Direktur Manajemen Risiko

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Surakarta pada tahun 1963, saat ini berusia 55 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1986 dan gelar *Master of Finance* dari University of Oregon, USA pada tahun 1989. Aktif mengikuti pelatihan *ASEAN Financial Innovation Network* yang diselenggarakan oleh ASEAN Financial Innovation, *Discovery and Dream Workshop* dalam rangka penyusunan *Corporate Plan BNI 2019-2023* yang diselenggarakan oleh BNI dan MC Kinsey, *Workshop Early Warning System* Konglomerasi Keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, *Risk Management Refresher Program* yang diselenggarakan oleh BARa Risk Forum serta Uji *Refreshment Asesor* yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2018. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2017.

Riwayat Jabatan

Beliau mengawali Karier di BNI pada tahun 1996 dan sepanjang kariernya Beliau pernah menjabat sebagai *General Manager* Kantor Cabang Luar Negeri BNI di Hongkong (2008-2010), Pemimpin Divisi Internasional (2010-2011), dan Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2011-2015).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai Direktur BNI, saat ini Beliau juga menjabat sebagai Ketua *Indonesia Change Management Forum* (ICMF). Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur BNI sejak 17 Maret 2015, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 34 tanggal 17 Maret 2015 dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-64/D.03/2015 tanggal 16 April 2015.

Periode Menjabat

17 Maret 2015 – sampai penutupan RUPS 2020 (Periode Pertama).



Endang Hidayatullah
(Direktur Kepatuhan)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor. Lahir di Sukabumi pada tahun 1970, saat ini berusia 48 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum Perdata dari Universitas Padjajaran pada tahun 1993, Magister Manajemen pada bidang Manajemen Pemasaran dari STIE Nusantara pada tahun 2005. Aktif mengikuti pelatihan di antaranya *Discovery and Dream Workshop* dalam rangka penyusunan *Corporate Plan BNI 2019-2023* yang diselenggarakan oleh BNI dan MC Kinsey, *Compliance Forum Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan* yang diselenggarakan oleh BNI, *Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Bidang General Banking* yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, *Workshop tentang "Isu-Isu Hukum Terkait Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia"* yang diselenggarakan oleh Forum Hukum Bisnis dan Kepailitan serta berpartisipasi pada *International Business Integrity Conference (IBIC) 2018* yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 5 yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) pada tahun 2018.

Riwayat Jabatan

Beliau memulai kariernya di BNI pada tahun 1996 dan sepanjang kariernya Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2012 - 2015), dan Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015 - 2018).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai Direktur BNI, saat ini Beliau juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pelatihan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan dan *Steering Committee* dalam Forum *Human Capital Indonesia*. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BNI sejak 20 Maret 2018, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 20 Maret 2018 dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 13/KDK.03/2018 tanggal 05 Juli 2018.

Periode Menjabat

20 Maret 2018– sampai penutupan RUPS 2023 (Periode Pertama).



Tambok P. Setyawati
(Direktur Retail Banking)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada tahun 1964, saat ini berusia 54 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada bidang Ilmu Tanah dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Magister Manajemen pada bidang Manajemen Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1995. Aktif mengikuti pelatihan *Risk Management Refresher Program* yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)), *Discovery and Dream Workshop* dalam rangka penyusunan *Corporate Plan BNI 2019-2023* yang diselenggarakan oleh BNI dan MC Kinsey, serta berpartisipasi Seminar Bank Indonesia "*Payment Gateway*" yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2018. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 5 pada tahun 2016 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dan telah mengikuti *Refreshment Manajemen Risiko* pada tahun 2017.

Riwayat Jabatan

Beliau memulai kariernya di BNI sejak tahun 1996 dan selama berkarier Beliau pernah menjabat sebagai CEO Region Jakarta Kemayoran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

(2015 - 2016) dan SEVP *Digital Banking* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016). Selanjutnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2016 - 2018).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai Direktur BNI, saat ini Beliau tidak merangkap jabatan lainnya baik di BNI maupun lembaga lainnya. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BNI sejak 20 Maret 2018, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 20 Maret 2018 dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 11/KDK.03/2018 tanggal 5 Juli 2018.

Periode Menjabat

20 Maret 2018 – sampai penutupan RUPS 2023 (Periode Pertama).



Dadang Setiabudi
(Direktur Teknologi Informasi dan Operasi)

Kewarganegaraan, Domisili, Usia dan Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Cimahi pada tahun 1962, saat ini berusia 56 tahun per Desember 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada bidang Akuntansi Universitas Padjajaran pada tahun 1987 dan gelar Magister Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1999. Pada tahun 2018, aktif mengikuti pelatihan *Discovery and Dream Workshop* dalam rangka penyusunan *Corporate Plan* BNI 2019-2023 yang diselenggarakan oleh BNI dan MC Kinsey, Konferensi Tahunan "*Oracle Open World*" di San Fransisco yang diselenggarakan oleh Oracle Corporation, berpartisipasi pada Seminar *Irving Fisher Committee Internasional on Big Data* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dan berpartisipasi sebagai pembicara pada forum IBEX 2018 yang diselenggarakan oleh Perbanas. Beliau telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 5 yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) pada tahun 2018.

Riwayat Jabatan

Beliau memulai kariernya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 1988. Sepanjang kariernya Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Jaringan Kerja Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada

tahun 2013 dan sebagai Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan (2014-2016). Bergabung dengan BNI pada tahun 2016, sebelum menjabat sebagai Direktur, Beliau pernah menjabat sebagai SEVP Teknologi Informasi dan Digital Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018).

Rangkap Jabatan dan Hubungan Afiliasi

Selain menjabat sebagai Direktur BNI, Beliau tidak merangkap jabatan lain baik di BNI maupun lembaga lainnya. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dasar Pengangkatan

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BNI sejak 20 Maret 2018, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 20 Maret 2018 dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 12/KDK.03/2018 tanggal 5 Juli 2018.

Periode Menjabat

20 Maret 2018 – sampai penutupan RUPS 2023 (Periode Pertama).



PROFIL

SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT



Yuddy Renaldi

SEVP Penyelamatan & Penyelesaian Kredit

Saat ini berusia 54 tahun. Meraih gelar Sarjana S1 di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1990 dan S2 di bidang Manajemen di STIE IPWI Jakarta. Telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko level 5 yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR). Sepanjang tahun 2018, Beliau aktif mengikuti berbagai pelatihan di antaranya *Discovery and Dream Workshop* dalam rangka penyusunan *Corporate Plan BNI 2019-2023* yang diselenggarakan oleh BNI dan MC Kinsey. Menjabat sebagai SEVP Penyelamatan & Penyelesaian Kredit berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. DIR/298 tanggal 05 Mei 2017.



Ronny Venir

SEVP Bisnis Menengah

Saat ini berusia 51 tahun. Meraih gelar Sarjana S1 di bidang Peternakan dari Universitas Padjajaran pada tahun 1993 dan Magister Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2003. Memulai Karier di BNI sejak tahun 1995 dan selama berkarier beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Wilayah Padang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016), Pemimpin Wilayah Jakarta Kota PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017) dan Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018). Menjabat sebagai SEVP Bisnis Menengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/146/DIR/R tanggal 13 April 2018.



Profil Perusahaan



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

Kiryanto

Sekretaris Perusahaan (25 April 2016 - 27 Januari 2019)

Saat ini berusia 54 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Ilmu Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1989 dan memperoleh gelar Magister di bidang *Finance* dari Universitas Indonesia pada tahun 2002. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/161/DIR/R tanggal 18 April 2016. Menjabat Sekretaris Perusahaan dari 25 April 2016 sampai dengan 27 Januari 2019.



Meiliana

Sekretaris Perusahaan (22 Maret 2019 - Saat ini)

Saat ini berusia 46 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Menjabat sebagai PGS Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/01.005265/2019/HCT/R tanggal 28 Januari 2019. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan pada tanggal 22 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/118/DIR/R.



Muhammad Gunawan Putra

Kepala Satuan Pengawasan Internal

Saat ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995, Register Akuntan pada tahun 1996 dan meraih gelar *Master Business Administration* di bidang *Strategic Management* dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2009, serta memperoleh Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2015. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/125/DIR/R tanggal 21 April 2017.



Risang Widoyoko

Pemimpin Divisi Kepatuhan

Saat ini berusia 52 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada di tahun 1992, dan memperoleh gelar Magister Manajemen pada Fakultas Pasca Sarjana Magister Management Universitas Lambung Mangkurat tahun 2004. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/147/DIR/R tanggal 13 April 2018.





Wicaksono Sarwo Edi

Pemimpin Divisi BNI Corporate University

Saat ini berusia 54 tahun. Meraih gelas S1 Teknik Sipil dan S2 Magister Manajemen bidang Keuangan dan Perbankan dari Universitas Gadjah Mada. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi BNI *Corporate University* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/101/DIR/R tanggal 10 April 2017.



Julius D. Aritonang

Pemimpin Divisi Commercial Remedial and Recovery

Saat ini berusia 47 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen Keuangan & Perbankan dari Universitas Indonesia. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi *Commercial Remedial and Recovery* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/147/DIR/R tanggal 13 April 2018.



Iwan Setiawan

Pemimpin Divisi Corporate Remedial and Recovery

Saat ini berusia 50 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Hukum dari Universitas Padjadjaran. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi *Corporate Remedial and Recovery* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/482/DIR/R tanggal 20 Desember 2016.



Anang Basuki

Pemimpin Divisi Administrasi Kredit

Saat ini berusia 49 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Administrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/482/DIR/R tanggal 20 Desember 2016.



Okki Rushartomo Budiprabowo

Pemimpin Divisi Bisnis Kartu

Saat ini berusia 38 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Bisnis Kartu berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/032/DIR/R tanggal 06 Februari 2018.



Benny Yoslim

Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional 1

Saat ini berusia 38 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen Bisnis dari Institut Teknologi Bandung. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Korporasi dan Multinasional 1 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/011/DIR/R tanggal 05 Januari 2018.



Warda Nadjamuddin

Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional 2

Saat ini berusia 47 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen dari Universitas Sam Ratulangi. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Korporasi dan Multinasional 2 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/147/DIR/R tanggal 13 April 2018.



Eko Setiawan

Pemimpin Divisi Bisnis Menengah

Saat ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Magister di bidang *Finance* dari Universitas Gadjah Mada. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Menengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/032/DIR/R tanggal 06 Februari 2018.





Edy Awaludin

Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil - 1

Saat ini berusia 50 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil-1 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/023/DIR/R tanggal 17 Januari 2019.



Bambang Setyatmojo

Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil - 2

Saat ini berusia 49 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil-2 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/368/DIR/R tanggal 1 November 2018.



A.A.G. Agung Dharmawan

Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah

Saat ini berusia 47 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/406/DIR/R tanggal 28 Agustus 2017.



Anang Fauzie

Pemimpin Divisi E-Banking

Saat ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Komputer dari Universitas Gunadarma. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi E-Banking berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/061/DIR/R tanggal 02 Maret 2018.



G.C. Koen Yulianto

Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan

Saat ini berusia 52 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen dari Universitas Semarang. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/411/DIR/R tanggal 30 November 2018.



Johansyah

Pemimpin Divisi Hukum

Saat ini berusia 37 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Hukum berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/342/DIR/R tanggal 12 Oktober 2018.



Eko Setyo Nugroho

Pemimpin Divisi Internasional

Saat ini berusia 49 tahun. Meraih gelar Magister *Business Administration* Teknologi dari Institut Teknologi Bandung. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Internasional berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/147/DIR/R tanggal 13 April 2018.



Teddy Wishadi

Pemimpin Divisi Jasa Transaksional Perbankan

Saat ini berusia 47 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Ilmu Komputer dari Universitas Indonesia. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Jasa Transaksional Perbankan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/482/DIR/R tanggal 20 Desember 2016.





Sigit Eri Soelistianto
Pemimpin Divisi Manajemen Data

Saat ini berusia 49 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Akuntansi dan Magister di bidang Ilmu Akuntansi Jalur Profesional dari Universitas Indonesia. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Data berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/210/DIR/R tanggal 12 Mei 2016.



Efita Praharani
Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia

Saat ini berusia 51 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Psikologi Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar *Master of Science* di bidang Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/292/DIR/R tanggal 23 Agustus 2018.



J. Donny Bima Herjuno
Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer

Saat ini berusia 47 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/274/DIR/R tanggal 03 Agustus 2018.



Aryanto Purwadi
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank

Saat ini berusia 52 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/274/DIR/R tanggal 03 Agustus 2018.



Neny Asriani

Pemimpin Divisi Manajemen *Wealth*

Saat ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen dari Universitas Terbuka. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen *Wealth* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/391/DIR/R tanggal 11 Agustus 2017.



Ahmad Fikri

Pemimpin Divisi Operasional

Saat ini berusia 51 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Hama & Penyakit Tumbuhan dari Universitas Sriwijaya. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Operasional berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/172/DIR/R tanggal 26 April 2016.



Afthon Shodaq Noor

Pemimpin Divisi Operasional Teknologi Informasi

Saat ini berusia 47 tahun. Meraih gelar Magister di bidang *Finance* dari Universitas Gadjah Mada. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Operasional Teknologi Informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/137/DIR/R tanggal 5 April 2018.



Moh. Hisyam

Pemimpin Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer

Saat ini berusia 51 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen dari Universitas Ibnu Khaldun. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/213/DIR/R tanggal 12 Mei 2016.





Putu Bagus Kresna

Pemimpin Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan

Saat ini berusia 46 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/147/DIR/R tanggal 13 April 2018.



Dandy Perwandi Sjamsudin

Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset dan Pengadaan

Saat ini berusia 47 tahun. Meraih gelar Magister di bidang *Finance/Banking* dari Monash University. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset dan Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/036/DIR/R tanggal 7 Februari 2018.



Fauzi

Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan

Saat ini berusia 51 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Pembangunan dari Universitas Andalas. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/032/DIR/R tanggal 06 Februari 2018.



Teddy Erdius E. Saputra

Pemimpin Divisi Pengembangan Perusahaan Anak

Saat ini berusia 49 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pengembangan Perusahaan Anak berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/449/DIR/R tanggal 10 September 2018.



Hermita

Pemimpin Divisi Penjualan Konsumer

Saat ini berusia 50 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Penjualan Konsumer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/032/DIR/R tanggal 06 Februari 2018.



Mucharom

Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

Saat ini berusia 49 tahun. Meraih gelar Magister Manajemen di bidang *International Business* dari Universitas Gadjah Mada. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/126/DIR/R tanggal 25 April 2017.



Babas Bastaman

Pemimpin Divisi Risiko Bisnis Komersial dan Usaha Kecil

Saat ini berusia 51 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Industri Kecil dan Menengah dari Institut Pertanian Bogor. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Risiko Bisnis Komersial dan Usaha Kecil berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/463/DIR/R tanggal 16 Oktober 2017.



Retno Murwani

Pemimpin Divisi Risiko Kredit Korporasi

Saat ini berusia 51 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Ilmu Sosial dari Universitas Gadjah Mada. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit Korporasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/027/DIR/R tanggal 20 Januari 2016.





Muhammad Faisal Jazuli

Pemimpin Divisi Solusi dan Keamanan Teknologi Informasi

Saat ini berusia 42 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen Administrasi Bisnis dari Institut Teknologi Bandung. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Solusi dan Keamanan Teknologi Informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/26/DIR/R tanggal 25 April 2017.



Josdi Situmorang

Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan

Saat ini berusia 54 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/147/DIR/R tanggal 13 April 2018.



Legendariah Bur Rasuanto

Pemimpin Divisi Tresuri

Saat ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Tresuri berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/147/DIR/R tanggal 13 April 2018.



Indomora Harahap

Pemimpin Divisi Komunikasi Pemasaran

Saat ini berusia 49 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen Bisnis dan Administrasi Teknologi dari Institut Teknologi Bandung. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Komunikasi Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/016/DIR/R tanggal 15 Januari 2019.



Novianto Harry Kristono

Pemimpin Kantor Wilayah Medan

Saat ini berusia 54 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Sriwijaya. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Medan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/147/DIR/R tanggal 13 April 2018.



Hari Sundjojo

Pemimpin Kantor Wilayah Padang

Saat ini berusia 50 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Merdeka Malang. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Padang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/168/DIR/R tanggal 27 April 2018.



Dodi Widjanto

Pemimpin Kantor Wilayah Palembang

Saat ini berusia 52 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Palembang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/032/DIR/R tanggal 06 Februari 2018.



Afien Yuni Yahya

Pemimpin Kantor Wilayah Bandung

Saat ini berusia 50 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen Jalur Profesi dari Universitas Indonesia. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Bandung berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/032/DIR/R tanggal 06 Februari 2018.





Mochamad Harsono

Pemimpin Kantor Wilayah Semarang

Saat ini berusia 54 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Mahasaraswati. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/032/DIR/R tanggal 06 Februari 2018.



Muhammad Jufri

Pemimpin Kantor Wilayah Surabaya

Saat ini berusia 49 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen dari Universitas Trisakti. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/011/DIR/R tanggal 05 Januari 2018.



Faizal Arief Setiawan

Pemimpin Kantor Wilayah Makassar

Saat ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Magister di bidang *Finance* dari Universitas Gadjah Mada. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/031/DIR/R tanggal 23 Januari 2019.



Suhardi Petrus

Pemimpin Kantor Wilayah Denpasar

Saat ini berusia 50 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Wijaya Putra. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/032/DIR/R tanggal 06 Februari 2018.



Muhammad Arafat

Pemimpin Kantor Wilayah Banjarmasin

Saat ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Hasanuddin. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/307/DIR/R tanggal 07 September 2018.



Yanar Siswanto

Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Senayan

Saat ini berusia 49 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Senayan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/172/DIR/R tanggal 24 April 2016.



Haris Agus Handoko

Pemimpin Kantor Wilayah Manado

Saat ini berusia 51 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Hasanuddin. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Manado berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/219/DIR/R tanggal 08 Juni 2018.



Yessy Kurnia Dyah W.

Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Kota

Saat ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen Agribisnis dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Kota berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/324/DIR/R tanggal 24 September 2018.





Henry Panjaitan

Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta BSD

Saat ini berusia 49 tahun. Meraih gelar Magister di bidang *Banking* dari University of South Australia. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta BSD berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/016/DIR/R tanggal 15 Januari 2019.



Feri Andajaya

Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran

Saat ini berusia 51 tahun. Meraih gelar Magister di bidang *Business Administration & Technology* dari Institut Teknologi Bandung. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/147/DIR/R tanggal 13 April 2018.



Setiawan Jahja Adie

Pemimpin Kantor Wilayah Papua

Saat ini berusia 52 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen dari Universitas Jember. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Papua berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/031/DIR/R tanggal 23 Januari 2019.



Arif Suwasono

Pemimpin Kantor Wilayah Yogyakarta

Saat ini berusia 52 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen dari STIE Artha Bodhi Iswara. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/585/DIR/R tanggal 28 Desember 2017.



Wiwi Suprihatno

Pemimpin Kantor Wilayah Malang

Saat ini berusia 47 tahun. Meraih gelar Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya dan Magister dari Mahasaraswati. Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Malang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/032/DIR/R tanggal 06 Februari 2018.



Yohanes Iwan Kurniawan

Pemimpin Unit BNI Contact Center

Saat ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen *Accounting* dari Universitas Gadjah Mada. Menjabat sebagai Pemimpin Unit BNI Contact Center berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/1711/HCT/1/R tanggal 29 September 2017.



Rommel TP. Sitompul

Pemimpin Unit Bisnis Sindikasi

Saat ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen Pemasaran dari Universitas Persada Indonesia YAI. Menjabat sebagai Pemimpin Unit Bisnis Sindikasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/1990/HCT/1/R tanggal 16 Oktober 2018.



Saktimaya Murti

Pemimpin Unit Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Saat ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Jendral Soedirman. Menjabat sebagai Pemimpin Unit Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/482/DIR/R tanggal 20 Desember 2016.





Tennisiana Soekesi

Pemimpin Unit E-Channel

Saat ini berusia 49 tahun. Meraih gelar Magister di bidang *Computer Science* dari Universitas Indonesia. Menjabat sebagai Pemimpin Unit *E-Channel* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/126/DIR/R tanggal 25 April 2017.



Grace Daturante Pong Samma

Pemimpin Unit Service Quality

Saat ini berusia 52 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia. Menjabat sebagai Pemimpin Unit *Service Quality* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/482/DIR/R tanggal 20 Desember 2016.



Syafrudin

PGS Pemimpin Unit Analisa Nasabah & Manajemen Portofolio

Saat ini berusia 50 tahun. Meraih gelar Magister di bidang Manajemen *Accounting* dari Universitas Gadjah Mada. Menjabat sebagai PGS Pemimpin Unit Analisa & Manajemen Portofolio berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/01.002785/2019/TBS/R tanggal 14 Januari 2019.



PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

JUMLAH KARYAWAN UNTUK MASING–MASING LEVEL JABATAN

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

(dalam satuan orang)

Level Jabatan	2018			2017		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
≥ Vice President	196	42	238	182	42	224
Assistant Vice President	755	322	1.077	730	276	1.006
Manager	1.803	1.190	2.993	1.692	1.101	2.793
Assistant Manager	4.743	4.842	9.585	4.078	4.191	8.269
Assistant	5.451	7.684	13.135	5.576	8.592	14.168
Pegawai Dasar	196	-	196	749	-	749
Jumlah			27.224			27.209

JUMLAH KARYAWAN UNTUK MASING–MASING TINGKAT PENDIDIKAN

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2018			2017		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Strata 3	5	4	9	3	4	7
Strata 2	1.556	1.028	2.548	1.509	963	2.472
Strata 1	10.031	11.392	21.423	9.718	11.334	21.052
Akademi	872	1.641	2.513	995	1.883	2.878
SD-SMA	680	15	695	782	18	800
Jumlah			27.224			27.209

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2018			2017		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Tetap	12.485	13.401	25.886	11.866	12.775	24.641
Kontrak	446	443	889	1.141	1.427	2.568
Trainee	213	236	449	-	-	-
Jumlah			27.224			27.209



JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN RENTANG USIA

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2018			2017		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
>50 Tahun	664	302	966	813	344	1.157
>45-50 Tahun	1.946	1.322	3.268	2.030	1.379	3.409
>40-45 Tahun	1.888	1.407	3.295	1.928	1.482	3.410
>35-40 Tahun	1.769	1.805	3.574	1.881	1.950	3.831
>30-35 Tahun	2.449	2.884	5.333	2.507	3.027	5.534
>25-30 Tahun	3.432	4.795	8.227	3.404	5.061	8.465
≤25 Tahun	996	1.565	2.561	444	959	1.403
Jumlah			27.224			27.209

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN GENERASI

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Generasi

(dalam satuan orang)

Generasi	2018			2017		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
<i>Baby Boomer</i>	130	34	164	282	85	367
<i>Gen X</i>	5.815	4.474	10.289	6.041	4.727	10.768
<i>Gen Y</i>	7.199	9.572	16.771	6.684	9.390	16.074
Jumlah			27.224			27.209

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Berikut ini program-program baru yang diimplementasikan di tahun 2018 guna mendukung pengembangan kompetensi pegawai BNI:

- Implementasi **BNI Learning Wallet (BLW)**, yaitu anggaran pembelajaran personal yang dikelola oleh pegawai sendiri dengan tujuan untuk memenuhi gap kompetensi atau dapat membuat pegawai bekerja lebih cerdas, cepat dan efisien. Realisasi BNI Learning Wallet sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebanyak 31.237 aplikasi dengan total partisipasi sebanyak 20.169 pegawai.
- Implementasi **BNI Smarter**, yaitu kerangka pengembangan pegawai melalui *learning and sharing* dan merupakan kombinasi dari pembelajaran informal yang dilakukan sambil mengerjakan pekerjaan sehari-hari atau berdiskusi dengan atasan maupun rekan kerja serta pembelajaran formal yang biasa dilakukan secara terstruktur di dalam kelas (kelas riil maupun kelas virtual). Model ini diadopsi dari teori *The 70:20:10 For Learning & Development* yaitu bahwa sesungguhnya porsi terbesar dari aktivitas *learning and sharing* terjadi pada saat pegawai berinteraksi dengan pihak lain dan pada saat menyelesaikan pekerjaannya. Kerangka pengembangan ini, kemudian diwujudkan dalam sebuah *website* bni.corpu.co.id agar para pegawai dapat mengaksesnya secara *online* di mana saja dan kapan saja. Sampai dengan akhir tahun 2018, terdapat 25.788 pegawai yang mencatatkan kegiatan *learning* dan 7.537 pegawai yang mencatatkan kegiatan *sharing*.



- Implementasi **BNI Expert Locator**, yaitu sarana *sharing knowledge* secara *online* antara pegawai dengan para ahli (*expert*) dalam proses pemecahan permasalahan (*problem solving*) maupun penciptaan pengetahuan (*knowledge creation*). Sampai dengan akhir tahun 2018, lebih dari 623 pegawai telah ditetapkan sebagai BNI Expert yang memiliki lebih dari 674 bidang keahlian, antara lain: *corporate communication, audit, policy, compliance, risk management, credit remedial and recovery, banking operational management, procurement management, strategic planning, data management, IT assessment, project management, financial analysis, credit analysis and credit process, project financing, portfolio analysis*. Selanjutnya segenap pegawai akan dapat berinteraksi dengan *expert* yang telah ditetapkan tersebut.
- Reaktivasi *Assessment Center* BNI menjadi *Center of Digital Assessment and Evaluation* (BNI CODAE) menempatkan BNI sebagai satu-satunya Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi *Assessment Center* dalam format digital. Melalui digitalisasi proses *assessment* BNI CODAE ini, sehingga akan meningkatkan efektivitas layanan dan kualitas hasil *assessment*. Sepanjang tahun 2018, BNI CODAE telah melakukan *assessment* dan menyediakan hasil *assessment* (*soft skill and hard skill*) atas segenap pegawai di seluruh jenjang jabatan serta pegawai di perusahaan anak BNI.
- Implementasi **Daily Exercise Employee Program 46 (DEEP46)**, yaitu program pembelajaran yang dirancang dalam bentuk kuis harian untuk mendapatkan informasi mengenai pemahaman pegawai atas pengetahuan yang perlu dimiliki, serta asesmen yang dapat untuk membantu pekerjaan sehari-hari sekaligus sebagai alat bantu pengingat akan informasi penting, mendasar, dan esensial terkait dengan pekerjaan.

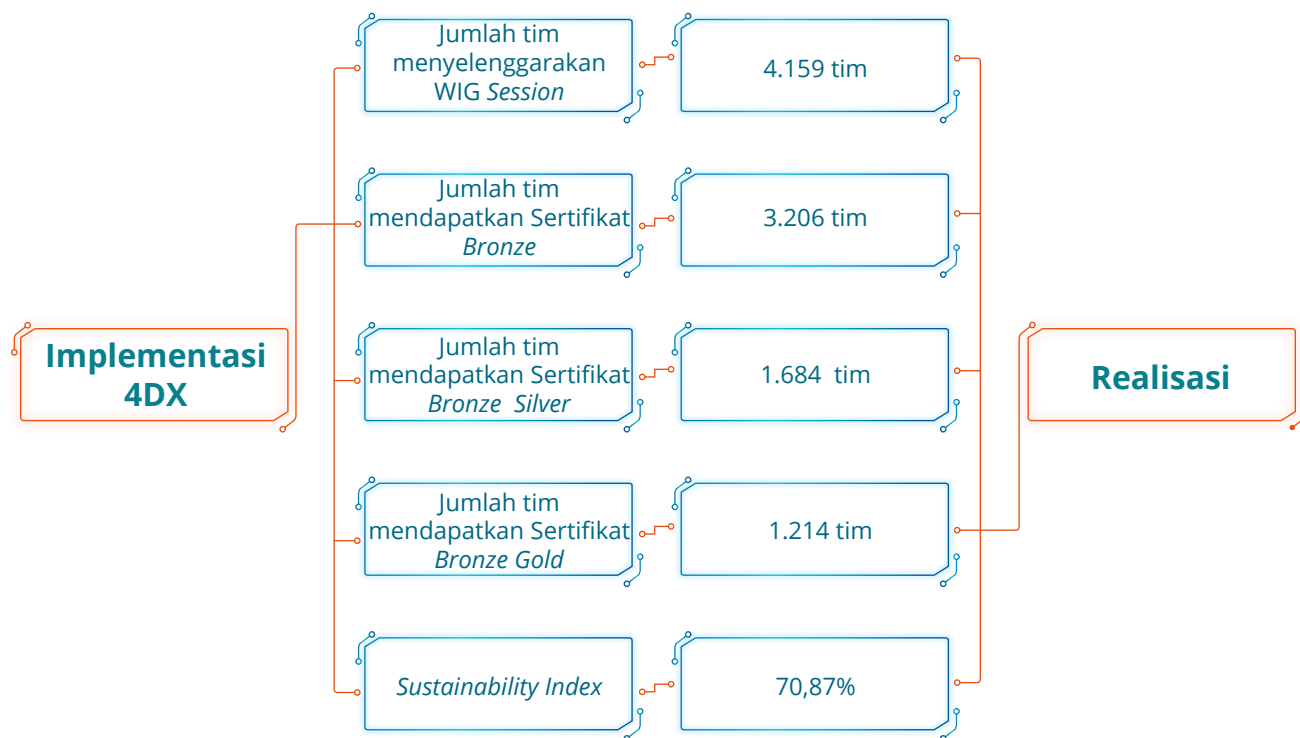
Jumlah peserta DEEP46 sepanjang tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut.

DEEP46	Peserta
<i>Small Credit</i>	4.574
<i>Consumer Lending</i>	1.956
<i>Services - Teller</i>	7.954
<i>Services - CS</i>	3.465
<i>Services - Pimpinan</i>	2.959
<i>Auditor</i>	759
<i>Emerald RM</i>	237
<i>Small Credit Komoditas Pertanian</i>	970
<i>Sales</i>	1.744
<i>Legal, Governance, Risk and Compliance</i>	27.092
<i>Commercial Credit</i>	820
<i>Treasury</i>	2.256
<i>Human Capital</i>	230
<i>Pengadaan Barang/Jasa</i>	3.085
<i>Brevet Branch Management</i>	2.321
Total Partisipan	60.422

- Implementasi **Program-program Leadership** yaitu *Digital Leadership for All Level*, *Program Leadership for Club 46*, dan program Magang di Kantor Cabang Luar Negeri bagi 10 lulusan terbaik dari masing-masing program, *Advanced Management Development Program (AMDP)*, *General Management Program (GMP)*, *Management Development Program (MDP)*, dan *Program Management Trainee (MT)* dan *Officer Development Program (ODP)*.



- Implementasi **Four Disciplines of Execution (4DX)** dengan tujuh orang *internal consultant* yang dijuluki "7 Samurai". Sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi implementasi 4DX di BNI tergambar pada informasi grafis berikut:





Profil Perusahaan



PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERDASARKAN LEVEL JABATAN

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2018

No.	Level Jabatan	Program Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Jumlah Peserta
1.	≥ Vice President	<i>Banking Operation</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang operasional perbankan.	6
		<i>Corporate Core Function</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang-bidang pendukung, seperti hukum, teknologi informasi, manajemen SDM, bahasa, manajemen kualitas, pengadaan barang dan jasa, akuntansi, dan sebagainya.	13
		<i>Credit and Business</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang perkreditan yang merupakan bisnis inti BNI.	65
		<i>Governance, Risk, and Compliance</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang tata kelola, risiko, dan kepatuhan.	25
		<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal kepemimpinan.	72
		<i>Marketing, Sales, and Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang pemasaran, penjualan, dan pelayanan guna mendukung bisnis BNI.	10
		<i>Professional Certification</i>	Memberikan sertifikasi di berbagai bidang, seperti <i>Credit Certification</i> , <i>Sales Certification</i> , <i>IT Certification</i> , dan sebagainya.	77
		<i>Strategic Initiative</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembelajaran-pembelajaran yang diselenggarakan oleh pihak di luar BNI, baik di dalam maupun di luar negeri.	27
		<i>Transactional Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang jasa pengelolaan kas untuk nasabah non perorangan.	2
		<i>Treasury and Global Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang tesuri dan perbankan global.	0
Total Vice President				297



No.	Level Jabatan	Program Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Jumlah Peserta
2.	<i>Assistant Vice President</i>	<i>Banking Operation</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang operasional perbankan.	86
		<i>Corporate Core Function</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang-bidang pendukung, seperti hukum, teknologi informasi, manajemen SDM, bahasa, manajemen kualitas, pengadaan barang dan jasa, akuntansi, dan sebagainya.	108
		<i>Credit and Business</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang perkreditan yang merupakan bisnis inti BNI.	568
		<i>Governance, Risk, and Compliance</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang tata kelola, risiko, dan kepatuhan.	75
		<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal kepemimpinan.	309
		<i>Marketing, Sales, and Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang pemasaran, penjualan, dan pelayanan guna mendukung bisnis BNI.	162
		<i>Professional Certification</i>	Memberikan sertifikasi di berbagai bidang, seperti <i>Credit Certification, Sales Certification, IT Certification</i> , dan sebagainya.	410
		<i>Strategic Initiative</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembelajaran-pembelajaran yang diselenggarakan oleh pihak di luar BNI, baik di dalam maupun di luar negeri.	129
		<i>Transactional Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang jasa pengelolaan kas untuk nasabah non perorangan.	7
		<i>Treasury and Global Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang tesuri dan perbankan global.	11
Total Assistant Vice President				1.865



No.	Level Jabatan	Program Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Jumlah Peserta
3.	Manager	<i>Banking Operation</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang operasional perbankan.	115
		<i>Corporate Core Function</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang-bidang pendukung, seperti hukum, teknologi informasi, manajemen SDM, bahasa, manajemen kualitas, pengadaan barang dan jasa, akuntansi, dan sebagainya.	423
		<i>Credit and Business</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang perkreditan yang merupakan bisnis inti BNI.	1.417
		<i>Governance, Risk, and Compliance</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang tata kelola, risiko, dan kepatuhan.	386
		<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal kepemimpinan.	554
		<i>Marketing, Sales, and Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang pemasaran, penjualan, dan pelayanan guna mendukung bisnis BNI.	373
		<i>Professional Certification</i>	Memberikan sertifikasi di berbagai bidang, seperti <i>Credit Certification</i> , <i>Sales Certification</i> , <i>IT Certification</i> , dan sebagainya.	608
		<i>Strategic Initiative</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembelajaran-pembelajaran yang diselenggarakan oleh pihak di luar BNI, baik di dalam maupun di luar negeri.	187
		<i>Transactional Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang jasa pengelolaan kas untuk nasabah non perorangan.	39
		<i>Treasury and Global Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang treasury dan perbankan global.	17
Total Manager				4.419



No.	Level Jabatan	Program Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Jumlah Peserta
5.	<i>Assistant Manager</i>	<i>Banking Operation</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang operasional perbankan.	374
		<i>Corporate Core Function</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang-bidang pendukung, seperti hukum, teknologi informasi, manajemen SDM, bahasa, manajemen kualitas, pengadaan barang dan jasa, akuntansi, dan sebagainya.	1.286
		<i>Credit and Business</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang perkreditan yang merupakan bisnis inti BNI.	2.994
		<i>Governance, Risk, and Compliance</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang tata kelola, risiko, dan kepatuhan.	467
		<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal kepemimpinan.	1.006
		<i>Marketing, Sales, and Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang pemasaran, penjualan, dan pelayanan guna mendukung bisnis BNI.	3.653
		<i>New Entry</i>	Memberikan pembekalan pada pegawai yang baru bergabung di BNI agar dapat menjalankan tugas di posisi definitifnya nanti.	558
		<i>Professional Certification</i>	Memberikan sertifikasi di berbagai bidang, seperti <i>Credit Certification</i> , <i>Sales Certification</i> , <i>IT Certification</i> , dan sebagainya.	1.550
		<i>Strategic Initiative</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembelajaran-pembelajaran yang diselenggarakan oleh pihak di luar BNI, baik di dalam maupun di luar negeri.	422
		<i>Transactional Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang jasa pengelolaan kas untuk nasabah non perorangan.	508
	<i>Treasury and Global Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang treasuri dan perbankan global.	47	
Total Assistant Manager				12.865



No.	Level Jabatan	Program Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Jumlah Peserta
6.	Assistant	<i>Banking Operation</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang operasional perbankan.	173
		<i>Corporate Core Function</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang-bidang pendukung, seperti hukum, teknologi informasi, manajemen SDM, bahasa, manajemen kualitas, pengadaan barang dan jasa, akuntansi, dan sebagainya.	1.891
		<i>Credit and Business</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang perkreditan yang merupakan bisnis inti BNI.	3.479
		<i>Governance, Risk, and Compliance</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang tata kelola, risiko, dan kepatuhan.	142
		<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal kepemimpinan.	983
		<i>Marketing, Sales, and Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang pemasaran, penjualan, dan pelayanan guna mendukung bisnis BNI.	4.704
		<i>New Entry</i>	Memberikan pembekalan pada pegawai yang baru bergabung di BNI agar dapat menjalankan tugas di posisi definitifnya nanti.	13
		<i>Professional Certification</i>	Memberikan sertifikasi di berbagai bidang, seperti <i>Credit Certification</i> , <i>Sales Certification</i> , <i>IT Certification</i> , dan sebagainya.	701
		<i>Strategic Initiative</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembelajaran-pembelajaran yang diselenggarakan oleh pihak di luar BNI, baik di dalam maupun di luar negeri.	219
		<i>Transactional Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang jasa pengelolaan kas untuk nasabah non perorangan.	121
	<i>Treasury and Global Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang tesuri dan perbankan global.	77	
Total Assistant				12.503



No.	Level Jabatan	Program Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Jumlah Peserta
7.	Pegawai Dasar	<i>Banking Operation</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang operasional perbankan.	0
		<i>Corporate Core Function</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang-bidang pendukung, seperti hukum, teknologi informasi, manajemen SDM, bahasa, manajemen kualitas, pengadaan barang dan jasa, akuntansi, dan sebagainya.	7
		<i>Credit and Business</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang perkreditan yang merupakan bisnis inti BNI.	72
		<i>Governance, Risk, and Compliance</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang tata kelola, risiko, dan kepatuhan.	0
		<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal kepemimpinan.	37
		<i>Marketing, Sales, and Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang pemasaran, penjualan, dan pelayanan guna mendukung bisnis BNI.	32
		<i>New Entry</i>	Memberikan pembekalan pada pegawai yang baru bergabung di BNI agar dapat menjalankan tugas di posisi definitifnya nanti.	0
		<i>Professional Certification</i>	Memberikan sertifikasi di berbagai bidang, seperti <i>Credit Certification</i> , <i>Sales Certification</i> , <i>IT Certification</i> , dan sebagainya.	0
		<i>Transactional Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang jasa pengelolaan kas untuk nasabah non perorangan.	1
		<i>Treasury and Global Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang tesuri dan perbankan global.	0
Total Pegawai Dasar				150

Selama tahun 2018, dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai, BNI telah melatih sebanyak 28.590 pegawai (termasuk 1.796 pegawai *terminated*), dengan rata-rata setiap pegawai mendapatkan pelatihan sebanyak 165,31 kali. Adapun penjelasan tersebut diinformasikan pada uraian tabel di bawah ini.

Total Partisipan	Jumlah Jam Training (dalam jam)	Training Hours per Employee	Jumlah Pelatihan Per Pegawai	Jumlah Karyawan yang Terlatih (dalam satuan orang)
4.452.413	7.871.298	293,77	165,31	26.794*

*belum termasuk 1.796 pegawai *terminated*



Profil Perusahaan



Adapun realisasi pembelajaran yang dilakukan BNI pada tahun 2018, berdasarkan Model Pembelajaran dan Pengembangan 70:20:10, yaitu:

Tabel Realisasi Pembelajaran Pada Tahun 2018 Berdasarkan Model Pembelajaran dan Pengembangan 70:20:10

Metode Pengembangan		Σ Kelas	Σ Partisipasi
Experiential Learning "70"	On the Job Training (OJT)	543	931
	In Service Training (IST)	135	196
	Short Overseas Assignment	3	27
Social Learning "20"	Coaching	375	675
	Mentoring	935	1.332
	Role Play	12.487	28.974
Formal Learning "10"	In-Class Learning	15.080	15.544
	e-Learning	27.502	29.688
	Sertifikasi	13	868

EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan pegawai memberikan dampak bagi produktivitasnya, maka pembelajaran tersebut dilakukan pengukuran. Pengukuran terdapat dampak *learning and sharing* yang ditetapkan oleh BNI yaitu:

1. *Circle 1*: untuk mengukur *learning experience* yaitu tingkat kepuasan *learner* terhadap program pembelajaran. Pada tingkat kepuasan pegawai dapat dipengaruhi oleh materi/modul pembelajaran, sarana dan prasarana serta fasilitator. Tingkat kepuasan pegawai ini dihitung dengan metode *Net Promoter Score*, di mana pada tahun 2018 skor NPS sebesar 62,07 (*generally deemed excellent*).
2. *Circle 2*: untuk mengukur *learning gain* yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai setelah mengikuti program pembelajaran. Pada tahun 2018, hasil evaluasi *circle 2* sebesar 55,90.
3. *Circle 3*: untuk mengukur *behavior change* yaitu perubahan perilaku dan kemampuan peserta, serta penerapan hasil pelatihan di tempat kerja. Pada tahun 2018, hasil evaluasi *circle 3* sebesar 11,27.

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Setiap tahunnya, sebesar 5% dari anggaran *human capital* dianggarkan untuk pembelajaran. Pada tahun 2018 sebesar Rp385,34 miliar telah digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai baik melalui pembelajaran yang dilakukan secara sentralisasi oleh BNI Corporate University, atau secara desentralisasi oleh masing-masing Unit maupun oleh pegawai sendiri menggunakan anggaran BLWnya. Berdasarkan realisasi anggaran pembelajaran tersebut, sebanyak 28.590 pegawai telah dilatih dengan rata-rata partisipasi 165,31 pembelajaran per pegawai. Tingginya partisipasi pembelajaran ini didukung karena adanya *digital learning* melalui BNI SMARTER.

Uraian	Biaya Kompetensi		Pertumbuhan	
	2018 (Juta Rp)	2017 (Juta Rp)	Dalam Mata Uang	Dalam Persen
Pendidikan dan Pelatihan	382.013,34	348.150,11	33.863,23	9,73%



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BNI PER 31 DESEMBER 2018

Tabel Komposisi Pemegang Saham BNI

No.	Kepemilikan Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
1	Pemerintah	11.189.193.875	60,00000%
2	Publik:		
	• Perorangan Indonesia	214.792.074	1,15178%
	• Koperasi	1.016.329	0,00545%
	• Yayasan	101.774.354	0,54575%
	• Dana Pensiun	163.280.124	0,87556%
	• Asuransi	442.488.323	2,37276%
	• Bank	1.766.636	0,00947%
	• Perseroan Terbatas	508.838.625	2,72855%
	• Badan Usaha Lain	5.298	0,00003%
	• Reksadana	646.867.810	3,46871%
	• Perorangan Asing	2.891.622	0,01551%
	• Badan Usaha Asing	5.375.741.388	28,82643%
Jumlah		18.648.656.458	100,00000 %

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR BNI PER 31 DESEMBER 2018

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar BNI

No.	Nama Investor	Alamat	Status	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
1.	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	KEMENTERIAN BUMN. JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 13, JAKARTA 10110	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	11.189.193.875	60,0000000%
2.	BPJS KETENAGAKERJAAN - PROGRAM JHT	JENDRAL GATOT SUBROTO No.79, JAKARTA	PERSEROAN TERBATAS	432.350.768	2,31840%
3.	BNYMSANV RE BNYMSANVLUX RE S/A ESPRING INV-2040084086	46 RUE MONTOYER B-100 BRUSSELS, BELGIUM	BADAN USAHA ASING	234.646.936	1,25825%
4.	HSBC BANK PLC S/A PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI HBEU AS AGENT	LAURENCE POUTNEY HILL LONDON, EC4R OHH	BADAN USAHA ASING	188.236.000	1,00938%
5.	BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD -2039844119	EPF BUILDING, JL. RAJA LAUT 50350, KUALA LUMPUR MALAYSIA	BADAN USAHA ASING	163.303.600	0,87569%
6.	JPMCB NA AIF CLT RE-STICHTING DEPOSITARY APG EME MRKT EQ POOL	OUDE LINDESTRAT 70, 6401 DJ HEERLEN, THE NETHERLANDS	BADAN USAHA ASING	137.983.700	0,73991%
7.	JPMCB NA RE-VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND	100 VANGUARD BOULEVARD, MALVERN, PA 19355, USA	BADAN USAHA ASING	119.284.300	0,63964%
8.	JPMCB NA RE-VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	100 VANGUARD BOULEVARD, MALVERN, PA 19355, USA	BADAN USAHA ASING	114.862.386	0,61593%
9.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	100 VANGUARD BOULEVARD MALVERN PA 19355, USA	BADAN USAHA ASING	114.079.127	0,61173%



Profil Perusahaan



No.	Nama Investor	Alamat	Status	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
10.	GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	168 ROBINSON ROAD 37-01 CAPITAL TOWER, SINGAPORE	BADAN USAHA ASING	102.173.541	0,54789%
11.	SSBTC 26AD S/A INV GLOBAL STRATEGY FD-2144606346	49 AVENUE J.F. KENNEDY L-1855, LUXEMBOURG	BADAN USAHA ASING	100.468.400	0,53874%
12.	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	6301 BEE CAVE RD. BUILDING ONE, AUSTIN TX 78746, USA	BADAN USAHA ASING	89.706.241	0,48103%
13.	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	PRUDENTIAL TOWER JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 79, SETIABUDI, JAKARTA	ASURANSI	85.155.716	0,45663%
14.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 15	BANKPLASSEN 2, 0151 OSLO, NORWAY	BADAN USAHA ASING	83.069.200	0,44544%
15.	HSBC BANK PLC S/A SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY	SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY PO BOX 2992, RIYADH	BADAN USAHA ASING	79.580.600	0,42674%
16.	YKP BNI FOR PROGRAM LTI BNI	JL LAUSER NO 73, KEBAYORAN BARU	YAYASAN	76.236.227	0,40880%
17.	SSB 2Q27 S/A ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF-2144613424	400 HOWARD STREET, SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94105	BADAN USAHA ASING	68.661.700	0,36819%
18.	BNYM RE BRIDGE BUILDER INTERNATIONAL EQUITY FUND-2039926979	615 EAST MICHIGAN STREET MILWAUKEE WISCONSIN 53202, AMERIKA SERIKAT	BADAN USAHA ASING	66.565.800	0,35695%
19.	PT AIA FINL - UL EQUITY	MENARA MATAHARI LT.7 JL. BOULEVARD PALEM RAYA, BENCONGAN KELAPA DUA, TANGERANG	ASURANSI	64.152.700	0,34401%
20.	PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A MANDIRI DINAMIC MONEY RP	GEDUNG AXA TOWER KUNINGAN CITY LT. 17, JL. PROF, DR SATRIO KAV. 18, KARET, SETIABUDI	ASURANSI	58.663.800	0,31457%

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH PER 31 DESEMBER 2018

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% atau lebih BNI

Nama Investor	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Negara Republik Indonesia	11.189.193.875	60,00000%

KOMPOSISI KELOMPOK PEMEGANG SAHAM KURANG DARI 5% PER 31 DESEMBER 2018

Tabel Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% BNI

No.	Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Pemodal Nasional				
1.	Perorangan Indonesia	41.461	214.792.074	1,15178%
2.	Koperasi	18	1.016.329	0,00545%
3.	Yayasan	41	101.774.354	0,54575%
4.	Dana Pensiun	183	163.280.124	0,87556%
5.	Asuransi	121	442.488.323	2,37276%
6.	Bank	4	1.766.636	0,00947%
7.	Perseroan Terbatas	204	508.838.625	2,72855%
8.	Badan Usaha Lain	5	5.298	0,00003%
9.	Reksadana	325	646.867.810	3,46871%
Sub Total		42.362	2.080.829.573	11,15806%



No.	Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Pemegang Saham Asing				
10.	Perorangan Asing	140	2.891.622	0,01551%
11.	Badan Usaha Asing	1.493	5.375.741.388	28,82643%
Sub Total		1.633	5.378.633.010	28,84194%
TOTAL		43.995	7.459.462.583	40%

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2018

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi BNI

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
DEWAN KOMISARIS			
Ari Kuncoro	Komisaris Utama/Independen	0	0,00%
Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama	0	0,00%
Pataniari Siahaan	Komisaris Independen	0	0,00%
Revrisond Baswir	Komisaris Independen	0	0,00%
Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen	0	0,00%
Bistok Simbolon	Komisaris	0	0,00%
Joni Swastanto	Komisaris	0	0,00%
Marwanto Harjowiryo	Komisaris	0	0,00%
Sigit Widyawan	Komisaris Independen	0	0,00%
DIREKSI			
Achmad Baiquni	Direktur Utama	0	0,00%
Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama	0	0,00%
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur	138.442	0,00%
Catur Budi Harto	Direktur	0	0,00%
Rico Rizal Budidarmo	Direktur	0	0,00%
Anggoro Eko Cahyo	Direktur	153.526	0,00%
Adi Sulistyowati	Direktur	324	0,00%
Bob Tyasika Ananta	Direktur	82.891	0,00%
Endang Hidayatullah	Direktur	51.368	0,00%
Tambok P. Setyawati	Direktur	24.880	0,00%
Dadang Setiabudi	Direktur	0	0,00%

Keterangan: Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham BNI secara tidak langsung.



Profil Perusahaan



DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI

ENTITAS ANAK

Nama	Bidang Usaha	Kepemilikan Saham	Tanggal dan Tahun Pendirian	Status Operasi	Jumlah Aset (Rp Juta)	Domisili
PT Bank BNI Syariah	Perbankan Syariah	99,94%	2010	Telah Beroperasi	41.040.203	Jakarta
PT BNI Multifinance	Pembiayaan Konsumen	99,99%	1983	Telah Beroperasi	1.322.611	Jakarta
PT BNI Securites	Brokerage dan <i>underwriter</i> meliputi Perdagangan Efek, termasuk di dalamnya bertindak sebagai Penjamin dan Penasehat Investasi	75,00%	1995	Telah Beroperasi	869.813	Jakarta
PT BNI Life Insurance	Jasa Asuransi Jiwa	60,00%	1997	Telah Beroperasi	17.283.191	Jakarta
BNI Remittance	Jasa Pengiriman Uang	100,00%	1998	Telah Beroperasi	4.931	Hongkong

Penjelasan singkat mengenai masing-masing Entitas Anak diuraikan sebagai berikut:

PT BANK BNI SYARIAH

BNI Syariah didirikan dengan Akta Pendirian No. 160 tanggal 22 Maret 2010. BNI Syariah merupakan bank umum syariah hasil pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("UUS BNI") dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI"). Proses pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BNI tanggal 5 Oktober 2009. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin prinsip dan izin usaha. Pada tanggal 8 Februari 2010, Bank telah mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia untuk melaksanakan pemisahan UUS BNI berdasarkan surat No. 12/2/DpG/Dpbs. Pemisahan UUS BNI dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 159 tanggal 22 Maret 2010. Penyetoran modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian dilakukan oleh pendiri dari hasil pemisahan (*spin-off*) yang efektif dilakukan pada tanggal 19 Juni 2010.

Pada tanggal 21 Mei 2010, Bank memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Selanjutnya pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 19 Juni 2010 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha. Bank menjalankan kegiatan operasional sebagai bank devisa dimulai pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010. Maksud dan tujuan Bank sebagai bank umum syariah hasil pemisahan yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 29 Desember 2017, BNI selaku Induk melakukan penambahan modal BNI Syariah, dengan tambahan penyertaan modal sebesar Rp1 triliun, sehingga memberi ruang pertumbuhan bisnis yang besar bagi BNI Syariah untuk meningkatkan bisnis berbasis syariah yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar.



BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan di setiap jaringannya. Sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.

Sedangkan dari sisi teknologi informasi, BNI Syariah selaku perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didukung dengan pemanfaatan bersama sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001:2008. Operasional bisnis BNI Syariah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Saat ini BNI Syariah telah memiliki 4.973 pegawai (termasuk 1.816 pegawai *outsourcer*) di mana proses pengembangan kompetensi terus dilakukan agar setiap pegawai yang ada menjadi yang terbaik di bidangnya.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, hingga 31 Desember 2018 BNI Syariah mengoperasikan 3 (tiga) kantor Wilayah, 68 Kantor Cabang, 202 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak, dan 49 *Payment Point*. Selain itu, nasabah BNI Syariah juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Induk (*Sharia Channelling Office/SCO*) yang tersebar di 1.490 *outlet* di seluruh wilayah Indonesia dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan aset. Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 11, Jakarta.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank BNI Syariah berdasarkan Akta Risalah RUPS No. 104 tanggal 27 April 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Fero Poerbonegoro
Komisaris Independen	: Rizqullah
Komisaris	: Imam Budi Sarjito *

* Efektif setelah menjalani proses *fit and proper test* OJK sejak tanggal 25 Maret 2019

Direksi

Direktur Utama	: Abdullah Firman Wibowo
Direktur Bisnis	: Dhias Widhiyati
Direktur Keuangan dan Operasional	: Wahyu Avianto
Direktur Kepatuhan	: Tribuana Tungadewi

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: K.H Ma'ruf Amin
Anggota	: Hasanudin

PT BNI MULTIFINANCE

BNI Multifinance didirikan tanggal 8 April 1983 berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H., No.21. BNI Multifinance berdiri pertama kali dengan nama PT BNI-AMEX Leasing, kerja sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan American Express Leasing Corporation (AMEX). Nama Perusahaan telah diubah beberapa kali dan yang terakhir menjadi PT BNI Multifinance yang keputusannya diaktakan dalam Akta No. 103 tanggal 27 Juni 1994. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1983.

Perusahaan bergerak di bidang pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna dan sewa operasi. Untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan dukungan oleh sumber daya manusia yang andal (jumlah pegawai hingga 31 Desember 2018 sebanyak 111 orang), dan mengoperasikan 7 (tujuh) kantor cabang di kota Medan, Lampung, Bogor, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan Surabaya serta pos (*point of sales*) Bandung. Kantor pusat terletak di Gedung BNI Life Insurance Lantai 5, Jalan Aipda KS. Tubun No. 67, Jakarta.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT BNI Multifinance berdasarkan Akta Risalah RUPS No. 05 tanggal 04 September 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Rosa de Lima Dwi Mutiari
Komisaris	: Retno Murwani

Direksi

Direktur Utama	: Hasan Gazali Pulungan*
Direktur Bisnis	: Linda Saragih
Direktur Keuangan dan Operasional	: Fajar Agustianto

* Efektif setelah menjalani proses *fit and proper test* OJK

sejak tanggal 22 Januari 2019



PT BNI SEKURITAS

PT BNI Sekuritas (BNI Sekuritas) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1995 di Jakarta. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta No. 39 dari notaris yang sama tanggal 3 Mei 1995. Sesuai Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan usaha Bank meliputi perdagangan efek, termasuk di dalamnya bertindak sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dengan memperhatikan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. BNI Sekuritas memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi saham dan manajer investasi dari Ketua BAPEPAM-LK masing-masing melalui Surat Keputusan No. KEP-19/PM/1995, No. KEP-020/PM/1995 tanggal 8 Agustus 1995 dan No. KEP-07/PM-MI/1995 tanggal 23 Oktober 1995, dan dialihkan kepada PT BNI Asset Management berdasarkan Surat Keputusan No. Kep-480/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009. Dalam rangka penerapan fungsi independensi manajer investasi berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. V.D.11 yang merupakan lampiran dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-480/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi, BNI telah selesai melaksanakan proses pemisahan/pemekaran usaha (*spin-off*) dari operasi bisnis divisi manajer investasi dengan membentuk sebuah perusahaan baru bernama PT BNI Asset Management. Proses pendiriannya telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI Sekuritas tanggal 1 Maret 2011 dengan kepemilikan sebesar 99,99%.

Pada pertengahan tahun 2011, struktur kepemilikan BNI Sekuritas diperkuat dengan bergabungnya investor strategis, yakni SBI Sekuritas Co. Ltd, Jepang, untuk turut memiliki saham Bank, sehingga komposisi kepemilikan saham BNI Sekuritas sampai dengan saat ini adalah 75% dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. dan 25% dimiliki oleh SBI Sekuritas Co. Ltd.

Sebagai Bank yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI Sekuritas memiliki izin sebagai penyedia jasa penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, serta agen penjual reksadana.

Operasional bisnis BNI Sekuritas selama tahun 2018 didukung oleh sumber daya manusia yang profesional di bidangnya dengan 279 pegawai hingga 31 Desember 2018, yang akan memberikan layanan kepada nasabah melalui 51 Galeri Investasi. Kantor Pusat BNI Sekuritas berada di Sudirman Plaza Indofood Tower, Lantai 16, Jl. Jendral Sudirman Kav.76-78, Jakarta 12910, Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT BNI Sekuritas berdasarkan Akta No. 11 tanggal 28 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Suhendry Hafni
Komisaris : Ryosuke Hayashi

Direksi

Direktur Utama : Adiyasa Suhadibroto
Direktur : Reza Benito Zahar
Direktur : Geger Nuryaman Maulana



PT BNI LIFE INSURANCE

BNI Life pada awalnya didirikan dengan nama "PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya" berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 tanggal 28 November 1996 di Jakarta. Pada tanggal 26 November 2004, Bank telah mengubah namanya menjadi PT BNI Life Insurance, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-31600 HT.01.04.TH.2004 tanggal 29 Desember 2004. Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan usaha dalam bidang asuransi jiwa termasuk usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah. BNI memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 305/KMK.017/1997 tanggal 7 Juli 1997. BNI juga telah memperoleh izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-186/KM.6/2004 tanggal 19 Mei 2004. BNI memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1997.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life. Realisasi penyertaan modal sebesar Rp 4,2 triliun dengan kepemilikan saham sebesar 40% pada BNI Life dan telah direalisasikan pada September 2014. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang.

Kerjasama strategis dengan Sumitomo Life Insurance, telah mempercepat pertumbuhan bisnis dan memberi ruang yang besar untuk memenangkan peluang bisnis ke depan. Sebagai bukti keseriusan Sumitomo Life Insurance dalam pengembangan bisnis BNI Life, Sumitomo Life Insurance telah menempatkan perwakilan di manajemen BNI Life baik sebagai Komisaris, Direksi, maupun tenaga ahli profesional.

BNI Life menawarkan berbagai produk asuransi seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, pensiun dan syariah. Operasional bisnis BNI Life didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang perasuransian. Saat ini BNI Life telah memiliki 833 pegawai dengan kompetensi yang terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, hingga 31 Desember 2018 BNI Life Insurance mengoperasikan 7 (tujuh) kantor layanan (Jakarta/Jl Aipda KS Tubun No.67, Bandung/Cihampelas Walk, GF No. 28-29), Semarang/Thamrin Square, Jl MH Thamrin No.5, Yogyakarta/Jogja City Mall Lantai 1 Unit 40, Surabaya/Grand City Mall, Lantai 2, Unit 42, Denpasar/Jl Raya Puputan No 108 B Renon, Palembang /Palembang Icon Mall, Lantai 2, Unit 70). Alamat kantor pusat BNI Life di Centennial Tower Lt. 9, Jl. Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT BNI Life Insurance berdasarkan Akta Risalah RUPS No. 35 tanggal 9 Oktober 2018 dan Akta No.105, tanggal 28 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Parikesit Suprpto
Komisaris	: Darwin Suzandi
Komisaris	: Kazuhiko Arai
Komisaris Independen	: Husain Abdullah
Komisaris Independen	: Henry Cratein C. Suryanaga

Direksi

Direktur Utama	: Shadiq Akasya
Direktur Keuangan	: Eben Eser Nainggolan
Direktur	: Hidenobu Ito
Direktur	: Naruyoshi Kuwata

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin
Anggota	: Ir. Agus Haryadi, AAIJ, FII, ASAI
Anggota	: Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, MA



BNI REMITTANCE LIMITED (BNI REMITTANCE)

BNI Remittance Limited (BNI Remittance) adalah anak perusahaan BNI yang didirikan oleh BNI Hong Kong pada tanggal 19 November 1996 berdasarkan *Certificate of Incorporation* No. 574748 dengan nama "*High Motivation Company*", kemudian pada tahun 1997 perusahaan ini berubah nama menjadi BNI Nakertrans Ltd.

Untuk lebih mengoptimalkan aktivitas bisnis yang dijalankan sesuai dengan koridor aturan otoritas setempat, melalui sebuah kajian bisnis yang komprehensif diputuskan untuk memisahkan manajemen BNI Nakertrans Ltd dari BNI Hong Kong sekaligus mengubah nama perusahaan menjadi BNI Remittance Ltd pada tahun 2009.

Saat ini BNI REMITTANCE terdaftar sebagai *Money Service Operator* dengan nomor *register* 12-08-00768 dan tunduk kepada Hong Kong *Custom and Excise Department*.

Untuk menjalankan bisnis, BNI Remittance mengelola *outlet* yang tersebar di 3 (tiga) area Hong Kong, yaitu Kantor Utama Keswick di Hong Kong Island, Kantor Cabang Tsuen Wan dan Kantor Cabang Yuen Long di New Territories dan Kantor Cabang Hung Hom di Kowloon. Kantor Pusat BNI Remittance beralamat di Flat/RM5 on G/F, Nos 1-7 Keswick Street, Causeway Bay, Hong Kong.

Di samping pelayanan melalui *outlet* tersebut, BNI Remittance bekerja sama dengan BNI dalam program keuangan inklusi, BNI Remittance memberikan akses keuangan melalui layanan digital yang seluas-luasnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong. Dengan beroperasinya 4 (empat) unit mesin ATM BNI di Hong Kong sejak awal 2015 maka nasabah dapat lebih leluasa melakukan transaksi keuangan melalui fitur layanan yang sama persis dengan mesin ATM di Indonesia antara lain penarikan tunai, cek saldo, transfer antar rekening BNI dan antar bank lain, pembelian pulsa/tiket dan pembayaran tagihan. Pada pertengahan tahun 2017, BNI Remittance memiliki layanan *Mobile Banking* yang dapat diaktivasi langsung dari Hong Kong, sehingga dapat semakin memperkuat layanan *digital banking* bagi nasabah untuk dapat mengelola keuangannya lebih efektif dan efisien.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI Remittance berdasarkan Akta Risalah RUPS No. 0574748 tanggal 31 Juli 2016 adalah sebagai berikut:

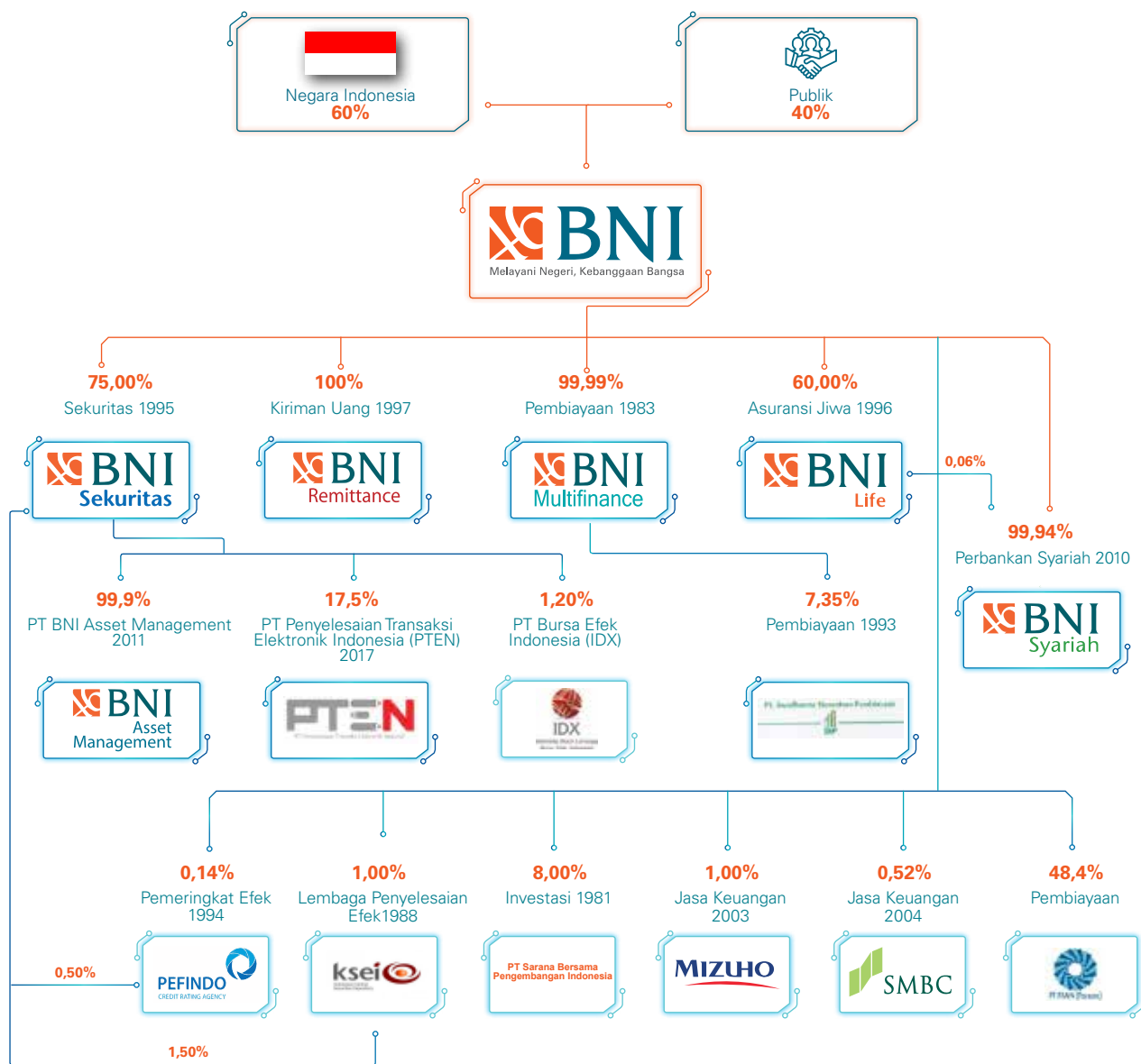
DIREKSI

Direktur : Eko Kristianto

ENTITAS ASOSIASI

Nama	Bidang Usaha	Kepemilikan Saham	Tanggal dan Tahun Pendirian	Status Operasi	Domisili
PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	Investasi	8,00%	1981	Telah Beroperasi	Jakarta
PT Swadharma Nusantara Pembiayaan	Pembiayaan	7,35%	1992	Telah Beroperasi	Jakarta
PT Bursa Efek Indonesia	Bursa Efek	1,20%	1977	Telah Beroperasi	Jakarta
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga Penyelesaian Efek	2,50%	1988	Telah Beroperasi	Jakarta
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat Efek	0,64%	1994	Telah Beroperasi	Jakarta
PT Bank Mizuho Indonesia	Jasa Keuangan	1,00%	2003	Telah Beroperasi	Jakarta
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Jasa Keuangan	0,52%	2004	Telah Beroperasi	Jakarta
PT PANN Pembiayaan Maritim	Pembiayaan	48,4%	1974	Telah Beroperasi	Jakarta

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN



Sampai dengan tahun 2018, BNI tidak memiliki perusahaan *joint venture* dan *Special Purposes Vehicle* (SPV).



KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM

Penawaran Umum Perdana Saham

Pada tanggal 28 Oktober 1996, BNI melakukan penawaran umum perdana atas 1.085.032.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) setiap saham dan harga penawaran setiap saham sebesar Rp850 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI) pada tanggal 25 November 1996.

Penawaran Umum Saham Terbatas I

Pada tanggal 30 Juni 1999, BNI melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 151.904.480.000 saham Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp25 (nilai penuh) setiap saham. Setiap pemegang 1 (satu) saham lama berhak membeli 35 saham baru dengan harga Rp347,58 (nilai penuh) setiap saham. Dari penawaran umum ini, BNI meningkatkan modal sahamnya sebanyak 683.916.500 lembar saham Seri C yang diterbitkan kepada masyarakat umum pada tanggal 21 Juli 1999 dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI). BNI juga menerbitkan 151.220.563.500 lembar saham Seri C kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 7 April 2000 dan 30 Juni 2000 melalui program rekapitalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999.

Rekapitalisasi

Pada tanggal 30 Maret 2000, Menteri Keuangan menyetujui rekapitalisasi BNI sebesar Rp61,8 triliun, yang meningkat sebesar Rp9 triliun dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999. Sehubungan dengan peningkatan rekapitalisasi tersebut, yang telah disetujui melalui Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2000, BNI menerbitkan tambahan saham Seri C sebanyak 44.946.404.500 saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pada tanggal 20 Juli 2001, modal saham BNI berkurang sebanyak 1.965.701.500 saham Seri C sehubungan dengan pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi kepada Pemerintah Indonesia. Pengembalian tersebut telah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 25 Juni 2001.

Penawaran Umum Saham Terbatas II

Pada tanggal 30 Juli 2007, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Pemegang Saham telah memutuskan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan sampai dengan sejumlah 1.992.253.110 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 (nilai penuh) setiap lembar saham.

Setiap pemegang 20 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BNI pada tanggal 9 Agustus 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai 3 (satu) HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp2.025 (nilai penuh) setiap saham. Dari Penawaran Umum Terbatas II, BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp747.094 dan tambahan agio saham sebesar Rp3.287.218 dan biaya emisi penerbitan saham sebesar Rp195.280. Perdagangan perdana dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2007 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI).

Penawaran Umum Saham Terbatas III

Pada tanggal 25 November 2010, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Pemegang Saham telah memutuskan antara lain untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor BNI melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan penerbitan HMETD sebesar 3.374.715.948 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 (nilai penuh) setiap lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp3.100. HMETD tersebut dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 16 Desember 2010, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Dari PUT III tersebut, BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp1.265.518 dan tambahan agio saham, bersih setelah dikurangkan dengan biaya emisi penerbitan saham, sebesar Rp245.231 juta.



Nama Bursa Tempat Saham Perusahaan Dicatatkan

Seluruh saham BNI telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Tabel Kronologis Penerbitan Saham BNI

Tanggal	Deskripsi	Saham	Nilai Nominal	Harga Penawaran	Jumlah Saham
Sebelum IPO	-	-	-	-	-
November 1996	Initial Public Offering (IPO)	Seri-A	@Rp500	-	1
		Seri-B	@Rp500	850	4.340.127.999
		Total Modal Ditempatkan dan Disetor			4.340.128.000
Juni 1999	Rights Issue (1:35)	Seri-A	@Rp500	-	1
		Seri-B	@Rp500	850	4.340.127.999
		Seri-C	@Rp25	347,58	151.904.480.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor			156.244.608.000		
Juni 2000	Issuance of new shares without pre-emptive rights	Seri-A	@Rp500	-	1
		Seri-B	@Rp500	850	4.340.127.999
		Seri-C	@Rp25	347,58	196.850.884.500
Total Modal Ditempatkan dan Disetor			201.191.012.500		
Juli 2001	Repayment of excess amount in Government Bonds	Seri-A	@Rp500	-	1
		Seri-B	@Rp500	850	4.340.127.999
		Seri-C	@Rp25	347,58	194.885.183.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor			199.225.311.000		
Desember 2003	Reverse Stock Split (15:1)	Seri-A	@Rp7.500	-	1
		Seri-B	@Rp7.500	12.750	289.341.866
		Seri-C	@Rp375	5.213,7	12.992.345.533
Total Modal Ditempatkan dan Disetor			13.281.687.400		
13 Agustus 2007	Rights Issue (20:3)	Seri-A	@Rp7.500	-	1
		Seri-B	@Rp7.500	12.750	289.341.866
		Seri-C	@Rp375	2.025	14.984.598.643
Total Modal Ditempatkan dan Disetor			15.273.940.510		
Agustus 2010	Divestasi Saham Negara RI pada BNI <i>eks green shoe</i>	Seri-A	@Rp7.500	-	1
		Seri-B	@Rp7.500	12.750	289.341.866
		Seri-C	@Rp375	2.025	14.984.598.643
Total Modal Ditempatkan dan Disetor			15.273.940.510		
10 Desember 2010	Rights Issue (110.473:500.000)	Seri-A	@Rp7.500	-	1
		Seri-B	@Rp7.500	12.750	289.341.866
		Seri-C	@Rp375	3.100	18.359.314.591
Total Modal Ditempatkan dan Disetor			18.648.656.458		



Profil Perusahaan



KRONOLOGIS PENERBITAN OBLIGASI

BNI menerbitkan obligasi senior berdenominasi USD (*global bond*) pada 27 April 2012 dengan nilai pokok sebesar USD500 juta. Obligasi tersebut diterbitkan di harga 98,89 dengan kupon sebesar 4,125% yang dibayar setiap 6 bulan sekali. Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun dan telah jatuh tempo pada 27 April 2017. Bank telah melunasi seluruh nilai pokok obligasi sebesar USD500 juta di harga 100,00.

Pada tanggal 22 Juni 2017, BNI telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK melalui surat nomor S-349/D.04/2017 untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BNI Rupiah Tahap I Tahun 2017 ("Obligasi"). Nilai obligasi yang diterbitkan sebesar Rp3 triliun, jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan kupon sebesar 8% per tahun yang akan dibayarkan secara triwulanan. Obligasi BNI diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2017. Pembayaran kupon pertama kepada para pemegang obligasi telah dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017.

Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT BCA Sekuritas. Bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sesuai dengan POJK No. 07/2017 dan Peraturan No.IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, BNI telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") untuk periode 6 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019 sesuai dengan suratnya No. RC-730/PEF-Dir/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 dengan peringkat idAAA (*Triple A Stable Outlook*). BNI akan melakukan pemeringkatan atas obligasi yang diterbitkan setiap tahun selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas.

Pada tahun 2018 BNI menerbitkan instrumen utang berkarakteristik modal dalam bentuk *Medium Term Notes* (MTN) melalui penawaran terbatas dengan nama "MTN Subordinasi I BNI Tahun 2018" yang memiliki fitur *write down* yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dengan tanggal efektif 8 Juni 2018 dengan jumlah pokok emisi sebesar Rp100 miliar.

Penerbitan MTN Subordinasi tersebut bertujuan untuk memenuhi Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 pasal 24 dan pasal 37 tentang *Recovery Plan*, di mana bank sistemik wajib memiliki surat utang berkarakteristik modal paling lambat 31 Desember 2018.

MTN Subordinasi I BNI Tahun 2018 ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% p.a berjangka waktu 5 (lima) tahun. Bertindak sebagai lembaga dan profesi penunjang dalam penerbitan MTN Subordinasi tersebut adalah BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Konsultan Hukum yang digunakan adalah Hanafiah Ponggawa & Partners. Notaris yang digunakan adalah Ir. Nanette Cahyanie, SH. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai *Paying Agent*.

Dalam rangka penerbitan MTN Subordinasi ini, Bank telah memperoleh hasil pemeringkatan nasional untuk *Medium Term Notes* (MTN Subordinasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia: idAA (*Double A*).



NAMA BURSA TEMPAT MTN PERUSAHAAN DICATATKAN

Seluruh MTN BNI telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel Kronologis Penerbitan Obligasi BNI

Uraian	Tanggal Terbit	Tanggal Efektif	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
										2018	2017	
Global Bond	27 April 2012	-	5 tahun	USD	500.000.000	98,89	27 April 2017	4,125% p.a	Lunas	-	BB (S&P)	HSBC
Obligasi Berkelanjutan IBNI Tahap I Tahun 2017	11 Juli 2017	22 Juni 2017	5 tahun	IDR	3.000.000.000	100,00	11 Juli 2022	8,00% p.a	Belum Lunas	idAAA (Pefindo)	idAAA (Pefindo)	BRI

Tabel kronologi Medium Term Notes (MTN)

Uraian	Tanggal Terbit	Tanggal Efektif	Tenor	Mata Uang	Nilai (juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Diskonto	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
									2018	2017	
MTN Subordinasi IBNI Tahun 2018	10 Agustus 2018	-	60 bulan	Rp	100.000.000	10 Agustus 2023	8,00%	Belum Lunas	idAA	*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

*Obligasi baru diterbitkan di tahun 2018.



Kronologis Pembayaran Bunga Obligasi

Global Bond memiliki bunga tahunan sebesar 4,125% dari jumlah pokok pinjaman. Bunga ini dibayarkan oleh Bank setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal perdana pembayaran bunga obligasi tersebut jatuh pada tanggal 29 Oktober 2012.

Tabel Kronologis Pembayaran Bunga Global Bond

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga	Status Pembayaran Bunga
1.	29 Oktober 2012	Sudah dibayar
2.	29 April 2013	Sudah dibayar
3.	28 Oktober 2013	Sudah dibayar
4.	28 April 2014	Sudah dibayar
5.	27 Oktober 2014	Sudah dibayar
6.	27 April 2015	Sudah dibayar
7.	27 Oktober 2015	Sudah dibayar
8.	27 April 2016	Sudah dibayar
9.	27 Oktober 2016	Sudah dibayar
10.	27 April 2017	Sudah dibayar

Tabel Realisasi Hasil Penggunaan Dana Hasil Obligasi BNI

dalam triliun Rupiah

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Ekspansi Kredit	Total	Ekspansi Kredit	Total	
Obligasi Berkelanjutan I BNI tahap I tahun 2017	22 Juni 2017	Rp 3	Rp 0,0074	Rp 2.992	Rp 2.992	Rp 2.992	Rp 2.992	Rp 2.992	-



KRONOLOGIS PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

Pada tahun 2017, Bank telah melakukan penawaran NCD maksimal sebesar Rp3 triliun dengan realisasi penerbitan sebesar Rp2,7 triliun yang terdiri dari beberapa seri. Pihak Arrangers dari penerbitan NCD BNI tersebut adalah BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan BCA Sekuritas. Notaris yang digunakan adalah Fathiah Helmi, SE. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai *Paying Agent*. Penerbitan NCD tersebut merupakan strategi Bank untuk menambah likuiditas rupiah.

Dalam rangkaian penerbitan NCD ini, Bank telah memperoleh hasil pemeringkatan nasional untuk *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)* dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO): idAAA (*Triple A*).

NAMA BURSA TEMPAT NCD PERUSAHAAN DICATATKAN

Seluruh NCD BNI telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel Kronologis Penerbitan Efek Lainnya BNI

Uraian	Tanggal Terbit	Tanggal Efektif	Tenor	Mata Uang	Nilai (juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Diskonto	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
									2018	2017	
NCD Tahap I											
NCD Tahap I Seri A		-	6 bulan	Rp	390.000	16 Desember 2016	7,00%	Lunas	-	-	-
NCD Tahap I Seri B		-	9 bulan	Rp	20.000	16 Maret 2017	7,20%	Lunas	-	-	-
NCD Tahap I Seri C	16 Juni 2016	-	370 hari	Rp	42.000	23 Juni 2017	7,55%	Lunas	-	-	-
NCD Tahap I Seri D		-	18 bulan	Rp	415.000	15 Desember 2017	7,75%	Lunas	-	-	-
NCD Tahap I Seri E		-	24 bulan	Rp	1.231.000	15 Juni 2018	8,25%	Lunas	-	-	-
NCD Tahap I Seri F		-	36 bulan	Rp	925.000	14 Juni 2019	8,40%	Belum Lunas	-	-	-
NCD Tahap II											
NCD Tahap II Seri A		-	370 hari	Rp	225.000	02 Oktober 2017	7,20%	Lunas	-	-	-
NCD Tahap II Seri B	27 September 2016	-	18 bulan	Rp	390.000	26 Maret 2018	7,60%	Lunas	-	-	-
NCD Tahap II Seri C		-	24 bulan	Rp	770.000	26 September 2018	7,90%	Lunas	-	-	-
NCD Tahap II Seri D		-	36 bulan	Rp	815.000	26 September 2019	8,10%	Belum Lunas	-	-	-
NCD Tahap III											
NCD Tahap III Seri A		-	370 hari	Rp	2.195.000	15 Maret 2018	7,55%	Lunas	-	-	-
NCD Tahap III Seri B	10 Maret 2017	-	18 bulan	Rp	350.000	03 September 2018	7,90%	Lunas	-	-	-
NCD Tahap III Seri C		-	24 bulan	Rp	150.000	28 Februari 2019	8,05%	Belum Lunas	-	-	-
NCD Tahap III Seri D		-	36 bulan	Rp	5.000	24 Februari 2020	8,35%	Belum Lunas	-	-	-



Profil Perusahaan



NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PENERBITAN SAHAM

INFORMASI PERDAGANGAN DAN PENCATATAN SAHAM

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : (62-21) 5150515
Fax : (62-21) 5154153
Website : www.idx.co.id
Email : listing@idx.co.id

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Purwantono, Sungkoro & Surja
Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : (62-21) 52895000
Fax : (62-21) 52894100
Website : www.ey.com/id

LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK

Standard & Poor's

30 Cecil Street Prudential Tower 17th Floor Singapore 049712
Tel : (65) 6438 2881
Website : www.standardandpoors.com

Moody's Singapore Pte Ltd

50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower 048623
Tel : (65) 6398 8300
Fax : (65) 6398 8301
Website : www.moody's.com

PT Fitch Ratings Indonesia

Prudential Tower Lt. 20
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79
Jakarta Selatan 12910
Tel : (62-21) 5795 7755
Fax : (62-21) 5795 7750
Website : www.fitchratings.com

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Panin Tower - Senayan City, 17th Floor
Jl. Asia Afrika Lot.19
Jakarta 10270, Indonesia
Tel : (62-21) 7278 2380
Fax : (62-21) 7278 2370
Website : www.pefindo.com



BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Tel : (62-21) 3508077
Website : www.datindo.com
Email : corporatesecretary@datindo.com

KUSTODIAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : (62-21) 5152855
Fax : (62-21) 52991199
Website : www.ksei.co.id
Email : helpdesk@ksei.co.id

NOTARIS

Fathiah Helmi, S.H.
Graha Irama Lantai 6-C
Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2 Bl X-1
Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta 12950
Tel : (021) 529 07304, (021) 529 07305, (021) 529 07306
Fax : (021) 526 1136
Email : fhchozie@gmail.com

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Penghargaan



Nama Penghargaan:
Peringkat 1 *Digital Brand Wealth Management*
Bank Umum Konvensional
Acara:
Digital Brand Awards 2018
Penyelenggara:
Infobank & isentia
Tanggal
25 April 2018



Nama Penghargaan:
Best e-Commerce 2017
Acara:
Card Center Manager
Penyelenggara:
VISA
Tanggal
19 September 2018



Nama Penghargaan:
Best Millennial Segment Solution
Acara:
MasterCard Awards
Penyelenggara:
MasterCard
Tanggal
7 Desember 2018



Nama Penghargaan:
Sektor Informasi & Komunikasi
Acara:
IT Governance Award 2018
Penyelenggara:
Forum TI BUMN
Tanggal
24 Desember 2018



Nama Penghargaan:
The 2018 Treasury & Cash Management Non-FI in Indonesia
Acara:
Global Finance World's Best Treasury and Cash Management Provider Awards 2018
Penyelenggara:
Global Finance
Tanggal
22 Januari 2018



Nama Penghargaan:
Best Remittances Provider in Southeast Asia 2017
Acara:
Best Deal & Solution Award 2017
Penyelenggara:
Alpha Southeast Asia
Tanggal
13 Februari 2018



Nama Penghargaan:
*Best Sales Volume From Issuing Bank
in Indonesia 2017*
Acara:
JCB Award of Appreciation
Penyelenggara:
JCB
Tanggal
28 Februari 2018



Nama Penghargaan:
Corporate Strategic Partner (CSP)
Acara:
*Half Day Seminar 2018 Wealth Management
Digitalization of Chance or Threat*
Penyelenggara:
Certified Wealth Managers' Association (CWMA)
Tanggal
5 April 2018



Nama Penghargaan:
Kartu Kredit Bank Umum Konvensional
Acara:
7th Digital Brand Awards 2018
Penyelenggara:
Infobank & Isentia
Tanggal
25 April 2018



Nama Penghargaan:
*The Best Digital Brand 2013-2017 Bank Umum
Konvensional*
Acara:
7th Digital Brand Awards 2018
Penyelenggara:
Infobank & Isentia
Tanggal
25 April 2018



Nama Penghargaan:
The Most Popular Bank for Mortgage Product
Acara:
Rumah 123 Real Estate Awards 2018
Penyelenggara:
Rumah123.com
Tanggal
26 April 2018



Nama Penghargaan:
Bronze Winner Promising Company in Strategy
Acara:
BUMN Marketeers Awards 2018
Penyelenggara:
MarkPlus
Tanggal
2 Mei 2018



Nama Penghargaan:
Silver Winner Promising Company in Branding
Acara:
BUMN Marketeers Awards 2018
Penyelenggara:
MarkPlus
Tanggal
2 Mei 2018



Nama Penghargaan:
Juara Umum Porseni BUMN 2018
Acara:
Porseni BUMN 2018
Penyelenggara:
BUMN
Tanggal
5 Mei 2018



Nama Penghargaan:
Rating A for HR Transformation
Acara:
HR Excellence Award 2018
Penyelenggara:
SWA & Universitas Indonesia
Tanggal
7 Mei 2018



Nama Penghargaan:
Rating A for Learning & Development Strategy
Acara:
HR Excellence Award 2018
Penyelenggara:
SWA & Universitas Indonesia
Tanggal
7 Mei 2018



Nama Penghargaan:
Rating A for Compensation and Benefit Strategy
Acara:
HR Excellence Award 2018
Penyelenggara:
SWA & Universitas Indonesia
Tanggal
7 Mei 2018



Nama Penghargaan:
Peringkat II Overall
Acara:
Satisfaction, Loyalty, Engagement Award 2018
Penyelenggara:
Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI)
Tanggal
17 Mei 2018



Nama Penghargaan:
Peringkat 1 Satisfaction (ATM)
Acara:
Satisfaction, Loyalty, Engagement Awards 2018
Penyelenggara:
Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI)
Tanggal
17 Mei 2018



Nama Penghargaan:
The Best Government Bank in Service Excellence
Acara:
Banking Service Excellence Awards 2018
Penyelenggara:
Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI)
Tanggal
5 Juni 2018



Nama Penghargaan:
Successfully Implementing Corporate Transformation
Acara:
Anugerah Manajemen Indonesia 2018
Penyelenggara:
SWA & PPM Manajemen
Tanggal
18 Juli 2018



Nama Penghargaan:
Top KPR (Kredit Perumahan Rakyat) 2018
Acara:
Top Bank 2018
Penyelenggara:
Business News
Tanggal
10 Agustus 2018



Nama Penghargaan:
The Best Performance Bank
Acara:
Bisnis Indonesia Financial Award 2018
Penyelenggara:
Bisnis Indonesia
Tanggal
27 Agustus 2018



Nama Penghargaan:
1st Best Call Center Bank Umum
Acara:
Banking Service Excellence Awards
Penyelenggara:
Infobank dan PT Rintis Sejahtera
Tanggal
30 Agustus 2018



Nama Penghargaan:
1st Best CRM (Mesin Setor Tunai)
Acara:
Banking Service Excellence Awards
Penyelenggara:
Infobank dan PT Rintis Sejahtera
Tanggal
30 Agustus 2018



Nama Penghargaan:
1st Best Transaction Growth as Acquirer Bank
Acara:
Transaction Banking Awards 2018
Penyelenggara:
Infobank dan PT Rintis Sejahtera
Tanggal
30 Agustus 2018



Nama Penghargaan:
1st Best Phone Banking Bank Umum
Acara:
Banking Service Excellence Awards
Penyelenggara:
Infobank dan PT Rintis Sejahtera
Tanggal
30 Agustus 2018



Nama Penghargaan:
2nd Best Collecting Agent
Acara:
23rd Infobank Award
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal
30 Agustus 2018



Nama Penghargaan:
The Remittance Product and Service of The Year
Acara:
The Asian Banker Excellence in Retail Financial Service Awards
Penyelenggara:
The Asian Banker International
Tanggal
30 Agustus 2018



Nama Penghargaan:
Bank Terbaik Implementasi SimPel/SimPel iB
Acara:
FIN OJK EXPO 2018
Penyelenggara:
Otoritas Jasa Keuangan
Tanggal
14 - 15 September 2018



Nama Penghargaan:
Bank Terinovatif Implementasi SimPel
Acara:
FIN OJK EXPO 2018
Penyelenggara:
Otoritas Jasa Keuangan
Tanggal
14 - 15 September 2018



Nama Penghargaan:
Best ICT Implementation in Sales & Marketing
Acara:
Indonesia Best eMark Award
Penyelenggara:
Telkom University & SWA
Tanggal
26 September 2018



Nama Penghargaan:
BNI Emerald
Acara:
Service Quality Award 2018
Penyelenggara:
Service Excellence & Service Quality Monitoring
Tanggal
17 Oktober 2018



Nama Penghargaan:
Best Beneficiary
Acara:
ATM Bersama Awards 2018
Penyelenggara:
Artajasa
Tanggal
6-8 November 2018



Nama Penghargaan:
Penyalur KUR 2018 Terbaik III
Acara:
KUR
Penyelenggara:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
Tanggal
22 November 2018



Nama Penghargaan:
Bank Pendukung UMKM Terbaik Kelompok Bank
BUKU 3 & 4
Acara:
BI Award
Penyelenggara:
BI
Tanggal
27 November 2018



Nama Penghargaan:
Kantor Bank Terbaik Dalam Pengelolaan Kas
Titipan di Seluruh Wilayah Indonesia Termasuk di
Daerah Terpencil, Terluar, dan Terdepan (3T)
Acara:
BI Award
Penyelenggara:
BI
Tanggal
27 November 2018



Nama Penghargaan:
Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Terbaik
Kelompok Bank BUKU 3 & 4
Acara:
BI Award
Penyelenggara:
BI
Tanggal
27 November 2018



Nama Penghargaan:
The Top 50 Companies for 2018
Acara:
Best of The Best Awards 2018
Penyelenggara:
Forbes Indonesia
Tanggal
29 November 2018



Nama Penghargaan:
Best Affinity Debit Card Program
Acara:
MasterCard Awards
Penyelenggara:
MasterCard
Tanggal
7 Desember 2018



Nama Penghargaan:
Best Innovative Acquiring
Acara:
MasterCard Awards
Penyelenggara:
MasterCard
Tanggal
7 Desember 2018



Nama Penghargaan:
Best Affluent Debit Card Program
Acara:
MasterCard Awards
Penyelenggara:
MasterCard
Tanggal
7 Desember 2018



Nama Penghargaan:
Most Creative Acquisition Campaign
Acara:
MasterCard Awards
Penyelenggara:
MasterCard
Tanggal
7 Desember 2018



Nama Penghargaan:
Best State Owned Enterprise
Acara:
The 10th IICD Corporate Governance Conference and Award
Penyelenggara:
AEI, Perbanas, PT Citra Negeri Amanah
Tanggal
10 Desember 2018



Nama Penghargaan:
Top 50 Big Capitalization Public Listed Company
Acara:
The 10th IICD
Penyelenggara:
Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
Tanggal
10 Desember 2018



Nama Penghargaan:
Best Service Cash Management
Acara:
EUROMONEY Market Leader Real Estate 2018
Penyelenggara:
EUROMONEY
Tanggal
28 Desember 2018



Nama Penghargaan:
Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)
Acara:
Good Corporate Governance Award 2018
Penyelenggara:
SWA & IICG
Tanggal
19 Desember 2018

Sertifikasi



Nama Sertifikasi:
Quality Management Systems
Penyelenggara:
SAI Global
Tanggal
11 Januari 2018 - 10 Januari 2021



Nama Sertifikasi:
ISO 9001:2015 Provision of In House Learning and e-Learning/Digital Learning for BNI Employees
Penyelenggara:
SGS
Tanggal
9 Maret 2018 - 18 Januari 2019



Nama Sertifikasi:
Information Technology (IT) Operation Services
Penyelenggara:
SGS
Tanggal
9 September 2018 - 26 September 2019



Nama Sertifikasi:
Information Technology (IT Security Management)
Penyelenggara:
SGS
Tanggal
14 September 2018



Nama Penghargaan:
Tier III Design
Penyelenggara:
Uptime Institute Certified
Tanggal
September 2018



Nama Sertifikasi:
SNI ISO 9001:2015 Banking Operations for Guarantee Letter, Real Time Gross Settlement (RTGS) & Remittance Services
Penyelenggara:
SGS
Tanggal
5 November 2018 - 5 November 2021



Nama Sertifikasi:
SNI ISO 9001:2015 Satisfactory Surveillance Audit
Penyelenggara:
SGS
Tanggal
5 November 2018



Nama Penghargaan:
Tier III Facility
Penyelenggara:
Uptime Institute Certified
Tanggal
31 Desember 2018



Profil Perusahaan



NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, KANTOR CABANG DAN PERWAKILAN LUAR NEGERI SERTA KANTOR WILAYAH

ENTITAS ANAK

Kantor Entitas Anak	Alamat/Telp./Fax/Situs Web	Kantor Entitas Anak	Alamat/Telp./Fax/Situs Web
PT Bank BNI Syariah	Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 11 Kuningan, Jakarta 12950 Tel.: (021) 29701946 Fax.: (021) 29667935 Email: info@bnisyaria	PT BNI Life Insurance	BNI Life Tower Lantai 21 The Landmark Center Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta 12910 Tel.: (021) 2953 9999 Fax.: (021) 2953 9998 www.bni-life.co.id Email: customer-care@bni-life.co.id Customer Care: (021) 5021 7626 SMS Center: 0811117626
PT BNI Multifinance	Gedung BNI Life Insurance Lantai 5 Jl. Aipda K.S. Tubun No. 67 Petamburan, Jakarta Pusat 10260 Hotline: (021) 290 22555 Fax. (021) 290 22146 www.bnimultifinance.co.id	BNI Remittance	BNI Remittance Limited Flat/RM5 on GF, Nos 1-7 Keswick Street, Causeway Bay Hong Kong Tel.: +852 28908082 Fax.: +852 28908182
PT BNI Securities	Sudirman Plaza Indofood Tower Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 - 78 Jakarta 12910 Tel./Call Center: (021) 2554 3946 Fax.: (021) 5793 5831 Email: bnisec@bnisecurities.co.id www.bnisecurities.co.id		

ENTITAS ASOSIASI

Kantor Entitas Asosiasi	Alamat	Telp./Fax/ Situs Web
PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia ("SBPI")	Setiabudi 2 Building, Suite 502A, Jl HR Rasuna Said, Kav. 62 Kuningan, Jakarta, 12920	-
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190	Tel : (62-21) 515 2855 Fax : (62-21) 5299 1199 Call Center: (62-21) 0800 186 5734 Website : www.ksei.co.id
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Panin Tower - Senayan City, 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot.19 Jakarta 10270, Indonesia	Tel : (62-21) 7278 2380 Fax : (62-21) 7278 2370 Website : www.pefindo.com
PT Bank Mizuho Indonesia	Sinarmas Land Plaza Tower 2, Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta Pusat 10350	Tel : (62-21) 3925222 Website : www.mizuhobank.co.id
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Menara BTPN Lantai 35-37, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Kuningan Timur Jakarta Selatan 12190	Tel : (62-21) 80862500 Website : www.smbc.co.id



KANTOR CABANG, SUB BRANCH, PERWAKILAN LUAR NEGERI DAN **KANTOR WILAYAH**

KANTOR CABANG LUAR NEGERI

Kantor Cabang Luar Negeri	Alamat/Telp./Fax/Situs Web
Kantor Cabang Singapore	39 Robinson Road #01-02, 02-02 and 06-01/04 Robinson Point Singapore 068911 Tel.: +65 6225 7755 Fax.: +65 6225 4757
Kantor Cabang Hong Kong	G/F Far East Finance Center, 16 Hartcourt Road Hong Kong Tel.: +852 25299871, 28618600 Fax.: +852 28656500
Kantor Cabang Tokyo	Kokusai Bld 1 st Floor 3-1-1 Marunouchi Chiyoda-Ku Tokyo 100-0005, Japan Tel.: +81 3 3214 6565, 3214 5621 Fax.: +81 3 3212 6428, 3201 2633
Kantor Cabang London	30 King Street, London EC2V 8AG Tel.: +44 (0) 20 7776 4646 Fax.: +44 (0) 20 7776 4699
Kantor Cabang New York	One Exchange Plaza 5 th Floor Broadway New York NY. 10006 USA Tel.: +1 212 943 4750 +1 212 943 4760 Fax.: +1 212 344 5723
Kantor Cabang Seoul	8th Floor Wise Tower,6-4, 5-ga Namdaemun-ro, Jung-gu Seoul Tel.: +82 2-6386-8046

SUB BRANCH LUAR NEGERI

Kantor Cabang Luar Negeri	Alamat/Telp./Fax/Situs Web
Kantor Sub Branch Osaka	Nakanoshima Festival Tower 17th Floor 2-3-18 Nakanoshima Kita-ku Osaka 530-0005, Japan Tel.: +81 6470 83823 Fax.: +81 6470 83823

KANTOR PERWAKILAN LUAR NEGERI

Kantor Cabang Luar Negeri	Alamat/Telp./Fax/Situs Web
Kantor Perwakilan Yangon	BNI Yangon Office 3 rd Floor Room #0303A Sakura Tower 339 Bogyoke Aung San Road Kyauktada Township – Myanmar



Profil Perusahaan



KANTOR WILAYAH

Kantor Wilayah	Alamat/Telp./Fax/Situs Web
Kantor Wilayah Medan	Jl. Pemuda No. 12, Lantai 4 Medan 20151 Tel.: (061) 4567110, 4567002 Fax.: (061) 4567105, 4515754
Kantor Wilayah Padang	Jl. Dobi No. 1, Lantai 3 Padang 25138 Tel.: (0751) 890005-08 Fax.: (0751) 890010-11
Kantor Wilayah Palembang	Jl. Jend. Sudirman No. 132 Palembang 30126 Tel.: (0711) 361961-65, 321046 Fax.: (0711) 361966, 374160
Kantor Wilayah Bandung	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3, Bandung 40117 Tel.: (022) 4240431-39, 4240534 Fax.: (022) 4240432-4214926-4213107
Kantor Wilayah Semarang	Jl. Letjen. MT. Haryono No. 16, Semarang 50122 Tel.: (024) 3556747, 3556746 Fax.: (024) 3547686, 3520636
Kantor Wilayah Surabaya	Jl. Jend. A. Yani No. 286, Gedung Graha Pangeran Lt. 3-4, Surabaya 60292 Tel.: (031) 8292820 - 26 Fax.: (031) 8292805, 8292841
Kantor Wilayah Makassar	Jl. Jend. Sudirman No. 1 Lt.3, Makassar 90115 Tel.: (0411) 3620355-56, 3621926 Fax.: (0411) 3619562, 3625395
Kantor Wilayah Denpasar	Jl. Raya Puputan Renon No. 27 - Lantai 2, Renon Denpasar 82265 Tel.: (0361) 263304 - 08 Fax.: (0361) 227874, 263319
Kantor Wilayah Banjarmasin	Jl. Lambung Mangkurat No. 30, Banjarmasin 70111 Tel.: (0511) 3353689, 3357063 Fax.: (0511) 3354409, 3357066
Kantor Wilayah Jakarta Senayan	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 55, Jakarta Pusat 10210 Tel.: (021) 2500025, 5706057 (Hunting) Fax.: (021) 2500033
Kantor Wilayah Manado	Jl. Dotulong Lasut No. 1 Manado 95122 Tel.: (0431) 868019, 862777 Fax.: (0431) 851852/865458
Kantor Wilayah Jakarta Kota	Jl. Lada No. 1 - Jakarta 11110 Tel.: (021) 6901131- 2601090, 2601148 Fax.: (021) 6901131, 6901182, 2601165, 2601179
Kantor Wilayah Jakarta BSD	Gedung BNI Kantor Wilayah Jakarta BSD, Lt.7 Kav. Sunburst Lot.1-5 Jl. Pahlawan Seribu Lengkong Gudang BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten. Tel.: (021) 80826860 Fax.: (021) 29514074
Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran	Jl. Lada No.1 Lt.2, Jakarta 11110 Tel.: (021) 2601177 Fax.: (021) 2601165
Kantor Wilayah Papua	Jl. Kelapa II Entrop, Kota Jayapura, Papua 99224 Tel.: (0967) 5355311, 522354 Fax.: (0967) 533316
Kantor Wilayah Yogyakarta	Jl. Trikora No.1, Yogyakarta 55122 Tel.: (0274) 376287 Fax: (0274) 2872414
Kantor Wilayah Malang	Jl. Jend. Basuki Rahmat No.75-77, Malang 65179 Tel: (0341) 3611945-47 Fax: (0341) 324565, 354767

INFORMASI YANG TERSEDIA DI *WEBSITE*



Home

About Us

Services

Contact Us

Get Started

Dengan diberlakukannya Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, maka BNI telah melengkapi *website* perusahaan dengan beberapa informasi penting seperti informasi mengenai pemegang saham, struktur grup perusahaan, analisis kinerja keuangan, laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir serta profil Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, informasi-informasi yang disajikan dalam *website* senantiasa diperbaharui secara berkala.



Beranda

Berita, promo dan acara serta suku bunga dasar kredit

Personal

Berisi informasi mengenai simpanan, pinjaman kartu debit, simpanan pensiun, *bancassurance*

Bisnis

Berisi informasi mengenai perbankan bisnis, internasional dan treasury

Wealth

Berisi informasi mengenai produk, layanan, promo dan program *priority banking* yang dimiliki BNI yaitu BNI Emerald

Perusahaan

Berisi informasi yang meliputi:

Tentang BNI :

1. Visi dan Misi Perusahaan
2. Penghargaan
3. Budaya Perusahaan
4. Struktur Organisasi
5. Susunan anggota Dewan Komisaris
6. Susunan anggota Direksi
7. Informasi Sekretaris Dewan Komisaris.

Tata Kelola

1. Panduan dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berisi informasi dan dokumen terkait RUPS yang telah dilaksanakan yang terdiri dari:
 - a. Pemberitahuan RUPS
 - b. Pemanggilan RUPS
 - c. Ringkasan Risalah dan berita acara RUPS
3. Informasi dan Pedoman terkait Komite di bawah Dewan Komisaris
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Unit Audit Internal serta Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
5. Pelaporan *Whistle Blowing System* (WBS)
6. Kode Etik
7. Anggaran Dasar BNI
8. Patriot Acts Certification and AML, dan
9. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi.

Hubungan Investor, meliputi informasi sebagai berikut:

1. Laporan-laporan dan Presentasi Perusahaan, yang terdiri dari:
 - a. Laporan Tahunan Perusahaan
 - b. Laporan Keberlanjutan Perusahaan
 - c. Laporan DPLK BNI
 - d. Laporan Keuangan Konsolidasi (*audited*)

- e. Laporan Keuangan Triwulan
- f. Laporan Keuangan Bulanan
- g. Laporan Tahunan PKBL
- h. Presentasi Korporasi
2. Kinerja Keuangan Perusahaan, yang meliputi:
 - a. Ikhtisar Keuangan
 - b. Kebijakan Dividen
 - c. Laporan Peringkat
 - d. Liputan Analisis
3. Kinerja Saham, yang meliputi:
 - a. Harga Saham
 - b. Kronologis Pencatatan Saham
 - c. Struktur Kepemilikan Saham
4. Berita dan Kalender Investor, yang meliputi:
 - a. Pengumuman kepada Investor
 - b. Kalender Investor
 - c. Jadwal dan Pengumuman Dividen BNI
5. Kontak Investor dan Lembaga Terkait
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai Program BNI Berbagi, yang terdiri dari: Bentuk dan Ruang Lingkup Program
 - b. Penjelasan mengenai Program BNI Go Green
 - c. Penjelasan mengenai Program Kampoeng BNI, dan
 - d. Program KAMI Bersama BNI

E-Banking

Berisi informasi mengenai BNI ATM, BNI SMS Banking, BNI Internet Banking, BNI Mobile Banking, BNI Phone Banking, *O-Branch*, *Agen46*, *TapCash*, *Debit Online*, *UnikQu*, *BNI IPay* dan *BNI Smartpay*.

Kontak

Berisi informasi mengenai Lokasi Kantor Cabang, Jaringan Global dan Kontak BNI.



PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2018, anggota Dewan Komisaris BNI telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Ari Kuncoro	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>1st Roundtable on Southeast Asian Economic and Trade</i>	17 April 2018 Washington DC	Center for Strategic & International Studies (CSIS)
		<i>CSIS Global Leaders Forum</i>	23 Juli 2018 Washington DC	Center for Strategic & International Studies (CSIS)
		<i>Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"</i>	30 Agustus 2018, Jakarta	BNI Corporate University
		<i>"Key Risk Management Challenges in 2018"</i>	27 – 28 September 2018 Makassar	Bankers Association for Risk Management (BARA)
Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama	<i>"Risk Management on Credit Process"</i>	6 – 7 November 2018 Yogyakarta	Peak Pratama Indonesia
Revrisond Baswir	Komisaris Independen	<i>"Executive Risk Management Refreshment Program"</i>	2 – 9 Juli 2018 Dusseldorf, Frankfurt & Bern, Jerman	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		<i>Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"</i>	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
Pataniari Siahaan	Komisaris Independen	<i>"Executive Risk Management Refreshment Program"</i>	2 – 9 Juli 2018 Dusseldorf, Frankfurt & Bern, Jerman	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		<i>Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"</i>	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen	<i>Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"</i>	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
Sigit Widyawan	Komisaris Independen	<i>Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"</i>	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
		<i>"Key Risk Management Challenges in 2018"</i>	27 – 28 September 2018 Makassar	Bankers Association for Risk Management (BARA)



Profil Perusahaan



Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Bistok Simbolon	Komisaris	<i>Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"</i>	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
		<i>"Key Risk Management Challenges in 2018"</i>	27 – 28 September 2018 Makassar	Bankers Association for Risk Management (BARA)
Joni Swastanto	Komisaris	<i>Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"</i>	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
		<i>"Key Risk Management Challenges in 2018"</i>	27 – 28 September 2018 Makassar	Bankers Association for Risk Management (BARA)
Marwanto Harjowiryo	Komisaris	<i>"Executive Risk Management Refreshment Program"</i>	2 – 9 Juli 2018 Dusseldorf, Frankfurt & Bern Jerman	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		<i>"Key Risk Management Challenges in 2018"</i>	27 – 28 September 2018 Makassar	Bankers Association for Risk Management (BARA)

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2018, anggota Direksi BNI telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
Achmad Baiquni	Direktur Utama	<i>Opening Assesment KPKU</i>	29 Januari 2018 Jakarta	<i>Meeting</i>	KPKU
		<i>High Level International Conf New Growth Models in a Changing Global Landscape</i>	27 Maret 2018 Hotel Fairmont, Jakarta	<i>Conference</i>	IMF
		<i>Discovery and Dream Workshop</i> dalam rangka penyusunan <i>Corporate Plan</i> BNI 2019-2023	12 April 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI dan MC Kinsey
Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama	<i>Discovery and Dream Workshop</i> dalam rangka penyusunan <i>Corporate Plan</i> BNI 2019-2023	12 April 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI dan MC Kinsey
		<i>Design Workshop</i> dalam rangka penyusunan <i>Corporate Plan</i> BNI 2019-2023	21-22 Mei 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI & MC Kinsey
		<i>Workshop Delivery</i> dalam rangka penyusunan <i>Corporate Plan</i> BNI 2019-2023	06 Juni 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
		<i>Digital Leadership Forum</i>	07 Agustus 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
		<i>Business Meeting</i> BNI Semester II 2018	09-10 Aug 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
		Pembicara dalam kegiatan Festival <i>Entrepreneurship</i> Pancasila	13 Agustus 2018 Jakarta	Seminar	Universitas Pancasila
		<i>Refreshment</i> APU PPT	30 Agustus 2018 Jakarta	<i>Refreshment</i>	BNI
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	24 September 2018 Jakarta	<i>Refreshment</i>	BSMR
		Peluncuran dan bedah buku "Turbulensi Sport di Indonesia"	15 November 2018 Jakarta	Seminar	Kementerian Pemuda dan Olah Raga
<i>Corporate Governance Perception Index</i>	19 November 2018 Jakarta	Seminar	BNI		



Nama	Jabatan	Materi Pengembangan / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur Bisnis Korporasi	Peluncuran dan bedah buku "Turbulensi Sport di Indonesia"	15 November 2018 Jakarta	Seminar	Kementerian Pemuda dan Olah Raga
		<i>Corporate Governance Perception Index</i>	19 November 2018 Jakarta	Seminar	BNI
		<i>Discovery and Dream Workshop</i> dalam Rangka Penyusunan <i>Corporate Plan</i> BNI tahun 2019-2023	12 April 2018 Gedung BNI Kantor Pusat, Lantai 32 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI dan MC Kinsey
		<i>Update BSMR 5</i>	12 April 2018 Jakarta	<i>Risk Culture and Strategic Trend In Indonesian Banking</i>	BSMR
		<i>Design Workshop</i> dalam Rangka Penyusunan <i>Corporate Plan</i> BNI Tahun 2019-2023	6 Juni 2018 Gedung BNI Kantor Pusat Lantai 25 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI Divisi REN
		<i>Compliance Forum</i> Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	30 Agustus 2018 Gedung BNI Kantor Pusat Lantai 25 Jakarta	Sosialisasi	BNI Divisi BNV
Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	<i>National Startup Agritech Conference 2018</i>	06 Februari 2018 Convention Hall ICE -BSD City Jakarta	<i>Conference</i>	Himpunan Alumni IPB
		<i>Talk Show Creative Santri Kreatif Preneure Indonesia</i>	06 Maret 2018 Bengkel Kreatif Hello Indonesia, Tangerang	Forum	Nahdatul Ulama (NU)
		Sebagai Pembicara: Pelatihan <i>Refreshment</i> pembiayaan Segmen Kecil dan KUR 2018 & Supervisi Kanwil WBN	16 Maret 2018 Kanwil Bandung	Forum	Internal BNI
		Sebagai Pembicara: <i>Refreshment</i> Segmen Kecil dan Program Serap Gabah	19 Maret 2018 Kanwil Surabaya	Forum	Internal BNI
		<i>Half Day Seminar CWMA 2018</i>	05 April 2018 Jakarta	Seminar	CWMA
		Permohonan menjadi Pembicara <i>Workshop</i> Penyusunan Rencana Pembangunan Percontohan Perkebunan Teh Rakyat	9 April 2018 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta	<i>Workshop</i>	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		<i>Discovery and Dream Workshop</i> dalam rangka penyusunan <i>Corporate Plan</i> BNI 2019-2023	12 April 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI dan MC Kinsey
		Sebagai Pembicara: Pembukaan <i>Workshop</i> HNS dan HCS	20 April 2018 Novotel Bogor	<i>Workshop</i>	Internal BNI



Profil Perusahaan



Nama	Jabatan	Materi Pengembangan / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Keuangan	FGD Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia	12 Maret 2018 R. Rapat KEIN Lt. 1 Gd. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lt.1 Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta	Seminar	Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia
		Seminar "Mengoptimalkan Momentum, Memperkuat Struktur" disertai dengan Peluncuran Buku Laporan Perekonomian Indonesia 2017	28 Maret 2018 Function Room, Gedung Thamrin Lantai 4 BI Jakarta	Seminar	Bank Indonesia
		Seminar Tren Ekonomi Digital: Era Transaksi Elektronik, Peluang dan Tantangan dari Harian Bisnis Indonesia	4 April 2018 The Westin Hotel Kuningan, Jakarta	Seminar	Bisnis Indonesia
		Undangan sebagai narasumber pada acara "Coffee Break Bersama Kapolda Metro Jaya mengenai "Skimming"	10 April 2018 Lantai 2 Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta	Seminar	Kapolda Metro Jaya
		Discovery and Dream Workshop dalam rangka Penyusunan Corporate Plan BNI 2019-2023	12 April 2018 R. Cakrawala Lantai 32 Jakarta	Workshop	BNI
		Sebagai Narasumber Acara "Membangun Era Baru Sistem Pembayaran Indonesia"	25 April 2018 Grand Hyatt Hotel Jakarta	Seminar	Artajasa
		Business Forum Industri Makanan dan Minuman dalam Rangka Kerangka Revolusi Industri 4.0	2 Mei 2018 Grha BNI Lantai 25	Seminar	BNI
		Diskusi Kajian Stabilitas Keuangan "Tantangan Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Ketidakpastian Perkembangan Global dan Domestik"	18 Mei 2018 Ruang Serbaguna - Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 3 BI	Seminar	Bank Indonesia
		Design Workshop dalam rangka Penyusunan Corporate Plan BNI 2019 - 2023	21 Mei – 22 Mei 2018 Grha BNI Lantai 25	Seminar	Bank Indonesia
		Delivery Workshop dalam rangka Penyusunan Corporate Plan BNI 2019- 2023	6 Juni 2018 Grha BNI Lantai 25	Seminar	Bank Indonesia
		Invitation as Speaker for RHB Fintech Luncheon : QR Code, NPG and The Future of Indonesia E-Payment	10 Juli 2018 Business Meeting Room, Ritz Carlton PP	Seminar	Bank Indonesia
		Digital Leadership Forum	7 Agustus 2018 Grha BNI Lantai 25	Seminar	BNI
		Macquaire ASEAN Conference 2018	29 Agustus 2018 Singapore	Conference	MacQuarie
		Refreshment APU PPT	30 Agustus 2018 Grha BNI Lantai 25	Refreshment	BNI & PPAK
		Diskusi RAPBN 2019 : Sudah Sehat dan Adilkah Belanja Kita?	5 September 2018 Ballroom Hotel Mandarin Oriental Jakarta	Seminar	Kementerian Keuangan
		Sharing Session Bersama Moody's Specialist (Dr. Steven Cochcrane, Phd & Dr. Olga Loiseau-Aslanidi, Phd)	10 Oktober 2018 Ruang Cakrawala Lantai 32	Seminar	BNI
Business Forum "Outlook Ekonomi Indonesia Pada Tahun Politik 2019"	24 Oktober 2018 Grha BNI Lantai 25	Seminar	BNI		
Professional Recognition Program Certified Professional Management Accountant (PRP CPMA)	21 November 2018 Junior Ballroom LG Level, Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta	Pelatihan	Institut Akuntan Manajemen Indonesia – Unika Atmajaya		
BNI Sharing Session Bersama Prasetya Mulya Executive Learning Institute	29 November 2018 Graha BNI Lantai 25	Seminar	BNI		



Nama	Jabatan	Materi Pengembangan / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
		<i>Business Forum "Tantangan & Peluang Ekosistem Kesehatan di Indonesia pada Era Industri 4.0"</i>	12 Desember 2018 Grha BNI Lantai 25	Seminar	BNI
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Bisnis Tresuri dan Internasional	<i>Conference JP Morgan ASIA</i>	11-12 Januari 2018 Singapore	<i>Conference</i>	BNI
		<i>Daiwa Investment Conference Tokyo 2018</i>	7-9 Maret 2018 Tokyo	<i>Conference</i>	BNI
		<i>Workshop Design Corporate Plan 2018 dengan McKinsey</i>	1- 2 April 2018 Kantor Pusat BNI, Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI & MC Kinsey
		<i>Discovery and Dream Workshop dalam rangka penyusunan Corporate Plan BNI 2019-2023</i>	12 April 2018 Kantor Pusat BNI, Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI Divisi REN _ MC Kinsey
		<i>CSIS-BNI Roundtable on U.S Southeast Asia Financial and Investment Relations</i>	17 April 2018 Washington DC	<i>Conference</i>	CSIS
		<i>High Level Discussion Forum CSIS-BNI</i>	23 Juli 2018 Washington DC	<i>Conference</i>	CSIS
		<i>Business Meeting Semester II 2018</i>	9-10 Agustus 2018 Ballroom Gedung BNI Pejompong, Jakarta	Seminar	Divisi REN
		<i>Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"</i>	30 Agustus 2018 Kantor Pusat BNI Jakarta	<i>Workshop</i>	PPATK
		<i>Digital Leadership Forum</i>	7 September 2018 Kantor Pusat BNI, Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
		<i>Pelatihan Sertifikasi Treasury Level Advance</i>	8 September 2018 Hotel Pullman, Jakarta	Pelatihan	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
		<i>Indonesia Economy and Investment Outlook 2019</i>	12 Desember 2018 Hongkong	<i>Workshop</i>	Divisi INT & Bisnis Indonesia
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan	Sebagai Narasumber Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa	30 Januari 2018 Jakarta	Seminar	Kementerian Desa
		FGD Implementasi produk unggulan kawasan pedesaan dengan pola kemitraan Kementerian Desa	31 Januari 2018 Jakarta	FGD	Kementerian Desa
		Sosialisasi SPAN dengan TNI AU	31 Januari 2018 Jakarta	Seminar	TNI AU
		Sebagai Narasumber Seminar Nasional Kemendikbud	14 Maret 2018 Jakarta	Seminar	Kemendikbud
		Sosialisasi SPAN dengan Kementerian pertahanan	7 Maret 2018 Jakarta	Seminar	Kementerian Pertahanan
		<i>Discovery and Dream Workshop dalam rangka Penyusunan Corporate Plan BNI 2019-2023</i>	12 April 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI & MC Kinsey
		Seminar Nasional Ketenagakerjaan	25 April 2018 Jakarta	Seminar	Kementerian Sosial
Bob Tyasika Ananta	Direktur Manajemen Risiko	<i>KEIN Meets The CEO "Mengelola Potensi Ekonomi 2018"</i>	17 Januari 2018 Jakarta	Seminar	KEIN
		<i>Executive Briefing KPKU BUMN "Sosialisasi Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (KASPI)"</i>	24 Januari 2018 Jakarta	Seminar	Kementerian BUMN
		Diskusi Panel & Peluncuran Buku Bapak Aswin Wirjadi " <i>Game Changing</i> "	26 Januari 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	Aswin Wirjadi
		Seminar Indonesia Outlook 2018	6 Februari 2018 Jakarta	Seminar	Indonesia Outlook
		Prospek Industri Keuangan Perbankan & Tantangan <i>Digital</i> oleh Bapak Agus DW Martowardjojo	21 Februari 2018 Jakarta	Seminar	PERBANAS



Nama	Jabatan	Materi Pengembangan / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
		ASEAN Financial Innovation Network	7 Maret 2018 Jakarta	Workshop	ASEAN Financial Innovation
		International Leadership Seminar "Transformational Leadership in the Next Era: Issues, Challenges, and Strategy"	8 Maret 2018 Bali	Seminar	Bank Indonesia
		Business Forum: Pembiayaan Perusahaan melalui Pembelian Corporate Bond	19 Maret 2018 Jakarta	Seminar	Business Forum
		2018 Retail Banking Forum	21 Maret 2018 Jakarta	Seminar	Retail Banking Forum
		Seminar Virtual Currency: Apa dan Bagaimana Risikonya bagi Masyarakat Luas	26 Maret 2018 Jakarta	ISEI	ISEI
		The Power of Collaboration Koran SINDO	27 Maret 2018 Jakarta	SINDO	SINDO
		Discovery and Dream Workshop dalam rangka penyusunan Corporate Plan BNI 2019-2023	12 April 2018 Jakarta	Workshop	BNI & MC Kinsey
		Annual Bankers Gathering	15 Mei 2018 Pacific Place, Jakarta	Workshop	PERBANAS
		Peluncuran Buku dan Diskusi kajian Stabilitas keuangan - Tantangan stabilitas sistem keuangan di tengah perkembangan global dan domestik	18 Mei 2018 Kantor Bank Indonesia Jakarta	Seminar	Gubernur BI
		PWC Survey: Digital Banking in Indonesia 2018	10 Juli 2018 The Westin, Jakarta	Seminar	PwC
		The Indonesia Green Finance Roundtable "The Role of Government Facilities & Innovative Finance Instruments"	23 Juli 2018 Sahid Sudirman Center Jakarta	Seminar Internasional	SMI
		Workshop Early Warning System Konglomerasi Keuangan	27 Juli 2018 Jakarta	Workshop	OJK
		BARa Risk Forum	1 Agustus 2018 Mandiri Club, Jakarta	Seminar	BARa
		The 3 rd Asia Pacific Research in Social Science and Humanities (APRISH) - Convention & Innovation in Disruption Era	15 Agustus 2018 JS Luwansa, Jakarta	Seminar Internasional	UI
		Seminar Refreshment APU PPT	30 Agustus 2018 Gedung BNI Kantor Pusat Lt 25, Jakarta	Seminar	PPATK
		BNI Talk "Banking On The Millennial Perspective"	4 September 2018 Gedung BNI Kantor Pusat Lt 25, Jakarta	Workshop	BNI
		Program SESPIBANK - Overview Bank Strategic Management	13 September 2018 LPPI Kemang, Jakarta	Seminar	LPPI
		Uji Refreshment Asesor	27-28 September Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Fatmawati, Jakarta	Refreshment	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
		Seminar FGD "Assessing Potential Financing Scheme of PV Solar Rooftop Installation in Housing and Commercial Buildings"	10 Oktober 2018 Double Tree Hilton Hotel Jakarta	Seminar	Kementerian ESDM RI
		Business Forum: Outlook Ekonomi Indonesia Pada Tahun Politik 2019	24 Oktober 2018 Gedung BNI Kantor Pusat Lt 25	Workshop	BNI Divisi REN
		Seminar Diskusi Publik - Respon Kebijakan Sistem keuangan terhadap Perkembangan Perekonomian Terkini	1 November 2018 Gedung Juanda – Aula Mezanine, Jakarta	Seminar	Kementerian Keuangan RI
		Seminar Indonesian Risk Management Outlook 2019 Achieving High Performance Amid political Risk	6 November 2018 Pullman Hotel Jakarta	Seminar	LPPI



Nama	Jabatan	Materi Pengembangan / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
		Seminar IAEI "Membangun Ekonomi Umat Melalui Inklusi Perbankan Syariah"	15 November 2018 IAIN Sultan Amai Gorontalo	Seminar	IAEI
		Seminar SGDs di Era Industri 4.0	7 Desember 2018 Bappenas/Kementerian PPN, Jakarta	Seminar	Bappenas/ Kementerian PPN
		Seminar <i>Economic Outlook</i> 2019 - Bisnis Bank di Era Digital: Risiko dan Mitigasi	10 Desember 2018 Plaza Mandiri Auditorium, Jakarta	Seminar	IBI
Endang Hidayatullah	Direktur Kepatuhan	BSMR Level 5	30 Maret 2018 Jakarta	Sertifikasi	BSMR
		<i>Workshop Discovery & Dream Corporate Plan</i> BNI 2018	12 April 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI & Mc Kinsey
		Seminar tentang "Peran Aktif Kepatuhan Perbankan Menjaga Stabilitas melalui Pencegahan Pendanaan Terorisme"	26 Juni 2018 Hotel Fairmont, Jakarta	Seminar	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		<i>Workshop</i> tentang "Isu-Isu Hukum Terkait Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia"	24 Juli 2018 Hotel Bidakara, Jakarta	<i>Workshop</i>	Forum Hukum Bisnis dan Kepailitan
		Pelatihan FKDKP Angkatan ke-2 Tahun 2018	1-2 Agustus 2018 Hotel Aston, Makassar	Pelatihan	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		<i>Business Meeting</i> Semester II 2018	9-10 Agustus 2018 Menara BNI Pejompongan Jakarta	<i>Business Meeting</i>	BNI Divisi REN
		Rakerda Serikat Pekerja DPD WJY dengan tema <i>How to be a great leader</i>	25 Agustus 2018 Bogor	Rapat Kerja	SP BNI
		<i>Compliance Forum</i> Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	30 Agustus 2018 Jakarta	Seminar	BNI Divisi BNV
		<i>Workshop</i> Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Bidang <i>General Banking</i>	26 September 2018 Hotel Pullman Central Park, Jakarta	<i>Workshop</i>	OJK
		Sosialisasi Pencapaian serta Arah Pelaksanaan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi Terhadap Konglomerasi Keuangan	15 November 2018 Hotel JS Luwansa, Jakarta	Sosialisasi	OJK
		<i>Sharing Session</i> dengan tema <i>Digital Leadership in Millennial Era</i>	22-23 November 2018 Hotel The Rinra, Makassar	<i>Sharing Session</i>	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)
		<i>Sharing Session</i> dengan tema <i>Driving Business Agility in Disruptive Era</i>	29 November 2018 Ballroom Graha BNI Lt. 25 Jakarta	<i>Sharing Session</i>	Prasetiya Mulya Executive Learning Institute
		Rakor KPK dengan Mitra Kerja Perbankan, Asuransi, dan KSEI	29 November 2018 Jakarta	Rapat Kerja	KPK
		<i>International Business Integrity Conference</i> (IBIC) 2018	4-5 Desember 2018 Jakarta	Konferensi	KPK
		<i>Awards Presentation Bringing About CG Changes: Opportunitites and Challenges for Directors</i>	10 Desember 2018 Hotel Le Meridien Jakarta	Ajang Penghargaan	Indonesian Instutue for Corporate Directorship (IICD)



Profil Perusahaan



Nama	Jabatan	Materi Pengembangan / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
Tambok P. Setyawati	Direktur Bisnis Ritel	<i>Refreshment</i> BSMR	02 April 2018 Jakarta	<i>Refreshment</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
		<i>Workshop Discovery and Dream Corporate Plan</i> BNI 2018	12 April 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI & Mc Kinsey
		<i>Workshop</i> HNS dan HCR tahun 2018	19 April 2018 Bogor	<i>Workshop</i>	BNI
		<i>Business Forum</i> Industri Makanan dan Minuman dalam rangka Kerangka Revolusi Industri 4.0	2 Mei 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
		<i>Workshop Transactional Banking Solutions</i> 2018	28 Mei 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
		<i>Business Forum</i> Pariwisata	25 Juli 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
		<i>Business Meeting</i> BNI Semester II 2018	9-10 Agustus 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
		<i>Refreshment</i> APU PPT	30 Agustus 2018 Jakarta	<i>Refreshment</i>	BNI
		Temu Nasional Seribu Organisasi Perempuan Indonesia dan Kongres ICW	14 September 2018 Yogyakarta	<i>Workshop</i>	Kementerian BUMN
		<i>Cyber Security</i> dan <i>Banking Technology</i> dari Perspektif <i>User</i> dan IT	26 September 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI dan JP Morgan
		<i>Media Workshop: Program dan Inovasi Produk Kartu Khusus IMF – WB Annual Meeting</i> 2018	4 Oktober 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
		<i>Grand Launch of</i> CNBC Indonesia dan <i>CEO Summit</i>	10 Oktober 2018 Bali	<i>Workshop</i>	BNI
		<i>Financial Institutions Expo</i> (Fin Expo)	27 Oktober 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	OJK
		Seminar Bank Indonesia: <i>Payment Gateway</i>	31 Oktober 2018 Jakarta	Seminar	BI
		<i>Workshop Road Map Sektor Retail Banking</i> s.d. tahun 2023	2 November 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
		<i>Workshop</i> Divisi BSL	10 November 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
		<i>Knowledge Sharing: IT Strategic Plan</i> (ITSP) BNI	14 November 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
<i>Workshop</i> Penjualan Konsumer Divisi SLN 2019	28 November 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI		
<i>Sharing Session</i> bersama Prasetiya Mulya <i>Executive Learning Institute: Bpk. Ruben Saragih, MM., MA.</i>	29 November 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI		
Rakernas REI 2018	05 Desember 2018 Bali	<i>Workshop</i>	Real Estate Indonesia		
<i>Workshop</i> Sektor <i>Retail Banking</i> 2018	7-8 Desember 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI		



Nama	Jabatan	Materi Pengembangan / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
Dadang Setiabudi	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Permohonan menjadi narasumber ulang tahun emas akutansi Universitas Padjajaran dengan tema " <i>Disruptive Teknologi dan Innovation</i> "	02 Februari 2018 Aula Graha Sanusi Unpad Bandung	UNPAD	UNPAD
		Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 5	17 Februari 2018 Jakarta	GARP	BSMR
		<i>Exclusive Invitation to plug and play fintech dan insurtech</i>	5 -6 Maret 2018 Singapura	<i>Plug and Play</i>	Plug and Play
		Penghargaan (<i>Award</i>) dari iCiO " <i>THE MOST INNOVATIVE CIO 2018</i> "	07 Maret 2018 The Ritz Carlton Pasific Place Jakarta	iCiO Award 2018	iCiO
		<i>Pertamina Digital Expo</i>	25-27 Januari 2018, Pertamina Office, Jakarta	Seminar	Pertamina
		<i>Discovery and Dream Workshop</i> dalam rangka penyusunan <i>Corporate Plan</i> BNI 2019-2023	12 April 2018 Jakarta	Workshop	BNI & MC Kinsey
		EXPO 2.0	27 April 2018 Djakarta Theatre XXI Ballroom, Jakarta	<i>Plug and Play</i>	Plug and Play



Profil Perusahaan



Nama	Jabatan	Materi Pengembangan / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
		<i>Blockchain The Next Digital Revolution in Every Industry</i>	7 Maret 2018 The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place	CTI SUMMIT 2018	CTI
		Narasumber <i>Infobank Digital Leadership Forum Digital Mastery for Business Leader Transformation in Disruption Era</i>	8 Mei 2018 Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta	Seminar	Infobank
		<i>Sharing Session</i> dengan LKPP Pemanfaatan peluang pemasaran produk produk BUMN melalui E-Katalog	16 Mei 2018 Jakarta	<i>Sharing Session</i>	KBUMN
		Menerima award peringkat I kategori <i>E-Banking</i> acara <i>Banking Services Excellence Award 2018</i>	5 Juni 2018 Hotel Shangrila, Jakarta	<i>Award</i>	Infobank
		<i>Irving Fisher Commite Internasional Seminar on Big Data</i>	26 Juli 2018 Nusa Dua, Bali	Seminar	Bank Indonesia
		<i>Refreshment APU</i> oleh PPATK	30 Agustus 2018 Jakarta	Sosialisasi	BNI
		FGD Operasional <i>Back Office</i> "penguatan <i>back office, operational risk awareness</i> dan tantangan ke depan"	7 September 2018 Hotel Pullman, Jakarta	FGD	BI
		Digitalisasi di Era Bisnis	14 September 2018 Ballroom Bidakara Grand Savoy , Bandung	Seminar	UNPAD
		<i>Indonesian Banking Award</i> (Juara 1 <i>The Best Digital Banking Services</i>)	26 September 2018 Hotel JS Luwansa Kuningan Tempo Group, Jakarta	<i>Banking Award</i>	Tempo Group
		<i>Annual Meeting 2018 IMF World Bank Group</i>	Oktober 2018 Bali	<i>Annual Meeting</i>	IMF
		EXPO	16 Oktober 2018 Soehanna Hall The Energy Building 2nd Floor Jakarta	<i>Plug and Play</i>	<i>Plug and Play</i>
		<i>F5 Networks Internasional Technology Center Seattle</i>	19-20 Oktober 2018 Seattle USA	Seminar	F5
		<i>Oracle Open World</i>	22-26 Oktober 2018 San Fransisco	Konvensi Tahunan	Oracle
		Komunikasi bersama rencana pengembangan integerasi pelaporan	1 November 2018 Jakarta	Seminar	BI
		Pembicara pada IBEX 2018	15 November 2018 Hotel Fairmont Senayan Jakarta	Seminar	PERBANAS
		Seminar Nasional HUT OJK Ke-7	13 November 2018 Jakarta	Seminar	OJK



PENGEMBANGAN KOMPETENSI SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT

Sepanjang tahun 2018, Senior Executive Vice President BNI yang telah mengikuti berbagai program kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Jabatan	Waktu	Materi Pengembangan / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
Yuddy Renaldi	SEVP <i>Remedial & Recovery</i>	15 Februari 2018	BSMR Level 5	17 Februari 2018 Jakarta	Sertifikasi	BSMR
			<i>Sharing Session</i> TEMA: "Indonesia Pasca Bonanza Komoditas dan Implikasinya pada Sektor Perbankan"	18 Mei 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
			<i>Sharing Session & Peningkatan Kompetensi Menghadapi Permasalahan Hukum</i>	28 Mei 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI Corporate University
			<i>Workshop "Refreshment Anti Pencucian Uang"</i>	30 Agustus 2018, Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
			<i>Workshop Cyber Security & Banking Technology</i>	26 September 2018, Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
Ronny Venir	SEVP <i>Commercial Banking</i>	April 2018	<i>Discovery and Dream Workshop</i> dalam Rangka Penyusunan <i>Corporate Plan</i> BNI tahun 2019-2023	12 April 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI & MC Kinsey
		Mei 2018	Memberikan pengarahan "Optimalisasi Profitabilitas Melalui Manajemen Portofolio dan <i>Risk Awareness</i> "; Kepada Pemimpin Kelompok Manajemen Bisnis & <i>Credit Risk Manager</i> "	07 Mei 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
		Mei 2018	Memberikan Pengarahan dalam <i>Workshop Transactional Banking Solutions 2018</i>	28 Mei 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
		Agustus 2018	<i>Workshop "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"</i>	30 Agustus 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI Corporate University
		September 2018	<i>Refreshment Assessment DDI 2018</i>	05 September 2018 Jakarta	<i>Refreshment</i>	PT DDI
		Oktober 2018	Menjadi Penguji Dalam Ujian Komprehensif Brevet Kredit SVP dan VP	03 Oktober 2018 Jakarta	Pelatihan	BNI
		Oktober	Menjadi Pembicara pada <i>Leadership Development Program</i> DPD SP WJK	13 Oktober 2018 Jakarta	<i>Workshop</i>	BNI
		November	Menjadi pembicara pada acara Pelatihan Industri Perkapalan untuk Sentra Kredit Menengah (SKM).	24 November 2018 Batam	<i>Workshop</i>	BNI



PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2018, anggota Komite Audit BNI yang telah mengikuti berbagai program kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Pataniari Siahaan	Ketua	"Executive Risk Management Refreshment Program"	2 – 9 Juli 2018 Dusseldorf, Frankfurt & Bern, Jerman	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
Ahmad Fikri Assegaf	Anggota	Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
Donnaria Silalahi	Anggota	-	-	-
Lungguk Gultom*	Anggota	-	-	-

*) menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2 Januari 2018

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2018, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BNI telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Periode	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Ari Kuncoro	Ketua	13 September - 31 Desember 2018	1 st Roundtable on Southeast Asian Economic and Trade	17 April 2018 Washington DC	Center for Strategic & International Studies (CSIS)
			CSIS Global Leaders Forum	23 Juli 2018 Washington DC	Center for Strategic & International Studies (CSIS)
			Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
			"Key Risk Management Challenges in 2018"	27 – 28 September 2018 Makassar	Bankers Association for Risk Management (BARA)
Wahyu Kuncoro	Anggota	13 September - 31 Desember 2018	"Risk Management on Credit Process"	6 – 7 November 2018 Yogyakarta	Peak Pratama Indonesia
Revrisond Baswir	Anggota	13 September - 31 Desember 2018	"Executive Risk Management Refreshment Program"	2 – 9 Juli 2018 Dusseldorf, Frankfurt & Bern, Jerman	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
			Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University



Nama	Jabatan	Periode	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Pataniari Siahaan	Anggota	13 September - 31 Desember 2018	"Executive Risk Management Refreshment Program"	2 – 9 Juli 2018 Dusseldorf, Frankfurt & Bern, Jerman	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPPI)
			Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"	30 Agustus 2018, Jakarta	BNI Corporate University
Bistok Simbolon	Anggota	13 September - 31 Desember 2018	Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
			"Key Risk Management Challenges in 2018"	27 – 28 September 2018 Makassar	Bankers Association for Risk Management (BARA)
Joni Swastanto	Anggota	13 September - 31 Desember 2018	Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
			"Key Risk Management Challenges in 2018"	27 – 28 September 2018 Makassar	Bankers Association for Risk Management (BARA)
Marwanto Harjowiryo	Anggota	13 September - 31 Desember 2018	"Executive Risk Management Refreshment Program"	2 – 9 Juli 2018 Dusseldorf, Frankfurt & Bern, Jerman	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPPI)
			"Key Risk Management Challenges in 2018"	27 – 28 September 2018 Makassar	Bankers Association for Risk Management (BARA)
Sigit Widyan	Anggota	13 September - 31 Desember 2018	Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
			"Key Risk Management Challenges in 2018"	27 – 28 September 2018 Makassar	Bankers Association for Risk Management (BARA)
Reny Wirandhani	Anggota	13 September - 31 Desember 2018	-	-	-
Efita Praharani	Anggota	13 September - 31 Desember 2018	Pengetahuan Dasar di Bidang Dana Pensiun	26 Oktober 2018 Jakarta	Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2018, anggota Komite Pemantau Risiko BNI telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Revrison Baswir	Ketua	1 Januari – 31 Desember 2018	"Executive Risk Management Refreshment Program"	2 – 9 Juli 2018 Dusseldorf, Frankfurt & Bern, Jerman	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPPI)
			Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University



Profil Perusahaan



Nama	Jabatan	Periode	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Bistok Simbolon	Anggota	1 Januari – 31	Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
			"Key Risk Management Challenges in 2018"	27 – 28 September 2018 Makassar	Bankers Association for Risk Management (BARA)
Joni Swastanto	Anggota	Desember 2018	Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
			"Key Risk Management Challenges in 2018"	27 – 28 September 2018 Makassar	Bankers Association for Risk Management (BARA)
Irwan Rinaldi	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2018	-	-	-
Kartika Siwi	Anggota	Desember 2018	-	-	-

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sepanjang tahun 2018, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Periode	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Revrisond Baswir	Ketua	1 Januari – 31 Desember 2018	"Executive Risk Management Refreshment Program"	2 – 9 Juli 2018 Dusseldorf, Frankfurt & Bern, Jerman	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
			Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
Joni Swastanto	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2018	Compliance Forum: "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan"	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
			"Key Risk Management Challenges in 2018"	27 – 28 September 2018, Makassar	Bankers Association for Risk Management (BARA)
Krisna Wijaya	Anggota	1 Januari – 26 Juni 2018	-	-	-
Parikesit Suprpto	Anggota	13 Desember – 31 Desember 2018	Manajemen Risiko Perbankan Level 2	15 Mei 2018 Jakarta	Sertifikasi - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
			Risk Control Self Assesment di Industri Perasuransian & Key Risk Indicator	29 November 2018 Jakarta	Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (LPMA – STPA Trisakti)
			Compliance Forum: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
Utang Ranuwijaya	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2018	A Half Day Training "Risk Management"	29 November 2018 Jakarta	Lembaga Pengembangan Manajemen Asuransi Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (LPMA – STMA TRISAKTI)



Nama	Jabatan	Periode	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
			<i>Workshop Pra-Ijtima' (Annual Meeting)</i> Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2018 Bidang Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah	4 Oktober 2018 Jakarta	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Rizqullah	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2018	Pelatihan <i>Refreshment Risk Management</i>	7 April 2018 Jakarta	BSMR
			<i>Compliance Forum: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan</i>	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
Hasanuddin	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2018	-	-	-
Rosa Lima Dwi Mutiar	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2018	Seminar Nasional "Perusahaan Pembiayaan di Mata Perbankan"	08 Mei 2018 Jakarta	APPI & OJK
			Seminar Nasional "Industri Pembiayaan di Pasar Modal"	26 Juni 2018 Jakarta	APPI dan OJK
			Sertifikasi Management Risiko Perusahaan Pembiayaan	11 Desember 2018 Jakarta	BSMR
			<i>Compliance Forum: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan</i>	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
Eddy Siswanto	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2018	<i>New Paradigm in Infrastructure Financing (The 2018 IMF-World Bank Annual Meetings)</i>	09 Oktober 2018 Tanjung Benoa, Bali	IMF dan Kementerian Keuangan RI.
			<i>Compliance Forum: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan</i>	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
Suhendry Hafni	Anggota	13 Desember – 31 Desember 2018	<i>Compliance Forum: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan</i>	30 Agustus 2018 Jakarta	BNI Corporate University
			<i>Workshop Assesor (Update Tool Assesment Process)</i>	02 November 2018 Jakarta	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Setyowati	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2018	-	-	-

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Selama tahun 2018, Sekretaris Perusahaan tidak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Namun demikian, Sekretaris Perusahaan telah melakukan kegiatan seminar dengan menjadi Narasumber pada kegiatan berikut ini:

1. Forum Diskusi Stabilitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 November 2018, Jakarta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dan
2. Analisa Intelijen pada Pengaruh Perkembangan Perekonomian Nasional terhadap Keamanan Nasional, pada tanggal 12 Desember 2018 di Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Republik Indonesia.



PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Sepanjang tahun 2018, Satuan Pengawasan Internal BNI telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Internal

Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu Pelaksanaan
<i>Refreshing Auditor</i> (tentang Internal Audit dan perkembangan bisnis/organisasi BNI)	Januari dan Maret 2018
Pelatihan <i>Internal Control COSO</i>	Januari 2018
Pelatihan <i>Design Thinking</i>	Januari 2018
Pelatihan <i>Report Writing</i>	Januari 2018
Pelatihan <i>Improving Self Confidence</i>	Maret 2018
Seminar " <i>Quo Vadis BUMN</i> " oleh Kementerian BUMN	April 2018
Seminar "Kepemimpinan sebagai <i>Role Model</i> untuk Membangun Budaya dan Sistem <i>Fraud</i> "	Juli 2018
<i>Workshop "Antisipasi OTT Dalam Tindak Pidana Korupsi"</i>	Juli 2018
Konferensi Nasional III Tahun 2018: " <i>Peran Auditor Internal Dalam Peningkatan Governance, Risk and Control di Era Disruptif</i> "	Agustus 2018
<i>Sharing Vision CITPE (Certified IT Procurement Expert)</i>	Agustus 2018
<i>Workshop "Investigative Interview Skill"</i>	Agustus 2018
<i>National Conference II - 2018 di The Trans Resort Bali: "Nurturing Agile Internal Auditors in Disruptive Times"</i>	Agustus 2018
<i>Workshop "Effective Fraud Mitigation"</i>	Agustus 2018
<i>Workshop "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Berpengaruh Terhadap Audit Terkait Maraknya Kasus-kasus Penyimpangan dalam Proses Pengadaan"</i>	Agustus 2018
<i>Workshop "Fraud Prevention and Detection: Forensic Data Analytics Approach"</i>	Oktober 2018
<i>Workshop "Urgensi dan Pelaksanaan Audit Keuangan dan Pemeriksaan Pajak di Lingkungan BUMN dan BUMD"</i>	Oktober 2018
Konferensi Nasional X IAIB Tahun 2018: " <i>Fostering an Innovative Internal Auditing as a Key Element in Innovative Banking</i> "	November 2018
<i>Workshop "Mobile Forensic Investigation Course"</i>	November 2018
Pelatihan dan Sertifikasi CITPE (<i>Certified IT Procurement Expert</i>)	November 2018
<i>IT Governance, Risk Management, Assurance & Cyber Security Summit</i>	November 2018
Pelatihan Audit <i>Digital Banking, Future of Internal Audit in Digital Era, Workshop</i>	Desember 2018
<i>Sharing Session "Driving Business Agility in Disruptive Era"</i>	Desember 2018

Analisis & Pembahasan Manajemen

174 TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI
178 TINJAUAN OPERASIONAL
224 ASPEK PEMASARAN
236 TINJAUAN KEUANGAN
297 PERPAJAKAN
300 *TRANSFER PRICING DOCUMENT*
303 *FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)*
305 INFORMASI MATERIAL LAINNYA



TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI



“

Di tengah situasi perekonomian di Indonesia yang tidak mengalami perubahan secara signifikan di tahun 2018, ditambah dengan semakin tertekannya Rupiah terhadap Dolar Amerika, BNI kembali membuktikan konsistensinya untuk terus memberikan kontribusi positif kepada negara dengan mencatat **pertumbuhan laba bersih** mencapai **10,3%** dibandingkan dengan tahun 2017 yang dipicu oleh meningkatnya komposisi pendapatan seperti pendapatan bunga dan syariah yang merupakan motor penggerak utama kegiatan operasional perbankan.

“



PEREKONOMIAN GLOBAL

Kondisi yang terjadi di Amerika Serikat tetap menjadi perhatian utama. Intensitas perang dagang antara Amerika Serikat dan China tidak hanya menyebabkan ketegangan kedua belah pihak secara langsung, tetapi juga berdampak pada mitra dagang Amerika Serikat dan China. Perang dagang tersebut dimulai sejak Presiden AS Donald Trump menyatakan keinginannya untuk mengenakan tarif bagi barang-barang China yang diekspor ke AS. Nilai tarif tersebut mencapai lebih dari US\$500 miliar yang meliputi 1.300 kategori barang-barang impor termasuk suku cadang pesawat, baterai, televisi layar datar, peralatan medis, satelit dan senjata. Sebagai balasan, China juga akan mengenakan tarif terhadap berbagai produk AS termasuk potongan aluminium, pesawat terbang, mobil, produk daging babi dan kedelai¹. Jumlah maupun jenis barang yang dikenakan tarif terus berubah seiring negosiasi yang dilakukan keduanya agar perang dagang tersebut tidak meluas. AS beralih melakukan hal tersebut untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dalam upaya menyehatkan perekonomian AS.

Selama tahun 2018, kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve menyita perhatian dunia. The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar 25 bps (*basis points*) sehingga Fed Fund Rate (FFR) saat ini berada di level 2,50%². Kenaikan tersebut dilakukan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2018 setelah mempertimbangkan kenaikan inflasi AS yang telah melewati batas nyaman 2% serta angka pengangguran hingga akhir tahun 2018 berada pada level 3,9%³. Tingkat pengangguran AS pada tahun 2018 sempat menyentuh level terendah sejak 49 tahun lalu, yakni ketika tingkat pengangguran AS mencapai 3,7% pada bulan Oktober 2018⁴. Pengangguran yang rendah meningkatkan *disposable income* dan kemampuan belanja AS sehingga memicu Inflasi AS. Selama tahun 2018 tingkat inflasi AS konsisten di atas angka 2% di mana pada bulan Juni dan Juli 2018, mencapai level tertinggi sebesar 2,9%⁵ sebagai akibat membaiknya kemampuan belanja masyarakat. Tertahannya inflasi menjelang akhir tahun tidak terlalu dikhawatirkan mengingat hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga energi. Tren penyerapan tenaga kerja juga mengalami kenaikan sehingga mendorong turunnya angka pengangguran. Sebagai negara yang pertumbuhannya tergantung dari konsumsi masyarakat, rendahnya tingkat pengangguran akan lebih mendorong terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi. Ekonomi AS di tahun 2018 terus meningkat dari 2,6% (yoy) pada triwulan I – 2018, naik menjadi 2,9% (yoy) di triwulan II – 2018 hingga menyentuh level 3% (yoy) pada triwulan III – 2018⁶ dan tercatat 3,1% (yoy) pada akhir tahun 2018. Peningkatan ekonomi ini ditopang oleh membaiknya daya beli masyarakat selain karena kebijakan Presiden Trump yang masif menjalankan

pembangunan infrastruktur. Untuk mendorong pembangunan, Trump bahkan berencana menerbitkan US Treasury lebih banyak untuk membiayai pembangunan. Kenaikan FFR akan menambah daya tarik investor untuk membeli US Treasury sebagai instrumen investasi yang minim risiko.

Dari kawasan Eropa, perekonomian Eurozone (EZ) yang kian membaik ditandai dengan membaiknya inflasi mendorong bank sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) untuk menurunkan stimulus pembelian surat berharga. Besarnya pembelian obligasi yang semula senilai €30 miliar per bulan, diturunkan menjadi €15 miliar per bulan sejak Juni 2018 dan akan dihentikan pada akhir Desember 2018⁷. Skema pembelian obligasi telah berlangsung selama satu dekade, tepatnya sejak krisis utang Eropa terjadi pada 2010. Keputusan penghentian ini tidak serta merta dilanjutkan dengan percepatan kebijakan pengetatan moneter seperti yang terjadi di AS. Kondisi ekonomi & politik Zona Eropa lebih unik. Beberapa anggota EZ memiliki persoalan masing-masing. Perebutan kekuasaan di Italia yang berlangsung dramatis antara kubu populis dan anggota parlemen yang pro Uni Eropa (UE) mengakibatkan kegagalan pemerintahan koalisi baru. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas ekonomi Italia, mengingat negara tersebut berada pada posisi ketiga dari sisi perekonomian terbesar di Eropa. Sebanyak 36% utang Italia dimiliki investor asing dan setara dengan 135% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Italia atau senilai €2,3 triliun⁸. Perkembangan dari Prancis juga ikut memberi eksese negatif. Demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak, tingginya pajak dan biaya hidup masyarakat menjadi persoalan yang serius. Harga bahan bakar diesel yang paling banyak dikonsumsi meningkat hingga 23% dalam 12 bulan terakhir, yang mencapai €1,5 atau tertinggi sejak dekade tahun 2000-an⁹. Banyaknya persoalan di EZ menyebabkan pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut tersendat. Pada triwulan I - 2018 hanya mampu tumbuh 2,4% (yoy) atau lebih rendah dari triwulan IV – 2017 sebesar 2,7% kemudian tumbuh 2,2% (yoy) di triwulan II – 2018 sebelum turun hingga 1,6% (yoy) pada triwulan III – 2018¹⁰ dan kembali lebih rendah mencapai 1,2% (yoy) pada triwulan IV -2018.

Beralih ke China, gaung perang dagang AS- China menyebabkan ekonomi China berkontraksi di tahun 2018. Setelah tumbuh moderat 6,8% (yoy) pada triwulan I – 2018, ekonomi China melambat menjadi 6,7% (yoy) di triwulan II – 2018 kemudian turun menjadi 6,5% (yoy) pada triwulan III – 2018 dan tercatat 6,4% (yoy) atau lebih rendah lagi pada triwulan IV 2018¹¹. Perang tarif dengan AS menyebabkan kinerja ekspor China tertekan, karena AS merupakan pasar tujuan ekspor utama China. Saat ini, berbagai kesepakatan dagang sedang dilakukan antara kedua negara, untuk mengurangi dampak *trade war* terutama yang menyangkut tarif barang ekspor kedua negara. Salah satu dampak ikutan yang



juga menekan ekonomi China adalah relokasi pabrik-pabrik dari China ke negara lain. Strategi ini dilakukan agar produksi dan penjualan tetap berjalan normal serta tetap dapat diekspor ke AS mengingat *trade war* tersebut berlaku untuk China. Pertumbuhan ekonomi yang melambat juga diakibatkan tingkat utang domestik China yang kian mengkhawatirkan. Akibat tingginya utang, Pemerintah China berencana melakukan pengetatan pemberian pinjaman. Namun dampaknya, pertumbuhan ekonomi justru tertekan.

Dari Jepang, kebijakan *negative interest rate* belum secara konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang. Setelah sempat tercatat 1,3% (yoy) di triwulan I - 2018, perekonomian Jepang tumbuh 1,5% (yoy) di triwulan II - 2018 tetapi kembali turun hingga 0,1% (yoy) di triwulan III - 2018 serta pada triwulan IV - 2018 mengalami stagnasi 0%¹². Inflasi Jepang memang terus membaik meninggalkan era deflasi yang terjadi pada tahun 2016 dan era *low inflation* di tahun 2017. Pada tahun 2018 inflasi Jepang lebih mendekati 2%. Inflasi Jepang tercatat tertinggi pada bulan Februari 2018 pada level 1,5% sedangkan inflasi selama tahun 2018 adalah sebesar 0,3%¹³. Peningkatan inflasi secara umum disebabkan kenaikan harga pangan dan energi, sementara inflasi inti masih tergolong rendah. Kondisi inilah yang nampaknya mendorong BOJ sebagai bank sentral Jepang untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan di level -0,10%.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Di tahun 2018, ekonomi Indonesia tumbuh moderat dan mencapai 5,18% (yoy) pada triwulan IV - 2018. Sebelumnya, pada triwulan I - 2018 ekonomi mampu tumbuh 5,06% (yoy) dan kemudian naik menjadi 5,27% (yoy) dan 5,17% pada triwulan II dan III - 2018¹⁴. Pertumbuhan triwulan II yang tinggi ditopang oleh meningkatnya Pengeluaran Rumah Tangga yang tumbuh 5,14% serta menyumbang 55,43% bagi perekonomian Indonesia¹⁵. Pada triwulan III dan IV - 2018, pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga hanya tumbuh 5,01% dan 5,08%¹⁶ namun ekonomi Indonesia tetap tumbuh seiring Bergeraknya perekonomian Indonesia saat berlangsungnya pesta olahraga terbesar di Asia, yaitu Asian Games 2018.

Inflasi Indonesia selama tahun 2018 berada pada level 3,13%¹⁷, yaitu pada kisaran target BI sebesar 3,5±1% di tahun 2018. Terkendalnya inflasi dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti serta inflasi *volatile food* yang cenderung rendah dan inflasi *administered price* yang relatif terjaga. Keberhasilan BI menjaga inflasi tidak terlepas dari fungsi koordinasi bersama dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Hingga akhir tahun 2018, inflasi tetap terjaga yang dipengaruhi juga oleh penurunan harga minyak dunia.

Salah satu persoalan serius di tahun 2018 adalah permasalahan defisit transaksi berjalan atau *Current Account Deficit* (CAD). Rasio CAD terhadap PDB Indonesia cenderung terus meningkat selama tahun 2018. Pada triwulan I - 2018, CAD mencapai 2,17% dari PDB kemudian meningkat menjadi 3,02% pada triwulan II - 2018

hingga melebar menjadi 3,37% dari PDB pada triwulan III - 2018¹⁸. CAD terhadap PDB Indonesia pada triwulan IV-2018 tercatat mencapai 3,57% lebih lebar dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya. Pertumbuhan impor yang meningkat tajam melebihi pertumbuhan ekspor menyebabkan defisit neraca perdagangan yang semakin besar. Di sisi lain, neraca ekspor impor jasa juga mengalami defisit yang terus meningkat. Padahal selama tahun 2018 *Foreign Direct Investment* (FDI) tetap meningkat meskipun terjadi *capital outflows* yang cukup deras di pasar saham maupun pasar modal. Realisasi investasi Indonesia tetap bertumbuh menunjukkan *confidence* yang baik pada ekonomi Indonesia. Realisasi investasi Indonesia pada tahun 2018 tumbuh 4,11% dari tahun sebelumnya di mana pada triwulan IV - 2018 realisasi investasi mencapai Rp185,9 triliun atau tertinggi dibandingkan realisasi investasi triwulan lain sepanjang tahun 2018. Realisasi investasi pada triwulan III - 2018 tercatat sebesar Rp173,8 triliun, lebih rendah jika dibandingkan realisasi triwulan II - 2018 yang mencapai Rp176,3 triliun atau realisasi triwulan I - 2018 sebesar Rp185,3 triliun¹⁹. Melebarnya CAD menjadi fokus perhatian Pemerintah untuk segera mengatasinya karena juga berimplikasi negatif terhadap nilai tukar rupiah.

Dampak negatif CAD di antaranya adalah menyebabkan BI bersikap *pre-emptive* dan *ahead the curve* terhadap suku bunga acuan, dalam hal ini adalah BI 7 *days (Reverse) Repo Rate* yang telah mengalami kenaikan sebesar 175bps di tahun 2018. Dari dalam negeri, faktor yang menjadi pertimbangan BI selain melebarnya CAD adalah defisit neraca perdagangan. Secara kumulatif, defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai US\$8,57 miliar, jauh lebih rendah daripada perdagangan pada tahun 2017 yang surplus senilai US\$11,84 miliar. Nilai ekspor Indonesia secara kumulatif sepanjang tahun 2018 mencapai US\$180,06 miliar atau tumbuh 6,65% sedangkan nilai impor mencapai US\$188,63 miliar dengan pertumbuhan 20,15%²⁰.

¹Press Release US Trade Representatives, menyangkut data Perdagangan Amerika Serikat dan China

²US Federal Reserve menyangkut data suku bunga acuan Amerika Serikat (Fed Fund Rate)

³US Bureau Labor Statistic

⁴Ibid

⁵Ibid

⁶US Bureau of Economic Analysis

⁷European Central Bank

⁸CNBC: Italy Crisis Heres What You Need to Know, 30 Mei 2018

⁹Reuters: French "Yellow Vest" Protest in Their Thousand for Fifth Saturday, 15 Desember 2018

¹⁰Eurostat

¹¹National Bureau of Statistic of China

¹²Economy and Social Research Institute of Japan

¹³Japan Ministry of Internal Affairs and Communication

¹⁴Biro Pusat Statistik

¹⁵Ibid

¹⁶Ibid

¹⁷Ibid

¹⁸Bank Indonesia

¹⁹Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

²⁰Biro Pusat Statistik



PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA DAN POSISI BANK BNI

Sampai dengan November 2018, kredit atau pinjaman yang diberikan oleh perbankan tumbuh sebesar 12,1% (YoY) lebih tinggi dari Desember 2017 yang sebesar 8,2%. Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan per November 2018 tumbuh sebesar 7,2% lebih rendah dari Desember 2017 yang sebesar 9,4%. Perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga tersebut berdampak pada pertumbuhan aset perbankan per November 2018 yang sebesar 9,1% atau lebih rendah dari Desember 2017 yang sebesar 9,8%.

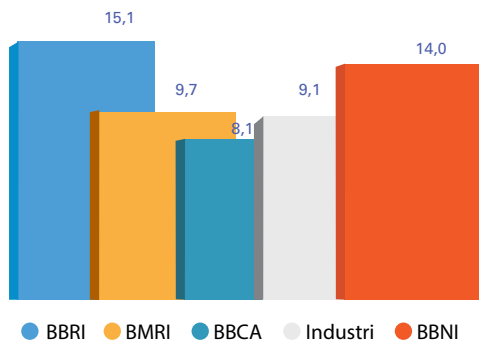
Apabila dibandingkan dengan industri perbankan dan *peers group*, BNI tumbuh lebih tinggi baik dari segi aset dan pendanaan. Sampai dengan posisi Desember 2018, pinjaman yang diberikan BNI berhasil tumbuh 16,2%, sedangkan dana pihak ketiga BNI tumbuh 12,1% lebih tinggi dibandingkan industri dan juga *peers group* per Periode November 2018. Dengan pertumbuhan pinjaman yang diberikan dan dana pihak ketiga tersebut, maka pada periode yang sama, aset BNI dapat tumbuh sebesar 14,0% lebih tinggi dibandingkan industri.

Tabel Posisi BNI Berdasarkan Pertumbuhan Aset, Pinjaman yang Diberikan, dan DPK (Bank Saja)

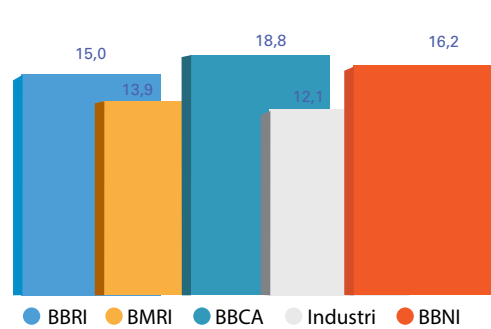
Bank	Aset	Pinjaman yang Diberikan	Dana Pihak Ketiga
Industri	9,1	12,1	7,2
BBRI	15,1	15,0	14,7
BMRI	9,7	13,9	8,3
BBCA	8,1	18,8	6,9
BBNI	14,0	16,2	12,1

Sumber: untuk data *peers* menggunakan data Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) Bank Indonesia per November 2018

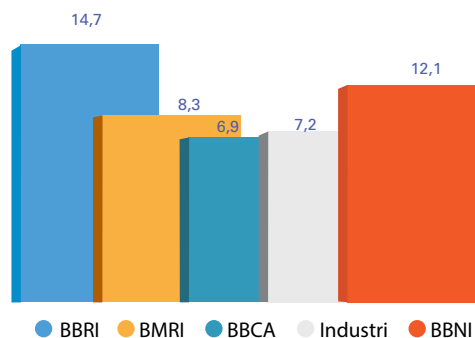
Grafik Posisi BNI dibandingkan *Peers* berdasarkan (%) Pertumbuhan Aset



Grafik Posisi BNI dibandingkan *Peers* berdasarkan (%) Pertumbuhan Pinjaman yang diberikan



Grafik Posisi BNI dibandingkan *Peers* berdasarkan (%) Dana Pihak Ketiga





TINJAUAN OPERASIONAL



BNI menjalankan usaha dan kegiatannya di bidang perbankan sesuai dengan Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 52, tanggal 22 Mei 2018. Kegiatan utamanya yaitu:

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan utang;
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya (surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh BNI selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud);
5. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
6. Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
7. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
8. Obligasi;
9. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
12. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;



13. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
14. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
15. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
16. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
17. Melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;
18. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
19. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan;
21. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyetaraannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;
22. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
23. Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking*, dan *investment banking* lainnya;
24. Dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama tersebut, Bank dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS 2018

Sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan, BNI berusaha untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal tersebut dilaksanakan, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan institusi lain yang berasal dari negara, pemerintah, individu, masyarakat, sesama perusahaan keuangan, maupun badan partikelir lainnya. Selain kontribusi terhadap bangsa dan Negara tersebut, BNI berusaha menegaskan eksistensinya dengan berusaha untuk menjadi salah satu pemain utama di sektor keuangan khususnya perbankan melalui layanan keuangan yang menyeluruh kepada semua nasabah perbankan dan nilai tambah bermanfaat bagi seluruh *stakeholder* yaitu nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri keuangan. Rencana jangka pendek BNI disusun berdasarkan pada rencana jangka panjangnya dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal terkini. Selama tahun 2018, BNI telah berhasil menjalankan rencana-rencananya dengan empat fokus tema utama yaitu *Selective*, *Digitalize*, *Market Penetration*, dan *Organization Capabilities*.

SELECTIVE

1. Meningkatkan bisnis pada nasabah Kementerian, Institusi, BUMN, dan Korporasi melalui solusi keuangan yang menyeluruh.
 - a. Fokus prioritas pembiayaan pada sektor infrastruktur, industri pengolahan dan pembiayaan pada sektor lainnya.
 - b. Peningkatan DPK dan APBN (Kementerian dan Institusi), BUMN, Korporasi Swasta dan Dana Debitur.
 - c. Optimalisasi pembiayaan melalui akuisisi obligasi korporasi secara selektif.
2. Meningkatkan bisnis Menengah pada industri prioritas sesuai dengan potensi daerah.
 - a. Melakukan *take over customer* pada industri selektif dan optimalisasi *value chain* nasabah Korporasi.
 - b. Peningkatan kualitas kredit dengan melakukan restrukturisasi dan *phase out bad loan* melalui sekuritisasi.
 - c. Ekspansi dana pada institusi daerah, Pemda, dan BUMD, serta dana debitur.
3. Memperkuat bisnis Kecil melalui optimalisasi *Supply Chain Financing* Nasabah Korporasi, komunitas/sentra bisnis, dan mendukung program pemerintah.
 - a. Ekspansi kredit dengan berbasis optimalisasi *outlet* dan digital.

- b. Ekspansi kredit dengan mengoptimalkan *value chain* dan *supply chain financing* dari debitur Korporasi.
 - c. Ekspansi kredit melalui pembiayaan *linkage*.
 - d. Mengoptimalkan peran program pemerintah sebagai basis pertumbuhan.
4. Meningkatkan CASA dengan model bisnis *digital* fokus pada *Closed Loop Transaction* dan optimalisasi transaksi nasabah.
 - a. Optimalisasi penggunaan giro debitur dan menjaga rasio giro terhadap KMK debitur.
 - b. Mengembangkan *closed loop transaction* pada nasabah Korporasi dan Komersial beserta *supply chain*-nya melalui utilisasi solusi produk dan *service*.

DIGITALIZE

Memperkuat bisnis konsumen bekerja sama dengan mitra bisnis dan memberikan solusi transaksi keuangan dengan fokus pada *e-commerce* dan generasi *millennial*.

- a. Pengembangan akuisisi *digital channel*.
- b. Menggarap potensi *millennial* melalui *digital enhancement*.
- c. Fokus *e-commerce* melalui pengembangan fitur dan *strategic partnership*.
- d. Meningkatkan *customer engagement* melalui pengembangan aplikasi manajemen kartu kredit personal.

MARKET PENETRATION

1. Meningkatkan kinerja *outlet* dengan memperkuat penetrasi pasar baik DPK maupun kredit.
 - a. Pengembangan jaringan kantor secara organik dan anorganik dan mendukung *digital branch*.
 - b. Optimalisasi *outlet* dalam rangka mendukung pencapaian target bisnis.
 - c. Peningkatan kinerja dan produktivitas *outlet*.
 - d. Inisiatif efisiensi dan perbaikan proses kerja.
 - e. Optimalisasi Agen46 dalam rangka perluasan jaringan dan pencapaian kinerja bisnis kecil dan konsumen.
2. Meningkatkan *market share* entitas anak dengan peningkatan sinergi, pengembangan digital, dan pertumbuhan anorganik.
 - a. Memperkuat *Risk Culture* dan *Risk Management* yang komprehensif melalui manajemen risiko terintegrasi
 - b. Meningkatkan sinergi dengan BNI Group.
 - c. Pengembangan digital dan meningkatkan *Financial Inclusive*.
 - d. Memperkuat SDM entitas anak dan meningkatkan *Cross Utilization*.
 - e. Memperkuat entitas anak melalui *Corporate Action* dan *Unorganic Growth*.

ORGANIZATION CAPABILITIES

Mengoptimalkan kapabilitas organisasi untuk mendukung pencapaian bisnis.

- a. Meningkatkan produktivitas pegawai.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis.
- c. Mengembangkan IT yang mendukung bisnis.

Strategi tahun 2018 tersebut secara umum dapat terlaksana dengan baik. Pertumbuhan kredit BNI yang tumbuh di atas pertumbuhan rata-rata industri didorong oleh pertumbuhan kredit segmen korporasi yang fokus pada infrastruktur dan sektor pengolahan. Pada segmen menengah, peningkatan kredit didukung oleh optimalisasi *value chain* nasabah Korporasi dan *take over customer* pada industri selektif sesuai potensi daerah. Ekspansi kredit pada segmen kecil didukung oleh pengoptimalan *value chain* dan *supply chain financing* dan memaksimalkan peran program pemerintah (KUR) sebagai basis pertumbuhan. Selain itu, untuk mendukung pencapaian kredit segmen kecil terdapat penambahan *channel* yaitu agen46 dan penyaluran kredit berbasis *digital* untuk mempermudah pengajuan kredit. Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sehingga *Non-Performing Loan* (NPL) dapat terjaga dan mengalami penurunan serta menghasilkan imbal hasil yang relatif tinggi.

Peningkatan terhadap bisnis konsumen dilakukan dengan cara penjualan BNI Griya, BNI Fleksi, Kartu Kredit dan kredit lainnya dengan menggarap potensi milenial melalui pengembangan *digital*. Untuk menumbuhkan bisnis *digital* dan menggarap potensi milenial, BNI telah meluncurkan *mobile payment* berbasis QR yaitu Yap!, *chat banking* Cinta, dan aplikasi BNI Call (1500046 *Virtual Assistant*). Untuk memberikan *user experience* yang lebih bagi nasabah, BNI membuka 8 (delapan) *digital branch*.

Strategi untuk peningkatan DPK yang fokus pada *closedloop transaction* adalah memastikan seluruh transaksi nasabah berada di BNI. Pengembangan *closedloop transaction* pada nasabah Korporasi dan Komersial beserta *supply chain*-nya dilakukan melalui utilisasi solusi produk dan *service* salah satunya peningkatan transaksi *cash management*. Selain itu, untuk meningkatkan transaksi nasabah melalui *e-commerce*, telah dilakukan beberapa pengembangan fitur dan *strategic partnership*.



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Segment operasi BNI terdiri dari Korporasi; Komersial dan Kecil; Konsumer dan Ritel; Tresuri dan Internasional; Kantor Pusat; Entitas Anak.

KORPORASI

Kegiatan segment korporasi meliputi kredit yang diberikan, simpanan nasabah dan transaksi-transaksi lainnya atas nasabah korporasi.

KREDIT

Uraian penjelasan, strategi tahun 2018, produktivitas, prospek usaha dan strategi pencapaiannya untuk kredit Segment Korporasi pada BNI disajikan sebagai berikut:

PENJELASAN SEGMENT KORPORASI-KREDIT

Segment Korporasi BNI menangani pemberian pinjaman di atas Rp300 miliar untuk nasabah individu dan nasabah grup pada Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan-Perusahaan Nasional dan Multi Nasional besar di Indonesia.

STRATEGI SEGMENT KORPORASI-KREDIT DI TAHUN 2018

Rencana jangka pendek BNI disusun berdasarkan pada rencana jangka panjangnya dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal terkini. Selama tahun 2018, BNI telah berhasil menjalankan rencana-rencananya dengan garis besar sebagai berikut:

1. Ekspansi kredit fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah untuk korporasi dan BUMN yang mencakup hulu hingga hilir.
 - a. Ekspansi debitur baru dan mengoptimalkan penggunaan kredit debitur eksisting yang fokus pada proyek infrastruktur.
 - b. Ekspansi debitur baru dan mengoptimalkan penggunaan kredit debitur eksisting pada sektor prioritas lainnya.
2. Ekspansi kredit segment menengah secara selektif dengan fokus pada industri prospektif.
 - a. Akuisisi dari *Supply Chain Financing* Debitur Korporasi.
 - b. Secara selektif melakukan *take over* debitur baru dari Bank Buku III dan Buku IV sejalan dengan sektor prioritas.
 - c. Optimalisasi fasilitas debitur eksisting dengan tetap memperhatikan tingkat kewajarannya.

PRODUKTIVITAS SEGMENT KORPORASI-KREDIT TAHUN 2018

Portofolio pinjaman BNI terus terdiversifikasi dengan baik pada sektor-sektor yang menjadi prioritas BNI. Berikut adalah daftar sektor usaha 10 (sepuluh) debitur besar individual dan grup pada akhir tahun 2018.

Tabel Daftar Sektor Usaha 10 (Sepuluh) Debitur Besar Individual

Debitur Individual	Jumlah (Rp juta)
Perdagangan Besar dan Eceran	12.599.313
Perantara Keuangan Lainnya (<i>Non Bank</i>) Selain <i>Leasing</i>	4.063.915
Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial	3.207.737
Industri Rokok	2.661.670
Ketenagalistrikan	2.354.596
Perdagangan Batubara	2.082.439
Ketenagalistrikan	1.726.776
Jasa Telekomunikasi	1.592.559
Perdagangan Besar dan Eceran	1.350.497
Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu	904.382
Jumlah	32.543.883



Tabel Daftar Sektor Usaha 10 (Sepuluh) Debitur Besar Grup

Debitur Grup	Jumlah (Rp juta)
Ketenagalistrikan	13.614.539
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	10.845.192
Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>), Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i> , Agribisnis dan Pangan, Layanan Keuangan, <i>Real Estate</i> dan <i>Developer</i>	10.820.499
Perkebunan Kelapa Sawit, Layanan Keuangan, Otomotif, Jasa Telekomunikasi, <i>Food and Beverage</i>	9.584.752
Jasa Telekomunikasi	8.618.945
Bangunan Jalan Tol	7.722.691
Bangunan Sipil Lainnya, Konstruksi Gedung	7.688.815
Perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan Karet, dan Penghasil Getah Lainnya, Industri Gula dan Pengolahan Gula	6.943.903
Industri Pupuk	6.865.002
Perkebunan Kelapa Sawit	6.326.393
Jumlah	89.030.733

Total kredit segmen korporasi mencapai Rp222,9 triliun di tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 18,6% atau sebesar Rp44,1 triliun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp188,0 triliun. Berdasarkan jenis kredit yang diberikan pada tahun 2018 mayoritas pinjaman korporasi disalurkan dalam bentuk Kredit Modal Kerja, yang mencakup 58,2% dari total pinjaman korporasi, atau sebesar Rp152,9 triliun sedangkan sisanya sebesar 41,0% atau Rp109,9 triliun merupakan Kredit Investasi. Pertumbuhan kredit segmen Korporasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Pertumbuhan Kredit Segmen Korporasi

Produk	2018		2017		Pertumbuhan	
	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)
Kredit Investasi	109.903	41,8%	94.052	43,0%	15.851	16,9%
Kredit Modal Kerja	152.925	58,2%	124.706	57,0%	28.220	22,6%
Total	262.828	100,0%	218.758	100,0%	44.070	20,1%

PROSPEK USAHA KREDIT KORPORASI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Prospek usaha masih cukup baik dan kredit Korporasi diproyeksikan dapat tumbuh 15%, pada sektor manufaktur, perkebunan sawit, jasa usaha lainnya. Berdasarkan prospek tersebut pada tahun 2019 segmen korporasi melakukan strategi sebagai berikut:

1. Ekspansi kredit di sektor Manufaktur, Perkebunan, Infrastruktur, Pariwisata dan Jasa usaha lainnya.
2. Optimalisasi *value chain* dan *transactional banking* dari nasabah sehingga dapat meningkatkan pendapatan *fee based*.
3. Menjaga kualitas kredit melalui proses pembiayaan kredit yang *prudent* dan *monitoring* debitur terutama yang masuk ke dalam *watchlist*.
4. Mempercepat bisnis proses.

SIMPANAN/DANA PIHAK KETIGA

Uraian penjelasan, strategi tahun 2018, produktivitas, prospek usaha dan strategi pencapaiannya untuk Simpanan/Dana Pihak Ketiga Segmen Korporasi pada BNI disajikan sebagai berikut:

PENJELASAN SEGMENT KORPORASI-DPK

Dana Pihak Ketiga (DPK) segmen Korporasi (*Business Banking*) adalah sejumlah dana, baik untuk simpanan maupun untuk kegiatan operasional, yang dimiliki dan atau dikelola oleh nasabah institusi (Kementerian, BUMN, *Non Banking Financial Institution*, Universitas. Nasabah institusi dimaksud bisa berbentuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, BUMN, BUMD, Rumah Sakit, Kementerian dan berbagai Lembaga Pemerintah lainnya. Belakangan ini muncul berbagai perusahaan yang berbasis *fintech*, yang juga berpotensi mengelola dana yang cukup besar. DPK *Business Banking* bisa berupa Tabungan, Deposito maupun Giro, sesuai dengan manfaat yang ingin diambil oleh nasabah. Ketiga produk tersebut secara bersama-sama ditawarkan ke institusi terpilih dengan paket yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah.



STRATEGI DPK-SEGMENT KORPORASI DI TAHUN 2018

Menjembatani strategi BNI untuk meraih pertumbuhan aset yang berkualitas dan tingkat profitabilitas yang baik melalui struktur pendanaan yang optimal, pada tahun 2018 BNI berinisiatif untuk meningkatkan *customer experience* melalui peningkatan *business solutions* dengan inisiatif-inisiatif sebagai berikut:

1. Fokus bisnis pada 20 (dua puluh) Kementerian dan Lembaga, 23 (dua puluh tiga) BUMN Utama, berbagai institusi pendidikan, solusi untuk Pemda dan Rumah Sakit, serta berbagai insitusi jasa keuangan, migas dan korporasi lainnya.
2. Meningkatkan peran BNI dalam layanan publik, terutama program pemerintah pusat.
3. Optimalisasi solusi-solusi berbasis elektronik dalam pengelolaan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Bukan Pajak.
4. Meningkatkan solusi transaksi korporasi melalui *e-channel* untuk jasa pembayaran, penerimaan dan pengelolaan informasi keuangan nasabah.
5. Meningkatkan *fee based income* dengan solusi layanan operasional yang inovatif di berbagai sektor industri.
6. Optimalisasi *Value chain* dan *Supply chain* dengan penggunaan solusi *Financial Supply Chain Management* untuk mendorong pertumbuhan dana murah.
7. *Cross selling* jasa transaksional dan garansi bank kepada nasabah.

PRODUKTIVITAS DPK-SEGMENT KORPORASI TAHUN 2018

Produktivitas DPK Segment Korporasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Jumlah Dana Segment Korporasi

Keterangan	2018		2017		Pertumbuhan	
	(Rp triliun)	Komposisi (%)	(Rp triliun)	Komposisi (%)	(Rp triliun)	(%)
Giro	148	53,2%	125	52,0%	23	18,1%
Deposito	113	40,5%	103	42,6%	10	10,6%
Tabungan	18	6,4%	13	5,4%	5	36,2%
Total	279	100,0%	241	100,0%	38	15,6%

DPK Segment Korporasi tahun 2018 mencapai Rp279 triliun meningkat 15,6% atau Rp38 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp241 triliun. Peningkatan DPK tersebut disebabkan oleh:

1. Peningkatan DPK dari APBN (Kementerian dan Institusi), BUMN, Korporasi swasta dan dana debitur.
2. Adanya ekspansi dana pada institusi, PEMDA, BUMD dan Debitur.
3. Peningkatan CASA dengan model bisnis digital yang fokus pada *closed loop transaction* dan optimalisasi transaksi nasabah

Tabel Jumlah Rekening Segment Korporasi

Keterangan	2018		2017		Pertumbuhan	
	(Unit Rekening)	Komposisi (%)	(Unit Rekening)	Komposisi (%)	(Unit Rekening)	(%)
Giro	323.834	50,2%	285.840	44,3%	37.994	13,3%
Deposito	21.061	3,3%	18.678	2,9%	2.383	12,8%
Tabungan	299.886	46,5%	82.337	12,8%	217.549	264,2%
Total	644.781	100,0%	386.855	60,0%	257.926	66,7%

Jumlah Rekening Segment Korporasi BNI tahun 2018 mencapai 644.781 unit rekening, meningkat sebesar 66,7% atau 257.926 unit rekening dibandingkan tahun 2017.

PROSPEK USAHA SEGMENT KORPORASI-DPK DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Prospek usaha Segment Korporasi DPK adalah sebagai berikut:

1. Potensi pengelolaan Anggaran APBN masih cukup besar mengingat total anggaran APBN tahun 2019 sebesar Rp2.461 triliun dalam hal ini BNI menargetkan untuk menangkap penyaluran dana tersebut sebesar Rp389 triliun.
2. Potensi bisnis korporasi dan turunannya yang masih dapat ditangkap cukup besar.



Rencana strategi tahun 2019 untuk segmen korporasi adalah sebagai berikut:

1. Menangkap potensi bisnis aliran dana APBN dan APBD 2019 (20 Nasabah Kementerian dan Lembaga, Rumah Sakit, Institusi Pendidikan serta Pemerintah daerah)
2. Meningkatkan Bisnis Turunan Nasabah Korporasi (BUMN, *Non Banking Financial Institution/NBFI*, Universitas dan Korporasi Swasta Lainnya)
3. Optimalisasi Dana Debitur dengan mendorong aktivitas keuangan debitur Sentra dan Korporasi melalui penggunaan layanan *cash management*.
4. Mengembangkan solusi dan transaksi melalui sistem sesuai kebutuhan nasabah.
5. Mengakuisisi nasabah baru.

TRANSAKSI LAINNYA

Uraian penjelasan, strategi tahun 2018, produktivitas, prospek usaha dan strategi pencapaiannya untuk Transaksi Lainnya Segmen Korporasi pada BNI disajikan sebagai berikut:

PENJELASAN SEGMENT KORPORASI-TRANSAKSI LAINNYA TAHUN 2018

Untuk nasabah Segmen Korporasi, produk unggulan yang BNI sediakan adalah produk BNI *Cash Management*, dengan produk tersebut nasabah secara mandiri bisa mengatur *cash flow* keuangan korporasinya lebih teratur dan terpantau secara *online*. Produk *Cash Management* BNI meliputi berbagai fitur, antara lain: *transfer overbooking*, transfer antar bank, baik domestik maupun internasional, pembayaran pajak *online*, *virtual account* untuk *collection*, pembayaran *billing* dengan *bill payment*, serta *supply chain financing*.

PRODUKTIVITAS SEGMENT KORPORASI-TRANSAKSI LAINNYA TAHUN 2018

Tahun 2018 jumlah unit rekening *cash management* mencapai 118.359 unit rekening, meningkat 25,46% dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai 94.341 unit rekening. Kenaikan jumlah rekening yang bertransaksi *cash management* di BNI karena keberhasilan BNI dalam mempertahankan kepercayaan nasabah korporasi, sehingga tetap berkomitmen untuk menggunakan BNIDirect sebagai alat bertransaksinya.

Dengan transaksi *cash management*, akan menumbuhkan DPK secara kontinu dan secara tidak langsung menjaga likuiditas BNI. Aplikasi utama yang disediakan oleh BNI yang bisa digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi *Cash Management*, dikenal dengan nama BNIDirect. BNIDirect adalah sebuah aplikasi berupa *website* yang sudah teruji aman yang bisa diakses melalui internet dari manapun, kapanpun, dan menggunakan media apapun. *Website* BNIDirect bisa diakses melalui alamat <https://bnidirect.bni.co.id>. BNIDirect bisa diakses melalui komputer maupun ponsel yang terhubung dengan jaringan internet. Dan sekarang sudah tersedia juga BNIDirect *Mobile* yang sangat fleksibel dan mudah dipasang di setiap jenis ponsel.

STRATEGI SEGMENT KORPORASI-TRANSAKSI LAINNYA TAHUN 2018

Selama tahun 2018, BNI menerapkan strategi untuk peningkatan transaksi *cash management*, sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan melakukan akuisisi terhadap Nasabah BUMN/Korporasi yang mempunyai ekosistem yang signifikan.
2. Menggali dan mengidentifikasi potensi penerimaan (PNBP) dan aliran Belanja pada Kementerian/Lembaga (10 besar) untuk solusi bisnis yang akan diberikan.
3. Menggali dan mengidentifikasi bisnis turunan berikut *value chain* dari nasabah korporasi untuk pemberian solusi *close loop transaction*.
4. Memperluas cakupan akses transaksi hingga di segmen nasabah komersial dengan mengoptimalkan potensi debitur BNI di masing-masing wilayah.

Tabel Jumlah Rekening *Cash Management*

Keterangan	2018		2017		Pertumbuhan	
	(Unit Rekening)	Komposisi (%)	(Unit Rekening)	Komposisi (%)	(Unit Rekening)	(%)
<i>Cash Management</i>	118.359	100	94.341	100	24.018	25.46

Sepanjang tahun 2018, BNI tetap berhasil dan terus meningkatkan keberadaannya sebagai bank transaksi pilihan nasabah melalui berbagai pilihan layanan *cash management* yang efisien, efektif, aman dan andal. Sebagai hasilnya, total frekuensi transaksi layanan manajemen kas terpadu melalui BNIDirect yang bertumbuh 15,0% mencapai 21,28 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp1.605 triliun, bisa memberikan pendapatan berbasis *fee* yang tumbuh 11,7% menjadi sebesar Rp521 miliar di akhir tahun 2018.



Tabel Transaksi BNIDirect

Keterangan	2018	2017	Pertumbuhan
Jumlah Transaksi (juta Rupiah)	21,28	18,7	15,0%
Nominal Transaksi (triliun Rupiah)	1.605	1.295	23,9%
Fee Based Income (miliar Rupiah)	590	528	11,7%
Jumlah Pengguna	65,675	52,594	24,9%

Peningkatan kinerja di atas didukung oleh beberapa inisiatif strategis di tahun 2018. Antara lain, sepanjang tahun 2018 BNI berhasil meningkatkan penetrasi layanan transaksional perbankan di segmen nasabah korporasi (termasuk BUMN dan Pemerintahan), serta memperluas kehadirannya di segmen nasabah komersial dengan mengoptimalkan potensi debitur BNI di masing-masing wilayah. BNI juga berhasil memperoleh kepercayaan dalam membangun layanan-layanan publik yang mendukung efisiensi dan transparansi birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan. Di antaranya untuk pembayaran pajak secara elektronik *real-time online* (BNI *e-Tax*) dan pembayaran bea cukai serta impor barang (BNI *e-PIB*), pembayaran pembuatan paspor, pembayaran PBB secara *online* (*e-PBB*), serta ikut berperan dalam berbagai program pemerintah terkait BumDes. Beragam solusi *cash management* BNI telah berhasil membantu nasabah dalam menciptakan proses bisnis yang semakin efisien sehingga mampu meningkatkan produktivitas nasabah. Solusi-solusi elektronik yang dibangun juga mampu menciptakan efisiensi proses kerja di internal BNI sehingga meningkatkan layanan bagi nasabah. Peningkatan *value chain* dengan transaksi *financial supply chain* pun sudah mulai menunjukkan potensi yang cukup bagus.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, layanan transaksional perbankan BNI berhasil meraih berbagai penghargaan di tahun 2018, yaitu:

1. *Best Treasury and Cash Management in Indonesia 2018* oleh *Global Finance Magazine*.
2. *Best Cash Management Solution In Southeast Asia 2018* dari *Alpha Southeast Asia Magazine*.
3. *Best Overall Cash Management in Indonesia 2018* berdasarkan survei dari *Euromoney Magazine*.

PROSPEK USAHA SEGMENT KORPORASI-TRANSAKSI LAINNYA DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Di tahun 2019, merupakan tahun politik, prospek untuk peningkatan transaksi *Cash Management* BNI masih terbuka cukup lebar, terutama di segmen digital, dengan menggandeng perusahaan *fintech* yang secara aktivitas transaksinya bisa bersinergi dengan *cash management* BNI. Untuk segmen kementerian dan lembaga, peluangnya juga masih besar dengan mengoptimalkan kucuran dana APBN melalui berbagai proyek pemerintah pusat dan daerah. Di segmen BUMN dan swasta, walaupun agak tertahan di awal tahun, namun diyakini tetap berkembang dan mempunyai prospek yang bagus, dengan memilih produk/solusi yang tepat.

Dengan melihat potensi di 2019 dan memetik pelajaran dari pengalaman di tahun 2018, BNI *Cash Management* segera berbenah, dengan membuat strategi bisnis yang berbeda dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

1. Akuisisi nasabah baru yang fokus pada nasabah yang berpotensi transaksi tinggi.
2. Penetrasi nasabah BNI yang belum menggunakan solusi transaksional.
3. Meningkatkan jumlah nasabah yang aktif bertransaksi *cash management*.
4. Peningkatan jumlah fitur yang digunakan oleh nasabah BNI.



PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT KORPORASI

Pendapatan dan profitabilitas segmen Korporasi disajikan sebagai berikut:

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Korporasi

Uraian	2018	2017	Pertumbuhan	
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(%)
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah - neto *)	12.813.111	12.428.601	384.510	3,1%
Pendapatan premi - neto				
Pendapatan operasional Lainnya	3.376.656	2.803.803	572.853	20,4%
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(1.431.145)	(2.107.854)	676.709	(32,1%)
Beban operasional lainnya	(5.541.492)	(4.166.494)	(1.374.998)	33,0%
Laba operasional	9.217.130	8.958.056	259.074	2,9%
Pendapatan (beban) bukan operasional neto	21	(7)	28	(400,0%)
Laba sebelum beban pajak	9.217.151	8.958.049	259.102	2,9%
Total aset	258.869.706	215.887.752	42.981.954	19,9%
Total liabilitas	270.621.130	248.980.052	21.641.078	8,7%

*) termasuk komponen internal transfer pricing antar segmen operasi

Pada tahun 2018 pendapatan bunga dan pendapatan syariah-neto segmen Korporasi mencapai Rp12,8 triliun, tumbuh sebesar 3,1% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp12,4 triliun. Sedangkan laba operasional segmen Korporasi pada tahun 2018 mencapai Rp9,2 triliun, tumbuh 2,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp9,0 triliun. Peningkatan pendapatan dan profitabilitas diakibatkan dari meningkatnya kontribusi pertumbuhan kredit segmen Korporasi sebesar 20,1%, pertumbuhan jumlah dana sebesar 18%, dan *fee based income* transaksi BNI Direct sebesar 11,7%.

KOMERSIAL DAN KECIL

Segmen Komersial dan Kecil meliputi kredit yang diberikan, simpanan nasabah dan transaksi-transaksi lainnya atas nasabah dengan skala kecil hingga menengah.

KOMERSIAL

KREDIT

Uraian penjelasan, strategi tahun 2018, produktivitas, prospek usaha dan strategi pencapaiannya untuk Kredit Segmen Komersial pada BNI disajikan sebagai berikut:

PENJELASAN SEGMENT KOMERSIAL-KREDIT

Segmen Komersial mengelola pemberian pinjaman di atas Rp15 miliar sampai dengan Rp300 miliar untuk nasabah individu dan nasabah grup.

SEGMENT KOMERSIAL-KREDIT DI TAHUN 2018

Untuk mengejar pertumbuhan laba melalui peningkatan pendapatan bunga yang bersumber dari ekspansi pinjaman, maka bisnis Segmen Komersial menetapkan strategi antara lain:

1. Menyasar industri unggulan dan pemain-pemain utama
2. Akuisisi *ex debitor* (*win back*) di sektor industri pilihan
3. *Pipeline management*
4. Pembiayaan kepada proyek nasional dan proyek pemerintah
5. *Value chain* dan *supply chain* korporasi

Pada sisi perbaikan kualitas, Segmen Komersial membentuk tim yang difokuskan untuk penanganan & pengelolaan *loan at risk* (kolektibilitas 1 restrukturisasi, Pra NPL dan NPL). Tambahan pendapatan lainnya yang cukup besar bersumber dari *fee based income*, dengan melihat potensi transaksi debitur eksisting maupun *value chain* dari keseluruhan bisnis debitur. Di samping itu juga selalu ditanamkan bahwa bisnis Segmen Komersial bukan hanya sebatas pinjaman melainkan keseluruhan transaksi bisnis yang dapat ditawarkan kepada debitur.



Analisis & Pembahasan Manajemen



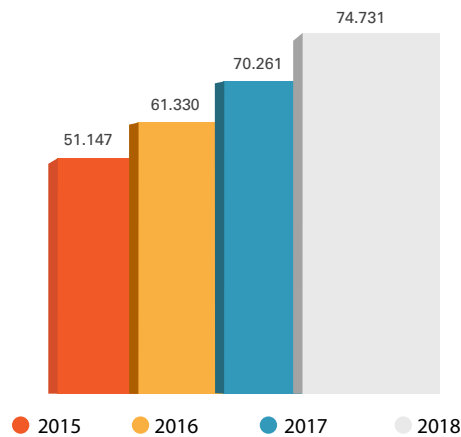
Hal-hal yang dilakukan di tahun 2018

1. Melakukan ekspansi melalui akuisisi debitur bank lain yang telah teruji *past performance* dengan melihat sektor ekonomi yang potensial.
2. *Joint effort* pemantauan dan penanganan *loan at risk* dengan menetapkan *dedicated SRM- RM* khusus.

PRODUKTIVITAS SEGMENT KOMERSIAL-KREDIT TAHUN 2018

Di tahun 2018, kredit Segmen Komersial BNI berhasil tumbuh 6,4%, sedangkan pertumbuhan penyaluran pinjaman perbankan 7,2% serta pertumbuhan rata-rata penyaluran pinjaman BNI 16,2%. Segmen Komersial BNI meng-cover seluruh kota besar Indonesia dengan sebaran sentra di 33 (tiga puluh tiga) Sentra Kredit Menengah (SKM).

Grafik Pertumbuhan Segmen Komersial (Menengah)



Penyaluran kredit Segmen Komersial terdiri dari Kredit Modal Kerja yang menyumbang sebesar Rp48,3 triliun atau 64,6%, sedang sisanya sebesar Rp26,5 triliun atau 35,4% merupakan Kredit Investasi. Kredit Segmen Komersial mayoritas disalurkan pada sektor perdagangan restoran dan hotel sebesar 31,4% diikuti dengan pinjaman di sektor perindustrian sebesar 26,2% dari total kredit Segmen Komersial. Berikut rincian penyaluran kredit Segmen Komersial berdasarkan sektor yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel Penyaluran Kredit Segmen Komersial (Menengah) Berdasarkan Sektor

Sektor	2018		2017		Pertumbuhan	
	(Rp miliar)	Komposisi (%)	(Rp miliar)	Komposisi (%)	(Rp miliar)	YoY (%)
Perdagangan, Restoran, dan Hotel	23.497	31,4%	23.220	33,0%	277	1,2%
Pertambangan	2.007	2,7%	1.947	2,8%	60	3,1%
Perindustrian	19.585	26,2%	20.285	28,9%	(701)	(3,5%)
Pertanian	3.622	4,8%	3.173	4,5%	449	14,1%
Konstruksi	7.787	10,4%	6.977	9,9%	809	11,6%
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	7.940	10,6%	6.307	9,0%	1.633	25,9%
Listrik, Gas, dan Air	456	0,6%	624	0,9%	(167)	(26,8%)
Jasa Dunia Usaha	7.082	9,5%	5.870	8,4%	1.212	20,6%
Jasa Pelayanan Sosial	2.755	3,7%	1.857	2,6%	898	48,4%
Total	74.731	100,0%	70.261	100,0%	4.470	6,4%

Selaras dengan arah kebijakan pemerintah yaitu pemerataan pembangunan, maka segmen komersial fokus kepada industri strategis pemerintah khususnya pengangkutan, pergudangan dan komunikasi serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pertumbuhan di sektor pertanian.

Selain itu untuk pertumbuhan bisnis yang berkualitas, pertumbuhan diarahkan kepada usaha-usaha yang memiliki potensi terus tumbuh dan tidak terdampak *disruption*, seperti jasa pelayanan sosial, dengan meningkatkan penyaluran pinjaman pada bidang tersebut secara signifikan di 2018.

Dalam internal BNI bisnis Segmen Komersial terus melakukan perbaikan agar dapat fokus kepada pencapaian laba, perbaikan dilakukan pada sisi sumber daya manusia, teknologi dan bisnis proses. Perbaikan pada sisi sumber daya manusia dilakukan dengan meningkatkan kemampuan tenaga perkreditan melalui berbagai macam program peningkatan *hard skill* dan *soft skill*, juga dengan cepat melakukan pemenuhan jumlah sumber daya sesuai dengan kebutuhan bisnis yang semakin hari semakin meningkat. Pada sisi teknologi di Segmen Komersial tengah membangun berbagai macam sistem dana automasi sehingga diharapkan proses bisnis dapat berjalan cepat dan *agile*.

PROSPEK USAHA SEGMENT KOMERSIAL-KREDIT DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Pada tahun 2019, Segmen Komersial masih fokus pada *supply chain* Korporasi, perbaikan proses bisnis dan perbaikan kualitas kredit.

BNI telah menetapkan serangkaian strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Ekspansi Selektif pada sektor prioritas dan wilayah di daerah potensial
2. Fokus pada pemain utama di sektor prioritas masing-masing wilayah
3. *Supply chain* untuk *selected corporate*, dengan memaksimalkan potensi *value chain* debitur Korporat dan Komersial.
4. Membangun *digital capabilities* melalui digitalisasi proses dan pemantauan
 - a. Digitalisasi perangkat aplikasi kredit
 - b. Pemanfaatan *Big Data*
5. Peningkatan kualitas kredit melalui pemantauan dan pengelolaan *loan at risk* secara komprehensif.
6. Meningkatkan sinergi dan potensi bisnis dengan mendorong *closed loop transaction*, peningkatan CASA melalui *cross selling* antara lain *cash management* dan *value chain* nasabah

KECIL

KREDIT

Uraian penjelasan, strategi tahun 2018, produktivitas, prospek usaha dan strategi pencapaiannya untuk Kredit Segmen Kecil pada BNI disajikan sebagai berikut.

PENJELASAN SEGMENT KECIL-KREDIT

Segmen kecil BNI mengelola pinjaman produktif kepada nasabah individu, perusahaan dan grup usaha, dengan maksimum pinjaman sampai dengan Rp15 miliar.

STRATEGI SEGMENT KECIL-KREDIT DI TAHUN 2018

Pencapaian positif di tahun 2018 tersebut dapat terwujud melalui beberapa pengembangan yang telah dilakukan oleh BNI yakni melakukan optimalisasi *outlet* sebagai *point of sales*, transformasi pengelolaan kredit berbasis *digital*, fokus pada pembiayaan berpola *clustering*, dan optimalisasi *supply chain financing* nasabah korporasi. BNI sebagai salah satu bank BUMN mempunyai fungsi sebagai *agent of development*, hal ini tampak dari komitmen BNI dalam mendukung program pemerintah, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kredit kepada UMKM. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan BNI antara lain:

1. Perhutanan Sosial

Membantu masyarakat di sekitar hutan milik PT Perhutani untuk dapat bercocok tanam memanfaatkan lahan hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya. BNI juga memberikan pembiayaan melalui program KUR untuk memudahkan petani mendapatkan permodalan dengan skema angsuran disesuaikan dengan siklus tanam. Kredit telah disalurkan sebesar Rp18,8 miliar kepada 3.170 petani.

Selain itu, BNI melalui BUMN peduli melakukan normalisasi irigasi/saluran air yang rusak pasca banjir untuk 6 (enam) desa dengan total luas sekitar 1.265 Ha serta pengerasan jalan desa ngimbang sepanjang 1,1 Km.
2. Mengawal Musim Tanam

Kegiatan tersebut sebagai bentuk partisipasi BNI untuk ikut mensukseskan program pemerintah meningkatkan hasil produksi pertanian sehingga dapat mencapai swasembada pangan.

Tujuan kegiatan mengawal musim tanam OKMAR 2018/2019 ini juga sebagai partisipasi BNI menyediakan pembiayaan yang murah, mudah, disertai pendampingan dan *offtaker* bagi petani sektor tanaman pangan di berbagai daerah Indonesia bersinergi dengan program BUMN Hadir Untuk Negeri dan Kementerian Pertanian.



Adapun rangkaian kegiatannya antara lain:

- a. Pembagian kartu tani sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
 - b. Penyaluran KUR Tani.
 - c. Penanaman komoditas pertanian.
 - d. Pemberian CSR, Benih dan alsintan untuk mendukung kelanjutan program.
 - e. Serap Gabah dan Komoditas lainnya dengan menggandeng BUMN-BUMN lainnya sebagai *Offtaker* (yang menyerap hasil panen petani) sebagai bentuk sinergi BUMN.
3. Peremajaan Sawit Rakyat
Pembiayaan kepada petani sawit yang bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
 4. Pembiayaan kepada Petani Kopi di Garut dan Malang
Pembiayaan ini sebagai bentuk dukungan BNI untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani kopi hingga dapat melakukan ekspor.
 5. Pembiayaan kepada petani garam
Sebagai bentuk peran serta BNI untuk meningkatkan produksi garam nasional melalui pembiayaan kepada petani garam, untuk saat ini yang telah berjalan di Sumenep, Indramayu, dan Kupang. Total pembiayaan yang telah diberikan BNI melalui CSR dan KUR mencapai Rp7,3 miliar kepada 320 petani garam.

PRODUKTIVITAS SEGMENT KECIL-KREDIT

Pertumbuhan kredit segmen kecil disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Pertumbuhan Kredit Segmen Kecil Per Jenis Produk

Produk	2018		2017		Pertumbuhan Outstanding Kredit (%)
	Outstanding (Rp miliar)	NPL (%)	Outstanding (Rp miliar)	NPL (%)	
KUR	20.289	0,7%	14.194	1,9%	42,9%
Non KUR	45.774	2,0%	42.285	3,0%	8,3%
Total	66.063	1,6%	56.479	2,7%	16,9%

Pada tahun 2018, segmen kecil mencatatkan pertumbuhan yang lebih pesat dibanding tahun lalu yakni sebesar 16,9%. Kredit kecil per 31 Desember 2018 mencapai Rp66,0 triliun atau meningkat sebesar Rp9,6 triliun dari tahun sebelumnya. Dari sisi kualitas kredit, NPL segmen kecil juga menunjukkan perbaikan, ditandai dengan adanya penurunan rasio NPL dari 2,7% pada tahun 2017 menjadi 1,6% pada tahun 2018.

Sepanjang 2018 BNI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 147.691 debitur senilai Rp15,9 triliun. Dari penyaluran KUR tersebut sebesar 54% disalurkan ke sektor produksi yang meliputi sektor pertanian, sektor perikanan, sektor industri dan sektor jasa-jasa. Selain menyalurkan KUR, BNI turut berperan dalam mendukung program Pemerintah dalam mengembangkan UMKM dan ekonomi kerakyatan melalui program Perhutanan Sosial, Kewirausahaan Petani, Kartu Tani, Peremajaan Sawit Rakyat dan gerakan mengawal musim tanam.

Berdasarkan sektor ekonominya, mayoritas kredit segmen kecil disalurkan ke sektor perdagangan, restoran, dan hotel yakni sebesar 57,4%, diikuti oleh penyaluran ke sektor industri pengolahan serta pertanian, perburuan, dan sarana pertanian masing-masing sebesar 10,8% dan 9,9% dari total portofolio kredit segmen kecil.

Tabel Portofolio Pinjaman Segmen Kecil Berdasarkan Sektor

Sektor Ekonomi	2018	2017	Pertumbuhan 2017-2018	Komposisi	NPL 2018	NPL 2017
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(%)	(%)	(%)	(%)
Perindustrian	7.109	5.388	31,9%	10,8%	1,4%	2,6%
Perdagangan, resto, hotel	37.896	34.697	9,2%	57,4%	1,9%	2,8%



Sektor Ekonomi	2018	2017	Pertumbuhan 2017-2018	Komposisi	NPL 2018	NPL 2017
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(%)	(%)	(%)	(%)
Pertanian	6.541	4.227	54,7%	9,9%	1,0%	2,1%
Jasa Dunia Usaha	6.131	5.369	14,2%	9,3%	1,6%	3,0%
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	1.848	1.583	16,7%	2,8%	1,0%	2,9%
Konstruksi	2.670	2.347	13,8%	4,0%	2,2%	2,4%
Listrik, gas dan air	100	70	42,9%	0,2%	0,0%	0,3%
Pertambangan	313	227	37,9%	0,5%	0,2%	0,9%
Jasa Pelayanan Sosial	3.454	2.571	34,3%	5,2%	1,2%	2,8%
Total	66.063	56.479	16,9%	100%	1,6%	2,7%

PROSPEK USAHA SEGMENT KECIL-KREDIT DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Peluang pembiayaan kredit kecil masih terbuka lebar, mengingat jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai ±58 juta orang. Potensi pembiayaan yang besar tersebut akan digarap segmen kecil BNI melalui jaringan *outlet* maupun melalui *digital channel*.

Melanjutkan tren kinerja positif di 2018, segmen Kecil BNI optimistis dalam mencapai target 2019 melalui strategi-strategi berikut:

1. Strategi pertumbuhan
 - a. Optimalisasi *supply chain financing* dari nasabah dan debitur korporasi.
 - b. Menjadikan program pemerintah sebagai basis pertumbuhan.
 - c. Meningkatkan sinergi BUMN untuk mengakselerasi pertumbuhan kredit di sektor produksi.
 - d. Fokus pembiayaan kepada sentra-sentra bisnis dengan pola *clustering*.
 - e. Menyempurnakan proses kredit berbasis digital.
2. Strategi kualitas kredit
 - a. Menyempurnakan manajemen risiko melalui *early warning system* yang lebih baik.
 - b. Penyempurnaan *collection management system*.
 - c. Intensifikasi penagihan klaim KUR.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT KOMERSIAL DAN KECIL

Pendapatan dan profitabilitas segmen Komersial dan Kecil disajikan sebagai berikut:

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Komersial dan Kecil

Uraian	2018	2017	Pertumbuhan	
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(%)
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah - neto *)	8.571.831	6.807.866	1.763.965	25,9%
Pendapatan premi - neto	-	-	-	-
Pendapatan operasional Lainnya	1.306.501	1.159.012	147.489	12,7%
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(3.787.622)	(2.306.273)	(1.481.349)	64,2%
Beban operasional lainnya	(2.547.390)	(2.702.085)	154.695	(5,7%)
Laba operasional	3.543.320	2.958.520	584.800	19,8%
Pendapatan (beban) bukan operasional neto	184	22	162	736,4%
Laba sebelum beban pajak	3.543.504	2.958.542	584.962	19,8%
Total aset	135.308.561	121.160.933	14.147.628	11,7%
Total liabilitas	14.658.291	121.311	14.536.980	11.983,2%

*) termasuk komponen *internal transfer pricing* antar segmen operasi



Pada tahun 2018 pendapatan bunga dan pendapatan syariah-neto segmen Komersial dan Kecil mencapai Rp8,6 triliun, tumbuh sebesar 25,9% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp6,8 triliun. Sedangkan laba operasional segmen Komersial dan Kecil pada tahun 2018 mencapai Rp3,5 triliun, tumbuh 19,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp3,0 triliun. Peningkatan Profitabilitas Segmen Komersial dan Kecil karena pertumbuhan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 42,9% dan pertumbuhan penyaluran pinjaman berdasarkan sektor ekonomi pertanian.

KONSUMER DAN RITEL

Bisnis Segmen Konsumer dan Ritel meliputi kredit pembiayaan konsumsi antara lain: kredit kepemilikan rumah, kredit multiguna, *payroll loan* (kredit tanpa agunan), kredit pensiun, kredit dengan jaminan simpanan atau ORI (Instan), pembiayaan kredit kendaraan bermotor, kartu tunai, dan kartu kredit.

KREDIT

Uraian penjelasan, strategi tahun 2018, produktivitas, prospek usaha dan strategi pencapaiannya untuk Kredit Segmen Konsumer dan Ritel pada BNI disajikan sebagai berikut:

PENJELASAN SEGMENT KONSUMER DAN RITEL - KREDIT

Produk-produk kredit konsumer terdiri dari kredit kepemilikan rumah/*mortgage*, *credit card*, *payroll based loan*, *auto loan* dan lainnya.

1. *Mortgage*/Kredit Kepemilikan Rumah
BNI Griya merupakan fasilitas kredit yang ditujukan kepada perorangan untuk kebutuhan kepemilikan rumah tinggal, apartemen, ruko/rukan dan rumah peristirahatan (*villa*) dengan kondisi baru atau seken. Fasilitas ini juga dapat digunakan untuk pembelian kavling/tanah, pembangunan, renovasi, *refinancing*, *take over*, *top up* melalui program BNI Griya Multiguna.
2. Kartu Kredit (*Credit Card*)
Kartu Kredit merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan oleh individu maupun korporasi untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul seperti transaksi belanja dan atau penarikan tunai. Kartu Kredit merupakan salah satu produk pinjaman Konsumer. Produk-produk Kartu Kredit

BNI terdiri dari:

- a. Kartu Kredit Reguler, yang terdiri dari: BNI Visa *Silver*, BNI Mastercard *Silver*, BNI Visa *Gold*, BNI Mastercard *Gold* dan BNI JCB *Gold*.
 - b. Kartu Kredit Premium, yang terdiri dari: BNI *Style Titanium*, BNI Visa *Platinum*, BNI JCB *Precious*, BNI Mastercard *World* dan BNI Visa *Infinite*.
 - c. Kartu Kredit *Co-Branding*, yang terdiri dari: BNI-Garuda, BNI-LOTTE Mart, BNI-Bank Sumsel Babel, BNI-Bank BJB, BNI-Bank DKI dan BNI-Pertamina.
 - d. Kartu Kredit *Affinity*, yang terdiri dari: Kartu Universitas, Kartu Ikatan Alumni, dan Kartu Komunitas seperti Kartu Kredit BNI WWF dan BNI Harley Owner Group.
 - e. Kartu Kredit *Corporate*, yang terdiri dari: BNI Visa *Corporate Card Gold*, BNI Visa *Corporate Card Platinum* dan BNI American Express *Business Card*.
 - f. Kartu Kredit Private Label yang terdiri dari: BNI *Travelling Card*, BNI *Health Card* dan BNI *Distribution Card*.
 - g. BNI Kartu Tunai, merupakan pinjaman tanpa agunan yang bersifat *revolving* dan dapat diubah menjadi cicilan tetap, hanya dapat digunakan untuk melakukan tarik tunai di ATM atau *Teller*.
3. *Payroll Based Loan*/Kredit Tanpa Agunan
BNI Fleksi adalah produk Kredit Tanpa Agunan BNI yang tersedia bagi para pegawai aktif dan pensiunan yang pembayaran gaji dan manfaat pensiunnya melalui BNI.
 4. *Others*
BNI Instan, adalah produk kredit dengan jaminan Deposito, Tabungan dan Giro BNI.

STRATEGI TAHUN 2018, PRODUKTIVITAS, PROSPEK DAN, STRATEGI PENCAPAIAN SEGMENT KONSUMER DAN RITEL - KREDIT

Tabel Kinerja Kredit Konsumer dan Ritel

Uraian	2018	2017	Pertumbuhan	
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(%)
<i>Mortgage</i>	40.753	37.066	3.687	9,9%
<i>Payroll Loan</i>	23.744	17.687	6.057	34,2%
<i>Credit Card</i>	12.558	11.635	923	7,9%
<i>Others</i>	2.680	5.057	(2.377)	(47,0%)
Subtotal	79.735	71.445	8.290	11,6%

Kredit konsumer dan ritel pada tahun 2018 mencapai Rp79,7 triliun, tumbuh sebesar 11,6% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp71,4 triliun. Ekspansi kredit konsumer dan ritel tahun 2018 sebesar Rp8,3 triliun. *Payroll Loan* masih menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan kredit konsumer, dengan *growth* sebesar 34,2%. Pertumbuhan *Payroll Loan* didukung oleh optimalisasi *database Corporate Segmen*, maupun institusi. Pertumbuhan kredit konsumer didukung pula dengan kemudahan proses dan *digital marketing* (BNI DigiLoan).



BNI Griya

BNI Griya merupakan fasilitas kredit yang ditujukan kepada perorangan untuk kebutuhan kepemilikan rumah tinggal, apartemen, ruko/rukan dan rumah peristirahatan (*villa*) dengan kondisi baru atau seken. Fasilitas ini juga dapat digunakan untuk pembelian kavling/tanah, pembangunan, renovasi, *refinancing*, *take over*, *top up*, serta BNI Griya Multiguna.

Strategi BNI Griya Tahun 2018

Strategi penyaluran BNI Griya 2018, difokuskan pada *Selected Partner*, (termasuk segmen milenial), dan *Selected Developer*, maupun *existing* Nasabah. Di segmen *primary property market*, BNI Griya memperluas kerja sama dengan *Developer* di seluruh Indonesia dan memberikan kemudahan serta kecepatan proses pengajuan kredit bagi calon debitur yang membeli properti baru di *Developer* kerja sama BNI tersebut. Di segmen *secondary property market*, BNI Griya telah melakukan kerja sama dengan sejumlah *Property Agent*, serta melakukan kegiatan *gathering* bersama untuk meningkatkan akuisisi aplikasi BNI Griya terutama pembelian properti seken.

Penyaluran kredit BNI Griya difokuskan kepada nasabah dengan *fixed income*, dan mengoptimalkan peran cabang khususnya di kota besar untuk percepatan proses kredit. Selain akuisisi debitur baru, penyaluran kredit juga dilakukan melalui program *Top Up* fasilitas kredit untuk eksisting nasabah dengan kriteria tertentu. Penyaluran kredit BNI Griya juga dilakukan melalui sinergi bersama *Business Banking* (Korporasi, Komersial, dan Ritel) dan entitas anak, untuk menggarap target segmen direktur/*top management*, *business owner* dan pegawai dari mitra institusi BNI, termasuk pemberian kredit untuk konstruksi *developer*.

Tahun 2018, BNI Griya memberikan kemudahan berupa antara lain adalah suku bunga ringan dan tetap hingga 4 (empat) tahun pertama, sehingga memberikan kepastian besarnya cicilan kepada debitur. BNI juga memasarkan program pembiayaan perumahan untuk segmen Milenials, yaitu BNI Griya Gue dengan fitur yang menarik berupa cicilan yang ringan di awal kredit dan secara berjenjang meningkat disesuaikan dengan proyeksi kenaikan penghasilan ke depannya. Khusus mitra *developer* kerja sama BNI, berlaku program instan *approval* yaitu persetujuan cepat dengan simplifikasi dokumen pengajuan kredit BNI Griya. BNI juga turut berpartisipasi dalam program penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penghargaan BNI Griya selama tahun 2018

1. Top Bank 2018 (Top KPR (Kredit Perumahan Rakyat) 2018)).
2. Rumah 123 Real Estate Awards 2018 (*The Most Popular Bank for Mortgage Product*).

Produktivitas BNI Griya

Portofolio BNI Griya mencapai Rp40,8 triliun tumbuh sebesar 9,9%, dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp37,1 triliun. Ekspansi BNI Griya sebesar Rp37,1 triliun pada tahun 2018. Penyaluran BNI Griya tahun 2018 difokuskan kepada segmen *primary property market* melalui kerja sama dengan *Developer*, sedangkan untuk segmen *secondary property market* penjualan BNI Griya dilakukan melalui *channel Property Agent* dan optimalisasi *outlet*.

Tabel Produktivitas BNI Griya

Keterangan	2018	2017	Pertumbuhan	
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(%)
BNI Griya	40.753	37.066	3.687	9,9%

Prospek BNI Griya dan Strategi Pencapaiannya

Pertumbuhan Griya BNI 2018 yaitu sebesar 9,9%. Prospek Griya BNI di tahun 2019 tetap optimis untuk dapat tumbuh hingga 12,0%.

Beberapa strategi yang akan diimplementasikan di tahun 2019 khusus untuk pemasaran BNI Griya:

1. Fokus pada potensi nasabah *fixed Income*: pegawai institusi, debitur *Business Banking* serta nasabah *Non Fixed Income*; nasabah *Emerald*, dan debitur *existing*, dengan menggarap potensi dari *chain business* melalui sinergi dengan *Business Banking* (*Korporasi, Komersial, dan Ritel*) maupun dengan entitas anak, yang akan memberikan potensi bagi *Consumer Banking* khususnya dalam menggarap BNI Griya dengan target segmen baik untuk Direktur/*Top Management*, *business owner*, pegawai institusi dan *partner* kerja sama.
2. Mengoptimalkan seluruh jaringan cabang/*outlet* yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai *channel* pemasaran BNI Griya, serta meningkatkan kemudahan dan kecepatan proses BNI Griya, termasuk meningkatkan Kerja sama dengan mitra bisnis properti yaitu *Developer* dan *Property Agent*.
3. Pemasaran BNI Griya menasar segmen milenial dengan upaya
 - a. Digitalisasi proses pengajuan kredit serta memperkuat pemasaran BNI Griya melalui *strategic partnership* dengan *media property online*.
 - b. Mengoptimalkan *Big Data* (*Crawling* dari *Business Directory*, Perguruan Tinggi, *Market Place*, dan Media Sosial) guna memperoleh data *leads* Griya *Millenials* yang berkualitas.
 - c. *Massive campaign* fokus di *online* dan sosial media, sekaligus memberikan edukasi bagi segmen milenial mengenai pentingnya memiliki rumah sejak dini.



BNI Fleksi

BNI Fleksi adalah produk Kredit Tanpa Agunan BNI yang tersedia bagi para pegawai aktif dan pensiunan yang menyalurkan gaji dan manfaat pensiunnya melalui BNI.

Strategi 2018 BNI Fleksi

Selama 2018 BNI Fleksi difokuskan pada ekspansi nasabah dengan profil risiko rendah (BUMN, PNS, *selected institution*, Pra Pensiun dan Pensiunan Taspen/Asabri/Dapen BUMN), selain program fleksi *payroll* dengan strategi akuisisi melalui *cross selling* fleksi *payroll* kepada nasabah/debitur terpilih (*selected company*) melalui *payroll based customer*.

Meningkatnya jumlah rekening *payroll* selama tahun 2018 memberi potensi peningkatan BNI Fleksi dengan melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan BUMN, Kementerian/Instansi Pemerintah, dan perusahaan swasta terpilih.

Berbagai program BNI Fleksi telah dilakukan selama tahun 2018, antara lain kemudahan pengajuan BNI Fleksi yang dapat di ajukan pada setiap cabang BNI terdekat maupun secara *digital*, dengan waktu pemrosesan yang cukup cepat.

Peningkatan *portfolio* BNI Fleksi dilakukan pula dengan penyaluran fasilitas kredit kepada pensiun melalui BNI Fleksi Pensiun (BFP). Produk ini merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada calon pensiun yang akan memasuki masa pensiun maksimal 5 (lima) tahun ke depan, dengan plafon kredit yang cukup menarik yaitu maksimum kredit sampai dengan Rp500 juta, jangka waktu sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan bunga yang cukup bersaing.

Penyaluran BNI Fleksi Pensiun kepada calon pensiunan dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pensiun beberapa institusi, antara lain dengan Taspen dan Asabri dan lembaga pensiunan BUMN, maupun dengan bekerja sama dengan *fronting* agen. Peningkatan akuisisi BNI Fleksi juga didukung oleh fleksibilitas *channel* pemasaran melalui *channel* ATM, *Mobile Banking*, *SMS Banking*, di samping percepatan proses dengan SLA proses kredit selama 1 (satu) hari, simplifikasi dokumen dan kemudahan proses.

Produktivitas BNI Fleksi

BNI Fleksi tumbuh dari tahun lalu sebesar 34,2 % atau menjadi Rp23,7 triliun naik dari tahun 2017 sebesar Rp17,7 triliun. Pertumbuhan BNI Fleksi didominasi dari ekspansi kredit kepada nasabah BUMN, Kementerian, Instansi pemerintah, *Selected Company* (Swasta Terpilih).

Tabel Produktivitas BNI Fleksi

Keterangan	2018	2017	Pertumbuhan	
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(%)
BNI Fleksi	23.744	17.687	6.057	34,2%

Prospek BNI Fleksi dan Strategi Pencapaiannya

Pertumbuhan *Payroll Loan* BNI merupakan pendorong utama potensi *Consumer Lending* BNI secara keseluruhan. Meningkatnya usia produktif dan generasi milenial merupakan kondisi potensial untuk pertumbuhan BNI Fleksi di tahun 2019.

Dalam meningkatkan ekspansi kredit BNI Fleksi di tahun 2019, maka strategi akan difokuskan pada *Selected Partner* dan *Existing Customer*, yaitu:

1. Penetrasi potensi nasabah *payroll* (BUMN, ASN, TNI POLRI, dan pegawai nasabah korporasi dan melakukan kerja sama kelolaan dengan BUMN dan Kementerian.
2. Fokus pada Pegawai Pra Purna dan Pensiun institusi/ lembaga antara lain Taspen Asabri dan Dana Pensiun BUMN.
3. Pengembangan melalui digitalisasi produk dan pemanfaatan *data analytics* dan pelaksanaan program untuk pemberian kredit jangka pendek bagi debitur fleksi terutama nasabah *payroll*, *non payroll* dan milenial.
4. Meningkatkan *loyalty* program bagi nasabah aktif pada *selected partner* dengan memanfaatkan media komunikasi dan aktivitas/*event*, serta kemudahan *top up*/ penambahan fasilitas.
5. Mengembangkan kemudahan dan *monitoring* proses kredit melalui digitalisasi, dan mengoptimalkan peran cabang sebagai *office channeling*.
6. Pengembangan fitur BNI Fleksi untuk mengakomodir kebutuhan Pegawai Pra Purna.

Pada Tahun 2019 ekspansi dan akuisisi BNI Fleksi difokuskan kepada pegawai institusi pemerintah yang risikonya rendah.



Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan oleh individu atau perorangan maupun korporasi untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul seperti transaksi belanja dan atau penarikan tunai. Kartu kredit merupakan salah satu produk pinjaman Konsumer.

Strategi Kartu Kredit di Tahun 2018

Di 2018, Bisnis Kartu BNI yang memiliki tagline “Start from the Card” fokus pada peningkatan Portofolio Kartu Kredit BNI dan peningkatan *Fee Based Income*. Peningkatan portofolio melalui peningkatan penetrasi akuisisi kartu kredit dari *captive data based* dan fokus akuisisi di *Selected Company* kelolaan *Business Banking*. Dalam rangka peningkatan *sales volume* tahun 2018, BNI melakukan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Menggarap potensi milenial melalui *Digital Enhancement* dengan pengembangan pembayaran menggunakan *QR Code* melalui aplikasi Yap!.
2. Kerjasama *usage* program dengan *e-commerce merchant* yang strategis baik program *discount*/potongan harga, *installment* atau *redemption BNI Rewards Point*.
3. Meningkatkan penetrasi *sales volume* di area luar Jakarta dengan memperbanyak program promo kartu kredit di *merchant-merchant local* melalui program *discount*, *cashback*, *redemption BNI Rewards Point* dan cicilan.
4. Meningkatkan Akuisisi dengan *digital channel* melalui *e-form*.
5. Meningkatkan akuisisi *Corporate Card* untuk *Selected Company* sesuai kelolaan *Business Banking*.
6. BNI menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan uang persediaan, antara lain bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Komisi Pemberantasan Korupsi dan berbagai Instansi Pemerintah lainnya.
7. Meluncurkan Kartu Kredit BNI Affinity Ikanas STAN.
8. Melakukan pengembangan Aplikasi Manajemen Kartu Kredit untuk meningkatkan loyalitas *Customer*.

Produktivitas Kartu Kredit 2018

Tabel Kinerja Kartu Kredit

Keterangan	2018 (Rp miliar)	2017 (Rp miliar)	Pertumbuhan (%)
Nilai Transaksi	38.924	34.970	11,3%
<i>Fee Based Income</i>	1.558	1.389	12,1%
<i>Outstanding</i>	12.558	11.635	7,9%

Kinerja Kartu Kredit 2018

Pertumbuhan jumlah kartu dan peningkatan *sales volume* kartu kredit melalui penetrasi pada program-program *e-commerce* dan penerbitan produk baru yang berdampak pada kenaikan *outstanding* Kartu Kredit BNI pada akhir tahun 2018. Adapun perolehan *sales volume* kartu kredit di tahun 2018 sebesar Rp38.924 miliar atau naik 11,3% dibandingkan tahun 2017 sedangkan perolehan *outstanding* kartu kredit di tahun 2018 sebesar Rp12.558 miliar atau meningkat 7,9% dibanding akhir tahun 2017. Selama tahun 2018, BNI aktif menyelenggarakan berbagai program menarik bagi para pemegang Kartu Kredit BNI dan pengembangan produk baru untuk memperluas pasar pengguna Kartu Kredit BNI antara lain:

1. Secara kontinu bekerja sama dengan *merchant-merchant e-commerce favorit* seperti Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Tiket.com, Shopee, Garuda, Agoda, JD.id, Lazada dan *merchant e-commerce favorit* lainnya, dalam bentuk program *regular*, *tactical*, *installment 0%*, dan *redemption BNI Rewards Point*.
2. Selain bekerja sama dengan *merchant e-commerce*, *continuity* program masih tetap berlangsung untuk *merchant favorit* lainnya dengan menambahkan fitur cicilan 0%, program *discount*, *voucher*, dan *redemption BNI Rewards Point* pada *merchant-merchant favorit* seperti The Duck King, Sushi Tei, Bakerzin, Shaburi, Kintan, Pepperlunch, Pizza HUT, Excelso, Accor Group Hotel, The Body Shop, Lotte Mart, Electronic City, Erafone, iBox, Best Denki, ACE Hardware, Informa, Toys Kingdom, Ranch Market, Farmer Market, Gramedia dan berbagai *merchant* lainnya.
3. Menjadi satu-satunya produk kartu kredit yang menawarkan *redemption reward points* (BNI Reward Point) di *merchant online* seperti di Garuda Indonesia, Tokopedia, Blibli, Sepulsa, Dinomarket dan blanja.com.
4. Ikut serta dalam berbagai *event* besar seperti Java Jazz Festival, Japan *Travel Fair*, Inacraft, Garuda *Online Travel Fair* (GOTF), Mommy and Me, *Mid Night Sales* Ramadhan Senayan City, *Cool Japan Travel Fair*, Indonesia *Maternity and Baby Expo*, *The Crazy Toys Sale* dan *event* besar lainnya.

Penghargaan Kartu Kredit Tahun 2018

Pada tahun 2018 Kartu Kredit menerima beberapa penghargaan, antara lain:

1. Peringkat I *Digital Brand* Kartu Kredit Bank Umum Konvensional dari Infobank 7th Digital Brand Awards.
2. *The Best E-Commerce* 2017 dari Visa.
3. *Best Milenials Segment Solutions* BNI Style Titanium dari Mastercard Appreciation Night 2018.
4. *Most Creative CC Acquisition Campaign* dari Mastercard Appreciation Night 2018.
5. *Best Sales Volume From Issuing Bank in Indonesia* 2017 dari JCB Award of Appreciation.



6. *The Best Digital Brand Bank* Umum Konvensional dari Infobank 7th Digital Brand Awards.
7. *Promising Company In Branding Campaign* "Silver Winner" dari BUMN Marketeers Awards 2018.

8. *Promising Company In Strategic Marketing* "Bronze Winner" dari BUMN Marketeers Awards 2018.

Prospek Kartu Kredit dan Strategi Pencapaian

Di tahun 2019, seiring dengan perkembangan *digitalization* maka kebutuhan penggunaan kartu kredit di kalangan masyarakat akan mengalami peningkatan, sehingga berdampak pada meningkatnya prospek dari bisnis kartu kredit. Dalam menangkap peluang tersebut bisnis Kartu Kredit BNI fokus pada beberapa strategi antara lain:

1. Meningkatkan akuisisi melalui Optimalisasi *Data Captive* dan Pengembangan Akuisisi Digital Berbasis Aplikasi.
2. Memperkuat penetrasi transaksi *e-commerce* melalui fokus pada *top strategic partners* dan pengembangan fitur.
3. Fokus promo dan komunikasi pada *merchant-merchant* pada kategori "*leisure experience*" di antaranya *travel, dining* dan *entertainment*.
4. Mengembangkan *new business Commercial Card* bekerja sama dengan *Fintech* dan *Supply Chain Financing*.
5. Meningkatkan kontribusi *sales volume regional* melalui program *usage (regional wisdom)*.
6. Optimalisasi *capability* Big Data melalui *enhance customer propensity model*.
7. Untuk meningkatkan loyalitas *Customer* dilakukan pengembangan lanjutan Aplikasi *digital dashboard* Kartu Kredit Personal.
8. *Launching* produk dan fitur baru Kartu Kredit BNI.

Guna mendukung pencapaian strategi di tahun 2019, maka dilakukan beberapa program akuisisi:

1. Meningkatkan akuisisi melalui optimalisasi *Data Captive*.
2. Penempatan *Direct Sales In Branch*.
3. Kerja sama dengan *Big Partner Database*.

BNI Instan

BNI Instan atau *Cash Colateral Credit (C3)*, adalah produk kredit untuk para nasabah BNI. BNI Instan merupakan fasilitas pinjaman yang dijamin dengan simpanan dalam bentuk Tabungan/Deposito/Giro yang diterbitkan oleh BNI atau yang dijamin dengan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) yang dibeli nasabah di BNI atau Bank lain atau Perusahaan Sekuritas sebagai agen penjual dan disimpan di *Sub Registry* sesuai ketentuan.

Strategi BNI Instan Tahun 2018

Ekspansi BNI Instan selama 2018, difokuskan pada pemberian fasilitas kepada *existing* nasabah serta percepatan *booking* dengan dukungan *digital enhancement*. Pengembangan fitur BNI Instan juga dilakukan dengan jaminan dalam bentuk obligasi perorangan selain ORI.

Produktivitas BNI Instan di Tahun 2018

Pada tahun 2018 produk BNI Instan mengalami penurunan sebesar 59,3% (YoY), Portfolio BNI Instan 2018 sebesar Rp925 miliar turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,3 triliun. Produk BNI Instan digunakan sebagai pendukung strategi retensi dana dan menambah pertumbuhan kredit konsumen secara keseluruhan.

Tabel Kinerja BNI Instan

Produk	2018 (Rp miliar)	2017 (Rp miliar)	Pertumbuhan (%)
BNI Instan	925	2.275	(59,3)

Pada Tahun 2018 jumlah rekening/*Number of Account* (NOA) BNI Instant mencapai 1.904 unit rekening turun sebesar 9,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 2.115 unit rekening.

Tabel Jumlah Rekening BNI Instan

Produk	2018 (unit rekening)	2017 (unit rekening)	Pertumbuhan (%)
BNI Instan	1.904	2.115	(9,98%)

Pada tahun 2018 jumlah rekening/*Number of Account* (NOA) BNI Instan mencapai 1.904 rekening turun sebesar 9,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya mendapai 2.115 rekening.

Prospek BNI Instan dan Strategi Pencapaiannya

BNI Instan masih menjadi sarana pendorong bagi strategi retensi dana pihak ketiga, dengan tetap berfokus pada percepatan *booking* melalui institusi kelolaan, nasabah Korporasi BUMN, Kementerian dan Universitas serta *existing* nasabah dan pegawai *selected partner* dengan dukungan *digital enhancement*, serta melakukan pengembangan fitur BNI Instan.

SIMPANAN/DANA PIHAK KETIGA

Uraian penjelasan, strategi tahun 2018, produktivitas, prospek usaha dan strategi pencapaiannya untuk Simpanan/Dana Pihak Ketiga Segmen Konsumer dan Ritel pada BNI disajikan sebagai berikut:

PENJELASAN SEGMENT KONSUMER DAN RITEL - DPK

Produk Dana Pihak Ketiga perbankan konsumer mencakup produk tabungan dan deposito.

Tabungan

Produk Tabungan BNI terdiri dari:

1. Tabungan Plus (Taplus), merupakan tabungan yang memberikan layanan PLUS dengan berbagai macam fitur dan manfaat.
2. Taplus Bisnis, adalah produk tabungan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha, baik perorangan maupun non perorangan, yang dilengkapi dengan fitur dan fasilitas yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam mendukung usaha bisnis.
3. TAPPA (Taplus Pegawai/Anggota), merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi Pegawai/Anggota suatu Perusahaan/Lembaga/Asosiasi/Organisasi Profesi yang menjalin kerja sama dengan BNI yang berfungsi sebagai sarana tabungan, kartu identitas Pegawai/Member.
4. Taplus Muda, merupakan produk simpanan dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan bagi kaum muda dengan usia mulai dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun yang dapat diajukan secara individual ataupun secara *Co-Brand* dengan Perguruan Tinggi yang melakukan kerja sama dengan BNI.
5. Taplus Anak, merupakan produk tabungan untuk membantu mengajarkan anak-anak menabung sejak usia dini, diperuntukkan bagi anak-anak usia di bawah 17 (tujuh belas) tahun.
6. *Emerald Saving*, merupakan produk tabungan untuk segmen nasabah *Emerald*
7. BNI Dolar, merupakan jenis simpanan dalam bentuk mata uang asing (USD/SGD/AUD) yang memiliki nilai tukar lebih stabil dan aman serta memberikan kemudahan dalam bertransaksi
8. Tapenas, merupakan simpanan berjangka untuk membantu perencanaan keuangan untuk mewujudkan

tujuan masa depan dengan lebih pasti dan aman.

9. Simpanan Pelajar, adalah tabungan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
10. Tabunganku, adalah produk Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. BNI Pandai, adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan oleh BNI yang memiliki karakteristik *Basic Saving Account* (BSA) dan dapat dibuka melalui Kantor Cabang BNI maupun melalui Agen
12. Tabungan Indonesia Pintar (TIP), Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) yang bersifat bantuan program kesejahteraan oleh pemerintah melalui BNI.

Deposito

BNI Deposito merupakan simpanan berjangka dalam berbagai pilihan mata uang (IDR/USD/SGD/JPY/HKD/EUR/GBP/AUD) dengan tingkat suku bunga yang menarik.

STRATEGI SEGMENT KONSUMER DAN RITEL - DPK DI TAHUN 2018

STRATEGI TABUNGAN

Beragam pilihan produk tabungan yang ditawarkan oleh BNI disesuaikan dengan kebutuhan nasabah pada setiap tahapan kehidupan. Selama 2018 strategi pencapaian DPK segmen konsumer dilakukan melalui relationship nasabah dominan/terpilih. Optimalisasi pertumbuhan DPK konsumer difokuskan pula untuk meningkatkan pertumbuhan transaksi *closed loop* melalui Layanan Digital, dan optimalisasi *merchant*, yang berdampak pada peningkatan dana *sustain*.

Taplus

Pada tahun 2018, BNI Taplus hadir menyemarakkan event dunia "Asian Games 2018" dengan menambah varian kartu debit edisi Asian Games untuk masyarakat Indonesia dan menjadi tabungan *official* untuk petugas *volunteer* di event tersebut. Kemudian, dari sisi pengembangan produk, dengan melihat perkembangan pasar di mana banyak masyarakat yang tidak menginginkan mendapatkan bunga tabungan, BNI Taplus menambah pilihan produknya dengan mengeluarkan parameter tabungan tanpa diberikan bunga tabungan. Sebagai *core* produk tabungan dengan portofolio terbesar, BNI Taplus memiliki peranan penting dalam pencapaian pertumbuhan DPK. Pada tahun ini, BNI Taplus mengeluarkan program utama yaitu *Kejutan BNI Taplus* yang merupakan program untuk mendapatkan dana *fresh fund* dari



nasabah perorangan dengan memberikan hadiah langsung sebagai apresiasi dan untuk meningkatkan *engagement* nasabah dengan BNI.

Taplus Bisnis

Dalam upaya menjadi *transactional banking*, BNI terus melakukan inovasi pada berbagai fitur dan *benefit* pada produk tabungan untuk segmen wirausaha dalam memantau keuangan atau alur transaksi usahanya. Segmen wirausaha merupakan *target market* yang digarap secara serius dengan menawarkan BNI Taplus Bisnis yang memudahkan wirausaha untuk bertransaksi dengan bank. Program-program khusus yang menasar segmen wirausaha di antaranya program akuisisi Taplus Bisnis melalui program Semarak Wirausaha, program *Reward Merchant*, *Bundling* BNI Taplus Bisnis-KUR Ritel, Kerja sama dengan *strategic partner*, Program di Pusat Bisnis, dan akuisisi BNI Taplus Bisnis Sahabat Agen 46. Pertumbuhan Taplus Bisnis 2018, difokuskan dalam peningkatan *closed loop transaction*, yang *inline* dengan proses bisnis melalui peningkatan transaksi segmen wirausaha, termasuk peningkatan jumlah transaksi *merchant*, serta optimalisasi pengelolaan *merchant* di segenap cabang/*outlet*.

Payroll

Dalam upaya meningkatkan penghimpunan dana murah, khususnya dalam meningkatkan saldo tabungan, BNI telah melakukan pemasaran produk BNI Taplus dan BNI TAPPA khusus untuk para pegawai nasabah giran dan Perusahaan/Institusi terutama yang telah menjadi Nasabah/Debitur BNI di sektor *Bisnis Banking* (Korporasi, Komersial, dan Ritel). Untuk para pegawai perusahaan yang ber-*payroll* dengan BNI tersebut akan memperoleh berbagai *benefit* di antaranya fasilitas pinjaman KTA BNI Fleksi dengan bunga kompetitif dan KPR BNI Griya proses cepat Selain *benefit* tersebut, nasabah *payroll* BNI juga dapat menikmati promo belanja debit berupa diskon atau *cashback*, produk *bundling* dengan produk tabungan lainnya seperti taplus anak dan tapenas, program loyalti *payroll* dan info promo melalui aplikasi BNI *Experience*. Program *loyalty payroll* yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 di 60 perusahaan terpilih bertujuan untuk meningkatkan loyalitas nasabah *payroll* yang tersebar di seluruh wilayah.

Taplus Anak dan Taplus Muda

Di tahun 2018, BNI Taplus Anak kembali hadir setidaknya di 100 (seratus) sekolah yang tersebar secara nasional dari timur ke barat Indonesia dengan berkolaborasi bersama Majalah CIA (*Creativity in Action*) dalam *campaign* BNI Taplus Anak dan *Asian Games* 2018. Salah satu yang berhasil menarik perhatian sekolah-sekolah yang dikunjungi oleh BNI dan Majalah CIA adalah Kartu Debit BNI Taplus Anak dan BNI Taplus Muda desain khusus *Asian Games* 2018. Kartu Debit ini tidak hanya berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit, tetapi juga berfungsi sebagai BNI *Tapcash* (uang elektronik). Pada *school to school* ini, selain BNI hadir

memberikan pengetahuan mengenai banyaknya manfaat dari menabung sejak usia dini, tim Majalah CIA juga hadir dengan memperkenalkan *Asian Games* dengan cara yang menyenangkan, di antaranya mengenai sejarah *Asian Games*, Negara-negara peserta *Asian Games*, filosofi maskot *Asian Games*, dan sebagainya. Untuk *school to school* tidak hanya berhenti disitu, kegiatan di sekolah-sekolah yang dikunjungi oleh BNI juga ditawarkan produk BNI-Edupatrol yang memberikan *benefit* sangat banyak bagi Sekolah, Orangtua, dan Siswa. Dalam rangka melengkapi kebutuhan manajemen finansial sekolah, penawaran BNI-Edupatrol sangat efektif apabila digabung (*bundling*) dengan Kartu Siswa/Pelajar BNI Taplus Anak dan BNI Taplus Muda. BNI Taplus Anak dan BNI Taplus Muda juga sangat memahami tren pasar masa kini, salah satu *start-up* karya anak bangsa yang populer di tahun ini adalah Aplikasi Ruangguru. Kami berkolaborasi dengan Ruangguru untuk program reguler dan program *tactical* di Ramadhan dan Idul Fitri kemarin. Sepanjang tahun 2018, BNI Taplus Muda juga memiliki banyak kegiatan bertujuan untuk meningkatkan *engagement* dengan komunitas anak milenial. Sebagian besar kami berkolaborasi dengan *partner* yang memang *expertise* pada aktivitas-aktivitas anak milenial, di antaranya BNI Java Jazz Festival 2018 (Java Promosindo), *SkyRun* 2018 (Labschool), *Sky Avenue* (Labschool), *Cravier* (Labschool), *I Loop Run* (Telkomsel), *UI-Half Marathon* (ILUNI UI), Program *Yellow* ILUNI (ILUNI UI), *ITB Half-marathon* (Alumni ITB), dan sebagainya. Selain itu, kami juga melaksanakan beberapa program yang sangat dekat dengan hobinya anak milenial, yakni program *Sketch Your Card* yang merupakan kompetisi desain untuk kartu debit BNI Taplus Muda. Lalu kami juga berkolaborasi dengan Telkomsel untuk menyelenggarakan program BNI Taplus Muda berhadiah ekstra kuota Telkomsel 2GB. Di akhir tahun 2018, BNI Taplus Anak hadir mendukung kegiatan Konser Penyanyi Cilik bernama "Naura" di Kota Bandung serta turut hadir dalam *sponsorship event* Indonesia Maternity, Baby, and Kids Expo 2018 (IMBEX) di JCC Kota Jakarta.

Tapenas

BNI Tapenas sebagai tabungan perencanaan masa depan, merupakan tabungan berjangka BNI untuk membantu mewujudkan berbagai rencana keuangan sebagai tujuan di masa depan dengan lebih pasti dan aman. BNI Tapenas memberikan perlindungan asuransi jiwa gratis bagi para Nasabah sebagai perwujudan komitmen BNI untuk lebih memberikan kepastian terwujudnya berbagai rencana nasabah di masa depan. Selama tahun 2018, terdapat beberapa program-promosi BNI Tapenas, antara lain program *bundling* antara BNI Tapenas dan beberapa produk Tabungan BNI Lainnya, seperti Taplus Anak, Taplus Bisnis, Taplus Pegawai, serta program promosi BNI Tapenas yang memberikan hadiah langsung bagi Nasabah berupa Logam Mulia dan *gadget flagship* Samsung dan Iphone terbaru secara gratis. Selain itu, untuk lebih memberikan kemudahan bagi Nasabah yang membuka BNI Tapenas, BNI telah mengembangkan *channel* baru yaitu pembukaan melalui



Mobile Banking BNI, yang memberikan kepraktisan bagi Nasabah untuk membuka BNI Tapenas tanpa harus datang ke outlet BNI.

Program Pemerintah dan Inklusi Keuangan

Selain untuk nasabah umum, produk tabungan BNI yang memiliki karakteristik *basic saving account* juga digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam hal penyaluran dana bantuan pemerintah yang juga sekaligus mendukung program inklusi keuangan seperti:

1. BNI Simpanan Pelajar untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan serta Kementerian Agama.
2. BNI Pandai untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI maupun juga program bantuan sosial yang menggunakan anggaran daerah dari beberapa propinsi.
3. BNI Pandai dan TabunganKu untuk Program Kartu Tani dari Kementerian Pertanian.
4. BNI Pandai dan Kartu KUSUKA (Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. BNI Pandai untuk Program PNM Mekar, yaitu program untuk ibu-ibu pra sejahtera yang menjadi nasabah dari PNM.
6. Tabungan Non Perorangan Khusus untuk program subsidi bagi Kelompok Tani (Poktan) dari Kementerian Pertanian.
7. BNI Pandai, TabunganKu, BNI Simpel untuk program/gerakan menabung dengan sampah yang merupakan kombinasi antara gerakan edukasi lingkungan dan inklusi keuangan.
8. BNI Pandai untuk program E-retribusi pasar-pasar di beberapa propinsi.

STRATEGI DEPOSITO

Deposito dapat menjadi salah satu instrumen investasi bagi nasabah. Dana nasabah dapat ditempatkan dengan berbagai pilihan jangka waktu dan suku bunga yang kompetitif.

BNI memberi kemudahan kepada nasabah dalam memiliki deposito melalui *digitalisasi* deposito. Nasabah dapat membuka sendiri rekening depositonya melalui fitur internet dan *mobile banking* dengan aman, cepat dan mudah. Diharapkan melalui digitalisasi ini dapat memenuhi kebutuhan segmen millennial dan nasabah yang menginginkan kemudahan di sela waktu dan berbagai kesibukan.

PRODUKTIVITAS SEGMENT KONSUMER DAN RITEL - DPK

Produktivitas simpanan segmen Konsumer dan Ritel disajikan sebagai berikut:

Tabel Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga

Keterangan	2018		2017		Pertumbuhan	
	(Unit Rekening)	Komposisi (%)	(Unit Rekening)	Komposisi (%)	(Unit Rekening)	(%)
Tabungan	43.181.705	99,0%	32.797.198	99,0%	10.384.517	31,7%
Deposito	364.988	1,0%	337.216	1,0%	27.840	8,2%
TOTAL	43.546.693	100,0%	33.134.405	100,0%	10.412.357	31,4%

Peningkatan jumlah rekening tabungan pada tahun 2018, di antaranya diperoleh melalui program kerja sama *payroll* dengan perusahaan/institusi terutama yang menjadi nasabah/debitur BNI di sektor *Business Banking* (Korporasi, Komersial, dan Ritel), program akuisisi *school to school* maupun *campus to campus*, serta pelaksanaan program pemerintah tahun 2018 dengan beberapa Kementerian dan Lembaga Pemerintah seperti Program Bantuan Sosial Non Tunai, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Simpanan Pelajar (Simpel).

Tabel Jumlah Dana Pihak ketiga

Keterangan	2018		2017		Pertumbuhan	
	(Rp juta)	Komposisi (%)	(Rp juta)	Komposisi (%)	(Rp juta)	(%)
Tabungan	189.708.216	73%	169.812.480	73,0%	19.895.737	11,7%
Deposito	68.486.923	27%	62.807.329	27,0%	5.919.426	9,5%
TOTAL	258.195.139	100%	232.619.809	100,0%	25.815.163	11,1%



Sejalan dengan peningkatan jumlah rekening, total dana pihak ke tiga pada akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp238,2 triliun atau tumbuh sebesar 11,1% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017. Pencapaian tersebut dikontribusikan dari komposisi tabungan sebesar Rp189,7 triliun atau tumbuh 11,7% dan deposito sebesar Rp68,5 triliun atau tumbuh sebesar 9,5%.

Penghargaan terkait pencapaian simpanan tahun 2018 sebagai berikut:

1. Bank Terinovatif Implementasi Sempel (FIN OJK EXPO 2018)
2. Bank Terbaik Implementasi Sempel/Sempel iB (FIN OJK EXPO 2018)
3. *Top Brand* 2018 Kategori *Installment Saving* ; BNI Tapenas
4. *Top Brand* 2018 Kategori Tabungan Anak ; BNI Taplus Anak
5. *Reader Choice Award Mother & Baby* Indonesia Kategori Tabungan pendidikan

PROSPEK DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Prospek dan Strategi Pencapaian Produk Tabungan

Pertumbuhan ekonomi diprediksikan akan meningkat sebesar 5,3% di tahun 2019 yang berdampak pada potensi pertumbuhan DPK yang diharapkan akan tumbuh 9,0% sampai dengan 10% . BNI terus berkomitmen agar pertumbuhan tabungan khususnya tetap tumbuh di atas industri, dengan terus meningkatkan transaksi *digital*, *strategic partnership*, dan pengembangan bisnis model, dengan demikian diharapkan tabungan BNI akan tumbuh sebesar 24%.

Fokus peningkatan DPK pada tahun 2019 masih fokuskan pada sektor wirausaha, pegawai, dan tabungan milenial, melalui peningkatan akuisisi, maupun *closed loop transaction* serta peningkatan transaksi *e-channel* baik POS maupun *e-commerce*, serta optimalisasi peran Agen 46, serta peningkatan jumlah dan volume transaksi BNI Kartu Debit dengan kebijakan strategi sebagai berikut:

1. Wirausaha, fokus untuk:
Akuisisi dan peningkatan saldo Tabungan Bisnis melalui aktivitas transaksi *merchant* dan optimalisasi EDC baik dengan aktivasi dan peningkatan transaksi *e-channel*, dan kerja sama dengan Pusat Bisnis, serta optimalisasi peran Agen 46. Peningkatan saldo Tabungan Bisnis melalui program pembiayaan maupun pengelolaan nasabah dan debitur.
2. Pegawai, fokus untuk:
Peningkatan saldo dan jumlah rekening *Payroll* melalui program akuisisi dan *loyalty* kepada perusahaan terpilih dan program retensi nasabah *payroll*, dengan memanfaatkan aplikasi *digi payroll* untuk akuisisi. Pelaksanaan program *payroll* melalui penjualan *bundling payroll* dengan BNI Fleksi atau BNI Griya dan berbagai fasilitas *e-channel* serta program *usage debit*.
3. Milenials, akan dilakukan melalui strategi:

Peningkatan Tabungan melalui pendekatan lembaga pendidikan formal dan non formal serta *first jobber*, serta melakukan akuisisi secara *massive* melalui program *School to school*, *Campus to Campus*, *Social Media Activation* dan *Cross Selling Product* melalui petugas *customer service* serta melakukan kerja sama dengan Kemendikbud atau Kemenag untuk menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Untuk menarik nasabah dari generasi ini, BNI akan mengembangkan sarana edukasi menabung dan transaksi secara *digital*.

4. Peningkatan preferensi nasabah dan *customer experience* pada peningkatan *image* BNI sebagai *transactional banking*, melalui edukasi dan aktivasi fasilitas *e-channel*, program *usage debit* atau transaksi *e-channel* yang *massive*.
5. Pengembangan aplikasi *digital* guna kemudahan *channel* akuisisi dan transaksi serta keamanan transaksi, melalui pembukaan rekening *digital* melalui *smartphone*, serta pembukaan rekening secara *digital* melalui mesin EDC Android.
6. Pengembangan *Digipoin* yaitu program loyalti berupa *reward poin* kepada nasabah tabungan BNI dengan aktif menambah saldo tabungan, transaksi melalui *e-channel* maupun kartu debit.

Prospek dan Strategi Pencapaian Produk Deposito

Deposito masih menjadi salah satu instrument penempatan dana yang aman bagi nasabah, yang dapat digunakan pula sebagai jaminan pinjaman kredit. Pertumbuhan deposito konsumen diharapkan dapat tumbuh sebesar 23%. Strategi pencapaian Deposito tahun 2019 difokuskan pada peningkatan transaksi digital, pemasaran *bundling* dengan produk Tabungan, Tapenas.

BISNIS KARTU DEBIT

PENJELASAN SEGMENT KONSUMER DAN RITEL – BISNIS KARTU

BNI terus berupaya mempertahankan posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di bisnis kartu kredit di samping secara berkesinambungan mengembangkan bisnis kartu debitnya.

BNI kartu debit memiliki berbagai pilihan dengan desain batik khas Indonesia meliputi Kartu Debit BNI Silver, Kartu Debit BNI Gold, Kartu Debit BNI Platinum serta Kartu BNI Emerald World MasterCard (khusus untuk nasabah prioritas). Selain itu, BNI juga terus melebarkan kerja sama dengan komunitas nirlaba maupun perguruan tinggi/universitas dalam bentuk Kartu Debit Affinity serta komunitas bisnis dalam bentuk Kartu Debit Co-brand antara lain Kartu Debit GamaCard (Universitas Gajah Mada), Kartu Debit Iluni UI (Ikatan Alumni Universitas Indonesia), Kartu Debit KAUP (Keluarga Alumni Universitas Pancasila), Kartu Debit LotteMart Wholesale, Kartu Debit Garuda, Kartu Debit *Multimart* dan Kartu Debit Indogrosir, dan lainnya.



STRATEGI KARTU DEBIT DI TAHUN 2018

Peningkatan *usage* BNI Kartu Debit 2018 dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan *campaign* program yang meliputi peningkatan habit nasabah dalam bertransaksi (*less cash customer*).
2. Meningkatkan jumlah frekuensi kartu debit bertransaksi, dalam upaya membentuk *usage experience* dan *brand awareness*, serta meningkatkan loyalitas nasabah melalui program aktivasi maupun program *usage* yang atraktif.

Strategi BNI Kartu Debit diimplementasikan dalam program unggulan BNI Kartu Debit selama tahun 2018 sebagai berikut:

Promo Nasional 2018

1. Program promosi kartu debit selama 2018 tersebar di *merchant-merchant* yang menjadi lokasi transaksi rutin nasabah di antaranya di *outlet-outlet Supermarket, Convenience Store, Department Store* maupun Restoran. Kerja sama dengan berbagai *merchant* favorit telah dilakukan dalam rangka membentuk dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat kartu debit sebagai alat transaksi pengganti uang tunai.
2. Program unggulan kartu debit BNI tahun 2018 di antaranya promo *Supermarket/Convenience Store, Restoran, Book store, Cinemas* maupun *Home Furnishing* terkemuka. Promo kartu debit BNI dilakukan melalui kerja sama dengan *E-Commerce* terkemuka BNI juga bekerja sama dengan wahana-wahana hiburan favorit.
3. Promo Lokal 2018
BNI Kartu Debit juga menjalin kerja sama dengan berbagai *merchant* lokal di daerah untuk lebih mendekatkan diri kepada pemegang kartu Debit BNI yang berada di luar area Jabodetabek. Kerja sama kemitraan dengan beberapa komunitas bisnis, juga semakin ditingkatkan khususnya dalam program-program *loyalty* dan aktivasi.
4. Promo *Co-Brand*
Beberapa program ditujukan untuk memberikan apresiasi tidak saja kepada para nasabah BNI namun juga mitra bisnis BNI. Untuk pemilik kartu debit *Co-brand Garuda* BNI, nasabah bisa mendapatkan *Triple Miles* setiap bertransaksi dengan menggunakan kartu#debit *Cobrand Garuda* BNI. Program kartu debit *Co-brand LotteMart Wholesale* memberikan *cashback* setiap bulannya bagi setiap nasabah yang bertransaksi di LotteMart Wholesale. Untuk pemilik Kartu debit BNI-Indogrosir BNI memberikan benefit tambahan kepada para nasabah yang bertransaksi dengan kartu debit BNI-Indogrosir.

PRODUKTIVITAS KARTU DEBIT TAHUN 2018

Tabel Kinerja Pertumbuhan Kartu Debit 2018

Transaction Debit Improvement	Pertumbuhan 2018 (YoY)	Pertumbuhan 2017 (YoY)
Sales Volume	21,7%	20,1%
Jumlah Kartu Beredar	39,8%	41,0%
Card transaction	24,9%	19,6%
Frekuensi	33,3%	26,5%

Tahun 2018, pertumbuhan *sales volume* BNI Kartu Debit tahun 2018, sebesar (YoY) 21,7% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2017 (YoY) 20,1%. Hal ini didorong oleh meningkatnya jumlah BNI Kartu Debit yang bertransaksi pada tahun 2018 sebesar 24,9% dari tahun 2017.

Penghargaan BNI Kartu Debit selama tahun 2018, sebagai berikut

1. *Best Millennial Segment Solution* (MasterCard Award 2018)
2. *Best Innovative Acquiring for QR* (MasterCard Award 2018)
3. *Best Affluent Debit Card Program* (MasterCard Award 2018)
4. *Most Creative Acquisition Campaign* (MasterCard Award 2018)

PROSPEK DAN STRATEGI PENCAPAIAN KARTU DEBIT

Tahun 2019, pertumbuhan *sales volume* BNI Kartu Debit difokuskan pada strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan preferensi nasabah dan *customer experience* serta peningkatan transaksi kartu debit melalui program *usage debit* baik transaksi POS maupun *e-commerce*, dengan tetap berfokus pada 10 *Top Merchant*.
2. Meningkatkan *debit card usage* nasabah bekerja sama dengan *merchant* dan *e-commerce* sesuai dengan perkembangan *market* dan *behavior* generasi *millennial*.
3. Meningkatkan jumlah Kartu Debit bertransaksi melalui program aktivasi maupun program *usage* yang atraktif, termasuk program promo bagi nasabah tertentu dengan cara mengoptimalkan media *online* maupun *offline*.

PENGEMBANGAN FITUR KARTU DEBIT ATAU CO BRAND

Beberapa rencana pengembangan fitur kartu debit pada tahun 2019, akan dilakukan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi, antara lain:

1. Kerja sama *Co brand* Kartu Debit BNI dengan institusi terpilih.
2. Pengembangan fitur 3D *secure* BNI Kartu Debit MasterCard
3. Pengembangan Fitur *B-secure* untuk transaksi *e-commerce* Kartu Debit *Private Label*, untuk mendukung program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)



PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT KONSUMER DAN RETAIL

Pendapatan dan profitabilitas segment Konsumer dan Retail disajikan sebagai berikut:

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segment Konsumer dan Retail

Uraian	2018	2017	Pertumbuhan	
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(%)
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah - neto *)	10.775.890	9.558.035	1.217.855	12,7%
Pendapatan premi - neto	-	-	-	-
Pendapatan operasional lainnya	6.580.492	5.875.743	704.749	12,0%
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(1.285.949)	(1.538.979)	253.030	(16,4%)
Beban operasional lainnya	(8.941.323)	(8.961.270)	19.947	(0,2%)
Laba operasional	7.129.110	4.933.529	2.195.581	44,5%
Pendapatan (beban) bukan operasional neto	14.074	16.352	(2.278)	(13,9%)
Laba sebelum beban pajak	7.143.184	4.949.881	2.193.303	44,3%
Total aset	78.206.547	69.216.585	8.989.962	13,0%
Total liabilitas	259.917.921	237.864.259	22.053.662	9,3%

*) termasuk komponen internal transfer pricing antar segment operasi

Pada tahun 2018 pendapatan bunga dan pendapatan syariah-neto segment Konsumer dan Retail mencapai Rp10,8 triliun, tumbuh sebesar 12,7% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp9,6 triliun. Sedangkan laba operasional segment Konsumer dan Retail pada tahun 2018 mencapai Rp7,1 triliun, tumbuh 44,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp5,0 triliun.

TRESURI DAN INTERNASIONAL

Segment Tresuri dan Internasional meliputi kegiatan tresuri Bank seperti transaksi valuta asing, *money market*, *capital market* dan *fixed income*, serta bisnis perbankan internasional dan supervisi cabang luar negeri.

TRESURI

Uraian penjelasan, strategi tahun 2018, produktivitas, prospek usaha dan strategi pencapaian Segment Tresuri BNI disajikan sebagai berikut:

PENJELASAN SEGMENT TRESURI

Produk Tresuri BNI diklasifikasikan ke dalam produk transaksional, produk investasi, dan produk lindung nilai (*hedging*).

TRANSAKSIONAL

Produk transaksional ini terdiri dari *Forex-TOD*, *Forex-TOM*, *Forex-SPOT*, dan *Forex- Bank Notes*. Rincian terkait produk-produk transaksional diuraikan sebagai berikut:

1. *Forex – TOD*
Jual beli valuta asing di mana kesepakatan transaksi dan penyelesaian transaksi dilakukan pada hari yang sama.
2. *Forex – TOM*
Jual beli valuta asing di mana penyelesaian transaksi dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal kesepakatan transaksi.

3. *Forex – SPOT*

Jual beli valuta asing di mana penyelesaian transaksi dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal kesepakatan transaksi.

4. *Forex – Bank Notes*

Transaksi yang melibatkan pertukaran kepemilikan fisik dari mata uang (*banknotes*) yang terlibat dalam transaksi. Dapat dibedakan atas;

- a. *Transaksi Banking*
Setoran atau penarikan *banknotes* dari rekening nasabah dengan mata uang yang sama yang menghasilkan pendapatan *fee in lieu of exchange*.
- b. *Transaksi Trading*
Jual atau beli *banknotes* yang menghasilkan pendapatan dari selisih kurs.

INVESTASI

Produk investasi tresuri terdiri dari *Deposit on Call (DOC)*, *Money Market Account (MMA)*, dan obligasi retail. Rincian Terkait produk-produk investasi diuraikan sebagai berikut:

1. *Deposit on Call (DOC)*
 - a. Penempatan dana jangka waktu minimal 3 (tiga) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
 - b. Tingkat suku bunga mengacu tingkat suku bunga *interbank*.

- c. Dapat dicairkan setiap saat.
- d. Minimal penempatan Rp100 juta atau USD75 ribu.
2. *Money Market Account (MMA)*
 - a. Penempatan dana jangka waktu minimal 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - b. Tingkat suku bunga mengacu tingkat suku bunga *interbank*.
 - c. Dapat dicairkan setiap saat.
 - d. Minimal penempatan IDR1 miliar atau USD100 ribu.
3. Obligasi Retail
Obligasi adalah bukti utang dari penerbit (*issuer*) yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai dengan kondisi dan syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Transaksi obligasi yang dapat dilakukan antara Divisi Tresuri dengan Nasabah Individu adalah transaksi berikut:
 - a. Pada pasar primer meliputi obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah non-ritel.
 - b. Pada pasar sekunder meliputi obligasi perusahaan, obligasi pemerintah ritel, obligasi.
 - c. Pemerintah non-ritel dan obligasi pemerintah Negara lain.
4. *Depo Swap*
Depo Swap merupakan produk investasi dalam mata uang valas dengan tingkat imbal hasil yang maksimal dan pokok penempatan investasi terjamin 100%. *Depo Swap* merupakan gabungan transaksi *forex* berupa *FX Swap* dan deposit. Dalam transaksi ini nasabah menukarkan mata uang valasnya menjadi mata uang valas lainnya sekaligus menukarkan kembali mata uang valas tersebut di masa yang akan datang pada tenor dan kurs yang telah ditetapkan pada awal kesepakatan transaksi. Keuntungan selisih kurs atas transaksi penukaran mata uang asing tersebut (*forex gain*) menjadi imbal hasil yang optimal atas investasi penempatan dana nasabah.
5. *Market Linked-Dual Currency Investment (ML-DCI)*
ML-DCI adalah *structured product* yang merupakan gabungan antara produk simpanan valuta asing dan *FX Option*. Produk ini memberikan imbal hasil yang tinggi jika dibandingkan dengan produk simpanan konvensional karena menggabungkan produk simpanan dengan *view* pergerakan nilai tukar. Produk ini memiliki karakteristik *non capital protected*/tidak menjamin pokok investasi.

LINDUNG NILAI (HEDGING)

1. *Currency Forward*
Jual beli valuta asing di mana penyelesaian transaksi dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Kurs yang digunakan pada transaksi *forward* ini memperhitungkan *forward points*.
2. *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)*
Transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) berupa transaksi *Forward* dengan

mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik. Mekanisme *fixing* adalah mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs transaksi *forward* dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*).

3. *Currency Swap*
Transaksi 'jual dan beli' atau 'beli dan jual' suatu mata uang terhadap mata uang yang lain yang dilaksanakan (secara simultan) dalam waktu bersamaan dengan *counterparty* (nasabah) yang sama.
4. *Currency Option*
Perjanjian untuk memberikan hak dan bukan kewajiban dari penjual (*option writer*) kepada pembeli (*option holder*) untuk membeli atau menjual sejumlah nominal mata uang tertentu untuk masa yang akan datang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya (*strike price*) pada atau sebelum waktu tertentu (*expiry date*).
5. *Interest Rate Swap (IRS)*
Kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan pertukaran rangkaian pembayaran bunga secara tetap (*fixed rate*) dalam satu mata uang dengan seri atau rangkaian pembayaran bunga secara fluktuatif (*variable rate*) dalam mata uang yang sama (atau sebaliknya), tanpa pertukaran pokok pinjaman.
6. *Cross Currency Swap (CCS)*
Kesepakatan antara dua pihak untuk menukarkan pokok pinjaman dan pembayaran bunga dalam mata uang yang berbeda. Pertukaran pokok pinjaman menggunakan nilai tukar pada saat dimulainya transaksi.
7. *Call Spread Option (CSO)*
Call Spread Option merupakan salah satu *Structured Product* dengan kombinasi 2 (dua) transaksi *Currency Option* yakni *Buy Call Option* (pembelian atas hak untuk membeli mata uang tertentu) dan *Sell Call Option* (penjualan atas hak untuk membeli mata uang tertentu), dengan nominal dan jangka waktu transaksi yang sama namun dengan *strike price* yang berbeda untuk masing-masing *Buy Call Option* dan *Sell Call Option* tersebut. Transaksi CSO wajib dilakukan secara *Dynamic Hedging* dengan tujuan agar pelaku *hedging* tidak terekspos risiko nilai tukar akibat kurs pasar melampaui *strike price Sell Call Option*. *Dynamic Hedging* dilakukan dengan cara melakukan transaksi CSO beberapa kali sesuai dengan jumlah frekuensi kurs pasar melampaui *strike price Sell Call Option* dan CSO dengan *dynamic hedging* ini merupakan bagian dari transaksi CSO awal dalam satu kesatuan.

STRATEGI SEGMENTRESURI DI TAHUN 2018

Pada tahun 2018, segmen tresuri menjalankan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas *staff outlet* sehingga sesuai dengan kebutuhan bisnis guna memenangkan persaingan.



- Pengelolaan *Portfolio* Surat Berharga secara aktif dengan risiko yang terjaga baik melalui pasar primer maupun sekunder.
- Pengelolaan posisi Devisa *Netto* Bank untuk memaksimalkan keuntungan *FX gain*
- Pengembangan *warehousing* untuk produk *FX* dan *Fixed Income Market* bagi memenuhi kebutuhan nasabah.
- Berperan aktif dalam program *close loop transaction* melalui bisnis unit dan anak perusahaan.
- Strategi *Marketing* baik *above/below the line* untuk meningkatkan *brand image* dan penetrasi pasar.
- Pengelolaan Likuiditas jangka pendek dengan memanfaatkan fasilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui *GMW Averaging* maupun instrumen lain.
- Pengembangan dan implementasi aplikasi digital *tresuri* sesuai kebutuhan nasabah.

PRODUKTIVITAS SEGMENT TRESURI

Berikut ini rincian terkait kinerja transaksi *forex* BNI terhadap *interbank* berdasarkan *volume* transaksi dan *profit* yang diuraikan dalam bentuk tabel.

Tabel Pertumbuhan *Forex Gain* berdasarkan *Volume* dan *Profit*

Produk	2018	2017	Pertumbuhan (%)
BERDASARKAN VOLUME (USD JUTA)			
<i>SPOT</i>	68.586	66.963	2,4
<i>FORWARD</i>	1.259	1.301	(3,2)
<i>SWAP</i>	52.547	77.720	(32,4)
<i>CCS, IRS</i>	839	311	169,8
Total	123.231	146.295	(15,8)
BERDASARKAN PROFIT (RP JUTA)			
<i>FOREX GAIN</i>	433.036	813.901	(46,8)

Forex Gain

Volume transaksi *spot* meningkat sebesar 2,4% seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis bank. Sementara secara *volume*, transaksi *forward* mengalami sedikit penurunan, yang diakibatkan oleh adanya perubahan pola *hedging* nasabah yang lebih memilih instrumen *hedging* melalui *Cross Currency Swap* dan *Interest Rate Swap*. *Volume* transaksi *CCS* dan *IRS* pada tahun 2018 mencapai USD 839 juta, meningkat sebesar 169,8% dibandingkan tahun 2017 sebesar USD 311 juta. Sedangkan untuk transaksi *swap* secara *volume* mengalami penurunan. Hal ini searah dengan kondisi likuiditas di pasar yang menurun di tahun 2018.

Pada tahun 2018 *forex gain* BNI mengalami penurunan di tengah kondisi pasar yang sedang *volatile* dan kurs rupiah yang sempat melemah terhadap dolar dan sempat menyentuh level Rp15.238 per dolar AS. Meskipun demikian BNI masih dapat membukukan laba *forex gain* sebesar Rp433,04 miliar pada tahun 2018, yang ditopang dari peningkatan nasabah, kemudahan akses pasar domestik dan internasional, serta harga yang kompetitif dan SDM yang andal.

Capital Gain - Trading Interbank

Pada tahun 2018, *volume* transaksi obligasi *trading* naik 27,22% dari tahun 2017 sebesar Rp82,49 triliun menjadi Rp104,94 triliun. Namun, profit transaksi mengalami penurunan dari Rp81,47 miliar menjadi Rp56,89 miliar atau terkoreksi sebesar 30,17%. Penurunan profit transaksi obligasi antara lain dipengaruhi kenaikan suku bunga acuan *Fed Fund (Fed Fund Rate)* 2018 yang memberikan tekanan pada pasar. Kenaikan yang terjadi sebesar 1,00% selama tahun 2018, yaitu pada awal Januari 2018 sebesar 1,50% dan meningkat menjadi 2,50% di Desember 2018.

Seiring dengan pergerakan *Fed Fund Rate* tersebut, BI juga meningkatkan BI 7 Days Reverse Repo sebesar 1,75 bps selama tahun 2018, yaitu pada awal Januari 2018 sebesar 4,25% dan terus mengalami peningkatan menjadi 6,00% di Desember 2018. Selain itu, ketidakpastian global yang meningkat karena adanya perang dagang antara AS dan China serta krisis yang terjadi di Argentina dan Turki juga turut memunculkan sentimen negatif di pasar.

Tabel Pertumbuhan *Capital Gain - Trading Interbank* Berdasarkan Volume dan Profit

Produk	2018		2017		Pertumbuhan	
	Volume	Profit	Volume	Profit	Volume	Profit
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(%)	(%)
Obligasi Trading	104.935	57	82.485	82	27	(30)

Capital Gain - Bonds and Securities

Pada posisi kuartal IV tahun 2018, *outstanding* surat berharga sebesar Rp88,8 triliun mayoritas ditempatkan pada obligasi pemerintah, tumbuh 14,9% dari posisi tahun lalu. Walaupun didominasi oleh obligasi pemerintah dan instrumen BI, namun BNI tetap melakukan diversifikasi pada beberapa obligasi korporat sebagai bentuk *yield enhancement* dalam batasan dan koridor risiko yang terukur.

Di tengah kondisi pasar obligasi yang berfluktuasi di tahun 2018, BNI masih dapat membukukan keuntungan *fee based* dari penjualan surat berharga sebesar Rp539 miliar, di mana juga telah dilakukan proses-proses mitigasi terutama terkait risiko pasar dengan melakukan transaksi *hedging*.

Tabel Pertumbuhan *Capital Gain - Bonds and Securities* Berdasarkan Volume dan Profit

Produk	2018		2017		Pertumbuhan	
	Volume	Profit	Volume	Profit	Volume	Profit
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(%)	(%)
Bonds and Securities	63.946	539	110.088	718	(42)	(25)

PROSPEK SEGMENT TRESURI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Untuk meraih target tahun 2019, berikut strategi yang akan dilaksanakan:

1. Pengelolaan likuiditas melalui instrumen DPK dan FNK secara optimal untuk mendorong pertumbuhan bisnis bank.
2. Pengembangan nasabah untuk semua produk tresuri.
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas *staff outlet* sejalan dengan kebutuhan bisnis yang berkembang.
4. Pengelolaan *Portfolio* Surat Berharga secara aktif dengan risiko yang terukur baik melalui pasar primer maupun sekunder.
5. Pengelolaan posisi Devisa *Netto* Bank untuk memaksimalkan keuntungan *FX gain*.
6. Optimalisasi pengelolaan *excess liquidity* pada instrumen yang memberikan imbal hasil (*yield*) terbaik dengan tetap memperhatikan kondisi likuiditas harian.
7. Menjadikan BNI sebagai *one stop financial solution*.
8. Perluasan segmen *market* institusi dan segmen produk.
9. Menggiatkan promosi produk dan aktivitas Tresuri.
10. Pengembangan dan implementasi aplikasi digital tresuri sesuai kebutuhan nasabah.
11. Pengembangan struktur organisasi TRS yang *agile* sesuai dengan kebutuhan bisnis.

INTERNASIONAL

Uraian penjelasan, strategi tahun 2018, produktivitas, prospek usaha dan strategi pencapaiannya untuk Segmen Internasional pada BNI disajikan sebagai berikut:

PENJELASAN SEGMENT INTERNASIONAL

Segmen Perbankan Institusi Keuangan menawarkan Jasa dan Layanan dari bisnis Institusi Keuangan baik dari Kantor Cabang Luar Negeri maupun di Indonesia (dalam negeri), termasuk produk-produk perbankan berupa BNI *Smart Trade*, *Remittance*, *International Desk*, *Custody*, dan *Trustee*.

KANTOR CABANG LUAR NEGERI (KCLN)

Produk dan Jasa/Layanan pada Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN), di antaranya:

Produk Pinjaman

Sesuai dengan *Road Map* BNI sebagai jembatan bisnis antara Indonesia dan dunia, maka produk pinjaman yang ditawarkan oleh Kantor Cabang Luar Negeri fokus untuk memfasilitasi perusahaan Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya di luar negeri, antara lain melalui:

1. Local Loan

Local loan adalah fasilitas kredit yang ditawarkan oleh Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) kepada group usaha perusahaan Indonesia maupun *counterparty* dari



perusahaan Indonesia di luar negeri baik secara bilateral maupun sindikasi. Jenis pinjaman yang ditawarkan dapat berupa Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan *term loan*.

2. *Offshore Loan*

Offshore loan adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) kepada nasabah debitur di dalam negeri untuk membiayai kebutuhan modal kerja (jangka pendek) maupun untuk membiayai pengadaan barang-barang modal untuk tujuan rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi yang akan diselesaikan pembayarannya dalam jangka menengah atau panjang.

3. *Trade Loan*

Trade Loan Adalah fasilitas pembiayaan Kantor Cabang Luar Negeri atas dasar transaksi *Trade Finance* yang dilakukan oleh grup usaha perusahaan Indonesia maupun *counterparty* dari perusahaan Indonesia di luar negeri.

Produk Dana Pihak Ketiga

Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) dengan lisensi *Full Bank* yaitu KCLN Singapore, KCLN Hong Kong, KCLN Tokyo dan KCLN Seoul, dapat menghimpun Dana Pihak Ketiga dari nasabah lokal di mana KCLN berada yang terdiri dari produk Tabungan, Deposito, dan Giro. Rincian terkait produk dana pihak ketiga *overseas* diuraikan sebagai berikut:

1. Tabungan

Layanan simpanan yang dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah individual.

2. Giro

Layanan deposit untuk nasabah individual dan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran aktivitas operasional dengan fasilitas cek sebagai alat tarik.

3. Deposito

Layanan *funding* dengan jangka waktu mulai dari 1 (satu) sampai 12 (dua belas) bulan yang dimiliki KCLN dengan memberikan *special rate* di masing-masing KCLN sesuai *license* yang dimiliki kepada selektif *customer*.

Jasa dan Layanan

Adapun jasa dan layanan yang ditawarkan oleh seluruh Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) adalah sebagai berikut.

1. *Export Letter of Credit*

Merupakan kegiatan bank dalam rangka menerima asli LC termasuk *pre-advice* dan perubahannya dari:

- Issuing Bank* untuk diteruskan kepada *Beneficiary Second Advising Bank*.
- First Advising Bank* untuk diteruskan kepada *Beneficiary*.

2. Penerbitan *Import Letter of Credit*

Merupakan kegiatan bank dalam rangka menerbitkan LC (*master LC*) termasuk *Preadvice* dan perubahannya (*amendment LC*) sebagai jaminan pembayaran bersyarat atas dasar instruksi atau permintaan dari *Applicant* atau atas namanya sendiri.

3. Konfirmasi *Letter of Credit*

Merupakan kegiatan bank dalam rangka ikut menjamin pembayaran suatu LC dan perubahannya yang diadvikan atas dasar permintaan atau penunjukkan dari Bank Pembuka yang disyaratkan dalam LC.

4. *Standby Letter of Credit* (SBLC)

Merupakan kegiatan bank dalam rangka melaksanakan transaksi *Standby Letter of Credit* (SBLC) yang tunduk pada UCPDC atau ISP yang berlaku, meliputi:

- Penerbitan SBLC
- Penerusan SBLC
- Konfirmasi SBLC
- Transfer SBLC*
- Cancellation SBLC*
- Realisasi SBLC
- Un-used SBLC*

5. *Inward Bill Collection*

Merupakan kegiatan bank sebagai:

- Collecting Bank* dalam rangka meneruskan instruksi *collection* dari *Remitting Bank* kepada *Presenting Bank*; atau
- Presenting Bank* dalam rangka melaksanakan instruksi *collection* dari *Remitting Bank*.

6. *Outward Bill Collection*

Merupakan kegiatan bank sebagai *Remitting Bank* dalam rangka mengirimkan dokumen komersial atau dengan disertai dokumen finansial (*wesel/promissory note*) dan instruksi *collection* kepada *Presenting Bank* atau melalui *Collecting Bank* di luar negeri untuk diserahkan kepada Tertarik (*Drawee*) atas dasar pembayaran atau akseptasi.

7. Bank Garansi

Bank Garansi yang diterbitkan untuk kepentingan nasabah misalnya pendirian perusahaan, kontrak kerja, dan lain-lain yang bersifat *full cover* atau dengan menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.

8. *Remittance*

Merupakan perintah tertulis atas permintaan individu atau badan hukum (*ordering customer atau institution*) kepada lembaga pengirim uang (*remitting bank/ institution*), untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pihak lain yang ditunjuk (*beneficiary customer atau institution*).

9. Layanan dari bisnis *Financial Institution*

Produk dan layanan dari bisnis *Financial Institution* adalah layanan *Business to Business* (B2B) sebagai berikut:

- Bank Guarantee Under Counter* (BGUC)
Merupakan penerbitan Bank Garansi (penjaminan perbankan) atas dasar permintaan dan dengan penjaminan pasti dari bank koresponden (*The Instructing Party*).
- Bank to Bank Financing – Refinancing*
Merupakan produk turunan dari transaksi *trade finance* di mana BNI memberikan pembiayaan atas tagihan yang dimiliki oleh bank koresponden terhadap transaksi *trade finance*.



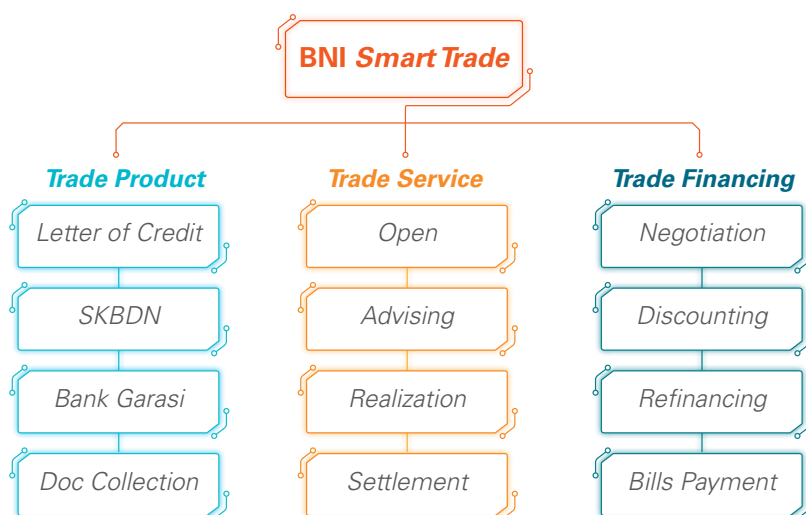
- c. *Bank to Bank Financing-Trade Advance Financing*
Merupakan pembiayaan (*refinancing*) yang dilakukan oleh BNI kepada *Issuing Bank*, berupa pembayaran atas realisasi LC/SKBDN maupun non-LC/SKBDN, kepada *Nominated Bank*.
- d. *Bank to Bank Financing-Forfaiting*
Merupakan pembelian hak tagih atas *Banker's Acceptance (B/A)* yang dimiliki Bank Koresponden selaku *Nominated Bank (forfaitee)* sehubungan transaksi L/C atau SKBDN dengan *discount* tanpa hak *regres*.
- e. *Risk Partication*
Merupakan pengalihan sebagian risiko yang dimiliki oleh suatu bank pemohon kepada BNI dalam bentuk *funded* atau *unfunded* terkait transaksi *trade* yang telah disepakati antara bank pemohon tersebut dengan bank lainnya.

JASA DAN LAYANAN PERBANKAN INTERNASIONAL DALAM NEGERI

Segmen Perbankan Internasional menawarkan Jasa dan Layanan dari bisnis Institusi Keuangan dari Kantor Cabang di Indonesia (dalam negeri), termasuk produk-produk perbankan berupa BNI *Smart Trade*, *Financial Institution*, *Remittance*, *International Desk*, *Custody*, dan *Trustee*.

BNI Smart Trade

BNI *Smart Trade* diklasifikasikan menjadi *trade product*, *trade service*, dan *trade finance*. Adapun rincian terkait produk *smart trade* diuraikan sebagai berikut:



Trade Product

1. *Letter of Credit*
L/C adalah instrumen jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank (*Issuing Bank* kepada penerima (*Beneficiary*) yang tunduk pada *Uniform Customs and Practice of Documentary Credits (UCP)*.
2. Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah instrumen jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank (*Issuing Bank*) kepada penerima (*Beneficiary*) yang tunduk pada Peraturan Bank Indonesia dan digunakan untuk transaksi perdagangan dalam negeri.
3. Bank Garansi
Bank Garansi adalah instrumen jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank kepada penerima garansi (*Beneficiary*) apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*). Bank Garansi tunduk kepada PBI atau *Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG)* atau *International Standby Practices (ISP)*.

4. *Documentary Collection*
Documentary Collection adalah salah satu sistem pembayaran dalam dunia perdagangan yang dilakukan melalui jasa perbankan dalam bentuk tagihan berdokumen yang tunduk pada *Uniform Rules for Collections (URC)*.

Trade Services

Trade Services merupakan bisnis *trade* yang memberikan pelayanan kepada nasabah untuk mendapatkan jasa atau *services* dalam rangka transaksi *trade* atau perdagangan dengan ruang lingkup ekspor/impor dan dalam negeri. Berikut adalah layanan *trade services*:

1. *Open*
Open (Penerbitan) merupakan jasa untuk melakukan penerbitan dari suatu *instrument* (L/C, SKBDN, Bank Garansi) yang menjamin kepastian pembayaran atau penjaminan pelaksanaan kontrak tertentu kepada pihak penerima dengan kondisi yang telah disepakati oleh pihak yang bersepakat.



2. *Advising*

Advising (Penerusan) merupakan jasa untuk menyampaikan berupa verifikasi keabsahan/kebenaran dari L/C, SKBDN, Bank Garansi yang dikirimkan oleh Bank Koresponden dari luar negeri dan dalam negeri untuk disampaikan kepada penerima/*beneficiary*.

3. *Realization*

Realization (Realisasi) merupakan jasa untuk melakukan penyampaian/penyerahan dokumen dalam rangka perdagangan kepada penerima dokumen sebagai importir/pembeli dengan kondisi yang telah disepakati.

4. *Settlement*

Settlement (Pembayaran) merupakan jasa untuk melakukan penyelesaian transaksi perdagangan berupa pembayaran terhadap transaksi yang telah dilaksanakan atau disepakati. Jasa ini merupakan satu siklus transaksi perdagangan dengan melakukan pembayaran kepada eksportir/penjual melalui *transfer bank*.

Trade Financing

Trade Financing merupakan bisnis yang dikelola oleh Divisi Internasional untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka transaksi *trade*/perdagangan dengan instrumennya berupa L/C, SKBDN, *Documentary Collection*, *Bills Payment*, dan *Invoice* atau berbasis tagihan. Berikut adalah layanan *trade financing*:

1. *Negotiation*

Negotiation adalah pengambilalihan pembayaran nilai wesel yang ditarik oleh *beneficiary* kepada suatu bank atas dasar dokumen yang dipresentasikan dan telah dinyatakan sesuai dengan syarat dan kondisi LC/SKBDN/SBLC dengan tenor *sight*.

2. *Discounting*

Discounting adalah pengambilalihan pembayaran nilai wesel yang ditarik oleh *beneficiary* kepada suatu bank atas dasar dokumen yang dipresentasikan dan telah dinyatakan sesuai dengan syarat dan kondisi LC/SKBDN/SBLC dengan tenor *usage*.

3. *Refinancing*

Refinancing merupakan pembiayaan dalam bentuk pengambilalihan pembayaran dengan latar belakang transaksi penerbitan L/C atau SKBDN. Pembiayaan dalam bentuk *refinancing* dapat dilaksanakan pada saat awal penerbitan atau pada saat mendekati jatuh tempo pembayaran.

4. *Bills Payment*

Bills Payment adalah pembiayaan kepada eksportir/penjual dan importir/pembeli atas dasar transaksi *documentary collection*/*open account*.

Produk dan Layanan Institusi Keuangan

Produk dan layanan dari bisnis *Financial Institution* adalah layanan *Business to Business* (B2B) sebagai berikut:

1. *Bank Guarantee Under Counter* (BGUC)

Merupakan penerbitan Bank Garansi (penjaminan perbankan) atas dasar permintaan dan dengan penjaminan pasti dari bank koresponden (*The Instructing Party*).

2. *Bank to Bank Financing – Refinancing*

Merupakan produk turunan dari transaksi *trade finance* di mana BNI memberikan pembiayaan atas tagihan yang dimiliki oleh bank koresponden terhadap transaksi *trade finance*.

3. *Bank to Bank Financing-Trade Advance Financing*

Merupakan pembiayaan (*refinancing*) yang dilakukan oleh BNI kepada *Issuing Bank*, berupa pembayaran atas realisasi LC/SKBDN maupun non-LC/SKBDN, kepada *Nominated Bank*.

4. *Bank to Bank Financing-Forfaiting*

Merupakan pembelian hak tagih atas *Banker's Acceptance* (B/A) yang dimiliki Bank Koresponden selaku *Nominated Bank* (*forfaitee*) sehubungan transaksi L/C atau SKBDN dengan *discount* tanpa hak *regres*.

5. *Bank to Bank Financing-Term Loan Facility Bank*

Merupakan pemberian fasilitas kredit kepada bank lain baik yang berstatus BUMN, BUSN, BUMD, atau Kantor Cabang Bank Asing yang berdomisili di Indonesia.

6. *Risk Partication*

Merupakan pengalihan sebagian risiko yang dimiliki oleh suatu bank pemohon kepada BNI dalam bentuk *funded* atau *unfunded* terkait transaksi *trade* yang telah disepakati antara bank pemohon tersebut dengan bank lainnya.

Remittance

Remittance merupakan perintah tertulis atas permintaan individu atau badan hukum (*ordering customer* atau *institution*) kepada lembaga pengirim uang (*remitting bank/ institution*), untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pihak lain yang ditunjuk (*beneficiary customer* atau *institution*). Adapun jenis – jenis *Remittance* diuraikan sebagai berikut:

1. *Incoming Fund Transfer* atau *Incoming Transfer* (ITR) atau Kiriman Uang Masuk

Adalah kiriman uang dari seseorang atau badan hukum melalui bank pengirim di luar negeri dalam valas/rupee atau melalui bank di dalam negeri khusus dalam valas yang ditujukan kepada BNI sebagai bank penerima, untuk keuntungan penerima yang namanya ditunjuk dalam kiriman uang, baik sebagai nasabah atau bukan nasabah BNI di dalam negeri. Kode transaksi ITR di BNI adalah S06. BNI Wesel PIN adalah layanan kiriman uang/*Incoming Transfer* (ITR) dari luar negeri yang dapat diambil tunai (tanpa rekening) di *outlet* BNI dan *paying agent* BNI seperti Pos Indonesia, Alfamart, dan Pegadaian. Syarat pencairan adalah dengan menunjukkan nomor PIN (*Personal Identification Number*) yang benar dan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.

2. *Outgoing Fund Transfer* (OTR) atau Kiriman Uang Keluar

Perintah tertulis tidak bersyarat dari BNI atas permintaan nasabah dan/atau untuk kepentingan BNI sendiri yang ditujukan kepada bank koresponden untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang/badan (*beneficiary*) yang ditentukan. Meliputi kiriman uang valas

keluar ke bank koresponden di dalam dan luar negeri. Kode transaksi OTR di BNI adalah S10. Layanan kiriman uang BNI dapat diterima pada hari yang sama (*same day service*) sesuai batas waktu (*cut off time*) yang telah ditentukan per masing-masing valuta. Selain itu BNI juga memiliki layanan *multi currencies* yaitu layanan kiriman uang yang dapat diterima dalam 125 (seratus dua puluh lima) jenis mata uang lokal di 160 (seratus enam puluh) negara.

International Desk

1. Pinjaman/*Loan*
Unit International Desk memberikan layanan pemberian Pinjaman dalam bentuk IDR maupun *offshore loan* dalam mata uang USD dan JPY maupun *Open Account Financing* (OAF) kepada Nasabah Korporasi Internasional yang ada di Indonesia dengan suku bunga yang kompetitif dengan berbasis *Stand by LC (SBLC)* yang dijamin oleh perbankan/ lembaga keuangan internasional. Dalam hal pemberian pinjaman ini maupun skema *Open Account Financing (OAF)*, *International Desk* berkoordinasi dengan unit Kredit (LMC, SKM, SKC).
2. Dana Pihak Ketiga
Bekerja sama dengan cabang dalam memberikan layanan pembukaan Tabungan, Giro dan Deposito kepada Nasabah, baik perorangan asing maupun korporasi Internasional yang ada di Indonesia.
3. *Cash Management*
Bekerja sama dengan Divisi *Transaction Banking Services* (TBS), memasarkan produk BNI *Cash Management* kepada nasabah korporasi Internasional di Indonesia.
4. Kartu Kredit
Bekerja sama dengan Divisi Bisnis Kartu (BSK) menawarkan kartu kredit personal untuk individu asing maupun korporasi Internasional.

Custody

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8/1995, Kustodian merupakan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Adapun jasa yang ditawarkan BNI *Custodial Services* ialah sebagai berikut:

1. *Custody Services*
 - a. Penyimpanan, pengelolaan dan pengadministrasian surat berharga baik *script* maupun *scriptless* pada Bursa Efek Indonesia.
 - b. Penyimpanan, pengelolaan dan pengadministrasian surat berharga yang diterbitkan pemerintah seperti Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
 - c. Penyimpanan, pengelolaan dan pengadministrasian surat berharga di pasar internasional yang terdaftar pada *Euroclear* sebagai salah satu lembaga depository internasional.

2. Fund Services

Jasa layanan terhadap proses transaksi sampai dengan penghitungan nilai aktiva bersih (neraca, laba/ rugi, laporan *portfolio*) untuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan *Unit Link*. Layanan yang diberikan meliputi *fund accounting/fund administration*, pengawasan, pelaporan dan publikasi.

3. Wali Amanat dan Agency

- a. Wali Amanat
Bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan efek bersifat utang, meliputi:
 - i. Penyusunan kontrak perwaliamanatan dengan emiten.
 - ii. *Monitoring* emiten atas pemenuhan kewajibannya.
 - iii. Menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi.
 - iv. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).
- b. Agen Jaminan (*Security Agent*)
Pengadministrasian aset yang dijamin oleh suatu pihak berdasarkan perjanjian yang disepakati.
- c. Agen Pembayaran (*Paying Agent*)
Memproses pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati untuk aktivitas terkait transaksi pasar modal seperti pembayaran kupon/bunga, dividen, pokok obligasi atau surat utang lainnya serta jasa pembayaran pembagian hasil jual/beli dan lain-lain.
- d. Agen Penampungan (*Escrow Agent*)
Pengelolaan, pemantauan dan pengendalian *escrow account* (rekening khusus) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (*customized*).

Trustee

Trust merupakan kegiatan usaha Bank berupa penitipan dengan pengelolaan atas harta milik *Settlor* (pihak yang memiliki dan menitipkan hartanya untuk dikelola *Trustee/ Bank*) berdasarkan perjanjian tertulis antara Bank sebagai *Trustee* dengan *Settlor* untuk kepentingan *Beneficiary* (penerima manfaat). Berdasarkan POJK No. 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*) sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 25/POJK.03/2016, *Trustee* dapat berperan sebagai:

1. Agen Pembayar (*Paying Agent*)
2. Agen Investasi Dana (*Investment Agent*)
3. Agen Peminjam (*Borrowing Agent*)

Trustee tidak hanya melayani nasabah korporasi, saat ini nasabah perorangan dapat menjadi nasabah *Trustee*. Hal ini berdasarkan POJK No. 25/POJK.03/2016. Hal ini merupakan relaksasi aturan untuk mendukung program *Tax Amnesty*.



STRATEGI SEGMENT INTERNASIONAL TAHUN 2018

Untuk mewujudkan BNI sebagai pemain utama bisnis perdagangan internasional dan *international payment* untuk industri perbankan di Indonesia, berbagai strategi telah diterapkan selama tahun 2018. Strategi-strategi tersebut terbukti efektif mendorong pertumbuhan bisnis internasional terutama pendapatan *trade finance* yang mampu tumbuh sebesar 25,9% (YoY). Selain itu pertumbuhan aset Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) juga tidak kalah menggembirakan. Dengan dukungan 6 (enam) Kantor Cabang BNI di Luar Negeri yaitu di Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London dan New York serta 1 (satu) *Representative Office* di Yangoon mampu meningkatkan aset KCLN sehingga tumbuh sebesar 28,8% (YoY) sedangkan DPK KCLN tumbuh 45,9% (YoY).

PRODUKTIVITAS, PROSPEK SEGMENT INTERNASIONAL DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Berikut ini rincian terkait produktivitas, prospek dan strategi pencapaiannya untuk Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) serta Jasa dan Layanan Perbankan Internasional Dalam Negeri.

KANTOR CABANG LUAR NEGERI (KCLN)

Total aset Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) selama tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Kinerja Aset KCLN

Keterangan	2018 (Rp juta)	Komposisi (%)	2017 (Rp juta)	Komposisi (%)	Pertumbuhan (%)
Total Loan	39.918.309	53,1%	30.734.174	52,6%	29,9%
Asset lainnya	35.317.273	46,9%	27.682.505	47,4%	27,6%
Total Asset	75.235.582	100%	58.416.679	100%	28,8%

Total aset KCLN mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana total aset seluruh KCLN mencapai Rp 75,2 triliun yang berarti tumbuh sebesar 28,8% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 58,4 triliun. Peningkatan aset ditunjang oleh peningkatan transaksi *loan*, *trade finance* dan surat berharga. Volume pinjaman seluruh KCLN pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana total seluruh KCLN telah berhasil membukukan pinjaman sebesar Rp39,9 triliun yang berarti tumbuh sebesar 29,9% dibandingkan tahun sebelumnya dengan pencapaian sebesar Rp30,7 triliun. Pinjaman yang diberikan oleh KCLN fokus kepada Indonesia *related business* terutama kepada perusahaan yang melakukan aktivitas ekspor atau impor dengan Indonesia.

PRODUK DANA PIHAK KETIGA KCLN

Pengendapan dana KCLN di tahun 2018 ditopang dari nasabah *local loan* dan *local trade* KCLN. Selain itu dilakukan juga optimalisasi rekening KBRI/KJRI yang ada di masing-masing KCLN.

Tabel Jumlah Dana Pihak Ketiga KCLN

Keterangan	2018 (Rp juta)	Komposisi (%)	2017 (Rp juta)	Komposisi (%)	Pertumbuhan (%)
Tabungan	629.243	12,1%	94.409	2,7%	566,5%
Giro	3.049.350	58,7%	2.630.979	73,9%	15,9%
Deposito	1.513.345	29,1%	833.078	23,4%	81,7%
Total	5.191.938	100%	3.558.461	100%	45,9%

Selama tahun 2018, nilai DPK KCLN tercatat sebesar Rp5,2 triliun. Nilai tersebut disumbang oleh 4 (empat) KCLN yang menyandang status sebagai *full branch* dan dapat melakukan transaksi *retail* yaitu: KCLN Singapore, KCLN Tokyo, KCLN Hong Kong dan KCLN Seoul. Untuk terus meningkatkan DPK KCLN di tahun 2019 maka peningkatan jumlah nasabah *local loan* dan *local trade* KCLN akan menjadi strategi utama di samping peningkatan DPK *retail*.



PENDAPATAN KANTOR CABANG LUAR NEGERI (KCLN)

Dengan strategi menitikberatkan ekspansi loan terutama *local loan* dengan menggali potensi bisnis dari nasabah-nasabah atau perusahaan Indonesia yang akan dan telah ekspansi di luar negeri serta melakukan optimalisasi potensi bisnis/transaksi yang menghasilkan *fee based income* KCLN, maka potret pendapatan selama tahun 2018 di KCLN adalah sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Kantor Cabang Luar Negeri

Keterangan	2018	Komposisi	2017	Komposisi	Pertumbuhan
	(Rp juta)	(%)	(Rp juta)	(%)	(%)
Net Interest Income	895.117	76,9%	879.585	77,9%	1,8%
Recurring FBI	269.636	23,1%	249.641	22,1%	8,0%
Total	1.164.753	100%	1.129.226	100%	3.1%

Kinerja *net interest income* di 2018 sebesar Rp895,1 miliar yang berarti tumbuh sebesar 1,8% dibandingkan tahun sebelumnya dengan pencapaian sebesar Rp879,6 miliar. Pertumbuhan tersebut terutama berasal dari *Interest Income Loan* dan *Trade Finance*. *Recurring fee* yang dihasilkan oleh KCLN mengalami peningkatan 8,0% dengan pencapaian sebesar Rp 269,6 miliar triliun dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 dengan nilai sebesar Rp249,6 miliar. Pertumbuhan terbesar dari *recurring fee* KCLN adalah pada layanan *remittance* dan *trade*. Hal ini didukung oleh peningkatan aktivitas nasabah *remittance* TKI maupun *corporate* di KCLN dan aktivitas ekspansi KCLN baik layanan pada pelaku bisnis di masing-masing negara maupun transaksi *trade refinancing*.

JASA DAN LAYANAN PERBANKAN INTERNASIONAL DALAM NEGERI

Pendapatan perbankan internasional dalam negeri yang berasal dari bisnis *trade finance*, *remittance*, *financial institution*, *custody*, *trustee* dan *international desk* selama tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 25,7% (YoY).

Tabel Pendapatan Perbankan Internasional Dalam Negeri

Jenis Pendapatan	2018		2017		Pertumbuhan (%)
	(Rp miliar)	Komposisi (%)	(Rp miliar)	Komposisi (%)	
Fee Based Income	1.594	62,8%	1.303	64,5%	22,4%
Interest Income	943	37,2%	716	35,5%	31,8%
Total	2.538	100%	2.018	100%	25,7%

Layanan dan produk-produk *trade finance* BNI mampu mendominasi pendapatan bisnis perbankan internasional dalam negeri. Strategi-strategi yang diterapkan sehingga pendapatan *trade finance* selama tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 22% di antaranya sebagai berikut:

1. Menggali potensi transaksi penerbitan SBLC/*Demand Guarantee* khususnya dari debitur yang bergerak di bidang infrastruktur.
2. Kerja sama dengan Perusahaan Penjaminan untuk menggarap nasabah yang belum memiliki *plafond non cash loan* khususnya pada transaksi impor.
3. Meningkatkan strategi "*close loop transaction*" melalui pemberian *pricing* yang kompetitif dalam rangka meningkatkan jumlah nasabah baru.
4. Menggali potensi kebutuhan transaksi *trade* atas *supplier* BUMN Karya dan nasabah potensial lainnya.
5. Sinergi dengan unit bisnis dalam menggali potensi utilisasi *Non Cash Loan* yang belum optimal.



Selain itu pada tahun 2018 bisnis *financial institution* juga mencatat pertumbuhan yang menggembirakan. Bank-bank koresponden baik di Indonesia maupun di luar negeri semakin memberikan kepercayaan kepada BNI untuk menyalurkan potensi bisnisnya. Hal ini terlihat dari peningkatan *volume* transaksi antar bank sebesar 26% dan peningkatan jumlah transaksi (slip) sebesar 26% (YoY). Dengan peningkatan *volume* dan jumlah transaksi tersebut mendorong kenaikan pendapatan transaksi *financial institution* hingga mencapai 64% (YoY).

Bisnis *remittance* juga cukup besar memberikan kontribusi terhadap pendapatan bisnis perbankan internasional dalam negeri. Selama tahun 2018 pendapatan *remittance* mampu tumbuh sebesar 16%. Peningkatan kinerja *remittance* BNI tersebut di topang dari 2 produk utamanya yaitu *incoming* dan *outgoing transfer*. Transaksi *incoming transfer* mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di mana dominasi transaksi berasal dari negara Malaysia serta negara lain seperti Taiwan dan Qatar. Selain itu pada tahun 2018 telah diluncurkan produk BNI *Mobile Remittance* (BNI More) di Singapura sebagai salah satu sarana pengiriman uang ke Indonesia berbasis digital yang dapat digunakan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura.

Untuk meningkatkan bisnis perbankan internasional kepercayaan koresponden merupakan aset penting bagi BNI. Untuk memelihara hubungan dengan koresponden, BNI secara aktif melakukan komunikasi kepada bank-bank koresponden sekaligus untuk memperluas lingkup transaksi baik melalui intensifikasi yaitu dengan mengeksplorasi potensi kerja sama baru dengan bank koresponden yang telah dimiliki BNI saat ini, sekaligus melalui ekstensifikasi dengan memperluas hubungan dengan bank yang belum menjadi bank koresponden BNI.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT TRESURI DAN INTERNASIONAL

Pendapatan dan profitabilitas segmen Tresuri dan Internasional disajikan sebagai berikut:

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Tresuri dan Internasional

Uraian	2018	2017	Pertumbuhan	
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(%)
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah - neto *)	2.086.897	1.860.111	226.786	12,2%
Pendapatan premi - neto	-	-	-	-
Pendapatan operasional Lainnya	2.950.936	3.213.069	(262.133)	(8,2%)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(145.055)	(73.992)	(71.063)	96,0%
Beban operasional lainnya	(1.947.361)	(2.035.563)	88.202	(4,3%)
Laba operasional	2.945.417	2.963.625	(18.208)	(0,6%)
Pendapatan (beban) bukan operasional neto	2.697	(1.356)	4.053	(298,9%)
Laba sebelum beban pajak	2.948.114	2.962.269	(14.155)	(0,5%)
Total aset	275.552.690	246.499.835	29.052.855	11,8%
Total liabilitas	103.149.183	74.321.428	28.827.755	38,8%

*) termasuk komponen internal transfer pricing antar segmen operasi

Pada tahun 2018 pendapatan bunga dan pendapatan syariah-neto segmen Tresuri dan Institusi Keuangan mencapai Rp2,1 triliun, tumbuh sebesar 12,2% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1,9 triliun. Sedangkan laba operasional segmen Tresuri dan Institusi Keuangan pada tahun 2018 mencapai Rp3,0 triliun, turun sebesar 0,6% atau Rp18,2 miliar dari tahun sebelumnya.

ENTITAS **ANAK**



Pada Tahun 2018 Entitas Anak BNI membukukan kinerja yang positif dengan total laba sebesar **Rp648** miliar dengan kontribusi laba sebesar **4,29%** terhadap **laba BNI**.



Perkembangan kebutuhan masyarakat dan korporasi akan jasa keuangan yang semakin beragam mengharuskan perbankan untuk menyediakan layanan jasa keuangan yang terintegrasi. Dengan adanya batasan-batasan dari otoritas, membuat perbankan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan *stakeholder* akan jasa keuangan sehingga perlu melibatkan Entitas Anak. Sebagai salah satu bank utama di Indonesia, peran BNI dan Entitas Anak BNI di industri keuangan telah menempati posisi yang sangat strategis. Untuk itu, BNI terus meningkatkan sinergi antara BNI dengan Entitas Anak, sehingga dapat memberikan layanan jasa keuangan secara menyeluruh dalam satu payung kepada nasabah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di industri perbankan, BNI mengelola Entitas Anak dengan melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Hingga akhir tahun 2018, BNI memiliki penyertaan saham di 10 (sepuluh) Entitas Anak. Kepemilikan mayoritas di beberapa Entitas Anak ditujukan agar dapat membangun aliansi strategis dan sinergi untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah BNI. Sedangkan kepemilikan minoritas dilaksanakan dengan tujuan mematuhi kebijakan/peraturan yang berlaku seperti ketentuan dari OJK dan BI, serta dalam rangka membangun kerja sama bisnis dengan mitra BNI. Entitas Anak di mana BNI berperan sebagai pemegang saham mayoritas adalah: PT Bank BNI Syariah (99,94%), PT BNI Life Insurance (60,0%), PT BNI Sekuritas (75,0%), PT BNI Multifinance (99,9%) dan BNI Remittance Ltd (100,0%). Sedangkan kepemilikan saham minoritas antara lain pada PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia (8,0%), PT Pemingkat Efek Indonesia (0,14%), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1,0%), PT Bank Mizuho Indonesia (1,0%), dan PT Sumitomo Mitsui Indonesia (0,5%). Pada Tahun 2018 Entitas Anak BNI membukukan kinerja yang positif dengan total laba sebesar Rp648 miliar menurun sebesar (10,36%) dibanding dengan tahun 2017 sebesar 723 miliar dengan kontribusi laba sebesar 4,29% terhadap laba BNI.

Tabel Kinerja Laba Entitas Anak BNI

Nama Entitas Anak	2018 (Rp miliar)	2017 (Rp miliar)	2016 (Rp miliar)	2015 (Rp miliar)	Growth 2017-2018 (%)
BNI Syariah	416,06	306,69	277,37	228,5	35,66%
BNI Life	177,16	377,80	183,95	160	(53,11%)
BNI Sekuritas	22,06	10,60	12,34	38,9	108,11%
BNI Multifinance	32,06	27,10	7,41	(12,3)	18,30%
BNI Remittance	0,69	0,73	0,21	(0,5)	(5,48%)
Total	648,04	722,92	481,28	414,6	(10,36%)

Untuk tahun 2019 BNI memiliki beberapa strategi untuk pengembangan bisnis untuk meningkatkan kinerja keuangan, pertumbuhan bisnis, kepuasan nasabah, dan posisi Entitas Anak di antara *peers group* dan industri sebagai berikut:

- Meningkatkan pertumbuhan aset Entitas Anak melalui aksi korporasi
- Meningkatkan sinergi BNI Grup
- Digitalisasi produk dan jasa Entitas Anak



PT BANK BNI SYARIAH (BNI SYARIAH)

PENJELASAN, PRODUKTIVITAS, PENDAPATAN, DAN PROFITABILITAS

Di tahun 2018, BNI Syariah berhasil membukukan kinerja yang positif dengan pencapaian laba bersih setelah pajak sebesar Rp416 miliar, tumbuh sebesar 35,66% dari laba tahun 2017 sebesar Rp307 miliar, mencapai 102,23% dari target akhir tahun 2018 sebesar Rp406 miliar. Jumlah aset BNI Syariah mencapai Rp41.040 miliar, mencapai 106,19% dari target akhir tahun 2018 sebesar Rp38.648 miliar. Pencapaian aset ini didorong oleh pencapaian pembiayaan dan DPK, yang masing-masing tumbuh sebesar 20,30% dan 20,82%. Posisi pembiayaan pada Desember 2018 sebesar Rp28.386 miliar mencapai 104,82% dari target akhir tahun 2018, dengan pertumbuhan terbesar pada pembiayaan komersial sebesar 56,9%. Posisi DPK pada Desember 2018 sebesar Rp35.496 miliar atau 107,07% dari target akhir tahun 2018.

Adapun rincian terkait kinerja keuangan BNI Syariah selama tahun 2018 diuraikan dalam tabel berikut:

Kinerja Keuangan PT Bank BNI Syariah

Keterangan	2018	2017	Growth	
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	%
Pos-Pos Neraca				
Aktiva	41.040.203	34.827.144	6.213.059	17,84%
Investasi	12.327.502	10.617.970	1.709.532	16,10%
Penempatan pada BI	4.554.393	5.113.798	(559.404)	(10,94%)
Penempatan pada bank lain	327.022	328.739	(1.716)	(0,52%)
Surat Berharga	7.446.086	5.175.433	2.270.653	43,87%
Pembiayaan	28.386.197	23.596.718	4.789.479	20,30%
Piutang Murabahah/Salam/Istishna	18.201.807	16.580.149	1.621.658	9,78%
Piutang Qardh (kartu kredit syariah)	1.564.282	1.479.877	84.405	5,70%
Pembiayaan	8.274.741	5.475.003	2.799.738	51,14%
Ijarah	345.366	61.689	283.678	459,85%
Dana Pihak Ketiga	35.496.519	29.379.291	6.117.228	20,82%
Dana Simpanan Wadiah	8.835.445	5.970.787	2.864.658	47,98%
Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah)	26.661.074	23.408.505	3.252.570	13,89%
Ekuitas	4.244.484	3.812.000	225.798	5,92%
Pos-Pos Laba Rugi				
Pendapatan Operasional	3.836.743	3.384.295	452.448	13,37%
Pendapatan dari penyaluran dana	3.567.329	3.174.648	392.682	12,37%
Margin Murabahah	2.212.338	2.090.204	122.134	5,84%
Sewa Ijarah	12.244	57.054	(44.810)	(78,54%)
Bagi hasil Mudharabah	123.307	172.440	(49.133)	(28,49%)
Bagi hasil Musyarakah	498.757	336.154	162.603	48,37%
Dari Bank Indonesia	38.826	6.718	32.108	477,94%
Pendapatan DPK lain	148.678	152.051	(3.373)	-2,22%
Dari bank lain	533.179	360.027	173.152	48,09%
Pendapatan Operasional Lainnya	269.413	209.647	59.766	28,51%
Bagi hasil untuk investor Dana Investasi tidak Terikat	1.007.841	967.942	39.900	4,12%
Dari pihak ketiga bukan bank	1.007.227	963.727	43.501	4,51%
Dari Bank Indonesia	-	-	-	-
Dari bank lain	614	4.215	(3.601)	(85,43%)
Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil	2.828.901	2.416.353	412.548	17,07%
Beban (Pendapatan) penyisihan penghapusan aktiva	689.828	700.859	(11.031)	(1,57%)



Analisis &
Pembahasan
Manajemen



Keterangan	2018	2017	Growth	
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	%
Beban (Pendapatan) estimasi kerugian komitmen dan kontingen	(215)	415	(630)	(151,84%)
Beban Operasional Lainnya	1.572.949	1.319.906	253.043	19,17%
Laba (Rugi) Operasional	566.339	395.174	171.165	43,31%
Laba (Rugi) non operasional	(16.131)	13.573	(29.704)	-218,85%
Laba Rugi Sebelum Pajak	550.208	408.747	141.462	34,61%
Pajak	134.151	102.061	32.089	31,44%
Laba (Rugi) Setelah Pajak	416.058	306.686	109.372	35,66%

ROA dan ROE BNI Syariah tahun 2018 sebesar 1,42% (naik 0,37) dan 10,39% (turun -1,03%) kenaikan ROA sejalan dengan pertumbuhan laba, namun ROE menurun karena adanya peningkatan pada ekuitas sehubungan penambahan setoran modal oleh BNI sebesar Rp1 triliun pada akhir Desember 2017. BOPO tahun 2018 sebesar 85,37% menurun sebesar 2,25% dari tahun 2017 sebesar 87,62. Terjadi kenaikan NPF sebesar 0,04% dari 2,89% pada tahun 2017 menjadi 2,93% pada tahun 2018.

Tabel Rasio Keuangan BNI Syariah

Ratio Keuangan	2018	2017
NPL	2,93%	2,89%
ROE	10,39%	11,42%
ROA	1,42%	1,05%
BOPO	85,37%	87,62%
FDR	79,61%	80,21%
NIM	7,16%	7,58%
CAR	19,15%	20,14%

Bukti pengakuan terhadap kinerja selama tahun 2018, BNI Syariah telah meraih penghargaan dari berbagai institusi di antaranya:

No.	Nama	Predikat	Kategori	Pelaksana	Tanggal
1	Public Relation Awards	<i>The Best Public Relation</i> Ketiga (No. 3 di industri)	Bank Syariah	Majalah Marketing	Januari 2018
2	Top Digital Public Relation Award	<i>Top Digital Public Relation</i> 2018 (No. 1 di industri)	Perbankan Syariah	Trasnco research	Januari 2018
3	Internal Magazine Awards (InMA)	<i>Bronze The Best Internal Magazine</i> 2018 (No. 3 di industri)	<i>Private Comp.internal magazine</i>	Dewan Pers	Februari 2018
4	Top Brand Award	<i>Top Brand</i> (No. 3 di industri)	<i>Top Brand kategori saving account sharia bank</i>	Majalah Marketing	Februari 2018
5	Indonesia Employee Engagement Index 2017	<i>Highly Engaged Organization</i>	Perbankan	Bisnis Indonesia	Maret 2018
6	Karim Award	<i>Best Innovative</i>	Perbankan	Karim Consulting	April 2018
7	Public Relation Award	Terpopuler di Media kategori anak perusahaan	Bank Umum Syariah	Majalah PR Indonesia	April 2018
8	Digital Innovation Award	Aplikasi Digital (No. 1 di industri)	Bank Umum Syariah	Warta Ekonomi	Mei 2018
9	Service Excellence Awards	Performa Terbaik Satpam (No. 1 di industri)	Bank Umum Syariah	InfoBank	Mei 2018
10	Service Excellence Awards	Performa Terbaik <i>Overall Minus E-Banking</i> (No. 4 di industri)	Bank Umum Syariah	InfoBank	Mei 2018
11	Service Excellence Awards	Performa Terbaik <i>Customer Service</i> (No. 4 di industri)	Bank Umum Syariah	InfoBank	Mei 2018
12	Service Excellence Awards	Performa Terbaik <i>Teller</i> (No.5 di industri)	Bank Umum Syariah	InfoBank	Mei 2018



No.	Nama	Predikat	Kategori	Pelaksana	Tanggal
13	Service Excellence Awards	Performa Terbaik Telepon (No. 3 di industri)	Bank Umum Syariah	InfoBank	Mei 2018
14	Service Excellence Awards	Performa Terbaik Fisik <i>Banking Hall</i> (No. 2 di industri)	Bank Umum Syariah	InfoBank	Mei 2018
15	Service Excellence Awards	Performa Terbaik Pelayanan Prima (No. 3 di industri)	Bank Umum Syariah	InfoBank	Mei 2018
16	Indonesia Digital Innovation Award	<i>Innovative Company in Digital Islamic Service and Applications</i> (No. 1 di industri)	<i>Islamic Banking</i>	Warta Ekonomi	Mei 2018
17	23th Infobank Award	Bank Syariah Terbaik	Asset > Rp 25 Triliun	Majalah Infobank	Agustus 2018
18	23th Infobank Award	Bank Syariah Terbaik (No. 2 di industri)	Asset > Rp 25 Triliun	Majalah Infobank	Agustus 2018
19	Sharia Investor Award	Bank Syariah Terbaik (No. 1 di industri)	Aset > Rp 10 Triliun	Majalah Investor	Agustus 2018
20	Bisnis Indonesia Financial Award	<i>The Most Innovative Sharia Product</i> (No. 1 di industri)	Perbankan	Bisnis Indonesia	Agustus 2018
21	Indonesia Banking Award	<i>The Most Efficient Bank</i> (No.1 di industri)	Asset > 10 Triliun	Majalah Tempo	September 2018
22	Indonesia Banking Award	<i>The Most Reliable Bank</i> (No.2 di industri)	Asset > 10 Triliun	Majalah Tempo	September 2018
23	Alphasoutheast Asia Award	<i>The Best Commercial Bank In Indonesia</i> (No. 1 di industri)	<i>Islamic Bank</i>	Alphasoutheast Asia	September 2018
24	7 th Infobank Sharia Awards	<i>The Best Sharia Bank modal</i> inti dibawah Rp5 T (No. 2 di industri)	<i>Islamic bank</i>	Majalah Infobank	September 2018
25	Digital Marketing Award	<i>The Best Website - Bank Syariah</i> (No. 2 di industri)	<i>Islamic Bank</i>	Majalah Trans n Co	September 2018
26	Indonesia Digital Popular Brand	<i>The Best KPR Sharia</i> (No. 2 di industri)	<i>Islamic Bank</i>	Trans- co	Oktober 2018

RENCANA KERJA TAHUN 2019

Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, BNI Syariah telah menetapkan strategi usaha 2019 sebagai berikut:

1. Business Strategy

- Strategi Penghimpunan Dana dengan mengembangkan industri halal *ecosystem*.
- Strategi Penyaluran Dana dengan salah satu fokus utama sektor infrastruktur dan perusahaan BUMN.

2. Functional Strategy

- Memperluas *coverage* pelayanan perbankan syariah ke seluruh pelosok Indonesia dengan prioritas produk laku pandai.
- Transformasi bisnis Mikro untuk peningkatan produktivitas.
- Implementasi *Data Center* sebagai pendukung kapasitas IT.
- Menyiapkan infrastruktur transaksional dimulai dari *Mobile Banking* dan *SMS Banking*.
- Mengelola *human capital* berbasis kompetensi.
- Optimalisasi Kerja sama Pendampingan Teknis antara BNI dan BNI Syariah.

3. Synergy Optimization (meliputi sinergi bisnis dan *shared service* baik BNI ke BNI Syariah maupun Entitas Anak BNI lainnya)

- Kerja sama keagenan (*Sharia Channeling Outlet/SCO*), yaitu sinergi dengan memanfaatkan jaringan *outlet* BNI induk dalam memberikan pelayanan syariah.
- Pembiayaan *Supply/Value Chain* dengan nasabah komersial BNI.
- Pemasaran produk *Hasanah Card* melalui jaringan BNI.
- Pengelolaan Dana Haji (Transito) melalui kerja sama BNI Syariah dan BNI dengan pelimpahan dana haji dari rekening cabang BNI transito ke BNI Syariah.
- Pemanfaatan fitur Cash Management (BNIDirect) oleh nasabah BNI Syariah dalam rangka peningkatan *fee based* serta pengelolaan nasabah *prime* BNI Syariah.
- Pemanfaatan fasilitas *e-channel* BNI oleh nasabah BNI Syariah dalam rangka peningkatan *fee based*.
- Pemanfaatan sistem *remittance* dan *trade finance* BNI oleh nasabah BNI Syariah dalam rangka optimalisasi bisnis internasional.



PT BNI LIFE INSURANCE (BNI LIFE)

PENJELASAN, PRODUKTIVITAS, PENDAPATAN, DAN PROFITABILITAS

Pada tahun 2018, BNI Life Insurance membukukan laba bersih setelah pajak Rp177 miliar, menurun sebesar (52,74%) dari laba tahun 2017 sebesar Rp375 miliar, mencapai 36,53% dari target akhir tahun 2018 sebesar Rp485 miliar. Selain itu, jumlah aset BNI Life sebesar Rp17.283 miliar, mencapai 78,54% dari target akhir tahun 2018 sebesar Rp22.006 miliar. Penurunan laba tersebut terutama disebabkan penurunan Pendapatan Hasil Investasi tahun 2018 yang menurun (61,99%) menjadi sebesar Rp487 miliar dari Rp1.282 miliar tahun 2017.

Adapun rincian terkait kinerja keuangan BNI Life selama tahun 2018 diuraikan dalam tabel berikut:

Kinerja Keuangan PT BNI Life Insurance

Keterangan	2018	2017	Pertumbuhan	
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(%)
POS-POS NERACA				
Aktiva	17.283.191	16.304.038	979.153	6,01%
Aktiva Produktif/Investasi	14.998.442	14.566.378	432.064	2,97%
Kewajiban	12.080.714	10.952.132	1.128.583	10,30%
Ekuitas	5.202.477	5.351.907	(149.430)	(2,79%)
POS-POS LABA RUGI				
Total Pendapatan	6.113.086	6.987.785	(874.699)	(12,52%)
Pendapatan Premi Bruto	5.568.467	5.710.686	(142.219)	(2,49%)
Pendapatan Premi Netto	5.510.161	5.577.321	(67.160)	(1,20%)
Pendapatan Hasil Investasi	487.255	1.281.910	(794.655)	(61,99%)
Non LINK	585.277	774.625	(189.348)	(30,32%)
LINK	(98.022)	507.285	(490.263)	(122,16%)
Pendapatan Lain-Lain	115.670	128.555	(12.884)	(10,02%)
Total Biaya	5.942.440	6.619.399	(676.959)	(10,23%)
Biaya Asuransi/Klaim	4.285.560	5.085.680	(800.120)	(15,73%)
Biaya Akuisisi	848.154	801.956	46.198	5,76%
Biaya Usaha	744.003	669.296	74.707	11,16%
Non Operasioanl expenses (income)	64.723	62.467	2.256	3,61%
LABA SEBELUM PAJAK	170.647	368.387	(197.740)	(53,68%)
PAJAK	6.517	6.517	0	0,00%
LABA BERSIH	177.164	374.904	(197.740)	(52,74%)

ROA dan ROE BNI Life tahun 2018 sebesar 1,05% dan 3,42 % masing-masing menurun (0,93%) dan (2,45%) sejalan dengan penurunan laba. BOPO sebesar 97,21% meningkat sebesar 2,48% dari 94,73% di tahun 2017, karena pertumbuhan biaya yang lebih besar dari pertumbuhan pendapatan seiring penurunan pendapatan hasil investasi. RBC BNI Life tahun 2018 sebesar 735,93% menurun sebesar 44,82% dari tahun 2017 sebesar 780,75% sejalan dengan pertumbuhan bisnis perusahaan.

Tabel Rasio Keuangan BNI Life

Rasio	2018	2017
ROA	1,05%	1,98%
ROE	3,42%	5,87%
BOPO	97,21%	94,73%
Hasil Investasi/Investasi	3,25%	8,80%
RBC	735,90%	780,75%



Kinerja tersebut tercapai dengan strategi bisnis tahun 2018, dengan fokus BNI Life diarahkan kepada perolehan pendapatan premi Regular dari jalur distribusi *Bancassurance*, terutama pada unit *In Branch* dan premi kesehatan dari jalur distribusi *Employee Benefits*, peningkatan pelayanan kepada nasabah, serta peluncuran produk-produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Menyikapi perkembangan yang dinamis di industri asuransi dan mengantisipasi pertumbuhan bisnis BNI Life di tahun 2018 dan tahun-tahun yang akan datang, maka pada tahun 2018 dilakukan penambahan fungsi *Regional Branch Manager (RBM) In Branch* sebagai koordinator wilayah yang berfungsi sebagai PIC BNI Life bekerja sama dengan Pimpinan cabang BNI dalam penjualan produk asuransi dan pelayanan kepada nasabah-nasabah BNI Life yang direferensikan oleh BNI. Agar dapat menawarkan lebih banyak pilihan bagi para pelanggan, sepanjang tahun 2018 BNI Life Insurance telah meluncurkan beberapa inisiatif produk, di antaranya: BLPM produk dasar, BLPM *Pro Illness Care+*, BLPM *Pro Hospital and Surgical*, Asuransi Jiwa Kredit (Perluasan Tenor) - BNI Griya, Asuransi Jiwa Proteksi Multi Kredit, BLife *Fixed Protection*, BNI Life *Prochild*, *Smart Protection Plus*, *PA Protection Plus*, *Maxi Health Protection (Telemarketing)*, *SiMUDA Saving Protection*. Selain itu, pada tahun 2018 BNI Life kembali meraih berbagai penghargaan, lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

Tabel Penghargaan BNI Life Tahun 2018

No	Nama	Predikat	Kategori	Pelaksana	Tanggal
1	B-Life Link Dana Cemerlang 2018	Unit Link Terbaik	Kelompok. BUMN dan Anak Usaha BUMN, Saham Periode 3 Tahun	Berita Satu	22 Februari 2018
2	B-Life Link Dana Cemerlang 2018	Unit Link Terbaik	Kelompok. BUMN dan Anak Usaha BUMN, Saham Periode 5 Tahun	Berita Satu	22 Februari 2018
3	B-Life Link Dana Cemerlang 2018	Unit Link Terbaik	Kelompok. BUMN dan Anak Usaha BUMN, Saham Periode 7 Tahun	Berita Satu	22 Februari 2018
4	B-Life Link Dana Cemerlang 2018	Unit Link Terbaik	Ke. BUMN dan Anak Usaha BUMN, Pendapatan Tetap Per 3 Tahun	Berita Satu	22 Februari 2018
5	B-Life Link Dana Cemerlang 2018	Unit Link Terbaik	Kelompok. BUMN dan Anak Usaha BUMN. Pendapatan Tetap Per 5 Tahun	Berita Satu	22 Februari 2018
6	Indonesia Sharia Finance Award 2018	<i>Top 5 Customer Choice</i>	<i>Sharia Business Unit in Life Insurance 2018</i>	Warta Ekonomi	30 April 2018
7	Service Quality Award 2018	<i>Excellent Total Service Quality Satisfaction</i>	<i>Life and Health Insurance</i>		10 Juni 2018
8	Best Insurance Award 2018	Asuransi Jiwa Terbaik 2018	Asuransi dengan Aset di Atas Rp 10 Triliun - Rp 25 Triliun	Investor	24 Juli 2018
9	Insurance Award 2018	Asuransi Berpredikat "Sangat Bagus"	Kinerja Keuangan Selama Tahun 2017	Infobank	26 Juni 2018
10	Best Insurance Award 2018	<i>Best Syariah 2018</i>	Asuransi Jiwa Syariah Aset di Atas Rp200 miliar - Rp1 triliun	Investor	23 Agustus 18
11	Financial Award	<i>Highly Committed Company</i>	<i>Social Responsibility</i>	Bisnis Indonesia	27 Agustus 2018
12	The Best Contact Center Indonesia 2018	<i>The Best Contact Center Operations "Gold"</i>	<i>Contact Center</i>		03 Agustus 2018
13	Sharia Award 2018	Syariah Berpredikat "Sangat Bagus"	Kinerja Keuangan Selama Tahun 2017, <i>Sharia Business Unit (UUS)</i>	Infobank	26 September 2018
14	Indonesia Insurance Consumer Choice Award 2018	<i>Best Financial Performance - Top 5 Best Consumer Choice Insurance Company,</i>	Between Assets Rp10-25 trillion	Warta Ekonomi	27 September 2018

RENCANA KERJA TAHUN 2019

1. Fokus untuk menjual produk yang menguntungkan dan meningkatkan jumlah polis.
2. Mengoptimalkan hasil investasi dan kinerja dari *Fund Unit Link*.
3. Mengoptimalkan *captive market*.
4. Meningkatkan rasio premi lanjutan.
5. Strategi integrasi penjualan regional.
6. Meningkatkan kualitas dan produktivitas penjualan.
7. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia.
8. Peningkatan proses bisnis melalui digital.
9. Mempertahankan efektivitas dan efisiensi OPEX.



PT BNI SEKURITAS (BNI SEKURITAS)

PENJELASAN, PRODUKTIVITAS, PENDAPATAN, DAN PROFITABILITAS

Di akhir tahun 2018, BNI Sekuritas berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp22 miliar tumbuh sebesar 102,25% dari tahun 2017 sebesar Rp10,99 miliar, mencapai 28,2% dari target sebesar Rp78,25 miliar, pendapatan operasional tahun 2018 sebesar Rp253 miliar tumbuh sebesar 9,23% dari tahun 2017 sebesar Rp232 miliar. Sumber utama pendapatan terutama berasal dari *investment management fee* (melalui BNI Aset Management sebagai Entitas Anak BNI Sekuritas) dengan kontribusi sebesar Rp93 miliar atau 36,48% dari total pendapatan operasional BNI Sekuritas, *brokerage commissions* sebesar Rp80 miliar atau 31,72% dan *Investment Banking Fee* sebesar Rp42 miliar atau 16,68%. Total nilai transaksi *equity brokerage* BNI Sekuritas tahun 2018 sebesar Rp59,5 triliun, menurun sebesar 0,84% dari tahun 2017 sebesar Rp 58,9 triliun. Kontribusi nilai transaksi *Online* mencapai sebesar Rp28,2 triliun sedangkan total nilai transaksi Reguler sebesar Rp31,2 triliun. Jumlah nasabah aktif BNI Sekuritas pada tahun 2018 tercatat sebanyak 66.995 nasabah meningkat 15% dari tahun 2017 sebesar 58.238 nasabah. Pada tahun 2018, BNI Sekuritas meraih penghargaan "The Most Active Security Company" dari KSEI pada tanggal 24 Januari 2018 dan Penghargaan *Innovative Company in Digital Investment Services* dari Warta Ekonomi.

Adapun rincian terkait kinerja keuangan BNI Sekuritas diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel Kinerja Keuangan PT BNI Sekuritas

Keterangan	2018	2017	Pertumbuhan	
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(%)
Pos-Pos Neraca				
Aktiva	869.813	1.212.406	(342.594)	(28,26%)
Kewajiban	383.600	760.124	(376.524)	(49,53%)
Equity	486.213	452.282	33.931	7,50%
Pos-Pos Laba Rugi				
Pendapatan	253.641	232.217	21.423	9,23%
<i>Brokerage commissions</i>	80.453	79.023	1.430	1,81%
<i>Investment management fees</i>	92.536	111.531	(18.995)	(17,03%)
<i>Brokerage Comm. From Fix Income Activities</i>	18.583	10.538	8.045	76,35%
<i>Fees from Inves. Banking Activities</i>	42.310	30.657		
<i>Increase/(decrease) on net asset value of mutual funds</i>	722	954	(232)	(24,35%)
<i>Interest Revenue from Fund Separation and Bond and Dividen</i>	8.422	4.521	3.902	86,31%
<i>Gain (Loss) on trading of marketable securities –net</i>	(21.734)	(45.985)	24.251	(52,74%)
<i>Margin and Overdue Revenue</i>	28.960	38.300	(9.340)	(24,39%)
<i>Other</i>	3.389	2.679		
Biaya Usaha	221.097	210.303	10.794	5,13%
Pendapatan Lain – Lain	19.198	14.686	4.512	30,72%
Biaya Bunga dan Keuangan Lainnya	(15.747)	(15.311)	(435)	(2,84%)
Total Pendapatan	272.839	246.904	25.935	10,50%
Total Biaya	236.844	225.615	11.228	4,94%
L/R (EBT)	35.995	21.498	14.497	67,44%
Tax	(13.930)	(10.588)	(3.342)	31,57%
L/R (EAT)	22.064	10.910	11.075	102,25%



ROA BNI Sekuritas tahun 2018 sebesar 3,56% meningkat 1,99% dari tahun 2017 sebesar 1,57%, ROE tahun 2018 sebesar 4,72 % meningkat dari 2,70% dari tahun 2017 sebesar 2,02% sejalan kenaikan laba.

Tabel Rasio Keuangan BNI Sekuritas

Ratio Keuangan	2018	2017
	(%)	(%)
ROA	3,56%	1,57%
ROE	4,72%	2,02%
BOPO	87,17%	90,56%

RENCANA KERJA TAHUN 2019

Untuk tahun 2019, BNI Sekuritas akan melanjutkan strateginya guna meraih kinerja yang lebih baik dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan BNI Grup.
2. Ekspansi bisnis *Equity* dengan fokus pada nasabah institusi baik domestik maupun asing.
3. Ekspansi bisnis *Investment Banking* di fokuskan pada klien BUMN dan Korporat.
4. Ekspansi bisnis DCM difokuskan melalui sinergi dengan BNI.
5. Meningkatkan penerapan GCG, *risk awareness* dan *sense of efficiency*
6. Ekspansi bisnis *Online Trading* dengan melakukan peningkatan dan pengembangan fitur-fitur aplikasi.

PT BNI MULTIFINANCE (BNI MULTIFINANCE)

PENJELASAN, PRODUKTIVITAS, PENDAPATAN, DAN PROFITABILITAS

Hingga Desember 2018 BNI Multifinance membukukan kinerja yang positif dengan laba bersih sebesar Rp32 miliar, tumbuh sebesar 21,06% dari tahun 2017 sebesar Rp26.480 miliar mencapai 95,72% dari target akhir tahun 2018 sebesar Rp33 miliar. Aset sebesar Rp1.322 miliar, tumbuh sebesar 45,36% dari tahun 2017 sebesar Rp907 miliar dan mencapai 95,7% dari target akhir tahun 2018 sebesar Rp 1.382 miliar. Pertumbuhan *asset* didorong oleh pertumbuhan pembiayaan sebesar 50,51% dari Rp764 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp1.151 miliar pada tahun 2018 sejalan dengan pertumbuhan kewajiban (pinjaman) sebesar 61,98% dari Rp 610 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp988 miliar pada tahun 2018. Pembiayaan investasi/sewa guna usaha tumbuh sebesar 98,74% dengan porsi sebesar 64,97% dari total *portfolio* pembiayaan. Kinerja tahun 2018 tersebut dicapai BNI Multifinance dengan fokus pada pembiayaan investasi (komersial) berupa kendaraan niaga, alat berat pada nasabah *referral* BNI, nasabah *repeat order* BNI Multifinance dan pembiayaan kepemilikan kendaraan roda empat melalui *Car Ownership Program* (COP) bagi segmen pejabat pemerintah, karyawan korporasi, serta karyawan Grup Usaha BNI, serta Sewa Operasi kendaraan roda 4 (empat) kepada BNI dan *Group*. Perusahaan melakukan pembiayaan konsumen (multi produk dan BNIMF OTO) dengan fokus pada karyawan BNI dan BNI *Group* serta juga mulai melakukan pembiayaan anjak-piutang dengan fokus pada selektif *flow risk customer* untuk menjaga portofolio yang sehat.

Adapun rincian kinerja keuangan BNI Multifinance diuraikan sebagai berikut:

Tabel Kinerja Keuangan BNI Multifinance

Keterangan	2018	2017	Pertumbuhan	
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(%)
POS-POS NERACA				
Aktiva	1.322.611	912,422	414.638	41.02%
Deposito	234	42,734	(42.500)	-99.45%
Pembiayaan	1.151.045	772,621	386.283	44.46%
Sewa Guna Usaha	747.798	382,388	371.522	87.11%
Pemby. Konsumen	221.855	254,527	(32.298)	-2.79%
Anjak Piutang	181.329	135,706	47.059	12.91%
CKPN Pembiayaan	(12.652)	(3,854)	(8.549)	204.74%
Kewajiban	987.926	609,905	378.021	57.35%
Ekuitas	334.686	302,517	32.358	8.10%
POS-POS LABA RUGI				
Pendapatan Operasional	174.477	114,861	59.616	51.90%
P. Sewa Guna Usaha	84.110	42,609	41.501	97.40%



Analisis &
Pembahasan
Manajemen



Keterangan	2018	2017	Pertumbuhan	
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(%)
P. Sewa Guna Operasi	28.631	30,481	(1.849)	-6.07%
P. Pemby. Konsumen	37.714	17,794	19.921	111.95%
P. Anjak Piutang	24.021	23,978	43	0.18%
Pendapatan Operasional lainnya	2.875	1,793	874	60.40%
Total Pendapatan Operasional	177.352	116,654	60.431	52.03%
Total Beban operasional	137.808	82,218	55.506	67.61%
Beban CKPN	11.543	2,777	8.517	315.58%
Pendapatan (beban) lain	138	2,093	(1.965)	-93.41%
Laba sebelum pajak	39.682	36,529	2.959	8.63%
pajak	(7.625)	(9,473)	2.231	-19.51%
Laba Bersih Setelah Pajak	32.057	27,056	5.190	18.49%

ROA BNI Multifinance tahun 2018 sebesar 3,45% turun (0,98%) dari tahun 2017 sebesar 4,43%, sementara ROE tahun 2018 sebesar 10,08% meningkat 2,69% dari tahun 2017 sebesar 7,39% sejalan dengan pertumbuhan laba. BOPO sebesar 77,63% meningkat sebesar 5,44% dari tahun 2017 sebesar 72,19%. NPL tahun 2018 sebesar 1,18% naik sebesar 0,86% dari tahun 2017 sebesar 0,32%. DER tahun 2018 sebesar 2,85 meningkat 0,83 dari 2,02 pada tahun 2017 sejalan dengan peningkatan pinjaman sebagai sumber pendanaan untuk ekspansi bisnis pembiayaan.

Tabel Rasio Keuangan BNI Multifinance

Ratio Keuangan	2018	2017
NPL	1,18%	0,32%
ROA	3,45%	4,43%
ROE	10,08%	7,39%
BOPO (Biaya Operasional/Pendapatan Operasional)	77,63%	72,19%
DER (Debt Equity Ratio) (kali)	2,85	2,02

Kinerja BNI Multifinance yang membaik mendapatkan apresiasi (*award*) dari berbagai pihak antara lain sebagai berikut

No.	Nama Penghargaan	Predikat	Kategori	Pelaksana	Tanggal
1	Human Capital Award IV - 2018	Gold/6 - Besar	Perusahaan <i>Multifinance</i> - Non Tbk	Economic Review, Indonesia Human Capital Award	Mei 2018
2	14 th Multifinance Awards 2018	Sangat Bagus	Kinerja Keuangan Selama Tahun 2017	infobank	Juli 2018
3	Indonesia Enterprise Risk Management Award-III-2018	Peringkat ke -1/ GOLD	Perusahaan <i>Multifinance</i> - Non Tbk	Economic Review, Indonesia	Agustus 2018
4	Perusahaan Multifinance Terbaik 2018	Terbaik di Indonesia 2018	Perusahaan <i>Multifinance</i> Asset 500M - 1 T (Anak Perusahaan BUMN)	Economic Review, IPMI, Perbanas Institute	September 2018
5	6 th Indonesia Multifinance Award 2018	Perusahaan <i>Multifinance</i> terbaik di Indonesia 2018	Perusahaan <i>Multifinance</i> Asset 500M - 1 T	Economic Review, Indonesia	Oktober 2018

RENCANA KERJA 2019

Guna meminimalisasi risiko di tahun 2019, fokus bisnis BNI Multifinance masih tetap seperti tahun sebelumnya yaitu:

1. Fokus *customer* pada selektif *low risk customer*.
2. Fokus pada pembiayaan komersial (kendaraan niaga, alat berat, dan lain-lain) pada nasabah *referral* BNI dan nasabah *repeat order* BNI Multifinance.



3. Fokus pada sektor unggulan seperti industri manufaktur dan penunjang infrastruktur.
4. Pembiayaan konsumen tetap berjalan dengan target *market COP* BNI dan *COP Non BNI* (BUMN dan Entitas Anak BUMN) serta produk multiguna dan BNIMF OTO untuk pegawai BNI Group.
5. Meningkatkan pendapatan berbasis *fee based*.
6. Memperbesar aset perusahaan dengan melakukan pertumbuhan pembiayaan baik secara *organic* dan *unorganic* dengan memperbesar pembiayaan multiguna/konsumen.
7. Merintis Digitalisasi Pembiayaan untuk mempercepat proses pembiayaan.

BNI REMITTANCE LIMITED (BNI REMITTANCE)

PENJELASAN, PRODUKTIVITAS, PENDAPATAN, DAN PROFITABILITAS

BNI Remittance berhasil membukukan kinerja yang positif dengan pencapaian laba sebesar Rp693 juta pada Desember 2018 menurun sebesar 5,22% dari laba 2017 sebesar Rp731 juta. Jumlah aset BNI Remittance pada tahun 2018 mencapai Rp4,9 miliar menurun (46,01%) dari tahun 2017 sebesar Rp9,12 miliar. Total transaksi remitansi selama tahun 2018 tercatat sebanyak 212,7 ribu slip atau meningkat sebesar 22,6% dibanding tahun sebelumnya sebesar 173,5 ribu slip. Transaksi secara konvensional dilakukan melalui *Teller* yang ada di *counter* sebanyak 77,8 ribu slip, sementara transaksi secara elektronik dilakukan melalui ATM BNI sebanyak 134,9 ribu slip. Kinerja tahun 2018 tersebut dicapai dengan peningkatan layanan remitansi selama tahun 2018, salah satunya inisiasi kerja sama antara BNI dengan *Money Service Operator* (MSO) lokal yang memiliki outlet jaringan lebih luas. Dengan adanya kerja sama ini, maka layanan remitansi BNI dapat dirasakan lebih merata di seluruh penjuru Hong Kong. Selama tahun 2018 telah terjalin kerja sama dengan 2 (dua) MSO lokal, yaitu *BEST Remittance* yang memiliki lebih dari 40 (empat puluh) *outlet* efektif pada Juli 2018 dan *Uniforex* yang memiliki lebih dari 100 (seratus) *outlet* efektif Desember 2018. Selama tahun 2018, BNI Remittance aktif menyelenggarakan berbagai program *marketing* yang berbasis edukasi antara lain: program peningkatan saldo tabungan, program peningkatan utilisasi ATM dan *Mobile Banking* dan *program customer get customer* melalui aplikasi pembukaan rekening BNI secara digital (*E-Form*). Melalui program KAMI bersama BNI, BNI Remittance juga aktif melakukan *capacity building* untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong. Antusiasme PMI untuk meningkatkan kapasitas, sekaligus melebarkan jejaring antara sesama pekerja migran, pihak perbankan dan pihak terkait lainnya, terlihat dari banyaknya peserta yang hadir pada setiap pelatihan yang diselenggarakan. Pelatihan dilakukan dalam dua tahap, yaitu pelatihan *soft skill* berupa seminar wirausaha dan pelatihan *hard skill* berupa kelas praktik keterampilan.

Adapun rincian kinerja keuangan BNI Remittance diuraikan sebagai berikut:

Tabel Kinerja Keuangan BNI Remittance

Keterangan	2018	2017	Pertumbuhan	
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
POS-POS NERACA				
Total Aktiva	4.931	9.119	(4.187)	(45,92%)
<i>Fixed Asset</i>	410	858	(447)	(52,15%)
<i>Current Asset</i>	3.615	4.861	(1.246)	(25,63%)
<i>Other Asset</i>	906	3.400	(2.494)	(73,36%)
Total Kewajiban	1.048	3.816	(2.768)	(72,53%)
<i>Current Liabilities</i>	1.048	3.816	(2.768)	(72,53%)
<i>Other Liabilities</i>	-	-	-	
Total Ekuitas	3.883	5.303	(1.420)	(26,77%)
POS-POS LABA RUGI				
Pendapatan	11.614	10.133	1.481	14,62%
			-	
<i>Commision Earned</i>	3.204	3.411	(207)	(6,1%)



Tabel Kinerja Keuangan BNI Remittance

Keterangan	2018	2017	Pertumbuhan	
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
Exchange gain/Loss	3.079	2.264	815	36,0%
Other Commision	5.332	4.458	874	19,6%
Biaya	10.922	9.402	1.520	16,2%
- Operational Expenses	10.922	9.402	1.520	16,2%
			-	
EBT	693	731	(38)	(5,22%)
TAX			-	
EAT	693	731	(38)	(5,22%)

ROA dan ROE BNI Remittance tahun 2018 sebesar 14,07% dan 17,88%, masing-masing meningkat sebesar 6,05% dan 4,09% dari tahun 2017 sebesar 8,02% dan 13,79%. BOPO meningkat menjadi 94,04% pada tahun 2018 dari 92,79% pada tahun 2017.

Tabel Rasio keuangan BNI Remittance

Rasio	2018 (%)	2017 (%)
ROA	14,07%	8,02%
ROE	17,88%	13,79%
BOPO	94,04%	92,79%
DER	0,270	0,720

RENCANA KERJA 2019

Secara umum strategi perusahaan tahun 2019 akan tetap sejalan dengan tahun sebelumnya, dengan fokus pada program-program yang melibatkan nasabah secara langsung antara lain:

1. *Customer Awareness*

Meningkatkan sinergi dengan perusahaan induk maupun sesama anak perusahaan untuk menyelenggarakan *program marketing above the line* maupun *below the line* yang melibatkan nasabah secara aktif melalui komunitas-komunitas yang ada di Hong Kong.

2. *Customer Experience*

Bekerja sama dengan perusahaan induk untuk meningkatkan *experience* nasabah BNI di Hong Kong melalui program yang mengarah kepada *digital banking*, antara lain:

- Optimalisasi penggunaan ATM terutama untuk fitur layanan non tunai.
- Optimalisasi penggunaan *Mobile Banking*.
- Optimalisasi penggunaan *E-Form* untuk pembukaan rekening BNI.

3. *Customer Loyalty*

Menginisiasi program yang dapat meningkatkan loyalitas *customer*, terutama fokus pada program berbasis peningkatan kapasitas yang berkesinambungan.

ASPEK PEMASARAN

STRATEGI PEMASARAN

Tahun 2018 merupakan tahun pengukuhan BNI sebagai *Digital Financial Institution*. Sesuai dengan semangat tersebut BNI dari sisi pemasaran harus dapat menyelaraskan komunikasi *brand* korporat dengan produk-produk yang akan menjadi *champion* di 2018 terutama yang berbasis digital. Untuk menyokong penyelarasan tersebut pada tahun 2018 BNI mengunggah komunikasi *brand* korporat dengan Tema *Campaign: Let's Make a Digital Leap* karena BNI itu Digital. Tema ini ingin memberikan penjelasan atau janji kepada nasabah dan masyarakat luas bahwa melalui produk-produk perbankan digital BNI, mereka mendapatkan kemudahan, kenyamanan, kesempatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia secara umum.

Produk-produk perbankan digital yang menjadi *champion* pada tahun 2018 tersebut tidak hanya pada tingkat produk perbankan korporasi namun juga meliputi perbankan *retail* dan produk non perbankan BNI yang diantarkan oleh anak-anak perusahaan BNI. Integrasi tersebut diharapkan dapat menaikkan persepsi BNI sebagai *digital financial institution*.

Dalam sisi pemasaran, untuk produk perbankan *digital* ini, *customer experience* menjadi satu *moment of truth* yang harus dapat disampaikan melalui tema yang dituangkan dalam strategi *corporate campaign*. Pesan tersebut adalah BNI melalui produk perbankan *digital* dan layanan yang dikembangkan sedemikian rupa akan memberikan pengalaman hidup yang terbaik. BNI percaya bahwa *customer experience* yang baik tidak hanya memenuhi kebutuhan namun juga memuaskan keinginan penggunaannya.

Untuk menjelaskan perubahan BNI dari konvensional banking menjadi *digital financial institutions* ini BNI mengangkat tema besar 'Perubahan' dengan maksud mengajak nasabah dan masyarakat Indonesia untuk menyongsong disrupsi *digital* dan menilainya sebagai peluang untuk mempercepat pencapaian kehidupan yang lebih baik.

Pesan ini secara konsisten terlihat dalam pesan *campaign* yang coba ditanamkan oleh BNI pada komunikasi *brand* korporat. Dengan harapan masyarakat Indonesia melakukan perubahan sikap/cara ber-bank dan bertransaksi yang menuju kepada digital. Misalnya dalam *festive promo* yang dibuat dengan tujuan ikut merayakan selebrasi bersama semua nasabah maupun masyarakat di setiap hari besar nasional ataupun keagamaan tersebut dengan promo-promo produk *digital* BNI. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan *awareness* seperti yang telah disebutkan di atas sekaligus peningkatan *usage* karena BNI selalu hadir di momen istimewa nasabah.

Demikian pula cara BNI dalam menyampaikan pesan, saat ini sudah semakin intensif kepada penggunaan media digital seperti, *Online* dan *Social Media* BNI dengan jumlah *followers* per Desember 2018 dari akun Twitter BNI @BNI adalah 1.184.748 *followers*, akun Instagram @bni46 adalah 152.365 *followers*, dan akun Facebook BNI adalah 330.044. Penyampaian informasi terkait promosi (periode, area cakupan dan ketentuan lainnya) dari setiap produk BNI seperti Tabungan, Griya, KUR, BNI Kartu Kredit, BNI Kartu Debit, promo penggunaan *electric banking* hingga promo entitas anak pun dapat diakses oleh masyarakat melalui *microsite* khusus promosi BNI yaitu bnidigideal.com. Namun untuk tetap mempertahankan *reach* BNI juga masih mempertahankan beberapa media konvensional *Above The Line, Below The Line, Out of Home*.



Analisis & Pembahasan Manajemen



REALISASI CAMPAIGN



Dalam rangka perwujudan perubahan BNI menjadi *Digital Financial Institution* dan BNI itu *Digital, moment of truth* di awal tahun 2018 ini adalah meluncurkan produk Yap! yang merupakan pelopor dari *QR payment* dengan tiga *source of fund* (*electronic money*, kartu debit dan kartu kredit). Dengan tiga *source of fund* ini, digitalisasi pembayaran yang dilakukan BNI memberikan keunikan, 'tanpa *top up*'. Di mana banyak produk sejenis namun hanya memiliki satu *source of fund*. Hal ini sesuai dengan semangat BNI ingin meningkatkan *customer experience*.

Customer experience Yap! pun diimplimentasikan di setiap *Iconic Event*. Salah satunya Java Jazz yang untuk ke-14 (empat belas) kalinya BNI kembali berpartisipasi sebagai salah satu pendukung utama penyelenggaraan *event* musik jazz berskala internasional tersebut.

Dimulai sejak pelaksanaan *pre-event* BNI Java Jazz Festival 2018 yaitu *Java Jazz on The Move x Yap! Fest*. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan *Java Jazz on The Move* di tahun 2018 ini diselenggarakan di luar kantor BNI agar masyarakat luas dapat turut berpartisipasi meramaikan *event* tersebut. BNI *Java Jazz on The Move* 2018 ini sukses menjadi *pra-event* Java Jazz Festival terbesar dan mengakuisisi banyak pengguna baru Yap! terbanyak serta turut mewujudkan *campaign* bahwa BNI itu Digital dan selalu relevan dengan *millennials*.

Selain itu, di ajang musik Java Jazz 2018 ini, Yap! juga diperkenalkan secara *massive* di seluruh transaksi yang berlangsung pada kegiatan Java Jazz, mulai dari *food truck*, *food court* sampai dengan pembelian *merchandise*. Yap! melengkapi penggunaan kartu *TapCash* yang selama ini sudah digunakan sebagai alat transaksi pembayaran utama di *event* tersebut.

Pada tahun 2018 ini BNI kembali menjadi bank *partner* dalam *event* Inacraft, terutama berpartisipasi dalam menyediakan berbagai layanan transaksi keuangan selama *event* berlangsung, seperti penggunaan Yap!, *TapCash*, dan mesin EDC bagi semua *tenant* Inacraft.

Penyediaan layanan tersebut merupakan suatu realisasi pesan perubahan yaitu mengubah *habit* transaksi pelanggan yang selama ini dominan uang tunai menjadi *cashless*. Selain sebagai alat pembayaran, pengunjung juga dibawa ke dalam *customer journey digital* di mana pengunjung dapat menggunakan Yap! dan *TapCash* sebagai tiket masuk Inacraft dengan harga spesial. Hadirnya layanan BNI Digital *Branch* juga akan memudahkan pengunjung dan nasabah untuk mencoba layanan pembukaan rekening BNI secara digital. Produk lain dari BNI yang ikut hadir dan memperkuat *branding* BNI selama Inacraft 2018 adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI untuk pembiayaan UMKM, BNI Taplus BNI serta

berbagai macam promosi penggunaan Kartu Kredit dan Kartu Debit BNI. BNI juga mendukung pembukaan rekening BNI Taplus dengan fasilitas Kartu GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dan EDC BNI yang digunakan sudah bisa menerima Kartu GPN.

Masih merupakan perwujudan dari semangat digital yang dapat memberikan berbagai keuntungan lebih banyak, lebih efisien, lebih mudah dan dapat dijangkau seluruh nasabah BNI, di 2018, perubahan yang dibawa oleh BNI adalah dalam hal pelaksanaan *Travel Fair*. Pada tahun-tahun sebelumnya, *support* BNI pada kegiatan *travel fair* selalu dilaksanakan secara *offline*, namun tahun ini BNI bekerja sama dengan Garuda Indonesia menyelenggarakan *Online Travel Fair* (GOTF 2018). Melalui GOTF, baik nasabah BNI maupun masyarakat luas mendapatkan penawaran berbagai tiket domestik maupun internasional melalui *channel-channel* digital (*website* maupun aplikasi) dan dapat menikmati promo khusus yang disediakan melalui transaksi *e-commerce* menggunakan BNI Kartu Debit, BNI Kartu Kredit dan tentunya Yap!.

Bentuk dari *customer journey* dan *experience digital* nasabah juga terlihat dari penyelenggaraan program BNI DigiMudik 2018 di mana pendaftarannya dilakukan secara *online*. Pada tahun ini, nasabah harus melakukan pendaftaran secara *online* untuk mendapatkan kuota *seat* langsung dari telepon genggamnya melalui situs resmi BNI atau *microsite* BNI DigiMudik. Selain itu peserta juga harus melakukan validasi keberangkatan dengan bertransaksi menggunakan aplikasi Yap! di seluruh Kantor Cabang BNI Area Jabodetabek.

Program ini menjadi sarana BNI dalam memaksimalkan program akuisisi dalam upaya meningkatkan DPK dan juga bentuk kepedulian BNI untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah transportasi. Sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN serta menjadi bagian dari rangkaian HUT BNI ke-72, BNI memberangkatkan 7.500 pemudik dengan moda transportasi bus *executive AC*, kereta api dan pesawat. Selain sebagai program *loyalty* untuk nasabah BNI, dalam program BNI DigiMudik 2018, BNI juga memberikan fasilitas mudik gratis untuk para santri serta karyawan pesantren.

Digital sendiri tentu erat kaitannya dengan *millennials*, sehingga BNI juga berpartisipasi mendukung *event-event* dengan target *audience millennials* seperti 90's festival atau pentas-pentas seni yang diadakan oleh SMA maupun kampus. Seperti *Cravier* yang diselenggarakan oleh salah satu sekolah menengah, seluruh transaksi penjualan maupun tiket masuknya sudah menggunakan produk digital BNI yaitu *TapCash* dan Yap!. Begitu juga dengan *event Jazz Goes To Campus* ataupun konser lain yang diikuti oleh BNI sebagai sponsor.



Selain banyak berpartisipasi dalam kegiatan olah raga seperti; ITB Marathon, UI Marathon, Plataran X-Trail dan dukungan terhadap tim *volley* BNI Taplus di Proliga, dalam rangka digitalisasi olah raga, BNI pun ikut mendukung BNI *Virtual Run* 2018. Dalam *event* ini, aktivitas lari yang umumnya dilakukan secara terbatas di suatu area kini dilaksanakan secara bersama-sama melalui *platform* digital seperti aplikasi ponsel, di mana para partisipan yang terlibat dapat lari pada periode yang telah ditentukan. Adapun produk BNI yang di-*highlight* dalam aktivitas ini adalah Yap! yang menjadi media untuk melakukan pendaftaran lomba). Puncak dari dukungan BNI di pentas olahraga nasional bahkan internasional adalah partisipasi BNI dalam *Asian Games* 2018.

Dalam perhelatan terbesar di Asia tersebut, BNI menunjukkan eksistensinya sebagai satu-satunya "*Official Prestige Digital Banking Partner*". Dukungan BNI tersebut meliputi transaksi digital baik melalui penjualan tiket secara *online* maupun transaksi *cashless on event* dengan penggunaan Kartu Debit, Kartu Kredit, *TapCash* dan Yap! dan juga penggunaan EDC BNI dalam segala aspek penjualan selama *Asian Games* 2018 berlangsung, serta layanan *money changer* yang tidak hanya terbatas di sekitar *venue* pelaksanaan *Asian Games* 2018. Selain itu BNI juga mendukung para atlet dan *official* dari *Asian Games* dengan menerbitkan VA Debit Card untuk menyalurkan uang saku dan sebagai alat transaksi bagi para atlet asing sehingga mereka tetap bisa menikmati transaksi selama persinggahan mereka di Indonesia. Dukungan BNI terhadap *cashless society* inilah bentuk perwujudan transformasi BNI itu Digital.

Selain mempermudah transaksi perbankan selama *Asian Games* 2018, BNI juga turut memberikan kontribusi melalui program filantropi bagi para atlet yang dahulu telah berjasa mengharumkan nama Indonesia di kancah olahraga dunia. Atlet-atlet seperti Ellyas Pical, Djunaedi Abdillah, Yustedjo Tarik, Tati Soemirah dan Lely Sampoerna dibuatkan kartu *TapCash* edisi khusus yang seluruh hasil penjualan kartu edisi Indonesia *Sport Legend* ini akan diserahkan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan BNI.

Selain menysasar segmen *mass*, BNI juga tetap memperhatikan segmen *affluent* dengan mendukung penyelenggaraan *Indonesian Masters* 2018 di penghujung tahun 2018. Partisipasi BNI pada turnamen golf berskala internasional ini sejalan dengan misi memajukan olahraga Indonesia dan memberikan kesempatan kepada pegolf muda Indonesia untuk bermain dalam kancah internasional. Seiring juga dengan produk dan layanan nasabah *Emerald* yang saat ini juga ditujukan kepada '*young mass affluent*' dari nasabah *Emerad* BNI. Semangat digital dan tetap relevan dengan kaum '*young mass affluent*' inilah yang tetap dibawa dalam *event* ini.

ACHIEVEMENT

Sepanjang tahun 2018 BNI mendapatkan beragam penghargaan antara lain sebagai berikut:

1. *Top Brand* 2018 kategori *Banking and Finance*:
 - a. Tabungan Junior - BNI Taplus Anak
 - b. Tabungan Berjangka - BNI Tapenas
2. *BUMN Marketeers Awards* 2018:
 - a. *Bronze Winner – Promising Company in Strategic Marketing*
 - b. *Silver Winner – Promising Company in Branding Campaign*
3. *Indonesia Banking Awards (IBA)* 2018:
 - a. *Most Reliable Bank*
 - b. *Best Bank in Digital Services*
 - c. *Diversity of the Board*

DISIPLIN OPERASIONALISASI UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS

FOKUS STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS

Masih berlandaskan visi membentuk *sales* BNI yang yang *highly skilled, knowledgeable*, dan memiliki *positive attitude*, selama periode 2018 BNI secara berkelanjutan terus membangun dan menanamkan kebiasaan dan karakter Budaya Penjualan (*Sales Culture*) yang kuat. Pola aktivitas penjualan yang dilakukan disertai juga dengan *monitoring* dan pengawalan secara harian melalui disiplin operasionalisasi yang merupakan pola eksekusi penjualan yang dirangkum dalam satu aplikasi *Sales Activity & Performance Management (SAPM)* dengan tujuan mencapai turunan angka hitungan target besaran yang sudah ditetapkan. Keseluruhan hal-hal tersebut demi menciptakan ritme operasional yang memberikan dampak bagi pencapaian strategi dan pertumbuhan bisnis BNI.

Strategi fokus juga dilakukan dengan desain formulasi *Key Performance Indicator (KPI)* yang mengacu kepada fokus strategi, pada periode tahun 2018 desain KPI mengacu kepada upaya pencapaian target penjualan produk yang memiliki *margin yield* besar.

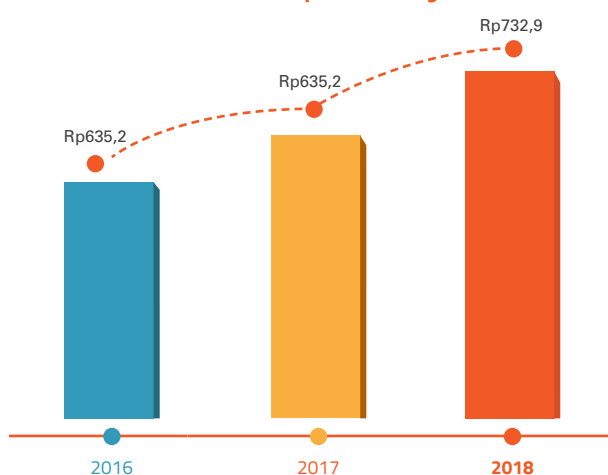
Dari implementasi pola fokus strategi yang dilakukan, terdapat peningkatan rata-rata pencapaian per *sales* di tahun 2018, seperti untuk jenis produk yang memang mendapatkan atensi khusus sehubungan dengan tipe profitabilitas produk yang memiliki *margin yield* besar, di mana tumbuh 15,4% dibanding tahun 2017, sebagaimana tabel dan grafik berikut:



Tabel Rata-Rata Pencapaian **Booking BNI Fleksi**

Subyek	2018 (Rp juta)	2017 (Rp juta)	2016 (Rp juta)
Rata-Rata pencapaian booking BNI Fleksi per sales per bulan	732,9	635,2	563,9

Grafik Rata-Rata Pencapaian **Booking BNI Fleksi**

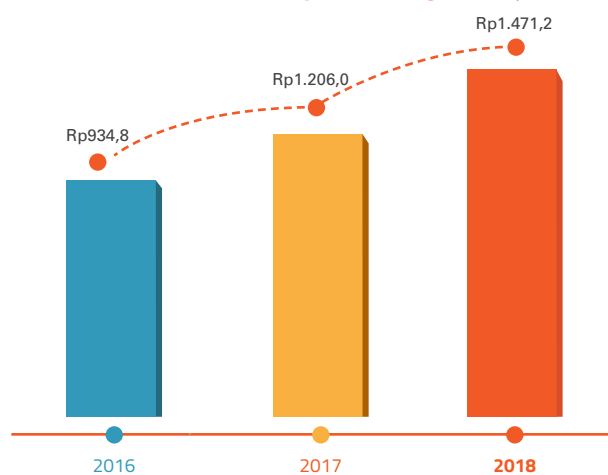


Strategi fokus lainnya juga diimplementasikan terhadap produk utama dari implementasinya juga terdapat peningkatan rata-rata pencapaian per sales di tahun 2018 dibanding tahun 2017 yaitu tumbuh 22,0%, sebagaimana tabel dan grafik berikut:

Tabel Rata-Rata Pencapaian **Booking BNI Griya**

Subyek	2018 (Rp juta)	2017 (Rp juta)	2016 (Rp juta)
Rata-rata pencapaian booking BNI Griya per sales per bulan	1.471,2	1.206,0	934,8

Grafik Rata-Rata Pencapaian **Booking BNI Griya**



STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS

- Strategi Peningkatan Produktivitas Sales
 - Mengoptimalkan *sales management* melalui aplikasi *Sales Activity & Performance Management (SAPM)*
 - Pemenuhan Jumlah dan Kompetensi *Supervisor* dan *Sales*
 - Coaching, mentoring* dan pendampingan (*transfer knowledge*) secara periodik kepada *Sales* dan *Supervisor Sales*
 - Pemberian *Leads* potensial dan *monitoring*-nya, baik *funding* maupun *lending*
 - Program Motivasi *Sales* baik untuk akuisisi maupun retensi
- Strategi Peningkatan Tabungan
 - Meningkatkan ekspansi tabungan dengan pengelolaan nasabah *business banking* dengan *value chain* dan ekosistem bisnisnya
 - Memperluas Ekspansi Tabungan BNI melalui akuisisi Milenial
 - Ekspansi dan Akuisisi Tabungan BNI melalui segmen wirausaha dan pegawai
- Strategi peningkatan *Booking BNI Fleksi*
 - Meningkatkan *booking BNI Fleksi* melalui *database existing payroll Selected Partner*, terutama nasabah *business banking* dengan *value chain* dan ekosistem bisnisnya
 - Meningkatkan *booking Fleksi* dengan mekanisme *Business to Business (B2B)* kepada BUMN dan Kementerian
 - Akuisisi BNI Fleksi melalui *Digital Channel*
 - Akuisisi BNI Fleksi dengan memaksimalkan potensi nasabah Pra dan Purna Pensiun BNI Fleksi Pensiun (BFP)
- Strategi Peningkatan *Booking BNI Griya*
 - Meningkatkan *booking BNI Griya* melalui *primary market*, termasuk nasabah *Business Banking* dengan *value chain* dan ekosistem bisnisnya.
 - Meningkatkan *booking BNI Griya* melalui *Secondary Market*
 - Memaksimalkan distribusi *Leads BNI Griya* melalui aplikasi *Sales Activity and Performance Management (SAPM)*
 - Ekspansi *booking BNI Griya* dengan mendukung Program Pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
- Strategi peningkatan Kartu Kredit
 - Peningkatan Kartu Kredit pada segmen *business banking* dengan *value chain* dan ekosistem bisnisnya.
 - Peningkatan Kartu Kredit melalui segmen Milenial
 - Akuisisi Kartu Kredit melalui *Canvassing* dan *Event Exhibition*
 - Akuisisi Kartu Kredit dengan memaksimalkan Kapasitas *Staff BNI*
 - Optimalisasi data untuk *Upselling Existing Card Holder*
 - Memperluas akuisisi Kartu Kredit melalui *Website Partner*



RENCANA KERJA 2019

Ritme operasional 2018 menjadi pola kerja yang akan lebih ditingkatkan dan dioptimalkan di tahun 2019, dengan menyesuaikan kepada hal-hal yang menjadi *lesson learned* maupun perkembangan yang terjadi di periode sebelumnya. Salah satu penyesuaian berdasarkan perkembangan bisnis yaitu upaya menggerakkan *sales* memiliki orientasi kepada implementasi strategi yang terkait dengan transaksional, di antaranya dengan lebih mengoptimalkan fitur-fitur transaksional perbankan BNI yang berbasis digital, seiring

dengan landasan desain strategi baik yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan berpedoman untuk memberikan solusi finansial yang menyeluruh melalui *value chain*, *close loop transaction* dan pembentukan ekosistem bisnis.

PANGSA PASAR

Analisis pangsa pasar diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank.

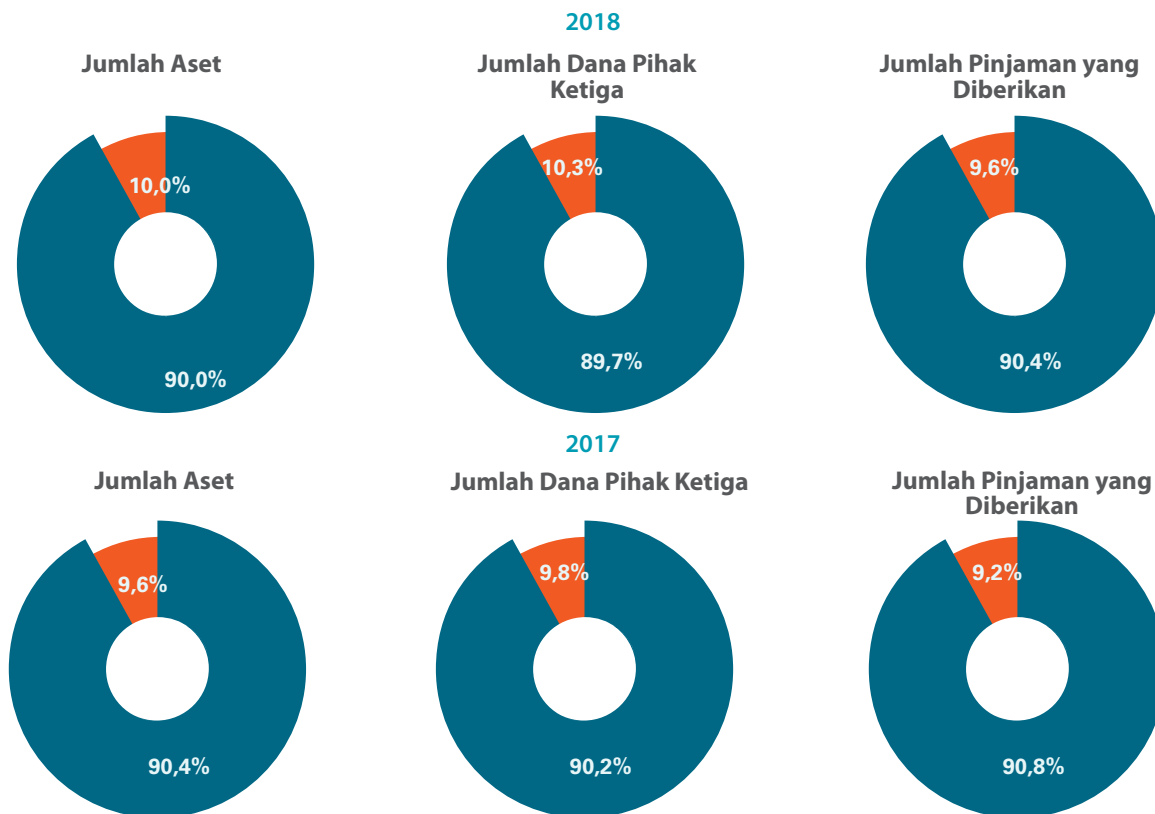
Tabel Pangsa Pasar

Uraian		2018	2017	2016
Jumlah Aset	Industri (Rp miliar)	8.068	7.388	6.730
	BNI (Rp miliar)	809	709	603
	Pangsa Pasar	10,0%	9,6%	9,0%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Industri (Rp miliar)	5.630	5.289	4.837
	BNI (Rp miliar)	579	516	436
	Pangsa Pasar	10,3%	9,8%	9,0%
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	Industri (Rp miliar)	5.358	4.782	4.413
	BNI (Rp miliar)	513	441	393
	Pangsa Pasar	9,6%	9,2%	8,9%
PERBANDINGAN RASIO KEUANGAN DENGAN RATA-RATA INDUSTRI BANK UMUM				
CAR (%)	Industri	23,0%	23,2%	22,9%
	BNI	18,5%	19,3%	19,4%
BOPO (%)	Industri	77,9%	78,6%	82,2%
	BNI	70,1%	70,5%	73,6%
ROA (%)	Industri	2,6%	2,5%	2,2%
	BNI	2,8%	2,8%	2,7%
LDR (%)	Industri	94,8%	90,0%	90,7%
	BNI	88,8%	90,0%	90,4%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Per Desember 2018



Grafik Pangsa Pasar BNI Dibandingkan Industri



PANGSA PASAR BERDASARKAN ASET

Selama tiga tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan 2018, BNI telah berhasil mendudukkan posisinya sebagai salah satu pemain penting dalam dunia perbankan Indonesia. Salah satu indikatornya dengan terus meningkatnya pangsa pasar BNI berdasarkan asetnya yang mencapai 10,0% di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 yang hanya meningkat 9,0% dan 9,6%. Peningkatan tersebut didorong oleh keberhasilan BNI dalam menghimpun dana masyarakat dan mengelolanya menjadi aset keuangan perusahaan.

PANGSA PASAR BERDASARKAN DANA PIHAK KETIGA

Di tengah melemahnya pasar dana pihak ketiga di Indonesia yang disebabkan oleh kondisi eksternal secara makro ekonomi, BNI membuktikan konsistensinya untuk bertahan dan tetap meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga sehingga dapat bersaing dengan kompetitornya di perbankan nasional. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pangsa pasar dana pihak ketiga BNI mencapai 10,3% di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 dan 2016 yang tercatat hanya sebesar 9,8% dan 9,0%.

PANGSA PASAR BERDASARKAN PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Berbeda dengan perolehan pangsa pasar aset dan dana pihak ketiga yang mencapai dua digit, pangsa pasar pinjaman yang diberikan BNI di tahun 2018 tercatat 9,6%. Pencapaian 2018 tersebut masih menjadi yang terbaik bila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016 yang masing-masing tercatat 9,2% dan 8,9%. Hal ini merupakan salah satu strategi BNI untuk terus tumbuh dengan dibarengi oleh kualitas yang juga lebih baik untuk menjaga kelangsungan usaha di masa yang akan datang.

PERBANDINGAN RASIO KEUANGAN DENGAN RATA-RATA INDUSTRI BANK UMUM

Berdasarkan rasio keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal (CAR) di 2018 mencapai 18,5%, menurun dibandingkan tahun 2017 dan masih lebih rendah dari industri. Sedangkan beban operasional per pendapatan operasional (BOPO) mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 70,1% dibandingkan tahun 2017 serta masih lebih rendah dibandingkan



industri. Imbal hasil atas aset (ROA) relatif stabil sebesar 2,8% di tahun 2018 dan masih lebih tinggi dari industri. Selain itu, tingkat likuiditas (LDR) mengalami penurunan sebesar 88,8% di tahun 2018 dan masih lebih rendah dari industri.

PROSPEK USAHA 2019

PERSPEKTIF GLOBAL DAN NASIONAL

Pada tahun 2019, beberapa lembaga dunia sepakat bahwa perekonomian global akan ditopang oleh AS dan negara-negara berkembang, seperti India, ASEAN-5 (terutama Indonesia dan Philipina), Brasil serta Mexico²¹. Dari faktor eksternal, terdapat potensi kenaikan FFR di tahun 2019 apabila perekonomian Amerika terus melanjutkan pertumbuhan sesuai dengan harapan dan realisasi inflasi Amerika yang telah mencapai target 2%. Banyak pihak menyakini, the Fed akan kembali menaikkan FFR maksimal sebanyak 2 kali atau setidaknya sekali.

Selain itu, penghentian *Quantitative Easing* (QE) baik di Eropa maupun Jepang akan berdampak pada minimnya dana asing yang masuk di pasar keuangan Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya. Perang dagang Amerika Serikat dan China juga akan terus berlangsung dan menimbulkan dampak ikutan. Dampak negatif yang mungkin terjadi adalah penurunan kinerja ekspor Indonesia ke China dan Amerika Serikat yang merupakan 2 (dua) negara tujuan utama ekspor Indonesia. Namun potensi relokasi pabrik dari China ke Indonesia untuk menghindari perang tarif dapat berimbas positif bagi perekonomian Indonesia.

Rencana Eropa yang akan melarang penggunaan *biofuel* berbasis minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) mulai 2030²². Selain itu India menaikkan tarif bea masuk CPO Indonesia dari 30% menjadi 44%²³. Pelarangan ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa dan penerapan tarif oleh India merupakan contoh nyata yang perlu diantisipasi agar tidak merugikan Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi China yang menurut IMF akan melambat hingga 6,2% di tahun 2019 juga berimbas ke Indonesia karena China merupakan pasar utama ekspor Indonesia. Permintaan ekspor dari Indonesia diperkirakan akan menurun sehingga menyebabkan potensi defisit neraca perdagangan yang semakin melebar.

Mengingat pertumbuhan ekonomi global masih dalam tekanan dan ketidakpastian, maka sumber pertumbuhan ekonomi yang utama berasal dari dalam negeri. Di Indonesia, Pemerintah akan terus berfokus mendorong terjaganya daya beli masyarakat melalui pengendalian tingkat inflasi, dan berbagai program subsidi, baik subsidi energi maupun non-energi. Pemerintah juga berkomitmen memberikan

perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk berpenghasilan rendah melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial (Bansos) Pangan, Bidikmisi (Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi), Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Kredit Ultra Mikro²⁴. Pemerintah akan tetap melanjutkan pembanguan infrastruktur dengan terobosan pembiayaan kreatif yang melibatkan peran BUMN dan swasta melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan skema *Availability Payment* (AP). Terdapat sebanyak 2.007 kilometer pembangunan/rekonstruksi/pelebaran jalan, 4 (empat) unit pembangunan bandara baru, 162 ribu hektar jaringan irigasi baru, 27.607 meter pembangunan dan rehabilitasi jembatan, 415 km² pembangunan/penyelesaian rel KA serta 48 unit bendungan²⁵. Selain itu, Pemerintah akan melanjutkan subsidi bunga KUR senilai Rp12 triliun dengan target penyaluran KUR tahun 2018 sebesar Rp120 triliun dengan suku bunga 7% yang diperuntukkan untuk pembiayaan sektor produktif bagi UMKM dan TKI²⁶. Subsidi pupuk akan dilakukan melalui Kartu Tani yang mencapai Rp29,5 triliun untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan nasional²⁷. Adapun subsidi bunga perumahan akan diberikan Pemerintah hingga Rp3,5 triliun bagi kredit perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk 100 ribu unit rumah²⁸.

Untuk mendorong perekonomian Indonesia, Pemerintah telah menetapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru, yaitu sektor Pariwisata. Pariwisata menjadi andalan Pemerintah karena mampu mendapatkan devisa secara cepat seiring besarnya potensi pariwisata di Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lapangan usaha terkait sektor pariwisata meliputi Hotel Bintang; Hotel Melati; Jasa Akomodasi Lainnya; Penyediaan Makan Minum Lainnya; Restoran/Rumah Makan; Angkutan Jalan Rel; Angkutan Jalan Tidak dalam Trayek untuk Penumpang; Angkutan Sungai & Danau; Jasa Perjalanan Wisata; Kawasan Pariwisata dan Penyediaan Sarana Wisata Tirta Kawasan Pariwisata; Perpustakaan, Arsip, Museum & Kegiatan Kebudayaan Lainnya²⁹. Pada tahun 2018, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia sebanyak 18 juta orang atau meningkat dibandingkan tahun 2017 sebanyak 14 juta orang dan tahun 2016 sebanyak 12 juta orang³⁰.

Beberapa peristiwa yang terjadi di tahun 2019 dan akan memengaruhi perekonomian Indonesia di antaranya;

1. Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara bersamaan. Sebelumnya, pelaksanaan kedua pemilu tersebut dilakukan secara bergantian. Untuk pertama kalinya, Indonesia akan menggelar pemilu serempak pada 17 April 2019 mendatang. Suhu politik diperkirakan akan meningkat menjelang pelaksanaan pencoblosan. Tidak seperti negara lainnya, secara umum pelaksanaan pemilu tidak berdampak



- negatif bagi perekonomian. Namun, hingga keputusan pemenang pemilu ditetapkan nampaknya semua pihak khususnya investor dan pengusaha bersikap menunggu sebelum mengambil keputusan bisnis. Pertumbuhan kredit pada triwulan I – 2019 akan sedikit tertahan tetapi diharapkan akan kembali meningkat setelah pelaksanaan Pileg dan Pilpres.
2. Pada tahun 2019 merupakan batas *holding period* 3 tahun atas dana repatriasi hasil *tax amnesty* yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2016. Hal ini sesuai dengan aturan pada UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. Selama ini, dana tersebut harus ditempatkan dalam instrumen investasi dengan batasan waktu 3 (three) tahun harus berada dalam sistem keuangan NKRI. Setelah itu, aset tersebut kembali menjadi hak wajib pajak peserta *tax amnesty* untuk tetap diinvestasikan di Indonesia atau dibawa kembali ke luar negeri. Apabila di dalam negeri tidak terdapat instrumen untuk investasi yang menarik, maka terdapat potensi larinya dana tersebut ke luar negeri. Misalnya dengan memberi imbal hasil yang tinggi. Jika hal ini terjadi maka akan berdampak pada sektor keuangan dan perekonomian Indonesia.
 3. Kondisi likuiditas domestik diperkirakan cenderung ketat karena beberapa hal. Pertama, pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK yang tercermin dari tingginya *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Berdasarkan peraturan No. 17/11/PBI/2015, batas bawah LDR adalah sebesar 78% dan batas atasnya sebesar 92%. Kedua, Pemerintah semakin aktif menerbitkan obligasi ritel yang dapat dibeli oleh perorangan sehingga terdapat potensi *switching* dari simpanan di bank (baik deposito maupun tabungan) menjadi obligasi ritel. Saat ini obligasi ritel yang

- dimiliki Pemerintah terdiri dari Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST). Jumlah penerbitan obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) Ritel di tahun 2019 akan mencapai Rp60 triliun. Untuk mempermudah masyarakat, Pemerintah akan menerbitkan SBN secara *online* dengan sistem *first come first serve*. Apabila likuiditas mengeat maka akan timbul persaingan merebutkan DPK antar perbankan. Hal ini akan memengaruhi pertumbuhan dana di tahun 2019.
4. Sejalan dengan penerapan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), BI terus mendorong penyaluran kredit perbankan sekaligus memperluas sumber pendanaan dan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga. Beragam alternatif pembiayaan ini menjadi tantangan bagi perbankan dalam melakukan fungsi intermediasi. Rendahnya biaya penerbitan obligasi akan mendorong perusahaan memilih pembiayaan melalui obligasi. Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan nasional menjadi persoalan jika tidak tumbuh seperti tahun 2018 yang hingga Desember 2018 mampu tumbuh sebesar 11,97%³¹.

²¹International Monetary Fund World Economy Outlook, Oktober 2018

²²CNBC Indonesia: Eropa Melarang Biofuel 2030, 18 Juni 2018

²³Market.bisnis.com: India Kembali Kerek Pajak Impor CPO Menjadi 44%, 5 Maret 2018

²⁴Ibid

²⁵Ibid

²⁶Ibid

²⁷Ibid

²⁸Ibid

²⁹Ibid

³⁰Biro Pusat Statistik

³¹OJK

Tabel Proyeksi Asumsi Makro dan Mikro

No	Asumsi	Tahun Proyeksi		
		2019	2020	2021
ASUMSI MAKRO				
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,4	5,2 – 5,4	5,3 – 5,5
2	Inflasi (%)	3,0 – 4,5	3,0 – 4,0	3,0 – 4,0
3	Nilai Tukar Rupiah/Dolar Amerika Serikat (Rp)	14.800 – 15.200	14.800 – 15.200	14.800 – 15.200
4	BI 7 Days Repo Rate	5,5 – 6,5	5,5 – 7,0	5,5 – 7,0
ASUMSI MIKRO				
1	Pertumbuhan Kredit (%)	10,0 – 12,0	10,0 – 12,0	10,0 – 12,0
2	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (%)	8,0 – 10,0	8,0 – 10,0	8,0 – 10,0

PROSPEK USAHA BNI

Prospek usaha BNI dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi faktor internal, kemampuan BNI untuk mengerahkan dan mengalokasikan sumber daya serta mempertahankan dan mengembangkan kapabilitas inti yang dimiliki menjadi faktor penting dalam mengantisipasi dan mengambil peluang bisnis dari kondisi eksternal yang ada.

Faktor eksternal yang memengaruhi BNI adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan regulasi. Secara umum kondisi politik cukup kondusif bagi dunia usaha dan BNI selalu siap mengantisipasi dinamika yang ada. Kondisi sosial juga mendukung pembangunan dengan adanya peta demografi yang menunjukkan adanya kekuatan



angkatan muda yang memadai untuk dikembangkan serta diperkirakan tidak terdapat gejala horisontal dan vertikal yang signifikan mengganggu aktivitas sektor riil. Dari sisi teknologi, penetrasi internet dan penggunaan gawai yang meluas menyebabkan perubahan preferensi nasabah untuk pemenuhan kebutuhan nasabah tersebut yang berakibat adanya disrupsi-disrupsi model bisnis pada berbagai sektor industri. Dari sisi lingkungan dan regulasi, upaya untuk meminimalisir risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola harus dilakukan lebih transparan dengan adanya regulasi penerapan keuangan berkelanjutan pada industri jasa keuangan dan emiten.

Kondisi perekonomian dunia akan berpengaruh signifikan terhadap ekonomi dan pertumbuhan Indonesia melalui mitra dagang dan transaksi yang tercermin dalam neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia. Kondisi pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka pendek ke depan diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan periode ekonomi jangka pendek periode sebelumnya. Hal tersebut disertai dengan beberapa faktor ketidakpastian berupa dinamika persaingan dagang antar negara, dinamika politik antar negara, dan implementasi kebijakan suku bunga acuan negara-negara maju selain dinamika pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia itu sendiri.

Walaupun kondisi eksternal tersebut akan sangat memengaruhi BNI dalam menjalankan fungsinya dan mencapai target kinerjanya, dunia usaha menawarkan banyak peluang pertumbuhan yang sangat baik pada tahun-tahun mendatang bagi perusahaan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan lincah dalam memanfaatkan peluang tersebut. Kemampuan adaptasi dan kelincahan BNI tersebut telah dibuktikan dalam data historis beberapa tahun terakhir. Pada beberapa tahun terakhir dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan industri keuangan yang moderat, BNI mampu tumbuh lebih tinggi dari pada industri, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel Pertumbuhan Kredit

Pertumbuhan Kredit	2018	2017	2016	2015
BNI	15,9%	12,0%	20,9%	17,4%
Perbankan	12,9%	8,2%	7,9%	10,4%

Dari struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulanan tahun 2017-2018, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar adalah dari Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian (termasuk Kehutanan dan Perikanan), Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, dan Informasi Komunikasi dengan kontribusi rata-rata masing-masing adalah 20%, 13%, 13%, 10,5%, 5,5%, dan 3,8% secara berurutan. Struktur ekonomi tersebut merupakan peluang bagi BNI untuk mengembangkan bisnisnya yang didukung

dengan kapabilitas digital.

Fokus pembiayaan BNI akan menyesuaikan dengan potensi PDB yang tercermin dalam realisasi 2018. Pembiayaan Segmen Korporasi BNI terbesar diberikan kepada Sektor Industri Manufaktur, Pertanian, dan Jasa Dunia Usaha dengan komposisi terhadap portofolio masing-masing adalah 26%, 15%, dan 13%. Walaupun Sektor Industri Jasa Dunia Usaha bukan salah satu kontributor tertinggi terhadap PDB, namun merupakan Sektor Industri tersebut adalah salah satu yang mempunyai pertumbuhan tertinggi. Pada periode yang sama, Segmen Komersial BNI memberikan pembiayaan terbesar kepada Sektor Industri Perdagangan, Manufaktur, dan Transportasi dan Pergudangan dengan komposisi portofolio masing-masing 31%, 26%, dan 10%. Segmen Kecil BNI mempunyai pembiayaan terbesar pada Perdagangan, Manufaktur, dan Pertanian dengan komposisi pembiayaan sebesar 57%, 11%, dan 10%.

Dalam upaya untuk selalu relevan dalam era perubahan teknologi termasuk upaya menjadi pionir dalam pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan perubahan preferensi nasabah akibat penetrasi internet dan gawai, maka BNI telah dan akan terus melakukan investasi yang signifikan dalam pengembangan teknologinya. Aplikasi teknologi informasi akan dapat dirasakan keunggulannya oleh nasabah baik perorangan maupun badan usaha atau lembaga lain pada saat menggunakan jasa keuangan BNI dan diharapkan akan meningkatkan keterikatan pada BNI sehingga dapat memberikan nilai tambah tidak hanya bagi BNI namun juga nasabahnya pada jangka panjang. Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan antara lain digitalisasi proses bisnis yang akan berdampak pada peningkatan kualitas, kecepatan layanan, transparansi proses dan interoperabilitas sistem. Selain digitalisasi proses, pengembangan *platform* dan aplikasi transaksi yang memungkinkan interaksi antar nasabah baik *Business to Business* (B to B), *Business to Customer* (B to C), maupun *Customer to Customer* (C to C) akan dikembangkan sehingga akan meningkatkan *user experience* dalam setiap perjalanan nasabah berhubungan dengan BNI. Pengembangan fitur dan aplikasi seperti Yap! atau pun *cash management system* akan terus dilakukan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan mengoptimalkan kemampuan *data analytics*.

Dukungan terhadap program-program pemerintah akan terus dilaksanakan karena selain BNI adalah salah satu *national agent of development*, namun juga program pemerintah tersebut beserta dengan seluruh masyarakat sebagai pelakunya dapat menjadi potensi bisnis bagi BNI. Dukungan terhadap strategi pembangunan pemerintah lintas sektor seperti pembangunan infrastruktur, pariwisata, transportasi, ataupun pertanian akan terus dilakukan. Kontribusi bisnis dari dukungan tersebut cukup signifikan bagi BNI baik untuk penyaluran pembiayaan maupun untuk



penghimpunan dana serta *fee based income*. Program-program pemerintah lain seperti Kredit Usaha Rakyat, Inklusi Keuangan, Laku Pandai, dan bantuan sosial akan dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan meningkatkan bisnis BNI secara keseluruhan.

STRATEGI JANGKA PANJANG 2019-2023

Dalam rangka mencapai visi BNI menjadi “Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja”, BNI telah menetapkan *Corporate Plan 2019-2023* dengan aspirasi BNI pada tahun 2023 yaitu “Menjadi Salah Satu Lembaga Keuangan paling *Profitable* di Indonesia”. Aspirasi tersebut akan dicapai melalui strategi *BEYOND Traditional Financial Services*, yaitu:

B, “Business Community’s Financial Institution of Choice”

Mengoptimalkan kapabilitas untuk menjadi pilihan komunitas bisnis.

E, “Ecosystem Orchestrator”

Mengorkestrakan ekosistem bisnis potensial.

Y, “Your Preferred Personal Financial Partner”

Mengoptimalkan layanan dan solusi bisnis konsumen agar menjadi bank utama dalam transaksi nasabah

O, “Organizationally Ready for The Future”

Meningkatkan kapabilitas organisasi dan sumber daya manusia dalam menangkap peluang bisnis yang baru.

N, “National Agent of Development”

Mengoptimalkan program pemerintah sebagai basis pertumbuhan.

D, “Digital and Data Driven Institution”

Mengoptimalkan pengembangan bisnis yang di-drive oleh *digital* dan *data analytics*.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA 2019

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia dan domestik, perkembangan teknologi di era digital, perubahan

preferensi nasabah, kebijakan dari otoritas (moneter, perbankan, dan fiskal) dan rencana perbaikan proses bisnis internal, maka pada tahun 2019, sesuai dengan rencana jangka panjang yang tertuang dalam *Corporate Plan 2019- 2023*, BNI akan fokus memperkuat bisnis inti dengan kapabilitas digital. Indikator dari kebijakan tersebut adalah nilai perusahaan bagi investor, ukuran profitabilitas, tingkat pengembalian investasi, transaksi digital, layanan yang unggul, *engagement* pegawai, kapabilitas digital, dan sinergi antar unit dan perusahaan anak. Pertumbuhan bisnis tersebut tentu saja dengan memperhatikan tata kelola yang baik (*good corporate government*), prinsip kehati-hatian perbankan, batasan regulasi, dan aspirasi pemegang saham. Dari sisi batasan regulasi, BNI bermaksud untuk tetap berada di area yang menjadi arah regulasi, antara lain rasio NPL jauh di bawah 5% dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di atas ketentuan sesuai dengan profil risiko di mana BNI berada. Sesuai dengan aspirasi pemegang saham, BNI menargetkan sasaran-sasaran keuangan yang lebih baik dari pencapaian tahun sebelumnya dan/atau lebih tinggi dari rata-rata industri. Sasaran-sasaran keuangan tersebut adalah profitabilitas, *market share* baik pinjaman maupun dana pihak ketiga, dan tercapainya program-program yang diamanatkan pemerintah kepada BNI. Selain itu, nilai saham ditargetkan untuk lebih baik dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019.

Untuk mencapai target-target tersebut, strategi BNI pada tahun 2019 secara garis besar tertuang dalam Kebijakan Manajemen BNI tahun 2019 sebagai berikut:

- Meningkatkan bisnis korporasi dengan menyediakan solusi keuangan terpadu dalam suatu ekosistem bisnis.
- Meningkatkan produktivitas bisnis konsumen yang fokus pada *supply chain* nasabah korporasi, perbaikan proses bisnis, dan perbaikan kualitas kredit.
- Meningkatkan ekspansi bisnis kecil melalui digitalisasi proses bisnis dan perbaikan kualitas kredit serta mendukung pemerataan ekonomi nasional.
- Akselerasi bisnis konsumen fokus pada preferensi nasabah dengan memanfaatkan *data analytics*.
- Meningkatkan CASA dan FBI melalui peningkatan transaksi *digital*, *strategic partnership* dan pengembangan model bisnis baru.
- Meningkatkan kapabilitas BNI Grup melalui peningkatan sinergi, inisiasi *agile organization*, serta *big data* dan *analytics*.



TINJAUAN KEUANGAN



Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tahun 2018 dan 2017 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, dan Surja (Member of Ernst and Young Global) dan mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.



Analisis &
Pembahasan
Manajemen



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

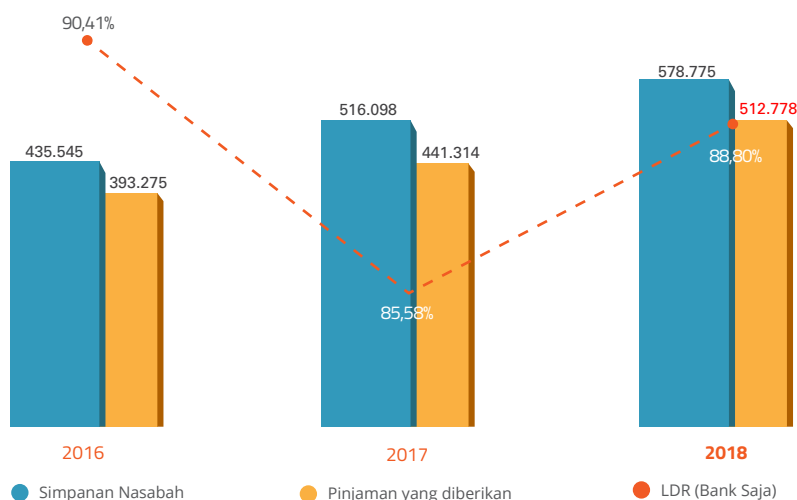
Uraian	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018	
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(%)
ASET					
Kas	14.044	11.578	11.168	2.466	21,3
Giro pada Bank Indonesia	35.591	32.701	30.147	2.891	8,8
Giro pada Bank Lain – neto	13.134	21.335	6.298	(8.201)	(38,4)
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia – neto	39.324	28.593	33.662	10.732	37,5
Efek – Efek – neto	32.044	36.050	23.765	(4.006)	(11,1)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	679	1.665	(679)	(100,0)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya – neto	24.587	15.701	8.932	8.886	56,6
Tagihan akseptasi – neto	20.295	18.106	14.724	2.189	12,1
Tagihan derivatif – neto	605	217	250	388	179,1
Pinjaman yang diberikan	512.778	441.314	393.275	71.465	16,2
Cadangan kerugian penurunan nilai atas Pinjaman yang diberikan	(14.892)	(14.524)	(16.681)	(368)	2,5
Obligasi Pemerintah	86.791	79.849	63.006	6.942	8,7
Pajak dibayar dimuka	1.624	623	620	1.002	160,9
Beban dibayar dimuka	2.337	2.318	2.411	19	0,8
Penyertaan saham – neto	604	713	57	(110)	(15,3)
Aset lain-lain - neto	11.900	10.381	6.429	1.519	14,6
Aset tetap- neto	26.127	22.805	21.972	3.322	14,6
Aset pajak tangguhan – neto	1.676	891	1.332	785	88,2
TOTAL ASET	808.572	709.330	603.032	99.242	14,0
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas Segera	4.160	4.868	3.276	(707)	(14,5)
Simpanan Nasabah*	578.775	516.098	435.545	62.677	12,1
Simpanan dari Bank Lain*	14.233	12.177	10.801	2.056	16,9
Pinjaman yang Diterima *	52.025	44.722	32.388	7.302	16,3
Liabilitas derivatif	322	114	411	208	182,9
Efek-Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	21.524	2.390	3.765	19.134	800,6
Liabilitas akseptasi	4.417	4.507	4.359	(91)	(2,0)
Beban yang masih harus dibayar	876	971	1.047	(95)	(9,8)
Utang pajak	481	80	151	401	498,2
Imbalan kerja	3.512	4.094	3.503	(582)	(14,2)
Penyisihan	178	192	156	(15)	(7,7)
Liabilitas lain-lain	14.608	14.731	11.149	(122)	(0,8)
Efek-efek yang diterbitkan*	2.987	3.482	3.482	(495)	(14,2)
Efek-efek Subordinasi	100	-	-	100	-
TOTAL LIABILITAS	698.198	608.427	513.778	89.771	14,8



Uraian	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018	
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(%)
Simpanan nasabah	26.603	23.350	20.092	3.253	13,9
Simpanan dari bank lain	358	494	489	(136)	(27,5)
Sukuk <i>Mudharabah</i> yang diterbitkan	-	496	496	(496)	(100,0)
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	26.961	24.340	21.077	2.621	10,8
Kepentingan non pengendali	2.297	2.311	2.097	(14)	(0,6)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	108.077	98.592	87.157	9.485	9,6
TOTAL EKUITAS	110.374	100.903	89.254	9.470	9,4
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS	808.572	709.330	603.032	99.242	14,0

*Termasuk di dalamnya dana syirkah temporer

Grafik Pertumbuhan Pinjaman yang Diberikan dan Simpanan Nasabah



ASET

Tahun 2018 telah memasuki babak akhir, para pengamat ekonomi dan Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 mencapai kisaran 5,17% dan tingkat inflasi sesuai target Bank Indonesia sebesar 3,5% di mana tingkat inflasi November 2018 sebesar 3,23% (YoY). Struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu pertanian, kehutanan/perikanan, dan perdagangan. Sampai dengan triwulan II 2018, industri pengolahan memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 0,91%, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 0,69%, dan konstruksi sebesar 0,57%.

Semakin tertekannya Rupiah terhadap Dolar Amerika di pertengahan 2018 yang masih terus berlanjut sampai dengan akhir tahun menyebabkan berpindahnya modal asing dari sistem keuangan Indonesia, dengan defisit neraca transaksi terus bergulir yang ditandai oleh defisit neraca ekspor impor yang mendominasi perekonomian Indonesia sepanjang 2018. Kondisi ini tidak lepas dari faktor eksternal seperti *Fed Fund Rate* (FFR) dan perang dagang Amerika dan China.



Di tengah desakan dari eksternal, situasi ekonomi Indonesia tidak mengalami perubahan secara signifikan di tahun 2018. Semangat BNI untuk terus tumbuh di tengah derasnya tekanan dari luar kembali diuji, hal ini kemudian mengangkat kesadaran BNI bahwa tingkat kesehatan dari pertumbuhan itu sendiri merupakan hal yang paling penting guna terus bertahan dalam persaingan usaha perbankan yang kian kompetitif. Hal ini terus dijaga oleh BNI sepanjang tahun 2018 dalam mempertimbangkan pertumbuhan bisnis bank itu sendiri, salah satu cara yang dilakukan oleh BNI adalah lebih selektif pada pemilihan sektor industri yang tepat. Era *disruptive economy* yang sudah dimulai di tahun 2017 kembali menjadi *highlight* di tahun 2018, BNI dituntut untuk bisa beradaptasi dengan baik khususnya dari sisi teknologi dan inovasi layanan.

Pada tahun 2018, BNI berhasil mempertahankan pertumbuhan asetnya pada sektor yang prospektif, hal ini tercermin dari meningkatnya total aset sebesar Rp99,2 triliun. Dengan komposisi pinjaman yang diberikan sebagai bisnis utama bank berkontribusi 63,4% dari total aset di tahun 2018. Pinjaman yang diberikan BNI tumbuh sebesar 16,2%, lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 12,2%. Peningkatan pertumbuhan tersebut dikarenakan BNI secara agresif melakukan ekspansi kredit dengan tetap selektif khususnya terhadap kualitas aset dan memperhatikan prinsip *prudential banking*. Pertumbuhan terutama terdapat pada kredit kepada BUMN yang tumbuh sebesar 31,6% serta kredit korporasi swasta yang tumbuh 12,9%, dengan kontribusi terbesar pada sektor industri manufaktur, perdagangan restoran dan hotel, serta jasa dunia usaha.

Tabel Aset

Uraian	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)
Kas	14.044	11.578	11.168	2.466	21,3	410	3,7
Giro pada Bank Indonesia	35.591	32.701	30.147	2.891	8,8	2.554	8,5
Giro pada Bank Lain	13.137	21.338	6.300	(8.201)	(38,4)	15.039	238,7
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	39.325	28.593	33.662	10.731	37,5	(5.069)	(15,1)
Efek - Efek	32.362	36.359	23.856	(3.997)	(11,0)	12.503	52,4
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	679	1.665	(679)	(100,0)	(986)	(59,2)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	24.745	15.799	15.701	8.946	56,6	6.867	0,6
Tagihan akseptasi	20.475	18.271	14.809	2.204	12,0	3.462	23,4
Tagihan derivatif	606	217	250	388	179,1	(33)	(13,2)
Pinjaman yang diberikan	512.778	441.314	393.275	71.465	16,2	48.038	12,2
CKPN – Pinjaman yang diberikan	(14.892)	(14.524)	(16.681)	(368)	2,5	2.157	12,9
Obligasi Pemerintah	86.791	79.849	63.006	6.942	8,7	16.843	26,7
Penyertaan saham	785	786	57	(1)	(0,1)	729	1.274,6
Aset tetap- neto	26.127	22.805	21.972	3.322	14,6	832	3,8
Pajak dibayar dimuka	1.624	623	620	1.002	160,9	2	0,4
Beban dibayar dimuka	2.337	2.318	2.411	19	0,8	(92)	(3,8)
Aset pajak tangguhan neto	1.676	891	1.332	785	88,2	(441)	(33,1)
Aset lain-lain - neto	11.900	10.381	10.381	1.519	14,6	3.952	-
CKPN	(840)	(648)	(209)	(193)	29,8	(439)	209,9
TOTAL ASET	808.572	709.330	603.032	99.241	14,0	106.298	17,6



KAS DAN GIRO PADA BANK INDONESIA

Posisi kas dan giro Bank Indonesia meningkat 12,1% dari Rp44,3 triliun di tahun 2017 menjadi Rp49,6 triliun di tahun 2018.

Giro pada Bank Indonesia naik 8,8% bila dibandingkan tahun 2017, sejalan dengan kewajiban BNI untuk memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rangka pemenuhan cadangan minimum pada bank sentral.

BNI dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan syariah, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, GWM bank telah sesuai dengan PBI No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank berupa SBI, Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan atau *excess reserve* yang merupakan kelebihan saldo rekening Rupiah bank dari GWM Primer, GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). GWM LFR dan RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM bank di bawah minimum LFR dan RIM target Bank Indonesia (80%) atau jika di atas maksimum LFR dan RIM target BI (92%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank lebih kecil dari KPMM insentif BI sebesar 14%.

Tabel Giro Wajib Minimum (GWM)

	2018	2017	2016
GWM - RUPIAH	6,53%	6,57%	6,77%
GWM - VALAS	8,01%	8,01%	8,01%

GIRO PADA BANK LAIN

Giro bank lain di tahun 2018 turun 38,4% bila dibandingkan tahun 2017 dari Rp21,3 triliun menjadi Rp13,1 triliun di tahun 2018. Penurunan tersebut merupakan salah satu strategi BNI dalam pengelolaan aset dengan penempatan dana pada aset keuangan dengan potensi *yield* yang lebih besar seperti pinjaman yang diberikan, efek-efek, dan obligasi Pemerintah.

PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia naik sebesar 37,5% bila dibandingkan tahun 2017 dari Rp28,6 triliun menjadi Rp39,3 triliun di tahun 2018. Peningkatan ini merupakan salah satu strategi BNI dalam rangka pengelolaan aset keuangan dan likuiditas.

EFEK-EFEK

Efek-efek adalah salah satu instrumen keuangan yang dimiliki BNI sebagai alternatif penyaluran dana selain pada pinjaman yang diberikan. Portofolio investasi BNI pada efek-efek mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 11,0% menjadi Rp32,4 triliun dari Rp36,4 triliun di tahun 2017. Penurunan efek-efek salah satunya disebabkan jatuh tempo produk Sertifikat Deposito Bank Indonesia di tahun 2018 ini.

Terdapat dua jenis portofolio efek-efek yang mengalami penurunan signifikan di tahun 2018, yaitu Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dengan penurunan dari Rp11,5 triliun di tahun 2017 menjadi Rp2,0 triliun di tahun 2018 atau sebesar 82,8% dan Obligasi Subordinasi yang secara total turun sampai dengan 34,2% menjadi sebesar Rp1,5 triliun di tahun 2018.

Selain dua portofolio efek-efek di atas, terdapat juga portofolio efek-efek yang mengalami peningkatan di tahun 2018, yaitu Reksadana, Surat Berharga Bank Indonesia (SBI), dan Obligasi lainnya yang masing-masing naik sebesar 47,1%, 36,3%, dan 14,7% dibandingkan tahun 2017.



Analisis &
Pembahasan
Manajemen



Tabel Efek-Efek

Uraian	2018		2017		2016		Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)
Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi	7.249	100,0	8.430	100,0	4.719	100,0	1,180	(14,0)	3.711	78,6
-Reksadana	4.053	55,9	3.981	47,2	2.430	51,5	72	1,8	1.551	63,8
-Obligasi lainnya	2.106	29,1	2.487	29,5	780	16,5	(381)	(15,3)	1.708	219,0
-Obligasi Subordinasi	674	9,3	1.600	19,0	1.159	24,6	(926)	(57,9)	441	38,0
-Efek Utang lainnya	416	5,7	361	4,3	350	7,4	55	15,2	11	3,1
Tersedia untuk dijual	23.768	100,0	26.806	100,0	17.080	100,0	(3.037)	(11,3)	9.726	56,9
-SDBI	1.983	8,3	11.531	43,0	1.096	6,4	(1.997)	(36,3)	10.435	952,4
-SBI	7.505	31,6	5.508	20,5	10.530	61,7	1.997		(5.022)	(47,7)
-Reksadana	4.920	20,7	2.119	7,9	889	5,2	2.801	132,2	1.230	138,3
-Obligasi lainnya	8.209	34,5	6.555	24,5	3.901	22,8	1.654	25,2	2.654	68,0
-Obligasi Subordinasi	843	3,5	706	2,6	664	3,9	137	19,4	42	6,3
-Efek Utang lainnya	308	1,3	387	1,4	-	0,0	(79)	(20,5)	387	-
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.345	100,0	1.124	100,0	2.057	100,0	221	197,7	(934)	(45,4)
Obligasi lainnya	1.345	100,0	1.124	100,0	2.057	100,0	221	197,7	(934)	(45,4)
Sub Total	32.362	1,0	36.359	1,0	23.856	1,0	(3.997)	(11,0)	12.503	52,4
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(318)		(309)		(91)		(9)	2,9	(218)	239,3
Total	32.044		36.050		23.765		(4.006)	(11,1)	12.285	51,7

Tabel Efek-Efek berdasarkan Penerbit

Uraian	2018		2017		2016		Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)
Korporasi	16.284	50,3	13.718	37,7	8.952	37,5	2.566	18,7	4.766	53,2
Bank	6.590	20,4	5.602	15,4	3.279	13,7	987	17,6	2.324	70,9
Bank Indonesia	9.489	29,3	17.039	46,9	11.626	48,7	(7.550)	(44,3)	5.414	46,6
Total	32.362	100,0	36.359	100,0	23.856	100,0	(3.997)	(11,0)	12.503	52,4
Cadangan kerugian penurunan nilai	(318)		(309)		(91)		(9)	2,9	(218)	239,3
Neto	32,044		36.050		23.765		(4.006)	(11,1)	12.285	51,7



EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (REVERSE REPO)

Transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali merupakan transaksi pembelian surat berharga yang diikuti perjanjian untuk menjual kembali surat berharga yang dibeli pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Transaksi *reverse repo* yang dilakukan pada 2017 sebesar Rp679 miliar telah jatuh tempo pada tahun 2018, dan selama 2018 BNI tidak melakukan transaksi *reverse repo* yang baru.

PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Perekonomian Indonesia pada tahun 2018 memberikan beberapa pelajaran yang dapat menjadi landasan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di 2019. Daya saing dan produktivitas harus terus ditingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi. Indonesia harus mampu beralih dari ketergantungan pada

ekspor komoditas primer ke manufaktur, meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri untuk menekan impor. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan diarahkan untuk mendorong pengembangan kawasan ekonomi dan industri.

Dalam rangka perkembangan sektor manufaktur tersebut, BNI sebagai salah satu bank BUMN kembali berperan penting guna memperkuat strategi pemerintah yang kemudian berdampak pada meningkatnya pinjaman yang diberikan kepada BUMN sebesar 31,6% serta pinjaman yang diberikan kepada korporasi swasta yang tumbuh 12,9%, peningkatan tersebut dikontribusi oleh sektor industri manufaktur, perdagangan restoran dan hotel, jasa dunia usaha dan pertambangan. Peningkatan ini kemudian berdampak pada meningkatnya komposisi pinjaman yang diberikan sebagai bisnis utama bank dari 62,2% di tahun 2017 menjadi 63,4% di tahun 2018.

Tabel Komposisi Pinjaman berdasarkan Segmentasi Debitur

	2018		2017		2016		Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Korporasi	222.910	43,5	188.026	42,6	174.073	44,3	34.884	18,6	13.953	8,0
Komersial Menengah	74.731	14,6	70.261	15,9	61.330	15,6	4.470	6,4	8.932	14,6
Kecil	66.063	12,9	56.477	12,8	50.684	12,9	9.586	17,2	5.793	11,4
Konsumer	79.735	15,5	71.445	16,2	65.069	16,5	8.290	11,6	6.376	9,8
Internasional	39.789	7,8	30.734	7,0	21.237	5,4	9.055	29,5	9.497	44,7
Perusahaan anak	29.550	5,8	24.369	5,5	20.882	5,3	5.181	21,3	3.487	16,7
Total Pinjaman	512.778	100,0	441.314	100,0	393.275	100,0	71.465	16,2	48.038	12,2

KOMPOSISI PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Struktur portofolio pinjaman yang diberikan di tahun 2018 kembali didominasi oleh segmen korporasi sebesar 43,5%, yang kemudian diikuti segmen konsumer dan komersial menengah masing-masing 15,5% dan 14,6%, segmen kecil sebesar 12,9% dan cabang luar negeri sebesar 7,8% dari total pinjaman yang diberikan. Secara konsolidasi, perusahaan anak berkontribusi menyalurkan pinjaman sebesar 5,8% dari total pinjaman yang diberikan.

Pertumbuhan paling agresif adalah pada penyaluran pinjaman pada segmen korporasi yang naik Rp34,9 triliun atau 18,6% dari posisi 2017 sebesar Rp188,0 triliun menjadi Rp222,9 triliun di tahun 2018. Segmen kecil juga mencatatkan pertumbuhan yang cukup agresif selama 2018 sebesar Rp9,6 triliun dibandingkan tahun 2017 menjadi Rp66,1 triliun di tahun 2018. Di samping itu penyaluran pinjaman kepada segmen konsumer menjadi salah satu pendorong pertumbuhan dengan kenaikan 11,6% atau

Rp8,3 triliun dibandingkan tahun 2017. Untuk pertumbuhan pinjaman yang diberikan oleh perusahaan anak BNI mampu tumbuh stabil di 21,3% dari Rp24,4 triliun di tahun 2017 menjadi Rp29,6 triliun di tahun 2018.

Segmen komersial menengah mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,4% atau Rp4,5 triliun dibandingkan tahun 2017. Pertumbuhan ini tidak seagresif tahun 2017 di mana segmen komersial menengah mampu tumbuh 14,6% atau Rp8,9 triliun bila dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan di tahun 2018 ini merupakan salah satu strategi BNI untuk lebih selektif dalam menyalurkan pinjaman pada segmen ini mengingat risiko yang masih cukup besar. Selama tahun 2018, terdapat beberapa debitur segmen komersial yang mengalami peningkatan eksposur bisnisnya sehingga memenuhi syarat untuk dapat dikelola oleh segmen korporasi.



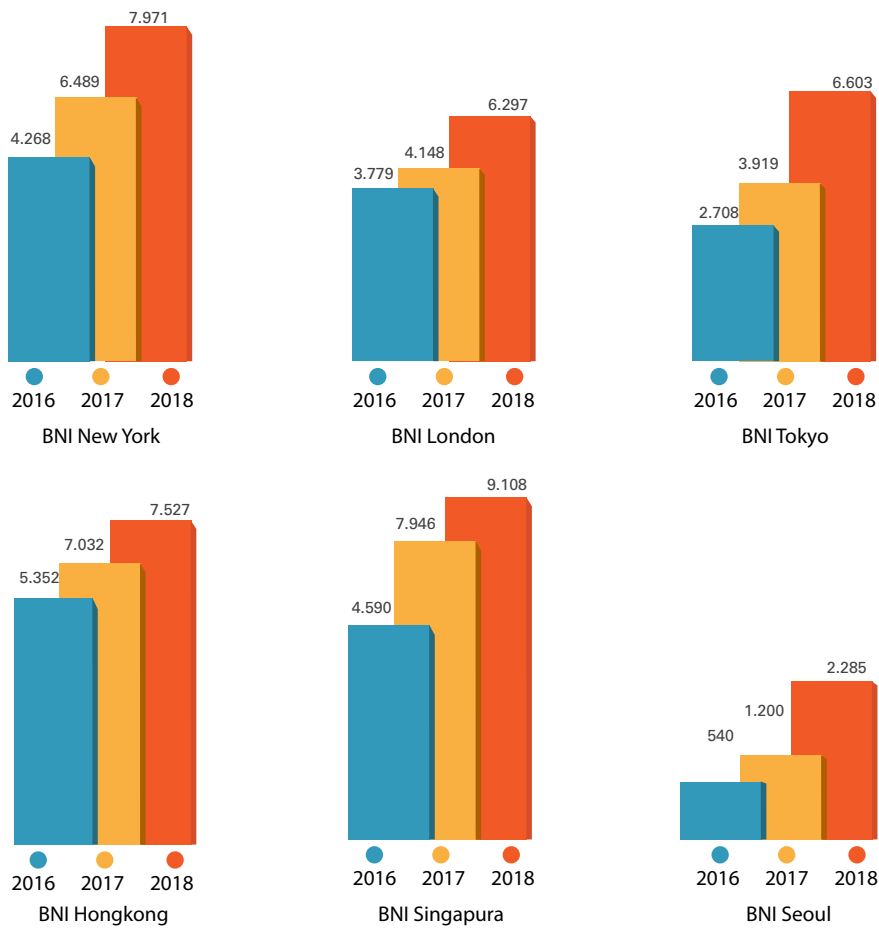
Analisis & Pembahasan Manajemen



Pinjaman yang Diberikan Cabang Luar Negeri

Cabang Luar Negeri	2018 Rp Miliar	2017 Rp Miliar	2016 Rp Miliar	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
				Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
BNI New York	7.971	6.489	4.268	1.482	22,8	2.221	52,0
BNI London	6.297	4.148	3.779	2.149	51,8	369	9,8
BNI Tokyo	6.603	3.919	2.708	2.684	68,5	1.211	44,7
BNI Hongkong	7.527	7.032	5.352	495	7,0	1.680	31,3
BNI Singapura	9.108	7.946	4.590	1.161	14,6	3.356	73,1
BNI Seoul	2.285	1.200	540	1.084	90,3	660	122,2
Total	39.789	30.734	21.237	9.055	29,5	9.497	44,7

Pinjaman Yang Diberikan Cabang Luar Negeri - Rp Miliar





Tabel Komposisi Pinjaman berdasarkan Segmen dan Mata Uang

	2018		2017		2016		Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Korporasi	222.910	43,5	188.026	42,6	174.073	44,3	34.887	18,6	13.953	8,0
Rupiah	181.449	81,4	154.555	82,2	141.044	81,0	26.898	17,4	13.511	9,6
Valas	41.461	18,6	33.471	17,8	33.029	19,0	7.990	23,9	442	1,3
Komersial	74.731	14,6	70.261	15,9	61.330	15,6	4.470	6,4	8.932	14,6
Rupiah	72.292	96,7	67.983	96,8	59.932	96,1	4.310	6,3	9.050	15,4
Valas	2.439	3,3	2.279	3,2	2.397	3,9	160	7,0	(119)	(4,9)
Kecil	66.063	12,9	56.477	12,8	50.684	12,9	9.586	17,0	5.793	11,4
Rupiah	65.937	99,8	56.360	99,8	50.568	99,8	9.578	17,0	5.791	11,5
Valas	126	0,2	117	0,2	116	0,2	9	7,5	1	1,0
Konsumer	79.735	15,5	71.445	16,2	65.069	16,5	8.290	11,6	6.376	9,8
Rupiah	79.719	100,0	71.380	99,9	65.038	100,0	8.339	11,7	6.342	9,8
Valas	16	0,0	65	0,1	31	0,0	(49)	(75,4)	34	109,4
Internasional	39.918	7,8	30.734	7,0	21.237	5,4	9.055	29,5	9.497	44,7
Rupiah	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0
Valas	39.918	100,0	30.734	100,0	21.237	100,0	9.055	29,9	9.497	44,7
Perusahaan Anak	29.550	5,8	24.369	5,5	20.882	5,3	5.181	21,3	3.487	16,7
Rupiah	29.367	99,4	24.214	99,4	20.582	98,6	5.153	21,3	3.633	17,7
Valas	183	0,6	155	0,6	301	1,4	28	17,9	(146)	(48,4)
Total Pinjaman	512.778	100,0	441.314	100,0	393.275	100,0	71.465	16,2	48.039	12,2
Total Rupiah	428.765	83,0	374.492	84,9	336.164	85,5	54.273	14,5	38.328	11,4
Total Valas	84.013	16,4	66.822	15,1	57.111	14,5	17.191	25,9	9.711	17,0

KUALITAS PINJAMAN YANG DIBERIKAN-BANK SAJA

Rasio NPL bruto tercatat sebesar 1,9% di 2018 membaik dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,3%. NPL neto tercatat 0,8% di tahun 2018, sementara pada tahun 2017 sebesar 0,7%. Kondisi ini merupakan hasil dari implementasi strategi BNI dengan ekspansi selektif pada sektor-sektor yang memiliki risiko rendah dan merupakan pemain utama pada wilayah tersebut. Di samping itu BNI juga melakukan restrukturisasi dan remedial untuk debitur-debitur bermasalah yang masih memiliki potensi perbaikan secara keuangan dan operasional.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi makro ekonomi yang masih fluktuatif, BNI melakukan mitigasi risiko atas pinjaman yang diberikan dengan membentuk pencadangan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercermin dari *coverage ratio* 152,9% pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 148,0%.

Kolektibilitas portofolio pinjaman yang diberikan BNI disajikan pada tabel berikut:

Tabel Pinjaman berdasarkan Kolektibilitas

	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Lancar	482.492	414.371	396.623	68.120	0,2	44.748	12,1



Analisis & Pembahasan Manajemen



	2018 Rp Miliar	2017 Rp Miliar	2016 Rp Miliar	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
				Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Dalam perhatian khusus	20.248	16.845	12.008	3.404	0,2	4.837	40,3
Kurang lancar	2.028	1.271	1.594	757	0,6	(323)	(20,3)
Diragukan	3.009	1.592	839	1.417	0,9	753	89,8
Macet	5.001	7.234	9.212	(2.233)	(0,3)	(1.978)	(21,5)
Total	512.778	441.413	393.275	71.465	0,2	48.039	12,2

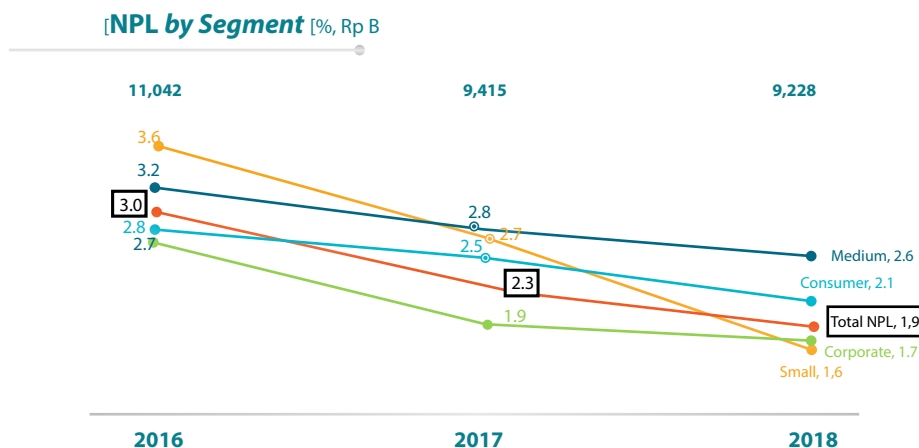
Tabel Pinjaman berdasarkan Sektor Ekonomi

	2018		2017		2016		Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	(%)	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Manufaktur	98.034	19,1	82.744	18,7	73.090	18,6	15.289	0,2	9.654	0,1
Perdagangan Restoran dan Hotel	89.751	17,5	76.391	17,3	61.581	15,7	13.360	0,2	14.810	0,2
Jasa Dunia Usaha	52.575	10,3	42.309	9,6	38.600	9,8	10.266	0,2	3.709	0,1
Transportasi & Komunikasi	31.351	6,1	25.986	5,9	22.205	5,6	5.365	0,2	3.781	0,2
Pertanian	49.185	9,6	46.888	10,6	43.128	11,0	2.297	0,0	3.760	0,1
Pertambangan	18.301	3,6	11.949	2,7	14.184	3,6	6.352	0,5	(2.236)	(0,2)
Listrik Gas dan Air	24.179	4,7	26.767	6,1	27.006	6,9	(2.587)	(0,1)	(239)	(0,0)
Konstruksi	34.474	6,7	27.499	6,2	20.079	5,1	6.975	0,3	7.420	0,4
Jasa Pelayanan Sosial	16.033	3,1	12.149	2,8	11.246	2,9	3.884	0,3	903	0,1
Lain-Lain	98.896	19,3	88.633	20,1	82.156	20,9	10.263	0,1	6.477	0,1
Total Pinjaman	512.778	100,0	441.314	100,0	393.276	100,0	71.465	0,2	48.038	0,1

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PINJAMAN YANG DIBERIKAN-BANK SAJA

Nominal NPL tercatat mengalami penurunan dari Rp9,4 triliun di tahun 2017 menjadi Rp9,2 triliun di tahun 2018 atau turun sebesar 2,4%. Hal ini menunjukkan komitmen BNI untuk tetap menjaga kualitas pinjaman yang diberikan di tengah ekspansi yang agresif. Pinjaman dengan kategori *Non Performing Loan* (NPL) didominasi oleh nasabah di sektor perindustrian, perdagangan, restoran, dan hotel, dan pertambangan. Kondisi perekonomian yang fluktuatif di tahun 2018 mengakibatkan sebagian dari debitur pada ketiga sektor tersebut berada pada kondisi NPL.

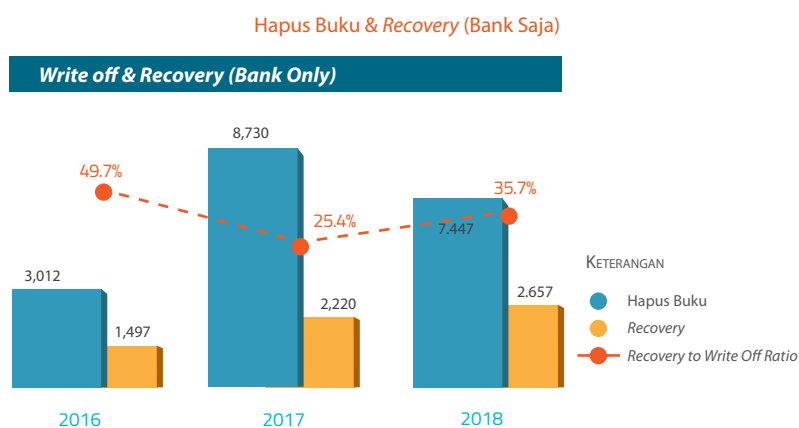
NPL Per Segmen (Bank saja)





PENGHAPUSAN ASET PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEROLEHAN KEMBALI – BANK SAJA

Sebagai tindak lanjut atas kondisi debitur yang sudah tidak memiliki potensi, baik secara bisnis maupun operasional, BNI melakukan penghapusan aset pinjaman yang diberikan sebesar Rp7,4 triliun selama tahun 2018, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp8,7 triliun. Dalam pelaksanaannya, manajemen BNI memprioritaskan debitur-debitur yang pailit dan bermasalah hukum, di mana telah dilakukan upaya-upaya yang maksimal. Jika dibandingkan dengan total pinjaman yang diberikan bank saja, rasio penghapusan aset pinjaman yang diberikan relatif rendah pada kisaran 1,5%. Sedangkan penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbuku (*recovery*) sebesar Rp2,7 triliun dengan *recovery rate* di tahun 2018 sebesar 35,7% lebih baik dibandingkan tahun 2017 sebesar 25,4%.



OBLIGASI PEMERINTAH

Obligasi pemerintah kembali menjadi instrumen keuangan yang menarik dengan tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen keuangan sejenis lainnya. Obligasi pemerintah yang dimiliki BNI naik sebesar Rp6,9 triliun atau 8,7% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp79,8 triliun menjadi Rp86,8 triliun di tahun 2018.

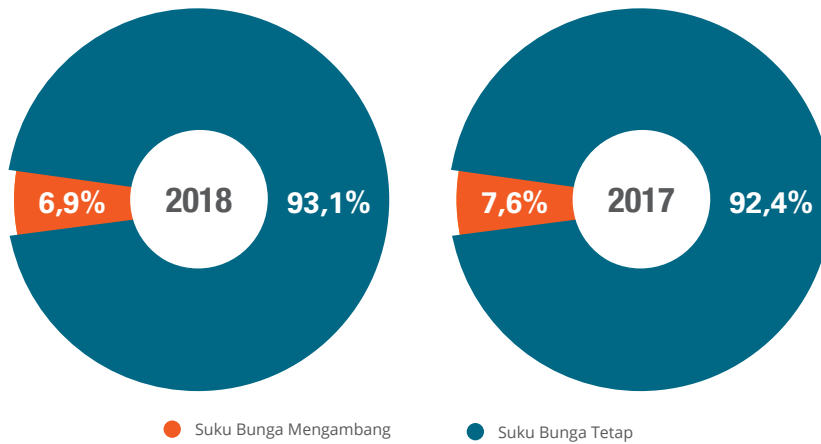
Dari sisi komposisi suku bunganya, obligasi pemerintah dengan suku bunga tetap masih mendominasi portofolio BNI dengan harga pasar Obligasi Pemerintah berkisar antara 76,01% sampai dengan 122,15% dan antara 96,70% sampai dengan 136,51% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Sedangkan untuk obligasi tingkat bunga mengambang, harga pasar Obligasi Pemerintah berkisar antara 99,55% sampai dengan 99,87% dan antara 99,84% sampai dengan 99,95% masing-masing pada 31 Desember 2018 dan 2017 dari nilai nominal.

Tabel Obligasi Pemerintah

	2018		2017		2016		Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	(%)	Rp Miliar	(%)	Rp Miliar	(%)	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	3.350	3,9	2.936	3,7	706	1,1	414	14,1	2.230	315,9
Tersedia untuk dijual	60.283	69,4	56.237	70,4	43.660	69,3	4.046	7,2	12.577	28,8
Dimiliki hingga jatuh tempo	23.158	26,7	20.676	25,9	18.640	29,6	2.482	12,0	2.036	10,9
Total	86.791	100,0	79.849	100,0	63.006	100,0	6.942	8,7	16.843	26,7
Suku bunga tetap	80.805	93,1	73.803	92,4	53.284	84,6	7.027	9,5	20.519	38,5
Suku bunga mengambang	5.986	6,9	6.046	7,6	9.722	15,4	(60)	(1,0)	(3.676)	(37,8)
Total	86.791	100,0	79.849	100,0	63.006	100,0	6.942	8,7	16.843	26,7



Grafik Obligasi Pemerintah Berdasarkan Suku Bunga



PENYERTAAN SAHAM

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan *non public* yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk tujuan jangka panjang. Total penyertaan saham BNI Pada posisi akhir 2018 sebesar Rp785 miliar (bruto) dengan rincian penyertaan dan persentase kepemilikan terhadap total saham beredar sebagai berikut:

1. PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia 8,0%
2. PT Swadharma Nusantara Pembiayaan 7,4%
3. PT Bursa Efek Indonesia 1,2%
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 2,5%
5. PT Pemingkat Efek Indonesia (Persero) 1,9%
6. PT Bank Mizuho Indonesia 1,0%
7. PT Sumitomo Mitsui Indonesia 0,5%
8. PT PANN Pembiayaan Maritim 48,4%

ASET TETAP

Aset tetap neto tahun 2018 tumbuh 14,6% dibandingkan tahun 2017 dari Rp22,8 triliun menjadi Rp26,1 triliun. Selama tahun 2018, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki BNI selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

BNI melakukan penilaian kembali tetap pada tanggal 30 September 2018 untuk kelompok aset tanah dan bangunan di Indonesia dan luar negeri dengan rincian:

	Nilai Buku sebelum Revaluasi Rp miliar	Nilai Buku Setelah Revaluasi Rp miliar	Keuntungan (Kerugian) Revaluasi Rp miliar
Tanah	14.098	15.511	1.414
Bangunan	3.836	5.189	1.353
Jumlah	17.934	20.700	2.766

Aset tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2018 diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian dengan nilai pertanggungan sebesar Rp12,1 triliun yang meningkat bila dibandingkan 31 Desember 2017 sebesar Rp9,6 triliun. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tersebut.



Tabel Aset Tetap

	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Tanah	15.557	13.857	13.829	1.700	12,3	28	0,2
Bangunan	5.626	4.252	3.850	1.374	32,3	402	10,4
Parengkapan kantor dan kendaraan bermotor	10.112	9.136	8.146	976	10,7	990	12,2
Total biaya perolehan	31.295	27.245	25.824	4.049	14,9	1.421	5,5
Aset dalam penyelesaian	2.714	2.960	2.601	(246)	(8,3)	359	13,8
Total biaya perolehan	34.009	30.205	28.426	3.803	12,6	1.779	6,3
Akumulasi penyusutan							
Bangunan	414	783	546	(370)	(47,2)	237	43,5
Parengkapan kantor dan kendaraan bermotor	7.469	6.617	5.908	851	12,9	710	12,0
Total akumulasi penyusutan	7.882	7.400	6.454	482	6,5	947	14,7
Nilai buku neto	26.127	22.805	21.972	3.322	14,6	832	3,8

ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain naik 14,6% menjadi Rp11,9 triliun pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp10,4 triliun. Pos ini terdiri dari piutang bunga dari obligasi pemerintah, piutang nasabah, agunan yang diambil alih, tagihan nasabah, piutang lain-lain dan aset lainnya.

LIABILITAS

Tabel Liabilitas

	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Liabilitas Segera	4.160	4.868	3.276	(707)	(14,5)	1.592	48,6
Simpanan Nasabah*	578.775	516.098	435.545	62.677	12,1	80.553	18,5
Simpanan dari Bank Lain*	14.233	12.177	10.801	2.056	16,9	1.376	12,7
Efek-Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	21.524	2.390	3.765	19.134	800,6	(1.375)	(36,5)
Liabilitas derivatif	322	114	411	208	182,9	(297)	(72,3)
Liabilitas akseptasi	4.417	4.507	4.359	(91)	(2,0)	149	3,4
Efek-efek yang diterbitkan*	2.987	3.482	7.227	(495)	(14,2)	(3.745)	(51,8)
Pinjaman yang diterima	52.025	44.722	32.388	7.303	16,3	12.334	38,1
Utang pajak	481	80	151	401	498,2	(70)	(46,7)
Penyisihan	178	192	156	(15)	(7,7)	36	23,2
Beban yang masih harus dibayar	876	971	1.047	(95)	(9,8)	(76)	(7,2)
Imbalan kerja	3.512	4.094	3.503	(582)	(14,2)	591	16,9
Liabilitas lain-lain	14.608	14.731	11.149	(122)	(0,8)	3.582	32,1
Efek-efek subordinasi	100	-	-	100	100,0	-	-
TOTAL LIABILITAS	698.198	608.427	513.778	89.771	14,8	94.649	18,4

*termasuk di dalamnya dana syirkah temporer



SIMPANAN NASABAH

Likuiditas perbankan menjadi salah satu isu selama 2018 ini. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit industri perbankan yang lebih tinggi dari pertumbuhan simpanan nasabah serta *Loan to Deposit Ratio* (LDR) industri yang berada di atas 90%. Di tengah ketatnya likuiditas perbankan, BNI mampu menunjukkan pertumbuhan simpanan nasabah yang menggembirakan selama 2018. Layanan transaksional perbankan yang berbasis digital menjadi senjata utama BNI dalam mendorong pertumbuhan ini. Di samping itu, dalam menghimpun dana murah BNI terus meningkatkan kemitraan dengan nasabah institusi atau kelembagaan, baik swasta, BUMN, maupun pemerintahan.

Selama tahun 2018, simpanan nasabah naik Rp62,7 triliun atau 12,1% menjadi Rp578,8 triliun dari posisi 2017 yang tercatat sebesar Rp516,1 triliun. Produk giro mencatatkan pertumbuhan 18,2% atau Rp26,1 triliun dari posisi 2017 sebesar Rp143,2 triliun menjadi Rp169,3 triliun di 2018. Produk tabungan juga mencatatkan pertumbuhan agresif sebesar Rp23,8 triliun dari posisi Rp182,3 triliun di 2017 menjadi Rp206,1 triliun. Di sisi lain, produk deposito mampu tumbuh 6,7% atau Rp12,8 triliun selama 2018 menjadi Rp203,4 triliun. Pertumbuhan deposito yang tidak seagresif pertumbuhan produk giro dan tabungan merupakan implementasi strategi BNI yang fokus pada pendanaan yang bersumber dari CASA.

Penerapan strategi ini berdampak pada membaiknya rasio CASA BNI dari 63,1% di tahun 2017 menjadi 64,8% di tahun 2018. Kondisi ini juga mendorong turunnya biaya simpanan nasabah (*Cost of Fund*) sebesar 0,2% dari 3,0% di 2017 menjadi 2,8% di 2018.

Tabel Simpanan Nasabah Termasuk Dana *Syirkah* Temporer

	2018		2017		2016		Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Giro	169.274	29,2	143.162	27,7	122.652	28,2	26.112	18,2	20.510	16,7
Rupiah	126.924	21,9	108.729	21,1	92.024	21,1	18.195	16,7	16.705	18,2
Mata uang asing	42.350	7,3	34.433	6,7	30.628	7,0	7.917	23,0	3.805	12,4
Tabungan	206.056	35,6	182.295	35,3	158.662	36,4	23.761	13,0	23.633	14,9
Rupiah	191.133	33,0	168.616	32,7	146.446	33,6	22.517	13,4	22.170	15,1
Mata uang asing	14.923	2,6	13.679	2,7	12.216	2,8	1.244	9,1	1.463	12,0
Total giro dan tabungan	375.330	64,8	325.457	63,1	281.315	64,6	49.873	15,3	44.142	15,7
Deposito	203.445	35,2	190.641	36,9	154.230	35,4	12.803	6,7	36.411	23,6
Rupiah	170.155	29,4	163.649	31,7	131.198	30,1	6.506	4,0	32.451	24,7
Mata uang asing	33.290	5,8	26.992	5,2	23.033	5,3	6.297	23,3	3.960	17,2
Total simpanan	578.775	100,0	516.098	100,0	453.545	100,0	62.677	12,1	80.533	18,5
Rupiah	488.212	84,4	440.994	85,4	369.668	84,9	47.218	10,7	71.326	19,3
Mata uang asing	90.563	15,6	75.104	14,6	65.877	15,1	15.459	20,6	9.228	14,0

DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/BNI Syariah) dalam pengelolaan investasinya dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas, karena BNI Syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi (*current asset* dan *other non investment accounts*). Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.



NEGOTIABLE CERTIFICATE DEPOSIT (NCD)

Untuk mendukung likuiditas serta memperkuat struktur dan komposisi pendanaan Rupiah, BNI telah menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) Rupiah *scriptless* (tanpa warkat) pada tahun 2017. Sebesar Rp3,3 triliun NCD yang diterbitkan telah jatuh tempo selama tahun 2018 ini. NCD akan dijelaskan secara lebih lengkap pada Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya.

SIMPANAN DARI BANK LAIN

Simpanan dari bank lain dimanfaatkan BNI sebagai salah satu fasilitas pendanaan jangka pendek antar bank (*interbank call money*). Simpanan dari bank lain pada 2018 sebesar Rp13,9 triliun naik Rp2,1 triliun atau 16,9% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp12,2 triliun. Selain itu, agar sumber pendanaan agar tidak terkonsentrasi pada pendanaan jangka pendek saja, BNI menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) yang sejak tahun 2016 sudah dipasarkan melalui KSEI.

Tabel Simpanan dari Bank Lain

Uraian	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)
Pinjaman pasar uang antar bank	8.459	3.352	1.339	5.107	152,3	2.013	150,3
Giro	2.152	2.343	1.899	(170)	(7,3)	444	23,4
Deposito berjangka	1.323	839	1.877	484	57,6	(1.038)	(55,3)
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD)	1.163	4.248	3.246	(3.099)	(72,7)	1.002	30,9
Simpanan lainnya	1.136	1.394	2.439	(585)	(34,0)	(1.045)	(42,9)
Total	14.233	12.177	10.801	2.056	16,9	1376	12,7

EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

Pada tanggal 22 Juni 2017, BNI telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-349/D.04/2017 untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BNI Rupiah Tahap I Tahun 2017 ("Obligasi"). Nilai obligasi yang diterbitkan sebesar Rp3,0 triliun, jangka waktu 5 tahun, dengan kupon sebesar 8% per tahun yang akan dibayarkan secara triwulanan. Obligasi BNI diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2017. Pembayaran kupon pertama kepada para pemegang obligasi telah dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017.

Pada tahun 2018, Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan perusahaan anak (BNI Syariah) pada 26 Mei 2015 tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah nilai nominal Rp500 miliar telah jatuh tempo dan dilunasi.

Untuk selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan akan dijelaskan pada bagian Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya.

EFEK-EFEK SUBORDINASI

Pada tanggal 8 Juni 2018, BNI telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-3/PB.31/2018 untuk menerbitkan *Medium Term Notes Subordinasi* I BNI Tahun 2018 ("MTN Subordinasi"). Nilai MTN Subordinasi yang diterbitkan sebesar Rp100 miliar, jangka waktu 5 tahun, dengan kupon sebesar 8% per tahun yang akan dibayarkan secara triwulanan. MTN Subordinasi BNI diterbitkan dengan penawaran terbatas. Pembayaran kupon pertama kepada para pemegang MTN Subordinasi akan dilakukan pada tanggal 7 November 2018.

Penggunaan dana hasil penerbitan MTN Subordinasi akan digunakan oleh BNI untuk memperkuat modal pelengkap (*tier 2*) dan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang, sesuai dengan sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 dan selanjutnya akan digunakan oleh Bank untuk mendukung peningkatan aset produktif.



PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima pada 2018 tercatat Rp52,0 triliun naik Rp7,3 triliun atau 16,3% dibandingkan tahun 2017 yang berada pada posisi Rp44,7 triliun. Kenaikan ini didominasi oleh *banker acceptance* yang naik Rp6,9 triliun atau 95,4% dibandingkan tahun 2017. *Bankers acceptance* adalah pinjaman antar bank yang diperoleh BNI dari bank-bank luar negeri yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas dengan jangka waktu pinjaman 6 bulan yang merupakan salah satu strategi pendanaan BNI untuk menjaga komposisi jangka panjang dan jangka pendek.

Tabel Pinjaman Yang Diterima

	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Pinjaman penerusan	73	75	132	(3)	(3,4)	(57)	(42,9)
Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya	1	1	1	-	-	-	-
Pinjaman bilateral	37.010	36.823	27.863	187	0,5	8.960	32,2
<i>Banker acceptance</i>	14.182	7.258	4.240	6.924	95,4	3.019	71,2
Lain-lain	759	565	152	194	34,4	(165)	(22,6)
Total	52.025	44.722	32.388	7.302	16,3	11.757	35,7

Tabel Daftar Counterparty Pinjaman yang diterima

Conterparty	Nominal	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jatuh Tempo
Standard Chartered Bank	USD 200 juta	5 tahun	LIBOR 3 Bulan + 1,95%	19 September 2019
China Development Bank	USD 700 juta	10 tahun	LIBOR 6 Bulan + 2,85%	16 Desember 2025
China Development Bank	CNY 1,90 miliar	10 tahun	SHIBOR 6 Bulan + 3,30%	16 September 2025
Konsorsium Bank	USD 500 juta	3 tahun	LIBOR 3 Bulan + 1,00%	22 Desember 2019
Konsorsium Bank	USD 500 juta	5 tahun	LIBOR 3 Bulan + 1,21%	22 Desember 2021
Konsorsium Bank	USD 500 juta	5 tahun	LIBOR 3 Bulan + 1,2%	30 Agustus 2022
Bank of America	USD 40 juta	335 hari	LIBOR 3 Bulan + 0,8%	12 Agustus 2019
CoBank Greenwood Village Colorado	USD 80 juta	359 hari	2,88%-3,55%	04 Desember 2019
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	USD 100 juta	3-6 bulan	2,94%-3,14%	25 Maret 2019
Societe Generale Paris	USD 50 juta	4 tahun	LIBOR 3 Bulan + 2,30%	17 Desember 2018

LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera didominasi oleh kewajiban BNI sebagai *issuer* bank (ATM), kiriman uang, dana setoran cek, deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah, transaksi kliring, setoran pajak yang diterima oleh BNI sebagai bank persepsi dan simpanan sementara yang belum diselesaikan. Liabilitas segera pada 2018 turun Rp707 miliar atau 14,5% dibandingkan posisi 2017.

EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Kewajiban efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan non konvensional BNI untuk mengelola likuiditas. Transaksi *repo* ini juga telah dipayungi dengan terbitnya SE OJK No.33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Masters Repurchase Agreement* Indonesia. Kewajiban efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp21,5 triliun pada 2018, naik Rp19,1 triliun dibandingkan posisi 2017.

LIABILITAS LAINNYA

Liabilitas lainnya pada 2018 sebesar Rp14,6 triliun turun Rp122 miliar dibandingkan posisi 2017 yang tercatat sebesar Rp14,7 triliun. Liabilitas lainnya terdiri atas kewajiban bank kepada pemegang polis, setoran jaminan, utang bunga, pendapatan yang belum diakui, utang reasuransi, komisi dan utang nasabah entitas perusahaan anak.



EKUITAS

Total ekuitas BNI pada tahun 2018 sebesar Rp110,4 triliun naik Rp9,5 triliun atau 9,4% dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp100,9 triliun. Peningkatan ini salah satunya didorong oleh pencapaian laba bersih BNI yang tumbuh 10,3% di tahun 2018.

Seiring dengan fluktuasi ekonomi makro dan tekanan terhadap pasar sehingga terjadi koreksi harga pasar Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, kondisi ini menyebabkan kerugian *Mark to Market* Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk dijual sebesar Rp3,9 triliun selama 2018.

Pada tahun 2018, BNI melakukan penilaian kembali terhadap untuk kelompok aset tanah dan bangunan Grup di Indonesia dan luar negeri. Secara total kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" adalah sebesar Rp2,7 triliun.

Tabel Ekuitas

	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Modal ditempatkan dan disetor penuh	9.055	9.055	9.055	-	0,00	-	0,00
Tambahan modal disetor	14.568	14.568	14.568	-	0,00	-	0,00
Transaksi dengan pihak non pengendali	2.257	2.257	2.257	-	-	-	-
Cadangan Revaluasi aset	14.979	12.283	12.285	2.696	21,9	(2)	-
Laba atau (Rugi) yang belum direalisasi atas surat-surat dan obligasi pemerintah berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan	(3.914)	22	(1.888)	(3.936)	(17.706,1)	1.911	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	85	93	82	(8)	(8,9)	11	13,4
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-	-	-	-	-	-	-
Total saldo laba	71.047	60.314	50.798	10.733	17,8	9.515	18,7
Saham tresuri	-	-	-	-	-	-	-
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	108.077	98.592	87.157	9.485	9,6	11.435	13,1
Kepentingan non pengendali	2.297	2.311	2.097	(14)	(0,6)	214	10,2
Total Ekuitas	110.374	100.903	89.254	9.470	9,4	11.649	13,1

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Di tengah situasi perekonomian di Indonesia yang tidak mengalami perubahan secara signifikan di tahun 2018, ditambah dengan semakin tertekannya Rupiah terhadap Dolar Amerika, BNI kembali membuktikan konsistensinya untuk terus memberikan kontribusi positif kepada negara dengan mencatat pertumbuhan laba bersih mencapai 10,3% dibandingkan dengan tahun 2017 yang dipicu oleh meningkatnya komposisi pendapatan seperti pendapatan bunga dan syariah yang merupakan motor penggerak utama kegiatan operasional perbankan.

Laporan Laba Rugi

	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah - neto	35.446	31.938	29.995	3.509	11,0	1.943	6,5
Pendapatan premi-neto	1.712	1.768	1.342	(56)	(3,2)	426	31,7



Analisis &
Pembahasan
Manajemen



	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Pendapatan operasional lainnya	11.613	11.040	9.552	573	5,2	1.488	15,6
Total pendapatan operasional	48.771	44.745	41.888	4.026	9,0	3.857	9,4
Beban operasional lainnya	(21.783)	(20.396)	(18.106)	(1.387)	6,8	(1.590)	8,5
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(7.388)	(7.126)	(7.853)	(262)	3,7	727	(9,3)
Laba operasional	19.599	17.223	14.229	2.377	13,8	2.993	21,0
Pendapatan (Beban) bukan operasional-neto	221	(57)	74	279	(486,4)	(131)	(177,0)
Laba sebelum beban pajak	19.821	17.165	14.303	2.655	15,5	2.862	20,0
Beban pajak	(4.729)	(3.395)	(2.893)	(1.334)	39,3	(502)	17,4
Laba tahun berjalan	15.092	13.771	11.410	1.321	9,6	2.360	20,7
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							
Kepentingan non pengendali	77	154	71	(77)	(50,3)	83	116,9
Pemilik entitas induk	15.015	13.616	11.339	1.399	10,3	2.278	20,1

PERTUMBUHAN PENDAPATAN BUNGA

PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH

BNI sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat sekaligus menopang kegiatan perekonomian nasional demi mensukseskan program pemerintah, pendapatan bunga dan pendapatan syariah merupakan sumber pendapatan utama perusahaan dalam menghasilkan laba selain pendapatan operasional lainnya. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah mengalami peningkatan dari Rp31,9 triliun di tahun 2017 menjadi Rp35,4 triliun di tahun 2018 atau sebesar 11,0%, dengan peningkatan terbesar pada pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan sebesar Rp3,9 triliun.

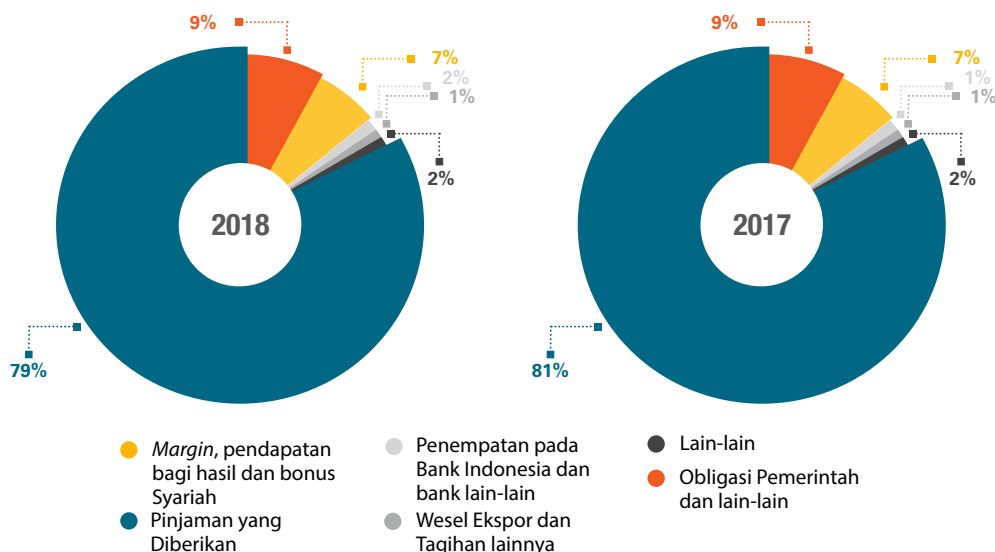
Selama tahun 2018, kenaikan pendapatan bunga tidak hanya didominasi dari pinjaman yang diberikan namun juga ditopang oleh kenaikan aset keuangan produktif lainnya sebagai dampak kebijakan BNI dalam mengelola komposisi instrumen keuangan perusahaan.

Tabel Pendapatan Bunga Berdasarkan Aktiva Produktif

	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Pinjaman yang diberikan	42.919	39.184	36.304	3.735	9,5	2.881	7,9
Obligasi Pemerintah dan efek-efek	5.196	4.303	3.608	893	20,8	695	19,3
Margin, pendapatan bagi hasil dan bonus syariah	3.567	3.175	2.790	393	12,4	384	13,8
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	874	629	447	244	38,8	183	40,7
Wasel ekspor dan tagihan lainnya	667	428	260	239	55,9	167	64,6
Lain-lain	916	459	359	457	99,6	100	27,9
Total	54.139	48.178	43.768	5.961	12,4	4.409	10,1



Grifik Komposisi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah



PENDAPATAN BUNGA ATAS PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Peningkatan pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan yaitu sebesar 10,0% di tahun 2018 atau meningkat menjadi Rp43,1 triliun dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar Rp39,2 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh tumbuhnya pinjaman yang diberikan sebesar 16,2% dan tidak ada peningkatan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) atas pinjaman yang diberikan.

Selama tahun 2018, terdapat peningkatan 7 days repo rate dari Bank Indonesia dari 4,25% menjadi 6,00% yang tidak berdampak langsung terhadap portofolio pinjaman yang diberikan BNI. Hal tersebut merupakan salah satu kebijakan BNI dalam hal mengelola kualitas debitur dan mendukung kegiatan perekonomian negara di saat kondisi makro ekonomi yang masih fluktuatif.

PENDAPATAN BUNGA ATAS OBLIGASI PEMERINTAH DAN EFEK-EFEK

Efek-efek dan obligasi pemerintah menjadi salah satu alternatif investasi penempatan dana yang dapat menjanjikan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan aset produktif lainnya selain pinjaman yang diberikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya portofolio efek-efek dan obligasi pemerintah yang meningkat 2,5% di akhir tahun 2018. Kenaikan tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan bunga atas obligasi pemerintah dan efek-efek yang mencapai 20,8% yaitu dari Rp4,3 triliun di tahun 2017 menjadi Rp5,2 triliun di tahun 2018.

PENDAPATAN BUNGA ATAS MARGIN, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN BONUS SYARIAH

Bisnis syariah relatif stabil perkembangannya dari tahun ke tahun dan merupakan salah satu bisnis yang masih menjanjikan bagi perbankan syariah di tahun 2018. Pendapatan Bunga atas Margin, Pendapatan Bagi Hasil dan Bonus Syariah naik sebesar 12,4% dari tahun sebelumnya.

PENDAPATAN BUNGA ATAS PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA

Sepanjang tahun 2018, pendapatan atas penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia mengalami peningkatan sebesar 39,3% atau meningkat dari Rp629 miliar di 2017 menjadi Rp877 miliar pada tahun 2018.

PENDAPATAN BUNGA ATAS WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA

Di tahun 2018 pendapatan bunga atas wesel ekspor dan tagihan lainnya naik 55,9 % atau dari Rp428 miliar di tahun 2017 menjadi Rp667 miliar di tahun 2018.

BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH

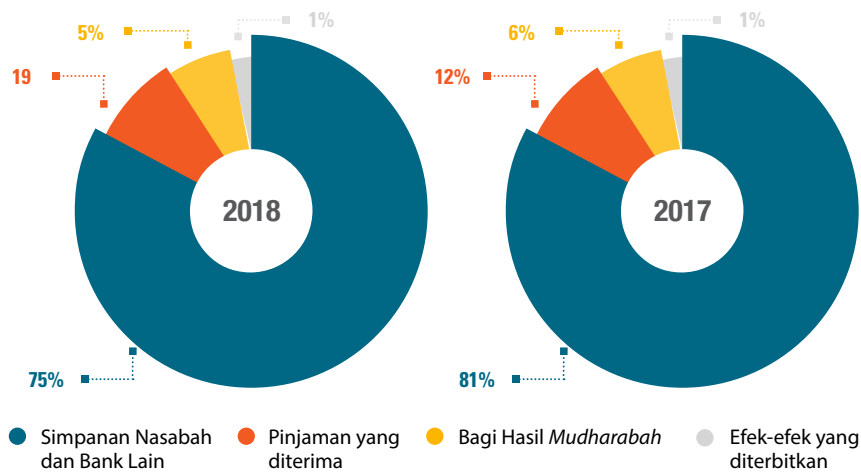
Beban bunga dan beban syariah mengalami peningkatan sebesar 15,1% di tahun 2018 dengan jumlah kenaikan sebesar Rp2,5 triliun dari tahun 2017 sebesar Rp16,2 triliun menjadi Rp18,7 triliun.



Tabel Beban Bunga dan Beban Syariah

	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Simpanan Nasabah dan Bank Lain	13.977	13.230	11.393	747	5,6	1.837	16,1
Pinjaman yang diterima	3.488	1.875	1.231	1.612	86,0	644	52,3
Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	987	919	855	69	7,5	64	7,5
Efek-efek yang diterbitkan	243	216	295	27	12,5	(79)	(26,8)
Total	18.696	16.240	13.773	2.455	15,1	2.467	17,9

Grafik Komposisi Beban Bunga dan Beban Syariah



BEBAN BUNGA ATAS SIMPANAN NASABAH DAN BANK LAIN

Kenaikan beban bunga atas simpanan nasabah dan bank lain di tahun 2018 sejalan dengan pertumbuhan simpanan nasabahnya. Sampai dengan akhir tahun 2018, simpanan nasabah meningkat sebesar 12,1% dengan pertumbuhan beban bunga sebesar 5,6% dari Rp13,2 triliun di tahun 2017 menjadi Rp13,9 triliun di tahun 2018.

Dalam rangka mengelola pertumbuhan biaya bunga, sejak awal tahun BNI berupaya memperbaiki komposisi simpanan nasabah dengan meningkatkan dana murah yaitu giro dan tabungan yang tercermin dari rasio CASA. BNI mengalami peningkatan rasio CASA dari 63,1% di tahun 2017 menjadi 65,3% di tahun 2018. Kondisi ini menyebabkan turunnya *cost of fund* simpanan nasabah dari 3,0% di tahun 2017 menjadi 2,8% di tahun 2018.



BEBAN BUNGA ATAS PINJAMAN YANG DITERIMA

Beban bunga atas pinjaman yang diterima meningkat dari Rp1,9 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp3,5 triliun pada tahun 2018 atau sebesar 86,0%. Peningkatan tersebut merupakan salah satu strategi pendanaan BNI untuk menjaga komposisi dana jangka pendek dan jangka panjang.

BEBAN BUNGA ATAS EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

Beban bunga atas efek-efek yang diterbitkan mengalami peningkatan dari Rp216 miliar di tahun 2017 menjadi Rp243 miliar atau naik sebesar 12,5%.

BEBAN BUNGA BAGI HASIL MUDHARABAH

Beban bunga bagi hasil *mudharabah* mengalami peningkatan sebesar 7,5% atau sebesar Rp69 miliar di tahun 2018 seiring dengan peningkatan dana *syirkah* temporer sebesar 10,8% dari Rp24,3 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp27,0 triliun tahun 2018.

PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH – NETO

Pendapatan bunga dan pendapatan syariah naik sebesar 12,7% di tahun 2018 yang diiringi dengan meningkatnya beban bunga dan beban syariah sebesar 15,1%, sehingga menghasilkan pendapatan bunga dan pendapatan syariah neto yang meningkat sebesar 11,0%.

PENDAPATAN PREMI NETO

BNI Life sebagai salah satu anak perusahaan BNI ikut berkontribusi terhadap pendapatan BNI secara konsolidasi. BNI Life mencatatkan pendapatan premi netto Rp1,7 triliun pada tahun 2018, mengalami penurunan sebesar 3,2% dari tahun 2017 yang sebesar Rp1,8 triliun. Kondisi ini dipengaruhi oleh terkoreksinya harga pasar efek-efek dan obligasi pemerintah yang menjadi sarana investasi BNI Life untuk pengembangan portofolionya.

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

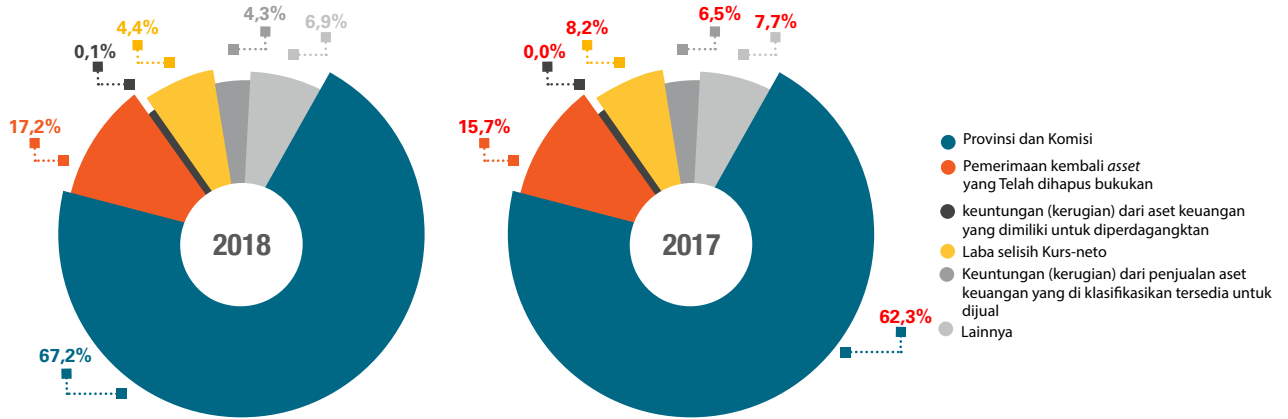
Kondisi makro ekonomi selama 2018 mengakibatkan fluktuasi pada suku bunga dan pelemahan kurs rupiah terhadap mata uang asing. Hal ini memengaruhi industri perbankan secara umum, termasuk BNI yang tercermin dari pertumbuhan pendapatan operasional lainnya selama 2018 sebesar 5,2% dibandingkan tahun 2017. Pertumbuhan ini jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan pendapatan operasional lain selama 2017 yang naik 10,8% dibandingkan tahun 2016.

Tabel Pendapatan Operasional Lainnya

Uraian	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Provisi dan komisi	7.802	6.872	6.085	930	13,5	787	12,9
Penerimaan kembali aset yang telah di hapus bukukan	1.997	1.732	1.378	265	15,3	354	25,7
Keuntungan (kerugian) dari aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan	12	(38)	(43)	50	(131,3)	5	11,9
Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan yang di klasifikasikan tersedia untuk dijual	509	720	646	(212)	(29,4)	74	11,5
Laba selisih kurs – neto	494	908	685	(414)	(45,6)	223	32,5
Lainnya	800	846	801	(46)	(5,5)	(46)	5,5
Total	11.613	11.040	9.552	106	5,2	1.544	15,6



Grafik Komposisi Pendapatan Operasional Lainnya



PROVISI DAN KOMISI

Pendapatan dari provisi dan komisi BNI selama tahun 2018 naik dari Rp6,9 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp7,8 triliun atau naik 13,5%. Pertumbuhan pendapatan atas provisi dan komisi di tahun 2018 mencapai Rp930 miliar ini didominasi oleh pendapatan dari transaksi *trade finance*, pengelolaan rekening, bisnis kartu, bank garansi, dan pendapatan *fee* ATM kerja sama.

PENERIMAAN KEMBALI ASET YANG TELAH DIHAPUS BUKUKAN

Penerimaan kembali aset yang dihapusbukukan merupakan pendapatan yang berasal dari setoran pokok aset yang telah dihapusbukukan sebelum tahun 2018. Pendapatan ini meningkat sebesar 15,3% dari Rp1,7 triliun di 2017 menjadi Rp2,0 triliun di 2018. Pertumbuhan ini merupakan prestasi BNI dalam memperoleh kembali setoran atas aset yang telah dihapus buku sebelum tahun 2018.

KEUNTUNGAN (KERUGIAN) DARI ASET KEUANGAN YANG DIMILIKI UNTUK DIPERDAGANGKAN

Di tahun 2018, aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan mengalami keuntungan menjadi sebesar Rp12 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 yang mengalami kerugian sebesar Rp38 miliar.

KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN ASET KEUANGAN YANG DIKLASIFIKASIKAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL DAN DIMILIKI UNTUK DIPERDAGANGKAN

Keuntungan dari penjualan aset keuangan yang tersedia untuk dijual mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi sebesar Rp509 miliar atau sebesar 29,4% dari tahun sebelumnya sebesar Rp720 miliar.

LABA SELISIH KURS NETO

Laba selisih kurs neto mengalami penurunan sebesar 45,6% menjadi Rp494 miliar di tahun 2018, hal ini disebabkan melemahnya kurs Rupiah terhadap mata uang asing selama tahun 2018.



BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Biaya operasional lainnya mengalami peningkatan sebesar 6,8% menjadi sebesar Rp21,8 triliun. Pertumbuhan *single digit* ini menyebabkan perbaikan *cost to income ratio* (CIR) dari 43,9% di tahun 2017 menjadi 42,6% di 2018. Hal yang serupa juga tampak pada rasio BOPO yang turun dari 71,0% di tahun 2017 menjadi 70,2% di tahun 2018. Membaiknya kedua rasio tersebut menjadi tolok ukur bagi kondisi perusahaan bahwa kegiatan operasional bank di tahun 2018 sudah berjalan jauh lebih efisien bila dibandingkan tahun 2017.

Tabel Beban Operasional Lainnya

	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Beban gaji dan tunjangan	9.519	9.277	8.834	242	2,6	443	5,0
Umum dan administrasi	7.667	6.923	6.212	744	10,8	711	11,4
Beban promosi	1.291	1.039	946	252	24,2	93	9,8
Premi penjaminan	971	877	729	93	10,6	148	20,3
Lain-lain	2.336	2.281	2.085	55	2,4	196	9,4
Total	21.783	20.396	18.806	1.387	6,8	1.591	8,5

➤ Komposisi Beban Operasional Lainnya



BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

Beban gaji dan tunjangan di tahun 2018 meningkat sebesar Rp242 miliar atau 2,6% dibandingkan tahun 2017.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi meningkat Rp744 miliar atau 10,8% dibandingkan tahun 2017. Kenaikan terbesar terjadi pada beban tenaga kerja alih daya, beban penyusutan serta beban telekomunikasi seiring dengan pertumbuhan bisnis.

BEBAN PROMOSI

Beban promosi di tahun 2018 meningkat 24,2% menjadi Rp1,3 triliun dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1,0 triliun. Kenaikan ini dirasakan perlu oleh BNI dalam rangka meningkatkan loyalitas dan hubungan baik dengan nasabah, yang dilakukan dalam bentuk *sponsorship*, *event management*, media promosi dan publikasi lainnya.

BEBAN PREMI PENJAMINAN

Beban premi penjaminan adalah beban premi yang dibayarkan BNI kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tercatat meningkat sebesar Rp93 miliar atau 10,6% di tahun 2018 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan premi ini sejalan dengan meningkatnya simpanan nasabah di tahun 2018 sebesar 12,1%.

BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain meningkat sebesar Rp55 miliar atau 2,4% dibandingkan dengan tahun 2018. Beban ini didominasi oleh beban iuran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beban transaksi bisnis kartu, beban *fee* kerja sama dengan pihak ketiga dan beban dana PKBL sesuai dengan keputusan RUPS.



Analisis &
Pembahasan
Manajemen



BEBAN PENYISIHAN CADANGAN KERUGIAN

Pembentukan beban cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,7% dibandingkan tahun 2017 yaitu dari Rp7,1 triliun menjadi Rp7,4 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan *coverage ratio* dari 148,0% di 2017 menjadi 152,9% di 2018.

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK

Laba sebelum pajak penghasilan BNI naik dari Rp17,2 triliun di tahun 2017 menjadi Rp19,8 triliun di tahun 2018 atau naik 15,5%.

BEBAN PAJAK

Beban pajak BNI mengalami peningkatan sebesar 39,3% menjadi Rp4,7 triliun. Sesuai dengan ketentuan berlaku, BNI telah memenuhi persyaratan pembayaran tarif tunggal sebesar 20%.

LABA TAHUN BERJALAN

Sampai dengan akhir tahun 2018, laba BNI mengalami peningkatan mencapai 10,3% menjadi Rp15,0 triliun.

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI

Pos ini terdiri dari keuntungan revaluasi aset tetap yang mengalami peningkatan dari kerugian sebesar Rp3,8 miliar menjadi keuntungan Rp2,8 triliun yang dikarenakan peningkatan pada revaluasi aset yang dilakukan pada tahun 2018. Selain itu pos pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja juga mengalami peningkatan dari sebelumnya kerugian sebesar Rp148,7 miliar menjadi keuntungan Rp601,4 miliar karena penyesuaian pada PSAK 24.

POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI

Pos ini terdiri dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing mengalami penurunan dari sebelumnya keuntungan Rp11,4 miliar menjadi kerugian sebesar Rp8,3 miliar. Kemudian keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual mengalami penurunan dari keuntungan Rp2,5 triliun menjadi kerugian Rp5,0 triliun.

TOTAL LABA KOMPREHENSIF

Total laba komprehensif BNI untuk periode tahun 2018 setelah mempertimbangkan pendapatan komprehensif adalah sebesar Rp14,2 triliun mengalami penurunan sebesar 8,8% dari posisi Rp15,6 triliun di tahun 2017.

Total Laba Rugi Komprehensif

	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Laba tahun berjalan	15.092	13.771	11.410	1.321,2	9,6	2.360,4	20,7
(kerugian/pendapatan komprehensif lain – setelah pajak)	(856)	1.847	923	(2.702,6)	(146,3)	924,6	100,2
Laba komprehensif tahun berjalan	14.236	15.618	12.333	(1.381,4)	(8,8)	3.285,0	26,6
Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :							
Kepentingan non pengendali	(14)	214	73	(228,5)	(106,6)	141,2	192,9
Pemilik entitas induk	14.250	15.403	12.259	(1.152,9)	(7,5)	3.143,8	25,5



LABA PER SAHAM DAN DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Laba tahun berjalan per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan. Meningkatnya laba bersih setelah pajak penghasilan sebesar 10,3% menyebabkan meningkatnya laba per saham BNI dari Rp730 per lembar di tahun 2017 menjadi Rp805 per lembar saham pada tahun 2018.

Tabel Laba Per Saham Dasar (dalam rupiah penuh)

Uraian	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018		Pertumbuhan 2016-2017	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Laba tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	15.015.118	13.616.476	11.339.743	1.398.642	10,3	2.277.733	20,1
Rata-rata Tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar (lembar saham)	18.648.656.458	18.648.656.458	18.588.205.225	-	0,0	60.451.233	0,3
Laba per Saham Dasar	805	730	610	75	10,3	120	19,7

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

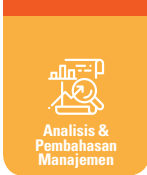
Pada tahun 2018, saldo kas dan setara kas meningkat dibandingkan tahun 2017 dari Rp92,0 triliun menjadi Rp98,9 triliun, yang terdiri dari arus kas keluar bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp4,3 triliun, arus kas keluar bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp9,6 triliun, dan arus kas masuk bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp20,6 triliun.

Tabel Arus Kas

Uraian	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	(4.274)	33.626	15.999	(37.951)	17.627
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(9.612)	(23.274)	(29.400)	13.663	6.126
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	20.609	3.245	8.060	17.416	(4.815)
Arus Kas Bersih	6.723	13.597	(5.341)	(6.874)	18.938

ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Arus kas bersih yang dikeluarkan dari aktivitas operasi untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp4,3 triliun. Arus kas bersih merupakan pengurangan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari peningkatan simpanan nasabah, dan peningkatan pada pendapatan bunga. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari penyaluran pinjaman, pembayaran bunga, serta beban operasional lainnya. Hal ini berarti BNI mampu untuk melakukan proses bisnis yang baik dengan memanfaatkan sumber operasionalnya seperti kredit yang diberikan, simpanan nasabah, dan pembayaran pajak menjadi kas yang sudah diakui dan diperoleh.



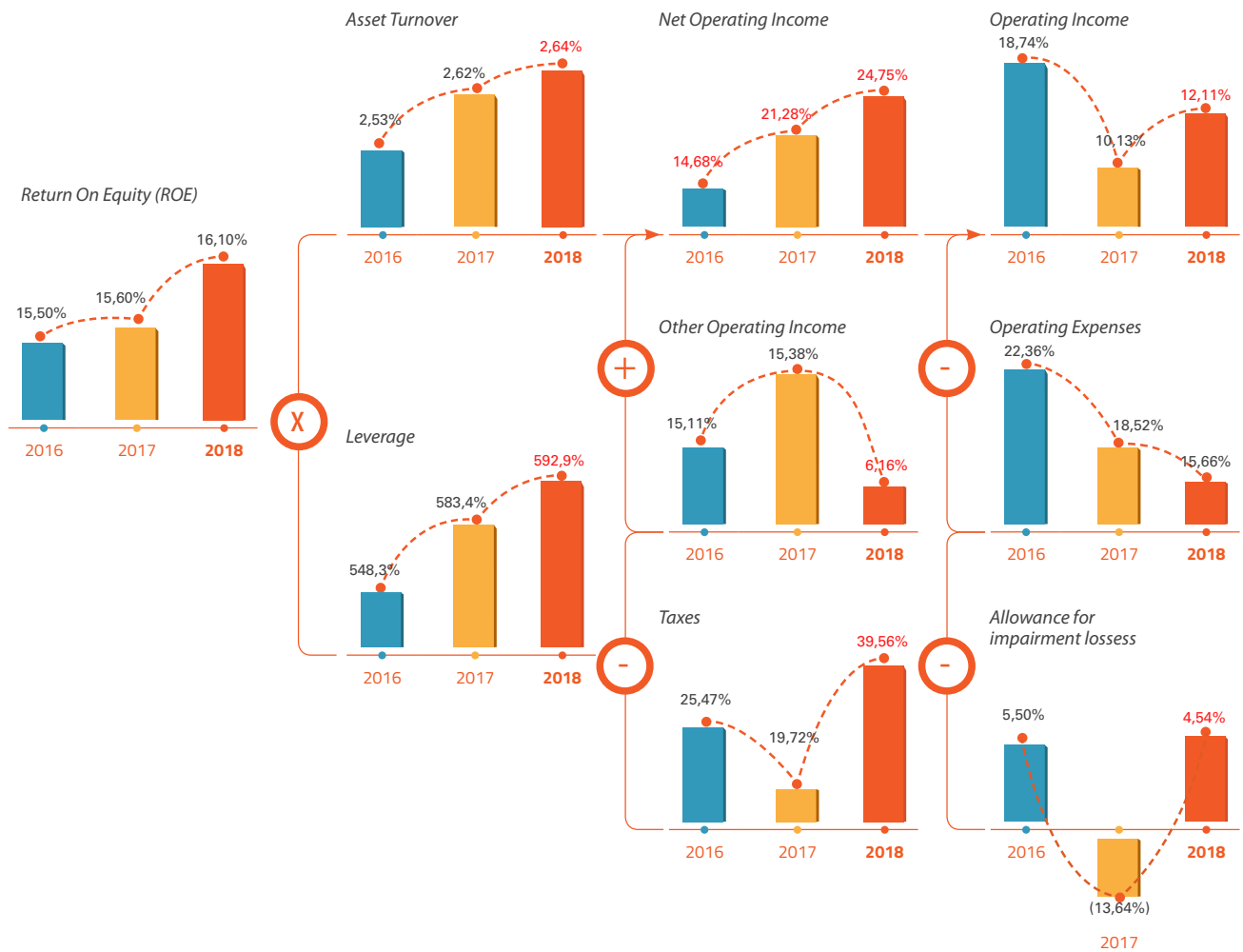
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI

Arus kas bersih yang dikeluarkan dari aktivitas investasi untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp9,6 triliun. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembelian obligasi pemerintah serta pembelian aset tetap. Hal ini mengindikasikan BNI masih melakukan tambahan investasi dan proses bisnis dalam bentuk obligasi namun belum mendapatkan imbal hasil dalam bentuk kas dari investasi yang dikeluarkan selama tahun 2018.

ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN

Arus kas bersih yang didapatkan dari aktivitas pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp20,6 triliun. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari kenaikan pinjaman yang diterima dan utang *repo* yang diterbitkan. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembayaran dividen. Hal ini memiliki arti bahwa BNI masih mampu mendapatkan kas dalam bentuk pendanaan dari pinjaman yang diterima yang mampu menutup kas keluar dalam bentuk dividen dan lain-lain.

Du Pont Analysis





RASIO KEUANGAN

Tabel Rasio Keuangan

	2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)
MODAL			
CAR-Tier I	17,4	17,4	18,3
CAR-Tier II	1,1	1,1	1,1
CAR (Risiko Kredit, Pasar dan Operasional)	18,5	18,5	19,4
Kualitas Aset			
NPL <i>Nett</i>	0,8	0,7	0,4
NPL <i>Gross</i>	1,9	2,3	3,0
Rasio Kecukupan pencadangan kerugian terhadap pinjaman yang bermasalah	152,9	148,0	146,0
Profitabilitas			
ROA	2,8	2,7	2,7
ROE	16,1	15,6	15,5
Margin Bunga Bersih	5,3	5,5	6,2
Efisiensi			
BOPO	70,1	71,0	73,6
CIR	42,5	43,9	44,0
Likuiditas			
LDR	88,8	85,6	90,4
LFR		85,3	90,4
Kepatuhan			
GWM (Rupiah)	6,5	6,6	6,8
Posisi Devisa Neto	2,0	2,5	3,4

RASIO PERMODALAN

RASIO KECUKUPAN MODAL

Rasio kecukupan modal (CAR) pada tahun 2018 stabil di 18,5%. Stabilitasnya CAR ini disebabkan oleh pertumbuhan modal yang sejalan dengan pertumbuhan aset produktif di tahun 2018. Rasio CAR BNI masih jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan Bank Indonesia melalui POJK No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016 yaitu minimum sebesar 9% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2.

RASIO KUALITAS ASET

RASIO NPL

Terdapat dua strategi utama yang diterapkan oleh BNI untuk mengelola kualitas aset, strategi pertama adalah dengan melakukan ekspansi pinjaman yang diberikan secara selektif pada sektor-sektor yang berisiko rendah. Strategi kedua adalah dengan melakukan pengelolaan terhadap debitur-debitur yang bermasalah namun masih memiliki potensi perbaikan melalui skema *remedial and restructuring* untuk mendukung perbaikan kondisi keuangan dan bisnis debitur tersebut. Strategi ini berdampak pada perbaikan rasio NPL BNI dari 2,3% di tahun 2017 menjadi 1,9% di tahun 2018.

COVERAGE RATIO

Dalam rangka mengantisipasi kondisi makroekonomi yang masih fluktuatif, BNI melakukan mitigasi risiko atas pinjaman yang diberikan dengan membentuk pencadangan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercermin dari *coverage ratio* 152,9% pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 148,0%.



RASIO PROFITABILITAS

ROA

Return on Assets (ROA) BNI meningkat menjadi 2,8% pada tahun 2018 dari 2,7% pada tahun 2017. Peningkatan ini merupakan sinyal atas naiknya potensi keuntungan BNI atas kenaikan aset produktif selama tahun 2018.

ROE

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan BNI dalam mencetak laba bersih dengan memaksimalkan modalnya dan menghasilkan laba yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE mengalami kenaikan dari 15,6% pada tahun 2017 menjadi 16,1% pada tahun 2018.

NIM

Margin bunga bersih (Net Interest Margin) pada tahun 2018 menurun menjadi 5,3% dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,5%. Penurunan rasio di tahun 2018 tersebut lebih merupakan salah satu strategi BNI untuk dapat menjaga kualitas aset dengan tidak menaikkan suku bunga pinjaman yang diberikan selama tahun 2018 walaupun Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuannya (*7 day repo rate*) dari 4,25% di awal tahun 2018 menjadi 6,00% pada penutupan tahun 2018.

RASIO EFISIENSI

BOPO

Membaiiknya rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dari 71,0% di tahun 2017 menjadi 70,1% di tahun 2018 disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya masing-masing 12,4% dan 3,3% pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan kemampuan BNI untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih efisien.

CIR

Cost to Income Ratio (CIR) adalah salah satu rasio yang dapat mengukur tingkat efisiensi atas beban operasional yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan secara optimal. Di tahun 2018 CIR BNI mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2017 dari sebelumnya 43,9% menjadi 42,5%. Membaiiknya rasio ini menggambarkan bahwa selama tahun 2018 BNI bisa memanfaatkan *resource* secara maksimal untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

RASIO LIKUIDITAS

RASIO PINJAMAN TERHADAP SIMPANAN DAN RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL

Rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 88,8% jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 85,6%. Kondisi ini searah dengan strategi Perusahaan untuk mendorong pertumbuhan kredit yang didukung oleh pertumbuhan DPK yang sehat dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dengan tetap menjaga kualitas kredit. Rasio tersebut masih berada dalam kisaran yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah di mana Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) berada dikisaran menjadi 80% sampai dengan 92%.

Sampai dengan tahun 2018, rasio RIM berada pada level 88,8% dengan total Surat Berharga Korporasi (Non Bank) yang dimiliki sebesar Rp1,6 triliun dan Surat Berharga Korporasi yang diterbitkan dan dibeli oleh investor Non Bank sebesar Rp2 triliun.

RASIO KEPATUHAN

GIRO WAJIB MINIMUM

Dalam pengelolaan likuiditas harian, BNI selalu berusaha menjaga tingkat kecukupan likuiditas yang optimal untuk mendukung operasional harian dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia melalui Giro Wajib Minimum (GWM). Pada Desember 2018, GWM Rupiah BNI tercatat sebesar 6,5% dan GWM Valuta Asing sebesar 8,0%. Posisi likuiditas ini sesuai dengan PBI No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.19/4/PADG/2017 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.

POSISI DEvisa NETO

Posisi Devisa Neto (PDN) Desember 2018 tercatat pada level 2,0%, sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar 2,5%. Angka tersebut masih jauh di bawah jumlah maksimum yang ditetapkan BI pada PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBI No. 17/5/PBI/2015, yaitu sebesar 20% dari modal.

TINJAUAN INFORMASI KEUANGAN LAINNYA

TINGKAT KESEHATAN BANK

Tingkat Kesehatan Bank (TKB) adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individu maupun secara konsolidasi. Tingkat Kesehatan Bank merupakan sarana bagi Bank untuk melakukan identifikasi dini permasalahan bank, menetapkan strategi bisnis di waktu yang akan datang, menyusun dan melaksanakan *corrective action* atas kelemahan/permasalahan bank, memberikan dasar bagi proses pengaitan modal dengan risiko, sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan serta untuk meningkatkan daya saing. Sedangkan bagi otoritas pengawas merupakan sarana dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan 4 (empat) faktor sebagai berikut:

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)
Penilaian Profil risiko dilakukan dengan menilai Risiko Inheren (risiko yang melekat pada aktivitas Bank) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terhadap 8 jenis risiko.
2. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)
Penilaian Tata Kelola Perusahaan merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
3. Rentabilitas (*Earnings*)
Penilaian atas faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas.
4. Permodalan (*Capital*)
Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, BNI mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risikonya.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilaporkan kepada regulator (OJK) setiap 6 bulan (semesteran) pada periode Juni dan Desember. Hasil penilaian TKB BNI periode 31 Desember 2018 berada pada peringkat "Sehat" yang berarti bahwa:

- a. Kondisi Bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- b. Peringkat faktor-faktor penilaian (Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan) secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Profil risiko BNI, sebagai salah satu faktor penilaian TKB periode 31 Desember 2018 berada pada peringkat 2 (*low to moderate*). Sebagai dampak dari profil risiko BNI yang berada pada tingkat *low to moderate* dan sesuai perhitungan menggunakan Internal *Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), maka CAR minimum sesuai profil risiko sebesar 9,9%. Jika ditambah dengan modal penyangga (*buffer*) yaitu *Conservation Buffer* 1,875%, *Countercyclical Buffer* 0% dan *Capital Surcharge* 1,125%, maka batas rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah 12,9%. Pada tahun 2018, KPMM BNI sebesar 18,5% telah melebihi batas minimum yang ditentukan.



Analisis &
Pembahasan
Manajemen



KOMITMEN DAN KONTIJENSI

BNI memiliki komitmen dan kontijensi. Ikhtisar komitmen dan kontijensi Bank yang dinyatakan dalam nilai kontrak sebagai berikut:

Tabel Komitmen dan Kontijensi

Uraian	2018 Rp Miliar	2017 Rp Miliar
Tagihan komitmen		
Pembelian berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	68.881	66.057
Lain-lain	510	463
Total	69.391	66.520
Liabilitas komitmen		
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	54.228	49.963
<i>Irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan	12.455	11.630
Penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	68.772	66.018
Total	135.455	127.611
Tagihan kontinjensi		
Garansi bank yang diterima	17.434	18.032
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	4.064	4.705
Lainnya	194	164
Total	21.692	22.901
Liabilitas kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:		
<i>Performance bonds</i>	29.755	29.760
<i>Advance payment bonds</i>	10.679	10.832
<i>Standby letters of credit</i>	9.215	8.269
<i>Garansi bank lainnya</i>	7.940	7.124
<i>Bid bonds</i>	4.174	3.481
<i>Shipping guarantee</i>	4	2
<i>Risk sharing</i>	-	-
Total	61.767	59.468

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal Bank yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp Miliar)	2017 (Rp Miliar)
Garansi bank yang diterbitkan		
Pihak yang berelasi	26.294	23.743
Pihak ketiga	35.473	35.725
<i>Irrevocable letters of credit</i>		
Pihak yang berelasi	8.152	6.660
Pihak ketiga	4.303	4.971
Total	74.223	71.099



Transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp Miliar)	2017 (Rp Miliar)
Lancar	73.847	68.947
Dalam perhatian khusus	2.317	2.140
Kurang lancar	56	-
Diragukan	-	-
Macet	3	12
Total	74.223	71.099

Di samping itu, BNI juga telah menyusun rincian terkait pertumbuhan Komitmen dan Kontinjensi yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	2018	2017	2016	Pertumbuhan			
				2017-2018		2016-2017	
				(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)
Tagihan Komitmen							
Pembelian berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	68.881	66.057	56.936	2.824	4,3	6.121	10,2
Lain-lain	510	463	459	48	10,2	4	0,9
Total Tagihan Komitmen	69.391	66.520	57.395	2.872	4,3	6.125	10,1
Liabilitas Komitmen							
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang belum Ditarik	54.228	49.963	54.548	4.265	8,5	(4.585)	(8,4)
Irrevocable L/C yang Masih Berjalan	12.456	11.630	10.515	825	7,1	1.116	10,6
Posisi Penjualan Spot dan Derivatif yang masih Berjalan	68.772	66.018	57.065	2.753	4,2	8.952	15,7
Total Liabilitas Komitmen	135.455	127.611	122.128	7.845	6,2	5.483	4,5
Tagihan Kontinjensi							
Garansi yang Diterima	17.434	18.032	18.697	(599)	(3,3)	(664)	(3,6)
Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	4.064	4.705	4.476	(641)	(13,6)	229	5,1
Lain-lain	194	163	142	31	19,0	21	14,7
Total Tagihan Kontinjensi	21.692	22.901	23.315	(1.209)	(5,3)	(414)	(1,8)
Liabilitas Kontinjensi							
Garansi Bank yang Diberikan	61.767	59.468	54.295	2.299	3,9	5.173	9,5
Total Liabilitas Kontinjensi	61.767	59.468	54.295	2.299	3,9	5.173	9,5

Jumlah liabilitas komitmen pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 6,2% dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebagian besar dipengaruhi oleh naiknya fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik sebesar 8,5%. Tagihan kontinjensi pada tahun 2018 turun sebesar 5,3% dibandingkan tahun 2017 yang didominasi oleh penurunan Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian sebesar 13,6%. Namun untuk posisi liabilitas kontinjensi mengalami kenaikan sebesar 3,9% dibandingkan tahun 2017 yang dipengaruhi oleh kenaikan garansi bank yang diberikan. Secara garis besar fluktuasi dari pergerakan pos komitmen dan kontinjensi ini sejalan dengan pertumbuhan kredit, mengingat debitur semakin mengoptimalkan penggunaan produk dan layanan BNI yang beragam dengan fitur yang bersaing.

ASET BANK YANG DIJAMINKAN

Pada Tahun 2018, tidak ada Aset Bank yang dijaminkan.



Analisis &
Pembahasan
Manajemen



DERIVATIF DAN FASILITAS LINDUNG NILAI

BNI melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan Bank ataupun kepentingan Nasabah. Per posisi 31 Desember 2018, BNI melakukan transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) USD-IDR mencatatkan total nilai aset sebesar USD 120 juta. Selain transaksi CCS, BNI juga melakukan transaksi *Interest Rate Swap* (IRS) dengan total nilai aset per posisi 31 Desember 2018 sebesar USD 1.862,0 juta. Transaksi CCS dan IRS dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan portofolio yang dimiliki, sebagai antisipasi atas pergerakan mata uang serta suku bunga yang berpotensi merugikan bank.

Dalam menjalankan bisnisnya, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas suku bunga, dan transaksi *spot* untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga. Instrumen keuangan derivatif diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kenaikan nilai wajar kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif. Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa. Kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing dan *cross currency swap* dan tingkat suku bunga *swap* dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

Selain itu, dalam melakukan usaha bisnis, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan *derivative* seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas suku bunga dan transaksi *spot* untuk keperluan pembiayaan, perdagangan dan lindung nilai.

Tabel Tagihan dan Liabilitas Derivatif Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

Instrumen	2018		
	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)	Nilai wajar	
		Tagihan derivatif (Rp juta)	Liabilitas derivatif (Rp juta)
Terkait Nilai Tukar			
Kontrak berjangka - beli			
USD	239.031.000	2.565	(26.092)
Kontrak berjangka – jual			
USD	466.832.415	84.598	(2.594)
CNY	12.100.000	312	-
<i>Swap</i> mata uang asing - beli			
EUR	59.068.329	2.699	(12.776)
JPY	600.492.755	5.752	-
USD	734.914.068	8.415	(220.572)
GBP	500.000	-	(36)
<i>Swap</i> mata uang asing – Jual			
AUD	4.700.000	165	-
EUR	2.900.000	1.259	(44)
GBP	3.500.000	36	(336)
CNY	20.688.068	33	-
JPY	1.050.862.321	1.512	(29)
HKD	423.790.330	-	(531)
USD	683.686.726	298.097	(15.686)



Instrumen	2018		
	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)	Nilai wajar	
		Tagihan derivatif (Rp juta)	Liabilitas derivatif (Rp juta)
<i>Spot mata uang asing - beli</i>			
USD	119.225.000	-	(16.305)
EUR	2.300.000	-	(40)
<i>Spot mata uang asing - jual</i>			
EUR	2.800.000	79	-
JPY	6.600.000	3	-
SGD	100.000	6	-
USD	108.691.079	14.956	-
<i>Option mata uang asing - beli</i>			
USD	8.550.000	5	(3.834)
<i>Option mata uang asing - jual</i>			
USD	23.550.000	3.605	(1.355)
<i>Terkait Suku Bunga</i>			
<i>Swap atas suku bunga</i>			
USD	1.862.000.000	156.187	(1.303)
<i>Terkait Nilai Tukar dan Suku Bunga</i>			
<i>Swap mata uang asing dan suku bunga</i>			
USD	120.028.426	24.964	(20.495)
TOTAL		605.248	(322.028)

Tabel Tagihan dan Liabilitas Derivatif Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

Tahun 2017			
Instrumen	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)	Nilai wajar	
		Tagihan derivatif (Rp Juta)	Liabilitas derivatif (Rp Juta)
<i>Terkait Nilai Tukar</i>			
<i>Kontrak berjangka - beli</i>			
USD	62.957.000	547	(1.339)
<i>Kontrak berjangka - jual</i>			
JPY	7.796.500	-	(1)
USD	199.540.743	856	(1.731)
<i>Swap mata uang asing - beli</i>			
EUR	22.786.049	3.468	(850)
USD	677.118.232	7.815	(45.827)
<i>Swap mata uang asing - Jual</i>			
AUD	4.400.000	-	(570)
CNY	26.045.766	326	-
EUR	6.967.492	847	(743)
GBP	9.000.000	-	(1.406)
USD	1.473.201.692	72.995	(9.860)
HKD	9.500.000	-	(177)



Analisis &
Pembahasan
Manajemen



Tahun 2017			
Instrumen	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)	Nilai wajar	
		Tagihan derivatif (Rp Juta)	Liabilitas derivatif (Rp Juta)
<i>Spot mata uang asing - beli</i>			
EUR	220.000	11	-
USD	33.500.000	232	-
<i>Spot mata uang asing - jual</i>			
USD	5.000.000	-	(105)
<i>Option mata uang asing – beli</i>			
USD	110.000.000	29.015	
<i>Option mata uang asing – jual</i>			
USD	110.000.000	-	(29.015)
Terkait Nilai Tukar dan Suku Bunga			
<i>Swap mata uang asing dan suku bunga</i>			
USD	110.403.244	23.092	(17.708)
<i>Swap atas suku bunga</i>			
USD	1.775.000.000	77.680	(4.488)
Total		216.884	(113.820)

Tabel Tagihan dan Liabilitas Derivatif Berdasarkan Hubungan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2018	2017
Tagihan derivatif		
<i>Pihak berelasi</i>		
Mata uang asing	56.341	27.361
<i>Pihak ketiga</i>		
Mata uang asing	548.907	189.523
Total	605.248	216.884
Liabilitas derivatif		
<i>Pihak berelasi</i>		
Mata uang asing	41.234	30.630
<i>Pihak ketiga</i>		
Mata uang asing	280.794	83.190
Total	322.028	113.820

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen Bank, seluruh tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diklasifikasikan ke dalam golongan lancar.



DAMPAK PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA BANK

Sejak awal kuartal pertama 2018, Bank Indonesia sudah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis point sebagai akibat tekanan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia yang disebabkan kenaikan Fed Fund Rate dan meningkatnya ketidakpastian global karena perubahan kebijakan Amerika dan sejumlah risiko geopolitik lainnya.

Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan pada kuartal ke-2 dan ke-3 sebesar 25 basis point yang merupakan langkah *pre-emptive* untuk memperkuat stabilitas ekonomi, terutama stabilitas nilai tukar terhadap perkiraan Fed Fund Rate dan meningkatnya risiko di pasar keuangan global.

Kemudian hal tersebut berdampak pada kondisi perbankan nasional yang mengalami tekanan secara signifikan pada menurunnya *margin* bunga bersih (NIM). BNI sendiri mengambil tindakan *pre-emptive* dalam menyikapi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia tersebut dengan tidak menaikkan suku bunga dasar kredit dengan pertimbangan bahwa pertumbuhan lebih sehat lebih penting guna menjaga stabilitas aset keuangan perusahaan sekaligus menopang dan mendorong kegiatan perekonomian nasional di tengah persaingan usaha yang kian kuat. Hal ini mengakibatkan turunnya NIM BNI di tahun 2018 menjadi 5,3% bila dibandingkan tahun 2017 yang tercatat mencapai 5,5%.

AKSELERASI PERTUMBUHAN FEE BASED INCOME

Fee based income di tahun 2018 yang berhasil dihimpun BNI mencapai Rp9,6 triliun, meningkat sebesar 3,3% dari tahun 2017 yang mencapai Rp9,3 triliun. Peningkatan tersebut didominasi oleh 4 (empat) aktivitas perbankan di antaranya *Account Maintenance*, *Card Business*, dan *Trade Finance*. Peningkatan *fee based income* dari jasa *Account Maintenance* tumbuh mencapai 10,0% dari Rp1,5 triliun di 2017 menjadi Rp1,7 triliun di 2018. *Card Business* mengalami pertumbuhan sebesar 9,1% dari Rp1,3 triliun di 2017 menjadi Rp1,4 triliun di 2018. Sejalan dengan peningkatan ketiga layanan tersebut, layanan *Trade Finance* juga mengalami pertumbuhan sebesar 18,5% dari Rp1,0 triliun di 2017 menjadi Rp1,2 triliun di 2018.

Tabel Rincian pertumbuhan *fee based income*

	2018 Rp Miliar	2017 Rp Miliar	2016 Rp Miliar	Pertumbuhan 2017-2018 (%)	Pertumbuhan 2016-2017 (%)
<i>Recurring Fee</i>	9.379	8.441	7.598	11,1	11,1
<i>Non Recurring Fee</i>	236	867	576	(72,8)	50,6
Total	9.615	9.308	8.174	3,3	13,9

STRUKTUR MODAL DAN PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

STRUKTUR MODAL

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Selama tahun 2018 terdapat *corporate action* terkait penambahan modal ataupun perubahan regulasi atau perlakuan akuntansi atas permodalan, yaitu penerbitan *Medium Term Note* (MTN) sebesar Rp100 miliar dalam rangka *Recovery Plan*. BNI senantiasa berupaya menjaga komposisi atau struktur modal minimal dan tidak melanggar ketentuan batas minimum yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perbankan.

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Dalam memenuhi kebutuhan permodalan agar sesuai dengan *Basel III*, BNI mencatat ATMR setelah risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional sebesar Rp563,44 triliun di tahun 2018 atau naik sebesar 9,5% dibandingkan Desember 2017. Naiknya ATMR tersebut seiring dengan tumbuhnya aset BNI yang cukup agresif di tahun 2018 atau sebesar 14,0%. Mengingat pentingnya struktur modal dalam mendukung ekspansi usaha, BNI bertekad untuk mengelola struktur modal yang sehat untuk mendukung pertumbuhan usaha secara maksimal.



Analisis & Pembahasan Manajemen



Tabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) – Bank Saja

Komponen Modal-Bank Saja	2018 Rp miliar	2017 Rp miliar	2016 Rp miliar
Modal Inti	98.014	89.765	79.645
Modal Pelengkap	6.240	5.542	4.634
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	104.254	95.307	84.278
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit	491.758	450.706	378.716
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional	68.484	61.393	54.098
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar	3.198	2.378	2.540
Rasio Modal Inti	17,4%	17,4%	18,3%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	18,6%	18,6%	19,5%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk Risiko Kredit Risiko Operasional, dan Risiko Pasar	18,5%	18,5%	19,4%

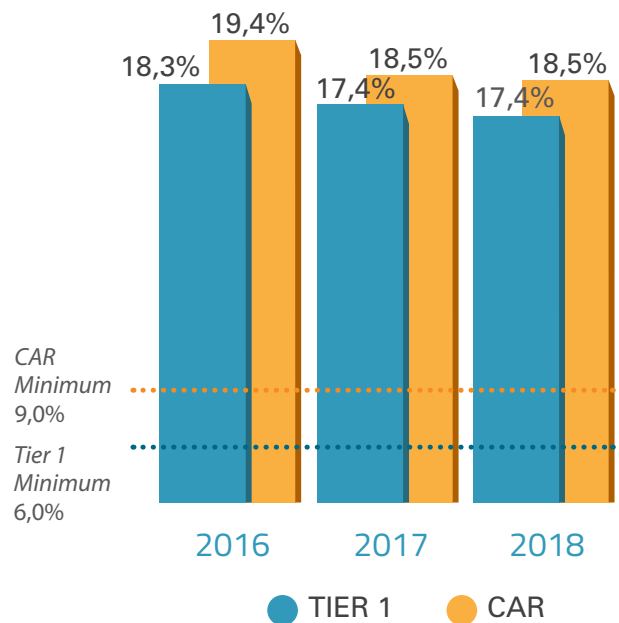
Komponen Modal – Bank Saja

• Modal Inti

Modal inti adalah modal bank yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang “Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum”. Modal inti BNI tumbuh 9,2% atau meningkat dari Rp89,7 triliun menjadi Rp98,0 triliun pada tahun 2018. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya laba tahun berjalan selama periode tahun 2018 yang menjadi Rp14,5 triliun.

• Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)

Modal pelengkap (mengacu pada modal bank) terdiri dari cadangan umum aset produktif. Modal pelengkap BNI naik dari Rp5,5 triliun pada Desember 2017 menjadi Rp6,2 triliun pada Desember 2018 atau tumbuh sebesar 12,6%. Kenaikan ini disebabkan oleh tambahan PPA (Pembentukan Penyisihan Aktiva) yang dibentuk atas pinjaman yang diberikan dengan kualitas lancar dan penerbitan MTM Subordinasi yang diakui sebagai modal pelengkap pada Agustus 2018.



PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan penilaian atas Tingkat Kesehatan Bank yang dilaporkan kepada regulator (OJK) setiap 6 bulan (semesteran) pada periode Juni dan Desember. Hasil penilaian TKB BNI periode 31 Desember 2018 berada pada peringkat “Sehat” yang berarti bahwa:

- Kondisi Bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- Peringkat faktor-faktor penilaian (Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan) secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Profil risiko BNI, sebagai salah satu faktor penilaian TKB periode 31 Desember 2018 berada pada peringkat 2 (*low to moderate*). Sebagai akibat dari profil risiko BNI yang berada pada tingkat *low to moderate* dan sesuai perhitungan menggunakan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) maka CAR minimum sesuai profil risiko sebesar 9,9%. Jika ditambah dengan modal penyangga (*buffer*) yaitu *Conservation Buffer* 1,875%, *Countercyclical Buffer* 0% dan *Capital Surcharge* 1,125%, maka batas rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah 12,9%. Pada tahun 2018, KPMM BNI sebesar 18,5% telah melebihi batas minimum yang ditentukan. Rincian tentang struktur permodalan dan manajemen risiko disajikan secara terpisah dalam Laporan Tahunan.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Sampai dengan tahun 2018, BNI memiliki tingkat likuiditas dan solvabilitas yang baik. Hal ini direpresentasikan oleh kemampuan BNI dalam memenuhi segala kewajiban jatuh tempo secara tepat waktu, baik terhadap pembayaran pokok utang ataupun beban bunganya. Berikut ini adalah rasio keuangan perbankan untuk mengukur likuiditas dan solvabilitas BNI:

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK (LIKUIDITAS BANK)

Pada akhir tahun 2018, tingkat likuiditas BNI yang diukur melalui rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (*Loan to Deposit Ratio*) mengalami kenaikan 3,2% menjadi 88,8% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 85,6%. Kenaikan ini disebabkan lebih pesatnya pertumbuhan kredit dibandingkan pertumbuhan *third party fund*. Tingkat likuiditas tersebut masih berada dalam toleransi dari OJK yaitu 85% sampai dengan 92%. Perhitungan LDR tidak memperhitungkan *funding non konvensional* seperti penerbitan *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) dan *Bilateral Loan* bertenor panjang yang sesungguhnya juga digunakan BNI untuk mendanai ekspansi pinjaman yang diberikan.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PANJANG (SOLVABILITAS BANK)

Dari sisi *solvency*, tingkat kecukupan modal BNI (*Capital Adequacy Ratio*) relatif stabil dan tidak mengalami perubahan yang berarti di tahun 2018 yaitu sebesar 18,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur permodalan yang dimiliki BNI memiliki kapabilitas untuk dapat mengimbangi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional di mana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan modal minimum yang ditetapkan oleh BI.

KOLEKTIBILITAS PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan - NPL*) di tahun 2018 sebesar 1,9%, atau turun 0,4% dari tahun 2017. Hal ini dipengaruhi oleh ekspansi kredit yang berkualitas di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan secara fundamental pada perkembangan kualitas pinjaman yang diberikan secara keseluruhan.

RESTRUKTURISASI PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Restrukturisasi dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha dan dilakukan secara selektif sesuai dengan kemampuan debitur. Jumlah pinjaman yang direstrukturisasi pada akhir tahun 2018 mencapai Rp29,2 triliun atau turun 4,0% dibanding tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pinjaman yang diperpanjang jatuh temponya sebesar Rp3,5 triliun atau turun 36,9% dari tahun sebelumnya.
2. Pinjaman yang diperpanjang jatuh temponya dan diturunkan suku bunganya sebesar Rp11,6 triliun atau turun 2,4% dari tahun sebelumnya.
3. Pinjaman yang diperpanjang jatuh temponya, diturunkan suku bunganya dan direstrukturisasi dengan cara lainnya sebesar Rp14,1 triliun atau naik 8,6% dari tahun sebelumnya.

Pinjaman yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas per tanggal 31 Desember 2018 adalah golongan lancar sebesar 40,4%, dalam perhatian khusus sebesar 42,9%, dan *non performing loan* (NPL) mencapai 16,7%.

Dilihat dari sisi jenis mata uang sebesar 82,3% dari pinjaman yang direstrukturisasi adalah dalam mata uang Rupiah sedangkan sisanya adalah dalam mata uang USD.

Pinjaman yang direstrukturisasi berdasarkan peruntukannya per tanggal 31 Desember 2018 adalah Kredit Modal Kerja sebesar 57,6%, Kredit Investasi sebesar 36,8%, dan Kredit Konsumtif mencapai 5,6%.

Dilihat dari per segmen, pinjaman yang direstrukturisasi per 31 Desember 2018 adalah untuk Korporasi sebesar 46,3%, *Middle* sebesar 33,9%, *Small* sebesar 14,2%, dan Konsumer sebesar 5,6%.



Pinjaman yang direstrukturisasi di tahun 2018 didominasi oleh sektor Manufaktur sebesar 27,2%, sektor usaha restoran dan hotel sebesar 24,2%, disusul oleh sektor usaha jasa sebesar 13,3%, sektor usaha pertambangan mencapai 8,0%, sektor Agrikultura sebesar 7,0%, dan sisanya tersebar di berbagai sektor usaha secara merata.

Tabel Pinjaman yang Direstrukturisasi Berdasarkan Kategori Restrukturisasi

Kategori Restrukturisasi	2018	2017	2016
Perpanjangan Jangka Waktu Kredit	3.521	5.577	5.285
Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Suku Bunga Kredit	11.583	11.872	11.400
Perpanjangan Jangka Waktu, Penurunan Suku Bunga Kredit, dan Skema Restrukturisasi lain-lain	14.095	12.977	14.748
Total	29.199	30.426	31.433
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(5.253)	(5.367)	(4.084)
Neto	23.945	25.060	27.349

Pinjaman yang Direstrukturisasi per Kolektibilitas

Kualitas	2018	2017	2016
Lancar	11.790	17.530	21.719
Dalam Perhatian Khusus	12.537	8.684	6.773
Kurang Lancar	1.472	876	858
Diragukan	2.236	489	117
Macet	1.164	2.847	1.965
Total	29.199	30.426	31.433

Pinjaman yang Direstrukturisasi per Jenis Sektor Usaha – Bank Saja

Sektor Usaha	2018	2017	2016
Jasa Dunia Usaha	3.483	2.900	2.849
Jasa Pelayanan Sosial	252	265	325
Konstruksi	1.309	1.065	2.097
Lain-lain	1.468	2.038	1.592
Listrik, Gas, dan Air	514	376	468
Pengangkutan, Pergudangan, dan Perdagangan	1.753	1.752	3.667
Restoran dan Hotel	6.286	6.433	5.100
Pertambangan	1.829	2.726	6.175
Perindustrian	7.097	6.171	2.719
Pertanian	2.096	4.319	4.437
Total	26.089	28.044	29.429



Pinjaman yang Direstrukturisasi per Jenis Peruntukan – Bank Saja

Peruntukan	2018	2017	2016
Kredit Modal Kerja	15.016	14.058	14.143
Kredit Investasi	9.604	11.948	13.698
Kredit Konsumtif	1.468	2.038	1.588
Total	26.089	28.044	29.429

Pinjaman yang Direstrukturisasi per Segmen – Bank Saja

Segmen	2018	2017	2016
Konsumer	1.468	2.038	1.588
Korporasi	12.076	13.297	16.216
<i>Small</i>	3.699	3.775	3.528
<i>Middle</i>	8.845	8.934	8.097
Total	26.089	28.044	29.429

TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

BNI melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Dalam kegiatan usahanya, semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

BNI dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak - pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam-LK No. KEP- 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang didefinisikan antara lain:

1. Perusahaan di bawah pengendalian BNI dan Entitas Anak;
2. Perusahaan asosiasi;
3. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
4. Perusahaan di bawah pengendalian investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
5. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
6. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah yaitu Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.



JENIS HUBUNGAN

Adapun transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan jenis hubungannya diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Jenis Hubungan

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham utama	
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	
Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia	
1. Adhi Karya dan Entitas Anak	58. Kereta Api Indonesia dan Entitas Anak
2. Amarta Karya	59. Kertas Kraft Aceh
3. Aneka Tambang dan Entitas Anak	60. Kertas Lece
4. Angkasa Pura I dan Entitas Anak	61. Kimia Farma dan Entitas Anak
5. Angkasa Pura II dan Entitas Anak	62. Kliring Berjangka Indonesia
6. ASABRI	63. Krakatau Steel dan Entitas Anak
7. ASDP Ferry Indonesia	64. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
8. Asuransi Jasa Indonesia	65. LEN Industri dan Entitas Anak
9. Asuransi Jasa Raharja dan Entitas Anak	66. LKBN Antara
10. Asuransi Jiwasraya	67. Merpati Nusantara Airlines
11. Asuransi Kredit Indonesia dan Entitas Anak	68. PAL Indonesia dan Entitas Anak
12. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Entitas Anak	69. PANN dan Entitas Anak
13. Balai Pustaka	70. Pegadaian dan Entitas Anak
14. Bank Mandiri dan Entitas Anak	71. Pelabuhan Indonesia I dan Entitas Anak
15. Bank Rakyat Indonesia	72. Pelabuhan Indonesia II dan Entitas Anak
16. Bank Tabungan Negara	73. Pelabuhan Indonesia III dan Entitas Anak
17. Barata Indonesia	74. Pelabuhan Indonesia IV dan Entitas Anak
18. Berdikari dan Entitas Anak	75. Pelayaran Nasional Indonesia dan Entitas Anak
19. Bhanda Ghara Reksa dan Entitas Anak	76. Pembangunan Perumahan dan Entitas Anak
20. Bina Karya	77. Percetakan Negara Republik Indonesia
21. Biofarma	78. Percetakan Uang Republik Indonesia dan Entitas Anak
22. Biro Klasifikasi Indonesia	79. Perhutani dan Entitas Anak
23. Boma Bisma Indra	80. Perikanan Indonesia
24. BPJS Kesehatan	81. Perikanan Nusantara
25. BPJS Ketenagakerjaan	82. Perkebunan Nusantara III dan Entitas Anak
26. Brantas Abipraya	83. Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak
27. Bulog dan Entitas Anak	84. Pertamina dan Entitas Anak
28. Dahana	85. Pertani
29. Damri	86. Perumnas
30. Danareksa dan Entitas Anak	87. Perusahaan Gas Negara dan Entitas Anak
31. Dirgantara Indonesia dan Entitas Anak	88. Perusahaan Listrik Negara dan Entitas Anak
32. Djakarta Lloyd dan Entitas Anak	89. Perusahaan Pengelola Aset dan Entitas Anak
33. Dok & Perkapalan Kodja Bahari	90. Perusahaan Perdagangan Indonesia
34. Dok dan Perkapalan Surabaya	91. Pindad dan Entitas Anak
35. Garam	92. Pos Indonesia dan Entitas Anak
36. Garuda Indonesia dan Entitas Anak	93. Primissima



Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia	
37. Hotel Indonesia Natour	94. Pupuk Indonesia Holding Company dan Entitas Anak
38. Utama Karya dan Entitas Anak	95. Rajawali Nusantara Indonesia dan Entitas Anak
39. IGLAS	96. Reasuransi Indonesia Utama dan Entitas Anak
40. Indah Karya	97. Sang Hyang Seri
41. Indofarma dan Entitas Anak	98. Sarana Karya
42. Indonesia Asahan Aluminium	99. Sarana Multigriya Finansial
43. Indra Karya	100. Sarinah dan Entitas Anak
44. Industri Kapal Indonesia	101. Semen Baturaja
45. Industri Kereta Api dan Entitas Anak	102. Semen Indonesia dan Entitas Anak
46. Industri Sandang Nusantara	103. Sucofindo dan Entitas Anak
47. Industri Telekomunikasi Indonesia	104. Surveyor Indonesia
48. Istaka Karya	105. Tambang Batubara Bukit Asam dan Entitas Anak
49. Jaminan Kredit Indonesia	106. Taspen dan Entitas Anak
50. Jasa Marga dan Entitas Anak	107. Telekomunikasi Indonesia dan Entitas Anak
51. Jasa Tirta I	108. Timah dan Entitas Anak
52. Jasa Tirta II	109. Varuna Tirta Prakasya
53. Kawasan Berikat Nusantara	110. Virama Karya
54. Kawasan Industri Makassar	111. Waskita Karya dan Entitas Anak
55. Kawasan Industri Medan	112. Wijaya Karya dan Entitas Anak
56. Kawasan Industri Wijayakusuma	113. Yodya Karya
57. Kementerian Keuangan	

PENGENDALIAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Manajemen Kunci

BERDASARKAN KEPEMILIKAN DAN/ATAU KEPENGURUSAN

Dana Pensiun BNI

Asuransi Tripakarta



NILAI TRANSAKSI

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Jenis Transaksi

Uraian	2018	2017
	(Rp juta)	(Rp juta)
GIRO PADA BANK LAIN		
Bank Mandiri	78.796	1.407.207
Bank Rakyat Indonesia	112	228
Total	78.908	1.407.434
PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA		
Bank Mandiri	1.103.975	261.052
Bank Tabungan Negara	538.387	292.534
Bank Rakyat Indonesia	35.222	138.016
LPEI	-	607.025
Total	1.677.584	1.298.627
EFEK – EFEK		
Bank Rakyat Indonesia	1.316.320	485.542
Danareksa	930.484	948.009
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	906.213	1.279.920
Bank Tabungan Negara	852.752	163.629
LPEI	827.413	1.784.242
Bank Mandiri	740.081	247.592
Hutama Karya	690.400	-
Permodalan Nasional Madani	505.971	300.964
PLN	392.070	40.579
Pegadaian	302.999	1.000
Pelabuhan Indonesia II	285.548	269.225
Waskita Karya	280.484	141.672
Telekomunikasi Indonesia	171.412	1.892
Lain-lain	388.082	389.578
Total	8.590.229	6.053.844
OBLIGASI PEMERINTAH		
Pemerintah Republik Indonesia	86.791.402	79.849.452
Total	86.791.402	79.849.452
WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA		
Waskita Karya	2.773.748	2.372.248
Adhi Karya	2.729.825	2.263.439
Brantas Abipraya	1.511.881	1.240.420
Wijaya Karya	1.118.976	1.033.111
Bank Mandiri	941.616	133.191
Hutama Karya	817.363	728.665
Garuda Indonesia	667.532	-

Uraian	2018	2017
	(Rp juta)	(Rp juta)
Bank Rakyat Indonesia	402.678	142.442
Krakatau Steel	235.672	-
Lain-lain	508.494	597.035
Total	11.707.785	8.510.551
TAGIHAN AKSEPTASI		
PLN	1.121.858	1.632.474
Garuda Indonesia	1.078.895	1.530.945
Adhi Karya	811.520	824.332
Pembangunan Perumahan	793.789	432.663
Hutama Karya	530.997	141.396
Pindad	249.080	302.617
Waskita Karya	199.077	-
Wijaya Karya	151.949	61.863
Dahana	145.812	73.498
Krakatau Steel	103.992	-
LPEI	64.858	15.984
Petrokimia Gresik	63.476	40.485
Nindya Karya	44.448	76.772
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	41.170	15.912
LEN Industri	40.854	42.645
Barata Indonesia	38.662	16.315
Dirgantara Indonesia	33.989	40.401
Lain-lain	33.625	519.934
Total	5.548.051	5.768.236
TAGIHAN DERIVATIF		
Pertamina	46.137	335
Krakatau Steel	8.122	440
Garuda Indonesia	-	13.327
PLN	-	11.660
Lain-lain	2.058	1.599
Total	56.317	27.361
PINJAMAN YANG DIBERIKAN		
PLN	14.414.539	18.626.608
Perum Bulog	12.599.313	3.815.351
Pertamina	8.888.804	2.251.796
Jasa Marga	7.825.356	5.129.498
Waskita Karya	6.641.236	5.835.011
Telkom	6.191.700	6.228.509
Krakatau Steel	4.583.740	4.131.607
Pegadaian	4.563.915	5.095.844
Semen Gresik	4.300.618	84.912
Petrokimia Gresik	4.108.777	4.360.190
Kementerian Keuangan	3.257.073	2.665.106



Analisis &
Pembahasan
Manajemen



Uraian	2018	2017
	(Rp juta)	(Rp juta)
Perkebunan Nusantara III	2.634.126	2.737.673
Perkebunan Nusantara VII	2.222.540	2.165.434
Bukit Asam	1.822.209	2.106.006
Kereta Api Indonesia	1.738.875	1.820.071
Hutama Karya	1.469.190	553.459
Pupuk Indonesia	1.056.335	459.153
Wijaya Karya	1.046.434	1.508.178
Pupuk Iskandar Muda	1.011.972	1.014.000
Rajawali Nusindo	1.108.824	1.094.772
Antam	977.840	-
Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia	974.873	752.338
Pelabuhan Indonesia I	944.584	461.717
Perkebunan Nusantara XI	924.818	465.949
PAL Indonesia	915.692	888.561
Garuda Indonesia	904.015	1.249.914
Semen Baturaja	863.904	863.904
Angkasa Pura II	700.000	185.985
Permodalan Nasional Madani	679.972	503.328
LEN Industri	638.896	90.267
Pindad	624.403	660.387
Dirgantara Indonesia	589.750	633.703
Pupuk Sriwijaya	561.008	1.066.948
Perum Peruri	541.512	227.765
Perkebunan Nusantara IV	471.189	471.189
Adhi Karya	430.000	249.950
Perkebunan Nusantara V	416.318	513.975
Pos Indonesia	331.861	364.000
Lain-lain	3.428.721	5.082.440
Total	107.404.932	86.415.499
PENYERTAAN SAHAM		
PT PANN Pembiayaan Maritim	724.338	724.338
Total	724.338	724.338
SIMPANAN NASABAH		
Entitas dikendalikan melalui Pemerintah Republik Indonesia	87.220.328	87.581.384
Manajemen Kunci	243.546	174.696
Total	87.463.874	87.756.080
SIMPANAN DARI BANK LAIN		
Entitas dikendalikan melalui Pemerintah Republik Indonesia	2.968.169	2.246.156
Total	2.968.169	2.246.156
EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI		
Bank Mandiri	87.503	-
Total	87.503	-

Uraian	2018	2017
	(Rp juta)	(Rp juta)
EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN		
Bank Rakyat Indonesia	456.854	265.896
Taspen	419.866	-
Dana Pensiun BNI	229.927	229.909
Bank Mandiri	148.952	148.941
Lain-lain	12.996	-
Total	1.268.595	644.746
PINJAMAN YANG DITERIMA		
Bank Mandiri	117.110	271.350
Bank Rakyat Indonesia	100.000	135.675
LPEI	37.804	-
Total	254.914	407.025
EFEK-EFEK SUBORDINASI		
Asuransi Tripakarta	24.988	-
Total	24.988	
LIABILITAS DERIVATIF		
Bank Mandiri	33.390	11.591
Bank Rakyat Indonesia	6.913	-
PLN	-	17.474
Lain-lain	931	1.565
Total	41.234	30.630
LIABILITAS AKSEPTASI		
Pembangunan Perumahan	306.422	184.761
Hutama Karya	280.584	41.963
Pindad	241.525	296.189
Dahana	144.327	76.283
Garuda Indonesia	71.483	125.801
Petrokimia Gresik	63.476	40.485
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	41.170	15.912
Wijaya Karya	28.459	26.769
Nindya Karya	14.746	44.350
Krakatau Steel	12.234	60.433
Semen Indonesia	9.821	14.808
Barata Indonesia	8.921	16.315
Cambrics Primissima	5.760	-
Boma Bisma Indra	5.620	-
LEN Industri	5.573	14.757
Waskita Karya	5.424	12.290
Pertamina	-	118.455
Lain-lain	8.402	71.410
Total	1.253.947	1.160.981
DANA SYIRKAH TEMPORER - GIRO MUDHARABAH		
Entitas dikendalikan melalui Pemerintah Republik Indonesia	209.056	319.334
Total	209.056	319.334



Analisis &
Pembahasan
Manajemen



Uraian	2018	2017
	(Rp juta)	(Rp juta)
DANA SYIRKAH TEMPORER – DEPOSITO MUDHARABAH		
Entitas dikendalikan melalui Pemerintah Republik Indonesia	357.052	7.824.499
Manajemen kunci	13.475	18.904
Total	370.527	7.843.403
DANA SYIRKAH TEMPORER – TABUNGAN MUDHARABAH		
Entitas dikendalikan melalui Manajemen kunci	16.545	9.499
Pemerintah Republik Indonesia	29	23
Total	16.574	9.522
SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN		
Bank Syariah Mandiri	-	100.000
Dana Pensiun BNI	-	45.000
Bank Rakyat Indonesia Syariah	-	68.500
Danareksa	-	25.000
Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-	20.000
Asuransi Tripakarta	-	1.000
Total	-	259.500
GARANSI BANK YANG DITERBITKAN		
Hutama Karya	3.205.967	3.039.526
Wijaya Karya	2.742.572	2.243.749
Adhi Karya	2.403.442	1.276.520
Pembangunan Perumahan	1.932.559	1.882.482
Pertamina	1.606.975	1.352.499
Rekayasa Industri	1.599.659	1.570.803
Nindya Karya	1.598.651	1.726.262
PLN	1.457.433	806.742
Waskita Karya	1.448.595	1.989.558
Garuda Indonesia	1.372.821	80.295
Telkom	1.350.365	1.477.346
Brantas Abipraya	1.007.708	810.321
Bank Mandiri	891.354	937.064
Petrokimia Gresik	857.687	272.932
Industri Kereta Api	613.723	-
LPEI	404.415	1.532.547
Dirgantara Indonesia	280.164	337.725
Kereta Api Indonesia	265.759	1.571
Perum Peruri	255.046	6.580
Perusahaan Gas Negara	246.313	231.016
Barata Indonesia	234.627	34.087
PAL Indonesia	173.127	280.742
LEN Industri	141.693	195.886
Pindad	122.465	14.184
Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia	102.274	195.928

Uraian	2018	2017
	(Rp juta)	(Rp juta)
Rajawali Nusindo	98.466	80.724
Semen Indonesia	91.834	90.865
Lain-Lain	418.883	1.275.440
Total	26.924.576	23.743.394
LETTER OF CREDIT		
PLN	1.328.363	975.941
Kereta Api Indonesia	1.038.299	678.194
Pembangunan Perumahan	850.133	611.572
Industri Kereta Api	766.065	-
Krakatau Steel	688.541	339.279
Hutama Karya	633.118	65.275
Pertamina	614.719	635.584
Pindad	544.579	315.440
Pelabuhan Indonesia I	287.648	532.690
Barata Indonesia	241.207	36.595
LEN Industri	146.001	420.885
Semen Gresik	139.734	86.825
Dahana	127.152	148.850
Garuda Indonesia	120.095	26.073
Nindya Karya	119.760	87.740
Perkebunan Nusantara V	79.848	73.746
Dirgantara Indonesia	69.782	365.684
Pupuk Iskandar Muda	62.154	28.686
Petrokimia Gresik	50.334	239.582
Semen Indonesia	49.340	-
Adhi Karya	46.480	-
Wijaya Karya	34.528	25.909
Lain-lain	131.956	965.181
Total	8.169.836	6.659.731
GAJI DAN TUNJANGAN		
Gaji, tunjangan dan imbalan kerja jangka panjang Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Senior Executive Vice President (SEVP), Executive Vice President (EVP) dan Senior Vice President (SPV)	372.017	366.540
Total	372.017	366.540



Selain itu, rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Transaksi dengan Pihak Berelasi

Uraian	2018	2017
ASET		
Giro pada bank lain	78.908	1.407.434
Penempatan pada bank lain	1.677.584	1.298.627
Efek-efek	8.590.229	6.053.845
Obligasi Pemerintah	86.791.402	79.849.452
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	11.707.785	8.510.551
Tagihan akseptasi	5.548.051	5.768.236
Tagihan derivative	56.317	27.361
Pinjaman yang diberikan	107.404.932	86.415.498
Penyertaan saham	724.338	724.338
Jumlah aset kepada pihak-pihak berelasi	222.579.546	190.055.342
Jumlah aset konsolidasian	808.572.011	709.330.084
Persentase jumlah aset kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset konsolidasian	27,5%	26,8%
LIABILITAS		
Simpanan nasabah	87.463.874	87.756.080
Simpanan dari bank lain	2.968.169	2.246.156
Efek-efek yang diterbitkan	1.268.596	644.745
Efek-efek subordinasi	24.988	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	739.103	-
Pinjaman yang diterima	254.914	407.025
Liabilitas derivatif	41.234	30.630
Liabilitas akseptasi	1.253.947	1.160.981
Jumlah liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	94.014.825	92.245.617
Jumlah liabilitas konsolidasian	671.237.546	584.086.818
Persentase jumlah liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset konsolidasian	14,0%	15,8%
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Simpanan <i>Mudharabah</i>	596.157	8.172.259
Sukuk <i>Mudharabah</i>	-	259.500
Jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer Pihak-Pihak Berelasi	596.157	8.431.759
Jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer	26.960.676	24.339.962
Persentase jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer kepada pihak-pihak Berelasi terhadap jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer konsolidasian	2,2%	34,6%



INFORMASI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Selama tahun 2018, BNI tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

NAMA PIHAK YANG BERTRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Selama tahun 2018, BNI tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

PENJELASAN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Selama tahun 2018, BNI tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Selama tahun 2018, BNI tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

REALISASI TRANSAKSI AFILIASI PADA PERIODE TAHUN BUKU TERAKHIR

Selama tahun 2018, BNI tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN MEKANISME REVIEW TRANSAKSI

Selama tahun 2018, BNI tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Selama tahun 2018, BNI tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

LARANGAN, BATASAN, DAN/ATAU HAMBATAN SIGNIFIKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSFER DANA ANTARA BANK DAN ENTITAS LAIN DALAM SATU KELOMPOK USAHA

Total penyediaan dana kepada pihak terkait di tahun 2018 sebesar Rp5,4 triliun. Pemberian dana kepada pihak terkait tersebut masih sesuai dengan ambang batas maksimum pemberian kredit sesuai dengan PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. PBI No. 8/13/PBI/2006 yaitu sebesar maksimal 10% dari Modal Bank. Di tahun 2018, tiga porsi penyediaan dana kepada pihak terkait yang tertinggi adalah kepada BNI Syariah sebesar Rp2,5 triliun dalam bentuk penyertaan dan Garansi bank, kemudian kepada BNI Asset Management sebesar Rp1,8 triliun, dan BNI Multifinance sebesar Rp491 miliar dalam bentuk penyertaan, pinjaman, serta *corporate card*. BNI telah melakukan transaksi dengan pihak terkait dengan prinsip adil dan wajar.

Total Penyediaan Dana Bank Kepada Pihak Terkait Sampai Dengan Desember 2018-Bank Saja

Uraian	Rp Miliar
Total Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait	5.379
Modal	104.254
BMPK (10% dari Modal)	10.425
Over (Under) terhadap BMPK	(5.046)



Analisis &
Pembahasan
Manajemen



Jenis Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Sampai Dengan Desember 2018 -Bank Saja

No	Pihak Terkait	Jenis Penyediaan Dana	Penyediaan Dana
			Rp Miliar
1	BNI Asset Management	Surat Berharga	1.814
2	BNI Syariah	Penyertaan, Garansi Bank	2.520
3	BNI Multifinance	Penyertaan, Pinjaman, <i>Corporate Card</i>	491
4	BNI Life Insurance	Penyertaan, <i>Corporate Card</i> , Garansi Bank	399
5	BNI Sekuritas	Penyertaan, Pinjaman, <i>Corporate Card</i> , dan Garansi Bank	100
6	BNI Remittance	Penyertaan	10
7	Perseorangan	Pinjaman Konsumtif dan Kartu Kredit	45
TOTAL PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT			5.379
MODAL			104.254
BMPK (10% dari Modal)			10.425
SPACE / Over (Under)			(5.046)

PROPERTI UNTUK INVESTASI

Sampai dengan akhir tahun 2018, BNI tidak memiliki aset properti yang digunakan untuk keperluan investasi

IKATAN MATERIAL TERKAIT INVESTASI BARANG MODAL

Nama Pihak Yang Melakukan Ikatan

No	Proyek	Nama Vendor
1	Gedung Penjompongan	<ul style="list-style-type: none"> PT Pembangunan Perumahan (PP) PT Artefak
2	Gedung BSD	<ul style="list-style-type: none"> PT Wika PT Advanced Design Rekragraha Omega Moverindo Sukses Inti Fajar Pratama PT Sari Jati Adhitama PT Indovickers Furnitama PT Kencana Arind Murni PT Alpha Graha Computindo PT Mitrasindo Jayatama PT Ananta Cipta Pratama
3	Gedung BNI KC Surabaya	PT Inti Indah
4	Gedung BNI KC PS Mayestik	<ul style="list-style-type: none"> PT Architeam Design Center PT Tunas Pembangunan
5	Gedung BNI KC Kotabaru P. Laut	<ul style="list-style-type: none"> PT Indah Karya PT Tunas Pembangunan

TUJUAN IKATAN

Ikatan material yang dimiliki oleh BNI bertujuan sebagai komitmen pembelian barang modal yang telah direncanakan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

SUMBER DANA

Sumber dana yang digunakan dalam pembelian barang modal berasal dari modal BNI yang telah dianggarkan selama tahun berjalan.

MATA UANG

Seluruh transaksi yang dilakukan dalam rangka pengikatan material untuk belanja modal adalah dalam mata uang rupiah.

LANGKAH PERLINDUNGAN RISIKO MATA UANG

Karena seluruh transaksi pengikatan dan belanja modal dilakukan dalam mata uang rupiah, maka BNI tidak perlu melakukan perlindungan atas risiko perlindungan atas mata uang rupiah.

NILAI IKATAN

BNI memiliki komitmen barang modal terkait dengan pembangunan gedung kantor serta pengadaan barang otomasi sebesar Rp2,1 triliun. Terkait dengan belanja modal, BNI telah melakukan beberapa pengikatan material. Beberapa pengikatan material yang dilakukan di antaranya:

1. Proyek Pembangunan gedung
 - a. Lanjutan pembangunan Gedung Penjompongan tahun 2017 sebesar Rp421 miliar.
 - b. Lanjutan pembangunan Gedung BSD tahun 2017 sebesar Rp70,6 miliar.
 - c. Pembelian *office space* di Satrio Tower (Wilayah Jakarta Senayan) sebesar Rp71,5 miliar.
 - d. Pembelian tanah dan bangunan KC Kelapa Gading sebesar Rp72,8 miliar.
 - e. Pembelian tanah dan bangunan KCP Dewi Sartika sebesar Rp47 miliar.
2. Pengembangan infrastruktur TI dan *e-Banking*
 - a. ATM *Cash Recycle Machine* (CRM) Rp109 miliar.
 - b. Mesin *Electronic Data Capture* (EDC) sebesar Rp81,2 miliar.
 - c. Konsolidasi Server *Surrounding* sebesar Rp41,7 miliar.
 - d. Konsolidasi *platform Unix* untuk *Data Center* sebesar Rp14,7 miliar.
 - e. Implementasi *e-branch* sebesar Rp7,5 miliar.
 - f. *Service Oriented Architecture* (SOA) *Enhancement* sebesar Rp16,3 miliar.
 - g. *Core IT Icons* Cabang Luar Negeri sebesar Rp25,2 miliar.

SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan atas belanja modal tersebut berasal dari sisa anggaran investasi tahun lalu, total beban penyusutan tahun lalu dan pembagian/ persentase laba bersih tahun buku sebelumnya.

INVESTASI BARANG MODAL

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

JENIS INVESTASI BARANG MODAL

Investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun 2018 sebesar Rp1,4 triliun, terdiri dari pengadaan barang otomasi senilai Rp742 miliar, pembelian tanah dan pembangunan Gedung sebesar Rp478 miliar, pembelian perabotan non otomasi sebesar Rp163 miliar serta pengadaan kendaraan sebesar Rp42 miliar.

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Pembelian barang modal tersebut bertujuan mendukung dan menunjang aktivitas operasional kegiatan perusahaan secara menyeluruh.

NILAI INVESTASI BARANG MODAL

Belanja barang modal BNI pada tahun 2018 sebesar Rp1,4 triliun. Kebutuhan investasi di tahun 2018 didominasi oleh jenis barang modal berupa perabotan otomasi yang digunakan untuk pengembangan infrastruktur IT, perluasan jaringan dan teknologi, pengembangan *digital banking* guna mempermudah transaksi nasabah serta pengadaan mesin ATM CRM dan EDC untuk menunjang bisnis.



Adapun rincian terkait nilai investasi barang modal diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Nilai Investasi Barang Modal

Jenis Barang Modal	2018 (Rp Miliar)	2017 (Rp Miliar)	2016 (Rp Miliar)
Bangunan	408	802	713
Tanah	70	150	122
Perabotan Otomasi	742	622	848
Perabotan Non Otomasi	163	219	195
Kendaraan	42	25	8
Total	1.425	1.818	1.886

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

PENCAPAIAN TARGET 2018

Di tengah gejolak politik dalam negeri dan perlambatan ekonomi secara global berdampak secara tidak langsung terhadap pertumbuhan BNI secara keseluruhan, keadaan tersebut sudah bisa diprediksi oleh BNI sejak tahun lalu dan melakukan tindakan preventif untuk tetap bertahan di tengah derasnya arus persaingan. Pada posisi Desember 2018 laba BNI tumbuh 9,6% dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar Rp13,6 triliun di tahun 2017 menjadi Rp15,0 triliun di tahun 2018.

Aset BNI tumbuh sebesar 14,0% dari tahun 2017 sebesar Rp709,3 triliun menjadi Rp808,6 triliun di tahun 2018, pertumbuhan aset tersebut ditopang oleh tumbuhnya Pinjaman yang diberikan sebesar 16,2% menjadi Rp512,8 triliun, yang diikuti pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 12,1% menjadi Rp578,8 triliun dengan LDR sebesar 88,8%. Sebagai bentuk mitigasi risiko, BNI meningkatkan *coverage ratio* dari 148,0% di tahun 2017 menjadi 152,9% dari tahun 2018.

Kebijakan Strategis 2018	Target 2018
Meningkatkan bisnis pada nasabah Kementerian, Institusi, BUMN, dan Korporasi melalui solusi keuangan yang menyeluruh.	- ROA : 2,6 - 2,8%
Meningkatkan bisnis Komersial pada industri prioritas sesuai potensi daerah.	- ROE : 16,0 -18,0%
Memperkuat bisnis kecil melalui optimalisasi <i>Upplly Chain Financing</i> Nasabah Korporasi, Komunitas/Sentra Bisnis, dan mendukung program pemerintah.	- Pertumbuhan Pinjaman : 15,0 - 17,0%
Meningkatkan CASA dengan model bisnis digital fokus pada <i>closed loop transaction</i> dan optimalisasi transaksi nasabah.	- <i>Coverage Ratio</i> : 150,0 - 153,0%
Memperkuat bisnis konsumen bekerja sama dengan mitra bisnis dan memberikan solusi transaksi keuangan dengan fokus pada <i>e-commerce</i> dan generasi milenial.	- <i>NPL Gross</i> : 2,3 -2,5%
Meningkatkan kinerja <i>outlet</i> dengan memperkuat penetrasi pasar baik DPK maupun kredit.	- LDR : 88,0 - 90,0%
Meningkatkan <i>market share</i> entitas anak dengan peningkatan sinergi, pengembangan digital, dan pertumbuhan anorganik.	- Pertumbuhan DPK : 13,0 - 15,0%
Mengoptimalkan kapabilitas organisasi untuk mendukung pencapaian bisnis.	- CIR : 42,0 - 44,0%
	- <i>Service Level</i> : Top 3

Secara umum, sampai dengan Desember 2018, BNI telah menunjukkan kinerja yang memuaskan, terlihat pada beberapa pencapaian kinerja kunci sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diukur menggunakan rasio ROA mencapai target dengan realisasi 2,5-2,8%
2. *Coverage Ratio* mencapai target dengan realisasi 146 -148%.
3. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai target dengan realisasi 18,0-22,0%.
4. Membaiknya efisiensi operasional dengan CIR sebesar 43,9%



PROYEKSI 2019

Dalam hal perencanaan bisnis untuk tahun 2019, Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2019 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2019, baik dari segi makro maupun mikro. Rencana bisnis bank tersebut diuraikan sebagai berikut:

Adapun asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi adalah sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Proyeksi 2019
1	Meningkatkan bisnis korporasi dengan menyediakan solusi keuangan terpadu dalam suatu ekosistem bisnis.	Return on Assets (ROA) : 2,5% - 2,8% Return on Equity (ROE) : 16,0% - 17,0% Pertumbuhan Pinjaman : 14,0% - 16,0% Coverage Ratio (CR) : 161,0% - 163,0% Non Performing Loan (NPL) Gross : 1,8% - 2,0% Loan to Deposit Ratio (LDR) : 88,0% - 89,0% Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) : 16,0% - 17,0% Cost to Income Ratio (CIR) : 42,0% - 43,0%
2	Meningkatkan produktivitas bisnis komersial yang fokus pada <i>supply chain</i> nasabah korporasi, perbaikan proses bisnis, dan perbaikan kualitas kredit.	
3	Meningkatkan ekspansi bisnis kecil melalui digitalisasi proses bisnis dan perbaikan kualitas kredit serta mendukung pemerataan ekonomi nasional.	
4	Akselerasi bisnis konsumen fokus pada preferensi nasabah dengan memanfaatkan data <i>analytics</i> .	
5	Meningkatkan CASA dan FBI melalui peningkatan transaksi digital, <i>strategic partnership</i> dan pengembangan model bisnis baru.	
6	Meningkatkan kapabilitas BNI Grup melalui peningkatan sinergi, inisiasi <i>agile organization</i> , serta <i>big data</i> dan <i>analytics</i> .	

NEGOTIABLE CERTIFICATE DEPOSIT (NCD)

TOTAL PEROLEHAN DANA

Sampai dengan tahun 2017, BNI telah menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) Rupiah *scriptless* (tanpa warkat) pada tahun 2016 dan 2017 dalam tiga tahap sebagai berikut:

1. Pada semester I 2016, BNI berhasil menerbitkan NCD Rupiah *scriptless* untuk pertama kalinya dengan emisi sebesar Rp3,0 triliun, dalam 6 seri tenor (6 bulan sampai dengan 3 tahun).
2. Pada semester II 2016, BNI kembali menerbitkan NCD Rupiah *scriptless* dengan total realisasi emisi sebesar Rp2,2 triliun, dari target semula Rp1 triliun (*oversubscribe*). *Oversubscription* ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan dan minat investor kepada BNI.
3. Pada semester I 2017, BNI menerbitkan NCD Rupiah *scriptless* dengan total realisasi emisi sebesar Rp2,7 triliun.

Tahap Penerbitan	Tanggal	Currency	Principal	Amount	Average Rate
1	16 Juni 2016	IDR	3.023	2.598	8,2%
2	27 September 2016	IDR	2.200	1.877	6,7%
3	10 Maret 2017	IDR	2.700	2.483	7,0%

SALDO DANA

Sampai dengan 31 Desember 2018, sisa saldo dana yang belum jatuh tempo atas NCD tersebut adalah sebesar Rp939 miliar.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN (PUB)

Pada tanggal 22 Juni 2017, BNI telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-349/D.04/2017 untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BNI Rupiah Tahap I Tahun 2017 ("Obligasi"). Nilai obligasi yang diterbitkan sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), jangka waktu 5 tahun, dengan kupon sebesar 8% per *annum* yang akan dibayarkan secara triwulanan. Obligasi BNI diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2017.



Keterangan Tentang Obligasi yang Ditawarkan

Nama Obligasi	Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017
Jumlah Pokok Obligasi	Sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah)
Harga Penawaran	100,00% dari jumlah pokok Obligasi
Jangka Waktu	5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi
Satuan Pemindahbukuan	Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya
Satuan /Perdagangan	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya
Tingkat Suku Bunga Obligasi	8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun.
Jenis Tingkat Suku Bunga	Tetap.
Periode Pembayaran Bunga	Triwulanan.
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	11 Oktober 2017.
Jaminan	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi ini adalah <i>paripassu</i> tanpa hak <i>preferen</i> dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Peringkat Efek	idAAA (<i>triple A</i>) dari Pefindo.
Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	Bank tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>)	Obligasi ini mempunyai opsi untuk pembelian kembali (<i>buy back</i>) berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Wali Amanat	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Bank untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan bisnis.

REALISASI DAN JADWAL PEMBAYARAN BUNGA

Tabel Realisasi Penerbitan PUB

dalam triliun Rupiah

Jenis Penawaran Umum	Tang-gal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Ekspansi Kredit	Total	Ekspansi Kredit	Total	
Obligasi Berkelanjutan I BNI tahap I tahun 2017	22 Juni 2017	Rp 3	Rp 0,0074	Rp 2.992	Rp 2.992	Rp 2.992	Rp 2.992	Rp 2.992	-



Tabel Pembayaran Bunga PUB

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Bunga
1	11 Oktober 2017	8%
2	11 Januari 2018	8%
3	11 April 2018	8%
4	11 Juli 2018	8%
5	11 Oktober 2018	8%
6	11 Januari 2019	8%
7	11 April 2019	8%
8	11 Juli 2019	8%
9	11 Oktober 2019	8%
10	11 Januari 2020	8%
11	11 April 2020	8%
12	11 Juli 2020	8%
13	11 Oktober 2020	8%
14	11 Januari 2021	8%
15	11 April 2021	8%
16	11 Juli 2021	8%
17	11 Oktober 2021	8%
18	11 Januari 2022	8%
19	11 April 2022	8%
20	11 Juli 2022	8%

MTN SUBORDINASI

BNI menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) Subordinasi dengan tujuan untuk memperkuat modal pelengkap (*tier 2*) dan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang, sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016.

MTN Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Bank atau perusahaan anak, Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Bank yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan perjanjian penerbitan MTN Subordinasi. Hak pemegang MTN Subordinasi adalah junior dengan hak-hak kreditur perseroan lain.

KETERANGAN TENTANG MTN SUBORDINASI YANG DITAWARKAN

MTN Subordinasi diterbitkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar rupiah) memiliki periode pembayaran kupon sebesar 8% p.a dan setiap 3 bulan (kuartalan), dengan basis perhitungan bunga 30/360 dengan tenor selama 5 tahun.

Nama	: <i>Medium Term Notes</i> Subordinasi I BNI Tahun 2018
Jumlah Pokok	: Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)
Harga Penawaran	: 100,00% dari nilai pokok MTN Subordinasi
Jangka Waktu	: 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi



Tingkat Suku Bunga Obligasi	: 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun.
Jenis Tingkat Suku Bunga	: Tetap.
Periode Pembayaran Bunga	: Triwulanan.
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	: 10 November 2018.
Jaminan	: MTN Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh perseroan atau perusahaan anak, Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan perjanjian penerbitan MTN Subordinasi. Hak pemegang MTN Subordinasi adalah junior dengan hak-hak kreditur perseroan lain pada saat likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peringkat Efek	: ^{id} AA (<i>double A flat</i>) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

TUJUAN PENGGUNAAN DANA MTN SUBORDINASI

Penerbitan MTN Subordinasi tersebut bertujuan untuk memenuhi Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 pasal 24 dan pasal 37 tentang *Recovery Plan*, di mana bank sistemik wajib memiliki surat utang berkarakteristik modal paling lambat 31 Desember 2018.

SALDO DANA MTN SUBORDINASI

Sampai dengan 31 Desember 2018 MTN Subordinasi bersaldo Rp 100,0 miliar.

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA MTN SUBORDINASI

Tingkat suku bunga sebesar 8% per annum yang dibayarkan periodik setiap 6 bulan dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel Pembayaran Bunga MTN Subordinasi

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga MTN Subordinasi	Bunga
1	10 November 2018	8%
2	10 Februari 2019	8%
3	10 Mei 2019	8%
4	10 Agustus 2019	8%
5	10 November 2019	8%
6	10 Februari 2020	8%
7	10 Mei 2020	8%
8	10 Agustus 2020	8%
9	10 November 2020	8%
10	10 Februari 2021	8%
11	10 Mei 2021	8%
12	10 Agustus 2021	8%
13	10 November 2021	8%
14	10 Februari 2022	8%
15	10 Mei 2022	8%
16	10 Agustus 2022	8%



Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga MTN Subordinasi	Bunga
17	10 November 2022	8%
18	10 Februari 2023	8%
19	10 Mei 2023	8%
20	10 Agustus 2023	8%

PENAWARAN UMUM OBLIGASI (GLOBAL BOND)

TOTAL PEROLEHAN DANA

Pada tanggal 27 April 2012, BNI, melalui BNI Cabang London, menerbitkan surat utang dengan jumlah nilai nominal USD500 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2017. Surat utang tersebut dapat dilunasi, secara keseluruhan tetapi tidak sebagian, sejumlah pokok yang terutang beserta bunga yang ditangguhkan dan bunga yang belum dibayarkan, jika ada, atas pilihan penerbit surat utang setiap saat dalam hal terdapat perubahan tertentu yang dapat memengaruhi pajak di Indonesia. Surat utang dikeluarkan pada harga 98,89% setara dengan USD494,4 juta dan terdaftar pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)*. Dari jumlah yang diterima sebesar USD494,4 juta tersebut, sebesar USD 400 ribu digunakan sebagai biaya penerbitan surat utang.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penerimaan bersih dari penerbitan surat utang tersebut akan digunakan oleh Bank sebagai tambahan sumber pendanaan untuk cabang-cabang luar negeri Bank dan untuk tujuan pendanaan umum Bank. Surat utang ini merupakan kewajiban langsung, tanpa syarat dan (tergantung pada ketentuan dan kondisi di bawah) tanpa jaminan dari Bank dan akan diperingkat pari passu (kecuali terdapat ketentuan hukum tertentu yang mewajibkan adanya preferensi) dan setara dengan kewajiban tanpa jaminan dari waktu ke waktu selama kewajiban masih belum dilunasi.

Tidak terdapat *negative covenant* dalam kontrak perwaliamanatan Bank dengan HSBC untuk penerbitan efek *Global Bond*, yang dapat membatasi Bank dalam melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Rupiah. Perusahaan selalu patuh terhadap persyaratan dan kondisi utang, di mana pembayaran kupon secara *semi-annual* selalu dilakukan Perusahaan tepat waktu.

SALDO DANA

Surat utang ini telah jatuh tempo pada tanggal 27 April 2017.

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Tingkat suku bunga sebesar 4,13% per tahun yang akan dibayarkan setiap enam bulan pada tanggal 27 April dan 27 Oktober setiap tahunnya, sejak tanggal 27 Oktober 2012.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tanggal 25 November 2010, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Pemegang Saham telah memutuskan antara lain untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh BNI melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebesar 3.374.715.948 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 (nilai penuh) setiap lembar saham. HMETD tersebut dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 16 Desember 2010, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

TOTAL PEROLEHAN DANA

Dari PUT III tersebut, BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp1.265.519 juta dan tambahan agio saham bersih setelah dikurangkan dengan biaya emisi penerbitan saham, sebesar Rp245.231 juta.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang bersumber dari Hasil Penawaran Umum Terbatas III digunakan untuk:

1. 80% digunakan untuk penyaluran kredit Korporasi, komersial, Usaha Kecil serta Konsumsi.
2. 15% digunakan untuk pengembangan infrastruktur pada teknologi informasi, *outlet*, ATM dan lain-lain.
3. 5% digunakan untuk pengembangan anak perusahaan yaitu BNI Life, BNI Syariah, BNI Sekuritas dan BNI Multifinance.



Analisis & Pembahasan Manajemen



SALDO DANA

Pada 31 Desember 2018, Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III adalah Nihil atau dengan kata lain sudah disalurkan 100% dari dana yang diperoleh.

TANGGAL PERSETUJUAN RUPS ATAS PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA

Tidak ada perubahan penggunaan dana atas Hasil Penawaran Umum Terbatas III BNI.

Tabel Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III	
Nilai bersih realisasi hasil penawaran umum (setelah dikurangi biaya-biaya)	Rp10.216.388.163.029
REALISASI PENGGUNAAN DANA	
Sekitar 80% digunakan untuk penyaluran kredit korporasi, usaha komersial, usaha kecil serta konsumsi	Per 31 Desember 2014 Rp 8.173.110.530.423
Sekitar 15% digunakan untuk pengembangan infrastruktur pada teknologi informasi, outlet, ATM dan lain-lain	Per 31 Desember 2014 Rp1.532.458.224.454,-
Sekitar 5% digunakan untuk pengembangan anak perusahaan BNI Life, BNI Syariah, BNI Securities dan BNI Multifinance	Per 31 Desember 2014 Rp510.819.408.152,-
Sisa Hasil Penggunaan Dana	Nihil

KEBIJAKAN DIVIDEN

KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen setiap tahun ditetapkan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

TOTAL DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

Pada tahun 2018, BNI telah melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Bank sebesar Rp4.765.766.513.174,80 atau sebesar Rp255,555488 per lembar saham atau sebesar 35% dari laba bersih Bank tahun 2017.

PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Tahun Buku	Jumlah Dividen (miliar Rupiah)	Dividen per Lembar Saham (Rupiah)	Rasio Dividen	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pembayaran
2017	4.765,76	255,555488	35% pendapatan bersih tahun 2017	20 Maret 2018	20 April 2018
2016	3.968,56	212,806849	35% pendapatan bersih tahun 2016	20 Maret 2017	20 April 2017
2015	2.266,64	122,533827	25% pendapatan tbersih tahun 2015	14 Maret 2016	13 April 2016

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN (ESOP/MSOP)

TUJUAN PROGRAM

Program bonus saham pegawai merupakan program pemberian bonus dalam bentuk saham Bank yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program.

Tujuan dari program bonus saham pegawai ini adalah sebagai:

1. Bentuk retensi pegawai dalam jangka panjang.
2. Upaya untuk memotivasi pegawai agar memberikan kinerja yang terbaik.
3. Upaya untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) pegawai terhadap Bank.

JUMLAH SAHAM ESOP/MSOP DAN REALISASINYA

Memperhatikan butir 4 huruf a angka 3 Peraturan No. XI.B.2 jo. Pasal 9 Peraturan OJK No. 2/ POJK.04/2013, saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan/digunakan untuk pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*, sehubungan dengan hal tersebut Bank telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 12 Mei 2016 yang intinya menyampaikan bahwa Bank akan melaksanakan pengalihan saham Seri C hasil pembelian kembali saham melalui Bank Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Pegawai Bank dalam bentuk Bonus Saham (selanjutnya disebut “Program Bonus Saham”).

Pengawasan Program Bonus Saham akan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan dan akan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdekat atas pelaksanaan program tersebut.

Alokasi bonus saham kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri BUMN. Berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan No. 8 tanggal 10 Maret 2016, alokasi bonus saham kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Menteri BUMN.

Berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-574/MBU/D5-06/2018 tanggal 5 Juni 2018 pada intinya menyampaikan penetapan *Long Term Incentive* (LTI) sebesar 10% dari Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017. LTI diberikan dalam bentuk saham yang nilainya ditangguhkan selama tiga tahun atau sampai berakhirnya masa jabatannya. Ketentuan ini dikecualikan untuk Komisaris Independen, di mana LTI diberikan dalam bentuk tunai yang pembayarannya ditangguhkan selama tiga tahun atau sampai berakhirnya masa jabatannya.

Alokasi tahap I untuk pegawai dilakukan pada tahun 2016 dan pegawai yang berhak menjadi peserta dalam Program Bonus Saham adalah pegawai tetap per 30 Oktober 2015 (dhi. tanggal Keterbukaan Informasi). Pegawai yang dinyatakan *eligible* untuk *vesting* akan memperoleh pemberitahuan melalui *email* atau media komunikasi lainnya yang di antaranya memuat konfirmasi atas bonus saham yang menjadi haknya pada tanggal *vesting* tersebut.

Adapun syarat *vesting* ditetapkan sebagai berikut:

1. Tidak sedang dalam proses kasus dan/atau dampak sanksi mengacu pada Peraturan Kepegawaian Bank yang berlaku;
2. Tidak berakhir hubungan kerja atas kemauan sendiri; atau
3. Tidak berakhir hubungan kerja karena kinerja (*low performance*).

Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, telah dilaksanakan *vesting* saham kepada 20.289 pegawai dengan total jumlah 35.349.718 lembar saham.

JANGKA WAKTU

Alokasi bonus saham dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu dimulai tahun 2016 sampai dengan 2018, kemudian dilakukan *vesting* saham secara periodik.

1. Syarat alokasi bonus saham dan syarat *vesting* bagi pegawai melingkupi persyaratan kinerja serta administratif lainnya berdasarkan ketentuan internal perusahaan.
2. Waktu pelaksanaan *vesting* dilaksanakan secara periodik berdasarkan jenjang jabatan setiap akhir bulan Januari, April dan Juli tahun 2017 sampai dengan 2019.

PERSYARATAN KARYAWAN ATAU MANAJEMEN YANG BERHAK

Program Bonus Saham disusun sebagai bagian dari remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dalam bentuk Penghargaan jangka panjang di mana saham yang dibeli kembali dialokasikan kepada:

1. Pegawai sebagai bonus atas pencapaian kinerja perusahaan, dan
2. Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris sebagai bagian dari tantiem untuk tahun buku yang bersangkutan



HARGA EXERCISE

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dan SEOJK No. 5/SEOJK.04/2017 tentang Pencabutan SEOJK No. 22/SEOJK.04/2015 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka BNI melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (*Buy Back*). BNI telah menunjuk PT BNI Sekuritas sebagai lembaga sekuritas yang melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan dengan periode pembelian saham di pasar kurang dari 3 bulan terhitung sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016.

Jumlah saham yang telah dibeli kembali adalah sebesar 0,8% dari modal ditempatkan dan disetor penuh atau sejumlah 150.537.500 lembar saham. Nilai pembelian kembali saham Bank sebesar Rp749.979.275.500,00 (maksimal 750 miliar Rupiah). Dengan demikian harga rata-rata Pembelian Kembali Saham adalah sebesar Rp4.982,00 per saham. Atas pelaksanaan pembelian kembali saham Bank tersebut, BNI telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 30 Oktober 2016.

Dengan pembelian saham tersebut, selanjutnya dibagikan kembali kepada pegawai yang memenuhi kriteria dengan *exercise price* Rp4.982,00 per saham.

SUKU BUNGA DASAR KREDIT

Bank Indonesia mewajibkan seluruh Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di Indonesia untuk melaporkan dan memublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dalam Rupiah. Hal ini sesuai dengan berlakunya POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 32/POJK.03/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475).

Penerapan transparansi informasi mengenai SBDK merupakan salah satu upaya untuk memberikan kejelasan kepada nasabah dan memudahkan nasabah dalam menimbang manfaat, biaya dan risiko kredit yang ditawarkan oleh Perusahaan. Selain itu, SBDK juga berupaya untuk meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan antara lain melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik.

SBDK juga diperlukan sebagai indikator besaran suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah yang mengajukan kredit pada Perusahaan. Dalam hal tersebut BNI senantiasa memperbaharui SBDK sesuai dengan pergerakan suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Secara umum SBDK dihitung berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana nasabah, beban operasional yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit serta komponen *profit margin* yang ditetapkan Perusahaan dalam kegiatan penyaluran kredit. Perhitungan SBDK belum memperhitungkan komponen premi risiko dari debitur, yang besarnya tergantung dari penilaian terhadap risiko masing-masing debitur. Dengan demikian besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.



BNI diwajibkan untuk melaporkan perhitungan SBDK kepada Bank Indonesia secara bulanan dan secara berkala memublikasikan dalam media yang lebih luas. Perhitungan SBDK berlaku untuk jenis kredit korporat, kredit ritel, kredit mikro, dan kredit konsumsi (KPR dan non-KPR). Namun Bank Indonesia menyerahkan penggolongan kredit korporat, kredit ritel dan kredit konsumsi (KPR dan non-KPR) berdasarkan kriteria internal yang digunakan oleh bank.

Dalam penetapan SBDK, BNI juga senantiasa mempertimbangkan perkembangan kebijakan regulator. Pada tahun 2016, OJK menerbitkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-18/D.03/2016 mengenai Pemberian Maksimum Suku Bunga Dana. Dalam surat tersebut OJK juga menyampaikan arahan untuk menurunkan suku bunga kredit secara bertahap hingga mencapai *single digit* pada akhir tahun 2016. Terkait hal ini BNI berkomitmen untuk menurunkan suku bunga kreditnya secara bertahap, yang dapat terlihat pada perbandingan SBDK tahun 2016 dan rata-rata SBDK tahun 2015 sebagai berikut:

(% per tahun)

	Suku Bunga Dasar Kredit (<i>Prime Lending Rate</i>)				
	Berdasarkan Segmen Bisnis				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
KPR				Non KPR	
Suku Bunga Dasar Kredit (<i>Prime Lending Rate</i>)	9,95	9,95	N/A	10,50	12,50

PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING YANG TERJADI DI BANK DAN KELOMPOK USAHA BANK DALAM TAHUN YANG BERSANGKUTAN

Tidak terdapat perubahan-perubahan penting yang terjadi di Bank dan kelompok usaha Bank sampai dengan periode Desember 2018 yang berpengaruh terhadap posisi keuangan BNI.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURISASI UTANG DAN MODAL

INVESTASI

Pada tahun 2018, BNI tidak melakukan kegiatan investasi.

EKSPANSI

Pada tahun 2018, BNI tidak melakukan kegiatan ekspansi.

DIVESTASI

Pada tahun 2018, BNI tidak melakukan kegiatan divestasi.

AKUISISI

Pada tahun 2018, BNI tidak melakukan kegiatan akuisisi.

RESTRUKTURISASI UTANG DAN MODAL

Pada tahun 2018, BNI tidak melakukan kegiatan restrukturisasi utang dan modal.



Analisis &
Pembahasan
Manajemen



PERPAJAKAN



KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Bentuk kontribusi BNI kepada negara diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak. Sebagai wajib pajak, kontribusi terbesar Perusahaan adalah memenuhi kewajiban PPh Badan. Sedangkan sebagai pemotong pajak, BNI berperan aktif dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek kena pajak. BNI selalu tepat waktu dalam pembayaran kewajiban pajak atas PPh Badan, PPh Karyawan, PPN, dan PBB. BNI juga menyampaikan dokumen kewajiban perpajakan seperti SPT tahunan maupun bulanan serta dokumen kewajiban pada lembaga regulator dengan tepat waktu. Jumlah setoran PPh badan tahun 2018 sebesar Rp5,0 triliun naik sebesar 57,2% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1,8 triliun.



Tabel Kontribusi Kepada Negara Selain Dividen

No	Jenis Pajak	2018	2017	2016	Pertumbuhan 2017-2018	Pertumbuhan 2016-2017
		(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(%)	(%)
1	PPN	377	348	366	(55,1)	(4,9)
2	PPH	3.634	3.254	2.316	(5,4)	40,5
3	PPH Badan	5.829	3.211	2.791	57,2	15
4	Pajak Lainnya	78	86	2	(17,6)	4.150
Total		7.918	6.898	5.475	(20,9)	4.200,6

TAGIHAN PAJAK

Pada tanggal 5 Februari 2018, BNI telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh pasal 21, PPN dan Surat Tagihan Pajak ("STP") untuk tahun fiskal 2015 sebesar Rp74,9 miliar (termasuk denda). Pada tanggal 2 Maret 2018, BNI telah melakukan pembayaran penuh atas seluruh SKPKB tersebut dan tidak mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tanggal 15 Juni 2017 BNI telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan, PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh Pasal 26, PPh pasal 4 ayat (2) dan Surat Tagihan Pajak ("STP") untuk tahun fiskal 2014 sebesar Rp145,3 miliar (termasuk denda). Pada tanggal 14 Juli 2017, BNI telah melakukan pembayaran penuh atas seluruh SKPKB tersebut dan tidak mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

PERMASALAHAN HUKUM PAJAK

Pada tanggal 5 Februari 2018, BNI telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2015 sebesar Rp2,5 triliun (termasuk denda) dan disetujui BNI sebesar Rp162,1 miliar. Pada tanggal 2 Maret 2018, BNI telah melakukan pembayaran sebagian SKPKB sebesar Rp1,8 triliun. Pada tanggal 4 Mei 2018, BNI mengajukan surat keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ke Direktorat Jenderal Pajak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan atas surat keberatan yang diajukan oleh BNI tersebut. Bank berkeyakinan bahwa keberatan atau banding yang diajukan dapat dikabulkan sehingga Bank tidak membentuk cadangan atas SKPKB tersebut.

Pada tanggal 16 Desember 2014, BNI menerima SKPKB atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2013 sebesar Rp619,8 miliar (termasuk denda). Pada tanggal 30 Desember 2014, BNI telah melakukan pembayaran penuh atas SKPKB tersebut. Pada tanggal 12 Maret 2015, BNI telah mengajukan surat keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak terhadap SKPKB PPh tersebut. Pada tanggal 7 Maret 2016, BNI menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang menolak keberatan atas SKPKB PPh Badan tersebut. Atas keputusan penolakan keberatan tersebut. Pada tanggal 3 Juni 2016, BNI telah mengajukan permohonan banding atas penolakan keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak. Pada bulan Januari 2018, BNI menerima salinan putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding BNI.

Pada tanggal 16 Maret 2018, BNI telah mengajukan Memori Peninjauan Kembali (PK) atas penolakan banding tersebut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak.

Berdasarkan informasi *website* resmi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 2018, majelis hakim telah menolak permohonan peninjauan kembali dari BNI. Bank telah membebaskan estimasi tagihan pajakpenghasilan ini dibeban pajak kini tahun berjalan.



Pada tanggal 28 November 2012, BNI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan Badan ("PPH Badan") untuk tahun fiskal 2010 sebesar Rp1.6 triliun (termasuk denda). Pada tanggal 26 Desember 2012, BNI telah melakukan pembayaran sebagian atas SKPKB PPh Badan sebesar Rp9.798. Pada tanggal 19 Februari 2013, BNI telah mengajukan surat keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak terhadap sisa SKPKB PPh Badan tersebut. Pada tanggal 26 Februari 2013, BNI telah melakukan pembayaran sebagian atas sisa SKPKB PPh Badan sebesar Rp816,9 miliar. Pada tanggal 21 Februari 2014, BNI menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang menolak keberatan atas SKPKB PPh Badan tersebut. Pada tanggal 16 Mei 2014, BNI telah mengajukan permohonan banding atas penolakan keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 16 Maret 2016, Pengadilan Pajak telah membacakan putusan banding yang mengabulkan permohonan banding BNI.

Pada tanggal 8 April 2016, BNI menerima salinan putusan banding. Terhadap pembayaran sebesar Rp816,9 miliar atas SKPKB telah dikompensasikan ke PPh Pasal 29 PPh Badan tahun pajak 2015, angsuran PPh Pasal 25 bulan April, Mei, dan Juni 2016.

Direktorat Jenderal Pajak mengajukan Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Juni 2016 kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak terhadap Putusan Pengadilan Pajak tanggal 16 Maret 2016. Sehubungan dengan diterimanya Memori Peninjauan Kembali tersebut, maka BNI memberikan jawaban dalam bentuk Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui surat pada tanggal 9 Mei 2017 yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung tanggal 30 Agustus 2017, majelis hakim telah menolak permohonan peninjauan kembali Direktorat Jenderal Pajak tersebut.

TUNGGAKAN PEMBAYARAN PAJAK

BNI telah melunasi seluruh ketetapan pajak sebagai hasil pemeriksaan yang sudah jatuh tempo pembayaran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pembahasan Permasalahan Hukum Pajak. Walaupun BNI masih dalam proses mengajukan upaya hukum terhadap ketetapan Dirjen Pajak, BNI senantiasa melakukan kewajiban pembayaran lebih dari yang diharuskan dalam ketentuan pajak. Sehingga secara ketentuan BNI tidak menunggak pajak. Untuk ketetapan pajak PPh Badan tahun 2015 sebesar Rp2,5 triliun, BNI menyetujui sebagian ketetapan pajak pemeriksaan sebesar Rp162 miliar, sedangkan sisanya atas kurang bayar sebesar Rp2,3 triliun BNI mengajukan upaya hukum Keberatan dan selanjutnya Banding. Jika Keberatan ditolak, terhadap ketetapan pajak yang masih dalam proses hukum tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang telah menjadi piutang negara atau utang pajak BNI adalah sebesar ketetapan yang disetujui oleh BNI yaitu sebesar Rp162 miliar, sedangkan sisa pajak sebesar Rp2,3 triliun ditangguhkan penagihannya sampai dengan dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak. Walaupun demikian, BNI telah melaksanakan pembayaran sebesar Rp1,8 triliun atas ketetapan yang disetujui maupun terhadap sebagian besar ketetapan pajak yang tidak disetujui .

Berdasarkan Pasal 27 ayat (5a) jo. Pasal 25 ayat (7) Undang-Undang No 6 Tahun 1983 stdd. Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dinyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

TRANSFER PRICING DOCUMENT



DOKUMEN PENENTUAN HARGA TRANSFER (*TRANSFER PRICING DOCUMENT*)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PM.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

Peraturan ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas dokumen yang dipersiapkan oleh wajib pajak dan meningkatkan transparansi. Wajib pajak juga perlu lebih proaktif dan memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dokumen induk dan dokumen lokal tersedia agar dapat mematuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) sebagai wajib pajak yang taat dan patuh terhadap segala peraturan perpajakan yang ada dan telah *comply* atas peraturan tersebut.



PENDAHULUAN

Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan baru wajib pajak yang diwajibkan membuat *Transfer Pricing Documentation* (TP Doc). Aturan baru TP Doc ini melengkapi ketentuan-ketentuan terkait dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Berdasarkan definisi pada Pasal 1 angka 6 PMK-213/PM.03/2016 disebutkan dokumen penentuan harga transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Peraturan ini diterbitkan sehubungan dengan ketentuan atas dokumen penentuan harga transfer, dan tidak menggantikan peraturan yang berlaku untuk mengatur prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yaitu Peraturan DJP No. PER-43/PJ/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan oleh Peraturan DJP No. PER-32/PJ/2011.

TIPE DOKUMEN YANG HARUS DISELENGGARAKAN

Berdasarkan peraturan tersebut, Wajib Pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan 3 (tiga) tingkat dokumen yang terdiri atas:

1. Dokumen Induk;
2. Dokumen Lokal; dan
3. Laporan per Negara.

Dokumen penentuan harga transfer di atas harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi, Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat membuat dokumen dalam Bahasa Inggris yang disertai dengan dokumen penentuan harga transfer dalam Bahasa Indonesia.

SUBJEK YANG WAJIB MEMBUAT TP DOC

Pihak yang wajib membuat TP Doc dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), di antaranya:

1. Mereka yang wajib membuat dokumen induk dan dokumen lokal; dan
2. Mereka yang wajib membuat dokumen induk, dokumen lokal dan laporan per negara.

DAMPAK PERATURAN BAGI PERUSAHAAN

Dalam hal menerapkan peraturan terkait *Transfer Pricing*, BNI telah melakukan *disclosure* atas transaksi dengan entitas anak dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal melakukan penilaian *arms length transaction* atau kewajaran dari transaksi BNI dengan pihak berelasi, perusahaan menggunakan jasa akuntan publik

Delloite untuk melakukan *assessment*. Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan, bahwa semua transaksi yang dilakukan BNI dengan pihak terkait sudah memenuhi batas kewajaran yang ditetapkan.

AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

PENDAHULUAN

Automatic Exchange of Financial Account Information atau (AEOI) merupakan rencana dari negara G20 dan diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengenai sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening Wajib Pajak antarnegara. Dengan adanya sistem ini, Wajib Pajak yang telah membuka rekening di Negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh Otoritas Pajak negara asalnya. AEOI memiliki standar global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi peluang penghindaran pembayaran pajak.

Sistem kerja AEOI yaitu pertukaran data keuangan Warga Negara asing yang tinggal di sebuah Negara. Pertukaran data keuangan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Setiap Negara yang telah bergabung dengan sistem AEOI akan mengirimkan dan menerima informasi awal (*pre-agreed information*) setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus.

Di Indonesia sendiri dengan adanya AEOI, maka Ditjen Pajak dapat melakukan pengawasan dan penggalan potensi perpajakan melalui transaksi perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang dilakukan Wajib Pajak di luar negeri dan dikembangkan sehingga berlaku untuk Wajib Pajak di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk penguatan basis data yang selama ini mengalami keterbatasan akses sehingga diharapkan potensi pendapatan Negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, ruang lingkup akses informasi keuangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pertukaran informasi untuk kepentingan Perjanjian Internasional atau Nasabah Asing
2. Untuk kepentingan Perpajakan Domestik atau Nasabah Domestik dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perpajakan.



SUBJEK PELAPOR DAN PEMBERI INFORMASI KEUANGAN

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2017, Lembaga Keuangan (LK) yang wajib menjadi subjek pelapor yaitu sebagai berikut:

LEMBAGA KEUANGAN PADA SEKTOR				
Perbankan	Pasar Modal	Perasuransian	Perdagangan Berjangka Komoditi	Perkoperasian
1. Bank umum 2. BPR 3. Bank Syariah	1. Penjaminan Emisi Efek 2. Perantara Pedagang Efek (PPE) 3. Manajer Investasi (MI) 4. Bank Kustodian 5. Biro Administrasi	1. Perusahaan Asuransi Umum dan Syariah 2. Perusahaan Asuransi Jiwa dan Jiwa Syariah 3. Perusahaan Reasuransi dan Reasuransi Syariah	1. Pialang Berjangka 2. Pialang Berjangka Anggota Kliring	Koperasi Simpan Pinjam

SIFAT PEMBERIAN INFORMASI KEUANGAN

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2017, sifat pemberian informasi keuangan dibagi menjadi 1 (satu) yaitu:

1. Otomatis

Pelaporan informasi keuangan yang dikelola selama 1 (satu) tahun kalender secara otomatis (tanpa diminta). Lembaga keuangan pelapor meninjau rekening keuangan mengidentifikasi rekening keuangan yang wajib dilaporkan menerapkan proses identifikasi menyampaikan laporan informasi keuangan. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2017, ada 5 (lima) elemen data yang akan dipertukarkan di antaranya:

- Identitas pemegang rekening keuangan
- Nomor rekening keuangan
- Identitas lembaga keuangan pelapor
- Saldo atau nilai rekening keuangan
- Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan secara otomatis oleh Lembaga Keuangan:

- Sektor Perbankan (simpanan)
 - Nasabah Domestik
 - yang dimiliki oleh orang pribadi, dengan agregat saldo paling sedikit Rp1 miliar (satu miliar rupiah);
 - yang dimiliki oleh entitas, tanpa batasan saldo minimal;
 - Nasabah Asing
 - rekening keuangan yang bernilai USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat)
 - Sektor Perasuransian (polis) nilai pertanggungan paling sedikit Rp1 miliar (satu miliar rupiah)
 - Sektor Perkoperasian (simpanan) dengan agregat saldo paling sedikit Rp1 miliar satu miliar rupiah
 - Sektor Pasar Modal (efek) dan Perdagangan Berjangka Komoditi (deposit margin) tanpa batasan saldo minimal
2. Permintaan Ditjen Pajak
- Pelaporan informasi keuangan berdasarkan permintaan Ditjen Pajak memiliki kewenangan untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan, selain informasi dari laporan otomatis, kepada lembaga keuangan. Lembaga keuangan wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diminta oleh DJP maksimal 1 (satu) bulan sejak permintaan diterima yang paling sedikit memuat:
- Informasi atau bukti atau keterangan yang diminta
 - Format dan bentuk pemberian yang diminta
 - Alasan dilakukannya permintaan

IMPLEMENTASI DI BNI

Menindaklanjuti adanya peraturan akses informasi data keuangan, BNI telah ikut serta sebagai bentuk *compliance* dalam akses informasi keuangan dengan mengirimkan data nasabah sesuai kriteria yang wajib dilaporkan setiap akhir tahun dimulai pada tahun 2018 ke Ditjen Pajak.



Analisis &
Pembahasan
Manajemen



FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)



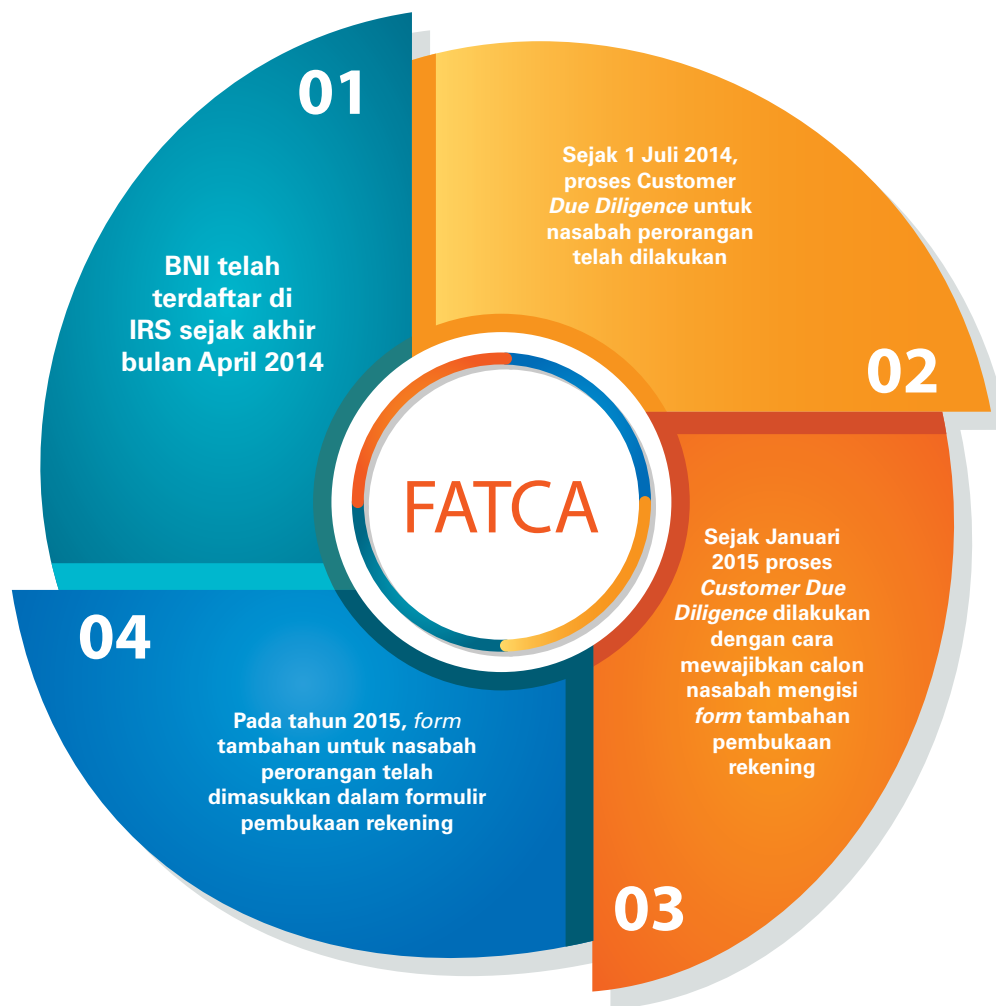
LEMBAGA KEUANGAN



DJP

FATCA merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh *Departement of Treasury dan Internal Revenue Service* ("IRS") Amerika Serikat untuk mencegah penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh warga negara atau perusahaan Amerika Serikat (*US persons*) melalui dana atau usaha yang disimpan di luar wilayah Amerika Serikat.

Terkait dengan FATCA, langkah-langkah yang telah dilakukan BNI adalah:



Kemudian melalui POJK No. 25/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra, BNI juga telah berkomitmen untuk mengambil bagian dalam kepatuhan akan ketentuan FATCA, di mana telah mendaftar pada IRS sebagai institusi keuangan yang akan menerapkan ketentuan FATCA. Saat ini kepatuhan kepada FATCA merupakan bagian dari proses *Customer Due Diligence* di BNI yang telah diimplementasikan sejak tanggal 1 Juli 2017. Pelaporan bank terkait dengan POJK tersebut baru akan dilakukan pada akhir bulan April 2018 untuk perpajakan domestik, sedangkan untuk kepentingan perjanjian internasional pertama kali akan dilaporkan pada awal bulan Agustus 2018.



INFORMASI MATERIAL LAINNYA

INFORMASI MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang signifikan setelah tanggal laporan akuntan yang berpengaruh terhadap posisi keuangan BNI per tanggal 31 Desember 2018.

TRANSAKSI-TRANSAKSI PENTING DALAM JUMLAH YANG SIGNIFIKAN

Selama tahun 2018, tidak terdapat transaksi dalam jumlah yang signifikan yang dilakukan oleh BNI.

ISO 9001:2015

Perbaikan tiada henti, sebagai salah satu nilai budaya kerja BNI, mendorong setiap insan BNI untuk senantiasa melakukan penyempurnaan. Salah satu wujud pengimplementasian nilai budaya kerja tersebut adalah dengan diterapkannya sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Publikasi (LKP). Tujuan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 adalah memastikan proses penyusunan LKP BNI mampu memenuhi harapan pengguna laporan akan LKP yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan regulator sehingga tercapailah kepuasan *user* LKP yaitu regulator, pihak-pihak eksternal, dan manajemen BNI. BNI telah mengembangkan prosedur dan dokumentasi, dan pengembangan karyawan yang terlibat dalam proses penyusunan LKP, serta penyempurnaan sistem dan lingkungan kerja, guna memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Pada bulan September 2016, secara resmi proses penyusunan LKP BNI diakui oleh sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Setiap 3 bulan sekali, diadakan *surveillance audit* terkait dengan implementasi ISO 9001:2015, selama tahun 2018 telah dilakukan 2 kali *surveillance audit* dengan hasil yang memuaskan.



ISO 9001:2015

Scope of Certification:
Preparation and Verification Process
of Bank Negara Indonesia
Published Financial Statements

Certificate No: 16/03754



PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP BANK

Adapun perubahan beberapa peraturan perundang-undangan sepanjang tahun 2018 dan dampaknya bagi BNI diuraikan di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Kinerja BNI dan Entitas Anak

No.	Peraturan	Resume Peraturan	Pengaruh Terhadap BNI dan Entitas Anak
1.	<p>PBI No. 20/3/ PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah</p> <p>PADG No. 20/10/ PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan GWM Rupiah bagi BUK adalah sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan tertentu : <ol style="list-style-type: none"> Secara harian sebesar 4,5% (empat koma lima persen); dan Secara rata-rata sebesar 2% (dua persen) diberlakukan mulai 16 Juli 2018. Pemenuhan GWM Valas bagi BUK adalah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK BUK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu: <ol style="list-style-type: none"> Secara harian sebesar 6% (enam persen); dan Secara rata-rata sebesar 2% (dua persen) diberlakukan mulai 1 Oktober 2018 Pemenuhan GWM sebagaimana butir 1 dan butir 2 di atas dihitung dengan membandingkan posisi saldo rekening Giro di BI pada akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. BI dapat memberikan jasa giro setiap hari terhadap sebagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah BUK. Jasa giro tersebut diberikan dengan tingkat bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun. Perubahan besaran jasa giro akan ditetapkan dengan PADG. Penyesuaian ketentuan pengenaan sanksi bagi BUK, yakni terkait pemberlakuan GWM rata-rata bagi GWM dalam valas BUK menjadi 2 (dua) jenis sanksi yaitu sanksi untuk pemenuhan GWM secara harian dan sanksi untuk pemenuhan GWM secara rata-rata. 	<ol style="list-style-type: none"> Memelihara GWM Rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dan secara rata-rata sebesar 2% (dua persen) selama periode tertentu mulai 16 Juli 2018. Memelihara GWM Valas yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 6% (enam persen) dan secara rata-rata sebesar 2% (dua persen) selama periode tertentu mulai 1 Oktober 2018 Melakukan <i>updating</i> terhadap PP Tata Kerja Divisi Tresuri Bab Prosedur Kelompok Funding And Gapping, Sub Bab Ketentuan Pelaksanaan, Sub Sub Bab Pengelolaan Funding and Gapping.
2.	<p>PBI No. 20/4/ PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah</p> <p>PADG No. 20/11/ PADG/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PADG No.20/33/ PADG/2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> Penyempurnaan Giro Wajib Minimum <i>Loan to funding Ratio</i> (GWM LFR) menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM); Kriteria surat berharga korporasi (SBK) yang dimiliki oleh Bank dalam rupiah dan valuta asing yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM atau RIM Syariah; Kriteria surat berharga (SB) yang diterbitkan Bank dalam rupiah dan valuta asing, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM atau RIM Syariah; Penyempurnaan Giro Wajib Minimum Sekunder (GWM Sekunder) menjadi Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> PLM BUK wajib dipenuhi minimum 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah PLM Syariah wajib dipenuhi minimum 4% (empat persen) dari DPK BUS dalam rupiah. Kewajiban pemenuhan PLM dan PLM Syariah diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> PLM dipenuhi dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> SB dalam rupiah yang dimiliki oleh BUK dan dapat digunakan dalam operasi moneter; dan SBS dalam rupiah yang dimiliki oleh UUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah, bagi BUK yang memiliki UUS; dan PLM Syariah dipenuhi dalam bentuk SBS dalam rupiah yang dimiliki oleh BUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah. 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaporan pertama kali Surat Berharga Korporasi (SBK) yang dimiliki dan diterbitkan Bank untuk posisi bulan: <ol style="list-style-type: none"> Mei 2018, oleh BUK paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan. Agustus 2018, oleh BUS dan UUS paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan. Kewajiban pemenuhan Giro RIM mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. Kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.



No.	Peraturan	Resume Peraturan	Pengaruh Terhadap BNI dan Entitas Anak
3.	PBI No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, Uang Elektronik dibedakan menjadi: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Closed loop</i>, yaitu Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut; dan b. <i>Open loop</i>, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut. 2. Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Media penyimpan Nilai Uang Elektronik berupa: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Server based</i>, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa <i>server</i>; dan • <i>Chip based</i>, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa <i>chip</i>; dan b. pencatatan data identitas Pengguna berupa: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Unregistered</i>, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan • <i>Registered</i>, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit. 3. Perizinan dan persetujuan penyelenggaraan UE, antara lain mencakup kewajiban dan pengelompokan izin, persyaratan umum dan aspek kelayakan, tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin dan persetujuan, penilaian kemampuan dan kepatutan; pemegang saham pengendali, evaluasi izin; serta kebijakan perizinan dan persetujuan; yaitu penyelenggara harus menyampaikan pernyataan dan jaminan (<i>representation and warranties</i>) secara tertulis kepada Bank Indonesia. 4. Surat pernyataan dan jaminan diajukan dan ditandatangani oleh direksi yang berwenang mewakili Bank atau Lembaga Selain Bank serta harus disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang independen dan <i>professional</i> berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum (<i>legal due diligence</i>). 5. Penyelenggaraan UE, antara lain mencakup penerapan manajemen risiko, standar keamanan sistem informasi, pemrosesan transaksi UE di wilayah Indonesia, interkoneksi dan interoperabilitas, penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, penerapan prinsip perlindungan konsumen, penyelenggaraan kegiatan UE, dan penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD); <ol style="list-style-type: none"> a. Batas Nilai Uang Elektronik yang dapat disimpan pada Uang Elektronik ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Uang Elektronik <i>unregistered</i> paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan • Untuk Uang Elektronik <i>registered</i> paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). b. Batas nilai transaksi Uang Elektronik dalam 1 (satu) bulan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan surat pernyataan dan jaminan (<i>representation and warranties</i>) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 paling lambat 6 (enam) bulan setelah PBI ini mulai berlaku. 2. Memastikan kesesuaian pelaksanaan Uang Elektronik dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI dimaksud.



No.	Peraturan	Resume Peraturan	Pengaruh Terhadap BNI dan Entitas Anak																											
4.	PBI No. 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio <i>Loan to Value</i> untuk Kredit Properti, Rasio <i>Financing to Value</i> untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor	<p>1. Penyesuaian rasio dan <i>tiering</i> LTV untuk Kredit Properti (KP) serta rasio dan <i>tiering</i> untuk Pembiayaan Properti (PP) untuk fasilitas pertama, fasilitas kedua, fasilitas ketiga dan seterusnya, bagi bank yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Rasio Kredit bermasalah secara neto kurang dari 5% (lima persen); dan</p> <p>b. Rasio KP bermasalah atau rasio PP bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen).</p> <p>2. Pemberian Kredit tambahan (<i>top up</i>) oleh BUK yang merupakan tambahan dari KP sebelumnya menggunakan Rasio LTV KP sebelumnya sepanjang Kredit tambahan (<i>top up</i>) tersebut menggunakan agunan yang sama dan KP sebelumnya memiliki kualitas lancar, apabila tidak menggunakan agunan yang sama dan/atau KP sebelumnya tidak memiliki kualitas lancar maka Kredit tambahan (<i>top up</i>) menggunakan Rasio LTV untuk KP sebagaimana Kredit baru.</p> <p>3. Untuk KP dan PP yang diambil alih (<i>take over</i>) dengan kredit tambahan (<i>top up</i>) atau disertai dengan Pembiayaan baru menggunakan Rasio LTV KP atau rasio FTV PP yang sama sepanjang KP atau PP tersebut memiliki kualitas lancar sebagaimana disebutkan pada butir 2 di atas.</p> <p>4. KP atau PP untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh ditetapkan paling banyak 5 (lima) fasilitas dan wajib melakukan pencairan KP atau PP secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Pencairan KP atau PP</th> <th>Tahapan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>≤ 30% dari plafon</td> <td>Setelah tanda tangan PK tanpa diperlukan penilaian perkembangan pembangunan</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>≤ 50% dari plafon</td> <td>Setelah pencairan tahap a s.d penyelesaian fondasi, berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan^{*)}</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>≤ 90% dari plafon</td> <td>Setelah pencairan tahap b. sampai dengan penyelesaian tutup atap berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan^{*)}</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Sebesar 100% dari plafon</td> <td>Setelah penandatanganan berita acara serah terima, dilengkapi akta jual beli dan akta pembebanan hak tanggungan atau surat kuasa membebaskan hak tanggungan</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) wajib didasarkan laporan perkembangan pembangunan yang berasal dari:</p> <p>a. Pengembang dengan verifikasi dari penilai intern Bank; atau</p> <p>b. Penilai independen</p> <p>5. Tata cara penilaian agunan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Untuk KP atau PP yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai intern Bank atau penilai independen; dan</p> <p>b. Untuk KP atau PP yang diberikan dengan plafon di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai independen.</p> <p>6. Bank yang memberikan KKB atau PKB wajib memenuhi ketentuan Uang Muka sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis kendaraan</th> <th>Uang Muka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Roda 2</td> <td>≤ 20%</td> </tr> <tr> <td>Roda 3 / lebih yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan produktif</td> <td>≤ 25%</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Ketentuan pada butir 6 tersebut di atas berlaku bagi bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Rasio Kredit bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen); dan</p> <p>b. Rasio KKB bermasalah atau rasio PKB bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen).</p> <p>8. Dalam hal Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 7 maka Bank wajib memenuhi ketentuan Uang Muka sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis kendaraan</th> <th>Uang Muka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Roda 2</td> <td>≤ 25%</td> </tr> <tr> <td>Roda 3 / lebih yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan produktif</td> <td>≤ 30%</td> </tr> </tbody> </table> <p>9. Dalam hal Bank memberikan KKB atau PKB untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif, maka Bank wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Memberikan KKB atau PKB dengan uang muka paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan</p> <p>b. Memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; atau Diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari usaha yang dimilikinya. 	No	Pencairan KP atau PP	Tahapan	a.	≤ 30% dari plafon	Setelah tanda tangan PK tanpa diperlukan penilaian perkembangan pembangunan	b.	≤ 50% dari plafon	Setelah pencairan tahap a s.d penyelesaian fondasi, berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan ^{*)}	c.	≤ 90% dari plafon	Setelah pencairan tahap b. sampai dengan penyelesaian tutup atap berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan ^{*)}	d.	Sebesar 100% dari plafon	Setelah penandatanganan berita acara serah terima, dilengkapi akta jual beli dan akta pembebanan hak tanggungan atau surat kuasa membebaskan hak tanggungan	Jenis kendaraan	Uang Muka	Roda 2	≤ 20%	Roda 3 / lebih yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan produktif	≤ 25%	Jenis kendaraan	Uang Muka	Roda 2	≤ 25%	Roda 3 / lebih yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan produktif	≤ 30%	Penyesuaian kebijakan dan prosedur internal BNI dengan berpedoman pada ketentuan PBI tersebut.
No	Pencairan KP atau PP	Tahapan																												
a.	≤ 30% dari plafon	Setelah tanda tangan PK tanpa diperlukan penilaian perkembangan pembangunan																												
b.	≤ 50% dari plafon	Setelah pencairan tahap a s.d penyelesaian fondasi, berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan ^{*)}																												
c.	≤ 90% dari plafon	Setelah pencairan tahap b. sampai dengan penyelesaian tutup atap berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan ^{*)}																												
d.	Sebesar 100% dari plafon	Setelah penandatanganan berita acara serah terima, dilengkapi akta jual beli dan akta pembebanan hak tanggungan atau surat kuasa membebaskan hak tanggungan																												
Jenis kendaraan	Uang Muka																													
Roda 2	≤ 20%																													
Roda 3 / lebih yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan produktif	≤ 25%																													
Jenis kendaraan	Uang Muka																													
Roda 2	≤ 25%																													
Roda 3 / lebih yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan produktif	≤ 30%																													



No.	Peraturan	Resume Peraturan	Pengaruh Terhadap BNI dan Entitas Anak
5.	<p>POJK No. 2/ POJK.03/2018 Tentang Penetapan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. OJK menetapkan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i> berkoordinasi dengan BI, yang dilakukan setiap semester pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Bulan Maret dengan menggunakan data posisi bulan Desember tahun sebelumnya; dan b. Bulan September dengan menggunakan data posisi bulan Juni tahun berjalan. 2. OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik dan besaran <i>Capital Surcharge</i> yang wajib dibentuk oleh Bank Sistemik tersebut. 3. Metodologi penetapan Bank Sistemik menggunakan indikator ukuran Bank (<i>size</i>), kompleksitas kegiatan usaha (<i>complexity</i>) dan keterkaitan dengan sistem keuangan (<i>interconnectedness</i>). 4. <i>Capital Surcharge</i> harus dipenuhi dengan menggunakan modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>), yang besarnya ditetapkan dalam 5 (lima) kelompok (<i>bucket</i>) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 1,0% (satu koma nol persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 1 (satu); b. 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 2 (dua); c. 2,0% (dua koma nol persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 3 (tiga); d. 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 4 (empat); dan e. 3,5% (tiga koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 5 (lima). 5. Pembentukan <i>Capital Surcharge</i> dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 1 (satu), sebesar: <ul style="list-style-type: none"> • 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari ATMR sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku; dan • 1,0% (satu koma nol persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019; b. Bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 2 (dua), sebesar: <ul style="list-style-type: none"> • 1,125% (satu koma seratus dua puluh lima persen) dari ATMR sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku; dan • 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019; c. Bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 3 (tiga), sebesar: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku; dan • 2,0% (dua koma nol persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019; d. Bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 4 (empat), sebesar: <ul style="list-style-type: none"> • 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari ATMR sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku; dan • 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019; e. Bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 5 (lima), sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) sejak tanggal 1 Januari 2019. 	<p>BNI wajib melakukan pemantauan kategori kelompok (<i>bucket</i>) Bank Sistemik yang akan diberitahukan secara tertulis oleh OJK serta menyediakan <i>Capital Surcharge</i> sesuai dengan kelompok (<i>bucket</i>) yang ditetapkan oleh OJK.</p>



No.	Peraturan	Resume Peraturan	Pengaruh Terhadap BNI dan Entitas Anak
6.	POJK No. 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum	<ol style="list-style-type: none"> Layanan Perbankan Elektronik (LPE) adalah layanan bagi nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Layanan Perbankan Digital (LPD) adalah LPE yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (<i>customer experience</i>), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan. Bank dapat menyelenggarakan LPE atau LPD dan wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam POJK. Bank wajib memuat rencana penerbitan produk LPE atau rencana penyelenggaraan LPD oleh Bank dan/atau oleh Mitra Bank dalam rencana bisnis Bank. Bank yang menerbitkan produk LPE yang bersifat transaksional atau memiliki rencana penyelenggaraan LPD wajib memperoleh persetujuan dari OJK. Permohonan persetujuan LPE atau LPD harus diajukan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum implementasi. Bank yang menyelenggarakan LPD wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan LPD. Dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah atau calon nasabah melalui LPD, Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah. Verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah dilakukan dengan: <ol style="list-style-type: none"> Melalui tatap muka: <ul style="list-style-type: none"> Secara langsung (<i>face to face</i>); atau Menggunakan perangkat lunak milik Bank dengan perangkat keras milik Bank atau perangkat keras milik nasabah atau calon nasabah; dan/atau Tanpa melalui tatap muka namun menggunakan perangkat lunak milik Bank dengan perangkat keras milik Bank atau perangkat keras milik nasabah atau calon nasabah. Dalam melakukan verifikasi dengan perangkat keras dan/atau perangkat lunak, Bank harus memperhatikan dan menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor keaslian (<i>two factor authentication</i>). Dalam hal Bank melakukan verifikasi tanpa melalui tatap muka, Bank wajib menerapkan faktor ciri khas anda (<i>what you are</i>) sebagai salah satu dari 2 (dua) faktor keaslian (<i>two factor authentication</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> Apabila akan menyelenggarakan LPD, maka BNI wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan LPD. BNI wajib memedomani POJK dimaksud apabila akan menyelenggarakan LPE maupun LPD.
7.	POJK No. 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan SEOJK No. 18/SEOJK.07/2018 Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Lingkup Layanan Pengaduan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> Penerimaan Pengaduan; Penanganan Pengaduan; dan Penyelesaian Pengaduan PUJK dilarang mengenakan biaya Layanan Pengaduan kepada Konsumen. PUJK wajib memiliki prosedur secara tertulis mengenai Layanan Pengaduan dan wajib mencantumkan prosedur singkat Layanan Pengaduan dalam perjanjian dan/atau dokumen Transaksi Keuangan. PUJK wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima PUJK. PUJK wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap. Dewan Komisaris PUJK wajib memastikan Direksi PUJK memiliki dan melaksanakan prosedur Layanan Pengaduan. PUJK wajib menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan secara triwulanan kepada OJK dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah periode triwulanan berakhir. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur internal dengan berpedoman pada POJK dimaksud. Memublikasikan prosedur singkat Layanan Pengaduan kepada Konsumen dan/atau masyarakat serta penanganan Pengaduan yang terkini, dalam laporan tahunan, <i>website</i>, dan/atau media lain yang dikelola secara resmi. Dewan Komisaris wajib memastikan Direksi memiliki dan melaksanakan prosedur Layanan Pengaduan.



No.	Peraturan	Resume Peraturan	Pengaruh Terhadap BNI dan Entitas Anak
8.	<p>POJK No.15/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata Dan Peningkatan Devisa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dikecualikan dari perhitungan BMPK atau BMPD adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu. b. Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu. 2. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 1 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Dimiliki oleh pemerintah pusat; b. Kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan c. Ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status <i>sovereign</i> 3. Jaminan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b harus memenuhi persyaratan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan tidak dapat dibatalkan (<i>irrevocable</i>); b. Dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga/<i>margin</i>/bagi hasil/<i>ujrah</i>; c. Mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan d. Tidak dijamin kembali (<i>counter guarantee</i>). 4. Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi. 5. Peminjam dinyatakan wanprestasi dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga/<i>margin</i>/bagi hasil/<i>ujrah</i> dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyediaan Dana belum jatuh tempo; b. Tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga/<i>margin</i>/bagi hasil/<i>ujrah</i> dan/atau tagihan lain pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau c. Tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga/<i>margin</i>/bagi hasil/<i>ujrah</i> yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi. 6. Penyediaan Dana Bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank. Penyediaan Dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan antara lain Penyediaan Dana untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan pangan; b. Pengadaan rumah sangat sederhana; c. Pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lain yang setara; d. Pengadaan/penyediaan/pengelolaan air; e. Pengadaan/penyediaan/pengelolaan listrik; f. Pengadaan/pengolahan komoditas yang berorientasi ekspor; g. Pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara; dan/atau h. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. 	<p>Penyesuaian kebijakan dan prosedur internal BNI dengan berpedoman pada ketentuan POJK tersebut.</p>



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Adapun perubahan beberapa kebijakan akuntansi sepanjang tahun 2018 dan dampaknya bagi BNI diuraikan di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi

No.	Perubahan Kebijakan Akuntansi	Alasan Kebijakan Akuntansi	Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi terhadap BNI dan Entitas Anak
	Amendemen PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program	Amendemen PSAK 24 memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan). Standar ini berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.	PSAK ini memiliki pengaruh terhadap BNI terkait dengan imbalan kerja BNI namun saat ini BNI tidak pernah melakukan amendemen, kurtailmen atau penyelesaian Program.
	PSAK 74: Kontrak Asuransi	Kontrak Asuransi mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi. Portofolio tersebut terdiri dari kontrak yang memiliki risiko serupa dan dikelola bersama. Entitas membagi portofolio kontrak asuransi terbitan (<i>insurance contracts issued</i>) minimal menjadi kelompok kontrak yang merugi (<i>onerous</i>) pada saat pengakuan awal, kelompok kontrak yang pada saat pengakuan awal tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk selanjutnya menjadi kontrak yang merugi, dan kelompok kontrak tersisa dalam portofolio. Standar ini berlaku efektif 1 Januari 2022.	PSAK ini memiliki pengaruh terhadap anak perusahaan BNI yaitu BNI Life.



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL YANG AKAN BERLAKU

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 71 – INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tahun 2014, IASB (*International Accounting Standard Board*) menerbitkan IFRS 9 – *Financial Instrument*. Standar Internasional ini berlaku efektif di negara yang melakukan *Full Adoption* IFRS per 1 Januari 2018 menggantikan IAS (*International Accounting Standard*) 39 – *Financial Instrument: Recognition and Measurement* (di Indonesia diadopsi menjadi PSAK 55 – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran).

Pada bulan September 2017, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 71– Instrumen Keuangan. PSAK ini mengadopsi IFRS 9 dan akan berlaku efektif per 1 Januari 2020 menggantikan PSAK 55. Perbedaan mendasar antara IFRS atau PSAK 71 dengan PSAK 55 yaitu :

Pengaturan	IFRS 9 atau PSAK 71	PSAK 55
Penentuan Klasifikasi Aset & Liabilitas Keuangan	Berdasarkan SPPI (<i>Solely Principal, Payment & Interest</i>) test dan Model Bisnis dengan	Berdasarkan Intensi
Klasifikasi Aset Keuangan	<i>Fair Value through Profit/Loss</i> (FVPL) <ul style="list-style-type: none"> <i>Fair Value through Other Comprehensive Income</i> (FVOCI) <i>Amortised Cost</i> (AC) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Held to Maturity</i> (HTM) <i>Fair Value through Profit/Loss</i> (FVTPL) <i>Loan and Receivables</i> (LAR) <i>Available for Sales</i> (AFS)
Reklasifikasi Aset Keuangan	Apabila terdapat perubahan Model Bisnis Perusahaan	Diperbolehkan, untuk kondisi tertentu (terdapat kondisi tertentu akan terkena <i>tainting rules</i>)
<i>Tainting Rules</i>	Dihapuskan	Berlaku untuk reklasifikasi kategori HTM ke AFS melebihi batas material
<i>Hedge Accounting</i>	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan dan dokumentasi lebih sederhana Berhubungan langsung dengan strategi manajemen risiko Bank Penilaian efektivitas sesuai dengan tujuan manajemen risiko 	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan dan dokumentasi lebih rinci Tidak ada hubungan langsung dengan strategi manajemen risiko Bank Penilaian efektivitas 80% s/d 125%
Tahapan Penentuan <i>Impairment</i> (Penurunan Nilai)	<p>Tahap 1 – <i>Performing</i> Instrumen keuangan yang tidak mengalami kenaikan risiko kredit signifikan (<i>investment grade</i>, dan belum ada tunggakan) <i>Expected Credit Loss</i> 12 Bulan setelah tanggal pelaporan.</p> <p>Tahap 2 – <i>Under Performing</i> Instrumen keuangan yang mengalami kenaikan risiko kredit signifikan namun belum terdapat bukti objektif <i>impairment</i> (dhi. terdapat tunggakan namun belum melewati kriteria <i>impairment</i> yaitu 90 hari tunggakan). <i>Expected Credit Loss: Lifetime</i> (selama umur instrumen keuangan).</p> <p>Tahap 3 – <i>Non Performing</i> Instrumen keuangan yang telah memenuhi kriteria <i>impairment</i> (tunggakan \geq 90 hari) <i>Expected Credit Loss: Lifetime</i> (selama umur instrumen keuangan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Performing</i> dan Tidak Signifikan nilainya <ol style="list-style-type: none"> CKPN dihitung secara kolektif Menggunakan <i>Probability of Default</i> (PD) dan <i>Loss Given Default</i> (LDG) berdasarkan data historis <i>Non Performing</i> dan/atau Signifikan secara Individual <ol style="list-style-type: none"> CKPN dihitung secara individual Menggunakan <i>Discounted Cashflow</i> CKPN
Pendekatan statistik	<i>Point in Time</i> (PiT), dengan memperhitungkan faktor ekonomi makro	<i>Migration analysis</i> dan <i>roll rate</i> , tanpa memperhitungkan faktor ekonomi makro
CKPN atas Komitmen Pinjaman	Dilakukan perhitungan CKPN atas Komitmen Pinjaman dengan menggunakan <i>Credit Conversion Factor</i> (CCF)	Tidak dilakukan perhitungan CKPN untuk Komitmen Pinjaman

Dikarenakan BNI memiliki Kantor Cabang di Luar Negeri, maka 3 (tiga) cabang BNI Luar Negeri (Singapura, Seoul, London) diharuskan untuk menerapkan IFRS 9 per 1 Januari 2018. Untuk cabang Hongkong, implementasi IFRS 9 akan dilakukan pada awal tahun 2020 mengikuti *Head Office*, sedangkan untuk 2 (dua) cabang lainnya (Tokyo dan New York) tidak diharuskan untuk menerapkan IFRS 9 sesuai dengan regulator masing-masing.

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP

Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dengan mempertimbangkan nilai buku aset tetap (tanah dan bangunan) yang telah dilakukan revaluasi pada tahun 2015, maka pada September 2018, BNI melakukan penilaian kembali aset tetap yang dimiliki untuk kelompok aset tanah dan bangunan yang ada di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Penilaian atas tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal sebagai berikut:

1. KJPP Toha Okky Heru dan Rekan
2. KJPP Rengganis Hamid dan Rekan
3. KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan
4. KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar, metode biaya dan metode pendapatan. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

1. Jenis dan hak yang melekat pada properti
2. Kondisi pasar
3. Lokasi
4. Karakteristik fisik
5. Karakteristik dalam menghasilkan pendapatan
6. Karakteristik tanah

Berikut adalah ringkasan hasil penilaian kembali aset tetap di tahun 2018:

1. Tanah
Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp1,4 triliun yang terdiri dari kenaikan nilai tanah yang dicatat sebagai Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp1,4 triliun dan penurunan nilai tanah yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp4,4 miliar.
2. Bangunan
Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi bangunan dicatat sebesar Rp1,4 triliun. Kenaikan ini terdiri dari kenaikan nilai bangunan yang dicatat sebagai Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp1,4 triliun dan penurunan nilai bangunan yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp32,0 miliar.



Analisis & Pembahasan Manajemen



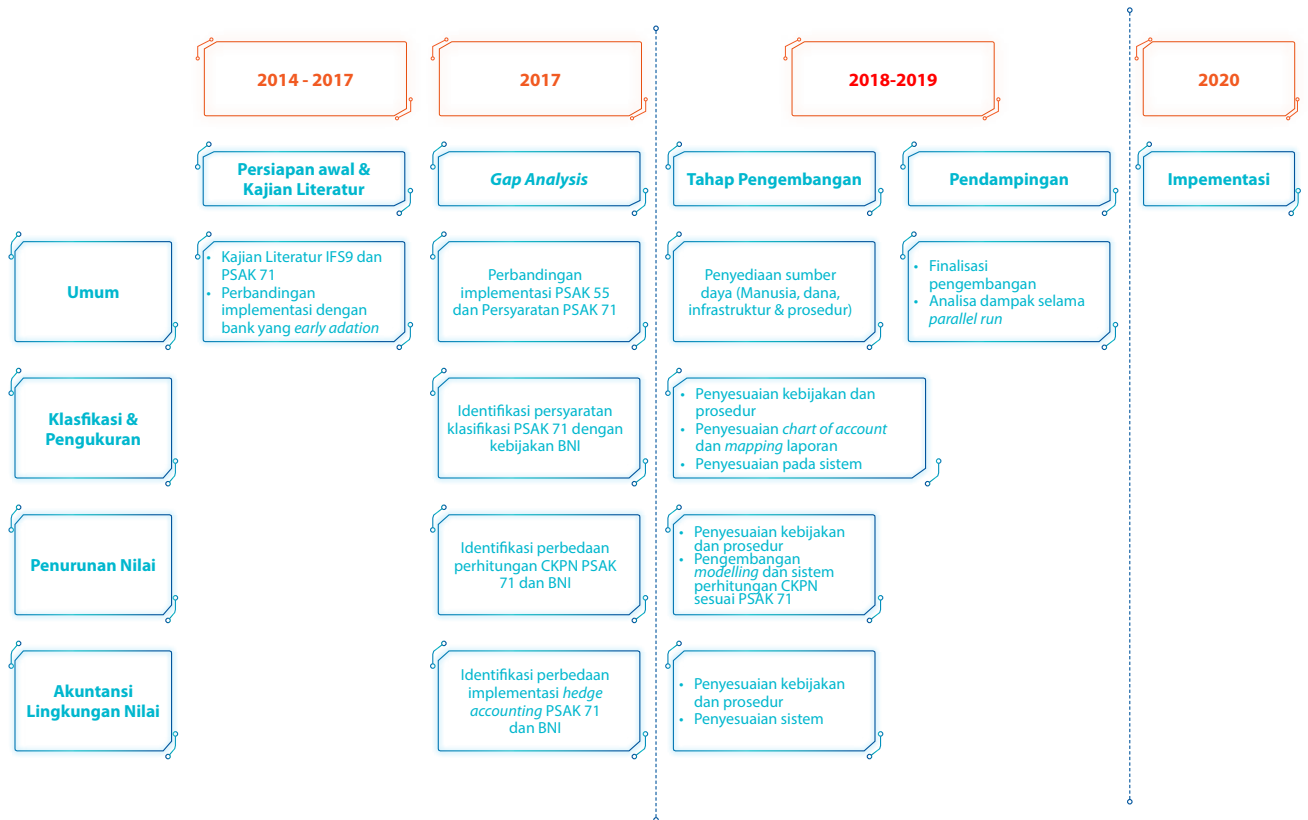
PERSIAPAN IMPLEMENTASI PSAK 71 – INSTRUMEN KEUANGAN

Dengan terbitnya IFRS 9: *Financial Instruments* oleh *International Accounting Standard Board (IASB)* pada tahun 2014, BNI merespons dengan mempersiapkan kajian literatur dan *gap analysis* awal. Dalam rangka persiapan implementasi, BNI juga turut aktif dalam diskusi bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai Lembaga yang berwenang dalam penyusunan standar akuntansi keuangan di Indonesia, asosiasi industri perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

IFRS 9 diadopsi di Indonesia per April 2017 menjadi PSAK 71: Instrumen Keuangan dan berlaku efektif di Indonesia per 1 Januari 2020. Sebagai tindak lanjutnya, BNI melakukan *gap analysis* persyaratan PSAK 71 dengan implementasi PSAK 55 yang berlaku saat ini dengan KPMG sebagai konsultan pendamping.

Pada tahun 2018, BNI telah menunjuk kembali KPMG sebagai konsultan pendamping implementasi PSAK 71 dalam penyusunan kebijakan dan prosedur sesuai dengan PSAK 71. Selain itu, setelah melalui proses pengadaan, BNI menunjuk PT. Nexia Indonesia Advisory Service sebagai vendor pengembangan sistem dalam melakukan proses pengembangan sistem pendukung implementasi PSAK 71 di BNI.

Roadmap implementasi PSAK 71 di BNI



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko operasional, BNI mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta International *Best Practices*. Pengelolaan risiko operasional meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Salah satu perangkat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan risiko operasional di BNI adalah PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). PERISKOP terdiri dari 3 (tiga) modul utama, yaitu:

1. Modul *Self Assessment*, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya risiko operasional di suatu unit. Metode ini terdiri dari serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan sendiri (*self assessment*) oleh setiap unit pemilik risiko (*risk owner*) secara independen dalam mengidentifikasi, menilai, mengontrol dan memantau risiko operasional yang terjadi di unitnya. Modul *self assessment* wajib diisi oleh segenap unit setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan melakukan pengukuran terhadap frekuensi dan dampak setiap *risk issue* di unitnya serta mencari penyebab risiko tersebut timbul.
2. *Loss Event Database*, merupakan sarana yang digunakan untuk mencatat setiap peristiwa risiko operasional yang menimbulkan dampak finansial yang meliputi *actual loss* dan *near miss* secara langsung. Setiap kali unit pemilik risiko (*risk owner*) mengalami kerugian risiko operasional, maka unit tersebut harus melakukan input dalam modul *Loss Event Database* tersebut. Dari modul ini akan diketahui tipe risiko yang terjadi, penyebab kejadian tersebut, lokasi (lini bisnis) tempat terjadinya risiko serta besarnya (*amount*) risiko yang terjadi atau liabilitas hukum yang terjadi serta pengembalian kerugian (*recovery*). Sarana ini sangat penting untuk memonitor profil risiko operasional secara teratur. Data yang diperoleh dari *Loss Event Database* (LED) merupakan input data utama bila Bank akan mengaplikasikan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA) dalam pengukuran kecukupan modal minimum risiko operasional.
3. *Key Risk Indicator*, merupakan serangkaian parameter yang ditetapkan untuk mengidentifikasi potensi kerugian risiko operasional yang utama/dominan, yang berpotensi mengganggu pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) unit kerja, sebelum peristiwa risiko operasional tersebut terjadi. Perangkat tersebut akan memberikan *warning/alert* jika nilainya sudah di luar *range/threshold* yang ditetapkan sebelumnya (*early warning signal*) yang menuntut adanya tindak lanjut manajemen Unit untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selain PERISKOP, BNI saat ini telah memiliki rekening Beban Risiko Operasional (BRO) serta *Recovery BRO*, yang digunakan untuk membukukan kerugian atau *recovery* yang disebabkan oleh risiko operasional. Pembukuan pada rekening BRO juga akan berdampak kepada penilaian kinerja serta tergambar dalam *Performance Measurement System* (PMS) Unit yang bersangkutan. Setiap bulan dilakukan *monitoring* terhadap rekening BRO dan *Recovery BRO* ini guna mitigasi risiko operasional.



Terkait dengan kelangsungan usaha bila terjadi kondisi *disaster* (bencana), BNI juga sudah mempunyai kebijakan *Business Continuity Management* (BCM), yaitu suatu mekanisme formal yang merupakan kombinasi antara strategi, kebijakan, prosedur, dan organisasi yang dikembangkan untuk memastikan kelangsungan operasional dari fungsifungsi usaha yang kritikal pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadi gangguan atau bencana. Kebijakan ini mencakup semua unit usaha yang ada di BNI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BNI memiliki infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi BCM seperti *Disaster Recovery Center* (DRC), *Dual Data Center* (DDC), Lokasi Alternatif Gedung BCM dan *Command Center*. Secara rutin BNI melakukan pengujian sistem dan aplikasi pada divisi/unit kritikal setiap 3 (tiga) bulan sekali, melakukan *site visit* dan simulasi pada cabang dan wilayah guna memastikan kesiapan menghadapi bencana.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT UNTUK MENGELOLA POTENSI YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Untuk mengelola potensi yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha, terutama yang bersifat finansial, BNI telah memiliki *Recovery Plan*. Dalam menyusun skenario untuk *Recovery Plan* tersebut, BNI menggunakan asumsi untuk krisis likuiditas disusun berdasarkan asumsi *scenario granular stress test* Bank Indonesia dan skenario perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang disesuaikan dengan kondisi internal BNI. Sedangkan untuk krisis solvabilitas disusun berdasarkan asumsi skenario dari OJK untuk *Financial Stability Assessment Program* (FSAP) sesuai kondisi internal BNI karena skenario tersebut dinilai telah mewakili kondisi buruk (*near default*).

Unit Pendukung Bisnis

320 PENGELOLAAN RISIKO KREDIT

325 JARINGAN DAN LAYANAN

328 BNI CONTACT CENTER

331 UNIT KUALITAS LAYANAN

332 TEKNOLOGI INFORMASI

335 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

339 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

340 RENCANA PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

343 DIGITAL BANKING

344 ELECTRONIC BANKING

351 HUMAN CAPITAL

352 HUMAN CAPITAL

ARCHITECTURE

353 KEBIJAKAN TALENT MANAGEMENT

UNTUK MENGAKSELERASI

LEADERSHIP DEVELOPMENT



PENGELOLAAN RISIKO KREDIT



“

Pertumbuhan kredit BNI yang cukup ekspansif di tahun 2018 diikuti oleh upaya perbaikan dalam pengelolaan risiko kredit sehingga menciptakan pertumbuhan yang berkualitas. Di tengah kondisi perekonomian di Indonesia yang belum pulih, pengelolaan risiko kredit menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung strategi pertumbuhan bisnis untuk dapat memastikan kualitas kredit BNI tetap terjaga sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. Penerapan sinergi antar unit untuk percepatan bisnis yang dicanangkan terbukti dapat menjaga kualitas kredit BNI dengan rasio pinjaman bermasalah (NPL) berada pada level 1,9%.



KINERJA TAHUN 2018

PERTUMBUHAN AKTIVA PRODUKTIF YANG SELEKTIF

Sepanjang tahun 2018 ekonomi China masih belum menggeliat dan mendorong ekonomi global seperti pada tahun 2008. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2018 diperkirakan tidak akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan ekspor dan investasi asing yang biasanya menjadi motor penggerak perekonomian China bergerak melamban. Kondisi tersebut turut memengaruhi ekonomi Indonesia sebagai salah satu mitra dagangnya. Hal ini menjadikan BNI menetapkan kebijakan yaitu memperkuat ekspansi bisnis di *selected corporate market* dan segmen komersial pada sektor terpilih untuk menjaga kualitas.

Dengan menetapkan sektor strategis salah satunya optimalisasi *supply chain* dan *cross selling*, yang juga merupakan unsur penting dalam mencapai pertumbuhan kredit yang berkualitas melalui proses *asesment* yang mendalam pada *parent account (Anchor Company)*.

Sementara itu, pertumbuhan aktiva produktif pada segmen konsumer tahun 2018 lebih difokuskan kepada debitur selektif yang cenderung memiliki profil risiko rendah seperti:

- Ekspansi BNI Griya fokus kepada pembeli unit di *selected developer, selected institution, nasabah emerald, cross sell existing* debitur yang belum menggunakan BNI Griya, dan *take over* debitur bank lain yang memiliki *track record* baik, serta program *Top Up* debitur eksisting;
- Ekspansi BNI Fleksi berfokus kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan BHMN yang memiliki *turn over* pegawai rendah dan juga pada pegawai dengan jabatan *Upper-Middle*; dan
- Ekspansi Kartu Kredit fokus pada peningkatan *outstanding* kartu kredit melalui program *loan on phone* dan *increase credit limit*, serta kebijakan akuisisi yang terfokus pada segmen BUMN dan instansi pemerintah.

ALUR PROSES PEMBERIAN KREDIT

BNI telah melakukan penyempurnaan dalam proses kredit *Business Banking* baik pada segmen Korporasi, Komersial maupun pada segmen Usaha Kecil.

Penyempurnaan yang dilakukan pada Segmen Korporasi dan Komersial yaitu:

1. Penajaman Fungsi Unit Bisnis
Unit bisnis melakukan perencanaan daftar prospek, pemasaran, melakukan penilaian kelayakan kredit secara menyeluruh (termasuk analisa *first way out* dan *second way out*) dan pemantauan debitur;
2. Penajaman Fungsi Unit Risiko
Unit Risiko memberikan rekomendasi kepada unit bisnis dengan melakukan analisa risiko kredit dan mitigasi/*risk control* yang berfokus pada risiko yang kemungkinan dan dampaknya tinggi.

Unit Risiko Kredit melakukan penerapan *Credit Risk Management* sebagai strategi utama dalam mengawal kebijakan pertumbuhan yang agresif pada tahun 2018. *Credit Risk Management* meliputi:

1. *Credit Risk Analysis*:
Meningkatkan peran *Credit Risk Manager* pada saat komite kredit dalam hal:
 - a. menyeimbangkan peran unit bisnis (SRM dan RM) dalam komite;
 - b. Memaksimalkan peran unit risiko sebagai penerapan *four eyes principles*.
2. *Credit Risk Review*:
 - a. Melakukan *review* secara periodik yang diprakarsai oleh pemimpin unit risiko di level Cabang, Wilayah dan Kantor Pusat;
 - b. Berkolaborasi dengan pihak independen untuk hal hal yang bersifat spesifik.
3. *Credit Administration*:
 - a. Memastikan agunan yang bersifat *fixed asset* telah dilakukan pengikatan secara sempurna untuk menjaga kepentingan BNI;
 - b. Memastikan dokumentasi kredit telah berjalan sesuai ketentuan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja rekanan.

Untuk meningkatkan kualitas kredit di segmen Korporasi telah dilakukan upaya-upaya selama tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi industri spesialis secara bertahap di Unit Risiko untuk dapat mempertajam analisis risiko sesuai karakteristik industri dan mitigasinya;
2. *Update key risk* parameter untuk sektor unggulan antara lain Perkebunan Kelapa Sawit, Infrastruktur Jalan Tol, Infrastruktur Kelistrikan, dan Pertambangan.
3. Pemantauan khusus untuk debitur berstatus Kolektibilitas 1 (satu) *Restruct*, Pra NPL, dan *watchlist* melalui mekanisme *Credit Risk Review* (forum antara unit risiko dan unit bisnis);
4. Pro aktif dan komprehensif dalam melakukan restrukturisasi dengan melakukan *joint effort* antara unit bisnis, unit risiko, dan unit *remedial* dan *recovery*.

Untuk meningkatkan kualitas kredit di segmen Komersial telah dilakukan upaya-upaya selama tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Pembuatan *risk register* dari hasil temuan audit sebagai *lesson learned* untuk *unit remote*.
2. Pemantauan khusus untuk debitur *Loan at Risk* (Kolektibilitas 1 restrukturisasi, Pra NPL, dan NPL) melalui mekanisme *Credit Risk Review* (forum antara unit risiko dan unit bisnis);
3. Pembentukan *team ad-hoc* di segenap *unit remote* dalam upaya menurunkan *Loan at Risk* (LaR)
4. Pro aktif dan komprehensif dalam melakukan restrukturisasi dengan melakukan *joint effort* antara unit bisnis, unit risiko, dan unit *remedial* dan *recovery*.

Sedangkan penyempurnaan yang dilakukan pada Segmen Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. RM (Unit Bisnis) melakukan perencanaan daftar prospek, pemasaran, melakukan analisa kelayakan kredit secara menyeluruh (termasuk analisa *first way out* dan *second way out*) dan pemantauan debitur;
2. Atasan langsung RM selain memiliki fungsi supervisi yang sudah melekat, juga memiliki fungsi *assessment* risiko kredit secara lebih mendalam.

Alat penunjang dalam proses pemberian kredit terus dikembangkan dan disempurnakan, Khusus untuk segmen Usaha Kecil terutama dalam hal penyaluran KUR telah didukung dengan sistem *electronic Loan Origination* (eLO) untuk mempercepat proses analisa kredit. Sedangkan pada seluruh segmen bisnis *banking* telah menggunakan Sistem Alat Bantu Analisa Kredit (SABAK) untuk meningkatkan efisiensi proses kredit serta mengurangi *human error* dalam proses analisis kredit.

Selain itu, dilakukan penguatan *four eyes principle* pada seluruh lini unit pemroses kredit sampai dengan pengambilan keputusan kredit melalui komite kredit yang beranggotakan pejabat pemutus kredit yang sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk terus menjaga kualitas kredit yang disalurkan.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis sektor konsumen secara selektif, penyempurnaan alur proses dilakukan secara komprehensif dan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yaitu:

1. Kebijakan prinsip *Know Your Customer* (KYC) pada calon debitur melalui proses verifikasi dokumen untuk meminimalisasi *fraud* aplikasi;
2. Pemberlakuan *corrective action* untuk unit pemrosesan kredit konsumen yang memiliki rasio NPL di atas batas yang telah ditentukan, di mana kewenangan memutus dinaikkan setingkat lebih tinggi;
3. Pemberlakuan proses khusus (*instan approval*) untuk *selected partner* (pembelian rumah *primary* pada *selected developer*);
4. Pemberlakuan proses regular dan khusus (*instant approval*) untuk pembelian agunan BNI Griya golongan NPL dan hapus buku;
5. Proses pra *approval* dan *instan approval* BNI Fleksi untuk *selected partner*;
6. Proses pra *approval* BNI Griya untuk nasabah *Emerald* (*Priority*); dan
7. Proses pra *approval* BNI Fleksi dan BNI Griya untuk Direksi dan Komisaris seluruh BUMN.



PEMANTAUAN KREDIT

Dalam menciptakan pertumbuhan aset yang berkualitas, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan pemantauan dan penagihan kredit secara intensif. Bentuk pemantauan tersebut dapat diwujudkan melalui kunjungan ke debitur untuk melihat kondisi usahanya, *review* kelayakan pinjaman debitur, dan pemantauan pembayaran kewajiban debitur.

Proses pemantauan pada segmen *business banking* juga ditunjang dengan optimalisasi alat *monitoring* yaitu *watchlist system* dan *credit risk review* yang digunakan untuk memantau kinerja kredit debitur dan menetapkan tindak lanjut debitur agar tidak terjadi penurunan kualitas kredit.

Sementara untuk pemantauan kredit pada segmen konsumen dilakukan dengan:

1. *Monitoring* intensif untuk debitur lancar yang mempunyai potensi untuk menunggak;
2. Pendebetan rekening tabungan debitur kartu kredit pada segmen *Captive Market*;
3. Melakukan strategi penagihan yang berbeda antara debitur kartu kredit berdasarkan *credit card behavior scorecard* agar penagihan lebih efektif dan efisien;
4. Penggunaan *Automated Account Allocation* untuk debitur-debitur yang memiliki potensi gagal bayar agar tidak terjadi penurunan kualitas aset;
5. Penggunaan aplikasi *Field Collector Tracking* untuk meningkatkan *productivity*;
6. Membentuk *unit collection* khusus untuk debitur BNI Fleksi sebagai *product unsecured*;
7. Pemantauan debitur BNI Griya yang memiliki pinjaman lebih dari Rp1 miliar (satu miliar rupiah) dilakukan *monitoring* secara periodik; dan
8. Pemantauan (*monitoring*) digitalisasi secara aplikatif.

PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT

Di tahun 2018, di tengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perekonomian global yang belum pulih mendorong BNI untuk terus meningkatkan pemantauan dan penyelamatan kredit (restrukturisasi) secara lebih komprehensif serta meningkatkan penyelesaian NPL dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Strategi penyelamatan dan penyelesaian kredit tetap dilakukan guna memperkuat fundamental keuangan BNI dan menjaga kualitas kredit antara lain dengan meningkatkan *coverage ratio* dan melakukan penanganan kredit bermasalah secara optimal. Penanganan kredit

bermasalah secara umum ditempuh melalui dua strategi, yaitu penyelamatan dan penyelesaian kredit. Strategi Penyelamatan dilakukan antara lain:

1. Restrukturisasi (*Restructuring, Reconditioning, Rescheduling*) terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban namun masih memiliki prospek dan dinilai kooperatif;
2. Setoran/Pelunasan melalui investor strategis;
3. Penjualan jaminan secara sukarela atau eksekusi Hak Tanggungan; dan
4. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Penyertaan Sementara Bank (PSB).

Sedangkan Strategi Penyelesaian diterapkan kepada debitur yang dinilai sudah tidak memiliki prospek. Kredit yang sudah dihapus buku terus diupayakan penyelesaiannya secara maksimal untuk memperkecil kerugian Bank melalui:

1. Penyelesaian utang melalui *strategic investor*;
2. Penjualan jaminan secara sukarela atau eksekusi Hak Tanggungan;
3. Optimalisasi penggunaan *website* lelang agunan untuk pemasaran agunan kredit segmen konsumen dan *business banking* yang dapat diakses oleh masyarakat umum;
4. Subrogasi;
5. Tindakan hukum melalui penagihan terhadap penjamin atas *personal guarantee* (PG) dan *company guarantee* (CG), eksekusi hak tanggungan/ fidusia, litigasi, kepailitan dan gugatan perdatas.

Selain itu, untuk penanganan kredit bermasalah untuk kredit konsumen ditempuh melalui dua strategi, yaitu penyelamatan dan penyelesaian kredit. Strategi Penyelamatan dan penyelesaian kredit yang dilakukan antara lain:

1. Percepatan Restrukturisasi (*Restructuring, Reconditioning, Rescheduling*) terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban namun masih memiliki prospek dan dinilai kooperatif melalui Program Perbaikan Kualitas Aset dan Percepatan *Recovery* (PPKA);
2. Pelaksanaan *Legal action* (gugatan sederhana, Jaksa Pengacara Negara/JPN);
3. Pendaftaran lelang untuk debitur yg berada pada golongan NPL sehingga menjadi efek jera bagi debitur agar berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya;
4. Optimalisasi penggunaan *website* lelang agunan untuk pemasaran agunan kredit segmen konsumen;
5. Penyelesaian kredit melalui pengalihan piutang NPL dan Hapus Buku (*cessie*-pengalihan atau penjualan tagihan kredit milik bank terhadap debitur kepada pihak lain atau investor sesuai kriteria yang ditetapkan Bank); dan
6. Optimalisasi *buy back guarantee* dari *developer* rekanan dan klaim asuransi.

RENCANA DAN STRATEGI TAHUN 2019

Menjawab tantangan gejolak ekonomi di tahun 2018, BNI menetapkan kebijakan pertumbuhan yang agresif dengan tetap menjaga kualitas. Melalui kajian internal dan eksternal yang telah dilakukan, ekspansi kredit difokuskan pada industri yang prospektif dan prioritas. Sejalan dengan hal tersebut maka strategi perbaikan kualitas kredit juga menjadi salah satu fokus utama di tahun 2018 yaitu perbaikan proses kredit yang meliputi restrukturisasi pada debitur bermasalah, meningkatkan *risk control* dalam proses perkreditan dengan menerapkan *four eyes principle* dan *supervise* atasan secara efektif. Pemantauan kredit juga terus dioptimalkan agar dapat mengidentifikasi permasalahan debitur lebih dini dan dapat menerapkan *corrective action* yang tepat.

Unit Risiko Kredit merencanakan penguatan *Credit Risk Management* sebagai strategi utama dalam mengawal kebijakan pertumbuhan yang agresif pada tahun 2019 antara lain:

1. *Credit Risk Analysis*, meliputi:
 - a. Meningkatkan peran dan kompetensi *Credit Risk Analysts* antara lain melalui:
 - i. Segmen Korporasi
 - Optimalisasi spesialis industri terutama untuk sektor unggulan;
 - Penanganan optimal atas kredit yang masuk dalam *loan at risk* (di luar NPL);
 - Pelatihan dan seminar sesuai dengan spesifikasi industri;
 - *Sharing session* dengan pelaku industri, regulator dan *stakeholder* lainnya;
 - ii. Segmen Komersial dan Usaha Kecil
 - Pengembangan proses kredit melalui eLO secara *end to end* untuk segmen usaha kecil;
 - Memperkuat fungsi *tracking process*;
 - Peningkatan *risk assessment* unit risiko melalui *sharing knowledge* atas sektor tertentu yang berasal dari spesialis industri di segmen korporasi;
 - *Sharing session* dengan pelaku industri, regulator dan *stakeholder* lainnya;

- b. Memaksimalkan peran unit risiko sebagai penyeimbang peran unit bisnis, serta menerapkan *four eyes principles*.
2. *Credit Risk Review*, meliputi:
 - a. Melakukan *review* atas *key risk parameter* sektor industri yang telah ada, untuk disesuaikan dengan kondisi makro dan mikro industri tersebut;
 - b. Melakukan pembuatan *key risk parameter* untuk sektor industri lainnya (di luar yang sudah ada di tahun 2018);
 - c. *Mapping* dan pembahasan permasalahan kredit yang sudah terjadi dan rekomendasinya (*risk mitigation and lesson learnt*);
 - d. Penajaman identifikasi dan pemantauan permasalahan debitur sehingga *action plan* yang ditetapkan lebih akurat; dan
 - e. Penajaman identifikasi permasalahan debitur sejak dini melalui sistem *Early Warning Signal* (EWS).

Sementara itu, untuk rencana dan strategis pada kredit konsumen pada tahun 2019 antara lain:

- Memaksimalkan strategi yang telah dijalankan pada tahun 2018;
- Fokus ekspansi untuk *selected partner* dalam hal ini developer PKS (Perjanjian Kerja Sama), institusi terpilih (BUMN, BUMD, institusi pemerintah dan swasta nasional terpilih, debitur eksisting, *selected profesional* (dokter dan notaris), nasabah *Emerald* dan *consumer relationship banking* (*customer* yang sudah memiliki *account* BNI minimal 6 bulan);
- Digitalisasi proses kredit melalui sistem pendataan aplikasi yang terintegrasi, pengecekan otomatis duplikasi dan *Bad Application*, serta verifikasi dengan menggunakan data internal dan eksternal (*Big Data*) untuk mempersingkat waktu penyelesaian proses kredit; dan
- Penyelesaian kredit melalui pengalihan piutang NPL dan Hapus Buku (melalui *cessie* dan *Bulk*).



JARINGAN DAN LAYANAN

Pengembangan jaringan dan layanan BNI selama tahun 2018 dilakukan melalui penambahan jaringan kantor (*outlet*), jaringan elektronik (ATM), Agen46 dan melakukan berbagai inovasi jaringan dan layanan yang didukung oleh Unit *Contact Center* dan Unit Kualitas Layanan. Hal ini merupakan salah satu upaya mendukung pencapaian kinerja bisnis BNI yang telah ditetapkan.

JARINGAN KANTOR (*OUTLET*)

KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka memperluas jaringan, meningkatkan pelayanan dan memperluas jangkauan inklusi keuangan kepada masyarakat, di tahun 2018, BNI melakukan penambahan jaringan kantor sebanyak 13 Kantor Cabang Pembantu, 23 (dua puluh tiga) Kantor Kas, 9 (sembilan) *Payment Point*, 74 (tujuh puluh empat) *O-Branch* (Layanan Kas Keliling), 1 (satu) Sentra Kredit Kecil, 1 (satu) *Money Changer*.

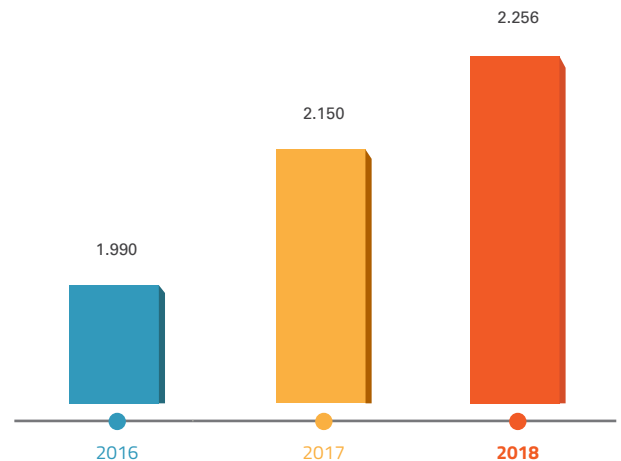
Selain itu untuk meningkatkan kinerja bisnis, efektivitas serta optimalisasi *outlet* dan pengendalian risiko operasional, BNI juga meningkatkan status *outlet* eksisting untuk 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang dan 12 (dua belas) Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu.

Jaringan kantor BNI hingga akhir tahun 2018 tersebar di 34 (tiga puluh empat) Provinsi dan menjangkau 476 (empat ratus tujuh puluh enam) Kota/Kabupaten (91%) di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah, 201 (dua ratus satu) Kantor Cabang, 1.109 (seribu seratus sembilan) Kantor Cabang Pembantu, 605 (enam ratus lima) Kantor Kas termasuk 14 (empat belas) layanan *Digital Branch* (*D-Branch*), 128 (seratus dua puluh delapan) *Payment Point* dan 196 (seratus sembilan puluh enam) armada *O-Branch* (Layanan Kas Keliling). Untuk melayani kebutuhan nasabah pada hari *weekend*, BNI mengoperasikan 78 (tujuh puluh delapan) *outlet* yang melayani nasabah pada hari Sabtu dan Minggu (Layanan *Weekend Banking*). Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada segmen nasabah *Wealth* (baik nasabah *priority* maupun *private*), BNI juga memiliki 28 (dua puluh delapan) *outlet* layanan BNI Emerald. Sampai saat ini, sebanyak 56% dari keseluruhan *outlet* BNI berada di Pulau Jawa dan 44%-nya berada di luar Pulau Jawa.

Dari *total outlet* BNI yang ada, sebanyak 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) atau 72% berada di area pusat bisnis komersial strategis (pertokoan dan perbelanjaan) dan sebanyak 527 (lima ratus dua puluh tujuh) atau 28% berada di area pusat perkantoran dan hunian strategis.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir (kurun waktu 2016 - 2018), jaringan *outlet* BNI telah bertumbuh sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) *outlet* atau rata-rata sebesar 6,47% (CAGR), seperti yang tergambar pada grafik di bawah berikut.

Grafik Jumlah Jaringan Outlet BNI





JARINGAN ATM

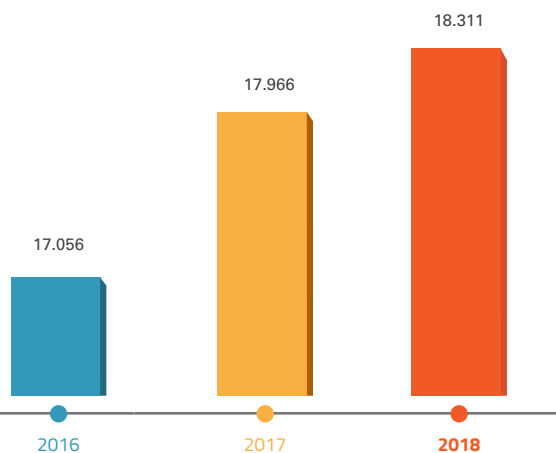
Untuk terus berkomitmen memberikan kemudahan kepada nasabah BNI maupun nasabah perbankan lainnya dalam bertransaksi, pada tahun 2018 BNI melakukan penambahan 345 (tiga ratus empat puluh lima) unit mesin ATM yang melayani transaksi tarik setor tunai (*Cash Recycle Machine/ CRM*) sehingga total ATM BNI di seluruh Indonesia sampai akhir tahun 2018 berjumlah 18.311 (delapan belas ribu tiga ratus sebelas) unit yang terdiri dari 15.834 (lima belas ribu delapan ratus tiga puluh empat) unit ATM Tunai (termasuk ATM *Drive Thru* dan *Ride Thru*), 1.477 (seribu empat ratus tujuh puluh tujuh) ATM Tarik Setor Tunai (CRM) dan 1.000 (seribu) ATM Non Tunai. Dari total 18.311 (delapan belas ribu tiga ratus sebelas) ATM BNI yang tersebar di seluruh Indonesia, 10.827 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh) atau 59% berada di Pulau Jawa, sedangkan 7.484 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat) atau 41% tersebar di Luar Pulau Jawa.

Dari total 18.311 (delapan belas ribu tiga ratus sebelas) ATM BNI tersebut, sebanyak 10.461 (sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu) ATM BNI atau 57% berada di area pusat bisnis komersial strategis (pertokoan dan perbelanjaan) dan sebanyak 7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) atau 43% berada di area pusat perkantoran dan hunian strategis.

Dalam rangka sinergi BUMN untuk terus memberikan kemudahan bertransaksi khususnya untuk nasabah-nasabah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), BNI juga melakukan konversi terhadap 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) ATM BNI menjadi ATM Merah Putih (*Link*).

Dengan semakin bertambahnya jumlah ATM BNI yang tersebar di seluruh Indonesia, akan semakin meningkatkan pelayanan transaksi perbankan baik bagi nasabah BNI maupun nasabah lain yang tergabung dalam jaringan ATM bersama, ATM *Link*, ATM *Global Master Card International* serta jaringan ATM Prima, serta meningkatkan pendapatan *fee base income* (FBI) dari transaksi melalui ATM BNI.

Grafik Jumlah dan Pertumbuhan ATM BNI



D-Branch Ngurah Rai, Bali



Interactive Wall



Big Screen dan CRM



Banking Cafe, Manado



INOVASI PADA JARINGAN KANTOR

Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan digital yang semakin pesat, pada tahun 2018 BNI menambah 6 (enam) layanan *D-Branch* yang mengutamakan layanan perbankan melalui penambahan perangkat digital sehingga *total D-Branch* BNI saat ini sebanyak 14 (empat belas) *D-Branch* yang berlokasi di kota-kota besar antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Bali, Yogyakarta, Makasar dan Manado.

Untuk memberikan pengalaman bertransaksi secara digital, pada *outlet D-Branch* tersedia perangkat digital yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan antara lain; ATM/CRM (transaksi setoran tunai, penarikan tunai, transfer dan lainnya), *Smart Kiosk (opening account machine)*, *Interactive Wall* (perangkat edukasi produk BNI *touchscreen*), *Interactive Table* (perangkat Informasi *touchscreen*) dan *Big Screen* (perangkat promo dan informasi).

Dalam rangka menggarap potensi bisnis dari kaum *milenial* melalui pengalaman bertransaksi yang lebih modern, nyaman dan kekinian, BNI menyediakan layanan *Banking Cafe* pada beberapa *outlet D-Branch*.

Pada tahun 2018, BNI melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan transaksi perbankan khususnya di *frontliner* melalui *piloting* penggunaan mesin *Teller Cash Recycle (TCR)* untuk mempermudah dan mempercepat layanan setoran tunai dan pemindahbukuan di *counter teller*.



Interactive Table



Perangkat TCR

RENCANA KERJA TAHUN 2019

Dalam persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif dan cepat di era digital saat ini, BNI terus berkomitmen melakukan transformasi layanan perbankan guna memenuhi tuntutan nasabah yang semakin kompleks. Menindaklanjuti hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan *customer base* nasabah BNI. Pada tahun 2019, BNI akan fokus melakukan penataan jaringan kantor untuk optimalisasi bisnis *outlet* dan layanan melalui peningkatan status 2 (dua) Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu dan merelokasi 50 *outlet* ke area potensial. Penambahan jaringan kantor hanya pada area potensial dan blank spot yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 4 (empat) *Payment Point*, 3 (tiga) Kantor Fungsional, dan 2 (dua) Unit *O-Branch*.

Selain penataan jaringan kantor, BNI akan melakukan penambahan 280 (dua ratus delapan puluh) ATM/CRM sebagai bagian jaringan elektronik untuk mendukung bisnis dan layanan *outlet*.

Pada tahun 2019 BNI akan mengembangkan *Smart Digital System (SDS)* sebagai *strategic tools* layanan diseluruh *outlet* yang bertujuan untuk mengimplementasikan layanan perbankan yang semakin modern melalui perbaikan proses bisnis dan layanan di cabang menjadi lebih *simple* sesuai ekspektasi nasabah dengan perangkat layanan yang lebih digital dan canggih seperti CRM, *Smart Kiosk (Opening Account Machine)*, *Self Service Passbook Printer*, *Teller Cash Recycle (TCR)*, *Internet Point*, *Digital Banner System (DBS)*.

BNI

CONTACT CENTER

BNI Contact Center terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi para nasabah BNI. Melalui layanan BNI Call 1500046, nasabah diberi kemudahan mendapatkan informasi, melakukan transaksi dan memperoleh solusi atas setiap permasalahan baik untuk layanan perbankan, kartu kredit, *merchant* serta transaksi *remittance* dan *trade*.

Pada tahun 2018 BNI Contact Center mendukung BNI Smart Kios melalui layanan *Video Contact Center* untuk pembukaan rekening melalui *D-Branch*, serta mengelola Media Sosial BNI untuk berbagai permintaan informasi maupun keluhan sehingga BNI Contact Center melayani seluruh kontak nasabah melalui *channel non-branch*.

Seiring dengan semangat BNI Digital dan untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah, BNI Contact Center meluncurkan layanan Aplikasi BNI Call yang merupakan aplikasi *Contact Center* perbankan pertama di Indonesia yang berbasis *Artificial Intelligence (AI)* yang dilengkapi dengan fitur *Voice Command* (perintah suara) dan *Natural Language Processing (NLP)*. Aplikasi BNI Call memberikan kemudahan bagi nasabah dan non nasabah, baik pengguna Android dan iOS, untuk mendapatkan berbagai informasi produk dan jasa BNI maupun informasi umum terkini yang diperlukan. Dengan menggunakan Aplikasi BNI Call, nasabah dan non nasabah juga akan diberikan kenyamanan dalam mendapatkan berbagai informasi dan layanan dari petugas BNI Call melalui *chat*.

Aplikasi BNI Call memberikan *experience* baru serta menambah alternatif *channel* sehingga nasabah diberikan berbagai pilihan dengan kemudahan dan kenyamanan akses yang dapat meningkatkan kepuasan nasabah terhadap layanan BNI Call 1500046.

BNI Contact Center mendukung komitmen BNI dalam memberikan layanan prima bagi para penyandang disabilitas dengan menjalankan kebijakan strategis dan program keuangan inklusif yang ramah disabilitas. BNI Contact Center berpartisipasi dalam perayaan Hari Disabilitas Internasional 2018 yang diadakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 2 dan 3 Desember 2018 dengan memperkenalkan Aplikasi BNI Call yang ramah disabilitas.

Selain itu BNI Contact Center mendukung program Inklusi Keuangan Untuk Semua dalam acara Fin Expo 2018 yang

diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Oktober 2018, serta acara Digital Expo yang diselenggarakan oleh Pertamina Geothermal Energy pada tanggal 12 dan 13 Desember 2018 untuk berbagi pengalaman mengenai digitalisasi.

Komitmen BNI Contact Center melalui kebijakan Mutu antara lain "Berkomitmen, Cakap dan Cermat" untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan bagi nasabah diwujudkan melalui standarisasi kualitas pada seluruh layanan sehingga Sertifikasi ISO 9001:2015 terus dipertahankan pada tahun 2018.

Prestasi yang telah diraih BNI Contact Center di tahun 2018, di antaranya *ranking* pertama untuk kategori *Phone Banking* dan *Call Center* berdasarkan hasil survei *Bank Service Excellent Monitor (BSEM)* dari *Marketing Research Indonesia (MRI)*, predikat *Excellent* untuk kategori *Reguler Banking* dan *Platinum Credit Card* berdasarkan hasil survei *Contact Center Service Excellent Award (CCSEA) 2018* dari *Majalah Service Excellence* bekerja sama dengan *Carre – Center for Customer Satisfaction and Loyalty (Carre-CCSL)*.

BNI Contact Center aktif berperan sebagai *point of contact* bagi nasabah BNI dalam menyampaikan *voice of customer* dengan memberikan berbagai *insight* kepada unit bisnis dalam peningkatan produk, fitur dan layanan yang unggul kepada nasabah, antara lain dengan memberikan *feedback* kepada *business/product owner* terkait pengaduan nasabah; melakukan pemantauan *Service Level Agreement (SLA)* penyelesaian pengaduan; penyesuaian ketentuan internal jika terdapat perubahan perundang-undangan serta penyempurnaan aplikasi penanganan pengaduan nasabah *Online Request Management*.

BNI Contact Center berkontribusi sebagai salah satu *source data* untuk memperkuat peluang peningkatan pendapatan pada Segmen *Consumer* dan Ritel melalui program *referral* dan *cross selling* sehingga BNI Call 1500046 menjadi *point of contact* dengan memberikan solusi layanan dan penjualan yang terintegrasi.

BNI Contact Center akan terus mengembangkan fitur-fitur pada Aplikasi BNI Call untuk meningkatkan kualitas layanan yang diharapkan semakin meningkatkan *customer experience* serta *customer satisfaction*.



PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH BNI

BNI Contact Center sebagai salah satu garda terdepan BNI dalam layanan bagi para nasabah BNI, senantiasa terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik, termasuk penyelesaian atas setiap pengaduan nasabah baik untuk layanan perbankan maupun kartu kredit. Nasabah BNI diberikan kemudahan mengakses layanan pengaduan dengan berbagai pilihan media baik melalui lisan maupun tertulis.



BNI Contact Center didukung oleh aplikasi penanganan pengaduan *Online Request Management* yang terintegrasi sehingga aktivitas penerimaan dan proses penyelesaian pengaduan nasabah dapat dilakukan pada aplikasi tersebut serta mempermudah pemantauan status penyelesaian pengaduan nasabah.

Solusi penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan dilakukan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja*) dan pengaduan tertulis dalam waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila diperlukan dokumen pendukung atas pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan, maka BNI akan meminta nasabah menyampaikan pengaduan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu, pemenuhan kelengkapan dokumen dan penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya sesuai POJK No.1/POJK.07/2013 dan diperbaharui melalui POJK No.18/POJK.07/2018*) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah.

*) Efektif berlaku per bulan Maret 2019



ALUR PENYAMPAIAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN



NASABAH



PETUGAS BNI

1 Menyampaikan pengaduan



2 Melakukan registrasi pengaduan

3 Memberikan tanda terima atau nomor registrasi



5 Menyampaikan pemberitahuan perpanjangan waktu**

4 Menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan*



6 Menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan

- BNI mengupayakan penyelesaian pengaduan Lisan dalam waktu maksimal 5 hari kerja dan pengaduan tertulis dalam waktu maksimal 20 hari kerja.
- Apabila diperlukan dokumen pendukung atas pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan, maka BNI akan meminta nasabah menyampaikan pengaduan secara tertulis.
- Apabila terdapat kekurangan dokumen, maka nasabah dapat menyampaikan kekurangan dokumen dalam waktu maksimal 20 hari kerja.
- Dalam kondisi tertentu pemenuhan kelengkapan dokumen dan penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang dalam waktu 20 hari kerja berikutnya.

Sesuai surat Edaran OJK (SE OJK) No. 2/SEOJK.07/2014 dan diperbaharui melalui surat Edaran OJK (SE OJK) No. 17/SEOJK.07/2018, BNI akan memberikan informasi penyelesaian pengaduan nasabah melalui sarana telepon, email, surat ataupun pesan singkat (*short message service/SMS*). Apabila nasabah merasa solusi penyelesaian yang diberikan oleh BNI tidak memenuhi harapan, maka nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



UNIT

KUALITAS LAYANAN

KINERJA TAHUN 2018

BNI senantiasa melakukan berbagai inovasi dan pembaharuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan. Secara konsisten BNI selalu menyesuaikan standar layanan dengan perkembangan digitalisasi perbankan yang bergerak dengan cepat melalui program-program pembaharuan standar layanan, peningkatan kompetensi *frontliner* dan simplifikasi proses layanan yang disertai dengan mitigasi risiko yang tepat sehingga Layanan BNI menjadi lebih cepat, mudah dan akurat. Beberapa inisiasi dilakukan untuk mendukung hal tersebut seperti; Standarisasi Layanan Kantor Cabang Luar Negeri, Standarisasi layanan Outlet "D-Branch", Program *Affiliate Wealth Manager Certification*, Program *Frontliner Super* dan Program Pengembangan Kualitas Layanan *Teller* BNI.

Sebagai upaya mempercepat pertumbuhan bisnis, BNI mencanangkan layanan sebagai "*2nd Engine of Sales*" yaitu layanan yang tidak hanya berorientasi pada kepuasan dan solusi bagi nasabah tetapi juga mempunyai fungsi dan peran dalam menciptakan peluang bisnis yang berkesinambungan sehingga mendukung pencapaian *profit* bagi Bank. Berbagai program diinisiasi dalam rangka menyiapkan petugas *frontliner* Kantor Cabang sebagai ujung tombak bagi bisnis dan layanan BNI. Adapun program-program tersebut di antaranya: *Bancassurance* Program, Program *Upgrade Segment Emerald*, *Property Investment* melalui Program *Griya*, Edukasi Program Investasi Pasar Modal serta Program Kredit *Flexi* dan Kartu Kredit.

Dalam rangka membentuk *image* setiap pegawai dengan karakter dan etika sebagai seorang profesional yang mencerminkan identitas sebagai insan BNI sekaligus sebagai identitas Bank, telah dilakukan *kick off* program BNI *Professional Image*. Program ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan citra Bank (*corporate identity*) melalui kemampuan pegawai untuk berpenampilan menarik (*professional style*), memiliki komunikasi yang baik (*communication skill*), memiliki etika ketika berinteraksi dengan nasabah maupun *stakeholders* (*business etiquette*) serta memiliki pemahaman yang baik tentang pemanfaatan teknologi dan bijak dalam menggunakan media sosial (*digital intellectual*).

Berbagai upaya peningkatan kualitas layanan yang dilakukan telah memberikan dampak positif. Hal tersebut tercermin dari beberapa hasil survei kepuasan nasabah yang dilakukan oleh lembaga independen di sepanjang tahun 2018. Adapun hasil survei tersebut telah mengantarkan BNI untuk memperoleh beberapa penghargaan seperti:

1. *The Best Government Bank in Service Excellence Bank Service Excellence Monitor 2018* oleh Marketing Research Indonesia (MRI);
2. *The Best Government Bank for Satisfaction, Loyalty and Engagement (SLE) Survey 2018* oleh Marketing Research Indonesia (MRI); dan
3. *2nd Ranked Overall for Satisfaction, Loyalty and Engagement (SLE) Survey 2018* oleh Marketing Research Indonesia (MRI).

RENCANA KERJA TAHUN 2019

Tahun 2019 Unit Kualitas Layanan mencanangkan 3 (tiga) strategi dalam rangka mencapai kualitas layanan yang unggul dan kompetitif, yaitu:

1. Layanan sebagai "*Business Accelerator*" yaitu layanan sebagai keunggulan kompetitif dalam percepatan pencapaian bisnis BNI baik di sektor *consumer banking* maupun *business banking*.
2. *Digital Services*, yaitu layanan yang berbasis digital meliputi:
 - a. *Digital Mindset*, yaitu menanamkan pola pikir digital kepada petugas yang *in charge* berhubungan dengan nasabah.
 - b. Optimalisasi Data Analitik, yaitu mengoptimalkan "*Big Data*" dengan tujuan pencapaian target bisnis dan layanan.
 - c. *Process Improvement* yaitu perbaikan bisnis proses dan otomasi layanan.
3. *Beyond Services*, yaitu layanan yang memberikan nilai tambah bagi nasabah meliputi:
 - a. Layanan yang diberikan melebihi harapan nasabah.
 - b. Layanan yang diberikan di atas rata-rata industri.
 - c. Layanan yang diberikan mampu memberikan pengalaman baru kepada nasabah.

Tujuan penetapan strategi layanan sebagai tersebut di atas diharapkan menghasilkan kualitas dan standar layanan yang *customer centris* serta mampu sebagai pondasi dalam percepatan pencapaian bisnis di seluruh *touch point* nasabah BNI.

TEKNOLOGI INFORMASI



UNTUK Mendukung Digital Transformation dan Competitive Analytics, BNI telah mengembangkan Big Data Analytics dengan memanfaatkan keunggulan Machine Learning dan analytical tools lainnya serta didukung dengan data scientist yang andal.

KEBIJAKAN DAN INISIATIF STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan Teknologi Informasi pada era industri 4.0 juga berdampak bagi dunia perbankan. Dalam upaya mendukung inovasi bisnis bank di era digital, BNI membuat kebijakan dan insiatif strategis selama tahun 2018.

Misi Teknologi Informasi

Kebijakan dan Inisiatif Strategis BNI 2018

Support TI yang Agile dan Dinamis

Menyediakan solusi berbasis TI guna mendukung bisnis, melalui inovasi dan penerapan tata kelola TI, dengan keamanan informasi yang terkendali

Menyediakan operasional TI yang berdaya guna, unggul, inovatif dan aman guna menjamin ketersediaan layanan TI yang andal dan terpercaya bagi user bisnis

Memberikan layanan TI berbasis *availability & reliability*

Menyediakan kebutuhan TI yang diperlukan untuk mendukung Rencana Strategis Bank menjadi *Competitive Financial Service*

Memberikan layanan *Decisions Support & Management Information System*

Memastikan kepatuhan terhadap tata kelola TI Perbankan

People, Process, Technology

Inisiatif TI 2018

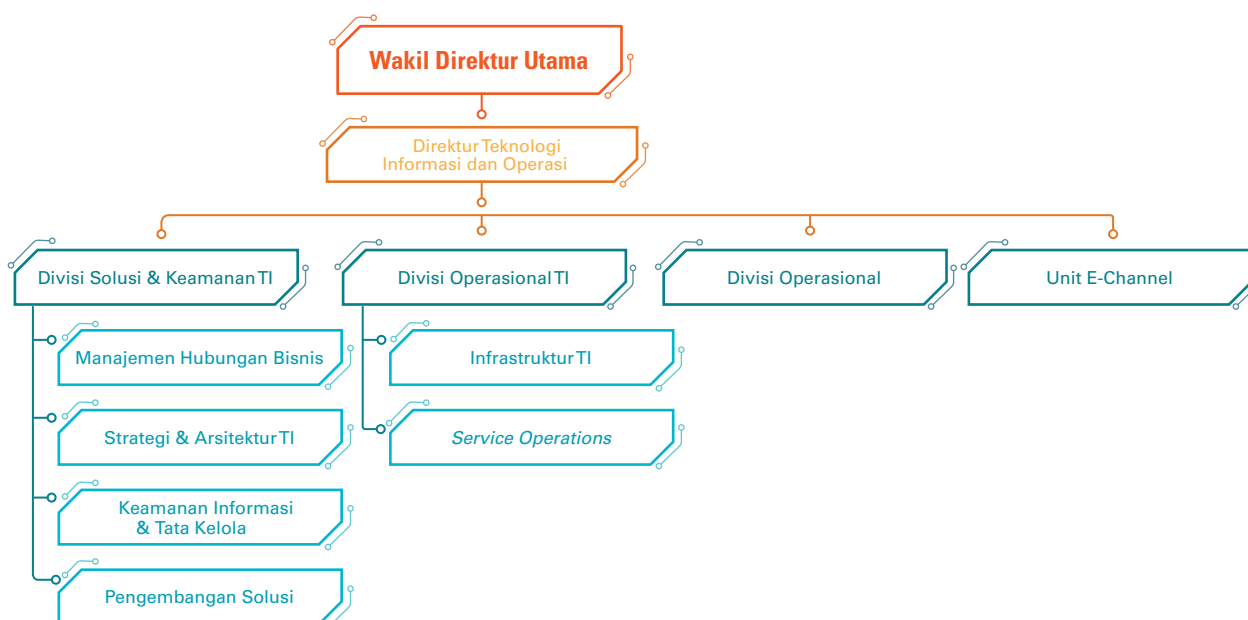


STRUKTUR PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan Teknologi Informasi (TI) Bank dijalankan oleh Satuan Kerja TI yaitu Divisi Solusi dan Keamanan Teknologi Informasi (STI) dan Divisi Operasional Teknologi Informasi (OTI), yang disupervisi oleh Direktur Teknologi Informasi dan Operasi (Dir TI), dengan ruang lingkup tugas yaitu:

NO	Unit Kerja	Job Description
1	Divisi Solusi dan Keamanan TI	Menyediakan solusi berbasis TI guna mendukung bisnis, melalui inovasi dan penerapan tata kelola TI, dengan keamanan informasi yang terkendali.
2	Divisi Operasional TI	Menyelenggarakan operasional TI yang unggul, inovatif dan aman guna menjaga <i>availability</i> , <i>reliability</i> dan <i>maintainability</i> layanan TI bagi user bisnis.

Mengacu pada SK Direksi No. KP/384/DIR/R tanggal 09 November 2018, Direktur TI juga membawahi Divisi Operasional (OPR) dan Unit E-Channel (ECN) dengan struktur organisasi sebagai berikut:



KEUNGGULAN TEKNOLOGI INFORMASI BNI

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Bank BNI dalam bidang Teknologi Informasi untuk mendukung bisnis antara lain:

1. Penyediaan *Application Programming Interface* (API) sebagai platform open banking yang memudahkan integrasi dan kolaborasi dengan pihak ketiga termasuk *start up* dan teknologi finansial (*fintech*) untuk memanfaatkan layanan bank secara aman dan *realtime*.
2. BNI menggunakan *data center* yang didukung dengan *disaster recovery center* yang menjamin ketersediaan layanan secara maksimal. Data center BNI telah mendapatkan Sertifikasi *Unexpired Tier III Design* untuk kategori *Tier Certification of Design Documents* (TCDD) dan *Tier III Facility* untuk kategori *Tier Certification for Constructed Facilities* (TCCF) dari *Uptime Institute*..
3. Sebagai pengembangan dari *data warehouse*, BNI mengadopsi teknologi *big data* yang memungkinkan bisnis mendapatkan *customer and business insight* yang lebih baik.
4. BNI juga terus berinovasi dan mengembangkan teknologi informasi yang bersifat *customer centric* dengan berfokus pada aspek kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi secara digital.
5. Satuan Kerja TI BNI telah menerapkan bi-modal IT, di mana alur pemenuhan dan pengembangan IT berjalan secara *agile* untuk dapat memenuhi kebutuhan *time to market* yang lebih cepat.



PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

ARSITEKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai upaya dalam menyelaraskan pengembangan teknologi informasi, sepanjang tahun 2018 BNI terus menyempurnakan skema *Application Architecture Landscape* sebagai berikut:



Application Architecture Landscape Teknologi Informasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

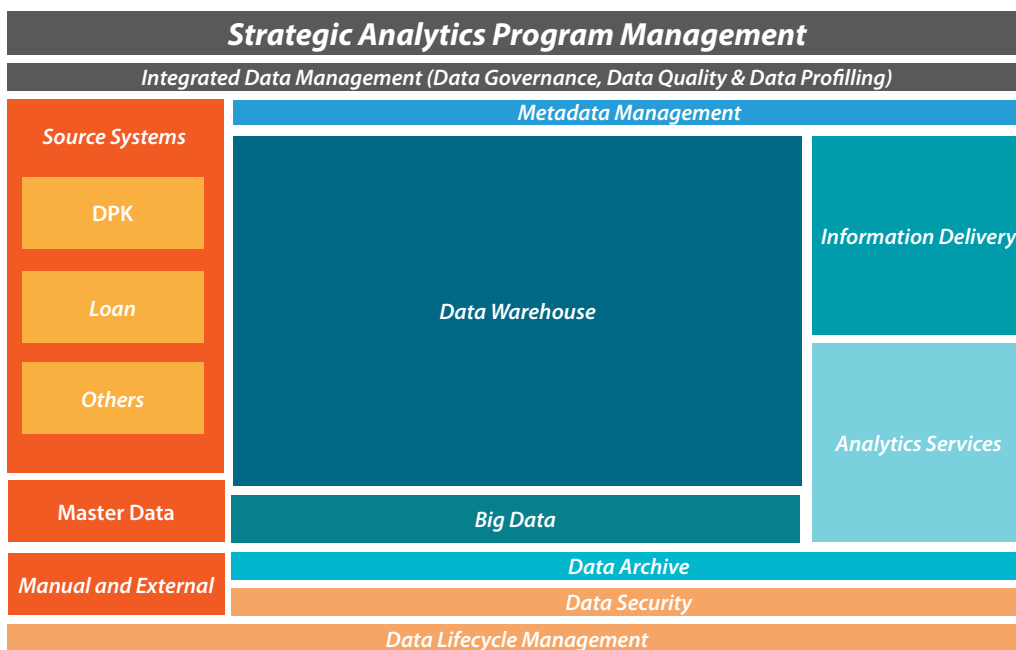
1. *Delivery Channel* merupakan kanal akses nasabah atas produk perbankan seperti *Outlet*, ATM, Internet Banking, *Mobile Banking*, API, dsb.
2. *Customer Management* sebagai sistem pengelolaan nasabah internal dan eksternal yang terdiri dari *Contact Center*, *Sales Performance Monitoring*, dan *Loyalty*.
3. *Product Processing* adalah sistem untuk menangani *Customer*, *Funding*, *Lending*, Produk Kartu Kredit, dsb.
4. *Middleware* merupakan sistem yang berfungsi sebagai layer *integrator* antar sistem di BNI maupun dengan pihak ketiga.
5. *Data Warehouse* dan *Analytics* terdiri dari *Data Warehouse*, ETL, *API Analytics* dan *Big Data*.
6. *Bank Management* merupakan sistem yang mencakup aplikasi akuntansi dan pelaporan.
7. *Risk* merupakan kumpulan aplikasi pengelolaan risiko.
8. *Payment* merupakan modul transaksi pembayaran, pengiriman uang, dan penyelesaian transaksi.
9. *Administration* merupakan kumpulan Aplikasi Administrasi dan pendukungnya.



MANAJEMEN DATA

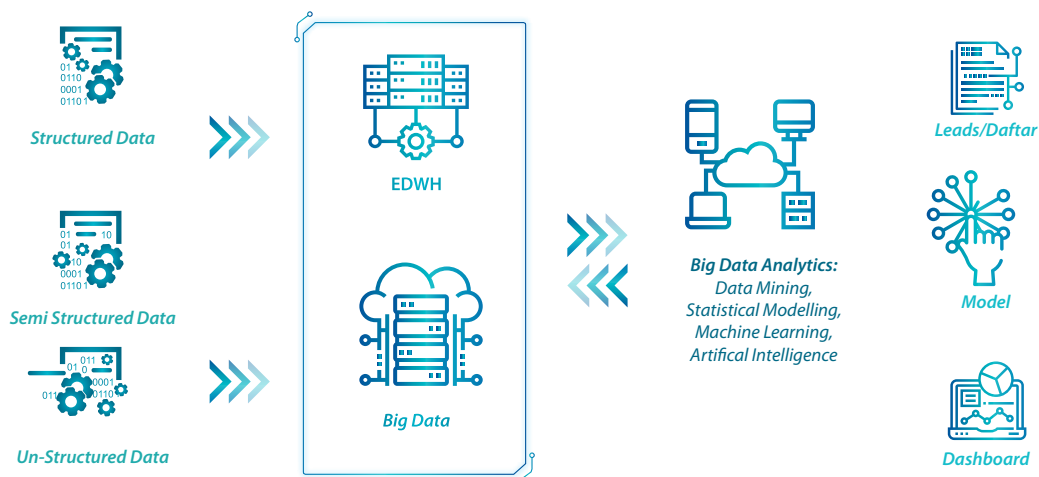
Data merupakan *the most valuable and treasure asset* yang diolah menjadi *guidance* dan *support* bagi bisnis. Data memiliki tiga *enabler* yaitu *People*, *Procedure* (*Data Governance & Strategy* dan *System Operating Procedure*), dan *Technology* (*Data Warehouse*, *Big Data*, dan *Network*). *Output* dari manajemen data adalah berupa data, informasi, dan *insight* untuk mendukung strategi & keputusan bisnis mengenai produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Misi Manajemen Data adalah mewujudkan *Single Source of Truth* yang andal bagi kepentingan bisnis bank dan sebagai pusat keunggulan *analytics* di BNI.

Prinsip Arsitektur Informasi



Untuk mewujudkan hal tersebut, alur informasi data pada Manajemen Data menganut Prinsip Arsitektur Informasi di mana data dari berbagai *source system* masuk ke dalam *Data Warehouse* (EDWH) dan *Big Data* melalui proses *Extract Transfer Load* (ETL) yang kemudian digunakan untuk pembentukan *datamart* untuk pengembangan laporan dan *analytics*. Tata Kelola Data dibutuhkan untuk mengintegrasikan data dari berbagai *source system* sehingga dapat menghasilkan data yang berkualitas dan memastikan sistem informasi yang efisien.

Strategi Implementasi Big Data Analytics





Untuk mendukung *digital transformation* dan *competitive analytics*, BNI telah mengembangkan *Big Data Analytics* dengan memanfaatkan keunggulan *machine learning* dan *analytical tools* lainnya serta didukung dengan *data scientist* yang andal. Melengkapi *enterprise data warehouse* yang telah dimiliki sebelumnya, adopsi teknologi *Big Data* berjalan sesuai harapan. *Platform Big Data* dengan teknologi terkini berhasil diimplementasikan dengan beberapa kasus bisnis terapan. Dengan demikian, kemampuan BNI dalam mengumpulkan, mengolah serta mengambil nilai dari sebuah atau sekumpulan data menjadi bertambah, tidak hanya terbatas pada data-data terstruktur, namun juga terhadap data-data semi-terstruktur dan tidak terstruktur yang volumenya besar dan kecepatan pertumbuhannya yang cukup tinggi.

Seperti lazimnya sistem-sistem pengelolaan data lainnya, *Big Data* memiliki kemampuan untuk melakukan pemuatan (*loading*) data, pengambilan (*retrieve*) data, atau sinkronisasi data antar-sistem. Oleh karena itu, integrasi antara sistem *Big Data* dengan sistem-sistem lainnya yang lebih dulu ada, berjalan cukup baik. Di samping itu, kemampuan mengambil data dari sumber eksternal juga dilengkapi dengan kapabilitas *web crawling*, yaitu mengambil data dari internet sebagai salah satu sumber data.



Kapabilitas lainnya dari *Big Data* yang telah diimplementasikan adalah tersedianya perangkat-perangkat analitik tingkat lanjut (*advanced analytics*), seperti perangkat untuk aktivitas *data mining*, pemodelan statistik (*statistical modelling*), pembelajaran mesin (*machine learning*), dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Dengan perangkat-perangkat tersebut, beberapa *output* bisa dihasilkan seperti pencocokan antar data (*data matching*), analisis prediktif, model-model statistik, daftar prospek nasabah dengan penawaran tertentu (*leads*), dan *dashboard*. Hasil *Big Data Analytics* akan membantu BNI untuk dapat lebih mengenal nasabah (*customer insight*), mengidentifikasi peluang-peluang baru dan mewujudkan *business data driven* yang mengarahkan pada penciptaan nilai bisnis (*business value creation*).

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah, BNI senantiasa menyesuaikan kapabilitas teknologi informasi yang dimiliki dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah. Peningkatan kapabilitas tersebut perlu diiringi dengan penyesuaian pola pikir yang mengakomodasi tren perkembangan teknologi serta tuntutan kebutuhan nasabah yang dinamis.

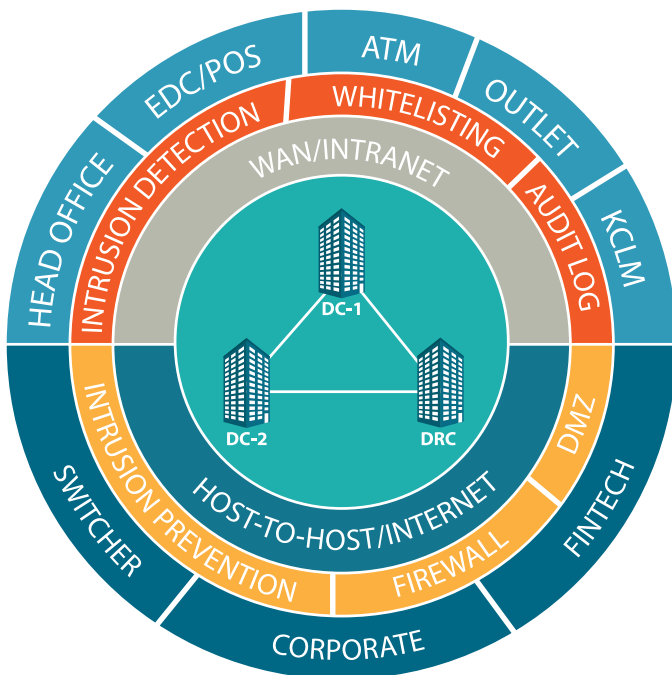
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung kebutuhan bisnis sesuai dengan *positioning* BNI sebagai Digital Bank mengacu pada 4 (empat) arahan strategis TI, yaitu *New Digital Proposition*, *Governance Toward Performance*, *Strive for Operational Excellence*, serta *Innovative and Agile Organization*.



INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

BNI telah menerapkan infrastruktur *high availability* guna meminimalisir potensi risiko operasional di area Teknologi Informasi, sekaligus untuk menjaga tingkat kepuasan nasabah. Infrastruktur *high availability* diterapkan mulai dari sisi *server*, jaringan, hingga *data center*, baik secara konfigurasi aktif maupun konfigurasi pasif sebagai *back up*. Dijaga oleh konfigurasi *security architecture* yang berlapis, serta didukung oleh pengawasan tiada henti (*nonstop monitoring*) oleh *network command center* dan tim *incident response* yang ahli di bidangnya.

Melalui penerapan infrastruktur *high availability* ini, maka gangguan layanan akibat kegagalan sistem dapat diminimalisir, terbukti dengan terjaganya stabilitas layanan pada saat tingginya kebutuhan transaksi, seperti pada saat hari raya dan hari libur lainnya.



CYBERSECURITY

Cybersecurity yang kuat merupakan salah satu faktor penting dalam memperoleh kepercayaan nasabah sehingga akan selalu mendapat perhatian serius untuk dikembangkan oleh BNI secara berkesinambungan dalam menjaga aktivitas bisnis terhadap risiko *cyber*. Beragam perlindungan yang mengacu kepada standar internasional diterapkan untuk melindungi BNI secara umum, maupun nasabah secara khusus.

Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan bisnis serta maraknya ancaman *cyber-crime*, dilakukan upaya-upaya perlindungan seperti:

1. Peningkatan kapasitas *cybersecurity* melalui beragam investasi perangkat keras dan perangkat lunak seperti anti-virus, *Firewall* dan *Intrusion Prevention System (IPS)*,
2. Penerapan pengamanan untuk mencegah penyebaran *malware* di ATM,
3. Edukasi kepada karyawan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan *cyber*,
4. Pemantauan yang bersifat proaktif selama 24x7 terhadap potensi-potensi *cybercrime*
5. Kerja sama dengan beragam pemangku kepentingan antara lain dengan badan resmi negara dan komunitas penggiat *cybersecurity* lainnya.

Selain hal-hal tersebut di atas serta mempertimbangkan tren serangan *cyber* yang saat ini semakin melebar ke arah nasabah, diterapkan beberapa pengamanan pada sisi nasabah yang di antaranya adalah:

1. Penerapan beragam mekanisme perlindungan nasabah terhadap transaksi *fraud* yang diakibatkan oleh *malware banking* maupun *social engineering*,
2. Penerapan deteksi *website* palsu yang mengatasnamakan BNI,
3. Mekanisme notifikasi atas transaksi yang dilakukan nasabah,
4. Edukasi yang terus menerus dilakukan kepada nasabah tentang perlindungan diri melalui pengamanan *password*, pengamanan internet *banking*, pengamanan *mobile banking*, pengamanan transaksi pada ATM dan lain-lain.

Dengan arah perkembangan bisnis menuju *digital banking*, *cybersecurity* akan terus menerus dikembangkan dalam mengawal inovasi-inovasi layanan perbankan sehingga aspek kepercayaan dan kenyamanan nasabah dapat selalu dijaga.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Tata kelola TI (*IT Governance*) merupakan pengelolaan kepemimpinan, struktur organisasi dan proses-proses yang berkelanjutan, untuk memastikan bahwa organisasi TI selaras dengan strategi dan tujuan bisnis organisasi. Pemilihan kerangka kerja (*framework*). Tata kelola TI yang baik membutuhkan keseimbangan antara aspek *People*, *Process*, dan *Technology*. Atas pertimbangan tersebut, implementasi tata kelola TI di BNI mengadopsi berbagai kerangka kerja yang sesuai dengan area layanan TI di BNI.

CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGIES (COBIT)

Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) diakui secara luas sebagai kerangka kerja manajemen TI dan tata kelola TI. COBIT mengatur TI dalam memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan BNI melalui pengelolaan kelompok proses dan *enabler*-nya, di mana tujuan bisnis dipetakan menjadi tujuan TI, serta dilakukan pengukuran pencapaian dan *maturity*-nya. TI BNI menggunakan kerangka kerja COBIT sebagai acuan tata kelolanya antara lain karena adanya sinergi antara tujuan bisnis dengan tujuan TI, berfokus pada data dan informasi, dapat fleksibel mengikuti arah kerja Bank, serta dapat digunakan bersamaan dengan standar kerangka kerja lainnya.

INFORMATION TECHNOLOGY INFORMATION LIBRARY (ITIL)

Information Technology Information Library (ITIL) merupakan kerangka kerja standar untuk *IT Service Management* (ITSM), yang digunakan TI BNI dalam menyelaraskan layanan pendukung TI kepada bisnis BNI. ITIL berfokus pada proses, prosedur, *task* dan *service level* IT untuk mendukung strategi Bank, memberikan nilai tambah, serta menjaga tingkat kompetensi TI. Dengan ITIL tersebut, operasional TI BNI menetapkan *baseline* sebagai tolak ukur layanan, sebagai landasan untuk perencanaan, implementasi dan pengukuran pencapaiannya.

ISO 27000

ISO 27000 adalah merupakan bagian dari standar kerja di area *Information Security Management Systems* (ISMS), di mana standar ini digunakan untuk mengelola risiko keamanan informasi dalam suatu organisasi. Standar ISO 27000 digunakan sebagai acuan referensi oleh TI BNI dalam menetapkan solusi keamanan secara *enterprise*, baik dari sisi arsitektur TI, kebijakan, solusi pengembangan, maupun dari operasional TI. Implementasi standar tersebut antara lain diterapkan secara *end-to-end*, mulai dari sisi sistem *core*, *surrounding*, jaringan komunikasi, aplikasi, dan perangkat akses nya seperti pada ATM dan EDC.

ISO 9001

ISO 9001 adalah standar sistem manajemen mutu (*Quality Management Systems*) yang didesain untuk memastikan bahwa BNI dapat memenuhi permintaan *stakeholder* sekaligus mematuhi kebutuhan *regulator* terkait produk maupun aktivitasnya. TI BNI telah menerapkan ISO 9001:2008 (standar internasional untuk sistem manajemen mutu) dengan ruang lingkup yaitu *IT Operation* dan *IT Security Management* dan telah melakukan proses *upgrade* sertifikasi ISO 9001 : 2015 pada tanggal 30 – 31 Juli 2018. Berdasarkan *audit summary report* dari tim auditor eksternal terhadap pencapaian sasaran mutu oleh *Unit IT*, disimpulkan bahwa sistem manajemen di Unit IT memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan *upgrade* sertifikasi ISO 9001:2015 hingga tanggal 26 September 2019. Dengan adanya sertifikasi ISO 9001:2015 di unit IT, akan memberikan manfaat bagi semua pegawai di unit IT beserta manajemen yakni dengan ditetapkannya mekanisme serta standar mutu yang fokus pada performa Bank dengan pendekatan pemikiran berbasis risiko (*risk based thinking*) sehingga unit IT aka lebih proaktif dalam mencegah dan mengurangi efek yang tidak dikehendaki dan selalu memperbaiki sistem secara berkelanjutan (*continual improvement*).



RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

Sebagai bagian dari sistem perencanaan proyek yang berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan bisnis akan dukungan TI, BNI melaksanakan forum *IT Planning Session* yang mempertemukan antara satuan kerja TI dengan segenap unit di BNI. Dalam forum tersebut segenap unit mendiskusikan bersama satuan kerja TI terkait kebutuhan bisnis beserta target pencapaian dan harapan ke depannya, baik dari sisi rencana solusi pengembangan, keamanan, operasional, pengolahan data, dan kebutuhan pelaporannya.

Forum *IT Planning Session* tersebut menghasilkan 122 (seratus dua puluh dua) rencana pengembangan aplikasi/arsitektur untuk diinisiasi di tahun 2019, yang mencakup demand strategis yang berdampak langsung pada pencapaian target bisnis maupun *business as usual* (BAU) sebagai pendukung operasional bisnis sehari-hari. Rencana pengembangan TI tersebut juga telah disampaikan kepada OJK, sejalan dengan POJK No. 38/POJK.03/2016 tanggal 01 Desember 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Guna memastikan terlaksananya rencana pengembangan aplikasi serta mendukung *corporate plan* 2019-2023, BNI menetapkan 4 (empat) arahan strategis TI, yaitu *New Digital Proposition*, *Governance Toward Performance*, *Strive for Operational Excellence*, serta *Innovative and Agile Organization*.

New Digital Proposition untuk pemanfaatan TI yang menjawab bagaimana digitalisasi bisa menghadirkan sesuatu yang bernilai baru bagi penggunaannya. Arahan strategi ini mendorong penciptaan nilai bisnis digital secara reguler, dengan memberikan rekomendasi berupa penyesuaian maupun pengembangan model bisnis baru berdasarkan tren TI yang berkembang ataupun melalui inovasi digital.

Governance towards Performance untuk pemenuhan *governance* yang baik guna mendorong performa yang optimal, antara lain melalui prioritas yang efektif, manajemen *portfolio* yang andal, *demand management* dan perencanaan TI yang selaras dengan kebutuhan bisnis, dan sinergi yang baik dengan segenap unit serta perusahaan anak.

Strive for Operational Excellence untuk pengoptimalan keunggulan operasional melalui digitalisasi dan otomasi proses bisnis sekaligus meningkatkan keamanan *cybersecurity* serta mengembangkan model operasi yang *sustainable* secara konsisten.

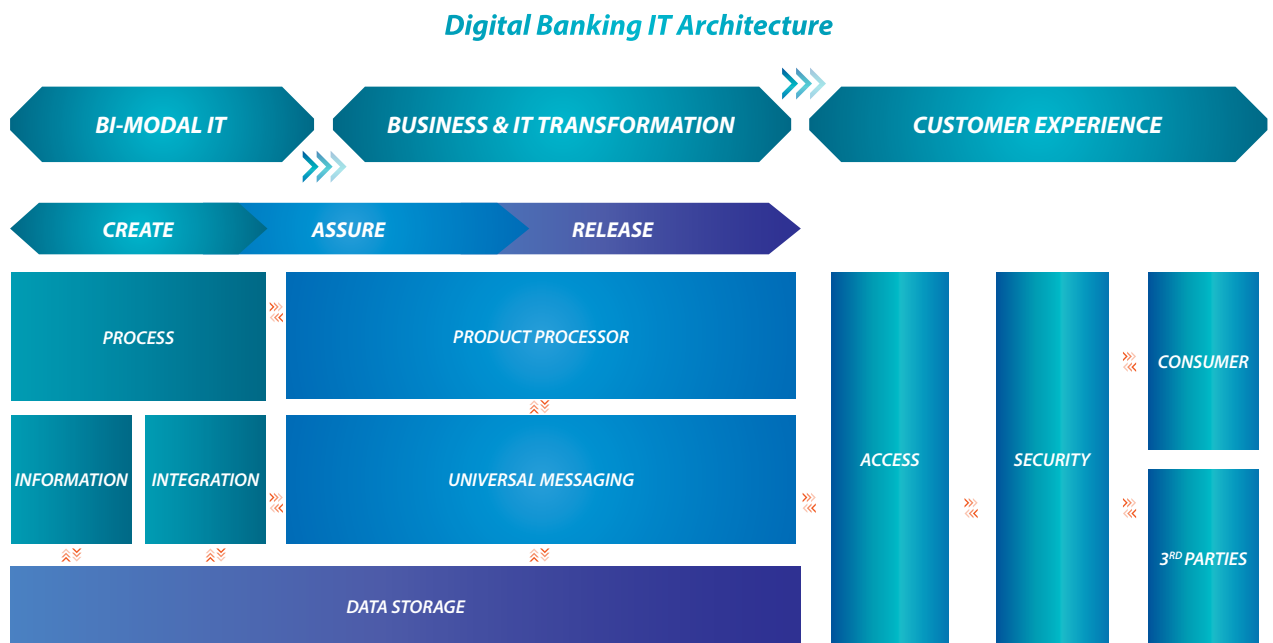
Innovative and Agile Organization untuk memperoleh organisasi yang adaptif terhadap perubahan serta memiliki kapabilitas untuk memberikan *deliverable* secara cepat, di antaranya melalui budaya inovasi yang *customer-centric* untuk memenuhi kebutuhan *customer* secara tepat dan efisien, dengan transformasi *mindset* yang visioner dalam strategi dan perencanaan TI, serta penerapan metodologi *Agile*.





TRANSFORMASI DIGITAL

Perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh yang nyata terhadap industri layanan keuangan dan perbankan. Hal ini mendorong BNI untuk senantiasa adaptif dalam memanfaatkan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi nasabah. Untuk mendukung hal tersebut, BNI menerapkan Arsitektur TI yang sesuai dengan arah transformasi digital



BNI menerapkan praktik BI-MODAL untuk pengembangan TI, yaitu dua metode kerja yang terpisah namun tetap koheren. Metode pertama dioptimalkan untuk area yang lebih mudah diprediksi dan dipahami dengan baik sedangkan metode kedua lebih bersifat eksploratif untuk memecahkan masalah baru. Implementasinya adalah penerapan metode pengembangan konvensional dan *agile*. Kedua metode ini diterapkan dengan tujuan untuk memberikan layanan yang optimal, *time to market* yang lebih cepat, serta berorientasi pada nasabah (*customer centric*).

Beberapa komponen dalam arsitektur ini antara lain,

1. *Process*, merupakan kapabilitas metode pengembangan produk yang *agile*, *prudent* dan dapat memenuhi ekspektasi *time-to-market*.
2. *Information*, merupakan kapabilitas dalam menyediakan informasi yang *insightful* dan komprehensif.

3. *Integration*, merupakan kapabilitas dalam mengintegrasikan proses antar sistem dan otomatisasi proses *workflow*.
4. *Storage*, merupakan kapabilitas dalam mengelola data dan informasi baik *structured* maupun *unstructured* data.
5. *Product Processor*, merupakan kapabilitas *core system* dan *surrounding system* yang tanggap terhadap perkembangan dan kebutuhan.
6. *Access*, merupakan kapabilitas dalam memberikan akses yang *modern* serta andal atas layanan dan produk.
7. *Universal Messaging*, merupakan kapabilitas dalam melayani berbagai macam *messaging system*.
8. *Security*, merupakan kapabilitas pengamanan dalam melindungi aset (data dan informasi).
9. *Consumer* yakni keberagaman *touchpoint* antara bank dan *consumer*.
10. *3rd Parties* yakni mencakup korporasi, *startup/fintech*, *commercial Off-The-Shelf (COTS)* baik *Premises* maupun *Cloud*.

Perkembangan teknologi informasi dan digital seperti Internet, *Cloud*, *Big Data*, *Internet of Things (IoT)*, dan *Artificial Intelligence (AI)* telah memicu perubahan di bidang industri yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan jaringan komunikasi dan internet untuk berbagai keperluan, proses otomatisasi yang terintegrasi dengan pemanfaatan AI, pengambilan keputusan menggunakan *insight* yang didapatkan dari analisis *Big Data*, optimalisasi penggunaan *Cloud* untuk kebutuhan bisnis maupun personal, serta terhubungnya berbagai perangkat sehari-hari dengan internet. Perkembangan ini mengakibatkan perubahan perilaku konsumen dan mendorong penciptaan model bisnis baru yang lebih sesuai. Untuk mengantisipasi berbagai perubahan tersebut, sudah seharusnya dilakukan transformasi digital yang mencakup integrasi teknologi digital ke proses bisnis.

Transformasi digital tidak sekedar mengubah teknologi analog menjadi digital, namun lebih dari itu diperlukan juga penyesuaian berbagai proses bisnis yang didorong dengan inovasi teknologi sehingga diharapkan dapat dibentuk proses yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien dengan biaya lebih rendah serta berpotensi membuka berbagai peluang bisnis baru. Beberapa inisiatif dari sisi teknologi yang telah dilakukan oleh satuan kerja TI untuk menggali inovasi baik dari sisi teknologi maupun optimalisasi proses bisnis, di antaranya sbb:

1. **Research and Development (R&D) Blockchain**

Blockchain merupakan teknologi *ledger* terdistribusi yang berpeluang menjadi *disruptor* dalam dunia bisnis karena bisa menghilangkan fungsi *intermediary*. Teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk membuat model bisnis baru maupun menggantikan proses bisnis yang telah ada sehingga menjadi lebih cepat, aman, dan murah. *Use case* yang telah diujicobakan adalah *cross border payment* bersama dengan *Fintech* dan korporasi internasional.

2. **Research and Development (R&D) Intelligent Video Analytics**

Teknologi *intelligent video analytics* dapat digunakan untuk melakukan identifikasi objek diam maupun bergerak, pengenalan wajah (*facial recognition*), analisis kepadatan ruang, pengawasan gedung/ruang berbasis AI (*building surveillance*), verifikasi identitas, dan hal-hal lain. Melalui teknologi tersebut, telah diujicobakan fitur pengenalan wajah untuk beberapa *use-case* seperti proses pembukaan rekening melalui *mobile phone* dan *monitoring* aktivitas pegawai melalui CCTV.

3. **Kerja sama dengan berbagai fintech dan startup business**

BNI telah menjalin hubungan kemitraan dengan Perusahaan *Startup Accelerator* global yang memiliki program inkubasi & akselerasi *startup* berbasis teknologi serta memiliki reputasi untuk menghubungkan startup dengan berbagai korporasi. Melalui bentuk kerja sama tersebut, BNI mendapatkan kesempatan berkolaborasi untuk memanfaatkan inovasi/solusi dari berbagai *startup* maupun *fintech* guna mendukung bisnis, meningkatkan kapabilitas proses internal di Bank, maupun bentuk kerja sama lain yang bisa dilakukan.

Guna mengoptimalkan inovasi baik dari sisi teknologi maupun optimalisasi proses bisnis, BNI juga memanfaatkan jasa Lembaga Riset Internasional Independen secara berkesinambungan sejak tahun 2007 untuk mendapatkan referensi, gambaran, tren, dan wawasan mengenai teknologi dan perkembangan industri global pada umumnya serta perbankan pada khususnya.



DIGITAL BANKING

PERCEPATAN PENGEMBANGAN DIGITALISASI

Sejalan dengan visi BNI untuk menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja, BNI terus melakukan perbaikan melalui inovasi untuk menjawab tantangan dan perubahan sesuai perkembangan terkini. Inovasi yang dijalankan tertuang pada pengembangan 5 (lima) kapabilitas *digital banking* yaitu:

1. **Digital Branding and Proposition**

Mengembangkan layanan berbasis persona *customer* disertai dengan pemberian informasi dan produk sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pada proses ini juga dilakukan *design thinking* untuk memvalidasi kebutuhan tersebut lebih dalam;

2. **New Digital Channel**

- Mengembangkan D-Branch sebagai *physical channel* dengan memanfaatkan penggunaan *smart kiosk*;
- Mengembangkan Aplikasi *Digital Banking* BNI berbasis *mobile platform*, seperti: Yap! (Fitur pembayaran berbasis QR dengan jaringan global);
- Mengembangkan *Chat Bot (Artificial Intelligent (AI))* yang dapat melayani informasi perbankan berbasis *messaging*);

3. **Digital Business and Ecosystem**

- Meningkatkan program penetrasi solusi bisnis digital pada beberapa ekosistem prioritas;
- Melakukan pengembangan proses otomasi pada rangkaian proses operasional BNI;

4. **Agile IT**

- Mengembangkan *Two Speed IT Development* (Pengembangan kapabilitas percepatan dan kelincahan (*agility*) dalam proses pengembangan solusi),
- Mengembangkan *API Management* yang merupakan pengembangan kapabilitas *connecting* ke potensial ekosistem digital, seperti ekosistem *marketplace*, *smart city*, dan sebagainya).
- Menyediakan *Big Data* yang merupakan pengembangan kapabilitas *behavioural analytic* untuk men-*deliver* solusi yang kontekstual ke kustomer.

5. **Digital Culture & Innovation**

- Membangun BNI *Innovation Center* dengan kapabilitas untuk menginkubasi ide bisnis digital yang potensial,
- Menyelenggarakan BNI *Business Innovation Award* (Binnova) sebagai kompetisi penjangkaran ide dan inovasi bisnis dari internal pegawai BNI untuk memicu semangat berinovasi,
- Menciptakan BNI *Digital Ninja* sebagai *Program change agent* dalam mendukung internalisasi budaya digital pada lingkungan organisasi BNI.

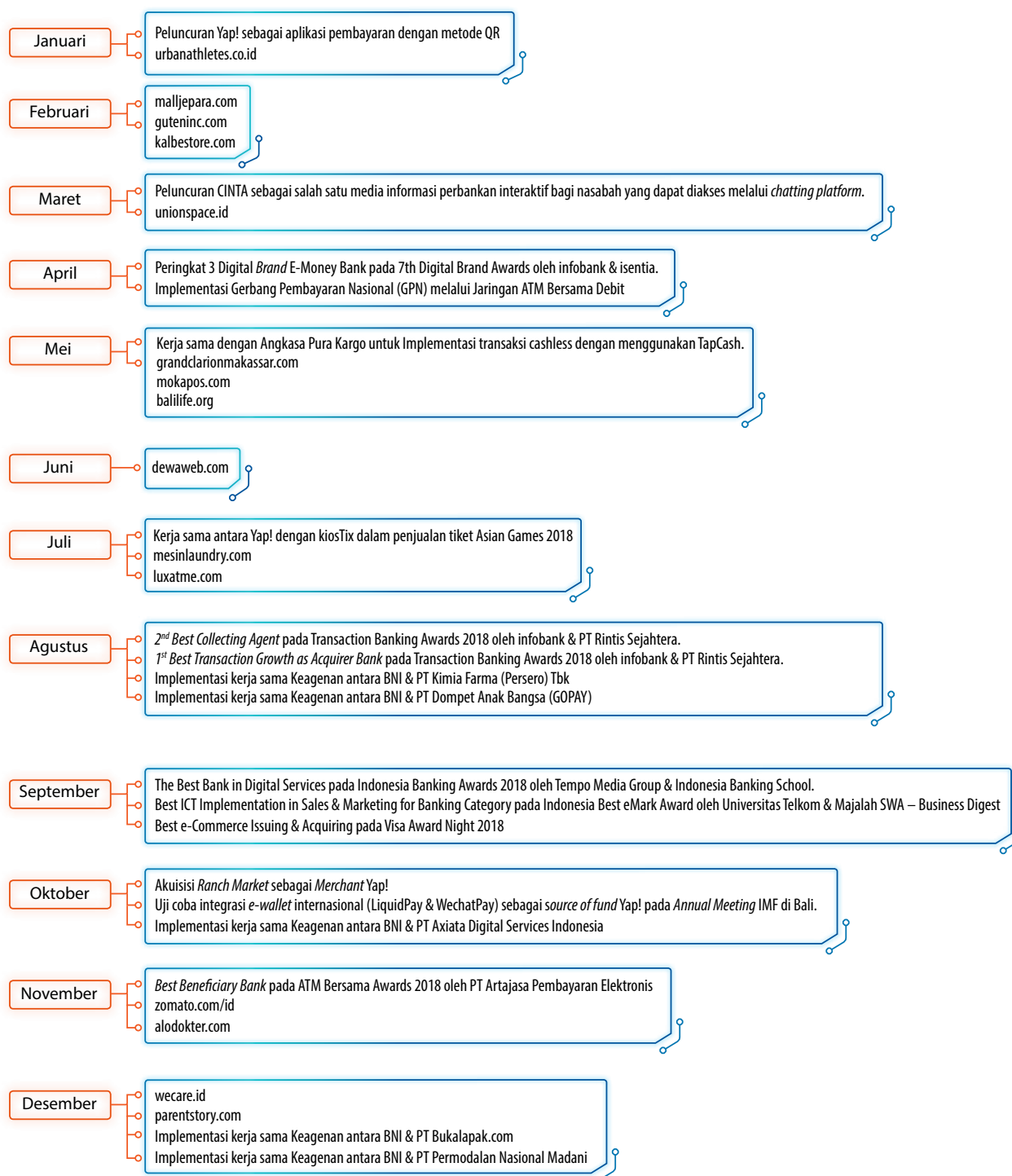
Strategi di tahun 2019

Sejalan dengan program BEYOND yang tertuang pada *corporate plan* BNI, maka strategi *digital banking* BNI adalah "Mengembangkan ekosistem bisnis B2B2C dan *digital attacker* (segmen *small and consumer*) melalui optimalisasi *customer journey*, *data analytic* serta menjaga keberlangsungannya dengan *venture capital* untuk menangkap peluang *Beyond Banking*".



ELECTRONIC BANKING

KALEIDOSKOP E-BANKING TAHUN 2018





DEFINISI PRODUK E-BANKING

BNI menawarkan beragam fasilitas *E-Banking* yang meliputi channel ATM, *SMS Banking*, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, Agen 46, *TapCash*, *UnikQu*, *Yap!*, *CINTA* dan *Electronic Data Capture* (EDC). Adapun penjelasan dari masing-masing produk tersebut adalah sebagai berikut:

ATM

Channel layanan perbankan, yang memfasilitasi Nasabah dalam melakukan transaksi setor-tarik tunai, cek saldo, transfer, pembayaran dan pembelian. Layanan ATM BNI saat ini berjumlah 18.202 (delapan belas ribu dua ratus dua puluh dua) mesin yang tersebar di seluruh Indonesia dan terkoneksi dengan Jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, Jaringan Internasional Mastercard, Visa, JCB, APN, Union Pay dan Cirrus.

SMS BANKING

BNI *SMS Banking* merupakan *channel* yang dapat digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi transfer, pembayaran dan pembelian yang dapat diakses melalui aplikasi menu SMS Banking, Syntax SMS dan akses USSD.

MOBILE BANKING

BNI *Mobile Banking* merupakan *channel* transaksional yang dapat digunakan oleh nasabah dalam bertransaksi transfer, pembayaran dan pembelian melalui aplikasi *mobile banking* yang dapat diakses oleh *smartphone* berbasis Android dan iOS. BNI *Mobile Banking* juga dapat diaktifkan dan digunakan untuk bertransaksi di luar negeri.

INTERNET BANKING

BNI *Internet Banking* adalah salah satu *channel* transaksional *e-Banking* BNI yang dimiliki nasabah melalui URL *Internet Banking* BNI yang dapat diakses melalui komputer maupun *handphone*. BNI *Internet Banking* juga memiliki fitur andalan berupa Pengelolaan Finansial Pribadi dan dilengkapi dengan standar keamanan yang menggunakan 2 (dua) jenis alat otorisasi transaksi finansial yaitu BNI e-Secure dan BNI m-Secure.

AGEN46

Agen46 merupakan mitra BNI dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif. Selain mitra BNI dalam penyediaan berbagai macam layanan perbankan, Agen46 juga memiliki berbagai macam program pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial maupun subsidi, dapat berupa tunai maupun non tunai. Melalui Agen46, transaksi perbankan menjadi lebih mudah, lebih cepat dan mudah dijangkau oleh Masyarakat sekitar. (Sesuai *tagline* Agen46: Lebih Mudah, Lebih Cepat, Lebih Dekat).

TapCash

TapCash adalah uang elektronik pengganti uang tunai yang berbasis kartu yang dapat ditransaksikan di berbagai titik akseptasi yang berupa *merchant* kerja sama BNI serta berbagai moda transportasi dan ruas jalan tol. Pengguna *TapCash* juga dimanjakan dengan aplikasi *TapCash Go* yang memberikan kemudahan dalam melakukan pengecekan saldo dan *top up* kartu *TapCash*.

UNIKQU

UnikQu adalah pengembangan dari uang elektronik berbasis *server* BNI. *UnikQu* dapat diakses dan digunakan oleh nasabah dan non nasabah BNI dengan melalui *smartphone* berbasis iOS dan Android. Dengan fleksibilitas tersebut, metode pembayaran menggunakan *UnikQu* dapat dikerjakan samakan dengan *merchant* yang telah memiliki infrastruktur IT juga pada *merchant* yang tidak memiliki infrastruktur IT seperti pedagang kaki lima maupun pedagang pasar. Pengisian ulang saldo *UnikQu* dapat dilakukan melalui BNI *SMS Banking*, BNI *Mobile Banking*, BNI *Internet Banking*, dan Agen46. Selain itu, *UnikQu* juga dapat digunakan untuk melakukan pembelian pulsa telepon dan pembayaran telepon pascabayar.

YAP!

Yap! adalah aplikasi pembayaran yang menggunakan metode QR dengan standar nasional (QRIS). *Yap!* memiliki 3 (tiga) *source of fund* yang menjadi sumber dana pembayaran dalam setiap transaksinya yaitu Kartu Debit, Kartu Kredit dan *UnikQu* yang memberikan fleksibilitas kepada penggunanya dalam melakukan pembayaran. Implementasi pembayaran dengan metode QR dapat dilakukan melalui mesin EDC, *Yap! QR (tent card)*, dan *push notification*. Sampai saat ini, *Yap!* telah diimplementasikan pada berbagai segmentasi *merchant*, baik usaha mikro, *chainstore*, *Business to Business* (B2B) dan *e-Commerce*.

CINTA

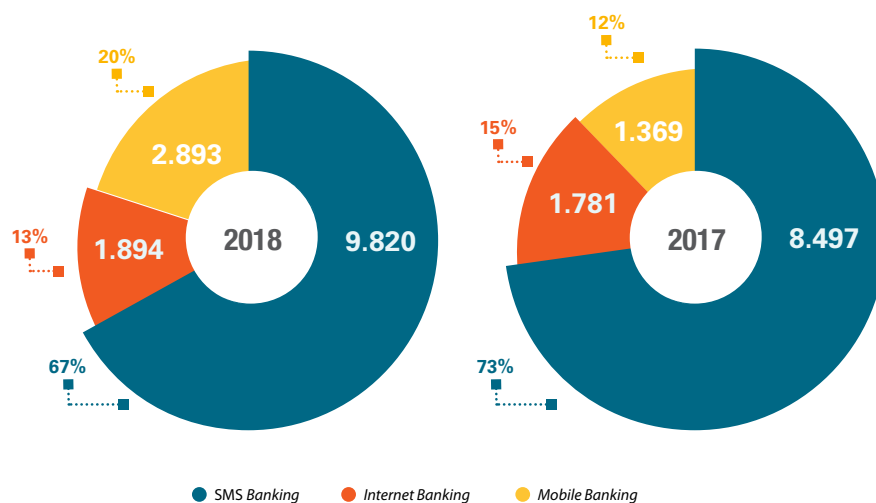
CINTA adalah salah satu bentuk pengembangan *chatbot* dengan memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* dan *machine learning* yang memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam mengakses berbagai informasi perbankan melalui *platform social media*. *CINTA* memiliki kapabilitas dalam melakukan personalisasi program, *survey* dan edukasi pelanggan serta fitur transaksional yang terintegrasi dengan *Yap!* untuk metode pembayarannya.



ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC)/ JARINGAN MERCHANT

Jaringan merchant adalah jaringan (*network*) pelayanan penerimaan transaksi APMK (menggunakan kartu kredit, debit dan *prepaid*). Jaringan merchant merupakan kerja sama antara Bank (*acquirer*) dengan *principal* baik *global principal* seperti VISA, MasterCard, Japan Credit Bureau (JCB), UPI, maupun *local principal* seperti Artajasa, Prima, dan ALTO. Sebagai *member* dari *principal* tersebut, dalam aktivitasnya jaringan merchant menjalin kerja sama dengan toko, hotel, restoran, dan berbagai badan usaha lain yang menerima pembayaran barang atau jasanya menggunakan APMK (kartu kredit, debit, dan *prepaid*) dan memperoleh *fee* dalam bentuk *merchant discount rate* (MDR) dari setiap nominal yang ditransaksikan.

KOMPOSISI USER E-BANKING



Channels	2018	2017	2016	Growth (Monthly)	
				User	%
Internet Banking	1.893.721	1.781.297	1.538.020	10.251	0,54%
Mobile Banking	2.892.518	1.368.771	506.564	132.637	4,81%
SMS Banking	9.819.514	8.497.014	6.873.626	108.000	1,11%

KINERJA E-BANKING TAHUN 2018

Kinerja masing-masing produk *E-Banking* dilihat dari pertumbuhan jumlah *user*, jumlah transaksi, dan volume transaksi sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

ATM

Uraian	2018	2017	Growth
Jumlah Transaksi	1.288,9 juta	962,3 juta	33,9%
Volume Transaksi (Rp)	668,0 triliun	600,1 triliun	11,3%

Sepanjang tahun 2018, layanan di *channel* ATM mengalami peningkatan jumlah transaksi sebanyak 326,6 juta transaksi atau mencapai 33,9% menjadi 1.288,9 juta transaksi dari 962,3 juta transaksi yang berlangsung di tahun 2017. Sedangkan untuk nominal yang ditransaksikan juga mengalami peningkatan sebanyak Rp67,9 triliun atau 11,3% menjadi Rp668,0 triliun dari Rp600,1 triliun di tahun 2017.



SMS BANKING

Uraian	2018	2017	Growth
User	9,7 juta	8,5 juta	15,6%
Jumlah Transaksi	504,0 juta	389,2 juta	29,5%
Volume Transaksi (Rp)	51,2 triliun	39,9 triliun	28,3%

Selama tahun 2018, jumlah pengguna *SMS Banking* tercatat mencapai 9,7 juta, meningkat 15,6% dari tahun lalu yang sebanyak 8,5 juta pengguna. Berdasarkan jumlah transaksinya, *SMS Banking* berhasil mencatatkan jumlah transaksi sebanyak 504,0 juta transaksi di tahun 2018, meningkat 29,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 389,2 juta transaksi. Sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna dan jumlah transaksi, nilai transaksi *SMS Banking* di tahun 2018 tercatat sebesar Rp51,2 triliun atau meningkat 28,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp39,9 triliun.

MOBILE BANKING

Uraian	2018	2017	Growth
User	2,9 juta	1,4 juta	111,3%
Jumlah Transaksi	96,9 juta	32,3 juta	199,4%
Volume Transaksi (Rp)	133,4 triliun	49,8 triliun	167,7%

Selama tahun 2018, jumlah pengguna *Mobile Banking* tercatat sebanyak 2,9 juta pengguna, meningkat 111,3% dari tahun lalu yang sebanyak 1,4 juta pengguna. Berdasarkan jumlah transaksinya, *Mobile Banking* berhasil mencatatkan jumlah transaksi sebanyak 96,9 juta transaksi di tahun 2018, meningkat 199,4% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 32,3 juta transaksi. Sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna dan jumlah transaksi, volume transaksi *Mobile Banking* di tahun 2018 tercatat sebesar Rp133,4 triliun, meningkat 167,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp49,8 triliun.

INTERNET BANKING

Uraian	2018	2017	Growth
User	1,9 juta	1,8 juta	6,3%
Jumlah Transaksi	27,5 juta	25,4 juta	8,3%
Volume Transaksi (Rp)	91,3 triliun	94,0 triliun	-3,0%

Selama tahun 2018, jumlah pengguna *Internet Banking* tercatat sebanyak 1,9 juta pengguna, meningkat 6,3% dari tahun lalu yang sebanyak 1,8 juta pengguna. Berdasarkan jumlah transaksinya, *Internet Banking* di 2018 tercatat jumlah transaksi sebanyak 27,5 juta, meningkat 8,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 25,4 juta transaksi. Sejalan dengan jumlah transaksi, volume transaksi *Internet Banking* di tahun 2018 tercatat sebesar Rp91,3 triliun, menurun -3,0%, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp94,0 triliun.

AGEN46

Uraian	2018	2017	Growth
Jumlah Agen	111.836 agen	69.589 agen	60,7%
Jumlah Transaksi	79,3 juta	34,4 juta	130,4%
Volume Transaksi (Rp)	94,5 triliun	11,6 triliun	715,6%
Rekening Pandai	9,2 juta	4,8 juta	91,7%
DPK BNI Pandai	636,3 miliar	561,9 miliar	13,2%
DPK Agen46	658,4 miliar	592,8 miliar	11,1%

Selama tahun 2018, jumlah Agen46 BNI tercatat sebanyak 111.836 agen atau meningkat sebesar 60,7% dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2017 yang berjumlah sebanyak 69.589 agen. Berdasarkan jumlah transaksinya, pada 2018 terjadi peningkatan signifikan pada jumlah transaksi yakni sebesar 130,4%, dari 34,4 juta transaksi pada tahun 2017 menjadi 79,3 juta transaksi pada tahun 2018. Sedangkan pada *sales volume*, terjadi peningkatan sebesar 715,6% dari tahun 2017 yang hanya memperoleh Rp11,6 triliun menjadi Rp94,5 triliun pada tahun 2018.



Jumlah rekening pandai di tahun 2018 tercatat meningkat sebesar 91,7% atau menjadi 9,2 juta akun pada 2018 dari sebelumnya 4,8 juta akun di akhir tahun 2017. Adapun DPK BNI Pandai yang dihasilkan oleh rekening tersebut mencapai Rp636,3 miliar, tumbuh sebesar 13,2% dibandingkan tahun 2017 yang hanya mencapai Rp561,9 miliar. Sedangkan untuk jumlah DPK Agen46 yang pada 2018 tercatat meningkat sebesar 11,1% menjadi Rp658,4 miliar dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar Rp592,8 miliar.

TAPCASH

Uraian	2018	2017	Growth
Jumlah Kartu	4,5 juta	2,9 juta	56,8%
Jumlah Transaksi	50,8 juta	23,2 juta	119,1%
Volume Transaksi (Rp)	807,1 miliar	362,5 miliar	122,7%

Sampai tahun 2018, tercatat jumlah kartu TapCash sebanyak 4,5 juta kartu, meningkat 56,8% dari tahun lalu yang jumlahnya sebesar 2,9 juta kartu. Berdasarkan jumlah transaksinya, Tapcash berhasil mencatatkan jumlah transaksi sebanyak 50,8 juta di tahun 2018, meningkat 119,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 23,2 juta transaksi. Sejalan dengan peningkatan jumlah kartu dan jumlah transaksi, volume transaksi Tapcash di tahun 2018 tercatat sebesar Rp807,1 miliar meningkat 122,7%, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp362,5 miliar.

UNIKQU

Uraian	2018	2017	Growth
User	109,2 ribu	68,2 ribu	60,0%
Jumlah Transaksi	254,3 ribu	45,2 ribu	462,7%
Volume Transaksi (Rp)	7,1 miliar	1,9 miliar	122,7%

Selama tahun 2018, jumlah pengguna layanan UnikQu tercatat sebanyak 109,2 ribu. Berdasarkan jumlah transaksinya, UnikQu berhasil mencatatkan jumlah transaksi sebanyak 254,3 ribu, meningkat sebesar 462,7% dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan volume transaksinya di tahun 2018 tercatat sebesar Rp7,1 miliar.

ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC)

Uraian	2018	2017	Growth
Jumlah Transaksi	40,9 Juta	34,0 Juta	20,3%
Volume Transaksi (Rp)	55,1 triliun	46,7 triliun	18,0%

Sepanjang tahun 2018, layanan *Electronic Data Capture* (EDC) mengalami peningkatan jumlah transaksi *purchase* sebanyak 20,3%, yaitu menjadi 40,9 juta transaksi di 2018 dari 34,0 juta transaksi di tahun 2017. Sedangkan pada volume transaksi terjadi peningkatan sebesar 18,0% menjadi Rp55,1 triliun di 2018 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp46,7 triliun.

CINTA

Uraian	2018	2017
Follower	349,0 ribu	-

Selama tahun 2018 CINTA telah memiliki *follower* sejumlah 349,0 ribu pada *platform* aplikasi Line dan telah aktif memberikan beragam informasi promo, *survey/couponing* serta edukasi nasabah melalui *chatting platform* tersebut.



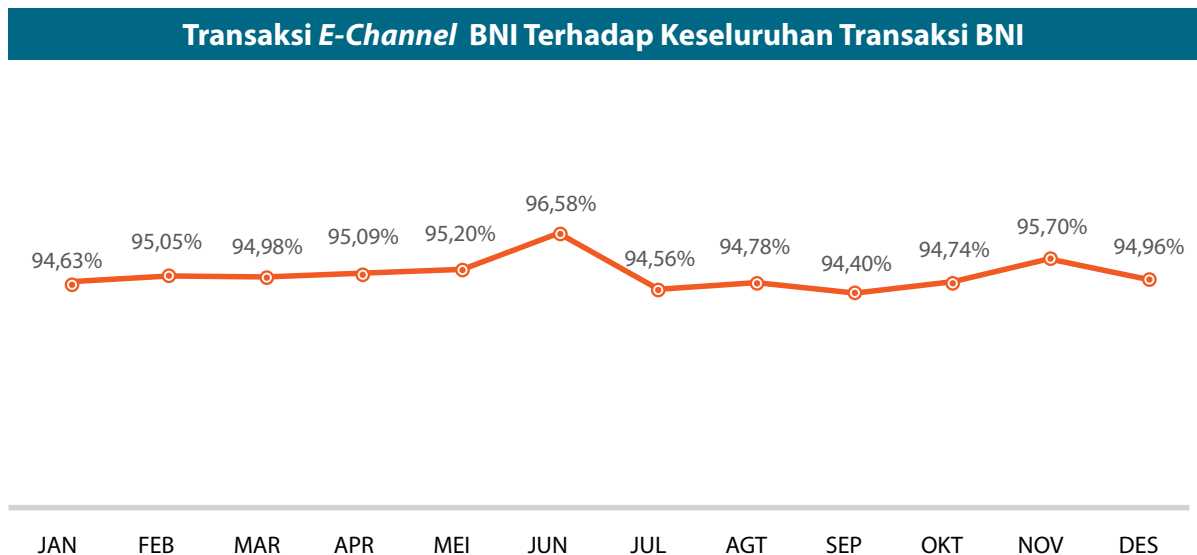
YAP!

Uraian	2018	2017
Jumlah User	419,2 ribu	-
Jumlah Merchant	515,4 ribu	-
Jumlah Transaksi (Rp)	6,7 juta	-
Volume Transaksi (Rp)	687,8 miliar	-

Selama tahun 2018, Produk Yap! telah berhasil mengakuisisi *user* sejumlah 419,2 ribu dan *merchant* sebanyak 515,4 ribu. Di tahun pertamanya, Yap! telah membukukan 6,7 juta transaksi dengan volume sebesar Rp687,8 miliar yang diperoleh dari transaksi *purchase (regular, chainstore, e-commerce)* dan B2B (pembayaran fidusia Ditjen AHU).

KONTRIBUSI TRANSAKSI E-CHANNEL BNI

Sepanjang tahun 2018 kontribusi transaksi *e-channel* terhadap seluruh transaksi perbankan tercatat di atas angka 90% dengan rata-rata kontribusi mencapai 95,06%. Pencapaian kontribusi transaksi tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan pencapaian sebesar 96,58%. Adapun pertumbuhan kontribusi transaksi *e-channel* dapat dilihat pada grafik berikut:



BNI SEBAGAI PELOPOR TEKNOLOGI PERBANKAN

CINTA

CINTA merupakan *Chatbot* yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* dan *Machine Learning*. CINTA memanfaatkan *chatting platform* dalam memberikan layanan kepada *follower* CINTA, khususnya nasabah BNI dengan segmen *millenials*. Adapun *value proposition* yang ditawarkan adalah *simple, personalize, familiar*. CINTA juga dilengkapi dengan kapabilitas yang meliputi personalisasi program, *ATM-Locator*, sarana edukasi nasabah serta *survey & couponing*.

YAP!

Yap! merupakan aplikasi pembayaran dengan menggunakan media *QR code*. Aplikasi ini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan kemudahan dalam bertransaksi yang ditawarkan kepada para penggunanya karena memiliki 3 (tiga) *source of fund* yang dapat dipilih oleh customer, meliputi kartu kredit, kartu debit & UnikQu. Selain itu, Yap! juga mudah diimplementasikan dan mampu menjangkau segmen pasar mikro sehingga dapat mempermudah BNI sebagai *agent of development* dalam menciptakan *cashless society ecosystem* di masyarakat. Pada pengimplementasiannya, transaksi di *merchant* Yap! dapat dilakukan dengan menggunakan *EDC, Tent Card* maupun *push notification*.

E-WALLET TEKNOLOGI

E-wallet Teknologi merupakan sistem yang dikembangkan dengan tujuan sebagai pendistribusian layanan program Pemerintah. Melalui sistem ini, setiap transaksi yang terjadi dapat dibagi berdasarkan fungsinya masing-masing sehingga dapat menghadirkan informasi yang *auditable* dan *akuntable*. Sistem *e-wallet* saat ini digunakan utk pendistribusian program Bansos (Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan PIP) dan subsidi (pupuk dan LPG). Untuk kegiatan Bansos sistem *e-wallet* teknologi digunakan oleh seluruh Bank Himbara yang dikelola oleh BNI sebagai pemilikinya.

AGEN46

Agen46 adalah layanan yang tergolong ke dalam sistem LKD (Layanan Keuangan Digital), Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk Keuangan Inklusif), dan *e-Payment*. Pada layanan ini BNI menghadirkan layanan perbankan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mampu menembus sampai ke wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Saat ini sudah tersebar lebih dari 111 (seratus sebelas) ribu agen diseluruh Indonesia. Sistem yang dikembangkan dapat berjalan pada *platform web* dan *mobile*. Selain itu Agen46 juga sudah dilengkapi oleh *EDC Android* untuk mempermudah transaksi.

EDC OFFLINE

EDC Offline merupakan sistem yang dikembangkan oleh BNI untuk dapat menghadirkan layanan transaksi di daerah-daerah *remote* yang belum tersentuh oleh infrastruktur *network*. Sistem ini dibangun tanpa perlu menggunakan infrastruktur *network* untuk dapat melakukan transaksi dengan verifikasi menggunakan teknologi *Biometric*. Saat ini layanan ini dihadirkan untuk membantu program Pemerintah dalam hal mendistribusikan bantuan sosial di daerah *remote*.

MARKETPLACE

E-commerce UMKM BNI Sebagai salah satu agen *development* pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan pasar industri kreatif dalam hal ini UMK. Dengan sistem *e-commerce* UMK maka pasar UMK pada daerah-daerah yang memiliki potensi UMK yang baik dapat menikmati pasar yang lebih terbuka, baik domestik maupun Internasional. Sistem ini sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran dan sistem pendistribusian/pengiriman.

E-RETRIBUSI PASAR

E-Retribusi Pasar merupakan sistem yang mengintegrasikan manajemen penyewaan tempat dan pembayaran pajak. Melalui sistem ini pemerintah daerah dapat dengan mudah melakukan pemantauan retribusi pajak pada pasar-pasar setempat sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pajak. Melalui sistem ini, pemanfaatan kios pada pasar dapat sangat efektif dan optimal karena terawasi dengan baik.



HUMAN CAPITAL

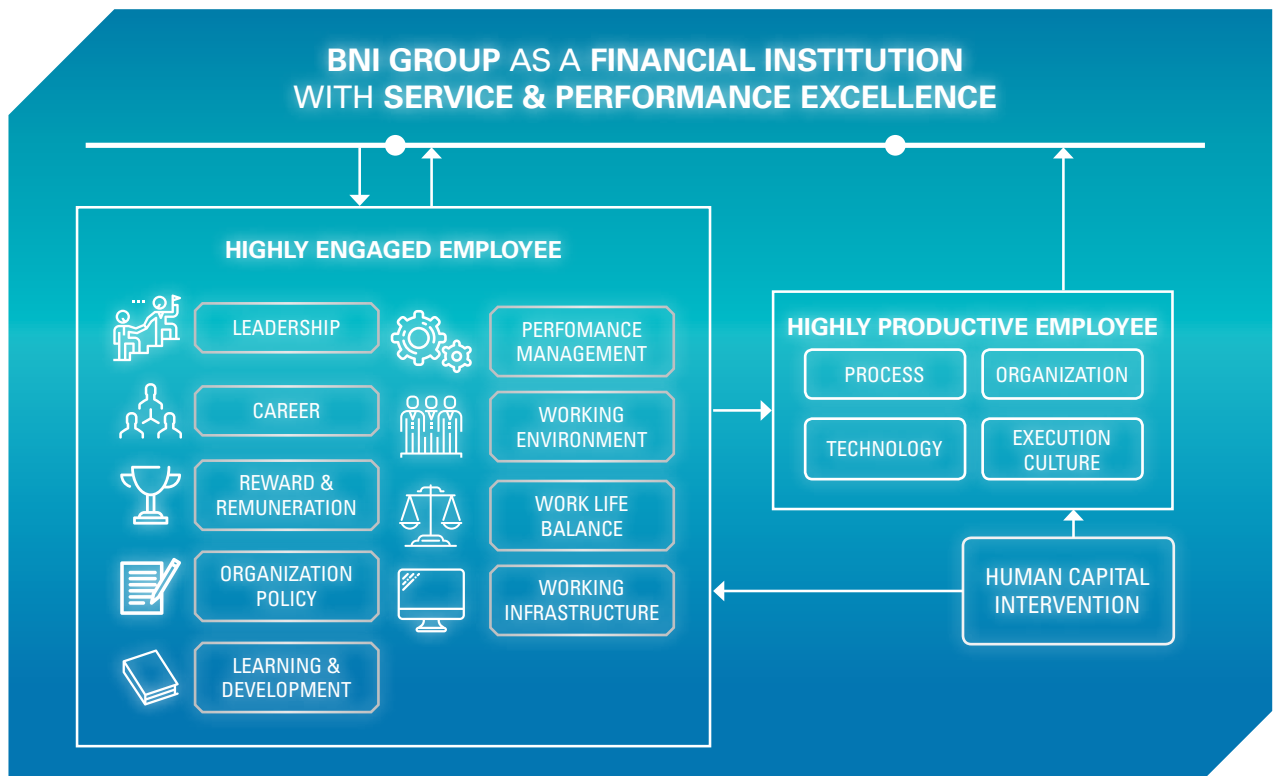
PERAN SENTRAL HUMAN CAPITAL BAGI BNI

Pertumbuhan bisnis dan perkembangan teknologi yang terjadi di tahun 2018 semakin cepat dan kompetitif. Di tengah situasi yang semakin kompetitif maka sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang mampu mendukung keberhasilan BNI dalam mewujudkan visinya sebagai lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Pengelolaan *Human Capital* (HC) yang andal dan mampu beradaptasi terhadap tuntutan bisnis menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam memastikan keberhasilan strategi Bank secara berkelanjutan.

Tahun 2018 dicanangkan sebagai tahun penguatan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya manusia secara digital. Pada tahun 2018, fondasi aplikasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia mulai dibangun. Perubahan ini dilakukan secara bertahap, baik dari sisi infrastruktur maupun *digital mindset*.

Dalam mewujudkan visi sebagai Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja, maka diperlukannya pegawai yang memiliki loyalitas (*engagement*) dan produktivitas yang tinggi. Aspek yang memengaruhi *engagement* pegawai di BNI yaitu kepemimpinan, jalur karier, *reward* dan remunerasi, kebijakan organisasi, pembelajaran dan pengembangan, pengelolaan kinerja, lingkungan kerja, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan (*work life balance*) serta sarana infrastruktur yang mumpuni. Sedangkan faktor memengaruhi produktivitas pegawai adalah proses bisnis, organisasi, teknologi dan budaya eksekusi. Dengan demikian, pegawai yang *engage* dan pegawai yang produktif akan tercapai apabila BNI dapat melakukan intervensi yang tepat pada aspek-aspek yang dinilai belum optimal.

Tabel Sistem *Thinking* Bank Negara Indonesia

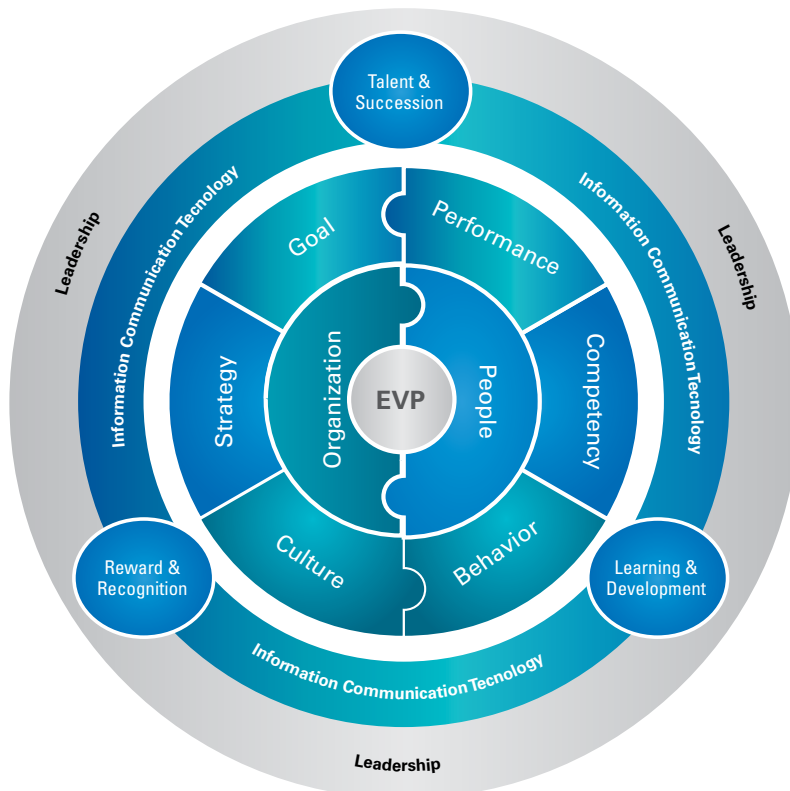


HUMAN CAPITAL ARCHITECTURE

Strategi pengelolaan sumber daya manusia yang diterapkan di BNI, diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mendukung strategi BNI yang dinamis, sesuai dengan tuntutan industri perbankan saat ini. *Human Capital Architecture (HC Architecture)* menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya manusia di BNI. Seluruh komponen yang terdapat dalam *HC Architecture* bermuara pada *Employee Value Proposition (EVP)*, yang menjadi komitmen BNI serta diyakini dan disepakati bersama antara Bank dan pegawai. EVP BNI adalah "Bersama-sama menjadikan BNI sebagai tempat terbaik untuk berkontribusi, belajar dan bertumbuh guna menjadi kebanggaan negeri". Penggunaan frasa "Bersama-sama" ini menekankan bahwa pegawai dan Bank merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam mewujudkan tercapainya tujuan BNI.

BNI sebagai perusahaan (organisasi) tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai, strategi dalam mencapai tujuan tersebut serta budaya organisasi yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Sejalan dengan ketiga hal tersebut, dari sisi pegawai (*people*) diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang mendukung tercapainya tujuan organisasi, kompetensi yang selaras dengan strategi Bank serta perilaku pegawai yang sejalan dengan budaya organisasi.

Untuk mengimplementasikan hal di atas, maka diperlukan *talent management system* yang mendukung terwujudnya seluruh aspek baik dari sisi organisasi maupun pegawai sehingga dapat mewujudkan *employee value proposition*. Sistem pengelolaan human capital, secara garis besar terdiri dari pengembangan karier (*talent and succession*), pengembangan kompetensi dan kapabilitas (*learning and development*) serta apresiasi dan penghargaan atas kontribusi yang diberikan (*reward and recognition*) yang terintegrasi. Dalam implementasi kebijakan tersebut, teknologi berperan penting sebagai infrastruktur utama yang mendukung penerapan kebijakan agar lebih efektif dan efisien. Seluruh implementasi atas kebijakan tersebut dapat berjalan secara optimal apabila didukung oleh *Information Communication and Technology* sebagai infrastruktur utama serta peran aktif para *leader*.





Unit Pendukung
Bisnis



KEBIJAKAN TALENT MANAGEMENT UNTUK **MENGAKSELERASI** **LEADERSHIP DEVELOPMENT**

Sejalan dengan tujuan untuk menjalankan proses pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan, maka proses pengelolaan *talent* yang diterapkan di BNI berfokus pada mempersiapkan, mengembangkan dan mempertahankan pegawai sejalan dengan *Employee Value Proposition* (EVP) BNI. BNI memahami bahwa pengelolaan *talent* menjadi suatu proses yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berlangsung dalam jangka panjang. Ketiga komponen besar dalam *Talent Management System* (*Talent & Sucession, Learning & Development, serta Reward & Recognition*) yang terdapat pada *HC Architecture* secara lebih detail dijabarkan sebagai lima aspek yang terdiri dari *Talent Acquisition, Talent Classification, Talent Development, Talent Mobility dan Talent Retention*. Setiap aspek pengelolaan *talent* ini melibatkan peranan *Talent Committee* yang terdiri dari para *leader* di BNI sejalan dengan *leader empowerment*.

TALENT ACQUISITION

Dengan tujuan untuk mendapatkan SDM yang andal, maka diperlukan jalur rekrutmen dan *sourcing channel* yang efektif. Pada tahun 2018, BNI membuka sejumlah program rekrutmen untuk berbagai posisi yang ditawarkan.

Program *Management Trainee* yang dikenal dengan nama Rookie 46 merupakan program unggulan BNI yang bertujuan untuk merekrut kandidat terbaik dengan *leadership* yang kuat dan kapabilitas yang mumpuni. Tahapan seleksi untuk program ini dilakukan secara inovatif dan menantang untuk mendapatkan kandidat *leader* di masa depan. Peserta yang lolos seleksi awal, selanjutnya akan menjalani tahap pembelajaran dan seleksi lanjutan selama 2 (dua) tahun dengan berbagai metode pembelajaran, yaitu *in class learning, social learning* dan *experiential learning*. Penekanan utama bagi peserta Rookie 46 adalah pada metode *experiential learning* dengan *exposure* terhadap bisnis perbankan secara menyeluruh. Pada akhirnya, peserta yang lulus akan ditempatkan pada sejumlah posisi strategis dengan level setingkat *manager*.

Officer Development Program atau ODP merupakan program yang bertujuan untuk merekrut lulusan baru dari perguruan tinggi untuk berkarier sesuai dengan daerah regionalnya. Peserta yang mengikuti program ini akan mendapatkan pelatihan yang komprehensif selama 6 bulan. Pada tahun 2018, jumlah pegawai yang direkrut melalui jalur ini sebanyak

674 pegawai untuk memastikan bahwa proses regenerasi di BNI dapat berlangsung dengan optimal.

Pada tahun 2018, BNI juga melakukan sejumlah penyempurnaan proses rekrutmen antara lain melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial sehingga memudahkan kandidat untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan pegawai dan mengikuti proses seleksi. Selain membuka situs rekrutmen, secara aktif BNI juga menggunakan media sosial sebagai salah satu *sourcing channel* yang dinilai cukup efektif untuk merekrut kandidat potensial.

Pengelolaan pegawai BNI tidak hanya berfokus pada jumlah melainkan juga pada kapabilitas pegawai. Sehingga, proses pembelajaran yang diberikan kepada calon pegawai juga menjadi semakin terfokus dan terarah untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kapabilitas yang mumpuni. Jumlah pegawai pada tahun 2018 sebesar 27.224 orang. Realisasi atas jumlah pegawai tersebut dinilai telah mampu mendukung target bisnis Bank berdasarkan indikator *Earning per Employee* (EPE). Produktivitas pegawai pada tahun 2018 adalah sebesar Rp529 juta/pegawai atau meningkat sebesar 12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat *turnover* pada tahun 2018 adalah sebesar 4,76% yang dinilai merupakan *healthy turnover* dan tetap terjaga di bawah rata-rata *turnover* industri perbankan nasional.

TALENT DEVELOPMENT

Sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi *Leader's Factory* baik bagi BNI Group maupun bagi Indonesia, maka akselerasi percepatan pengembangan *leadership* menjadi hal yang mutlak dilakukan. *Talent Development* merupakan sinergi antara Bank dan pegawai, mulai dari proses perencanaan hingga eksekusinya.

MENUMBUHKAN BUDAYA PEMBELAJAR

Talent management system di BNI telah berbasis kompetensi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai telah memiliki kompetensi yang sesuai pada posisi yang dituju (*right man in the right place*). Untuk mendukung *Talent Management System* berbasis kompetensi, BNI telah memiliki kamus kompetensi dan setiap posisi yang terdapat di BNI telah memiliki profil kompetensi yang spesifik. Kamus kompetensi merupakan daftar yang mencakup seluruh



kompetensi baik *soft competency* maupun *hard competency* di BNI. Sementara itu, profil kompetensi posisi berisi daftar kompetensi yang secara spesifik diperlukan untuk dapat menjalankan pekerjaan secara optimal.

Dalam mengembangkan kompetensi pegawai BNI, dimulai dengan menggeser paradigma pembelajaran dari *learning center* menjadi *learner as the center of learning*, yang berarti pusat pembelajaran adalah *learner* (pelajar). Dalam hal ini, pegawai tidak hanya disebut sebagai *learner* namun juga sebagai *adult learner* yaitu individu yang secara bebas dan aktif memilih sendiri bagaimana, cara dan waktu untuk melakukan *learning and sharing* sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Hal ini juga didasari bahwa pegawai dengan *job position* sama belum tentu juga membutuhkan pembelajaran yang sama dengan yang lain, namun diperkuat untuk masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pengembangan dirinya.

Perubahan paradigma pembelajaran dari *learning center* menjadi *learner as the center of learning* merupakan proses yang dilakukan secara bertahap yang diawali dengan perubahan *mindset* dan diiringi dengan peningkatan kelengkapan infrastruktur pembelajaran.

AKSELERASI LEADERSHIP DEVELOPMENT

Pada tahun 2018, BNI berfokus pada pengembangan kapabilitas *leadership* pada setiap jenjang kepegawaian yang bertujuan untuk menyiapkan *Leader's Successor* jangka pendek maupun jangka panjang. *Leaders Create New Leaders* merupakan salah satu tema yang diusung di tahun 2018. Sejalan dengan konsep *leader empowerment*, seorang *leader* tidak hanya dituntut untuk dapat memimpin melainkan juga menciptakan kader pimpinan di masa depan. Tema *Leaders Create New Leaders* selanjutnya dijabarkan menjadi:

1. Building Immediate Successor

Merupakan program untuk menyiapkan suksesor yang akan menduduki posisi *leader* dalam waktu dekat. Pegawai yang masuk ke dalam program terbagi menjadi dua kategori yang telah siap untuk menduduki posisi *leader (Ready Now)* atau memerlukan pengembangan tertentu (*Ready with Development*) dalam jangka pendek. Baik *leader* maupun suksesor pada program ini diharapkan untuk dapat menjaga secara konsisten baik dari sisi kinerja maupun kapabilitas kesiapan suksesor untuk sewaktu-waktu ditugaskan mengisi posisi tertentu.

2. Preparing Future Leader

Merupakan program untuk mempersiapkan *leader* di masa depan bagi pegawai setingkat *manager* ke bawah. Untuk memastikan bahwa kandidat telah memiliki kompetensi yang mumpuni, maka pengembangan kapabilitas perlu dilakukan sejak awal dan dipantau secara berkala. Metode pengembangan para kandidat

suksesor menggunakan konsep 70:20:10 yang terdiri dari *experiential learning*, *social learning*, dan *in class learning*. Salah satu model *experiential learning* yang diterapkan kepada *future leader* adalah penyelenggaraan event *Glowing Night Run*. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sejumlah kompetensi bagi *future leader*.

TALENT RETENTION

ENGAGEMENT PEGAWAI

BNI secara berkala menyelenggarakan *Employee Engagement Survey* (EES) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat *engagement* pegawai terhadap perusahaan secara konsisten sehingga Bank mampu menetapkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi pegawai.

Pada tahun 2018, BNI menyempurnakan metode pengukuran *engagement* pegawai menjadi metode *on going*. Tujuan dari penyempurnaan ini adalah simplifikasi dan digitalisasi sehingga dapat memudahkan responden dalam mengisi kuesioner. Pengukuran *engagement* pegawai yang dilakukan secara terus menerus (*on going*), maka perusahaan dapat memperoleh umpan balik dari pegawai setiap saat. Dengan demikian, BNI dapat segera menggulirkan *intervention program* untuk setiap *engagement driver* yang dinilai kurang optimal. Hasil *engagement level* pada tahun 2018 sebesar 88% atau naik 5,17% dibandingkan hasil tahun 2017 sebesar 82,83%.

REWARD AND RECOGNITION

Strategi remunerasi yang diterapkan BNI bertujuan untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan *talent* dengan kinerja dan kompetensi yang unggul untuk mendukung tercapainya visi Bank. Dalam rangka mengimplementasikan strategi remunerasi agar selalu kompetitif di *market*, inisiatif penyesuaian remunerasi tahun 2018 merupakan kelanjutan dari strategi remunerasi pada tahun 2017. Pada tahun 2017 program remunerasi dilakukan lebih fokus pada *fixed pay* dan *variable pay*. Selanjutnya pada tahun 2018 program remunerasi berfokus pada *benefit* dan *allowances*. Peningkatan *benefit* antara lain pada komponen manfaat kesehatan, manfaat pensiun, dan tunjangan lokasi.

WORKING ENVIRONMENT

Kolaborasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam mencapai visi Bank. BNI menyadari bahwa untuk menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompetitif, maka diperlukan sinergi yang kuat antar seluruh komponen di BNI.

Saat ini, bentuk lingkungan kerja semakin didorong ke arah *open space* yang dinilai sesuai dengan konsep kerja *agile* yang mengedepankan kolaborasi. Untuk memfasilitasi kolaborasi, maka BNI semakin mendorong tersedianya *open working space*. Pada tahun 2018, telah didirikan The 46 Hub sebagai *Coworking Space* yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai untuk bekerja sekaligus sebagai ruang untuk berkumpul bagi berbagai komunitas di BNI.



Di BNI terdapat berbagai komunitas yang dapat diikuti pegawai untuk menyalurkan minat dan bakatnya, baik di bidang seni, olahraga atau hobi tertentu. BNI juga memfasilitasi pegawai untuk dapat mengikuti komunitas yang sesuai dengan minatnya. Penyaluran minat dan bakat pegawai ini tidak hanya dilakukan di komunitas internal BNI melainkan juga termasuk di kegiatan eksternal, salah satunya dalam kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) BUMN 2018. Pada kegiatan Porseni BUMN, untuk pertama kalinya BNI mampu keluar sebagai Juara Umum dengan total raihan medali 4 (empat) Emas (Marawis, Ragam Talenta, MTQ Putri, Solo Vocal), 5 (lima) Perak (Tenis Lapangan, Grup Band, Tarian Daerah, MTAQ, Duta BUMN Putra) dan 2 (dua) Perunggu (Stand Up Comedy, Vocal Group). Selain prestasi tersebut, supporter BNI juga didaulat menjadi Suporter terbaik di PORSENI BUMN 2018 ini.

MEMPERKUAT TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

MEMBANGUN FONDASI DIGITAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Digitalisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia diwujudkan secara bertahap, seiring dengan proses implementasi kebijakan secara menyeluruh. BNI menyadari pentingnya peranan teknologi dalam mengelola sumber daya manusianya. Oleh karena itu, sejumlah aplikasi berbasis digital secara bertahap mulai dibangun agar sesuai dengan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang terkini. Sejumlah aplikasi akan dibangun secara terintegrasi sesuai dengan arsitektur sistem informasi dan teknologi pengelolaan sumber daya manusia. Dengan demikian, seluruh informasi terkait dengan sumber daya manusia akan dengan mudah diakses dan menjadi dasar dalam pengelolaan SDM yang berbasis data.

MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR PEMBELAJARAN DIGITAL UNTUK MENDUKUNG PEGAWAI SEBAGAI CENTER OF LEARNER

Dalam pengembangan kapabilitas pegawai, sejak tahun 2017 dikembangkan BNI SMARTER (BNI Sistem Monitoring Pembelajaran Terpadu) yaitu konsep pembelajaran dengan mengadopsi Teori Learning and Development 70:20:10. Konsep tersebut ialah pembelajaran yang akan memberikan dampak secara optimal, jika dilakukan secara kolaboratif antara experiential learning (belajar sambil bekerja), learning from others (berinteraksi dengan orang lain) dan formal learning (pembelajaran terstruktur baik melalui kelas riil maupun kelas *online*). Hal tersebut dapat diwujudkan dalam learning infrastructure berbasis internet melalui website bnicorpu.co.id, di mana sampai dengan tahun 2018 telah dapat mengakomodir hal-hal sebagai berikut:

1. BNI MoRe UnLeaSh (BNI Monitoring Realisasi Unggahan Learning and Sharing)

Adalah aplikasi untuk menumbuhkan learning and sharing culture di kalangan pegawai, dengan cara menstimulasi pegawai agar dapat melakukan learning and sharing setiap hari dan mencatatkannya secara online melalui aplikasi tersebut. Pegawai BNI diwajibkan melakukan 46 hours learning dan 46 hours sharing setiap tahunnya.

2. BNI Expert Locator (BEL)

Bank BNI telah memetakan lebih dari 600 pegawai BNI dengan jenjang jabatan minimal AVP (Assistant Vice President), yang merupakan expert (ahli) di bidangnya. Melalui aplikasi BNI Expert Locator, pegawai dapat mencari para ahli yang dibutuhkan, serta dapat menghubunginya secara langsung. Kemudian, aktivitas tersebut langsung mencatatkan realisasi pembelajarannya.

3. BNI Digital Learning

Adalah modul-modul pembelajaran yang dapat diakses pegawai di mana saja dan kapan saja, baik dalam bentuk pdf, gamification, bite size video dan sebagainya. Selain itu berisi pula pre and post test, smartbook dan modul-modul program pembelajaran baik yang diselenggarakan secara *blended learning* maupun 100% *online learning*.

4. BNI Learning Wallet (BLW)

Adalah alokasi anggaran pembelajaran personal yang dikelola oleh pegawai sendiri dengan tujuan untuk memenuhi *gap* kompetensi atau dapat membuat bekerja lebih cerdas, cepat dan efisien. Besar anggaran BLW dapat disesuaikan dengan hasil *talent classification*, *total cash* (gaji), realisasi *learning* dan *sharing* serta ketersediaan anggaran pembelajaran yang dikelola BNI Corporate University. Implementasi BLW tersebut dilakukan secara *online*, dimulai dari pelaksanaan perencanaan pembelajaran sampai dengan *reimbursement* biaya pembelajaran yang telah dilakukan.

5. Learner's Virtual Assistant (LeVA)

Adalah aplikasi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang dapat di *download* melalui *smartphone*. Di mana pegawai dapat berinteraksi dengan *bot* terkait modul pembelajaran serta program-program BNI Corporate University maupun terkait *Human Capital*, melalui *text command* atau *voice command*. Dengan belajar bersama LeVA, pegawai tidak perlu membaca sebuah modul secara keseluruhan untuk mencari pengetahuan yang dibutuhkan.



6. DEEP46

Adalah program pembelajaran dengan metode pegawai diberikan sebuah soal pada setiap hari, untuk dikerjakan secara *online* antara pukul 00.00–12.00 WIB dengan tujuan untuk memastikan pegawai menguasai kompetensi sesuai *job positionnya*.

7. Daily Check In

Adalah aplikasi untuk mengawal pelaksanaan *on the job training* (OJT), *In Service Training and Evaluation* (ISTE) dan Evaluasi Lapangan (Evalap). Hal ini untuk memastikan peserta pembelajaran, mentor dan Pemimpin Unitnya dapat melakukan tugasnya sesuai desain pembelajaran.

8. Digital Leadership for All Level

Adalah program pembelajaran untuk segenap jenjang jabatan, dimulai dari pegawai dasar sampai dengan direksi, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan pegawai BNI. Pegawai bebas melakukan pembelajaran *leadership* sesuai hasil asesmen dan *mobility plan*, di mana pelaksanaan pembelajaran dapat dimulai kapan saja (*multy entry*) dan diselesaikan kapan saja (*multiple exit*).

9. Info Public Training

Adalah menu untuk mendukung pegawai dalam memanfaatkan anggaran BLW, maka perlu didukung dengan informasi *training provider* terbaik beserta jadwal *learning event-nya*

PROGRAM LAINNYA

BINA BNI

Program Pemagangan BINA BNI sebagai perwujudan kepedulian dan tanggung jawab sosial BNI, tetap menjadi salah satu komitmen yang dilaksanakan pada tahun 2018. Terdapat 3.838 peserta yang saat ini sedang mengikuti program pemagangan BINA BNI dengan tujuan memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bagi para lulusan baru (*fresh graduate*) untuk dapat bersaing di dunia kerja.

BNI INNOVATION AWARD (BINNOVA) 2017 – 2018

Sebagai rangkaian dari program pengembangan budaya inovasi pegawai, secara rutin tiap tahunnya diselenggarakan BNI Innovation Award (Binnova). Untuk pelaksanaan tahun 2017 – 2018, terdapat beberapa penyempurnaan proses, yaitu berupa penyelenggaraan pelatihan *Design Thinking and Prototyping* untuk finalis, pelaksanaan inkubasi inovasi untuk 10 (sepuluh) tim terbaik, dan pemberian kesempatan studi banding untuk 3 (tiga) tim terbaik ke Shanghai

dan Hangzhou, China di mana mereka berkesempatan mengunjungi beberapa perusahaan *financial technology* yang telah mendunia, yaitu salah satunya adalah Alipay. Penyempurnaan dimaksud bertujuan untuk terus menerus memberikan pengalaman berinovasi yang lebih baik lagi kepada peserta, serta mampu menularkan semangat budaya inovasi di seluruh penjuru organisasi, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada perkembangan bisnis BNI secara jangka panjang.

BNI PROFESSIONALISM AWARD (PERFORMA) 2018

BNI Professionalism Award selanjutnya disingkat dengan BNI Performa 2018 adalah suatu ajang kompetisi untuk mendukung *Employee Value Proposition* (EVP) BNI yaitu “Bersama-sama menciptakan tempat terbaik untuk berkontribusi, belajar dan bertumbuh, guna menjadi kebanggaan Negeri” dengan mengedepankan budaya kerja sebagai Landasan BNI yang menjadi fokus utama pada Profesionalisme sehingga dapat membantu percepatan pertumbuhan bisnis BNI yang berkelanjutan. BNI Performa diharapkan dapat menghasilkan pegawai dengan kemampuan *leadership* yang sesuai dengan PRINSIP 46, serta siap sebagai perwakilan dalam ajang pemilihan DUTA BUMN 2019.

MEMPERSIAPKAN PEGAWAI MEMASUKI MASA PURNABAKTI (PENSIUN)

BNI memperhatikan kesejahteraan pegawai, baik selama masa aktif maupun setelah pensiun. Masa transisi dari sebelumnya bekerja dan beraktivitas menuju masa pensiun harus dipersiapkan dengan baik. Sebab, perubahan tidak hanya dalam faktor finansial namun juga dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan pegawai untuk tetap memiliki aktivitas pada saat pensiun sehingga tetap terjaga kesehatannya, maka diberikan pelatihan purna bakti yang antara lain mengenai cara memulai usaha dan mengelola keuangan di masa pensiun. Sepanjang tahun 2018, telah dilaksanakan pelatihan pra purnabakti sebanyak 14 *batch* yang diikuti oleh 207 pegawai. Adapun dampak lainnya yaitu pegawai dapat memiliki persiapan dari sisi mental, psikologis dan finansial pada saat usia pensiun. Untuk memastikan bahwa pegawai tetap terjaga kesehatannya, maka sejak masa aktif pegawai dan BNI bersama-sama mempersiapkan dana kesehatan untuk dapat dimanfaatkan setelah pensiun.



Unit Pendukung
Bisnis



HUBUNGAN INDUSTRIAL

Kualitas hubungan industrial antara manajemen dengan serikat pekerja secara konsisten terus berupaya untuk ditingkatkan. Secara konsisten, serikat pekerja terlibat dalam proses *co creation* penyusunan kebijakan sumber daya manusia. Selain dalam proses penyusunan kebijakan, kegiatan forum kemitraan yang berfungsi sebagai sarana penyampaian aspirasi kepada Bank juga telah dilakukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali. Pada tahun 2018, juga telah dilakukan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang juga telah disosialisasikan kepada segenap pegawai.

Divisi *Human Capital* (HCT) BNI memiliki layanan Info HCT yang dapat diakses setiap saat oleh pegawai melalui media digital seperti *website*, *email* dan jaringan telepon untuk memudahkan penyelesaian dan tindak lanjut atas kendala kepegawaian yang dialami oleh pegawai.

APRESIASI DAN PENGHARGAAN

Sebagai sarana evaluasi dan perbandingan atas sistem pengelolaan sumber daya manusia yang telah diterapkan, Bank juga mengikuti sejumlah kegiatan yang melibatkan pihak eksternal dalam melakukan perbandingan dan penilaian atas sejumlah aspek pengelolaan sumber daya manusia. Hasil dari sejumlah kegiatan ini menjadi masukan dalam penyempurnaan proses dan sistem pengelolaan sumber daya manusia sejalan dengan semangat “Perbaikan Tiada Henti” sebagai salah satu nilai budaya Bank BNI. Pada tahun 2018, terdapat sejumlah apresiasi dan penghargaan yang diraih oleh Bank BNI dalam pengelolaan sumber daya manusia antara lain sebagai berikut:

Tabel Penghargaan Bank BNI Terkait Sumber Daya Manusia Selama Tahun 2018

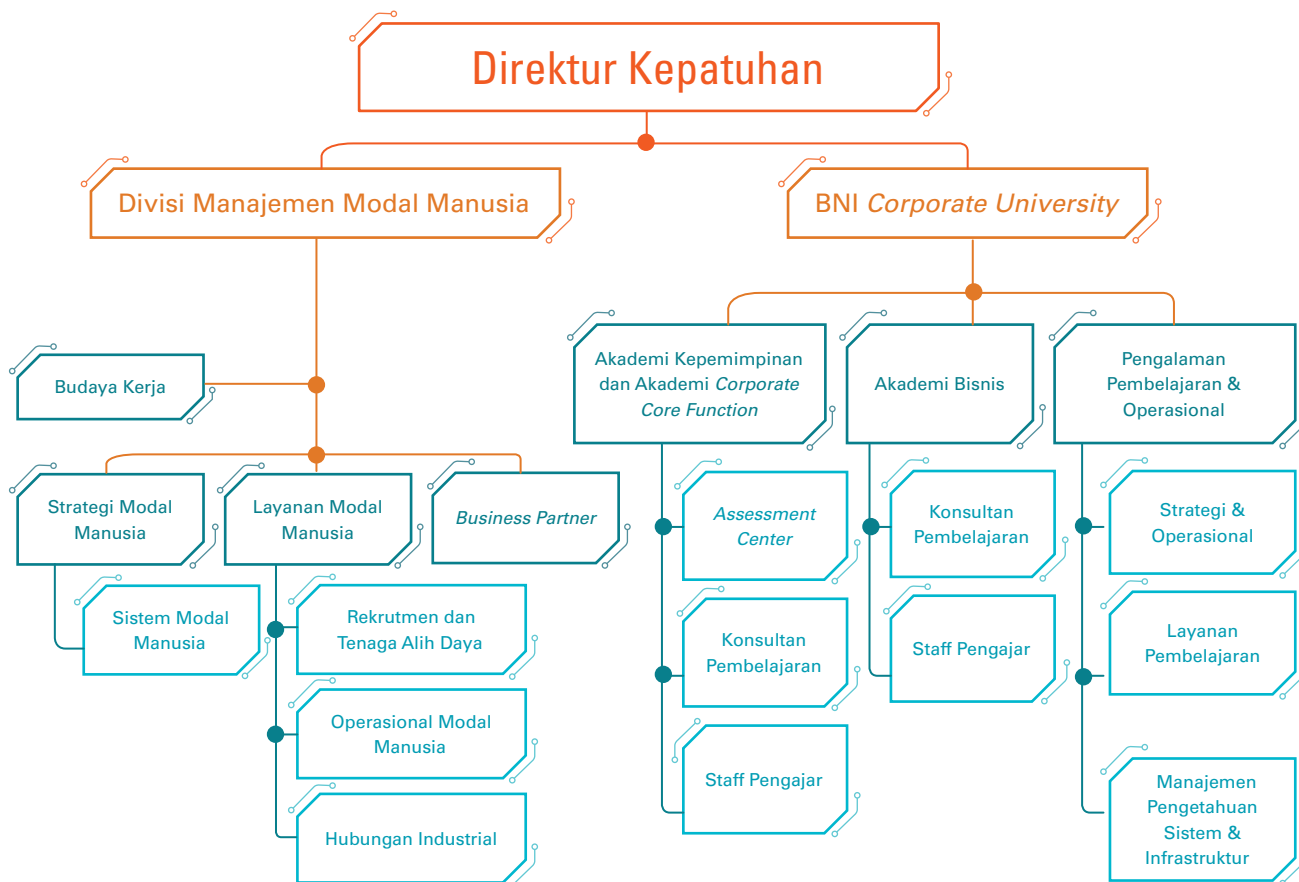
No	Event	Penghargaan
1	<i>HR Excellence Award in HR Transformation</i>	SWA dan Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
2	<i>HR Excellence Award in Learning & Development Strategy</i>	SWA dan Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
3	<i>HR Excellence Award in Compensation & Benefit Strategy</i>	SWA dan Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
4	<i>Corporate Transformation category Competent People</i>	PPM Manajemen

RENCANA KE DEPAN

Sejalan dengan peranan *Human Capital* dalam mendorong pengelolaan sumber daya manusia yang mampu mendukung tercapainya strategi Bank, maka tema utama pada tahun 2019 adalah *Optimizing Productivity and Accelerating Development*. Sejumlah inisiatif strategis yang akan diimplementasikan antara lain adalah mengoptimalkan produktivitas melalui *workforce planning* yang *robust* dan percepatan pengembangan pegawai dengan mekanisme *development plan* yang terintegrasi. BNI menyadari bahwa percepatan pengembangan kapabilitas pegawai merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mendukung tercapainya rencana strategis Bank.

STRUKTUR PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

Desain pengembangan organisasi BNI selalu disesuaikan dengan arah perkembangan Bank. Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan Sumber Daya Manusia di BNI berada di bawah Divisi Manajemen Modal Manusia yang berperan dalam penyusunan, implementasi kebijakan dan pengelolaan kegiatan operasional kepegawaian serta BNI Corporate University yang bertanggung jawab atas fungsi pengembangan kapabilitas pegawai.



Divisi Manajemen Modal Manusia dan BNI Corporate University dipimpin oleh Direktur Kepatuhan, Bapak Endang Hidayatullah, Profil ringkas telah disampaikan pada Profil Direktur pada Laporan Tahunan ini.

PROFIL RINGKAS SUMBER DAYA MANUSIA

Adapun profil singkat Pemimpin pada sektor yang mengelola sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia

Divisi Manajemen Modal Manusia dipimpin oleh Efta Praharani, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer dan Pemimpin Konsumer Banking Wilayah. Beliau sebelumnya juga menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran, serta telah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun dalam pengelolaan sumber daya manusia di BNI. Beliau memiliki gelar *Master of Science* pada bidang Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia dan Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada.

2. Pemimpin BNI Corporate University

Divisi BNI Corporate University dipimpin oleh Wicaksono Sarwo Edi resmi menduduki jabatan selaku Dekan BNI Corporate University sejak 10 April 2017. Sebelum menjabat, beliau telah menduduki sejumlah posisi strategis baik di wilayah maupun di kantor pusat, antara lain Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan, Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil dan S2 Magister Manajemen bidang keuangan dan Perbankan dari Universitas Gadjah Mada.

PROFIL PEGAWAI

Informasi mengenai profil pegawai dapat dilihat di bagian Profil BNI pada Laporan Tahunan ini.



Tata Kelola Perusahaan

362 *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

365 *KETERKAITAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DENGAN KINERJA PERUSAHAAN*

366 *LANDASAN HUKUM PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

367 *PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

371 *UPAYA PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI
GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

374 *MONITORING IMPLEMENTASI GCG*

375 *GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT*

383 *ORGAN PERUSAHAAN DAN PROSES PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

576 *MANAJEMEN RISIKO*

608 *PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)*

610 *PERKARA PENTING*

624 *AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN*

643 *KEBIJAKAN GRATIFIKASI*

646 *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

658 *INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA
DAN PENGENDALI*

670 *PELAKSANAAN PENERAPAN ASEAN CORPORATE
GOVERNANCE SCORECARD*



GOOD CORPORATE GOVERNANCE



“ Implementasi *corporate governance* telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja BNI. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai pencapaian BNI sepanjang tahun 2018 yang membuahkan hasil memuaskan baik dari sisi kinerja keuangan, operasional maupun penghargaan yang diraih. Peningkatan implementasi GCG berbanding lurus dengan peningkatan kinerja BNI secara keseluruhan.



BNI memahami bahwa penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* bukan lagi merupakan suatu keharusan, akan tetapi merupakan kebutuhan dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank. Seiring dengan pemahaman bahwa peningkatan kualitas penerapan *corporate governance* yang efektif secara berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting, BNI sebagai lembaga kepercayaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan secara konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan Perusahaan yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja bank, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada industri perbankan.

Efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* tersebut dapat dilihat dari adanya keselarasan dari 3 (tiga) aspek *governance system* yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. *Governance Structure* terkait dengan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja Perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

Governance Process adalah efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan. *Governance Outcome* adalah kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan. Dengan demikian, *Governance Outcome* merupakan hasil penerapan *Governance Process* dan dukungan yang memadai dari *Governance structure*. Adanya permasalahan pada *Governance structure* menimbulkan kelemahan pada *Governance Process*. Di lain pihak, adanya kelemahan pada *Governance Process* berdampak pada *Governance Outcome*.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan, melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, maka sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris BNI menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Direksi BNI menjalankan fungsi pengelolaan dan kepengurusan secara *professional* dan menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan.

Penerapan dan pengembangan *Good Corporate Governance* di lingkungan BNI dan Perusahaan anak bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh regulator, namun sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat tergantikan bagi setiap Perusahaan dalam mengelola Perusahaannya. Dengan adanya penerapan dan pengembangan GCG, maka BNI sudah memiliki pondasi yang kokoh dan bekal yang cukup untuk menjadi Perusahaan yang tangguh dan terus berkembang.

BNI berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di seluruh aspek kegiatan usaha bisnisnya termasuk pada Perusahaan anak secara terintegrasi. Seiring berkembangnya *best practices* pelaksanaan tata kelola Perusahaan, baik pada industri perbankan maupun industri jasa keuangan, sebagai bank BUMN yang terdaftar di pasar modal, BNI memahami bahwa penerapan dan pengembangan GCG memiliki manfaat yang sangat besar bagi BNI. Dengan adanya penerapan dan pengembangan GCG, BNI memiliki pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha bisnisnya agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebutuhan setiap *stakeholder*. Keselarasan antara *stakeholder* dan BNI akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan Perusahaan yang berujung pada timbul dan meningkatnya sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap insan BNI.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dibangun berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilaksanakan pada setiap tingkatan organisasi, dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas BNI sehingga seluruh kegiatan operasional perbankan dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Penerapan Tata Kelola di BNI berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, Kesetaraan dan juga Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut di lingkungan BNI, sudah disepakati oleh Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen dan seluruh insan BNI guna menciptakan Bank yang senantiasa tumbuh dan berdaya saing global, serta kuat dan bertahan dalam menjalankan roda bisnisnya.

BNI juga menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan akan semakin meningkatkan kepercayaan dan rasa aman investor atas investasi dalam era global saat ini. Secara berkelanjutan, selain menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG, BNI terus mengadopsi berbagai standar Tata Kelola terbaik yang berlaku di regional maupun internasional antara lain meliputi *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.



KETERKAITAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DENGAN **KINERJA PERUSAHAAN**

Implementasi *corporate governance* telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja BNI. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai pencapaian BNI sepanjang tahun 2018 yang membuahkan hasil memuaskan baik dari sisi kinerja keuangan, operasional maupun penghargaan yang diraih. Peningkatan implementasi GCG berbanding lurus dengan peningkatan kinerja BNI secara keseluruhan. Pengakuan pihak eksternal dalam bentuk berbagai penghargaan, baik terkait kinerja BNI, keterbukaan Informasi dan juga implementasi GCG telah diperoleh, antara lain adalah:

1. Juara 1 Kategori BUMN Keuangan *Listed* dalam acara *Annual Report Award* 2016.
2. *The Best State Owned Enterprise* dan *Top 50 Public Listed Companies* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan *Indonesiaan Institute for Corporate Directorship* (IICD).
3. *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Index* (CGPI) pada *Good Corporate Governance Award* 2018.

Selain itu dicapainya kinerja keuangan yang bagus di tahun 2018 sebagai berikut.

1. Pendapatan Bunga dan Syariah meningkat 11,0% menjadi Rp35.446 Miliar.
2. Pinjaman yang disalurkan meningkat 16,2% menjadi Rp512.778 Miliar.
3. Simpanan Nasabah meningkat 12,1% menjadi Rp578.775 Miliar.
4. Jumlah Kredit yang disalurkan meningkat 12,2% menjadi Rp513.022 Miliar.
5. Total Aset meningkat 14,1% menjadi Rp808.572 Miliar.
6. Ekuitas meningkat 9,4% menjadi Rp110.374 Miliar.
7. Laba meningkat 9,6% menjadi Rp15.092 Miliar.
8. NPL Bruto mengalami penurunan dari sebesar 2,3% di 2017 menjadi 1,9% di 2018.

LANDASAN HUKUM PENERAPAN **GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Landasan hukum penerapan *Corporate Governance* pada BNI mengacu pada ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
10. Berbagai pedoman implementasi GCG antara lain Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, dan *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.



PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di BNI bertujuan untuk:

1. Meningkatkan *corporate value* BNI dengan menerapkan prinsip GCG yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Keadilan dan Kesetaraan dalam melaksanakan bisnisnya agar BNI memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat nasional maupun regional.
2. Mendorong setiap organ BNI untuk selalu menekankan budaya GCG dalam setiap pengambilan keputusan yang dilandasi nilai dan norma yang berlaku serta tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan kinerja BNI melalui program-program efisiensi Perusahaan yang tercipta dari terimplementasinya budaya GCG di setiap organ BNI.
4. Meningkatkan kepercayaan investor dan menempatkan BNI sebagai pilihan utama tempat berinvestasi.

Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG BNI dapat diuraikan sebagai berikut:

Prinsip GCG	Uraian
Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>) sesuai dengan haknya. 2. Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham Pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi <i>good corporate governance</i> serta informasi dan fakta material yang dapat memengaruhi keputusan pemodal. 3. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. 4. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada <i>stakeholders</i> dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada <i>stakeholders</i>. 2. Bank menetapkan <i>check and balance system</i> dalam pengelolaan Bank. 3. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua organ organisasi berdasarkan ukuran yang disepakati dan sejalan dengan nilai-nilai Perusahaan (<i>Corporate Culture Values</i>), sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki <i>rewards and punishment system</i>. 4. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi <i>good corporate governance</i>.
Responsibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential bank practices</i>) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 2. Bank sebagai <i>good corporate citizen</i> peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
Independensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh <i>stakeholders</i> manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). 2. Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.
Kesetaraan dan Kewajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> asas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). 2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.



PELAKSANAAN ROADMAP GCG

BNI senantiasa berupaya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana dikehendaki oleh segenap *stakeholder*. Implementasi GCG oleh BNI dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

Tahun	Aktivitas
2001	BNI berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola penyelenggaraan Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>). Komitmen tersebut dipelopori oleh Komisaris dan Direksi BNI dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi No. KEP/001/DK dan KP/001/DIR tanggal 3 Januari 2001 perihal Pelaksanaan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> sebagaimana tercantum dalam <i>Corporate Governance Handbook</i> PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang kemudian dijadikan pedoman bagi Direksi dan Komisaris untuk mengelola BNI.
2002	Sebagai bagian dari komitmen untuk mengadakan perbaikan yang terus menerus atas implementasi <i>corporate governance</i> , BNI melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut. <ul style="list-style-type: none"> Membentuk Unit Kepatuhan dan Unit <i>Anti Money Laundering</i> di bawah tanggung jawab Divisi Hukum dan Kepatuhan. Membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyusun kriteria penilaian kinerja bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi serta melakukan penilaian struktur, sistem, dan pelaksanaan kompensasi bagi Direksi dan memberi saran untuk perubahannya kepada Komisaris bila diminta. Membentuk <i>assessment center</i> untuk memperbaiki proses/sistem seleksi posisi pimpinan tingkat atas. Memperbaiki sistem informasi perbankan. Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit (<i>Audit Committee Charter</i>) sebagai panduan bagi anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas.
2003 Kuasi Reorganisasi, <i>Reverse Stock Split</i> , peningkatan modal dasar	BNI terus melakukan perbaikan <i>corporate governance</i> -nya, baik dari segi komitmen maupun kepatuhan terhadap penerapannya. Setiap pegawai diharuskan menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Kode Etik Perilaku. Salah satu usaha perbaikan tata kelola tersebut, maka pada tahun 2003, BNI membentuk Komite Eksekutif yang bertugas membantu Direksi pada bidang-bidang tertentu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> Komite <i>Asset & Liability Committee</i> (ALCO). Komite Manajemen Risiko. Komite Kebijakan Kredit. Komite Sumber Daya Manusia. Komite Manajemen Teknologi.
2004 Peluncuran identitas korporat baru	Berikut adalah pencapaian penting di bidang penerapan tata kelola Perusahaan selama tahun 2004: <ul style="list-style-type: none"> Manajemen BNI telah menyetujui pembentukan Komite <i>Good Corporate Governance</i> yang bertugas membantu Direksi dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan efektivitas kebijakan maupun implementasi tata kelola Perusahaan di lingkungan kerja BNI. BNI dinilai sebagai salah satu dari lima Perusahaan publik dengan praktik tata kelola Perusahaan yang baik dalam <i>survey</i> yang diadakan oleh <i>Standard & Poor's Governance Services</i> serta <i>Corporate Governance and Financial Reporting Center</i> (CGRfC) yang berkantor pusat di Singapura. Manajemen melaksanakan program <i>Zero Fraud</i> guna menumbuhkan praktik perbankan yang sehat dan bertanggung jawab, kesadaran akan risiko, serta pengawasan melekat atas perilaku yang menyimpang. Melalui program ini, BNI memberi imbalan bagi unit kerja yang berhasil mencapai <i>Zero Fraud</i> dalam operasinya dan sebaliknya memberi sanksi kepada unit kerja yang gagal mencegah <i>Fraud</i>. BNI membentuk Tim Etika Kerja yang bekerja di bawah Komite Sumber Daya Manusia. Secara berkala tim ini mengevaluasi kemajuan etika kerja di lingkungan kerja BNI. <p>BNI telah meningkatkan akses para <i>stakeholder</i> terhadap seluruh informasi yang memiliki dampak material terhadap BNI, termasuk laporan keuangan triwulanan, Laporan Tahunan, informasi mengenai penggunaan dana hasil <i>corporate action</i>, informasi yang dapat memengaruhi keputusan berinvestasi pemodal, hasil-hasil Rapat Umum Pemegang Saham, serta peristiwa penting lainnya menyangkut BNI, baik melalui situs web BNI, laporan ke Bapepam, Bursa Efek, media massa, paparan publik, maupun temu analisis.</p>
2005	Komitmen BNI dalam peningkatan tata kelola dibuktikan dengan pembentukan suatu unit organisasi Pemantauan GCG melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/174/DIR/R tanggal 26 April 2005.
2006	Ditandatanganinya 'Pernyataan Komitmen untuk Menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> ' oleh segenap Direksi, Komisaris, dan Pemimpin Divisi pada Rapat Kerja Perusahaan, yang selanjutnya diikuti oleh segenap pegawai di seluruh jenjang organisasi dan diperbaharui setiap tahun.
2007	Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan 'Pernyataan Komitmen untuk Menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> ' di tahun sebelumnya, maka BNI menyusun program GCG antara lain: <ul style="list-style-type: none"> GCG <i>e-learning</i>. Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris dan Direksi BNI. Buku Tuntutan Perilaku Insan BNI, yang terdiri dari Nilai-Nilai Budaya Kerja dan Perilaku Utama Insan BNI yang disebut PRINSIP 46. BNI memperoleh predikat sebagai Perusahaan Terpercaya dalam pemeringkatan <i>Corporate Governance Perception Index</i> yang diselenggarakan <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> (IICG) dan majalah SWA.



Tahun	Aktivitas
2008	Terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Divisi Kepatuhan bekerja sama dengan Divisi Teknologi Informasi telah mengembangkan dan terus menyempurnakan sistem yang terintegrasi dengan sistem iCONS untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
2009	BNI berhasil meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan laba hingga 103% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan GCG yang konsisten oleh segenap insan BNI.
2010	Peluncuran <i>Whistleblowing System</i> (WBS) secara terintegrasi agar transparansi terjaga dan pelaksanaannya dipahami oleh segenap pegawai BNI. Penyempurnaan <i>code of conduct</i> pegawai BNI yang ditujukan agar terdapat peningkatan kualitas pegawai BNI. Keikutsertaan BNI dalam peratingan/pemeringkatan implementasi GCG yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat independen, yaitu <i>Center for Good Corporate Governance</i> Universitas Gadjah Mada (CGCG UGM), <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD).
2011	BNI meraih berbagai penghargaan dari berbagai institusi skala nasional maupun internasional. Beberapa penghargaan besar di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Best of The Best Company</i> BUMN 2011. • <i>The Most Admired ASEAN Enterprise Economics Challenges Award</i> 2011. • <i>The Most Trusted Company</i> dari <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> (IICG). Terkait dengan implementasi GCG, BNI meraih beberapa penghargaan, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> • BNI meraih penghargaan <i>Corporate Governance Award</i> 2011 dari <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i>. • Tata kelola teknologi informasi BNI telah diakui keandalannya dengan diberikannya <i>IT Governance Award</i> oleh Kementerian BUMN.
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil <i>self assessment</i> sesuai ketentuan Bank Indonesia di tahun 2011 dan 2012 menunjukkan tren yang stabil dengan predikat komposit Sangat Baik. • Pembentukan Komite Anti <i>Fraud</i> yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/508/DIR/R tanggal 9 November 2012 perihal Pembentukan Komite Anti <i>Fraud</i> (KAF). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KAF dibantu oleh Unit Pengelolaan <i>Ethics Management</i> yang berada di Divisi Kepatuhan, yang salah satu fungsinya sebagai <i>liaison</i> data dan pelaporan dengan Divisi/Unit lain serta pihak eksternal terkait Strategi Anti <i>Fraud</i> dan mengelola <i>database</i> terkait <i>Fraud</i> yang ada di BNI.
2013	BNI meraih penghargaan: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Most Trusted Company Based on Investors and Analyst's assesment Survey</i> pada <i>Good Corporate Governance Award</i> 2013. • <i>Most Trusted Company Based on Corporate Governance Index</i> (CGPI) pada <i>Good Corporate Governance Award</i> 2013. • Penghargaan sebagai <i>The Best Bank in Indonesia in Developing Good Corporate Governance</i> (GCG) dari <i>Asiamoney Magazine</i>.
2014	<ul style="list-style-type: none"> • BNI terus melakukan peningkatan dan pembaharuan untuk meningkatkan tata kelola Perusahaan. • BNI juga terus mendukung pertumbuhan terhadap ekonomi dan lingkungan dengan menyelenggarakan program Kampoeng BNI, PKBL, aktivitas CSR yang diselenggarakan BNI Syariah, dan komitmen terhadap program <i>One Billion Indonesian Trees</i> (OBIT) yang telah menanam lebih dari 7 juta pohon dalam 7 tahun terakhir.
2015	BNI meraih penghargaan sebagai: <ul style="list-style-type: none"> • <i>The Best State Owned Enterprise</i> dan <i>Top 50 Public Listed Companies</i> dalam acara <i>Good Corporate Governance Award</i> yang diselenggarakan <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD).
2016	BNI kembali meraih penghargaan sebagai <ul style="list-style-type: none"> • <i>The Best State Owned Enterprise</i> dan <i>Top 50 Public Listed Companies</i> dalam acara <i>Good Corporate Governance Award</i> yang diselenggarakan <i>Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD). • <i>Most Trusted Company Based on Corporate Governance Index</i> (CGPI) pada <i>Good Corporate Governance Award</i> 2016.
2017	BNI kembali meraih penghargaan sebagai: <ul style="list-style-type: none"> • Juara 1 Kategori BUMN Keuangan <i>Listed</i> dalam acara <i>Annual Report Award</i> 2016. • <i>The Best State Owned Enterprise</i> dan <i>Top 50 Public Listed Companies</i> dalam acara <i>Good Corporate Governance Award</i> yang diselenggarakan <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD). • <i>Most Trusted Company Based on Corporate Governance Index</i> (CGPI) pada <i>Good Corporate Governance Award</i> 2017.
2018	BNI kembali meraih penghargaan sebagai <ul style="list-style-type: none"> • <i>The Best State Owned Enterprise</i> dan <i>Top 50 Public Listed Companies</i> dalam acara <i>Good Corporate Governance Award</i> yang diselenggarakan <i>Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD). • <i>Most Trusted Based on Corporate Governance Index</i> (CGPI) pada <i>Good Corporate Governance</i>.

Selama tahun 2018, BNI telah melaksanakan implementasi GCG sebagai berikut:

Januari

Penyampaian *Self Assessment* GCG posisi Desember 2017 kepada OJK.

Februari

1. Penandatanganan Komitmen GCG oleh seluruh Insan BNI.
2. Sosialisasi Anti *Fraud* kepada seluruh pegawai BNI.
3. Penyampaian *Self Assessment* TKT posisi Desember 2017 kepada OJK.
4. Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
5. Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS sesuai Rekomendasi *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan POJK No. 32/POJK.04/2014.
6. Pada Pemanggilan RUPS telah disampaikan rincian penjelasan masing-masing mata acara RUPS sesuai Rekomendasi *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan POJK No. 32/POJK.04/2014.

Maret

1. Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 20 Maret 2018.
2. Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 sekaligus Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 pada tanggal 22 Maret 2018 di 2 (dua) surat kabar yaitu *Investor Daily* dan *The Jakarta Post* guna memenuhi ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No. 10/POJK.04/2017.

April

1. Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017 tepat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan RUPS atau setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yaitu tanggal 20 April 2018 sesuai Rekomendasi *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No. 10/POJK.04/2017.
2. Pelaksanaan Sosialisasi GCG di Kantor Wilayah Malang.

Mei

1. Penyampaian Laporan fungsi Pelaksanaan *Corporate Secretary* kepada Direksi yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014.
2. Publikasi Anti Gratifikasi di Harian Kompas dan Bisnis Indonesia tanggal 30 Mei 2018.

Juni

Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/228/DIR/R tanggal 29 Juni 2018.

Juli

Penyampaian *Self Assessment* GCG posisi Juni 2018 kepada OJK.

Agustus

1. Penandatanganan Pakta Integritas Direksi sebagai Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur No. DIR/564 tanggal 19 Juli 2017.
2. Penyampaian *Self Assessment* TKT posisi Juni 2018 kepada OJK.
3. Pelaksanaan Sosialisasi GCG di Kantor Cabang Singkawang dan Pontianak.
4. Pelaksanaan *Compliance* Forum Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan tanggal 30 Agustus 2018.

Desember

1. Pelaksanaan IICD *Award* BNI mendapat 2 (dua) penghargaan yaitu: *The Best State Owned Enterprise* dan *Top 50 Public Listed Companies*.
2. Publikasi Anti Gratifikasi di Harian Kompas dan Bisnis Indonesia tanggal 30 Mei 2018.
3. Partisipasi dalam Riset ASEAN *Corporate Governance Scorecard* terhadap BNI, dan BNI mendapat *score* 88,60.
4. Pelaksanaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diadakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) di mana BNI mendapat penghargaan yaitu: *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Index* dengan skor 88,38.
5. BNI selalu berupaya meningkatkan implementasi GCG di lingkungan kerja BNI. Hal ini dilakukan melalui Divisi KMP dengan menyelenggarakan kegiatan internal berupa Kompetisi *Vlog* GCG dgn tema : Integritas Sebagai Gaya Hidup Insan BNI #IniIntegritasGue. Maksud dan tujuan dari diadakannya kompetisi ini yaitu untuk menumbuhkan *awareness* terhadap seluruh Insan BNI sehingga dapat meningkatkan sikap integritas sebagai gaya hidup serta keikutsertaan segenap Insan BNI untuk berperan aktif dan kreatif dalam *campaign* Integritas sebagai Gaya Hidup Insan BNI.



UPAYA PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI **GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan GCG di BNI berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Bank, *shareholders* dan *stakeholders*. BNI senantiasa melakukan evaluasi penerapan GCG secara berkelanjutan, sehingga penerapan GCG akan selalu mengalami peningkatan. Evaluasi GCG di BNI dilakukan antara lain dengan cara:

1. *Review* pedoman/kebijakan terkait dengan GCG yang sudah ada sebelumnya untuk disesuaikan dengan ketentuan regulator terbaru.
2. Penyusunan pedoman/kebijakan baru terkait dengan GCG yang belum ada, termasuk di dalamnya *updating* ketentuan baru kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Peningkatan Prinsip Kepatuhan melalui *Compliance Index*.
4. Penyusunan Laporan terkait GCG, di antaranya Laporan Tata Kelola, Laporan *Corporate Secretary*, serta laporan terkait lainnya.
5. Sarana Pengaduan Eksternal terkait GCG untuk mendorong kesadaran Insan BNI agar senantiasa berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sebagai suatu budaya, BNI juga melibatkan peran serta masyarakat/publik sebagai pengawas implementasi GCG di BNI antara lain dengan menyediakan sarana bagi masyarakat umum (publik) untuk menyampaikan keluhan serta pengaduan terjadinya pelanggaran GCG yang dilakukan oleh pegawai BNI melalui PO Box GCG BNI JKP 10000 dan gcg@bni.co.id. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh perbuatan Insan BNI atau mengetahui adanya perbuatan pegawai BNI yang menyimpang dari prinsip GCG dapat menginformasikan melalui kedua sarana tersebut dengan menyebutkan secara jelas identitas pegawai/Insan BNI yang melakukan pelanggaran dan unit di mana pegawai/Insan BNI tersebut pegawai melaksanakan tugasnya.

Pengaduan atau keluhan yang diterima melalui PO Box GCG BNI JKP 10000 dan gcg@bni.co.id selain dimaksudkan untuk membantu proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi pihak yang menyampaikan keluhan/informasi juga diharapkan dapat menjadi bahan *review*/masukan serta evaluasi bagi BNI untuk melakukan perbaikan secara terus menerus serta meningkatkan kualitas penerapan GCG di BNI

sehingga dapat menekan terjadinya tindakan penyimpangan atau pelanggaran prinsip GCG oleh pegawai BNI. Jumlah pengaduan/permintaan informasi yang masuk dalam tahun 2018 sebanyak 16 (enam belas) aduan. Terhadap pengaduan/permintaan informasi yang tidak terkait dengan GCG telah diteruskan ke unit-unit terkait untuk penyelesaiannya.

Dalam rangka peningkatan kualitas implementasi GCG di BNI tersebut, BNI terus berupaya menciptakan, mengembangkan dan memperbaiki diri sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Penyusunan *Roadmap* diperlukan untuk memetakan aspek GCG maupun menciptakan program terkait GCG di BNI dalam rangka mendukung praktik implementasi GCG.

AWARENESS

SOSIALISASI TERKAIT GCG

Sosialisasi terkait GCG selama tahun 2018 telah dilakukan baik di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, di antaranya pada Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan, Wilayah Malang dan Makassar serta Kantor Cabang Singkawang dan Pontianak. Dalam sosialisasi dimaksud dipaparkan antara lain mengenai prinsip-prinsip GCG, contoh implementasi, sampai dengan ketentuan terbaru terkait GCG. Dengan sosialisasi ini diharapkan para Insan BNI memiliki tekad serta komitmen bersama untuk mewujudkan implementasi GCG di BNI.

PROGRAM INDUKSI PEGAWAI BARU

Pegawai baru merupakan cikal bakal Insan BNI yang nantinya akan belajar, tumbuh dan berkembang di BNI. Sebagai tunas atau cikal bakal maka pembekalan *corporate value* sangat penting, karena dalam pembekalan tersebut akan ditanamkan nilai-nilai GCG dan Kode Etik yang diharapkan nantinya akan bermanfaat dalam perjalanan Karier di BNI. Pembekalan diberikan oleh Tim GCG yang bekerja sama dengan BNI *Corporate University* untuk memberikan jam pembekalan khusus terkait GCG dan Kode Etik bagi pegawai baru.

KOMITMEN TATA KELOLA

Sebagai wujud dari komitmen bersama dalam rangka mendukung penegakan dan penyelenggaraan GCG di BNI, maka setahun sekali di mana untuk tahun 2018 ini penandatanganan Komitmen Tata Kelola dilaksanakan pada bulan Februari. Setiap pegawai baik dari berbagai tingkat jenjang jabatan bersama-sama menandatangani Komitmen Tata Kelola yang didahului dengan pembacaan Komitmen dan sosialisasi Anti *Fraud Awareness*. Program ini dilakukan untuk menekankan kepada para Insan BNI akan pentingnya nilai-nilai dalam komitmen dimaksud. Komitmen Tata Kelola dimaksud menyatakan antara lain bahwa Insan BNI berkomitmen untuk:

1. Melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab sesuai dengan *corporate culture* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak memberikan, menjanjikan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun.
3. Menghindarkan diri dari segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan.
4. Bertindak adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*.
5. Berusaha dengan maksimal untuk mencegah kemungkinan terjadinya *Fraud*.
6. Bersedia untuk melaporkan segala hal yang dicurigai sebagai *Fraud* melalui media pelaporan yang ada di BNI.
7. Bersedia dikenakan sanksi apabila dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Insan BNI terbukti tidak melaksanakan komitmen sebagaimana tersebut di atas.

KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam rangka mendorong terciptanya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NPP :

Selaku pribadi dan dalam jabatannya tersebut di atas, secara bersungguh-sungguh dan dengan penuh kesadaran berkomitmen untuk :

- a. Melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), Prinsip 46, Kode Etik BNI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat;
- b. Tidak memberikan, menjanjikan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun kepada atau dari nasabah dana maupun nasabah debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan/atau pihak lainnya baik eksternal maupun internal;
- c. Menghindarkan diri dari segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas;
- d. Bertindak adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* serta mendorong seluruh mitra bisnis untuk mengedepankan praktik bisnis yang beretika, sehat dan transparan;
- e. Berusaha dengan maksimal untuk mencegah kemungkinan terjadinya *Fraud* serta tidak melakukan maupun mentolerir segala bentuk *Fraud* yang terjadi di lingkungan kerja;
- f. Bersedia untuk melaporkan segala hal yang dicurigai sebagai *Fraud* (yang terjadi di dalam lingkungan dan/atau yang menggunakan sarana BNI) melalui media pelaporan yang ada di BNI;
- g. Menggunakan media sosial secara profesional, tidak bertentangan dengan moralitas, menjaga nama baik dan rahasia perusahaan serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Bersedia dikenakan sanksi apabila dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya sebagai insan BNI terbukti tidak melaksanakan komitmen sebagaimana tersebut di atas.

Demikian komitmen ini dibuat dengan itikad baik, tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali.

Jakarta,
Yang menyatakan komitmen,

Mengetahui,



INTERNALISASI

Internalisasi bukan sebatas pada mengetahui, namun internalisasi telah sampai pada tahap pemahaman. Internalisasi GCG di BNI dilakukan melalui berbagai macam *tools*, sehingga memudahkan proses untuk mengadopsi nilai-nilai yang nantinya dapat diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. *Tools* yang digunakan antara lain dalam bentuk:

1. Pembacaan Prinsip 46 dan Kode Etik BNI pada setiap hari mutu yang diadakan 1 (satu) bulan sekali di tiap unit maupun pada *morning briefing*.
2. Metode *self education* melalui *e-learning* GCG dan *Corporate Culture* yang memberikan kemudahan pembelajaran GCG untuk para Insan BNI.
3. Penyebaran dan pemasangan poster serta *e-leaflet* anti gratifikasi dan penegakan GCG pada tiap unit dan BNI Forum sehingga para pegawai dapat *aware* setiap saat.
4. Penyebaran *pocket book* Kode Etik.
5. Kemudahan akses Kode Etik dan *Corporate Culture* melalui *website* BNI yang dapat diakses kapanpun dan di manapun.
6. Sebagai salah satu cara meningkatkan implementasi prinsip GCG di lingkungan kerja BNI, diselenggarakan kegiatan internal berupa kompetisi *Vlog* GCG dengan tema "Integritas Sebagai Gaya Hidup Insan BNI #IniIntegritasGue". Maksud dan tujuan dari diadakannya kompetisi tersebut adalah untuk menumbuhkan *awareness* segenap insan BNI untuk menjadikan sikap integritas sebagai gaya hidup serta meningkatkan kesertaan segenap Insan BNI untuk berperan aktif dan kreatif dalam *campaign* integritas sebagai gaya hidup Insan BNI.

BNI memahami bahwa *Corporate Culture* memberikan konsentrasi pada bentuk sikap (*attitude*). Bentuk sikap inilah yang akan membentuk kepribadian dari tiap individu pada suatu Perusahaan, sehingga kumpulan *attitude* ini membentuk interaksi antar individu dan integritas yang selanjutnya akan memunculkan karakter yang ada pada suatu Perusahaan.

EKSTERNALISASI

Eksternalisasi sendiri didefinisikan sebagai penyesuaian terhadap dunia luar yaitu 'dunia' selain diri sendiri. Sebagaimana diketahui, pihak atau 'dunia' luar Perusahaan Terbuka terdiri dari para *stakeholder* (Pemegang Saham, nasabah penyimpan, nasabah peminjam (debitur), rekanan/*vendor*/mitra kerja, pemerintah, pegawai, *customer*) dan masyarakat luas. Eksternalisasi GCG lekat kaitannya dengan prinsip transparansi dan kewajaran, di mana prinsip keterbukaan senantiasa tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank dan rahasia jabatan serta memperlakukan *stakeholder* dan masyarakat dengan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. BNI mengimplementasikan eksternalisasi GCG kepada *stakeholder* dan masyarakat luas melalui berbagai macam sarana yaitu sebagai berikut:

1. RUPS
RUPS merupakan sarana media komunikasi *stakeholder* kepada Perusahaan dan merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip GCG, karena di dalam RUPS dipaparkan perwujudan tanggung jawab Pengurus Perusahaan dari berbagai aspek. Penjelasan RUPS lebih rinci dapat dilihat pada Bagian RUPS bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.
2. Hak-Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan
Hak-hak Pemegang Saham senantiasa dilindungi dan difasilitasi, di BNI hak Pemegang Saham diimplementasikan di antaranya melalui dividen, hak mengajukan pertanyaan dalam RUPS, hak memperoleh informasi, dan hak untuk menyetujui/tidak menyetujui keputusan RUPS melalui kartu suara yang diberikan pada saat RUPS.
3. *Disclosure* dan Transparansi
Sebagai wujud pilar transparansi dalam prinsip GCG, maka BNI terus berupaya untuk memberikan keterbukaan informasi kepada para *stakeholder* dan masyarakat luas melalui berbagai macam sarana di antaranya melalui Laporan Tahunan, *website* BNI, media massa, *website* IDX, serta pemberitahuan kepada *regulator* melalui *hardcopy* maupun sarana pelaporan elektronik. Mengingat status BNI sebagai emiten, maka keterbukaan informasi ini dirasa sangat penting sebagai media komunikasi Perusahaan terbuka, keterbukaan informasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan pasar modal yang berlaku.
4. Perlakuan Setara
Seluruh Pemegang Saham BNI termasuk Pemegang Saham Minoritas dan Pemegang Saham Asing diperlakukan setara. Seluruh Pemegang Saham diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi. Perlakuan ini diterapkan di BNI dalam rangka pemberian informasi baik dalam rangka *Corporate Action* maupun dalam keterbukaan informasi yang diatur dalam ketentuan pasar modal. Seluruh masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan kritik/saran kepada Bank. Informasi, kritik dan/atau saran dapat diakses melalui *website* BNI dan layanan BNI Call 1500046.
5. Mewujudkan Citra Positif Bank
Tak dapat dipungkiri bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang mengandalkan sisi *trust*. Praktik GCG yang sehat dari seluruh pihak internal Perusahaan dan *stakeholder* dapat meningkatkan citra Perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang sehingga *trust* kepada bank akan terus terjaga. Dalam era digital ini, BNI berupaya memanfaatkan berbagai *tools* untuk meningkatkan citra positif bank melalui berbagai media di antaranya melalui media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio dan televisi) dan *cyber media* (*website*, *twitter*, *instagram*, *email*, portal berita, *facebook*, blog dan media sosial lainnya). Pemanfaatan media untuk mendukung praktik GCG dilakukan untuk penyebaran anti gratifikasi, GCG *awareness*, *service excellent*, WBS, dan sebagainya.



MONITORING IMPLEMENTASI GCG

Monitoring GCG di BNI
dilakukan antara lain dengan cara:

1

Optimalisasi fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab tiap pegawai, dilakukan di tiap unit oleh atasan langsung, unsur Pimpinan Unit, maupun Satuan Pengawasan Internal.

2

Penyusunan dan *monitoring Key Performance Indicator (KPI)*. Pimpinan unit memiliki peran aktif dalam proses *monitoring KPI*.

3

Branch Performance Reward yaitu *reward* yang dilakukan terhadap cabang-cabang dengan kriteria penilaian operasional, bisnis dan upaya perbaikan.

4

Know Your Employee (KYE) sebagai salah satu upaya pengawasan melekat terhadap pegawai. Atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawai di bawah supervisinya untuk memastikan tidak terjadi kecurangan/*Fraud* dengan memperhatikan apakah terdapat indikasi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut (*irregularities*).



GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

GCG *Assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau memetakan kondisi Perusahaan dalam penerapan GCG saat ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur Perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG *assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

Dalam rangka evaluasi penerapan GCG, BNI melaksanakan GCG *Assessment* yang dilaksanakan secara periodik dan konsisten setiap tahun yang terdiri dari *Self Assessment* sesuai ketentuan BI/OJK dan *Third Party Assessment*, sebagai berikut:

SELF ASSESSMENT

Berdasarkan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, serta Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, salah satu penilaian poin penilaian tingkat kesehatan Bank adalah penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Bank. Pelaksanaan *Self Assessment* tersebut dilakukan secara periodik setiap semester yaitu pada bulan Juni dan Desember pada tahun berjalan.

Penilaian sendiri ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan (*strength*) dan kelemahan pelaksanaan GCG di BNI yang ditinjau dari 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Governance Structure

Penilaian *Governance Structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank.

Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

Aspek *Governance Structure* adalah penilaian terhadap pemenuhan struktur dan infrastruktur Perusahaan dalam menerapkan GCG yang diukur melalui struktur tata kelola yang meliputi:

- a. Komposisi Pemegang Saham serta Organ Perusahaan; struktur dan fungsi penanggung jawab dalam rangka pelaksanaan GCG; struktur penanggung jawab penegakkan etik; struktur penanggung jawab keterbukaan informasi; struktur penanggung jawab pengawasan dan audit; struktur penanggung jawab pengelolaan SDM; struktur penanggung jawab operasional/produksi; struktur penanggung jawab pemasaran; struktur penanggung jawab keuangan; struktur manajemen risiko, struktur penanggung jawab pengelolaan teknologi informasi; struktur penanggung jawab hubungan *stakeholders*; struktur penanggung jawab pengadaan barang dan jasa; serta struktur penanggung jawab manajemen perubahan.
- b. Pemenuhan terhadap kebijakan-kebijakan Perusahaan terutama terkait penegakan fungsi GCG dalam melaksanakan operasional Perusahaan, yang di antaranya mencakup pedoman dan kebijakan terkait GCG, penegakan etika, keterbukaan informasi, pengawasan dan audit serta kepatuhan, pengelolaan SDM, operasional/produksi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, manajemen risiko, tata kelola teknologi informasi, hubungan dengan *stakeholders*.

2. Governance Process

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Aspek *Governance Process* adalah penilaian terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme Perusahaan dalam menerapkan GCG yang diukur melalui:



- a. Proses pelaksanaan implementasi GCG, penegakan etika, keterbukaan informasi, pengawasan dan audit serta kepatuhan, pengelolaan SDM, operasional/produksi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, manajemen risiko, tata kelola teknologi informasi, hubungan dengan *stakeholders* dan sebagainya.
 - b. Mekanisme tata kelola Perusahaan yang mencakup mekanisme dan proses implementasi GCG, penegakan etika, keterbukaan informasi, pengawasan dan audit serta kepatuhan, pengelolaan SDM, operasional/produksi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, manajemen risiko, pengelolaan teknologi informasi, hubungan *stakeholder* dan sebagainya.
3. *Governance Outcome*
Aspek *Governance Outcome* adalah penilaian terhadap hasil pelaksanaan sistem dan mekanisme Perusahaan dalam menerapkan GCG yang diukur melalui Hasil pelaksanaan implementasi GCG, mencakup *output* dan hasil dari proses implementasi GCG penegakan etika, keterbukaan informasi, pengawasan dan audit serta kepatuhan, pengelolaan SDM, operasional/produksi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, manajemen risiko, tata kelola teknologi informasi, hubungan dengan *stakeholders* dan sebagainya.

Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan GCG BNI telah melakukan penilaian terhadap implementasi pelaksanaan GCG. Adapun penilaian tersebut bertujuan untuk mengukur proses pelaksanaan GCG di BNI, penilaian dilakukan melalui *self assessment* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengukur pelaksanaan GCG dari 11 (sebelas) aspek yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal.
11. Rencana Strategis Bank.

Sesuai dengan Peraturan OJK, Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan GCG. Hasil GCG *Self Assessment* selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2016
Nilai komposit	2	2	2

Berdasarkan ketiga aspek penilaian tersebut, melalui *self assessment* GCG pada tahun 2018, BNI telah menetapkan skor implementasi pelaksanaan GCG sebagai berikut.

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
Individual	2	Menunjukkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. Saat ini Bank sedang terus melakukan upaya-upaya perbaikan (<i>corrective action</i>) untuk menindaklanjuti hasil temuan Regulator.



Penetapan skor tersebut di atas didasari pada kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) pelaksanaan implementasi GCG di BNI sebagai berikut:

Rekomendasi yang didapatkan BNI dari *self assessment* dan telah ditindaklanjuti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kekuatan	Kelemahan
<p>Governance Structure</p> <p>Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung pelaksanaan Tata Kelola di setiap lini kerja dan operasional Bank.</p>	<p>Governance Structure</p> <p>Tidak ada</p>
<p>Governance Process</p> <p>Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada Pihak Regulator serta pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban kepada segenap <i>stakeholder</i>.</p>	<p>Governance Process</p> <p>Secara keseluruhan <i>governance process</i> dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan Operasional Bank, dalam pelaksanaannya masih terdapat implementasi yang belum sesuai dikarenakan <i>Human Error</i>, sistem dan kebijakan yang saat ini belum sepenuhnya dipahami oleh segenap pegawai.</p>
<p>Governance Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementasi GCG secara umum baik, yang didukung oleh hasil pemeringkatan pihak independen. Perolehan <i>score</i> CGPI BNI mengalami peningkatan dari 88,38 menjadi 88,94 dengan predikat Indonesia <i>most trusted Company</i>, serta perolehan <i>Score</i> ACGS BNI yang mengalami peningkatan dari 88,60 menjadi 91,58 dengan predikat <i>very good</i>. Penurunan jumlah sanksi dan teguran dari pihak regulator jika dibandingkan pada periode Januari – Desember 2017. 	<p>Governance Outcome</p> <p>Sampai dengan Desember 2018 masih terdapat teguran/denda serta pelanggaran yang dilakukan oleh internal BNI, namun frekuensi dan nominal denda yang dikenakan mengalami penurunan secara signifikan dibanding dengan periode Desember 2017.</p>

Rekomendasi yang didapatkan BNI dari *self assessment* dan telah ditindaklanjuti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kelemahan	Tindak Lanjut
<p>Secara keseluruhan <i>governance process</i> dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan Operasional Bank, dalam pelaksanaannya masih terdapat implementasi yang belum sesuai dikarenakan <i>Human Error</i>, sistem dan kebijakan yang saat ini belum sepenuhnya dipahami oleh segenap pegawai.</p>	<p>Dalam rangka peningkatan pemahaman SOP oleh segenap pegawai, BNI telah mewajibkan segenap pegawai untuk meningkatkan <i>awareness</i> melalui <i>e learning mandatory</i>, sehingga kesalahan yang diakibatkan <i>human error</i> dapat ditekan setiap tahunnya</p>
<p>Sampai dengan Desember 2018 masih terdapat teguran/denda serta pelanggaran yang dilakukan oleh internal BNI, namun frekuensi dan nominal denda yang dikenakan mengalami penurunan secara signifikan dibanding dengan periode Desember 2017.</p>	<p>Peningkatan supervisi oleh Unit <i>Compliance</i> akan senantiasa ditingkatkan, hal ini terbukti dengan penurunan jumlah sanksi dan denda yang signifikan daripada periode sebelumnya.</p>

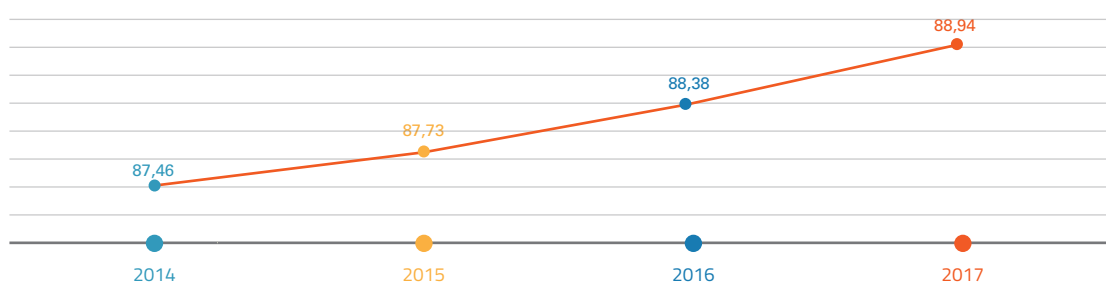


CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX (CGPI)

Dalam rangka menjaga kepercayaan segenap *stakeholder*, BNI juga aktif mengikuti *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diadakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Keikutsertaan BNI dalam program tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Implementasi GCG di BNI. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan bagi BNI untuk melakukan penyempurnaan Implementasi GCG ke depannya.

CGPI 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018, mengangkat tema Transformasi Model Bisnis dalam Kerangka *Good Corporate Governance*. Aspek penilaian pada CGPI 2017 mencakup struktur governansi (*governance structure*), proses governansi (*governance process*), dan hasil governansi (*governance outcome*). Penilaian CGPI menggunakan acuan penerapan GCG yang bersifat wajib (*mandatory*) dan praktik terbaik yang berlaku umum (*best practices*) serta pendekatan dengan perspektif *stakeholder* di mana hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) semakin penting dalam menjaga kesinambungan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang.

BNI telah menyelesaikan seluruh persyaratan dan tahapan penilaian CGPI Tahun Buku 2017 yang hasilnya menunjukkan capaian sangat baik dan mendapat predikat "Sangat Terpercaya (*Most Trusted Company*)". Hasil Penilaian CGPI mulai dari Tahun Buku 2014 – 2017 adalah sebagai berikut.



Hasil Penilaian CGPI Tahun Buku 2016-2017

Indikator	Tahun Buku 2016	Tahun Buku 2017
<i>Governance Structure</i>	29,06	23,03
<i>Governance Process</i>	29,73	38,14
<i>Governance Outcome</i>	29,59	27,77
Skor CGPI	88,38	88,94

Hasil Penilaian CGPI Tahun Buku 2014-2015

Aspek Penilaian	Tahun Buku 2014	Tahun Buku 2015
<i>Self Assessment/Survey</i>	18,17	26,94
Sistem Dokumentasi	23,55	22,35
Makalah	22,01	13,12
Observasi	23,73	25,33
Skor CGPI	87,46	87,73

Pada periode 4 (empat) tahun terakhir, penilaian yang diberikan oleh IICG dalam keikutsertaan BNI dalam CGPI selalu meningkat, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan GCG di BNI semakin baik dari tahun ke tahun.



Rekomendasi yang didapatkan BNI dari CGPI tahun buku 2016 yang dilaksanakan tahun 2017 dan telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Melakukan pemetaan perkembangan regulasi dan konsekuensinya bagi bisnis dan operasional Perusahaan dalam rangka menjamin pemenuhan kepatuhan secara berkelanjutan.	Guna memetakan perkembangan Regulasi BNI telah memiliki Divisi <i>Policy Governance</i> yang selalu melakukan <i>review</i> terhadap perkembangan Regulasi dengan bekerja sama dengan Divisi Kepatuhan untuk selalu memastikan pemenuhan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
2.	Melakukan kembali pemetaan <i>stakeholders</i> dalam rangka menjamin hubungan yang harmonis, sinergis, dan berorientasi pada etika dan penciptaan nilai secara berkelanjutan.	BNI telah melakukan pemetaan <i>stakeholder</i> yang dimuat dalam rencana bisnis Bank yang di- <i>review</i> secara berkala untuk kemudian disampaikan kepada Regulator.
3.	Melakukan integrasi sistem dan rantai nilai Perusahaan dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja Perusahaan yang diharapkan.	Dalam rangka peningkatan efisiensi, BNI telah melakukan integrasi proses bisnis sehingga mampu memaksimalkan proses bisnis dan meningkatkan pendapatan yang tercermin dari peningkatan laba yang diperoleh oleh BNI.
4.	Melakukan pemutakhiran kebijakan, pedoman, dan sistem tata kelola Perusahaan dalam rangka menyempurnakan kelemahan sistem dan mencegah timbulnya dampak negatif terhadap bisnis dan operasional Perusahaan.	Setiap dampak risiko telah dilakukan antisipasi, melalui sinergi unit bisnis dengan unit risiko untuk meminimalisir timbulnya dampak <i>negative</i> bagi bisnis Perseroan, selain itu upaya peningkatan kesadaran terhadap budaya tata kelola selalu dilakukan secara rutin dengan menggunakan cara-cara kekinian sehingga dapat dengan mudah diterima oleh segenap insan BNI.
5.	Melakukan peningkatan pemahaman dan kompetensi terhadap GCG di lingkungan internal serta <i>stakeholders</i> eksternal Perusahaan melalui berbagai sosialisasi dan keterikatan yang baik.	Dalam rangka peningkatan pemahaman bagi segenap insan BNI serta seluruh <i>stakeholder</i> , Perseroan menggunakan cara-cara kekinian dengan memaksimalkan fungsi <i>media social</i> sebagai program peningkatan pemahaman tata kelola di BNI.
6.	Mengimbu dan mendorong Perusahaan afiliasi dan kolega untuk memiliki komitmen dan upaya yang sama dalam penerapan GCG dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif bagi penerapan GCG dan praktik Keberlanjutan.	Dalam rangka mendorong peningkatan budaya tata kelola di Perusahaan anak, maka Perusahaan telah membentuk konglomerasi Keuangan BNI yang beranggotakan seluruh Perusahaan Anak di <i>sector</i> keuangan, dengan salah satu tujuan terdapat standarisasi pelaksanaan tata kelola.

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

Penilaian atas implementasi GCG di BNI, juga dilaksanakan berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang didasarkan pada Laporan Tahunan dan *Website* Perusahaan. Penilaian ACGS dilaksanakan oleh IICD (*The Indonesian Institute for Corporate Directorship*) dengan menggunakan komponen *scorecard* yang terdiri dari:

1. Hak-hak Para Pemegang Saham.
2. Perlakuan yang Setara Terhadap Para Pemegang Saham.
3. Peran Para Pemangku Kepentingan.
4. Pengungkapan dan Transparansi.
5. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap praktik GCG BNI berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* Tahun Buku 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018, BNI mendapatkan skor 91,58.

No.	Komponen Penilaian	Tahun Buku 2017	Tahun Buku 2016
1.	Hak-hak Pemegang Saham	9,05	9,60
2.	Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham	6	9,17
3.	Peran Pemangku Kepentingan	15	10
4.	Keterbukaan dan Transparansi	22,66	22,56
5.	Tanggung Jawab Dewan Komisaris	31,88	30,27
6.	Bonus	9	7
7.	Penalti	(2)	0
Total Skor		91,58 (Very Good)	88,60 (Good)



Rekomendasi yang didapatkan BNI dari ACGS dan telah ditindaklanjuti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Untuk menjamin hak-hak Pemegang Saham, BNI diharapkan dapat memperhatikan waktu pengumuman notulen RUPS, yaitu selambatnya 1 (satu) hari kerja.	Proses pengumuman ringkasan risalah RUPS saat ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, namun BNI selalu berupaya untuk dapat mempercepat penyampaian informasi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Luar Biasa sehingga dapat memenuhi kriteria ini.
2	Dalam dokumen undangan RUPS, direkomendasikan beberapa hal ini untuk diungkapkan secara lebih rinci: (1) Profil Komisaris/Direksi yang akan dipilih dalam RUPS, seperti usia, kualifikasi, pengalaman kedirektoran di Perusahaan-Perusahaan terbuka, (2) Pengungkapan nama auditor eksternal yang akan digunakan di tahun buku berikutnya, (3) Penjelasan kebijakan pemberian dividen pada agenda RUPS, (4) Jumlah dividen yang akan dibagikan.	Berkenaan dengan penyampaian profil <i>Board</i> yang akan dipublikasikan saat penyampaian undangan RUPS, akan menjadi bahan perbaikan kami dalam penyelenggaraan RUPS di masa yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bank BUMN.
3	BNI juga disarankan untuk memiliki kebijakan yang mengatur pelaporan transaksi perdagangan saham Perusahaan oleh orang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.	Mekanisme pelaporan transaksi maksimal 3 (tiga) hari kerja oleh orang dalam telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
4	Perlu diatur ketentuan perihal pemberian fasilitas pinjaman bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam syarat wajar (yakni pada periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga pasar/normal tanpa terkecuali).	Guna memfasilitasi hal tersebut, BNI telah menyusun ketentuan pemberian fasilitas pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
5	BNI disarankan untuk menambahkan informasi di dalam <i>Annual Report</i> terkait informasi rincian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.	Bank telah menginformasikan besaran Remunerasi CEO, sebagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6	BNI disarankan untuk mengungkapkan <i>fee</i> yang diberikan kepada Auditor Eksternal apabila ada jasa <i>non-audit</i> yang diberikan, jika tidak, adanya pernyataan yang diungkapkan bahwa Perusahaan tidak menerima jasa <i>non-audit</i> dari Auditor Eksternal.	Akan menjadi perhatian kami dalam penyusunan Laporan Tahunan selanjutnya.
7	BNI disarankan untuk mempercepat penerbitan Laporan Tahunan selambatnya 120 hari sejak tanggal akhir periode laporan keuangan berakhir.	Bank telah menerbitkan Laporan Tahunan < 120 hari sejak tanggal akhir periode laporan keuangan berakhir.
8	Dewan agar secara kontinu setiap tahunnya mereview visi, misi dan strategi Perusahaan.	Untuk tahun 2018, Direksi telah melakukan <i>review</i> terhadap visi dan misi yang menjadi satu bagian dengan Rencana Bisnis Bank.
9	BNI disarankan untuk membuat rencana rapat Direksi secara terperinci sebelum tahun buku berjalan sehingga anggota Direksi dapat merencanakan lebih awal kehadirannya pada rapat tersebut.	Rencana jadwal Rapat Direksi akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2018.
10	Menyusun kebijakan untuk menetapkan batas minimum tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris (minimal 75% dari total rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 periode).	Bank telah menetapkan aturan dan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang di dalamnya telah menetapkan batas minimal kehadiran rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11	Perlu diatur adanya kebijakan yang mensyaratkan mengenai syarat kuorum dalam rapat pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris, yakni minimum 2/3 anggota yang harus hadir.	Bank telah menetapkan aturan dan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang di dalamnya telah menetapkan batasan minimal pengambilan keputusan rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12	Sirkulasi materi rapat hendaknya dapat diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris paling lambat dalam jangka waktu lima (5) hari (kerja) sebelum pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.	Bank telah menetapkan aturan dan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang di dalamnya telah menetapkan penyampaian materi rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13	Pemberian kompensasi dalam bentuk bonus merupakan praktik yang kurang baik, karena bonus tersebut terkait dengan kinerja Perusahaan, yaitu kinerja Direksi. Disarankan agar kompensasi kepada Dewan Komisaris, apalagi bagi anggota Komisaris yang independen, tidak diberikan dalam bentuk bonus karena akan memengaruhi independensi Komisaris Independen.	Pemberian remunerasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
14	Dewan Komisaris atau Komite Audit harus menyatakan dan mengungkapkan pernyataannya mengenai perihal kecukupan pengendalian internal Perusahaan atau sistem pengelolaan risiko Perusahaan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.	Kecukupan pengendalian internal telah dimuat dalam setiap Laporan Tahunan Perseroan.
15	BNI disarankan untuk membuat rencana suksesi bagi Direktur Utama, anggota Direksi, maupun manajemen kunci Perusahaan yang akan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Rencana yang dimaksud adalah proses indentifikasi dan pengembangan karyawan yang potensial untuk menjadi suksesor Direktur Utama, anggota Direksi, maupun Manajemen Kunci Perusahaan.	Bank telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas menyiapkan suksesi Direktur Utama, anggota Direksi, maupun Manajemen Kunci Perusahaan.
16	BNI disarankan untuk memuat tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama dalam pedoman kerja Dewan Komisaris dan mengungkapkannya ke publik.	Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama telah dimuat dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang bisa di <i>download</i> dalam <i>website</i> BNI.
17	Penilaian kinerja Presiden Direktur oleh Dewan Komisaris perlu dilakukan dan diungkapkan (bukan sekedar penilaian untuk Direksi yang dilakukan secara kolegal saja).	Penilaian Kinerja Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
18	BNI disarankan untuk melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap setiap/masing-masing anggota Dewan Komisaris (atau mengungkapkannya jika sudah ada praktik ini) serta mengungkapkan proses yang terjadi selama penilaian kinerja tersebut.	Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
19	BNI disarankan untuk membuat kebijakan yang mengatur mengenai komposisi jumlah keanggotaan dalam Komite Nominasi/Remunerasi yang mayoritas anggotanya adalah Komisaris Independen.	Kebijakan komposisi dan Jumlah Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah di atur sesuai ketentuan perundang – undangan.
20	Untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit, Perusahaan disarankan untuk menunjuk anggota Komite Audit yang memiliki kualifikasi keahlian di bidang akuntansi.	Komposisi sekaligus kualifikasi Komite Audit telah disesuaikan dengan kebutuhan Bank untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit.
21	Terkait dengan Komite Audit, disarankan untuk menambahkan peran atau fungsinya, yakni tidak hanya merekomendasikan penunjukan Auditor Eksternal saja, namun juga sampai pada pemberian rekomendasi untuk pemberhentian auditor Eksternal Perusahaan. Peran atau fungsi tersebut seharusnya dapat dituangkan atau ditetapkan secara jelas dalam piagam Komite Audit.	Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai ketentuan yang berlaku telah tertuang dalam piagam Komite Audit BNI yang dapat diakses di <i>website</i> BNI.
22	BNI disarankan untuk menggunakan teknologi informasi pada saat melakukan <i>voting</i> pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.	Pelaksanaan <i>voting</i> dengan menggunakan Teknologi Informasi akan menjadi catatan kami dalam pelaksanaan RUPS selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23	Peraturan baru Otoritas Jasa Keuangan tentang RUPS yang dikeluarkan pada bulan Desember 2016 mengharuskan Perusahaan mengirimkan panggilan RUPS tahunan kepada para Pemegang Saham paling sedikit dalam 21 (dua puluh satu) hari kalender. Namun, mekanisme panggilan RUPS itu sendiri memungkinkan Perusahaan untuk mengirimkan kepada para Pemegang Saham dalam 28 (dua puluh delapan) hari kalender.	Pelaksanaan pemanggilan RUPS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
24	BNI dapat mempertimbangkan diversifikasi <i>gender</i> di Dewan Komisaris, dengan meningkatkan pengangkatan/penunjukan wanita sebagai anggota Dewan Komisaris Independen.	Akan menjadi perhatian BNI untuk ke depannya.
25	Sebagai salah satu Perusahaan besar yang ada di Indonesia, BNI mempunyai kemampuan untuk menggunakan <i>professional search firm</i> dalam melakukan perekrutan calon anggota Dewan Komisaris.	Akan menjadi perhatian BNI untuk ke depannya.
26	BNI disarankan untuk mengungkapkan rincian remunerasi yang diterima oleh Direktur Utama.	Akan menjadi perhatian BNI untuk ke depannya.
27	BNI dapat memperkuat peran Dewan Komisaris lewat pemberdayaan Komite Nominasi dengan komposisi anggota 100 persen independen. Anggota yang independen tidak harus seorang Komisaris Independen, namun dapat berasal dari pihak luar yang memenuhi syarat independensi.	Akan menjadi perhatian BNI untuk ke depannya.



KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) merupakan sistem pengelolaan dan pengendalian kinerja yang disusun oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) sebagai pedoman standar bagi KBUMN dan seluruh BUMN dalam membangun, menata, dan memberdayakan kesisteman dan sumber daya Perusahaan untuk mencapai kinerja unggul.

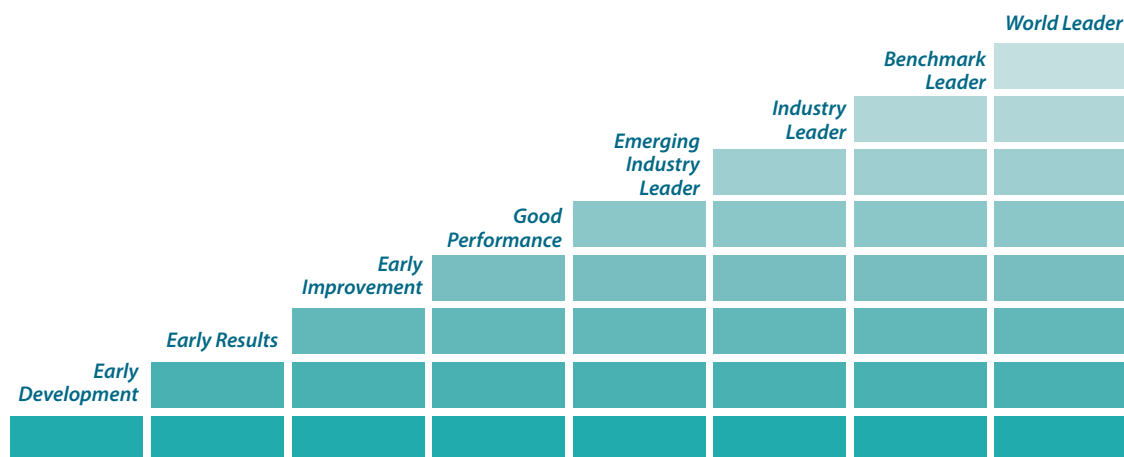
Kriteria penilaian dalam KPKU diadopsi dan diadaptasi dari *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence* (MBCfPE) yang telah mulai diterapkan di BUMN sejak tahun 2012 melalui Surat Kementerian BUMN No. S-153/S.MBU/2012, tanggal 19 Juli 2012.

Sejak tahun 2005, BNI menjadikan sistem evaluasi kinerja *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence* (MBCfPE) sebagai bagian dari kerangka kerja pengembangan kinerja Perusahaan, hingga dilanjutkan implementasinya dalam bentuk KPKU BUMN.

Kriteria penilaian dalam KPKU terdiri dari sejumlah pertanyaan yang mewakili aspek-aspek fundamental pengelolaan Organisasi/Perusahaan dalam konteks pencapaian kinerja unggul. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikelompokkan ke dalam tujuh Kategori, yaitu:

1. Kepemimpinan.
2. Perencanaan Strategis.
3. Fokus Pelanggan.
4. Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan.
5. Fokus Tenaga Kerja.
6. Fokus Operasi.
7. Hasil-Hasil Usaha.

Bagi BNI selaku salah satu BUMN yang mengimplementasikan KPKU, proses evaluasi terhadap ketujuh kategori di atas akan menghasilkan umpan balik berupa rekomendasi perbaikan kinerja (*OFI/Opportunity for Improvement*) dan *rating* kinerja dengan standar penilaian kelas dunia, karena KPKU BUMN disarikan dari *Malcolm Baldrige Criteria* yang memang didesain untuk menilai kinerja Perusahaan berdasarkan karakteristik Perusahaan kelas dunia. *Rating* kinerja tersebut dibagi dalam beberapa jenjang, yaitu:



Sejak menerapkan sistem MBCfPE di tahun 2005, hasil *assessment* menunjukkan skor KPKU BNI yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Hasil *assessment* KPKU tahun 2016 yang berlangsung pada akhir Januari 2017 telah berhasil memperoleh *Band Score* "Emerging Industry Leader". Untuk tahun 2018, tidak dilakukan *assessment* KPKU, maka masih berlaku penilaian hasil *assessment* tahun sebelumnya.

Melalui penerapan *framework* KPKU, BNI mendapatkan gambaran kondisi Perusahaan yang komprehensif dari berbagai aspek, baik proses maupun hasil. Melalui potret kondisi Perusahaan tersebut, BNI dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan Perusahaan. Kelemahan Perusahaan yang terbungkus dalam OFI menjadi pembelajaran, sekaligus sumber inspirasi dan pemicu bagi BNI untuk melakukan perbaikan dan *improvement* dalam berbagai bidang.

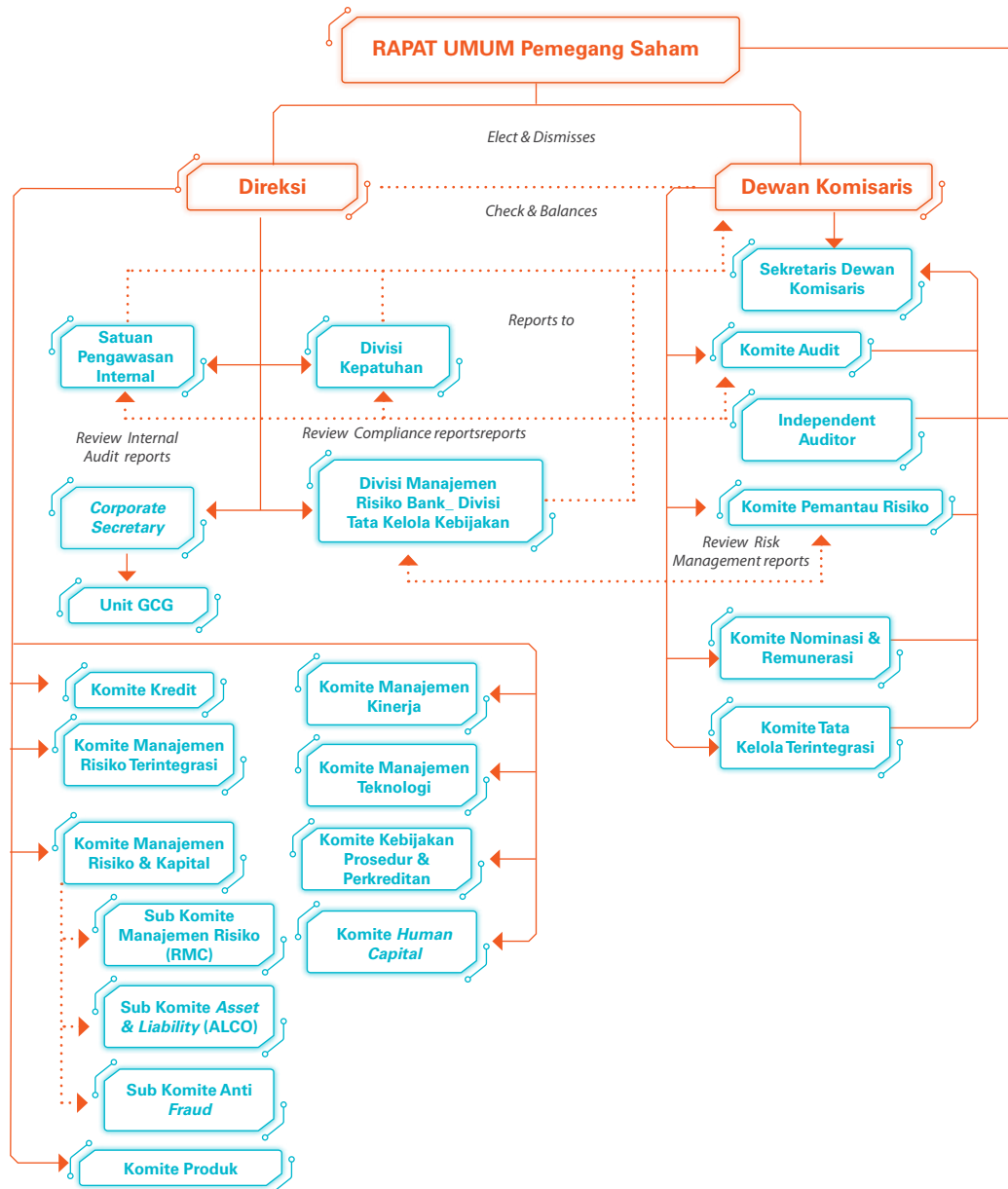


ORGAN PERUSAHAAN DAN PROSES PENERAPAN **GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Dalam melaksanakan kepengurusan BNI, Direksi didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari organ utama dan organ pendukung sehingga manajemen menjadi efektif. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kepenasehatan, Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

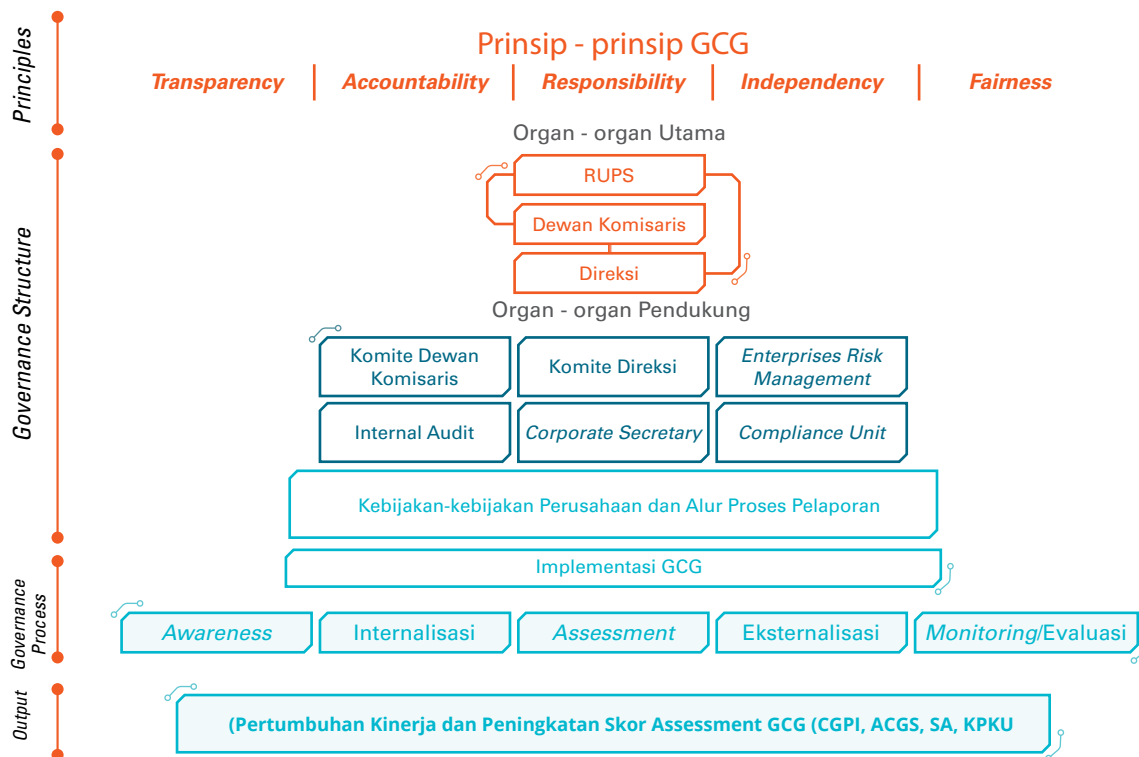
STRUKTUR ORGAN PERUSAHAAN

Struktur organ Bank BNI adalah sebagai berikut.





Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di BNI pada dasarnya mengikuti *roadmap* yang telah disusun, melalui 3 (tiga) kelompok proses utama (*structure, process* dan *outcome*), serta mengacu pada prinsip-prinsip GCG.



Proses penerapan GCG oleh organ Perusahaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya didukung oleh berbagai kebijakan/pedoman yang disebut dengan infrastruktur GCG. Infrastruktur GCG yang telah dimiliki oleh BNI antara lain adalah:

1. Anggaran Dasar Bank No. 52 tanggal 22 Mei 2018 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0012962.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018.
2. Kode Etik BNI sebagai Pedoman Perilaku Insan BNI (*Code of Conduct*).
3. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang *update*-nya telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/0049/DK/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
4. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi yang *update*-nya telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi BNI No. KP/228/DIR/R tanggal 29 Juni 2018.
5. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Direksi No. DIR/796 tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/140 tanggal 13 Desember 2018.
6. Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Dewan Komisaris No. DK/27 tanggal 8 Maret 2016 dan dituangkan dalam e-PP No. IN/239/ERM/001 tanggal 28 April 2016.
7. Pedoman Benturan Kepentingan yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan *Online* (e-PP) No. IN/695/KMP/001 tanggal 29 Oktober 2014.
8. Pedoman Sekretaris Perusahaan yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/356/DIR/R tanggal 2 September 2016.
9. Pedoman Perusahaan Transaksi Efek yang Dilarang dan Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.
10. Piagam Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/009/DK/2016 tanggal 14 April 2016.
11. Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/024/DK/2016 tanggal 21 Juli 2016.
12. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP 027/DK/2015 tanggal 21 September 2015.
13. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/006/DK/2015 tanggal 22 Juni 2015.
14. *Corporate Governance Handbook* No. KEP/001/DK dan KP/001/Dir tanggal 3 Januari 2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola.
15. BNI *Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML and CFT) Policy Statement*.



16. Pedoman Perusahaan terkait Prosedur Pengadaan yang telah dituangkan dalam e-PP Pengadaan.
17. Kebijakan *Whistleblowing System* yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. KEP/019/DK/2010 dan No. KP/279/DIR tanggal 1 Desember 2010.
18. Pedoman Kerja Komite Risiko dan Kapital (KRK) yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/483/DIR/R tanggal 21 Desember 2016.
19. Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/193/DIR/R tanggal 26 Mei 2015.
20. Pedoman Kerja Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan yang di dalamnya terdapat Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP) yang telah disetujui oleh Direksi melalui SK Direksi No. KP/253/DIR/R tanggal 1 Juni 2016.
21. Pedoman Komite Manajemen Kinerja yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/466/DIR/R tanggal 5 Oktober 2012 perihal *Performance Management Committee* (PMC) BNI.
22. Pedoman Komite Produk yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/448/DIR/R tanggal 20 September 2012 perihal *Product Committee* (PRC) BNI.
23. Pedoman Komite Manajemen Teknologi yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/201/DIR/R tanggal 14 Juni 2011 yang telah diperbaharui melalui Memo Divisi Perencanaan No. REN/2/234/R tanggal 04 Mei 2016 perihal Perubahan Keanggotaan Komite.
24. Pedoman Aktivitas Pemantauan GCG dan Laporan Penilaian Sendiri yang tertuang dalam e-PP No. IN/462/KMP/001 tanggal 22 Oktober 2015.
25. Pedoman Aktivitas Hubungan Investor yang tertuang dalam e-PP No. IN/41/KMP/001 tanggal 26 Januari 2015.
26. Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang tertuang dalam e-PP No. IN/92/REN/001 tanggal 17 Maret 2014.
27. Pedoman Pengelolaan Kebijakan Akuntansi yang tertuang dalam e-PP No. IN/406/PKU/001 tanggal 24 Agustus 2016.
28. Pedoman Kepegawaian tentang Penilaian Kinerja yang tertuang dalam e-PP No. IN/99/HCT/001 tanggal 29 Februari 2016.
29. Pedoman Kepegawaian tentang Tata Tertib Pegawai No. IN/648/HCT/001 tanggal 10 Oktober 2014.

MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham merupakan seorang atau satu badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham Perseroan dan merupakan pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham. Saham Bank adalah saham atas nama yang terdiri dari:

1. Saham Seri A Dwiwarna yang khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia, dan
2. Saham Seri B dan Saham Seri C adalah saham biasa yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan masyarakat.

HAK PEMEGANG SAHAM

Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B, dan Pemegang Saham Seri C mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

Berdasarkan Anggaran Dasar, Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai berikut:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Persetujuan perubahan permodalan.
 - c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran.
 - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada Perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - h. Persetujuan penggunaan laba.
 - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perusahaan dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.



Selain daripada hak istimewa yang dimiliki Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B dan Pemegang Saham Seri C memiliki hak yang sama jika tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar, yakni sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan saham.
2. Kesempatan untuk mengajukan agenda pada RUPS.
3. Kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila Pemegang Saham berhalangan hadir dalam RUPS.
4. Hak untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS.
5. Dalam forum RUPS, berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Bank dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Bank.
6. Kesempatan untuk memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain pada setiap usulan putusan agenda RUPS.
7. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
8. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
9. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.
10. Kesempatan untuk melihat daftar Pemegang Saham dan daftar khusus.

KEBIJAKAN HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka penerapan prinsip tata kelola yang baik khususnya pada aspek keterbukaan, Bank senantiasa berupaya untuk menjamin transparansi informasi Perusahaan baik finansial maupun non finansial secara wajar dan tepat waktu, kepada seluruh Pemegang Saham, termasuk Pemegang Saham Minoritas dan Pemegang Saham Asing.

Dalam rangka mewujudkan transparansi informasi tersebut, Sekretaris Perusahaan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi Perusahaan kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan bertugas sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, termasuk kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk membina hubungan dengan Pemegang Saham yang intensif, sistematis, dan terencana, Bank memiliki kebijakan internal Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan No. IN/794/KMP/001 tanggal 23 Desember 2014.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS merupakan organ Perseroan terbatas yang tertinggi di mana organ ini mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris. Dengan demikian, RUPS merupakan organ yang tertinggi di dalam Bank. RUPS merupakan organ yang sangat penting dalam Bank mengingat peranannya dalam menentukan arah dan tujuan Bank sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank. Selanjutnya, RUPS juga menentukan hal-hal penting terkait dengan Bank.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan RUPS Bank terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya yang biasa disebut juga sebagai RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

LANDASAN HUKUM PENYELENGGARAAN RUPS

Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank BNI dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara .
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

PELAKSANAAN RUPS

BAHAN MATA ACARA RUPS

1. Bahan Mata Acara RUPS adalah dokumen yang berisikan susunan Mata Acara Rapat yang disertai landasan hukum serta penjelasan-penjelasan terkait Mata Acara RUPS.
2. Perseroan menyediakan bahan mata acara RUPS yang dapat diakses oleh Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
3. Bahan Mata Acara RUPS tersedia di Kantor Pusat Perseroan dan dapat diakses di situs Web Perseroan, baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
4. Dalam hal Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi BUMN Terbuka yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS, yakni sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

TATA TERTIB RUPS

1. Tata Tertib RUPS dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Tata Tertib RUPS dibagikan kepada Pemegang Saham/ Kuasanya pada saat registrasi.
3. Tata Tertib RUPS mengatur antara lain peserta rapat yang berhak hadir dalam RUPS, Pimpinan Rapat, bahasa yang digunakan dalam RUPS, kuorum pelaksanaan rapat dan pengambilan keputusan, mekanisme tanya jawab dan pemberian tanggapan, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan suara.
4. Pokok-pokok Tata Tertib RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.
5. Sesuai dengan ketentuan Tata Tertib RUPS yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, pada saat pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham mengenai:
 - a. Kondisi umum Perseroan secara singkat.
 - b. Mata acara RUPS.
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS, dan
 - d. Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

PEMIMPIN RAPAT

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1.1) Anggaran Dasar Perseroan, yang memimpin RUPS adalah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN

Kuorum dalam RUPS harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

PROSEDUR PENGAJUAN TANYA JAWAB DAN TANGGAPAN

1. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam RUPS hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi RUPS.
2. Formulir pertanyaan dan/atau tanggapan disampaikan kepada Pemegang Saham atau kuasanya pada saat registrasi RUPS.
3. Setelah Pimpinan RUPS atau pihak yang ditunjuk Pimpinan RUPS menyampaikan usulan mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam RUPS, Pimpinan RUPS akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dimaksud.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, Pimpinan RUPS mempersilahkan Pemegang Saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan kepada Pimpinan RUPS secara tertulis dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara RUPS yang sedang dibicarakan.

Pada RUPS Tahunan BNI tanggal 20 Maret 2018, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA

1. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabah pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
3. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setuju.
5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain atas usulan keputusan RUPS, Pimpinan RUPS mempersilahkan Pemegang Saham/Kuasanya untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat untuk dilakukan penghitungan suara. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan dinyatakan setuju.
6. Setelah dilakukan penghitungan suara, dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan RUPS akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
7. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

PROSEDUR PERHITUNGAN SUARA

Notaris melakukan perhitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek, yaitu dengan cara menghitung kartu suara tidak setuju atau suara abstain yang diserahkan oleh Pemegang Saham/Kuasanya melalui petugas Rapat. Perhitungan suara dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada Kartu Suara dimaksud dengan alat pemindai *barcode*. Suara abstain dijumlahkan ke dalam suara Setuju atau ke dalam suara Tidak Setuju, mana yang lebih tinggi. Setelahnya, Pimpinan RUPS akan meminta Notaris untuk melaporkan hasil perhitungan suara. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan RUPS dapat diambil.



KETERLIBATAN PIHAK INDEPENDEN DALAM RUPS

Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perusahaan/Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Biro Administrasi Efek membantu Perusahaan/Emiten dalam penyelenggaraan RUPS, yakni antara lain dalam:

1. Notaris
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal. Notaris turut berperan untuk meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung dan memperhatikan syarat formalitas pelaksanaan RUPS agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
2. Biro Administrasi Efek
Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perusahaan/Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Biro Administrasi Efek membantu Perusahaan/Emiten dalam penyelenggaraan RUPS, yakni antara lain dalam:
 - a. Mempersiapkan *proxy* dari Pemegang Saham Minoritas.
 - b. Menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
 - c. Memvalidasi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS dan meregistrasikannya.
 - d. Melakukan penghitungan kehadiran Pemegang Saham sehubungan dengan kuorum pelaksanaan RUPS
 - e. Menyediakan kartu suara bagi Pemegang Saham.
 - f. Membantu Notaris dalam melaksanakan penghitungan suara menggunakan sarana pemindai *barcode*.
3. Kantor Akuntan Publik
Kantor Akuntan Publik hadir selaku pihak yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

UPAYA PERSEROAN UNTUK MENINGKATKAN KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Sebagai upaya BNI dalam memfasilitasi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan kewenangannya dalam RUPS, Perusahaan melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. BNI melakukan Pengumuman dan Pemanggilan RUPS secara tepat waktu, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dipublikasikan pada 2 (dua) surat kabar berperedaran nasional, *website* Perusahaan, dan *website* Bursa Efek Indonesia.
2. Dalam Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, BNI memaparkan secara jelas Pemegang Saham yang berwenang untuk menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPS, yakni Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Pemanggilan.
3. Pada *website*, BNI menyediakan kontak yang dapat digunakan Pemegang Saham untuk berkomunikasi sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS.
4. BNI memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham yang membutuhkan informasi dan/atau akan mengajukan pertanyaan sehubungan dengan rencana RUPS dan/atau mata acara RUPS baik melalui pertemuan langsung maupun korespondensi via *email*.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN RUPS

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, tahapan penyelenggaraan RUPS Perseroan adalah sebagai berikut:

1

Pemberitahuan
Rencana RUPS kepada OJK

4

Pelaksanaan RUPS

2

Publikasi
Pengumuman RUPS

5

Publikasi
Ringkasan Risalah RUPS

3

Publikasi
Pemanggilan RUPS

6

Penyampaian
Risalah RUPS kepada OJK



PELAKSANAAN RUPS PADA TAHUN 2018

Selama tahun 2018, BNI menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2018. Penyelenggaraan RUPS Tahunan BNI tersebut dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka: sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017:

Tahapan	Pemberitahuan kepada OJK	Pengumuman RUPS	Pemanggilan RUPS	Pelaksanaan RUPS	Ringkasan Risalah RUPS	Risalah RUPS
Ketentuan	BNI menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengumuman RUPS.	BNI wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Publikasi Pengumuman RUPS dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.	BNI wajib melakukan Pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS. Publikasi Pemanggilan RUPS dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.	RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir	BNI wajib membuat ringkasan risalah RUPS. Publikasi Ringkasan Risalah RUPS dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.	BNI wajib membuat risalah RUPS dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
Penerapan	Pemberitahuan rencana pelaksanaan RUPS Tahunan disampaikan pada tanggal 30 Januari 2018 kepada OJK. Pemberitahuan Perubahan Tanggal Penyelenggaraan RUPS Tahunan diberitahukan pada tanggal 5 Februari 2018.	Pengumuman RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2018, Publikasi dilakukan melalui Harian <i>Investor Daily</i> dan <i>The Jakarta Post</i> , dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web BNI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	Pemanggilan RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018. BNI melakukan Ralat Pemanggilan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2018. Publikasi dilakukan melalui Harian <i>Investor Daily</i> dan <i>The Jakarta Post</i> , dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web BNI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di <i>Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta</i> yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta, 10220.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2018 melalui Harian <i>Investor Daily</i> dan <i>The Jakarta Post</i> , dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web BNI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	BNI menyampaikan Risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018 dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris, yaitu Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 37 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan dapat diakses melalui <i>website</i> BNI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Kepatuhan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

BAHAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2018

Bahan Mata Acara RUPS Tahunan yang dilaksanakan tanggal 20 Maret 2018 dapat diakses melalui *website* Perseroan sebagai berikut: <http://bni.co.id/portals/1/bni/perusahaan/docs/Buku%20Materi%20Rapat.pdf>

TATA TERTIB RUPS TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2018

Tata Tertib RUPS Tahunan yang dilaksanakan tanggal 20 Maret 2018 dapat diakses melalui *website* Perseroan sebagai berikut: <http://bni.co.id/portals/1/bni/perusahaan/docs/Buku%20Tata%20Tertib.pdf>



MATA ACARA RUPS TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2018

Adapun mata acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian BNI, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
Mata Acara Kedua	Persetujuan penggunaan Laba Bersih BNI untuk Tahun Buku 2017.
Mata Acara Ketiga	Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2018 serta tantiem Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris BNI.
Mata Acara Keempat	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan BNI dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018.
Mata Acara Kelima	Persetujuan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) BNI.
Mata Acara Keenam	Penguukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Mata Acara Ketujuh	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Bank.
Mata Acara Kedelapan	Perubahan Pengurus Bank.

PEMIMPIN RAPAT DALAM RUPS TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2018

Pada RUPS tanggal 20 Maret 2018, berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. DK/31 tanggal 16 Maret 2018, Dewan Komisaris telah menetapkan Ari Kuncoro (Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan) sebagai Pemimpin Rapat dan sebagai Pemimpin Rapat Pengganti I adalah Bapak Wahyu Kuncoro (Wakil Komisaris Utama Perseroan), serta Pemimpin Rapat Pengganti II adalah Bapak Pataniari Siahaan (Komisaris Independen Perseroan).

KEHADIRAN PENGURUS PERSEROAN PADA RUPS TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2018

Adapun Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran		
			Hadir	Tidak	Keterangan
DEWAN KOMISARIS					
1.	Ari Kuncoro	Komisaris Utama/Komisaris Independen	√		
2.	Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama	√		
3.	Pataniari Siahaan	Komisaris Independen	√		
4.	Revrison Baswir	Komisaris Independen	√		
5.	Bistok Simbolon	Komisaris	√		
6.	Marwanto Harjowiryono	Komisaris	√		
7.	Joni Swastanto	Komisaris	√		
8.	Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen	√		
TOTAL KEHADIRAN			100%		

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran		
			Hadir	Tidak	Keterangan
DIREKSI					
1.	Achmad Baiquni	Direktur Utama	√		
2.	Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama	√		
3.	Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit	√		
4.	Putrama Wahyu Setyawan	Direktur Bisnis Menengah	√		
5.	Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer <i>Banking</i>	√		
6.	Panji Irawan	Direktur Tresuri dan Internasional	√		
7.	Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	√		
8.	Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	√		
9.	Bob Tyasika Ananta	Direktur Perencanaan dan Operasional	√		
10.	Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	√		
TOTAL KEHADIRAN			100%		

KEHADIRAN PIHAK INDEPENDEN DALAM RUPS TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2018

Pihak Independen yang hadir dalam RUPS Tahun Buku 2017 adalah sebagai berikut:

1. Notaris

Dalam RUPS Tahunan BNI tanggal 20 Maret 2018, Notaris yang membantu terselenggaranya Rapat adalah Notaris Fathiah Helmi, SH.

2. Biro Administrasi Efek

Dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 20 Maret 2018, Biro Administrasi Efek yang membantu terselenggaranya Rapat adalah PT Datindo Entrycom.

3. Kantor Akuntan Publik

Dalam RUPS Tahunan BNI tanggal 20 Maret 2018, Kantor Akuntan Publik yang hadir adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Firma anggota jaringan global *Ernst & Young*.

KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2018

Penetapan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS mengacu pada Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS Tahunan Perseroan tanggal 20 Maret 2018 dihadiri oleh 16.329.884.642 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 87,566% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mengacu pada penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 20 Maret 2018, Kuorum Kehadiran dan Keputusan berdasarkan Mata Acara adalah sebagai berikut:



Mata Acara	Dasar Usulan	Ketentuan Kuorum Kehadiran	Kuorum Kehadiran RUPS Tahunan 20 Maret 2018	Ketentuan Kuorum Keputusan	Kuorum Keputusan RUPS Tahunan 20 Maret 2018
<p>Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017</p>	<p>Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. Per-07/MBU/05/2015 yang diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan</p>	<p>Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah</p>	<p>Terpenuhi</p>	<p>Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS</p>	<p>Disetujui oleh 16.294.383.042 suara atau 99,78% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka kuorum keputusan terpenuhi</p>
<p>Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017</p>	<p>Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan</p>	<p>Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah</p>	<p>Terpenuhi</p>	<p>Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS</p>	<p>Disetujui oleh 16.253.252.242 suara atau 99,53% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka kuorum keputusan terpenuhi</p>
<p>Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2018 serta tantiem Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan</p>	<p>Pasal 96 dan 113 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Peraturan Menteri BUMN No. Per-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 ayat (30) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan</p>	<p>Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah</p>	<p>Terpenuhi</p>	<p>Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS</p>	<p>Disetujui oleh 15.711.499.429 suara atau 96,21% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka kuorum keputusan terpenuhi</p>



Mata Acara	Dasar Usulan	Ketentuan Kuorum Kehadiran	Kuorum Kehadiran RUPS Tahunan 20 Maret 2018	Ketentuan Kuorum Keputusan	Kuorum Keputusan RUPS Tahunan 20 Maret 2018
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018	Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Terpenuhi	Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	Disetujui oleh 15.640.575.837 suara atau 95,78% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka kuorum keputusan terpenuhi
Persetujuan Laporan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Bagi Bank Sistemik	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Terpenuhi	Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	Disetujui oleh 16.305.925.487 suara atau 99,85% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka kuorum keputusan terpenuhi
Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara	Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Terpenuhi	Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	Disetujui oleh 16.319.090.442 suara atau 99,93% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka kuorum keputusan terpenuhi



Mata Acara	Dasar Usulan	Ketentuan Kuorum Kehadiran	Kuorum Kehadiran RUPS Tahunan 20 Maret 2018	Ketentuan Kuorum Keputusan	Kuorum Keputusan RUPS Tahunan 20 Maret 2018
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan	RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/ atau wakil wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Terpenuhi	Keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	Disetujui oleh 12.014.624.743 suara atau 73,57% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, maka kuorum keputusan terpenuhi
Perubahan Pengurus Perseroan	Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/ atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Terpenuhi	Keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	Disetujui oleh 12.019.850.702 suara atau 73,61% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, maka kuorum keputusan terpenuhi



KEPUTUSAN DAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2018

Hasil keputusan RUPS tahunan tahun buku 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama		
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. RPC-5575/PSS/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. RPC-5806/PSS/2018 tanggal 26 Februari 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (Tiga triliun Rupiah). Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 	
Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	16.294.383.042 suara atau 99,78% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Tidak Setuju	9.994.200 suara atau 0,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Abstain	25.507.400 suara atau 0,16% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Realisasi/Tindak Lanjut	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Januari 2018 dan 26 Februari 2018.	
Status	Selesai	

Mata Acara Kedua		
Keputusan	<p>Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp13.616.475.751.928,00 (Tiga belas triliun enam ratus enam belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun Buku 2017" sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dividen sebesar 25% atau Rp3.404.118.937.982,00 (Tiga triliun empat ratus empat miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua Rupiah) dan ditambah dividen <i>special</i> sebesar 10% atau Rp1.361.647.575.192,80 (Satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah koma delapan puluh sen), sehingga total dividen sebesar 35% atau Rp4.765.766.513.174,80 (Empat triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah koma delapan puluh sen) ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham akan disetorkan ke rekening Kas Negara. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebesar 65% atau Rp8.850.709.238.753,20 (Delapan triliun delapan ratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah koma dua puluh sen) akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan. 	
Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	16.253.252.242 suara atau 99,53% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Tidak Setuju	75.832.400 suara atau 0,46% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Abstain	800.000 suara atau 0,00% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Realisasi/Tindak Lanjut	BNI telah mengumumkan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 pada tanggal 22 Maret 2018 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 20 April 2018.	
Status	Selesai	



Mata Acara Ketiga		
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2018. 	
Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	15.711.499.429 suara atau 96,21% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Tidak Setuju	606.898.813 suara atau 3,72% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Abstain	11.486.400 suara atau 0,07% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Realisasi/Tindak Lanjut	RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018, dan RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2018.	
Status	Selesai	

Mata Acara Keempat		
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Firma anggota jaringan global Ernst & Young, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Firma anggota jaringan global Ernst & Young, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. 	
Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	15.640.575.837 suara atau 95,78% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Tidak Setuju	688.508.805 suara atau 4,22% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Abstain	800.000 suara atau 0,00% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Realisasi/Tindak Lanjut	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>member of Ernst and Young</i>) telah selesai melaksanakan audit Perseroan pada tanggal 24 Januari 2019.	
Status	Selesai	

Mata Acara Kelima		
Keputusan	Menyetujui Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan dalam Rangka memenuhi regulasi POJK No. 14/POJK.03/2017.	
Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	16.305.925.487 suara atau 99,85% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Tidak Setuju	23.159.155 suara atau 0,14% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Abstain	800.000 suara atau 0,00% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Realisasi/Tindak Lanjut	Perseroan telah melaksanakan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) bagi Bank Sistemik dan pemenuhan kewajiban dalam bentuk dokumen <i>Recovery Plan</i> BNI telah mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN.	
Status	Selesai	



Mata Acara Keenam

Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017, dan perubahan-perubahannya. 	
Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	16.319.090.442 suara atau 99,93% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Tidak Setuju	9.994.200 suara atau 0,06% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Abstain	800.000 suara atau 0,00% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Realisasi/ Tindak Lanjut	BNI telah memberlakukan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2018 ini.	
Status	Selesai	

Mata Acara Ketujuh

Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sepanjang tidak menambah hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 	
Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	12.014.624.743 suara atau 73,57% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Tidak Setuju	4.301.745.199 suara atau 26,34% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Abstain	13.514.700 suara atau 0,08% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Realisasi/ Tindak Lanjut	Perubahan Anggaran Dasar tertuang dalam Akta No. 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan SK No. AHU-0012962.AH.01.02. TAHUN 2018 tanggal 25 Juni 2018 dan pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0215738 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082015.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018.	
Status	Selesai	



Mata Acara Kedelapan

- Keputusan
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. Sdr. Panji Irawan sebagai Direktur;
 - b. Sdr. Imam Budi Sarjito sebagai Direktur,
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
 2. Mengubah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur	Direktur <i>Corporate Banking</i>
2.	Direktur	Direktur Retail Banking
3.	Direktur	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan
4.	Direktur	Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>
5.	Direktur	Direktur Keuangan
6.	Direktur	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
7.	Direktur	Direktur Hubungan Kelembagaan
8.	Direktur	Direktur Manajemen Risiko
9.	Direktur	Direktur Kepatuhan
 3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Putrama Wahyu Setyawan	Direktur	Direktur <i>Corporate Banking</i>
2.	Catur Budi Harto	Direktur	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan
3.	Rico Rizal Budidarmo	Direktur	Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>
4.	Anggoro Eko Cahyo	Direktur	Direktur Keuangan
5.	Adi Sulistyowati	Direktur	Direktur Hubungan Kelembagaan
6.	Bob Tyasika Ananta	Direktur	Direktur Manajemen Risiko
 4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. Sdri. Tambok P. Setyawati sebagai Direktur *Retail Banking*
 - b. Sdr. Endang Hidayatullah sebagai Direktur Kepatuhan
 - c. Sdr. Dadang Setiabudi sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Operasi.
 Berakhirnya masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 5. Mengangkat Sdr. Sigit Widyanan sebagai Komisaris Independen Perseroan. Berakhirnya masa jabatan Komisaris Independen yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



Mata Acara Kedelapan

6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

No.	Nama	Jabatan
1.	Achmad Baiquni	Direktur Utama
2.	Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama
3.	Putrama Wahyu Setyawati	Direktur <i>Corporate Banking</i>
4.	Tambok P. Setyawati	Direktur <i>Retail Banking</i>
5.	Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan
6.	Rico Rizal Budidarmo	Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>
7.	Anggoro Eko Cahyo	Direktur Keuangan
8.	Dadang Setiabudi	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
9.	Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan
10.	Bob Tyasika Ananta	Direktur Manajemen Risiko
11.	Endang Hidayatullah	Direktur Kepatuhan

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.	Ari Kuncoro	Komisaris Utama/Komisaris Independen
2.	Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama
3.	Bistok Simbolon	Komisaris
4.	Marwanto Harjowiryono	Komisaris
5.	Revrison Baswir	Komisaris Independen
6.	Joni Swastanto	Komisaris
7.	Pataniari Siahaan	Komisaris Independen
8.	Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen
9.	Sigit Widyawan	Komisaris Independen

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon-calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	12.019.850.702 suara atau 73,61% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Tidak Setuju	4.297.927.040 suara atau 26,32% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Abstain	12.106.900 suara atau 0,07% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Realisasi/Tindak Lanjut	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan serta susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah dinyatakan dalam akta Notaris tersendiri serta diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
Status	Selesai	



PELAKSANAAN RUPS PADA TAHUN 2017

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dalam Laporan Tahunan ini juga menyajikan informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017, Perseroan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2017 dan RUPS Luar Biasa Perseroan Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017.

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2017 tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2017

Tahapan	Pemberitahuan kepada OJK	Pengumuman RUPS	Pemanggilan RUPS	Pelaksanaan RUPS	Ringkasan Risalah RUPS	Risalah RUPS
Ketentuan	Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengumuman RUPS	Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Publikasi Pengumuman RUPS dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing	Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS. Publikasi Pemanggilan RUPS dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing	RUPS Lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan terbuka.	Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS. Publikasi Ringkasan Risalah RUPS dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing	Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
Penerapan	Pemberitahuan rencana pelaksanaan RUPS Tahunan disampaikan pada tanggal 30 Januari 2017 kepada OJK.	Pengumuman RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2017, Publikasi dilakukan melalui Harian Investor Daily dan The Jakarta Post, dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	Pemanggilan RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017. Publikasi dilakukan melalui Harian Investor Daily dan The Jakarta Post, dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2017 pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Ruang Serba Guna BNI Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, 10220.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dipublikasikan pada tanggal 20 Maret 2017 melalui Harian Investor Daily dan The Jakarta Post, dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	Perseroan menyampaikan Risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 23 Maret 2017 dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris, yaitu Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 42 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan dapat diakses melalui website Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Kepatuhan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi



MATA ACARA RUPS TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2017

Adapun mata acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.
Mata Acara Kedua	Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016
Mata Acara Ketiga	Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2017 serta tantiem Tahun Buku 2016 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Mata Acara Keempat	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017
Mata Acara Kelima	Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Mata Acara Keenam	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Mata Acara Ketujuh	Perubahan Pengurus Perseroan

KEHADIRAN PENGURUS PERSEROAN PADA RUPS TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2017

Adapun Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS tahunan tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2017

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran		
			Hadir	Tidak	Keterangan
DEWAN KOMISARIS					
1.	Hartadi A. Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	√		
2.	Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	√		
3.	Anny Ratnawati	Komisaris Independen			
4.	Pataniari Siahaan	Komisaris Independen	√		
5.	Revisond Baswir	Komisaris Independen	√		
6.	Bistok Simbolon	Komisaris	√		
7.	Joni Swastanto	Komisaris	√		
8.	Wahyu Kuncoro	Komisaris	√		
TOTAL KEHADIRAN			100%		
DIREKSI					
1.	Achmad Baiquni	Direktur Utama	√		
2.	Suprajarto	Wakil Direktur Utama		√	Telah diangkat menjadi Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3.	Herry Sidharta	Direktur Bisnis Korporasi	√		
4.	Putrama Wahyu Setyawan	Direktur Bisnis Menengah	√		
5.	Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer Banking	√		
6.	Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit	√		
7.	Bob Tyasika Ananta	Direktur Perencanaan dan Operasional	√		
8.	Panji Irawan	Direktur Tresuri dan Internasional	√		
9.	Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	√		
10.	Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	√		
TOTAL KEHADIRAN			90%		



KEHADIRAN PIHAK INDEPENDEN DALAM RUPS TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2017

Pihak independen yang hadir dalam RUPS Tahunan 2017 adalah sebagai berikut:

1. Notaris

Dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2017, Notaris yang membantu terselenggaranya Rapat adalah Notaris Fathiah Helmi, SH.

2. Biro Administrasi Efek

Dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2017, Biro Administrasi Efek yang membantu terselenggaranya Rapat adalah PT Datindo Entrycom.

3. Kantor Akuntan Publik

Dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2017, Kantor Akuntan Publik yang hadir adalah Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja – Firma anggota jaringan global Ernst & Young.

KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2017

Penetapan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS mengacu pada Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS Tahunan BNI tanggal 16 Maret 2017 dihadiri oleh 15.672.907.888 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,04% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

Mengacu pada penyelenggaraan RUPS Tahunan BNI tanggal 16 Maret 2017, Kuorum Kehadiran dan Keputusan berdasarkan Mata Acara adalah sebagai berikut:

Tabel Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2017

Mata Acara	Dasar Usulan	Ketentuan Kuorum Kehadiran	Kuorum Kehadiran RUPS Tahunan 16 Maret 2017	Ketentuan Kuorum Keputusan	Kuorum Keputusan RUPS Tahunan 16 Maret 2017
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. Per-07/MBU/05/2015 yang diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan 	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Terpenuhi	Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	Disetujui oleh 15.409.422.609 suara atau 98,32% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka kuorum keputusan terpenuhi
Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan 	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Terpenuhi	Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	Disetujui oleh 15.431.337.721 suara atau 98,46% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka kuorum keputusan terpenuhi



Mata Acara	Dasar Usulan	Ketentuan Kuorum Kehadiran	Kuorum Kehadiran RUPS Tahunan 16 Maret 2017	Ketentuan Kuorum Keputusan	Kuorum Keputusan RUPS Tahunan 16 Maret 2017
Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2017 serta tantien Tahun Buku 2016 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 96 dan 113 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Peraturan Menteri BUMN No. Per-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 ayat (30) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan 	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Terpenuhi	Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	Disetujui oleh 15.711.499.429 suara atau 96,21% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka kuorum keputusan terpenuhi
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017	Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Terpenuhi	Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	Disetujui oleh 15.640.575.837 suara atau 95,78% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka kuorum keputusan terpenuhi
Penguatan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.	Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN no. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN tanggal 16 Desember 2016	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Terpenuhi	Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	Disetujui oleh 15.454.940.114 suara atau 98,61% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka kuorum keputusan terpenuhi
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Kementerian BUMN No. SR-117/MBU/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan PT Bank BNI (Persero), Tbk tahun buku 2016	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Terpenuhi	Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	Disetujui oleh 11.695.587.769 suara atau 74,62% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka kuorum keputusan terpenuhi



Mata Acara	Dasar Usulan	Ketentuan Kuorum Kehadiran	Kuorum Kehadiran RUPS Tahunan 16 Maret 2017	Ketentuan Kuorum Keputusan	Kuorum Keputusan RUPS Tahunan 16 Maret 2017
Perubahan Pengurus Perseroan	Pasal 11 ayat (7) dan pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Kementerian BUMN No. SR-117/MBU/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS tahunan PT Bank BNI (Persero), Tbk tahun buku 2016	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Terpenuhi	Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	Disetujui oleh 11.589.196.448 suara atau 73,94% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka kuorum keputusan terpenuhi

KEPUTUSAN DAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2017

Hasil keputusan RUPS tahunan tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama		
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. RPC-2855/PSS/2017 tanggal 20 Januari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. RPC-2958/PSS/2017 tanggal 3 Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, maka Perseroan menyampaikan laporan perubahan susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 	
Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	15.409.422.609 suara atau 98,32% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Tidak Setuju	15.145.612 suara atau 0,10% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Abstain	248.339.667 suara atau 1,58% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Realisasi/Tindak Lanjut	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Januari 2017 dan 22 Februari 2017.	
Status	Selesai	



Mata Acara Kedua

Keputusan	Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp11.338.748.081.836,- (sebelas triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun Buku 2016" sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Dividen sebesar 25% atau Rp2.834.687.020.459,00 dan ditambah dividen spesial sebesar 10% atau Rp1.133.874.808.183,60, sehingga total dividen sebesar 35% atau Rp3.968.561.828.642,60 ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham akan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dalam bentuk Rupiah di Bank Indonesia. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebesar 65% atau Rp7.370.186.253.193,40 akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan. 	
Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	15.431.337.721 suara atau 98,46% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Tidak Setuju	10.821.800 suara atau 0,07% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Abstain	230.748.367 suara atau 1,47% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Realisasi/ Tindak Lanjut	BNI telah mengumumkan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 pada tanggal 20 Maret 2017 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 20 April 2017.	
Status	Selesai	

Mata Acara Ketiga

Keputusan	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017, dan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017.	
Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	15.091.429.511 suara atau 96,29% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Tidak Setuju	354.190.503 suara atau 2,26% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Abstain	227.287.874 suara atau 1,45% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Realisasi/ Tindak Lanjut	RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017, dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memberikan wewenang dan kuasa kepada dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017.	
Status	Selesai	

Mata Acara Keempat

Keputusan	Menyetujui: <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. 	
Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	14.871.840.932 suara atau 94,89% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Tidak Setuju	556.447.828 suara atau 3,55% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Abstain	244.619.128 suara atau 1,56% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Realisasi/ Tindak Lanjut	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>member of Ernst and Young</i>) telah selesai melaksanakan audit Perseroan pada tanggal 20 Januari 2017.	
Status	Selesai	



Mata Acara Kelima		
Keputusan	Menyetujui mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.	
Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	15.454.940.114 suara atau 98,61% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Tidak Setuju	0 suara atau 0,00% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Abstain	217.967.774 suara atau 1,39% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Realisasi/Tindak Lanjut	Perseroan telah memberlakukan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2017 ini.	
Status	Selesai	

Mata Acara Keenam		
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 	
Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	11.695.587.769 suara atau 74,62% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Tidak Setuju	3.562.043.345 suara atau 22,73% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Abstain	415.276.774 suara atau 2,65% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Realisasi/Tindak Lanjut	Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 45 tanggal 25 April 2017 telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM R.I. No. AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17 Mei 2017.	
Status	Selesai	



Mata Acara Ketujuh

- Keputusan
1. Dewan Komisaris :
 - a. Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden No. 61/M TAHUN 2016 tanggal 25 Oktober 2016 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
 - b. Memberhentikan Sdr. Pradjoto sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen dan Sdri. Anny Ratnawati sebagai Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
 - c. Mengalihkan penugasan Sdr. Wahyu Kuncoro dari semula Komisaris menjadi Wakil Komisaris Utama dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan sebagai Komisaris.
 - d. Mengangkat Sdr. Marwanto Harjowiryono sebagai Komisaris dan Sdr. Ahmad Fikri Assegaf sebagai Komisaris Independen.
 2. Direksi :
 - a. Memberhentikan Sdr. Suprajarto sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 15 Maret 2017 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat Wakil Direktur Utama.
 - b. Mengalihkan penugasan Sdr. Herry Sidharta dari semula Direktur menjadi Wakil Direktur Utama, dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan sebagai Direktur yang diangkat pada RUPS Tahunan 17 Maret 2015.
 - c. Mengangkat Sdr. Catur Budi Harto sebagai Direktur.
 3. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 4. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

 - Sdr. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama
 - Sdr. Pataniari Siahaan sebagai Komisaris Independen
 - Sdr. Revrisond Baswir sebagai Komisaris Independen
 - Sdri. Ahmad Fikri Assegaf sebagai Komisaris Independen
 - Sdr. Bistok Simbolon sebagai Komisaris
 - Sdr. Joni Swastanto sebagai Komisaris
 - Sdr. Marwanto Harjowiryono sebagai Komisaris

Direksi

 - Sdr. Achmad Baiquni sebagai Direktur Utama
 - Sdr. Herry Sidharta sebagai Wakil Direktur Utama
 - Sdr. Rico Rizal Budidarmo sebagai Direktur
 - Sdr. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur
 - Sdri. Adi Sulistyowati sebagai Direktur
 - Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Direktur
 - Sdr. Imam Budi Sarjito sebagai Direktur
 - Sdr. Panji Irawan sebagai Direktur.
 - Sdr. Putrama Wahyu Setyawan sebagai Direktur
 - Sdr. Catur Budi Harto sebagai Direktur
 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon-calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	11.589.196.448 suara atau 73,94% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Tidak Setuju	3.539.081.050 suara atau 22,58% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Abstain	544.630.390 suara atau 3,47% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Realisasi/Tindak Lanjut	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Perseroan telah menyatakan dalam akta Notaris tersendiri serta telah memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
Status	Selesai	



PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA PERSEROAN TAHUN 2017

Tahapan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Perseroan di tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel Pelaksanaan RUPS Luar Biasa

Tahapan	Pemberitahuan kepada OJK	Pengumuman RUPS	Pemanggilan RUPS	Pelaksanaan RUPS	Ringkasan Risalah RUPS	Risalah RUPS
Ketentuan	BNI menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengumuman RUPS	BNI wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Publikasi Pengumuman RUPS dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing	BNI wajib melakukan Pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS. Publikasi Pemanggilan RUPS dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing	RUPS Lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan terbuka.	BNI wajib membuat ringkasan risalah RUPS. Publikasi Ringkasan Risalah RUPS dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing	BNI wajib membuat risalah rups dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
Penerapan	Pemberitahuan rencana pelaksanaan RUPS Tahunan disampaikan pada tanggal 15 September 2017 kepada OJK.	Pengumuman RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017, Publikasi dilakukan melalui Harian Investor Daily dan The Jakarta Post, dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	Pemanggilan RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017. Publikasi dilakukan melalui Harian Investor Daily dan The Jakarta Post, dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017 pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Ruang Serba Guna BNI Lantai 25. Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, 10220.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dipublikasikan pada tanggal 6 November 2017 melalui Harian Investor Daily dan The Jakarta Post, dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	BNI menyampaikan Risalah RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 7 November 2017 dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris, yaitu Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 2 Tanggal 2 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan dapat diakses melalui <i>website</i> BNI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Kepatuhan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

BAHAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA PERSEROAN TAHUN 2017

Bahan Mata Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017 dapat diakses melalui *website* Perseroan sebagai berikut:

<http://bni.co.id/portals/1/bni/perusahaan/docs/mata-acara-rups-luar-biasa-bni-2-november-2017.pdf>

TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PERSEROAN TAHUN 2017

Tata Tertib RUPS Luar Biasa Perseroan Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017 dapat diakses melalui *website* Perseroan sebagai berikut:

<http://bni.co.id/portals/1/bni/perusahaan/docs/tata-tertib-rups-luar-biasa-bni-2-november-2017.pdf>



KEHADIRAN PENGURUS PERSEROAN PADA RUPS LUAR BIASA PERSEROAN TAHUN 2017

Adapun Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPSLB

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran		
			Hadir	Tidak	Keterangan
DEWAN KOMISARIS					
1.	Hartadi A. Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen		√	Telah diangkat menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2.	Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama	√		
3.	Pataniari Siahaan	Komisaris Independen	√		
4.	Revrisond Baswir	Komisaris Independen	√		
5.	Bistok Simbolon	Komisaris	√		
6.	Joni Swastanto	Komisaris	√		
7.	Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen	√		
8.	Marwanto Harjowiryo	Komisaris	√		
TOTAL KEHADIRAN			87,5%		
DIREKSI					
1.	Achmad Baiquni	Direktur Utama	√		
2.	Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama	√		
3.	Putrama Wahyu Setyawan	Direktur Bisnis Menengah	√		
4.	Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	√		
5.	Anggoro Eko Cahyo	Direktur Bisnis Konsumer	√		
6.	Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit	√		
7.	Bob Tyasika Ananta	Direktur Perencanaan dan Operasional	√		
8.	Panji Irawan	Direktur Tresuri dan Internasional	√		
9.	Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	√		
10.	Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	√		
TOTAL KEHADIRAN			100%		

KEHADIRAN PIHAK INDEPENDEN DALAM RUPS LUAR BIASA PERSEROAN TAHUN 2017

Pihak independen yang hadir dalam RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017 adalah sebagai berikut:

1. Notaris

Notaris yang membantu terselenggaranya Rapat adalah Notaris Fathiah Helmi, SH.

2. Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek yang membantu terselenggaranya Rapat adalah PT Datindo Entrycom.



KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA PERSEROAN TAHUN 2017

Penetapan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS mengacu pada Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS Luar Biasa BNI tanggal 2 November 2017 dihadiri oleh 16.148.948.470 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 86,59% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh BNI.

Mengacu pada penyelenggaraan RUPS Luar Biasa BNI tanggal 2 November 2017, Kuorum Kehadiran dan Keputusan berdasarkan Mata Acara adalah sebagai berikut:

Tabel Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan Tahun 2017

Mata Acara	Dasar Usulan	Ketentuan Kuorum Kehadiran	Kuorum Kehadiran RUPS Luar Biasa 2 November 2017	Ketentuan Kuorum Keputusan	Kuorum Keputusan RUPS Luar Biasa 2 November 2017
Perubahan Pengurus Perseroan	Pasal 23 dan 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 tentang Direksi dan pasal 14 tentang Dewan Komisaris	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Terpenuhi	Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	Disetujui oleh 11.519.663.335 suara atau 71,33% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

KEPUTUSAN DAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA PERSEROAN TAHUN 2017

Hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017 adalah sebagai berikut:

Mata Acara: Perubahan Pengurus Perseroan		
Keputusan	Mengangkat Sdr. Ari Kuncoro, sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan. Berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2021.	
Hasil Pemungutan Suara (Jumlah Suara dan Persentase)	Setuju	11.519.663.335 suara atau 71,33% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Tidak Setuju	4.461.192.519 suara atau 27,62% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Abstain	168.092.616 suara atau 1,04% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Realisasi/Tindak Lanjut	Komisaris Utama Perseroan yang diangkat tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Pengangkatan serta perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah dinyatakan dalam akta Notaris tersendiri serta telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
Status	Selesai	



DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pengaturan Dewan Komisaris BNI berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-undangan lainnya khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BNI diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/49/DK/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya meliputi pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Struktur;
3. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris;
4. Komisaris Independen;
5. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
6. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris;
7. Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Jabatan Lowong;
8. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi;
9. Pembagian Kerja dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
10. Kesekretariatan Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris;
11. Nilai-nilai Perseroan;
12. Etika Kerja Dewan Komisaris dan Larangan, Transparansi;
13. Transparansi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan BNI dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Dewan Komisaris wajib:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BNI.

Untuk menjaga objektivitas dan independensi dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali untuk:

1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
2. Hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau Peraturan Perundang-undangan.

Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris tersebut di atas, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Bank;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Bank;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Bank;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite-komite lain jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Bank;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;



10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern;
12. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
13. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
4. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank;
5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Bank;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan 1 (satu) salinannya;
9. Melaporkan kepada Bank mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Bank lain;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
11. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
12. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS;
13. Memberikan persetujuan secara tertulis atas perbuatan hukum yang dilakukan Direksi sebagaimana diwajibkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal:
 - a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
 - b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), kerja sama usaha (KSU), kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. Menetapkan dan mengubah logo Bank;
 - d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
 - e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada Perseroan lain, anak Perusahaan dan Perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - f. Mendirikan anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - i. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - j. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
 - k. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:

- i. Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
- ii. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak;

Dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (*limit*) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (*limit*) baru oleh RUPS.

Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan huruf a, b, e, f, g, dan h di atas dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, e, f, g, dan h di atas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

KRITERIA DAN MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan Peraturan perundang-undangan lain termasuk peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar, yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan, dan syarat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank;
6. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan termasuk menantu atau ipar.

Masa jabatan Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir;
2. Setelah masa jabarannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.



PROSES PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Proses pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris BNI dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris sektor Bank dan BUMN, khususnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 31/SEOJK.05/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta dengan memperhatikan ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris mulai berlaku sejak penutupan RUPS. Penyampaian usulan bakal calon anggota Dewan Komisaris kepada RUPS melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan antara mengatur bahwa calon anggota Dewan Komisaris yang termasuk sebagai Pihak Utama BNI yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris. Dalam rangka memberikan persetujuan tersebut, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) kepada calon Anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan memiliki dan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BNI telah lulus penilaian dan kepatutan (*fit and proper test*) dan mendapat persetujuan OJK untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris BNI yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini

Tabel Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Nama	Jabatan	Pelaksana	Tanggal Efektif	Hasil
Ari Kuncoro*	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	14 Maret 2018	Lulus
Wahyu Kuncoro	Komisaris Wakil Komisaris Utama/Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	25 Januari 2017 29 Mei 2017	Lulus
Revrisond Baswir	Komisaris Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	24 Juni 2015 25 Januari 2017	Lulus
Pataniari Siahaan	Komisaris Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	25 Juni 2015 25 Januari 2017	Lulus
Bistok Simbolon	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	10 Mei 2016	Lulus
Joni Swastanto	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	20 April 2016	Lulus
Marwanto Harjowiryono	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	19 Juli 2017	Lulus
Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	19 Juli 2017	Lulus
Sigit Widyanan**	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	7 September 2018	Lulus

Keterangan:

*Pengangkatan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB BNI 2 November 2017 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 14 Maret 2018.

**Pengangkatan sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPST BNI 20 Maret 2018 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 7 September 2018.



Para anggota Dewan Komisaris yang telah lulus *fit and proper test* kemudian diangkat dalam RUPS yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS. Dasar pengangkatan tiap-tiap anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tabel Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Ari Kuncoro	Komisaris Utama/Komisaris Independen	RUPSLB tanggal 2 November 2017
Wahyu Kuncoro	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Wakil Komisaris Utama/Komisaris 	RUPST tanggal 10 Maret 2016 RUPST tanggal 16 Maret 2017
Revrisond Baswir	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Komisaris Independen 	RUPST tanggal 17 Maret 2015 RUPST tanggal 10 Maret 2016
Pataniari Siahaan	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Komisaris Independen 	RUPST tanggal 17 Maret 2015 RUPST tanggal 10 Maret 2016
Bistok Simbolon	Komisaris	RUPSLB tanggal 12 Januari 2016
Joni Swastanto	Komisaris	RUPST tanggal 10 Maret 2016
Marwanto Harjowiryono	Komisaris Independen	RUPST tanggal 16 Maret 2017
Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen	RUPST tanggal 16 Maret 2017
Sigit Widyawan	Komisaris Independen	RUPST tanggal 20 Maret 2018

PROGRAM PENGENALAN BAGI KOMISARIS BARU

Program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru dilaksanakan dengan cara penyampaian dokumen, pemaparan atau penjelasan yang dapat dilakukan oleh Direksi, Sekretaris Perusahaan, Divisi-divisi atau unit-unit terkait, yang secara umum antara lain mencakup informasi/hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi, struktur organisasi Perseroan, kegiatan usaha/bisnis dan jaringan operasional;
2. Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Kode Etik Perseroan, Budaya Kerja BNI, Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, *Corporate Governance Handbook*, dan Anggaran Dasar Perseroan;
3. *Good Corporate Governance* (rangkap jabatan, kepemilikan saham dan komisaris independen);
4. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, pendelegasian kewenangan serta batasan kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung terhadap Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris;
6. Remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris per Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Bidang Tugas
Ari Kuncoro*	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	5 April 2018 – 31 Desember 2018	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Revrisond Baswir	Komisaris Independen	1 Januari 2018 - 31 Desember 2018 1 Januari 2018 - 31 Desember 2018 1 Januari 2018 - 31 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Ketua Pemantau Risiko Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
Pataniari Siahaan	Komisaris Independen	1 Januari - 31 Desember 2018 1 Januari 2018 - 31 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Ketua Komite Audit



Nama	Jabatan	Periode	Bidang Tugas
Bistok Simbolon	Komisaris	1 Januari – 31 Desember 2018 1 Januari 2018 - 31 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Pemantau Risiko
Joni Swastanto	Komisaris	1 Januari 2018 - 31 Desember 2018 1 Januari 2018 - 31 Desember 2018 1 Januari 2018 - 31 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Marwanto Harjowirjono	Komisaris	1 Januari 2018 - 31 Desember 2018	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen	1 Januari 2018 - 5 April 2018 5 April 2018 - 31 Desember 2018 5 April 2018 - 31 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Sigit Widyawan**	Komisaris Independen	13 September 2018 -31 Desember 2018	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keterangan:

*Pengangkatan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB BNI 2 November 2017 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 14 Maret 2018.

**Pengangkatan sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPST BNI 20 Maret 2018 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 7 September 2018.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, disebutkan bahwa komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Pada periode 2018, keberagaman komposisi Dewan Komisaris yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Ari Kuncoro*	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	56 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Ilmu Ekonomi • S2 Ekonomi Pembangunan • S3 Ilmu Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. • Wakil Dekan I Bidang Pengajaran, Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat. • Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. • Profesor Tamu Bidang Riset Brown University. • Anggota Forum Komunikasi Riset Kestabilan Sistem Keuangan Bank Indonesia. • <i>Board of Director East Asian Economist Association.</i> • Dekan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi



Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama	49 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Pertanian S1 Ekonomi S2 Magister Management 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Seksi Pendanaan dan Sumber Daya Direktorat Jendral Pembinaan BUMN Departemen Keuangan. Kepala Sub Bidang Perencanaan Usaha Produksi Pertanian Kementerian BUMN. Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Kepala Bidang Usaha Perkebunan IIB Kementerian BUMN. Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI (Persero). Kepala Bidang Usaha Industri Primer III A Kementerian BUMN. Kepala Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I A Kementerian BUMN. Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero). Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III Kementerian BUMN. Asisten Deputi Perbankan dan Asuransi, Kementerian BUMN. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Kementerian BUMN. Komisaris PT Angkasa Pura II (Persero). Ketua Umum Koperasi Pegawai Prabunara Kementerian BUMN. Anggota Pengawas Koperasi Pegawai Prabunara Kementerian BUMN. Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Kementerian BUMN. Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wakil Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi Manajemen
Revrison Baswir	Komisaris Independen	60 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Akuntansi S2 Administrasi Bisnis S3 Ilmu Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Dosen Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Peneliti P3PK Universitas Gajah Mada. Staf Ahli Kementerian HAM RI. Staf Ahli Pustep Universitas Gajah Mada. Staf Ahli DPD RI. Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada. Anggota Komite Kebijakan Publik Kementerian BUMN. Komisaris dan Ketua Komite Audit PTPN XIII Pontianak. Komisaris PTPN VIII, Bandung. Komisaris dan Ketua Komite Audit PTPN XI Surabaya. Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi Akuntansi



Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Pataniari Siahnan	Komisaris Independen	72 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Teknik Sipil S1 Teknik sipil Transportasi S2 Magister Ilmu Hukum S3 Doktor Ilmu Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota DPR/MPR RI. Anggota Komisi I DPR-RI. Anggota Badan Kerja sama antar Parlemen DPR RI. Anggota Grup Kerja sama Bilateral Indonesia-Australia DPR-RI. Anggota Badan Pekerja MPR-RI. Anggota Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI. Ketua Komisi A Sidang Tahunan MPR RI. Anggota Komisi III DPR RI. Pimpinan Badan Legislasi DPR RI. Kuasa Hukum DPR-RI untuk Mahkamah Konstitusi. Ketua Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI di Bidang Undang-undang Dasar Negara RI. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Ketua Pusat Studi konstistusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Dewan Redaksi Jurnal Hukum Prioris Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 	<ul style="list-style-type: none"> Teknik Hukum
Bistok Simbolon	Komisaris	62 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Hukum S2 Hukum Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Kasubag Penelitian Rancangan 3 Bagian Penelitian II Biro Hukum dan PPU Sekretariat Kabinet. Kabag Politik, Pemerintahan Daerah, dan Polkam pada Biro PUU II Sekretariat Kabinet. Kabag Analisa Hukum Ketatanegaraan Biro Hukum Sekretariat Kabinet. Asisten Sekretaris Kabinet Sekretariat Kabinet. Kepala Biro Hukum Sekretariat Kabinet. Kepala Biro Polkam, Pertahanan, Ratifikasi dan Permasalahan Hukum Sekretariat Kabinet. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Politik Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet. Komisaris PT Industri Kereta Api (Persero). Komisaris Utama PT Industri Kereta Api (Persero). Komisaris Pertamina Geothermal Energy. Wakil Sekretaris Kabinet. Staf Khusus Sekretaris Kabinet. Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 	<ul style="list-style-type: none"> Hukum



Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Joni Swastanto	Komisaris	62 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Ekonomi S2 Ekonomi S3 Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Seksi Bank Indonesia Bandung, Wakil Kepala Bagian Pengawasan Bank Bukan Devisa 2 Bank Indonesia, Pengawas Bank Senior Urusan Pengawasan Bank 3 Bank Indonesia, Pengawas Bank Eksekutif Urusan Pengawasan Bank 3 Bank Indonesia, Kepala Bagian Analisis Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Kepala Bagian Moneter Bank Indonesia, Kepala Bagian Bank Indonesia Surabaya, Pengawas Bank Eksekutif Senior Bank Indonesia Surabaya, Deputi Direktur Departemen Pengawasan Perbankan 3 Bank Indonesia, Direktur Departemen Pengawasan Perbankan 3 Bank Indonesia, Direktur Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia , Kepala Perwakilan Semarang Bank Indonesia. Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Advisor Kelompok Panelis Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1B Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisioner Manajemen Strategis 2B Otoritas Jasa Keuangan, Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi



Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Marwanto Harjowiryo	Komisaris	59	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Ekonomi S2 Ekonomi S3 Doktor Ekonomi/ Kebijakan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Biro Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Departemen Keuangan. Kepala Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran Departemen Keuangan. Kepala Biro Kerja sama Luar Negeri Departemen Keuangan. Pjs. Kepala Pusat Kerja sama Keuangan Internasional Departemen Keuangan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN. Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara. Member of Budget Review Committee Asian Development Bank Manila. Chairman of Ethic Committee Asian Development Bank Manila. Executive Director Asian Development Bank Manila. Komisaris PTPN XIII, Pontianak Kalimantan. Komisaris PT Sucofindo (Persero.) Komisaris Utama. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Direktur Jendral pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi
Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen	Pria	50	<ul style="list-style-type: none"> S1 Hukum S2 Magister Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Co founder PT Justika Siar Publika, Owner & Operator (www.hukum.online.com). Pendiri SekolahTinggi Hukum Indonesia Lentera. Anggota Penasehat Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Anggota Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. Founder dan Senior Partner Assegaf Hamzah & Partners. Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 	<ul style="list-style-type: none"> Hukum
Sigit Widyanan**	Komisaris Independen	53	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Ekonomi S2 Magister Akuntansi 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Bagian Perpajakan – Divisi Produk Beton PT Wijaya Karya (Persero). Kepala Bagian Keuangan PT Wijaya Karya Beton. Direktur Keuangan Roda Jati Grup. Direktur PT Roda Pembangunan Jaya. Komisaris Independen PT Jasamarga. (Persero) Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi Akuntansi Keuangan

Keterangan:

*Pengangkatan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB BNI 2 November 2017 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 14 Maret 2018.

**Pengangkatan sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPST BNI 20 Maret 2018 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 7 September 2018.



JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada periode 2018, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris BNI mengalami 2 (dua) kali perubahan sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

PERIODE 1 JANUARI 2018 – 20 MARET 2018

Periode 1 Januari 2018 – 20 Maret 2018, Dewan Komisaris berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris.

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Tanggal efektif
Ari Kuncoro	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Jakarta	2 November 2017	14 Maret 2018
Wahyu Kuncoro	Komisaris Wakil Komisaris Utama/Komisaris	Jakarta	10 Maret 2016 16 Maret 2017	25 Januari 2017 29 Mei 2017
Revrisond Baswir	Komisaris Komisaris Independen	Jogjakarta	17 Maret 2015 10 Maret 2016	24 Juni 2015 25 Januari 2017
Pataniari Siahaan	Komisaris Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015 10 Maret 2016	25 Juni 2016 25 Januari 2017
Bistok Simbolon	Komisaris	Jakarta	12 Januari 2016	10 Mei 2016
Joni Swastanto	Komisaris	Jakarta	10 Maret 2016	20 April 2016
Marwanto Harjowiryono	Komisaris	Jakarta	16 Maret 2017	19 Juli 2017
Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen	Jakarta	16 Maret 2017	19 Juli 2017

PERIODE 20 MARET 2018 – 31 DESEMBER 2018

Periode 20 Maret 2018 – 31 Desember 2018, Dewan Komisaris berjumlah 9 (sembilan) terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris.

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Tanggal efektif
Ari Kuncoro	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Jakarta	2 November 2017.	14 Maret 2018
Wahyu Kuncoro	Komisaris Wakil Komisaris Utama/Komisaris.	Jakarta	10 Maret 2016 16 Maret 2017	25 Januari 2017 29 Mei 2017
Revrisond Baswir	Komisaris Komisaris Independen	Jogjakarta	17 Maret 2015 10 Maret 2016	24 Juni 2015 25 Januari 2017
Pataniari Siahaan	Komisaris Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015 10 Maret 2016	25 Juni 2016 25 Januari 2017
Bistok Simbolon	Komisaris	Jakarta	12 Januari 2016	10 Mei 2016
Joni Swastanto	Komisaris	Jakarta	10 Maret 2016	20 April 2016
Marwanto Harjowiryono	Komisaris	Jakarta	16 Maret 2017	19 Juli 2017
Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen	Jakarta	16 Maret 2017	19 Juli 2017
Sigit Widyawan	Komisaris Independen	Jakarta	20 Maret 2018	7 September 2018

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga dan kepengurusan baik dengan sesama Dewan Komisaris maupun dengan Direksi.



Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ari Kuncoro*	Komisaris Utama/ Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Revisond Baswir	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Pataniari Siahaan	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Biston Simbolon	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Joni Swastanto	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Marwanto Harjowirjono	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Sigit Widyanan**	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√

Keterangan:

*Pangkat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB BNI 2 November 2017 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 14 Maret 2018.

**Pangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPST BNI 20 Maret 2018 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 7 September 2018.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi anggota Dewan Komisaris BNI telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Komisaris Independen pada bank umum wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komposisi Komisaris BNI per 31 Desember 2018 berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris. Dengan demikian komposisi Komisaris Independen BNI lebih dari 50% dari seluruh jumlah Dewan Komisaris. Jumlah tersebut telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Penetapan Komisaris Independen BNI dilakukan dengan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan yang mengatur persyaratan dan kriteria Komisaris Independen dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya:

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Pengertian memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak tidak independen dimaksud berpedoman kepada pengertian yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.



2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 21 ayat 2 yang mengatur bahwa:
 - a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau Perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan:
 - i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
 - ii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
 - iii. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - iv. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:
 - a. Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris utusan.
 - b. Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
4. Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 yang menyatakan bahwa setiap Komisaris Independen wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2.

PERNYATAAN KOMISARIS INDEPENDEN

Masing-masing Komisaris Independen Bank, telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) pada OJK.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fikri Assegaf

No. KTP : 3174041406680001


Alamat : Jl. Jeruk Purut RT 004 RW 003 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Jabatan : Calon Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang independent terhadap pemilik bank atau PSP.

Menyatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.

Jakarta, 6 April 2017



(Ahmad Fikri Assegaf)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Kuncoro
 No. KTP : 3175012801620001
 Alamat : Jl. Galur Sari X/133, RT 009 RW 001 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur
 Jabatan : Calon Komisaris Utama/Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang independent terhadap pemilik bank atau PSP.

Menyatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.

mengetahui,



(Ahmad Baiquni)
 Direktur Utama

Jakarta, 19 December 2017



(Ari Kuncoro)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pataniari Siahaan
 No. KTP : 3174063007460001
 Alamat : Jl. Kelapa Sawit Raya AK/9, RT 005 RW 007 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
 Jabatan : Calon Komisaris Utama/Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

1. Menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang independent terhadap pemilik bank atau PSP.
2. Menyatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.

Jakarta, 26 November 2016



(Pataniari Siahaan)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Revrisond Baswir
 No. KTP : 3174122802580003
 Alamat : Nganggrung, Gang Mawar No. 38, TR 004 RW 003, Sukoharjo, Nganglik, Sleman, Yogyakarta
 Jabatan : Calon Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang independent terhadap pemilik bank atau PSP.

Menyatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.

Jakarta, 28 November 2016



(Revrisond Baswir)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Widyawan
 No. KTP : 3313121407650004
 Alamat : Jayan RT 003 RW 009 Blulukan Colomadu
 Jabatan : Calon Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

1. Menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP;
2. Menyatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.

Mengetahui,

(Achmad Baiquni)
 Direktur Utama

Jakarta, 25 JUNI 2018

(Sigit Widyawan)



RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

Uraian	Ari Kuncoro*	Wahyu Kuncoro	Revrison Baswir	Pataniari Siahaan	Bistok Simbolon	Joni Swastanto	Marwanto Harjowirjono	Ahmad Fikri Assegaf	Sigit Widyawan**
Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Pengurus partai politik dan/ atau calon/ anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Keterangan:

*Pengangkatan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB BNI 2 November 2017 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 14 Maret 2018.

**Pengangkatan sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPST BNI 20 Maret 2018 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 7 September 2018.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi saat kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Atas hal tersebut maka Anggota Komisaris hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan;
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank dan atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan;
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BNI, Bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) DEWAN KOMISARIS

Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya, setiap awal tahun Dewan Komisaris menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi. Penyusunan RKA tersebut sebagaimana diwajibkan dalam:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Pasal 12 ayat (5) yang mengatur bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan RKAP, serta;
2. Anggaran Dasar BNI pasal 17 ayat (2) yang mengatur bahwa Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan (RKAP) yang disusun oleh Direksi.

MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Melalui Rapat Dewan Komisaris
Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara internal Dewan Komisaris, atau dengan mengundang Direkur sektor atau *Senior Executive Vice President* yang terkait dengan agenda Rapat, serta Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara rutin.
2. Peran aktif Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam membantu dan mendukung kelancaran tugas Dewan Komisaris antara lain melalui pelaksanaan rapat-rapat Komite serta evaluasi, kajian atau penelaahan terhadap hal-hal yang menjadi tugas Dewan Komisaris.
3. Pemberian arahan dan pendapat Dewan Komisaris secara tertulis kepada Direksi sebagai tanggapan terhadap laporan pelaksanaan tugas Direksi, permohonan persetujuan atau konsultasi yang disampaikan oleh Direksi serta terhadap informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang bersifat strategis dan signifikan.
4. Pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke lingkungan unit kerja BNI serta pemberian arahan dan pendapat Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan hasil kunjungan Kerja Dewan Komisaris dimaksud.

REALISASI TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Selama Tahun 2018 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BNI yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan awal tahun yang antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan fungsi pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB), antara lain:
 - a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank tahun 2018, antara lain evaluasi terhadap *Corporate Plan* BNI dan RBB serta kinerja keuangan tahun 2018 setiap bulan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap upaya pencapaian RBB, khususnya terhadap pencapaian beberapa aspek penting rencana bisnis seperti penyaluran kredit, perbaikan kualitas aset, penghimpunan dana pihak ketiga, produktivitas dan efisiensi;
 - c. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan Revisi RBB Tahun 2018 - 2020
 - d. Melakukan evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester serta menyampaikan laporan pengawasan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan RBB 2019-2021 dan *Corporate Plan* BNI 2019-2023.



2. Mengevaluasi Kinerja Keuangan BNI dan kinerja keuangan Konsolidasi setiap bulan.
3. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan.
4. Melakukan *review* pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2017 yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak eksternal lainnya.
5. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal di BNI, antara lain dengan:
 - a. Memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal di BNI telah berjalan dengan baik.
 - b. Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Satuan Pengawasan Internal BNI.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal BNI, antara lain:
 - i. Melakukan evaluasi atas *internal control* atau Satuan Pengawasan Internal BNI;
 - ii. Melakukan *review* rencana dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dari pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal BNI;
 - iii. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawasan Internal BNI, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan otoritas lainnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan, auditor eksternal atau hasil audit akuntan publik, antara lain dengan memastikan adanya tindak lanjut Direksi terhadap temuan audit baik secara tertulis maupun secara lisan;
 - iv. Melakukan *review* atas pokok-pokok hasil audit dari Satuan Pengawasan Internal BNI yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
6. Melakukan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank Semester II-2016 dan Semester I-2017 dan mendukung Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
7. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Manajemen Risiko BNI serta Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain:
 - a. Mengevaluasi tugas Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan aktivitas dan risiko Bank telah dilaksanakan secara efektif;
 - b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko BNI dan strategi Manajemen Risiko;
 - c. Melakukan *review* atas Profil Risiko secara triwulanan, serta melakukan evaluasi atas posisi dan perkembangan risiko BNI secara berkala;
 - d. Memastikan kebijakan dan proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses Manajemen Risiko secara keseluruhan;
 - e. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala;
 - f. Memberikan persetujuan Kebijakan/Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - g. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan serta memastikan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI untuk mendukung penerapan manajemen risiko Terintegrasi secara efektif.
8. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan di BNI antara lain dengan:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan di BNI, memastikan bahwa fungsi kepatuhan di BNI telah dilaksanakan dengan baik serta memberikan saran kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan.
 - b. Melakukan *review* atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang disampaikan Direksi secara berkala.
 - c. Melakukan pemantauan terhadap implementasi Strategi Anti *Fraud*, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), serta Prinsip Mengenal Nasabah.
9. Berkenaan dengan penerapan prinsip dan praktik penerapan Tata Kelola yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG):
 - a. Memastikan terselenggaranya penerapan prinsip dan praktik GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BNI serta pada Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG dalam Konglomerasi Keuangan BNI serta melakukan evaluasi/*review* Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka penyempurnaan;
 - c. Mendorong penyempurnaan praktik GCG dengan mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *international best practices*;
 - d. Melakukan *review* terhadap laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan Direksi;
 - e. Melakukan pemantauan terhadap hasil *self assessment* GCG, serta melakukan *self assessment* penilaian efektivitas implementasi GCG Dewan Komisaris termasuk Komite-komite di bawah Dewan Komisaris setiap semester sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan Anak serta kebijakan Direksi yang terkait dengan penciptaan sinergi dan penguatan bisnis Perusahaan anak.

11. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana strategis, pelaksanaan Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait Teknologi Informasi BNI.
12. Melakukan *review* terhadap laporan perkembangan perkara materiil secara berkala.
13. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit oleh Direksi antara lain:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit dan pembiayaan yang telah dituangkan dalam RBB.
 - b. Memberikan saran dan pendapat atas keputusan Direksi terhadap pemberian fasilitas kredit di atas jumlah tertentu yang wajib dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
 - c. Memberikan persetujuan atas pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
 - d. Melakukan *review* secara rutin dan berkala terhadap perkembangan dan tindak lanjut kredit-kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
 - e. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas kebijakan dan strategi perkreditan sesuai kewajiban yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Melakukan *review* secara berkala terhadap perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan termasuk *Non Performing Loan* (NPL).
14. Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengembangan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya berkenaan dengan fungsi strategis Sumber Daya Manusia dalam mendukung pencapaian kinerja Bank.
15. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Sektor secara berkala termasuk pencapaian rencana kerja Direktur Sektor, khususnya terkait isu-isu yang bersifat strategis dan signifikan.
16. Melakukan *review* Kinerja Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) selaku Dewan Pengawas DPLK.
17. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan dan sistem remunerasi di BNI termasuk remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta pegawai.
18. Memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan antara lain:
 - a. Persetujuan investasi BNI;
 - b. Pemberian kredit kepada Pihak terkait;
 - c. Persetujuan Penataan Organisasi BNI;
 - d. Persetujuan Revisi Rencana Bisnis BNI Tahun 2018-2020;
 - e. Persetujuan Rencana Bisnis BNI tahun 2019-2021;
 - f. Persetujuan *Corporate Plan* BNI 2019-2023;
 - g. Persetujuan Dokumen *Recovery Plan* BNI;
 - h. Persetujuan Pengurus Perusahaan Anak BNI;
 - i. Persetujuan terhadap Kebijakan-kebijakan atau Pedoman Perusahaan.
19. Menyampaikan laporan kepada Kementerian BUMN berupa tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan kinerja BNI setiap triwulan sebagai tindak lanjut Surat Menteri BUMN pada tahun 2014 kepada Dewan Komisaris BNI bahwa dalam rangka mengefektifkan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja BUMN, Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan pendapat dan tanggapan atas laporan kinerja BNI untuk periode triwulanan.
20. Mengadakan Rapat-Rapat Dewan Komisaris baik Rapat internal Dewan Komisaris maupun dengan mengundang anggota Direksi atau Direktur Sektor terkait serta Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara teratur untuk membahas aspek-aspek tertentu seperti aspek bisnis, organisasi, manajemen risiko, pengendalian internal hukum dan kepatuhan, sumber daya manusia, teknologi dan lain-lain yang diselenggarakan secara rutin sebanyak 52 (lima puluh dua) kali pertemuan.
21. Melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah atau Cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.



KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris 18 (delapan belas) keputusan, yaitu:

1. Pedoman Konsultasi Kredit.
2. Ketentuan Umum Pengangkatan, Pemberhentian, Pengaturan Tugas serta Honorarium Anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.
3. Penyesuaian Honorarium Anggota Independen Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
4. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Ahmad Fikri Assegaf sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Pengangkatan Saudara Ari Kuncoro sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Pengangkatan Saudara Ahmad Fikri Assegaf sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
7. Pengangkatan Saudari Pasu Donnaria sebagai Anggota Independen Komite Audit.
8. Pengangkatan Saudari Idayu Nilawati sebagai Sekretaris Independen Komite Nominasi dan Remunerasi.
9. Penetapan Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2018 dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun 2017.
10. Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
11. Pengakhiran Pengangkatan Saudari Nurul Almy Firdausi dan Pengangkatan Saudara Mamat Rohimat sebagai Staf Sekretariat Dewan Komisaris.
12. Pengukuhan Pengakhiran Pengangkatan Saudara Krisna Wijaya sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
13. Pengangkatan Saudara Irwan Rinaldi sebagai Anggota Independen Komite Pemantau Risiko.
14. Pengangkatan Saudara Sigit Widyawan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
15. Pedoman Nominasi Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
16. Pengangkatan Saudara Suhendry Hafni sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
17. Pengangkatan Saudara Parikesit Suprpto sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
18. Pengangkatan Saudari Efitra Praharani sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

MEKANISME RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Di samping itu Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Sebagai pedoman bagi pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, maka Dewan Komisaris telah menetapkan tata cara dan mekanisme pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang secara umum diatur dalam dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/049/DK/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/010/DK/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang pada pokoknya memuat ketentuan mengenai:

1. Jadwal Rapat;
2. Agenda Rapat;
3. Tempat Pelaksanaan Rapat;
4. Peserta Rapat;
5. Kuasa dan Perwakilan;
6. Pemanggilan Rapat;
7. Kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat;
8. Dokumentasi Pelaksanaan Rapat dan Pengelolaan Administrasi Risalah Rapat;
9. Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat;
10. Rapat Dewan Komisaris melalui Media Telekonferensi;
11. Format dan Materi Bahan Presentasi Rapat.

Rapat Dewan Komisaris (Rakom) terdiri dari:

1. Rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari:
 - a. Rapat Internal Dewan Komisaris.
 - b. Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Bidang/Sektor atau Senior *Executive Vice President* (SEVP) terkait.
2. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Radikom) yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang dihadiri *Corporate Secretary* dan Sekretaris Dewan Komisaris.



AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DEWAN KOMISARIS

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2018, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
1.	11 Januari 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Independen Komite. • Laporan Komite Audit mengenai Kinerja BNI sampai dengan Desember 2017. • <i>Overview</i> SK Dewan Komisaris mengenai Pedoman Konsultasi Kredit BNI. • Laporan Komite Pemantau Risiko mengenai hasil <i>review</i> terhadap kredit-kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. • <i>Monitoring</i> tindak lanjut rapat sebelumnya. 	<p>Ari Kuncoro*)</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p>	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	
2.	18 Januari 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait. • <i>Monitoring</i> tindak lanjut rapat sebelumnya. • Dokumen persetujuan penambahan modal pada Perusahaan Anak. <p><u>Rapat dengan mengundang Direktur Sektor terkait Konsultasi kredit-kredit kepada Dewan Komisaris.</u></p>	<p>Ari Kuncoro*)</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p>	<p>Tidak Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	<p>Dinas</p> <p>Dinas</p>
3.	25 Januari 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Harga Perkiraan sendiri (HPS) Pengadaan Jasa <i>General Audit</i> atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan lainnya BNI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. • Keputusan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait. • <i>Monitoring</i> tindak lanjut rapat sebelumnya. <p><u>Rapat dengan mengundang Direktur Sektor Terkait Kredit Berisiko Tinggi.</u></p>	<p>Ari Kuncoro*)</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p>	<p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p>	<p>Dinas</p> <p>Dinas</p>
4.	1 Februari 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kredit kepada pihak terkait. • <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. • Laporan tindak lanjut surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. • Laporan Komite Audit mengenai hasil <i>review</i> terhadap Hasil Penilaian Sendiri (HPS) atas Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP). <p><u>Rapat dengan mengundang Direktur Sektor terkait Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit.</u></p>	<p>Ari Kuncoro*)</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p>	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p>	<p>Dinas</p>



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
5.	8 Februari 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoring Tindak lanjut Rapat sebelumnya. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan Komite Audit mengenai pokok-pokok saran dan pendapat Komite Audit triwulan IV-2017. 	<p>Ari Kuncoro*)</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p>	<p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	<p>Dinas</p> <p>Dinas</p>
6.	15 Februari 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko mengenai Hasil Penilaian Sendiri (HPS) atas Penerapan Manajemen Risiko DPLK BNI. Laporan Komite Pemantau Risiko mengenai hasil review kredit-kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. Laporan Komite Audit mengenai hasil review kinerja Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI. Monitoring tindak lanjut Rapat sebelumnya. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. 	<p>Ari Kuncoro*)</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p>	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	
7.	22 Februari 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengenai evaluasi fungsi Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI Semester II-2017. Monitoring tindak lanjut Rapat sebelumnya. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <p><u>Rapat dengan mengundang Direktur Sektor Terkait</u> Laporan Hasil Penilaian Sendiri (HPS) atas penerapan Manajemen Risiko DPLK BNI per 31 Desember 2017.</p>	<p>Ari Kuncoro*)</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p>	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	
8.	1 Maret 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoring tindak lanjut Rapat sebelumnya. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <p><u>Rapat dengan mengundang Direktur Sektor Terkait</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Perusahaan Anak. Mitigasi Risiko Pendanaan Proyek Infrastruktur BUMN. 	<p>Ari Kuncoro*)</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p>	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	
9.	8 Maret 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Pemantau Risiko mengenai hasil review terhadap kredit-kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. Laporan Komite Audit mengenai hasil review terhadap Usulan Kantor Akuntan Publik. Laporan Komite Audit mengenai hasil review terhadap pelepasan asset BNI di Pare-pare. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <p><u>Rapat dengan mengundang Direktur Sektor Terkait</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan jaringan dan perkembangan Kartu Tani. Kinerja Tresuri dan transaksi luar negeri serta pengelolaan cabang luar negeri. 	<p>Ari Kuncoro*)</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p>	<p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	<p>Dinas</p>



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
10.	15 Maret 2018	<p><u>Pembahasan Komite Nominasi dan Remunerasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan mengenai Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2017. Format KPI untuk Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2018. Presentasi Kajian Remunerasi. <p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoring tindak lanjut Rapat sebelumnya. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrison Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p>	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	
11.	20 Maret 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoring tindak lanjut Rapat sebelumnya. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrison Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p>	<p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	Dinas
12.	29 Maret 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi. Penataan organisasi Direksi BNI (Pembidangan Direksi BNI). Persetujuan honorarium KAP untuk audit tahun 2018. Persetujuan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada pihak terkait. Rencana Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Kantor Wilayah BNI. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrison Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan**)</p>	<p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	Dinas
13.	5 April 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut RUPS: Usulan remunerasi dan batasan/<i>threshold</i> perbuatan Direksi yang perlu persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Laporan Komite Pemantau Risiko mengenai hasil <i>review</i> terhadap kredit-kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. Monitoring tindak lanjut Rapat sebelumnya. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <p><u>Rapat dengan mengundang Direktur Sektor Terkait</u> Strategi Digital Banking.</p> <p><u>Rapat dengan mengundang SEVP Terkait</u> BNI Corporate University & Pelatihan Dewan Komisaris.</p>	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrison Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan**)</p>	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	
14.	26 April 2018	<p><u>Rapat dengan mengundang Direktur Sektor terkait</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Review Auto Write Off Kartu Kredit <p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Pemantau Risiko mengenai hasil <i>review</i> kredit-kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. Review Keanggotaan Komite Independen. Batasan/<i>threshold</i> perbuatan Direksi yang perlu mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Monitoring tindak lanjut Rapat sebelumnya. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrison Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan**)</p>	<p>Tidak Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	Dinas Dinas



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
15.	3 Mei 2018	<p><u>Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Sektor terkait</u> Monitoring progress pemberian kredit kepada grup debitur.</p> <p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengangkatan kembali anggota Independen Komite dan Sekretaris Komite. Monitoring tindak lanjut Rapat sebelumnya. Laporan surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. 	<p>Ari Kuncoro Wahyu Kuncoro Revrison Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Marwanto Harjowiryono Ahmad Fikri Assegaf Sigit Widyawan**)</p>	<p>Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir</p>	Dinas
16.	17 Mei 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Usulan Direksi mengenai Pengurus Perusahaan Anak BNI. Monitoring tindak lanjut Rapat sebelumnya. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <p><u>Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Sektor</u> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan perkembangan Perkara Materil.</p>	<p>Ari Kuncoro Wahyu Kuncoro Revrison Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Marwanto Harjowiryono Ahmad Fikri Assegaf Sigit Widyawan**)</p>	<p>Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir</p>	Dinas
17.	24 Mei 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Calon pengurus Perusahaan Anak. Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Tindak lanjut Rapat sebelumnya. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Penetapan jangka waktu pengangkatan kembali anggota independen Komite Audit dan Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi. 	<p>Ari Kuncoro Wahyu Kuncoro Revrison Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Marwanto Harjowiryono Ahmad Fikri Assegaf Sigit Widyawan**)</p>	<p>Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir</p>	Dinas
18.	28 Juni 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengesahan keputusan-keputusan Dewan Komisaris di luar Rapat. Updating Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <p><u>Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor terkait</u> Revisi Rencana Bisnis BNI Tahun 2018-2020.</p>	<p>Ari Kuncoro Wahyu Kuncoro Revrison Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Marwanto Harjowiryono Ahmad Fikri Assegaf Sigit Widyawan**)</p>	<p>Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir</p>	Dinas
19.	5 Juli 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan Corporate Secretary mengenai Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/Corporate Social Responsibility (PKBL/ CSR) Tahun 2017 dan Triwulan I-2018. Laporan Komite Pemantau Risiko mengenai hasil review pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait. Rencana Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Kantor Wilayah BNI. Monitoring tindak lanjut Rapat sebelumnya. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. 	<p>Ari Kuncoro Wahyu Kuncoro Revrison Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Marwanto Harjowiryono Ahmad Fikri Assegaf Sigit Widyawan**)</p>	<p>Hadir Hadir Tidak Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Tidak Hadir Hadir</p>	Dinas Dinas Dinas Dinas
20.	12 Juli 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengenai Kinerja Keuangan BNI Konsolidasi Triwulan II-2018. Monitoring tindak lanjut Rapat sebelumnya. 	<p>Ari Kuncoro Wahyu Kuncoro Revrison Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Marwanto Harjowiryono Ahmad Fikri Assegaf Sigit Widyawan**)</p>	<p>Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir</p>	Dinas Dinas



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
21.	19 Juli 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Pemantau Risiko mengenai hasil review Profil Risiko BNI. Paparan Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan mengenai Remunerasi Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite yang berasal dari pihak independen. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. <p><u>Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor Efektivitas Pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern.</u></p>	<p>Ari Kuncoro Wahyu Kuncoro Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Marwanto Harjowiryono Ahmad Fikri Assegaf Sigit Widyawan**)</p>	<p>Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir</p>	Dinas
22.	26 Juli 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Program <i>Refreshment</i> sertifikasi Management Risiko untuk Dewan Komisaris. Penetapan honorarium staf Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. Paparan Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan mengenai Remunerasi Dewan Komisaris. <p><u>Rapat Dewan Komisaris bersama Direktur Penanganan NPL, kebijakan <i>writte off, Remedial & Recovery</i> dan <i>Pipeline</i> kredit.</u></p>	<p>Ari Kuncoro Wahyu Kuncoro Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Marwanto Harjowiryono Ahmad Fikri Assegaf Sigit Widyawan**)</p>	<p>Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir</p>	
23.	2 Agustus 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Kantor Wilayah BNI. Laporan temuan sementara pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. <p><u>Rapat dengan mengundang Direktur Sektor Kick Off Meeting Audit 2018 oleh Kantor Akuntan Publik.</u></p>	<p>Ari Kuncoro Wahyu Kuncoro Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Marwanto Harjowiryono Ahmad Fikri Assegaf Sigit Widyawan**)</p>	<p>Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir</p>	Dinas
24.	16 Agustus 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Kantor Wilayah BNI. <i>Threshold</i> kewenangan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Program <i>refreshment</i> sertifikasi Management Risiko untuk Dewan Komisaris. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya 	<p>Ari Kuncoro Wahyu Kuncoro Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Marwanto Harjowiryono Ahmad Fikri Assegaf Sigit Widyawan**)</p>	<p>Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir</p>	Dinas
25.	23 Agustus 2018	<p><u>Rapat dengan mengundang Direktur Sektor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Implementasi <i>Long Term Incentive</i> (LTI) Tahun 2018. Penyertaan modal kepada Perusahaan Anak. <p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. 	<p>Ari Kuncoro Wahyu Kuncoro Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Marwanto Harjowiryono Ahmad Fikri Assegaf Sigit Widyawan**)</p>	<p>Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir</p>	Dinas



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
26.	30 Agustus 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pencalonan Direktur Utama Perusahaan Anak. Pedoman Nominasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. <p><u>Rapat dengan mengundang Direktur Sektor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Laporan Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan mengenai Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> di BNI. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan**)</p>	<p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	<p>Dinas</p>
27.	6 September 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <p>Paparan Komite Nominasi dan Remunerasi BNI mengenai Sistem Nominasi untuk calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.</p> <p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Review</i> para Calon Direktur Utama Perusahaan Anak yang diusulkan Direksi. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. <p><u>Rapat dengan mengundang Direktur Sektor</u> Kinerja Kantor cabang Luar Negeri dan Isu strategis lainnya.</p>	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan**)</p>	<p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p>	<p>Dinas</p> <p>Dinas</p>
28.	13 September 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. <p><u>Rapat dengan mengundang Direktur Sektor</u> Kinerja Bisnis Konsumer, serta perkembangan Yap! BNI dan Agen 46.</p>	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan</p>	<p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	<p>Dinas</p>
29.	20 September 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Notulen rapat Dewan Komisaris. Evaluasi realisasi Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite 2018. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan</p>	<p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	<p>Dinas</p>
30.	26 September 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Implementasi <i>Long Term Incentive</i> (LTI) Tahun 2018. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan</p>	<p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	<p>Dinas</p> <p>Dinas</p> <p>Dinas</p>



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
31.	4 Oktober 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. <p><u>Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Sektor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Perkembangan produk baru BNI tahun 2018 dan rencana penjualan Efek Reksadana. Perkembangan kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris sd. bulan Agustus 2018. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan</p>	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	
32	11 Oktober 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi <i>Enterprise Risk Management</i> mengenai <i>stress test</i> kondisi makro terhadap kinerja BNI. Presentasi Komite-komite mengenai hasil <i>review Corporate Plan 2019-2023</i>. Penataan organisasi Direksi (Pembidangan Direksi) BNI. Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan</p>	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p>	Dinas
33.	18 Oktober 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan</p>	<p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p>	Dinas
34.	25 Oktober 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. <p><u>Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Sektor</u></p> <p>Transformasi BNI menjadi Lembaga Keuangan yang paling <i>profitable</i>.</p>	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan</p>	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p>	Dinas
35.	1 November 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. Pedoman Nominasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris. <p><u>Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Sektor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Stress Test</i> Kondisi Makro terhadap kinerja BNI. Perkembangan produk baru BNI tahun 2108, dan penjualan efek Reksadana. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan</p>	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p>	Dinas



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
36.	8 November 2018	<p><u>Komite Nominasi dan Remunerasi:</u> <i>Talent and succession</i>, serta <i>Leadership Program</i></p> <p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Tahun 2019. • Laporan Komite Audit mengenai <i>progress</i> penyelesaian temuan dan rekomendasi Satuan Pengawasan Internal serta hasil audit 2016-2018. • Peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris BNI. • Laporan <i>fraud eksternal</i>. • Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. • <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. • Pedoman Nominasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris. <p><u>Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Sektor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan <i>fraud eksternal</i>. • Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), perkembangan <i>remedial and recovery</i> serta realisasi investasi 2018. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrison Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan</p>	<p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p>	<p>Dinas</p> <p>Dinas</p>
37.	16 November 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris tahun 2019. • <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrison Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan</p>	<p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	<p>Dinas</p>
38.	22 November 2018	<p><u>Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Sektor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Progress</i> Audit Laporan Keuangan 2018. <p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Paparan Komite-komite terkait Rencana Bisnis BNI Tahun 2019-2021. • Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. • <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrison Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan</p>	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p>	<p>Dinas</p>
39.	29 November 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Dewan Komisaris terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Bisnis BNI Tahun 2019-2021. - Rencana Aksi Keuangan berkelanjutan Tahun 2019. - Dokumen <i>Recovery Plan</i> BNI Tahun 2018 - Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris 2019. - Pedoman Nominasi Calon Direksi dan Dewan Komisaris. • Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. • <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. <p><u>Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Sektor</u></p> <p><i>Supply Chain Financing</i>.</p>	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrison Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan</p>	<p>Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	<p>Dinas</p>



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
40.	6 Desember 2018	<p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. <p><u>Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Sektor</u> Persetujuan Kredit Pihak Terkait.</p>	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan</p>	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	
41.	13 Desember 2018	<p><u>Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Sektor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) tahun 2019. <p><u>Rapat Internal Dewan Komisaris</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. <i>Monitoring</i> tindak lanjut Rapat sebelumnya. 	<p>Ari Kuncoro</p> <p>Wahyu Kuncoro</p> <p>Revrisond Baswir</p> <p>Pataniari Siahaan</p> <p>Bistok Simbolon</p> <p>Joni Swastanto</p> <p>Marwanto Harjowiryono</p> <p>Ahmad Fikri Assegaf</p> <p>Sigit Widyawan</p>	<p>Tidak Hadir</p> <p>Tidak Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>	<p>Dinas</p> <p>Dinas</p>

Keterangan:

*Pengangkatan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 14 Maret 2018.

**Pengangkatan sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPST BNI 20 Maret 2018 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 7 September 2018.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2018, agenda, tanggal dan peserta rapat bersama Dewan Komisaris bersama Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Ket	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Ket
1.	11 Januari 2018	Kinerja Keuangan Konsolidasi BNI Posisi sampai dengan Desember 2017.	Ari Kuncoro*)	Hadir		Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Wahyu Kuncoro	Tidak Hadir	Dinas	Herry Sidharta	Hadir	
			Revrisond Baswir	Hadir		Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir	Dinas
			Pataniari Siahaan	Hadir		Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Bistok Simbolon	Hadir		Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Joni Swastanto	Hadir		Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Marwanto Harjowiryono	Tidak Hadir	Dinas	Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Ahmad Fikri Assegaf	Hadir		Adi Sulistyowati	Hadir	
						Panji Irawan***)	Tidak Hadir	Dinas



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Ket	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Ket
2.	22 Februari 2018	Kinerja Keuangan Konsolidasi BNI Posisi sampai dengan Januari 2018.	Ari Kuncoro*)	Hadir		Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Wahyu Kuncoro	Hadir		Herry Sidharta	Hadir	
			Revrisond Baswir	Hadir		Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Pataniari Siahaan	Hadir		Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Bistok Simbolon	Hadir		Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Joni Swastanto	Hadir		Putrama Wahyu Setyawan	Tidak Hadir	Dinas
			Marwanto Harjowiryono	Hadir		Catur Budi Harto	Hadir	
			Ahmad Fikri Assegaf	Tidak Hadir	Dinas	Adi Sulistyowati	Hadir	
					Panji Irawan***)	Hadir		
3.	29 Maret 2018	Kinerja Keuangan Konsolidasi BNI Februari 2018.	Ari Kuncoro*)	Hadir		Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Wahyu Kuncoro	Tidak Hadir	Dinas	Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Revrisond Baswir	Hadir		Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Pataniari Siahaan	Hadir		Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Bistok Simbolon	Hadir		Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Joni Swastanto	Hadir		Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Marwanto Harjowiryono	Hadir		Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Ahmad Fikri Assegaf	Hadir		Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Sigit Widyawan**)	Hadir		Dadang Setiabudi****)	Hadir	
						Tambok P. Setyawati****)	Hadir	
			Endang Hidayatullah****)	Hadir				



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Ket	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Ket
4.	18 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Konsolidasi BNI Posisi sampai dengan Maret 2018. Kredit-kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris pada bulan Maret 2018. 	Ari Kuncoro*)	Tidak Hadir	Dinas	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Wahyu Kuncoro	Tidak Hadir	Dinas	Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Revrisond Baswir	Hadir		Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Pataniari Siahaan	Hadir		Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir	Dinas
			Bistok Simbolon	Hadir		Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Joni Swastanto	Hadir		Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Marwanto Harjowiryono	Hadir		Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Ahmad Fikri Assegaf	Hadir		Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Sigit Widyawan**)	Hadir		Dadang Setiabudj****)	Hadir	
						Tambok P. Setyawati****)	Hadir	
			Endang Hidayatullah****)	Hadir				
5.	24 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Konsolidasi BNI Posisi sampai dengan April 2018. Keputusan pemberian fasilitas kredit bulan April 2018 yang perlu dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. 	Ari Kuncoro*)	Hadir		Achmad Baiquni	Hadir	
			Wahyu Kuncoro	Tidak Hadir	Dinas	Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Revrisond Baswir	Hadir		Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Pataniari Siahaan	Hadir		Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Bistok Simbolon	Hadir		Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Joni Swastanto	Hadir		Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Marwanto Harjowiryono	Hadir		Catur Budi Harto	Hadir	
			Ahmad Fikri Assegaf	Hadir		Adi Sulistyowati	Hadir	
			Sigit Widyawan**)	Hadir		Dadang Setiabudj****)	Hadir	
						Tambok P. Setyawati****)	Hadir	
			Endang Hidayatullah****)	Hadir				



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Ket	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Ket
6.	12 Juli 2018	Kinerja Keuangan Bulan Mei dan Juni 2018.	Ari Kuncoro*)	Hadir		Achmad Baiquni	Hadir	
			Wahyu Kuncoro	Tidak Hadir	Dinas	Herry Sidharta	Hadir	
			Revrisond Baswir	Hadir		Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Pataniari Siahaan	Hadir		Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Bistok Simbolon	Tidak Hadir	Dinas	Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Joni Swastanto	Hadir		Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Marwanto Harjowiryono	Hadir		Catur Budi Harto	Hadir	
			Ahmad Fikri Assegaf	Hadir		Adi Sulistyowati	Hadir	
			Sigit Widyawan**)	Hadir		Dadang Setiabudi	Hadir	
								Tambok P. Setyawati
					Endang Hidayatullah	Hadir		
7.	23 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan BNI bulan Juli 2018. Kredit-kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris bulan Mei – Juli 2018. 	Ari Kuncoro*)	Hadir		Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Wahyu Kuncoro	Tidak Hadir	Dinas	Herry Sidharta	Hadir	
			Revrisond Baswir	Tidak Hadir	Dinas	Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Pataniari Siahaan	Hadir		Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Bistok Simbolon	Hadir		Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Joni Swastanto	Hadir		Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Marwanto Harjowiryono	Tidak Hadir	Dinas	Catur Budi Harto	Hadir	
			Ahmad Fikri Assegaf	Hadir		Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Sigit Widyawan**)	Hadir		Dadang Setiabudi	Hadir	
								Tambok P. Setyawati
					Endang Hidayatullah	Tidak Hadir	Dinas	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Ket	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Ket
8.	20 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Bulan Agustus 2018. Keputusan Pemberian Fasilitas Kredit Bulan Agustus 2018 yang perlu dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. 	Ari Kuncoro*)	Hadir		Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Wahyu Kuncoro	Tidak Hadir	Dinas	Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Revrisond Baswir	Hadir		Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Pataniari Siahaan	Hadir		Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Bistok Simbolon	Hadir		Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Joni Swastanto	Hadir		Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Marwanto Harjowiryono	Tidak Hadir	Dinas	Catur Budi Harto	Hadir	
			Ahmad Fikri Assegaf	Hadir		Adi Sulistyowati	Hadir	
			Sigit Widyawan	Hadir		Dadang Setiabudi	Hadir	
						Tambok P. Setyawati	Hadir	
			Endang Hidayatullah	Hadir				
9.	11 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> Corporate Plan BNI. Kinerja Keuangan bulan September 2018. Keputusan pemberian fasilitas kredit bulan September 2018 yang perlu dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. 	Ari Kuncoro*)	Tidak Hadir	Dinas	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Wahyu Kuncoro	Hadir		Herry Sidharta	Hadir	
			Revrisond Baswir	Hadir		Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Pataniari Siahaan	Hadir		Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Bistok Simbolon	Hadir		Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Joni Swastanto	Hadir		Putrama Wahyu Setyawan	Tidak Hadir	Dinas
			Marwanto Harjowiryono	Tidak Hadir	Dinas	Catur Budi Harto	Hadir	
			Ahmad Fikri Assegaf	Hadir		Adi Sulistyowati	Hadir	
			Sigit Widyawan	Tidak Hadir	Dinas	Dadang Setiabudi	Hadir	
						Tambok P. Setyawati	Hadir	
			Endang Hidayatullah	Hadir				



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Ket	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Ket
10.	22 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Konsolidasi bulan Oktober 2018. Rencana Bisnis Bank BNI Tahun 2019-2021. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2019. Kredit-kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris bulan Oktober tahun 2018. 	Ari Kuncoro*)	Hadir		Achmad Baiquni	Hadir	
			Wahyu Kuncoro	Hadir		Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Revrisond Baswir	Hadir		Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Pataniari Siahaan	Hadir		Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Bistok Simbolon	Hadir		Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Joni Swastanto	Hadir		Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Marwanto Harjowiryono	Hadir		Catur Budi Harto	Hadir	
			Ahmad Fikri Assegaf	Tidak Hadir	Dinas	Adi Sulistyowati	Hadir	
			Sigit Widyawan	Hadir		Dadang Setiabudi	Hadir	
						Tambok P. Setyawati	Hadir	
			Endang Hidayatullah	Tidak Hadir	Dinas			
11.	13 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Konsolidasi November 2018 dan Prognosa Desember 2018. Keputusan Pemberian Fasilitas Kredit bulan November 2018 yang perlu dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. 	Ari Kuncoro*)	Tidak Hadir	Dinas	Achmad Baiquni	Hadir	
			Wahyu Kuncoro	Tidak Hadir	Dinas	Herry Sidharta	Hadir	
			Revrisond Baswir	Hadir		Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Pataniari Siahaan	Hadir		Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir	Dinas
			Bistok Simbolon	Hadir		Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Joni Swastanto	Hadir		Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Marwanto Harjowiryono	Tidak Hadir	Dinas	Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Ahmad Fikri Assegaf	Hadir		Adi Sulistyowati	Hadir	
			Sigit Widyawan	Hadir		Dadang Setiabudi	Hadir	
						Tambok P. Setyawati	Hadir	
			Endang Hidayatullah	Tidak Hadir	Dinas			

Keterangan:

*) Pengangkatan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 14 Maret 2018.

**) Pengangkatan sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 13 September 2018.

***) Berhenti menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 20 Maret 2018.

****) Pengangkatan sebagai Direktur oleh RUPS efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 5 Juli 2018.



FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan 41 (empat puluh satu) kali rapat Dewan Komisaris serta 11 (sebelas) kali rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Berikut frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing anggota Dewan Komisaris:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Ari Kuncoro*	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	32	28	87,50	9	6	66,66
Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	41	26	63,41	11	3	27,27
Revrisond Baswir	Komisaris Independen	41	37	90,24	11	10	90,91
Pataniari Siahaan	Komisaris Independen	41	38	92,68	11	11	100
Bistok Simbolon	Komisaris	41	38	92,68	11	10	90,91
Joni Swastanto	Komisaris	41	41	100	11	11	100
Marwanto Harjowirjono	Komisaris	41	39	95,12	11	8	72,73
Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen	41	33	80,48	11	9	81,82
Sigit Widyawan**	Komisaris Independen	13	13	100	4	3	75,00

Keterangan:

*Pengangkatan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB BNI 2 November 2017 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 14 Maret 2018.

**Pengangkatan sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPST BNI 20 Maret 2018 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 7 September 2018.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pada periode 2018, Dewan Komisaris yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sertifikasi
Ari Kuncoro*	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Level 2
Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama	Level 1
Revrisond Baswir	Komisaris Independen	Level 2
Pataniari Siahaan	Komisaris Independen	Level 2
Bistok Simbolon	Komisaris	Level 1
Joni Swastanto	Komisaris	Level 1
Marwanto Harjowirjono	Komisaris	Level 1
Ahmad Fikri Assegaf	Komisaris Independen	Level 2
Sigit Widyawan**	Komisaris Independen	Level 2

Keterangan:

*Pengangkatan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB BNI 2 November 2017 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 14 Maret 2018.

**Pengangkatan sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPST BNI 20 Maret 2018 dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 7 September 2018.



PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui berbagai macam prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS OLEH RUPS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada saat penyampaian Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS dalam Laporan Tahunan Perseroan, di mana berdasarkan laporan tersebut RUPS menyatakan serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS OLEH RUPS

Kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2018 tercermin dari pencapaian realisasi Program Kerja/Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris tahun 2018 yang seluruhnya tercapai.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESMENT

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS OLEH RUPS

Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Tahunan Perseroan. Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dipergunakan sebagai pedoman kerja bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan BNI selama tahun berjalan. Selama tahun 2018, Kinerja Dewan Komisaris dilihat dari pencapaian realisasi Program Kerja/Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris tahun 2018 yang seluruhnya tercapai.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS MELALUI ASSESMENT GCG

Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui *Self Assesment* GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Pelaksanaan *Self Assesment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap

semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS MELALUI ASSESMENT GCG

Kriteria *Self Assesment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG kriteria *Self Assesment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Government Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESMENT

Pihak yang melakukan *Self Assesment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

HASIL PENILAIAN

Hasil *self assessment* GCG BNI periode 31 Desember 2018 BNI mendapat nilai komposit 2 (baik). Faktor-faktor positif *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang ada pada Dewan Komisaris dan dituangkan dalam *Self Assesment* GCG periode 31 Desember Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Struktur Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di mana 55.5% (lima puluh lima koma lima persen) Dewan Komisaris berasal dari pihak independen.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator (dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
4. Dewan Komisaris telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan diupdate secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan GCG.
5. Dewan Komisaris telah dan terus berupaya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain melalui forum rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris bersama Direksi atau Direktur Sektor secara rutin rata-rata setiap minggu untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG. Seluruh hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik.
6. Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dan telah diterima oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

TATA KELOLA REMUNERASI

BNI telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris yang mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Dalam Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris disebutkan bahwa remunerasi yang diberikan bersifat tetap dan variabel. Pemberian remunerasi yang bersifat tetap dan variabel didasarkan pada skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat Tetap juga memperhatikan perbedaan (*gap*) remunerasi antar tingkat jabatan, sehingga mencegah potensi terjadinya konflik internal dan risiko operasional seperti *fraud* atau risiko operasional lainnya. Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat Variabel, Perseroan telah mendasarkan pada *prudent risk taking* yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi serta melakukan evaluasi secara berkala melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.

Berdasarkan Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, RUPS menyetujui sebagai berikut :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2018.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris.
2. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris akan menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi yang berbentuk gaji/honorarium dan tantiem tersebut untuk disetujui oleh RUPS.



STRUKTUR REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Adapun struktur remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi/ Fasilitas	Keterangan
Honorarium	<ol style="list-style-type: none"> Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.
TUNJANGAN	
Hari Raya	Dewan Komisaris diberikan tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali honorarium
Transportasi	Dewan Komisaris diberikan transportasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium.
Asuransi Purna Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> Diberikan selama menjabat. Premi yang ditanggung Perusahaan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium dalam satu tahun. Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.
FASILITAS	
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris serta suami/isteri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Rawat jalan dan obat; Rawat inap dan obat; Medical check up dengan ketentuan 1 (satu) kali setiap tahun dan dilakukan di dalam negeri. Apabila Dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri, fasilitas kesehatan diberikan secara penuh.
Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Dewan Komisaris diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (<i>at cost</i>). Fasilitas bantuan hukum dianggarkan atas beban Perseroan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Fasilitas bantuan hukum hanya dapat digunakan selama masih menjabat atau sudah berhenti dari jabatannya atas kebijakan yang diambil selama menjabat dan tidak dapat diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Dalam hal anggota Dewan Komisaris menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan. Tata cara prosedur bantuan hukum bagi Dewan Komisaris dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang Mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Dalam menetapkan indikator Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 sebagai berikut:

- Faktor skala usaha.
- Faktor kompleksitas usaha.
- Tingkat inflasi.
- Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.
- Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Pengungkapan komponen remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

Berikut Jumlah nominal/komponen remunerasi Dewan Komisaris.

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Orang	Jutaan Rp
REMUNERASI		
Gaji	9	13.686,34
Tunjangan Perumahan	-	-
Tunjangan Transportasi	9	2.737,37
Tunjangan Hari Raya	9	1.168,65
Tantiem	9	45.142,81
Fasilitas Lain Dalam Bentuk Natura		
• Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-
• Transportasi (tidak dapat dimiliki)	-	-
• Asuransi Purna Jabatan (dapat dimiliki)	9	3.421,59
• Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	9	43,07

Komposisi honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

1. Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama.
2. Wakil Komisaris Utama sebesar 42.5% dari gaji Direktur Utama.
3. Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama.

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah Remunerasi	Jumlah Komisaris	Jutaan Rp
Di atas Rp2 miliar	9	66.199,83
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp500 juta - Rp1miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-



KELENGKAPAN ORGAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 organ pendukung Dewan Komisaris dapat terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris jika diperlukan, Komite Audit dan dan komite lain jika diperlukan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu organ-organ sebagai berikut:

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit (KA), Komite Pemantau Risiko (KPR), Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) dan Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT). Pembentukan dan pelaksanaan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dewan Komisaris menetapkan suatu pedoman yang mengatur tata cara pengangkatan, pemberhentian, pengaturan tugas serta honorarium anggota Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Pembaharuan terakhir dilakukan pada tahun 2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/002/DK/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang "Ketentuan Umum Pengangkatan, Pemberhentian, Pengaturan Tugas serta Honorarium Anggota Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris" yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tata Cara Pengangkatan anggota Komite.
2. Pokok-pokok materi yang perlu diatur dalam perjanjian kerja anggota Komite yang berasal dari pihak independen dengan BNI.
3. Rangkap jabatan yang mengatur rangkap jabatan yang diperbolehkan dan yang dilarang bagi anggota Komite berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Jangka waktu pengangkatan/masa jabatan anggota Komite.
5. Pembagian tugas dan ruang lingkup tugas Komite.
6. Kewajiban kehadiran anggota Komite pada Perseroan.
7. Honorarium bagi anggota Komite yang berasal dari pihak independen.
8. Evaluasi/penilaian kinerja anggota Komite yang berasal dari pihak independen.
9. Pengakhiran Pengangkatan anggota Komite.
10. Pengunduran diri anggota Komite.

MEKANISME KERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris berpedoman kepada Piagam Komite masing-masing Komite. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai Program Rencana Kerja masing-masing Komite yang ditetapkan pada awal tahun dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dengan melakukan pemantauan, penelaahan/*review* serta pemberian saran atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang terkait dengan fungsi dan tugas komite-komite yang bersangkutan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Komite melakukan rapat baik secara internal maupun dengan mengundang satuan dan/atau divisi dan/atau unit terkait.
2. Komite melakukan penelaahan/evaluasi/*review* serta diskusi/pembahasan di luar forum rapat yang apabila diperlukan dilakukan diskusi bersama satuan atau divisi-divisi/unit-unit terkait.
3. Hasil rapat atau/evaluasi/*review* serta diskusi/pembahasan di luar forum rapat disampaikan oleh Ketua Komite kepada Dewan Komisaris sebagai laporan baik secara tertulis atau dalam forum Rapat Dewan Komisaris yang membahas agenda terkait.
4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris menyampaikan laporan realisasi program kerja/kegiatannya setiap triwulan kepada Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite – komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Penilaian Kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris tersebut tercermin dari telah dilaksanakannya seluruh program/ rencana Kerja Komite-komite yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan baik. Pelaksanaan Program/Rencana kerja komite-komite tersebut dilakukan melalui mekanisme:

1. Pelaksanaan Rapat komite termasuk dengan mengundang Direktur sektor atau divisi-divisi/Satuan kerja terkait.
2. Penelaahan/evaluasi/*review* komite di luar forum rapat yang hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Penjelasan realisasi penyelesaian seluruh program/rencana kerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang ditetapkan pada awal tahun dapat dilihat pada bagian Tata Kelola masing-masing komite tersebut dalam sub bab frekuensi dan tingkat kehadiran Rapat dan laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PENILAIAN ATAU EVALUASI ANGGOTA KOMITE YANG BERASAL DARI PIHAK INDEPENDEN

Ketua komite melakukan evaluasi/penilaian terhadap kinerja anggota komite yang berasal dari pihak independen dalam jangka waktu setiap 6 (enam) bulan maupun sewaktu-waktu. Evaluasi atau penilaian tersebut meliputi Indikator Penilaian Kinerja yang antara lain namun tidak terbatas pada kompetensi dan keahlian, kualitas *output*, kedisiplinan dan tingkat kehadiran anggota komite yang bersangkutan pada BNI, serta pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan piagam komite dan tata tertib kerja yang berlaku bagi anggota independen komite di bawah Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memperpanjang atau melanjutkan atau mengakhiri pengangkatan anggota komite yang bersangkutan pada BNI.

Penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan untuk anggota Komite dari Pihak Independen (bukan Dewan Komisaris). Adapun Faktor penilaiannya adalah:

1. Tugas sesuai Piagam Komite (bobot 25%)
2. Kompetensi dan *Skill* (bobot 30%)
3. Kualitas *Output* (bobot 30%)
4. Tingkat Kehadiran (15%)

KEWAJIBAN KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE YANG BERASAL DARI PIHAK INDEPENDEN

Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan (anggota independen) memiliki kewajiban untuk hadir secara rutin pada hari dan jam kerja Perseroan sesuai hari, jumlah hari dan jadwal yang ditetapkan Dewan Komisaris dan/atau Ketua Komite, antara lain untuk menghadiri Rapat Komite dan melaksanakan tugas-tugas lainnya, dan wajib mengisi daftar hadir pada Bank dalam rangka pelaksanaan tugas selain menghadiri Rapat Komite. Apabila diperlukan, atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Ketua Komite, anggota Komite yang berasal dari luar BNI juga wajib hadir pada BNI atau pada Rapat Dewan Komisaris atau Ketua Komite, atau pada kegiatan yang harus dihadiri oleh Dewan Komisaris sesuai dengan keperluannya di luar frekuensi dan jadwal kehadiran rutin tersebut.

Penjelasan dan paparan mengenai masing-masing Komite disampaikan dalam sub bab tersendiri pada Bagian *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh Sekretaris yang berasal dari luar Perusahaan dibantu oleh staf sekretariat Dewan Komisaris. Pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN yang mengatur Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan dan paparan mengenai Kesekretariatan Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris disampaikan dalam sub bab tersendiri.



MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran dasar BNI adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dimaksud dilakukan apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
 - a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BNI dan/atau negara;
 - d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
 - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. Mengundurkan diri.
3. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan BNI.
4. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b, c dan d dan butir 3 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
5. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c dan e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
6. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar). Dalam hal terjadi keadaan tersebut maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada BNI.
8. BNI wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
9. BNI wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas
10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
12. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud pada butir 8 di atas.
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Masa jabatannya berakhir;
 - d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
 - e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum; yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan;
 - f. Berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan;
 - h. Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
15. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS



DIREKSI

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BNI untuk kepentingan BNI, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan BNI. Selain itu, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI PERATURAN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Sama halnya dengan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, maka dalam rangka menyempurnakan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan sebagai salah satu upaya implementasi praktik GCG di BNI, maka dilakukanlah suatu penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi BNI No. KP/228/DIR/R tanggal 29 Juni 2018 sehingga terhadap Surat Keputusan Direksi No. KP/150/DIR/R tanggal 11 April 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi mengatur antara lain tentang Landasan Hukum, Struktur, Persyaratan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi, Masa Jabatan Direksi, Pembentukan Komite di Bawah Direksi, Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, Waktu Kerja Direksi, Nilai Perseroan, Etika Kerja Direksi, Transparansi, serta Pelaporan dan Tanggung Jawab.

Selain beberapa hal terkait Tata Tertib Kerja yang diatur di atas, beberapa pokok pedoman kerja Direksi yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dijabarkan sebagai berikut:

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan BNI untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

WEWENANG DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam pengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;
6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, selanjutnya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Tahunan;
7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Bank, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilihan kekayaan Perseroan, mengikat Bank dengan pihak lain dan/ atau pihak lain dengan Bank, serta mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.



KEWAJIBAN DIREKSI

Selain itu, Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
4. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggung jawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
5. Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku BNI berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri di Bidang Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan BNI sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 di atas, dan dokumen Perseroan lainnya;
11. Menyimpan di tempat kedudukan BNI: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan BNI serta dokumen BNI lainnya;
12. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS.

KRITERIA DAN MASA JABATAN DIREKSI

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam:
 - a. UUPT;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.



Masa jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada peutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Pemberhentian berlaku sejak penutupan RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
3. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

NOMENKLATUR DIREKSI

RUPS Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 memutuskan perubahan nomenklatur jabatan Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur	Direktur <i>Corporate Banking</i>
2.	Direktur	Direktur <i>Retail Banking</i>
3.	Direktur	Direktur Bisnis Kecil & Jaringan
4.	Direktur	Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>
5.	Direktur	Direktur Keuangan
6.	Direktur	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
7.	Direktur	Direktur Hubungan Kelembagaan
8.	Direktur	Direktur Manajemen Risiko
9.	Direktur	Direktur Kepatuhan

DASAR PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

Proses pengangkatan Direksi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Proses nominasi dan pemilihan Direksi dilakukan dengan melihat kriteria Direksi kemudian melalui usulan kepada RUPS yang memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Direksi yang telah selanjutnya dipilih kemudian diangkat melalui RUPS.

Sesuai Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Direksi Perseroan diangkat dalam RUPS sebagai berikut:

Tabel Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Achmad Baiquni	Direktur Utama	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2015
Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2015 kemudian dialihkan penugasannya dari semula Direktur menjadi Wakil Direktur Utama pada RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2017
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur <i>Corporate Banking</i>	RUPS Tahunan 10 tanggal Maret 2016
Tambok P. Setyawati	Direktur <i>Retail Banking</i>	RUPS Tahunan 20 tanggal Maret 2018
Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2017
Rico Rizal Budidarmo	Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2015
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2015
Dadang Setiabudi	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	RUPS Tahunan 20 Maret 2018
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2015
Bob Tyasika Ananta	Direktur Manajemen Risiko	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2015
Endang Hidayatullah	Direktur Kepatuhan	RUPS Tahunan 20 tanggal Maret 2018
Imam Budi Sarjito*	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2015
Panji Irawan*	Direktur	RUPS Luar Biasa tanggal 12 Januari 2016

Keterangan:

* Berhenti menjabat sejak 20 Maret 2018



PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pengangkatan anggota Direksi berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat mengikuti proses *Fit and Proper Test*, Perseroan mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Direksinya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif Berdasarkan Surat OJK	Pelaksana	Tanggal Efektif
Achmad Baiquni	Direktur Utama	16 April 2015	Otoritas Jasa Keuangan	16 April 2015
Herry Sidharta*	Direktur Bisnis Korporasi	22 Mei 2015	Otoritas Jasa Keuangan	22 Mei 2015
	Wakil Direktur Utama	29 Mei 2017	Otoritas Jasa Keuangan	29 Mei 2017
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur <i>Corporate Banking</i>	15 Juli 2016	Otoritas Jasa Keuangan	15 Juli 2016
Tambok P. Setyawati	Direktur <i>Retail Banking</i>	5 Juli 2018	Otoritas Jasa Keuangan	5 Juli 2018
Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	19 Juli 2017	Otoritas Jasa Keuangan	19 Juli 2017
Rico Rizal Budidarmo	Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>	16 April 2015	Otoritas Jasa Keuangan	16 April 2015
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Keuangan	22 Mei 2015	Otoritas Jasa Keuangan	22 Mei 2015
Dadang Setiabudi	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	5 Juli 2018	Otoritas Jasa Keuangan	5 Juli 2018
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan	22 Mei 2015	Otoritas Jasa Keuangan	22 Mei 2015
Bob Tyasika Ananta	Direktur Manajemen Risiko	16 April 2015	Otoritas Jasa Keuangan	16 April 2015
Endang Hidayatullah	Direktur Kepatuhan	5 Juli 2018	Otoritas Jasa Keuangan	5 Juli 2018
Imam Budi Sarjito**	Direktur	22 Mei 2015	Otoritas Jasa Keuangan	22 Mei 2015
Panji Irawan**	Direktur	11 April 2016	Otoritas Jasa Keuangan	11 April 2016

Keterangan:

*Dialihkan penugasannya dari semula Direktur menjadi Wakil Direktur Utama pada RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2017.

**Berhenti menjabat sejak tanggal 20 Maret 2018.

PROGRAM PENGENALAN BAGI DIREKSI BARU

Mengingat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2018 terdapat Mata Acara Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, di mana anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat memiliki latar belakang beragam, maka BNI melakukan program pengenalan bagi anggota Direksi baru antara lain:

1. Diskusi Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Kode Etik, Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi, *Corporate Governance Handbook*, dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang ada di bawah Direksi dan Komisaris.
3. Penjelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan tersebut diberikan dengan cara melakukan presentasi oleh Unit terkait kepada anggota Direksi dimaksud serta melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah/Cabang BNI.



RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Dalam memperlancar pelaksanaan tanggung jawab dan pekerjaannya mengelola BNI, maka dilakukan pembagian tugas dan wewenang Direksi. Pembagian tugas dan wewenang Direksi dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 20 Maret 2018 terkait dengan Nomenklatur Direktur. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Bidang berwenang penuh atas SEVP atau unit kerja yang dikelolanya dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, sepanjang tidak menyimpang dari:

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Anggaran Dasar Perseroan.
3. *Corporate Plan*.
4. Kebijakan Umum Direksi (KUD), dan
5. Kebijakan khusus Direksi yang ditetapkan dalam Rapat Direksi atau dalam Surat Keputusan Direksi atau dalam bentuk tertulis lainnya.

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pembagian tugas Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas	Kantor Wilayah Binaan	Perusahaan Anak Binaan
Achmad Baiquni	Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Mengoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. Bertanggung Jawab secara keseluruhan atas tugas dan wewenang Direksi Perseroan. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Pengawasan Intern dan Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan yang di dalamnya termasuk bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan. 	-	
Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sesuai dengan pembedangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Tata Kelola Kebijakan, dan Pengembangan Perusahaan Anak. 	-	Seluruh Perusahaan Anak
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur <i>Corporate Banking</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sesuai dengan pembedangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Bisnis Korporasi dan Multinasional 1, Bisnis Korporasi dan Multinasional 2, BUMN dan Institusi Pemerintah dan Bisnis Sindikasi. 	Denpasar Yogyakarta	BNI Multifinance BNI Securities
Tambok P. Setyawati*	Direktur <i>Retail Banking</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sesuai dengan pembedangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Manajemen Produk Konsumer, Penjualan Konsumer, Bisnis Kartu, E-Banking, dan Komunikasi Pemasaran. 	Semarang Surabaya	BNI Life Insurance
Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sesuai dengan pembedangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Bisnis Usaha Kecil, Pengelolaan Jaringan, Kualitas Layanan, dan Pusat Layanan Pelanggan. 	Seluruh Kantor Wilayah	BNI Syariah
Rico Rizal Budidarmo	Direktur <i>Treasury dan International Banking</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank, sesuai dengan pembedangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Tresuri, Internasional dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. 	Jakarta Senayan	BNI Remittance



Nama	Jabatan	Bidang Tugas	Kantor Wilayah Binaan	Perusahaan Anak Binaan
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Perencanaan Strategis, Pengendalian Keuangan, Pengelolaan Aset dan Pengadaan, dan Manajemen Data. 	Makassar Manado	-
Dadang Setiabudi*	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Solusi dan Keamanan Teknologi Informasi, Operasional Teknologi Informasi, Operasional, dan E-Channel. 	Palembang Malang	-
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Hubungan Kelembagaan, Jasa Transaksional Perbankan dan Manajemen <i>Wealth</i>. 	Jakarta Kemayoran	-
Bob Tyasika Ananta	Direktur Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Manajemen Risiko Bank, Risiko Kredit Korporasi, Risiko Kredit Menengah dan Usaha Kecil, Administrasi Kredit dan Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer. 	Jakarta BSD	-
Endang Hidayatullah	Direktur Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang kepatuhan, hukum, manajemen risiko Bank, modal manusia dan BNI <i>Corporate University</i>. 	Bandung Banjarماسin	-
Imam Budi Sarjito*	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang kepatuhan, hukum, tata kelola kebijakan, dan manajemen risiko Bank. 	-	-
Panji Irawan*	Direktur Tresuri dan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Tresuri, Internasional dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. 	-	-

Keterangan:

* Berhenti menjabat sejak tanggal 20 Maret 2018.

DIREKTUR YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN

Seiring meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha BNI sebagai Bank dan Perusahaan Terbuka, diperlukan mitigasi terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan. Untuk memitigasi risiko kegiatan usaha tersebut, diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Sebagai bagian dari upaya preventif (*ex-ante*), Perseroan senantiasa mematuhi berbagai kaidah Perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi memiliki kewajiban untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka penegakan fungsi kepatuhan (*compliance*) Perseroan, maka BNI memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, di mana fungsinya berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Tata Tertib Kerja Direksi.

PERSYARATAN DIREKTUR YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan fungsinya, calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi.
3. "Persyaratan independensi" adalah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governace* bagi Bank Umum.

STRUKTUR

1. Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
2. Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dilarang membawahi fungsi-fungsi:
 - a. Bisnis dan operasional.
 - b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank.

- c. Tresuri.
 - d. Keuangan dan akuntansi.
 - e. Logistik dan pengadaan barang/jasa.
 - f. Teknologi informasi, dan.
 - g. Audit intern.
3. Penggantian Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan:
 - a. Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
 - b. Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank wajib segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, paling lama 6 (enam) bulan setelah Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya
 - c. Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Bank wajib menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
 - d. Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, wajib memenuhi persyaratan diatas, hal tersebut dikecualikan apabila di dalam Perseroan tidak terdapat Direktur yang memenuhi syarat dimaksud .
 - e. Penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil oleh Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:
 - a. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
 - b. Memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
 - d. Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai;
 - e. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia antara lain komitmen dalam *Action Plan*, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil pengawasan Bank Indonesia yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT;
 - f. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan APU dan PPT;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT;
 - h. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
 - i. Mengusulkan Laporan *Action Plan* dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada Bank Indonesia.
8. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi:
 - a. Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank;
 - b. Laporan Kepatuhan; dan
 - c. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/ atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
9. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling kurang secara triwulanan.
10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman komposisi anggota Direksi. Keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.

Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c.2 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa untuk mengusulkan calon anggota Direksi Perseroan. Serta berdasarkan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar, para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar tersebut, maka penentuan komposisi anggota Direksi yang memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dilakukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna selaku Pemegang Saham yang berhak mengajukan calon anggota Direksi.



Pada periode 2018, keberagaman komposisi Direksi Perseroan tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Achmad Baiquni	Direktur Utama	62	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Ekonomi Pembangunan S2 Bisnis Manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Konsumer BNI. Direktur Korporasi BNI. Direktur Bisnis Usawha Kecil, Menengah, dan Syariah BNI. Direktur Keuangan BRI. 	Ekonomi, Manajemen Bisnis
Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama	62	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Manajemen S2 <i>Business Administration</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Korporasi BNI. Pemimpin Divisi Usaha Menengah. Pemimpin Divisi Usaha Kecil BNI. 	Ekonomi, Manajemen Keuangan
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur <i>Corporate Banking</i>	49	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Kehutanan S2 Magister Manajemen Accounting 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Korporasi BNI. Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah BNI. Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial dan Usaha Kecil BNI. 	Kehutanan, Manajemen Bisnis
Tambok P. Setyawati	Direktur Retail Banking	55	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> S1 Pertanian Magister Manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Keuangan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. SEVP <i>Digital Banking</i> BNI. CEO <i>Region</i> Jakarta Kemayoran BNI. 	Pertanian, Manajemen, Akuntansi
Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	54	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Agronomi S2 Magister Manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Korporasi BNI. Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah BNI. 	Agronomi, Manajemen Bisnis
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Treasury dan International Banking	56	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Ekonomi Manajemen MBA dan MIS Business and Finance S3 Doktor Manajemen Bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> GM/EVP <i>Treasury</i> BRI. Direktur <i>Risk and Compliance</i> BTN. 	Manajemen Keuangan, Manajemen Bisnis, Hukum
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Keuangan	50	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Teknik Manajemen Industri S2 Agribisnis 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin BNI Kantor Wilayah Jakarta Kota. Pemimpin BNI Kantor Wilayah Jakarta BSD. Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan BNI. Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i> BNI. Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Negara Indonesia. Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). 	Manajemen Industri, Agribisnis, Manajemen



Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Dadang Setiabudi	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	57	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Akuntansi Magister Agribisnis 	<ul style="list-style-type: none"> SEVP Teknologi Informasi & Digital Banking BNI. Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Kepala Divisi Jaringan Kerja Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 	Ekonomi, Manajemen Teknologi
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan	52	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> S1 Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin BNI Kantor Wilayah Jakarta Senayan. Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan BNI. 	Ekonomi
Bob Tyasika Ananta	Direktur Manajemen Risiko	56	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Akuntansi S2 Finance 	<ul style="list-style-type: none"> General Manager Kantor Cabang Luar Negeri Hong Kong BNI. Pemimpin Divisi Internasional BNI. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI. 	Akuntansi, Manajemen Bisnis
Endang Hidayatullah	Direktur Kepatuhan	48	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Hukum Magister Manajemen Pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Hukum BNI. Wakil Pemimpin Divisi Hukum BNI. 	Hukum
Panji Irawan*	Direktur	54	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya 	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris PT Mandiri Sekuritas. Executive Vice President. Treasury Group Bank. Mandiri (Persero) Tbk, Ketua Association Cambiste Internationale (ACI) Indonesia. Chairman Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC). 	Manajemen
Imam Budi Sarjito*	Direktur	60	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Ekonomi S2 Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management BNI. Komisaris PT BNI Syariah. 	Ekonomi

Keterangan:

* berhenti menjabat sejak 20 Maret 2018.



JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada periode 2018, jumlah dan komposisi Direksi mengalami perubahan dengan komposisi sebagai berikut:

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI SEBELUM RUPS TAHUNAN 20 MARET 2018

Jumlah dan komposisi Direksi sebelum RUPS Tahunan 20 Maret 2018 berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 8 (delapan) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BNI.

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Efektif
Achmad Baiquni	Direktur Utama	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama	Jakarta	17 Maret 2015 (pengangkatan sebagai Direktur). 16 Maret 2017 (pengalihan menjadi Wakil Direktur Utama)	22 Mei 2015 29 Mei 2017
Rico Rizal Budidarmo	Direktur <i>Treasury & International Banking</i>	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Bob Tyasika Ananta	Direktur Manajemen Risiko	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Keuangan	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Tambok P. Setyawati	Direktur <i>Retail Banking</i>	Jakarta	20 Maret 2018	5 Juli 2018
Dadang Setiabudi	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Jakarta	20 Maret 2018	5 Juli 2018
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur <i>Corporate Banking</i>	Jakarta	10 Maret 2016	15 Juli 2016
Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil & Jaringan	Jakarta	16 Maret 2017	19 Juli 2017
Endang Hidayatullah	Direktur Kepatuhan	Jakarta	20 Maret 2018	5 Juli 2018

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI SETELAH RUPS TAHUNAN 20 MARET 2018

Jumlah dan komposisi Direksi setelah RUPS Tahunan 20 Maret 2018 berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 9 (sembilan) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BNI.

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Efektif
Achmad Baiquni	Direktur Utama	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Herry Sidharta	Direktur Wakil Direktur Utama	Jakarta	17 Maret 2015 16 Maret 2017	22 Mei 2015 29 Mei 2017
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur <i>Corporate Banking</i>	Jakarta	10 Maret 2016	15 Juli 2016
Tambok P. Setyawati	Direktur <i>Retail Banking</i>	Jakarta	20 Maret 2018	5 Juli 2018
Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil & Jaringan	Jakarta	16 Maret 2017	19 Juli 2017
Rico Rizal Budidarmo	Direktur <i>Treasury dan International Banking</i>	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Keuangan	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Dadang Setiabudi	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Jakarta	20 Maret 2018	5 Juli 2018
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Bob Tyasika Ananta	Direktur Manajemen Risiko	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Endang Hidayatullah	Direktur Kepatuhan	Jakarta	20 Maret 2018	5 Juli 2018



HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Independensi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga, dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Achmad Baiquni	Direktur Utama	√		√		√		√		√		√		√	
Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama	√		√		√		√		√		√		√	
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur Corporate Banking	√		√		√		√		√		√		√	
		√		√		√		√		√		√		√	
Tambok P. Setyawati *	Direktur Retail Banking	√		√		√		√		√		√		√	
Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	√		√		√		√		√		√		√	
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Treasury dan International Banking	√		√		√		√		√		√		√	
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Keuangan	√		√		√		√		√		√		√	
Dadang Setiabudi*	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	√		√		√		√		√		√		√	
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan	√		√		√		√		√		√		√	
Bob Tyasika Ananta	Direktur Manajemen Risiko	√		√		√		√		√		√		√	
Endang Hidayatullah*	Direktur Kepatuhan	√		√		√		√		√		√		√	
Imam Budi Sarjito**	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	√		√		√		√		√		√		√	
Panji Irawan**	Direktur Tresuri dan Internasional	√		√		√		√		√		√		√	

Keterangan:

*Efektif menjabat sejak tanggal 5 Juli 2018

**Berhenti menjabat sejak tanggal 20 Maret 2018



KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Ketentuan rangkap jabatan bagi Direksi diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015, para anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; dan/atau
 - b. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - d. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - e. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - f. Menjadi calon legislatif atau calon kepada daerah/wakil kepada daerah.
2. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016, para anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain. Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada Perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
3. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan tersebut di atas diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rangkap jabatan anggota Direksi yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Uraian	Achmad Baiquni	Herry Sidharta	Putrama Wahju Setyawan	TambokP. Setyawati*	Catur Budi Harto	Rico Rizal Budidarmo	Anggoro Eko Cahyo	Dadang Setiabudi*	Adi Sulistyowati	Bob Tyasika Ananta	Endang Hidayatullah*	Imam Budi Sarjito**	Panji Irawan**
Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Pengurus partai politik dan/ atau calon/ anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Keterangan:

*Efektif menjabat sejak tanggal 5 Juli 2018

**Berhenti menjabat sejak tanggal 20 Maret 2018



PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Pengelolaan Benturan kepentingan Direksi diatur dalam Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan No. IN/695/KMP/001 tanggal 29 Oktober 2014. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi di mana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Atas hal tersebut maka Anggota Direksi hendaknya senantiasa:

1. Wajib mendahulukan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya.
2. Tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank maupun Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
4. Wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali Perseroan.
5. Dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
6. Tidak akan ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Anggota Direksi Perseroan memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham BNI baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Kewajiban pelaporan tersebut juga diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/228/DIR/R tanggal 29 Juni 2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang juga dipublikasikan pada *website* BNI.

Selama tahun 2018, BNI telah menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Guna memenuhi azas transparansi dalam penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham baik pada BNI maupun pada Bank dan Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Per tanggal 31 Desember 2018, tidak terdapat anggota Direksi BNI yang memiliki saham BNI mencapai 5% atau lebih dari modal disetor BNI, ataupun di Bank lain maupun Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEPUTUSAN DIREKSI TAHUN 2018

Selama tahun 2018, Direksi telah melaksanakan tugas pengurusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

1. Penyusunan perencanaan Perseroan, antara lain revisi RBB 2018 – 2019.
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan.
3. Pengelolaan aset dan keuangan, termasuk penyertaan saham pada Perusahaan yang tidak tercatat di bursa.
4. Penyelenggaraan rapat Direksi.
5. Menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
8. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan BNI.



KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN OLEH DIREKSI TAHUN 2018

No. Keputusan	Perihal Keputusan
KP/003/DIR/R	Penataan Organisasi Divisi Perencanaan Strategis (REN)
KP/012/DIR/R	Kebijakan dan Prosedur Perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Direksi
KP/024/DIR/R	Pembentukan Forum Koordinasi Bisnis Konsumer dan <i>Digital Banking</i>
KP/033/DIR/R	Panitia Pelepasan Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB) BNI yang terkena proyek Pemerintah
KP/034/DIR/R	Panitia Jakarta BNI Taplus Proliga 2018
KP/035/DIR/R	Tim Manajemen Pemulihan
KP/039/DIR/R	Hapus Buku Aktiva Tetap Tidak Bergerak Gedung KCP Pemangkat
KP/040/DIR/R	Hapus Buku Aktiva Tetap Tidak Bergerak Gedung KCP Gunung Sahari
KP/042/DIR/R	Panitia Pelepasan Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB) BNI yang terkena proyek Pemerintah
KP/120/DIR/R	Panitia Event BNI Asian Games 2018
KP/122/DIR/R	Penunjukan Pengurus UPZ BAZNAS BNI
KP/125/DIR/R	Tim Penyusunan <i>Corporate Plan</i> 2019-2023
KP/127/DIR/R	Pembentukan Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 (BSL 2)
KP/128/DIR/R	Pembentukan Divisi Bisnis Usaha Kecil 1 (BSL 1)
KP/130/DIR/R	Keputusan Direksi tentang Dana Pensiun Bank Negara Indonesia
KP/138/DIR/R	Penataan Organisasi Direksi BNI
KP/145/DIR/R	Panitia Pengadaan Jasa Kloning dan Relokasi Server Divisi BSK
KP/153/DIR/R	Tim <i>Force Akuisisi Merchant Yap!</i>
KP/158/DIR/R	Hapus Buku Aktiva Tetap Tidak Bergerak Gedung Kantor Cabang Pembantu Kanaka
KP/160/DIR/R	Pembentukan Tim Task Force Medium Term Notes (MTN) Subordinasi BNI 2018
KP/164/DIR/R	Panitia Revaluasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Milik BNI
KP/169/DIR/R	Panitia HUT Ke-72 (tujuh puluh dua) BNI
KP/182/DIR/R	Penataan Organisasi Divisi Jasa Transaksional Perbankan (TBS)
KP/191/DIR/R	Panitia Event BNI Asian Games 2018
KP/196/DIR/R	Panitia Pengadaan Starter Kit Debit BNI SimPel
KP/215/DIR/R	Hapus Buku Aktiva Tetap Tidak Bergerak Gedung Kantor Cabang Mamuju di Jalan Urip Sumoharjo No. 125 Mamuju
KP/220/DIR/R	Surat Keputusan Tim Implementasi IFRS 9
KP/232/DIR/R	Panitia Penilaian Beauty Contest Asuransi Kredit Commercial Card BNI
KP/234/DIR/R	Panitia Pengadaan Jasa Pencetakan <i>Billing Statement</i> Kartu Kredit BNI
KP/246/DIR/R	Pengangkatan Sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Negara Indonesia
KP/247/DIR/R	Penataan Organisasi Divisi Operasional
KP/251/DIR/R	Organisasi <i>Crisis Management Team</i> (CMT) Kantor Pusat
KP/284/DIR/R	Tim Proyek Implementasi Mesin EDW <i>Appliance</i>
KP/321/DIR/R	Tim Implementasi Program <i>Beyond Banking</i> - 33 Inisiatif <i>Corporate Plan</i> 2019-2023
KP/322/DIR/R	Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2019
KP/323/DIR/R	Penataan Organisasi Divisi Solusi & Keamanan Teknologi Informasi (STI)
KP/366/DIR/R	Tim <i>Task Force Millenial</i>
KP/384/DIR/R	Penataan Organisasi Direksi BNI



No. Keputusan	Perihal Keputusan
KP/385/DIR/R	Rencana Jangka Panjang (RJP/ <i>Corporate Plan</i>) BNI Tahun 2019-2023
KP/387/DIR/R	Pengurus dan Pembina Tim Volly Jakarta BNI 46 Proliga Periode 2019 – 2023 Dir kN
KP/395/DIR/R	Penataan Organisasi Divisi Solusi dan Keamanan Teknologi Informasi (STI)
KP/396/DIR/R	Penugasan <i>Task Force 46 Champion Millenial Program</i>
KP/400/DIR/R	Penugasan Sebagai Panitia Teknis <i>Event Glowing Night Run dan Food Coffe Festival</i>
KP/401/DIR/R	Penataan Pengganti <i>Senior Executive Vice President (SEVP)</i>
KP/406/DIR/R	Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019 - 2021
KP/412/DIR/R	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2019
KP/413/DIR/R	Penataan Organisasi Divisi Risiko Kredit Korporasi (BNR)
KP/420/DIR/R	Panitia Pelepasan dan Hapus Buku Aktiva Tetap Tidak Bergerak <i>Unit Caimhill Mansion BNI Singapura</i>
KP/433.1/DIR/R	Penugasan Tim BNI <i>Cyber Squad</i>

RAPAT DIREKSI

MEKANISME RAPAT DIREKSI

Penyelenggaraan Rapat Direksi Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun Rapat Direksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: <ol style="list-style-type: none"> Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
Pemanggilan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Pemanggilan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
Pemimpin Rapat Direksi	<ol style="list-style-type: none"> Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.

<p>Kehadiran</p>	<ol style="list-style-type: none"> Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap anggota Direksi yang secara Pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhal untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
<p>Risalah Rapat</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas wajib didokumentasikan oleh Perseroan. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
<p>Keputusan di Luar Rapat Direksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.



AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DIREKSI TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
1.	4 Januari 2018	1. <i>Capacity Planning</i> 2. <i>Flextime</i>	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir	Cuti
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir	Cuti
			Imam Budi Sarjito**	Hadir	
			Panji Irawan**	Hadir	
2.	8 Januari 2018	1. Penataan Organisasi BSL 2. Kinerja Keuangan Desember 2017	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir	Cuti
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir	Cuti
			Imam Budi Sarjito**	Hadir	
			Panji Irawan**	Hadir	
3.	11 Januari 2018	Strategi Pengelolaan Remedial dan <i>Recovery</i>	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir	Cuti
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Imam Budi Sarjito**	Hadir	
			Panji Irawan**	Tidak Hadir	Dinas
4.	15 Januari 2018	1. Presentasi Rencana Aksi Korporasi BNI 2. Penataan Organisasi Divisi BSL	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Imam Budi Sarjito**	Hadir	
			Panji Irawan**	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
5.	18 Januari 2018	Yap! <i>Launching Preparation Update</i>	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Imam Budi Sarjito**	Hadir	
		Panji Irawan**	Hadir		
6.	25 Januari 2018	1. Pembahasan Pra NPL Segmen Menengah 2. <i>Corporate Iconic Event</i>	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Imam Budi Sarjito**	Hadir	
		Panji Irawan**	Tidak Hadir	Cuti	
7.	29 Januari 2018	1. Penetapan Limit Pembelian Surat Berharga Korporasi 2. <i>Update Assessment Kriteria Penilaian Kinerja Unggul</i>	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Imam Budi Sarjito**	Hadir	
		Panji Irawan**	Tidak Hadir	Cuti	
8.	5 Februari 2018	Update Rencana <i>Business Meeting</i> 2018	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Imam Budi Sarjito**	Hadir	
		Panji Irawan**	Hadir		



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
9.	8 Februari 2018	1. <i>Update Java Jazz</i> 2. <i>Beauty Contest</i> Pengadaan Seragam	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Imam Budi Sarjito**	Hadir	
			Panji Irawan**	Hadir	
10.	15 Februari 2018	1. <i>Persetujuan Penamaan Produk dan Launching BNI Mobile Remittance</i> 2. Lain - lain	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Imam Budi Sarjito**	Tidak Hadir	Dinas
			Panji Irawan**	Tidak Hadir	Dinas
11.	19 Februari 2018	1. <i>Beauty Contest</i> Pengadaan Seragam <i>Frontliner</i> 2. <i>Finalisasi Score PMS Unit</i> Desember 2017 3. <i>BNI Chat Banking</i>	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Imam Budi Sarjito**	Tidak Hadir	Dinas
			Panji Irawan**	Tidak Hadir	Dinas
12.	22 Februari 2018	<i>BNI Emerald Program Java Jazz 2018</i>	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Putrama Wahyu Setyawan	Tidak Hadir	Dinas
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Imam Budi Sarjito**	Hadir	
			Panji Irawan**	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
13.	26 Februari 2018	1. <i>Customer Satisfaction Survey 2017</i> 2. <i>Update Progress Persiapan Launching BNI Mobile Remittance (More)</i>	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Imam Budi Sarjito**	Hadir	
		Panji Irawan**	Hadir		
14.	5 Maret 2018	1. <i>Update Laporan Keuangan Februari 2018 dan Prognosa Q1 2018</i> 2. <i>Penerbitan Instrumen Utang Berkarakteristik Modal</i>	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Imam Budi Sarjito**	Hadir	
		Panji Irawan**	Hadir		
15.	12 Maret 2018	Update PIR Implementasi 92 KCP Pemutus Kredit (Kredit Standart dan Konsumer)	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Imam Budi Sarjito**	Tidak Hadir	Dinas
		Panji Irawan**	Tidak Hadir	Dinas	
16.	15 Maret 2018	1. <i>Progress Status Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)</i> 2. <i>Program BNI Digimudik dan Usulan Cong AD Nyepi</i>	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Imam Budi Sarjito**	Hadir	
		Panji Irawan**	Hadir		



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
17.	22 Maret 2018	1. Usulan Pembidangan Direksi BNI 2018 2. Review Kewenangan Segmen	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir	Dinas
		Endang Hidayatullah*	Hadir		
18.	26 Maret 2018	Update Prognosa Kinerja Keuangan Q1 2018	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir	Dinas
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
		Endang Hidayatullah*	Hadir		
19.	2 April 2018	1. Finalisasi KPI Supporting Unit 2018 2. Persiapan PORSENI BUMN 2018	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Tidak Hadir	Dinas
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
		Endang Hidayatullah*	Hadir		



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
20.	5 April 2018	1. Konsep Besar HUT BNI ke 72 2. Usulan <i>Sharing Session</i> dalam Rangka Penyusunan <i>Corporate Plan</i> BNI 2019 - 2023 <i>Scenario Planning</i>	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
Endang Hidayatullah*	Hadir				
21.	9 April 2018	1. Strategi Meningkatkan Tabungan dengan <i>Game Changer</i> Yap! 2. <i>Update Progress</i> Yap!	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir	Cuti
Endang Hidayatullah*	Hadir				
22.	16 April 2018	<i>Update Event Inacraft</i> 2018 dan <i>Update Iklan Corporate</i> untuk Ramadhan, Waisak, & Idul Fitri	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
Endang Hidayatullah*	Hadir				
23.	19 April 2018	1. Prognosa Kinerja Keuangan Q2 - 2018 2. <i>Workshop "Discovery and Dream" Corporate Plan</i> 2019 - 2023 3. <i>Sharing Session - Capturing The Digital Banking Opportunity</i>	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Tidak Hadir	Dinas
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
Endang Hidayatullah*	Hadir				



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
24.	30 April 2018	1. <i>Update Prognosa Kinerja Keuangan Q2 2018</i> 2. <i>Sharing Session: Unleashing the Value of Talent in a Digital Area</i>	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
25.	3 Mei 2018	<i>Highlight Kinerja April 2018</i>	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
26.	7 Mei 2018	1. <i>BNI Digital Transformation</i> 2. <i>Update Kegiatan BNI Service & Sales Excellence Award Tahun 2018</i>	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir	Dinas
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
27.	14 Mei 2018	1. <i>Update Progress</i> terkait Remedial dan <i>Recovery</i> 2. <i>Update Progress</i> Yap!	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
28.	17 Mei 2018	1. Homologasi / Perdamaian PKPU 2. Kinerja Segmen Menengah 3. Lain - Lain: Arahan Yap!	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Tidak Hadir	Dinas
29.	24 Mei 2018	1. <i>Review</i> Perbaikan Kualitas Kredit 2. <i>Update</i> Kegiatan Bulan Ramadhan dan Idul Fitri	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
30.	28 Mei 2018	1. Pelaksanaan BNI Digimudik 2. Iklan Agenda Lebaran	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
31.	4 Juni 2018	1. <i>Update</i> Pemberian Fasilitas kepada debitur 2. <i>Update Cyber Squad</i>	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
32.	7 Juni 2018	1. <i>Update</i> RBB 2018 – 2020 2. Tabur Bunga dalam Rangka HUT BNI ke 72	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
33.	25 Juni 2018	1. <i>Update</i> Persiapan Dukungan IMF - WB Group Annual Meeting Bali Oktober 2018 2. Evaluasi Operasional Terbatas Libur Idul Fitri 2018 3. <i>Update</i> Persiapan HUT BNI	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan	
34.	2 Juli 2018	Update Acara Halal Bihalal Bersama Persatuan Pensiunan BNI	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas	
			Herry Sidharta	Hadir		
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir		
			Tambok P. Setyawati*	Hadir		
			Catur Budi Harto	Hadir		
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir		
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir		
			Dadang Setiabudi*	Hadir		
			Adi Sulistyowati	Hadir		
			Bob Tyasika Ananta	Hadir		
Endang Hidayatullah*	Hadir					
35.	9 Juli 2018	Kinerja Keuangan BNI Juni 2018	Achmad Baiquni	Hadir		
			Herry Sidharta	Hadir		
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir		
			Tambok P. Setyawati*	Hadir		
			Catur Budi Harto	Hadir		
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir		
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir		
			Dadang Setiabudi*	Tidak Hadir		Dinas
			Adi Sulistyowati	Hadir		
			Bob Tyasika Ananta	Hadir		
Endang Hidayatullah*	Hadir					
36.	12 Juli 2018	Update Progress Big Data	Achmad Baiquni	Hadir		
			Herry Sidharta	Hadir		
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir		
			Tambok P. Setyawati*	Tidak Hadir		Dinas
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir		Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir		
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir		
			Dadang Setiabudi*	Tidak Hadir		Dinas
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir		Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir		
Endang Hidayatullah*	Hadir					
37.	16 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> Nama Gedung dan Konsep Acara Peresmian Gedung Penjopongan Eksekusi <i>Corporate Plan</i> Update Progress Yap! (<i>Yap! On the move</i>) 	Achmad Baiquni	Hadir		
			Herry Sidharta	Hadir		
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir		
			Tambok P. Setyawati*	Hadir		
			Catur Budi Harto	Hadir		
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir		
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir		
			Dadang Setiabudi*	Hadir		
			Adi Sulistyowati	Hadir		
			Bob Tyasika Ananta	Hadir		
Endang Hidayatullah*	Hadir					



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
38.	23 Juli 2018	Update Corporate BNV	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Putrama Wahyu Setyawan	Tidak Hadir	Dinas
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir	Dinas
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Izin
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Tidak Hadir	Dinas
39.	26 Juli 2018	Prognosa Kinerja Keuangan Q3 dan Q4 - 2018	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir	Dinas
			Dadang Setiabudi*	Tidak Hadir	Dinas
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
40.	6 Agustus 2018	1. Update Bisnis Meeting 2. Merger 3. Update Iklan Asian Games dan Congratulation Advertising	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
41.	13 Agustus 2018	Update Persiapan HUT ke-73 Republik Indonesia	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
42.	20 Agustus 2018	1. Usulan Aksi Korporasi Bank Umum 2. Update Persiapan Dukungan IMF - WB Annual Meeting Bali Oktober 2018 3. Update Progress Pengadaan Jasa Konsultan Perbaikan Kualitas Kredit	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
		Endang Hidayatullah*	Hadir		
43.	23 Agustus 2018	Usulan Penamaan Gedung BNI	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
		Endang Hidayatullah*	Hadir		
44.	27 Agustus 2018	Hari Layanan BNI	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
		Endang Hidayatullah*	Hadir		
45.	30 Agustus 2018	Hari Pelanggan Nasional 2018	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
		Endang Hidayatullah*	Hadir		



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
46.	3 September 2018	Kebijakan Umum Direksi 2019	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Tidak Hadir	Cuti
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
47.	10 September 2018	Kinerja Keuangan Agustus 2018 dan Prognosa Kinerja Keuangan 2018	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Cuti
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
48.	13 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Progress Report</i> Komitmen <i>Business Meeting</i> BNI Semester II - 2018 Sektor RR 2. <i>Update</i> Persiapan Dukungan IMF - WB 3. Kinerja Keuangan Agustus 2018 dan Prognosa Kinerja Keuangan 2018 	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Cuti
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
49.	20 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembidangan Direksi 2. <i>Follow Up</i> Surat Otoritas Jasa Keuangan terkait Revisi RBB 	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Tidak Hadir	Dinas



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
50.	24 September 2018	1. Relokasi KCLN Singapura 2. Pembidangan Direksi	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
51.	27 September 2018	Stress Test Volatilitasi Nilai Tukar dan Suku Bunga	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir	Dinas
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir	Dinas
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
52.	1 Oktober 2018	Draft CMRT Dalam Rangka Penanggulangan Gempa Palu dan Sekitarnya	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
53.	4 Oktober 2018	1. Progress Report Komitmen Business Meeting BNI Semester II - 2018 Sektor R.R 2. Update Persiapan Dukungan IMF - WB Group Annual Meeting Bali Oktober 2018 3. Update Paviliun Indonesia	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Tidak Hadir	Dinas
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Tidak Hadir	Dinas



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
54.	8 Oktober 2018	<i>Loan Processing Digital</i>	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
55.	11 Oktober 2018	1. <i>Stress Test Volatilitas Nilai Tukar dan Suku Bunga</i>	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Hadir	
		2. <i>Corporate Plan 2019 - 2023</i>	Putrama Wahyu Setyawan	Tidak Hadir	Dinas
			Tambok P. Setyawati*	Tidak Hadir	Dinas
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
56.	15 Oktober 2018	1. <i>Executive Talent Committee</i>	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
		2. <i>Tindak Lanjut Rencana Antisipasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam</i>	Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
57.	18 Oktober 2018	<i>Analyst Meeting dan QNA untuk Issues dari Analisa dan Wartawan</i>	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Tidak Hadir	Dinas
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
58.	22 Oktober 2018	Kajian Memperhitungkan Piutang SPK sebagai Jaminan <i>Controlled</i>	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Tidak Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
Endang Hidayatullah*	Hadir				
59.	25 Oktober 2018	1. Prognosa Kinerja Keuangan Q4 2018 2. <i>Update</i> Program Milenial BUMN 3. <i>Progress</i> Pengadaan Konsultan Perbaikan Kualitas Kredit	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Tidak Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
Endang Hidayatullah*	Hadir				
60.	29 Oktober 2018	Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019 - 2021	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Tidak Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir	
Endang Hidayatullah*	Hadir				
61.	1 November 2018	1. <i>Update</i> Materi <i>Stress Testing</i> Volatilitas Nilai Tukar dan Suku Bunga 2. Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019 - 2021	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
Endang Hidayatullah*	Tidak Hadir				



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
62.	5 November 2018	1. Digitalisasi Proses Pembukaan Rekening 2. Kerja sama BNI dengan WeChat dan Alipay	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Putrama Wahyu Setyawan	Tidak Hadir	Dinas
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Cuti
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
		Endang Hidayatullah*	Tidak Hadir	Dinas	
63.	8 November 2018	Surat BSSN - Potensi Ancaman Siber pada Infrastruktur Perbankan	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Tidak Hadir	Dinas
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
		Endang Hidayatullah*	Hadir		
64.	12 November 2018	Update Progress Project BEYOND 2019 - 2023	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir	Dinas
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
		Endang Hidayatullah*	Tidak Hadir	Dinas	
65.	15 November 2018	Future Capability Academy	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir	Dinas
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir	Dinas
		Endang Hidayatullah*	Tidak Hadir	Dinas	



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
66.	19 November 2018	1. Eskalasi Level 2. Pemantauan <i>Budget Loss</i> Surat Berharga AFS <i>Head Office</i>	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir	
Endang Hidayatullah*	Hadir				
67.	22 November 2018	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BNI Tahun 2019	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
Endang Hidayatullah*	Tidak Hadir	Dinas			
68.	26 November 2018	1. <i>Recovery Plan</i> BNI 2018 2. Ketentuan Debitur Prima 3. <i>Update Event Indonesia Masters</i>	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
Endang Hidayatullah*	Tidak Hadir	Dinas			
69.	29 November 2018	1. <i>Progress Report</i> Program Millenial BUMN: <i>Glowing Night Run</i> dan <i>Food & Coffee Festival</i> , tgl 1 Des 2018 2. Usulan Desain Eksterior dan Interior BNI KCLN Singapura	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
Endang Hidayatullah*	Tidak Hadir	Dinas			



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
70.	3 Desember 2018	Lanjutan <i>Update Review</i> Ketentuan Debitur Prima	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir	Dinas
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Tidak Hadir	Dinas
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
Endang Hidayatullah*	Hadir				
71.	6 Desember 2018	Kinerja November 2019 dan Prognosa Posisi Keuangan BNI Akhir Desember 2018	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Tidak Hadir	Dinas
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir	Dinas
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
Endang Hidayatullah*	Hadir				
72.	10 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Tema & Design <i>Annual Report</i> BNI Tahun 2018 2. <i>Update</i> Kegiatan dalam Meyambut Natal dan Tahun Baru 3. Finalisasi KPI BOD 	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Tidak Hadir	Dinas
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir	Dinas
Endang Hidayatullah*	Hadir				
73.	13 Desember 2018	<i>Review</i> Ketentuan Debitur Prima dan <i>Review</i> Referensi Keuangan per Sektor Industri	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Tidak Hadir	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Tidak Hadir	Dinas
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
Endang Hidayatullah*	Hadir				



No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
74.	17 Desember 2018	Dampak Penurunan Harga <i>Crude Palm Oil</i> Terhadap Debitur Korporasi	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Tidak Hadir	Dinas
75.	20 Desember 2018	Prognosa Kinerja Keuangan Desember 2018	Achmad Baiquni	Tidak Hadir	Dinas
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Tidak Hadir	Dinas
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
76.	27 Desember 2018	Prognosa Keuangan <i>Fiscal Year</i> 2018	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	
77.	31 Desember 2018	Prognosa Laporan Keuangan Tahun 2018 (Final)	Achmad Baiquni	Hadir	
			Herry Sidharta	Hadir	
			Putrama Wahyu Setyawan	Hadir	
			Tambok P. Setyawati*	Hadir	
			Catur Budi Harto	Hadir	
			Rico Rizal Budidarmo	Hadir	
			Anggoro Eko Cahyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	
			Adi Sulistyowati	Hadir	
			Bob Tyasika Ananta	Hadir	
			Endang Hidayatullah*	Hadir	

Keterangan:

*Efektif menjabat sejak 5 Juli 2018

**Berhenti menjabat sejak 20 Maret 2018

Untuk agenda rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris dalam Bab *Good Corporate Governance* pada Laporan Tahunan ini.



FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Selama tahun 2018, Direksi telah mengikuti Rapat Direksi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kali serta rapat Direksi dengan Dewan Komisaris sebanyak 11 (sebelas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat bagi masing-masing Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Achmad Baiquni	Direktur Utama	77	51	66,23	11	4	36,36
Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama	77	64	83,12	11	6	54,55
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur <i>Corporate Banking</i>	77	69	89,61	11	9	81,82
Tambok P. Setyawati*	Direktur <i>Retail Banking</i>	63	58	92,06	6	6	100
Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	77	56	72,73	11	7	63,64
Rico Rizal Budidarmo	Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>	77	59	76,62	11	7	54,55
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Keuangan	77	64	83,12	11	8	81,82
Dadang Setiabudi*	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	63	54	85,71	6	6	100
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan	77	54	70,13	11	8	72,72
Bob Tyasika Ananta	Direktur Manajemen Risiko	77	68	88,31	11	9	81,82
Endang Hidayatullah*	Direktur Kepatuhan	63	49	77,78	6	2	33,33
Imam Budi Sarjito**	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	16	13	81,25	2	-	0
Panji Irawan**	Direktur Tresuri dan Internasional	16	10	62,50	2	2	100

Keterangan:

*Efektif menjabat sejak tanggal 5 Juli 2018

**Berhenti menjabat sejak tanggal 20 Maret 2018



RAPAT DIREKSI YANG DIJADWALKAN PADA TAHUN 2019

Sesuai Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Namun Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

Pada tahun 2019, Rapat Direksi dijadwalkan akan dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu setiap hari Senin. Jadwal Rapat Direksi untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1.	14 Januari 2019	Kinerja Bisnis Bank
2.	11 Februari 2019	Kinerja Bisnis Bank
3.	11 Maret 2019	Kinerja Bisnis Bank
4.	15 April 2019	Kinerja Bisnis Bank
5.	13 Mei 2019	Kinerja Bisnis Bank
6.	10 Juni 2019	Kinerja Bisnis Bank
7.	15 Juli 2019	Kinerja Bisnis Bank
8.	12 Agustus 2019	Kinerja Bisnis Bank
9.	16 September 2019	Kinerja Bisnis Bank
10.	14 Oktober 2019	Kinerja Bisnis Bank
11.	11 November 2019	Kinerja Bisnis Bank
12.	16 Desember 2019	Kinerja Bisnis Bank

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Pengembangan kompetensi Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Seluruh Direksi BNI telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 sebagai salah satu syarat untuk mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI

TATA KELOLA REMUNERASI

BNI telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris yang mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Dalam Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Direksi disebutkan bahwa remunerasi yang diberikan bersifat tetap dan variabel. Pemberian remunerasi yang bersifat tetap dan variabel didasarkan pada skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat tetap juga memperhatikan perbedaan (*gap*) remunerasi antar tingkat jabatan, sehingga mencegah potensi terjadinya konflik internal dan risiko operasional seperti *fraud* atau risiko operasional lainnya. Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat variabel, Perseroan telah mendasarkan pada *prudent risk taking* yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi serta melakukan evaluasi secara berkala melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Direksi dilakukan melalui tahapan berikut.

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Direksi.
2. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi.
3. Dewan Komisaris akan menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi yang berbentuk gaji/honorarium dan tantiem tersebut untuk disetujui oleh RUPS.



STRUKTUR REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI

Struktur remunerasi anggota Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan Surat Menteri BUMN No. S-574/MBU/D5/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk. Tahun 2018, sebagai berikut.

Tabel Struktur Remunerasi Anggota Direksi

No.	Jenis Remunerasi/ Fasilitas	Keterangan
1	Gaji	Direktur Utama sebesar 100%.
		Wakil Direktur Utama sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.
		Direktur sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
2	Tunjangan	
	Hari Raya Keagamaan	Anggota Direksi diberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali gaji setiap tahun.
	Perumahan	Anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp 27.500.000.
	Asuransi Purna Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> Diberikan selama menjabat (mulai efektif diangkat sampai berhenti). Premi yang ditanggung Perseroan adalah maksimal 25% dari gaji dalam 1 (satu) tahun. Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.
3	Fasilitas	
	Kendaraan	<p>Anggota Direksi disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas serta 1 (satu) orang pengemudi yang dapat dipergunakan secara <i>full time</i> oleh anggota Direksi dengan uang lembur ditanggung oleh Bank.</p> <ol style="list-style-type: none"> Merk dan jenis kendaraan ditetapkan oleh Bank. Biaya pemeliharaan dan biaya operasional kendaraan serta biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas kendaraan dinas ditanggung Bank sebesar pemakaian (<i>at cost</i>) Anggota Direksi yang tidak lagi menjabat wajib mengembalikan kendaraan dinas kepada Bank dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat.
	Kesehatan	<p>Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya obat.</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi serta suami/isteri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Rawat jalan dan obat, Rawat inap dan obat, <i>Medical check up</i> dengan ketentuan 1 (satu) kali setiap tahun dan dilakukan di dalam negeri. Apabila Dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri, fasilitas kesehatan diberikan secara penuh.
	Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Direksi dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (<i>at cost</i>) Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi dianggarkan atas beban Perseroan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Fasilitas bantuan hukum hanya dapat digunakan apabila terdapat tuntutan dari pihak ketiga, baik selama masih menjabat atau sudah berhenti dari jabatannya atas kebijakan yang diambil selama menjabat dan tidak dapat diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan Dalam hal anggota Direksi menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan Tata cara dan prosedur bantuan hukum Direksi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
Fasilitas Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> Dalam hal Bank menyediakan rumah jabatan Direksi maka ybs wajib mempergunakan rumah tersebut sebagai fasilitas perumahan dan ybs tidak diberikan tunjangan perumahan. Dalam hal Bank tidak menyediakan rumah jabatan Direksi, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan Fasilitas perumahan yang diterima Direksi termasuk utilitas dan pemeliharaan rumah jabatan Direksi yang bersangkutan Besarnya perincian utilitas (listrik, air, telepon, dan lain-lain) sebagaimana dimaksud di atas mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan pada Bank. 	



INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Dalam menetapkan indikator Direksi, BNI mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai berikut:

- Faktor skala usaha
- Faktor kompleksitas usaha
- Tingkat inflasi
- Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
- Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DIREKSI

Pengungkapan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

Jenis Remunerasi dan fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	Orang	Jutaan Rp
REMUNERASI		
• Gaji	11	35.396,46
• Tunjangan Perumahan	11	1.651,77
• Tunjangan Transportasi	-	-
• Tunjangan Hari Raya	11	3.008,25
• Tantiem	11	128.477,99
FASILITAS LAIN DALAM BENTUK NATURA		
• Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-
• Transportasi (tidak dapat dimiliki)	11	7.785,97
• Asuransi Purna Jabatan (dapat dimiliki)	11	8.847,69
• Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	11	801,83

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi

Jumlah Remunerasi	Jumlah Orang	Jutaan Rp
Di atas Rp2 miliar	10 Orang	165.457,41
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

TANTIEM

Tantiem yang dibayarkan pada tahun 2017 adalah sebesar 1,17% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016 diberikan kepada Direksi dengan proporsi terhadap Direktur Utama yaitu Direktur Utama sebesar 100%, Wakil Direktur Utama sebesar 95% dan anggota Direksi lainnya sebesar 90%.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2018

Selama tahun 2018, Direksi telah melaksanakan tugas pengurusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

1. Penyusunan perencanaan Perseroan, antara lain revisi RBB 2018 – 2019.
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan.
3. Pengelolaan aset dan keuangan, termasuk penyertaan saham pada Perusahaan yang tidak tercatat di bursa.
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi.
5. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
8. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.



PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kinerja Direksi dan masing-masing Anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI MENGGUNAKAN METODE KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

Kementerian BUMN secara khusus telah menetapkan penilaian kinerja Direksi BUMN dengan menggunakan metode KPKU melalui Surat No. S-153/S-MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN.

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KPKU

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* KPKU adalah, sebagai berikut

1. Kementerian BUMN membentuk Forum Ekselen BUMN (FEB) yang bertugas untuk melaksanakan *Assessment*.
2. Kementerian BUMN menyampaikan kepada Perseroan Tim FEB sebagai personil yang melaksanakan *Assessment* di Perseroan.
3. Tim FEB melakukan *Assessment* dan membuat kesimpulan atau hasil *assessment*.
4. Tim FEB menyampaikan hasil *Assessment* kepada Kementerian BUMN untuk dapat disetujui.
5. Kementerian BUMN menetapkan hasil *Assessment*.

KRITERIA EVALUASI KPKU

Perspektive Versi KPKU	Indikator Pengukuran Kinerja KPKU
Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Penerapan GCG - Tingkat <i>Compliance</i>/pemenuhan portal-portal BUMN (asset, PKBL, FIS, SDM, Publik) - Tingkat <i>Proper</i> strategis program penilaian peringkat kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. - Tingkat kesesuaian penyusunan belanja modal (capex) dengan kebutuhan Perusahaan dan sinkronisasi dengan MP3E
Perencanaan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Strategi <i>objective</i> dan <i>action plan</i> implementasi strategi. - Implementasi Strategi
Fokus pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran yang menunjukkan kesungguhan Perusahaan dalam meraih mempertahankan, memperluas dan menciptakan pasar dan pelanggan.
Fokus Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Kapabilitas dan Kapasitas tenaga Kerja - Lingkungan Kerja - Pengembangan dan Keterikatan Pegawai
Efektivitas Produk dan Proses	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi perbaikan proses bisnis - Tingkat utilisasi peralatan produksi - Kualitas penerapan manajemen risiko - Ukuran yang menunjukkan prestasi Perusahaan dalam melakukan penciptaan nilai dari produk/ jasa, yang diwujudkan dengan perencanaan operasional yang tepat - Sinergi BUMN
Keuangan dan Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - Pertumbuhan pendapatan - Efisiensi/Biaya - Pertumbuhan Pasar - Penguasaan Pasa

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT KPKU

Pihak yang melakukan *Assessment* KPKU adalah Tim FEB dan Kementerian BUMN.

HASIL ASSESSMENT KPKU

Sejak adanya revisi sistem MBCfPE di tahun 2015, di mana pada hasil revisi tersebut fokus utamanya adalah strategi Perusahaan yaitu setiap pemimpin senior di Perusahaan dituntut untuk mampu menyusun rute keberhasilan dan menjamin kelangsungan hidup Perusahaan. Berdasarkan hasil *assessment* menunjukkan skor KPKU BNI yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Hasil *assessment* KPKU tahun 2016 yang berlangsung pada akhir Januari 2017 BNI telah berhasil masuk pada *Band Score "Emerging Industry Leader"*.



PENILAIAN KINERJA PENERAPAN GCG (SELF ASSESSMENT) DIREKSI SESUAI KETENTUAN BANK INDONESIA /OTORITAS JASA KEUANGAN

BI/OJK secara khusus mengatur penilaian kinerja Direksi berdasarkan parameter kriteria Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi yang diatur dalam ketentuan *self assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

PROSEDUR PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT GCG

Prosedur Pelaksanaan *Self Assessment* GCG terkait Kinerja Direksi adalah, sebagai berikut:

1. Direksi menugaskan *Compliance Division* (dhi. unit GCG) Perseroan dalam melaksanakan *Self Assessment*.
2. *Compliance Division* Mengoordinir seluruh unit kerja terkait termasuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka melaksanakan *Self Assessment*.
3. *Compliance Division* mengusulkan rekomendasi nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif untuk disampaikan kepada Direksi dan kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Direksi menetapkan nilai komposit, termasuk faktor positif dan negatif dalam pelaksanaan GCG.
5. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada BI/OJK untuk mendapatkan persetujuan.

KRITERIA SELF ASSESSMENT DIREKSI TERKAIT PELAKSANAAN GCG

Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance Structure* terdiri dari 16 indikator, *Governance Process* terdiri dari 14 (empat belas) indikator sedangkan *Governance Outcome* terdiri dari 10 (sepuluh) indikator.

PIHAK YANG MELAKUKAN SELF ASSESSMENT GCG

Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari BI/OJK.

HASIL SELF ASSESSMENT DIREKSI TERKAIT PELAKSANAAN GCG

Hasil *self assessment* GCG BNI Periode 31 Desember 2018 BNI mendapat nilai komposit 2 (baik). Faktor-faktor positif *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang ada pada Direksi dan dituangkan dalam *Self Assesment* GCG Periode 31 Desember Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Struktur Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku di mana jumlah Direksi sebanyak 11 (sebelas) Direktur dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi mempunyai integritas, kompetensi dan pengetahuan yang sangat memadai.
2. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator (dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
3. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
4. Direksi telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan diupdate secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan GCG.
5. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi disertai kewajiban penyampaian laporan tindaklanjut dari unit-unit pelaksana.
6. Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dan telah diterima oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.



PENILAIAN KINERJA DIREKSI MELALUI KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

Penilaian kinerja Direksi melalui KPI dilakukan dengan pola 100% kolegial yang diukur berdasarkan 5 (lima) perspektif KPKU dan pencapaian pelaksanaan tugas BUMN selaku agen pembangunan (*Agent of Development*) :

Perspektif	No	KPI	Satuan	
KPI BERDASARKAN PERSPEKTIF KPKU	Keuangan dan Pasar	1	Laba Setelah Pajak	Triliun Rp
		2	<i>Market Cap Growth</i>	%
		3	Rasio NPL	%
		4	<i>Cost to Income Ratio</i>	%
	Fokus Pelanggan	5	Hasil <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan oleh Surveyor Independen	Peringkat
		6	Implementasi atas PAB yang telah Disetujui Otoritas Jasa Keuangan	%
	Efektivitas Produk dan Proses	7	Peningkatan Produk dan Layanan Perbankan yang sudah Terdigitalisasi	%
		8	Pertumbuhan Agen <i>Branchless Banking</i>	Jumlah
		9	Pengembangan Sistem Suborgasi Online untuk KUR	Unit
	Fokus Tenaga Kerja	10	<i>Employee Productivity</i>	Rp/Pekerja
		11	<i>Employee Engagement Survey</i>	Score
	Kepemimpinan, Tata kelola, dan Tanggung Jawab Masyarakat	12	Skor KPKU	Score
		13	Realisasi Penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	% terhadap anggaran RKAP
		14	<i>Corporate Governance Perception Index</i>	Score
AGENT OF DEVELOPMENT	Sinergi antar BUMN	1	Realisasi Total Pendapatan Bunga dari BUMN/Total Pendapatan Bunga	%
		2	Realisasi DPK dari BUMN/Total DPK	%
		3	Implementasi ATM, EDC Merah Putih (Efisiensi OPEX)	%
	Hilirasi dan Kandungan Lokal	4	Peningkatan <i>Fee Based Income</i>	Triliun Rp
		5	Peningkatan Pendapatan <i>Non Interest</i>	Triliun Rp
	Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu	6	Peningkatan Jumlah Rumah Kreatif	Jumlah
		7	Peningkatan Jumlah BUMDes	Jumlah
	Kemandirian Keuangan dan Penciptaan Nilai	8	Pembiayaan Bank Himbara pada Sektor Infrastruktur	Triliun Rp
	Penugasan Pemerintah	9	Realisasi Penyaluran KUR	%
		10	Realisasi BANSOS dan Kartu Tani	%

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi membentuk Komite-komite di tingkat Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis BNI dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional, di antaranya:

1. Komite Kredit.
2. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Komite Manajemen Risiko dan Kapital.
4. Komite Produk.
5. Komite Manajemen Kinerja.
6. Komite Manajemen Teknologi.
7. Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan.
8. Komite Sumber Daya Manusia.

Penilaian anggota Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi dengan menilai tugas sesuai Piagam Komite, Kompetensi dan *Skill* serta Tingkat Kehadiran anggota Komite tersebut. Direksi secara berkala melakukan penilaian atas Kinerja Komite di bawah Direksi. Selama tahun 2018, penilaian Kinerja Komite di bawah Direksi secara keseluruhan memuaskan.



MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DIREKSI

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Direksi telah di atur dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, yaitu:

1. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
 - b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
 - c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara.
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi.
 - f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - g. Mengundurkan diri.
 - h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
3. Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali untuk alasan sebagaimana tersebut pada butir f dan g.
4. Pemberhentian karena alasan sebagaimana tersebut pada butir 2 huruf d dan f merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
5. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal ini terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
6. BNI wajib menyelenggarakan RUPS untuk memuruskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggung jawaban atas tindakan-tindakannya yang sebelum diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS.
8. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Bank atau melalaikan kewajiban atau terdapat alasan yang

mendesak bagi Bank dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi;
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
- f. Pembatasan kewenangan pada butir 8 huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada butir 8 huruf d ; atau
 - Lampaunya jangka waktu pada butir 8 huruf d;
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf e.
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris serta Komite Penunjang, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Semua komite tersebut, diketuai oleh Komisaris Independen. Adapun uraiannya sebagai berikut:

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran dasar BNI, untuk kelancaran tugasnya, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris BNI berasal dari luar Bank, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris BNI membawahi Kesekretariatan Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertugas untuk membantu dan mendukung kelancaran kegiatan dan tugas Dewan Komisaris dan dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Dewan Komisaris dibantu oleh staf Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank dan staf yang berasal dari internal Bank.

Pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretariat Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang antara lain mengatur Sekretariat Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/041/DK/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Kesekretariatan Dewan Komisaris yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan Kedudukan Sekretaris Dewan Komisaris,
2. Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan,
3. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris,
4. Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan,
5. Tugas Sekretariat dan Sekretaris Dewan Komisaris,
6. Akses dan kerahasiaan informasi,
7. Waktu kerja Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan,
8. Evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Komisaris,
9. Larangan rangkap jabatan,

10. Mekanisme koordinasi Sekretariat Dewan Komisaris dengan *Corporate Secretary* dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

PERSYARATAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik;
5. Memiliki waktu yang cukup memadai untuk melaksanakan tugasnya pada Perseroan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris:

1. Mengoordinir tugas Sekretariat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
 - b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menghadiri dan membuat risalah rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi;
 - c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik berupa surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
 - d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
 - e. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat Dewan Komisaris melaksanakan tugas berupa:
 - a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
 - b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - c. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
 - d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain;



- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - Mengoordinir penyusunan rancangan Surat Keputusan Dewan Komisaris;
 - Mengoordinir pembuatan kajian/*review* yang diperlukan Dewan Komisaris;
 - Mendampingi kunjungan kerja/perjalanan dinas Dewan Komisaris pada unit-unit kerja dalam lingkungan Perseroan dan berkoordinasi dengan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pembuatan laporan kunjungan kerja/perjalanan dinas Dewan Komisaris tersebut;
 - Mendampingi Dewan Komisaris pada pertemuan dengan pihak regulator atau pihak pengawas Bank terkait dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagai pengawas Perseroan.
- 3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Bank.

LARANGAN RANGKAP JABATAN BAGI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank tidak boleh merangkap sebagai:


1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Bank lain;
2. Sekretaris/Staf Sekretaris Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Perusahaan lain;
3. Anggota komite lain pada BNI; dan/atau;
4. Anggota komite pada BUMN/Bank lain.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini adalah Fahrudin yang diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris BNI sejak tanggal 3 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/032/DK/2017 tanggal 3 Juli 2017.

Fahrudin
Sekretaris Dewan Komisaris

Lahir tahun 1983, Lulus Diploma 3 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2005, Sarjana Akuntansi (S1) Universitas Indonesia tahun 2009, dan Pasca Sarjana (S2) Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada tahun 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Analisis dan Penyajian Informasi pada Kementerian BUMN (2015 – sekarang), sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi pada Kementerian BUMN (2014 – 2015), pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (2013-2016), Sekretaris Dewan Komisaris pada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (April 2016-Oktober 2017).



PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

No.	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	<i>Excellence Supervisory Skills</i>	14-15 Mei 2018	Jakarta	Elevate-MHG
2.	<i>Legal for Non Legal</i>	25-26 Oktober 2018	Jakarta	Value Consult

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Selama tahun 2018 Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tugasnya membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris melalui pemberian informasi, kajian, dan laporan kepada Dewan Komisaris yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2019 dan Laporan Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris 2018.
2. Membantu penyusunan *draft* laporan Dewan Komisaris yang merupakan kewajiban Dewan Komisaris sesuai ketentuan regulator yang berlaku antara lain:
 - a. Laporan kepada Kementerian BUMN RI per triwulan.
 - b. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Laporan kunjungan kerja Dewan Komisaris.



3. Memantau, me-review dan menginformasikan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk pembuatan, pembaharuan/penyesuaian Surat Keputusan Dewan Komisaris serta piagam Komite-komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi termasuk mempersiapkan jadwal rapat, materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Komisaris, menyampaikan saran dan pendapat Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris kepada Direksi serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut saran dan pendapat Dewan Komisaris tersebut.
5. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain:
 - a. Mengoordinasikan pembagian tugas Komite-komite di bawah Dewan Komisaris
 - b. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan rapat Komite-komite di bawah Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat, serta menyampaikan saran dan pendapat hasil evaluasi dan rapat Komite kepada Dewan Komisaris sebagai masukan.
 - c. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris
 - d. Memastikan penyelesaian Laporan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris
6. Melaksanakan tugas administratif terkait kelancaran tugas Komisaris, yaitu pengelolaan, penyimpanan dan administrasi Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta risalah rapat Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dokumen/surat-menyurat Komisaris termasuk mempersiapkan draft surat-surat persetujuan serta masukan/saran Dewan Komisaris yang bersifat strategis yang disampaikan kepada Direksi atau pihak lain.
7. Mendampingi kunjungan kerja/perjalanan dinas Dewan Komisaris pada unit-unit kerja dalam lingkungan Perseroan dan pada pertemuan dengan pihak regulator atau pihak pengawas Bank terkait dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam rangka memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik dalam kegiatan usaha Bank, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit BNI dibentuk pada tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/05/DK/2000 tanggal 28 Juli 2000 tentang Pembentukan Komite Audit. Pedoman dan Tata Tertib Kerja berupa Piagam Komite Audit BNI secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Penyempurnaan/pembaharuan terhadap Piagam Komite Audit BNI terakhir dilakukan pada tahun 2017 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/037/DK/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan dasar peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017, tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Dalam Piagam Komite Audit diatur struktur dan persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat Komite Audit, serta kewajiban pelaporan pelaksanaan tugas atau aktivitas Komite Audit. Kode Etik Komite Audit mencakup integritas, objektif dan independen, kerahasiaan, serta kompetensi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BNI;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi:
 - a. Perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; dan/atau
 - b. Ketidaksesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Rekomendasi minimal mempertimbangkan:
 - a. Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan orang dalam Kantor Akuntan Publik;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik;
 - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada periode sebelumnya, apabila ada.

Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan yang dilampirkan dokumen penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik disertai rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi, dilaporkan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap tahun paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;

5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, paling sedikit melalui:

- a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilaporkan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap tahun paling lama 6 (enam) bulan bulan setelah tahun buku berakhir;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
 7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
 8. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang diusulkan oleh Komite Audit dan disetujui oleh Dewan Komisaris atas biaya Bank;
 9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank; dan
 10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit memperhatikan Kode Etik Komite Audit sebagai berikut:

1. Integritas
Anggota Komite Audit berkomitmen untuk selalu konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh kata hati dan keyakinan pada prinsip-prinsip kebenaran yang hakiki. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Komite Audit:
 - a. Wajib melaksanakan tugas dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab;
 - b. Wajib mematuhi peraturan hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan peraturan hukum dan profesi;
 - c. Wajib mempraktikkan dan mendorong pihak lain untuk bertindak secara profesional;
 - d. Wajib menghargai dan mendukung Visi dan Misi BNI yang telah ditetapkan;
 - e. Dilarang dengan sengaja menjadi bagian dari kegiatan ilegal, atau terlibat dalam perbuatan yang merusak kredibilitas Komite Audit;



- f. Dilarang dengan sengaja membuat kekeliruan atau melakukan manipulasi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan.
2. **Objektif dan Independen**

Anggota Komite Audit memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Komite Audit:

 - a. Wajib memperhatikan keseimbangan dan menempatkan kepentingan *stakeholders* di atas kepentingan lainnya;
 - b. Wajib mengungkapkan seluruh fakta material yang dimiliki, yang apabila tidak diungkapkan dapat mengaburkan pelaporan yang dihasilkan;
 - c. Wajib mengungkapkan apabila terdapat hubungan yang berpotensi memengaruhi penilaian yang tegas dan menimbulkan benturan kepentingan;
 - d. Dilarang menerima sesuatu yang dapat atau berpotensi memengaruhi penilaian yang profesional.
3. **Kerahasiaan**

Anggota Komite Audit senantiasa menjaga kerahasiaan informasi yang merupakan rahasia Bank dan rahasia Jabatan sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya Anggota Komite Audit:

 - a. Wajib bersikap *prudent* dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh;
 - b. Dilarang menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya kecuali terdapat kewajiban hukum atau kewajiban profesi.
4. **Kompetensi**

Anggota Komite Audit menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan. Dalam menjalankan tugasnya Anggota Komite Audit:

 - a. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 - b. Wajib menjaga dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;

Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI).

MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Masa jabatan Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Apabila anggota Komisaris yang menjadi ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

Struktur Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit yang ditetapkan Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

1. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen;
 - b. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan
 - c. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau Perbankan.
4. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
5. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.



Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pataniari Siahaan	Ketua	Komisaris Independen	Hukum
Ahmad Fikri Assegaf	Anggota	Komisaris Independen	Hukum
Donnaria Silalahi	Anggota	Pihak Independen	Perbankan dan Teknologi
Lungguk Gultom*	Anggota	Pihak Independen	Perbankan dan Keuangan

*) menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 2 Januari 2018

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian, dan telah dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web BNI.

PROFIL KOMITE AUDIT

Ketua Komite Audit

PATANIARI SIAHAAN

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Anggota Komite Audit

AHMAD FIKRI ASSEGAF

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Anggota Komite Audit

DONNARIA SILALAH

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada 16 September 1952, saat ini berusia 66 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/020/DK/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/007/DK/2018 tanggal 24 Mei 2018.

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di beberapa Perusahaan, antara lain sebagai sebagai QA & HC *Operation Division Head* (EVP) (2014-2015) dan *Operational Division Head* (EVP) (2012-2013) pada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. dan PT Bank BTPN Syariah, *Operational Risk Division Head* (EVP) pada PT Bank OCBC NISP Tbk. (2009-2012), berbagai posisi jabatan dengan posisi terakhir sebagai *Operation Risk Management Head* (EVP) pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2001-2009), dan berbagai posisi jabatan dengan posisi terakhir sebagai *System and Operation Policy Group Head* (VP) pada PT Bank Niaga Tbk. (1984-2001).

Anggota Komite Audit

LUNGGUK GULTOM

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada 30 Desember 1954, saat ini berusia 64 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/053/DK/2017 tanggal 21 Desember 2017.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen dari Universitas Parahyangan pada tahun 1979. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di beberapa Perusahaan, antara lain sebagai Anggota Direksi (2013-2017) serta Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko (2011-2013) pada PT BPD Banten Tbk., Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko pada PT Bank Commonwealth Indonesia (2011-2013), *Risk Management and Compliance Division Head* (2002-2003) dan *Internal Audit Division Head* (2001-2002) pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk., *Asset Management Investment Division Head* pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2001), dan berbagai posisi jabatan dengan posisi terakhir sebagai *Corporate Banking Group Head* pada PT Bank Niaga Tbk. (1982-1999).



KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE AUDIT

Secara Umum, persyaratan keanggotaan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
3. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
4. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank;
6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
7. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank; dan
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Per 31 Desember 2018, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Pataniari Siahhan	Ketua	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Ahmad Fikri Assegaf	Anggota	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Donnaria Silalahi	Anggota		<ul style="list-style-type: none"> • QA & HC <i>Operation Division Head</i> (EVP) dan <i>Operational Division Head</i> (EVP) pada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk & PT Bank BTPN Syariah • <i>Operational Risk Division Head</i> (EVP) pada PT Bank OCBC NISP Tbk • Berbagai posisi jabatan dengan posisi terakhir sebagai <i>Operation Risk Management Head</i> (EVP) pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk • Berbagai posisi jabatan dengan posisi terakhir sebagai <i>System and Operation Policy Group Head</i> (VP) pada PT Bank Niaga Tbk
Lungguk Gultom	Anggota	S1 Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Direksi serta Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko pada PT BPD Banten Tbk • Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko pada PT Bank Commonwealth Indonesia • <i>Risk Management and Compliance Division Head</i> dan <i>Internal Audit Division Head</i> pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk • <i>Asset Management Investment Division Head</i> pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) • Berbagai posisi jabatan dengan posisi terakhir sebagai <i>Corporate Banking Group Head</i> pada PT Bank Niaga Tbk



INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Independensi Komite Audit diatur dalam Kode Etik Komite Audit BNI. Anggota Komite Audit memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya.

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya bertindak independen. Tidak ada Anggota Komite Audit yang merangkap menjadi anggota Komite lainnya.

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Pataniari Siahaan	Ahmad Fikri Assegaf	Donnaria Silalahi	Lungguk Gultom
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, anak Perusahaan, maupun Perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓

RAPAT KOMITE AUDIT

Aturan rapat Komite Audit yang diatur dalam Piagam Komite Audit yaitu:

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen;
3. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak;
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
5. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan tersebut.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2018, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta Rapat Komite Audit, sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	9 Januari 2018	• <i>Progress Audit Tahun Buku 2017</i>	• Pataniari Siahaan • Ahmad Fikri Assegaf • Donnaria Silalahi • Lungguk Gultom
2.	11 Januari 2018	• Laporan Keuangan Publikasi per 31 Desember 2017	• Pataniari Siahaan • Ahmad Fikri Assegaf • Donnaria Silalahi • Lungguk Gultom
3.	18 Januari 2018	• Realisasi <i>Review</i> Divisi Kepatuhan sd. Triwulan 4 Tahun 2017 • Rencana Kerja Divisi Kepatuhan Tahun 2018 • Program Strategi Anti <i>Fraud</i> • Program <i>Whistle Blowing System</i> • POJK No.14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang <i>Recovery Plan</i> Bagi Bank Sistemik • Laporan Komite Audit untuk <i>Annual Report</i> Tahun 2017	• Pataniari Siahaan • Ahmad Fikri Assegaf • Donnaria Silalahi • Lungguk Gultom
4.	25 Januari 2018	• <i>Review</i> Penetapan HPS Pengadaan KAP Tahun Buku 2018	• Pataniari Siahaan • Donnaria Silalahi • Lungguk Gultom



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
5.	1 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Review Penetapan HPS Pengadaan KAP Tahun Buku 2018 Review Realisasi Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
6.	15 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Review Kinerja DPLK per 31 Desember 2017 Review Penerapan Manajemen Risiko DPLK per 31 Desember 2017 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
7.	22 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Pelaksanaan RKAT SPI Triwulan 4 Tahun 2017 Evaluasi Pokok-Pokok Hasil Audit Tindak Lanjut Pemeriksaan SPI Tindak Lanjut Pemeriksaan Auditor Eksternal Pemantauan Tindak Lanjut Kasus <i>Fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Lungguk Gultom
8.	8 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi Penunjukan KAP Tahun Buku 2018 Review Pelepasan Aset Tanah dan Bangunan di Kota Pare-Pare 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
9.	18 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Publikasi per 31 Maret 2018 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
10.	26 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> Progress Audit Tahun Buku 2017 Review <i>Auto Write-Off</i> Kartu Kredit (Rapat Dewan Komisaris) 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
11.	17 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Pelaksanaan RKAT SPI Triwulan 1 Tahun 2018 Temuan-Temuan SPI yang Bersifat Material Tindak Lanjut Pemeriksaan SPI Tindak Lanjut Pemeriksaan Auditor Eksternal Pemantauan Tindak Lanjut Kasus <i>Fraud</i> Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Perkembangan Perkara Materiil (Rapat Dewan Komisaris) 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
12.	24 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Pelaksanaan RKAT SPI Triwulan 1 Tahun 2018 Temuan-Temuan SPI yang Bersifat Material Tindak Lanjut Pemeriksaan SPI Tindak Lanjut Pemeriksaan Auditor Eksternal Pemantauan Tindak Lanjut Kasus <i>Fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
13.	28 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> Review Fungsi Audit Intern BNI Periode Tahun 2015-2017 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
14.	12 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Publikasi per 30 Juni 2018 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
15.	2 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <i>Kick Off</i> Audit Tahun Buku 2018 (Rapat Dewan Komisaris) 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
16.	14 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Pelaksanaan RKAT SPI Triwulan 2 Tahun 2018 Evaluasi Pokok-Pokok Hasil Audit Tindak Lanjut Pemeriksaan SPI Tindak Lanjut Pemeriksaan Auditor Eksternal Pemantauan Tindak Lanjut Kasus <i>Fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
17.	20 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Review Divisi Kepatuhan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2018 Program Strategi Anti <i>Fraud</i> Program <i>Whistleblowing System</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
18.	16 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Publikasi per 30 September 2018 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
19.	1 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Pelaksanaan RKAT SPI Triwulan 3 Tahun 2018. Evaluasi Pokok-Pokok Hasil Audit. Tindak Lanjut Pemeriksaan SPI. Tindak Lanjut Pemeriksaan Auditor Eksternal. Pemantauan Tindak Lanjut Kasus <i>Fraud</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
20.	8 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> <i>Review Progress</i> Penyelesaian Hasil Audit SPI, Rekomendasi SPI & Disposisi Direksi Triwulan 3 Tahun 2018. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-126/PB.31/2018 tanggal 1 November 2018 mengenai Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Komisaris. Persiapan Pengadaan KAP Tahun Buku 2019. Temuan SPI yang perlu Mendapat Perhatian Khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
21.	22 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> <i>Progress Audit Tahun Buku 2018</i> (Rapat Dewan Komisaris). 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
22.	4 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi <i>Review</i> Divisi Kepatuhan sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2018. Program Strategi Anti <i>Fraud</i>. Program <i>Whistleblowing System</i>. Rencana Kerja Divisi Kepatuhan Tahun 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom
23.	5 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> RKAT dan Metodologi Audit SPI Tahun 2019. ORSA SPI. 	<ul style="list-style-type: none"> Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan 23 (dua puluh tiga) rapat, baik rapat internal Komite, rapat bersama Direktur Sektor dan Divisi terkait, serta melalui Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Anggota Komite Audit dengan tujuan agar hal-hal yang bersifat substantif dapat segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Berikut frekuensi dan tingkat kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Pataniari Siahaan	Ketua	23	23	100%
Ahmad Fikri Assegaf	Anggota	23	18	78,26%
Donnaria Silalahi	Anggota	23	22	95,65%
Lungguk Gultom	Anggota	23	23	100%

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2018

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*), Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, serta Kode Etik Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit yang telah ditetapkan Dewan Komisaris.

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, BNI telah memuat Piagam Komite Audit dan informasi lainnya yang diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut pada Situs Web BNI.

Selama tahun 2018 Komite Audit telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak Otoritas.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit/jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP), termasuk menelaah independensi dan objektivitas.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2018.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor.
 - Melakukan penelaahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit dan konsultasi SPI, serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI.



- b. Melakukan penelaahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan *review* Divisi Kepatuhan (KPN), serta pengawasan tindak lanjut hasil *review* Divisi KPN.
 - c. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan Pemeriksaan OJK, serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK.
 - d. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan Pemeriksaan BPK, serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
 - e. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan Pemeriksaan KAP, serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan KAP (*Management Letter*).
 - f. Memantau penyiapan laporan Direksi dan Komisaris tentang pokok-pokok hasil audit.
 - g. Memantau perkembangan penyelesaian kasus pegawai, dan tindak lanjut kasus-kasus yang berkenaan dengan *fraud*.
6. Melakukan *assessment* terhadap Sistem *Internal Control* BNI.
 - a. Melakukan evaluasi penerapan *Whistle Blowing System* (WBS).
 - b. Melakukan evaluasi penerapan Program Strategi Anti *Fraud*.
 7. Melakukan penelaahan terhadap laporan kinerja bulanan Perseroan.
 8. Melakukan penelaahan atas usulan-usulan Manajemen yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
 9. Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas Komite Audit.
 10. Melakukan koordinasi antar Komite.

Dalam tahun buku 2018, Komite Audit melalui rapat-rapat Komite telah melakukan pembahasan dengan pihak terkait mengenai hal-hal berikut:

- a. Manajemen

Komite Audit melakukan *review* atas laporan keuangan *audited* dan *unaudited* yang akan dipublikasikan pada tahun 2018, guna memastikan bahwa isi dan pengungkapan informasi telah sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku. Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, independensi, objektivitas, serta kecukupan lingkup pemeriksaannya juga dilakukan oleh Komite Audit melalui pembahasan bersama Manajemen. Komite Audit juga melakukan pembahasan dan *monitoring* tindak lanjut penyelesaian temuan Audit baik Audit Internal maupun Audit Eksternal, *monitoring* tindak lanjut penyelesaian kasus-kasus yang terjadi dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian serta tindakan-tindakan sanksi administratif yang diperlukan. Berkenaan dengan upaya untuk lebih meningkatkan kualitas kredit Bank, Komite Audit melalui Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada Manajemen untuk melakukan *review* secara menyeluruh terhadap proses kredit BNI.

- b. Auditor Eksternal

Dalam rangka proses audit laporan keuangan Perusahaan per 31 Desember 2018 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit membahas rencana audit, *monitoring progress* pelaksanaan audit termasuk temuan yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian, evaluasi terhadap pengendalian internal termasuk pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perseroan, serta kualitas pelaporan keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi *monitoring* terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KAP, Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil audit auditor eksternal dimaksud. Penelaahan dan evaluasi terhadap hasil audit eksternal yang dilakukan Komite Audit sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- *Progress* penyelesaian hasil audit BI sebesar 100% atau seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.
- *Progress* penyelesaian hasil audit Otoritas Jasa Keuangan sebesar 93,70% dengan jumlah *pending* sebanyak 87 rekomendasi.
- *Progress* penyelesaian hasil audit BPK sebesar 87,94% dengan jumlah *pending* sebanyak 48 rekomendasi.
- *Progress* penyelesaian hasil audit PPATK sebesar 85,71% dengan jumlah *pending* sebanyak 1 rekomendasi.
- *Progress* penyelesaian *Management Letter* KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young*) sebesar 85,71% dengan jumlah *pending* sebanyak 4 rekomendasi.

Komite Audit telah menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Tahun Buku 2017 oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young*). Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Perseroan telah melaporkan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Juni 2018.

- c. Satuan Pengawasan Internal

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap rencana audit internal tahunan, memonitor pelaksanaan dan hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut penyelesaiannya oleh Manajemen Perseroan. Komite Audit juga melakukan pembahasan dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI), dalam upaya mendorong efektivitas dan penguatan fungsi SPI.



Hasil *review* KAP Siddharta Widjaja dan Rekan (KPMG) terhadap fungsi SPI untuk periode 3 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, disimpulkan bahwa secara umum fungsi SPI telah memenuhi (*Generally Conform*) ketentuan-ketentuan di dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, dan secara umum pelaksanaan audit penggunaan Teknologi Informasi telah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, meskipun terdapat perbaikan yang diperlukan terhadap beberapa peraturan atau standar yang berlaku namun tidak memengaruhi pencapaian tujuan internal audit dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam batasan yang wajar.

Berdasarkan RKAT SPI Tahun 2018, realisasi dari rencana aktivitas yang dilakukan SPI sebagai berikut:

No	Jenis Aktivitas	Rencana	Realisasi
1	Audit Umum	316	318
2	Audit Teknologi Informasi	13	14
3	Audit <i>Issue</i>	7	7
4	Audit Pendalaman	-	21
5	Konsultasi	-	8
Jumlah		336	368

Dari hasil penelaahan dan evaluasi atas tindak lanjut audit SPI sampai dengan akhir tahun 2018, terdapat 143 (seratus empat puluh tiga) tindak lanjut yang masih dalam proses penyelesaian, masing-masing terdiri dari 5 (lima) tindak lanjut atas audit SPI tahun 2016, 106 (seratus enam) tindak lanjut atas audit SPI tahun 2017, dan 32 (tiga puluh dua) tindak lanjut atas audit SPI tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi atas proses penyelesaian kasus pegawai, pada tahun 2018 terdapat 95 (sembilan puluh lima) kasus. Sebanyak 62 (enam puluh dua) kasus telah selesai diproses, sementara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kasus masih dalam proses penyelesaian.

Terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dan *fraud*, ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi PHK (Pengakhiran Hubungan Kerja) kepada 32 (tiga puluh dua) pegawai, pemberian sanksi Demosi kepada 13 (tiga belas) pegawai, pemberian sanksi STK (Surat Teguran Keras) kepada 16 (enam belas) pegawai, pemberian sanksi STE (Surat Teguran) kepada 52 (lima puluh dua) pegawai, dan pemberian sanksi SP (Surat Pembinaan) kepada 84 (delapan puluh empat) pegawai.

Berkenaan dengan upaya untuk lebih mengoptimalkan fungsi SPI, Komite Audit telah merekomendasikan kepada SPI untuk terus meningkatkan kapabilitas auditor, sehingga diharapkan auditor SPI memiliki keahlian yang memadai baik dalam bidang Perbankan dan teknologi, maupun dalam berbagai sektor industri dalam kaitannya dengan penyaluran fasilitas kredit Bank.

- d. Direktur Kepatuhan
Berdasarkan hasil penelaahan Komite Audit atas Laporan Kepatuhan terhadap ketentuan Perbankan dan perundang-undangan lainnya yang terkait, disampaikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan. Selama tahun 2018, Perseroan secara rutin telah menyampaikan laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Selain hal tersebut, Komite Audit juga melakukan penelaahan dan pembahasan mengenai rencana kerja Divisi Kepatuhan, proses kasus pegawai, pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS), dan penerapan Program Strategi Anti *Fraud*.

Pembahasan terhadap rencana kerja dari Divisi Kepatuhan dilakukan untuk mendorong efektivitas sinergi antara Divisi Kepatuhan dan SPI dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap laporan WBS, selama tahun 2018 terdapat 93 (sembilan puluh tiga) laporan yang disampaikan melalui WBS, yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) laporan di luar lingkup WBS, 22 (dua puluh dua) laporan tidak cukup bukti/tidak terbukti kebenarannya, 1 (satu) laporan terbukti terkait benturan kepentingan, 2 (dua laporan) terbukti terkait kelakuan tidak etis, 7 (tujuh) laporan terbukti terkait kecurangan, 7 (tujuh) laporan terbukti terkait pelanggaran peraturan/hukum, dan 12 (dua belas) laporan tindaklanjutnya masih dalam proses penyelesaian.

Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester II tahun 2017 telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Januari 2018, dan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester I tahun 2018 telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Juli 2018. Pada tahun 2018, terdapat 2 (dua) kasus *fraud* yang dilaporkan sebagai laporan insidental kepada OJK. Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap penerapan Strategi Anti *Fraud*, pada tahun 2018 jumlah *fraud* internal yang terjadi sebanyak 7 (tujuh) kejadian dan jumlah *fraud* eksternal yang terjadi sebanyak 1 (satu) kejadian.



e. Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta rekomendasi Komite Audit, secara periodik dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Secara garis besar sebagai berikut:

- Pelaksanaan *review* atas usulan penunjukkan KAP dan Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian BNI yang berakhir 31 Desember 2018, serta melakukan *review* atas efektivitas pelaksanaan Jasa Audit Kantor Akuntan Publik termasuk aspek independensi dan objektivitas.
- Pelaksanaan *review* atas Laporan Keuangan Publikasi Bank.
- Pelaksanaan *review* atas efektivitas fungsi Internal Audit berkaitan dengan realisasi RKAT, temuan-temuan dan rekomendasi audit mencakup kepatuhan atas *Internal Control*, proses pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan (GCG).
- Pelaksanaan *review* efektivitas tindak lanjut atas penyelesaian temuan-temuan Auditor Internal maupun Auditor Eksternal (OJK, BPK, PPAK).
- Melakukan penelaahan terhadap laporan kinerja bulanan Perseroan, usulan revisi RBB Tahun 2018-2020, dan usulan RBB Tahun 2019-2021 yang disampaikan Manajemen.
- Melakukan penelaahan atas usulan-usulan Manajemen yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- Menyusun Pokok-Pokok Saran dan Pendapat Komite Audit berdasarkan hasil Rapat Komite Audit, dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menyampaikan Pokok-Pokok Saran dan Pendapat Komite Audit tersebut kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris BNI telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan fungsi dan tugas untuk membantu Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan nominasi dan remunerasi.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/01/DK/2002 tanggal 2 Desember 2002 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi terkini. Pembaharuan/penyempurnaan atas Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi BNI terakhir dilakukan pada tahun 2017 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. KEP/030/DK/2017 tanggal 08 Juni 2017 mengenai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut memuat:

1. Landasan hukum;
2. Struktur organisasi dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi;
5. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. Wewenang hak dan kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi;
7. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi;
8. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh.

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Terkait dengan fungsi nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Memberikan usulan/rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Terkait fungsi Remunerasi
 - a. Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
 - b. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur remunerasi;
 - Kebijakan remunerasi; dan
 - Besaran remunerasi;
 Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
 - c. Menyampaikan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
 - f. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris terkait fungsi nominasi dan remunerasi.
4. Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank umum.

Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh.

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik BNI yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi atas persetujuan Dewan Komisaris berhak menunjuk pihak ketiga (orang atau badan usaha) untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:



- a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- b. Prestasi kerja individual.
- c. Kewajaran dengan *peer group*, dan
- d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- e. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- f. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.

MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.
3. Apabila anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris sebelum masa tugasnya selesai, maka jabatan anggota Komite dimaksud dapat digantikan oleh anggota Komisaris yang lain.
4. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris maka jabatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
5. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
6. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga akumulasi masa

jabatannya pada Perseroan maksimal adalah selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Struktur, keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi yang diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia pada BNI.
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya selain anggota yang sekurang-kurangnya harus terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam butir d di atas dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pihak yang berasal dari luar BNI.
6. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota komite yang merupakan Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
7. Anggota Komite Nominasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir e sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
8. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen pada BNI.
9. Ketua komite Nominasi dan Remunerasi dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain dan hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada BNI.
10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada BNI maupun pada Bank lain.
11. Jika dianggap perlu, Komite dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite dengan penugasan, hak, wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Ketua Komite.



Pada periode 2018, struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini:

PERIODE 1 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 5 APRIL 2018

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Ahmad Fikri Assegaf	Ketua	Komisaris Independen	Hukum
Wahyu Kuncoro	Anggota	Wakil Komisaris Utama	Ekonomi Manajemen
Revisond Baswir	Anggota	Komisaris Independen	Ekonomi Akuntansi
Pataniari Siahaan	Anggota	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik Sipil • Hukum
Bistok Simbolon	Anggota	Komisaris	Hukum
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris	Ekonomi
Marwanto Harjowiryono	Anggota	Komisaris	Ekonomi
Reny Wiriandhani	Anggota	Pihak Independen	Psikologi
Ayu Sari Wulandari	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik Industri • Keuangan

PERIODE 5 APRIL SAMPAI DENGAN 3 SEPTEMBER 2018

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Ari Kuncoro*)	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi
Wahyu Kuncoro		Wakil Komisaris Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi Manajemen
Revisond Baswir	Anggota	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi Akuntansi
Pataniari Siahaan	Anggota	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik Sipil • Hukum
Bistok Simbolon	Anggota	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi
Marwanto Harjowiryono	Anggota	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi
Ahmad Fikri Assegaf**)	Anggota	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum
Reny Wiriandhani	Anggota	Pihak Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Psikologi
Ayu Sari Wulandari	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik industri • Keuangan

Keterangan:

*)Mulai menjabat sebagai Ketua KNR sejak tanggal 5 April 2018

***)Menjabat kembali sebagai anggota KNR sejak tanggal 5 April 2018



PERIODE 3 SEPTEMBER 2018 SAMPAI DENGAN 13 SEPTEMBER 2018

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Ari Kuncoro	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	• Ekonomi
Wahyu Kuncoro		Wakil Komisaris Utama	• Ekonomi • Manajemen
Revrisond Baswir	Anggota	Komisaris Independen	• Ekonomi Akuntansi
Pataniari Siahaan	Anggota	Komisaris Independen	• Teknik Sipil • Hukum
Bistok Simbolon	Anggota	Komisaris	• Hukum
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris	• Ekonomi
Marwanto Harjowiryono	Anggota	Komisaris	• Ekonomi
Ahmad Fikri Assegaf	Anggota	Komisaris Independen	• Hukum
Reny Wiriandhani	Anggota	Pihak Independen	• Psikologi
Ayu Sari Wulandari*)	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	• Teknik industri • Keuangan
Efita Praharani**)	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	• Psikologi • Ilmu Administrasi

Keterangan:

*)Berhenti menjabat sebagai anggota KNR sejak 3 September 2018

**)Mulai menjabat sebagai anggota KNR sejak 3 September 2018

PERIODE 13 SEPTEMBER 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Ari Kuncoro	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	• Ekonomi
Wahyu Kuncoro	Anggota	Wakil Komisaris Utama	• Ekonomi Manajemen
Revrisond Baswir	Anggota	Komisaris Independen	• Ekonomi Akuntansi
Pataniari Siahaan	Anggota	Komisaris Independen	• Teknik Sipil • Hukum
Bistok Simbolon	Anggota	Komisaris	• Hukum
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris	• Ekonomi
Marwanto Harjowiryono	Anggota	Komisaris	• Ekonomi
Ahmad Fikri Assegaf	Anggota	Komisaris Independen	• Hukum
Sigit Widyawan*)	Anggota	Komisaris Independen	• Ekonomi Akuntansi • Keuangan
Reny Wiriandhani	Anggota	Pihak Independen	• Psikologi
Efita Praharani	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	• Psikologi • Ilmu Administrasi

Keterangan:

*) Mulai menjabat sebagai anggota KNR sejak 13 September 2018



PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Adapun profil singkat mengenai Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BNI per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Ari Kuncoro

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Wahyu kuncoro

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Revrisond Baswir

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Pataniari Siahaan

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Joni Swastanto

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Bistok Simbolon

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Marwanto Harjowiryo

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Ahmad Fikri Assegaf

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Ayu Sari Wulandari

Warga negara Indonesia, berdomisili di Bogor. Lahir pada 1 Desember 1969. Saat ini berusia 50 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sejak Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/002/DK2016 tanggal 29 Februari 2016.

Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Industri Pertanian dan Istitut Pertanian Bogor dan memperoleh gelar *Master of Applied Finance* The University of Melbourne. Pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Divisi Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2010-2011), Pemimpin Divisi Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2011-2012), Wakil Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2012-2014), Wakil Pemimpin *Divisi Market Intelligence & Portfolio* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2014-2015), Pemimpin Divisi *Market Intelligence & Portfolio* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2015). Saat ini menjabat sebagai Pemimpin Divisi *Human Capital* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Januari 2016-sekarang).

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Efita Praharani

Warga negara Indonesia, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat. Lahir pada tanggal 14 September 1967. Saat ini berusia 51 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada Perseroan sejak September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/018/DK/2018 tanggal 17 Desember 2018.

Meraih gelar Sarjana di bidang Psikologi Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar *Master of Science* di bidang Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia.

Pernah menjabat sebagai Pemimpin Konsumer *Banking* Wilayah – Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2016 –2018), dan Wakil Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Mei – September 2018). Saat ini menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (September 2018 – sekarang).

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Reny Wiriandhani

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada 29 April 1969. Saat ini berusia 49 tahun. Diangkat sebagai Anggota Independen Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/055/DK/2017 tanggal 21 Desember 2017.

Meraih gelar Sarjana di bidang Psikologi dari Universitas Indonesia pada tahun 1995 dan *Master of Human Resources Management* dari Monash Univesity Melbourne, Australia.

Pernah menjabat sebagai *Head of Human Resources* untuk *Consumer Banking* pada Standard Chartered Bank (2004-2011), *Head of Human Resources* pada PT Bank ICBC Indonesia (2011-2015) dan *Head of Human Resources* pada Permata Bank (2015-2016).



KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Persyaratan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, antara lain:

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, serta memiliki pemahaman di bidang Perbankan.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
 - c. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
 - d. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan secara efektif.
2. Di samping persyaratan sebagaimana disebutkan dalam butir a tersebut di atas, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Pihak Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak memiliki hubungan afiliasi atau hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna BNI atau hubungan dengan BNI yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Pengertian Pihak Independen dalam piagam ini berpedoman pada ketentuan yang mengatur Pihak Independen komite di bawah Dewan Komisaris dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
 - b. Memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi.
 - c. Bukan merupakan karyawan BNI.
 - d. Tidak merangkap sebagai:
 - Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain;
 - Sekretaris/staf Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain.
 - Anggota komite lainnya yang ada pada Perseroan.
 - e. Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *sucession plan* Bank.
 - f. BNI harus meneliti kebenaran dari seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas Pihak Independen.

Per 31 Desember 2018, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Ari Kuncoro*	Ketua Komite	Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.	Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman komposisi Dewan Komisaris
Wahyu Kuncoro	Anggota	Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.	Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman komposisi Dewan Komisaris
Revrisond Baswir	Anggota	Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.	Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman komposisi Dewan Komisaris.
Pataniari Siahaan	Anggota	Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.	Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman komposisi Dewan Komisaris.
Joni Swastanto	Anggota	Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.	Riwayat pengalaman kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.
Bistok Simbolon	Anggota	Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.	Riwayat pengalaman kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.
Marwanto Harjowiryono	Anggota	Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.	Riwayat pengalaman kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.
Ahmad Fikri Assegaf	Anggota	Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.	Riwayat pengalaman kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.
Sigit Widyawan**	Anggota	Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.	Riwayat pengalaman kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris



Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Ayu Sari Wulandari***	Anggota	S1 Teknik Industri Pertanian S2 Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Pemimpin Divisi Usaha Kecil BNI Pemimpin Divisi Usaha BNI Wakil Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi BNI Wakil Pemimpin <i>Market Intelligence & Portfolio</i> BNI Pemimpin Divisi <i>Market Intelligence & Portfolio</i> BNI Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i> BNI
Efita Praharani****	Anggota	S1 Psikologi S2 Ilmu Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin <i>Consumer Banking</i> Wilayah – Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran BNI. Wakil Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer BNI. Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i> BNI.
Renny Wiriandhani	Anggota	Psikologi	<ul style="list-style-type: none"> <i>Head of Human Resources</i> untuk <i>Consumer Banking</i> pada Standard Chartered Bank. <i>Head of Human Resources</i> pada PT Bank ICBC Indonesia. <i>Head of Human Resources</i> pada Permata Bank.

Keterangan:

*)Mulai menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi Remunerasi sejak tanggal 5 April 2018.

**)Mulai menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi Remunerasi sejak tanggal 13 September 2018.

***)Berhenti menjabat sebagai anggota Komite Nominasi Remunerasi sejak tanggal 3 September 2018.

****)Mulai menjabat sebagai anggota Komite Nominasi Remunerasi sejak tanggal 3 September 2018.

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya.

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Aspek Independensi	Ari Kuncoro	Wahyu Kuncoro	Revisond Baswir	Pataniari Siahaan	Joni Swastanto	Bistok Sombolon	Marwanto Harjowiyono	Ahmad Fikri Assegaff	Sigit Widyawan	Ayu Sari Wulandari	Efita Praharani	Renny
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di BNI, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di BNI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Nominasi dan Remunerasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan dari mayoritas jumlah tersebut merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi serta 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam rapat.
4. Pengambilan keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara, tanpa menghitung suara dari anggota yang berasal dari Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
6. Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite dan didokumentasikan dengan baik.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 6 tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris.
9. Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.



AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Selama tahun 2018 Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan 8 (delapan) kali rapat dengan tabel penjelasan sebagai berikut:

No.	Tanggal rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	08 Februari 2018	Laporan <i>Senior Executive Vice President (SEVP) Human Capital</i> mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Material Risk Taker</i> 2. <i>Up date Human Capital Architecture dan Talent Management</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Fikri Assegaf* • Wahyu Kuncoro • Revrisond Baswir • Pataniari Siahaan • Joni Swastanto • Reny Wiriandhani • Ayu Sari Wulandari****
2.	15 Februari 2018	Pengusulan calon anggota Direksi Perusahaan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Fikri Assegaf* • Wahyu Kuncoro • Revrisond Baswir • Pataniari Siahaan • Bistok Simbolon • Joni Swastanto • Marwanto Harjowiryono • Reny Wiriandhani • Ayu Sari Wulandari****
3.	15 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi Konsultan Willis Tower Watson mengenai Draft kajian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2018 dan tiantim tahun 2018. 2. Penilaian kinerja Direksi tahun 2017 3. Format dan KPI Penilaian Kinerja Direksi tahun 2018 4. Pemberian mandat dan kuasa kepada Ketua KNR untuk: Hadir, memberikan suara dan rekomendasi dalam rapat dengan Tim Evaluasi bakal calon kandidat pengurus BNI dan penandatanganan dokumen terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Fikri Assegaf* • Wahyu Kuncoro • Revrisond Baswir • Pataniari Siahaan • Bistok Simbolon • Joni Swastanto • Marwanto Harjowiryono • Reny Wiriandhani • Ayu Sari Wulandari****
4.	20 Maret 2018	Pembahasan calon pengurus Bank dalam rangka RUPS tahunan BNI	<ul style="list-style-type: none"> • Kuasa anggota KNR kepada Ketua KNR Ahmad Fikri Assegaf
5.	17 Mei 2018	Laporan <i>Senior Executive Vice President (SEVP) Human Capital</i> mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Up date implementasi sistem remunerasi pegawai</i> b. <i>Up date penyempurnaan Talent Management System</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ari Kuncoro** • Wahyu Kuncoro • Revrisond Baswir • Pataniari Siahaan • Bistok Simbolon • Joni Swastanto • Marwanto Harjowirjono • Ahmad Fikri Assegaf • Reny Wiriandhani • Ayu Sari Wulandari****
6.	16 Agustus 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan <i>Senior Executive Vice President (SEVP) Human Capital</i> mengenai sistem sanksi bagi pegawai 2. Usulan remunerasi Direksi terkait alokasi <i>Long Term Incentive</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ari Kuncoro** • Wahyu Kuncoro • Revrisond Baswir • Joni Swastanto • Marwanto Harjowiryono • Ahmad Fikri Assegaf • Reny Wiriandhani • Ayu Sari Wulandari****
7.	6 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 2. <i>Review</i> pegawai senior berstatus prohire 3. Usulan calon Direktur Utama Perusahaan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Ari Kuncoro** • Revrisond Baswir • Pataniari Siahaan • Bistok Simbolon • Joni Swastanto • Marwanto Harjowiryono • Ahmad Fikri Assegaf • Reny Wiriandhani • Efitra Praharani*****



No.	Tanggal rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
8	08 November 2018	<p><i>Review Road Map HCA BNI berdasarkan Core Plan 2019-2023 antara lain:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Keberlanjutan <i>Human Capital Architecture</i> (HCA) <ul style="list-style-type: none"> Strategi <i>Management Talent</i> untuk peran <i>critical</i> <i>Leadership Program</i> Pembenahan <i>Performance Management System</i> Hasil <i>Employee Engagement Survey</i> (EES) 2018 dan tindak lanjutnya. Rencana Kerja divisi <i>Human Capital</i> dan koordinasi dengan Divisi <i>Corporate University</i> dalam rangka menyiapkan organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Ari Kuncoro** Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Marwanto Harjowiryono Ahmad Fikri Assegaf Sigit Widyawan*** Reny Wiriandhani Efta Praharani****

Keterangan:

*)Berhenti menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi Remunerasi dan menjabat kembali sebagai anggota Komite Nominasi Remunerasi sejak tanggal 5 April 2018.

**)Mulai menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi Remunerasi sejak tanggal 5 April 2018.

***)Mulai menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi Remunerasi sejak tanggal 13 September 2018.

****)Berhenti menjabat sebagai anggota Komite Nominasi Remunerasi sejak tanggal 3 September 2018.

*****)Mulai menjabat secara efektif sebagai anggota Komite Nominasi Remunerasi sejak tanggal 3 September 2018.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Presentase
Ari Kuncoro*	Ketua Komite	4	4	100%
Wahyu Kuncoro	Anggota	6	8	75%
Revrisond Baswir	Anggota	8	8	100%
Pataniari Siahaan	Anggota	7	8	87,5%
Joni Swastanto	Anggota	8	8	100%
Bistok Simbolon	Anggota	6	8	75%
Marwanto Harjowiryono	Anggota	7	8	87,5%
Ahmad Fikri Assegaf	Anggota	8	8	100%
Sigit Widyawan**	Anggota	1	1	100%
Reny Wiriandhani	Anggota	8	8	100%
Ayu Sari Wulandari***	Anggota	6	6	100%
Efta Praharani****	Anggota	2	2	100%

Keterangan:

*)Mulai menjabat secara efektif sebagai Ketua Komite Nominasi Remunerasi sejak tanggal 5 April 2018.

**)Mulai menjabat secara efektif sebagai anggota Komite Nominasi Remunerasi sejak tanggal 13 September 2018.

***)Berhenti menjabat secara efektif sebagai anggota Komite Nominasi Remunerasi sejak tanggal 3 September 2018

****)Mulai menjabat secara efektif sebagai anggota Komite Nominasi Remunerasi sejak tanggal 3 September 2018

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2018

Selama tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan seluruh program/Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris:

1. Pelaksanaan tugas nominasi
 - a. Melakukan *review*/penelaahan terhadap calon pengurus BNI yang berasal dari pihak internal BNI serta memberikan usulan/rekomendasi mengenai calon pengurus BNI yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan dalam RUPS BNI melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
 - b. Melakukan *review*/penelaahan terhadap kelengkapan persyaratan calon pengurus BNI untuk keperluan pengajuan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai calon pengurus BNI.
 - c. Melakukan *review*/penelaahan terhadap para calon pengurus Perusahaan anak BNI yang akan diusulkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna (Kementerian BUMN).
 - d. Membuat rekomendasi mengenai Program Pengembangan Kemampuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - e. Menyusun rekomendasi terhadap Sistem Nominasi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
 - f. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - g. Melakukan *review* terhadap sistem nominasi pengelolaan SDM secara keseluruhan atau *Human Capital Architecture* (HCA).
 - h. Menelaah Penilaian Kinerja Direksi tahun 2017 serta format dan *Key Performance Indicator* (KPI) penilaian kinerja Direksi 2018.
 - i. Melakukan evaluasi terhadap *Talent Management System*.
 - j. Melakukan evaluasi terhadap sistem sanksi pegawai.
 - k. Melakukan *review* terhadap pegawai senior berstatus *pro hire*.
2. Pelaksanaan tugas remunerasi
 - a. Melakukan evaluasi atas sistem/kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pejabat eksekutif serta pegawai secara keseluruhan.
 - b. Menelaah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018 dan tantiem tahun 2017.
 - c. Melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna termasuk *review* terhadap usulan remunerasi Direksi terkait alokasi *Long Term Incentive*.

- d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi pegawai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi pegawai.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang, secara internal Perseroan memiliki program yang telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Dalam program ini para pegawai potensial yang termasuk ke dalam *Talent Pool* akan mendapat kesempatan untuk mengikuti program pelatihan atau aktivitas terkait bidang manajemen, strategi bisnis, perencanaan strategis, analisis risiko dan potensi bisnis, analisis kinerja operasional dan keuangan serta berbagai program sejenis lainnya.

Dengan adanya program ini, apabila Perseroan membutuhkan penggantian kepemimpinan, Perseroan akan mengajukan kandidat internal dari peserta program yang difasilitasi oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Selanjutnya hasil pemilihan kandidat internal tersebut akan diajukan kepada Kementerian BUMN untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko BNI dibentuk pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/002/DK/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pembentukan Komite Risiko dan Kepatuhan. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.



PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perseroan memiliki Piagam Pemantau Risiko yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Pembaharuan/penyempurnaan atas Piagam Komite Pemantau Risiko BNI terakhir dilakukan pada tahun 2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/028/DK/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang "Piagam Komite Pemantau Risiko". Piagam Komite Pemantau Risiko tersebut memuat dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas, maksud dan tujuan, pembentukan dan struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, rapat serta masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tugas Komite Pemantau Risiko meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, yang antara lain:
 - a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategis, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.
 - b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, yang terdiri dari 8 (delapan) risiko, serta risiko asuransi dan risiko transaksi intra grup.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan implementasinya untuk memastikan bahwa BNI telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
 - d. Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Umum Perkreditan serta kebijakan lainnya yang diwajibkan oleh regulator yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, antara lain:
 - a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan tugas Komite Manajemen Risiko.
 - b. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada BNI, termasuk pelaksanaan manajemen risiko secara terintegrasi dengan Perusahaan anak.
 - d. Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator terkait risiko kepada Dewan Komisaris.
3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang terkait dengan fungsi dan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik BNI yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko berwenang untuk melakukan pengujian secara uji petik dan melakukan inspeksi terhadap kantor-kantor cabang/perwakilan/wilayah dan unit-unit bisnis BNI apabila diperlukan.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko berwenang melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko, termasuk dalam mengkomunikasikan hal-hal terkait informasi keuangan dan manajemen.
4. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko serta unit-unit kerja yang relevan.

HAK DAN KEWAJIBAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjalankan tugas dengan baik dengan berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independent memiliki hak untuk menerima honorarium dari BNI yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko.
4. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan menyampaikan Rencana kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan Rencana kerja dan Anggaran tahunan Komite Pemantau Risiko tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

5. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib membuat dan menyapaikan laporan kepada Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan Anggota Komite sebagai berikut:
 - a. Laporan atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
 - b. Laporan triwulanan dan laporan tahunan.
6. Setiap tahun Komite melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai tanggung jawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan.
7. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang terkait jabatannya.
8. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan waktu meneydiakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
9. Anggota Komite yang berasal dari pihak independen wajib hadir pada hari dan jam kerja Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dalam satu minggu sesuai hari dan jadwal kehadiran yang ditetapkan Dewan Komisaris dan/atau Ketua Komite, antara lain untuk menghadiri Rapat Komite dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan serta;
 - b. Apabila diperlukan, atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Ketua Komite, anggota Komite yang berasal dari pihak independen wajib hadir pada Perseroan atau pada Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Komite, atau pada kegiatan yang harus dihadiri oleh Dewan Komisaris sesuai dengan keperluannya di luar hari dan jadwal kehadiran rutin tersebut.
10. Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas di antara Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan kerja sama pelaksanaan tugas, Komite Pemantau Risiko wajib melakukan koordinasi dengan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris lainnya.

MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris, masa tugasnya sebagai anggota komite adalah sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya sebagai anggota komite apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.
3. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir maka jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.
4. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga total masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko pada Perseroan maksimal hanya selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.
5. Dewan Komisaris dengan memperhatikan usulan dari Ketua Komite Pemantau Risiko, dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen apabila dianggap tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota komite sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan penunjukan/pengangkatan anggota komite yang bersangkutan dan/atau Perjanjian Kerja antara anggota komite yang bersangkutan dengan BNI, serta berdasarkan peraturan yang berlaku.
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris maka Ketua Komite yang bersangkutan wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.



STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
4. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua
 - b. 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
 - c. 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
5. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah seorang Komisaris Independen merangkap sebagai anggota yang ditetapkan dalam keputusan rapat Dewan Komisaris, dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
7. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada BNI.
8. Mantan anggota Direksi dan mantan pejabat eksekutif BNI atau pihak yang memiliki hubungan dengan BNI yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen yang akan menjadi anggota independen Komite Pemantau Risiko wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi dan mantan pejabat eksekutif BNI yang bertugas hanya melaksanakan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan. Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah masa tunggu (*cooling off*) sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang berlaku.
9. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain;
 - b. Sekretaris/staf Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain.
10. Direksi melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
11. Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris jika salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.
12. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang berasal dari anggota Direksi BNI maupun Bank lain.
13. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
14. Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
15. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf yang berasal dari pihak luar BNI atau sekretaris Komite. Staf atau Sekretaris Komite tersebut ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Pada periode 2018, Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Revisond Baswir	Ketua	Komisaris Independen	• Ekonomi
Bistok Simbolon	Anggota	Komisaris	• Hukum
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris	• Perbankan
Irwan Rinaldi	Anggota	Pihak Independen	• Perbankan dan • Manajemen Risiko
Kartika Siwi	Anggota	Pihak Independen	• Perbankan

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

Profil singkat mengenai Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Ketua Komite Pemantau Risiko

Revisond Baswir

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

Anggota Komite Pemantau Risiko

Joni Swastanto

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

Anggota Komite Pemantau Risiko

Bistok simbolon

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

Anggota Komite Pemantau Risiko

Irwan Rinaldi

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir pada 6 Juli 1960. Saat ini berusia 56 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/026/DK/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi dari Universitas Andalas pada tahun 1985 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1999. Pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Akuntansi manajemen dan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2013), Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2013-2016) dan memberikan berbagai pelatihan, antara lain Ikatan Komite Audit Indonesia (2015), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah/Asbanda (2015), BARa Risk Forum (2016), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) (2017).

Anggota Komite Pemantau Risiko

Kartika Siwi

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta lahir pada 11 Oktober 1959. Saat ini berusia 59 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/054/DK/2017 tanggal 21 Desember 2017.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Jayabaya pada tahun 1992 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998. Pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Divisi Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2004-2008), Wakil Pemimpin Satuan Pengawasan Internal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009-2010), dan Pemimpin Divisi Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011-2014).

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yaitu:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lain.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BNI.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang ekonomi, keuangan dan Perbankan atau manajemen risiko sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur persyaratan bagi anggota Komite Pemantau Risiko.
 - b. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai mengenai peraturan perundangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional BNI, penerapan *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko.
3. Persyaratan Independensi

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen:

 - a. Merupakan pihak di luar BNI yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BNI.
 - c. Dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik maupun konsultan yang memberikan jasa audit, jasa manajemen risiko dan/atau konsultasi non audit kepada BNI.
 - d. Bukan merupakan pihak yang berasal dari karyawan Bank.



Per 31 Desember 2018, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Revrisond Baswir	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.
Joni Swastanto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.
Bistok Simbolon	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.
Irwan Rinaldi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Akuntansi S2 Manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan BRI Kepala Divisi Manajemen Risiko BRI
Kartika Siwi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Ekonomi S2 Manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Pemimpin Divisi Teknologi Informasi BNI. Wakil Pemimpin Satuan Pengawasan Internal BNI. Pemimpin Divisi Operasional BNI.

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek independensi	Revrisond Baswir	Joni Swastanto	Bistok Sombolon	Irwan Rinaldi	Kartika Siwi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Perusahaan anak, maupun Perusahaan afiliasi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai penurus partai politik, pejabat dan pemerintah.	√	√	√	√	√

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan anggota yang berasal dari Pihak Independen.
3. Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota Komite Pemantau Risiko yang paling senior apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
4. Jika dipandang perlu, Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan rapat untuk hadir dalam Rapat Komite Pemantau Risiko.
5. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
7. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota



- Komite Pemantau Risiko yang hadir. Pengaturan hak suara anggota Komite menganut prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
8. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
 9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 10. Risalah Rapat Komite disusun oleh Sekretaris Komite atau oleh salah satu anggota komite yang berasal dari pihak independen dalam hal tidak terdapat Sekretaris Komite.
 11. Risalah Rapat Komite disampaikan secara tertulis oleh Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
 12. Kehadiran Anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko (KPR) telah melaksanakan 8 (delapan) rapat baik rapat internal KPR maupun rapat bersama divisi-divisi terkait dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	01 Januari 2018	Rapat KPR bersama Divisi Manajemen Risiko Bank (<i>Enterprise Risk Manajemen</i>) mengenai realisasi rencana kerja Divisi Enterprise Risk Manajemen Triwulan IV-2017 dan rencana kerja Divisi ERM Tahun 2018.	<ul style="list-style-type: none"> • Revrison Baswir • Joni Swastanto • Irwan Rinaldi • Kartika Siwi
2.	22 Februari 2018	Rapat KPR bersama Divisi Manajemen Risiko mengenai Profil Risiko Triwulan IV-2017 dan Tingkat Kesehatan Bank BNI Semester II-2017.	<ul style="list-style-type: none"> • Revrison Baswir • Joni Swastanto • Bistok Simbolon • Irwan Rinaldi • Kartika Siwi
3.	15 Maret 2018	Rapat KPR bersama Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Administrasi Kredit, Divisi Tresuri, dan Satuan Pengawasan Internal mengenai pendalaman Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas.	<ul style="list-style-type: none"> • Revrison Baswir • Joni Swastanto • Bistok Simbolon • Irwan Rinaldi • Kartika Siwi
4.	26 April 2018	Rapat KPR bersama Divisi Manajemen Risiko Bank mengenai Profil Risiko Triwulan I-2018 dan evaluasi pelaksanaan kerja Komite Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Revrison Baswir • Joni Swastanto • Bistok Simbolon • Irwan Rinaldi • Kartika Siwi
5.	28 Juni 2018	Rapat bersama Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Operasional Teknologi Informasi, Divisi Hukum, Divisi Kepatuhan, serta Divisi Solusi & Keamanan Teknologi Informasi mengenai isu-isu utama Risiko Operasional, Risiko Hukum, dan Risiko Kepatuhan.	<ul style="list-style-type: none"> • Revrison Baswir • Joni Swastanto • Bistok Simbolon • Irwan Rinaldi • Kartika Siwi
6.	23 Agustus 2018	Rapat bersama Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Perencanaan Strategis dan Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan mengenai Tingkat Kesehatan BNI, serta isu-isu Utama Risiko Stratejik dan Risiko Reputasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Revrison Baswir • Joni Swastanto • Bistok Simbolon • Irwan Rinaldi • Kartika Siwi
7.	25 Oktober 2018	Rapat bersama Divisi Manajemen Risiko Bank, dan Divisi Pengembangan Perusahaan Anak mengenai Profil Risiko Terintegrasi Semester I-2018 dengan pendalaman pada Risiko Transaksi Intra Grup dan Risiko Asuransi, Laporan Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Semester I-2018 dan Profil Risiko BNI Triwulan III-2018.	<ul style="list-style-type: none"> • Revrison Baswir • Joni Swastanto • Bistok Simbolon • Irwan Rinaldi • Kartika Siwi
8.	29 November 2018	Rapat KPR bersama Direktur Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko Bank mengenai Dokumen <i>Recovery Plan</i> BNI 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Revrison Baswir • Joni Swastanto • Bistok Simbolon • Irwan Rinaldi • Kartika Siwi



FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan 8 (delapan) rapat KPR baik rapat internal KPR maupun rapat bersama Divisi-divisi atau unit. Jumlah kehadiran masing-masing anggota KPR dalam Rapat KPR adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Presentase
Revrisond Baswir	Ketua	8	8	100%
Joni Swastanto	Anggota	8	8	100%
Bistok Simbolon	Anggota	8	7	87%
Irwan Rinaldi	Anggota	8	8	100%
Kartika Siwi	Anggota	8	8	100%

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2018

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan seluruh program/Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun 2018 dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Mekanisme pelaksanaan kegiatan/tugas KPR melalui:

- Pelaksanaan Rapat KPR termasuk dengan mengundang divisi-divisi/unit-unit terkait.
- Penelaahan/evaluasi/*review* di luar forum rapat

Hasil Rapat KPR dan pemantauan, penelaahan/evaluasi/*review* KPR tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai laporan dan rekomendasi baik secara tertulis maupun dalam forum Rapat Dewan Komisaris.

Pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko tersebut secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank per semester dan Profil Risiko per Triwulan.
2. Rencana Bisnis Bank 2019-2021 dan *Corporate Plan* BNI 2019-2023.
3. Laporan Kepatuhan yang disampaikan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris.
4. Pemberian kredit kepada pihak terkait yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
5. Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) BNI 2018.
6. Laporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
7. Pendalaman terhadap isu-isu utama Profil Risiko.
8. Permohonan konsultasi kredit yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
9. Kinerja Keuangan BNI dan Kinerja Perusahaan Anak BNI.
10. Rencana Kerja dan realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta realisasi dan hasil pelaksanaan tugas dan Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi per triwulan.
11. Kebijakan Umum Manajemen Risiko, Pedoman Perusahaan Sistem Pengendalian Intern, serta Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi.
12. Pedoman Manajemen Risiko Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dibentuk dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/12/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan di BNI didudukkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KEP/006/DK/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Perseroan memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang secara terus-menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Pembaharuan/ penyempurnaan atas Piagam Komite Pemantau Risiko BNI terakhir dilakukan pada tahun 2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/044/DK/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut memuat dasar hukum; pengertian; pembentukan dan struktur komite; persyaratan anggota komite; keanggotaan komite; tugas dan tanggung jawab komite; wewenang, hak dan kewajiban komite; pengangkatan, pemberhentian serta masa tugas anggota Komite; dan rapat Komite.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dari anggota Dewan Komisaris masing-masing Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi serta penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris Entitas Utama.

WEWENANG KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat meminta penjelasan atau informasi yang diperlukan mengenai karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan BNI, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

2. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat bekerja sama atau berkoordinasi dengan Komite di bawah Dewan Komisaris Entitas Utama lainnya, serta divisi-divisi/satuan/unit-unit kerja yang relevan pada Entitas Utama atau pada Lembaga Jasa Keuangan lainnya dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
4. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen memiliki hak untuk menerima honorarium dari BNI yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama, Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Ketua/anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
6. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
7. Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib untuk melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama mengenai kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan implementasinya untuk memastikan pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan secara memadai.
8. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama kepada Direksi Entitas Utama untuk diketahui. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
9. Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib membuat dan menyampaikan laporan atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan Anggota Komite.



MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Ketua dan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris Entitas Utama, atau Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Lembaga Jasa Keuangan:
 - a. Masa tugasnya adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh RUPS.
 - b. Berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas berakhir.
3. Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga total masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen pada Perseroan maksimal selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Entitas Utama untuk memberhentikan anggota komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.
4. Dewan Komisaris Entitas Utama, dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi jika dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota komite sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan penunjukan/pengangkatan anggota komite yang bersangkutan.
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Entitas Utama yang menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Entitas Utama, maka Ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen Entitas Utama lainnya yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada Entitas Utama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
6. Pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite dilaporkan kepada RUPS.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Struktur dan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
2. Komite Tata Kelola Terintegrasi berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi paling kurang terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI, sebagai anggota;
 - c. Seorang pihak independen sebagai anggota. Pihak independen dapat berasal dari pihak independen anggota Komite pada Entitas Utama;
 - d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah dalam Konglomerasi Keuangan BNI sebagai anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan BNI serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b di atas disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan BNI serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.
5. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b di atas dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan BNI, di mana apabila diperlukan Entitas Utama dapat menambah keanggotaan tidak tetap Komisaris Independen dari Lembaga Jasa Keuangan yang belum menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
6. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak Independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf 3 tersebut di atas pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNI tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.



Pada periode tahun 2018, struktur dan keanggotaan serta keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Revrisond Baswir	Ketua	Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Ekonomi
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan
Krisna Wijaya*)	Anggota	Komisaris Utama/Independen PT BNI Life Insurance	Perbankan dan Ekonomi
Parikesit Suprpto**)	Anggota	Komisaris Utama/Independen PT BNI Life Insurance	<i>Economic Development</i>
Utang Ranuwijaya	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT BNI Life Insurance	Ekonomi Syariah
Rizqullah	Anggota	Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah	Ekonomi dan keuangan Syariah, Perbankan Umum dan Syariah
Hasanuddin	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah	Hukum Ekonomi Syariah
Rosa Lima Dwi Mutiari	Anggota	Komisaris Utama/Independen PT BNI Multifinance	Perbankan (Perkreditan)
Eddy Siswanto	Anggota	Presiden Komisaris/Komisaris Independen PT BNI Asset Management	<i>Finance, tax and accounting, capital market, pension fund</i>
Suhendry Hafni**)	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Sekuritas	Manajemen
Setyowati	Anggota	Pihak Independen	Perbankan (<i>Risk Management & Compliance</i>)

Keterangan:

*) Berakhir menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 26 Juni 2018

***) Mulai menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 13 Desember 2018

PROFIL KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi

REVRISOND BASWIR

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

JONI SWASTANTO

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

KRISNA WIJAYA

(Komisaris Utama/Independen PT BNI Life Insurance)
Lahir Tahun 1955. Memperoleh gelar Sarjana (S1) Bidang Sosial Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1980), gelar Sarjana (S2) Bidang Manajemen Agribisnis dari Universitas Gajah Mada (1990) dan gelar Sarjana (S3) Studi Antar Bidang dari Universitas Gajah Mada.

Menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI sejak November 2015 sampai dengan Juni 2018. Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner/Kepala Eksekutif (CEO) Lembaga Penjamin Simpanan (2005-2007), Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2008-2010), dan Komisaris Independen PT Bank Mandiri Tbk (2010-2015). Beliau resmi menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Life Insurance sejak Oktober 2015. Jabatan lainnya sampai dengan sekarang adalah Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Adira Finance Tbk, Komisaris Independen PT Mahaka Radio Tbk, Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Chubb Syariah Insurance.

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

PARIKESIT SUPRAPTO

(Komisaris Utama/Independen PT BNI Life Insurance)
Lahir tahun 1951. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (1980) dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Master (*economic development*) (1990) dari Indiana University/USA, Doktor (*economic development*) (1995) dari University of Notre Dame/USA.

Menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI sejak Desember 2018. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen di Bank Bukopin (2013 s.d 2018), Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN (2010-2012), Wakil Menteri BUMN untuk Industri Perbankan dan Keuangan (2008-2010), Penasehat Ahli bidang Usaha Kecil untuk Menteri Negara BUMN (2006-2008), Asisten Deputi Menteri BUMN, bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Industri Keuangan dan Pembangunan (2002-2005), Direktur Restrukturisasi dan Privatisasi, Dirjen BUMN, Departemen Keuangan (2001-2002).

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

UTANG RANUWIJAYA

(Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT BNI Life Insurance)
Lahir tahun 1958. Memperoleh gelar Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" Bandung (1984), gelar Sarjana (S2) IAIN "Syahid" Jakarta (1992) dan gelar Sarjana (S3) IAIN "Syahid" Jakarta (1998).



Menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI sejak Januari 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten (2011-2015), Direktur Pasca Sarjana IAIN SMH Banten (2015-2017).

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

RIZQULLAH

(Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah)

Lahir tahun 1957. Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 1982, memperoleh gelar S2 di bidang Bisnis Internasional dari Universitas Baldwin Wallace College, Ohio, USA pada tahun 1986 dan memperoleh gelar sarjana S3 di bidang Ekonomi & Keuangan Islam dari Universitas Trisakti pada tahun 2013.

Menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Oktober 2016. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di berbagai Perusahaan, antara lain sebagai Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (2005-2007), Pemimpin Divisi Risiko Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2007-2008), Pemimpin Proyek Pendirian Bank Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2008-2010), Direktur Utama PT Bank BNI Syariah (2010-2012), Direktur Program S2 Ilmu Ekonomi & Keuangan Islam (2013-2015), Komisaris Independen PT Asuransi Tripakarta (2015-2016), Komisaris Independen PT Grha 165, Tbk (2015-2017).

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

HASANUDDIN

(Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Bank BNI Syariah)

Lahir tahun 1961. Memperoleh gelar Sarjana Muda Fakultas Syariah dari Universitas Islam Tribhakti, Kediri tahun 1985, Sarjana Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN-sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1997, dan telah menyelesaikan program Doktor dalam studi Pengkajian Syariah dari universitas yang sama.

Menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI sejak Januari 2017. Menjabat sebagai anggota Tim Ahli LP POM - MUI tahun 2006, hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH - DSN) MUI. Aktif dalam kegiatan akademik dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IIQ, Jakarta tahun 1993 - 1997 dan 1999 - 2002 serta menjadi dosen Hukum Islam di UIN dan IIQ hingga saat ini.

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

ROSA LIMA DWI MUTIARI

(Komisaris Utama/Independen PT BNI Multifinance)

Lahir tahun 1956. Memperoleh gelar Sarjana (S1) Bidang Ekonomi Perusahaan dari Universitas Diponegoro (1980) dan gelar Sarjana (S2) Sekolah Ilmu Ekonomi IPWI (1995).

Menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI sejak Oktober 2016. Sebelumnya menjabat berbagai posisi jabatan dari tahun 2004 dengan posisi terakhir sebagai Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2012-2014), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (*Indonesian Profesional Certification Authority*), Asesor Kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2012-Sekarang), Tenaga Pengajar dan Konsultan Perkreditan pada BNI Corporate University PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2014-sekarang).

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

EDDY SISWANTO

(Presiden Komisaris/Komisaris Independen PT BNI Asset Management)

Lahir tahun 1956. Lulus sebagai Sarjana *Accounting* di Universitas Sumatera Utara - Medan (1982) dan memperoleh gelar *Master Finance and Banking* di Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta (1993). Memiliki *tax brevet* A, B, dan C serta sertifikasi Pasar Modal WMI, WPPE, WPEE.

Menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak September 2017. Sebelumnya berkarier di BNI Group dari 1982 dan dari tahun 2001-2010, antara lain menjabat sebagai Akuntan di Divisi Keuangan PT BNI Sekuritas (2001-2004), Direktur Investasi di Dana Pensiun BNI (2004-2006), Pemimpin Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan di PT BNI (Persero) Tbk (2006-2009), Direktur Utama di PT BNI Sekuritas (2009-2010), dan Direktur Utama di PT Tri Handayani Utama (Perusahaan Anak Dana Pensiun BNI) (2011-sekarang).

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

SUHENDRY HAFNI

(Komisaris Independen PT BNI Sekuritas)

Lahir tahun 1958. Meraih gelar sarjana dari UNKRIS dan Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1995 serta mengikuti berbagai seminar di dalam dan luar negeri, di antaranya adalah *Management Audit Framework* World Bank yang diadakan oleh Internal Audit Association di Washington, Amerika Serikat pada tahun 2012 dan *Executive Leadership Workshop* yang diadakan oleh Marcus Evan di Kuala Lumpur pada tahun 2011. Pada tahun 2012 mengikuti seminar *Ethic and Compliance Forum*, diadakan oleh Ethic and Compliance Forum di Shanghai.

Menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Desember 2018. Sebelumnya menjabat berbagai posisi strategis di BNI Group, antara lain Wakil Pemimpin Divisi Jasa Keuangan Institusi PT BNI (Persero) Tbk, Pemimpin Wilayah Denpasar PT BNI (Persero) Tbk, Pemimpin Divisi Kepatuhan PT BNI (Persero) Tbk, dan Komisaris PT BNI Sekuritas (2015-2018).



Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

SETYOWATI

(Pihak Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi)

Lahir tahun 1958. Memperoleh gelar S1 Bidang Ekonomi, Universitas Diponegoro (1982).

Menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI sejak November 2015. Sebelumnya berkarier di PT Bank Niaga dari tahun 1983 sampai dengan 2001 dengan jabatan terakhir sebagai *Compliance Group Head*, Komisaris Niaga Securities (2000-2001), *Credit & Market Risk Management* PT Bank Danamon (2001-2006), *Corporate Credit Audit Department Head* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006-2007), *Credit Risk & Policy Group Head* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007-2009), *Policy, System & Procedure Group Head* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2014), penasehat di PT Bank Syariah Mandiri (2015-2017).

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Persyaratan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite;
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang Perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya;
 - b. Mampu bekerja sama, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif, dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai mengenai prinsip dan proses penerapan *Good Corporate Governance* secara umum, serta peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional Perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
3. Persyaratan Independensi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen:

 - a. Merupakan pihak di luar BNI yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI, atau hubungan dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dimaksud sesuai dengan pengertian yang ditetapkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Revrisond Baswir	Ketua	Riwayat Pendidikan beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Joni Swastanto	Anggota	Riwayat pendidikan beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Krisna Wijaya*)	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Bidang Sosial Ekonomi Pertanian • S2 Bidang Manajemen Agribisnis • S3 Studi Antar Bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Dewan Komisiner/Kepala Eksekutif (CEO) Lembaga Penjamin Simpanan • Komisaris PT Bank Danamon Indonesia (Tbk) • Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Tbk) • Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia • Komisaris independen dan Ketua Komite Audit PT Adira Finance Tbk • Komisaris Independen PT Mahaka Radio Tbk • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Chubb Syariah Insurance.



Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Parikesit Suprpto**)	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Bidang Ekonomi S2 Bidang <i>Economic Development</i> S3 Bidang <i>Economic Development</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen di Bank Bukopin. Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN. Wakil Menteri BUMN untuk Industri Perbankan dan Keuangan. Penasehat Ahli bidang Usaha Kecil untuk Menteri Negara BUMN (2006-2008). Asisten Deputi Menteri BUMN, bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Industri Keuangan dan Pembangunan. Direktur Restrukturisasi dan Privatisasi, Dirjen BUMN, Departemen Keuangan.
Utang Ranuwijaya	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Bidang Peradilan Agama S2 Bidang Studi Islam S3 Bidang Studi Islam 	<ul style="list-style-type: none"> Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten. Direktur Pasca Sarjana IAIN SMH Banten.
Rizqullah	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Bidang Ekonomi S2 Bidang Bisnis Internasional S3 Bidang Ekonomi dan Keuangan Islam 	<ul style="list-style-type: none"> <i>General Manager</i> Bank BNI – Cabang London, Inggris. Pemimpin Wilayah Bank BNI – Jawa Timur. Pemimpin Divisi Bank BNI - Unit Usaha Syariah. Direktur PT Sarana Multigriya Finansial. Pemimpin Divisi Bank BNI Divisi Risiko Kredit. Pemimpin proyek Pendirian Bank Syariah. Asesor Perbankan Umum dan Manajemen Risiko Bank. Direktur Utama PT Bank BNI Syariah. Direktur Program Universitas Trisakti – Program S2 Ilmu Ekonomi & Keuangan Islam. Komisaris Independen PT Asuransi Tripakarta. Komisaris Independen PT Grha 165, Tbk.
Hasanuddin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Muda Fakultas Syariah dari Universitas Islam Tribhakti Sarjana Fakultas Syariah, institut Agama Islam Negeri IAIN (sekarang UIN) Magister Agama dalam studi Pengkajian Islam (konsentrasi syariah) dari IAIN Syarif Hidayatullah Doktor dalam studi Pengkajian Islam (konsentrasi syariah) dari IAIN Syarif Hidayatullah. 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Anggota Tim Ahli LPPOM - MUI tahun 2006 Anggota Komite Akuntansi Syariah (KAS) – IAI tahun 2006. Dekan Fakultas Syariah IIQ, Jakarta tahun 1993 – 1997 dan 1999 – 2002. Tenaga pengajar bidang Hukum Islam di UIN dan IIQ dan menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH – DSN) MUI. Dewan Pengawas Syariah di PT Bank BNI Syariah sejak 2010
Rosa Lima Dwi Mutiari	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Bidang Ekonomi Perusahaan Sarjana (S2) Sekolah Ilmu Ekonomi IPWI 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pemimpin Divisi Korporasi 1 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (<i>Indonesian Profesional Certification Authority</i>). Asesor Kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Tenaga Pengajar dan Konsultan Perkreditan pada BNI Corporate University PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Eddy Siswanto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Bidang Accounting S2 Bidang Finance and Banking 	<ul style="list-style-type: none"> Akuntan di Divisi Keuangan PT BNI Sekuritas Direktur Investasi di Dana Pensiun BNI Pemimpin Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan PT BNI (Persero) Tbk Direktur Utama PT BNI Sekuritas Direktur Utama PT Tri Handayani Utama (Anak Perusahaan Dana Pensiun BNI)
Suhendry Hafni**)	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Bidang Manajemen S2 Bidang Magister Manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Pemimpin Divisi Jasa Keuangan Institusi PT BNI (Persero) Tbk Pemimpin Wilayah Denpasar PT BNI (Persero) Tbk Pemimpin Divisi Kepatuhan PT (BNI) Persero Tbk Komisaris PT BNI Sekuritas
Setyowati	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Bidang Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Compliance Group Head</i> PT Bank Niaga Komisaris Niaga Securities <i>Credit & Risk Managemen</i> PT Bank Danamon <i>Corporate Credit Audit Departement Head</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk <i>Credit Risk & Policy Group Head</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk <i>Policy, System & Procedure Group Head</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Penasehat di PT Bank Syariah Mandiri

Keterangan:

*) Berakhir menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 26 Juni 2018

**) Mulai menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 13 Desember 2018



INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Aspek Independensi	Revisond Baswir	Joni Swastanto	Krisna Wijaya*)	Parikesit Suprpto**)	Utang Ranuwijaya	Rizqullah	Hasanuddin	Rosa Lima Dwi Mutiari	Eddy Siswanto	Suhendry Hafni**)	Setyowati
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, anak Perusahaan, maupun Perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan:

*) Berakhir menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 26 Juni 2018

***) Mulai menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 13 Desember 2018

RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
2. Rapat Tata Kelola Terintegrasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota.
3. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang paling senior apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.
4. Jika dipandang perlu, Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan agenda/pembahasan rapat untuk hadir dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.



5. Rapat komite wajib dihadiri oleh masing-masing Komisaris Independen dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dalam hal Komisaris independen yang bersangkutan tidak dapat menghadiri rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, maka Komisaris lain yang bukan merupakan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi atau pejabat pada Lembaga Jasa Keuangan yang bersangkutan dapat diminta untuk menghadiri rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan mengisi daftar hadir rapat, tetapi tidak dihitung dalam kuorum kehadiran dan pengambilan jumlah suara untuk mencapai keputusan dalam rapat tersebut.
6. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
7. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir. Pengaturan hak suara anggota Komite menganut prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
8. Rapat Komite dapat dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
9. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
10. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
11. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.

AGENDA RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan 5 (lima) kali rapat, baik rapat internal maupun rapat dengan mengundang Direktur atau Divisi/Unit terkait. Agenda rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi selamat tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	25 Januari 2018	Presentasi Divisi Kepatuhan (KPN) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI): 1. Permasalahan dan Perbaikan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi 2. Tindak Lanjut Rekomendasi OJK 3. Kecukupan, Metodologi, dan Permasalahan Pengendalian Internal Terintegrasi berdasarkan Hasil Audit Intern Terintegrasi	1. Revrison Baswir 2. Joni Swastanto 3. Krisna Wijaya 4. Utang Ranuwijaya 5. Rizqullah 6. Hasanuddin 7. Rosa Lima Dwi Mutiari 8. Eddy Siswanto 9. Suhendry Hafni*) 10. Setyowati
2.	12 April 2018	Presentasi Direktur Kepatuhan BNI: 1. Profil Risiko Terintegrasi 2. Risk Appetite Statement Terintegrasi, Limit Seluruh <i>Eksposure</i> dan <i>Stress Test</i> Terintegrasi 3. Evaluasi Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>) Tata Kelola Terintegrasi Semester II/2017	1. Revrison Baswir 2. Krisna Wijaya 3. Utang Ranuwijaya 4. Rizqullah 5. Rosa Lima Dwi Mutiari 6. Eddy Siswanto 7. Suhendry Hafni*) 8. Setyowati
3.	24 Mei 2018	Presentasi Direktur Keuangan BNI: 1. Kinerja Keuangan Perusahaan Anak Triwulan I/2018 2. Strategi Pengembangan Bisnis Perusahaan Anak	1. Revrison Baswir 2. Joni Swastanto 3. Krisna Wijaya 4. Rizqullah 5. Hasanuddin 6. Rosa Lima Dwi Mutiari 7. Eddy Siswanto 8. Suhendry Hafni*) 9. Setyowati
4.	30 Agustus 2018	1. Presentasi SPI: Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan terkait Tata Kelola Terintegrasi 2. Presentasi Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan (KMP): <i>Review</i> Pedoman Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi	1. Revrison Baswir 2. Joni Swastanto 3. Parikesit Suprpto**) 4. Rizqullah 5. Rosa Lima Dwi Mutiari 6. Eddy Siswanto 7. Suhendry Hafni*) 8. Setyowati



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
5.	1 November 2018	<ol style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Pengembangan Perusahaan Anak (PPA): Kinerja Perusahaan Anak Triwulan III/2018 Internal Komite TKT: Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019 	<ol style="list-style-type: none"> Revrison Baswir Joni Swastanto Parikesit Suprpto**) Rizqullah Hasanuddin Rosa Lima Dwi Mutiari Eddy Siswanto Suhendry Hafni**) Setyowati

Keterangan:

*) Hadir sebagai perwakilan dari PT BNI Sekuritas

***) Hadir sebagai perwakilan dari PT BNI Life

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan 5 (lima) kali rapat, baik rapat internal, maupun rapat dengan mengundang Direktur atau Divisi/Unit terkait. Dengan terjadinya perubahan keanggotaan selama tahun 2018, maka persentase kehadiran masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana tabel di bawah ini disesuaikan dengan waktu efektif menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Revrison Baswir	Ketua	5	5	100%
Joni Swastanto	Anggota	5	4	80%
Krisna Wijaya*)	Anggota	3	3	100%
Parikesit Suprpto**)	Anggota	-	-	-
Utang Ranuwijaya	Anggota	5	2	40%
Rizqullah	Anggota	5	5	100%
Hasanuddin	Anggota	5	3	60%
Rosa Lima Dwi Mutiari	Anggota	5	5	100%
Eddy Siswanto	Anggota	5	5	100%
Suhendry Hafni**)	Anggota	-	-	-
Setyowati	Anggota	5	5	100%

Keterangan:

*) Berakhir menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 26 Juni 2018

***) Mulai menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 13 Desember 2018

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2018

Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan seluruh program/Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Dewan Komisaris dengan melakukan pemantauan, penelaahan/*review* serta pemberian saran terhadap hal-hal yang terkait dengan fungsi dan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui pelaksanaan rapat internal dan diskusi/pembahasan bersama Direktur atau Divisi/unit terkait serta dengan melakukan penelaahan/evaluasi/*review* serta diskusi/pembahasan bersama divisi/unit terkait di luar forum rapat yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai laporan baik secara tertulis atau dalam forum rapat yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai laporan, baik secara tertulis atau dalam forum Rapat Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan aktivitas dan memberikan saran atas hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan *review* dan membahas kinerja Perusahaan anak berikut strategi pengembangan Perusahaan anak sejalan dengan visi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja sehingga *corporate plan* Perusahaan anak terintegrasi dengan *corporate plan* Perusahaan induk.
- Mendorong peningkatan pelaksanaan sinergi Perusahaan anak sebagai bagian dari BNI Group, di antaranya sinergi dalam kerja sama pembiayaan, *sharing* informasi *know your customer*, eksplorasi produk-produk baru yang prospektif dan optimalisasi peluang bisnis dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Perusahaan induk.



3. Mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi meliputi kecukupan pengendalian intern terintegrasi; pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi; implementasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi, dan pencapaian kinerja Perusahaan anak.
4. Melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan metodologi dan permasalahan pengendalian internal terintegrasi berdasarkan hasil audit terintegrasi.
6. Melakukan evaluasi terhadap profil risiko terintegrasi, *risk appetite* terintegrasi, limit seluruh eksposur terintegrasi dan *stress test* terintegrasi.
7. Mendorong percepatan BNI *Incorporated* berjalan dengan baik sehingga berdampak pada *profitability* masing-masing Perusahaan anak diiringi pengendalian risiko, pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas, dan tata kelola yang baik.
8. Membahas dan merekomendasikan penyelesaian permasalahan yang terjadi di Perusahaan anak dan perbaikan fungsi kepatuhan terintegrasi.
9. Melakukan *review* dan memastikan Laporan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan tata kelola terintegrasi serta memastikan atas kelemahan yang ada telah dibuat *action plan*/langkah-langkah perbaikan.
10. Menyusun laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris.
11. Melakukan *review* dan revisi/pembaharuan terhadap Pedoman Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
12. Melakukan *review* dan pemantauan bulanan terhadap *financial performance* Perusahaan anak dalam rangka pencapaian target bisnis sebagai salah satu hasil dari tata kelola terintegrasi.
13. Melakukan *review* terhadap *Corporate Plan* BNI 2019-2023 dan RBB BNI 2019-2021 untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
14. Meningkatkan komitmen bersama bagi semua Komisaris Perusahaan anak dan seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi bahwa dalam melakukan pengawasan harus berdasarkan pada konteks risiko terhadap entitas utama.
15. Melakukan pemantauan dan memastikan hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan telah ditindaklanjuti serta memberikan saran perbaikan terkait sumber daya manusia, kebutuhan *database*, kelengkapan aturan di antaranya terkait benturan kepentingan.
16. Memastikan Perusahaan anak telah mengantisipasi adanya perubahan kondisi eksternal yaitu gejolak nilai tukar rupiah serta era digital yang saat ini menjadi tren dan berkembang di masyarakat.
17. Melakukan *review* efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi.
18. Melakukan *review* terhadap revisi Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi.
19. Melakukan pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi setiap triwulan kepada Dewan Komisaris.
20. Menyusun program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2019 dengan fokus: memastikan struktur Tata Kelola Terintegrasi berfungsi secara optimal, memastikan proses Tata Kelola Terintegrasi berjalan dengan baik; mengevaluasi hasil Tata Kelola Terintegrasi.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan BNI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengembang misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap *stakeholder*, antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan publik secara luas. Sekretaris Perusahaan memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan dan menguasai peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi.

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

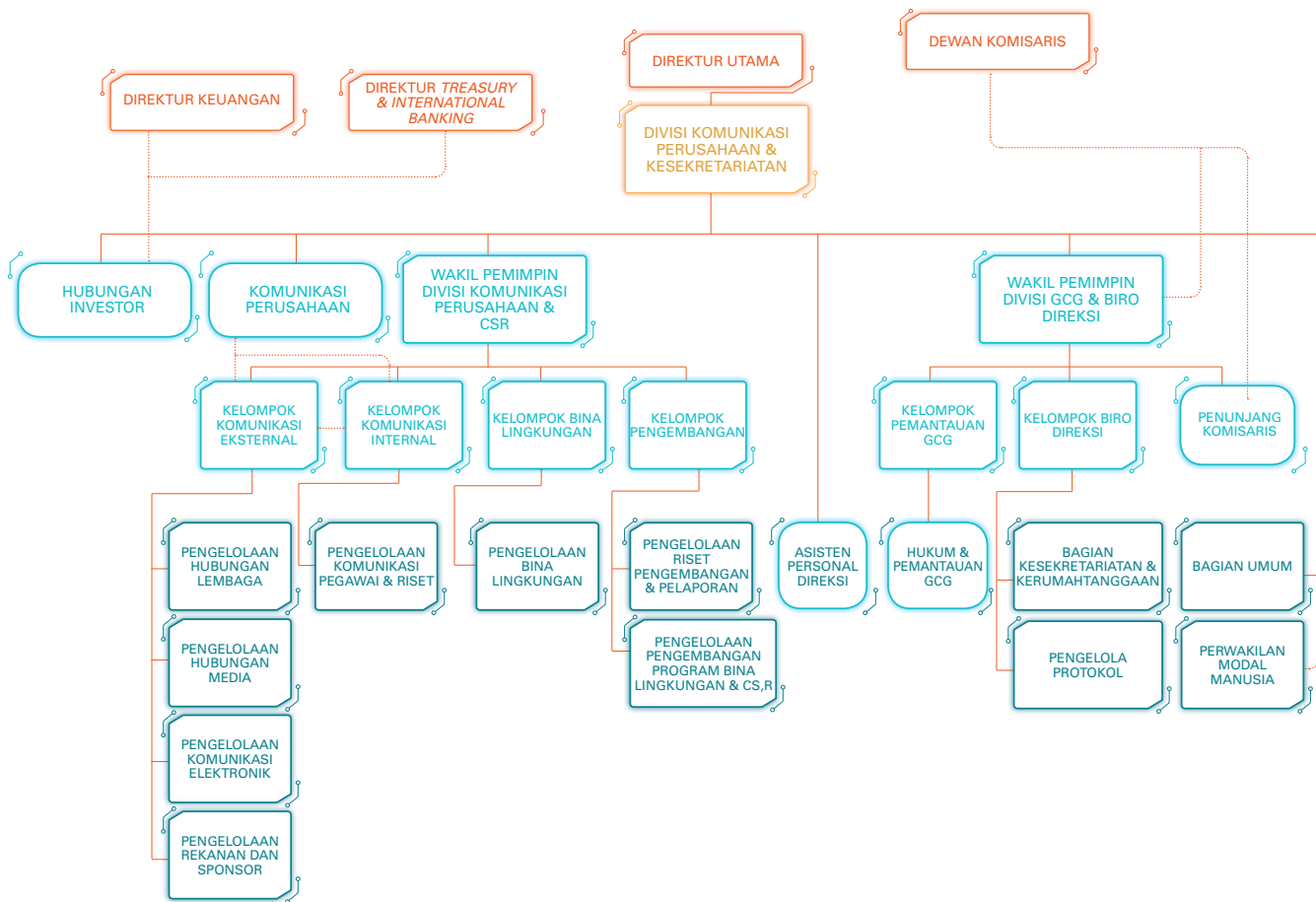
Regulasi yang menjadi acuan dalam pembentukan, pengangkatan dan pelaksanaan Sekretaris Perusahaan, antara lain:

1. Anggaran Dasar BNI.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A: tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.
5. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002.
7. Keputusan Direksi BEJ No. 339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001 Perihal Perubahan Ketentuan huruf C.2.e Peraturan Pencatatan Efek No. I-A: tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.
8. Peraturan No. IX.I.4 Keputusan Ketua Bapepam Nomor. Kep 63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada struktur organisasi BNI, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dalam memberikan pengarahan dan memantau kegiatan unit-unit kerja menurut bidang tugasnya yang meliputi hubungan investor, komunikasi eksternal, komunikasi internal, bina lingkungan, pengembangan bina lingkungan dan *corporate social responsibility*, pemantauan GCG, biro direksi serta penunjang Komisaris.

Berikut struktur organisasi Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan.





FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Di BNI, fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan. Sekretaris Perusahaan BNI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap *stakeholder*. Sekretaris Perusahaan memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Bank dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi *Corporate Secretary* paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas dan dalam pencapaian dan pelaksanaan visi dan misi Sekretaris Perusahaan yang selaras dengan visi dan misi BNI, Sekretaris Perusahaan BNI memiliki fungsi dan tugas yang tertuang dalam Pedoman Perseroan Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi pokok Sekretaris Perusahaan untuk Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal. Khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
 - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal (*investor relation*) yang berkaitan dengan kondisi Bank.
 - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan *stakeholder* (*public relation*) yang berkaitan dengan kondisi Bank.
 - d. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
 - e. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat.
2. Selain melaksanakan fungsi pokok tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan juga menjalankan tugas-tugas sebagai berikut.
 - a. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat *minutes of meeting*.
 - b. Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam Perseroan maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Membuat Daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan 5% (lima per seratus) atau lebih.
 - d. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan/kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perseroan.
 - e. Menyelenggarakan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.



PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan 27 Januari 2019, Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Sdr. Kiryanto.

KIRYANTO

(25 April 2016 - 27 Januari 2019)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, Usia 50 tahun. Memperoleh gelar S1 Bidang Manajemen Keuangan FISIP Universitas Gajah Mada (1992) dan S2 Bidang Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia (2000).

Sebelumnya menjabat sebagai *Senior Economist* BNI Divisi Perencanaan Strategis (2006-2016) dan *Assistant Vice President* Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan (2004-2006). Selain itu, beliau adalah seorang ekonom dan profesional Indonesia yang karyanya telah diterbitkan di sejumlah media cetak dan sering memberikan pelatihan kepada pegawai Bank.

Dasar pengangkatan beliau sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BNI No. KP/161/DIR/R tanggal 18 April 2016.



Pada tanggal 28 Januari 2019, BNI menunjuk Meiliana sebagai Pengganti Sementara Sekretaris Perusahaan untuk menggantikan sementara Kiryanto. Selanjutnya Beliau menjabat Sekretaris Perusahaan pada tanggal 22 Maret 2019.

MEILIANA

(22 Maret 2019 - saat ini)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Usia 46 tahun. Memperoleh gelar Magister di bidang Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor.

Beliau berkarier sejak tahun 1997 sebagai Analis Kredit. Selanjutnya berkiprah di bidang *product development* sebagai Manajer Taplus sejak tahun 2010 dan Assistant Vice President Korporat Branding pada tahun 2010. Pada tahun 2014 menjadi Wakil Pemimpin Divisi *Marketing* Komunikasi.

Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BNI berdasarkan SK Direksi BNI No. KP/118/DIR/R tanggal 22 Maret 2019.





PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2018

Beberapa kegiatan terkait dengan pemangku kepentingan yang telah dilakukan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2018 antara lain:

1. Menyelenggarakan *Corporate Action* yaitu:
 - a. RUPS Tahunan pada tanggal 20 Maret 2018.
 - b. Pembayaran Dividen pada tanggal 20 April 2018.
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku.
3. GCG *Awareness* untuk Direksi dan Dewan Komisaris BNI termasuk di dalamnya *update* kebijakan baru dan isu mengenai GCG.
4. Melakukan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dalam upaya mengelola komunikasi dengan komunitas pasar modal khususnya investor dan *analyst* untuk menjamin keterbukaan atau transparansi informasi, BNI mengadakan kegiatan *Analyst Meeting* dan *Public Expose*, menerima Investor/*Analyst Visit* dan *Conference Call*, menyelenggarakan *Analyst Gathering*, *Economic Outlook* serta menerbitkan BNI *Monthly Report*.
6. Mengikuti *Non Deal Roadshow* baik di dalam maupun luar negeri, yakni di wilayah Asia, Eropa dan Amerika.
7. Penyediaan akses informasi yang *up to date* pada akses yang dapat dijangkau publik secara luas, antara lain membangun *database* saham, mengembangkan aplikasi *website*, mempersiapkan *Annual Report* Tahun Buku 2018.
8. Mengoptimalkan strategi penerapan GCG melalui *Self Assessment* GCG dan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi, serta sosialisasi GCG di beberapa Divisi di Kantor Pusat, beberapa kantor Wilayah dan wakil Perusahaan Anak.
9. Penyampaian laporan rutin dan insidental kepada regulator antara lain Laporan Registrasi Pemegang Efek, Daftar Pemegang Saham, Laporan Utang Valas, dsb.
10. Pengurusan *Fit and Proper Test* Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Dokumentasi data legalitas Perusahaan antara lain Akta RUPS, Akta Perubahan Susunan Pengurus, dsb.
12. Menyelenggarakan *press Conference* dan *teleConference* dengan para *stakeholder*.
13. Menjalin komunikasi dengan Kementerian Negara BUMN, Kementerian Keuangan, Sekretaris Negara, Otoritas Jasa Keuangan, *Self Regulatory Organization* (Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia), Biro Administrasi Efek, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
14. Berpartisipasi aktif dalam rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja dengan DPR-RI.
15. Menghadiri setiap pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi dan membuat Notulen hasil Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi.

Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun Buku 2017

Sebagaimana Laporan *Corporate Secretary* yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK/2014 yang menyatakan bahwa:

1. Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris Perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
2. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan uraian singkat pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan dan informasi mengenai pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Sekretaris Perusahaan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.



Berpedoman pada hal tersebut di atas, maka Sekretaris Perusahaan BNI telah menyusun Laporan Sekretaris Perusahaan yang di laporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Memo No. KMP/7/1716 tanggal 4 Mei 2018 dan Surat Direksi No. DIR/320 tanggal 9 Mei 2018.

Laporan tersebut antara lain memuat tentang:

Pelaksanaan Fungsi Corporate Secretary Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2014.

No.	Fungsi Menurut OJK	Program	Realisasi
1.	Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal	Mengikuti perkembangan Pasar Modal sesuai peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan melakukan koordinasi dengan Divisi lain terkait pemenuhan ketentuan Pasar Modal yang berlaku.	<p>Membuat Juklak kepada segenap Divisi dan melakukan sosialisasi terkait Keterbukaan Informasi untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Menyusun Laporan Berkala Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Menyampaikan tanggapan Konsep Perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. II-H dan No. III-1. Melakukan analisa yuridis mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Menyusun Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan yang telah disetujui oleh Direktur Utama Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/356/DIR/R tanggal 2 September 2016 dan dipublikasi melalui <i>website</i> BNI. Di samping hal tersebut pada tahun 2017, pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah berkoordinasi dengan Unit Penunjang Komisaris untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris analisa hukum sehubungan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan melalui Nota Intern No. GCG/204 tanggal 3 Mei 2017. 2. Telah menyampaikan himbauan Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan melalui Memo No. KMP/7/1789 tanggal 18 Mei 2017 tentang himbauan Otoritas Jasa Keuangan kepada BNI sebagai Bank pelapor LCR terkait dengan kewajiban penyampaian Laporan LCR melalui media <i>online</i> APOLO. 3. Telah menyampaikan kajian hukum kepada segenap Direksi melalui Memo No. KMP/7/2437 tanggal 6 Juli 2017 tentang Penyampaian Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait Kewajiban Pelaporan atas Kepemilikan Saham. 4. Telah menyampaikan himbauan kepada segenap Divisi/Satuan/Unit melalui memo No. KMP/7/3106 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Himbauan Penyampaian Laporan Informasi dan/atau Fakta Material Bank. 5. Telah menyampaikan kajian hukum kepada Divisi Tresuri melalui memo No. KMP/7/3485 tanggal 18 September 2017 tentang Kewajiban Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
		Memenuhi POJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.	<p>Dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI (Pedoman TKT) dan menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. POJK No. 8/POJK.03/2014, telah dilakukan <i>review</i> Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Melakukan review Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan BNI (Pedoman TKT), serta menindaklanjuti ketentuan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. POJK No. 18/POJK.03/2014, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP/006/DK/2015 tanggal 22 Juni 2015 dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Dewan Komisaris No DK/71 tanggal 8 Juli 2015.</p> <p>Berkenaan dengan penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola di Perseroan selaku Entitas Utama maupun pada segenap Perseroan Perseroan Anak yang menjadi Anggota Konglomerasi Keuangan Perseroan, melalui surat Dewan Komisaris No. DK/109 tanggal 20 November 2017, Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan arahan terkait dengan pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan yang telah disampaikan Direksi melalui surat DIR/695 tanggal 2 November 2017.</p>



No.	Fungsi Menurut OJK	Program	Realisasi
Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi			
<p>Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan di Perseroan didudukkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/006/DK/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.</p>			
<p>Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Pembaharuan/penyempurnaan atas Piagam Komite Risiko Perseroan terakhir dilakukan pada tahun 2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/044/DK/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang "Piagam Tata Kelola Terintegrasi".</p>			
<p>Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut memuat dasar hukum; pengertian; pembentukan dan struktur komite; persyaratan anggota komite; keanggotaan komite; tugas dan tanggung jawab komite; wewenang, hak dan kewajiban komite; pengangkatan, pemberhentian serta masa tugas anggota Komite, dan rapat Komite.</p>			
2.	<p>Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>GCG <i>Awareness</i> untuk Dewan Komisaris dan Direksi termasuk di dalamnya <i>update</i> kebijakan baru dan isu-isu mengenai GCG.</p>	<p>Telah melakukan dan menyampaikan Kajian Yuridis/Analisa Yuridis: Telah menyusun dan menyampaikan Analisa Yuridis Perubahan Tata Cara Penyertaan Modal Negara dalam kaitannya dengan isu yang berkembang atas Rencana <i> Holding</i> BUMN Jasa Keuangan kepada Direktur Utama melalui Wakil Direktur Utama melalui Memo No. KMP/0286 tanggal 23 Januari 2017. Telah menyusun Analisa Yuridis terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Perbuatan Direksi Yang Harus Mendapat Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan melalui Memo No. KMP/1/1594 tanggal 4 Mei 2017. Telah menyusun dan menyampaikan Kajian Yuridis Updating Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nominal Berbeda kepada segenap Direksi melalui Memo No. KMP/7/3157 tanggal 23 Agustus 2017.</p> <p>Telah menyusun dan menyampaikan Kajian Yuridis <i>Updating</i> Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka kepada segenap Direksi melalui Memo No. KMP/7/3156 tanggal 29 Agustus 2017.</p> <p>Telah menyusun dan menyampaikan Kajian Yuridis tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik kepada segenap Direksi melalui Memo No. KMP/7/3739 tanggal 6 Oktober 2017.</p>
3.	<p>Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.</p>	<p>Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>Menjamin keterbukaan atau transparansi informasi Perusahaan baik finansial maupun non finansial, dengan tetap menjaga informasi tersebut disampaikan secara wajar dan pantas.</p>	<p>Telah menyusun, melakukan dan menyampaikan: Keterbukaan Informasi atas setiap <i>corporate action</i> BNI; Publikasi Keterbukaan Informasi di media cetak, <i>website</i> BNI, Sistem Pelaporan Emiten (SPE) Otoritas Jasa Keuangan dan <i>e-reporting</i> di Bursa Efek Indonesia (<i>idx.net</i>); Surat Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia.</p>
		<p>Intensifikasi publikasi materi dan informasi kinerja Perusahaan.</p>	<p>Telah menyusun, melakukan dan menyampaikan: Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan di Media Lokal Materi <i>Corporate Presentation Smartbook</i> publikasi <i>highlight</i> laporan keuangan dan <i>print ad</i> di media asing</p>
		<p>Penyediaan informasi secara berkala mengenai kinerja Perusahaan, kinerja saham BNI maupun <i>outlook</i> pasar</p>	<p>Menyediakan informasi secara berkala mengenai kinerja Perusahaan, kinerja saham BNI maupun <i>outlook</i> pasar secara keseluruhan melalui <i>Weekly, Monthly, Quarterly</i> dan <i>Annually Reporting</i>. Mengirimkan laporan bulanan (<i>Monthly update</i>) pada pihak internal dan pihak eksternal.</p>



No.	Fungsi Menurut OJK	Program	Realisasi
		Penyediaan akses informasi yang <i>up to date</i> pada akses yang dapat dijangkau <i>public</i> secara luas melalui <i>updating</i> materi pada media digital agar dapat memberikan akses yang lebih mudah dan luas.	Membangun <i>database</i> mengenai saham, data investor dan masukan/ <i>feedback</i> sebagai dasar perbaikan ke depan; Menyediakan informasi <i>up to date</i> mengenai kinerja Perusahaan dan tata kelola Perusahaan melalui media digital (<i>website</i>); Mengembangkan Aplikasi dan Konten <i>website</i> . Akses Informasi Perseroan maupun data terkait <i>corporate action</i> dapat diakses melalui situs resmi <i>website</i> Perseroan di http://bni.co.id/ . Pihak yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait <i>corporate action</i> maupun data Perseroan dapat menghubungi via telepon di 021-5728387, Fax di 6221-5728053 atau <i>email</i> ke: investor.relations@bni.co.id. Melakukan <i>updating</i> materi <i>website</i> BNI sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten (materi dikoordinasikan dengan Divisi/Satuan/Unit terkait cfm Memo KMP No. KMP/7/2128 tanggal 19 Agustus 2015).
		Mempersiapkan laporan manajemen yang terangkum dalam laporan tahunan (<i>Annual Report</i>).	Menyusun Tim <i>Annual Report</i> Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka penyusunan <i>Annual Report</i> TB 2018.
Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu	Mengoptimalkan strategi penerapan dan pemantauan GCG		Penyampaian Laporan <i>Self Assesment</i> GCG sebagai berikut: Melakukan <i>Self Assesment</i> GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama-sama dengan dokumen Tingkat Kesehatan Bank melalui surat No. DIR/055 tanggal 22 Januari 2018 dan BNI mendapat Peringkat Komposit 2 (PK-2) atau "Sehat". Melakukan <i>Self Assesment</i> GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama-sama dengan dokumen Tingkat Kesehatan Bank melalui surat No. DIR/468 tanggal 21 Juli 2017 dan BNI mendapat Peringkat Komposit 2 (PK-2) atau "Sehat". Penyampaian Laporan <i>Self Assesment</i> TKT sebagai berikut: Melakukan <i>Self Assesment</i> TKT yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. DIR/125 tanggal 13 Februari 2018 dan BNI mendapat Peringkat 2 (Baik). Melakukan <i>Self Assesment</i> TKT yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. DIR/474 tanggal 27 Juli 2017 dan BNI mendapat Peringkat 2 (Baik).
		Penyampaian Laporan Rutin ke OJK	Laporan <i>Registrasi</i> Efek setiap bulannya. Laporan 10 Besar Daftar Pemegang Saham setiap triwulan. Serta Laporan Data Utang/Kewajiban dalam Valuta Asing setiap bulan.
		Penyampaian Laporan insidental ke OJK	Laporan insidental dalam rangka kepatuhan ketentuan terhadap Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan melalui surat dan <i>upload</i> SPE Otoritas Jasa Keuangan antara lain berupa Laporan Keterbukaan Informasi atas <i>corporate action</i> .
Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)		Telah melakukan RUPS Tahunan tgl 20 Maret 2018 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 37 tgl. 20 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH.
	Pengurusan <i>Fit and Proper Test</i> Direksi dan Dewan Komisaris		Telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan <i>Fit And Proper Test</i> terhadap 1 (satu) calon anggota Direksi dan 4 (empat) calon anggota Dewan Komisaris. Seluruh calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah mengikuti <i>Fit And Proper Test</i> tahun 2017 dinyatakan lulus uji <i>Fit And Proper Test</i> Otoritas Jasa Keuangan dan telah dituangkan dalam Akta Perubahan Susunan Pengurus yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH.
Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pendokumentasian data GCG antara lain berupa Akta RUPS dan Notulen Rapat Direksi untuk <i>database Corporate</i> .		Telah melakukan administrasi secara <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i> melalui <i>filling</i> dan <i>scanning</i> terhadap dokumen Perusahaan antara lain berupa Akta RUPS dan Notulen Rapat Direksi.
Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Program orientasi dilakukan untuk menambah kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris.		Telah dituangkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2018.



No.	Fungsi Menurut OJK	Program	Realisasi
	Lain-lain terkait implementasi GCG	Penunjang Komisaris	Melaksanakan inisiatif strategis untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Komisaris dalam menerapkan GCG serta meningkatkan kualitas layanan melalui dukungan implementasi penerapan TKT, kelengkapan administrasi Komisaris baru dalam memastikan terselenggaranya GCG dan RUPS, peningkatan kualitas layanan yuridis dan strategis sebagai bahan referensi Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan, peningkatan kualitas laporan yang berisi analisis atau <i>review</i> dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, dan penyusunan Laporan Hasil Rapat Komisaris dan Rapat Komite serta menindaklanjuti hasil rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Melakukan <i>supporting</i> terhadap implementasi program Dewan Komisaris berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2017.
		Mengupayakan terlaksananya Prinsip-Prinsip GCG secara efektif dan efisien, sehingga meningkatkan citra/ <i>image</i> BNI serta memberikan nilai tambah bagi Perusahaan (<i>value creation</i>).	Membuat Komitmen GCG yang ditandatangani oleh segenap Insan BNI setiap awal tahun Menyusun Pakta Integritas BNI yang ditandatangani oleh segenap Direksi Melakukan publikasi Anti Gratifikasi melalui eksternal dan internal media.
		Pengelolaan Saham	Telah melakukan pengelolaan administrasi saham yang berkoordinasi dengan Biro Administrasi Efek BNI (PT Datindo Entrycom). Untuk selanjutnya BNI menyampaikan Laporan Registrasi Efek Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan IDX melalui sistem pelaporan emiten Otoritas Jasa Keuangan dan IDX.
		Pembayaran Dividen	<i>Corporate Secretary</i> Perseroan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan pembayaran dividen tahun buku 2016 pada tanggal 20 April 2017. Dividen yang dibayarkan adalah sejumlah Rp2.859.459.907.905 sehingga setiap 1 (satu) saham berhak untuk menerima dividen sebesar Rp122,533827 per lembar saham.
		Sosialisasi GCG	Telah dilakukan sosialisasi GCG antara lain mengenai prinsip-prinsip GCG, contoh implementasi, sampai dengan ketentuan terbaru terkait GCG baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan pada acara <i>vendor gathering</i> .
		Penilaian GCG Eksternal	Telah dilakukan pemeringkatan oleh 3 lembaga pemeringkat independen, dengan hasil penilaian sebagai berikut: <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> dengan hasil penilaian <i>Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index</i> 2016 dan skor 88,38. <i>Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> dengan Predikat "Good" dan total skor 88,60 untuk penilaian <i>ASEAN Corporate Governance Scorecard</i> . Kementerian BUMN dengan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN dengan penilaian <i>Emerging Industry Leader</i> .
4.	Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, OJK, dan Pemangku Kepentingan Lainnya	Mengoptimalkan strategi yang berkaitan dengan permodalan dan <i>rating</i> BNI. Intensifikasi komunikasi efektif dengan publik/investor sehingga dapat meningkatkan <i>stakeholders satisfaction</i> . Intensifikasi komunikasi efektif dengan <i>analyst</i> melalui penyelenggaraan <i>analyst meeting</i>	Telah melaksanakan: intensifikasi komunikasi efektif dengan Lembaga <i>Rating</i> . aktivitas <i>review rating</i> BNI melalui lembaga <i>rating</i> S & P, Moody's, Fitch dan Pefindo. Telah melakukan intensifikasi komunikasi efektif dengan public/investor melalui aktivitas Investor Relations antara lain melalui aktivitas <i>Analyst Meeting</i> , <i>Public Expose</i> , <i>Non Deal Road Show</i> Dalam dan Luar Negeri, <i>Investor and Analyst Visit</i> , <i>TeleConference</i> , <i>Analyst Gathering</i> , <i>Economic Outlook</i> serta BNI <i>Monthly Report to External</i> . Telah melakukan <i>analyst meeting</i> Kinerja Keuangan sebagai berikut: 1. <i>Full Year</i> tahun 2016 pada tanggal 26 Januari 2017 2. Kuartal I tahun 2017 pada tanggal 12 April 2017 3. Kuartal II tahun 2017 pada tanggal 12 Juli 2017 4. Kuartal III tahun 2017 pada tanggal 12 Oktober 2017
		Penyelenggaraan <i>Public Expose</i>	Telah melaksanakan <i>Public Expose</i> Kinerja Keuangan posisi bulan September 2017 pada tanggal 7 Agustus 2017 melalui acara <i>Public Expose marathon</i> 2017 yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia.



No.	Fungsi Menurut OJK	Program	Realisasi
		Pelaksanaan Program Kemitraan GCG dengan Institusi/Lembaga terkait	Telah melakukan kerja sama dengan <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> , Indonesian Institute for Corporate Directorship, Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i> dan Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia.
		Menjadi penghubung antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan	Melakukan promosi Perusahaan dan penerbitan informasi lainnya. Mengelola komunikasi dengan Kementerian BUMN secara berkesinambungan. Mengelola komunikasi dan korespondensi dengan investor, analis pasar modal, <i>fund manager</i> , Perusahaan sekuritas, badan regulator dan Lembaga pemeringkat. <i>Updating sistem support</i> (Bloomberg, Orient) dan sebagainya. Mengadakan <i>shareholder meetings, press Conferences, Conference, investor meetings/forum, investor/analyst visit, private meetings with investors ("one-on-one" briefings)</i> . Mengelola <i>database</i> mengenai investor, kinerja Perusahaan maupun <i>peers</i> dan <i>analyst mailing list</i> . Penghubung antara Perusahaan dengan media, misalnya dalam penyusunan <i>Press Release</i> . <i>Spokesperson</i> Perseroan. Meminimalisir pemberitaan negatif reputasi BNI.

FUNGSI INVESTOR RELATIONS

Kegiatan *Investor Relations* merupakan bagian dari fungsi Sekretaris Perusahaan yang mempunyai fungsi utama mendukung Sekretaris Perusahaan dalam usahanya untuk membina hubungan dan meningkatkan program *Investor Relations* yang kondusif secara intensif, sistematis dan terencana, dengan:

1. Menjadi penghubung antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan mengelola komunikasi dan korespondensi dengan investor, analis pasar modal, *fund manager*, Perusahaan sekuritas, badan regulator dan lembaga pemeringkat.
2. Menjamin keterbukaan atau transparansi informasi Perusahaan baik finansial maupun non finansial, dengan tetap menjaga informasi tersebut disampaikan secara wajar dan pantas.
3. Menjaga kerahasiaan informasi mengenai Perusahaan atau nasabah sebagaimana mestinya dan tidak memanfaatkan informasi rahasia tersebut untuk kepentingan pribadi maupun keuntungan pihak tertentu lainnya.
4. Mengadakan *shareholder meetings, press Conferences, Conference, investor meetings/forum, investor/analyst visit, private meetings with investors ("one-on-one" briefings)*.
5. Melakukan publikasi kinerja Perusahaan.
6. Melakukan promosi Perusahaan dan penerbitan informasi lainnya.
7. Mengirimkan laporan bulanan pada pihak internal dan pihak eksternal mengenai perkembangan pasar dan kinerja saham Perusahaan.
8. Mempersiapkan laporan manajemen yang terangkum dalam laporan tahunan (*Annual Report*).
9. Menyediakan informasi mengenai kinerja Perusahaan melalui media *digital (website)* agar dapat memberikan akses yang lebih mudah dan luas.
10. Mengelola *database* mengenai investor, kinerja Perusahaan maupun *peers* dan *analyst mailing list*.

Berikut adalah aktivitas *Investor Relations* bersama dengan Sekretaris Perusahaan dalam rangka Pelaksanaan Fungsi *Investor Relations*.

Aktivitas Investor Relation	2018
<i>Conference Call</i>	26
<i>Meeting With Investor</i>	133
<i>Non Deal Roadshow/Conference Local</i>	6
<i>Non Deal Roadshow/Conference Foreign</i>	19
<i>Public Expose</i>	4



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

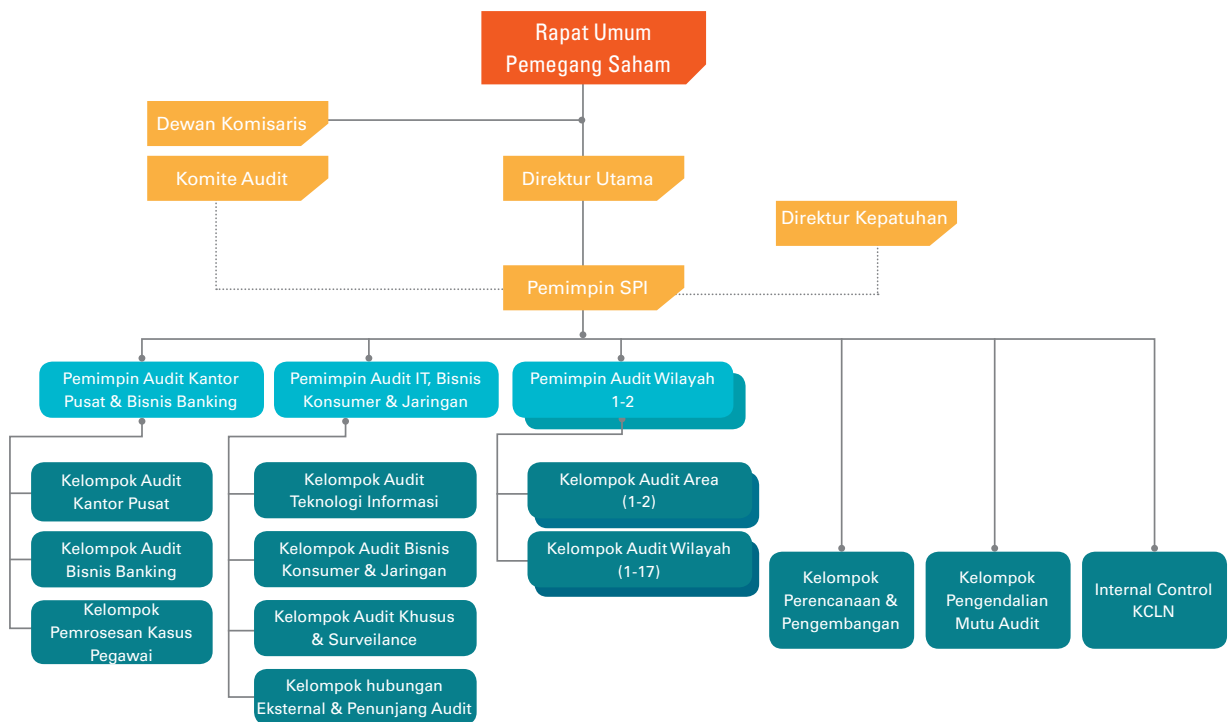
Penerapan Sistem Pengendalian Internal di BNI telah dilakukan dengan efektif dan efisien melalui pemisahan fungsi antara *Risk Taking Unit* (1st Line Of Defense) dan *Risk Control Unit* (2nd Line of Defense) serta *Risk Assurance Unit* (3rd Line of Defense).

Berperan sebagai 3rd Line of Defense (*Risk Assurance Unit*), Satuan Pengawasan Internal (SPI) memastikan bahwa pengendalian internal di setiap *line of defense* telah berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan SPI bertujuan untuk mendorong perbaikan terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja, kualitas dan efektivitas pengelolaan risiko, serta kecukupan dan efektivitas pengendalian intern, dengan ruang lingkup mencakup pelaksanaan *assurance* dan konsultasi. Fungsi konsultasi dilakukan secara formal maupun informal antara lain dengan melakukan *independent review* atas peluncuran produk baru (sesuai ketentuan OJK) dan penugasan khusus atas permintaan, manajemen maupun atas inisiatif dari SPI.

Untuk itu, SPI terus melakukan penyempurnaan dalam metodologi serta *tools* audit sehingga pelaksanaan audit sesuai dengan perkembangan bisnis.

Selain itu, sehubungan dengan implementasi POJK No.18/POJK.03/2014 dan SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, fungsi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dilaksanakan oleh SPI. Berkaitan dengan peran tersebut, SPI telah rutin menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Perusahaan Anak antara lain melalui forum komunikasi bersama, pelaksanaan *sharing knowledge* dan integrasi pelaksanaan dan pelaporan audit untuk mendukung penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan BNI.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL



KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Fungsi SPI dalam organisasi BNI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Kedudukan SPI dalam organisasi BNI telah dilakukan penataan pada tahun 2016. Penataan organisasi SPI tersebut dilakukan dengan melakukan *re-grouping* dalam rangka memperkuat fungsi audit khususnya di Wilayah (Audit Wilayah/Regional Audit), dengan pembagian sebagai berikut.

1. Audit Kantor Pusat, Audit Bisnis Banking, Pemrosesan Kasus Pegawai.
2. Audit Teknologi Informasi, Audit Bisnis Konsumer dan Jaringan, Audit Khusus dan *Surveillance*.
3. Audit Wilayah (Audit Wilayah 1 dan Audit Wilayah 2), terdiri dari: Kelompok Audit Area (2 Kelompok) dan Kelompok Audit Wilayah (17 Kelompok) yang dibagi mempertimbangkan area geografis.



PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Sejak tanggal 4 Januari 2017, Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh Muhammad Gunawan Putra, SE AK, MBA, CA (48 tahun), dengan jabatan *Executive Vice President* sesuai Surat Keputusan Direksi No. KP/482/DIR/R tahun 2016. Profil ringkas pemimpin SPI sebagai berikut:

MUHAMMAD GUNAWAN PUTRA

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi tahun 1995 dan memperoleh gelar MBA jurusan *Strategic Management* dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009.

Beliau mengawali karier sebagai auditor SPI BNI pada tahun 1997 dan telah memiliki pengalaman baik pada bidang internal audit, operasional Perbankan dan pengelolaan risiko. Posisi yang pernah dijabat adalah *Group Head SPI Kredit dan Jaringan* (Oktober 2007 – September 2010), Wakil Pemimpin SPI (Oktober 2010 – November 2012), *Head of Network & Services* Wilayah Medan (Desember 2012 – Mei 2014), *CEO Region* Kantor Wilayah Padang (Juni 2014 – Desember 2015), Pemimpin Divisi Risiko Bisnis Komersial dan Usaha Kecil (Januari 2016 – Desember 2016) dan Komisaris BNI Multifinance (Juni 2016 – Desember 2016).

Di samping itu, aktif dalam kepengurusan organisasi profesi di bidang Internal Audit, dengan jabatan Sekretaris Jendral Ikatan Auditor Intern Bank periode tahun 2017 – 2020.



PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Pemimpin SPI diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit yang selanjutnya dilaporkan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

SPI telah memiliki Piagam Audit Internal, yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, berdasarkan SK Direksi No. KP/106/DIR tanggal 11 Maret 2016. Piagam Audit Internal disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal serta standar *best practices* yang berlaku.

Piagam Audit Internal memuat tentang Visi dan Misi SPI, Struktur dan Kedudukan SPI, Tugas dan Tanggung Jawab SPI, Wewenang, Kode Etik, Independensi dan Obyektivitas, Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Audit, Persyaratan dan Pengembangan Auditor, Risiko Audit dan Perlindungan Hukum kepada Pemimpin dan Auditor, Program Pengendalian Mutu Audit, Fungsi SPI dalam Tata Kelola Terintegrasi dan Hubungan SPI dengan auditor eksternal.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Dalam menjalankan fungsinya, SPI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan.
2. Melaporkan realisasi Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap semester/triwulan atau sesuai periode yang disepakati.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan BNI.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
6. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
7. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola Perusahaan sepanjang tidak memengaruhi independensi dan objektivitas SPI, serta tersedia sumber daya yang memadai.
8. Melakukan audit pendalaman sesuai permintaan Direksi dan/atau Komisaris, atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu objek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi penyimpangan dan/atau *Fraud* apabila diperlukan.
9. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyampaikan Laporan *Pending Tindak Lanjut* Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara periodik.
10. Melakukan pemrosesan kasus serta melakukan penyempurnaan, pengembangan dan fungsi pemrosesan kasus di BNI.
11. Melaporkan segera atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
12. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan tugas.



13. Mengajukan anggaran tahunan dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama setiap semester.
14. Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

WEWENANG SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Agar tugas dan tanggung jawab SPI dapat dijalankan secara optimal, SPI diberikan wewenang untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area, dan sumber daya lain BNI termasuk terhadap Perusahaan anak/afiliasi/lembaga jasa keuangan yang dimiliki BNI, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
2. Melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan teknik pemeriksaan lainnya kepada nasabah atau pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
5. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan tujuan, ruang lingkup, dan rencana atau jadwal audit, serta menetapkan metodologi, teknik, perangkat, dan pendekatan audit dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan.
6. Meminta bantuan dari unit kerja lain atau menggunakan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.
7. Melakukan koordinasi dan membangun hubungan sinergis dengan unit/fungsi penyelenggaraan *assurance* lainnya (*compliance unit* dan manajemen risiko) guna memperoleh hasil audit yang komprehensif dan optimal.

KODE ETIK AUDITOR

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, auditor SPI harus menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik yang tercantum dalam Piagam Audit Internal, sebagai berikut:

1. Integritas
 - a. Melakukan tugasnya dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab;
 - b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan profesinya;
 - c. Tidak dengan sengaja/sadar terlibat dalam aktivitas yang dilarang/tidak sah, tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas SPI dan profesi audit internal;
 - d. Mendukung tujuan BNI dan SPI.
2. Objektivitas
 - a. Tidak terlibat dalam kegiatan atau memiliki hubungan yang akan menimbulkan benturan kepentingan;
 - b. Tidak menerima apapun yang berdampak atau diduga akan berdampak terhadap *professional judgement*;

- c. Senantiasa menggunakan *professional judgement* dalam pelaksanaan tugas pada kondisi dan situasi apapun;
 - d. Mengungkapkan semua fakta yang diketahui.
 3. Kerahasiaan
 - a. Bersikap hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan siapapun dan/atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan Perusahaan.
 4. Kompetensi
 - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki;
 - b. Melaksanakan audit sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan/atau standar audit lain yang berlaku; dan
 - c. Meningkatkan kompetensi secara terus-menerus.

STANDAR PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN MUTU

Pelaksanaan audit berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan Pedoman Perusahaan Audit Intern. Dalam rangka meningkatkan mutu audit, SPI senantiasa mengembangkan metodologi audit dan menyempurnakan audit programnya agar sesuai dengan perkembangan proses bisnis yang ada serta *best practice* antara lain *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan *Information System Audit and Control Association* (ISACA).

Sesuai SPFAIB, efektivitas pelaksanaan fungsi Satuan Pengawasan Internal dan kesesuaiannya dengan standar pelaksanaan yang berlaku, secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun dievaluasi.

Di tahun 2018, telah dilakukan evaluasi/*review* oleh KPMG Siddharta Advisory terhadap fungsi SPI untuk periode 3 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang disimpulkan bahwa secara umum (*Generally Conform*) fungsi SPI telah memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, dan pelaksanaan audit penggunaan teknologi informasi telah mengacu pada POJK Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi (MRTI).

HUBUNGAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DENGAN PIHAK EKSTERNAL

SPI dapat melakukan pertukaran informasi dan Mengoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal yang dapat dilakukan melalui pertemuan secara periodik guna memperoleh hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak. Wujud dari tanggung jawab SPI terhadap pihak eksternal antara lain sebagai berikut:



1. *Transfer Knowledge*

SPI aktif melakukan *transfer knowledge* tentang metodologi/perkembangan di bidang internal audit baik kepada Internal Audit Perusahaan Anak maupun kepada organisasi lainnya, antara lain aktif dalam CAE Forum “*The Millenials in Internal Audit: Understanding and Managing the Next Generation of Auditors*” dan keikutsertaan dalam pembahasan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Internal Audit.

2. Aktif dalam organisasi profesi, yaitu Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB), IIA Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dan Forum Komunikasi SPI.

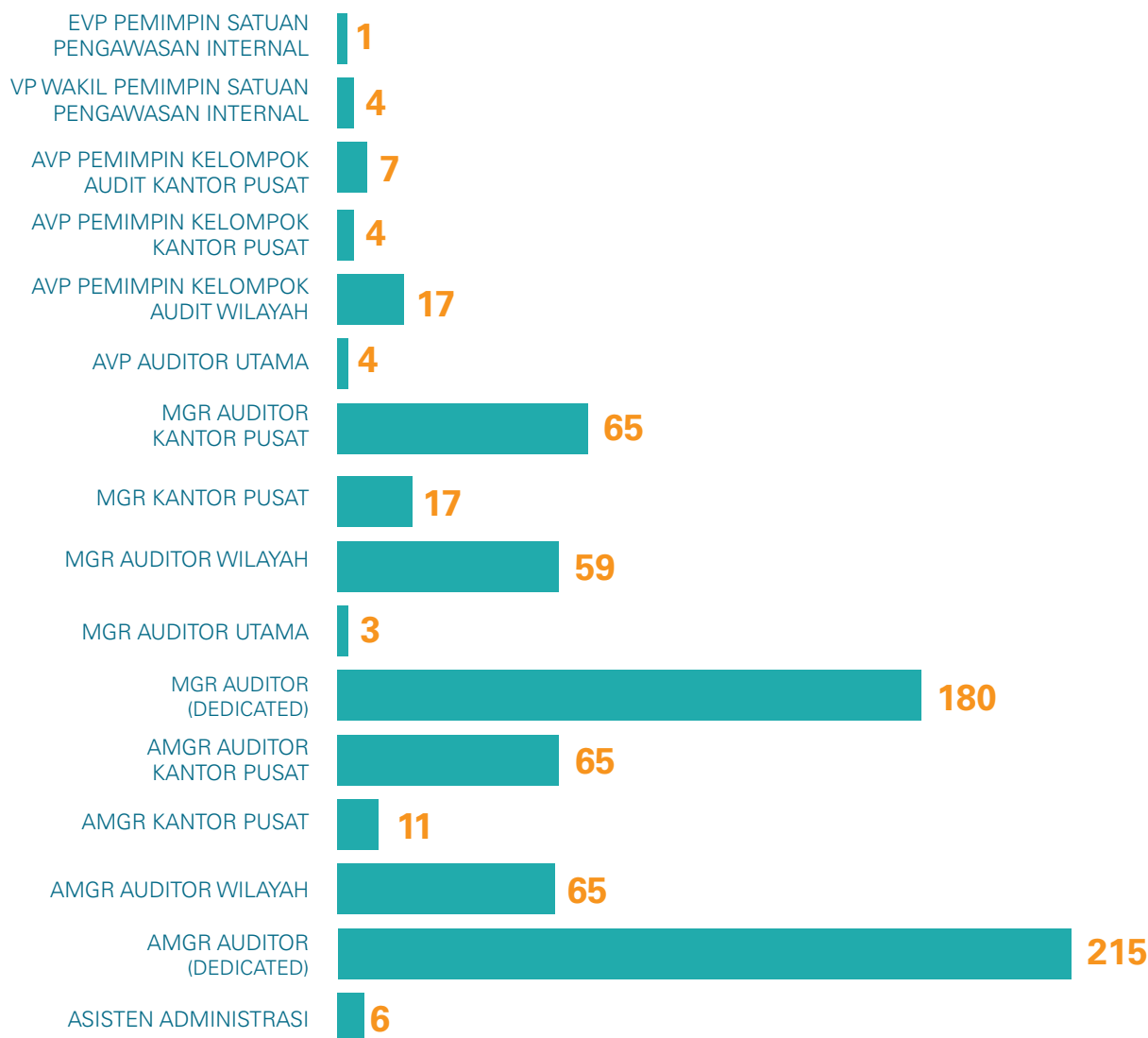
3. Pelaksanaan *Benchmarking*

SPI BNI secara aktif melakukan *benchmarking* dengan internal audit Bank lain dan aktif dalam *benchmarking* forum, yaitu:

- Pelaksanaan *benchmarking* tentang peran dan fungsi internal audit, organisasi, perkembangan *good practice* internal audit dan pengelolaan SDM.
- Keikutsertaan dalam *benchmarking* forum metodologi audit oleh IAIB (*Audit Rating & Reporting* dan Implementasi *Quality Assurance Improvement Program*)

KOMPOSISI PERSONIL INTERNAL AUDIT

Satuan Pengawasan Internal didukung oleh 723 pegawai yang tersebar di kantor pusat dan seluruh wilayah operasional BNI, sebagaimana tergambar pada diagram berikut:



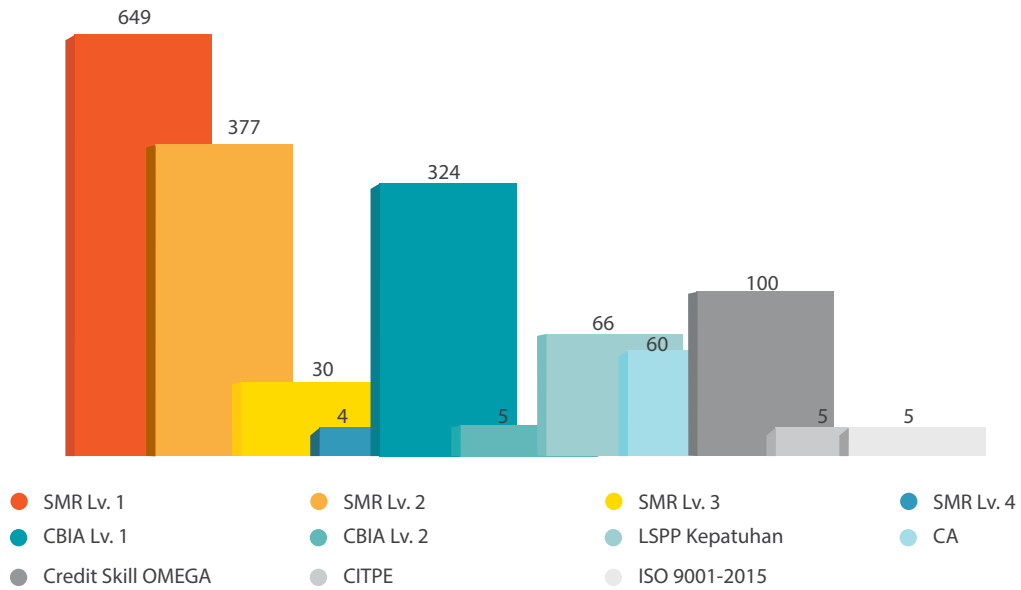


SERTIFIKASI PROFESI INTERNAL AUDIT

SPI berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan auditor, melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sehingga mampu memenuhi kualifikasi yang memadai.

Data sertifikasi yang telah diperoleh pegawai SPI sampai dengan posisi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi Nasional



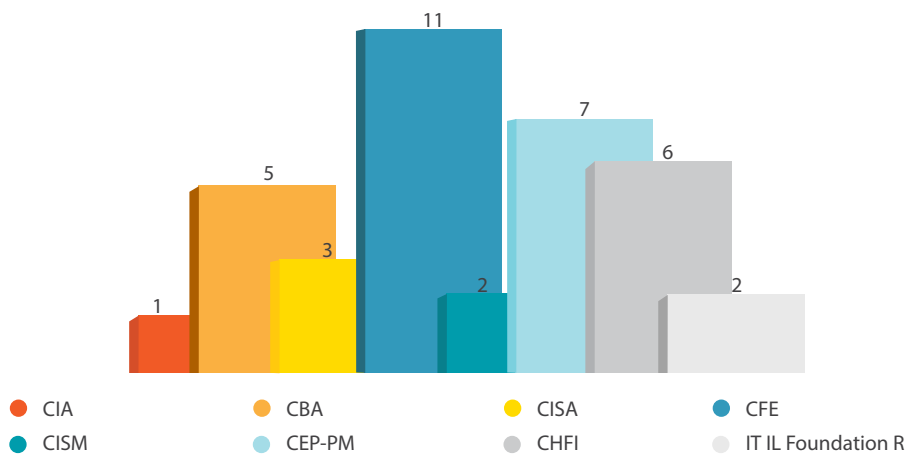
Keterangan:

SMR : Sertifikasi Manajemen Risiko
CBIA : Certified Bank Internal Audit

LSPP : Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
CA : Chartered Accountant

CITPE : Certified IT Procurement Expert

Sertifikasi Internasional



Keterangan:

CIA : Certified Internal Auditor
CBA : Certified Behavioral Analyst
CISA : Certified Information System Auditor
CFE : Certified Fraud Examiner

CISM : Certified Information Security Manager
CEP-PM : Certified E-Business Professional in Project Management

CHFI : Computer Hacking Forensic Investigation
IT IL : Information Technology Infrastructure Library



PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Internal telah disajikan pada bagian sub bab Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Internal Bab Profil Perusahaan.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2018

Visi BNI menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja, dengan arah kebijakan BNI sesuai *Corporate Plan* adalah fokus menjadi Bank dengan kinerja unggul dengan memperkuat sinergi antar unit untuk percepatan bisnis yang didukung dengan tingkat layanan yang semakin baik.

SPI berupaya melaksanakan fungsi pengawasan internal dan berintegrasi dengan SPI Perusahaan Anak, dengan tetap menjadi mitra bisnis profesional, independen dan objektif bagi manajemen untuk mendukung terwujudnya visi BNI. SPI mengawal percepatan bisnis BNI melalui *alignment* antara strategi SPI dan strategi bisnis BNI, untuk memberikan nilai tambah dalam peningkatan efektivitas *risk management, control* dan *governance process*.

SPI telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Audit dan Konsultasi tahun 2018 yang sejalan dengan fokus utama BNI. Melalui Rencana Kerja Audit dan Konsultasi tahun 2018, SPI ingin memastikan kualitas pertumbuhan bisnis BNI yang diimbangi dengan penetapan tata kelola Perusahaan yang kuat di seluruh area operasional.

PROGRAM KERJA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Berdasarkan hasil kajian terhadap arah Perusahaan pada tahun 2018, *risk assessment*, prioritas pelaksanaan audit, serta ketersediaan SDM SPI, maka ditetapkan rencana audit dan konsultasi tahun 2018 sebanyak 336 penugasan audit baik audit yang bersifat tematik, audit IT dan audit rutin, yang meliputi:

1. Audit Tematik pada aktivitas kredit usaha kecil, aktivitas kredit segmen menengah, aktivitas kredit segmen konsumen, aktivitas *network & services*, optimalisasi transaksi nasabah melalui *closed loop transaction*, dan efektivitas pengelolaan SDM,
2. Audit *Mandatory*,
3. Audit Unit terdiri dari audit divisi, cabang dalam negeri dan luar negeri, kantor wilayah, Sentra Kredit Kecil, Sentra Kredit Menengah dan *Loan Consumer Centre*,
4. Aktivitas IT dan Audit Aplikasi, dan
5. Konsultasi baik yang dilakukan secara informal maupun formal antara lain melalui *independent review* peluncuran produk/aktivitas baru.

Hasil audit tematik bersifat lebih menyeluruh dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang strategik (menyentuh *root cause*) kepada manajemen untuk perbaikan proses bisnis BNI.

Selain itu, dengan keberadaan *dedicated auditor* pada setiap *delivery channel* yang berorientasi pada *Internal Control Review* diharapkan dapat menjadi sarana *early warning* atas adanya *irregularities*.

METODOLOGI AUDIT

SPI telah menyusun Rencana Audit dan Konsultasi tahun 2018, dengan pendekatan *risk based* melalui tahapan *macro risk assessment* dan *micro risk assessment*.

Macro Assessment dilakukan terhadap indikator kinerja dan risiko BNI secara keseluruhan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tema/topik tertentu yang akan menjadi fokus audit dengan orientasi pada *business process improvement*. Pemilihan tema audit dimulai dengan mengidentifikasi dan menilai aktivitas-aktivitas yang terkait dengan Kebijakan Umum Direksi (KUD) BNI 2018, *Risk Profile* BNI sesuai *Risk Management Committee* (RMC), masukan atau *concern* Direksi dan *Senior Management*, kondisi/issue yang terjadi sesuai perkembangan bisnis BNI, dan kajian internal BNI.

Selain itu, juga dilakukan *assessment* terhadap unit tertentu yang akan menjadi fokus audit dengan orientasi pada *compliance and control assurance*. Penilaian objek audit dimulai dengan mengidentifikasi dan menilai tingkat risiko *unit auditee* melalui pengkajian level risiko unit sesuai *risk factor* dan elemen pengendalian.

PENGEMBANGAN METODOLOGI AUDIT TAHUN 2018

Selama tahun 2018, beberapa inisiatif penyempurnaan dan pengembangan perangkat audit yang telah dilaksanakan SPI sebagai berikut:

1. Implementasi *audit management system* untuk menunjang aktivitas *dedicated auditor* melalui aplikasi AUDIGI yang mengakomodasi seluruh siklus audit sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil *review dedicated auditor*.
2. Pengembangan aplikasi *audit management system*, untuk menunjang aktivitas tim audit.
3. Perbaikan format pelaporan hasil audit, pengkinian kodefikasi temuan audit dalam aplikasi IAMS untuk mendorong rekomendasi perbaikan atas efektivitas kinerja, kualitas *risk management* dan kecukupan *internal control* oleh *auditee* maupun *supervisory control* atasan *auditee*.
4. Pengkinian mekanisme pelaksanaan *review dedicated auditor*.
5. Evaluasi dan *review* audit program *how to (user manual audit)*.
6. *Enhancement audit analytics* untuk meningkatkan fungsi



- surveillance* dalam mendukung pelaksanaan audit.
7. Identifikasi struktur database report transaksi yang bersumber dari *core Banking system* dan *Surrounding* lainnya.
 8. Pengembangan *media sharing knowledge* (*audit program*, panduan/juklak, *selected report & exception report*) melalui *database SPI*.
 9. Melakukan konsultasi dengan KPMG terhadap pelaksanaan aktivitas *data analytical* dalam peningkatan fungsi *surveillance*.
 10. Penyusunan *Risk and Fraud Awareness* melalui sosialisasi *lesson learned* ke unit bisnis dan pembuatan materi

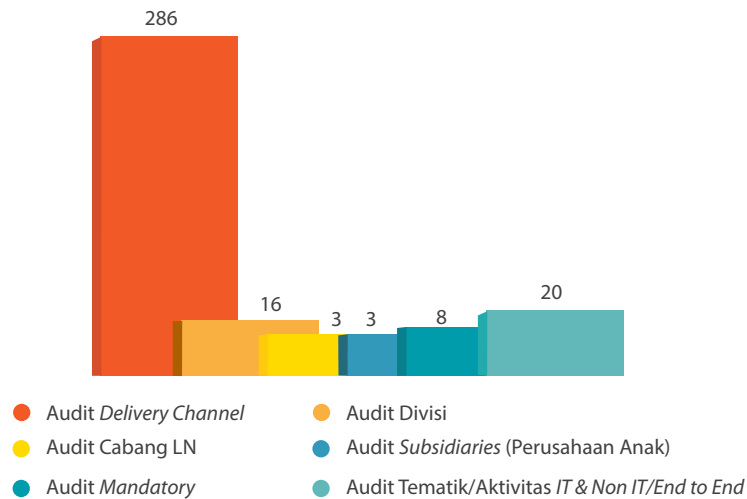
awareness terkait industri semen, industri baja, debitur konsumen sebagai upaya terciptanya budaya pengendalian.

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUN 2018

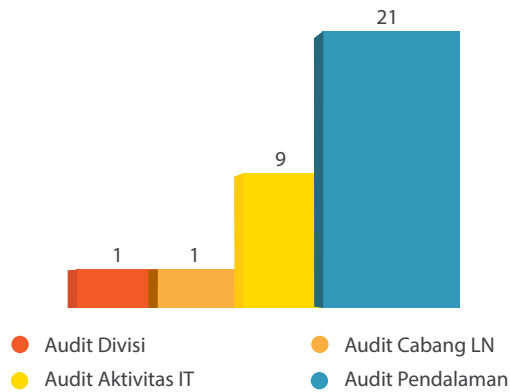
Total coverage audit mencapai 94,15% di tahun 2018 dengan *coverage delivery channel* 100%, meningkat dibandingkan *total coverage audit* di tahun 2017 sebesar 75,07%.

Realisasi audit dan konsultasi tahun 2018 sebanyak 368 penugasan audit atau 109,52% dari target rencana audit tahunan (336 penugasan audit), sebagai berikut:

RENCANA AUDIT TAHUN 2018



TAMBAHAN AUDIT TAHUN 2018



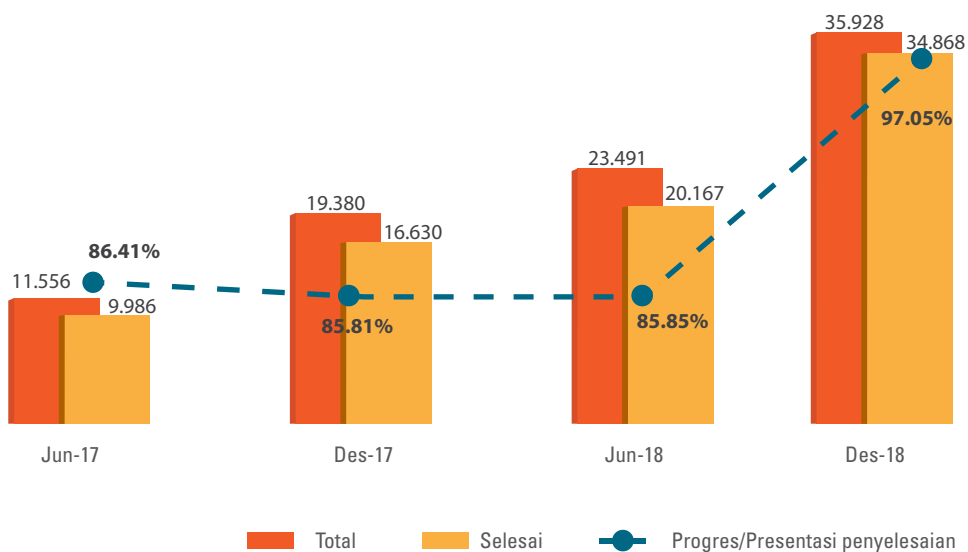
TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Sebagai bagian dari keseluruhan proses/tahapan audit, setelah pelaporan audit, kegiatan audit yang harus dilakukan adalah pemantauan terhadap *auditee* atau *auditable activities*. Kegiatan pemantauan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui dan meyakini pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit baik oleh *auditee* maupun pihak terkait lainnya. Tindak lanjut hasil audit tersebut termasuk penyelesaian Rekomendasi SPI dan Disposisi Direksi.

SPI melakukan analisis terhadap data yang disampaikan auditee untuk menentukan status penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Status tindak lanjut hasil audit dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu temuan yang belum ditindaklanjuti, temuan yang sedang ditindaklanjuti dan temuan yang telah ditindaklanjuti.

Setiap Triwulan, SPI menyampaikan perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil audit dalam bentuk Laporan *Pending Tindak Lanjut Hasil Audit* kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Berikut data tindak lanjut penyelesaian *pending* audit, rekomendasi SPI dan disposisi direksi atas hasil audit SPI tahun 2018.



Di samping melakukan pemantauan terhadap hasil audit SPI, sehubungan dengan fungsi SPI sebagai *liaison* bagi pihak



eksternal (OJK, BI, BPK dan KAP), SPI juga melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit pihak eksternal. Selama tahun 2018, tindak lanjut hasil audit eksternal, tercermin pada grafik berikut:

Audit	Tahun 2018		Tahun 2017	
	Selesai	Dalam Progress	Selesai	Dalam Progress
Bank Indonesia	47	0	38	9
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	1295	87	1771	57
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI)	504	48	504	64
Kantor Akuntan Publik (KAP)	20	4	-	-

PROGRAM DAN STRATEGI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2019

Dalam rangka mendukung pencapaian strategi BNI tahun 2019, SPI telah menyusun strategi inisiatif dalam *Business Plan* SPI Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit untuk mengawal timbulnya risiko dengan *coverage audit* delivery channel 100%.
2. *Business Process Improvement* melalui audit aktivitas dengan pendekatan *end to end* audit sesuai dengan isu kritical dan risiko terkini dan audit aktivitas IT sesuai dengan *Major Risk* IT dan *IT Transformation*.
3. Melaksanakan audit *mandatory* sesuai dengan ketentuan regulator.
4. Melaksanakan *value-added services* melalui Konsultasi/*Independent Review* sesuai dengan kebutuhan *user*.
5. Melaksanakan *internal control review* untuk mengawal timbulnya *critical risk* terhadap aktivitas operasional *outlet*.
6. Mengoptimalkan efektivitas Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi di Perusahaan Anak.
7. Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Audit.
8. Mengoptimalkan fungsi *surveillance* melalui deteksi transaksi *unusual* dan/atau potensi pergeseran kredit sebagai *Early Warning System*.
9. Meningkatkan *learning and growth* melalui penyempurnaan metodologi dan perangkat audit, penyempurnaan aplikasi dan infrastruktur penunjang TI SPI dan meningkatkan kompetensi kapabilitas pegawai.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi membentuk Komite-komite di tingkat Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis BNI dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional, di antaranya:

1. Komite Kredit.
2. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Komite Manajemen Risiko dan Kapital.
4. Komite Produk.
5. Komite Manajemen Kinerja.
6. Komite Manajemen Teknologi.
7. Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan.
8. Komite Sumber Daya Manusia.

KOMITE KREDIT

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT

Komite Kredit terdiri dari 4 (empat) tingkatan yang masing-masing memiliki komposisi keanggotaan dan limit kewenangan tersendiri, yaitu:

1. Komite Kredit tingkat Direksi.
2. Komite Kredit tingkat Direktur:
 - a. Direktur Sektor + Direktur*) + Direktur Utama .
 - b. Direktur Sektor + Direktur*).
 - c. Direktur Sektor.
3. Komite Kredit tingkat Kantor Pusat:
 - a. Kantor Pusat 2 (KP-2).
 - b. Kantor Pusat 1 (KP-1).
4. Komite Kredit tingkat Wilayah:
 - a. Komite Kredit Kantor Wilayah 2.
 - b. Komite Kredit Kantor Wilayah 1.
 - c. Komite Kredit Menengah.
 - d. Komite Kredit Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) Remote.
 - e. Komite Kredit Kecil 2.
 - f. Komite Kredit Kecil 1.
 - g. Komite Kredit Cabang 2.
 - h. Komite Kredit Cabang 1.



Komite Kredit Tingkat Direksi

Kewenangan Memutus Kredit	Maksimum Kredit	Anggota Komite	Anggota Komite Yang Harus Ada
Segmen Korporasi	s.d. BMPK	Anggota Direksi	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Korporasi, Direktur Manajemen Risiko
Segmen Menengah	s.d. BMPK	Anggota Direksi	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, SEVP Bisnis Menengah, Direktur Manajemen Risiko
Segmen Kecil	s.d. BMPK	Anggota Direksi	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Bisnis Kecil & Jaringan, Direktur Manajemen Risiko
Kantor Cabang Luar Negeri	s.d. BMPK	Anggota Direksi	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Treasury & International Banking, Direktur Manajemen Risiko
Bank Financial Institution	s.d. BMPK	Anggota Direksi	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Treasury & International Banking, Direktur Manajemen Risiko

Komite Kredit Tingkat Direktur

Kewenangan Memutus Kredit	Maksimum Kredit	Pejabat Pemutus Kredit	
		Bisnis	Risiko
Segmen Korporasi	s.d. <i>House Limit</i>	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Bisnis Korporasi	Direktur Manajemen Risiko
	s.d. Rp750 miliar	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Bisnis Korporasi	Direktur Manajemen Risiko
	s.d. Rp500 miliar	Direktur Bisnis Korporasi	Direktur Manajemen Risiko
Segmen Menengah	s.d. <i>House Limit</i>	Direktur Utama Wakil Direktur Utama SEVP Bisnis Menengah	Direktur Manajemen Risiko
	s.d. Rp750 miliar	Wakil Direktur Utama SEVP Bisnis Menengah	Direktur Manajemen Risiko
	s.d. Rp500 miliar	SEVP Bisnis Menengah	Direktur Manajemen Risiko
Segmen Kecil	s.d. <i>House Limit</i>	Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Bisnis Kecil & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko
	s.d. Rp750 miliar	Wakil Direktur Utama Direktur Bisnis Kecil & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko
	s.d. Rp500 miliar	Direktur Bisnis Kecil & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko
Segmen Konsumer Unorganik	s.d. <i>House Limit</i>	Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Bisnis Korporasi	Direktur Manajemen Risiko
	s.d. Rp750 miliar	Wakil Direktur Utama Direktur Bisnis Korporasi	Direktur Manajemen Risiko
	s.d. Rp500 miliar	Direktur Bisnis Korporasi	Direktur Manajemen Risiko
Segmen Konsumer Organik	s.d. <i>House Limit</i>	Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Retail Banking	Direktur Manajemen Risiko
	s.d. Rp150 miliar	Wakil Direktur Utama Direktur Retail Banking	Direktur Manajemen Risiko
	30 miliar s.d. Rp75 miliar	Direktur Retail Banking	Direktur Manajemen Risiko
Kantor Cabang Luar Negeri	s.d. <i>House Limit</i>	Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Treasury & International Banking	Direktur Manajemen Risiko
	s.d. USD 50 juta	Wakil Direktur Utama Direktur Treasury & International Banking	Direktur Manajemen Risiko
	s.d. USD 30 juta	Direktur Treasury & International Banking	Direktur Manajemen Risiko
Bank Financial Institution	s.d. <i>House Limit</i>	Wakil Direktur Utama Direktur Treasury & International Banking	Direktur Manajemen Risiko
	s.d. USD 200 juta	Direktur Treasury & International Banking	Direktur Manajemen Risiko



URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT

Uraian Tugas Komite Kredit sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan kredit sesuai dengan limit kewenangan atau jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan Divisi Tresuri dalam aspek pendanaan perkreditan.
3. Bertanggung jawab atas keputusan kredit yang didasarkan pada hal-hal yang meliputi kelayakan usaha yang dibiayai, pertimbangan keamanan kredit, kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta ketentuan limit kredit.
4. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang memberikan kredit yang hanya bersifat formalitas.
5. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit sesuai kewenangannya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KREDIT TAHUN 2018

Kewenangan Memutus Kredit Segmen Korporasi

Komite Kredit	Maksimum Kredit	Jumlah Rapat
Komite Kredit Tingkat Direksi	s.d. BMPK	5
Komite Kredit Tingkat Direktur		
• Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Bisnis Korporasi, Direktur Manajemen Risiko	s.d. <i>House Limit</i>	63
• Wakil Direktur Utama, Direktur Bisnis Korporasi, Direktur Manajemen Risiko	s.d. 750 miliar	33
• Direktur Bisnis Korporasi dan Direktur Manajemen Risiko	s.d. 500 miliar	31
Total		132

Kewenangan Memutus Kredit Segmen Menengah

Komite Kredit	Maksimum Kredit	Jumlah Rapat
Komite Kredit Tingkat Direksi	s.d. BMPK	-
Komite Kredit Tingkat Direktur		
• Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, SEVP Bisnis Menengah, Direktur Manajemen Risiko	s.d. <i>House Limit</i>	-
• Wakil Direktur Utama, SEVP Bisnis Menengah, Direktur Manajemen Risiko	s.d. 750 miliar	3
• SEVP Bisnis Menengah dan Direktur Manajemen Risiko	s.d. 500 miliar	2
Total		5

Kewenangan Memutus Kredit Segmen Konsumer Organik

Komite Kredit	Maksimum Kredit	Jumlah Rapat
Komite Kredit Tingkat Direktur		
Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur <i>Retail Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d. <i>House Limit</i>	1
Wakil Direktur Utama, Direktur <i>Retail Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d. 150 miliar	1
Direktur <i>Retail Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	30 miliar s.d Rp75 miliar	12
Total		14

Kewenangan Memutus Kredit Segmen Kantor Cabang Luar Negeri

Kantor Cabang Hongkong

Komite Kredit	Maksimum Kredit	Jumlah Rapat
Komite Kredit Tingkat Direksi		-
Komite Kredit Tingkat Direktur		
• Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur <i>Treasury & International Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d House Limit	1
• Wakil Direktur Utama, Direktur <i>Treasury & International Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d USD 75 Juta	-
• Direktur <i>Treasury & International Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d USD 50 juta	-
Total		1

Kantor Cabang Singapura

Komite Kredit	Maksimum Kredit	Jumlah Rapat
Komite Kredit Tingkat Direksi		-
Komite Kredit Tingkat Direktur		
• Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur <i>Treasury & International Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d House Limit	-
• Wakil Direktur Utama, Direktur <i>Treasury & International Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d USD 75 Juta	1
• Direktur <i>Treasury & International Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d USD 50 juta	2
Total		3

Kantor Cabang New York

Komite Kredit	Maksimum Kredit	Jumlah Rapat
Komite Kredit Tingkat Direksi		-
Komite Kredit Tingkat Direktur		
• Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur <i>Treasury & International Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d House Limit	1
• Wakil Direktur Utama, Direktur <i>Treasury & International Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d USD 75 Juta	-
• Direktur <i>Treasury & International Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d USD 50 juta	-
Total		1

Kantor Cabang Tokyo

Komite Kredit	Maksimum Kredit	Jumlah Rapat
Komite Kredit Tingkat Direksi		-
Komite Kredit Tingkat Direktur		
• Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur <i>Treasury & International Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d House Limit	-
• Wakil Direktur Utama, Direktur <i>Treasury & International Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d USD 75 Juta	-
• Direktur <i>Treasury & International Banking</i> Direktur Manajemen Risiko	s.d USD 50 juta	1
Total		1

Kewenangan Memutus Kredit Segmen Bank Financial Institution

Komite Kredit	Maksimum Kredit	Jumlah Rapat
Komite Kredit Tingkat Direksi	s.d BMPK	
Wakil Direktur Utama, Direktur <i>Treasury & International Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d House Limit	11
Direktur <i>Treasury & International Banking</i> , Direktur Manajemen Risiko	s.d USD 200 juta	12
Total		23



KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

BNI sebagai bagian dari sektor jasa keuangan yang memiliki beberapa anak BNI yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan juga menerapkan Manajemen Risiko secara terintegrasi.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/193/DIR/R tanggal 26 Mei 2015 yang telah dikinikani sesuai dengan perubahan organisasi Direksi cfm. SK Direksi No. KP/384/DIR/R tanggal 9 November 2018.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

No.	Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)	
a.	Ketua	: Direktur Manajemen Risiko - BNI sebagai Direktur yang menyelia fungsi Manajemen Risiko Bank
b.	Sekretaris	: Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank – BNI
c.	Anggota Tetap	: <ul style="list-style-type: none"> Direktur Keuangan – BNI Direktur Kepatuhan – BNI Pemimpin Divisi Kepatuhan – BNI Pemimpin Satuan Pengawasan Internal – BNI Pemimpin Divisi Pengembangan Perusahaan Anak – BNI Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis – BNI Pemimpin Divisi Hukum – BNI Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan – BNI Direktur yang menyelia Manajemen Risiko – BNI Syariah Direktur yang menyelia Manajemen Risiko – BNI Sekuritas Direktur yang menyelia Manajemen Risiko – BNI Life Direktur yang menyelia Manajemen Risiko – BNI Multifinance Direktur yang menyelia Manajemen Risiko – BNI Asset Management Pemimpin Divisi yang menyelia Manajemen Risiko – BNI Syariah Pemimpin Divisi yang menyelia Manajemen Risiko – BNI Sekuritas Pemimpin Divisi yang menyelia Manajemen Risiko – BNI Life Pemimpin Divisi yang menyelia Manajemen Risiko – BNI Multifinance Pemimpin Divisi yang menyelia Manajemen Risiko – BNI Asset Management
d.	Anggota Tidak Tetap	: Direktur dan Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi rapat baik dari BNI maupun Perusahaan Anak.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka:

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
3. Penetapan metodologi dan penilaian profil risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BNI.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan 2 (dua) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1.	7 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Hasil <i>Self Assessment</i> Profil Risiko Terintegrasi posisi 31 Desember 2017. Persetujuan Hasil Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi posisi 31 Desember 2017. Persetujuan <i>Risk Appetite Statement</i> (RAS) Terintegrasi 2018.
2.	8 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Hasil <i>Self Assessment</i> Profil Risiko Terintegrasi posisi 30 Juni 2018. Persetujuan Hasil Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi posisi 30 Juni 2018.

KOMITE RISIKO DAN KAPITAL

Komite Risiko dan Kapital (KRK) merupakan komite permanen di BNI yang mempunyai kewenangan dan fungsi:

1. Penetapan kebijakan dan pengelolaan risiko di seluruh unit organisasi BNI, mencakup pengelolaan kecukupan modal untuk meng-cover risiko dan mendukung strategi bisnis Bank.
2. Penetapan kebijakan dan pengelolaan *asset* dan liabilitas.
3. Penetapan kebijakan dan pengelolaan strategi *anti fraud* di seluruh unit organisasi.



Komite Risiko dan Kapital (KRK) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi, terakhir diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/483/DIR/R tanggal 21 Desember 2016 yang telah dikinikani sesuai dengan perubahan organisasi Direksi cfm. SK Direksi No. KP/384/DIR/R tanggal 9 November 2018, diketuai oleh Direktur Utama dan sebagai Wakil Ketua adalah Wakil Direktur Utama.

Komite Risiko dan Kapital memiliki 3 (tiga) sub Komite, yaitu:

1. Sub Komite Manajemen Risiko (RMC).
2. Sub Komite *Asset* dan *Liability* (ALCO).
3. Sub Komite *Anti Fraud*.

KOMITE RISIKO DAN KAPITAL SUB KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KRK-RMC)

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE RISIKO DAN KAPITAL SUB KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KRK-RMC)

No.	Susunan Keanggotaan Komite Risiko dan Kapital (KRK)	
I.	Ketua	: Direktur Utama
II.	Wakil Ketua	: Wakil Direktur Utama
SUSUNAN ANGGOTA KRK – SUB KOMITE MANAJEMEN RISIKO (RMC)		
I.	Ketua	: Direktur Manajemen Risiko
II.	Sekretaris	: Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank (merangkap anggota tetap)
III.	Anggota Tetap	: <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan • Direktur <i>Corporate Banking</i> • Direktur <i>Retail Banking</i> • Direktur <i>Treasury & International Banking</i> • Direktur Teknologi Informasi & Operasi • Direktur Bisnis Kecil & Jaringan • Direktur Keuangan • SEVP Bisnis Menengah • SEVP Penyelamatan & Penyelesaian Kredit • Pemimpin Divisi Tresuri • Pemimpin Divisi Risiko Kredit Korporasi • Pemimpin Divisi Risiko Kredit Menengah & Usaha Kecil • Pemimpin Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer • Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis • Pemimpin Divisi Kepatuhan • Pemimpin Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan • Pemimpin Satuan Pengawasan Internal • Pemimpin Divisi Hukum • Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan • Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan • Pemimpin Unit Analisa Nasabah & Manajemen Portofolio • Pemimpin Divisi Administrasi Kredit
	Anggota Tidak Tetap	: Direktur/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi Rapat

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE RISIKO DAN KAPITAL SUB KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KRK-RMC)

Tugas dan tanggung jawab KRK-RMC adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait Manajemen Risiko, yang paling kurang meliputi:

1. Menyusun Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko serta perubahannya.
2. Menyusun kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
3. Menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang memengaruhi kecukupan Permodalan, Profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
4. Menetapkan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui *limit* yang telah ditetapkan.
5. Menetapkan kebijakan pengelolaan kecukupan modal untuk melindungi risiko dan mendukung strategi bisnis Bank, mencakup pengukuran, struktur (tier 1/tier 2), alokasi dan rencana kontijensi permodalan.



PELAKSANAAN TUGAS KOMITE RISIKO DAN KAPITAL SUB KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KRK-RMC) TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, KRK-RMC telah mengadakan 4 (empat) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
1	18 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Hasil penilaian Tingkat Kesehatan BNI Individu posisi 31 Desember 2017. Profil Risiko BNI secara Individu posisi 31 Desember 2017.
2	18 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko BNI secara Individu posisi 31 Maret 2018.
3	19 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> Hasil penilaian Tingkat Kesehatan BNI Individu posisi 30 Juni 2018. Profil Risiko BNI secara Individu posisi 30 Juni 2018.
4	17 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko BNI secara Individu posisi 30 September 2018. Review Risk Appetite Statement BNI 2019.

KOMITE RISIKO DAN KAPITAL SUB KOMITE ASSET DAN LIABILITY (ALCO)

Struktur dan Keanggotaan Komite Risiko dan Kapital Sub Komite Asset dan Liability (ALCO)

Ketua	Direktur Tresuri & Internasional
Sekretaris	Pemimpin Divisi Tresuri (merangkap anggota tetap)
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan Direktur Corporate Banking Direktur Retail Banking Direktur Teknologi dan Informasi Operasi Direktur Manajemen Risiko Direktur Hubungan Kelembagaan Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan SEVP Bisnis Menengah SEVP Penyelesaian dan Penyelesaian Kredit Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank Pemimpin Divisi Risiko Kredit Korporasi Pemimpin Divisi Risiko Kredit Menengah dan Usaha Kecil Pemimpin Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan Pemimpin Divisi Internasional Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional 1 Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional 2 Pemimpin Unit Bisnis Sindikasi Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah Pemimpin Divisi Bisnis Menengah High End (dihapuskan) Pemimpin Divisi Bisnis Menengah Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil (berubah menjadi BSL 1 dan 2 terakhir : per november 2018) Pemimpin Unit Analisa Nasabah dan Manajemen Portfolio Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer Pemimpin Divisi Jasa Transaksional Perbankan Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan Pemimpin Divisi Manajemen Wealth
Anggota Tidak Tetap	SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi rapat

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE RISIKO DAN KAPITAL SUB KOMITE ASSET DAN LIABILITY (ALCO)

Adapun tugas dan tanggung jawab Sub Komite/Bidang Asset dan Liabilities, yaitu:

1. Menetapkan tujuan dan sasaran ALMA BNI serta merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan.
2. Memberikan petunjuk pengelolaan aset dan kewajiban BNI.
3. Menetapkan dan menjaga jumlah alat likuid sesuai kebutuhan likuiditas dan ketentuan Bank Indonesia.
4. Menjaga keseimbangan penggunaan dana dengan sumber dana.
5. Menetapkan kebijakan penempatan dana baik melalui *Primary Reserve*, *Secondary Reserve*, *Tertiary Reserve* dan *Loan*.
6. Menganalisa struktur neraca dan mengkaji semua risiko yang muncul dari *exposure* yang dimiliki oleh BNI berupa *interest rate risk*, *foreign exchange risk*, dan *liquidity risk*.
7. Mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi dan menganalisis dampaknya terhadap posisi simpanan dan pinjaman, posisi valuta asing, suku bunga, nilai tukar valuta asing dan profitabilitas BNI.
8. Menetapkan suku bunga pinjaman (*base rate*) dan suku bunga DPK (giro, tabungan dan deposito).



PELAKSANAAN TUGAS KOMITE RISIKO DAN KAPITAL SUB KOMITE ASSET DAN LIABILITY (ALCO) TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, Komite ALCO telah mengadakan 11 (sebelas) kali rapat ALCO dengan usulan agenda rapat sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Usulan Agenda Rapat
1.	09 Januari 2018	Alokasi kuota dan alur kewenangan memutus <i>special rate</i> untuk Giro dan Tabungan
2.	07 Februari 2018	Tarif papan Deposito Rupiah untuk seluruh tenor di-review turun 0,25% sampai dengan 0,75%
3.	08 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi Likuiditas Pasar dan BNI Pengelolaan Risiko Nilai Tukar Pengelolaan Risiko Suku Bunga
4.	26 April 2018	Pengelolaan <i>Asset & Liability</i>
5.	28 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> <i>Monitoring</i> tarif papan DPK <i>Monitoring base rate</i> kredit
6.	20 Juli 2018	Perubahan <i>tiering</i> saldo dan kenakan tarif papan Deposito USD
7.	28 Agustus 2018	Alokasi kuota dan alur kewenangan memutus <i>special rate</i> Giro
8.	27 September 2018	Guna mendukung program Pemerintah dalam rangka stabilitas nilai tukar Rupiah dan mendukung pencapaian unit bisnis sampai dengan akhir tahun 2018, diputuskan Program Kredit Berorientasi Ekspor
9.	25 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan <i>Asset & Liability</i> <i>Monitoring Kinerja</i>
10.	28 November 2018	<i>Review</i> tarif papan Deposito Rupiah
11.	18 Desember 2018	<i>Monitoring Kinerja</i>

KOMITE RISIKO DAN KAPITAL SUB KOMITE ANTI FRAUD

Sesuai dengan SEBI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan efektivitas penerapan Strategi *Anti Fraud*, maka BNI membentuk Komite Anti *Fraud* untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE RISIKO DAN KAPITAL SUB KOMITE ANTI FRAUD

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/384/DIR/R tanggal 9 November 2018 dengan cfm. Memo REN No. REN/2/1489 tanggal 11 Desember 2018 perihal Perubahan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan Kapital (KRK), Struktur dan keanggotaan Komite Risiko dan Kapital Sub Komite *Anti Fraud* adalah sebagai berikut.

Ketua	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	Pemimpin Divisi Kepatuhan (merangkap anggota)
Anggota Tetap	Direktur Manajemen Risiko Direktur <i>Retail Banking</i> Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM) Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan (PGV) Pemimpin Satuan Pengawasan Internal (SPI) Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia (HCT) Pemimpin Divisi Hukum (HUK) Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan (JAL) Pemimpin Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN)
Anggota Tidak Tetap	Direktur Sektor/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi Rapat



URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE RISIKO DAN KAPITAL SUB KOMITE ANTI FRAUD

Tugas dan tanggung jawab Komite *Anti Fraud* yaitu:

1. Mengidentifikasi, mengevaluasi dan menetapkan tindak lanjut atas kejadian *Fraud* yang berasal dari kegiatan/aktivitas di segenap unit kerja BNI.
2. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap *Anti Fraud* pada seluruh jajaran organisasi.
3. Menetapkan kebijakan dan Strategi *Anti Fraud*.
4. Memantau penerapan kebijakan dan Strategi *Anti Fraud* di BNI serta melakukan *review* dampak dari kebijakan dan strategi yang diimplementasikan secara periodik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite *Anti Fraud* dibantu oleh Divisi Kepatuhan yang memiliki fungsi:

1. Mengelola kebijakan dan pelaksanaan Strategi *Anti Fraud* berkoordinasi dengan unit/divisi terkait;
2. Mereview SOP Strategi *Anti Fraud*;
3. Melaporkan secara berkala maupun insidental ke pihak Internal (Direktur Utama dan Dewan Komisaris) dan pihak eksternal (Otoritas Jasa Keuangan) terkait dengan Strategi *Anti Fraud*;
4. Sebagai *liaison* data dan pelaporan dengan Divisi/Unit lain serta pihak eksternal terkait Strategi *Anti Fraud* dan mengelola *data base* terkait *Fraud* yang ada di BNI;
5. Memonitor inisiasi dan implementasi Strategi *Anti Fraud* serta perbaikannya.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE RISIKO DAN KAPITAL SUB KOMITE ANTI FRAUD TAHUN 2018

Rapat Komite *Anti Fraud* (KAF) di tahun 2018 telah dilaksanakan dengan hasil yaitu:

1. *Awareness*
 - a. Sosialisasi dan *awereness anti fraud* yang lebih mendalam sesuai dengan *profiling* pelaku *fraud*.
 - b. Pelatihan yang sifatnya kerohanian kepada segenap pegawai.
 - c. *Mandatory e-learning Anti Fraud Awareness* oleh segenap pegawai.
 - d. Penyampaian *lesson learnt* kasus *fraud*.
 - e. Tips aman bertransaksi melalui *e-Channel* kepada segenap nasabah dan pemegang kartu BNI.
2. *Preventif*
 - a. Setiap nasabah pembuka rekening agar dapat dilengkapi dengan foto diri nasabah dan *signature* berupa *ESVS* yang nantinya dapat disimpan di sistem serta dapat diakses oleh setiap *frontliner* dan unit kredit.
 - b. Perubahan parameter/kondisi penyebab perubahan suatu rekening dormant menjadi aktif dan kewenangan aktivasi rekening *dormant*, sehingga aktivasi rekening *dormant* dapat langsung terpantau.
 - c. Penambahan *numerator* buku tabungan di sistem *iCons*, sehingga pada saat pergantian atau penerbitan buku tabungan dapat langsung terlihat *historical* buku tabungan tersebut.
 - d. Penginputan PIN Kartu Debit di PINPAD tanpa *swipe* kartu untuk penggantian kartu debit tanpa harus membawa buku tabungan dan transaksi *non pinpad* di *Teller*.
 - e. Penerbitan Jurnal CS/Penyelia, sehingga aktivitas CS/Penyelia dapat dipantau melalui CMOD.
 - f. Normalisasi transaksi (kewenangan transaksi dan *loss* PINPAD), yang akan dikembangkan dengan modul *SSO (single sign on)*.
 - g. Melakukan *monitoring* yang lebih intensif untuk wilayah yang pengelolaan ATM nya masih di cabang dan menyusun mitigasi standar bagi ATM yang belum dikelola oleh vendor.
 - h. Pemasangan *CCTV online/live* di lokasi *high risk*.
3. Tindakan
 - a. Implementasi *Force PIN* secara *Bulk*.
 - b. Optimalisasi penggunaan laporan CMOD (*exception report*).
 - c. Implementasi atas struktur organisasi administrasi kredit di kantor cabang dan sentra kredit serta peningkatan kompetensi petugas administrasi kredit.
 - d. *Review* Bina BNI untuk posisi administrasi kredit dan *customer service* termasuk soal kewenangan dan *career path* nya.
 - e. Penegasan prinsip *four eyes* untuk aplikasi permohonan kartu kredit.
 - f. Peningkatan penggunaan *mobile Banking* oleh nasabah.
 - g. Memastikan dalam PKS dengan pihak BNI *Life* telah terdapat klausul penggantian kerugian atas kejadian *fraud*.
 - h. Penegasan tanggung jawab/*guarantee* terkait alat anti *skimming* dari vendor mesin ATM.
 - i. Uji coba program *debit roaming* dan *force pin* reguler bagi Pegawai BNI.



KOMITE PRODUK

Komite Produk (PRC) merupakan wadah pengelolaan kebijakan dan pemantauan produk/aktivitas di BNI untuk memastikan keberhasilannya dalam menciptakan keuntungan yang maksimal. Komite Produk dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/448/DIR/R tanggal 20 September 2012 telah dilakukan perubahan susunan keanggotaan PRC dengan cfm. Memo REN No. REN/2/1397 tanggal 21 November 2018 perihal Perubahan Keanggotaan Product Committee.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PRODUK

Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti merangkap Anggota Tetap	Wakil Direktur Utama
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan • Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Teknologi Informasi dan Operasi • Direktur Kepatuhan • Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan • Pemimpin Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan • Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan • Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank • Pemimpin Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer • Pemimpin Divisi Solusi dan Keamanan Teknologi Informasi • Pemimpin Divisi Operasional • Pemimpin Divisi Kepatuhan • Pemimpin Divisi Hukum
Anggota Tidak Tetap	Anggota Direksi/SEVP yang bertindak sebagai Direktur/SEVP Sponsor, Pemimpin Divisi/Satuan/Unit terkait dengan topik yang dibahas
Sekretaris	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
Supporting Staff Group	<ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin Kelompok Riset Manajemen dan Organisasi – Divisi Perencanaan Strategis • Pemimpin Kelompok Perencanaan Strategis – Divisi Perencanaan Strategis • Pemimpin Kelompok Kebijakan dan Sistem Pedoman Perusahaan – Divisi Tata Kelola Perusahaan • Pemimpin Kelompok Analisa Kinerja Keuangan – Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan • Pemimpin Kelompok Pengembangan Kebijakan Akuntansi – Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan • Pemimpin Kelompok Anggaran Perusahaan – Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan • Pemimpin Kelompok Pemantau Kinerja Bisnis – Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan • Pemimpin Kelompok Integrasi Risiko – Divisi Manajemen Risiko Bank • Pemimpin Kelompok Otorisasi dan Pengendalian <i>Fraud</i> – Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer • Pemimpin Kelompok <i>Business Partner</i> – Divisi Solusi dan Keamanan Teknologi Informasi • Pemimpin Kelompok Pengembangan Operasional – Divisi Operasional • Pemimpin Kelompok Kepatuhan Peraturan dan Kebijakan – Divisi Kepatuhan • Pemimpin Kelompok Pengkajian dan Pengembangan Hukum – Divisi Hukum

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PRODUK

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Produk antara lain:

1. Menetapkan strategi besaran dan pengembangan bisnis melalui produk/aktivitas BNI.
2. Melakukan pengujian komprehensif dan memutuskan “kelayakan” produk/aktivitas baru khususnya terkait aliansi yang bersifat lintas sektoral/segmen dan aliansi strategis dengan Perusahaan anak/Perusahaan lain di luar BNI dengan mengundang Direktur Sektor terkait.
3. Melakukan *monitoring* produk/aktivitas yang terimplementasi di BNI dan membuat keputusan atas keberlangsungan produk/aktivitas atas rekomendasi *Supporting Staf Group/product owner*.
4. Sebagai lembaga arbitrase dalam masalah-masalah lintas sektoral terkait dengan *Performance Management System (PMS)* dalam implementasi produk/aktivitas baru.



PELAKSANAAN TUGAS DAN FREKUENSI RAPAT KOMITE PRODUK

Sepanjang tahun 2018, Komite Produk telah mengadakan 4 (empat) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1.	19 April 2018	Update Progress Usulan Produk/Aktivitas Baru dalam Revisi RBB 2018-2020.
2.	18 Mei 2018	SSG Komite Produk terkait Usulan Produk dan/atau Aktivitas Baru dalam Revisi RBB 2018-2020.
3.	5 Oktober 2018	Diskusi terkait Pelaksanaan Komite Produk dalam Rangka Penyusunan Dokumen RBB 2019-2021.
4.	8 Oktober 2018	Persiapan Komite Produk dalam Rangka Penyusunan Dokumen RBB 2019-2021.

KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Komite Manajemen Kinerja (PMC) merupakan komite permanen di BNI sebagai wadah pengelolaan kebijakan pemantauan anggaran dan memperlancar proses manajemen kinerja (*performance management*) di BNI untuk memastikan keselarasan *strategic planning*, memfasilitasi proses *target setting* dan penilaian kinerja, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. KP/353/DIR/R tanggal 21 Juni 2017 perihal Penataan *Performance Management Committee* (PMC).

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti merangkap Anggota Tetap	Wakil Direktur Utama
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Anggota Direksi dan SEVP Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i> Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan Pemimpin Satuan Pengawasan Internal Pemimpin Divisi Manajemen Data Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan Pemimpin Divisi Tresuri Pemimpin Divisi <i>E-Banking</i>
Anggota Tidak Tetap	Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan topik yang dibahas
Sekretaris 1 (Bidang <i>Target Setting</i>)	Pemimpin Divisi Penganggaran dan pengendalian
Sekretaris 2 (Bidang <i>Strategic Planning</i>)	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Keuangan
<i>Supporting Staff Group</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Kelompok Anggaran Perusahaan – Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan Pemimpin Kelompok Analisa Kinerja Keuangan – Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan Pemimpin Kelompok Perencanaan Strategis – Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Kelompok Sistem Manajemen Kerja – Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Kelompok Pemantauan Kinerja Bisnis – Divisi Pengelolaan Jaringan Pemimpin Kelompok Profil Jabatan dan Kinerja Individu – Divisi <i>Human Capital</i> Pemimpin Kelompok Perencanaan dan Pengembangan – Satuan Pengawasan Internal Pemimpin Kelompok Liaison & Kualitas Data – Divisi Manajemen Data

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Uraian Tugas Komite Manajemen Kinerja sebagai berikut:

Bidang *Target Setting*

- Menyetujui dan menetapkan jadwal tahunan dan bertanggung jawab dalam *planning* dan *budgeting*.
- Mengawasi dan memantau perkembangan dari kegiatan *planning and budgeting*.
- Memutuskan proposal CAPEX dengan kriteria tertentu (*business cases*).

Bidang *Strategic Planning*

- Meninjau dan memastikan keselarasan antara RBB, *Corporate Plan* dan anggaran, dan menyarankan penyesuaian bila diperlukan.
- Meninjau dan menyetujui target yang disarankan/penyesuaian anggaran (*forecasting*), dan merekomendasikan perubahan RBB/ *Corporate Plan* apabila diperlukan sebagai lembaga arbitrase atas permasalahan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja.



Bidang Penilaian Kinerja

1. Meninjau dan menyetujui KPI pada level sektor.
2. Meninjau dan memberikan rekomendasi KPI BNI.
3. Memberikan rekomendasi kepada sektor dan Divisi selama proses penentuan dan penurunan KPI dan target.
4. Meninjau proses *Performance Management* secara berkelanjutan/menyarankan inisiatif/amandemen kebijakan untuk meningkatkan efisiensi.
5. Memberikan *insight* desain KPI *Business Unit & Fungsional Unit*.
6. Mereview dan memutuskan skor PMS (Q1, Q2 dan Q3)
7. Mereview *feedback* dari Direktur Sektor dan memberikan *insight* skor PMS Q4 sebelum diputus dalam Forum PMC.

PELAKSANAAN TUGAS DAN FREKUENSI RAPAT KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Sepanjang tahun 2018, Komite Manajemen Kinerja telah mengadakan sebanyak 3 (tiga) kali Rapat Komite Manajemen Kinerja, dengan agenda:

No.	Tanggal	Agenda
1.	19 Februari 2018	Finalisasi Skor Unit dan Sub Unit Q4 2017
2.	2 April 2018	Penetapan KPI <i>Functional Unit</i> 2018
3.	13 September 2018	Finalisasi Skor KPI Direksi Q1 & Q2 2018

KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Komite Manajemen Teknologi merupakan salah satu komite permanen di BNI yang memiliki kewenangan sebagai Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan, penetapan kebijakan dan strategi pengembangan teknologi informasi BNI. Komite ini dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Teknologi Informasi (TI).

Komite Manajemen Teknologi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/201/DIR/R tanggal 14 Juni 2011 perihal Penataan Komite Manajemen Teknologi, yang terakhir diperbaharui melalui Memo Divisi Perencanaan Strategis No. REN/2/528 tanggal 30 April 2018 perihal Perubahan Keanggotaan Komite.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Ketua	Direktur Teknologi informasi & Operasi
Ketua Pengganti merangkap Anggota Tetap	Direktur Bisnis Kecil & Jaringan
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur <i>Retail Banking</i> • Direktur Keuangan • Direktur Kepatuhan • Pemimpin Divisi Solusi dan Keamanan Teknologi informasi • Pemimpin Divisi Manajemen Data • Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer • Pemimpin Divisi Bisnis Kartu • Pemimpin Divisi <i>E-Banking</i> • Pemimpin Divisi Internasional • Pemimpin Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan • Pemimpin Unit <i>E-Channel</i> • Pemimpin Divisi Operasional • Pemimpin Divisi Manajemen Risiko • Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis • Pemimpin Satuan Pengawasan Internal • Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset & pengadaan • Pemimpin Divisi Kepatuhan • Pemimpin Unit Analisa Nasabah & Manajemen <i>Portfolio</i>
Anggota Tidak Tetap	Direksi, Pemimpin, Divisi/Satuan/Unit dan Pemimpin Perusahaan Anak (yang terkait dengan topik yang dibahas)
Sekretaris	Pemimpin Divisi Solusi & Keamanan Teknologi Informasi
<i>Supporting Staff Group</i>	Divisi Terkait



URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Teknologi terdiri atas berbagai bidang, yaitu:

1. Bidang Formulasi Kebijakan TI
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan dan prosedur utama TI, khususnya terkait aspek pengembangan dan pengadaan sistem TI, aktivitas operasional TI dan jaringan komunikasi, pengamanan informasi, *end user computing*, aktivitas *e-Banking*, penggunaan pihak penyedia jasa TI, serta kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko penggunaan TI BNI.
 - b. *Review* dan persetujuan rekomendasi anggaran TI dan keamanan informasi.
 - c. Penetapan dan evaluasi TI *Governance*.
2. Bidang Penyelarasan Strategi TI dan Bisnis
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan – ITSP*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha BNI, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi, efektivitas serta rencana pelaksanaan (*roadmap*), sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan, serta *cost and benefit* yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
 - b. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kesesuaian proyek-proyek yang disetujui dengan Rencana Strategis TI.
 - c. Menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional BNI.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha BNI pada sektor TI sehingga investasi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BNI.
3. Bidang Pengelolaan Risiko TI
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan kebijakan dan prosedur utama TI, khususnya terkait aspek pengembangan dan pengadaan sistem TI, aktivitas operasional TI dan jaringan komunikasi, pengamanan informasi, *end user computing*, aktivitas *e-Banking*, penggunaan pihak penyedia jasa TI. Serta kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko penggunaan TI BNI.
 - b. Memastikan efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi BNI pada sektor TI sehingga investasi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BNI.
 - c. Memfasilitasi hubungan antar Divisi/Satuan/Unit dalam upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI.
4. Bidang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja TI
 - a. Melakukan analisis dan rekomendasi terhadap kesesuaian pelaksanaan proyek- proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*) dalam *Service Level Agreement* (SLA).
 - b. Melakukan pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya.

PELAKSANAAN TUGAS DAN FREKUENSI RAPAT KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Sepanjang tahun 2018, Komite Manajemen Teknologi telah mengadakan 2 (dua) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

Tanggal	Agenda
5 Juni 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> Status Proyek TI 2018. 2. Proyek TI Kantor Cabang Luar Negeri (<i>Closing Project</i>). 3. Realisasi CAPEX 2018 dan Program Efisiensi. 4. BNI <i>Cloud Roadmap</i> dan <i>Cyber Security</i>.
19 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek TI Tahun 2018 dan Rencana Proyek Tahun 2019. 2. <i>Upgrade</i> Infrastruktur TI. 3. <i>Update</i> Status ITSO 2019-2023. 4. IT <i>Project Management Office</i> (PMO) <i>Review</i>.



KOMITE KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN

Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan merupakan Komite permanen di BNI yang di dalamnya terdapat Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP). Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (KKP) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/106/DIR/R tanggal 03 April 2014 dan berikut perubahannya terakhir cfm. SK Direksi No. KP/384/DIR/R tanggal 9 November 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN (KKP)

Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan (merangkap Sekretaris) • Direktur Corporate Banking • Direktur Bisnis Kecil & Jaringan • Direktur Retail Banking • Direktur Keuangan • Direktur Manajemen Risiko • Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan • Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank • Pemimpin Divisi Kepatuhan • Pemimpin Satuan Pengawas Internal
Anggota Tidak Tetap	Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi rapat.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KOMITE PROSEDUR PERKREDITAN (KPP)

Ketua	Wakil Direktur Utama
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur <i>Corporate Banking</i> (khusus materi terkait segmen korporasi) • Direktur Bisnis Kecil & Jaringan (khusus materi segmen kecil) • Direktur Bisnis <i>Retail Banking</i> (Khusus materi terkait segmen konsumen) • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Kepatuhan • Direktur Teknologi Informasi dan Operasi (Khusus materi terkait Operasional Perkreditan) • Direktur Tresuri dan Internasional Banking (khusus materi terkait bisnis tresuri dan internasional) • SEVP Bisnis Menengah (khusus materi terkait segmen menengah)
Sekretaris	Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
2. Menetapkan Kebijakan Bisnis Tresuri dan Internasional/*Financial Institution* terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian.
3. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta melakukan *review* apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB.
4. Melakukan *review* secara berkala selama-lamanya setiap 3 (tiga) tahun sekali terhadap KPB dan apabila diperlukan menetapkan perubahan/perbaikan KPB.
5. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur- debitur besar tertentu.
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK, *Good Corporate Governance* dan Penerapan Manajemen Risiko.
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang- undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
 - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
6. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dewan Komisaris, mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB dan hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir 4 di atas.
7. Merumuskan dan merekomendasikan langkah- langkah penyempurnaan dalam pelaksanaan aktivitas Perkreditan Bank.
8. Me-*review* hasil keputusan Sub Komite Prosedur Perkreditan melalui mekanisme Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan.



Sedangkan tugas dan tanggung jawab sub Komite Prosedur Perkreditan sebagai berikut:

1. Menetapkan Prosedur dan ketentuan operasional Perkreditan.
2. Menetapkan *Lending Model*.
Lending Model adalah kebijakan operasional dan prosedur perkreditan yang spesifik terkait skema pembiayaan dengan syarat dan kondisi khusus yang telah disesuaikan untuk segmen pasar, industri atau daerah tertentu dengan tetap memperhatikan *prudential Banking principles* dan *Good Corporate Governance*.
3. Menetapkan prosedur dan ketentuan operasional Bisnis Tresuri dan Internasional/*Financial Institution*.
4. Menyampaikan laporan/*report* secara berkala keputusan Sub Komite Prosedur Perkreditan ke Komite Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan.

PELAKSANAAN TUGAS DAN FREKUENSI RAPAT KOMITE KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN

Selama tahun 2018, Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan telah mengadakan 17 (tujuh belas) kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1	15 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> • BNI sebagai investor dalam Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT). • BNI sebagai investor dalam Investasi Reksa Dana Pasar Uang (RDPU).
2	20 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pemberian Kredit Kepada Anak Perusahaan (<i>Subsidiary</i>) dari Group Usaha yang Telah Menjadi Debitur Segmen Korporasi. • Ketentuan <i>Top Up Facility</i> Kredit Investasi (KI) di Usaha Bidang Properti.
3	3 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Limit Pembelian Surat Berharga Korporasi pada Masa Interim. • Penetapan Limit Pembelian Surat Berharga Non Debitur.
4	5 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pemberian BNI Fleksi Pensiun (BFP) kepada Calon Pensiunan: • Status Pemohon (PT Taspen, PT ASABRI, Pegawai Aktif Lembaga Pensiunan BUMN) • Masa Kerja/Masa Pra Purna • Pembayaran Gaji dan Penyaluran Manfaat Pensiun • Kelengkapan Data Administratif • Jangka Waktu • Pembayaran Kembali • Kriteria Perusahaan/Institusi BUMN/BUMD (Termasuk Grup dan Anak Perusahaan)
5	15 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan Memutus Kredit Segmen Korporasi untuk Tingkat Kantor Pusat.
6	15 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Review</i> Ketentuan Kewenangan Memutus Pencairan Kredit Pertama Kali untuk Debitur Baru/Tambahan yang diputus oleh Komite Kredit Kantor Pusat pada Segmen Menengah.
7	24 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Nominal Minimum dan Maksimum Kredit BNI Griya Multiguna.
8	24 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Hapus Tagih Bunga Denda dan Ongkos-Ongkos BDO untuk Debitur Kategori <i>Loan at Risk</i> dalam Rangka <i>Phase Out</i>.
9	20 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Sentralisasi Penunjukan Penilai Independen atau Kantor jasa Penilai Publik (KJPP) Oleh Unit Administrasi Kredit.
10	20 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Kewenangan Memutus Kredit Kepada <i>CST Leader</i>.
11	21 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Penutupan Penjaminan/Asuransi kredit Segmen Kecil untuk KMK R/C Terbatas.
12	21 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan Memutus Restrukturisasi Kredit <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Kredit sampai dengan Rp10 Miliar.
13	23 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Review</i> Ketentuan Pembiayaan atas Pekerjaan/Proyek yang didanai Oleh APBN melalui Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
14	5 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan Kewenangan Memutus Kredit Konsumer Organik yang diproses oleh Unit LNC. • Kewenangan Memutus Kredit Konsumer Organik di atas Kantor Cabang.
15	20 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Penetapan Kewenangan Memutus Besarnya <i>Fee Broker</i>/Agen Properti dalam Rangka Penjualan Agunan.
16	26 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Domestic Non – Deliverable Forward</i> (DNFD).
17	31 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Review</i> ketentuan Debitur Prima dan <i>Review</i> Referensi Keuangan per Sektor Industri.



KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komite permanen di BNI yang beranggotakan seluruh Direksi dan beberapa pemimpin Divisi dengan kewenangan sebagai berikut:

1. Memutuskan kebijakan/ketentuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia terkait:
 - a. Perencanaan Pegawai
 - b. Rekrutmen dan Seleksi
 - c. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
 - d. Penilaian Kinerja Pegawai
 - e. Jalur Karier dan Suksesi
 - f. Remunerasi
 - g. Hubungan Industrial
 - h. Budaya Kerja
2. Memutuskan persetujuan atas usulan pelaksanaan program mutasi/promosi tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah.
3. Mengevaluasi kinerja tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah.
4. Memutuskan persetujuan atas usulan pemberian sanksi administratif untuk tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah.
5. Menyetujui pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/235/DIR/R tanggal 18 Juli 2011 perihal Perubahan Komite Sumber Daya Manusia. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. KP/078/DIR/R tanggal 9 Februari 2004 perihal Komite Sumber Daya Manusia dan Surat Keputusan Direksi No. KP/637/DIR/R tanggal 5 Oktober 2004 perihal Komite Disiplin dinyatakan tidak berlaku lagi.

STRUKTUR DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Ketua	Direktur Utama
Anggota Tetap	Direktur yang mensupervisi Divisi <i>Human Capital</i> (Merangkap Ketua Pengganti *) Direktur yang mensupervisi Divisi Kepatuhan *)
Anggota Tidak Tetap	Direktur Sektor dan/atau Pejabat yang mensupervisi Divisi/Satuan/Unit (jika tidak terdapat Direktur Sektor) yang terkait dengan materi rapat *)
Sekretaris	Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i> (HCT)

*) Dalam hal tidak terdapat posisi Direktur, maka posisi tersebut digantikan oleh SEVP atau Pejabat yang mensupervisi Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan bidang tersebut.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite *Human Capital* adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa kebijakan/ketentuan dalam bidang sumber daya manusia konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan/ketentuan dalam bidang sumber daya manusia antara lain meliputi pengelolaan SDM, Pengelolaan Sistem Remunerasi, serta mekanisme *Reward and Punishment* bagi segenap pegawai BNI.
2. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan menempatkannya pada jabatan yang tepat termasuk untuk tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah.
3. Melakukan evaluasi kinerja terhadap tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi.
4. Memastikan bahwa pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia telah sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

TIM DI BAWAH KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Tim Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Ketua	• Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i> (HCT)
Anggota Tetap	• Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (REN) (Merangkap Ketua Pengganti) • Pemimpin Divisi Kepatuhan (KPN)
Anggota Tidak Tetap	• Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi rapat *)
Sekretaris	• Pemimpin Kelompok di Divisi <i>Human Capital</i> (HCT) yang terkait dengan agenda pembahasan (Tidak Merangkap Anggota)



Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengkajian & Perumusan Kebijakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut:

1. Mengelola aktivitas penelitian, pengkajian dan evaluasi efektivitas dan kualitas serta merekomendasikan usulan perubahan/penyempurnaan kebijakan maupun mekanisme operasionalisasi implementasi kebijakan manajemen sumber daya manusia terkait:
 - a. Perencanaan pegawai
 - b. Rekrutmen dan seleksi
 - c. Pelatihan dan pengembangan kompetensi
 - d. Penilaian Kinerja Pegawai
 - e. Jalur Karier dan suksesi
 - f. Remunerasi
 - g. Hubungan Industrial
 - h. Budaya kerja
2. Mengelola usulan pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

TIM PERTIMBANGAN MUTASI TENAGA PIMPINAN

Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i> (HCT)
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang mensupervisi unit terkait (Merangkap Ketua Pengganti) • Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi rapat
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin Kelompok di Divisi <i>Human Capital</i> (HCT) yang terkait dengan agenda pembahasan (Tidak Merangkap Anggota)

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan yaitu mengelola aktivitas perencanaan dan pencarian kandidat berdasarkan syarat yang telah ditetapkan serta merekomendasikan kandidat bersangkutan untuk dimutasikan/ dipromosikan sebagai tenaga pimpinan.

TIM PERTIMBANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Kantor Pusat

Ketua	Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i> (HCT) (Merangkap Anggota)
Anggota	Pemimpin Divisi Kepatuhan (KPN) Pemimpin Divisi Hukum (HUK) Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan peristiwa/kasus atau kuasanya
Sekretaris	Pemimpin Satuan Pengawasan Internal (SPI) (Tidak Merangkap Anggota)

Kantor Wilayah

Ketua	Pemimpin Wilayah (CEO <i>Region</i>)
Anggota Tetap	Wakil Pemimpin Wilayah yang mensupervisi unit terjadinya peristiwa/kasus Satu orang Wakil Pemimpin Wilayah Lainnya yang ditunjuk oleh Pemimpin Wilayah (CEO <i>Region</i>) Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan peristiwa/kasus atau kuasanya
Sekretaris	Pemimpin Kontrol Internal Wilayah (Tidak Merangkap Anggota)

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan yaitu Mengelola aktivitas analisa dan pengkajian atas rekomendasi sanksi administratif yang diterima dari divisi pemroses kasus untuk kemudian merekomendasikan kepada pemutus atau memberikan putusan sanksi administratif terhadap pegawai yang terkait kasus sesuai dengan matriks kewenangan yang berlaku.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Sepanjang tahun 2018, Tim Pertimbangan Mutasi Pegawai (TPMTP) telah menjadwalkan rapat secara reguler sebanyak 2 (dua) kali seminggu untuk pembahasan mutasi tenaga Pimpinan Cabang, Sentra. Selanjutnya, keputusan mutasi pada jabatan CEO GM dan CEO *Region* telah dilakukan melalui Rapat Direksi yang berjumlah 15 (lima belas) kali pertemuan. Sementara, Tim Pertimbangan Sanksi Administratif telah melakukan 12 (dua belas) kali rapat pembahasan.



FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Bank dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan BNI tahun buku 2018 ditetapkan melalui RUPS Tahunan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Bank.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Dalam menjalankan aktivitas operasional, selain auditor internal, Otoritas Jasa Keuangan, juga diawasi oleh auditor ekstern di Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kantor Akuntan Publik.

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahun buku 2017, melalui surat Dewan Komisaris No. DK/040 tanggal 02 April 2018, Dewan Komisaris menetapkan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (*member of Ernst and Young*) sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Bank dan Laporan lainnya tahun buku 2018.

Tahun buku 2018, merupakan periode tahun audit ketiga bagi KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (*member of Ernst and Young*).

Dasar penetapan di atas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 Tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan pada pasal 16 ayat 1 disebutkan Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
2. Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan jo Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional pada pasal 18 ayat 6 disebutkan Bank wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan berikut nama Akuntan Publik yang bertanggung-jawab dalam audit (*partner in charge*) disertai dengan opini yang diberikan pada pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Desember.
3. Proses Penunjukan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (*member of Ernst and Young*) sebagai auditor eksternal dilakukan melalui mekanisme Pelelangan.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN DAN FEE

Berikut daftar Kantor Akuntan Publik, nama akuntan, fee, dan izin KAP selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee dan Izin KAP Periode 5 Tahun Terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (<i>Partner Penanggung Jawab</i>)	Periode	Fee Jasa Audit (dalam Jutaan Rupiah)*	Izin KAP
2018	KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (Ernst and Young)	Danil Setiadi Handaja	1 Tahun	8.500.000.000	603/KM.1/2015
2017	KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (Ernst and Young)	Yasir	2 Tahun	7.200.000.000	603/KM.1/2015
2016	KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (Ernst and Young)	Yasir		7.200.000.000	603/KM.1/2015
2015	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Pricewaterhouse Coopers)	Angelique Daryanto	1 Tahun	8.390.000.000	241/KM.1/2015
2014	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Pricewaterhouse Coopers)	Haryanto Sahari	3 Tahun	13.215.125.000	151/KM.1/2010

Keterangan:

*Termasuk Fee Auditor Eksternal untuk Anak Perusahaan



Selain audit atas laporan keuangan konsolidasi BNI, ruang lingkup pekerjaan audit KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (*member of Ernst and Young*) untuk Tahun Buku 2018 adalah:

1. Audit atas Laporan Keuangan Publikasi.
2. Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
3. Audit atas Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
4. Audit atas Laporan Investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
5. Audit atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama atas Operasional Departemen Kustodian BNI.
6. Audit atas Laporan PSA 62.
7. *Review* atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja BNI.
8. Surat Komentar/*Management Letter*.

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh auditor eksternal disampaikan dalam bentuk opini Laporan Keuangan. Untuk tahun 2011 hingga 2018, Laporan Keuangan Konsolidasian BNI memperoleh Opini disajikan secara Wajar. Hal ini menunjukkan BNI telah menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku serta lepas dari salah saji yang material. Hal ini menunjukkan BNI telah menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku dan lepas dari salah saji yang material.

IMBALAN JASA AUDIT

Fee jasa audit Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BNI, dan jasa audit lainnya untuk Tahun Buku 2018 adalah sebesar Rp7.284.000.000,00 (sudah termasuk *out of pocket expense* (OPE) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)).

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

Jasa lain yang diberikan akuntan selama tahun 2018 yaitu jasa Konsultan Pendamping Implementasi IFRS 9/PSAK 71 sebesar Rp8.000.000.000,00.

PROFIL PERUSAHAAN AKUNTAN PUBLIK

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
(*Member of Ernst and Young*)
Indonesia Stock Exchange Building Tower 2,7 th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
INDONESIA
Nomor Telepon: [62] (21) 52895000
Nomor Facsimile: [62] (21) 52894100

KOORDINASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Dalam rangka pelaksanaan fungsi *monitoring* terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK), dan KAP, Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil audit auditor eksternal dimaksud. Koordinasi selengkapnya dapat dilihat pada uraian Laporan Komite Audit.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL DAN KEPATUHAN BANK TERHADAP KETENTUAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA BANK, AKUNTAN PUBLIK DAN BANK INDONESIA

BNI telah menyelenggarakan pelaksanaan audit eksternal dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank dengan efektif, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagaimana disebutkan dalam PBI No. 7/50/PBI/2005 Tentang Perubahan atas PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan bank, dalam memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan, BNI wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Melalui surat Dewan Komisaris No. DK/076 tanggal 21 Juli 2016, Dewan Komisaris menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (*member of Ernst and Young*) sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan lainnya tahun buku 2017.
- b. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 Tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan pada pasal 16 ayat 1 disebutkan Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut turut.
- c. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh BNI wajib didasarkan pada perjanjian kerja.
- d. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank wajib melakukan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta sesuai dengan perjanjian kerja dan ruang lingkup audit. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib memperhatikan ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.
- e. Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit, Akuntan Publik dapat meminta informasi kepada Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang akan diaudit.
- f. Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi kepada Akuntan Publik meskipun perjanjian kerja telah berakhir.

MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengantisipasi tantangan ekonomi domestik maupun global serta peningkatan eksposur risiko yang dihadapi oleh BNI, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan risiko dan permodalan yang efektif dan terintegrasi, yang mampu mendukung pencapaian dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan. Sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki beberapa perusahaan anak yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BNI, selain menerapkan manajemen risiko secara individu, BNI juga menerapkan manajemen risiko secara Terintegrasi.

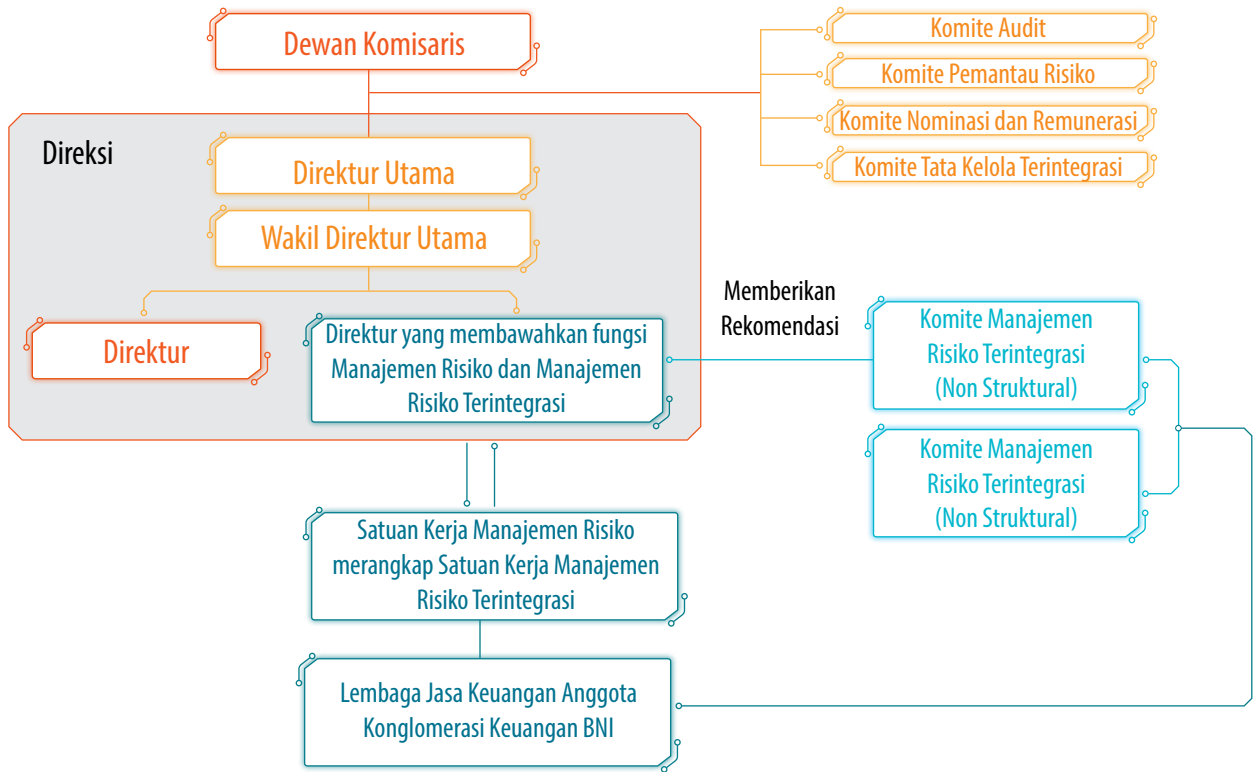
Beberapa regulasi yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Risiko
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. Penerapan Manajemen Risiko Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
3. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 tanggal 04 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Manajemen Risiko bagi Produk dan Aktivitas Bank Umum, antara lain:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.
5. Sistem Pengendalian Intern.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.



STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Organisasi dan fungsi Manajemen Risiko BNI dan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BNI disusun dan ditetapkan sebagai berikut:



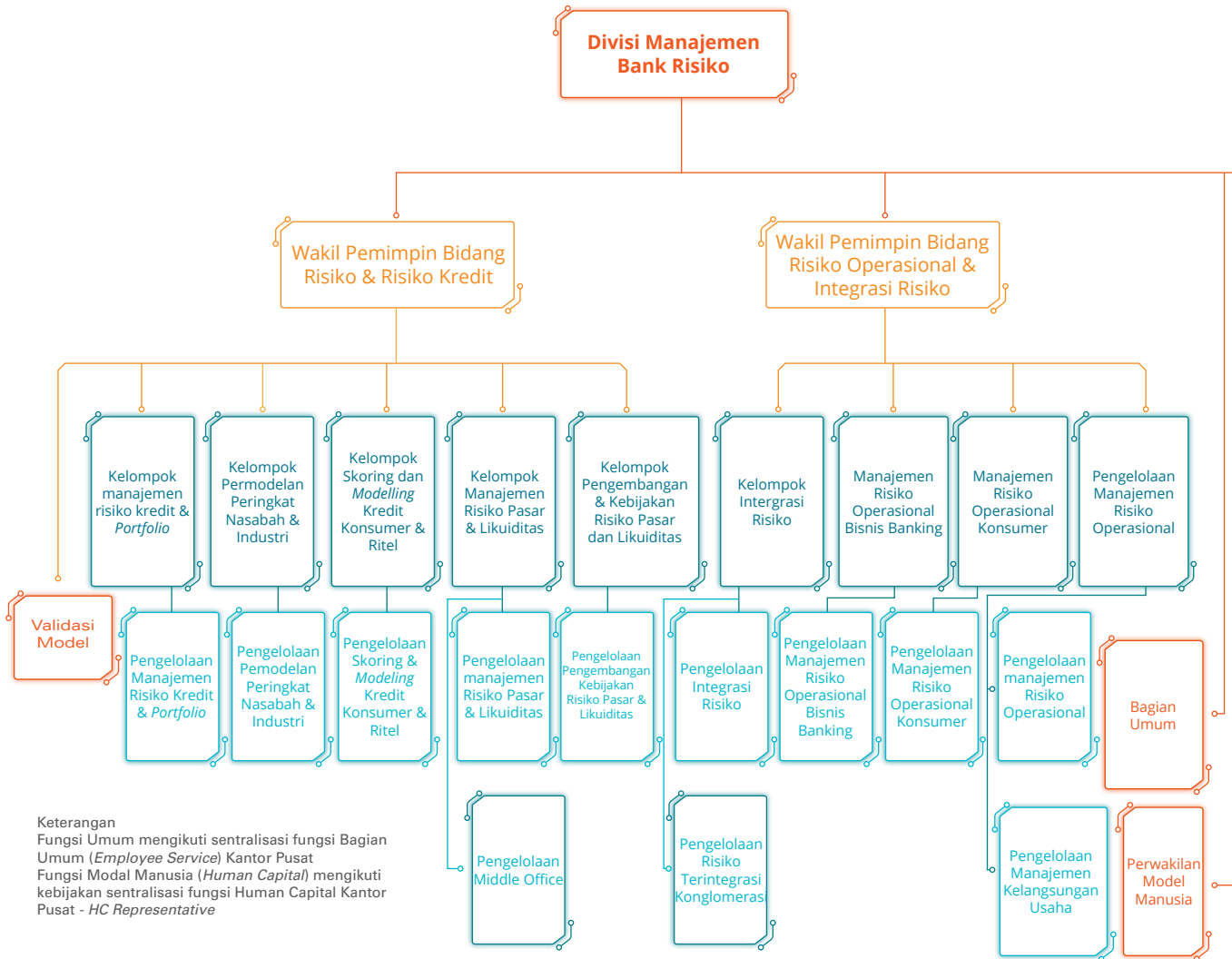
1. Direksi dan Dewan Komisaris BNI berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko BNI secara Individu maupun Manajemen Risiko secara Terintegrasi.
2. Dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan penerapan Manajemen Risiko BNI dan Manajemen Risiko Terintegrasi, Dewan Komisaris BNI dalam pelaksanaannya dibantu oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Komite Remunerasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Direktur BNI yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko selain menjalankan fungsi penerapan Manajemen Risiko bagi BNI juga melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BNI.
4. Dalam menjalankan fungsinya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh Komite Risiko dan Kapital sub Komite Manajemen Risiko (KRK-RMC) dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
5. Jika diperlukan, Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dapat membahas permasalahan terkait Manajemen Risiko dalam rapat komite lainnya di tingkat Direksi atau Rapat Direksi.
6. Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko BNI, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang juga menjalankan fungsinya sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).
7. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan unit pengelola risiko yang berada di BNI maupun segenap LJK anggota Konglomerasi Keuangan dalam mengelola 8 (delapan) jenis risiko di BNI, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko reputasi, serta 10 (sepuluh) jenis risiko pada Konglomerasi Keuangan BNI, termasuk risiko transaksi intra-grup dan risiko asuransi.
8. Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsi serta wewenang dan tanggung jawabnya independen terhadap Satuan Kerja Operasional (*risk taking unit*) dan tidak melakukan aktivitas yang terkait dengan bisnis Bank.
9. Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat melakukan eskalasi atas permasalahan yang terjadi kepada Komite Risiko dan Kapital sub Komite Manajemen Risiko (KRK-KMR) atau Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. Sedangkan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi melakukan eskalasi permasalahan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi atau Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.



DIVISI MANAJEMEN RISIKO BANK

Secara hirarki, organisasi Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM) yang berperan sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) di BNI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.

STRUKTUR DIVISI MANAJEMEN RISIKO BANK





PROFIL PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko. Sejak September 2018, Divisi Manajemen Risiko Bank dipimpin oleh Drs. Aryanto Purwadi, MM.

Drs. Aryanto Purwadi, MM
(03 Agustus 2018 – Saat ini)

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, memperoleh gelar S1 dari Fakultas Biologi Universitas Jendral Soedirman Purwokerto (1990), dan gelar S2 dari Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (2004). Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank berdasarkan surat keputusan Direksi No KP/274/DIR/R tanggal 03 Agustus 2018. Sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pengembangan Perusahaan Anak dan Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT), Divisi Manajemen Risiko Bank memiliki fungsi:

1. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai berikut.

- Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko bank.
- Memantau posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*.
- Mengembangkan dan mengevaluasi akurasi model yang digunakan untuk mengukur risiko.
- Mengkaji usulan produk dan aktivitas baru dari aspek risiko.
- Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) sesuai kewenangan yang dimiliki.
- Mengevaluasi independensi dan efektivitas infrastruktur pengelolaan risiko bank secara rutin.
- Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko antara lain melalui penerapan sistem pengendalian risiko yang terintegrasi serta penetapan limit eksposur risiko.
- Menyusun dan menyampaikan laporan risiko secara berkala kepada Direksi melalui Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko.
- Independen dari *risk taking unit* dalam menjalankan fungsi pengawasan manajemen risiko. Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dan portofolio bank telah dikelola dengan baik antara lain melalui penetapan parameter risiko dan limit.
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan 4 (empat) risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional, termasuk melakukan pengukuran risiko kredit, pasar dan operasional, antara lain melalui *Internal Rating System*, *Market Risk Management Model* dan Perangkat Risiko Operasional.

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut.

- Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan BNI berdasarkan hasil penilaian:
 - Profil Risiko setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
 - Tingkat Risiko masing-masing risiko secara terintegrasi.
 - Profil Risiko Terintegrasi.
- Menyiapkan usulan penetapan *Risk Appetite Statement* secara terintegrasi.
- Melakukan *stress testing*.
- Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan penerapan Manajemen Risiko di masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
- Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan.
- Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tentang hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.



- i. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko Terintegrasi secara berkala kepada Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO BANK

Pengembangan kompetensi yang diikuti pegawai Divisi Manajemen Risiko Bank selama tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel Pengembangan Kompetensi Divisi Manajemen Risiko Bank

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Nama Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan
1	<i>Introduction R Programming (Introduction to Machine Learning)</i>	Enigma	Januari 2018
2	<i>Writing Report</i>	Value Consult	Januari 2018
3	<i>Integrated Digital Marketing</i>	C&G Training	Januari 2018
4	<i>Cybersecurity Risk Management</i>	E-Learning melalui edx.org	Februari - Maret 2018
5	<i>Gap Analysis IFRS 9</i>	KPMG	8-9 Maret 2018
6	<i>Refrehment IFRS9</i>	KPMG	01 Maret 2018
7	Energi Terbarukan : Biodiesel	Dirjen EBTKE	Mei 2018
8	<i>Workshop Introduction Asset Liability Management</i>	Lentera Pro	18 - 20 Juli 2018
9	<i>Workshop Persiapan Implementasi Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)</i>	BNV & TRS - BNI	01 Juli 2018
10	<i>Workshop Early Warning System (EWS) Konglomerasi Keuangan</i>	OJK	27 Juli 2018
11	<i>IFRS9</i>	KPMG + PKU	01 Juli 2018
12	Penerapan Budaya Risiko pada Konglomerasi Keuangan dari Aspek Pengawasan	OJK	2 Agustus 2018
13	<i>Best Practice Penerapan Budaya Risiko</i>	Center For Risk Management Studies Indonesia	03 Agustus 2018
14	<i>Training for Trainer</i>	Jakarta Consulting Group	28-29 Agustus 2018
15	Pelatihan & <i>Benchmark IFRS 9</i> dengan Bank Sentral Filipina	EY + PKU	Agustus 2018
16	<i>Workshop Lanjutan Implementasi Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB)</i>	BNV & ERM - BNI	01 September 2018
17	<i>Sustainable Energy</i>	BNI (bekerja sama dengan USAID)	13 September 2018
18	<i>Digital Transformation Roadmap Online Course</i>	Udemy	15 Oktober 2018
19	<i>Building Cashless Society - Grab Ovo Kudo Study Case</i>	QB Consult	28 - 29 Oktober 2018
20	<i>E-Channel The Spearhead of Banking and Financial Industry</i>	Asia Anti Fraud	20 -21 Oktober 2018
21	<i>Economic Modeling</i>	BI Institute	Oktober 2018
22	Menerapkan Sistem Inovasi Berkelanjutan	PPM Manajemen	31 Oktober - 01 November 2018
23	<i>Aligning Liquidity Risk Management</i>	One Point	01 November 2018
24	<i>Asset & Liability Management</i>	One Point	01 November 2018
25	<i>Fintech: Inovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan</i>	One Point Indonesia	8 - 9 November 2018
26	<i>Fintech Digital Banking</i>	Golden Regency Training & Konsulting	10 - 11 November 2018
27	<i>Happy employee is productive employee</i>	QB Consult	9 - 10 November 2018
28	<i>The Annual Indonesia Cyber Security Summit (ICSS) All-Day Conference Focused On Investing And Developing The Infant Cyber Security Industry In Indonesia And The Region.</i>	Indonesia Cyber Security Forum	18 - 19 November 2018
29	<i>Creative Problem Solving & Decision Making</i>	M-Knows Consulting	24 - 25 November 2018
30	<i>Classification in Machine Learning I</i>	Algoritma Course	November 2018
31	<i>Classification in Machine Learning II</i>	Algoritma Course	November 2018
32	<i>Creative Thinking & Decision Making</i>	M-Knows	November 2018



No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Nama Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan
33	<i>Problem Solving</i>	M-Knows	November 2018
34	<i>Leadership Program</i>	M-Knows	November 2018
35	<i>Fintech</i>	Markplus, Kanaka Training	November 2018
36	<i>Business Communication and Personal Development</i>	Global Strategic Consulting	30 November - 1 Desember 2018
37	<i>Creative Problem Solving and Decision Making</i>	M-Knows	24 - 25 November 2018
38	<i>Selling Yourself</i>	Dr. Personality Power	01 - 02 Desember 2018
39	<i>Capital Market Training</i>	Bina Insan Learning Centre	13 - 14 Desember 2018
40	<i>Seminar Of Digital Business Transformation 2018</i>	Xanoco Digital Indonesia	8 Desember 2018
41	<i>Quantitative Risk Management Under Basel III and Basel IV</i>	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)	11 - 12 Desember 2018
42	<i>Neural Network & Deep Learning</i>	Algoritma Course	01 Desember 2018
43	<i>Soul of Speaking</i>	The Soul of Speaking Organizer	13 - 14 Desember 2018
44	<i>Financial Statement Analysis & Risk Based Bank Rating</i>	Bina Insan	13 - 14 Desember 2018
45	<i>Certified Risk Management Profesional (CRMP)</i>	LSPP	Desember 2018

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Tabel Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko Pegawai BNI melalui Uji Sertifikasi Manajemen Risiko selama tahun 2018.

Tabel Sertifikasi Manajemen Risiko

Level Sertifikasi	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Asisten	16
	Assistant Manager	887
	Manager	77
	Assistant Vice President	6
2	Asisten	1
	Assistant Manager	55
	Manager	212
	Assistant Vice President	106
3	Manager	30
	Assistant Vice President	164
	Vice President	4
4	Assistant Vice President	3
	Vice President	39
	Senior Vice President	4
	Executive Vice President	1
5	Vice President	-
	Senior Vice President	-
	Executive Vice President	-

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

TARGET DAN INISIATIF STRATEGIS PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2018

Sepanjang Tahun 2018 Divisi Manajemen Risiko Bank menetapkan target dan melakukan inisiatif strategis sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
 - a. Menyusun dokumen *review* Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Kredit.

- b. Menyusun *review* standar rasio keuangan per industri untuk tahun 2018.
 - c. Menyusun *review Industry Risk Rating* (IRR) tahun 2018.
 - d. Menyusun *review* Risiko Industri pada Sektor Ekonomi Prioritas.
 - e. Mengimplementasikan *Internal Rating System* (IRS) untuk FI/Bank.
 - f. *Me-review* IRS segmen Menengah.
 - g. Melakukan pemantauan sistem pemeringkatan debitur *Business Banking* di segmen korporasi dan menengah.
 - h. Melakukan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit dengan menggunakan metode Standar.
 - i. Menyusun laporan publikasi kuantitatif eksposur Risiko Kredit.
 - j. Menyusun laporan *stress testing* risiko kredit dan Rencana Aksi.
 - k. Melakukan pengembangan *credit risk measurement* (berkelanjutan).
 - l. Menyusun *review* perhitungan *Credit Risk Premium* (CRP).
 - m. Melakukan analisa/kajian portofolio pinjaman, kajian 25 debitur inti, *Non Performing Loan* (NPL) *analysis* dan *space available* pinjaman secara berkala.
 - n. Melakukan analisa *performance monitoring, review, kalibrasi* serta pengembangan *scoring* dan *modeling* baru untuk produk kredit konsumen (antara lain Kartu Kredit dan BNI Griya) dan mass ritel (antara lain KUR).
 - o. Implementasi (*piloting/full implementation*) atas *application/behavior/collection scorecard* untuk produk kredit konsumen dan *mass ritel* (antara lain KUR) pada *loan application system/scoring engine*.
 - p. Melakukan pengembangan *Impairment Model* terkait penerapan standar akuntansi terbaru (IFRS 9).
 - q. Melakukan validasi model Risiko Kredit Segmen *Business Banking* (Menengah dan Kecil) dan Segmen Konsumer (konsumer dan *mass retail*) baik untuk model *rating/skoring* baru ataupun model eksisting yang diajukan untuk divalidasi.
 - r. Melakukan analisa penilaian/*asesment* Risiko Kredit pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank.
 - s. Menyusun *review Risk Appetite* Risiko Kredit.
 - t. Menyusun *review* parameter, pengukuran/ metodologi Profil Risiko Kredit dan pemantauan implementasi *concern* perbaikan Risiko Kredit.
2. Risiko Pasar
 - a. Menyusun dokumen *review* Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Pasar.
 - b. Menyusun *review* dan pengembangan Kebijakan, Prosedur dan Metodologi Pengelolaan risiko pasar, untuk portofolio Tresuri dan Kantor Cabang Luar Negeri.
 3. Risiko Likuiditas
 - a. Pengelolaan Risiko Likuiditas Dalam Negeri dan Kantor Cabang Luar Negeri.
 - b. Menyusun dokumen kebijakan, prosedur, metodologi dan pelaporan LCR (*Liquidity Coverage Ratio*) secara BNI individu dan konsolidasi.
 - c. Menyusun dokumen kebijakan, prosedur, metodologi dan pelaporan NSFR (*Net Stable Funding Ratio*) secara BNI individu dan konsolidasi.
 - d. Melakukan pemantauan dan analisis pengelolaan kas per wilayah.
 - e. Menyusun laporan publikasi kuantitatif eksposur Risiko Likuiditas.
 - f. Menyusun laporan pengukuran, pemantauan, dan analisis serta pengendalian dalam rangka pengelolaan Risiko Likuiditas.
- c. Melakukan pemantauan transaksi dan limit signifikansi Surat Berharga.
 - d. Melakukan pemantauan dan *review budget loss limit* Tresuri dan KCLN.
 - e. Melakukan pemantauan kewenangan transaksi/*deal size dealer* Tresuri dan KCLN.
 - f. Menyusun laporan publikasi kuantitatif eksposur Risiko Pasar.
 - g. Menyusun laporan pengukuran, pemantauan, dan analisis serta pengendalian dalam rangka pengelolaan risiko pasar.
 - h. Menyusun laporan *stress testing* nilai tukar dan suku bunga sesuai jadwal (*business as usual*), pemantauan dan analisis perkembangan parameter *stress testing* risiko pasar insidentil serta *recovery plan*.
 - i. Menyusun laporan *backtesting* atas *Value at Risk* (VaR).
 - j. Menyusun dokumen perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Pasar dengan menggunakan metode Standar.
 - k. Menyusun validasi model Risiko Pasar.
 - l. Melakukan analisa penilaian/*assessment* Risiko Pasar pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank.
 - m. Menyusun *review Risk Appetite* Risiko Pasar.
 - n. Menyusun *review* parameter dan pengukuran Profil Risiko Pasar.
 - o. Melakukan evaluasi perhitungan *Net Open Position* (NOP).
 - p. Melakukan evaluasi perhitungan *Interest Rate Risk Banking Book* (IRRBB).
 - q. Menyusun *review* hasil perhitungan tingkat risiko transaksi forex, derivatif dan *reverse repo*.
 - r. Melakukan *monitoring* limit-limit terkait konsentrasi surat berharga.



- g. Menyusun laporan *stress testing* Risiko Likuiditas sesuai jadwal (*business as usual*), pemantauan dan analisis perkembangan parameter *stress testing* Risiko Likuiditas insidental serta *recovery plan*.
 - h. Melakukan analisa penilaian/*asesment* Risiko Likuiditas pada produk, aktivitas dan transaksi baru/*eksisting* Bank.
 - i. Menyusun *review Risk Appetite* Risiko Likuiditas.
 - j. Menyusun *review* parameter dan pengukuran Profil Risiko Likuiditas.
4. Risiko Operasional
- a. Menyusun *review* Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Operasional.
 - b. Menyusun *review* Kebijakan dan Prosedur *Business Continuity Management* (BCM).
 - c. Melakukan analisa identifikasi risiko operasional dengan *me-review risk issues* di segenap unit organisasi.
 - d. Menyusun laporan publikasi kuantitatif eksposur Risiko Operasional.
 - e. Menyusun laporan terkait Risiko Operasional untuk kebutuhan Internal dan Eksternal.
 - f. Melakukan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar.
 - g. Menyusun hasil Pemantauan Risiko Operasional di segenap unit organisasi.
 - h. Menyusun Kajian Risiko Operasional.
 - i. Pengembangan Aplikasi *Self Assessment* dan implementasinya di Divisi/Satuan/Unit/Wilayah/Cabang Dalam dan Luar Negeri serta Sentra.
 - j. Menyusun hasil pengembangan Aplikasi *Loss Event Database* (LED) dan Implementasinya di Divisi/Satuan/Unit, Wilayah/Cabang Dalam Negeri serta Sentra.
 - k. Menyusun hasil pengembangan Aplikasi *Key Risk Indicator* (KRI) dan Implementasinya di Divisi/Satuan/Unit.
 - l. Pengadaan *Operational Risk Management Solution* (ORMS).
 - m. Evaluasi dokumen *Business Continuity Management* (BCM), *Risk and Threat Analysis* (RTA) dan *Business Impact Analysis* (BIA).
 - n. Menyusun hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap implementasi BCM di segenap unit organisasi.
 - o. Menyusun hasil Pemantauan dan Evaluasi Optimalisasi fungsi *Data Centre* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan *Command Centre* (CC) serta penentuan *Alternate Site* di segenap unit organisasi.
 - p. Melakukan analisa penilaian/*assessment* Risiko Operasional pada produk, aktivitas dan transaksi baru/*eksisting* Bank.
 - q. Menyusun *review Risk Appetite* Risiko Operasional.
 - r. Menyusun *review* parameter dan pengukuran Profil Risiko Operasional.
5. Risiko Hukum
- a. Melakukan *review* Kebijakan Manajemen Risiko Hukum.
 - b. Melakukan *review* Kebijakan Hukum.
 - c. Melakukan analisis/kajian hukum dalam bentuk pemberian *advis* tertulis dan lisan.
 - d. Melaksanakan penyuluhan/pelatihan hukum.
 - e. Melakukan *legal review* terhadap perjanjian non standar dengan menggunakan metode perhitungan *scoring system*.
 - f. Melakukan pendampingan terhadap unit bisnis terkait dengan aktivitas bisnis.
 - g. Menangani dan menyelesaikan perkara hukum.
 - h. Melakukan supervisi penanganan perkara.
 - i. Melakukan penilaian/*assessment* Risiko Hukum pada produk, aktivitas dan transaksi baru/*eksisting* Bank.
 - j. Melakukan *review* parameter dan pengukuran Profil Risiko Hukum.
6. Risiko Reputasi
- a. Melakukan *review* Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.
 - b. Menyampaikan surat jawaban/tanggapan kepada media massa terkait *komplain*/keluhan nasabah terhadap BNI.
 - c. Menjaga reputasi dan *image* BNI terhadap seluruh *stakeholders*.
 - d. Melakukan penilaian/*assessment* Risiko Reputasi pada produk, aktivitas dan transaksi baru/*eksisting* Bank.
 - e. Melakukan *review* parameter dan pengukuran Profil Risiko Reputasi.
7. Risiko Strategik
- a. Melakukan *review* Kebijakan Manajemen Risiko Strategik.
 - b. Melakukan penajaman strategi dan target jangka panjang dalam *Corporate Plan* 2019-2023 yang fokus pada pengembangan bisnis berbasis *digital*.
 - c. Menyusun rencana jangka pendek dalam Kebijakan Umum Direksi (KUD) dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi dan persaingan industri, serta *competitive assessment* terhadap *peers*.
 - d. Menyusun rencana jangka menengah dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan memperkuat *alignment* strategi unit dalam upaya mencapai strategi dan target *corporate*.
 - e. Melakukan sosialisasi strategi dan target yang sudah ditetapkan dalam KUD dan RBB kepada segenap Divisi/Satuan/Unit/Wilayah.
 - f. Melakukan penyempurnaan organisasi yang

- berkesinambungan, khususnya dengan penguatan kantor cabang dan wilayah, penataan fungsi pendukung bisnis, dan *review* proses bisnis organisasi yang berkaitan dengan model bisnis *digital*.
- g. Mempertajam informasi dan ulasan mengenai kondisi ekonomi dan bisnis dunia, nasional, wilayah dan potensi bisnis perusahaan anak terkini untuk memperluas wawasan dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis.
 - h. Menyusun Kajian terkait sektor prioritas BNI (meliputi *Overview* Industri, karakteristik industri, *Key Success Factor* dan *Key Risk Factor*, perkembangan Industri yang dikaji, portfolio pembiayaan BNI dan *Lesson learned* atas pembiayaan tersebut, serta *Outlook* Industri).
 - i. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap realisasi pencapaian strategi dan target yang sudah ditetapkan dalam KUD, RBB dan *Business Plan* Unit.
 - j. Melakukan *review* dan *monitoring* produk dan aktivitas baru khususnya terkait produk dan aktivitas *digital*.
 - k. Melakukan penilaian/*assessment* Risiko Strategik pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank.
 - l. Melakukan *review* parameter dan pengukuran Profil Risiko Strategik.
8. Risiko Kepatuhan
- a. Melakukan *review* Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan.
 - b. Mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank.
 - c. Memastikan Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Ketentuan Regulator dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.
 - e. Mengelola *Whistle Blowing System* (WBS) dan *Strategy Anti Fraud*.
 - f. Menyusun dan menyempurnakan *compliance tools/system* dan media komunikasi (*Compliance Forum*).
 - g. Mengimplementasikan dan mengevaluasi *compliance index*.
 - h. Melakukan penilaian/*assessment* Risiko Kepatuhan pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank.
 - i. Melakukan *review* parameter dan pengukuran Profil Risiko Kepatuhan.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BNI

Penerapan Manajemen Risiko BNI memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Mengelola risiko yang melekat pada produk, aktivitas dan kegiatan usaha/bisnis BNI yang relatif kompleks.

2. Memberikan gambaran kepada Manajemen mengenai kemungkinan kerugian yang dialami pada masa mendatang.
3. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi.
4. Memelihara dan meningkatkan penilaian Profil Risiko BNI secara individu, konsolidasi maupun terintegrasi sebagai Konglomerasi Keuangan.
5. Mengelola struktur permodalan yang memadai untuk meng-cover risiko yang mungkin timbul.
6. Memberikan dasar pengukuran kinerja yang lebih akurat.
7. Menciptakan dan memelihara posisi strategis dan reputasi BNI.
8. Menciptakan keunggulan kompetitif dan memelihara pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan nilai (*shareholder value*) BNI.

Implementasi Manajemen Risiko BNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari regulator yaitu dengan menerapkan 4 (empat) pilar penerapan Manajemen Risiko yang pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan:

1. Menyusun kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko termasuk limit risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi BNI serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan.
2. Menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko di BNI.
3. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
4. Melakukan evaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
5. Menetapkan struktur organisasi BNI termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
6. Melaksanakan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko termasuk Penilaian Profil Risiko BNI.
7. Memastikan seluruh risiko BNI yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti.
8. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).



9. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko BNI secara efektif.
10. Mengembangkan budaya manajemen risiko di BNI termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.
11. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independent.

Pelaksanaan fungsi pengawasan Direksi dilakukan melalui forum Rapat Direksi (Radisi), Rapat Komite Risiko dan Kapital (KRK) Sub Komite Manajemen Risiko (RMC), Sub Komite Assets & Liabilities (ALCO), Sub Komite Anti Fraud (KAF), forum Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Prosedur Perkreditan (KPP).

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan antara lain dengan:

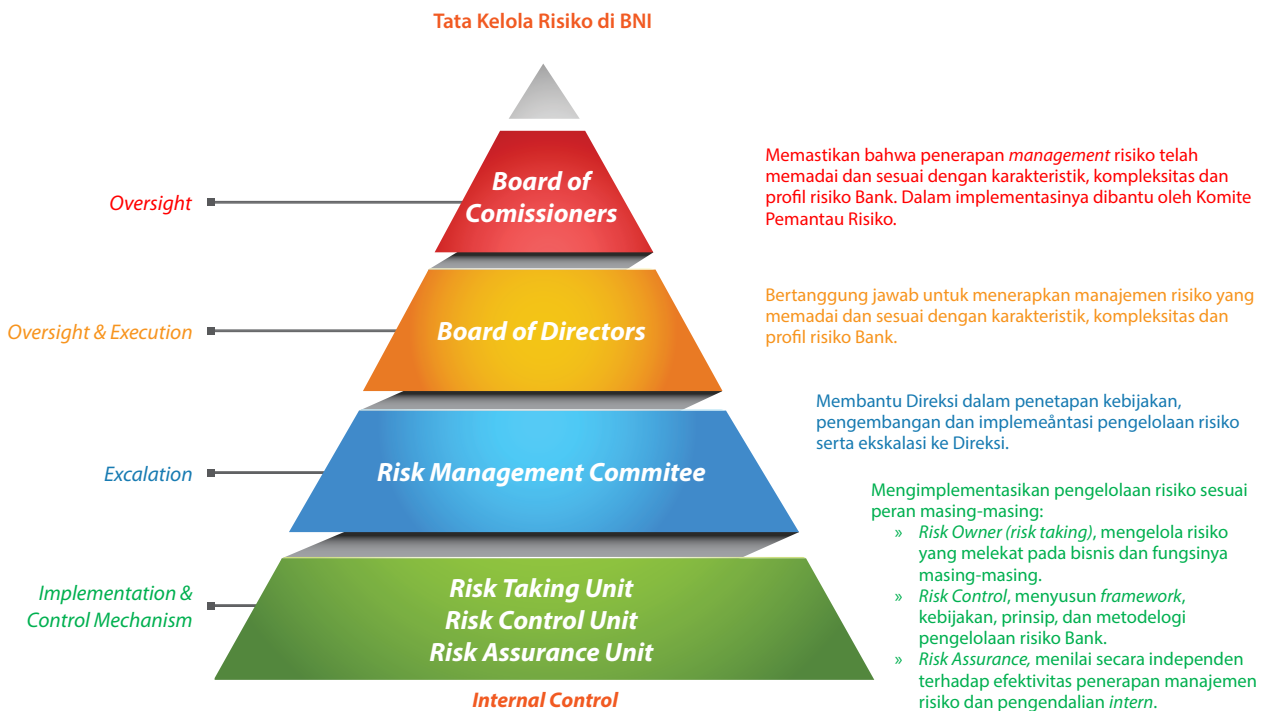
1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko BNI termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk*

appetite) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

2. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
3. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko BNI.
4. Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko BNI secara keseluruhan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris (Radikom), maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Audit.

Agar implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif, maka pelaksanaannya didasarkan pada Tata Kelola Risiko yang telah ditetapkan. Tata Kelola Risiko mengatur dengan jelas peran dan tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, keterkaitan antar fungsi-fungsi pengelolaan Risiko, serta penetapan kebijakan yang memastikan bahwa Risiko dikelola dengan baik.



KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT

Untuk mendukung implementasi Manajemen Risiko secara efektif, BNI telah menyusun kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang komprehensif dan terintegrasi. BNI telah memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai kebijakan yang menjadi acuan dasar yang bersifat strategis dan komprehensif dalam penerapan Manajemen Risiko. Prosedur Manajemen Risiko merupakan tata cara yang

menjadi panduan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko. Sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko, Bank wajib mengelola 8 (delapan) jenis Risiko, BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan terhadap masing-masing Risiko. Ketentuan secara detail dari masing-masing prosedur diatur dalam petunjuk teknis. Hirarki penetapan kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis digambarkan pada bagan berikut:



Hirarki Penetapan Kebijakan



Sebagai salah satu metode pengendalian Risiko, BNI juga telah memiliki limit Risiko. Limit risiko merupakan ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan oleh manajemen. Penetapan limit risiko BNI mencakup limit per Risiko (Risiko kredit, Risiko pasar, dan Risiko likuiditas), limit per aktivitas fungsional maupun limit secara keseluruhan.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit Risiko tersebut secara berkala dilakukan *review* dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO.

Proses manajemen risiko BNI mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Proses identifikasi risiko dilakukan untuk menganalisa sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya. Beberapa hal yang diperhatikan dalam proses identifikasi risiko adalah:

1. Identifikasi seluruh risiko dilakukan secara berkala.
2. Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis BNI.
3. Secara khusus melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan aktivitas baru, sebelum produk/aktivitas baru diperkenalkan atau dijalankan.

Proses pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang ditetapkan oleh regulator atau dengan menggunakan metode internal untuk metode yang belum ditetapkan secara khusus. Untuk mengantisipasi kondisi yang bersifat ekstrim, pengukuran risiko di BNI juga dilengkapi dengan *stress testing* untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

Proses pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik antara lain melalui pemantauan terhadap mitigasi dan limit risiko yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional (*risk taking unit*) sebagai pemilik risiko (*risk owner*) maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai *risk control unit*. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan secara berkala antara lain Kajian Portofolio Pinjaman, Laporan Pemantauan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, Laporan Beban Risiko Operasional, *Feedback Operational Risk Self Assessment*, *Internal Risk Report*, Penilaian Profil Risiko, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, dan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko.

Proses pengendalian risiko dilakukan terutama untuk mengelola risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BNI. Strategi pengendalian risiko yang dilakukan oleh BNI adalah mengurangi risiko (*risk mitigation*), menerima risiko (*risk acceptance*), menghindari risiko (*risk avoidance*) dan memindahkan risiko (*risk transfer*).

Sistem Informasi Manajemen Risiko BNI dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dan memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat digunakan dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.

Beberapa aplikasi manajemen risiko telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan proses manajemen risiko secara tepat waktu dan akurat antara lain *Credit Risk Management System (CRMS)*, *Internal Rating System*, *Scoring System*, Perangkat Risiko Operasional (PERISKOP), dan aplikasi manajemen risiko pasar.

BNI telah menyiapkan solusi manajemen risiko yang sejalan dengan IT *Strategic Plan*, di antaranya:

1. Menyiapkan aplikasi *front end* untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional
2. Menyiapkan data *storage* dan *information system*.
3. *Capital calculation engine*



SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem pengendalian intern di BNI diimplementasikan dengan menggunakan model *Three Lines of Defense* yang terdiri atas: *First line of defense* dilakukan oleh Satuan Kerja Operasional (*risk taking unit*) sebagai *risk owner* yang melakukan pengelolaan risiko terhadap risiko yang melekat di bisnis dan fungsinya (*day-to-day risk management and control*).

Second line of defense atau *risk control unit* dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Tata Kelola Kebijakan dan Divisi Kepatuhan yang bertugas mendorong seluruh jajaran organisasi melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan internal.

Sebagai *Third line of defense* atau *risk assurance unit*, BNI memiliki Satuan Pengawasan Internal sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). *Risk Assurance* unit melakukan penilaian secara independen terhadap kesesuaian proses penerapan Manajemen Risiko dan sistem pengendalian intern dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan secara internal serta kesesuaian dengan ketentuan regulator.

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

Dalam implementasi manajemen risiko, perlu keselarasan antara strategi dan tujuan bisnis dengan strategi risiko dan *risk appetite*. Strategi risiko dan *risk appetite* tersebut implementasinya diterjemahkan ke dalam tata kelola, proses, kebijakan serta perangkat dan metodologi yang didukung oleh teknologi informasi, sumber daya manusia dan budaya risiko yang kuat.



Strategi manajemen Risiko dirumuskan sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*). Tujuan penetapan strategi manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa eksposur risiko telah dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Strategi manajemen risiko disusun mencakup beberapa prinsip yakni:

1. Berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha BNI.
2. Bersifat komprehensif, dapat mengendalikan dan mengelola risiko BNI baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dan terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
3. Terpenuhinya kecukupan modal yang dipersyaratkan serta alokasi sumber daya yang memadai.



Strategi manajemen risiko disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada eksposur risiko BNI.
2. Organisasi BNI, termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.
3. Kondisi keuangan termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan BNI dalam mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan internal.
4. Bauran serta diversifikasi portofolio internal.

Strategi manajemen risiko dirumuskan sesuai dengan strategi bisnis dan harus mampu memberikan arahan secara keseluruhan dalam aktivitas pengelolaan risiko. Strategi manajemen risiko terdiri atas 4 (empat) komponen utama yaitu:

1. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*)
2. Prinsip dan kebijakan manajemen risiko
3. Tata kelola risiko
4. Jenis eksposur risiko dan kondisi pasar

Jenis dan besarnya eksposur risiko diukur dengan menggunakan metodologi pengukuran risiko yang sesuai dengan ketentuan Regulator, dan harus dikaitkan dengan *risk appetite*, *risk tolerance*, limit yang telah ditetapkan serta ketersediaan dan perencanaan modal.

Tata kelola penetapan strategi manajemen risiko

1. Strategi Manajemen Risiko menjadi salah satu dasar (acuan) dalam penetapan strategi bisnis yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) BNI yang ditetapkan secara tahunan dan disampaikan kepada Regulator.
2. Strategi manajemen risiko disusun dan dipersiapkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, diputus oleh Direksi melalui Rapat Komite Risiko dan Kapital Bidang Manajemen Risiko dan dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.

Strategi Manajemen Risiko dikomunikasikan oleh Direksi kepada Divisi/Unit/Satuan Kerja dan di-review secara berkala sejalan dengan perubahan strategi bisnis, dengan memperhatikan kondisi perekonomian, bisnis perbankan, adanya perubahan ketentuan oleh Regulator serta dampaknya terhadap kinerja keuangan bank.

PROFIL RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

JENIS RISIKO

Terdapat 10 (sepuluh) jenis risiko yang sekurang-kurangnya harus dikelola, yaitu:

1. Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank, seperti pemberian kredit, pembelian surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontijensi, di mana pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar.
2. Risiko Pasar
Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar meliputi Risiko suku bunga (*interest rate risk*), Risiko nilai tukar (*foreign exchange risk*), Risiko ekuitas (*equity risk*) dan Risiko komoditas (*commodity risk*). Sebagai Bank, BNI dilarang melakukan transaksi ekuitas (saham) dan komoditas. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas dan komoditas diterapkan dalam hal melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
3. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko Likuiditas BNI dapat terjadi akibat ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas yang disebabkan oleh:
 - a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
 - b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.
4. Risiko Operasional
Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-



kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Risiko operasional bersumber antara lain dari proses internal, sumber daya manusia (SDM), sistem dan infrastruktur teknologi informasi, serta kejadian eksternal.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum BNI dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko reputasi BNI dapat timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai BNI yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi BNI yang kurang efektif

7. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko strategik BNI dapat terjadi antara lain karena penetapan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi BNI, analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik (*strategic plan*) antar level. Selain itu, risiko strategik BNI juga dapat timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Risiko kepatuhan BNI dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas BNI yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas BNI yang menyimpang atau bertentangan dari standar secara umum.

9. Risiko Intra-Grup.

Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas

lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana

10. Risiko Asuransi.

Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

UPAYA PENGELOLAAN RISIKO BNI

Untuk mengelola risiko secara efektif dan komprehensif diperlukan infrastruktur manajemen risiko yang mencakup Tata Kelola dan Organisasi (termasuk SDM), Kebijakan dan Prosedur, Proses Manajemen Risiko, Perangkat dan Metode Pengukuran (termasuk Kuantifikasi Model Risiko), dan didukung oleh Teknologi Informasi serta Budaya Risiko yang kuat.

Proses Manajemen Risiko untuk masing-masing risiko yang telah dikembangkan dan diimplementasikan di BNI adalah sebagai berikut:

Risiko Kredit

Identifikasi risiko kredit dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko kredit berikut dampaknya, yang dilaksanakan berkala disesuaikan dengan karakteristik produk dan jenis aktivitasnya. Identifikasi risiko kredit juga dilakukan dengan penyusunan analisa Risiko Industri pada sektor ekonomi prioritas.

Pengukuran risiko kredit merupakan bagian dan rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses penerapan manajemen risiko kredit dan digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko.

Untuk pemrosesan pada eksposur individu segmen *business banking*, BNI telah memiliki model pemeringkatan (*rating*) debitur berupa *internal rating system*, sementara untuk segmen konsumen digunakan sistem skoring debitur untuk membantu dalam menganalisa kualitas debitur dalam proses perkreditan.

Untuk mengatur komposisi portofolio, BNI telah memiliki *Loan Exposure Limit* (LEL) yang berfungsi membatasi risiko konsentrasi eksposur pinjaman setiap sektor ekonomi pada masing-masing segmen, dan menjadi pedoman unit bisnis



untuk melakukan ekspansi pinjaman. Untuk menilai risiko setiap jenis industri, BNI telah memiliki *Industry Risk Rating* (IRR) serta Standar Rasio Keuangan yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam penilaian kualitas debitur dari sisi industri.

BNI menggunakan metode *Standardized Approach* untuk perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit dalam menilai kecukupan pemenuhan Kewajiban Peenyeediaan Modal Minimum (KPMM).

Saat ini BNI juga sedang melakukan pengembangan *Impairment Model* terkait dengan penerapan standar akuntansi terbaru (IFRS 9).

Dalam rangka melengkapi sistem pengukuran risiko kredit, dilakukan *stress testing* yaitu dengan mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja BNI terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi faktor yang berdampak signifikan terhadap portofolio dan kecukupan permodalan BNI.

Stress testing dilakukan secara berkala atau dapat juga dilakukan setiap saat disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan kondisi perekonomian atau sesuai kebutuhan/permintaan regulator.

Divisi ERM menyusun metodologi/model *stress testing* risiko kredit dengan memperhatikan karakteristik produk atau aktivitasnya serta diselaraskan dengan aturan/kebutuhan regulator.

Pemantauan risiko kredit bertujuan untuk melihat dan memastikan pelaksanaan seluruh proses pengelolaan risiko kredit berjalan baik dan potensi risiko kredit yang ada masih dalam limit risiko yang diperkenankan. Pemantauan risiko kredit antara lain dilakukan melalui pemantauan portofolio pinjaman yaitu pertumbuhan, kualitas dan konsentrasi pinjaman, pemantauan eksposur pinjaman dibandingkan dengan *Loan Exposure Limit*, maupun pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Pengendalian Risiko Kredit dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang lebih dalam akibat Risiko Kredit yang didukung dengan beberapa perangkat manajemen risiko kredit baik pada tataran eksposur individu maupun portofolio.

Risiko Pasar

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar dilakukan oleh unit yang independen dari unit bisnis. Identifikasi Risiko Pasar terutama dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas baru.

Tujuan Identifikasi Risiko Pasar antara lain adalah:

1. Menentukan transaksi/produk yang terekspos Risiko Pasar.
2. Mengelompokkan Risiko Pasar berdasarkan kriteria yang ada.
3. Memudahkan pengukuran Risiko Pasar dan pengendaliannya.

Pengukuran Risiko Pasar secara periodik dilakukan terhadap seluruh portofolio *trading book* dan *banking book* yang terekspos Risiko Pasar. BNI melakukan pengukuran Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar dan Metode Internal. Metode Standar digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Risiko Pasar, sementara pengelolaan Risiko Pasar harian menggunakan Metode Internal (*Value at Risk*).

Cakupan portofolio yang dihitung dalam KPMM dengan menggunakan Metode Standar adalah portofolio *trading book* untuk risiko suku bunga serta portofolio *trading book* dan *banking book* untuk risiko nilai tukar Dalam Negeri dan Kantor Cabang Luar Negeri.

Proses pemantauan dan pelaporan Risiko Pasar dilakukan secara periodik, mencakup:

1. Pemantauan dan pelaporan besarnya Risiko Pasar atas seluruh portofolio Bank yang terekspos Risiko Pasar.
2. Pemantauan dan pelaporan terhadap kepatuhan limit Risiko Pasar (realisasi eksposur Risiko Pasar dibandingkan limitnya).
3. Rekomendasi tindak lanjut atas terjadinya pelampauan limit dan/atau terjadinya kondisi pasar yang tidak normal, dan/atau terjadinya kondisi lainnya yang mengarah pada peningkatan potensi Risiko Pasar.

Pengendalian Risiko Pasar dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang lebih dalam akibat Risiko Pasar melalui penetapan limit-limit risiko pasar di Divisi Tresuri maupun Kantor Cabang Luar Negeri antara lain sebagai berikut:

1. *Value at Risk Limit* (VaR Limit), yang merupakan maksimum potensi kerugian yang mungkin terjadi pada waktu tertentu di masa datang dengan tingkat kepercayaan tertentu.
2. *Stress Value at Risk Limit* (SVaR Limit), yang merupakan pengukuran risiko pasar yang disesuaikan dengan kondisi tidak normal di pasar atau maksimum potensi kerugian saat pasar tidak normal.
3. *Budget Loss Limit* yang dipergunakan untuk membatasi realisasi kerugian aktivitas bisnis.
4. *Management Action Trigger* (MAT), yaitu batasan untuk melakukan tindakan terhadap risiko perubahan nilai yang merugikan (*early warning signal*). MAT melengkapi *loss limit* berupa persentase tertentu dari *loss limit*.
5. Limit pembelian surat berharga yang digunakan untuk membatasi konsentrasi pembelian surat berharga



korporat berdasarkan rating dan jenis mata uang surat berharga.

6. *Limit asset and liability repricing gap (Interest Rate Risk in Banking Book)* untuk membatasi risiko suku bunga dalam *banking book*.
7. *Nominal open position limit*, yaitu batas maksimum nominal *open position* yang dapat dilakukan *dealer*.
8. Limit internal PDN keseluruhan (*absolut*), yaitu batas maksimum pengelolaan PDN.

Risiko Likuiditas

Identifikasi Risiko Likuiditas merupakan proses memperoleh dan menganalisis sumber-sumber Risiko Likuiditas yang melekat pada seluruh aktivitas bisnis/transaksi/produk yang dapat memberikan dampak finansial bagi Bank.

Setiap aktivitas/produk/transaksi dianalisis dan dibedakan untuk memastikan bahwa setiap Risiko Likuiditas telah diidentifikasi, diukur secara akurat, dikelola sesuai dengan metode yang tepat, dan dikendalikan dengan baik.

Pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas, dan membangun kekuatan likuiditas struktural neraca bank untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan.

Metode Pengukuran Risiko Likuiditas meliputi rasio likuiditas, profil maturitas, proyeksi arus kas, *stress testing*, dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Proses pemantauan dan/atau pelaporan Risiko Likuiditas dilakukan secara periodik, mencakup:

1. Pemantauan dan pelaporan besarnya Risiko Likuiditas atas seluruh aktivitas/produk Bank yang terekspos Risiko Likuiditas.
2. Pemantauan dan pelaporan terhadap kepatuhan limit Risiko Likuiditas (realisasi eksposur Risiko Likuiditas dibandingkan limitnya).
3. Pemantauan indikator (internal dan eksternal) peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas.
4. Rekomendasi tindak lanjut atas terjadinya pelampauan limit dan/atau terjadinya kondisi pasar yang tidak normal, dan/atau terjadinya kondisi lainnya yang mengarah pada peningkatan potensi Risiko Likuiditas.

Dalam mengelola likuiditas, selain mengelola *primary reserve* (kas dan GWM), BNI menjaga dan mempertahankan *secondary reserve* untuk memastikan likuiditas berada pada level yang aman. Sebagai cadangan *secondary reserve*, BNI menjaga dan mempertahankan *tertiary reserve*. Penetapan dan pemantauan limit, yaitu limit Pagu Kas BNI *Wide*, *limit Secondary Reserve Ideal (SR Ideal)*, *limit Profil Maturitas*, dan pembatasan Kredit Valas berdasarkan Ketersediaan Dana dilakukan secara berkala oleh Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM). Sedangkan ketersediaan atas keseluruhan *reserve* dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan oleh Divisi Tresuri (TRS) dan Divisi ERM.

Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional BNI terdiri dari 5 (lima) proses utama yang berkesinambungan yaitu identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian.

1. Identifikasi Risiko

Metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional, antara lain: *Risk Control Self Assessment (RCSA)*, *risk mapping*, *Key Risk Indicators (KRI)*, *scorecards*, *event analysis*, matriks frekuensi, metodologi kuantitatif, dan metodologi kualitatif. Implementasi dari metode-metode identifikasi dan pengukuran risiko operasional tersebut di BNI terangkum dalam suatu aplikasi, yaitu PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). PERISKOP merupakan suatu *tools* atau perangkat yang digunakan dalam pengelolaan risiko operasional termasuk untuk melakukan pencatatan kejadian kerugian, menyusun tindak lanjut serta melakukan mitigasinya.

2. Penilaian Risiko

Dilakukan oleh masing-masing unit pemilik risiko melalui metode *operational risk self assessment*, mencakup penilaian atas dampak, frekuensi dan penyebab risiko serta solusinya.

3. Pengukuran Risiko

Sesuai dengan aturan Regulator, pengukuran risiko operasional saat ini menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*).

4. Pemantauan Risiko

Dilakukan oleh seluruh unit sebagai *first line of defense* terhadap risiko utama pada saat aktivitas operasional sedang berlangsung. Divisi Manajemen Risiko Bank melakukan evaluasi dan laporan/*feedback* atas penilaian risiko berdasarkan hasil *self assessment* serta realisasi atas kerugian risiko operasional yang terjadi, meliputi:

- a. *Feedback report* untuk seluruh divisi/satuan/unit/wilayah/cabang.
- b. Laporan bulanan Pemantauan Beban Risiko Operasional, disampaikan kepada Direksi
- c. Laporan Profil Risiko Operasional

5. Pengendalian Risiko

Mekanisme mitigasi risiko operasional tergambar pada proses pengendalian internal dengan menerapkan 4 (empat) strategi mitigasi risiko, yaitu hindari, kurangi, transfer dan terima. Keempat strategi mitigasi risiko tersebut tertuang dalam prosedur mitigasi Risiko Operasional yang meliputi prosedur pengendalian, prosedur penyelesaian transaksi, prosedur akuntansi, prosedur penyimpanan aset dan kustodian, prosedur penyediaan produk dan prosedur pencegahan *Fraud*.

Business Continuity Management

Gangguan atau bencana yang diakibatkan oleh faktor alam, perbuatan manusia, maupun sistem dapat terjadi pada fungsi-fungsi usaha BNI yang kritical sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas bisnis dan layanan BNI.

Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka BNI telah menerapkan Manajemen Keberlangsungan Usaha/*Business Continuity Management* (BCM) di segenap unit baik di dalam maupun di luar negeri, yang diharapkan dapat meminimalisir risiko operasional pada saat terjadinya kondisi darurat atau bencana.

Pengembangan perangkat tersebut sejalan dengan peraturan Regulator yang mewajibkan bank untuk melaksanakan proses pengendalian risiko dalam mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, serta selaras dengan persyaratan pada dokumen Basel II yang mewajibkan Bank untuk memiliki pengelolaan keberlangsungan usaha dan rencana darurat (*Business Continuity Management* dan *Contingency Plan*) guna memastikan kemampuan Bank untuk dapat tetap beroperasi dan membatasi kerugian jika terjadi gangguan terhadap aktivitas bisnisnya. Selain peraturan Regulator dan Basel II, untuk Kantor Cabang Luar Negeri, BCM diimplementasikan dengan memenuhi regulasi BCM di negara setempat.

Risiko Hukum

Proses identifikasi risiko hukum dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko hukum yang sekurang-kurangnya dilakukan terhadap risiko hukum dari produk dan aktivitas usaha BNI serta risiko hukum dari produk dan aktivitas baru melalui proses pengendalian manajemen risiko hukum sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Proses identifikasi risiko hukum yang melekat pada Bank dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter:

1. Faktor Litigasi
2. Faktor Kelemahan Perikatan
3. Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan

Pengukuran risiko hukum dilakukan berdasarkan perhitungan menggunakan indikator/parameter dalam identifikasi risiko hukum yang dibandingkan dengan modal Bank. Hasil pengukuran risiko hukum tercermin dalam Profil Risiko Hukum. Pemantauan risiko hukum dilakukan guna mengevaluasi eksposur risiko hukum yang melekat terutama yang bersifat material atau yang berdampak pada permodalan Bank. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko hukum tersebut dilaporkan secara berkala termasuk tindak lanjut yang diperlukan.

Pelaksanaan proses pengendalian risiko hukum digunakan BNI untuk mengelola risiko hukum terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BNI. Proses pengendalian Risiko Hukum, dilakukan antara lain dengan:

1. Melakukan penilaian/*assessment* berupa kajian yuridis dalam hal terdapat produk baru atau aktivitas baru atau terdapat penambahan/perubahan fitur atas produk Bank.
2. Memberikan advis hukum dan/atau pendampingan hukum dalam hal terdapat Risiko Hukum dalam aktivitas operasionalnya.
3. Melakukan *review* berkala terhadap format standar perjanjian, khususnya perjanjian kredit, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku.
4. Melakukan *review* secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara BNI dengan pihak lain, khususnya untuk perjanjian non standar atau perjanjian yang belum dibakukan dalam Pedoman Perusahaan.
5. Melakukan pemantauan secara intensif atas permasalahan hukum, khususnya gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan BNI sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat.

Risiko Reputasi

Untuk melakukan identifikasi dan mengukur dampak Risiko Reputasi, BNI menggunakan beberapa sumber informasi antara lain pemberitaan media massa, situs Bank dan analisis jejaring sosial, pengaduan nasabah melalui layanan nasabah dan kuesioner kepuasan nasabah.

Pemantauan terhadap pemberitaan (*news management*) dan pengelolaan krisis komunikasi serta *monitoring* opini/komentar *news media* atau sosial media dilakukan secara berkoordinasi antara Divisi Manajemen Risiko Bank dengan Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan, sedangkan pengelolaan *komplain*/keluhan nasabah dilakukan bekerja sama dengan BNI *Contact Center* (BCC).

Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan (KMP) melakukan pemantauan dan melaporkan Risiko Reputasi yang terjadi kepada Direksi baik secara insidentil pada saat terjadinya risiko reputasi maupun secara berkala termasuk tindak lanjut yang diperlukan. BNI telah mengembangkan mekanisme dalam melakukan tindakan pengendalian risiko reputasi yang efektif. Secara umum, pengendalian risiko reputasi dilakukan melalui 2 (dua) hal, yaitu:

1. Pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan risiko reputasi.
2. Pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko reputasi.



Risiko Kepatuhan

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan dengan menganalisis beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan seperti jenis dan kompleksitas kegiatan usaha BNI, termasuk produk dan aktivitas baru, jumlah (*volume*) dan materialitas ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat.

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter berupa:

1. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
2. Frekuensi pelanggaran (*track record* kepatuhan Bank);
3. Pelanggaran terhadap ketentuan transaksi keuangan tertentu.

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kepatuhan, indikator/parameter serta besarnya bobot dan rasio yang digunakan untuk mengukur profil risiko kepatuhan ditetapkan oleh Divisi Kepatuhan dengan memperhatikan masukan dari Direksi, Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM) dan Unit lainnya maupun Regulator, bila ada. Divisi Kepatuhan melakukan pemantauan dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi baik secara insidental pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala.

Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BNI telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan BNI terhadap komitmen yang dibuat kepada Regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Pengendalian risiko kepatuhan tidak hanya dilakukan terhadap unit organisasi yang ada di dalam negeri tetapi termasuk juga unit organisasi yang ada di luar negeri.

Risiko Strategik

Identifikasi risiko strategik dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor risiko strategik yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan BNI misal karena adanya kebijakan yang tidak tepat, kurang responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, implementasi kebijakan yang tidak sesuai rencana, atau karena implementasinya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur Profil Risiko Strategik. Pengukuran risiko strategik menggunakan empat parameter, yaitu: kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi bisnis BNI terhadap pesaing dan pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB).

Divisi Perencanaan Strategis (REN) melakukan pemantauan realisasi strategi *Business Plan* tiap-tiap Divisi/Unit sehingga dapat diidentifikasi permasalahan implementasi strategi dan program kerja untuk segera diperbaiki agar target keuangan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Risiko Intra-Grup

Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Risiko Asuransi

Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

PENILAIAN RISIKO BNI

Penilaian Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko. Dalam menilai Profil Risiko, Bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana ketentuan regulator.

PENILAIAN RISIKO INHEREN

Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Bank.

Karakteristik risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri di mana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.

Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*).

PENILAIAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai Kualitas Penerapan Manajemen Risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

1. tata kelola Risiko;
2. kerangka Manajemen Risiko;
3. proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta
4. kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

HASIL PENILAIAN PROFIL RISIKO

Hasil *self assessment* Profil Risiko BNI secara Individu posisi 31 Desember 2018 adalah peringkat 2 (*low to moderate*) dengan Peringkat Risiko *Inherent low to moderate* dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) *Satisfactory*.

IMPLEMENTASI BASEL III

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMU), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sesuai Profil Risiko.

Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai Profil Risiko, Bank juga wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang meliputi *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer*, dan *Capital Surcharge* untuk *Bank Systemic*. Berdasarkan hasil perhitungan kecukupan modal BNI posisi 31 Desember 2018, CAR BNI sebesar 18,5% masih berada di atas kewajiban permodalan yang dipersyaratkan sebesar 12,9%, yaitu persyaratan sesuai Profil Risiko (peringkat 2) dan tambahan modal penyangga (*buffer*) yaitu *Conservation Buffer* 1,875%, *Countercyclical Buffer* (0%), dan *Capital Surcharge* (1,125%).

Selain itu, untukantisipasi implementasi Basel III terkait likuiditas BNI juga telah melakukan penyempurnaan manajemen risiko likuiditas berupa penerapan perhitungan

Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan perhitungan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas manajemen risiko likuiditas. Perhitungan LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank dengan memelihara *High Quality Liquid Assets* (HQLA) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama periode 30 hari ke depan dalam kondisi krisis, sedangkan NSFR bertujuan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan BNI mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan. Berdasarkan hasil perhitungan posisi 31 Desember 2018, LCR BNI sebesar 192% dan uji coba NSFR BNI sebesar 134%, masih berada di atas kewajiban minimal yang dipersyaratkan sebesar 100%.

PERBAIKAN DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN RISIKO

Untuk pengembangan ke depan, BNI telah merencanakan beberapa inisiatif untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas penerapan manajemen risiko, antara lain:

1. Peningkatan Kapabilitas Risiko Kredit
 - a. Membenahi manajemen risiko dan proses kredit – Sinkronisasi *Watchlist* dan IRS Online dengan Proyek Pengembangan *Internal Rating Based (IRB) Model* beserta *Rating System Structure*, yang bertujuan sebagai solusi untuk:
 - i. Memberikan hasil terbaik (*best return*), mengevaluasi dan menganalisis strategi dan menopang proses pengambilan keputusan dengan mengembangkan *risk based pricing*, *risk based performance* dan *portfolio management*.
 - ii. Melakukan pemantauan (*tools monitoring*) terhadap *performance* debitur korporasi, menengah dan kecil.
 - iii. Perhitungan CKPN sesuai dengan PSAK 71.
- Manfaat pengembangan IRB Model bagi BNI antara lain untuk:
- i. Meningkatkan kualitas kredit BNI.
 - ii. Membantu unit bisnis dalam melakukan seleksi calon debitur.
 - iii. Menjadi *early warning signal* dalam memantau debitur kelolaan, sehingga mengurangi *provision* yang perlu dibentuk.
- b. Implementasi *Integrated Decision Automated System* (IDEAS) yang dapat menjadi *tools* bagi BNI untuk bergerak lebih fleksibel dan cepat dalam menangkap perubahan pasar yang dinamis dan kompetitif, dengan tetap meminimalkan risiko melalui



implementasi *credit scorecard* melalui penggunaan data *customer* yang lebih komprehensif pada seluruh *customer life cycle*.

2. Peningkatan Kapabilitas Risiko Operasional
Untuk memenuhi aturan regulator dan mendukung pengelolaan risiko operasional BNI yang lebih baik dan komprehensif, diperlukan suatu perangkat/solusi yang dapat melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional, termasuk *Business Continuity Management* (BCM).

Perangkat/solusi tersebut berupa aplikasi solusi *Operational Risk Management* (ORM) dan *Business Continuity Management* (BCM) memiliki kapabilitas:

- a. *Risk Control Self Assessment* (RCSA).
- b. *Loss Event Database* (LED).
- c. *Key Risk Indicator* (KRI).
- d. *Business Continuity Management* (BCM).

Dengan adanya perangkat/solusi manajemen risiko operasional, maka dapat memberikan manfaat besar bagi BNI, sebagai berikut:

- a. Melakukan proses pengelolaan risiko operasional di segenap unit BNI dalam suatu solusi yang terintegrasi yang diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas manajemen risiko Bank.
 - b. Memiliki basis data risiko operasional yang komprehensif, akurat dan tepat waktu.
 - c. Menyediakan analisa data dan pelaporan Manajemen Risiko Operasional.
 - d. Pengelolaan risiko operasional dan BCM yang lebih baik.
3. Peningkatan Kapabilitas Risiko Pasar
Sesuai ketentuan regulator, pada tahun 2019 segenap Bank diminta untuk mengukur dampak perubahan suku bunga pada *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book/IRRBB*). Metode perhitungan dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu metode *Net Interest Income* (NII) dan metode *Economic Value of Equity* (EVE). Bank diminta untuk melakukan simulasi *shock* suku bunga dengan 6 (enam) skenario sesuai Basel dan melihat dampaknya terhadap profitabilitas dan modal Bank. Dengan mempertimbangkan kompleksitas data,

produk, dan model yang digunakan, saat ini sedang dikembangkan aplikasi perhitungan IRRBB sehingga diharapkan hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat.

4. Peningkatan Kapabilitas Integrasi Risiko
Salah satu inisiatif untuk peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah melalui pengembangan budaya risiko yang kuat. Budaya risiko merupakan bentuk kolektif tata nilai, sikap dan persepsi dari setiap individu atau kelompok di perusahaan terhadap risiko dan pengelolaannya. Keberadaan Budaya Risiko sangat memengaruhi efektivitas implementasi manajemen risiko dan pada akhirnya pencapaian kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Hal-hal yang akan dilakukan adalah melakukan evaluasi budaya risiko di BNI saat ini dengan menggunakan metode *survey*, mengidentifikasi gap atau kelemahan berdasarkan hasil *survey*, mengidentifikasi gap atau kelemahan berdasarkan hasil *survey* serta menyusun strategi upaya perbaikan.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Secara umum, cakupan pengaturan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan antara lain:

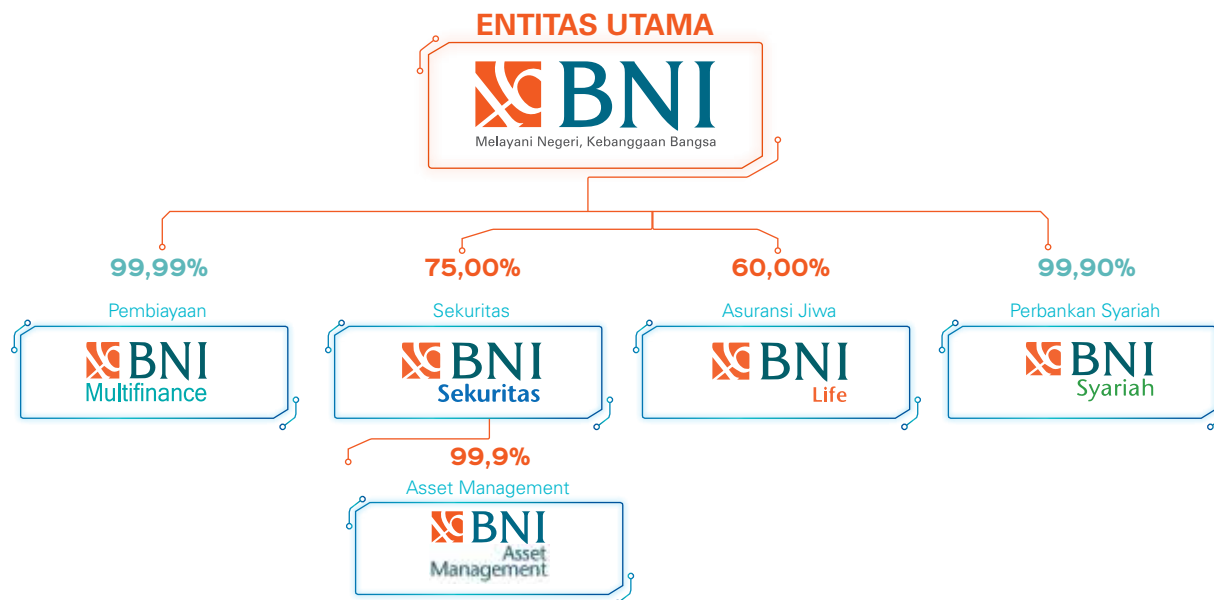
1. Konglomerasi Keuangan (KK) wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Konglomerasi Keuangan meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai berikut:
 - a. Bank
 - b. Perusahaan Asuransi/Reasuransi
 - c. Perusahaan Efek
 - d. Perusahaan Pembiayaan
3. Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Entitas Utama. Dalam hal struktur KK terdiri dari LJK induk dan LJK anak, Entitas Utama adalah LJK induk.

BNI telah membentuk Struktur Konglomerasi Keuangan, BNI sebagai perusahaan induk merupakan Entitas Utama serta memiliki 5 (lima) Lembaga Jasa Keuangan sebagai anggota Konglomerasi Keuangan BNI yaitu BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Life, BNI Sekuritas dan BNI Asset Management.



Struktur Konglomerasi Keuangan BNI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan cfm. Surat Direksi No. Dir/102 tanggal 13 Maret 2015, sebagai berikut:

Gambar Struktur Konglomerasi Keuangan BNI



Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan BNI memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing LJK yang dituangkan dalam Pakta Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama/Presiden Direktur dan Komisaris Utama segenap LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BNI.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi yang efektif, mencakup 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, BNI sebagai Entitas Utama telah melakukan hal-hal berikut:

1. Pilar I : pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama, yaitu:
 - a. Membentuk Struktur Konglomerasi Keuangan BNI;
 - b. Menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - c. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - d. Menyusun Pakta Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama segenap LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BNI;
 - e. Melaksanakan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
 - f. Direksi menyusun Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi (KUMRT) dan Kebijakan Permodalan Terintegrasi serta melakukan review paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - g. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi (KUMRT) dan Kebijakan Permodalan Terintegrasi serta melakukan evaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - h. Menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI
2. Pilar II : Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi, yaitu:
 - a. Menyusun dan melakukan *review* Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi (KUMRT) dan Manajemen Permodalan Terintegrasi;
 - b. Menyusun Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk Prosedur Pengelolaan Risiko Transaksi Intra-grup;
 - c. Menyusun Prosedur Penilaian Profil Risiko Terintegrasi;



- d. Menyusun Prosedur Manajemen Permodalan Terintegrasi; serta
 - e. Menetapkan limit risiko terintegrasi dan mekanisme eskalasi pelampauan limit.
3. Pilar III : Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi dan sistem informasi Manajemen Risiko terintegrasi, yaitu:
- a. Menetapkan metodologi Profil Risiko Terintegrasi serta melakukan penilaian setiap semester dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan .
 - b. Menetapkan metodologi perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi, melakukan perhitungan setiap semester dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan .
 - c. Menetapkan parameter dan metodologi *risk appetite* terintegrasi, melakukan pemantauan tiap triwulan dan dilaporkan kepada Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - d. Menetapkan parameter dan metodologi Limit Risiko Terintegrasi, melakukan pemantauan setiap triwulan dan dilaporkan kepada Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - e. Menetapkan parameter dan metodologi penilaian *Leading Risk Indicator* (LRI), melakukan pemantauan secara bulanan dan dilaporkan kepada Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - f. Melakukan *stress testing* terintegrasi volatilitas nilai tukar dan suku bunga pada Konglomerasi Keuangan BNI.
 - g. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi berbasis teknologi.
4. Pilar IV : Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, yaitu:
- a. Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko Terintegrasi kepada segenap LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BNI secara berkelanjutan.
 - b. Melakukan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi segenap LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNI.

HASIL PENILAIAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI

Hasil penilaian Profil Risiko Terintegrasi dilakukan terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko posisi 31 Desember 2018 adalah peringkat 2 (*Low to Moderate*) dengan Peringkat Risiko Inheren *Low to Moderate* dan Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) *Satisfactory*.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam Sistem Pengendalian Intern, yang dituangkan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) BNI mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, dan telah sejalan dengan kerangka COSO dan *Basel Committee – Internal Control*, dengan mencakup 5 (Lima) elemen utama yang saling berkaitan dalam sistem pengendalian internal bank, yaitu:

1. Pengawasan manajemen dan budaya pengendalian
2. Identifikasi dan penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi
5. Kegiatan Pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan

TUJUAN PENGENDALIAN

Tujuan Sistem Pengendalian Intern di BNI adalah:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan (Tujuan Kepatuhan).
Dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha BNI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh BNI.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu (Tujuan Informasi).
Dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha BNI (Tujuan Operasional).
Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan asset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi BNI dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi BNI secara menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko).
Dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di BNI secara berkesinambungan.



LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian dan langkah-langkah Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional BNI.

Unsur-unsur lingkungan pengendalian di BNI meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai;
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen BNI;
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi pegawai;
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia;
5. Atensi dan arahan manajemen BNI dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko.
6. Faktor-faktor eksternal yang memengaruhi operasional BNI dan penerapan manajemen risiko.

Sistem Pengendalian Intern BNI meliputi:

1. Pengendalian stratejik, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap strategi ataupun kebijakan yang ditetapkan telah sesuai dengan tujuan, visi dan misi BNI.
2. Pengendalian operasional, bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional.
3. Pengendalian pelaporan, bertujuan memastikan kualitas setiap informasi/pelaporan yang dihasilkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan baik internal maupun eksternal.
4. Pengendalian ketaatan, bertujuan untuk memastikan tingkat ketaatan terhadap hukum, peraturan dan perundangan yang terkait dengan operasional.

PENILAIAN RISIKO

Sistem penilaian (pengukuran) risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko sebagai acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Penilaian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang wajib dikelola oleh BNI yaitu:

1. Penilaian Risiko Kredit.
Penilaian Risiko Kredit dilakukan antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Jumlah, kualitas serta komposisi eksposur neraca dan rekening administratif.
 - b. Tingkat risiko kredit debitur/pihak lawan transaksi.
 - c. Karakteristik kredit.
 - d. Kondisi lingkungan bisnis.
 - e. *Rating system* dan *scoring system*.
 - f. *Stress testing*.
2. Penilaian Risiko Pasar.
Penilaian risiko pasar dilakukan terhadap seluruh portofolio *trading book* dan *banking book*. Penilaian risiko pasar pada *trading book* antara lain mencakup:
 - a. Pengukuran sensitivitas risiko pasar – metode standar.
 - b. Agregasi menggunakan *Value at Risk* (VaR) – model internal.
 - c. *Stress Testing*.

Penilaian risiko pasar pada *banking book* antara lain mencakup:

- a. Pengukuran risiko suku bunga pada *banking book*.
 - b. Pengukuran risiko nilai tukar pada *banking book*.
3. Penilaian Risiko Operasional.
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai risiko operasional di BNI adalah *Self Assessment*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit (*risk owner*) dalam mengidentifikasi operational *risk issue* di masing-masing unit, mencari penyebab, mengukur potensi kerugian yang mungkin timbul serta mencari solusi untuk mengatasinya.
Risiko operasional diklasifikasikan dalam kategori dan sub kategori untuk memfasilitasi penilaian, pengendalian dan pelaporan risiko atas 7 (tujuh) peristiwa risiko operasional, yakni:
 - a. Kecurangan internal;
 - b. Kejahatan eksternal;
 - c. Praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja;
 - d. Klien, produk dan praktik bisnis;
 - e. Kerusakan aset fisik;
 - f. Gangguan bisnis dan kegagalan sistem; dan
 - g. Eksekusi, pengiriman dan manajemen proses.
 4. Penilaian Risiko Likuiditas.
Penilaian risiko likuiditas dilakukan untuk mengukur dan memantau kebutuhan pendanaan bersih (*net funding*) secara berkelanjutan.
Proses penilaian risiko likuiditas mencakup:
 - a. Penilaian rasio likuiditas.
 - b. Penilaian profil maturitas.
 - c. Proyeksi arus kas.
 - d. *Stress Testing*
 5. Penilaian Risiko Hukum.
Penilaian/pengukuran risiko hukum dapat menggunakan indikator/parameter berupa potensi kerugian yang timbul akibat tuntutan litigasi, kelemahan perikatan serta ketiadaan/terjadinya perubahan peraturan/perundang-undangan yang mendasari penerbitan suatu produk atau jasa.
 6. Penilaian Risiko Stratejik.
Penilaian/pengukuran risiko stratejik dapat menggunakan indikator/parameter berupa kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi bisnis BNI terhadap pesaing, dan pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB).



7. Penilaian Risiko Kepatuhan.
Penilaian/pengukuran risiko kepatuhan dapat menggunakan indikator/parameter berupa jenis, signifikansi dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku serta pelanggaran terhadap ketentuan transaksi keuangan tertentu.
 8. Penilaian Risiko Reputasi.
Penilaian/pengukuran risiko reputasi dapat menggunakan indikator/parameter berupa pengaruh reputasi dari pemilik BNI dan perusahaan terkait, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerja sama bisnis BNI, frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif Bank, serta frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.
- ### AKTIVITAS PENGENDALIAN
- Aktivitas pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan dalam mengendalikan suatu risiko.
- Kegiatan Pengendalian.
- a. Kegiatan Pengendalian secara Umum.
Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai termasuk Direksi, direncanakan dan dilakukan untuk memastikan arahan manajemen telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus tertuang dalam kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan secara efektif dan mendorong tindakan antisipasi risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasional.
 - b. Kegiatan Pengendalian sesuai Fungsi Organisasi.
Sistem Pengendalian Intern yang efektif membutuhkan penetapan struktur pengendalian sesuai dengan struktur organisasi, yang mencakup:
 - 1). Kaji Ulang Manajemen (*Top Management Reviews*)
Direksi aktif meminta presentasi dan laporan kinerja secara berkala, sehingga dapat mengevaluasi perkembangan BNI terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan harus sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang disusun dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan (*risk tolerance*) dan penetapan limit.
 - 2). Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Reviews*)
Kaji ulang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal secara periodik.
 - 3). Pengendalian Sistem Informasi
Mencakup verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi dan otorisasi, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
 - 4). Pengendalian Aset Fisik
Aktivitas pengendalian mencakup pengamanan aset, membatasi akses terhadap komputer dan file data.
 - 5). Dokumentasi, mencakup dokumentasi kebijakan, prosedur, sistem & standar akuntansi serta proses audit secara memadai.
- c. Kegiatan pengendalian sesuai jenis risiko
Aktivitas pengendalian telah dituangkan dalam dokumen kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi risiko-risiko (dhi. Risiko pasar, likuiditas, kredit, operasional, hukum, kepatuhan, reputasi dan strategis).
- 1). Pengendalian Risiko Kredit.
 - a. Pengawasan kredit meliputi semua aspek perkreditan serta semua objek pengawasan tanpa pengecualian
 - b. Pengendalian intern perkreditan
 - 2). Pengendalian Risiko Pasar.
Untuk tujuan pengendalian, proses identifikasi dan pengukuran risiko pasar dilakukan oleh unit yang independen dari kegiatan bisnis, dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam pengendalian risiko pasar adalah:
 - a. Menyetujui dan memvalidasi usulan model/metode yang dapat digunakan dalam pengukuran risiko pasar.
 - b. Melakukan pengembangan model-model pengukuran risiko pasar.
 - c. Memeriksa kebenaran perhitungan risiko pasar berdasarkan laporan risiko yang diterima.
 - d. Menentukan *confidence* level yang dipergunakan.
 - e. Menetapkan parameter untuk *stress testing* risiko pasar.
 - f. Mengusulkan model dan parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko pasar oleh Divisi Tresuri.
 - g. Melakukan pengukuran risiko pasar.
 - h. Melakukan *back testing* dan *stress testing*;
 - 3). Pengendalian Risiko Operasional.
Pengelolaan dan pengendalian risiko operasional dilakukan melalui koordinasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan Satuan Kerja Operasional secara berjenjang. Peran dan dukungan yang dibutuhkan dari Satuan Kerja Operasional adalah:
 - a. Menyampaikan laporan eksposur risiko secara periodik/insidental kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko

- b. Memastikan bahwa pengelolaan risiko berada pada masing-masing Satuan Kerja Operasional (*risk taking unit/risk owner*), sehingga unit tersebut harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko yang melekat pada transaksi/aktivitas secara harian.

Prosedur Rencana Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Plan/BCP*). Pengendalian risiko operasional juga mencakup prosedur rencana kelangsungan usaha (*Business Continuity Plan/BCP*). BCP adalah suatu mekanisme formal/rencana yang merupakan kombinasi antara strategi, kebijakan, prosedur dan organisasi yang dikembangkan untuk memastikan kelangsungan operasional dari fungsi-fungsi usaha yang kritis pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadinya gangguan atau bencana.

- 4). Pengendalian Risiko Likuiditas.
Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan:
 - a. Melakukan pemantauan serta mengambil langkah alternatif strategi pada setiap *traffic light Secondary Reserve(SR)* yakni: *Dark Green, Light Green, Light Yellow, Dark Yellow dan Red*.
 - b. Melakukan strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intra-group yang diatur dalam Kebijakan *Global Funding*, Kebijakan Pengelolaan Aset dan Kebijakan *Asset & Liability Management*.
- 5). Pengendalian Risiko Hukum.
Pengendalian risiko hukum dilakukan dengan memastikan bahwa perjanjian BNI dengan pihak ketiga telah mengamankan kepentingan BNI. Pengendalian risiko hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang berfungsi mengelola risiko hukum, antara lain melalui:
 - a. Penilaian/*assessment* berupa kajian yuridis, dalam hal adanya rencana penambahan/ pengembangan produk atau aktivitas baru.
 - b. Pemberian *advis hukum*, dan/atau pendampingan hukum dalam hal terdapat risiko hukum dalam aktivitas operasional.
 - c. *Review* secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian/*agreement* dengan pihak lain.
- 6). Pengendalian Risiko Strategik.
Pengendalian risiko strategik dilakukan dengan:
 - a. Melakukan kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang dituangkan antara lain dalam bentuk *review* terhadap implementasi dan pencapaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank melalui pertemuan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Radikom), Rapat Direksi (Radisi), Rapat Sektor

dan *Business Review*.

- b. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.
- 7). Pengendalian Risiko Kepatuhan.
Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan melalui tindakan yang bersifat *ex-ante (preventif)* yang bertujuan:
 - a. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha di BNI telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan yang berlaku.
 - b. Memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang telah ditetapkan.
- 8). Pengendalian Risiko Reputasi.
Pengendalian risiko reputasi dilakukan dengan:
 - a. Mengelola, menindaklanjuti dan mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan risiko reputasi dengan segera.
 - b. Mengembangkan mekanisme yang andal dalam melakukan tindakan pengendalian risiko reputasi yang efektif.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

Informasi tersebut meliputi:

1. Informasi internal dan eksternal yang diperoleh dan disampaikan kepada Manajemen terkait dengan kinerja pencapaian tujuan perusahaan.
2. Informasi yang dihasilkan mencukupi dan tepat waktu sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif dan efisien.

Sistem informasi yang diperlukan meliputi:

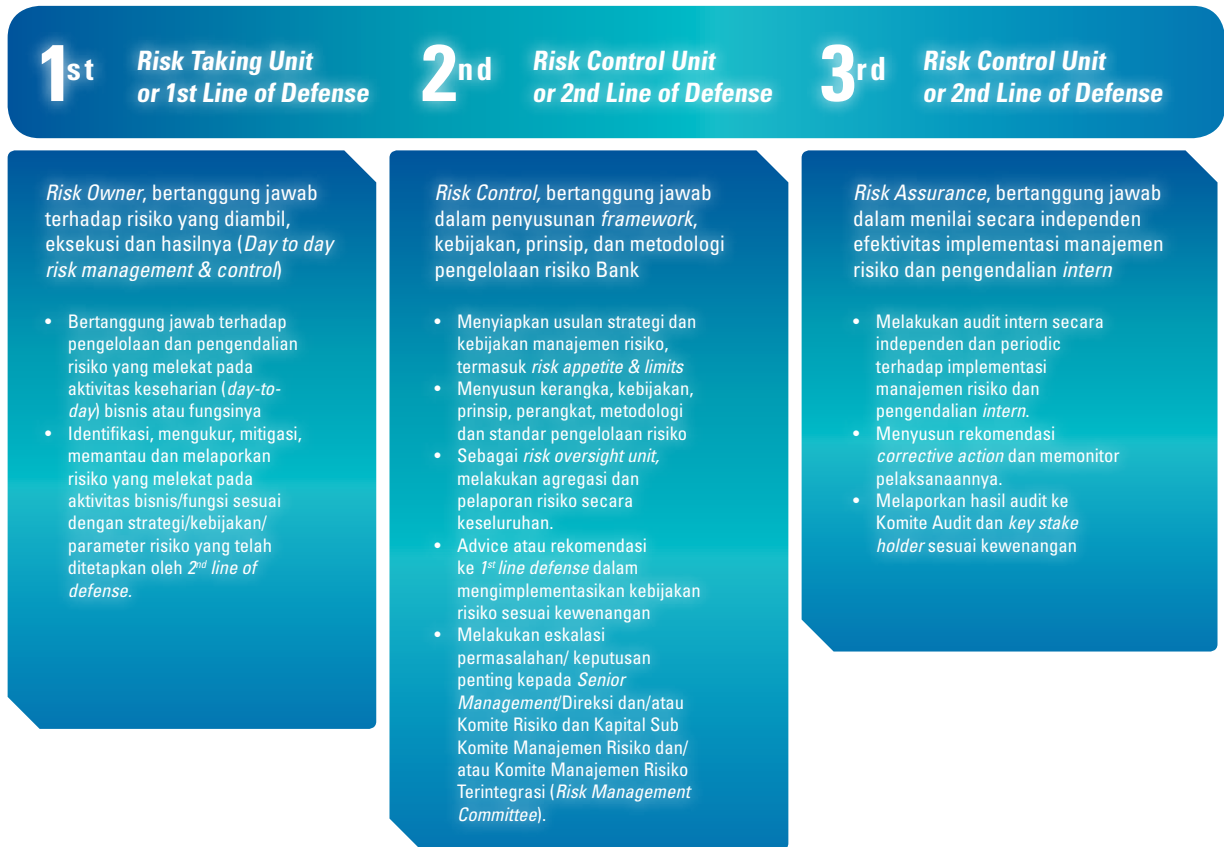
1. Pengembangan dan *up grade* sistem informasi, didasarkan pada rencana strategis sistem informasi serta dikaitkan dengan strategi perusahaan secara keseluruhan dan pencapaian tujuan perusahaan.
2. Sistem yang digunakan untuk menghasilkan informasi, baik sistem elektronik maupun manual dengan memenuhi syarat:
 - a. Aman;
 - b. Dipantau secara independen; dan
 - c. Didukung oleh ketentuan *contingency plan* (rencana darurat) yang memadai.

Pada saat memproses informasi dalam format elektronik, sistem yang digunakan harus memiliki jejak audit (*audit trail*) yang memadai.



AKTIVITAS PEMANTAUAN

Pemantauan aktivitas BNI pada unit bisnis maupun unit fungsional dilakukan melalui *three lines of defenses*, yakni:



EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pedoman Perusahaan (PP) Sistem Pengendalian Intern dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan usaha BNI secara signifikan. Secara umum untuk tahun 2018, faktor yang memengaruhi perubahan PP Sistem Pengendalian Intern adalah *update* Regulasi, terkait dengan:

1. Restrukturisasi kredit
2. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor perbankan.

Hasil *self assessment* kecukupan Sistem Pengendalian Intern secara BNI Individu untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BNI Individu	Risiko Kredit	Risiko Pasar	Risiko Likuiditas	Risiko Operational	Risiko Hukum	Risiko Strategik	Risiko Kepatuhan	Risiko Reputasi	Risiko Komposit
Peringkat	2,51	1,93	1,60	2,29	1,50	1,90	1,88	1,55	2,08

Kecukupan Sistem Pengendali Intern BNI secara komposit pada peringkat 2 (*Low to Moderate*), yang berarti memadai. Dalam hal masih terdapat kelemahan minor yang perlu mendapatkan perhatian manajemen.

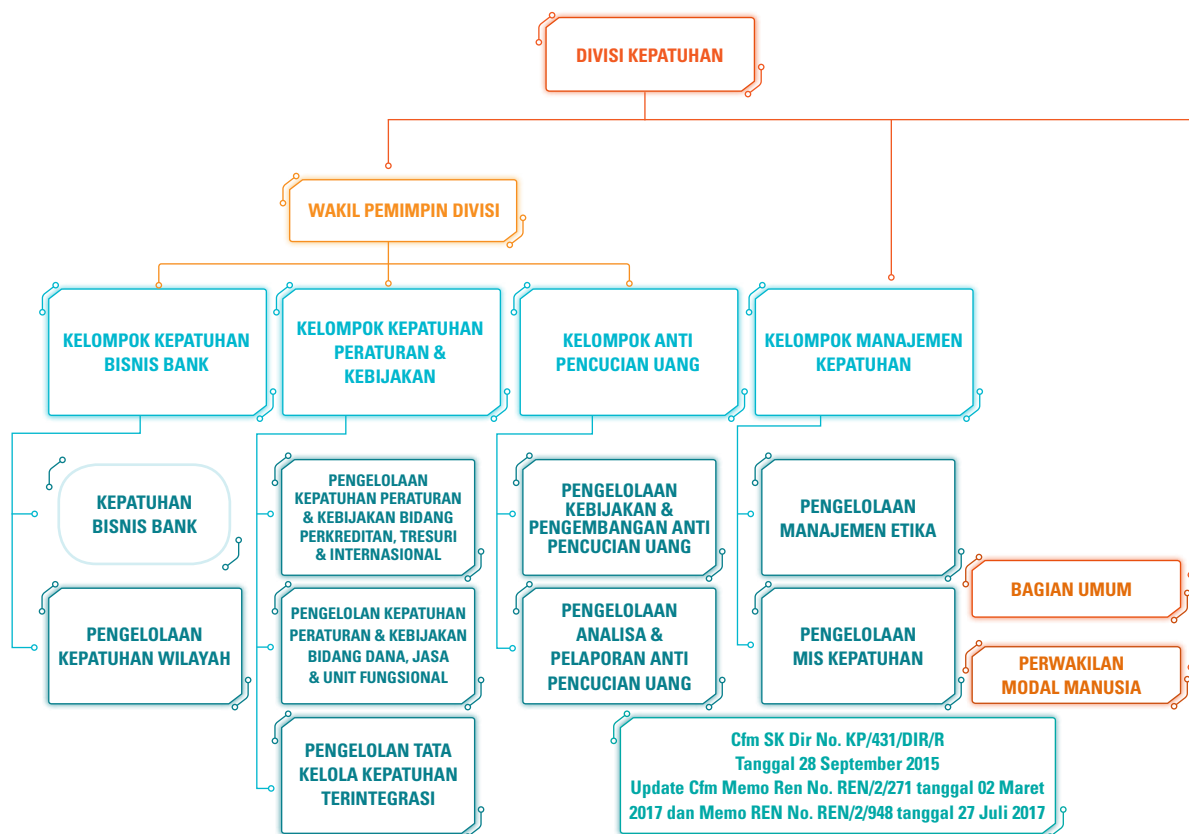
FUNGSI KEPATUHAN

BNI merupakan lembaga keuangan yang melakukan aktivitas berdasarkan prinsip kepercayaan, agar mampu tumbuh secara sehat dan berkelanjutan diperlukan landasan *good corporate governance* yang kuat serta penerapan prinsip-prinsip *prudential banking* yang konsisten, salah satunya melalui pelaksanaan kepatuhan bank. Berangkat dari kesadaran di atas, maka BNI telah menargetkan salah satu sasaran perseroan dalam misi kelima perusahaan yakni "Menjadi Acuan Pelaksanaan Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Industri".



Berdasarkan misi tersebut perseroan, pelaksana kepatuhan tidak hanya untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga suatu kebutuhan organisasi. Dengan demikian kepatuhan harus dibangun menjadi sebuah budaya (*culture*) yang terinternalisasi dan terorganisasi.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA KEPATUHAN



Dalam pelaksanaan kepatuhan, BNI memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk Divisi Kepatuhan sebagai pelaksana fungsi kepatuhan. Selain hal tersebut, Dewan Komisaris BNI juga terlibat melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kepatuhan bank.

PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS TERHADAP FUNGSI KEPATUHAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris serta pemenuhan PBI terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dilaksanakan dengan cara:

1. Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan bank paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan bank.

Dewan Komisaris BNI secara langsung ataupun melalui Komite di bawah Komisaris, secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan saran perbaikan melalui sarana pertemuan atau melalui laporan berkala, seperti:

1. Pertemuan berkala Dewan Komisaris dengan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;
2. Pertemuan berkala Komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan/atau Komite Tata Kelola Terintegrasi) dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan/atau Divisi Kepatuhan;
3. Laporan yang disampaikan secara berkala antara lain Laporan Kepatuhan, Laporan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Laporan terkait pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Laporan uji kepatuhan terhadap keputusan Rapat Direksi dan Laporan penerapan Strategi Anti *Fraud*.



DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di BNI saat ini adalah Sdr. Endang Hidayatullah selaku Direktur Kepatuhan BNI. Pengangkatan dan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Ketentuan Umum, Ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), serta ketentuan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Di Sektor Perbankan, yang antara lain mengatur:

1. Wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No. 13/KDK.03/2018 tanggal 5 Juli 2018, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Sdr. Endang Hidayatullah selaku Direktur Kepatuhan.
2. Wajib memenuhi persyaratan independensi, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dilarang dijabat atau memanfaatkan tenaga kerja asing.
5. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama.
6. Tidak membawahkan fungsi-fungsi: bisnis operasional, manajemen risiko yang mengambil keputusan pada kegiatan bank, *treasury*, keuangan, akuntansi, logistik, pengadaan, teknologi informasi dan audit internal. Berdasarkan struktur organisasi BNI yang berlaku bahwa Direktur Kepatuhan BNI membawahi organisasi sebagai berikut:
 - a. Divisi Kepatuhan
 - b. Divisi Hukum
 - c. Divisi Manajemen Modal Manusia
 - d. BNI *Corporate University*

Secara umum tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/agar keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, seperti memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, BI maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
8. Selain tugas dan tanggung jawab di atas, dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan memiliki tugas untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi serta menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama atau Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka penyempurnaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi.

SATUAN KERJA KEPATUHAN

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Selain itu, Divisi Kepatuhan juga ditetapkan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

Dalam rangka pelaksanaan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Divisi Kepatuhan BNI ditetapkan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing – masing Perusahaan Anak (PA) dalam Konglomerasi Keuangan BNI, antara lain mencakup :

1. Menyelaraskan metodologi Pengelolaan Risiko Kepatuhan termasuk Pelaksanaan ketentuan APU dan PPT.
2. Mengintegrasikan dan menyelaraskan kebijakan dan prosedur fungsi kepatuhan, termasuk kebijakan dan prosedur APU dan PPT.
3. Memastikan kepatuhan PA atas pelaksanaan kewajiban pelaporan internal dan eksternal.
4. Mengembangkan SDM Satuan Kerja Kepatuhan dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
5. Memastikan penerapan Strategi Anti Fraud di PA dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

PROFIL PEMIMPIN SATUAN KERJA KEPATUHAN

Pemimpin Divisi Kepatuhan saat ini adalah Sdr Risang Widoyoko, dalam menentukan dan menetapkan Pemimpin Divisi Kepatuhan manajemen senantiasa memperhatikan syarat minimum sebagai berikut.



1. Memenuhi persyaratan independensi.
2. Menguasai ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar fungsi kepatuhan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan budaya kepatuhan (*compliance culture*).

Risang Widoyoko

(24 April 2018 – Saat ini)

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada di tahun 1992, dan memperoleh gelar Magister Management pada Fakultas Pasca Sarjana Magister Management Universitas Lambung Mangkurat di tahun 2004. Memimpin Divisi Kepatuhan sejak 24 April 2018 sampai dengan sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan sejak 10 Mei 2017 sampai dengan 23 April 2018.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN

Sesuai SK DIR No. KP/431/DIR/R tanggal 28 September 2015, tugas dan tanggung jawab Divisi Kepatuhan secara garis besar terbagi atas fungsi-fungsi sebagai berikut.

1. Pelaksana Fungsi Kepatuhan;
2. Pelaksana Fungsi yang bertanggung jawab atas Penerapan Program APU dan PPT;
3. Pelaksana Fungsi yang bertanggung jawab atas implementasi Strategi Anti *Fraud* dan *Whistleblowing System* (WBS);
4. Pelaksana Fungsi Kepatuhan Terintegrasi.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN KERJA KEPATUHAN

Dalam rangka menjadikan Divisi Kepatuhan sebagai *strategic partner* bagi setiap lini organisasi, maka pegawai Kepatuhan juga terus ditingkatkan kompetensinya dengan mengikutsertakan dalam pelaksanaan sertifikasi/seminar/*workshop*/pelatihan, seperti:

1. Sertifikasi Manajemen Risiko.
2. Sertifikasi Kepatuhan dan APU PPT.
3. Pelatihan *Environmental, Social and Governance Integration for Banks*.
4. Pelatihan *Talk On Security and Managing Data Breach*.
5. *Workshop* Klasifikasi Pengembangan Aplikasi e-PAK Segmen Menengah dan Segmen Kecil.
6. *Workshop* Ketentuan Pengadaan Alat Media Promosi, Jasa Periklanan dan *Event Organizer*.
7. *Focus Group Discussion* Peranan Penyedia Jasa Keuangan Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Bebas Korupsi Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel.
8. Pelatihan Pembekalan Materi dan Uji Kompetensi Kepatuhan Level 1 & 2.
9. Seminar SWIFT *Business Forum* Indonesia.
10. Pelatihan FKDKP "Penerapan Prinsip Kehati-hatian & Kebijakan APU dalam Bisnis Perbankan".
11. Pelaksanaan *Enhancement Skill For Compliance* (ESCO) yang diikuti oleh segenap RCO dengan beberapa materi antara

lain : Materi *Compliance Review*, Implementasi APU PPT, *Update* Ketentuan Internal dan Eksternal (AYDA, Gugatan Sederhana, *Cleansing Data* dan Risiko Operasional).

12. Diseminasi Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang "Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme".
13. Seminar Nasional "Transparansi dan *Disclosure* Sektor Jasa Keuangan di Indonesia".
14. *Focus Group Discussion* PPAK dengan tema "Peran Penyedia Jasa Keuangan dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Bebas Korupsi Guna Menciptakan Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel".
15. *International Governance, Risk Management & Compliance & Financial Crimes Conference*.
16. Mini Seminar EAP BNI perihal Produktif Mengelola Tekanan Pekerjaan.
17. Seminar tentang Resi Gudang.
18. Seminar tentang Perkembangan Surat Utang Korporasi di Indonesia.
19. Penyelenggaraan Pelatihan *Environmental, Sosial & Governance Integration for Banks*.
20. *Talk on security and managing data breach*.
21. Seminar Indonesia Conference on Governance and Sustainability
22. Penanganan Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum dan Risiko Bisnis
23. *Sosialisasi Usability and Workshop API Management*.
24. Seminar EAP BNI (*How To Raise Independent Children*).
25. Training tentang Sustainable Finance.
26. *Workshop Legal Region* (LGR) 2018.
27. Seminar DBS "Helping Optimise Payments in the digital economy"
28. *Workshop Cyber Security and Banking Technology*.
29. *Training Building Cashless Society*.

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SATUAN KERJA KEPATUHAN TAHUN 2018

Dalam menjalankan kegiatan operasional dengan



kompleksitas usaha yang semakin meningkat, sejalan dengan perkembangan teknologi, informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi semakin besar, sehingga BNI terus berupaya untuk melakukan mitigasi risiko kegiatan usaha bank baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Sejalan dengan peraturan yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 yaitu perlu adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka mendorong terwujudnya budaya kepatuhan di segenap unit organisasi telah disusun dan dilaksanakan program-program *compliance* sebagai berikut:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
 - a. Penyampaian materi kepatuhan melalui hari bulan mutu, *video conference*, *email* (BNI Menyapa) yang mencakup materi pencegahan *fraud*, kasus kelalaian yang sering terjadi, sanksi/denda dari otoritas, temuan audit, APU PPT serta materi WBS.
 - b. Penyampaian *Compliance Reminder* (CORE) setiap periode untuk meningkatkan budaya kepatuhan pegawai dan pelaksanaan *Daily Exercise Employee Program* (DEEP) antara lain terkait dengan materi *Legal Governance Risk & Compliance* (LGRC) dalam media ujian *online* yang dilakukan setiap hari kerja kepada segenap pegawai BNI.
 - c. Pelaksanaan supervisi maupun koordinasi secara intensif dengan unit lain terkait dengan kebijakan, sistem dan prosedur, serta juklak dan juknis baru, dan isu-isu yang perlu diperhatikan antara lain terkait dengan pencegahan terjadinya *fraud*, kasus kelalaian, sanksi eksternal dan merumuskan rekomendasi dan *corrective action* yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing unit.
 - d. Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja BNI bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Budaya Kepatuhan.
 - e. Pelaksanaan pengembangan aplikasi sistem berupa *Compliance Information Management System* (CIMS) yang merupakan suatu sistem informasi, database dan pemantauan atas hasil *review* kepatuhan dan pelaksanaan APU PPT secara *online*.
 - f. Pengukuran *Compliance Index* (CIX) sebagai acuan untuk mengukur dan memastikan bahwa pelaksanaan fungsi kepatuhan berjalan dengan baik.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut Divisi Kepatuhan aktif dalam meminimalkan tingkat risiko kepatuhan. Penilaian

profil risiko kepatuhan secara komposit mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*) kepatuhan.

Secara komposit, Profil Risiko Kepatuhan BNI pada tahun 2018 berada pada level 2 (*low to moderate*), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Risiko Inheren BNI pada tahun 2018 BNI berada pada level 2 (*low to moderate*).
- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada di level 2 (*satisfactory*).

Upaya perbaikan selalu dilakukan oleh Divisi Kepatuhan dalam rangka meminimalisir Risiko Kepatuhan antara lain:

- a. Melakukan identifikasi, pemantauan, dan sosialisasi secara periodik terhadap pemenuhan kewajiban dan hal-hal yang dilarang oleh regulasi sebagai langkah *preventif*.
 - b. Mengingatkan unit organisasi yang menjadi *unit in charge* terhadap pemenuhan kewajiban secara periodik/berkala.
 - c. Membuat langkah-langkah perbaikan (*corrective action*) berdasarkan *database* risiko kepatuhan.
 - d. Memasukkan sanksi dari regulator/pengawas yang merupakan salah satu sumber risiko kepatuhan ke dalam *compliance index*, serta menjadikan *compliance index* sebagai *Key Performance Indicators* (KPI) Divisi Kepatuhan.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/BI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah timbulnya risiko kepatuhan serta mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan maka Divisi Kepatuhan melakukan upaya-upaya preventif (*ex-ante*) dengan melakukan uji kepatuhan untuk memastikan seluruh ketentuan internal maupun aktivitas perbankan tertentu telah mematuhi kaidah perbankan yang berlaku, adapun aktivitas uji kepatuhan tersebut antara lain:

- a. Uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, sistem dan prosedur baru maupun pengembangan (*up-dating*).
- b. Uji kepatuhan/*review* terhadap kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku (*existing*).
- c. Uji kepatuhan terhadap keputusan Rapat Direksi.
- d. Uji kepatuhan terhadap rancangan penerbitan atau pengembangan produk/aktivitas baru.
- e. *Compliance checklist* untuk penilaian kemampuan

- dan keputusan bagi calon Pemegang Saham pengendali, anggota Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- f. *Compliance checklist* terhadap rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa *bancassurance* dan agen penjual reksa dana.
 - g. Uji kepatuhan/*Credit Compliance Review (C2R)* atas usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK).
 - h. Uji kepatuhan/*Procurement Compliance Review (PCR)* atas usulan Dokumen Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
 - i. Uji kepatuhan/*review* terhadap rencana pembukaan dan relokasi kantor bank (kantor wilayah, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor fungsional)
4. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan/BI dan otoritas pengawas lain yang berwenang. Pemantauan komitmen terhadap otoritas pengawas dilakukan bersama dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI).

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI TAHUN 2018

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, Divisi Kepatuhan telah melaksanakan hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan review kecukupan kebijakan/prosedur di PA, yaitu terhadap draft PP Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) – BNI Life Insurance, draft PP Benturan Kepentingan dari BNI Sekuritas dan BNI Asset Management, Buku Pedoman Mekanisme Sistem Pelanggaran (Whistle Blowing System) BNI Multifinance, dan Kebijakan Strategi Anti Fraud (Kebijakan SAF) – BNI Life Insurance.
2. Melakukan analisa ketentuan eksternal terkini yang berdampak bagi PA, dan menyampaikan kepada PA untuk ditindaklanjuti, antara lain yaitu POK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan unit Usaha Syariah, POJK No. 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, POJK No. 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, dan PBI No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.
3. Melakukan pemantauan secara bulanan terhadap business conduct dari Perusahaan Anak berdasarkan regulasi, yang dilakukan dengan metode self assessment

- dan pelaporan secara periodik sebagai sarana pemantauan kepatuhan Perusahaan Anak, dengan pemenuhan parameter business conduct.
4. Menerapkan Compliance Index (CIX) di PA sebagai salah satu sarana monitoring pelaksanaan fungsi kepatuhan di PA dengan menggunakan parameter Fraud, Kasus Kelalaian, Sanksi dan Denda Regulator, serta Pending Temuan Audit Eksternal dan Internal, dari masing – masing PA BNI.
 5. Melakukan analisa terhadap Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang disampaikan oleh PA kepada Divisi Kepatuhan BNI secara triwulanan mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perusahaan terhadap Regulasi Eksternal, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Penerapan APU – PPT.
 6. Melakukan pertemuan dengan masing – masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BNI setiap Triwulan dengan agenda diskusi yaitu tindak lanjut PA atas rekomendasi BNI, perumusan action plan tindak lanjut atas rekomendasi BNI, dan sharing isu – isu dalam Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, termasuk Strategi Anti Fraud dan APU – PPT.

EVALUASI EFEKTIVITAS FUNGSI KEPATUHAN

Secara umum pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik, dengan penjelasan sebagai berikut:

Governance Structure

1. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan telah dilaksanakan secara independen dan terpisah terhadap satuan kerja operasional. Hubungan kerja dengan unit organisasi lainnya adalah sebagai partner yang independen dalam rangka melakukan *review* kepatuhan terhadap aktivitas operasional untuk memastikan kebijakan, prosedur, sistem serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku.
2. Manajemen telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai Satuan Kerja Kepatuhan, antara lain dilakukan dengan:
 - a. Menetapkan kualifikasi dan kompetensi tertentu pada anggota Satuan Kerja Kepatuhan.
 - b. Mengikutsertakan Satuan Kerja Kepatuhan dalam berbagai pelatihan, program sertifikasi kompetensi, maupun seminar.

Governance Process

Divisi Kepatuhan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang meliputi:

1. Membangun budaya kepatuhan kepada segenap lini organisasi BNI, antara lain melalui *Compliance Awareness*



Program, Uji Pemahaman pegawai melalui *Daily Exercise Employee Program* (DEEP), dan penerapan *Compliance Index* (CIX);

2. Pengelolaan Risiko Kepatuhan di BNI mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. Berperan aktif memantau dan menjaga agar kebijakan, prosedur, sistem dan kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan.
4. Memastikan hasil pemeriksaan regulator telah ditindaklanjuti sesuai dengan komitmen yang dibuat dan melaporkan hasil tindaklanjut tersebut kepada regulator.

Governance Outcome

Sebagai *monitoring* pelaksanaan fungsi kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan, Direktur Utama, Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lainnya yang meliputi:

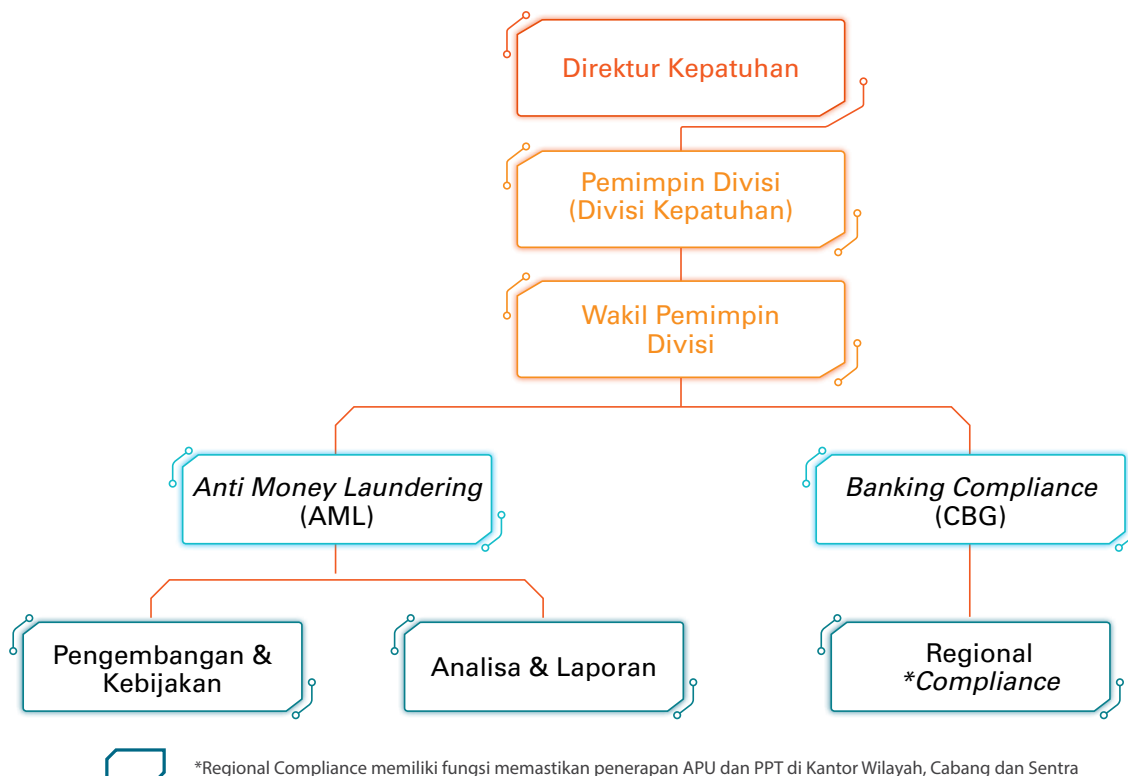
1. Laporan Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Divisi Perencanaan Strategis.
2. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan secara triwulanan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur Utama, dan Dewan Komisaris, serta secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan .

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Untuk mencegah dipergunakannya system perbankan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka Bank dalam menjalankan kegiatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, di mana salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip tersebut adalah Bank wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) secara memadai.

ORGANISASI DALAM PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT

Dalam rangka mendukung penerapan program APU dan PPT, Divisi Kepatuhan ditetapkan sebagai Unit Kerja Khusus (UKK) sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT. Divisi Kepatuhan melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di BNI (Direktur Kepatuhan).



PROGRAM DALAM PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT

Sebagai upaya mencegah dan meminimalisasi penggunaan Bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka BNI menerapkan program APU dan PPT melalui:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektivitas penerapan Program APU dan PPT, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan memengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam penerapan Program APU dan PPT. Bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:



- a. Persetujuan Direksi atas penetapan Divisi Kepatuhan sebagai Unit Kerja Khusus (UKK) yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT;
 - b. Persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris atas Kebijakan APU dan PPT;
 - c. Laporan berkala (bulanan, triwulanan dan semesteran) terkait kewajiban pelaporan dan implementasi Program APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Persetujuan Direksi atas Laporan rencana dan realisasi pengkinian data nasabah;
 - e. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris untuk membahas pelaksanaan Program APU dan PPT.
2. Kecukupan dan efektivitas kebijakan serta prosedur. Divisi Kepatuhan telah menyusun Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT yang secara berkala dilakukan *review/up-dating/penyempurnaan* sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memperkuat penerapan APU dan PPT, maka di setiap prosedur produk dan aktivitas perbankan diatur pula prosedur pelaksanaan APU dan PPT, seperti prosedur *due diligence* untuk masing-masing produk atau aktivitas. Untuk memastikan implementasi Program APU dan PPT telah berjalan sebagaimana mestinya maka dilakukan supervisi oleh Divisi Kepatuhan. Pelaksanaan pengendalian intern. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dalam penerapan APU dan PPT antara lain dilakukan dengan:
 - a. Dimilikinya kebijakan dan prosedur APU dan PPT serta pemantauan internal yang memadai;
 - b. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT baik melalui *firstline (risk taking unit), second line* maupun *third line of defense*; dan
 - c. Dilakukannya pemeriksaan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern.
 3. Sistem manajemen informasi. Untuk mengoptimalkan pemantauan transaksi dalam pelaksanaan Program APU dan PPT, BNI memiliki teknologi system informasi *Enterprise Fraud Management (EFM) System* yang terdiri dari modul : *Anti Money Laundering Detection, Sanction list, Filtering & Screening Terrorist, PEP Screening Detection* dan *Customer Due*

Diligence (CDD) Risk Scoring serta Sistem *Suspect Account to Verify (SAV)* dan selain itu BNI juga telah mengembangkan Sistem Aplikasi *Walk In Customer (WIC)*.

Sistem EFM tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih optimal, khususnya dalam hal pendeteksian/pemantauan transaksi nasabah yang memiliki pola perilaku dan pola transaksi pencucian uang, Sistem SAV untuk mendeteksi transaksi nasabah dengan pola penipuan, sedangkan *system* Aplikasi WIC digunakan untuk memelihara profil WIC.

4. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan. BNI menyelenggarakan pelatihan mengenai penerapan Program APU dan PPT kepada seluruh pegawai secara berkesinambungan. Metode pelatihan adalah sebagai berikut:
 - a. Pelatihan dapat dilakukan secara elektronik/*Online base*, maupun melalui tatap muka;
 - b. Pelatihan melalui tatap muka, dengan pendekatan yaitu:
 - Dilakukan secara interaktif (antara lain : *workshop*), diberikan untuk pegawai yang mendapatkan prioritas secara berkala, dengan topik disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
 - Dilakukan secara satu arah (antara lain : seminar) diberikan untuk pegawai yang tidak mendapatkan prioritas, dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan, dengan topik berupa gambaran umum penerapan Program APU dan PPT.

PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT PADA PERUSAHAAN ANAK DAN KANTOR CABANG DI LUAR NEGERI

Sebagai bentuk tanggung jawab bagi Bank yang memiliki jaringan kantor secara internasional, maka untuk memastikan penerapan APU dan PPT telah berjalan efektif di seluruh jaringan kantor, maka Divisi Kepatuhan juga memantau dan menganalisa serta melakukan supervisi atas penerapan Program APU dan PPT di:

1. Perusahaan Anak di Luar Negeri
2. Kantor Cabang Luar Negeri



PERKARA PENTING

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN

Perkara hukum yang dihadapi BNI untuk periode tahun 2018 meliputi perkara perdata yang disertai tuntutan ganti rugi terhadap Bank dan perkara pidana yang meliputi perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

JENIS PERKARA

PERKARA PERDATA

Perkara Hukum	Jumlah
Perkara dalam proses penyelesaian	241
Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap)	75
Total	316

- Sejumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) perkara perdata yang masih dalam proses penyelesaian, terdiri dari:
 - 225 (dua ratus dua puluh lima) perkara perdata yang merupakan gugatan perdata yang diajukan terhadap BNI dengan disertai tuntutan ganti rugi, antara lain mengenai keberatan/perlawanan debitur atas pelaksanaan eksekusi/lelang agunan, gugatan pihak ketiga atas jaminan kredit, penguasaan jaminan oleh pihak ketiga dan gugatan atas pembebanan bunga dan pinjaman pokok serta gugatan terkait simpanan yang ada di BNI.
 - 14 (empat belas) perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
 - 2 (dua) perkara Tata Usaha Negara (TUN).
- Jumlah perkara perdata yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap) pada tahun 2018 berjumlah 75 (tujuh puluh lima) perkara, dengan rincian sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara selesai dengan amar putusan BNI dimenangkan, sedangkan terdapat 5 (lima) perkara lainnya BNI dikalahkan namun tidak bersifat materil.

PERKARA PIDANA

Perkara Hukum	Jumlah
Perkara dalam proses penyelesaian	7
Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap)	4
Total	11

- Sejumlah 7 (tujuh) perkara pidana yang masih dalam proses penyelesaian, terdiri dari:
 - 7 (tujuh) perkara tindak pidana khusus yang terdiri dari 4 (empat) perkara tindak pidana khusus di bidang kredit dan 3 (tiga) perkara tindak pidana khusus di bidang non kredit.
 - 0 (nol) perkara tindak pidana umum di bidang kredit dan non kredit.
- Sejumlah 4 (empat) perkara pidana yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap) pada tahun 2018, terdiri dari:
 - 2 (dua) perkara tindak pidana khusus yang terdiri dari 2 (dua) perkara tindak pidana khusus di bidang kredit dan 0 (nol) perkara tindak pidana khusus di bidang non kredit.
 - 2 (dua) perkara tindak pidana umum yang terdiri dari 1 (satu) perkara tindak pidana umum di bidang kredit dan 1 (satu) perkara tindak pidana umum di bidang non kredit.

PERKARA PAJAK

Selain perkara perdata dan pidana tersebut, pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) perkara pajak yang masih dalam proses penyelesaian, yakni:

- Perkara mengenai koreksi tarif PPh Badan Tahun Pajak 2013 terkait dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Dalam perkara ini, BNI telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 16 Maret 2018 atas Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-90170/PP/M.IIA/15/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang menolak permohonan Banding yang diajukan oleh BNI. Berdasarkan informasi pada website resmi Mahkamah Agung, saat ini telah terdapat Putusan PK No. 2507 B/PK/PJK/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang amarnya menolak permohonan PK yang diajukan oleh BNI. Adapun BNI sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana Putusan dimaksud.
- Perkara mengenai koreksi tarif PPh Badan Tahun Pajak 2015 antara lain terkait dengan pembebanan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai biaya. Dalam perkara ini, BNI telah mengajukan Surat Keberatan kepada Dirjen Pajak pada tanggal 4 Mei 2018. Saat ini perkara masih dalam pemeriksaan di Dirjen Pajak dan belum terdapat keputusan.



TINGKAT MATERIALITAS PERKARA

Perkara yang memiliki dampak materiil bagi Bank, antara lain:

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	NILAI PERKARA	STATUS PERKARA	PENGARUH/ RISIKO TERHADAP PERUSAHAAN	SANKSI ADMINISTRASI
1	<p>Penggugat: Sdr. AS</p> <p>Tergugat: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. 2. Menteri Keuangan RI 3. Menteri BUMN RI</p>	<p>Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait permintaan pembayaran Obligasi BNI Atas Unjuk tahun 1962-1963 kepada Penggugat (Perkara No. 351/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Pst).</p>	Rp 3.794.418.000.000,-	Saat ini perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perusahaan berisiko melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 3.794.418.000.000,-	Tidak ada
2	<p>Penggugat: Sdr. RA</p> <p>Tergugat: PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.</p>	<p>Gugatan permohonan pembayaran ganti rugi terkait pemindahan barang jaminan kredit oleh Bank yang dikuasai Penggugat (Perkara No. 16/Pdt.G/2018/PN.Klk).</p>	Rp 1.631.713.390.541,6,-	<p>Telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat terima. Saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.</p>	Perusahaan berisiko melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 1.631.713.390.541,6,-	Tidak ada
3	<p>Pelapor: PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.</p> <p>Terlapor: HS (Direktur PT RA)</p>	<p>PT RA merupakan debitur BNI, dalam perkembangannya tanpa persetujuan dari BNI terlebih dahulu, PT RA dan Sdr. HS (Direktur PT RA) mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam proses PKPU, sebagian besar Kreditur termasuk BNI tidak menyetujui proposal perdamaian yang ditawarkan oleh PT RA. Pada awal tahun 2017, BNI melaporkan Sdr. HS ke Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau pemalsuan dan tindak pidana pencucian uang berupa pengajuan dan pencairan kredit pada BNI dengan menggunakan dokumen palsu.</p>	Rp 175.097.985.491,-	Masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.	Sumber recovery kredit debitur PT RA saat ini dari hasil pemberesan boedel pailit yang dilakukan oleh Kurator, sedangkan Sdr. HS telah dilaporkan secara pidana oleh BNI ke instansi kepolisian dan saat ini yang bersangkutan telah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada perkara ini terdapat potensi risiko kredit dan risiko reputasi bagi BNI.	Tidak ada



DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN

Kebijakan/*policy* maupun SOP BNI cukup memadai dan *prudent* dalam melindungi kepentingan bisnis BNI. Sehingga, seluruh permasalahan hukum tersebut di atas baik perdata maupun pidana, tidak memberikan dampak finansial yang signifikan terhadap BNI. Hal tersebut tercermin dari Profil Risiko Hukum selama periode 2018 yang secara konsisten berada pada predikat *Low To Moderate*.

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama periode tahun 2018, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat memiliki perkara hukum penting terkait perdata maupun pidana terkait dengan bisnis BNI.

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN

Anak Perusahaan	Perkara Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Klaim
PT BANK BNI SYARIAH	Perkara <i>Carry Over</i> Tahun Sebelumnya	9	-	-
	Perkara <i>Inkracht</i> di Tahun 2018	12	-	-
	Dalam Proses Persidangan	14	3	-
PT BNI LIFE INSURANCE	Perkara <i>Carry Over</i> Tahun Sebelumnya	-	-	-
	Perkara <i>Inkracht</i> di Tahun 2018	-	-	-
	Dalam Proses Persidangan	1	2	-
PT BANK BNI SEKURITAS	Perkara <i>Carry Over</i> Tahun Sebelumnya	-	-	-
	Perkara <i>Inkracht</i> di Tahun 2018	-	-	-
	Dalam Proses Persidangan	-	-	-
PT BANK BNI MULTIFINANCE	Perkara <i>Carry Over</i> Tahun Sebelumnya	1	-	-
	Perkara <i>Inkracht</i> di Tahun 2018	1	-	-
	Dalam Proses Persidangan	1	-	-

PERKARA MATERIIL YANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN

NO	PARA PIHAK	Anak Perusahaan	POKOK PERKARA	NILAI PERKARA	STATUS PERKARA	PENGARUH/ RISIKO TERHADAP PERUSAHAAN
1	Penggugat: Tanti Widyana (ahliwaris M Thoib) Tergugat: PT BNI Life Insurance	BNI Life Insurance	Penggugat adalah ahli waris M.Thoib yang merupakan nasabah Asuransi BNI Life dengan nomor polis BLPM 9172009817 dan telah menjadi nasabah sejak 27 Juni 2017 yang mengajukan klaim kematian oleh ahli waris, namun di tolak dikarenakan ketidaksesuaian data kesehatan dan ketidakjujuran dalam pengisian SPAJ	Materill : Rp275.000.000,- Imateriil: Rp500.000.000,-	Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur	Pembayaran ganti rugi sebesar nilai gugatan
2	Pelapor: PT BNI Life Insurance Terlapor: BAS BNI Life Sukabumi Yuridiksi : Polres Kota Sukabumi No Laporan : LP/B/69/ II/2017/JBR/ RES SMI KOTA tanggal10 Februari 2018	BNI Life Insurance	Euis Sri Kartina adalah pemasar Bancassurance Specialist berdasarkan Perjanjian Agensi 001355.PK.BL.BAS/BAS/1214 dan memiliki sertifikat lisensi agen yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dengan nomor lisensi 14329959 dan nomor kode BAS 5576 agen bersertifikat sejak 20 Desember 2014 hingga 20 Desember 2018. BAS telah melakukan penggelapan dana premi nasabah	Rp50.000.000,-	Penyelidikan Polres Sukabumi	Pembayaran ganti rugi kepada nasabah Potensi Risiko reputasi BNI Life di Sukabumi



NO	PARA PIHAK	Anak Perusahaan	POKOK PERKARA	NILAI PERKARA	STATUS PERKARA	PENGARUH/ RISIKO TERHADAP PERUSAHAAN
3	<p>Pelapor: PT BNI Life Insurance</p> <p>Telapor: ASM BNI Life Kupang</p> <p>Yuridiksi : Polres Kota Kupang</p> <p>No Laporan : LP/B/763/ VIII/2018/SPKT ResorKupang Kota tanggal 30 agustus 2018</p>	BNI Life Insurance	ASM BNI Life Kupang telah melakukan tindakan <i>fraud</i> , ASM tidak menyerahkan uang premi yang disetorkan oleh nasabah ke BNI Life.	Rp100.000.000,-	Proses Penahanan tersangka di Polresta Kupang, NTT	<p>Pembayaran ganti rugi kepada nasabah</p> <p>Potensi Risiko reputasi BNI Life di Kupang</p>
1	<p>Penggugat: Buruh PT Surya Sukmana Leather</p> <p>Tergugat: PT Surya Sukmana Leather</p>	BNI Multifinance	Penggugat merupakan buruh PT SSL Tergugat: Tidak dapat menyelesaikan kewajiban terhadap upah buruh selama +/- 1 tahun sehingga penggugat mengajukan pailit terhadap tergugat.	Nilai gugatan: Rp3.000.000.000,-	Upaya Hukum Keadilan Niaga Surabaya	Kesulitan mengeluarkan mesin milik BNIMF yang saat ini masih berada di dalam area pabrik karena tuntutan buruh belum dapat dipenuhi.

UPAYA MEMINIMALISIR RISIKO HUKUM

BNI secara berkesinambungan selalu berupaya untuk terus meminimalisir risiko hukum bagi Bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang secara garis besar terbagi dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Pra-Transaksi
 - a. Memberikan kajian hukum dan pendampingan hukum melalui *assessment* atas rencana pengembangan produk dan aktivitas baru, guna terlindunginya kepentingan BNI, khususnya dari aspek risiko hukum. Hal ini juga merupakan pemenuhan atas ketentuan regulator yang mempersyaratkan adanya analisa hukum terhadap setiap rencana pengembangan produk dan aktivitas baru.
 - b. Melaksanakan program *Legal Risk Awareness* secara konsisten sebagai salah satu upaya pencegahan risiko hukum yang disampaikan baik melalui kunjungan langsung ke unit operasional maupun melalui sarana pembelajaran *digital* milik BNI, guna mencegah terjadinya *fraud* dan mendukung pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan.
 - c. Menyelenggarakan *Legal Blast* dalam bentuk penyampaian materi hukum yang dapat diakses di mana saja oleh segenap pegawai BNI pada *website* BNI Corporate University (www.bnincorpu.co.id) dan

dilengkapi dengan adanya notifikasi melalui *short message service (SMS)* secara *blast* (serentak dan massal). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir potensi risiko unit bisnis dalam menjalankan bisnisnya.

- d. Menyelenggarakan Pelatihan atau *Sharing Session* terkait isu hukum terbaru antara lain mengenai *managing data breaches*, munculnya *blockchain* dalam sistem keuangan, dll. Narasumber pada Pelatihan atau *Sharing Session* yang diadakan oleh Divisi Hukum antara lain para pakar hukum, praktisi (*lawyer*), institusi penegak hukum seperti Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Mengikutsertakan pegawai Divisi Hukum dalam berbagai sertifikasi dan pelatihan yang bekerja sama dengan BNI Corporate University maupun lembaga pelatihan eksternal lainnya. Bentuk sertifikasi atau pelatihan yang diberikan antara lain berupa Sertifikasi Manajemen Risiko, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Pendidikan Kurator dan Pengurus, Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Pendidikan Auditor Hukum, *Financial Analysis for Lawyer*, *Microsoft Powerpoint for Business*, Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP), serta pelatihan hukum lainnya, dalam rangka menciptakan *corporate lawyer* yang profesional dan

- kompeten.
- f. Memberikan pelatihan bagi masing-masing pegawai Divisi Hukum disesuaikan dengan profil dan hasil *assessment* kompetensi, kebutuhan pegawai, dan perkembangan bisnis, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi *core*, personal, dan kepemimpinan pegawai, guna menunjang bisnis BNI.
2. Transaksi
 - a. Memberikan advis atau kajian hukum atas suatu transaksi dan kegiatan operasional, sesuai dengan kebutuhan Divisi/Satuan/Unit Kantor Wilayah/Cabang/Sentra.
 - b. Meningkatkan kualitas advis atau kajian hukum pada Satuan Kerja Hukum di BNI, guna mendukung kelancaran kegiatan bisnis/transaksi maupun operasional seluruh Divisi/Satuan/Unit Kantor Wilayah/Cabang/Sentra di BNI, yang dilaksanakan melalui supervisi advis hukum kepada segenap Satuan Kerja Hukum.
 3. Post-Transaksi
 - a. Melaksanakan Program Legal *Review* Perjanjian yang dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan risiko hukum melalui proses identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko dan pemantauan guna pengukuran risiko hukum yang dapat timbul dari suatu perjanjian.
 - b. Melakukan koordinasi penanganan perkara secara rutin dengan seluruh Satuan Kerja Hukum pada seluruh Kantor Wilayah BNI sebagai bentuk *monitoring* atau supervisi perkara di seluruh Satuan Kerja Hukum.

PENGUNGKAPAN HAL PENTING

Sejalan dengan implementasi prinsip-prinsip GCG, maka Perseroan yang memandang perlu untuk mengungkapkan hal-hal sebagaimana berikut:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan disesuaikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Hal tersebut dilakukan dengan tepat waktu, lengkap, utuh, kini dan cukup akurat sesuai Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Transparansi Informasi Produk

1. Berkenaan dengan transparansi informasi produk Bank:
 - a. Bank telah mentransparansikan informasi produk

Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

- b. Penerapan transparansi informasi produk Bank dilakukan dengan informasi secara tertulis melalui Buku Petunjuk Layanan/*staterkit*, Brosur/*leaflet*, Ketentuan Pembukaan Rekening yang harus dibaca dan ditandatangani nasabah pada saat membuka rekening, maupun melalui sarana lain seperti *website* BNI, maupun pengumuman yang dipasang/disebarkan di kantor-kantor Cabang BNI. Selain informasi secara tertulis Petugas Bank akan menjelaskan informasi produk kepada nasabah pada saat menawarkan produk/jasa Bank.
 - c. Di samping itu informasi produk-produk *consumer banking* telah disampaikan secara transparan melalui media cetak, media elektronik dan *billboard* termasuk media internet.
 - d. Melalui berbagai sarana yang mudah diakses oleh nasabah, Bank telah menyampaikan informasi dalam hal terdapat perubahan syarat dan ketentuan penggunaan produk Bank kepada nasabah. Bank juga memiliki layanan informasi produk 24 jam melalui BNI *Call* 1500046.
2. Terkait dengan penggunaan data pribadi nasabah oleh pihak Bank, telah dicantumkan di dalam Syarat dan Ketentuan pada formulir Pembukaan Rekening yang diberikan Bank kepada nasabah pada saat pembukaan rekening.

TRANSPARANSI TATA CARA PENGADUAN NASABAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPADA NASABAH

One Stop Solution via BNI Call 1500046

Sejalan dengan salah satu misi BNI untuk memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama, BNI Call 1500046 terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi para nasabah BNI.

Komitmen BNI Call 1500046 untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan bagi nasabah BNI diwujudkan melalui standarisasi kualitas proses dan layanan dengan memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015 pada akhir tahun 2016.

Melalui layanan BNI Call 1500046, nasabah diberi kemudahan mendapatkan informasi, melakukan transaksi dan memperoleh solusi atas setiap permasalahan baik untuk layanan perbankan maupun kartu kredit.

Layanan BNI Call 1500046 dapat dinikmati nasabah BNI selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, baik menggunakan fitur *Interactive Voice Response* (IVR) maupun langsung ke petugas BNI *Call Officer*.



Nasabah BNI diberikan kemudahan akses layanan BNI Call 1500046, melalui:



BNI Call 1500046

[READ MORE](#)

TELEPON		
<i>Akses dari Dalam Negeri (seluruh wilayah Indonesia)</i>		
<i>Telpon PSTN (Fixed Phone)</i>	1500046 (tanpa kode area)	Pulsa lokal
<i>Telpon seluler (Mobile Phone)</i>	1500046 (tanpa kode area)	Sesuai tarif penyedia layanan seluler (<i>provider</i>)
Akses dari Luar Negeri		
<i>Fixed Phone/Mobile Phone</i>	+62-21-30500046	Sesuai tarif penyedia layanan dari masing-masing negara

EMAIL	FAKSIMILI
bnicall@bni.co.id	021-25541203

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH BNI

BNI *Contact Center* sebagai salah satu garda terdepan BNI dalam layanan bagi para nasabah BNI, senantiasa terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik, termasuk penyelesaian atas setiap pengaduan nasabah baik untuk layanan perbankan maupun kartu kredit.

Nasabah BNI diberikan kemudahan mengakses layanan pengaduan dengan berbagai pilihan media baik melalui lisan maupun tertulis.

MEDIA PENYAMPAIAN PENGADUAN NASABAH BNI



LISAN



Nasabah menghubungi
BNI Call 1500046



Nasabah mendatangi
BNI Cabang terdekat



TERTULIS



Nasabah mengunjungi
www.bni.co.id pada
menu **Hubungi Kami**



Nasabah mengirimkan
email ke bnicall@bni.co.id atau faksimili
(021)25541203



Nasabah mendatangi
BNI Cabang terdekat



Solusi penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan dilakukan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja*) dan pengaduan tertulis dalam waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila diperlukan dokumen pendukung atas pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan, maka BNI akan meminta nasabah menyampaikan pengaduan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu, pemenuhan kelengkapan dokumen dan penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya sesuai POJK No. 1/POJK.07/2013 dan diperbaharui melalui POJK Nomor 18/POJK.07/2018*) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah.

*) Efektif berlaku per bulan Maret 2019



Sesuai surat Edaran OJK (SE OJK) No. 2/SEOJK.07/2014 dan diperbaharui melalui surat Edaran OJK (SE OJK) No. 17/SEOJK.07/2018, BNI akan memberikan informasi penyelesaian pengaduan nasabah melalui sarana telepon, email, surat ataupun pesan singkat (short message service/SMS).

Apabila nasabah merasa solusi penyelesaian yang diberikan oleh BNI tidak memenuhi harapan, maka nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



REMUNERASI

Strategi remunerasi pegawai ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip *supply and demand*, posisi remunerasi BNI dibandingkan *market* serta mempertimbangkan *talent classification* pegawai. Komponen remunerasi pegawai terdiri atas remunerasi bersifat tetap yang dibedakan berdasarkan bobot jabatan dan *person value*. Sedangkan remunerasi yang bersifat variabel diberikan berdasarkan kinerja yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja bank, kinerja unit serta kinerja pegawai yang bersangkutan. Adapun kinerja unit dimaksud dicerminkan dengan klasifikasi unit bisnis, wilayah, perusahaan anak dan kantor cabang yang berlokasi di luar negeri.

Konsultan kebijakan remunerasi menggunakan jasa konsultan Willis Towers Watson untuk menyelenggarakan *salary survey* setiap tahun. Hasil *survey* digunakan sebagai acuan remunerasi pegawai.

RASIO GAJI PEGAWAI YANG TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji merupakan hal pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau emberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah: 45:1
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah: 1,1:1
3. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah: 1,1:1
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi: 1,8:1

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pemberian kredit kepada Pihak Terkait dengan Bank serta memiliki kebijakan yang mengatur limit kredit per sektor industri, berikut pemantauan dan penyelesaiannya. Secara berkala BNI melakukan rapat Komite Prosedur Perkreditan dan Komite Kebijakan Perkreditan maupun Rapat Direksi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kebijakan, prosedur dan pelaksanaan operasional bidang perkreditan.

Untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, BNI telah memiliki sistem *internal control* yang memadai sebagai berikut:

- a. Telah ada kebijakan dan prosedur dalam proses pemberian kredit.
- b. Telah ada *review ex-ante* pada proses pemberian kredit baru maupun tambahan dengan nominal >Rp5 miliar berupa *Credit Compliance Review (C2R)* atas usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan pada proses pengadaan barang dan jasa dengan nominal \geq Rp1 miliar berupa *Procurement Compliance Review (PCR)*
- c. Telah ada *review ex-post* yang dilakukan oleh Satuan Kerja

Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal.

- d. Penyediaan dana kepada pihak terkait harus dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
- e. Penyediaan dana besar dimintakan persetujuan kepada manajemen dan untuk jumlah tertentu harus dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
- f. SPI melakukan pemeriksaan terhadap sentra kredit berdasarkan *risk assessment* untuk memastikan kecukupan pengelolaan *risk management* dan *internal control* termasuk dalam proses pemberian kredit.

Dalam penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait atau penyediaan dana besar:

1. Manajemen memberikan perhatian terhadap pemberian kredit dalam jumlah besar antara lain yang menyangkut penyediaan dana kepada debitur melalui *Internal Rating System (corporate, commercial, and small business)*, *Loan Portfolio Management*, *Loan Exposure Limit* (per segment, per sektor ekonomi dan per regional), BMPK (untuk internal BNI melalui *Internal House Limit*), dan *Country Exposure Limit*.
2. Jumlah modal dan rasio CAR selalu dilaporkan kepada Manajemen dan segenap unit untuk dipedomani dalam melaksanakan kegiatan bisnis bank terutama yang menyangkut penyediaan dana.

Penyampaian laporan ke BI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dapat dilihat ada pada tabel di bawah ini:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal Rp juta
Kepada Pihak Terkait	150	5.379.164
Kepada Debitur Individu	3	161.385.418
Group	17	20.642.926
		140.742.492

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEGAWAI DAN/ATAU MANAJEMEN PERSEROAN

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dan Surat Edaran SEOJK No. 5/SEOJK.04/2017 Tentang Pencabutan SEOJK No. 22/SEOJK.04/2015 tentang Kondisi Lain sebagai aKondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka BNI melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (*Buy Back*). BNI telah menunjuk PT BNI Securities sebagai lembaga sekuritas yang melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan dengan periode pembelian saham di pasar kurang dari 3 bulan terhitung sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015.

Jumlah saham yang telah dibeli kembali adalah sebesar 0,807% dari modal ditempatkan dan disetor penuh atau sejumlah 150.537.500 lembar saham. Nilai pembelian kembali saham Perseroan sebesar Rp749.979.275.500,00 (maksimal 750 miliar Rupiah) dengan demikian harga rata-rata Pembelian Kembali Saham adalah sebesar Rp4.982,00 per saham.

Atas pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan tersebut, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 30 Oktober 2015.

Memperhatikan butir 4 huruf a angka 3 Peraturan No. XI.B.2 jo. Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2013, saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan/digunakan untuk pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*, sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 12 Mei 2016 yang intinya menyampaikan bahwa Perseroan akan melaksanakan pengalihan saham Seri C hasil pembelian kembali saham melalui Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Pegawai Perseroan dalam bentuk Bonus Saham (selanjutnya disebut "Program Bonus Saham").

Program Bonus Saham disusun sebagai bagian dari remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dalam bentuk penghargaan jangka panjang di mana saham yang dibeli kembali dialokasikan kepada:

1. Pegawai sebagai bonus atas pencapaian kinerja perusahaan, dan
2. Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris sebagai bagian dari tantiem untuk tahun buku yang bersangkutan.

Pengawasan Program Bonus Saham akan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan dan akan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdekat atas pelaksanaan program tersebut.

Alokasi bonus saham kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri BUMN.

Berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan No. 8 tanggal 10 Maret 2016, alokasi bonus saham kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Menteri BUMN.

Berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-574/MBU/D5-06/2018 tanggal 5 Juni 2018 pada intinya menyampaikan

penetapan *Long Term Incentive* (LTI) sebesar 10% dari Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017. LTI diberikan dalam bentuk saham yang nilainya ditangguhkan selama tiga tahun atau sampai berakhirnya masa jabatannya. Ketentuan ini dikecualikan untuk Komisaris Independen, di mana LTI diberikan dalam bentuk tunai yang pembayarannya ditangguhkan selama tiga tahun atau sampai berakhirnya masa jabatannya.

PROGRAM BONUS SAHAM PEGAWAI

Program bonus saham pegawai merupakan program pemberian bonus dalam bentuk saham Bank yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program.

Tujuan dari program bonus saham pegawai ini adalah sebagai:

1. Bentuk retensi pegawai dalam jangka panjang.
2. Upaya untuk memotivasi pegawai agar memberikan kinerja yang terbaik.
3. Upaya untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) pegawai terhadap Bank.

Alokasi tahap I dilakukan pada tahun 2016 dan alokasi tahap II dilakukan pada tahun 2017. Pegawai yang berhak menjadi peserta dalam Program Bonus Saham adalah pegawai tetap per 30 Oktober 2015 (dhi. tanggal Keterbukaan Informasi).

Tanggal berakhir *vesting period* tahap I dibedakan berdasarkan jenjang jabatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. ASST ke bawah *vesting period* berakhir tanggal 31 Januari 2017
2. AMGR *vesting period* berakhir tanggal 30 April 2017
3. MGR ke atas *vesting period* tanggal 31 Juli 2017.

Sedangkan tanggal berakhir *vesting period* tahap II dibedakan berdasarkan jenjang jabatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. ASST ke bawah *vesting period* berakhir tanggal 31 Januari 2018
2. AMGR *vesting period* berakhir tanggal 30 April 2018
3. MGR ke atas *vesting period* tanggal 31 Juli 2018.

Jenjang jabatan yang menjadi dasar perhitungan *vesting period* tahap I dan tahap II adalah jenjang jabatan pegawai per 31 Desember 2015.

Pegawai yang dinyatakan *eligible* untuk *vesting* akan memperoleh pemberitahuan melalui *email* atau media komunikasi lainnya yang di antaranya memuat konfirmasi atas bonus saham yang menjadi haknya pada tanggal *vesting* tersebut. Adapun syarat *vesting* ditetapkan sebagai berikut:

1. Tidak sedang dalam proses kasus dan/atau dampak sanksi mengacu pada Peraturan Kepegawaian Bank yang berlaku;



2. Tidak berakhir hubungan kerja atas kemauan sendiri; atau
3. Tidak berakhir hubungan kerja karena kinerja (*low performance*).

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI

Pada tahun 2018, BNI tidak melakukan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Afiliasi.

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

PRINSIP DASAR DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

1. Efisien : pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
2. Efektif : pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Kompetitif : pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan/atau Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas

dan transparan.

4. Transparan: semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan/atau Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi syarat.
5. Adil dan Wajar : memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi syarat.
6. Akuntabel : harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

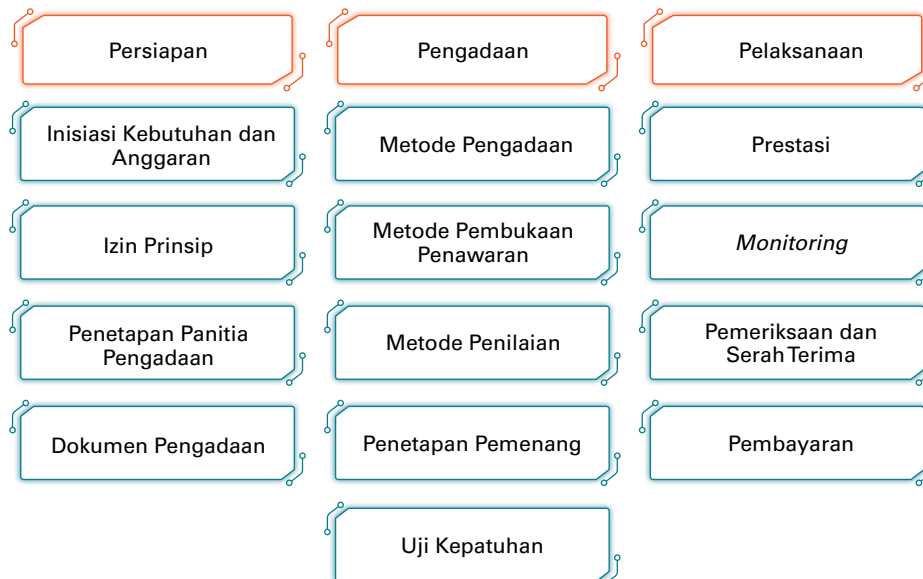
METODE PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

1. Pelelangan Terbuka/Seleksi Umum, yaitu pengadaan yang diumumkan secara luas melalui media massa dengan calon peserta sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta.
2. Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak secara terbatas dengan calon peserta sekurang-kurangnya 2 (dua) peserta.
3. Penunjukan Langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa dengan memperhatikan syarat-syarat Penunjukan Langsung.
4. Pembelian Langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar.

PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

TAHAPAN PROSES PENGADAAN

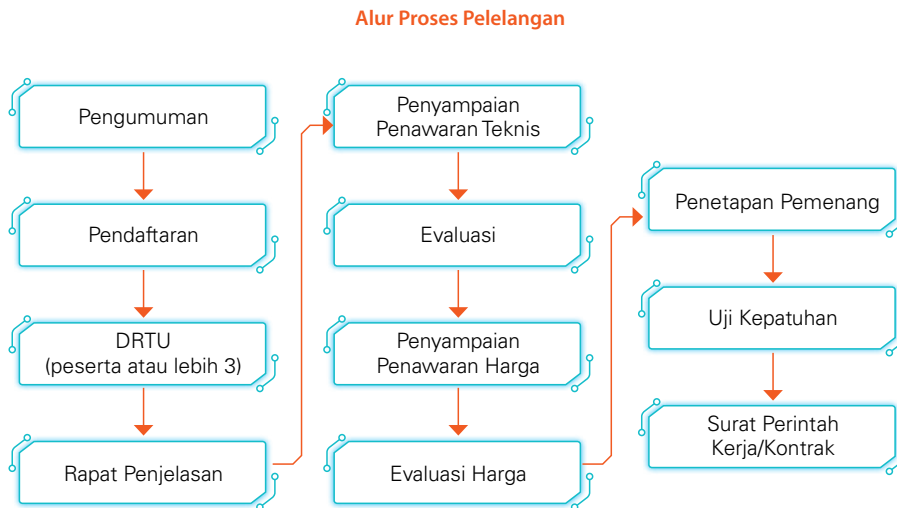
BNI menerapkan pembagian tahapan pengadaan barang dan atau jasa sebagai berikut:



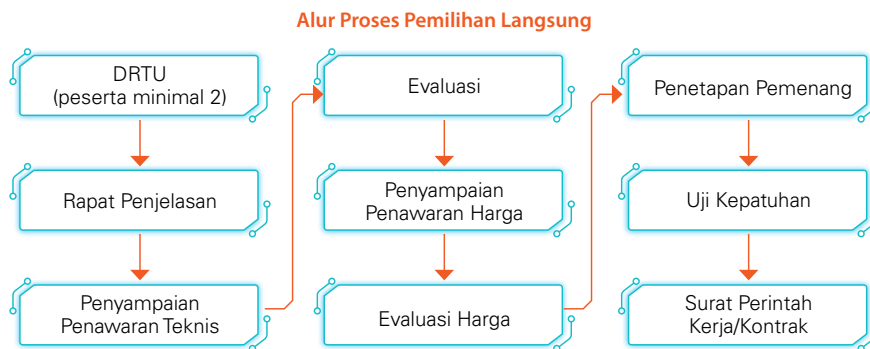
PROSES PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Proses pengadaan barang dan/atau jasa terdiri dari:

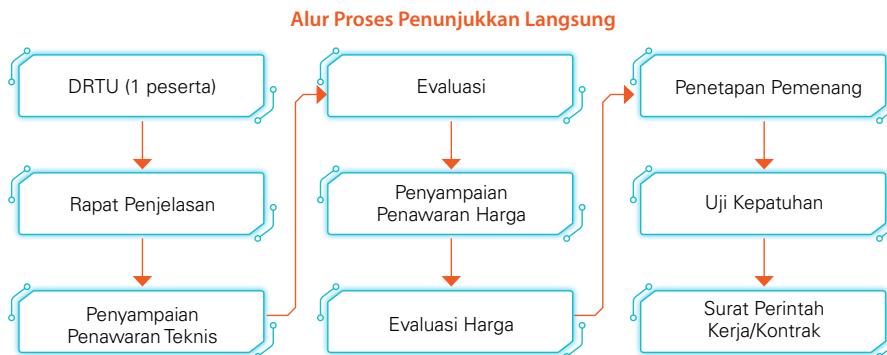
Pelelangan, untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp1 miliar.



Pemilihan Langsung, untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp100 juta sampai dengan Rp1 miliar.



Penunjukan Langsung, untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp100 juta, atau dengan kriteria tertentu.



Pembelian Langsung dilakukan untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp25 juta dengan cara langsung dibeli di toko atau penjual.

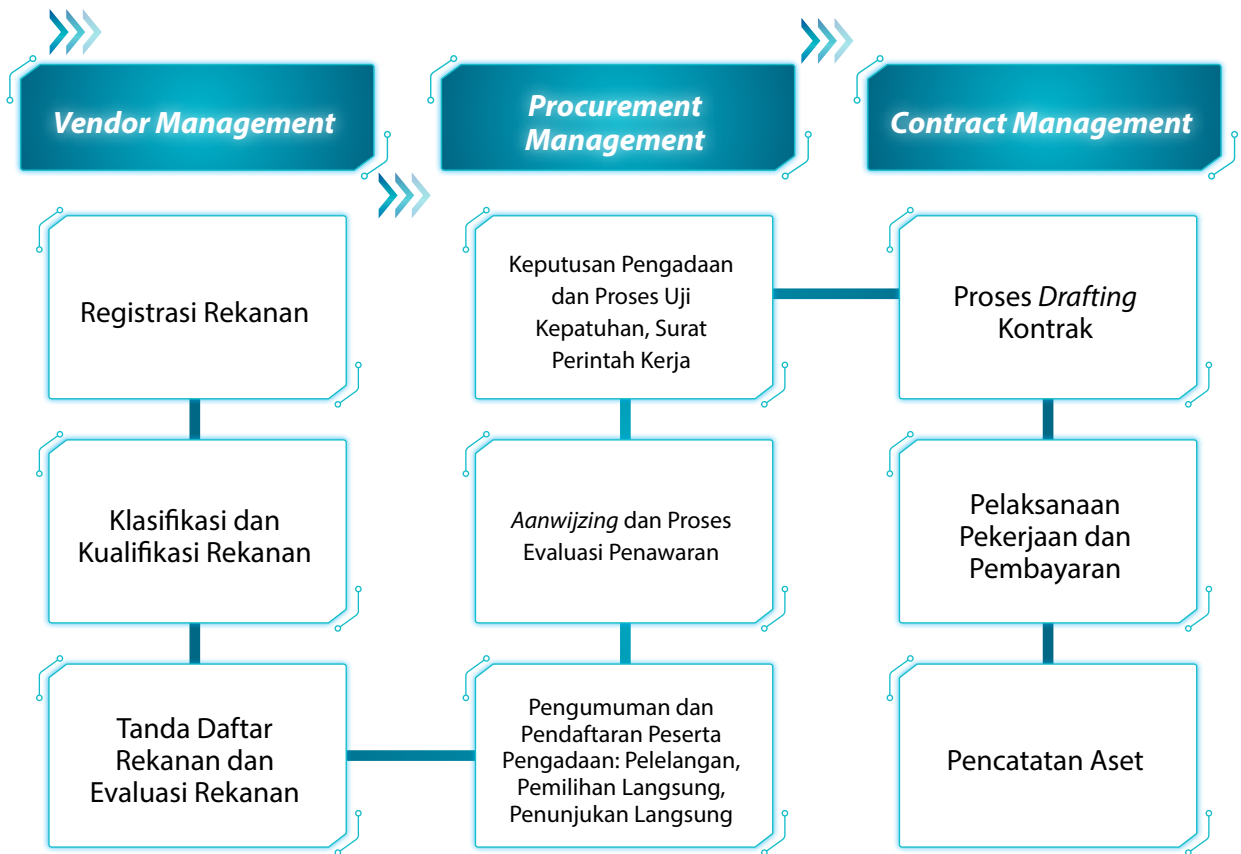


PENGADAAN MELALUI APLIKASI *ELECTRONIC PROCUREMENT* (E-PROC)

Sebagai salah satu sarana untuk menunjang strategi BNI bertransformasi menjadi digital banking dalam rangka menghadapi persaingan bisnis, meningkatkan kepuasan *stakeholder* dan prinsip GCG. Sejak tahun 2017 BNI telah menggunakan Aplikasi *Electronic Procurement* (*e-Proc*) untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa, berupa modul *Procurement Management* dan *Vendor Management*.

Penggunaan Aplikasi *e-Proc* tsb dapat mengurangi biaya administrasi, maupun operasional yang harus dikeluarkan baik dari BNI maupun vendor. Bahkan melalui modul baru *Contract Management* calon vendor yang belum terdaftar menjadi rekanan BNI dapat langsung mendaftar secara online melalui website <https://e-proc.bni.co.id>, dengan adanya modul tsb, vendor lebih terqualifikasi, proses pengadaan lebih termonitor dengan baik, dan lebih transparan.

ALUR PROSES PENGADAAN MELALUI APLIKASI *ELECTRONIC PROCUREMENT* (E-PROC)



RENCANA IMPLEMENTASI ISO 9001:2015 BIDANG VENDOR MANAJEMEN

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan vendor manajemen sesuai standar internasional serta menunjang efisiensi dhi, menekan mutu yang tidak baik, meningkatkan produktifitas dan efektivitas operasional, sejak tahun 2018 BNI melakukan inisiasi sertifikasi *ISO 9001 : 2015 System Management* Mutu bidang Vendor Manajemen. Dengan adanya sertifikasi tsb maka dapat meningkatkan mutu produk dan layanan kinerja perusahaan yang akan berujung kepada peningkatan kepuasan stake holder.

Menara BNI merupakan *Icon* baru yang dimiliki BNI dengan konsep *Green Building (Gold)*, yang terletak di Jl. Pejompongan Raya Jakarta, terdiri dari 2 tower yaitu *Tower Office* dengan 31 lantai dan *Tower Podium* dengan 6 lantai. Konsep *Green Building (Gold)* diharapkan penggunaan energi akan lebih efisien. Efisiensi *energy* listrik sebesar 25,33%, pemakaian air sebesar 30,99% dan luas area hijau sebesar 40,74%.

Untuk menunjang kebutuhan *work-life balance* pegawai BNI, Menara BNI dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti *Foodcourt BNI Digicafe*, lapangan *outdoor*, *rooftop garden*, *social room*, *daycare*, *nursery room*, *gym center*, *helipad*, *ballroom* dan masjid yang *representative*.



Icon baru MENARA BNI Pejompongan



MASJID



BALLROOM



ROOFGARDEN



LAPANGAN OLAHRAGA



FOODCOURT BNI DIGICAFFE



SYSTEM PORTAL TRANSPORTASI ONLINE

Untuk meningkatkan *control costs*, *drive efficiency*, mendukung program *Go Green* dan sejalan dengan program management *#bnitdigital*. BNI telah melakukan penyempurnaan pelayanan transportasi untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dinas pegawainya dari pola lama *Transportasi Management System (TMS)* ke era *digitalisasi transportasi* dengan menggunakan *System Portal Transportasi Online*. Evaluasi *System Portal Transportasi Online* tsb. dinilai lebih nyaman, memudahkan pegawai, *cashless transaction* dan terbukti dapat *mereduce cost* yang cukup signifikan.

BNI RECORD CENTER (BRC) CIKUPA

Kearsipan BNI memiliki BNI *Record Center (BRC) Cikupa* yang merupakan salah satu unit kearsipan terbesar di Indonesia, dengan luas area 3,4 Ha dan bangunan 1,3 Ha serta memiliki kapasitas penyimpanan 337.200 box. BRC Cikupa merupakan kearsipan perbankan pertama di Indonesia yang telah mendapatkan Akreditasi Kearsipan A (Istimewa) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 2 kali mendapat predikat juara 2 pada Lomba Unit Kearsipan Nasional Terbaik kategori BUMN yang diselenggarakan oleh ANRI. BRC Cikupa pernah dikunjungi oleh Arsiparis dari KITLV Leiden, Belanda, hal-hal tersebut menjadikan BRC Cikupa beberapa kali menjadi tujuan studi tiru institusi/lembaga baik dari pemerintah maupun swasta.



BNI Record Center

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan BNI sesuai standar internasional serta menunjang efisiensi dan efektivitas operasional di BRC Cikupa, saat ini BRC Cikupa sedang mempersiapkan untuk memperoleh sertifikasi *Standarisasi System Management for Records (SMR) ISO 30301:2011*. Dengan penerapan ISO 30301:2011 pada tahun 2019, diharapkan BNI merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang mendapat sertifikasi ISO 30301:2011 dibidang kearsipan.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN POLITIK

BNI memiliki kebijakan yang melarang Insan BNI menjadi anggota dan/atau donatur Partai Politik. Selama tahun 2018, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL

Biaya yang telah dikeluarkan dalam aktivitas Bina Lingkungan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal (Rp)
Bantuan Korban Bencana Alam	Rp3,5 Miliar
Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan	Rp31,0 Miliar
Bantuan Peningkatan Kesehatan	Rp7,5 Miliar
Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum	Rp11,1 Miliar
Bantuan Sarana Ibadah	Rp17,1 Miliar
Bantuan Pelestarian Alam	Rp2,0 Miliar
Bantuan Pelestarian Alam	Rp13,8 Miliar
Total	Rp86 Miliar

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Akses Informasi Perseroan maupun data terkait *corporate action* dapat diakses melalui situs resmi *website* Perseroan di <http://bni.co.id/>. Pihak yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait *corporate action* maupun data Perseroan dapat menghubungi via telepon di 021-5728387, Fax di 6221-5728053 atau *email* ke : investor.relations@bni.co.id.

SIARAN PERS

Siaran pers yang telah dilakukan BNI selama tahun 2018 adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Acara	Tempat	Judul Siaran Pers
1	08 Januari 2018	Kunjungan Presiden Jokowi ke Stasiun BNI City	Jakarta	Lengkapi Fasilitas KA Bandara - BNI Buka 1 Outlet & 4 ATM, Peroleh Naming Right
2	08 Januari 2018	Kunjungan Presiden Jokowi ke Stasiun BNI City	Jakarta	Stasiun BNI City Hadir dengan Beragam Fasilitas Modern
3	09 Januari 2018	Sosialisasi Program Ketahanan Pangan	Madiun	Percepat Penyaluran KUR BNI Bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan TNI, Sukseskan Program Ketahanan Pangan
4	11 Januari 2018	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Air Nav Terkait Penggunaan Properti BNI	Sentani	BNI Penuhi Kebutuhan Properti AirNav di Papua
5	12 Januari 2018	Launching Tim Putra dan Putri Jakarta BNI Taplus	Jakarta	Proliga 2018, Jakarta BNI Taplus Siapkan Tim Terbaik Untuk Menjadi Juara
6	18 Januari 2018	Press Conference Java Jazz 1	Jakarta	BNI Ajak Pecinta Jazz Bertransaksi Kekinian
7	19 Januari 2018	Kunjungan Direksi ke BNI Tual	Tual	Kunjungi Pedalaman Indonesia , BNI Bantu Pembangunan Pusat Pelatihan Usaha dan Masjid
8	21 Januari 2018	Layanan Pembuatan dan Perpanjangan Paspor di Monumen Nasional	Jakarta	Layani Pembayaran Paspor , BNI Jadi Bank Terbanyak Layani Setoran PNBPN Online
9	26 Januari 2018	Paparan Kinerja BNI Tahun 2016	Jakarta	Laba Bersih BNI Tumbuh 25,1%
10	26 Januari 2018	Launching Yap!	Jakarta	BNI Luncurkan Yap!
11	29 Januari 2018	Antisipasi Demosntrasi Hapus Buku Trikomsel	Jakarta	Pulihkan Kinerja, BNI Hapus Buku Trikomsel
12	31 Januari 2018	penandatanganan Nota Kesepahaman BNI sebagai <i>Single Partner</i> UM PTKIN 2018		BNI Menjadi <i>Single Partner</i> UM PTKIN 2018
13	02 Februari 2018	Uji Coba Simponi di London	London	Kemkeu Sukses Uji Coba Simponi di BNI London
14	05 Februari 2018	penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS TK	Gianyar	Dukung Agen PERISAI, BNI Jadi Bank Penampung Dana Iuran BPJS Ketenagakerjaan
15	06 Februari 2018	Penandatanganan PKB 2018	Jakarta	Manajemen & SP BNI Sepakati PKB Baru
16	08 Februari 2018	Pelatihan Wartawan pada Hari Pers Nasional	Padang	Peringati Hari Pers Nasional, BNI Ajak 100 Wartawan Berlatih Kewirausahaan
17	09 Februari 2018	Kunjungan BNI ke Way Jepara	Way Jepara	Kunjungi Way Jepara, BNI Tingkatkan Kualitas CTKI dan TKI
18	12 Februari 2018	Penyerahan Simbolik Kartu VA Debit BNI kepada pihak Indonesian Asian Games Organizing Committee (INASGOC)	Jakarta	BNI Bagikan 3000 Kartu VA Debit di <i>Test Event</i> Asian Games 2018



No.	Tanggal	Acara	Tempat	Judul Siaran Pers
19	13 Februari 2018	11th Annual Best Deal & Solution Awards	Kuala Lumpur	Layani 125 Mata Uang Remitansi BNI Terbaik Se - Asia Tenggara
20	15 Februari 2018	Java Jazz On The Move	Jakarta	Gelar Java Jazz on The Move, BNI Perkenalkan Yap!, Alat Bayar Baru di BNI Java Jazz Festival 2018
21	16 Februari 2018	BNI Travel Experience	Jakarta	BNI Gandeng 4 Maskapai Gelar Travel Experience
22	21 Februari 2018	Teaser Mudik Gratis BNI	Jakarta	BNI Siap Gelar Mudik GRATIS Bareng BUMN 2018
23	21 Februari 2018	Signing PKS Induk Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah antara BNI dan HIMBARA dengan Kementerian Keuangan RI	Jakarta	Kerja Sama BNI – Kementerian Keuangan RI, BNI Corporate Card Menjadi Alat Bayar Kedinasan Pemerintah, Sudah Capai 700 Pengguna
24	21 Februari 2018	Perayaan Imlek BNI	Jakarta	BNI Ajak Nasabah & Debitur Loyal Rayakan Imlek 2569
25	21 Februari 2018	Penyaluran Dana PIP dan KIK	Agats	BNI Salurkan Dana PIP Hingga Pedalaman Papua
26	22 Februari 2018	Sosialisasi Bunga KUR yang Baru	Jakarta	Kemenko dan BNI Sosialisasikan Suku Bunga Baru KUR
27	25 Februari 2018	Festival Danau Sunter	Jakarta	Yap! Menjadi Alat Pembayaran di Festival Danau Sunter
28	28 Februari 2018	PKS antara BNI dan BPJS TK	Jakarta	BPJS Ketenagakerjaan Gandeng BNI Untuk Tingkatkan Kepesertaan
29	28 Februari 2018	Press Conference Java Jazz 2	Jakarta	Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2018 “Unity in Diversity”
30	28 Februari 2018	Pelelangan Barang Wakil Presiden RI	Jakarta	Dukung Acara Lelang Koleksi Pribadi Wapres RI, BNI Jadi Bank Penampung Jaminan Lelang
31	02 Maret 2018	Launching TapCash Elek Yo Band	Jakarta	BNI Terbitkan TapCash Edisi Elek Yo Band
32	02 Maret 2018	Java Jazz 2018	Jakarta	Mudah Transaksi di Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2018 dengan Yap!
33	03 Maret 2018	Penyerahan Mock Up Kartu Kredit BNI Garuda	Jakarta	BNI dan GARUDA Apresiasi Glenn Fredly, Tompi, dan Sandhy Sondoro, Nasabah Loyal KartuKredit GARUDA BNI
34	03 Maret 2018	Java Jazz 2018	Jakarta	Ramaikan BNI Java Jazz Festival 2018, Perusahaan Anak BNI Gelar Produk Terbaru
35	03 Maret 2018	Java Jazz 2018	Jakarta	BNI Gandeng 15.000 Pedagang Gunakan Yap!
36	03 Maret 2018	Java Jazz 2018	Jakarta	Mulai Akhir Maret, Kartu Debit BNI Bakal Dapat Digunakan untuk Transaksi E-commerce
37	04 Maret 2018	Launching BNI Cinta Chat Banking di Java Jazz 2018	Jakarta	BNI Luncurkan Cinta, BNI Chat Banking
38	05 Maret 2018	Java Jazz 2018	Jakarta	Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2018, Nyaman Bertransaksi Bersama BNI
39	09 Maret 2018	Panen Raya Jagung	Jakarta	Perhutanan Sosial, KUR BNI Sentuh 1.700 Petani di Jawa Timur
40	11 Maret 2018	Launching BNI Mobile Remittance	Jakarta	BNI Luncurkan Aplikasi Mobile Remittance, Layanan Remitansi Dengan Tarif Termurah di Singapura
41	13 Maret 2018	Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNI dan Go-Jek	Jakarta	Optimalkan Penyaluran KUR pada UMKM, BNI Gandeng GO-PAY
42	13 Maret 2018	BNI Menjadi Partner IMF	Jakarta	Menjadi Partner, BNI Penuhi Kebutuhan Layanan Keuangan pada Voyage to Indonesia Art Exhibition dan IMF – World Bank Group Annual Meeting 2018
43	13 Maret 2018	Penghargaan Pajak	Jakarta	Patuh Bayar Pajak, BNI Diapresiasi Menteri Keuangan
44	20 Maret 2018	RUPS 2018	Jakarta	RUPS Tahunan, BNI Setor Dividen Rp 4,77 Triliun ke Pemegang Saham
45	21 Maret 2018	Launching Kartu Sehat BUMN	Jakarta	BNI Dukung Pertamedika-IHC Dalam Optimalisasi Layanan Kesehatan Melalui Kartu Sehat BUMN
46	21 Maret 2018	Padat Karya Tunai Kebumen	Kebumen	Padat Karya Tunai BNI Dijujicoba di 3 Provinsi

No.	Tanggal	Acara	Tempat	Judul Siaran Pers
47	23 Maret 2018	Signing MoU dan PKS antara BNI dan KemKum HAM	Jakarta	KemKum HAM Gandeng BNI, Gunakan BNI Corporate Card Untuk Alat Bayar Kedinasan
48	27 Maret 2018	Konferensi Pers BNI UI Half Marathon	Jakarta	BNI UI HALF MARATHON 2018 'THE BEST HALF MARATHON INSIDE CAMPUS IN INDONESIA'
49	28 Maret 2018	MoU BNI dan BPJS Kesehatan	Jakarta	BPJS Kesehatan Gandeng BNI Dalam Program Cicilan Tunggalan Iuran
50	29 Maret 2018	Peresmian Tol Ngawi - Kertosono	Madiun	BNI Biayai Tol Ngawi - Kertosono Rp580 Miliar
51	29 Maret 2018	PR Indonesia Awards 2018	Surabaya	BNI Menang Sebagai Juara Umum PR Indonesia Awards 2018
52	29 Maret 2018	Launching BNI Fleksi Pendidikan	Surabaya	BNI Gandeng ITS, Terbitkan Kredit Pendidikan
53	29 Maret 2018	Serap Gabah Mojokerto	Mojokerto	Ikut Stabilkan Harga, BNI Dukung Program Sergab
54	03 April 2018	Penyambutan Media Peliput Asian Games 2018	Jakarta	Counting Down to Asian Games 2018, BNI Invited Media to Learn More about Indonesian Banking
55	03 April 2018	Operasi Katarak	Jakarta	BNI Bantu Ratusan Warga Tak Mampu Operasi Katarak di Morotai
56	06 April 2018	Signing MoU dan PKS antara BNI dan UGM	Yogyakarta	BNI & UGM Pererat Kerja Sama, Layanan Perbankan Diperluas
57	06 April 2018	Serap Gabah Banyuwangi	Banyuwangi	Sergab46 BNI Serap 700 Ton Gabah Petani Jatim
58	15 April 2018	Indonesia Creative Product Festival (ICPF) 2018	Kuala Lumpur	BNI Boyong Mitra Binaan ke Kuala Lumpur
59	18 April 2018	Mou BNI dan Ditjen Pajak	Jakarta	Dukung Layanan Digital Ditjen Pajak, BNI Kembangkan Kartu Pintar NPWP
60	19 April 2018	Mou Antara BNI dan Go-Pay	Jakarta	Perluas Kerja Sama, BNI Tanamkan Yap! Pada Aplikasi GOJEK
61	23 April 2018	Analyst Meeting Q1	Jakarta	BNI Cetak Laba Bersih Rp 3,66 Triliun di Kuartal 1 2018
62	24 April 2018	Energy Ranges School Campaign 2018	Jakarta	Dukung Program Energy Rangers School Campaign 2018, BNI Sediakan BNI Taplus Anak
63	25 April 2018	INACRAFT	Jakarta	BNI To Digital Meramaikan INACRAFT 2018
64	26 April 2018	Signing PKS antara BNI, PI, dan PTPN 3	Jakarta	BNI, PI, dan PTPN 3 Bersinergi Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pupuk
65	27 April 2018	Launching Kartu Debit GPN di INACRAFT	Jakarta	Kartu Debit BNI-GPN Hadir di Inacraft 2018
66	02 Mei 2018	Hari Pendidikan Nasional 2018	Jakarta	Rayakan Hardiknas 2018, BNI Undang 25.250 Pelajar Field Trip, Kenali Bank Lebih Dekat
67	05 Mei 2018	Media Workshop dan Gathering	Bogor	Tingkatkan Keamanan Transaksi, BNI Terapkan 3D Secure
68	07 Mei 2018	MoU antara BNI dan PELNI	Jakarta	BNI Dukung Transaksi Online, Pembayaran Tiket Kapal dan Top Up Agen PELNI
69	08 Mei 2018	MoU antara BNI dan Kemenkominfo	Jakarta	Kemenkominfo Gandeng BNI Gelar Gerakan 100 Smart City 2018
70	08 Mei 2018	Award Nasabah BNI	Jakarta	BNI Beri Penghargaan Bagi Nasabah Terbaik
71	09 Mei 2018	Layanan BNI Heli Service	Jakarta	Keistimewaan Nasabah BNI Emerald Kini Nasabah BNI Dapat Nikmati Layanan BNI Heli Service
72	09 Mei 2018	Penyaluran KUR	Rokan Hilir	BNI Perluas Penyaluran KUR Replanting Kelapa Sawit ke Riau
73	11 Mei 2018	Nota Kesepahaman (MoU) antara BNI dan PT Adamobile Solutions Networks	Jakarta	Manfaatkan Teknologi Blockchain, BNI Tingkatkan Bisnis Trade Finance dan Remittance
74	13 Mei 2018	Parade Asian Games	Jakarta	BNI Meriahkan Parade Asian Games 2018
75	14 Mei 2018	Penyaluran KUR	Mojokerto	BNI Perluas Penyaluran KUR Petani Tebu ke Mojokerto
76	14 Mei 2018	PKS antara BNI dan PGN	Jakarta	Dukung Bisnis PGN, BNI Sediakan Kartu Kredit BNI Garuda dan Layanan Perbankan



No.	Tanggal	Acara	Tempat	Judul Siaran Pers
77	16 Mei 2018	Kunjungan Kerja Menteri BUMN ke Garut	Garut	BNI Dukung Program Serap Gabah di Garut
78	17 Mei 2018	Pembagian Sembako Murah	Pamekasan	BNI Persembahkan 6.000 Paket Sembako Murah untuk Keluarga PMI
79	17 Mei 2018	Awarding BNI	Jakarta	BNI Dinobatkan Sebagai <i>The Best</i> #1 Bank BUMN
80	21 Mei 2018	Serap Gabah Garut	Garut	Percepatan KUR, BNI Sinergikan Program Serap Gabah dan Kewirausahaan Pertanian di Garut
81	21 Mei 2018	Pemaparan Mudik Gratis BNI dan Buka Puasa Bersama Wartawan	Jakarta	Gelar BNI Digimudik 2018, BNI Buka Pendaftaran Peserta Secara <i>Online</i>
82	25 Mei 2018	PKS antara BNI dan AP Kargo	Jakarta	BNI & Angkasa Pura Kargo Perluas Kerja Sama, Ragam Implementasi Transaksi Cashless Diperbanyak
83	25 Mei 2018	Pasar Murah Cilacap	Cilacap	Apresiasi Para Pengirim Uang, BNI Sebarkan 6.000 Paket Sembako Murah
84	27 Mei 2018	Promo Lebaran 2018	Jakarta	Lebaran Seru, BNI Tawarkan Promo Lengkap
85	28 Mei 2018	<i>Media Update</i> dan Buka Puasa Bersama Redaktur Media	Jakarta	Jelang Lebaran Kebutuhan Naik 5%, BNI Siap Penuhi Permintaan Uang Tunai
86	28 Mei 2018	PKS antara BNI dan PT PAM Digital Teknologi	Balikpapan	Kolaborasi BNI dan PAM Digital Teknologi, Terapkan Yap! Pada Transaksi di Mall
87	05 Juni 2018	PK antara BNI dan Staf Bappenas	Jakarta	Diujicoba di Bappenas, BNI Tawarkan Pembiayaan Perumahan Aparatur Sipil Negara
88	06 Juni 2018	Pasar Murah BNI	Karawang	BNI Adakan Pasar Murah, Hasil Penjualan Untuk Bangun Fasilitas Sanitasi Irigasi dan MCK
89	07 Juni 2018	MoU BNI dan Railink	Jakarta	Perdalam Penggunaan Uang Elektronik, BNI & Railink Garap Pengguna KA Bandara
90	08 Juni 2018	Mudik Bareng Kemenkumham	Jakarta	Gandeng BNI, Kemenkumham RI Pulangkan Pegawai ke Kampung Halaman
91	08 Juni 2018	Mudik Bareng BNI		BNI Gelar Digimudik 2018, Ajak Santri dan Penghafal Quran Pulang Kampung
92	08 Juni 2018	Mudik Bareng BNI	Jakarta	Ramaikan Mudik Gratis Bareng BUMN 2018, BNI Bersinergi dengan Garuda dan KAI Angkut 1.250 Pemudik Pulang Kampung
93	22 Juni 2018	Peresmian Tol Ruas Gempol - Pasuruan Seksi 2	Jakarta	Kredit BNI Membuahkan Hasil, Tol Gempol - Pasuruan Seksi 2 Beroperasi
94	22 Juni 2018	Sosialisasi Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM	Surabaya	Pasca Penurunan Tarif, BNI Siap Tampung Pembayaran Pajak UMKM
95	27 Juni 2018	Operasional Terbatas BNI saat PILKADA 2018	Jakarta	BNI Beroperasi Secara Terbatas pada PILKADA 2018
96	28 Juni 2018	Penyediaan Media Pembayaran Asian Games 2018	Jakarta	BNI Sediakan Media Pembayaran Untuk Asian Games 2018
97	29 Juni 2018	Deville BNI	Jakarta	Jelang Asian Games, HUT ke-72 BNI Diwarnai Kompetisi Olahraga Rakyat
98	29 Juni 2018	PKS antara BNI dan TNI AL	Jakarta	Gandeng BNI, TNI AL Salurkan Gaji Prajurit Secara Cashless
99	29 Juni 2018	PKS antara BNI dan ITS	Jakarta	BNI & Ikatan Alumni ITS Terbitkan Kartu Anggota Berasuransi
100	01 Juli 2018	Serap Kopi Banyuwangi	Banyuwangi	BNI & PTPN XII Perdalam Dukungan Untuk Petani Kopi 1.500 Petani Jawa Timur Peroleh Kredit BNI
101	04 Juli 2018	Padat Karya Karawang	Karawang	Rayakan HUT ke-72, BNI Ajak Warga Ikuti Padat Karya Tunai
102	05 Juli 2018	Syukuran HUT ke-72 BNI	Jakarta	Bertransformasi Digital di Usia 72 Tahun, BNI Tumbuh Lampau Fungsi Perbankan
103	05 Juli 2018	Syukuran HUT ke-72 BNI	Jakarta	Rayakan HUT ke-72, Nikmati Beragam Promo Bertema 72 dari BNI



No.	Tanggal	Acara	Tempat	Judul Siaran Pers
104	06 Juli 2018	Launching Kartu <i>e-Logbook</i>	Jakarta	Sosialisasikan GNNT, BNI Ajak Pengemudi AKAP Bertransaksi <i>Cashless</i>
105	08 Juli 2018	<i>Family Gathering</i> HUT BNI	Jakarta	Berusia 72 Tahun, BNI Masuki Babak Baru Perbankan
106	08 Juli 2018	<i>Family Gathering</i> HUT BNI	Jakarta	Puncak Perayaan HUT ke-72 BNI, BNI Tawarkan Beragam Promo
107	08 Juli 2018	<i>Family Gathering</i> HUT BNI	Jakarta	BNI Optimalkan Penggunaan Yap! Untuk Donasi pada Puncak Rangkaian HUT ke-72 BNI
108	11 Juli 2018	BNI UI Half Marathon	Depok	Makin Siap Ikut BNI-UI Half Marathon 2018 lewat Berbagai Aktivitas saat <i>Race Pack Collection</i>
109	15 Juli 2018	BNI UI Half Marathon	Jakarta	BNI Sediakan Promo Selama BNI-UI Half Marathon 2018
110	17 Juli 2018	Perjanjian Kredit Tambahan untuk fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Dana Talangan Tanah	Jakarta	BNI Turut Biayai Ruas Tol Pertama di Sulawesi Utara
111	18 Juli 2018	<i>Analyst Meeting</i> H1	Jakarta	Kuartal Kedua 2018, Kredit BNI Tumbuh 11,1%
112	18 Juli 2018	<i>Launching Virtual Account Debit Combo Card</i>	Yogyakarta	Dukung Asian Games 2018, BNI Luncurkan <i>Virtual Account Debit Combo Card</i>
113	19 Juli 2018	<i>Torch Relay</i> Yogyakarta	Yogyakarta	Dukungan Total BNI Terhadap Asian Games 2018, Awali Kirab Obor dari Titik Nol Yogyakarta
114	20 Juli 2018	Perjanjian Kredit Sindikasi	Jakarta	BNI Dukung Proyek Tol Ruas Kunciran-Serpong
115	20 Juli 2018	PK antara BNI dan PT Banshu Electric Indonesia	Jakarta	Dorong Ekspor RI, BNI Salurkan Pinjaman Berdenominasi Yen
116	23 Juli 2018	<i>Press Conference</i> KiosTix	Jakarta	Beli Tiket Asian Games kiosTix & BNI Berikan Promo pada Kaum Millennial, Raih Diskon Hingga 72% dengan Yap!
117	24 Juli 2018	<i>Signing</i> PK	Jakarta	BNI Kucurkan Kredit untuk Perusahaan <i>Pulp & Paper</i> di Amerika
118	25 Juli 2018	<i>Signing</i> PKS BNI, Jasindo, dan PTPN XII	Jakarta	Semester I 2018, Penyaluran KUR BNI 2018 Telah Capai 70% dari Target
119	26 Juli 2018	<i>Torch Relay</i> Papua	Raja Ampat	Asian Games 2018, BNI Wujudkan Kirab Obor di Raja Ampat, Akrabkan Yap! Di Papua
120	28 Juli 2018	Festival Indonesia	Tokyo	Kain Tenun Dayak Telah Singgah di Jepang
121	31 Juli 2018	PK antara BNI dan Jasamarga Jalanlayang Cikampek	Jakarta	BNI Turut Biayai Proyek Tol Layang Cikampek II
122	01 Agustus 2018	<i>Launching Smart Office</i> Kementerian Desa	Jakarta	Kemendes PDTT Gandeng BNI Wujudkan <i>Smart Office</i>
123	02 Agustus 2018	PKS antara BNI dan GME	Seoul	BNI Gandeng Global Money Express Korea, Kini Remitansi dari Korea Lebih Murah 70%
124	07 Agustus 2018	<i>Launching IPC Smart Card</i>	Jakarta	Dukung IPC, BNI Salurkan <i>Port Service Financing</i> dan <i>IPC Smart Card</i>
125	09 Agustus 2018	CSR Korban Gempa Bumi	Mataram	Bantu Korban Gempa Lombok, BNI & BNI Life Bangun Posko Kesehatan & Dapur Umum
126	09 Agustus 2018	Peluncuran Aplikasi SIMPAKI	Yogyakarta	Kerja sama DJKI dan BNI, Pembayaran Kekayaan Intelektual Kini Bisa <i>Online</i>
127	11 Agustus 2018	<i>7 Missions</i> BNI	Jakarta	BNI Gelar Kompetisi <i>7 Missions</i> 2018
128	12 Agustus 2018	Puncak Acara <i>Energy Ranges School Campaign</i> 2018	Jakarta	BNI Berikan Taplus Anak bagi Atlet Cilik Berprestasi
129	13 Agustus 2018	MoU dan PKS antara BNI dan ASDP	Jakarta	Beli Tiket Ferry Makin Mudah Pakai BNI
130	14 Agustus 2018	Addendum PKO BNI dan 39 Bank Lain	Jakarta	Penyaluran FLPP BNI Berlanjut
131	14 Agustus 2018	Penyaluran KUR Garam	Kupang	Dimulai di NTT, BNI Pionir Penyaluran KUR untuk Petani Garam



No.	Tanggal	Acara	Tempat	Judul Siaran Pers
132	15 Agustus 2018	Signing MoU BNI dan Kimia Farma	Jakarta	Apotik Kimia Farma Kini Jadi Agen46 BNI
133	15 Agustus 2018	Signing MoU BNI dan Angkasa Pura Logistik	Jakarta	Total Baggage Solution Angkasa Pura Logistik Kini Cashless dengan BNI
134	15 Agustus 2018	Signing MoU BNI dengan SPAM	Jakarta	Bangun Fasilitas Air Minum di Lampung, BNI dan IIF Kucurkan Rp 550 Miliar
135	16 Agustus 2018	Signing PKS BNI dengan AP	Jakarta	Angkasa Pura Logistik Kini Cashless dengan BNI
136	20 Agustus 2018	Penyerahan apresiasi kepada penggiat lingkungan yang berpartisipasi dalam Gerakan Ayo Menabung	Jakarta	Berstatus Bank Sampah, Agen46 BNI Miliki 22.000 Nasabah Cilik
137	21 Agustus 2018	Penutupan Asian Games	Jakarta	Kenang Asian Games 2018 dengan Produk Bank
138	30 Agustus 2018	Konferensi Pers Persiapan UN-ICW ke-35 dan Temu Nasional Perempuan Indonesia	Jakarta	Sekitar 1.200 Tokoh Wanita Akan Kunjungi Yogyakarta, BNI Jadi Pendukung Utama
139	30 Agustus 2018	Penyaluran Pembiayaan di Hongkong	Hong Kong	BNI Salurkan Kredit di Hong Kong, Dukung Perusahaan Berorientasi Ekspor
140	30 Agustus 2018	The Asian Banker Excellence in Retail Financial Service Awards	Jakarta	Digitalisasi BNI Diakui The Asian Banker, Raih Remittance Product and Service of the Year 2018
141	04 September 2018	Hari Pelanggan Nasional 2018	Jakarta	Hari Pelanggan, Direksi BNI Sapa Milenial di Kampus
142	06 September 2018	Penyerahan simbolis bantuan TASA	Jakarta	Hari Anak Nasional BNI Jadi Penyalur Bantuan Bagi Anak Terlantar Tahun 2018 akan Sentuh 70.000 Anak
143	07 September 2018	Cool Japan Travel Fair (CJTF) 2018	Jakarta	Gandeng BNI, HIS Tawarkan Harga Spesial ke Jepang
144	09 September 2018	Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018	Jakarta	Ini Kekuatan BNI Dukung Pertemuan Tahunan IMF – World Bank, BNI Layani Main Campuss Secara Penuh
145	10 September 2018	Press Conference BNI dan Trip Logic	Jakarta	Perkuat Layanan di Sektor Logistik, BNI & Triplogic Bangun Sistem Transaksi Digital
146	15 September 2018	Penandatanganan PK antara BNI dengan Golden Mountain Textile & Trading Pte Ltd	Jakarta	Genjot Ekspor, BNI Biayai Anak Usaha Sritex di Singapura
147	17 September 2018	Press Conference BNI dan ITB	Jakarta	Sukses Tahun Lalu, BNI & ITB Gelar Kembali Lomba Ultra Marathon
148	26 September 2018	Penandatanganan akad kredit massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera BNI FLPP	Banjarmasin	Genjot Program Sejuta Rumah, BNI Gelar 1.046 Akad Kredit Massal
149	30 September 2018	Penandatanganan PKS BNI dengan KAI	Bandung	Sinergi BNI dan KAI, Integrasi Layanan Pembayaran BNI Pada Aplikasi KAI Access
150	01 Oktober 2018	Bantuan BNI untuk Palu	Jakarta	Tanggap Darurat Palu, Sebagian Kantor Cabang BNI Mulai Beroperasi
151	03 Oktober 2018	IBD Expo	Surabaya	Ramaikan IBDExpo 2018, BNI Usung Digital Ecoservices
152	04 Oktober 2018	Press Conference BNI IMF	Jakarta	Pertemuan Tahunan IMF – World Bank Group 2018, BNI Luncurkan Virtual Account Debit dan Aplikasi BNIVast
153	12 Oktober 2018	Bantuan BNI untuk Palu	Jakarta	Bantu Korban Bencana, BNI Ajak Psikolog Beri Pertolongan Pertama Psikologi Pascabencana
154	12 Oktober 2018	BNI ITB Ultra Marathon	Jakarta	BNI ITB Ultra Marathon, Menpora Lepas Pelari dari Lobi Kantor BNI, Kampanyekan Literasi Keuangan Sambil Olahraga
155	14 Oktober 2018	Reuni Akbar UI	Depok	Homecoming Day Universitas Indonesia BNI & UI Kembangkan Aplikasi UI Connect

No.	Tanggal	Acara	Tempat	Judul Siaran Pers
156	18 Oktober 2018	Paparan Kinerja BNI Q3 2018	Jakarta	Kuartal III Tahun 2018, BNI Cetak Laba Bersih Rp 11,4 Triliun, Didorong Pertumbuhan Kredit 15,6%
157	18 Oktober 2018	Wisata Edukasi Perbankan	Jakarta	BNI Pecahkan Rekor MURI, Ajak 3.500 Pelajar Belajar Perbankan Serentak
158	18 Oktober 2018	Hari Anak Nasional Tahun 2018	Lombok Utara	Hari Anak Nasional 2018, BNI Jadi Penyalur 67.754 Tabungan Sosial Anak
159	23 Oktober 2018	Bantuan BNI untuk Sembalun	Sembalun	Tanggap Darurat Bencana NTB, BUMN Realisasikan 1.500 Huntara
160	30 Oktober 2018	Gerakan Ayo Menabung dengan Sampah	Jakarta	OJK Gandeng BNI Canangkan Gerakan Menabung Sampah
161	31 Oktober 2018	Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan UMKM melalui program Rumah Kreatif BUMN (RKB)	Jakarta	BNI - DJP Gelar Pelatihan di 3 Kota Sedot 450 Pengusaha UMKM
162	31 Oktober 2018	Gue Beda Gue Indonesia – <i>Music Diversity</i>	Jakarta	Peringati Sumpah Pemuda, Anak Muda Diperkenalkan BNI Griya Gue
163	01 November 2018	Pelatihan UMKM Pangandaran	Pangandaran	Dilatih Bisnis Out of The Box, UMKM Priangan Dipacu Untuk Naik Kelas
164	02 November 2018	<i>Building Strategic Partnership To Boost Indonesia's Export</i>	Los Angeles	Perkuat Ekspor RI, BNI Rangkul Mitra Bisnis di Amerika Serikat
165	07 November 2018	<i>Press Conference</i> Indonesia Master	Jakarta	BNI Kembali Menjadi Sponsor Utama Turnamen Golf Bergengsi Tanah Air
166	07 November 2018	Penandatanganan Program Promo antara BNI dan Pertamina	Jakarta	BNI Dukung Program Cashless di SPBU Pertamina, Beragam Promo Siap Manjakan Customer
167	13 November 2018	Program Aku Saudagar Muda	Tegal	BNI Rintis "Aku Saudagar Muda" Cetak Siswa SMK Berjiwa Bisnis
168	13 November 2018	Peresmian BUM-Desa Center	Malang	Dukung Program Otoritas Jasa Keuangan, BUMDES Binaan BNI Jadi BUM-Desa Center
169	16 November 2018	Kerja sama BNI New York dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York	New York	Dukung Perdagangan dan Investasi AS di Indonesia, <i>Trade Finance</i> BNI Cabang New York Tumbuh 25%
170	15 November 2018	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Samsat Online Nasional Tahap II	Jakarta	E-Samsat Tahap II Dibuka, BNI Perluas Layanan ke 16 Provinsi
171	28 November 2018	Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober 2018 - Maret 2019	Aceh Besar	BNI Inisiasi Gerakan Mengawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019
172	28 November 2018	Peresmian Ruas Tol Solo-Ngawi Segmen Sragen - Ngawi	Sragen	Ruas Tol Solo-Ngawi Segmen Sragen - Ngawi Resmi Beroperasi
173	30 November 2018	<i>Launching</i> Tim Proliga	Jakarta	Tim Bola Voli BNI 46 Terbentuk, Siap Buru Gelar Juara
174	03 Desember 2018	<i>The Crazy Toys Sale</i>	Jakarta	Jelang Natal & Tahun Baru, BNI & Toys Kingdom Gelar <i>The Crazy Toys Sale</i>
175	05 Desember 2018	Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober 2018 - Maret 2019	Jember	Gerakan 25.000 Petani, BNI & Kementerian Kawal Musim Tanam 2018/2019
176	11 Desember 2018	Pro-Am BNI Indonesian Masters	Jakarta	BNI Kembali Wujudkan Turnamen Pro-Am Indonesian Masters 2018
177	12-Dec-18	Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober 2018 - Maret 2019	Barito Kuala	Kawal Musim Tanam 2018/2019, BNI & Kementan Kini Garap Bumi Borneo
178	12 Desember 2018	<i>Santa Claus is Coming to RKB</i>	Jakarta	Jelang Natal, BNI Bagikan 10.000 Bingkisan
179	13 Desember 2018	Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober 2018 - Maret 2019	Malang	Mulai di Malang, KUR BNI Wujudkan <i>Drying Center</i> Petani Warnai Gerakan Mengawal Musim Tanam, Darmin Turun ke Sawah
180	17 Desember 2018	Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober 2018 - Maret 2019	Purwokerto	Milenial BUMN Diajak Peduli Petani, Gerakan Kawal Musim Tanam Sentuh Banyumas



No.	Tanggal	Acara	Tempat	Judul Siaran Pers
181	18 Desember 2018	Perayaan Hari Ibu Kemenkumham	Jakarta	BNI Hasilkan Graduasi PKH dan PMI Purna
182	19 Desember 2018	Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober 2018 - Maret 2019	Deli Serdang	Lanjutan Gerakan Kawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019, BNI Garap Deli Serdang
183	20 Desember 2018	Media Workshop "Layanan Akhir Tahun"	Jakarta	71 Outlet BNI Tetap Beroperasi Pada Libur Natal 2018
184	20 Desember 2018	BUMN Berbagi Kasih	Ambon	BUMN Berbagi Kasih, 500 Anak Yatim Diajak Bergembira Sambut Natal
185	21 Desember 2018	Signing FLPP	Jakarta	Lampau Target FLPP 2018, BNI Akan Salurkan KPR Subsidi untuk 10 Ribu Rumah Tahun 2019
186	26 Desember 2018	Signing BNI dengan Angkasa Pura I	Jakarta	Kerja Sama BNI & Angkasa Pura I, Bayar Tagihan Kian Tertib dengan Sistem H2H
187	26 Desember 2018	Grand Launching Kereta Api Galunggung	Bandung	Jalur Kereta Bandung - Tasikmalaya Kembali Aktif, BNI Berikan Promo

BULETIN

BNI memiliki majalah internal yaitu majalah Sinergi, selama tahun 2018 telah menerbitkan 6 (enam) edisi dengan tema sebagai berikut:

Tema	Edisi
Optimalisasi Model Bisnis <i>Digital</i> BNI di Era Milenial	104
Transformasi <i>Digital</i> Dari Panggung Hiburan	105
Program Sergab BNI Sejahterakan Petani	106
Kian Inovatif di Era <i>Digital</i>	107
BNI Mengawal Asian Games 2018	108
BNI Pelopor Gerakan <i>Non Tunai</i>	109

Tools komunikasi internal berupa *email* dan sms BNI Menyapa, terdiri dari:

1. informasi korporat yang bersifat *bankwide* dan *high level* yang disampaikan oleh Direksi kepada segenap pegawai (*Newsletter*).
2. informasi korporat yang bersifat *bankwide* dan lebih teknis yang disampaikan oleh Divisi KMP kepada segenap pegawai (Info Korporat).
3. informasi terkait dengan SDM dan bersifat teknis yang harus disampaikan segera oleh Divisi SDM kepada segenap pegawai (Pesan SDM).
4. informasi lainnya yang bersifat *bankwide* namun tidak terkait dengan pemasaran, produk maupun layanan (Kolom BNI).

Selama tahun 2018, jumlah SMS BNI Menyapa sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) kali. Adapun daftar topik *email/sms* BNI Menyapa antara lain sebagai berikut.

1. 22 Tahun BNI Life berkontribusi untuk bangsa! youtu.be/PhFzjJFE-Mc & youtu.be/i0nDfG8E9_0
2. Aktifkan UnikQu Anda di Yap! utk pengalaman transaksi yg lebih menyenangkan. Unduh di Google Play atau klik <http://bit.ly/yapaja>. Info lengkap klik www.yap.id

3. Ayo isi Survei Mapping Media Sosial Pegawai dan raih voucher belanja online.
4. Berdasarkan hasil RUPS Tahunan BNI pada 20 Maret 2018, terdapat perubahan susunan Direksi & Dewan Komisaris Perseroan. Info lengkap <https://goo.gl/GUKwN8>
5. Aspek Hukum Bidang Dana & Aktivitas Dalam Negeri:
6. Pembukaan & Pencairan Rek Simpanan. Info: <http://bnicorpu.co.id/>Digital Learning>E-Book>Hukum>Legal Blast>
7. Aspek Hukum Bidang Dana & Aktivitas Dalam Negeri:
8. Pembukaan & Pencairan Rek Simpanan. Info: <http://bnicorpu.co.id/>Digital Learning>E-Book>Hukum>Legal Blast>
9. Ayo kirimkan usulan logo anda untuk HUT ke-72 BNI! Menangkan hadiah uang tunai & gadget menarik senilai total puluhan juta rupiah. Info lengkap BNI Forum
10. Ayo meriahkan! Defile HUT Ke-72 BNI pkl 15.00 WIB di halaman KP BNI. Tunjukkan kreatifitasmu dan dukung kontingen jagoan kamu. Info bit.ly/DeFileHUTke72BNI
11. Bagi Umat Muslim Ibadah Shalat Subuh pada saat Family Gathering dapat dilaksanakan di Masjid Al-I'tishom dan Masjid Baitussalam (Arthaloka)
12. Berdasarkan hasil RUPS Tahunan BNI pada 20 Maret 2018, terdapat perubahan susunan Direksi & Dewan Komisaris Perseroan. Info lengkap <https://goo.gl/GUKwN8>
13. BNI bersama Universitas Indonesia dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia segera menggelar BNI-UI Half Marathon 2018. Info lengkap <https://goo.gl/xjW6nU>
14. BNI mencatatkan laba Rp11,44T pada Q3 2018. Info lengkap di e-Sinergi46 (Android <http://bit.ly/AndroidSinergi> & iOS <http://bit.ly/BNISinergi46>)
15. Daftarkan diri Anda untuk mengikuti #7missions BNI! Ikuti keseruannya dan menangkan total hadiah 50 juta rupiah. Info lengkap klik bit.ly/BNI7MissionsRules
16. Dapatkan program khusus pegawai BNI pada pameran BNI Multifinance bekerja sama dengan Nissan & Datsun

- pada 21-23 Feb 2018 mulai pk1 09.00 di Parkir Selatan Gd BNI
17. Dewan Komisaris & Direksi BNI mengucapkan Selamat Idul Fitri 1439 H mohon maaf lahir & batin. Kemenangan seutuhnya berawal dr perubahan sepenuhnya #BNItuDigital
 18. Download dan aktivasi aplikasi Sobat BUMN! Pahami panduan penggunaannya. Klik link berikut untuk mengakses panduan Sobat BUMN <http://bit.ly/sobatbumnpanduan>
 19. Employee Journalism! You see it, you report it. Kirim berita mengenai BNI & raih honorarium utk setiap berita yg dimuat. Info <http://bit.ly/journalism4employee>
 20. Hari ini Selasa, 20 Maret 2018 BNI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bertempat di Ballroom Hotel Shangri-La. Info <https://goo.gl/LrZUGz>
 21. Ikuti e-sinergi46 Year End Quiz! Menangkan 2 Samsung Gear & 30 Tabungan Rp 500rb. Info lengkap klik <http://bit.ly/esinergi46yearendquiz>
 22. Ikuti keseruan Nonton Bareng Piala Dunia Uruguay vs France pada Jumat, 6 Juli 2018 di Area Parkir KP BNI mulai pk1 16.30. Dapatkan berbagai doorpize menarik!
 23. Ikuti sosialisasi Program Beyond Banking & pahami Corplan BNI. Saksikan livestreaming di <http://bit.ly/bnitransformationlive> atau cek link di e-sinergi46
 24. Ikuti Stress Test Yap! Jumat (23/2) pk 09.00-10.00 WIB, transaksikan Yap! mu di <https://bit.ly/2CAfHW8> Jutaan rupiah & Samsung A8 menanti. Info BNIForum
 25. Ingin belajar tapi tidak punya teman? Belajar saja dengan LeVA. Download app BNI Call dari Play store/App store & ikuti juknis LeVA di BNIForum.
 26. Jangan lupa mencatatkan kehadiran Anda Pada Upacara dlm rangka Hari Lahir Pancasila, 01 Juni 2018 pk1 07.00 WIB di Kantor Pusat melalui check in e-Absensi!
 27. Khusus Pegawai BNI, CASHBACK Bayar Tagihan Telkom & PLN hingga 100% !! Segera Daftar Autodebet di Cabang terdekat pada Periode November 2018. S&K di BNI Forum
 28. Khusus Pegawai BNI. Ayo tunjukkan Semangat Hari Pahlawan dg transaksi BNI SMS Banking sebanyak2nya & dapatkan hadiah Rp 200rb. Periode 9-16 Nov'18. S&K di BNI Forum
 29. Khusus untuk Anda!Ubah trx belanja Kartu Kredit BNI Anda mjd cicilan 0% 3&6bln (min 2,5jt) & 12bln (min 5jt). Periode trx 15Mar-15Apr18. Hub BNI Call 1500046.S&K
 30. Kirimkan usulan logo Kamu untuk HUT ke-72 BNI! Menangkan hadiah uang tunai & gadget menarik senilai total puluhan juta rupiah. Info lengkap BNI Forum
 31. Kuis e-sinergi46 Year End Quiz akan berakhir pd 31 Des 2018! Jawab semua pertanyaan (4 pertanyaan) & raih hadiahnya. Info : <http://bit.ly/esinergi46yearendquiz>
 32. Laba bersih BNI Paruh Pertama tahun 2018 tumbuh 16% (yoy) atau mencapai Rp 13,62 triliun. Mari terus tingkatkan kinerja tahun 2018. Baca Info lengkapnya di Sinergi 46. Download di Android bit.ly/AndroidSinergi46 & iOS bit.ly/BNIsinergi46
 33. Laba bersih BNI tahun 2017 mencapai Rp13,62 triliun atau naik 20,1% (yoy). Mari terus tingkatkan kinerja tahun 2018. Info lengkap di BNI Forum
 34. Majalah Sinergi46 kini bertransformasi mnjdi Digital. Unduh di smartphone & ikuti Kuisnya. Android bit.ly/AndroidSinergi46 & iOS bit.ly/BNIsinergi46 #BNItuDigital
 35. Manajemen Menyapa "Bijak Menggunakan Sosial Media" telah mengudara via Livestream Youtube <https://youtu.be/l-bDQjeiDto> atau cek Bio IG @Quickpose jika link mati
 36. Manfaat BNI Learning Wallet-mu di 2018 ini, langsung klik dan akses bnicorpu.co.id/BLW. Ayo belajar sesuai dengan pilihanmu sekarang juga!
 37. Mau dapat Top Up Taplus, mobil civic turbo, honda scoopy dan hadiah lainnya dari BNI Life? Caranya gampang, klik di bit.ly/2EFyt4r & bit.ly/2CYt86N . S&K berlaku
 38. Menyambut HUT BNI Ke-72 Dapatkan DISKON provisi 72% & bebas biaya adm untuk pengajuan BNI Griya khusus pegawai BNI & Perusahaan Anak. Hubungi BNI Cab terdekat
 39. Saksikan Manajemen Menyapa "Bijak Menggunakan Sosial Media" bersama narasumber kompeten. Livestream Youtube <https://youtu.be/tCqAVPFjI> So sore ini pk1 15.30 WIB
 40. Meriahkan Family Gathering BNI dalam rangka HUT Ke-72 BNI. Ajak keluarga Anda menikmati berbagai atraksi. Info lengkap bit.ly/famgathBNI
 41. Meriahkan Bazaar KKB BNI Pesona Kreasi Nusantara! Dapatkan berbagai penawaran menarik 16-18 April 2018 di Lt. 25 Kantor Pusat BNI. Info bit.ly/bnimenyapa-kkb
 42. Peran serta saudara sebagai BNI Expert untuk membuat Q&A Chatbot menjadi nilai tambah. Penyampaian Q&A kami diperpanjang sd 31 Ags 2018. Email bnicorpu@bni.co.id
 43. Pengen voucher belanja online? Isi Survei Mapping Media Sosial Pegawai. Klik <https://goo.gl/gijWQe> periode survei tgl 16-26 Maret 2018
 44. Segenap insan BNI, manfaatkan kesempatan belajar Leadership secara digital (bagi semua level dan talent class), dengan mengakses BNI Smarter.
 45. Selama libur lebaran BNI membuka Outlet Operasional Terbatas. Klik link berikut untuk melihat daftar Outlet Operasional Terbatas bit.ly/outletterbatasbni
 46. Simak artikel "Cara Tepat Menghindari Berita Bohong di Medsos" di e-Sinergi46! Unduh di Android <http://bit.ly/AndroidSinergi46> & iOS <http://bit.ly/BNIsinergi46>
 47. Simak artikel "Cara Tepat Menghindari Berita Bohong di Medsos" di e-Sinergi46! Unduh di Android <http://bit.ly/AndroidSinergi46> & iOS <http://bit.ly/BNIsinergi46>
 48. Sukseskan Earth Hour 2018 dg mematikan lampu & peralatan elektronik Anda pada Sabtu 24/3/2018 pk1 20.30-21.30 waktu setempat. Sayangi bumi demi anak cucu kita.
 49. Temukan jawaban atas isu hukum yang sering muncul di KC Mega Kuningan. Info <http://bnicorpu.co.id/>Digital>



Learning> E-Book > Hukum > Legal Blast

50. Temukan jawaban atas isu hukum yang sering muncul di KC Margonda. Info lengkap <http://bnicorpu.co.id/>
51. um terkait pembukaan rekening giro non perorangan. Info lengkap bnicorpu.co.id > Digital Learning > E-book > Hukum > Legal Blast
52. Test Drive Motor dan Mobil terbaru hanya di BNI Multifinance – Suzuki Expo, 3-4 & 7-8 Mei di Parkiran Gd. BNI Kantor Pusat
53. Yuk Kunjungi Pameran BUMN Terbesar di Indonesia | IBD EXPO 2018 (@ibdexpo) di Grand City, Surabaya tgl 3 - 6 Oktober 2018, mulai pukul 10.00 - 20.00 WIB.
54. Transformasi Digital BNI telah membawa BNI menjadi institusi yg menawarkan layanan serba cepat, fleksibel, & mobile. Mari terus tingkatkan kinerja. Dirgahayu BNI! Melayani Negeri kebanggaan Bangsa

55. Tingkatkan person value-mu dengan melakukan learning & sharing dan catatkan realisasinya melalui bnicorpu.co.id dari gadget kamu. Learn on, Share on!

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

Prinsip GCG dalam hal ini Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas salah satu bentuk implementasinya adalah Keterbukaan Informasi dalam bentuk transparansi penyampaian laporan yang dilakukan oleh BNI kepada segenap *stakeholder* baik itu Pemegang Saham, regulator maupun masyarakat luas. Berikut daftar Keterbukaan Informasi yang dilakukan oleh BNI selama tahun 2018 baik yang dilakukan melalui *website*, sistem pelaporan elektronik regulator maupun surat. Adapun Tranparansi Penyampaian Laporan BNI selama tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website		
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI
1	Informasi Pengakhiran dan Pengangkatan Anggota Independen Komite Audit BNI	2 Januari 2018			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit 	√	√	√
2	Laporan Informasi atau Fakta Material: Informasi Penambahan Penyertaan Modal Pada Anak Perusahaan Perseroan: PT Bank BNI Syariah	2 Januari 2018	√	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√	√
3	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Desember 2017	8 Januari 2018	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	√	√	-
4	Penyampaian Data Utang/ Kewajiban Dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Desember 2017	8 Januari 2018	-	√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Utang/Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing.	-	√	-
5	Daftar 10 Pemegang Saham Terbesar (Lokal dan Asing) Posisi Desember 2017	8 Januari 2018	-	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	-	-	-
6	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	15 Januari 2018	√	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum			
7	Laporan Informasi atau Fakta Material: Perseroan menyelenggarakan <i>Analyst Meeting</i> Kinerja Desember 2017 (audited)	17 Januari 2018	√	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√	√



No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website		
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI
8	Laporan Keuangan Publikasi Posisi Desember 2017 (audited)	18 Januari 2018	√	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	√	√	√
9	Laporan Keuangan Konsolidasi Posisi Desember 2017 (audited)	18 Januari 2018	v	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	-	√	√
10	Rencana RUPS Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30 Januari 2018	-	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	-	-	-
11	Perubahan Tanggal Penyelenggaraan RUPS Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5 Februari 2018	-	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	-	-	-
12	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Januari 2018	7 Februari 2018	v	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	√	√	-
13	Penyampaian Data Utang/ Kewajiban Dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Januari 2018	7 Februari 2018	-	√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Utang/Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing.	-	√	-
14	Pengumuman RUPS Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9 Februari 2018	v	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	-	-	-
15	Publikasi Pengumuman RUPS Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9 Februari 2018	v	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	√	√	v
16	Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode Desember 2017	13 Februari 2018	-	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan 	-	-	-
17	Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26 Februari 2018	v	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	-	-	-



No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website		
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI
	Publikasi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26 Februari 2018	v	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	√	√	v
18	Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26 Februari 2018	v	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	√	√	v
19	Klarifikasi dan Penjelasan (Pemberitaan Situs Bisnis.com dengan judul "Bank BUMN Siap Terbitkan Surat Utang Konversi Rp6,5 Triliun")	26 Februari 2018	-	√	Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi			
20	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Februari 2018	6 Maret 2018	v	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	√	√	-
21	Penyampaian Data Utang/ Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Februari 2018	6 Maret 2018	-	√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Utang/Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing.	-	√	-
22	Informasi Ralat Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9 Maret 2018	v	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	v	v	-
23	Publikasi Informasi Ralat Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9 Maret 2018	v	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	√	√	v
24	Laporan Tanggal Efektif Pengangkatan Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20 Maret 2018			Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan			
25	Penyampaian Bahan RUPS Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk Mata Acara <i>Recovery Plan</i>	20 Maret 2018	v	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	v	√	v
26	Penyampaian Penjelasan Mengenai Tindak Lanjut Pengaduan Pensiunan BNI	21 Maret 2018	√		Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	√		



No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website		
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI
27	Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final BNI	22 Maret 2018	√	v	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan No. II A Tentang Perdagangan Efek Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 	√	√	√
28	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	22 Maret 2018	v	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	-	-	-
29	Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	22 Maret 2018	v	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	√	√	√
30	Penyampaian Akta Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	29 Maret 2018		√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	√		
31	Penyampaian Data Utang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Maret 2018	5 April 2018	-	√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Utang/Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing.	-	√	-
32	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Maret 2018	5 April 2018	v	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	√	√	-
33	Daftar 10 Pemegang Saham Terbesar (Lokal dan Asing) Posisi Maret 2018	5 April 2018	-	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	-	-	-
34	Penyampaian Informasi Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan BNI	6 April 2018	-	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	-	-	-
35	Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada institusi-institusi beserta Otoritas Jasa Keuangan (Bank Indonesia)	9 April 2018	-	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	-	-	-
36	Penyampaian Hasil Pemantauan Peningkatan Atas Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017	19 April 2018	v	v	Peraturan No. IX.C.11, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Peningkatan Atas Efek Bersifat Utang			



No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website		
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI
37	Laporan Informasi atau Fakta Material: Perseroan menyelenggarakan <i>Analyst Meeting</i> Kinerja Maret 2018 (<i>unaudited</i>)	23 April 2018	v	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√	v
38	Laporan Keuangan Konsolidasian Posisi Maret 2018 (<i>unaudited</i>) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	24 April 2018	√	v	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi 	√	√	-
39	Laporan Keuangan Publikasi Posisi Maret 2018 (<i>unaudited</i>) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	24 April 2018	√	v	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi 	√	√	√
40	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi April 2018	8 Mei 2018	v	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	√	√	-
41	Penyampaian Data Utang/ Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi April 2018	8 Mei 2018	-	√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Utang/Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing.	-	√	-
42	Informasi Keanggotaan Komite Audit Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30 Mei 2018	√	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit 	√	√	v
43	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Mei 2018	7 Juni 2018	v	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	√	√	-
44	Penyampaian Data Utang/ Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Mei 2018	7 Juni 2018	-	√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Utang/Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing.	-	√	-
45	Penyampaian Data Utang/ Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Juni 2018	5 Juli 2018	-	√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Utang/Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing.	-	√	-



No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website		
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI
46	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Juni 2018	5 Juli 2018	v	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	√	√	-
47	Daftar 10 Pemegang Saham Terbesar (Lokal dan Asing) Posisi Juni 2018	5 Juli 2018	-	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	-	-	-
48	Laporan informasi dan fakta material: Perseroan menyelenggarakan <i>Analyst Meeting</i> Kinerja Juni 2018 (<i>unaudited</i>)	18 Juli 2018	v	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	√	√	√
49	Laporan Keuangan Konsolidasi Posisi Juni 2018 (<i>unaudited</i>) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	19 Juli 2018	v	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi 	√	√	-
50	Laporan Keuangan Publikasi Posisi Juni 2018 (<i>unaudited</i>) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	19 Juli 2018	v	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi 	√	√	v
51	Penyampaian Informasi Perubahan Kepemilikan Saham Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3 Agustus 2018	v	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	√	√	-
52	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Juli 2018	6 Agustus 2018	v	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	√	√	-



No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website		
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI
53	Penyampaian Data Utang/ Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Juli 2018	6 Agustus 2018	-	√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Utang/Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing.	-	√	-
54	Informasi Rencana <i>Public Expose</i> BNI	9 Agustus 2018	√	-	Peraturan Bursa Efek No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	√	-	-
55	Penerbitan Medium Term Notes (MTN) Subordinasi I BNI Tahun 2018 senilai Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)	10 Agustus 2018	√	√	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√	√
56	Penyampaian Materi <i>Public Expose</i>	21 Agustus 2018	√	-	Peraturan Bursa Efek No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	√	-	-
57	Penyampaian Laporan Hasil <i>Public Expose</i> BNI	31 Agustus 2018	√	-	Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	√	-	-
58	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Posisi Agustus 2018	6 September 2018	√	√	Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban	√	√	-
59	Penyampaian Data Utang/ Kewajiban dalam Valuta Asing Posisi Agustus 2018	6 September 2018	-	√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Utang/Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing.	-	√	-
60	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Posisi September 2018	4 Oktober 2018	√	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	√	√	-
61	Daftar 10 Pemegang Saham Terbesar (Lokal dan Asing) Posisi September 2018	4 Oktober 2018	-	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	-	-	-
62	Penyampaian Data Utang/ Kewajiban dalam Valuta Asing Posisi September 2018	4 Oktober 2018	-	√	<ul style="list-style-type: none"> Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Utang/Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	-	√	-
63	Perseroan menyelenggarakan Analyst Meeting Klnerja September 2018 (unaudited)	18 Oktober 2018	√	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan 	√	√	√



No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website		
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI
64	Laporan Keuangan Konsolidasi Posisi September 2018 (unaudited) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	19 Oktober 2018	√	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi 	√	-	-
65	Laporan Keuangan Publikasi Posisi September 2018 (unaudited) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	19 Oktober 2018	√	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi 	√	√	√
66	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Posisi Oktober 2018	5 November 2018	√	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	√	√	-
67	Penyampaian Data Utang/ Kewajiban dalam Valuta Asing Posisi Oktober 2018	6 November 2018	-	√	<ul style="list-style-type: none"> Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Utang/Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	-	√	-
68	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Posisi November 2018	5 Desember 2018	√	√	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	√	√	-
69	Penyampaian Data Utang/ Kewajiban dalam Valuta Asing Posisi November 2018	5 Desember 2018	-	√	<ul style="list-style-type: none"> Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Utang/Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 	-	√	-



PROGRAM ANTI KORUPSI

BNI telah memiliki pedoman anti korupsi yang tertuang dalam berbagai kebijakan antara lain Kode Etik, Pedoman Gratifikasi, dan *Whistleblowing System*. Berbagai pedoman tersebut telah diterapkan dengan baik dan dievaluasi efektivitasnya setiap tahun. Penjelasan tentang mekanisme anti korupsi disajikan sebagai berikut.

KODE ETIK

BNI senantiasa berupaya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Untuk mewujudkan hal tersebut, BNI telah memiliki *Code of Conduct* yang dinamakan Kode Etik BNI. Kode Etik BNI ini merupakan pedoman etika yang menjadi prinsip dan dasar yang memandu hubungan di antara Insan BNI dengan para pemangku kepentingan dalam berbisnis. Kode Etik berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Kode Etik BNI diberlakukan sejak tanggal 1 Desember 2010 yang merupakan hasil revitalisasi dari *Code of Conduct* sebelumnya (tahun 2001). Kode Etik BNI wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap Insan BNI (Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai BNI) yang ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh segenap Insan BNI pada surat Pernyataan Sikap Insan BNI sebagai wujud nyata komitmen dalam melaksanakan Kode Etik BNI.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Kode Etik BNI terdiri dari 14 butir yang pada prinsipnya mewajibkan segenap Insan BNI untuk:

1. Bertindak Profesional, dengan mengedepankan nilai-nilai budaya kerja Prinsip 46.
2. Menjadi panutan dan saling mengingatkan kepada bawahan, atasan, rekan kerja dan mitra kerja untuk melaksanakan Kode Etik BNI.
3. Menjaga hubungan baik antar sesama insan BNI.
4. Menjaga kerahasiaan bank dan kerahasiaan jabatan.
5. Menjaga keamanan kerja.
6. Melindungi kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Melakukan pencatatan, pelaporan dan pengadministrasian pekerjaan dengan baik, jujur dan akurat.
8. Mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan BNI.
9. Tidak memberi atau menerima hadiah dalam bentuk apapun, secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun, yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab kami.
10. Bertindak sebagai Narasumber, sepanjang untuk kepentingan BNI.
11. Tidak menjadi anggota dan donatur Partai Politik.
12. Tidak mengungkapkan informasi yang tidak benar mengenai BNI.
13. Tidak menggunakan asset BNI untuk kepentingan pribadi.

14. Tidak menyalahgunakan *Corporate Identity* BNI, untuk kepentingan pribadi.

Sampai dengan saat ini, materi Kode Etik tersebut masih cukup relevan dengan situasi dan kondisi di BNI serta perkembangan regulasi perbankan di Indonesia.

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

Kode Etik adalah salah satu bentuk komitmen BNI untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja BNI melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya. Pengelolaan Perseroan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. *Code of conduct* berlaku bagi seluruh insan Perseroan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan. Seluruh insan Perseroan mempunyai kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perseroan.

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Dalam rangka sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Kode Etik BNI tersebut, telah diterbitkan buku saku Kode Etik BNI dan telah didistribusikan kepada segenap Insan BNI. Selain itu secara berkala dilakukan sosialisasi Kode Etik melalui seminar internal/sosialisasi BNI, internal media BNI (Majalah Sinergi dan *website* BNI Forum) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai BNI, *sharing session* pada saat bulan mutu yang diselenggarakan setiap bulan di setiap unit organisasi BNI, pelatihan GCG dan Kode Etik bagi pegawai BNI baik pegawai baru maupun lama serta *coaching* yang dilakukan oleh atasan pegawai. Pelanggaran terhadap Kode Etik BNI akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku di BNI.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Penerapan dan penegakan Kode Etik sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi GCG senantiasa dilakukan melalui program *awareness* dan internalisasi. BNI berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip GCG dalam setiap kegiatan Perseroan di semua tingkatan atau struktur organisasi mulai dari level dasar sampai kepada *top management*. Untuk itu keberadaan Kode Etik menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja sebagai bagian dari usaha pencapaian Visi dan Misi Perseroan. Penegakan terhadap Kode Etik dilakukan dengan upaya pemantauan secara berkala terhadap kepatuhan Kode Etik dan menyediakan fasilitas bagi pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik yang diatur tersendiri dalam mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*). Setiap insan BNI dapat melaporkan penyimpangan atas Kode Etik tersebut dan identitas pelapor akan dilindungi. Seluruh laporan tersebut harus disertai data dan/atau bukti-bukti akurat sehingga pelanggaran dapat diproses lebih lanjut. Setiap pelanggaran atas Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penerapan sanksi tersebut tidak bersifat diskriminatif.



PENGAWASAN IMPLEMENTASI KODE ETIK BNI

Pengawasan implementasi Kode Etik BNI dilakukan oleh Divisi Komunikasi Perseroan dan Kesekretariatan pada bagian Kelompok Pemantauan GCG, yang salah satu fungsinya adalah memantau implementasi Kode Etik. Namun demikian pemantauan terhadap pelaksanaan Kode Etik tersebut juga dilakukan oleh Divisi Kepatuhan untuk memastikan telah dipenuhinya kepatuhan dan kewajiban terhadap Kode Etik BNI, serta proses penegakan kepatuhan terhadap kasus-kasus pelanggaran Kode Etik BNI.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Insan BNI dalam tingkatan apapun apabila jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik BNI maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

Sanksi Pokok	Jenis Pelanggaran
Surat Pembinaan (SP)	Pelanggaran tata tertib dan ketertiban lingkungan kerja
Surat Teguran (STE)	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran tata tertib dan ketertiban lingkungan kerja Pelanggaran sistem prosedur/kewajiban
Surat Teguran Keras (STK)	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran sistem prosedur/kewajiban Pelanggaran berat yang tidak memenuhi unsur <i>Fraud</i>/Kecurangan/fiktif/rekayasa dan/atau gratifikasi
Demosi	Pelanggaran Sistem Prosedur/Kewajiban yang mengandung unsur kesengajaan pelanggaran berat yang tidak memenuhi unsur <i>fraud</i> /kecurangan/fiktif/rekayasa dan/atau gratifikasi
Pemutusan Hubungan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran Sistem Prosedur/Kewajiban yang mengandung unsur kesengajaan dan menimbulkan kerugian Pelanggaran berat yang tidak memenuhi unsur <i>Fraud</i>/Kecurangan/fiktif/rekayasa dan/atau gratifikasi

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Jumlah pelanggaran kode etik dapat dilihat pada jumlah pengaduan dan tindak lanjut *Whistleblowing System*.

BUDAYA PERUSAHAAN

Perusahaan BNI diidentikkan dengan "PRINSIP 46" yang merupakan tuntutan Perilaku Insan BNI, terdiri dari:

4 Nilai Budaya Kerja:

- Profesionalisme
- Integritas
- Orientasi Pelanggan

- Perbaikan Tiada Henti

6 Nilai Perilaku Utama Insan BNI:

- Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik
- Jujur, Tulus dan Ikhlas
- Disiplin, Konsisten dan Bertanggung jawab
- Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis
- Senantiasa Melakukan Penyempurnaan
- Kreatif dan Inovatif

Setiap Nilai Budaya Kerja BNI memiliki Perilaku Utama yang merupakan acuan bertindak bagi seluruh Insan BNI, 6 perilaku Utama Insan BNI adalah:

4 Nilai Budaya Kerja BNI	6 Nilai Perilaku Utama Insan BNI
Profesionalisme	Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik
Integritas	Jujur, tulus dan ikhlas Disiplin, Konsisten dan Bertanggung jawab
Orientasi Pelanggan	Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis
Perbaikan Tiada Henti	Senantiasa Melakukan Penyempurnaan Kreatif dan Inovatif



KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Kode Etik (*Code of Conduct*) di BNI salah satunya adalah dengan penerapan Pengendalian Gratifikasi. Sebagai tahap awal dalam penerapan program Pengendalian Gratifikasi, telah dilakukan penandatanganan “Komitmen Pengendalian Gratifikasi” oleh Direktur Utama yang disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Ketua KPK) pada tanggal 17 Oktober 2016, dan dihadiri oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, *Top Management* serta Nasabah, Debitur, dan Notaris.

Dalam rangka menindaklanjuti “Komitmen Pengendalian Gratifikasi”, maka dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang ditempatkan di Divisi Kepatuhan. Pedoman Perusahaan Pengendalian Gratifikasi telah disusun dan dapat diakses oleh segenap insan BNI melalui BNI ePP. Pedoman Perusahaan (PP) Pengendalian Gratifikasi tersebut menambah pedoman BNI terkait dengan ketentuan gratifikasi yang sebelumnya hanya diatur dalam Kode Etik BNI.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Sejak penandatanganan komitmen Gratifikasi, BNI telah menerapkan pengendalian Gratifikasi di dalam aktivitas operasionalnya. Laporan Penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan ke UPG, telah diteruskan ke KPK melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL). Divisi Kepatuhan juga telah memberikan konsultasi secara lisan dan tertulis atas pertanyaan Divisi/Satuan/Unit terkait dengan Gratifikasi.

Setiap awal tahun seluruh insan BNI melakukan penandatanganan Pakta Integritas Pegawai yang salah satu poinnya adalah sebagai berikut: “Tidak memberikan, menjanjikan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun kepada atau dari nasabah dana maupun nasabah debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan/atau pihak lainnya baik eksternal maupun internal.”

Sebagai upaya digitalisasi pelaporan gratifikasi secara *paperless*, sejak Desember 2018, Insan BNI dapat melaporkan gratifikasi melalui portal *Compliance Information Management System* (CIMS) dengan alamat www.cims.bni.co.id. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait dengan pelaporan tersebut dapat di akses melalui BNI ePP maupun BNI Forum.

SOSIALISASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Sosialisasi terkait Gratifikasi telah dilakukan, melalui penayangan artikel maupun informasi lain terkait dengan Gratifikasi pada *website* bni.co.id, media cetak, serta media internal BNI antara lain BNI Forum.

Adapun aktivitas yang telah dilakukan UPG selama 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan pasal integritas (klausula gratifikasi) pada perjanjian kerja sama BNI dengan pihak ketiga (Perjanjian Kerja Sama & Perjanjian Kredit). Terdapat klausul *Whistleblowing System* pada seluruh perjanjian di atas, sebagai sarana pelaporan bagi pihak eksternal jika terdapat insan BNI yang melanggar komitmen pengendalian gratifikasi melalui saluran *website*, email, SMS, surat dan telepon (*Hotline*).
2. Menyampaikan sosialisasi Prosedur Penerimaan Gratifikasi Yang Terpaksa Diterima saat Hari Raya Idul Fitri ke segenap Divisi/Satuan/Unit melalui Memo KPN No. KPN/6/0923 tanggal 7 Juni 2018 dan BNI Forum.
3. Memberikan pendapat kepatuhan terkait dengan status atas fasilitas/barang yang diterima BNI dari pihak ketiga.
4. Menyampaikan sosialisasi pengendalian gratifikasi dalam bentuk infografis melalui sarana *Whatsapp Group* kepada unsur pimpinan Divisi dan Wilayah pada tanggal 8 Juni 2018.
5. Menyampaikan sosialisasi pengendalian gratifikasi melalui *Compliance Reminder* (CORE) yang dikirim lewat sarana *email* BNI Menyapa pada tanggal 28 Juni 2018.

Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi yang WAJIB Dilaporkan

Penerimaan gratifikasi yang berasal dari pihak yang memiliki benturan kepentingan dan berkaitan dengan jabatan seperti nasabah, debitur, rekanan / vendor / mitra kerja dan pihak ketiga lainnya.



Gratifikasi yang Tidak WAJIB Dilaporkan



Berlaku umum.



Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Wujud ekspresi keramahan dalam hubungan sosial antar sesama.



Ranah adat istiadat dan norma hidup dalam masyarakat.

Gratifikasi yang Terpaksa Diterima



Gratifikasi tidak diterima secara langsung.



Identitas pemberi tidak diketahui.



Penerima ragu dengan kriteria gratifikasi yang diterima.



Kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti rusaknya hubungan baik antar institusi dan lain-lain.

WAJIB dilaporkan kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di DIVISI KEPATUHAN (KPN)

Alur Pelaporan Gratifikasi



Sumber referensi:
Pedoman Perusahaan Pengendalian Gratifikasi

6. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi melalui materi dan soal-soal *Daily Exercise Employee Program* (DEEP46). Segenap insan BNI wajib menjawab soal-soal terkait dengan Pengendalian Gratifikasi.
7. Materi video gratifikasi telah selesai dibuat dan telah ditayangkan melalui media elektronik di kantor pusat BNI. Segenap pegawai dapat mengakses video tersebut melalui BNI Corpu dari *smartphone* masing-masing pegawai BNI.
8. Menyampaikan poster ke segenap Divisi/Satuan/Unit dan Segenap Kantor Wilayah/Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas.



Stop Gratifikasi!

/gra-ti-fi-ka-si/

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Kategori Gratifikasi

Wajib dilaporkan

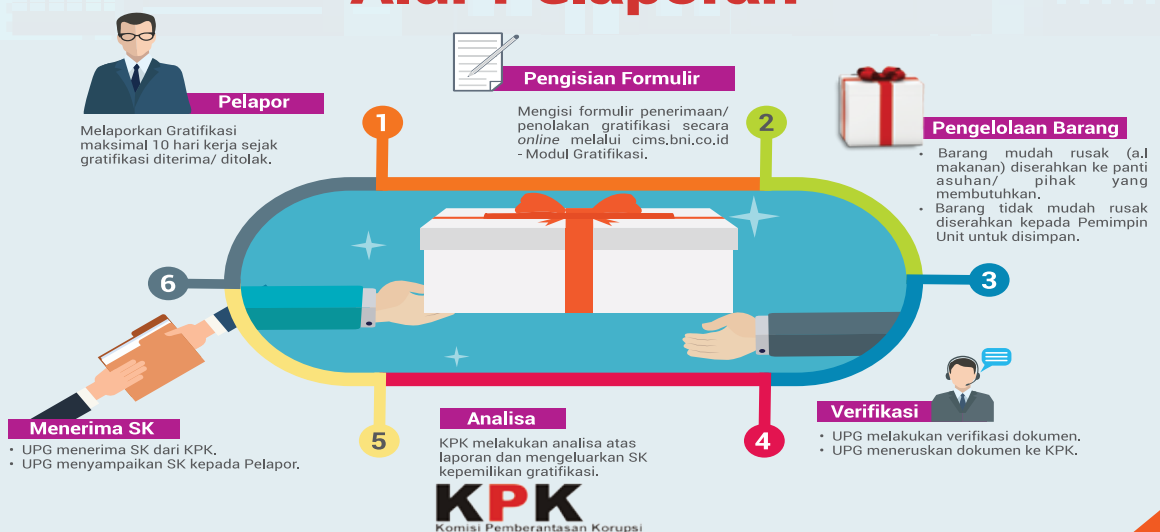
Penerimaan gratifikasi yang berasal dari pihak yang memiliki benturan kepentingan dan berkaitan dengan jabatan seperti nasabah, debitur, rekanan / vendor / mitra kerja dan pihak ketiga lainnya.

Tidak wajib dilaporkan

- Berlaku umum.
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Wujud ekspresi keramah-tamahan dalam hubungan sosial antar sesama.
- Ranah adat istiadat dan norma hidup dalam masyarakat.

Dilaporkan kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Divisi Kepatuhan

Alur Pelaporan



BNI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan | www.bni.co.id

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2018

Laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh pelapor (dhi. Pegawai BNI) kepada Divisi Kepatuhan, yang selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada KPK melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL). Laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pelapor telah diteruskan kepada KPK dengan rata-rata pelaporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dari tenggat waktu 30 (Tiga Puluh Hari) hari kerja.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan GCG, manajemen Perseroan berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan kode etik dan budaya kerja, guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, Perseroan telah membangun *Whistleblowing System* (WBS).

KEBERADAAN DAN TUJUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Implementasi *Whistleblowing System* (WBS) dengan nama "WBS to CEO" merupakan salah satu mekanisme deteksi dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran di BNI yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak *image* BNI. Pengelolaan WBS dilakukan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu Deloitte. Dengan demikian, WBS merupakan komitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas dalam bentuk partisipasi aktif Insan BNI untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI.

PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Penanggung Jawab WBS di BNI adalah Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penanggung Jawab WBS, Direktur Utama menunjuk Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai Pengelola WBS. Pengelola WBS adalah penanggung jawab pelaksanaan WBS di BNI yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Pengelola WBS dibantu oleh Petugas WBS BNI yang mempunyai kompetensi dan integritas untuk menjalankan aktivitas harian WBS. Penunjukan/pengangkatan Petugas WBS BNI tersebut dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan atas usul dari Pengelola WBS.

Tugas dan Wewenang Pengelola WBS sebagai berikut:

1. Tugas Pengelola WBS
 - a. Mengelola pelaksanaan WBS.
 - b. Mengoordinasikan penanganan tindak lanjut atas

laporan yang masuk melalui WBS.

- c. Mengoordinasikan pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan unit terkait baik di Kantor Pusat maupun diluar Kantor Pusat.
 - d. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui WBS.
 - e. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektivitas WBS BNI.
2. Wewenang Pengelola WBS adalah:
 - a. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab WBS terkait dengan tindak lanjut penanganan Laporan.
 - b. Menetapkan tindak lanjut atas laporan khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangan Pengelola WBS.
 - c. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab WBS terkait dengan adanya permintaan perlindungan dari Pelapor.
 - d. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan WBS.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Pelaporan pelanggaran melalui WBS dapat dilakukan dengan sarana:

Telepon	: 021-57853377
Email	: bni-transparan@tipoffs.com.sg
Surat	: BNI Transparan PO BOX 2646/JKP 10026
Website	: http://bni-transparan.tipoffs.com.sg
SMS	: Nomor (081-1970-1946)

PENANGANAN PENGADUAN

Adapun penanganan pengaduan pelaporan melalui WBS, yaitu:

1. Tim WBS Konsultan menyusun laporan penyingkapan beserta rekomendasi tindak lanjut berdasarkan laporan pelanggaran yang diterima, selanjutnya *upload* ke dalam *e-room* yang dipersiapkan khusus untuk BNI paling lambat 1 hari kerja setelah laporan tersebut diterima. Tim WBS konsultan akan mengirimkan *e-mail* kepada Pengelola WBS BNI dan/atau Petugas WBS BNI



yang telah ditunjuk serta anggota *e-room* lainnya mengenai adanya laporan penyingkapan baru yang masuk ke dalam *e-room*. Petugas WBS BNI diharapkan untuk memberikan tanggapan mengenai tindak lanjut dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

2. Jangka waktu untuk memberikan tanggapan mengenai tindak lanjut laporan penyingkapan adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggapan pertama: paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyingkapan masuk ke *e-room*.
 - b. Tanggapan berikutnya: setiap akhir bulan berikutnya setelah tanggapan pertama.
3. Guna menjaga independensi, apabila terdapat laporan tindak pelanggaran yang menyebutkan nama atau melibatkan salah seorang anggota *e-room* maka anggota *e-room* tersebut tidak dapat mengakses *e-room*.

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Perlindungan utama terhadap Pelapor adalah perlindungan terhadap kerahasiaan identitas dan laporan yang disampaikan oleh Pelapor. Bentuk perlindungan terhadap Pelapor disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di BNI. Perlindungan juga berlaku bagi pihak yang melakukan investigasi antara lain Kontrol Internal/SPI maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan laporan tindak pelanggaran.

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

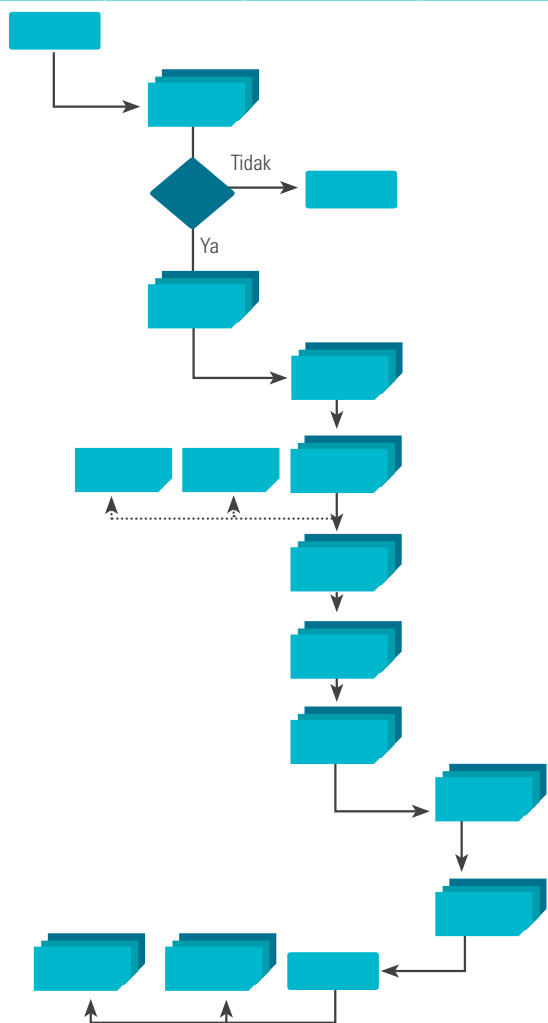
Laporan yang disampaikan melalui WBS adalah laporan tindak pelanggaran sebagai berikut:

1. Kecurangan
Kecurangan, yaitu perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan.
2. Pelanggaran peraturan/hukum
Melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran yang diancam sanksi menurut ketentuan hukum yang berlaku baik internal maupun eksternal.
3. Benturan kepentingan
Situasi di mana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, pegawai tetap/non tetap/*outsourcing* (Insan BNI) karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimilikinya di BNI mempunyai kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi tugas yang diamanatkan oleh BNI secara objektif, sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis BNI.
4. Penyuapan/gratifikasi
Menerima sesuatu dalam bentuk apapun dan berapapun jumlah/nilainya dari pihak lain terkait dengan jabatan/wewenang/tanggung jawabnya di BNI.
5. Kelakuan tidak etis
Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Insan BNI yang tidak dapat dibenarkan secara etika yang berlaku seperti pelanggaran kepada *Code of Conduct* BNI.



BAGAN ALUR PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN

No	LANGKAH KERJA	Pelapor	Tim WBS Konsultan	KPN	SPI
1.	Pelapor membuat laporan dugaan pelanggaran melalui sarana WBS.				
2.	Laporan dari pelapor diterima oleh tim WBS konsultan.				
3.	Tim WBS Konsultan melakukan analisa apakah laporan termasuk dalam objek WBS atau bukan (jika bukan masuk ke dalam objek WBS, laporan tersebut akan diteruskan kepada Petugas WBS BNI untuk kemudian diteruskan kepada unit yang berkepentingan).				
4.	Apabila merupakan objek WBS maka Tim WBS konsultan akan menginput ke e-room.				
5.	Tim WBS Konsultan mengirimkan email pemberitahuan ke Pengelola WBS dan Petugas WBS BNI mengenai adanya laporan baru dalam e-room.				
6.	Petugas WBS BNI melakukan kajian/analisa awal terhadap laporan yang masuk serta dapat menghubungi unit terkait, Tim Konsultan WBS, maupun Pelapor (<i>full disclosure</i>) untuk mengumpulkan informasi dan data pendukung tambahan (bila ada dan memungkinkan).				
7.	Petugas WBS BNI meminta keputusan dari yang berwenang untuk tindak lanjut laporan WBS tsb.				
8.	Keputusan dari yang berwenang melalui petugas WBS untuk menindaklanjuti/tidak menindaklanjuti laporan tersebut.				
9.	Petugas WBS melakukan pengkinian di e-room atas keputusan yang berwenang atas laporan tersebut.				
10.	Apabila keputusan yang berwenang agar ditindaklanjuti, maka Petugas WBS akan meneruskan ke SPI untuk melakukan penelitian.				
11.	SPI melaporkan perkembangan penelitian yang dilakukan kepada Petugas WBS.				
12.	Petugas WBS mengupdate perkembangan penelitian dari SPI ke e-room				



SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pelaksanaan sosialisasi WBS dilakukan secara berkesinambungan antara lain pelaksanaan pelatihan kepada pegawai baru, sosialisasi melalui video, poster, sms blast kepada segenap pegawai serta melalui peran Serikat Pekerja (SP) Pusat untuk membantu mensosialisasikan kepada segenap pegawai di Cabang/Sentra.

BNI akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui WBS sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal itu, telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi sebagai berikut:

1. Menyampaikan progress penyelesaian WBS melalui BNI forum;
2. Menyampaikan materi WBS melalui in-class training kepada calon pegawai jenjang Officer Development Program (ODP) maupun Assistant Development Program (ADP);
3. Memasang poster WBS di setiap unit;
4. Mensosialisasikan WBS melalui BBM blast kepada segenap pegawai, media/majalah internal, video WBS;
5. Perluasan pelapor dengan melibatkan pihak eksternal;
6. Penambahan saluran media pelaporan;
7. Sosialisasi ke pihak eksternal melalui perangkat sosialisasi di unit-unit, website BNI, pencantuman informasi WBS pada perjanjian-perjanjian dengan pihak-ketiga;



JUMLAH PENGADUAN

Selama tahun 2018, laporan tindak pelanggaran yang diterima melalui WBS adalah sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) laporan. Laporan tindak pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dengan proses investigasi yang dilakukan oleh Auditor yang bertugas pada unit terjadinya tindak pelanggaran tersebut.

Sarana pelaporan yang digunakan dalam melaporkan WBS adalah sebagai berikut:

1. *Email* sebanyak 44 (empat puluh empat) laporan atau sebesar 47,31% dari total laporan WBS.
2. *Website* sebanyak 19 (sembilan belas) laporan atau sebesar 20,43% dari total laporan WBS.
3. *Hotline* sebanyak 12 (dua belas) laporan atau sebesar 12,90% dari total laporan WBS.
4. *Short Message Service (SMS)* sebanyak 9 (sembilan) laporan atau sebesar 9,68% dari total laporan WBS.
5. Melalui sarana Surat sebanyak 9 (sembilan) laporan atau sebesar 9,68% dari total laporan WBS.

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN DI TAHUN 2018

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, maka perkembangan tindak lanjut laporan WBS sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Dalam Proses	Terbukti	Tidak Terbukti
1	Pelanggaran hukum/aturan	20	2	7	11
2	Kelakuan tidak etis	13	1	4	8
3	Kecurangan	14	3	8	3
4	Penyuapan/gratifikasi	2	1	1	-
5	Benturan kepentingan	2	-	1	1
6	Laporan <i>Out Of Scope</i> *	42	-	-	42
Total		93	7	21	65

Keterangan:

*di luar lingkup WBS

Berdasarkan hasil pemeriksaan SPI terhadap pelaporan WBS, terdapat 21 laporan yang dinyatakan terbukti. Adapun tindak lanjut terhadap Terlapor yang dinyatakan terbukti adalah Konseling dan Mutasi masing-masing sebanyak 4 laporan, sanksi PHK sebanyak 3 laporan, serta Surat Peringatan dan Teguran Tertulis masing-masing sebanyak 1 laporan. Selain itu, terdapat 3 laporan yang masih dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh SPI dan 5 laporan masih dalam proses pemberian sanksi administratif.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Penyimpangan internal (*Internal Fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang memengaruhi kondisi keuangan Bank. Jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Internal fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya (2017)	Tahun berjalan (2018)	Tahun sebelumnya (2017)	Tahun berjalan (2018)	Tahun sebelumnya (2017)	Tahun berjalan (2018)
Total fraud	-	-	15 Fraud	7 Fraud	2 Fraud	1 Fraud
Telah diselesaikan	-	-	15 Fraud	4 Fraud	2 Fraud	1 Fraud
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	3 Fraud	-	-



Internal fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya (2017)	Tahun berjalan (2018)	Tahun sebelumnya (2017)	Tahun berjalan (2018)	Tahun sebelumnya (2017)	Tahun berjalan (2018)
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2 Fraud	-	-	-

Keterangan : Kasus penyimpangan/fraud dengan kerugian di atas Rp100 juta

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagai wujud transparansi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI, serta sebagai tindak lanjut ketentuan yang tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, adapun pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI tahun 2018 terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2017.
2. Struktur Konglomerasi Keuangan BNI.
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BNI posisi sampai dengan Desember 2017.
4. Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan BNI.
5. Prinsip Dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI.
6. Kebijakan Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan BNI.
7. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BNI selaku Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan BNI.

Berikut Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BNI selaku Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan BNI.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA TAHUN 2018

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, antara lain telah mewajibkan Konglomerasi Keuangan untuk menyusun laporan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi secara periodik (Juni dan Desember) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan (tanggal 15 Agustus dan tanggal 15 Februari).

Self Assessment terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI, paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan dalam 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang terdiri dari:

Faktor Penilaian

No.	Faktor Penilaian
1	Direksi Entitas Utama
2	Dewan Komisaris Entitas Utama
3	Komite Tata Kelola Terintegrasi
4	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
5	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
6	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
7	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi



Penilaian sendiri tersebut dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat dengan penjelasan masing-masing peringkat sebagai berikut:

Peringkat	Definisi
1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
4	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
5	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Untuk tahun 2018 Konglomerasi keuangan BNI telah menyusun penilaian sendiri terkait dengan implementasi Tata Kelola pada Konglomerasi Keuangan BNI sebagai berikut:

Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi		
Peringkat		Definisi Peringkat
Juni 2018	Desember 2018	
2	2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* terhadap 7 (tujuh) faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Desember 2018 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Direksi Entitas Utama
 - a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Direksi BNI telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi tugas dan tanggung jawab Direksi BNI terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan dan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Dewan Komisaris BNI.
 - c. Direksi BNI telah menindaklanjuti masukan Dewan Komisaris BNI atas evaluasi terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, serta memastikan bahwa temuan audit baik dari internal maupun eksternal telah ditindaklanjuti dengan baik.
2. Dewan Komisaris Entitas Utama
 - a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Dewan Komisaris BNI telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BNI terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan kepada Direksi BNI dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - c. Dewan Komisaris BNI telah memberikan masukan dan arahan serta evaluasi terhadap temuan audit baik dari internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti dengan baik oleh Direksi BNI.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terbentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Selama periode Juli – Desember 2018 Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali guna

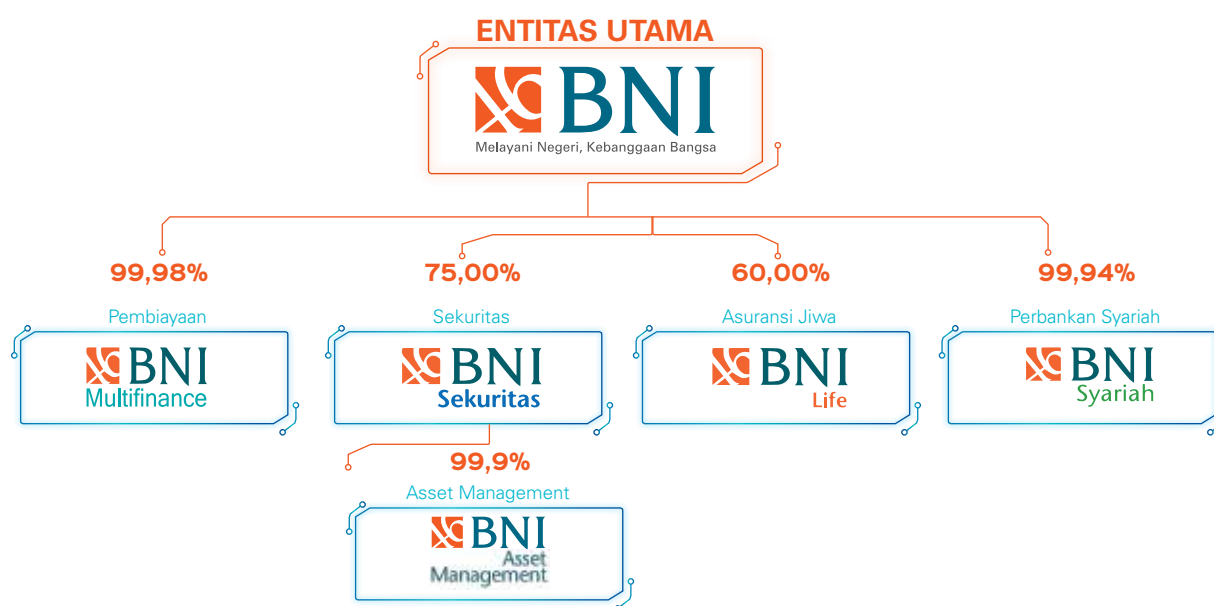


- memberikan masukan terkait pelaksanaan Tata Kelola pada Konglomerasi Keuangan BNI.
4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
 - a. Divisi Kepatuhan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi bersifat independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Dalam rangka penyempurnaan fungsi kepatuhan terintegrasi, Divisi Kepatuhan telah melaksanakan koordinasi dengan segenap satuan kerja pada masing-masing LJK.
 - c. Divisi Kepatuhan telah melakukan pemantauan, evaluasi serta senantiasa melakukan updating Pedoman Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memastikan penerapan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK berjalan dengan baik.
 5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
 - a. Satuan Pengawasan Internal sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Secara periodik Satuan Pengawasan Internal telah menyampaikan hasil audit dan tindak lanjut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris BNI dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
 - c. Satuan Pengawasan Internal telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern terintegrasi pada masing-masing LJK.
 6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
 - a. Divisi Manajemen Risiko Bank sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Divisi Manajemen Risiko Bank telah menetapkan serta melakukan updating terhadap Kebijakan dan penetapan limit risiko yang berlaku bagi segenap LJK.
 - c. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengakomodir 4 (empat) pilar penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK/POJK.03/2014.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI telah dikomunikasikan kepada segenap LJK pada Konglomerasi Keuangan BNI dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Melalui Surat Direksi No. DIR/102 tanggal 13 Maret 2015 Konglomerasi Keuangan BNI telah melaporkan struktur Konglomerasi Keuangan BNI sebagai berikut:





Konglomerasi Keuangan BNI telah memenuhi persyaratan administratif dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan cfm. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-48/PB.313/2015 tanggal 15 April 2015, selain itu Konglomerasi Keuangan BNI juga telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) sebagai berikut:

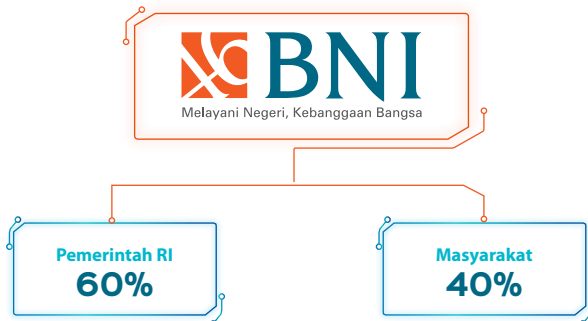
- Ketua : Bapak Revrisond Baswir (BNI)
 Anggota :
- Bapak Joni Swastanto (BNI)
 - Bapak Rizqullah (BNI Syariah)
 - Bapak Hasanudin (DPS BNI Syariah)
 - Bapak Utang Ranuwijaya (BNI Life)
 - Bapak Parikesit Suprpto (BNI Life)
 - Bapak Eddy Siswanto (BNI Asset Management)
 - Bapak Suhendry Hafni (BNI Sekuritas)
 - Ibu Rosa Lima Dwi Mutiari (BNI Multifinance)
 - Ibu Setyowati (Pihak Independen Komite TKT)

Sebagai pedoman BNI juga telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yang disusun dan di-review sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, adapun pedoman tersebut dapat diakses melalui www.bni.co.id

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah diupdate terakhir melalui Surat Keputusan Direksi No. DIR/796 Tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/140 Tanggal 13 Desember 2018.

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BNI.

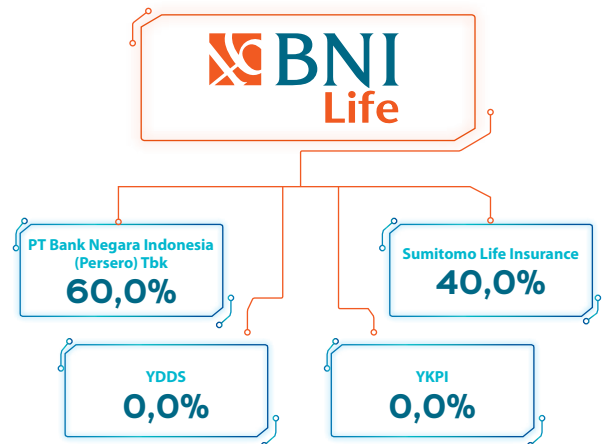


Struktur Kepemilikan Saham Lembaga Jasa keuangan yang berada pada Konglomerasi Keuangan BNI, yaitu:

1. PT BNI Syariah



2. PT BNI Life Insurance



Keterangan:

* Yayasan Danar Dhana Swadharma

** Yayasan Kesejahteraan Pegawai BNI

3. PT BNI Sekuritas

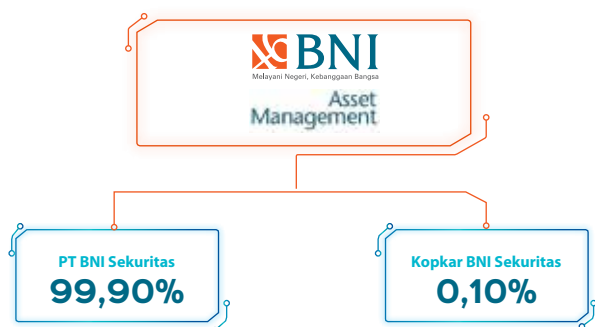




4. PT BNI Multifinance



5. PT BNI Aset Management



STRUKTUR KEPENGURUSAN KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Struktur Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Ari Kuncoro	Komisaris Utama/Independen
Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama
Pataniari Siahaan	Komisaris Independen
Revrisond Baswir	Komisaris Independen
Bistok Simbolon	Komisaris
Joni Swastanto	Komisaris
Ahmad Fikri Asegaf	Komisaris Independen
Marwanto Harjowiryono	Komisaris
Sigit Widyawan	Komisaris Independen

Struktur Direksi

Nama	Jabatan
Achmad Baiquni	Direktur Utama

Nama	Jabatan
Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur Bisnis Korporasi
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Treasury dan International Banking
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Keuangan
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan
Bob Tyasika Ananta	Direktur Manajemen Risiko
Catur Budiharto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan
Endang Hidayatullah	Direktur Kepatuhan
Dadang Setiabudi	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
Tambok P. Setyawati	Direktur Retail Banking

PT BNI Syariah

Struktur Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Fero Poerbonegoro	Komisaris Utama
Rizqullah	Komisaris Independen
Max Niode	Komisaris Independen
Imam Budi Sarjito*)	Komisaris

*) Efektif setelah menjalani proses fit and proper test OJK sejak tanggal 25 Maret 2019

Struktur Direksi

Nama	Jabatan
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama
Dhias Widhiyati	Direktur Bisnis
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan & Operasional
Iwan Abdi *)	Direktur Bisnis Retail & Jaringan
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan & Risiko

*)Efektif setelah mendapatkan Keputusan *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan

Struktur Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan
K.H. Ma'ruf Amin	Ketua
Hasanudin	Anggota

PT BNI Life Insurance

Struktur Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Parikesit Suprpto	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Darwin Suzandi	Komisaris
Kazuhiko Arai	Komisaris
Husain Abdullah	Komisaris Independen
Henry Cratein Suryanaga	Komisaris Independen



Struktur Direksi

Nama	Jabatan
Shadiq Akasya	Direktur Utama
Eben Eser Nainggolan	Direktur Keuangan
Naruyoshi Kuwata	Direktur Bancassurance
Hidenobu Ito	Direktur Risk Management
Intan Sari Abdams Katoppo *)	Direktur Marketing

*) Mengundurkan diri pada 1 November 2018

Struktur Dewan Pengawas

Nama	Jabatan
K.H Ma'ruf Amin	Ketua
Agus Haryadi	Anggota
Utang Ranuwijaya	Anggota

PT BNI Sekuritas

Struktur Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
-	Komisaris Utama
Ryosuke Hayashi	Komisaris
Suhendry Hafni	Komisaris Independen

Struktur Direksi

Nama	Jabatan
Adiyasa Suhadibroto	Direktur Utama
Reza Benito Zahar	Direktur Bisnis
Geger N. Maulana	Direktur Operasional

PT BNI Multifinance

Struktur Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Rosa Lima Dwi Mutiari	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Retno Murwani	Komisaris

Struktur Direksi

Nama	Jabatan
Fajar Agustianto	Direktur Keuangan & Operasional
Linda Saragih	Direktur Bisnis

PT BNI Aset Manajemen

Struktur Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Eddy Siswanto	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Neny Asriani	Komisaris

Struktur Direksi

Nama	Jabatan
Reita Farianti	Presiden Direktur
Putut Endro Andanawarih	Direktur Investasi Research & Teknologi
Donny Susatio Adjie	Direktur Bisnis

PRINSIP DASAR TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Guna menunjang bisnis dan operasional Konglomerasi Keuangan BNI, diperlukan prinsip – prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada GCG *Roadmap* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang menjadi acuan implementasi penerapan GCG.

Sesuai dengan hal tersebut prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI bertujuan untuk menciptakan kinerja yang unggul dan menambah nilai ekonomi bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjamin operasional Konglomerasi Keuangan BNI sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, etika bisnis, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku Perusahaan Anak merupakan badan hukum yang terpisah dari BNI sehingga memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri dalam pengelolaan perusahaan.
3. Perusahaan Anak merupakan badan hukum yang independen sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, di mana dalam pengelolaannya BNI merupakan Pemegang Saham Pengendali pada Konglomerasi keuangan BNI.
4. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Anak dalam pedoman ini berlaku bagi Perusahaan Anak sepanjang tidak diatur berbeda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Dasar Perusahaan Anak yang belum sesuai dengan Pedoman ini, maka wajib disesuaikan.

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP PADA KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Transaksi keuangan intra group dalam Konglomerasi Keuangan BNI harus dilakukan berdasarkan *cost and benefit analysis* yang memadai, memiliki *underlying* yang jelas, memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGETERIAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan memengaruhi kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha entitas yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi di industri jasa keuangan, dengan salah satunya adalah kewajiban Konglomerasi Keuangan dalam melakukan pengelolaan risiko transaksi intra-grup.

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

TUJUAN MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Penerapan Manajemen Risiko transaksi intra-grup pada Konglomerasi Keuangan BNI bertujuan untuk:

1. Mengatur dan mengawasi risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan, maupun dampak negatif terhadap kondisi bisnis Konglomerasi Keuangan BNI secara keseluruhan.

PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh BNI sebagai entitas utama dalam menerapkan Manajemen Risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan BNI antara lain:

1. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko transaksi intra-grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan pemantauan transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dan menyusun laporan secara berkala.
3. Mendorong pengungkapan publik terkait transaksi intra-grup.
4. Mempertimbangkan dampak transaksi intra-grup terhadap kinerja LJK anggota Konglomerasi Keuangan secara langsung maupun terhadap Konglomerasi Keuangan BNI secara keseluruhan.

JENIS TRANSAKSI YANG DAPAT MENIMBULKAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Jenis transaksi yang dapat menimbulkan terjadinya risiko transaksi intra-grup di Konglomerasi Keuangan BNI, antara lain sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Eksposur kepada Pemegang Saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen.
5. Pembelian atau penjualan aset dari satu LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
6. Transfer risiko melalui reasuransi.
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, BNI selaku Entitas Utama melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*Risk Factors*) yang bersifat material secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

1. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan melakukan analisis terhadap jenis produk dan/atau transaksi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI yang dapat menimbulkan risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

2. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh BNI sebagai entitas utama dalam melakukan pengukuran risiko transaksi intra-grup adalah menyusun metodologi pengukuran risiko transaksi intra-grup serta melakukan evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko transaksi intra-grup.

3. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko transaksi intra-grup yang bersifat material atau yang berdampak pada kondisi permodalan Konglomerasi Keuangan, serta



melakukan penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan antara lain apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor Risiko yang bersifat material.

Untuk menilai hubungan keuangan yang material secara intra-grup antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI diukur berdasarkan nilai transaksi keuangan BNI dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNI, maupun antar sesama LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

4. Pengendalian Risiko Transaksi Intra-grup

Dalam rangka melaksanakan pengendalian Risiko, BNI sebagai Entitas Utama memastikan Konglomerasi Keuangan BNI memiliki metode pengendalian atas risiko transaksi intra-grup yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan.

Pengendalian risiko transaksi intra-grup pada Konglomerasi Keuangan BNI dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Komposisi parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada penilaian profil risiko terintegrasi;
- b. Pemenuhan asas kewajaran transaksi (Arm's Length) terkait transaksi intra-grup;
- c. Ketersediaan dan kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup; dan
- d. Pemenuhan ketentuan hukum/regulator yang berlaku untuk setiap transaksi intra-grup.
- e.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi:

- a. Laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi;
- b. Laporan transaksi intra-grup, yang memuat:
 - Rekapitulasi transaksi dengan pihak berelasi
 - Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak berelasi

BNI sebagai Entitas Utama menyusun dan menyampaikan Laporan profil risiko transaksi intra-grup sebagai bagian dari laporan profil risiko terintegrasi dan laporan transaksi intra-grup kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran untuk posisi pelaporan Juni dan Desember.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BNI SELAKU ENTITAS UTAMA PADA KONGLOMERASI KEUANGAN BNI.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, antara lain telah diwajibkan bagi setiap Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

BNI merupakan Badan Usaha Milik Negara di mana kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia memiliki satu lembar Saham Seri A Dwiwarna. Kepemilikan saham yang dimiliki Negara Republik Indonesia sebesar 60%. Sehingga tidak terdapat Pemegang Saham utama dan pengendali individu.



Saham Seri A Dwiwarna memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh Pemegang Saham lainnya, yaitu:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Persetujuan perubahan Permodalan;
 - c. Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
 - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
 - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
 - h. Persetujuan penggunaan laba;
 - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;

2. Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris
 3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;
 4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan; dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- Informasi Rinci Pemegang Saham Utama dan Pengendali dilihat pada bagian Komposisi Pemegang Saham pada Laporan Tahunan ini.

PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP SELURUH PEMEGANG SAHAM

Seluruh Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Minoritas dan Pemegang Saham Asing harus diperlakukan setara dan diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi tentang Perseroan. Perseroan aktif melakukan disklosur atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material Perseroan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan *governance* Perseroan (Daftar Keterbukaan Informasi Tahun 2018 telah diungkapkan pada tabel sebelumnya). Hak-hak Pemegang Saham dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasar Modal. Hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan kerja sama aktif antara perusahaan dan para *stakeholders* harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlanjutan Perseroan.

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Pedoman Tata Kelola mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola adalah standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Bank untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.



No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan Penerapan di BNI
I	ASPEK 1: HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM;			
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang Saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan Pemegang Saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan Pemegang Saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i> .	Prosedur Pengambilan Suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS BNI dilakukan dengan cara <i>voting</i> secara tertutup yakni dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan menggunakan <i>electronic voting</i> . Prosedur dan Tata cara penghitungan kuorum, Tanya jawab serta mekanisme pengambilan keputusan rapat telah dituangkan dalam Tata Tertib RUPS yang merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017. Keterangan: Comply
		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham terkait mata acara dalam RUPS.	Pada RUPS Tahunan BNI tanggal 20 Maret 2018 telah dihadiri oleh 10 (Sepuluh) orang anggota Direksi dan 8 (delapan) orang anggota Dewan Komisaris. Keterangan: Comply
		Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi Pemegang Saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Ringkasan risalah RUPS Tahunan telah diumumkan dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan baik di situs Web Perusahaan maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXnet dan Otoritas Jasa Keuangan <i>e-reporting</i> , yakni pada tanggal 22 Maret 2018. Keterangan: Comply



No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan Penerapan di BNI
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau investor dimaksudkan agar para Pemegang Saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Di samping itu, Pemegang Saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para Pemegang Saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para Pemegang Saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung Pemegang Saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	<p>Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor tertuang dalam pedoman perusahaan Hubungan Investor No.IN/41/KMP/001 tanggal 26 Januari 2015 yang mencakup kebijakan aktivitas hubungan investor seperti <i>analyst meeting</i>, penyusunan <i>annual report</i>, <i>investor meeting</i>, <i>public expose</i>, dan <i>roadshow</i>.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung Pemegang Saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi.</p> <p>Adanya kebijakan komunikasi dengan para Pemegang Saham atau investor menunjukkan BNI sebagai Perusahaan Terbuka berkomitmen melaksanakan komunikasi dengan para Pemegang Saham atau investor.</p> <p>Keterangan: Comply</p>
		Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua Pemegang Saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran Pemegang Saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	<p>Pengungkapan kebijakan komunikasi serta agenda komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor telah di-<i>upload</i> ke dalam Situs Web bagian Hubungan Investor.</p> <p>Keterangan: Comply</p>
II ASPEK 2: FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS;				
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda di antara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	<p>Jumlah anggota Dewan Komisaris di BNI sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keberagaman komposisi, jumlah ini dipandang cukup dan sesuai dengan kondisi BNI serta disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014.</p> <p>Keterangan: Comply</p>



No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan Penerapan di BNI
		Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	<p>Komposisi Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/ pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas BNI.</p> <p>Hal ini telah dipaparkan pada Sub Bab Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tata Kelola ini.</p> <p>Keterangan: Comply</p>
4	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian realisasi program kerja Dewan Komisaris sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris dan melalui <i>Self Assessment</i> GCG yang di dalamnya terdapat indikator tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p> <p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian realisasi program kerja Dewan Komisaris sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris digambarkan melalui indikator <i>advisory</i> atas kinerja, penguatan fungsi eksekutif, dan pemantauan kepatuhan. Sedangkan penilaian yang terdapat pada <i>Self Assessment</i> GCG dibagi menjadi 3 (tiga) tolak ukur yaitu <i>Governance Process</i> dan <i>Governance Outcome</i>. <i>Governance structure</i> terdiri dari 14 (empat belas) indikator, <i>governance process</i> terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator sedangkan <i>governance outcome</i> terdiri dari 6 (enam) indikator.</p> <p>Keterangan: Comply</p>

No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan Penerapan di BNI
		Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para Pemegang Saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut Pemegang Saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris Kebijakan penilaian sendiri yang tertuang dalam RKA disampaikan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka, sedangkan hasil <i>Self Assessment</i> GCG atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris disampaikan kepada pihak regulator. Keterangan: Comply
		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris tertuang dalam Anggaran Dasar yaitu Pasal 14 ayat 16 c yang menyatakan bahwa pemberhentian anggota Dewan Komisaris antara lain bila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara, Pasal 14 ayat 18 yang menyatakan bahwa Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS, serta Pasal 14 ayat 26 f yang menyatakan bahwa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. Keterangan: Comply



No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan Penerapan di BNI
		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di BNI dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka Panjang BNI.	Salah satu organ Dewan Komisaris adalah Komite Nasional dan Remunerasi (saat ini anggotanya seluruh Komisaris) yang menjalankan fungsi nominasi, di antaranya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi, dengan berpedoman pada peraturan BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015. Keterangan: Comply
III ASPEK 3: FUNGSI DAN PERAN DIREKSI				
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi BNI Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan BNI, penentuan jumlah Direksi sangat memengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Jumlah dan kapasitas anggota Direksi didasarkan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014. Jumlah anggota Direksi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 11 (sebelas) orang. Dalam rangka efektivitas pengambilan putusan, maka dalam Rapat Direksi dilakukan pengambilan putusan secara musyawarah mufakat. Keterangan: Comply
		Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.	Komposisi Direksi BNI saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/ pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dengan memperimbangkan kebutuhan dan kompleksitas BNI. Hal ini telah dipaparkan pada Sub Bab Keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tata Kelola ini. Keterangan: Comply



No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan Penerapan di BNI
		<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p>	<p>Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.</p> <p>Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.</p>	<p>Laporan Keuangan BNI terdiri dari Laporan posisi keuangan konsolidasian serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut sesuai dengan SAK di Indonesia dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan entitas Anak.</p> <p>Bahwa dalam penyajian Laporan Keuangan BNI terdapat Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan entitas Anak yang memuat tentang Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian BNI dan entitas Anak, telah disusun sesuai SAK dan semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar, dengan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Selain itu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk adalah KAP yang memiliki kompetensi dan profesional di bidangnya. Seluruh ini menunjukkan komitmen penuh dari Direksi sehingga Laporan Keuangan dapat diandalkan oleh para <i>stakeholder</i>.</p> <p>Direktur Keuangan BNI saat ini telah memiliki keahlian, pengetahuan dan kapabilitas di bidang akuntansi/keuangan, hal ini dapat dibuktikan melalui pendidikan formal dan informal yang telah diikuti baik di dalam maupun di luar negeri. Pengalaman sebelumnya sebagai Direktur <i>Risk and Compliance</i> di Bank lain juga turut mendukung keahlian yang bersangkutan, hal ini tentunya merupakan nilai tambah bagi yang bersangkutan maupun BNI.</p> <p>Keterangan: Comply</p>



No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan Penerapan di BNI
6	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Kebijakan penilaian kinerja Direksi dimuat dalam <i>Guiding Principle Key Performance Indicator</i> (KPI) BOD.</p> <p>Pengukuran kinerja Direksi terdiri dari beberapa KPI yang diukur secara kolegial pada seluruh Direktur dan bersifat kuantitatif maupun kualitatif.</p> <p>Kebijakan tersebut mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan terhadap beberapa faktor yaitu kapitalisasi <i>market</i>, laba, <i>market share</i> serta kepemimpinan. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/ kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh.</p> <p>Keterangan: Comply</p>
		Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut Pemegang Saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.	<p>Tiap tahunnya Penilaian Kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan yang dapat diakses oleh Pemegang Saham/ investor maupun <i>stakeholder</i> lainnya melalui <i>website</i> BNI sehingga informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik.</p> <p>Keterangan: Comply</p>



No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan Penerapan di BNI
		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<p>Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Perseroan akan bertindak aktif apabila terjadi kejahatan keuangan, tertuang dalam Anggaran Dasar yaitu Pasal 11 ayat 13 jo Pasal 11 ayat 14 d yang menyatakan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan antara lain bila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara, Pasal 11 ayat 15 yang menyatakan bahwa Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS, dan Pasal 11 ayat 24 f yang menyatakan bahwa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selain itu Anggaran Dasar juga menyatakan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.</p> <p>Perseroan telah memiliki BNI <i>Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML & CFT) Policy Statement</i> dalam rangka penegakan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>Keterangan: Comply</p>
IV ASPEK 4: PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN				
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	<p>BNI telah memiliki Kebijakan terkait informasi orang dalam untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Pedoman Perusahaan <i>Online (e-PP)</i>.</p> <p>Keterangan: Comply</p>



No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan Penerapan di BNI
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>Fraud</i> .	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i> , dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>Fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Dalam rangka kepatuhan terhadap SEBI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 mengenai Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> untuk menumbuhkan Komite Anti <i>Fraud</i> untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti <i>Fraud</i> pada seluruh jajaran organisasi. Kebijakan dan Prinsip <i>no Fraud for our bank</i> diselenggarakan melalui Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> . Untuk mengukur terwujudnya budaya kepatuhan, Divisi Kepatuhan telah mengembangkan suatu <i>tools</i> yang bernama <i>Compliance index</i> (CIX). Sedangkan kebijakan anti korupsi telah diatur dalam kode etik, Pedoman Gratifikasi dan <i>Whistleblowing System</i> . BNI yang dapat diakses oleh seluruh pegawai maupun <i>stakeholder</i> melalui situs web BNI.
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan memengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau <i>vendor</i> , mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> , dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau <i>vendor</i> .	<p>Keterangan: Comply</p> <p>Perseroan telah memiliki kebijakan seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> yang dituangkan dalam bentuk Pedoman Perusahaan <i>Online</i> (e-PP) Pengadaan. Kebijakan tersebut juga mengatur Prosedur Pengadaan termasuk metode dan alur prosesnya.</p> <p>Pelaksanaan kebijakan tersebut senantiasa diterapkan dalam proses pengadaan barang dan/ atau jasa dan dipedomani bagi seluruh pegawai. Penyedia barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BNI wajib telah terdaftar dalam sistem manual atau dalam sistem aplikasi <i>e-Procurement</i>. Pemberitahuan pemenang pengadaan barang dan/ atau jasa pun dilakukan dengan transparan.</p> <p>Keterangan: Comply</p>



No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan Penerapan di BNI
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Kebijakan terkait hak kreditur telah tertuang dalam perjanjian dalam hal BNI melakukan kesepakatan Pinjaman dengan Kreditur. Dalam perjanjian tersebut telah dicantumkan hak dan kewajiban para pihak, terkait dengan hak kreditur misalnya berupa memberikan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu baik pada saat permintaan maupun penggunaan Pinjaman, menjaga rasio keuangan (<i>Current Ratio</i> , <i>DeR</i> , <i>Debt to Service Ratio</i>) sesuai dengan rasio yang disepakati dengan kreditur, menyampaikan laporan keuangan <i>audited</i> tahunan pada jangka waktu yang telah disepakati dengan Kreditur, dan sebagainya. Keterangan: Comply
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i> , cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) di BNI dengan nama "WBS to CEO. WBS merupakan komitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas dalam bentuk partisipasi aktif Insan BNI untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI. Laporan pelanggaran melalui WBS dapat dilakukan dengan sarana Telepon, <i>email</i> , surat maupun <i>website</i> . Keterangan: Comply
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka Panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka Panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka Panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan telah dituangkan ke dalam Pedoman <i>Long Term Incentive</i> tersendiri, untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 ini bagi Pegawai tertuang dalam Pedoman Bonus Saham. Adapun pemberian <i>Long Term Incentive</i> (LTI) untuk Direksi dan Dewan Komisaris total sebesar Rp192.912.000.000,- telah disetujui dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 September 2018. Kebijakan insentif ini merupakan komitmen BNI yang disesuaikan dengan tujuan jangka Panjang Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan. Keterangan: Comply



No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan Penerapan di BNI
V	ASPEK 5 : KETERBUKAAN INFORMASI			
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui Pemegang Saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Selain situs web, BNI juga memanfaatkan teknologi informasi lainnya seperti <i>email</i> , <i>twitter</i> dan <i>instagram</i> sebagai sarana komunikasi dan media keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan namun juga info lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui Pemegang Saham/ investor. Keterangan: Comply
		Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai Pemegang Saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh Pemegang Saham utama dan pengendali.	Pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen) telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Sub Bab Daftar Pemegang Saham serta Sub Bab Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris. Keterangan: Comply

PELAKSANAAN PENERAPAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

PELAKSANAAN PENERAPAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
PRINSIP A: HAK-HAK PEMEGANG SAHAM (RIGHTS OF SHAREHOLDERS)					
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham				
A.1.1	Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at annual general meeting (AGM) for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days?	Yes	1	Ya, Berdasarkan catatan RUPS yang dipublikasikan di bursa, diperoleh informasi bahwa untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, perusahaan mengumumkan tanggal pembayaran dividen pada tanggal 20 April 2018 pada Ringkasan Risalah RUPST 22 Maret 2018 sesuai Rekomendasi Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No. 10/POJK.04/2017. Dengan demikian, jangka waktu maksimal 30 hari terpenuhi. Evidence : http://www.bni.co.id/portals/1/bni/perusahaan/docs/BBNI-RINGKASAN%20RISALAH%20RUPST%202018.pdf	
A.2	Hak Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan terkait Perubahan-Perubahan Mendasar Korporasi				
Do shareholders have the right to participate in:					
A.2.1	Amendments to the company's constitution?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat pada Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan Ya, sebagaimana telah dimuat http://bni.co.id/Portals/1/BBNI/Perusahaan/TataKelola/Docs/GCG/BBNI%20-%20ARTICLES%20OF%20ASSOCIATION%202018.pdf	
A.2.2	The authorisation of additional shares?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat pada Pasal 4 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan Ya, sebagaimana telah dimuat http://bni.co.id/Portals/1/BBNI/Perusahaan/TataKelola/Docs/GCG/BBNI%20-%20ARTICLES%20OF%20ASSOCIATION%202018.pdf	
A.2.3	The transfer of all or substantially all assets, which in effect results in the sale of the company?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat Ya, sebagaimana telah dimuat pada Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan http://bni.co.id/Portals/1/BBNI/Perusahaan/TataKelola/Docs/GCG/BBNI%20-%20ARTICLES%20OF%20ASSOCIATION%202018.pdf	
A.3	Hak Untuk Berpartisipasi Secara Efektif Dan Menggunakan Suara Dalam RUPS Serta Hak Untuk Mendapatkan Informasi Mengenai Aturan-Aturan Yang Berlaku Dalam RUPS (Termasuk Prosedur Voting)				
A.3.1	Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda items, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/ commissioners?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat Ya, sebagaimana telah dimuat pada Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 http://bni.co.id/portals/1/BBNI/Perusahaan/Docs/BBNI-SUMMARY%20OF%20MINUTES%20OF%20AGM%202018.pdf	



No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
A.3.2	Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/ commissioners?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat pada Anggaran Dasar Perseroan http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/TataKelola/Docs/GCG/BBNI%20-%20ARTICLES%20OF%20ASSOCIATION%202018.pdf	
A.3.3	Does the company allow shareholders to elect directors/ commissioners individually?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat pada Pasal 5 ayat 4 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/TataKelola/Docs/GCG/BBNI%20-%20ARTICLES%20OF%20ASSOCIATION%202018.pdf	
A.3.4	Does the company disclose the voting procedures used before the start of the meeting?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat pada Buku Tata Tertib RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 http://bni.co.id/portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/ENG%20-%20Buku%20Tata%20Tertib.pdf	
A.3.5	Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answer given recorded?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat pada Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/2018/Akta%20Berita%20Acara%20RUPS%20BNI%20No%2037%2020%20Maret%202018.pdf	
A.3.6	Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for most recent AGM?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat pada Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 http://bni.co.id/portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/BBNI_SUMMARY%20OF%20MINUTES%20OF%20AGM%202018.pdf	
A.3.7	Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat pada Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 http://bni.co.id/portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/BBNI_SUMMARY%20OF%20MINUTES%20OF%20AGM%202018.pdf	
A.3.8	Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attend the most recent AGM?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat pada Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 http://bni.co.id/portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/BBNI_SUMMARY%20OF%20MINUTES%20OF%20AGM%202018.pdf	
A.3.9	Does the company allow for voting in absentia?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat pada Buku Tata Tertib RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 http://bni.co.id/portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/ENG%20-%20Buku%20Tata%20Tertib.pdf	
A.3.10	Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat pada Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 http://bni.co.id/portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/BBNI_SUMMARY%20OF%20MINUTES%20OF%20AGM%202018.pdf	
A.3.11	Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	No	0	Perusahaan menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek BNI PT Datindo Entrycom untuk melakukan proses penghitungan dan/atau validasi voting dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan telah dipublikasikan pada Berita Acara Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.	
A.3.12	Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions?	No	0	Perseroan telah memenuhi kepatuhan penyampaian Ringkasan Risalah RUPS sesuai Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017	
A.3.13	Do companies provide at least 21 days notice for all AGMs and EGMs?	Yes	1	Ya, dipublikasi pada saat Pemanggilan RUPS http://bni.co.id/portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/Rev6a_Pemanggilan%20RUPS_26%20Februari%202018_Investor%20Jakpost.pdf	



No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
A.3.14	Does the company provide the rationale and explanation for each agenda which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	Yes	1	Ya, Penjelasan tersebut tertuang dalam Berita Acara RUPS http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/2018/Akta%20Berita%20Acara%20RUPS%20BNI%20No%2037%2020%20Maret%202018.pdf	
A.3.15	Does the company give the opportunity for shareholder to place item/s on the agenda of AGM?	Yes	1	Ya, kesempatan tersebut dituangkan dalam Pengumuman RUPS http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/BBNI%20-%20ANNOUNCEMENT%20-%20TJP.pdf	
A.4	Pasar untuk pengendalian/kontrol perusahaan (Markets for Corporate control) harus dimungkinkan berfungsi dengan cara yang efisien dan transparan				
A.4.1	In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers, does the board of directors/commissioners of the offeree company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	Yes	1	Selama tahun 2018, tidak ada transaksi material khususnya yang berkaitan dengan merger, akuisisi, dan/atau takeover.	
A.5	Pelaksanaan Hak Kepemilikan Pemegang Saham, Termasuk Investor Institusi Difasilitasi Perusahaan				
A.5.1	Does the company publicly disclose policy/practice to encourage shareholders including institutional shareholders to attend the general meetings or engagement with the company?	Yes	1	Perusahaan telah mengungkapkan praktik dalam mendorong pemegang saham untuk menghadiri RUPS atau keterlibatan dalam Perusahaan. Hal ini pun tertuang dalam Buku Tata Tertib RUPS Tahunan 20 Maret 2018 http://bni.co.id/portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/ENG%20-%20Buku%20Tata%20Tertib.pdf	
PRINSIP B: PERLAKUAN SETARA KEPADA PEMEGANG SAHAM (EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS)					
B.1	Kepemilikan Saham dan Hak Suara				
B.1.1	Do the company's ordinary or common shares have one vote for one share?	Yes	1	Ya, setiap lembar saham memiliki 1 (satu) hak suara dalam pengambilan keputusan, Hal ini diatur dalam Pasal Buku Tata Tertib RUPS Tahunan 20 Maret 2018 http://bni.co.id/portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/ENG%20-%20Buku%20Tata%20Tertib.pdf	
B.1.2	Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)?	Yes	1	Ya, Perseroan mengungkap hak suara untuk setiap klasifikasi dalam Laporan Tahunan BNI Tahun Buku 2017 halaman 769 yang telah dipublikasikan dalam website perusahaan. http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-eng.pdf	
B.2	Panggilan RUPST				
B.2.1	Does each resolution in the most recent AGM deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	No	0	-	
B.2.2	Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?	Yes	1	Ya, Perseroan telah menterjemahkan Pemanggilan RUPS Tahunan 20 Maret 2018 dalam Bahasa Inggris pada Koran Jakarta Post dan dipublikasikan bersamaan dengan Pemanggilan RUPS Tahunan 20 Maret 2018 dalam Bahasa Indonesia di Koran Bisnis Indonesia. http://bni.co.id/portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/Rev6a_Pemanggilan%20RUPS_26%20Februari%202018_Investor%20Jakpost.pdf	



No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
Does the notice of AGM/circulars have the following details:					
B.2.3	Are the profiles of directors/commissioners (at least age, qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?	No	0	Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 dan No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris / Direksi Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris / Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris / Direksi. Mengingat Perseroan adalah BUMN Terbuka, maka Perseroan tunduk pada ketentuan tersebut.	
B.2.4	Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	No	0	-	
B.2.5	Were the proxy documents made easily available?	Yes	1	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 20 Maret 2018 http://bni.co.id/portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/BBNI_SUMMARY%20OF%20MINUTES%20OF%20AGM%202018.pdf	
B.3 Perdagangan orang dalam dan self-dealing abusif (penyalah-gunaan wewenang) haruslah dilarang.					
B.3.1	Does the company have policies and/or rules prohibiting directors/commissioners and employees to benefit from knowledge which is not generally available to the market?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat di Laporan Keberlanjutan Perseroan halaman 431, bagian penjelasan prinsip Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/Laporan-Keberlanjutan-Tahun-2017.pdf	
B.3.2	Are the directors and commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	No	0	Perseroan selalu memenuhi ketentuan kewajiban pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017	
B.4 Transaksi Pihak Berelasi Yang Dilakukan Oleh Dewan Komisaris & Direksi					
B.4.1	Does the company have a policy requiring directors / commissioners to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest?	Yes	1	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi 2018 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/TataKelola/Docs/GCG/Pedoman%20dan%20Tata%20Tertib%20Kerja%20Direksi%202018.pdf Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/the%20board%20manual%20for%20the%20board%20of%20commissioners.pdf	
B.4.2	Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material/significant RPTs to determine whether they are in the best interests of the company?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 716 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
B.4.3	Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat pada Pasal 13 ayat 22 Anggaran Dasar Perseroan http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/TataKelola/Docs/GCG/BBNI%20-%20ARTICLES%20OF%20ASSOCIATION%202018.pdf	



No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
B.4.4	Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	No	0	-	
B.5	Perlindungan kepada para pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan abusif				
B.5.1	Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	No	0	-	
B.5.2	In case of related party transactions requiring shareholders approval, is the decision made by disinterested shareholders?	Yes	1	Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 719 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	

PRINSIP C: PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN (ROLE OF STAKEHOLDERS)

C.1	Hak-Hak Para Pemangku Kepentingan yang ditetapkan oleh UU atau lewat kesepakatan bersama haruslah dihormati				
C.1.1	The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	Yes		Telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 368 tentang BNI Contact Center http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
C.1.2	Supplier/contractor selection procedures?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada bagian Lelang Pengadaan di website Perseroan http://bni.co.id/id-id/beranda/berita/lelangpengadaan	
C.1.3	The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat di Laporan Keberlanjutan Perseroan halaman 62 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/Laporan-Keberlanjutan-Tahun-2017.pdf	
C.1.4	The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat di Laporan Keberlanjutan Perseroan halaman 83 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/Laporan-Keberlanjutan-Tahun-2017.pdf	
C.1.5	Describes the company's anti-corruption programmes and procedures?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 432 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
C.1.6	Describes how creditors' rights are safeguarded?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 432 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
C.1.7	Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?	Yes		Ya, Perseroan melaporkan pada Laporan Keberlanjutan yang terpisah dari Laporan Tahunan Perseroan http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/Laporan-Keberlanjutan-Tahun-2017.pdf	
C.2	Para pemangku kepentingan haruslah memiliki peluang untuk mendapatkan ganti rugi efektif untuk pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak mereka				
C.2.1	Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 419 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	



No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
C.3	Mekanisme-mekanisme meningkatkan kinerja untuk partisipasi karyawan haruslah dimungkinkan berkembang				
C.3.1	Does the company explicitly disclose the health, safety, and welfare policy for its employees?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 392 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
C.3.2	Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 129 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
C.3.3	Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 389 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
C.4	Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan-badan perwakilan mereka, haruslah dapat secara bebas mengomunikasikan keprihatinan mereka kepada dewan atas praktik-praktik melanggar hukum dan tidak etis dan hak-hak mereka melakukan ini haruslah dilindungi				
C.4.1	Does the company have a whistleblowing policy which includes procedures for complaints by employees concerning alleged illegal (including corruption) and unethical behavior and provide contact details via the company's website or annual report?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 747 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
C.4.2	Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behavior from retaliation?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 707. http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan				
D.1.1	Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 138 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.1.2	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 137 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.1.3	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 528 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.1.4	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 528 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.1.5	Does the company disclose details of the subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 340 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	



No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
D.2	Kualitas Laporan Tahunan				
D.2.1	Corporate objectives	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 102 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.2.2	Financial performance indicators	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 47 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.2.3	Non-financial performance indicators	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 69 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.2.4	Dividend policy	No		-	
D.2.5	Biographical details (at least age, qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of directors/commissioners	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 106 dan 114 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.2.6	Attendance details of each director/commissioner in respect of meetings held	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 507 dan 550 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.2.7	Total remuneration of each member of the board of directors/commissioners	No		D.2.7 terkait dengan pengungkapan remunerasi setiap anggota Dewan Komisaris. Tidak ditemukan informasi terkait dengan remunerasi anggota Dewan Komisaris	
D.2.8	Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 412 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.3	Pengungkapan Atas Transaksi Hubungan Istimewa				
D.3.1	Does the company disclose its policy covering the review and approval of material/significant RPTs?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 304 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.3.2	Does the company disclose the name of the related party and relationship for each material/significant RPT?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 304 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.4	Pengungkapan Atas Transaksi Saham Perusahaan Yang Dilakukan Oleh Para Anggota Direksi Atau Dewan Komisaris				
D.4.1	Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	Yes		Ya, telah dimuat pada Laporan Keuangan Perusahaan pada Catatan Atas Laporan Keuangan nomor 34.	
D.5	Eksternal Auditor Dan Laporan Auditor				
D.5.1	Are audit fees and non-audit fees disclosed?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 661 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.5.2	Does the non-audit fees exceed the audit fees?	No		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 662 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	



No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
D.6	Media Komunikasi Perusahaan				
	Does the company use the following modes of communication?				
D.6.1	Quarterly reporting	Yes		Ya, telah dipublikasi pada web Perseroan http://bni.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi	
D.6.2	Company website	Yes		Ya, Perseroan memiliki website dengan alamat : http://bni.co.id/id-id/	
D.6.3	Analyst's briefing	Yes		Ya, telah dipublikasi pada web Perseroan http://bni.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi	
D.6.4	Media briefings /press conferences	Yes		Ya, telah dipublikasi pada web Perseroan http://bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers	
D.7	Penyampaian Informasi Laporan Keuangan Atau Laporan Tahunan Secara Tepat Waktu				
D.7.1	Are the audited annual financial report/statement released within 120 days from the financial year end?	Yes		Ya, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tanggal 31 Desember 2017 dipublikasikan pada tanggal 18 Januari 2018 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/LaporanKeuanganAuditan-2017.pdf	
D.7.2	Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	Yes		Ya, Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan dipublikasikan pada tanggal 26 Februari 2018 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
D.7.3	Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	Yes		Ya, dipublikasikan pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tanggal 31 Desember 2018 halaman 2 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/LaporanKeuanganAuditan-2017.pdf	
D.8	Keberadaan Website Perusahaan Dalam Mengungkap Informasi Tentang Perusahaan Ke Publik				
	Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following :				
D.8.1	Financial statements/reports (current and prior years)	Yes		Ya http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/LaporanKeuanganAuditan-2017.pdf http://bni.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi	
D.8.2	Materials provided in briefings to analysts and media	Yes		Ya http://bni.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi	
D.8.3	Downloadable annual report	Yes		Ya http://bni.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi	
D.8.4	Notice of AGM and/or EGM	Yes		Ya http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/BBNI%20-%20PENGUMUMAN%20-%20INV.DAILY.pdf	
D.8.5	Minutes of AGM and/or EGM	No		http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/2018/Akta%20Berita%20Acara%20RUPS%20BNI%20No%2037%2020%20Maret%202018.pdf	
D.8.6	Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)	Yes		http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/TataKelola/Docs/GCG/072018_resize_AD%20BNI%202018%20(dan%20AHU).pdf	



No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
D.9	Hubungan-hubungan investor				
D.9.1	Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer responsible for investor relations?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 87 dan website Perseroan http://bni.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/kontakinvestor/kontakinformasi	
PRINSIP E: TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (RESPONSIBILITIES OF THE BOARD)					
E.1	Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris				
Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Kebijakan CG harus dinyatakan secara jelas oleh perusahaan:					
E.1.1	Does the company disclose its corporate governance policy / board charter?	Yes		Ya, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris dipublikasikan di website Perseroan http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/pedomandantatertib	
E.1.2	Are the types of decisions requiring board of directors/ commissioners' approval disclosed?	Yes		Ya, dipublikasikan di Anggaran Dasar Perseroan http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/TataKelola/Docs/GCG/072018_resize_AD%20BNI%202018%20(dan%20AHU).pdf	
E.1.3	Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated?	Yes		Ya, dipublikasikan di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perseroan http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/pedomandantatertib http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/TataKelola/Docs/GCG/072018_resize_AD%20BNI%202018%20(dan%20AHU).pdf	
Visi dan Misi Perusahaan:					
E.1.4	Does the company have an updated vision and mission statement?	Yes		Ya, dipublikasikan di website Perseroan dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 102 http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tentangbni/visimisi http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.1.5	Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 48 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.1.6	Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 48 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.2	Struktur Dewan Komisaris				
Kode Etik atau Kode Perilaku:					
E.2.1	Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	Yes		Ya, diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang dipublikasikan di website Perseroan http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/pedomandantatertib	
E.2.2	Are all directors/ commissioners, senior management and employees are required to comply with the code?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 743 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.2.3	Does the company have a process to implements and monitors compliance with the code of ethics or conduct?	Yes		Ya telah dipublikasikan di Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 743 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	



No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris:					
E.2.4	Do independent directors/ commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners?	Yes		Pada tahun 2017, jumlah Komisaris Independen adalah 4 dari total 8 anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan telah dipublikasikan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 106	
E.2.5	Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years each for its independent directors/ commissioners?	Yes		Ya, telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi / Dewan Komisaris pada bagian Masa Jabatan Direksi / Dewan Komisaris http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/pedomandantatertib	
E.2.6	Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/ non-executive director/ commissioner may hold simultaneously?	Yes		Ya, telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi / Dewan Komisaris pada bagian Masa Jabatan Direksi / Dewan Komisaris http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/pedomandantatertib	
E.2.7	Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside the group?	No	-	-	
Komite Nominasi:					
E.2.8	Does the company have a Nominating Committee (NC)?	Yes		Ya, Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris	
E.2.9	Does the Nominating Committee comprise of a majority of independent directors/commissioners?	No		E.2.9 mensyaratkan Komite Nominasi Perusahaan adalah mayoritas terdiri dari komisaris independen. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Komisaris Independen Perusahaan tidak lebih dari 50%, namun tepat 50%. Hal ini tercantum pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perusahaan.	
E.2.10	Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/ commissioner?	Yes		Ya, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah Bapak Ahmad Fikri Assegaf, yang merupakan Komisaris Independen Perseroan http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris	
E.2.11	Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee?	Yes		Ya, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dapat diakses di website Perseroan http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/piagam_komite_nominasi_dan_remunerasi_2017.pdf	
E.2.12	Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	Yes		Ya, Agenda dan Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan di Publikasikan pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 593. Selama tahun 2017 KNR telah melakukan 12 (dua belas) kali rapat. http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	



No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
Komite Remunerasi/Komite Kompensasi:					
E.2.13	Does the company have a Remuneration Committee?	Yes		Ya, Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris	
E.2.14	Does the Remuneration Committee comprise of a majority of independent directors/commissioners?	No		E.2.14 memiliki keterkaitan dengan point E.2.9 yaitu mensyaratkan Komite Remunerasi Perusahaan adalah mayoritas terdiri dari Komisaris Independen. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Komisaris Independen Perusahaan tidak lebih dari 50%, namun tepat 50%. Hal ini tercantum pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017Perusahaan.	
E.2.15	Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner?	Yes		Ya, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah Bapak Ahmad Fikri Assegaf, yang merupakan Komisaris Independen Perseroan http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris	
E.2.16	Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Remuneration Committee?	Yes		Ya, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dapat diakses di website Perseroan http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/piagam_komite_nominasi_dan_remunerasi_2017.pdf	
E.2.17	Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	Yes		Ya, Agenda dan Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan di Publikasikan pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017Perseroan halaman 593. Selama tahun 2017 KNR telah melakukan 12 (dua belas) kali rapat. http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
Komite Audit:					
E.2.18	Does the company have an Audit Committee?	Yes		Ya, Perseroan memiliki Komite Audit http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris	
E.2.19	Does the Audit Committee comprise entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	Yes		Ketua dan anggota Komite Audit Perseroan merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Keanggotaan Komite Audit Perseroan dipublikasikan di website Perseroan. http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris	
E.2.20	Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	Yes		Ya, Ketua Komite Audit Perseroan adalah Bapak Pataniari Siahaan, yang merupakan Komisaris Independen Perseroan http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris	
E.2.21	Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	Yes		Ya, Piagam dan Kode Etik Komite Audit telah dipublikasikan pada website Perseroan http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/piagam%20komite%20audit.pdf http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/kode%20etik%20komite%20audit.pdf	
E.2.22	Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	No		-	



Tata Kelola
Perusahaan

No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
E.2.23	Is the meeting attendance of the audit committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	Yes		Ya, Agenda dan Kehadiran Rapat Komite Audit dipublikasikan pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 580. Selama tahun 2017, Komite Audit menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat. http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.2.24	Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	No		E.2.24 mensyaratkan Komite Audit Perusahaan mempunyai tanggung jawab utama untuk merekomendasikan penunjukan dan pemberhentian Auditor Eksternal. Bila hanya salah satu dari tanggung jawab tersebut yang dimiliki Komite Audit Perusahaan, perusahaan tetap dianggap tidak memenuhi praktik tata kelola perusahaan atas point ini. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Komite Audit Perusahaan hanya memiliki salah satu dari dua tanggung jawab tersebut.	
E.3	Proses Dewan Komisaris				
	Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris:				
E.3.1	Are the board of directors meetings scheduled before the start of financial year?	No	-		
E.3.2	Does the board of directors/ commissioners meet at least six times per year?	Yes		Ya. Selama tahun 2017, dilaksanakan 29 (dua puluh Sembilan) kali Rapat Dewan Komisaris, 11 (sebelas) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan 56 (lima puluh enam) kali Rapat Direksi. Hal tersebut dipublikasikan pada Laporan Tahunan Perseroan halaman 494, 503, 529 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.3.3	Has each of the directors/ commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	No	-		
E.3.4	Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	No	-		
E.3.5	Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	Yes		Ya telah dipublikasikan pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 529 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
	Akses Informasi:				
E.3.6	Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	No	-		
E.3.7	Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 622 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.3.8	Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices?	Yes		Ya, pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan pada bidang tersebut telah di publikasikan pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 621 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	



No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
Penunjukkan dan Pemilihan Kembali anggota Dewan Komisaris:					
E.3.9	Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	Yes		Ya. Kriteria anggota Dewan Komisaris telah dipublikasikan pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 474, dan Kriteria Direksi telah dipublikasikan pada Laporan Tahunan Perseroan halaman 517 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.3.10	Does the company disclose the process followed in appointing new directors/commissioners?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 454 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.3.11	Are all the directors/ commissioners subject to re-election at least once every three years?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 454 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
Perihal Mengenai Remunerasi:					
E.3.12	Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	No	-		
E.3.13	Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	No	-		
E.3.14	Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 452 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.3.15	Does the company have measureable standards to align the performance-based remuneration of the executive with long term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	No	-		
Audit Internal:					
E.3.16	Does the company have a separate internal audit function?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 628 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.3.17	Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 630 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.3.18	Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 630 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	



No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
Pengawasan Risiko (Risk Oversight):					
E.3.19	Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 663 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.3.20	Does the Annual Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 687 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.3.21	Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 58 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.3.22	Does the Annual Report / Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/ risk management systems?	Yes		Ya, telah dipublikasikan pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 48-49, 58-59,75-76 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.4	Individu Dalam Susunan Dewan Komisaris				
Komisaris Utama Perusahaan:					
E.4.1	Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 114 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.4.2	Is the chairman an independent director/ commissioner?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Perseroan halaman 114 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.4.3	Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years?	No		-	
E.4.4	Are the role and responsibilities of the chairman disclosed?	No		Point E.4.4 meminta pengungkapan tugas dan tanggung jawab secara khusus dari Komisaris Utama. BBNI tidak memberikan pemaparan khusus untuk informasi ini.	
Keahlian dan Kompetensi Dewan Komisaris:					
E.4.5	If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	N/A		*terdapat Not Applicable (N/A) pada point ini. Jawaban N/A tidak diperhitungkan ke dalam point penilaian akhir.	
E.4.6	Does at least one non-executive director/ commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada bagian Profil Direksi dan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 114 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	

No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
E.5	Kinerja Dewan Komisaris				
	Pelatihan/Pengembangan Dewan Komisaris:				
E.5.1	Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 507 dan 561 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.5.2	Does the company have a policy that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 166 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
	Penunjukkan dan Penilaian Kinerja Direktur Utama:				
E.5.3	Does the company disclose how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 596 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.5.4	Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 442 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris:				
E.5.5	Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 442 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	
E.5.6	Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	No	-		
E.5.7	Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Yes		Ya, sebagaimana telah dimuat pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan halaman 50 http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2017-ind.pdf	



No.	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A"	Skor	Keterangan ACGS	Keterangan Perseroan
3.6.	BONUS DAN PENALTI			<p>_ Bonus Penilaian Untuk Praktik GCG Perusahaan</p> <p>BBNI memperoleh bonus untuk beberapa item penilaian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> (B) C.1.1: +2 poin. Poin ini mewajibkan BBNI untuk mengadopsi kerangka internasional terkait pelaporan keberlangsungan perusahaan. Berdasarkan Laporan Keberlanjutan, BBNI sudah melaksanakan mengadopsi kerangka untuk keberlanjutan. (B) D.1.1: +3 poin. Poin ini mewajibkan Perusahaan untuk mengeluarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit dalam 60 hari sejak akhir tahun buku keuangan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa perusahaan mengeluarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit pada 18 Januari 2018, masih dalam 60 hari sejak tahun buku perusahaan. (B) E.5.1: +2 poin. Item ini mensyaratkan Dewan Komisaris untuk mendeskripsikan proses tata kelola seputar Information Technology (IT) termasuk gangguan, keamanan cyber, pemulihan bencana, untuk meyakinkan bahwa risiko kunci sudah diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Hasil penilaian menunjukkan bahwa terdapat pengungkapan atas hal ini pada Laporan Tahunan Perusahaan. (B) E.6.1: +2 poin. Item ini mensyaratkan perusahaan untuk memiliki Komite Risiko yang terpisah. Hasil penilaian menunjukkan bahwa perusahaan memiliki Komite Risiko yang terpisah dengan ditunjukkan pada Laporan Tahunan Perusahaan. <p>Total poin bonus yang diperoleh perusahaan adalah 9 (sembilan) poin.</p>	
	_ Penalti Untuk Praktik GCG Perusahaan			<p>BBNI terkena penalti untuk satu item penilaian berikut ini:</p> <p>(P) E.4.2: -2 poin. Poin ini berisi mengenai pengungkapan apakah Komisaris Independen menerima opsi, saham atau bonus. Hasil penilaian menunjukan bahwa Komisaris Independen menerima salah satu dari ketiga hal tersebut yang ditunjukkan pada Laporan Tahunan Perusahaan.</p> <p>Total poin penalti yang diperoleh perusahaan adalah minus 2 (dua) poin.</p> <p>Sehingga Skor total untuk Komponen Bonus dan Penalti (Penilaian Level 2) yang diperoleh perusahaan adalah sebesar 7 poin.</p>	

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

688 TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

693 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

695 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL

696 PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

BERLANDASKAN KONSEP KEUANGAN BERKELANJUTAN

698 DASAR PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

699 STRUKTUR PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

700 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

705 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT

DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

708 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

715 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN



*Informasi lebih lengkap tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan BNI Tahun 2018

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Komitmen BNI dalam menerapkan tanggung jawab sosial telah tercermin dalam misi BNI nomor 4 (empat) yaitu Meningkatkan Kepedulian dan Tanggung Jawab kepada Lingkungan dan Komunitas dan nomor 5 (lima) yaitu Menjadi Acuan Pelaksanaan Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Dalam upaya mencapai misi tersebut, telah ditetapkan beberapa kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan BNI antara lain meliputi:

1. Pedoman Perusahaan Perkreditan Bisnis Banking Segmen Korporasi Buku I untuk analisis risiko kredit nasabah yang mengatur tentang persyaratan AMDAL atau PROFER.
2. Pedoman Perusahaan Bina Lingkungan (BL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) No. IN/134/KMP/001 tanggal 23 Maret 2018.
3. Pedoman Perusahaan Pengelolaan Pengembangan Komunitas No. IN/341/KMP/001 tanggal 17 Juli 2017.
4. Pedoman Perusahaan Pola Hidup Ramah Lingkungan No. IN/418/KMP/001 tanggal 12 September 2017.

Pedoman-pedoman tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab sosial BNI. Adapun prosesnya dimulai dari perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan pelaksanaannya dievaluasi secara berkala dan dilaporkan kepada para pemangku kepentingan yang terkait.

Di samping itu, BNI mulai tahun 2018 telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai komitmen BNI dalam menerapkan keuangan berkelanjutan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/412/DIR/R tanggal 4 Desember 2018. RAKB akan menjadi acuan BNI dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan di 2019 sampai dengan 2023 dan setiap tahun pelaksanaannya dilaporkan di OJK.

Tanggung jawab pelaksanaan tata kelola tanggung jawab sosial saat ini berada pada Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan (KMP). Divisi ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

BNI menyadari bahwa lingkup tanggung jawab sosial adalah meliputi seluruh dampak dari kegiatan bisnisnya terhadap seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, BNI telah memiliki metode *due diligent* terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Mekanisme *due diligent* digunakan meliputi:

1. Survei kepuasan pegawai dan nasabah.
2. Analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
3. Pendampingan oleh konsultan yang ahli di bidangnya.
4. Peningkatan kompetensi terkait keuangan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh WWF Indonesia, USAID ICED II, dan berbagai pihak lainnya.
5. Pelaksanaan pedoman Perusahaan Perkreditan Bisnis Banking Segmen Korporasi Buku I untuk analisis risiko kredit nasabah.
6. Divisi KMP senantiasa melakukan evaluasi efektivitas pola hidup ramah lingkungan.

Beberapa *stakeholder* penting yang terdampak dari kegiatan perusahaan telah diidentifikasi oleh BNI. *Stakeholder* penting serta program kerja dalam menangani isu sosial ekonomi dan lingkungan dalam rangka meningkatkan *stakeholder engagement* adalah sebagai berikut:



Pemangku Kepentingan	Topik Pembahasan	Pendekatan dan Response BNI	Frekuensi Pendekatan
Nasabah (Hubungan Ekonomi)	<ol style="list-style-type: none"> Keamanan transaksi perbankan Kredit Usaha Kecil dan Menengah Fasilitas perbankan dan kemudahan akses Informasi produk dan layanan perbankan yang jelas dan transparan 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Call Center Survei Kepuasan Pelanggan Website & <i>Frontline Information</i> Gathering Agen46 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap saat Dua tahun sekali Setiap saat Minimal setahun Sekali
Investor/ Pemegang Saham (Hubungan Ekonomi, Kepemilikan dan Legal)	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja keuangan dan non keuangan Investasi untuk Perusahaan ramah lingkungan 	Pelaporan Kinerja Menyelenggarakan RUPS	Setiap Kuartal
Pegawai (<i>Legal</i> & pemangku Legal kepentingan yang membantu pencapaian tujuan perusahaan)	<ul style="list-style-type: none"> Hak-hak pegawai Kesetaraan kesempatan Pengembangan Karier Pengalaman bekerja yang berharga dan menyenangkan 	<ul style="list-style-type: none"> Media Internal (Portal), hotline telepon dan surel Survei Kepuasan pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap saat Setahun sekali
Serikat Pekerja (<i>Legal</i>)	Hak-hak pegawai Remunerasi & tunjangan	Pembahasan Perjanjian Kerja Bersama	Dua tahun sekali
Pemerintah & OJK (<i>Legal</i> dan Kepentingan LJK)	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan Analisa risiko lingkungan & sosial dalam pemberian kredit <i>Anti Bribery and Corruption (ABC), Anti-Money Laundering (AML) and Anti Terrorism</i> Green banking Inclusive banking Keuangan berkelanjutan 	Pelaporan pelaksanaan kepatuhan & notifikasi pada Bank Indonesia Basel II Accord-Basel Committee Pelaporan kepatuhan aspek syariah pada Dewan Syariah Nasional Pembentukan Agen46, penyediaan ATM disabilitas Penyusunan RKAB dan Laporan Keberlanjutan	Minimal setahun sekali
Pemasok (hubungan ekonomi & <i>legal</i>)	Hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok proses pengadaan barang maupun jasa yang adil & transparan	Seminar & sosialisasi kebijakan	Saat diperlukan
Organisasi Bisnis (<i>Legal</i> & Kepentingan Industri)	Kinerja keuangan Investasi untuk perusahaan ramah lingkungan Kinerja nonkeuangan Kegiatan operasional Arah perkembangan bisnis	Pertemuan & kegiatan nasional maupun regional Konferensi Internasional	Empat tahun sekali
Organisasi Masyarakat/ NGO (Relasi sosial, lisensi sosial & tanggung jawab sosial serta kedekatan dengan perusahaan)	Dampak & kinerja lingkungan Program CSR yang dilaksanakan & direncanakan Kesempatan untuk berkolaborasi dalam program CSR Informasi kegiatan perusahaan	Kerja sama strategis dalam kepedulian sosial BNI Pelaporan program kemitraan bina lingkungan	Minimal setahun sekali

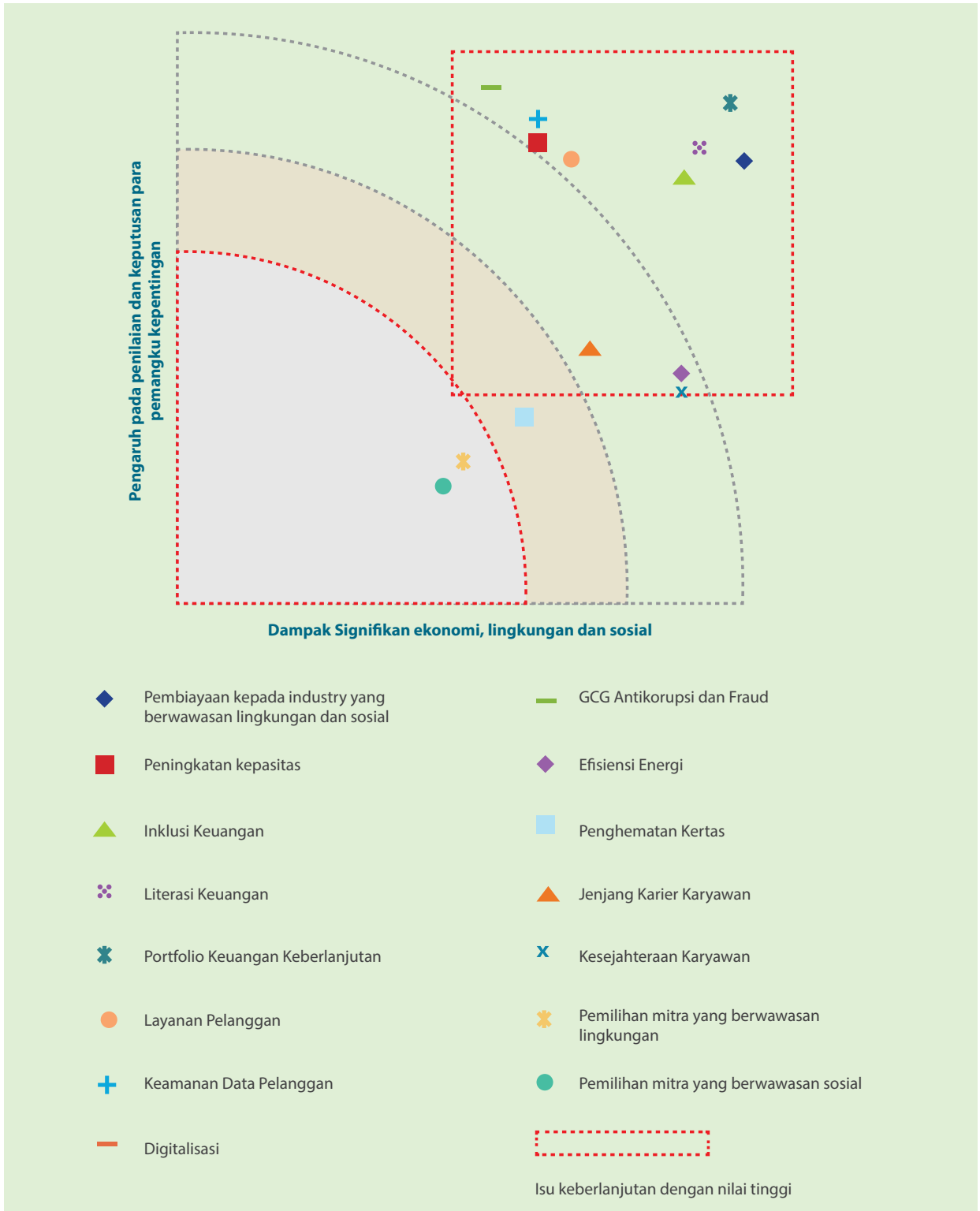


Pemangku Kepentingan	Topik Pembahasan	Pendekatan dan Response BNI	Frekuensi Pendekatan
Media (Relasi sosial, lisensi Social)	Kinerja keuangan & non keuangan Dampak & kinerja lingkungan Program CSR yang dilaksanakan & direncanakan Kesempatan untuk berkolaborasi dalam Program CSR	Siaran pers Media Gathering	Saat diperlukan Tiga bulan sekali

BNI juga telah mengidentifikasi isu-isu penting sosial, ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan dalam rangka melakukan pengelolaan isu-isu penting tersebut agar memberikan dampak positif bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Isu-isu penting sosial, ekonomi dan lingkungan adalah sebagai berikut:

ISU KEBERLANJUTAN	RELEVANSI DENGAN TOPIK MATERIAL BERDASARKAN GRI STANDARD
ASPEK EKONOMI	
Pembiayaan kepada industry yang berwawasan lingkungan dan sosial	Portofolio Produk (FSSD)
Portofolio keuangan berkelanjutan	Kinerja ekonomi (201), portofolio produk (FSSSD)
ASPEK SOSIAL	
Inklusi keuangan	Masyarakat local (413)
Literasi keuangan	
Layanan pelanggan	Privasi pelanggan (418)
Keamanan data pelanggan	
Digitalisasi	
Peningkatan kapasitas	Pendidikan dan pekatihan (404)
Jenjang Karier karyawan	
Kesejahteraan karyawan	Ketenagakerjaan (401)
GCG Antikorupsi dan fraud	Antikorupsi (205)
Pemilihan mitra yang berwawasan sosial	Penilaian sosial pemasok (414)
ASPEK LINGKUNGAN	
Efisiensi energi	Energi (302)
Penghematan kertas	Limbah (306)
Pemilihan mitra yang berwarna lingkungan	Penilaian lingkungan pemasok (308)

*Tulisan berwarna menunjukkan isu dengan nilai tinggi





BNI senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban. Rincian kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kegiatan tanggung jawab sosial yang merupakan kewajiban

Kegiatan	Dasar Regulasi
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 4 tahun 1997 dan PP No. 43 tahun 1998 mengenai kewajiban mempekerjakan kaum disabilitas. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.023/PHIJSK-PK/PKB/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Serikat Pekerja PT PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Keselamatan Kerja	Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Perlindungan Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 1/POJK.03/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Program-Program Anti Korupsi	Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan tanggung jawab yang melebihi kewajiban adalah sebagai berikut:

- Pola Hidup Ramah Lingkungan.
- Perkreditan Bisnis *Banking* Segmen Korporasi Buku I untuk analisis risiko kredit nasabah yang mengatur tentang persyaratan AMDAL atau PROPER.
- Kegiatan ketenagakerjaan lainnya yang meliputi penyediaan *Day Care, Gym Center, Konsep Open Working Space*, dan Ruang Laktasi.
- Program-program keselamatan kerja lainnya antara lain penggunaan gedung ramah lingkungan dan tahan gempa.
- Kesempatan Karier bagi putra-putri daerah melalui *Regional Officer Development Program (ODP)*.
- Pembelajaran bagi pegawai BNI melalui digital learning (BNI smarter) yang bias diakses melalui smartphone
- Penggunaan solar cell di Plaza BNI BSD dengan kapasitas 2200 watt
- Menjadi anggota di dalam organisasi internasional (UNEP-FI) dan nasional (IBCSD, AKKI, ASPI, HIMBARA, PERBANAS, FKPP)
- Memiliki Misi Perusahaan yang terkait dengan aspek LST yaitu Misi No. 4 "Meningkatkan Kepedulian dan Tanggung Jawab kepada Lingkungan dan Komunitas" dan No. 5 "Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industry"
- Memiliki Pilar Keberlanjutan BNI (BNI Untuk Indonesia, BNI untuk Nasabah, BNI untuk Pegawai, BNI untuk masyarakat dan BNI untuk Lingkungan Hidup)
- Memiliki 19 unit ATM Disabilitas
- Mempekerjakan 23 pegawai disabilitas

Selama tahun 2018 BNI telah mengeluarkan biaya Program Kemitraan sebesar Rp104,49 miliar dan Program Bina Lingkungan sebesar Rp115,44 miliar.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN **HAK ASASI MANUSIA**

KEBIJAKAN

BNI berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan-ketentuan hukum dan Prinsip-prinsip HAM. Hal ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara BNI dan Pegawai BNI. Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia meliputi jaminan kebebasan berserikat, kebebasan dalam beribadah, dan lainnya. Selain itu, BNI juga melakukan mekanisme pengaduan terhadap Keluh Kesah pegawai melalui divisi *Human Capital* (HCT).

TARGET KEGIATAN

Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah disepakati bersama menjadi target bagi BNI untuk dapat diterapkan dengan baik. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi semua pegawai BNI.

KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan dalam tanggung jawab sosial perusahaan terkait hak asasi manusia meliputi:

JAMINAN BAGI SERIKAT PEKERJA

BNI mengakui bahwa Serikat Pekerja merupakan wakil yang sah bagi Anggota, baik secara perorangan maupun kolektif dalam bidang ketenagakerjaan.

BNI senantiasa memusyawarahkan dengan Serikat Pekerja dalam menetapkan kebijakan di bidang kepegawaian yang berkaitan dengan syarat kerja dan kesejahteraan Pekerja/Pegawai.

WAKTU KERJA

BNI senantiasa menerapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di luar waktu kerja dan di luar jam kerja lembur wajib memperhatikan keseimbangan kerja Pekerja/Pegawai (*Work Life Balance*) yang diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian.

CUTI TAHUNAN

Pelaksanaan kegiatan cuti tahunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pegawai diberikan hak cuti tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenjang jabatan Manajer ke atas mendapatkan hak cuti 18 hari kerja.
 - b. Jenjang jabatan Asisten Manajer ke bawah :
 - i. Masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, mendapatkan hak cuti 18 (delapan belas) hari kerja.
 - ii. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, mendapatkan hak cuti 15 (lima belas) hari kerja.
 - iii. Masa kerja sampai dengan 5 (lima) tahun, mendapatkan hak cuti 12 (dua belas) hari kerja.
- Pegawai yang baru diangkat sebagai Pegawai tetap, cuti tahunan pertama kali diberikan setelah masa kerja paling sedikit 6 (enam) bulan terus menerus sejak tanggal pengangkatan dan diberikan secara proporsional.
- Pegawai yang berhenti bekerja, pemberian hari cuti dan ongkos perjalanan cuti tahunannya diberikan secara proporsional.
- Pegawai yang menjalani Cuti Tahunan diberikan Ongkos Perjalanan Cuti Tahunan sebesar 1 (satu) kali *Total Cash*.
- Memperhatikan kepentingan Pengusaha atau kepentingan Pegawai, cuti tahunan dapat dilaksanakan dalam beberapa bagian, yang salah satu bagiannya paling sedikit selama 5 (lima) hari kerja.
- Apabila hari libur yang ditetapkan Pemerintah dan hari libur yang diakui oleh Perusahaan jatuh pada masa cuti Pegawai, maka hari tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari cuti Pegawai.
- Hak cuti tahunan harus dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan, apabila dipandang perlu dapat dilakukan penangguhan maksimal 6 (enam) bulan sejak berakhirnya periode cuti.
- Bagi Pegawai yang ditempatkan di luar *Home Base* atau kota kelahiran, mendapatkan tambahan waktu/ hari di luar hak cutinya apabila yang bersangkutan melaksanakan cuti dan dipergunakan untuk kembali ke *Home Base* atau ke kota kelahiran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tambahan waktu/hari dihitung berdasarkan lama perjalanan yang ditempuh paling banyak 6 (enam) hari kalender untuk pergi dan kembali ke tempat tugas.
- b. Diberikan 1 (satu) kali setiap tahun cuti.
- c. Jenjang jabatan AVP ke bawah.
- d. Waktu tempuh perjalanan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam perjalanan darat ataupun laut.
- e. Ketentuan pelaksanaan cuti tahunan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian.

CUTI HAID, MELAHIRKAN DAN KEGUGURAN

BNI sangat menghargai hak asasi manusia bagi pegawai perempuan. BNI telah menjalankan kebijakan cuti haid, melahirkan dan keguguran dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pegawai wanita yang menderita sakit saat haid tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid, serta kepada Pegawai yang bersangkutan dapat diberikan cuti haid dan harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- Pegawai wanita yang melahirkan berhak memperoleh cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan kalender dengan tetap menerima Upah/Gaji dan pelaksanaannya diambil 1½ (satu setengah) bulan sebelum dan 1½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan/bidan yang diajukan oleh Pegawai.
- Cuti melahirkan tidak mengurangi hak cuti tahunan dan cuti besar.
- Pegawai wanita yang hamil dan mengalami keguguran yang tidak disengaja dan/atau menggugurkan dengan alasan medis, mendapatkan cuti sesuai dengan surat keterangan dari dokter kandungan/bidan yang merawat, selama 1½ (satu setengah) bulan kalender setelah mengalami keguguran/pengguguran atau sesuai dengan surat keterangan dari dokter kandungan/bidan yang merawat dengan tetap menerima Upah/Gaji.

MENUNAIKAN/MENJALANKAN KEWAJIBAN BERAGAMA

Menjalankan kegiatan keagamaan merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar. Oleh karena itu BNI telah melaksanakan kegiatan kebijakan menunaikan/menjalankan kewajiban beragama sebagai berikut:

- BNI senantiasa memberikan waktu yang secukupnya kepada Pegawai untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agama atau kepercayaannya masing-masing.
- Atas permohonan Pegawai, BNI memberikan izin untuk melaksanakan perjalanan suci umat beragama yang

diwajibkan oleh ajaran agamanya dan diberikan 1 (satu) kali selama bekerja di BNI dalam waktu yang diperlukan tanpa mengurangi hak-hak Pegawai.

- Ketentuan pelaksanaan perjalanan suci umat beragama diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian.

IZIN TIDAK MASUK KERJA

Pegawai berhak tidak masuk kerja dengan tetap menerima Upah/Gaji tanpa mengurangi hak cuti, dengan cara mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Atasan Langsung dan sedapat mungkin melampirkan surat-surat bukti yang sah.

BNI juga memberikan hak untuk Izin keperluan lain:

- Pernikahan Pegawai diberikan izin 3 (tiga) hari kerja;
- Menikahkan anak yang terdaftar pada Perusahaan, maka Pegawai diberi izin 2 (dua) hari kerja;
- Kelahiran anak dari istri yang terdaftar pada Perusahaan atau istri mengalami keguguran kandungan diberi izin 2 (dua) hari kerja;
- Baptisan anak yang terdaftar pada Perusahaan diberi izin 2 (dua) hari kerja;
- Khitanan anak yang terdaftar pada Perusahaan diberi izin 2 (dua) hari kerja;
- Nyambutin anak yang terdaftar pada Perusahaan bagi umat Hindu diberi izin 1 (satu) hari kerja;
- Kematian anggota Keluarga Langsung diberikan izin 2 (dua) hari kerja;
- Kematian kerabat serumah Pegawai diberi izin 1 (satu) hari kerja;
- Kematian saudara kandung Pegawai diberi izin 1 (satu) hari kerja.

Untuk musibah antara lain kebakaran, banjir, bencana alam yang menimbulkan kerusakan berat terhadap tempat tinggal atau kejadian tersebut menyebabkan Pegawai tidak dapat mencapai tempat bekerja, dapat diberikan izin paling lama 3 (tiga) hari kerja, kecuali untuk *force majeure* yang sifatnya regional atau nasional diatur tersendiri.

DAMPAK

Dengan memberikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, maka tingkat *engagement* pegawai sebesar 87,75%, meningkat 4,92% dari tahun sebelumnya. Di samping itu tingkat *turnover* pegawai sebesar 4,76%, lebih rendah dari rata-rata industri perbankan nasional.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN **TERKAIT** **DENGAN OPERASI YANG ADIL**

KEBIJAKAN

Kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan operasi yang adil dituangkan pada beberapa kebijakan khususnya kebijakan anti korupsi yang meliputi pencegahan benturan kepentingan, gratifikasi, dan penerapan *whistleblowingsystem* dan *code of conduct*

TARGET KEGIATAN

BNI menargetkan bahwa semua kebijakan tanggung jawab sosial terkait dengan operasi yang adil telah diterapkan dengan baik.

KEGIATAN

MENCEGAH BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi saat kepentingan ekonomis perusahaan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Insan BNI dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan terjadinya benturan kepentingan sehingga dapat merugikan kepentingan BNI.

LARANGAN MEMBERI, MENERIMA HADIAH ATAU CINDERAMATA

Insan BNI dilarang:

- Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- Memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara secara pribadi dengan tujuan agar yang bersangkutan melakukan transaksi dengan BNI.
- Memberikan hadiah, perjamuan atau fasilitas lain kepada mitra kerja, rekan kerja, dan nasabah sesuai dengan larangan yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

GRATIFIKASI

Salah satu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di BNI adalah dengan menerapkan kebijakan pengendalian Gratifikasi di dalam aktivitas operasionalnya. Untuk itu, BNI membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang ditempatkan di Divisi Kepatuhan. Setiap awal tahun seluruh insan BNI melakukan penandatanganan Pakta Integritas Pegawai yang salah satu poinnya adalah sebagai berikut: "Tidak memberikan, menjanjikan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun kepada atau dari nasabah dana maupun nasabah debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan/atau pihak lainnya baik eksternal maupun internal."

WHISTLEBLOWING SYSTEM

BNI telah membangun Whistleblowing System (WBS) untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. BNI juga berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan kode etik dan budaya kerja sehingga dapat meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan. Mekanisme deteksi dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran di BNI yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak image BNI diimplementasikan melalui Whistleblowing System (WBS) dengan nama "WBS to CEO". Pengelolaan WBS dilakukan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu Deloitte. Dengan demikian, WBS merupakan komitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas dalam bentuk partisipasi aktif Insan BNI untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI.

DAMPAK

Dampak diterapkannya kegiatan tanggung jawab sosial terkait dengan operasi yang adil adalah terciptanya kegiatan usaha yang sehat, sehingga meningkatkan kinerja operasional dan keuangan dengan cukup signifikan di tahun 2018.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BERLANDASKAN KONSEP KEUANGAN **BERKELANJUTAN**



“ Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan hanya sekedar pemenuhan regulasi. Namun juga merupakan tanggung jawab BNI kepada para pemangku kepentingan. Untuk itu, kebijakan pelaksanaan CSR mengacu dan selaras dengan Misi BNI serta aspek LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola).



Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, OJK menerbitkan ketentuan untuk mendorong nilai ekonomis, sosial dan ekologis di dalam setiap pengambilan kebijakan maupun keputusan bisnis, melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Peraturan POJK No. 51/POJK03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik ("POJK Keuangan Berkelanjutan") menetapkan bahwa penerapan keuangan berkelanjutan bagi kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4 dan Bank Asing mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. POJK Keuangan Berkelanjutan diterbitkan untuk mendukung *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan yang telah disusun oleh OJK serta mendukung implementasi penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) melalui industri keuangan dan lembaga keuangan.

Action pertama BNI dalam menerapkan POJK 51 Keuangan Berkelanjutan adalah pembentukan Tim *Task Force* untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BNI Tahun 2019. *Output* Tim *Task Force* tersebut adalah dokumen RAKB yang disampaikan ke OJK bersamaan dengan penyerahan Rencana Bisnis Bank (RBB).

BNI menciptakan nilai (*creating value*) bagi ke lima pemangku kepentingan utama melalui pelaksanaan pilar keberlanjutan, baik secara internal dan eksternal. Adapun nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1. BNI Untuk Indonesia:** Merupakan kegiatan BNI untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, melalui pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi mitra BNI.
- 2. BNI Untuk Nasabah:** BNI menerapkan konsep *responsible investment*. Kami sadar sepenuhnya bahwa investasi dari nasabah harus kami kelola dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, BNI menjalin kemitraan yang saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan melalui penerapan tata kelola yang baik.
- 3. BNI Untuk Pegawai:** Merupakan komitmen BNI untuk menyediakan tempat kerja yang membanggakan dan mampu mendorong semua pegawai untuk meningkatkan kinerja dan potensi yang dimilikinya.
- 4. BNI Untuk Masyarakat:** Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka sesuai dengan Misi Perusahaan, BNI menjalankan peran tanggung jawab sosial (CSR) yang mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka.
- 5. BNI Untuk Lingkungan Hidup:** Kami menerapkan program 'BNI Go Green' untuk ikut serta melestarikan lingkungan hidup dan menciptakan gerakan cinta lingkungan.

Pilar Keberlanjutan BNI





DASAR PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan hanya sekedar pemenuhan regulasi. Namun juga merupakan tanggung jawab BNI kepada para pemangku kepentingan. Untuk itu, kebijakan pelaksanaan CSR mengacu dan selaras dengan Misi BNI serta aspek LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola). Selain mengacu pada Misi Bank, pelaksanaan program CSR BNI juga berpedoman pada regulasi sebagai berikut:

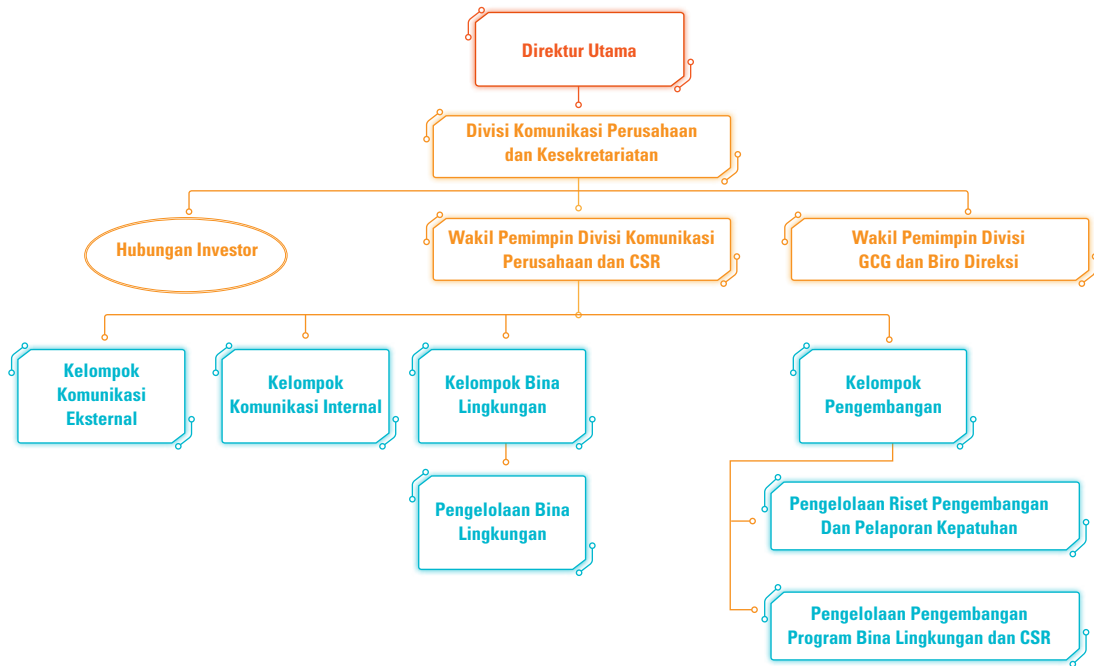
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, mencabut Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-03/MBU/12/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017, tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri BUMN ini berlakuan pada tahun 2017.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (RUPSLB BNI) tanggal 9 November 2015 menetapkan bahwa Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 akan mulai diberlakukan pada tahun 2016.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.



STRUKTUR PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan terkait pada sosial kemasyarakatan khususnya kegiatan Program Bina Lingkungan, hal ini menjadi tugas dari Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, sedangkan pelaksanaan Program Kemitraan sejak tahun 2018 telah menjadi tugas dari Divisi Bisnis Kecil-2.

Bagan Struktur Pengelola Tanggung Jawab Sosial Divisi KMP



Bagan Struktur Pengelola Tanggung Jawab Sosial Divisi Bisnis Usaha Kecil-2



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

KEBIJAKAN

OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 mendorong perbankan nasional bersama emiten dan perusahaan publik untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Keuangan Berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan kepentingan *Profit, People* dan *Planet*. Khusus perbankan, peran yang diharapkan adalah kebijakan pembiayaan proyek yang mempunyai perhatian pada aspek Sosial dan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pedoman Perusahaan Bina Lingkungan (BL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang ditetapkan melalui Instruksi BNI No. Instruksi: IN/576/KMP/001 dan berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2018, yang merupakan pembaharuan Pedoman Perusahaan Sementara No. IN/134/KMP/001 tanggal 23 Maret 2018 pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik telah menjadi komitmen Perseroan dalam menjalani bisnisnya. Hal tersebut diwujudkan dengan menjadikan Lingkungan Hidup sebagai salah satu pilar utama dalam kegiatan CSR Perseroan. Bagi Perseroan, melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan hidup merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Hal ini didasari atas kesadaran Perseroan bahwa Lingkungan Hidup merupakan sumber kehidupan yang utama.

Dalam upaya mewujudkan terciptanya Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik, BNI telah menyusun Pedoman Perusahaan Pola Hidup Ramah Lingkungan yang diperuntukkan bagi seluruh insan BNI. Dasar hukum pembentukan pedoman perusahaan ini adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang antara lain mengatur kewajiban bagi industri untuk melindungi alam dan lingkungan hidup. Selain itu, pedoman ini dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ran GRK).

Pedoman Perusahaan menjadi arah bagi perubahan pola hidup menuju ramah lingkungan, yang meliputi keseluruhan sikap, pemikiran, tindakan di dalam lingkup kerja sehari-hari dengan mengedepankan pola perilaku yang berorientasi untuk memelihara keberlanjutan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial di BNI, baik secara internal maupun eksternal.

Pola hidup ramah lingkungan di BNI secara umum terbagi menjadi 4 (empat) kategori utama, yaitu:

1. Efisiensi sumber daya alam (*resource efficiency*) yakni perilaku yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara hemat (efisien) dan bertanggung jawab.
2. Pencegahan dari pencemaran lingkungan yakni mencakup pola pikir dan perilaku yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup.
3. Perilaku non-karbon, merujuk pada kebiasaan untuk mencegah pemborosan emisi karbon di atmosfer yang bertujuan untuk mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim. Perilaku ini termasuk di antaranya adalah memprioritaskan penggunaan teknologi digital, khususnya yang terkait dengan dukungan terhadap pengurangan limbah kertas dan upaya hemat energi.
4. Perilaku pertemanan ramah lingkungan (*environment-friendly collegial relationship*), merujuk kepada orientasi aktivitas pertemanan di lingkungan kerja yang mendukung upaya keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, dalam hal pemberian kredit, BNI senantiasa berpegang pada ketentuan internal yang berlaku serta selalu berupaya untuk menghindari pemberian kredit kepada proyek atau usaha yang secara nyata dapat membahayakan lingkungan. Untuk memenuhi komitmen tersebut, saat ini BNI telah memiliki Pedoman Perusahaan Perkreditan *Business Banking* Segmen Korporasi Buku I untuk analisa risiko kredit nasabah sebagai bentuk acuan terhadap pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Pedoman tersebut mengatur mengenai persyaratan kredit, yang salah satunya adalah BNI mempersyaratkan adanya dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan/atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).



TARGET KEGIATAN

Target kegiatan CSR terkait dengan lingkungan hidup adalah dilaksanakannya Pedoman Perusahaan Pola Hidup Ramah Lingkungan dan Pedoman Perusahaan Perkreditan *Business Banking* Segmen Korporasi Buku I secara efektif. Perseroan juga telah menargetkan untuk mempersiapkan pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BNI Tahun 2019.

KEGIATAN

KEGIATAN PEMBERIAN KREDIT BERWAWASAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Dalam kegiatan penyaluran kreditnya, selama ini BNI telah menerapkan *program Green Banking*. *Green Banking* merupakan sebuah konsep kegiatan pada sebuah institusi keuangan yang selalu memberikan prioritas pada keberlanjutan lingkungan dalam menjalankan praktik bisnisnya. BNI mendorong debitur korporasi yang bergerak di industri kelapa sawit untuk menerapkan praktik pengelolaan kebun sawit ramah lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan BNI terhadap komitmen Indonesia dalam mengembangkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, serta pencegahan risiko finansial yang juga akan berdampak pada aspek sosial dan lingkungan.

Tahun 2018, BNI melakukan kajian terkait perkebunan kelapa sawit beserta risiko di dalamnya untuk memitigasi risiko pembiayaan perkebunan kelapa sawit. Selain memperhatikan persyaratan lingkungan, BNI juga memperhatikan aspek sosial dari pembiayaan kelapa sawit, meliputi pemetaan area perkebunan untuk menghindari tumpang tindih dengan masyarakat sekitar dan area konservasi. BNI juga memperhatikan *historical* debitur terkait pelanggaran secara legalitas. Apabila ditemukan pelanggaran, maka BNI akan melakukan verifikasi kepada pihak terkait untuk meminimalisasi pemberian kredit pada debitur yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan.

Tabel Portofolio Kredit Pembiayaan Hijau

Portofolio Kredit Maksimum (triliun rupiah)	2018	2017	2016
<i>Green Financing</i> Korporasi	134.164	57.646	21.570
Kredit Korporasi	262.699	188.026	174.073
Total Kredit BNI (tidak termasuk kredit konsumen)	403.737	314.764	286.087
Rasio Persentase	2018	2017	2016
<i>Green Financing</i> Korporasi/Korporasi	51,07%	30,66%	12,39%
<i>Green Financing</i> Korporasi/Total Kredit	33,23%	18,31%	7,54%

Debitur kelapa sawit BNI diwajibkan telah mendaftarkan atau telah tersertifikasi *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) atau Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO). Persyaratan ini diberlakukan bagi seluruh debitur korporasi. Sejak tahun 2017, BNI telah melakukan penghitungan bagi debitur kelapa sawit korporasi swasta.

KEGIATAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

Dalam pengelolaan energi dan air, Perseroan selalu berkomitmen untuk melakukan penghematan dalam penggunaannya. Sebagai upaya penghematan air dan energi pada seluruh unit kerja yang ada di Indonesia, BNI telah menerapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Earth Hour* 2018 di seluruh Unit Kerja luar negeri dan dalam negeri. Program *Earth Hour* merupakan salah satu bentuk kampanye global yang diinisiasi oleh World Wide Fund for Nature (WWF). EH mengajak individu, komunitas, praktisi bisnis dan pemerintahan di seluruh dunia untuk turut peduli terhadap perubahan iklim yang disebabkan aktivitas manusia. Bentuk aksinya adalah mematikan lampu dan peralatan elektronik selama 1 jam. Pelaksanaannya adalah pada setiap hari Sabtu di minggu ke-3 setiap tahun. Aksi pertama kali dilakukan tahun 2007 di Sidney, Australia dan di Indonesia pada Tahun 2009. Sebagaimana misi ke-4 BNI "meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan hidup dan komunitas", BNI berpartisipasi aktif dalam EH sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini guna menekan dampak perubahan iklim melalui kampanye hemat energi. Aktivitas EH BNI adalah turut mematikan lampu-lampu dan peralatan listrik yang tidak diperlukan di seluruh kantor cabang di Indonesia dan LN, tidak berlaku untuk ATM dan sistem operasional perbankan.
2. Penghematan energi melalui penggantian lampu konvensional dengan lampu jenis LED yang memiliki watt lebih kecil namun memiliki *lifetime* yang lebih panjang dan menghasilkan intensitas cahaya yang lebih tinggi;
3. Membatasi perjalanan bisnis dan menggantikannya dengan komunikasi langsung jarak jauh (*teleconference*);
4. Secara berkala, Perseroan juga melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat transportasi kendaraan operasional untuk mengoptimalkan kinerja mesin agar makin efisien dalam memakai energi dan mengeluarkan emisi yang memenuhi standar baku mutu.
5. Pembangunan gedung-gedung BNI baru dengan konsep *green* dengan mematikan lampu diluar jam kerja dan melakukan sosialisasi perilaku hijau atau *Green Attitude*.

KEGIATAN PAPERLESS BANKING MELALUI E-OFFICE

BNI memiliki strategi ramah lingkungan untuk mengurangi kebutuhan penggunaan kertas, yaitu dengan mengadopsi konsep *paperless office*. Konsep ini meminimalisir penggunaan kertas dengan cara mengonversikan penggunaan dokumen cetak dan persuratan ke dalam bentuk digital.

Penerapan konsep *paperless office* diadopsi melalui penggunaan BNI Forum sebagai media komunikasi

operasional bank, ePP sebagai repositori peraturan perusahaan secara digital, serta inovasi *platform e-office* yang mencakup aplikasi persuratan internal BNI dan absensi bagi pegawai. Dengan semakin era digital pula, BNI telah menerapkan aplikasi persuratan, dokumen seperti nota intern, memo, lampiran, serta pesan disposisi yang disebarluaskan secara digital kepada penerima.

Penggunaan aplikasi persuratan telah diterapkan oleh segenap Divisi/Satuan/Unit dan seluruh wilayah di BNI, mulai dari Direksi sampai ke segenap pegawai. Saat ini, jumlah dokumen yang beredar melalui aplikasi persuratan sudah lebih dari 100.000 nomor dokumen dan 600.000 disposisi. Demikian pula dengan pengembangan aplikasi absensi elektronik telah menggantikan dokumen cetak seperti pengajuan cuti, izin, keterlambatan, laporan kehadiran karyawan, dan sebagainya, juga bisa mewujudkan pengurangan pada kebutuhan penggunaan kertas di seluruh operasional BNI.

KEGIATAN GERAKAN AYO MENABUNG DENGAN SAMPAH

BNI telah menerapkan program inklusi keuangan dengan model bisnis yang mensinergikan literasi keuangan dalam tata kelola bisnis kemitraan. Salah satunya adalah sinergi pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan produk BNI Pandai, BNI Simpanan Pelajar, dan layanan teknologi Agen46. Sinergi ini diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kepedulian lingkungan dalam rantai pasokan BNI.

Melalui "Program Ayo Menabung Dengan Sampah" BNI telah menyediakan sistem administrasi bank sampah yang terkoneksi dengan sistem perbankan Agen 46. Sehingga pencatatan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini tercatat dalam sistem perbankan BNI dan dapat dilakukan secara *real time*. Sistem ini menggantikan pencatatan manual yang lebih rentan terhadap kesalahan manusia dan juga meningkatkan akuntabilitas bank sampah dihadapan masing-masing nasabahnya.

Warga yang mengumpulkan sampah dapat membawa sampah ke Bank Sampah yang sudah menjadi Agen46, untuk kemudian ditimbang dan selanjutnya dikonversi menjadi nilai rupiah. Nilai rupiah ini kemudian langsung disetor ke rekening masing-masing nasabah yang menggunakan produk BNI Pandai dan BNI Simpanan Pelajar. Selain menerima transaksi menabung sampah, Agen 46 juga dapat memberikan layanan transaksi lainnya, seperti pembelian *voucher* listrik, telepon, dan pembayaran BPJS bagi para nasabahnya masing-masing. Hingga akhir tahun 2018, program 'Ayo Menabung Dengan Sampah' telah dilaksanakan di seluruh wilayah Jakarta dengan jumlah nasabah lebih dari 250 sekolah, lebih dari 150 bank sampah, total nasabah 159.622 untuk wilayah Jakarta Barat dan Timur.



DAMPAK KUANTITATIF

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN PEMBERIAN KREDIT BERWAWASAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Perseroan turut menciptakan praktik-praktik bisnis yang ramah terhadap lingkungan hidup, melalui program pemberian kredit yang berwawasan sosial dan lingkungan. Hal ini dibuktikan dari meningkatnya jumlah debitur yang telah tersertifikasi RSPO dan/atau ISPO menjadi 41 debitur dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 13 debitur selama tahun 2018.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

Dengan dilaksanakannya program *Earth Hour*, BNI mencatat penghematan konsumsi tenaga listrik tahun 2018 di seluruh kantor, baik di Kantor Pusat BNI maupun di *outlet* cabang dan sentra kredit yang tersebar di seluruh Indonesia, serta lima cabang luar negeri, sebesar 8.001.259 KWh. Penghematan energi itu tetap dapat dilakukan tanpa mengganggu pelayanan terhadap nasabah karena seluruh mesin ATM tetap berfungsi.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN PAPERLESS BANKING MELALUI E-OFFICE

Dengan mewujudkan penghematan biaya cetak dan pengiriman dokumen, serta mempercepat proses *updating* dalam perusahaan, BNI juga telah mengembangkan BNI e-PP. Teknologi ini menyusun sistematis kebijakan, panduan penyusunan dan pemutakhiran SOP yang disajikan secara *online* dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional perbankan. Selama implementasi pada tahun 2018, BNI berhasil mencatat penghematan Rp24,84 untuk segenap pegawai. Di sisi lain, penghematan kertas dalam transaksi nasabah juga ditingkatkan melalui *e-billing*. Hingga 2018, *e-billing* berhasil menghemat biaya kertas sebanyak 322.821 amplop *billing 2 in 1* atau sebesar Rp71.703,12 miliar.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN GERAKAN AYO MENABUNG DENGAN SAMPAH

Program gerakan ayo menabung dengan sampah bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat pada lingkungan sekitar sehingga dapat mengurangi sampah. Selain itu, kegiatan ini juga menambah pengetahuan dan kecakapan masyarakat tentang proses inklusi finansial dan dapat meningkatkan kesejahteraan finansial.

Tabel Program Ayo Menabung dengan Sampah

Tahun	Wilayah	NOA (Number of Account)	Tonase	Omzet BSI	Keterangan
2017	Jakarta Barat	4.622	395 Ton	1,5 miliar	
2018	Jakarta Barat	33.578	1457 Ton	3,5 miliar	
	Jakarta Timur	-	608 Ton	1,3 miliar	Belum diaktifkan secara masif
	Jakarta Utara	111.378	-	-	Baru dimulai sosialisasi di akhir tahun 2018

Selain jumlah akuisi di atas Program Ayo Menabung Dengan Sampah masuk dalam RAKB BNI dan mendapat predikat sebagai "FIRST MOVER" dan akhir 2018 juga mendapatkan dua penghargaan oleh OJK untuk kategori:

1. Inovasi terbaik
2. Jumlah pembukaan rekening

Melihat potensi yang begitu besar, Ke depannya diharapkan program ini dapat membantu Kantor wilayah dan cabang untuk melakukan akuisisi rekening dan Agen 46 secara masif di semua wilayah yang ada di Indonesia.

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN

SERTIFIKASI *GREEN BUILDING*

Sebagai wujud nyata BNI dalam memfokuskan pada *environmental sustainability*, saat ini BNI telah memiliki bentuk bangunan hijau atau biasa disebut dengan *green building*, yang didesain pada ramah lingkungan dan hemat energi yaitu Plaza BNI BSD yang telah mendapatkan sertifikasi *platinum* dari Green Building Council Indonesia (GBCI) dan Tower BNI Pejompongan, yang saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi *gold*.

BNI juga telah mengikutsertakan beberapa pegawai dalam sertifikasi ahli bangunan hijau yang diselenggarakan oleh *Green Building Council Indonesia* (GBCI), baik untuk *Greenship Associate* (GA) maupun *Greenship Profesional* (GP). Hal ini sebagai upaya BNI dalam mewujudkan bangunan hijau yang bersertifikasi. Saat ini, tercatat 14 (empat belas) pegawai BNI dari *Procurement and Fixed Asset* (PFA) dan *Pengelolaan Jaringan* (JAL) telah mendapatkan sertifikasi *Greenship*.

MEKANISME PENGADUAN DI BIDANG LINGKUNGAN

Dalam upaya mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan hidup di wilayah operasional, BNI juga melakukan mekanisme pengaduan melalui Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan yang mengelola aduan *Corporate* termasuk jika terdapat aduan terkait lingkungan oleh debitur BNI. Hingga tahun 2018, terdapat satu (1) aduan yang telah ditindaklanjuti.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN **KESELAMATAN KERJA**

Sumber daya manusia merupakan aset bagi BNI dalam menjalankan seluruh kegiatan serta memberikan layanan kepada nasabah dan seluruh mitra BNI. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan telah menjadi perusahaan publik, BNI terus berupaya untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, BNI juga memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme karyawan, sistem imbal jasa yang sepadan hingga kesehatan serta keselamatan kerja bagi seluruh pegawai BNI.

KEBIJAKAN

BNI memberikan kesempatan, sarana, dan prasarana untuk pegawai dalam mengaktualisasikan potensi diri. Sementara itu, pegawai BNI juga berperan aktif dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan oleh BNI melalui peningkatan *engagement* pada sejumlah aspek berdasarkan *Human Capital Architecture* (*HC Architecture*).

TARGET KEGIATAN

Sebagai salah satu aset BNI, aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja setiap pegawai selalu menjadi fokus perhatian Bank. BNI selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk mendukung terciptanya kinerja BNI yang optimal. Untuk itu, BNI bertekad menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bebas cedera dan melakukan kegiatan operasional sesuai kaidah yang berlaku. Bank juga memfasilitasi karyawan dengan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan motivasi dalam menjaga kesehatan masing-masing, sehingga nantinya tiap karyawan mampu meningkatkan produktivitasnya.

KETENAGAKERJAAN

KEGIATAN KETENAGAKERJAAN

LINGKUNGAN BEKERJA YANG RAMAH BAGI WANITA

BNI senantiasa menjamin bahwa seluruh pegawai akan diperlakukan dengan setara tanpa mempertimbangkan *gender*, hal ini menjadi prioritas BNI dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia.

Dengan komposisi pegawai yang mayoritasnya merupakan perempuan, yakni sebesar 52% dari total keseluruhan, BNI meluncurkan program yang secara khusus ditujukan untuk pegawai perempuan. Program tersebut antara lain adalah *Women's Day* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kualitas kesehatan perempuan dengan memberikan seminar, pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksin HPV. Selain itu, bagi para ibu juga disediakan *daycare* untuk menitipkan anak di waktu kerja dan ruang laktasi bagi ibu menyusui serta disediakan juga *Nursery Room* untuk menyediakan ruang bagi anak bayi atau balita yang berada di kantor pusat BNI.

KESEMPATAN KERJA BAGI DISABILITAS

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan kerja bagi kaum disabilitas serta untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kaum disabilitas, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan mengenai disabilitas, di antaranya UU No. 4 tahun 1997 mengenai kewajiban mempekerjakan kaum disabilitas dan PP No. 43 tahun 1998. Untuk mematuhi aturan tersebut, BNI turut mengambil peran dengan membuka kesempatan kerja bagi kaum disabilitas. Hingga tahun 2018, telah terdapat 23 pegawai dengan disabilitas. Di tahun mendatang, Bank berencana meningkatkan peluang bagi kaum disabilitas untuk bergabung dengan BNI sejalan dengan persiapan sarana-prasarana pendukung kerja bagi pegawai berkebutuhan khusus.



KESETARAAN KERJA

Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di BNI menjamin bahwa seluruh pegawai akan diperlakukan dengan setara tanpa mempertimbangkan *gender*. Pengelolaan sumber daya manusia di BNI telah berbasis kompetensi, sehingga BNI menjamin bahwa seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang setara dalam pengembangan Karier. Bank melalui BNI *Corporate University* memberikan setiap pegawainya kesempatan untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan yang aplikatif, serta memberikan kesempatan untuk tumbuh melalui kinerja yang baik dan memberikan kontribusi secara signifikan untuk pencapaian kinerja bisnis Bank. Keseluruhan program pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BNI *Corporate University* ditentukan oleh kebutuhan Bank dan pegawai dengan memperhatikan kesetaraan *gender* dan persamaan kesempatan kepada seluruh level organisasi.

KEBEBASAN BERSERIKAT

Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dengan Serikat Pekerja sebagai perwakilan dari pegawai, selalu menjadi prioritas utama Bank. Serikat Pegawai selalu dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia melalui kegiatan *co-creation*. Selain itu, ada pula kegiatan forum kemitraan sebagai sarana bagi pegawai untuk menyampaikan aspirasi kepada BNI. Selama tahun 2018, telah dilakukan 33 kali pertemuan forum kemitraan dan hingga akhir tahun.

REMUNERASI

Kebijakan sistem remunerasi yang diterapkan BNI berpedoman pada konsep *For More Benefit We Go*. BNI meluncurkan program *flexible benefit* sebagai salah satu program pemberian *benefit* yang sejalan dengan konsep *For More Benefit We Go*. BNI juga senantiasa memastikan bahwa sistem remunerasi yang dijalankan, telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, Bank juga senantiasa berupaya memberikan remunerasi yang kompetitif sesuai dengan industri. Rasio gaji tertinggi dan terendah selama 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio
Gaji pegawai tertinggi dan terendah	40,9:1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,2:1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,1:1
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,4:1

PROGRAM PENSIUN

Bentuk program pensiun yang diberikan oleh BNI untuk pegawai salah satunya adalah Program Dana Kesehatan Masa Pensiun (DKMP). Program DKMP ini merupakan kewajiban moral Bank untuk memastikan bahwa pegawai tetap mendapatkan fasilitas kesehatan setelah pensiun dengan cara mempersiapkannya sejak saat ini atau saat masih aktif sebagai pegawai.

Selain itu, BNI juga menyelenggarakan pelatihan yang ditujukan secara khusus kepada pegawai yang akan memasuki masa pra purna bakti. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan pegawai yang akan memasuki usia pensiun dengan memberikan materi mengenai kesehatan, finansial, serta psikologis.

DAMPAK KEGIATAN KETENAGAKERJAAN

Dampak dari pelaksanaan kegiatan Ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan sepanjang tahun 2018, dapat dilihat dari tingkat turnover serta tingkat employee engagement pegawai sebagai berikut.

TINGKAT TURNOVER KARYAWAN

Tingkat *turnover* pada tahun 2018 adalah sebesar 4,76% yang dinilai merupakan *healthy turnover* dan tetap terjaga di bawah rata-rata *turnover* industri perbankan nasional.

EMPLOYEE ENGAGEMENT

Bagi BNI, karyawan menjadi prioritas penting dalam meningkatkan kinerja bisnis Bank. Dengan prioritas tersebut, Bank juga menyelenggarakan survei kepuasan pegawai untuk mendapatkan umpan balik dan mengetahui kondisi lingkungan kerja yang mereka rasakan. Berdasarkan *employee engagement survey* yang telah dilakukan pada tahun 2018, tingkat *engagement* pegawai sebesar 88% atau naik 5,17% dibandingkan hasil tahun 2017 sebesar 82,83%. Berdasarkan survei *engagement* yang dilakukan oleh AON Hewitt, hasil *engagement* pegawai BNI berada di atas rata-rata Global yang sebesar 83% dan rata-rata Indonesia yang sebesar 76%.



KESEHATAN KARYAWAN

KEGIATAN PEMBERIAN FASILITAS KESEHATAN BAGI KARYAWAN

Untuk memastikan agar kesehatan karyawan tetap prima, Bank sangat memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan karyawannya. Fasilitas kesehatan yang diberikan kepada karyawan dan anggota keluarganya cukup komprehensif yang antara lain mencakup BPJS, BPJS Ketenagakerjaan serta asuransi swasta lainnya. Kebijakan kesehatan tersebut dimaksudkan untuk membawa dampak positif bagi Karyawan selaku individu dan keluarganya, yang pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada perbaikan produktivitas Bank.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN PEMBERIAN FASILITAS KESEHATAN BAGI KARYAWAN

Segala bentuk fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Bank kepada karyawannya telah berdampak pada tingkat produktivitas pegawai atau *Earning per Employee* (EPE). Tingkat produktivitas yang mampu diraih pada tahun 2018 adalah sebesar Rp529 juta/pegawai atau meningkat sebesar 13% dibandingkan tahun 2017. Sejalan dengan pencapaian target tersebut, maka alokasi sumber daya manusia yang telah direalisasikan dinilai mampu menjaga tingkat produktivitas BNI untuk tetap kompetitif dalam mencapai target secara optimal.

KESELAMATAN KARYAWAN

KEGIATAN KESELAMATAN KERJA BAGI KARYAWAN

BNI juga senantiasa memperhatikan lingkungan bekerja yang aman bagi seluruh karyawan. Hal tersebut diwujudkan melalui konstruksi gedung tahan gempa dan sistem alarm dan alat pemadam kebakaran terstandar. Fasilitas tersebut telah dilakukan melalui audit keselamatan gedung.

BNI juga telah melengkapi seluruh kantor operasionalnya dengan berbagai perangkat keselamatan kerja seperti Apar, *Smoke Detector*, *Diesel Pump*, dan Tangga Darurat. Hal ini untuk menjamin efektivitas penerapan keselamatan kerja.

Sementara itu, Bank juga telah memiliki rencana situasi/evakuasi kebakaran, peletakan prosedur operasional keselamatan kebakaran berada di ruang karyawan dan setiap lantai gedung sehingga seluruh karyawan teredukasi dengan baik. Terkait dengan pembelajaran keselamatan tenaga kerja, Bank telah mengikut sertakan karyawan dalam sertifikasi pelatihan "Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan

Kesehatan Kerja Umum (AK3U)" yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bekerja sama dengan PT Surveyor Indonesia (Persero) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sebagai upaya untuk menciptakan tempat bekerja yang layak, secara bertahap BNI telah berusaha mengubah dan menyesuaikan lingkungan kerja, agar menjadi lebih ergonomis dan nyaman bagi pegawai. Perubahan ini, antara lain diterapkan dengan penyediaan fasilitas *daycare* di tempat kerja untuk menitipkan anaknya selama jam kerja. Bagi ibu yang sedang menyusui, Bank juga menyediakan ruang laktasi dan tempat penyimpanan ASI. Untuk menjaga kebugaran, telah disediakan juga *Gym Center* dengan peralatan lengkap dan kelas olahraga yang variatif. Dalam mendorong kenyamanan pada ruang kerja pegawai, BNI menerapkan konsep penataan yang mulai mengarah pada konsep *open working space*. Konsep ini menekankan pada ruang kerja yang terbuka, yang memudahkan kolaborasi antar pegawai. Fasilitas ini terdapat di Plaza BNI, Graha BNI, dan Menara BNI.

DAMPAK KEGIATAN KESELAMATAN KERJA BAGI KARYAWAN

Pada tahun 2018, Bank tidak mencatat adanya kecelakaan kerja (*zero accident*) dalam kegiatan operasional BNI di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang/*Regional*. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya penerapan keselamatan kerja yang telah dilakukan Bank telah berjalan dengan efektif.

MEKANISME PENGADUAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Dalam upaya mewujudkan kepedulian terhadap ketenagakerjaan Bank, BNI juga melakukan mekanisme pengaduan terhadap Keluh Kesah pegawai melalui divisi *Human Capital* (HCT). Mekanisme penanganan keluh kesah pegawai adalah sebagai berikut:

1. Pegawai menyampaikan keluh kesah kepada Atasan langsung untuk selanjutnya dilakukan penyelesaian secara musyawarah.
2. Dalam hal ini tidak tercapai penyelesaian, permasalahan dapat diteruskan ke Pimpinan yang lebih tinggi.
3. Jika belum terselesaikan, pegawai dapat menyampaikan permasalahan kepada Pengurus Serikat Pekerja yang selanjutnya secara bersama-sama membicarakannya dengan Pimpinan secara berjenjang.
4. Pegawai, Pimpinan dan Serikat Pekerja mengupayakan penyelesaian agar tidak timbul perselisihan industrial.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

KEBIJAKAN

Penerapan CSR terkait dengan tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan bagi perusahaan BUMN dilaksanakan melalui mekanisme Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Ketentuan untuk melaksanakan PKBL diatur pada Peraturan Menteri Negara BUMN antara lain Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-08/MBU/2013, tanggal 10 September 2013 tentang Program Kemitraan badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-03/MBU/12/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017, tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015.

TARGET KEGIATAN

Sebagai salah satu perusahaan BUMN yang memiliki kewajiban untuk melakukan program berbentuk kemitraan dengan masyarakat, serta bina lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, Bank senantiasa berupaya untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran dana hibah maupun pinjaman lunak.

Program PKBL dilakukan secara terencana, tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan sehingga BNI turut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Pada tahun 2018 aktivitas BNI dibagi menjadi 2 (dua) program besar yaitu:

1. Inisiasi BNI, merupakan aktivitas-aktivitas yang berdasarkan pada inisiasi tematik BNI yang dihubungkan dengan SDGs dan Nawacita. Inisiasi BNI juga berupa aktivitas yang berdasar pada proposal dari *stakeholder*.
2. Dukungan Nasional, merupakan aktivitas yang berdasar pada inisiasi pemerintah sebagai *stakeholder* utama.

Kedua program besar tersebut dikenal sebagai kegiatan BNI Berbagi dan BNI *GoGreen* dengan target penyaluran tahun 2018 sebesar Rp125 miliar.



KEGIATAN

KEGIATAN BANTUAN PASCA BENCANA

HUNTARA

HUNTARA merupakan hunian sementara yang digunakan untuk transit pengungsi dari tenda sampai dengan hunian tetap dan relokasi permukiman selesai. BNI menjadi koordinator pembangunan HUNTARA sebanyak 700 unit untuk para korban gempa bumi di Lombok dan 400 unit untuk korban gempa di Sigi, Sulawesi Tengah.

RUKANTARA

RUKANTARA merupakan ruang kelas belajar sementara bagi siswa SD dan SMP korban bencana gempa bumi Palu. BNI membangun 18 (delapan belas) unit RUKANTARA yaitu 4 (empat) unit di Kabupaten Sigi, 10 unit di Kota Palu dan 4 (empat) unit di Kabupaten Donggala.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PERHUTANAN SOSIAL

Perhutanan Sosial bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat disekitar hutan dengan tetap melestarikan fungsi hutan. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan antara lain berupa, kepastian mengenai lokasi lahan garapan dan jangka waktu hak garap, petani dapat memperoleh akses ke sumber pendanaan KUR dari perbankan, mendapatkan kepastian pasar atau serapan hasil produksi, mendapatkan pembinaan intensif dari Departemen terkait serta perbankan, berpeluang mendapatkan subsidi saprotan, mendapatkan area pengelolaan lahan yang lebih ekonomis (2 hektar per orang) sehingga masyarakat penggarap dapat memperoleh pendapatan tambahan yang lebih baik dan pasti.

Sebagai penerima SK, para petani tersebut menjadi jelas statusnya, yaitu menjadi petani yang layak mendapatkan akses permodalan yang murah dari perbankan. Untuk itu, BNI memberikan perhatian khusus untuk menyalurkan KUR.

Selain membantu permodalan melalui program KUR dan Kartu Tani, dalam program perhutanan sosial ini BNI juga memberikan bantuan mesin traktor, alat pemipil jagung, kulivator, pompa air, sumur bor, perbaikan saluran air dan pengerasan jalan dengan total sebesar Rp1,6 miliar kepada masyarakat penggarap hutan. BNI juga melakukan penguatan kelembagaan masyarakat dengan membentuk BUMDES berikut unit usahanya yang mendukung keberhasilan budidaya program perhutanan sosial.

Terhitung sejak April 2017 sampai akhir tahun 2018, BNI telah melakukan program tersebut di Probolinggo, Madiun, Tuban, Tulungagung, Malang, Bojonegoro, Jember, Bandung dan Palembang.

Selain dari Perhutanan Sosial di Pulau Sumatera dan Provinsi Jawa Barat, BNI sudah berkiprah dalam Perhutanan Sosial di Jawa Timur, di mana sampai dengan 31 Desember 2018, penyaluran KUR BNI di Perhutanan Sosial sebesar Rp18,8 miliar yang diterima oleh 3.170 penerima SK Perhutanan Sosial.

Dari hasil penyaluran KUR di Jawa Timur, beberapa lokasi binaan telah menunjukkan keberhasilan dari program ini. Salah satunya LMDH Wono Lestari di Lumajang Jawa Timur, penerima SK di tempat tersebut berhasil mengembangkan potensi bisnis di daerahnya seperti susu sapi, pisang, madu, getah damar dan akan dikembangkan untuk pengolahan susu menjadi produk bernilai tinggi.

Tabel bantuan Perhutanan Sosial Tahun 2018

Lokasi	Biaya (Jutaan Rupiah)	Bentuk Bantuan
Malang	46.000.000	Mesin perajang porang
Bojonegoro	88.450.000	Traktor, mesin pemipil jagung
Tuban	334.895.000	Mesin pompa air, traktor, perpustakaan
Bandung	132.000.000	Mesin pemipil kopi,
Indramayu	125.749.550	Mesin pompa air, jaring rajut dan arat
Cianjur	30.900.000	Mesin Chainsaw, mesin pemotong rumput, cangkul
Palembang	125.000.000	Hand Tractor
Lumajang	496.000.000	Kandang sapi komunal, PKT perbaikan jalan
Total	1.378.994.550	

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Sebagai bentuk wujud nyata BNI dalam melayani tiada henti ke wilayah pelosok nusantara, BNI melakukan pendampingan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah pedesaan. Bentuk pendampingan yang dilakukan adalah dengan memberikan stimulus bisnis-bisnis rintisan yang dapat dikerja samakan antara lain BUMDes sebagai agen referal dan *collection* KUR dan BUMDes dapat melakukan aktivitas layanan produk perbankan melalui Agen46 untuk masyarakat desa.



Selain itu BNI juga telah melakukan pelatihan Wajib Pajak untuk 125 BUMDes di Bali pada tanggal 22-23 Januari 2018, dan pelatihan lainnya antara lain:

1. Pelatihan wawasan pengembangan bisnis pertanian dan turunan pengolahannya di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Garut.
2. Pelatihan packaging produk olahan BUMDes untuk dapat diekspor di 250 BUMDes di wilayah surabaya.
3. Pelatihan pemanfaatan sampah menjadi berkah kepada 350 BUMDes di Madiun, Malang dan sekitarnya.
4. Pembuatan Institute BUMDes yang digagas bersama dengan 300 BUMDes dari Sumatera Barat di BNI *Corporate University*.

Hingga saat ini BNI telah mendampingi 8.998 BUMDes di mana yang telah memiliki Bisnis rintisan dengan BNI sebanyak 4.278 BUMDes. Di tahun 2019, akan ditargetkan untuk terus meningkatkan pendampingan dan pelatihan kepada BUMDes hingga mencapai 15.000 BUMDes.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Selama tahun 2018, BNI membantu pembangunan infrastruktur masyarakat. Bantuan ini bersifat *in-kind* atau pro-bono. Dengan adanya infrastruktur ini, maka diharapkan akses untuk berkegiatan ekonomi akan semakin terbuka, demikian pula akan berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat akan semakin membaik, sehingga dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga dapat memberikan dampak negatif apabila masyarakat tidak dapat memanfaatkan dengan produktif dan tidak dapat menjaga keberadaannya. Demikian pula, apabila ada kelompok masyarakat yang belum menerima bantuan, maka sangatlah mungkin timbul kecemburuan sosial. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, maka BNI mulai melakukan pemetaan sosial lebih dahulu, sebelum memberikan bantuan ke masyarakat.

Tabel Bantuan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018

Uraian	Sifat Bantuan	Wilayah	Nominal (ribuan rupiah)
Bantuan Jembatan Desa Sidorejo di Klaten	pro-bono	Jawa Tengah	163.844
Bantuan Jembatan Mandrajaya di Sukabumi	pro-bono	Jawa Barat	834.141
Bantuan Jembatan SDN Inauga di Timika	pro-bono	Papua	10.094
Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Agung di Lubuklinggau	pro-bono	Sumatera Selatan	319.068
Pembangunan Jembatan Desa Lam Kling di Aceh Besar	pro-bono	Nanggroe Aceh D.	793.427
Pembangunan Jembatan SD Al Hidayah di Jember	pro-bono	Jawa Timur	100.000
Pembangunan Jembatan Desa Srikandang di Jepara	pro-bono	Jawa Tengah	286.366
Pembangunan Jembatan Di Dusun Kunir, Banyuwangi	pro-bono	Jawa Timur	100.000
Pembangunan Jembatan Desa Kebon Kopi, lebak	pro-bono	Banten	162.624
Pembangunan Jembatan Desa Genaharjo di Tuban	pro-bono	Jawa Timur	417.664
Pembangunan Jembatan Uepai Kabupaten Konawe	pro-bono	Sulawesi Tenggara	398.400
Pembangunan Jembatan di Gombengsari	pro-bono	Jawa Timur	84.125
TOTAL			3.669.752



KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)

PROGRAM KEMITRAAN

Sejak tahun 2017, Program Kemitraan di BNI dilaksanakan oleh Divisi Bisnis Kecil. Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk pinjaman lunak pada mitra binaan dengan hanya membebankan jasa administrasi sebesar 3% per tahun dari limit pinjaman, yang disalurkan dalam bentuk:

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;
3. Beban Pembinaan:
 - a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - b. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - c. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

Mitra binaan BNI adalah pengusaha mikro yang belum mengenal perbankan secara teknis karena keterbatasan akses untuk menerima pinjaman dari perbankan. Pelaku usaha mikro tersebut bergerak di berbagai sektor ekonomi formal dan nonformal, namun mempunyai peran strategis dalam ekonomi sektor riil dan telah terbukti bahwa segmen mikro relatif lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Mitra binaan BNI diharapkan dapat meningkatkan aktivitas usaha, modal usaha, jiwa kewirausahaan, akses ke perbankan, administrasi usaha, kualitas produk dan jangkauan pemasaran.

Penyaluran Program Kemitraan BNI pada tahun 2018 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Realisasi Penyaluran (Juta Rupiah)	Jumlah Mitra Binaan
Industri Pengolahan	1.520.000.000,00	49
Jasa-jasa Dunia Usaha	492.000.000,00	13
Jasa-jasa Sosial Masyarakat	936.000.000,00	22
Listrik, Gas, dan Air	30.000.000,00	1
Perdagangan, Restoran, dan Hotel	8.110.000.000,00	256
Pertambangan	1.950.000.000,00	27
Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian	91.452.059.347,00	1.271
Grand Total	104.490.059.347,00	1.639

Berdasarkan Sebaran Kantor Wilayah BNI

No	Wilayah	Target (juta rupiah)	Penyaluran (juta rupiah)	Proporsi Terhadap Target %
1	Wilayah 1. Medan	7.500	2.142	28,56%
2	Wilayah 2. Padang	7.500	50	0,67%
3	Wilayah 3. Palembang	10.500	6.158	58,65%
4	Wilayah 4. Bandung	7.500	2.610	34,80%
5	Wilayah 5. Semarang	7.500	1.985	26,47%
6	Wilayah 6. Surabaya	12.000	10.848	90,40%
7	Wilayah 7. Makassar	7.500	46	0,61%
8	Wilayah 8. Denpasar	7.500	665	8,87%
9	Wilayah 9. Banjarmasin	7.500	205	2,73%
10	Wilayah 10. Jakarta Senayan	1.000	675	67,50%
11	Wilayah 11. Manado	2.500	25	1,00%
12	Wilayah 12. Jakarta Kota	1.000	1.280	128,00%
14	Wilayah 14. Jakarta BSD	1.000	1.075	107,50%
15	Wilayah 15. Jakarta Kemayoran	1.000	1.185	118,50%
16	Wilayah 16. Papua	1.000	-	0,00%
17	Wilayah 17. Yogyakarta	5.000	305	6,10%
18	Wilayah.18. Malang	12.500	75.236	601,88%
Grand Total		100.000	104.490	104,49%



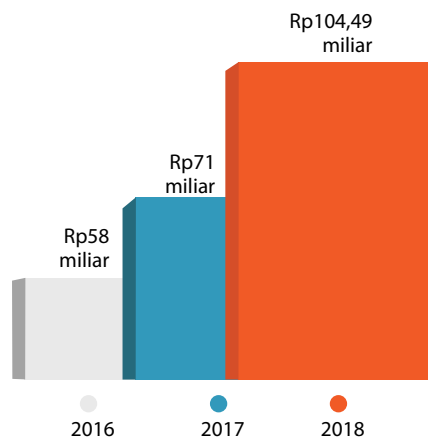
Program Kemitraan lainnya adalah sebagai *agent development* yang membantu Pemerintah melalui agen bantuan sosial (Bansos). Program ini meliputi: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kinerja Agen Bansos

Keterangan	PKH	BPNT
Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (orang)	4.226.542	6.385.666
Jumlah Kota/Kabupaten	469	107
Jumlah Cabang Penyalur	200	108

Kinerja Agen Bansos memberikan dampak terhadap peningkatan literasi keuangan.

Realisasi Dana Program Kemitraan per Desember 2018



PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Kegiatan Bina Lingkungan di BNI dilaksanakan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan yang secara langsung disupervisi oleh Direktur Utama. Adapun kegiatan Bina Lingkungan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut.

BANTUAN PROGRAM BENCANA ALAM

Bidang Bencana Alam direalisasikan melalui kegiatan antara lain bantuan tanggap darurat berupa paket sembako, tenda pengungsi, dapur umum, pemeriksaan kesehatan, MCK dan kegiatan trauma healing di sejumlah wilayah di Indonesia. Pembangunan Hunian Sementara (HUNTARA) dan Ruang Kelas Sementara (RUKANTARA) bagi korban bencana alam di Sulawesi Tengah dan Banten.

BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN

Bidang Pendidikan dan Pelatihan direalisasikan melalui kegiatan antara lain bantuan komputer sekolah Yayasan Ardhya Garini di Jakarta, pembangunan Pesantren Modern Internasional Dea Malela di Sumbawa, Program Capacity Buliding TKI di Hongkong, Korea Selatan, Singapura dan Malaysia, Program Pelatihan UMKM di Rumah Kreatif BUMN di seluruh Indonesia, pembangunan atau perbaikan sarana pendidikan antara lain gedung sekolah, perpustakaan atau taman bacaan.

BIDANG PENINGKATAN KESEHATAN

Bidang Peningkatan Kesehatan direalisasikan melalui kegiatan antara lain bantuan mobil ambulance untuk rumah sakit di Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bali. Operasi mata katarak di Morotai, Cikarang dan Bali. Program pengobatan gratis di Lombok, Palu dan DKI Jakarta.

BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA UMUM

Bidang Pengembangan Sarana dan Sarana Umum direalisasikan melalui kegiatan antara lain bantuan sarana pertanian di Lampung, Lumajang, Indramayu, dan Bali. Bantuan sarana air bersih dan MCK/toilet di Tangerang, Surabaya, Muaro Jambi, Serang, Cibinong, Pacitan dan Buol. Pembangunan jembatan di Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara. Pembangunan pasar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Betonisasi jalan di wilayah Ogan Baru, Musi Rawas, Banyuwangi, Palembang, Jepara, Merauke dan lainnya.

BIDANG SARANA IBADAH

Bidang Sarana Ibadah direalisasikan melalui kegiatan pembangunan/perbaikan sarana ibadah seluruh umat beragama di sejumlah wilayah di Indonesia, bantuan Al-Quran untuk Pondok Pesantren di Jakarta, Tasikmalaya dan Garut.

BIDANG PELESTARIAN ALAM

Bidang Pelestarian Lingkungan direalisasikan melalui kegiatan antara lain bantuan tempat sampah dan motor pengangkut sampah di Bandung, Kuningan, Cilacap, Jepara, dan Banyuwangi. Rehabilitasi Hutan Organik di Jawa Barat, Program Pelestarian Alam di Citarum, Pemeliharaan Taman Pintar BNI di Jakarta dan Mojokerto. Program Penghijauan di Semarang, Bandung, Purwakarta, Magelang dan Jakarta.



BIDANG PENGENTASAN KEMISKINAN

Bidang Pengentasan Kemiskinan direalisasikan melalui kegiatan antara lain Program Bedah Rumah untuk para Veteran, Mantan Atlet dan Pensiunan. Santunan anak yatim, pasar murah, dan bantuan paket sembako di sejumlah daerah di Indonesia. Bantuan sarana pertanian dan perikanan di Indramayu, Banyuwangi, Bojonegoro, Tuban, Aceh Tengah dan lainnya. Program Pemberdayaan Masyarakat di Aceh, Bengkulu dan Indramayu.

DAMPAK KEGIATAN

DAMPAK KEGIATAN BANTUAN PASCA BENCANA

Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Ruang Kelas Sementara (Rukantara) yang dilakukan oleh BNI di daerah bencana, memberikan dampak positif bagi warga yang menjadi korban gempa bumi Lombok dan Palu. Keberadaan Huntara tersebut, dapat digunakan sebagai tempat transit pengungsi dari tenda sampai hunian tetap dan relokasi permukiman permanen selesai. Sedangkan, Rukantara digunakan oleh siswa di wilayah terjadi gempa agar tetap dapat memperoleh aktivitas belajar mengajar meskipun dalam kondisi darurat.

DAMPAK KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan BNI sepanjang tahun 2017 telah berdampak pada meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat. Sedangkan melalui pembangunan infrastruktur berdampak pada terbukanya akses untuk berkegiatan ekonomi, demikian pula tingkat kesehatan yang membaik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, untuk kegiatan Perhutanan Sosial memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat di area sekitar hutan, namun dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.

DAMPAK KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Bank memberikan dampak pada beberapa aspek kehidupan masyarakat mitra binaan antara lain meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, pengentasan kemiskinan dan perbaikan lingkungan hidup di daerah binaan.

BIAYA YANG DIKELUARKAN

Hingga akhir tahun 2018, penyaluran kredit di Program Kemitraan mencapai Rp104,49 miliar, dengan kategori 'baik', dan tingkat kolektabilitas atau *non-performing loan* (NPL) sebesar 0,8 %. Di tahun 2018, target penyaluran mencapai Rp100 miliar yang akan dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.

Realisasi biaya kegiatan bina lingkungan yang dilaksanakan BNI sepanjang tahun 2018 adalah sebesar Rp115.438.383.424. Adapun rincian penyaluran bina lingkungan berdasarkan ruang lingkungannya adalah sebagai berikut.

Tabel Rincian Program dan Kegiatan Bina Lingkungan Tahun 2018

(dalam miliar Rupiah)

Bidang Bantuan	Biaya Pelaksanaan
Bantuan Korban Bencana Alam	4,61
Bantuan Pendidikan dan Pelatihan	41,38
Bantuan Peningkatan Kesehatan	10,37
Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum	18,78
Bantuan Sarana Ibadah	24,55
Bantuan Pelestarian Alam	2,34
Bantuan Pengentasan Kemiskinan	13,41

MEKANISME PENGADUAN DI BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Dalam upaya memenuhi kewajiban untuk melakukan program kemitraan dengan masyarakat, serta bina lingkungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BNI juga melakukan mekanisme pengaduan melalui Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan yang mengelola aduan *Corporate*.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB **KEPADA KONSUMEN**



KEBIJAKAN

Sesuai Surat Edaran OJK (SE OJK) No. 2/SEOJK.07/2014 dan diperbaharui melalui Surat Edaran OJK (SE OJK) No. 17/SEOJK.07/2018, BNI akan memberikan informasi penyelesaian pengaduan nasabah melalui sarana telepon, *email*, surat ataupun pesan singkat (*short message service/SMS*). Apabila nasabah merasa solusi penyelesaian yang diberikan oleh BNI tidak memenuhi harapan, maka nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

TARGET KEGIATAN

Bank menargetkan untuk selalu berupaya memenuhi harapan konsumen, salah satunya melalui penanganan keluhan ataupun pengaduan yang ditargetkan dapat terselesaikan sesuai dengan *Standard Level Agreement*. Solusi penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan dilakukan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja*) dan pengaduan tertulis dalam waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila diperlukan dokumen pendukung atas pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan, maka BNI akan meminta nasabah menyampaikan pengaduan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu, pemenuhan kelengkapan dokumen dan penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya sesuai POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan diperbaharui melalui POJK Nomor 18/POJK.07/2018*) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah. Terkait dengan kepuasan pelanggan, Bank selalu berupaya untuk memastikan terjaminnya keamanan atas setiap produk dan fitur yang ditawarkan/diluncurkan kepada konsumen.

*) Efektif berlaku per bulan Maret 2019

KEGIATAN

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KONSUMEN

ATM DISABILITAS

BNI memiliki satu mesin ATM untuk penyandang disabilitas yang terletak di Fatmawati, khususnya pengguna kursi roda. ATM khusus penyandang disabilitas ini memiliki spesifikasi yaitu jalan akses menuju galeri ATM dapat dilalui kursi roda, pintu masuk ATM otomatis, lantai di bawah mesin ATM menggunakan lantai besi sehingga tidak licin saat dilalui kursi roda, serta mesin ATM yang lebih rendah dibandingkan ATM pada umumnya. Spesifikasi tersebut digunakan untuk memudahkan pengguna kursi roda.

Selain itu, BNI juga memiliki 19 mesin ATM Disabilitas Netra yang terdapat di wilayah Jabodetabek. Mesin ATM Disabilitas Netra yang ditempatkan mulai dari rumah sakit, Kantor Cabang, dan Gedung Perkantoran. Fitur yang dikembangkan adalah *'inquiry'* dan *'penarikan'* dengan menu *'fast cash'*. Penyediaan ATM Khusus ini merupakan salah satu bagian dari upaya BNI untuk mendukung keberadaan para penyandang disabilitas.

KEAMANAN PRODUK

Secara persentase, 100% produk dan fitur yang diluncurkan oleh BNI sudah dievaluasi keamanannya setelah melewati *Post Implementation Review* (PIR) yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko Bank dan Divisi Teknologi. Jika hasil PIR sudah memenuhi sisi operasional, teknologi dan risiko, maka deskripsi produk disampaikan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan sebelum diluncurkan ke masyarakat umum.



DAMPAK KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KONSUMEN

Pelaksanaan kegiatan terkait tanggung jawab kepada konsumen, khususnya penanganan dan penyelesaian keluhan pelanggan yang dijalankan telah berjalan efektif, hal ini ditunjukkan melalui angka survei kepuasan nasabah yang dilakukan secara rutin oleh BNI. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2017, BNI telah melaksanakan lima kali survei kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Survey/CSS*), yaitu pada 2011, 2012, 2013. Pada tahun 2018 BNI tidak melaksanakan CSS karena mulai tahun 2015 survei dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Pada tahun 2017 yang lalu, angka CSS sebesar 4,05 yang berarti sangat baik.

PROSEDUR PELAPORAN DAN PENYELESAIAN KELUHAN NASABAH

BNI *Contact Center* sebagai salah satu garda terdepan BNI dalam memberikan layanan bagi para nasabah BNI, dengan senantiasa terus berupaya dalam memberikan layanan terbaik, termasuk penyelesaian atas setiap pengaduan nasabah baik untuk layanan perbankan maupun kartu kredit. Nasabah BNI diberikan kemudahan mengakses layanan pengaduan dengan berbagai pilihan media baik melalui lisan maupun tertulis.

Gambar Media-Media Penyampaian Pengaduan



BNI *Contact Center* didukung oleh aplikasi penanganan pengaduan *Online Request Management* yang terintegrasi sehingga aktivitas penerimaan dan proses penyelesaian pengaduan nasabah dapat dilakukan pada aplikasi tersebut serta mempermudah pemantauan status penyelesaian pengaduan nasabah.

Solusi penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan dilakukan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja*) dan pengaduan tertulis dalam waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila diperlukan dokumen pendukung atas pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan, maka BNI akan meminta nasabah menyampaikan pengaduan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu, pemenuhan kelengkapan dokumen dan penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya sesuai POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan diperbaharui melalui POJK Nomor 18/POJK.07/2018*) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah.

*) Efektif berlaku per bulan Maret 2019



Sesuai Surat Edaran OJK (SE OJK) No. 2/SEOJK.07/2014 dan diperbaharui melalui Surat Edaran OJK (SE OJK) No. 17/SEOJK.07/2018, BNI akan memberikan informasi penyelesaian pengaduan nasabah melalui sarana telepon, email, surat ataupun pesan singkat (*Short Message Service/SMS*). Apabila nasabah merasa solusi penyelesaian yang diberikan oleh BNI tidak memenuhi harapan, maka nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Sementara itu, pada tahun 2018 BNI *Contact Center* mendukung BNI *Smart Kios* melalui layanan *Video Contact Center* untuk pembukaan rekening melalui *Digital Branch*, serta mengelola Media Sosial BNI untuk berbagai permintaan informasi maupun keluhan sehingga BNI *Contact Center* melayani seluruh kontak nasabah melalui *channel non-branch*. Seiring dengan semangat “BNItuDigital” dan untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah, BNI *Contact Center* meluncurkan layanan Aplikasi BNI *Call* yang merupakan aplikasi *Contact Center* perbankan pertama di Indonesia yang berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang dilengkapi dengan fitur *Voice Command* (perintah suara) dan *Natural Language Processing* (NLP). Aplikasi BNI *Call* memberikan kemudahan bagi nasabah dan non nasabah, baik pengguna Android dan iOS, untuk mendapatkan berbagai informasi produk dan jasa BNI maupun informasi umum terkini yang diperlukan. Dengan menggunakan Aplikasi BNI *Call*, nasabah dan non nasabah juga akan diberikan kenyamanan dalam mendapatkan berbagai informasi dan layanan dari petugas BNI *Call* melalui *chat*. Aplikasi BNI *Call* memberikan *experience* baru serta menambah alternatif *channel* sehingga nasabah diberikan berbagai pilihan dengan kemudahan dan kenyamanan akses yang dapat meningkatkan kepuasan nasabah terhadap layanan BNI *Call* 1500046.

BNI *Contact Center* aktif berperan sebagai *point of contact* bagi nasabah BNI dalam menyampaikan *voice of customer* dengan memberikan berbagai *insight* kepada unit bisnis dalam peningkatan produk, fitur dan layanan yang unggul kepada nasabah, antara lain dengan memberikan *feedback* kepada *business/product owner* terkait pengaduan nasabah; melakukan pemantauan *Service Level Agreement* (SLA) penyelesaian pengaduan; penyesuaian ketentuan internal jika terdapat perubahan perundang-undangan serta penyempurnaan aplikasi penanganan pengaduan nasabah *Online Request Management*.

Apabila nasabah merasa solusi penyelesaian yang diberikan oleh BNI tidak memenuhi harapannya, maka nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduan melalui layanan mediasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ataupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Data Komplain Nasabah Berdasarkan Media

Media Complaint	2018		2017		2016	
	Banking	Credit Card	Banking	Credit Card	Banking	Credit Card
Media Massa (Koran)	1	7	6	2	-	5
Media Elektronik (<i>Online</i>)	70	43	16	24	4	16
Media Sosial	4.048	43	334	104	82	50
Surat/ <i>Fax</i>	17	15	13	34	-	32
<i>Email</i>	3.145	1.235	3.780	1.315	-	1.709
Telepon/ <i>Cabang</i>	563.937	68.113	376.297	74.070	190.023	66.423
Lain-lain	264	83	146	52	-	358
TOTAL	571.482	69.539	380.592	75.601	190.109	68.593

Tabel Penyelesaian keluhan Nasabah

Jenis Keluhan	2018					2017				
	Total	on Progress	%	Selesai	%	Total	on Progress	%	Selesai	%
<i>Banking</i>	571.482	10.526	1,84%	560.956	98,16%	380.592	11.274	2,96%	369.318	97,04%
<i>Credit Card</i>	69.539	549	0,79%	68.990	99,21%	75.601	1.936	2,56%	73.665	97,44%
TOTAL	641.021	11.075	1,32%	629.946	98,68%	456.193	13.210	2,90%	442.983	97,10%



Permodalan & Praktik Manajemen Risiko

723 PERMODALAN

727 PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO





Sebagai bank umum dengan nama “Bank Negara Indonesia 1946”, BNI mendapatkan tugas memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan memberdayakan berbagai sektor industri di Indonesia.



PERMODALAN

Modal merupakan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas secara keseluruhan, bantalan (*cushion*) untuk menyerap kerugian yang tidak terduga (*unexpected losses*), dan jaring pengaman (*safety nett*) dalam kondisi krisis. Kecukupan modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Bank menyusun Rencana Permodalan berdasarkan telaah dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Rencana Permodalan tersebut disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank senantiasa menghubungkan antara sasaran keuangan dan kecukupan modal dengan risiko melalui proses perencanaan modal. Demikian pula, dengan ekspansi bisnis yang didasarkan pada kecukupan permodalan dan persyaratan likuiditas Bank. Kebutuhan permodalan tersebut direncanakan dan didiskusikan secara rutin dengan didukung data-data analisis.

Kebijakan manajemen terkait permodalan ditujukan untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat dan struktur permodalan yang baik untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha saat ini dan mempertahankan kelangsungan usaha di masa mendatang. Kebijakan manajemen permodalan juga digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi sumber-sumber permodalan baik internal maupun eksternal. Selain itu, kebijakan permodalan ditetapkan untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank telah efisien.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016, modal Bank terdiri dari:

MODAL INTI (TIER 1)

Modal inti merupakan modal bank yang terdiri dari: Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1 – CET 1*) dan Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (agio, modal sumbangan, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu, laba tahun berjalan, selisih lebih penjabaran laporan keuangan, dana setoran modal, waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham Bank, opsi saham, pendapatan komprehensif lainnya dan saldo surplus revaluasi aset tetap) dan faktor pengurang (disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran laporan keuangan, pendapatan komprehensif lainnya, selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif, selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* dan jumlah penyesuaian berdasarkan standar akuntansi keuangan serta PPA non produktif).

MODAL PELENGKAP (TIER 2)

Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti). Modal pelengkap meliputi instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan, agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap, cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan.

Pada tahun 2018, BNI memiliki jumlah modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp104,25 triliun, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan modal inti dan modal pelengkap tahun 2017 sebesar Rp95,31 triliun.



Tabel 1.a Struktur Modal BNI

(dalam juta Rupiah)

KOMPONEN MODAL	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Individual	Konsolidasian	Individual	Konsolidasian
I. MODAL INTI (TIER 1)	98.013.788	102.411.938	89.765.390	94.156.872
1 Modal Inti Utama/ <i>Common Equity Tier 1</i> (CET 1)	98.013.788	102.411.938	89.765.390	94.156.872
1.1 Modal Disetor (setelah dikurangi <i>Treasury Stock</i>)	9.054.807	9.054.807	9.054.807	9.054.807
1.2 Cadangan Tambahan Modal *)	93.776.277	95.372.851	84.777.424	86.341.937
1.2.1 Faktor Penambah	96.876.604	99.314.270	84.822.185	86.413.968
1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya	14.921.658	15.044.109	12.563.636	12.354.344
1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	84.951	84.886	93.279	93.155
1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	280.627	-
1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap	14.836.707	14.959.223	12.189.730	12.261.189
1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	81.954.946	84.270.161	72.258.549	74.059.624
1.2.1.2.1 Agio	14.568.468	14.568.468	14.568.468	14.568.468
1.2.1.2.2 Cadangan umum	2.778.412	2.778.412	2.778.412	2.778.412
1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu	50.145.903	51.946.977	41.865.822	43.322.969
1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan	14.462.163	14.976.304	13.045.847	13.389.775
1.2.1.2.5 Dana setoran modal	-	-	-	-
1.2.1.2.6 Lainnya	-	-	-	-
1.2.2 Faktor Pengurang	(3.100.327)	(3.941.419)	(44.761)	(72.031)
1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya	(2.985.198)	(3.826.108)	-	(20.766)
1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-
1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2.985.198)	(3.826.108)	-	(20.766)
1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	(115.129)	(115.311)	(44.761)	(51.265)
1.2.2.2.1 Disagio	-	-	-	-
1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu	-	-	-	-
1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan	-	-	-	-
1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	-	-	-	-
1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i>	-	-	-	-
1.2.2.2.6 PPA aset <i>non</i> produktif yang wajib dibentuk	(115.129)	(115.311)	(44.761)	(51.265)
1.2.2.2.7 Lainnya	-	-	-	-
1.3 Kepentingan <i>Non</i> Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	2.544	-	3.808
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama *)	(4.817.296)	(2.018.264)	(4.066.841)	(1.243.680)
1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan	(1.514.755)	(1.623.997)	(764.300)	(849.413)
1.4.2 <i>Goodwill</i>	-	-	-	-
1.4.3 Seluruh aset tidak berwujud lainnya	-	-	-	-
1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	(3.302.541)	(394.267)	(3.302.541)	(394.267)
1.4.5 Kekurangan modal pada Perusahaan Anak asuransi	-	-	-	-
1.4.6 Eksposur sekuritisasi	-	-	-	-
1.4.7 Faktor pengurang modal inti utama lainnya	-	-	-	-
1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau <i>Tier 2</i> pada bank lain	-	-	-	-
1.4.7.1 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-	-	-



KOMPONEN MODAL	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Individual	Konsolidasian	Individual	Konsolidasian
2 Modal Inti Tambahan/ <i>Additional Tier 1</i> (AT 1) *)	-	-	-	-
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1	-	-	-	-
2.2 Agio/Disagio	-	-	-	-
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan *)	-	-	-	-
2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau <i>Tier 2</i> pada bank lain	-	-	-	-
2.3.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-	-	-
II. MODAL PELENGKAP (<i>TIER 2</i>)	6.240.307	6.487.602	5.541.500	5.715.552
1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan <i>Tier 2</i>	93.333	93.333	-	-
2. Agio/Disagio	-	-	-	-
3. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	6.146.973	6.394.269	5.541.500	5.715.552
4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap *)	-	-	-	-
4.1 <i>Sinking Fund</i>	-	-	-	-
4.2 Penempatan dana pada instrumen <i>Tier 2</i> pada bank lain	-	-	-	-
4.3 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-	-	-
TOTAL MODAL	104.254.095	108.899.540	95.306.890	99.872.424

	31 Desember 2018		31 Desember 2017			31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Individual	Konsolidasian	Individual	Konsolidasian		Individual	Konsolidasian	Individual	Konsolidasian
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO					Rasio KPMM				
ATMR RISIKO KREDIT	491.757.871	511.541.518	450.705.555	469.415.700	Rasio CET 1 (%)	17,40%	17,46%	17,45%	17,56%
ATMR RISIKO PASAR	3.198.449	3.273.949	2.378.070	2.554.267	Rasio Tier 1 (%)	17,40%	17,46%	17,45%	17,56%
ATMR RISIKO OPERASIONAL	68.483.648	71.631.769	61.393.204	64.300.544	Rasio Tier 2 (%)	1,11%	1,11%	1,08%	1,07%
TOTAL ATMR	563.439.969	586.447.236	514.476.829	536.270.511	Rasio KPMM (%)	18,50%	18,57%	18,53%	18,62%
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%)	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	CET 1 UNTUK BUFFER (%)	8,60%	8,67%	8,63%	8,72%

Untuk menunjang ekspansi bisnis dan mempertahankan *market share* serta untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/ KPMM (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) sesuai Profil Risiko dan modal penyangga (*buffer*) maka diperlukan permodalan yang memadai.

Oleh karena itu, BNI berusaha untuk terus memperkuat permodalan dengan cara menambah modal inti yang bersifat organik, dalam hal ini terutama bersumber dari peningkatan laba tahun berjalan (*retained earnings*).

Kecukupan permodalan dinilai melalui perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional berdasarkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sesuai dengan Pilar 1 Basel II.

Metode perhitungan ATMR Risiko Kredit menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*), untuk perhitungan ATMR Risiko Pasar menggunakan Metode Standar (*Standard Method*) sedangkan untuk perhitungan ATMR Risiko Operasional menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*).

Untuk risiko-risiko yang belum diperhitungkan dalam ATMR tersebut, antara lain Risiko Konsentrasi Kredit, Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi diperhitungkan dalam Profil Risiko Bank.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sesuai Profil Risiko. Penyediaan modal minimum dihitung dengan menggunakan peringkat Profil Risiko sebagai berikut:

Peringkat Profil Risiko	KPMM
1	8%
2	9% sd <10%
3	10% sd <11%
4 dan 5	11% sd <14%

Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai Profil Risiko, terhitung sejak Januari 2016 BNI juga wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) sesuai kriteria yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tambahan modal penyangga (*buffer*) tersebut terdiri dari *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer*, dan *Capital Surcharge* untuk *Bank Systemic*. Rasio KPMM BNI posisi 31 Desember 2018 sebesar 18,5% telah memenuhi persyaratan KPMM berdasarkan Profil Risiko dan tambahan modal penyangga (*buffer*) sebesar 12,9%.

MANAJEMEN PERMODALAN TERINTEGRASI PADA KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Mengacu pada POJK No. 26/POJK.03/2015, Konglomerasi Keuangan wajib menyediakan modal minimum terintegrasi paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan yang dilakukan dengan menghitung Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi.

Berdasarkan hasil Komite Risiko dan Kapital Sub Komite Manajemen Risiko (KRR RMC)-01/2016 tanggal 15 Januari 2016, telah diputuskan bahwa pelaporan KPMM Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI menggunakan modal BNI secara konsolidasi ditambah dengan modal BNI Life.

Perhitungan Total Modal Aktual (TMA) dan Total Modal Minimum masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI juga dilakukan dalam rangka memantau kecukupan permodalan masing-masing LJK. Hasil perhitungan Rasio Kecukupan Permodalan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI posisi 31 Desember 2018 adalah sebesar 192,3%, diatas persyaratan minimum sebesar 100%.



PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko BNI berlandaskan pada regulasi nasional maupun internasional, meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan dokumen *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

Beberapa regulasi yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Risiko.
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
3. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Manajemen Risiko bagi Produk dan Aktivitas Bank Umum, antara lain:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018, tanggal 6 Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.
5. Sistem Pengendalian Intern.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, baik untuk BNI secara individu maupun secara Konsolidasi dan Terintegrasi dengan Perusahaan Anak, penerapan manajemen risiko BNI mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan melakukan penyusunan, persetujuan, penerapan serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko BNI maupun manajemen risiko terintegrasi.

Dalam menjalankan fungsinya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang merangkap sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT). Pengawasan dilakukan melalui forum Rapat Direksi (Radisi), Rapat Komite Risiko & Kapital (KRK) Sub Komite Manajemen Risiko (RMC), Sub Komite *Assets & Liabilities* (ALCO), Sub Komite *Anti Fraud* (KAF), forum Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Prosedur Perkreditan (KPP), serta Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

Dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan penerapan Manajemen Risiko BNI dan Manajemen Risiko Terintegrasi, Dewan Komisaris BNI dalam pelaksanaannya dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR), Komite Audit, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan antara lain melalui persetujuan dan evaluasi atas Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris (Radikom), maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko (KPR)

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi dan rencana strategik serta lebih berfokus pada risiko yang relevan dalam aktivitas usaha/bisnis BNI, serta disusun dengan memperhatikan tingkat risiko yang bersedia diambil (*risk appetite*), toleransi risiko serta penetapan limit.

Kebijakan Manajemen Risiko di BNI antara lain:

1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko.
2. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Strategik, dan Risiko Reputasi.
3. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi
4. Pedoman Sistem Pengendalian Intern

Dalam implementasinya, Prosedur Manajemen Risiko merupakan penjabaran serta aturan pelaksanaan dari Kebijakan Manajemen Risiko dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan risiko bagi setiap Unit Pengelola Risiko dan didokumentasikan secara memadai. Ketentuan secara detail dari masing-masing prosedur diatur dalam petunjuk teknis (Juknis).

Evaluasi dan/atau pengkinian terhadap Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko BNI dilakukan secara berkala, atau dalam hal terjadi perubahan secara signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha BNI.

Sebagai salah satu metode pengendalian Risiko, BNI juga telah memiliki limit risiko. Limit risiko merupakan ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan oleh manajemen.

Penetapan limit risiko BNI mencakup limit per Risiko (Risiko kredit, Risiko pasar, dan Risiko likuiditas), limit per aktivitas fungsional maupun limit secara keseluruhan. Kebijakan, prosedur dan limit Risiko tersebut secara berkala dilakukan *review* dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.



KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko di BNI meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko, dapat digambarkan sebagai berikut:



Kebijakan mengenai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko (risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, kepatuhan dan reputasi) ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko per jenis risiko, sedangkan proses Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI ditetapkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi (KUMRT).

IDENTIFIKASI RISIKO

Proses identifikasi risiko dilakukan secara proaktif terhadap seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisa sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya. Hal-hal yang diperhatikan dalam proses identifikasi risiko adalah:

1. Identifikasi seluruh risiko dilakukan secara berkala.
2. Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis BNI.
3. Secara khusus melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan aktivitas baru, sebelum produk/aktivitas baru diperkenalkan atau dijalankan.

PENGUKURAN RISIKO

Proses pengukuran risiko dilakukan dalam rangka mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko serta untuk keperluan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Pengukuran risiko dilakukan baik secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang telah ditetapkan oleh Regulator atau dengan menggunakan metode internal yang dikembangkan sendiri oleh BNI berdasarkan *best practise* dalam pengukuran risiko. Untuk mengantisipasi kondisi yang bersifat ekstrim, pengukuran risiko di BNI juga dilengkapi dengan *stress testing* untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan pengukuran risiko adalah:

1. Ruang lingkup pengukuran risiko paling tidak mengukur sensitivitas, kecenderungan, faktor risiko secara individu, eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko dengan mempertimbangkan korelasi, dan seluruh risiko yang melekat pada transaksi serta produk bank.
2. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Regulator maupun yang dikembangkan sendiri secara internal.
3. Penerapan metode pengukuran disesuaikan ketentuan Regulator yang berlaku.
4. Penggunaan metode internal dalam hal pengukuran risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, harus mempertimbangkan persyaratan Regulator, antara lain persyaratan penggunaan, *backtesting*, validasi, dan dokumentasi.
5. Pengukuran risiko dilakukan oleh Unit Pengelola Risiko berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
6. Pengukuran risiko untuk BNI secara individu dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko, sedangkan untuk Konglomerasi Keuangan BNI dilakukan terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko.

7. Untuk keperluan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kepada Regulator, pengukuran risiko BNI secara individu dilakukan terhadap 3 (tiga) risiko utama yakni risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Sedangkan perhitungan KPMM terintegrasi dilakukan dengan membandingkan antara total modal aktual Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota Konglomerasi Keuangan dengan total modal minimum yang wajib dipenuhi oleh LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNI.
8. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala di mana hasil pengukuran dilaporkan kepada Regulator sebagai bagian dari pelaporan Profil Risiko dan KPMM BNI secara individu serta pelaporan Profil Risiko Terintegrasi dan KPMM Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI.

PEMANTAUAN RISIKO

Proses pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik antara lain dengan melakukan pemantauan terhadap mitigasi dan limit risiko yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan risiko adalah:

1. Pemantauan risiko mencakup antara lain pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit, dan hasil *stress testing* serta konsistensi pelaksanaan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan yang disampaikan secara berkala kepada pihak eksternal (Regulator) maupun internal (Manajemen).

Pemantauan risiko dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional (*risk taking unit*) sebagai pemilik risiko (*risk owner*) maupun oleh *risk control unit*, dan hasil pemantauan disajikan dalam laporan secara berkala antara lain Laporan Portofolio Pinjaman, Laporan Pemantauan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, Laporan Beban Risiko Operasional, Laporan *Feedback Operational Risk Self Assessment*, *Internal Risk Report*, Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).



PENGENDALIAN RISIKO

Proses pengendalian risiko dilakukan terutama untuk mengelola risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BNI.

Hal-hal yang diperhatikan dalam pengendalian risiko adalah:

1. Sistem pengendalian risiko mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Proses pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
3. Mekanisme lindung nilai dan mitigasi risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Operasional bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Strategi pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima Risiko (*Risk Acceptance*)
Untuk jenis risiko yang secara proses tidak memungkinkan untuk dilakukan intervensi pencegahan atau perbaikan situasi, maka potensi risiko yang ada akan diterima sebagai konsekuensi bank dalam memanfaatkan kesempatan bisnis, dengan pertimbangan bahwa risiko yang ada masih dalam limit/toleransi Bank. Namun demikian, kontrol yang ketat harus dijalankan apabila strategi pengendalian risiko ini diterapkan.
2. Menghindari Risiko (*Risk Avoidance*)
Risk avoidance dilakukan untuk mencegah BNI mengalami suatu risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable*), atau mencegah bertambahnya eksposur risiko yang ada. *Risk avoidance* dipilih apabila potensi keuntungan dari suatu aktivitas bisnis lebih kecil dari pada eksposur risiko yang mungkin terjadi.
3. Memindahkan risiko (*Risk Transfer*)
Pada strategi pemindahan risiko, risiko yang ada masih melekat pada aktivitas bisnis tersebut, namun risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain. Salah satu metode

pemindahan risiko yang paling umum dilakukan adalah pemanfaatan jasa asuransi atau tenaga alih daya (*outsourcing*).

4. Mengurangi Risiko (*Risk Mitigation*).
Pengendalian risiko akan optimal apabila dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengurangi risiko yang ada. Mitigasi risiko dimaksudkan untuk memperkecil kerugian yang dipicu oleh faktor eksternal, maupun kejadian di internal bank. Salah satu alternatif untuk menekan dan mengurangi risiko adalah melalui peningkatan kontrol dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Beberapa aplikasi manajemen risiko telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan proses manajemen risiko secara baik, akurat dan tepat waktu antara lain *Credit Risk Management System (CRMS)*, *Internal Rating System*, *Scoring System*, Perangkat Risiko Operasional (PERISKOP), dan Aplikasi Manajemen Risiko Pasar.

BNI telah menyiapkan solusi manajemen risiko yang sejalan dengan IT *Strategic Plan*, di antaranya:

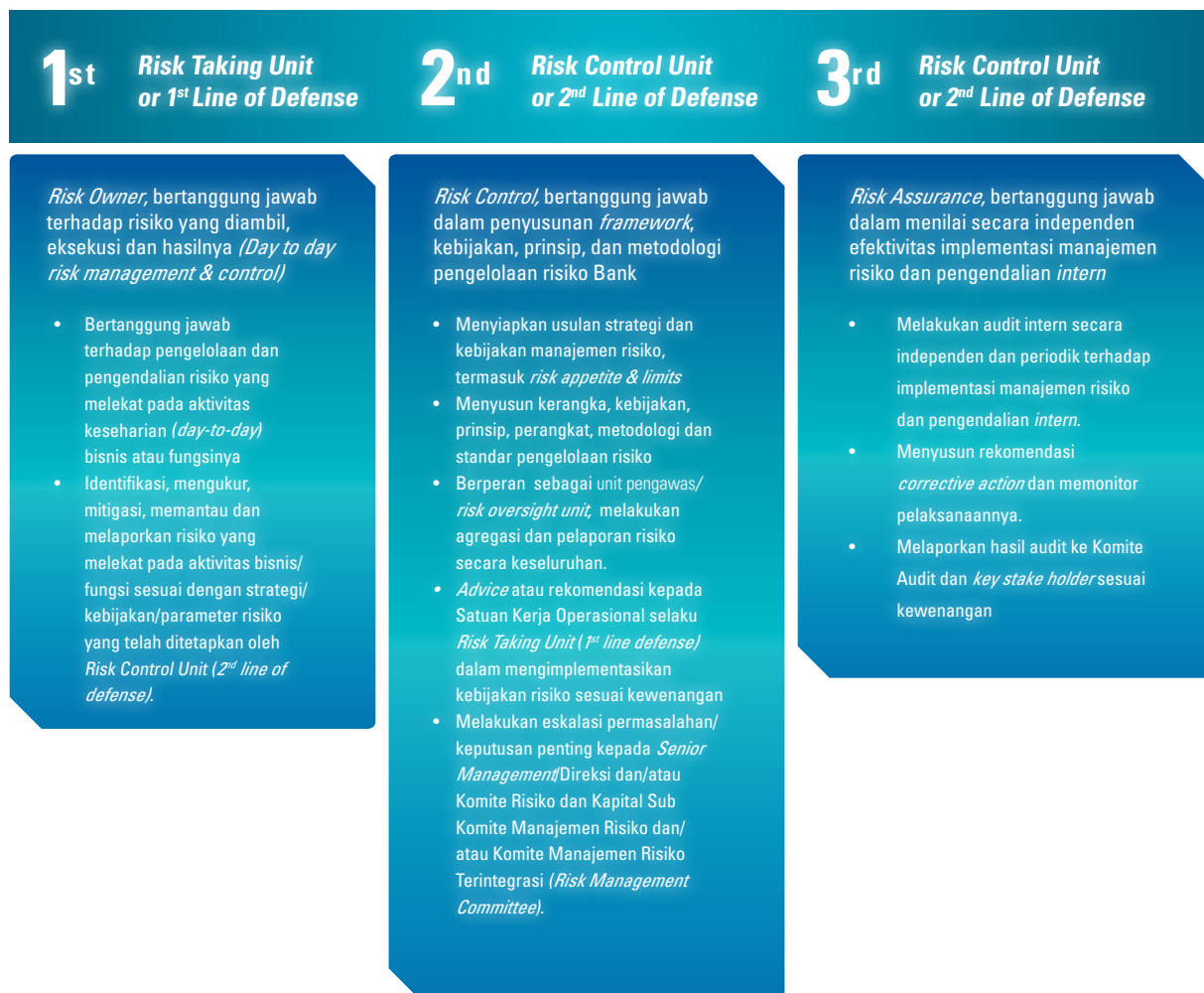
1. Menyiapkan aplikasi *front end* untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional
2. Menyiapkan *data storage* dan *information system*.
3. Menyiapkan *Capital Calculation Engine*.

Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen risiko yang baru, harus dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan *output* yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian, dan penilaian kembali secara efektif dan akurat.



SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH

Sistem pengendalian intern di BNI dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model *Three Lines of Defense* yang terdiri atas:



Pemilik Risiko (*Risk Owner*) sebagai *first line of defense/Risk Taking Unit* melakukan pengelolaan terhadap risiko yang melekat di bisnis dan fungsinya secara harian (*day to day*). Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Tata Kelola Kebijakan dan Divisi Kepatuhan bertindak sebagai *second line of defense/Risk Control Unit*.

Satuan Pengawasan Internal bertindak sebagai *third line of defense/Risk Assurance Unit*, yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan bertugas menilai secara independen kesesuaian proses penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta dengan ketentuan dari Regulator.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di BNI telah berjalan dengan efektif dan efisien dengan diterapkannya pemisahan fungsi antara *Risk Taking Unit* dan *Risk Control Unit* serta *Risk Assurance Unit*.



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA KHUSUS

RISIKO KREDIT

PENGELOLAAN RISIKO KREDIT

Ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada kinerja dan kualitas kredit perbankan secara umum. Dalam kondisi tersebut Portofolio kredit BNI dapat tumbuh cukup agresif yaitu sebesar 16,2% pada tahun 2018 berada di atas rata-rata pertumbuhan Bank Umum maupun Bank Persero. Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) BNI dapat terjaga pada rentang yang wajar dan membaik dari 2,3% pada tahun 2017 menjadi 1,9% pada tahun 2018.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko kredit yang diakibatkan oleh kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya, BNI mengimplementasikan sistem peringatan dini (*early warning system*) yaitu suatu sistem *monitoring* untuk mengidentifikasi potensi risiko kredit sejak dini yang digunakan sebagai indikator bagi tindakan lebih lanjut sebelum kredit jatuh menjadi *Non Performing Loan*. Guna menekan laju peningkatan NPL, BNI secara proaktif terus melakukan upaya penyempurnaan pengelolaan kredit kualitas rendah, antara lain melalui penajaman fungsi *Credit Risk Review*, serta pembentukan *Joint Effort Team* beranggotakan lintas divisi untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan lebih dini dan terintegrasi.

Untuk mempertahankan kemampuan Bank menyerap risiko yang mungkin timbul dan mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak pasti BNI secara bertahap terus meningkatkan rasio kemampuan Bank untuk menyerap potensi kerugian akibat kualitas kredit yang buruk melalui peningkatan *Coverage Ratio*, dan saat ini *Coverage Ratio* BNI telah mencapai 153% meningkat dari 148% di tahun 2017.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas proses, BNI telah mengimplementasikan *Credit Discipline Program* (CDP) sebagai panduan bagi seluruh perangkat pengelola kredit dalam menjalankan proses kredit sehingga dapat lebih efektif dan prudent, mulai dari proses penyusunan *pipeline*, verifikasi hingga pemantauan kredit.

Selain itu, untuk fokus ekspansi yang berkualitas BNI juga memberikan pelatihan dan penyediaan tenaga perkreditan spesialisasi pada sektor industri prioritas, serta melakukan ekspansi pada mitra korporat menggunakan *skim learning model* (*supply chain financing*).

BNI juga memperkuat unit administrasi kredit dengan mengubah paradigma dari fungsi administrasi dokumen menjadi *credit risk management*, yaitu melibatkan unit

administrasi kredit dalam meminimalisir risiko kredit melalui pengelolaan dokumen yang baik, memantau proses pengikatan jaminan di notaris dan penutupan asuransi. Selain itu diterapkan prinsip "*not complete no disburse*" di mana tidak akan dilakukan pencairan jika persyaratan administrasi kredit belum lengkap.

TATA KELOLA DAN ORGANISASI

Untuk mempercepat proses ekspansi bisnis di segenap unit bisnis segmen kecil, fungsi pemasaran dan proses analisa kredit dilakukan oleh *Relationship Manager* yang berada di bawah unit bisnis yaitu dengan melakukan analisa bisnis dan analisa risiko serta memberikan mitigasi risiko yang diperlukan terhadap calon debitur yang diusulkan.

Adapun untuk segmen Menengah dan Korporasi terdapat perbedaan proses bisnis dibandingkan segmen kecil. Proses kredit di segmen ini dilakukan oleh *Senior Relationship Manager* dan *Relationship Manager* yang berada di unit bisnis dengan tugas memproses usulan dari calon debitur, sementara analisis dan *review* risiko calon debitur di segmen Korporasi dan Menengah dilakukan oleh fungsi *Credit Risk Manager* yang berada di bawah Unit Risiko.

Penerapan *four eyes principles* dalam proses perkreditan di BNI diimplementasikan dalam proses persetujuan kredit yang dilakukan melalui Komite Kredit, yaitu forum bersama pejabat pemutus kredit yang mempunyai wewenang memutus kredit yang diusulkan sesuai dengan limit yang ditetapkan. Anggota Komite Kredit terdiri dari pejabat unit bisnis dan unit risiko bisnis. Unit bisnis dan unit risiko bisnis berperan sebagai *first line of defense* (*risk owner*) yang bertugas mengelola dan mengendalikan risiko kredit pada kegiatan operasional harian unit tersebut.

Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM) dan Divisi Tata Kelola Kebijakan (PGV) berperan sebagai *second line of defense* yang bertugas mempersiapkan infrastruktur perkreditan seperti penyusunan kebijakan dan prosedur perkreditan, penetapan limit kewenangan memutus kredit, menyiapkan sistem *rating* dan *scoring*, bersama unit bisnis memantau portofolio kredit, serta mempersiapkan *tools* lain yang diperlukan untuk menunjang aktivitas perkreditan.

Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai *third line of defense* turut aktif menjaga kualitas portofolio kredit melalui *immediately post review*, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap beberapa debitur segera setelah kredit dicairkan. SPI juga melakukan pemeriksaan terhadap debitur secara *sampling* untuk menjaga kualitas debitur yang telah mendapatkan fasilitas kredit. Guna menjamin terselenggaranya proses kredit yang berkualitas secara berkelanjutan, untuk selanjutnya fungsi *immediately post review* akan terus disempurnakan.



KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Kebijakan dan Prosedur Perkreditan disusun sebagai dasar untuk melakukan aktivitas dalam proses perkreditan agar kualitas kredit dapat terjaga dengan tetap memperhatikan target bisnis yang ditetapkan. BNI memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang diputus oleh Forum Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya KPB diterjemahkan ke dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan yang diputus oleh Forum Komite Prosedur Perkreditan (KPP).

Selain itu BNI juga sudah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang diturunkan dalam bentuk Prosedur Manajemen Risiko Kredit. Kebijakan dan prosedur Perkreditan dan Manajemen Risiko Kredit telah dilakukan pembakuan ke dalam Pedoman Perusahaan. Pedoman Perusahaan yang digunakan saat ini sudah tersedia dalam bentuk pedoman *online* yaitu BNI e-PP (*electronic* Pedoman Perusahaan).

PROSES

Proses manajemen risiko kredit diimplementasikan dalam seluruh proses perkreditan, dimulai dari pemasaran kredit sampai dengan kredit tersebut lunas. Proses tersebut berlangsung secara berkesinambungan dalam suatu *value chain activity* yang diawali dengan penetapan strategi dan perencanaan, *customer insight*, perencanaan portofolio, pengembangan produk, pemrosesan kredit, administrasi kredit, pemantauan yang intensif dan optimisasi portofolio.

Pada aktivitas operasional perkreditan dalam lingkup individual nasabah, proses manajemen risiko kredit dilaksanakan baik oleh Unit Bisnis maupun Unit Risiko Bisnis melalui tahapan identifikasi (antara lain verifikasi kebenaran data), pengukuran (penggunaan perangkat analisa kredit), pemantauan (melalui kunjungan kepada nasabah dan *review rating* nasabah secara berkala), serta pengendalian (antara lain melalui penetapan limit, *covenant*, dan faktor *mitigant*).

Proses Manajemen Risiko Kredit



Dalam lingkup keseluruhan portofolio, pemantauan dan pelaporan eksposur kredit dilakukan secara berkala kepada Manajemen antara lain melalui Laporan Portofolio Pinjaman. Di samping itu juga dilakukan pemantauan terhadap konsentrasi kredit, baik konsentrasi terhadap sektor ekonomi tertentu maupun konsentrasi terhadap segmen tertentu. Secara berkala dalam Forum Komite Risiko dan Kapital Sub Komite Manajemen Risiko (KRK-RMC) dilakukan evaluasi atas pencapaian target, penetapan langkah-langkah dan koordinasi tindak lanjut perbaikan, serta evaluasi atas efektivitas langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan.

PERANGKAT DAN METODE

Dalam rangka mendukung operasional proses bisnis dan pengelolaan risiko kredit, BNI telah memiliki beberapa perangkat manajemen risiko kredit baik pada tataran eksposur individu maupun portofolio. Untuk pemrosesan kredit pada eksposur individu segmen *business banking*, BNI telah memiliki *model rating* berupa *internal rating system*, sedangkan untuk segmen *consumer* digunakan sistem *scoring* debitur untuk membantu analisa kualitas debitur dalam proses perkreditan.

Untuk menjaga agar portofolio bank tidak terkonsentrasi pada debitur dan sektor ekonomi tertentu, maka telah ditetapkan pembatasan kredit sesuai *risk appetite*, sedangkan untuk mengantisipasi pelampauan BMPK BNI telah menetapkan limit BMPK yang disebut *house limit* dengan batas yang lebih *prudent* dibandingkan limit BMPK sesuai ketentuan regulator.

Untuk mengatur komposisi portofolio pinjaman, BNI telah memiliki *Loan Exposure Limit* (LEL) yang berfungsi membatasi risiko konsentrasi eksposur pinjaman di setiap sektor ekonomi pada masing-masing segmen bisnis, dan menjadi pedoman ekspansi pinjaman selama satu tahun. Untuk penilaian terhadap risiko industri, BNI mengimplementasikan *Industry Risk Rating* (IRR) serta standar rasio keuangan yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam penilaian kualitas debitur dari sisi industri.

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit dan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan faktor makro yang berpengaruh pada bank, BNI secara berkala melakukan *stress testing* risiko kredit untuk menilai perubahan portofolio kredit dan pengaruhnya bagi bank serta kemampuan bank menghadapi kondisi tersebut.



Untuk mengintegrasikan dokumentasi dalam proses perkreditan, BNI telah menggunakan aplikasi e-PAK untuk kredit korporasi yang membantu *end-to end process* kredit berikut pendokumentasiannya yang dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa *tools* yang telah ada.

PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN)

Berdasarkan PSAK 55, bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk mengantisipasi terjadinya penurunan nilai aset keuangan bank. Penurunan nilai adalah suatu kondisi di mana nilai tercatat dari suatu aset keuangan bank melebihi dari nilai yang dapat dipulihkan dari aset keuangan yang bersangkutan.

Setiap akhir bulan BNI melakukan evaluasi penurunan nilai atas seluruh aset keuangan kecuali aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang nilai wajarnya diukur melalui Laporan Laba Rugi (*Fair Value Through Profit and Loss*). BNI mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa Aset Keuangan atau kelompok Aset Keuangan tersebut mengalami penurunan nilai.

Bukti objektif adalah bukti terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Bukti objektif tersebut antara lain:

1. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau debitur.
2. Pelanggaran kontrak, yaitu terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran kewajiban debitur baik pokok, bunga dan denda.
3. BNI dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan keuangan tersebut.
4. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
5. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau
6. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset keuangan tersebut, meskipun penurunan belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara Individu dalam kelompok aset keuangan tersebut.

Metode perhitungan pembentukan CKPN di BNI menggunakan 2 (dua) metode yaitu *assessment* secara Individu dan *assessment* secara Kolektif.

Perhitungan CKPN secara Individu dilakukan terhadap suatu aset keuangan yang signifikan mempunyai bukti objektif mengalami penurunan nilai, yaitu aset keuangan dari segmen Korporasi dan Menengah, serta kepemilikan surat berharga.

CKPN secara Individu dihitung dengan menggunakan metode nilai kini dari estimasi arus kas suatu aset keuangan yang dilakukan langsung oleh pengelola masing-masing debitur.

CKPN secara kolektif dihitung dengan menggunakan data kerugian historis (perhitungan *Incurring Loss* berdasarkan estimasi *Probability of Default* [PD] dan *Loss Given Default* [LGD]) dari masing-masing kelompok aset tertentu). Perhitungan CKPN secara Kolektif dilakukan bagi semua *asset* keuangan yang:

1. Tidak dievaluasi secara Individu, yaitu antara lain kredit dari segmen Kecil, Kredit Konsumtif, Kartu Kredit, Tagihan Akseptasi, Tagihan Dokumen dan Fasilitas.
2. Tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dari aset keuangan yang dievaluasi, yaitu pinjaman dalam segmen korporasi dan usaha menengah yang tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai.
3. Terdapat bukti objektif penurunan nilai dari *asset* keuangan yang dievaluasi secara Individu namun tidak terdapat kerugian penurunan nilai.

Dalam perhitungan CKPN secara kolektif ini, suatu aset dikategorikan sebagai aset yang telah jatuh tempo (*default*) apabila aset tersebut tercatat mempunyai jumlah hari tunggakan atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, atau telah dihapus buku.

BNI menggunakan *migration analysis* dan *roll rate analysis* dengan periode observasi data selama 5 (lima) tahun untuk perhitungan PD dan LGD CKPN Kolektif.

Dalam rangka implementasi IFRS-9 di seluruh unit BNI baik cabang dalam negeri maupun luar negeri, BNI telah mempersiapkan implementasinya dengan pengembangan metodologi perhitungan *impairment* (CKPN) sesuai IFRS-9. Model perhitungan CKPN sesuai IFRS-9 cabang luar negeri telah dapat diimplementasi di 3 (tiga) cabang luar negeri sejak Januari 2018, sedangkan untuk BNI cabang dalam negeri akan diimplementasikan mulai Januari 2020.



Pengungkapan tagihan bersih dan rincian mutase cadangan penurunan nilai Bank secara Individu dan konsolidasi dibuat dalam tabel: Tabel 2.1.a, Tabel 2.1.b, Tabel 2.2.a, Tabel 2.2.b, Tabel 2.3.a, Tabel 2.3.b, Tabel 2.4.a, Tabel 2.4.b, Tabel 2.5.a, Tabel 2.5.b, Tabel 2.6.a, dan Tabel 2.6.b

Tabel 2.1a Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Bank Secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-18						31-Dec-17					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Area						Tagihan Bersih Berdasarkan Area					
		Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total	Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total
1	Tagihan kepada Pemerintah	216	23	-	149.274.501	17.323.908	166.598.648	707	18	13	125.280.427	18.531.330	143.812.495
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	15.977.999	616.326	17.543.301	58.979.685	5.325.421	98.442.732	6.733.924	354.518	12.830.021	57.011.305	3.396.005	80.325.773
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	2.524	501	-	-	3.025
4	Tagihan kepada Bank	396.210	321.712	409.670	36.384.525	9.694.942	47.207.059	487.616	503.632	688.534	44.614.259	6.300.177	52.594.218
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.702.821	1.488.488	5.364.450	2.814.441	1.431	12.371.631	2.291.025	1.502.208	5.018.717	3.010.392	79	11.822.421
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.438.963	1.454.535	2.118.773	6.819.885	-	11.832.156	1.150.468	1.510.218	1.874.125	4.747.967	-	9.282.778
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	142.171	98.614	211.797	99.918	3.356	555.856	218.787	151.663	322.244	147.581	3.927	844.202
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	17.179.462	14.211.957	24.197.097	22.814.580	3.653	78.406.749	13.753.488	10.956.612	18.333.815	19.857.819	1.653	62.903.387
9	Tagihan kepada Korporasi	60.273.981	26.535.000	66.861.926	156.216.495	20.674.663	330.562.065	55.504.764	23.997.043	62.572.201	131.378.913	17.866.593	291.319.514
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	840.965	313.485	1.238.703	1.333.608	260.204	3.986.966	66.141	9.447	8.960	119.958	75.398	279.904
11	Aset Lainnya	3.007.578	1.853.422	3.740.312	38.180.316	148.482	46.930.109	2.306.611	1.676.712	2.928.247	45.542.899	3.420.274	55.874.743
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	101.960.366	46.893.562	121.686.029	472.917.954	53.436.060	796.893.971	82.513.531	40.664.595	104.577.378	431.711.520	49.595.436	709.062.460

Grup A : Wilayah Medan, Wilayah Padang, Wilayah Palembang, Wilayah Banjarmasin.

Grup B : Wilayah Makassar, Wilayah Denpasar, Wilayah Manado, Wilayah Papua.

Grup C : Wilayah Bandung, Wilayah Semarang, Wilayah Surabaya, Wilayah Jogjakarta, Wilayah Malang

Grup D : Wilayah Jakarta Senayan, Wilayah Jakarta Kota, Wilayah Jakarta BSD, Wilayah Jakarta Kemayoran.

Grup E : Wilayah Kantor Cabang Luar Negeri



2.1.b Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-18						31-Dec-17					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Area						Tagihan Bersih Berdasarkan Area					
		Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total	Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total
1	Tagihan kepada Pemerintah	216	23	-	149.262.106	17.323.908	166.586.253	707	18	13	125.280.427	18.531.330	143.812.495
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	15.986.417	616.326	18.215.004	58.245.130	5.325.421	98.388.298	6.733.924	354.518	12.830.021	57.011.305	3.396.005	80.325.773
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	2.524	501	-	-	3.025
4	Tagihan kepada Bank	396.210	321.712	409.670	30.467.756	9.695.934	41.291.282	487.616	503.632	688.534	44.877.123	6.300.273	52.857.178
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.702.821	1.488.488	5.364.450	2.814.441	1.431	12.371.631	2.291.025	1.502.208	5.018.717	3.010.392	79	11.822.421
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.438.963	1.454.535	2.118.773	6.819.885	-	11.832.156	1.150.468	1.510.218	1.874.125	4.747.967	-	9.282.778
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	146.893	98.748	227.092	79.766	3.356	555.855	218.787	151.663	322.244	147.581	3.927	844.202
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	17.191.224	14.212.006	24.603.054	23.523.013	3.653	79.532.950	13.890.194	10.956.612	18.415.396	20.202.458	1.653	63.466.313
9	Tagihan kepada Korporasi	60.275.256	26.535.000	66.884.832	154.841.977	20.674.663	329.211.728	55.517.535	23.997.043	62.642.010	131.296.329	17.866.596	291.319.513
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	840.965	313.485	1.238.703	1.333.608	260.204	3.986.965	66.141	9.447	8.960	119.958	75.398	279.904
11	Aset Lainnya	3.007.578	1.853.422	3.740.312	39.479.282	148.482	48.229.076	2.306.611	1.676.712	2.928.247	47.360.235	3.420.274	57.692.079
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	6.785.972	2.034.110	9.427.275	22.916.238	-	41.163.595	5.495.683	1.690.356	7.798.627	19.908.448	-	34.893.114
	Total	108.772.515	48.927.855	132.229.165	489.783.202	53.437.052	833.149.789	88.158.691	42.354.951	112.527.395	453.962.223	49.595.535	746.598.795

Grup A : Wilayah Medan, Wilayah Padang, Wilayah Palembang, Wilayah Banjarmasin.

Grup B : Wilayah Makassar, Wilayah Denpasar, Wilayah Manado, Wilayah Papua.

Grup C : Wilayah Bandung, Wilayah Semarang, Wilayah Surabaya, Wilayah Yogyakarta, Wilayah Malang

Grup D : Wilayah Jakarta Senayan, Wilayah Jakarta Kota, Wilayah Jakarta BSD, Wilayah Jakarta Kemayoran.

Grup E : Wilayah Kantor Cabang Luar Negeri



2.2.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Bank Secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Des-18						31-Des-17					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak						Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total	<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	78.519.196	8.918.856	15.549.203	25.846.069	37.765.325	166.598.649	41.327.837	11.546.393	18.128.788	38.776.626	34.032.851	143.812.495
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	41.566.808	17.750.097	4.639.658	25.821.814	8.664.353	98.442.730	39.716.055	5.470.712	5.017.573	26.038.812	4.082.621	80.325.773
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	2.524	-	501	-	-	3.025
4	Tagihan Kepada Bank	28.909.127	7.190.210	1.299.090	662.155	9.146.476	47.207.058	27.230.954	6.203.530	1.988.638	979.263	16.191.833	52.594.218
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	62.952	698.522	1.661.168	9.948.990	-	12.371.632	104.548	553.619	1.551.002	9.613.252	-	11.822.421
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.257.262	1.161.032	2.062.178	7.351.684	-	11.832.156	932.105	1.179.369	1.323.221	5.848.083	-	9.282.778
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	3.407	17.655	66.773	468.022	-	555.857	3.419	16.498	70.436	753.849	-	844.202
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	5.239.583	14.967.159	19.014.928	29.141.474	10.043.605	78.406.749	4.215.693	11.474.191	14.911.021	22.497.896	9.804.586	62.903.387
9	Tagihan Kepada Korporasi	140.233.969	34.991.387	44.258.556	105.924.126	5.154.026	330.562.064	133.077.227	26.471.395	37.084.172	88.730.238	5.956.481	291.319.514
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	1.603.561	327.860	455.810	1.502.933	96.802	3.986.966	679.178	331.570	404.908	(981.192)	(154.560)	279.904
11	Aset Lainnya	12	9	4	99	46.929.985	46.930.109	-	-	-	-	55.874.743	55.874.743
12	Eksposur di Unit Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	297.395.877	86.022.787	89.007.368	206.667.366	117.800.572	796.893.970	247.289.540	63.247.277	80.480.260	192.256.827	125.788.556	709.062.460



2.2.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Des-18						31-Des-17					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak						Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total	<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	78.519.196	8.918.856	15.549.203	25.846.069	37.752.928	166.586.252	41.327.837	11.546.393	18.128.788	38.776.626	34.032.851	143.812.495
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	41.763.904	18.021.713	4.834.070	25.844.270	7.924.340	98.388.297	39.716.055	5.470.712	5.017.573	26.038.812	4.082.621	80.325.773
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	2.524	-	501	-	-	3.025
4	Tagihan Kepada Bank	29.157.852	7.190.210	1.299.090	662.155	2.981.975	41.291.2823	27.846.384	6.203.530	1.988.638	979.263	15.839.363	52.857.178
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	62.952	698.522	1.661.168	9.948.989	-	12.371.631	104.548	553.619	1.551.002	9.613.252	-	11.822.421
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.257.262	1.161.032	2.062.178	7.351.684	-	11.832.156	932.105	1.179.369	1.323.221	5.848.083	-	9.282.778
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	6.632	26.789	74.316	448.120	-	555.857	3.419	16.498	70.436	753.849	-	844.202
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	5.261.046	15.200.885	19.177.347	29.152.315	10.741.357	79.532.950	4.571.004	11.474.191	14.911.021	22.499.435	10.010.662	63.466.313
9	Tagihan Kepada Korporasi	140.233.969	35.007.264	44.265.584	105.925.401	3.779.507	329.211.725	133.241.756	26.551.761	37.164.538	88.836.574	5.524.884	291.319.513
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	1.603.561	327.860	455.810	1.502.933	96.802	3.986.966	679.178	331.570	404.908	(981.192)	(154.560)	279.904
11	Aset Lainnya	12	9	4	99	48.228.951	48.229.075	-	-	-	-	57.692.079	57.692.079
12	Eksposur di Unit Syariah	10.164.429	6.492.453	7.031.388	-	17.475.327	41.163.597	7.426.144	5.033.865	5.011.143	-	17.421.963	34.893.114
	Total	308.030.815	93.045.593	96.410.158	206.682.035	128.981.187	833.149.7889	255.850.954	68.361.508	85.571.769	192.364.702	144.449.862	746.598.795

2.3.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi Bank Secara Individu

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	6.413.117	-	-	-	
2	Perikanan	-	77.772	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	9.494.673	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	20.294.567	-	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	-	13.847.497	-	-	-	
6	Konstruksi	-	6.827.942	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	12.599.313	462.940	-	-	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	4.495.609	-	-	-	
10	Perantara Keuangan	23.604.164	9.779.909	-	47.206.568	-	
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	1.029.426	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	63.753.603	103.091	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	492	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	12.626	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	554.790	-	-	-	
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	10.446.036	
20	Lainnya	66.641.568	25.048.772	-	-	1.925.595	
Total		166.598.648	98.442.731	-	47.207.060	12.371.631	



(dalam Juta Rupiah)

31–Des-2018

	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Syariah
	1.578	-	4.329.138	35.886.346	20.125	-	-
	50	-	457.321	1.007.874	2.714	-	-
	-	-	47.688	4.547.346	511.140	-	-
	88	-	3.063.889	71.474.919	987.039	-	-
	-	-	40.085	10.451.611	-	-	-
	-	-	352.225	25.325.024	230.439	-	-
	3.650	-	13.650.187	49.812.762	783.542	-	-
	-	-	1.387.927	12.887.842	80.697	-	-
	-	-	407.878	25.551.772	216.848	-	-
	-	-	28.626	15.382.455	3.940	-	-
	9.893.363	-	1.166.521	23.591.184	71.256	-	-
	-	-	2.814	12.699	-	-	-
	351	-	56.749	1.033.281	-	-	-
	-	-	219.678	1.734.631	5.618	-	-
	-	-	887.280	5.040.707	9.449	-	-
	-	-	35.574	5.488	158	-	-
	-	-	-	2.988	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	1.921.272	547.256	47.989.243	9.724.309	751.317	-	-
	11.805	8.600	4.283.926	37.088.827	312.683	46.930.109	-
	11.832.157	555.856	78.406.749	330.562.065	3.986.965	46.930.109	-



31–Des-2017

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	5.595.182	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	48.805	-	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	1.228.246	-	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	-	12.952.558	-	-	-	
6	Konstruksi	-	18.108.394	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	8.922.321	-	-	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	362	-	502	-	133	
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	-	-	-	
10	Perantara Keuangan	-	4.414.093	-	-	-	
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	48.733.488	5.275.298	-	42.370.872	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.815.351	325.598	-	38.218	-	
13	Jasa Pendidikan	86.299.156	58.198	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	3.909	-	
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	46.657	-	30.072	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	2.827.075	-	-	10.514	11.822.288	
20	Lainnya	2.088.258	23.399.228	2.523	10.140.634	-	
	Total	143.812.495	80.325.773	3.025	52.594.218	11.822.421	



	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Syariah
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	2.277.019	35.609.969	1.206	-	-
	-	-	322.087	938.935	12.287	-	-
	-	-	24.725	7.730.760	-	-	-
	348	-	1.313.178	67.239.574	8.850	-	-
	-	-	16.884	8.791.952	53	-	-
	-	-	181.851	16.594.785	15.261	-	-
	6.245	-	12.654.790	46.717.500	14.557	-	-
	1.566	-	753.057	11.774.476	8.123	-	-
	-	-	257.951	20.578.436	-	-	-
	-	-	18.177	1.642.201	20.728	-	-
	7.187.433	-	774.516	15.019.997	23.648	-	-
	-	-	2.293	42	-	-	-
	385	-	37.624	575.620	-	-	-
	-	-	107.434	1.373.880	2.763	-	-
	172	-	410.783	3.219.559	-	-	-
	-	-	30.850	4.699	82	-	-
	-	-	-	5.961	-	-	-
	2.086.629	844.201	43.373.839	11.658.627	163.411	-	-
	-	-	346.331	41.842.541	8.934	55.874.743	-
	9.282.778	844.202	62.903.387	291.319.514	279.904	55.874.743	-



Tabel 2.3.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

31-Des-2018

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	6.412.595	-	-	-	
2	Perikanan	-	77.772	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	9.494.673	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	20.293.614	-	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	-	13.847.497	-	-	-	
6	Konstruksi	-	6.824.117	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	12.599.313	441.622	-	-	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	4.486.642	-	-	-	
10	Perantara Keuangan	23.591.767	9.773.956	-	41.290.791	-	
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	1.025.256	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	63.753.603	103.091	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	492	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	5.391	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	553.300	-	-	-	
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	10.446.036	
20	Lainnya	66.641.568	25.048.772	-	-	1.925.595	
Total		166.586.251	98.388.298	-	41.291.283	12.371.631	



(dalam Juta Rupiah)

	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Syariah
	1.577	-	4.329.138	35.886.345	20.126	-	612.121
	50	-	457.321	1.007.874	2.714	-	29.074
	-	-	47.688	4.547.346	511.140	-	268.878
	88	-	3.064.988	71.474.919	987.039	-	1.676.912
	-	-	40.085	10.451.611	-	-	1.286.500
	-	1.075	387.033	24.736.079	230.439	-	1.637.684
	3.650	5.520	14.479.784	49.400.857	783.542	-	2.427.390
	-	-	1.387.927	12.887.842	80.697	-	570.107
	-	1.982	430.582	25.378.171	216.848	-	973.483
	-	3.555	210.423	15.382.455	3.940	-	1.597.976
	9.893.363	3.903	1.190.206	23.591.183	71.256	-	871.750
	-	-	2.814	12.699	-	-	-
	351	-	56.749	1.033.281	-	-	813.502
	-	3.545	243.643	1.558.746	5.618	-	740.984
	-	1.615	895.827	5.040.707	9.449	-	171.172
	-	-	35.574	5.488	158	-	6.640
	-	-	-	2.988	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	1.921.272	526.061	47.989.243	9.724.309	751.317	-	14.184.667
	11.805	8.600	4.283.926	37.088.826	312.683	48.229.075	13.294.756
	11.832.156	555.856	79.532.951	329.211.726	3.986.966	48.229.075	41.163.596



31-Des-2017

No	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	5.595.182	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	48.805	-	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	1.228.246	-	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	-	12.952.558	-	-	-	
6	Konstruksi	-	18.108.394	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	8.922.321	-	-	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	362	-	502	-	133	
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	-	-	-	
10	Perantara Keuangan	-	4.414.093	-	611.695	-	
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	48.733.488	5.275.298	-	42.089.924	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.815.351	325.598	-	37.965	-	
13	Jasa Pendidikan	86.299.156	58.198	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	3.883	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	46.657	-	29.872	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	2.827.075	-	-	10.444	11.822.287	
20	Lainnya	2.088.258	23.399.228	2.523	10.073.395	-	
Total		143.812.495	80.325.773	3.025	52.857.178	11.822.421	



	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Syariah
	-	-	33.453	2.679	-	-	286.460
	-	-	2.284.297	35.559.831	1.206	-	28.031
	-	-	340.074	946.774	12.287	-	264.782
	-	-	145.288	7.746.170	-	-	1.042.585
	348	-	1.329.952	67.158.006	8.850	-	841.050
	-	-	51.720	8.793.115	53	-	1.183.005
	-	-	203.847	16.579.472	15.261	-	2.373.972
	6.245	-	12.697.811	46.651.723	14.557	-	188.748
	1.566	-	779.474	11.788.716	8.123	-	633.073
	-	-	266.570	20.806.061	-	-	1.449.475
	-	-	84.903	1.681.632	20.728	-	714.374
	7.187.433	-	776.991	15.000.323	23.648	-	-
	-	-	2.301	42	-	-	433.799
	385	-	55.768	579.931	-	-	713.995
	-	-	109.364	1.373.243	2.763	-	180.225
	172	-	412.096	3.215.026	-	-	4.983
	-	-	30.949	4.692	82	-	-
	-	-	-	5.953	-	-	-
	2.086.629	844.201	43.512.475	11.642.210	163.411	-	12.848.859
	-	-	348.982	41.783.911	8.934	57.692.079	11.705.697
	9.282.778	844.202	63.466.313	291.319.510	279.904	57.692.079	34.893.114



2.4.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah Bank Secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No.	Keterangan	31-Dec-18					
		Area					
		Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total
1	Tagihan	98.155.349	43.655.370	117.396.466	404.107.153	51.798.417	715.112.755
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (<i>impaired</i>)	-	-	-	-	-	-
	a. Belum jatuh tempo	445.040	110.308	841.695	1.035.228	192.008	2.624.279
	b. Telah jatuh tempo	1.661.201	573.301	2.827.508	1.268.148	-	6.330.158
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	999.044	30.907	1.111.630	3.575.653	192.900	5.910.133
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	1.977.239	1.287.663	4.564.464	1.127.836	149.392	9.106.594
5	Tagihan yang dihapus buku	2.160.119	724.520	2.582.245	1.972.159	8.325	7.447.368

keterangan:

Grup A : Wilayah Medan, Wilayah Padang, Wilayah Palembang, Wilayah Banjarmasin.

Grup B : Wilayah Makassar, Wilayah Denpasar, Wilayah Manado, Wilayah Papua.

Grup C : Wilayah Bandung, Wilayah Semarang, Wilayah Surabaya, Wilayah Jogjakarta, Wilayah Malang

Grup D : Wilayah Jakarta Senayan, Wilayah Jakarta Kota, Wilayah Jakarta BSD, Wilayah Jakarta Kemayoran.

Grup E : Wilayah Kantor Cabang Luar Negeri

No.	Keterangan	31-Dec-17					
		Area					
		Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total
1	Tagihan	81.238.049	37.815.260	101.591.686	348.572.230	42.320.424	611.537.649
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (<i>impaired</i>)						
	a. Belum jatuh tempo	121.570	51.567	90.491	1.021.168	190.389	1.475.185
	b. Telah jatuh tempo	1.958.180	517.096	3.710.568	2.040.349	302.065	8.528.258
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	1.281.626	142.557	951.330	1.247.641	102.361	3.725.514
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	2.325.870	1.053.740	3.894.534	3.169.422	93.875	10.537.441
5	Tagihan yang dihapus buku	1.336.207	558.072	2.813.489	4.023.273	-	8.731.041



2.4.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No.	Keterangan	31-Dec-18					
		Area					
		Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total
1	Tagihan	105.029.308	45.708.191	128.029.762	419.889.251	51.799.409	750.455.921
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (<i>impaired</i>)	-	-	-	-	-	-
	a. Belum jatuh tempo	6.187.265	2.843.171	9.160.563	25.730.920	192.008	44.113.927
	b. Telah jatuh tempo	1.663.693	574.616	2.833.934	1.306.795	-	6.379.038
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	999.044	54.228	1.116.557	3.710.876	192.900	6.073.605
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	2.153.389	1.380.937	4.765.214	1.291.727	149.392	9.740.659
5	Tagihan yang dihapus buku	2.430.270	803.736	2.873.707	3.019.615	8.325	9.135.653

keterangan:

Grup A : Wilayah Medan, Wilayah Padang, Wilayah Palembang, Wilayah Banjarmasin.

Grup B : Wilayah Makassar, Wilayah Denpasar, Wilayah Manado, Wilayah Papua.

Grup C : Wilayah Bandung, Wilayah Semarang, Wilayah Surabaya, Wilayah Jogjakarta, Wilayah Malang

Grup D : Wilayah Jakarta Senayan, Wilayah Jakarta Kota, Wilayah Jakarta BSD, Wilayah Jakarta Kemayoran.

Grup E : Wilayah Kantor Cabang Luar Negeri

No.	Keterangan	31-Dec-17					
		Area					
		Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total
1	Tagihan	86.917.098	39.516.037	109.589.786	370.041.277	42.329.543	648.393.741
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (<i>impaired</i>)						
	a. Belum jatuh tempo	5.644.924	1.750.455	7.932.244	21.016.651	190.389	36.534.663
	b. Telah jatuh tempo	1.964.394	518.985	3.715.525	2.073.692	302.065	8.574.661
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	1.281.626	142.557	952.371	1.402.579	102.361	3.881.494
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	2.410.754	1.093.452	3.987.158	3.380.949	93.875	10.966.188
5	Tagihan yang dihapus buku	1.497.515	597.880	2.941.584	5.072.750	-	10.109.729



2.5.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi
Bank Secara Individu

(dalam juta Rupiah)

31-Des-2018							
No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individu	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	46.696.455	2.837	54.564	110.655	421.847	266.701
2	Perikanan	1.562.693	-	7.425	2.159	41.568	89.310
3	Pertambangan dan Penggalian	15.400.192	386.987	934.133	1.470.616	123.183	1.066.573
4	Industri Pengolahan	99.031.758	611.292	2.459.450	2.537.988	2.336.860	1.393.207
5	Listrik, Gas dan Air	23.245.121	-	-	7.181	109.591	357
6	Konstruksi	32.799.978	208.685	106.224	70.861	376.006	184.013
7	Perdagangan Besar dan Eceran	78.788.575	594.660	1.169.106	548.663	2.079.214	1.973.421
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	14.545.319	20.293	156.292	48.079	318.368	264.690
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	30.454.446	209.023	22.281	151.249	327.620	120.634
10	Perantara Keuangan	81.568.922	10	12.908	58.786	211.109	64.195
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	36.371.174	5.653	260.936	288.364	705.259	258.865
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	63.120.974	-	-	-	43.501	223
13	Jasa Pendidikan	1.089.572	-	-	-	15.626	4.688
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.976.778	5.002	5.526	-	34.389	8.482
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	6.527.606	-	37.044	644	113.653	106.151
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	41.908	-	433	-	1.397	271
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	2.982	-	-	-	61	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	8.145
19	Bukan Lapangan Usaha	72.614.129	577.290	987.249	121.529	1.438.117	1.637.441
20	Lainnya	109.274.173	2.547	116.586	493.359	409.222	-
Total		715.112.755	2.624.279	6.330.157	5.910.133	9.106.591	7.447.367



31-Des-2017							
No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individu	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapusbuku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	44.282.116	1.594	153.479	706.214	501.586	91.443
2	Perikanan	1.392.086	128	73.802	37.848	61.432	7.785
3	Pertambangan dan Penggalian	9.184.363	-	1.035.737	270.568	64.163	540.433
4	Industri Pengolahan	84.574.551	446.925	2.762.130	1.040.404	2.577.216	2.469.355
5	Listrik, Gas dan Air	25.923.685	-	220	6.906	143.545	133.396
6	Konstruksi	25.747.259	182.537	195.566	5.609	323.169	265.965
7	Perdagangan Besar dan Eceran	59.995.590	216.240	1.500.452	96.114	2.068.455	1.941.038
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	12.853.353	21.901	100.615	256.584	242.802	44.910
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	25.077.058	2.463	147.734	123.399	255.033	1.447.253
10	Perantara Keuangan	96.919.335	150.681	56.261	266.286	141.537	47.885
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	14.235.111	81.014	439.528	618.261	988.368	74.589
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	85.795.058	-	-	-	44.039	-
13	Jasa Pendidikan	615.487	-	-	-	15.085	1.066
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.497.880	-	10.480	217	38.791	39.181
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	3.738.904	2.784	69.215	10.998	87.673	71.206
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	36.127	-	238	-	1.475	928
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	5.950	-	-	-	164	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	356
19	Bukan Lapangan Usaha	74.970.147	368.918	1.393.986	185.170	1.998.880	-
20	Lainnya	44.693.589	-	588.815	100.936	984.028	1.554.252
Total		611.537.649	1.475.185	8.528.258	3.725.514	10.537.441	8.731.041



2.5.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

31-Des-2018							
No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individu	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	47.316.011	620.967	57.175	110.655	435.720	312.888
2	Perikanan	1.592.195	29.391	7.535	2.159	42.133	91.298
3	Pertambangan dan Penggalian	15.671.991	658.436	934.483	1.470.616	129.625	1.070.438
4	Industri Pengolahan	100.733.754	2.312.636	2.461.167	2.543.603	2.374.231	1.429.520
5	Listrik, Gas dan Air	24.531.877	1.286.757	-	8.651	122.419	3.709
6	Konstruksi	33.840.516	1.858.487	114.817	70.861	410.671	241.464
7	Perdagangan Besar dan Eceran	81.754.165	3.138.845	1.188.893	576.958	2.252.027	2.087.236
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	15.117.014	591.872	156.408	48.079	325.127	268.172
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	31.313.596	1.250.970	24.357	210.932	346.864	126.484
10	Perantara Keuangan	76.782.392	1.604.984	15.119	98.067	234.847	271.727
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	37.357.749	909.237	264.226	294.069	741.615	285.236
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	63.120.974	-	-	-	43.501	223
13	Jasa Pendidikan	1.904.588	814.995	21	710	23.121	5.609
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.546.220	756.004	5.536	8.836	40.795	10.519
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	6.706.961	172.206	37.417	644	116.502	112.913
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	48.552	6.638	439	-	1.454	283
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	2.982	-	-	-	61	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	11.760
19	Bukan Lapangan Usaha	86.977.640	14.956.669	994.563	135.406	1.677.277	2.371.494
20	Lainnya	123.136.744	13.144.833	116.882	493.359	422.669	434.680
Total		750.455.921	44.113.927	6.379.038	6.073.605	9.740.659	9.135.653



31-Des-2017							
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individu	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	44.611.333	293.334	154.927	706.214	510.482	135.809
2	Perikanan	1.421.905	29.862	73.886	37.848	63.349	9.189
3	Pertambangan dan Penggalian	9.475.562	265.121	1.035.737	270.569	66.145	632.273
4	Industri Pengolahan	85.775.546	1.497.570	2.766.046	1.040.404	2.596.973	2.626.526
5	Listrik, Gas dan Air	26.790.595	841.251	220	7.137	151.782	134.007
6	Konstruksi	26.992.830	1.367.700	207.742	5.609	348.588	304.774
7	Perdagangan Besar dan Eceran	62.474.870	2.657.104	1.509.458	120.952	2.179.356	2.104.991
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	13.045.660	211.016	101.242	256.584	245.107	46.926
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	25.779.334	648.675	149.003	134.987	262.317	1.452.243
10	Perantara Keuangan	99.631.805	1.705.871	57.669	365.477	163.090	244.174
11	Real estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	15.082.423	814.518	445.077	622.364	1.013.555	88.288
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	85.796.533	-	-	-	44.039	-
13	Jasa Pendidikan	1.049.685	434.197	-	1.041	17.844	1.302
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.235.182	714.207	10.480	4.545	43.791	39.291
15	Jasa Masyarakat, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	3.923.169	184.043	69.341	10.998	90.304	78.188
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	41.164	5.030	245	-	1.565	940
17	Badan Internasional badan Ekstra Internasional Lainnya	5.950	-	-	-	164	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	4.178
19	Bukan Lapangan Usaha	87.971.667	13.361.606	1.402.818	195.830	2.173.565	213.031
20	Lainnya	56.288.530	11.503.559	590.769	100.936	994.173	1.993.599
Total		648.393.741	36.534.664	8.574.660	3.881.493	10.966.189	10.109.729



2.6.a Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Bank Secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No	Keterangan	31-Des-18		31-Des-17	
		CKPN Individu	CKPN Kolektif	CKPN Individu	CKPN Kolektif
1	Saldo awal CKPN	4.419.430	10.299.301	8.164.248	8.418.756
	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (<i>Net</i>)	2.782.977	4.576.268	(684.686)	7.677.958
2	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	2.675.373	4.123.217	(1.017.865)	7.521.029
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	107.604	453.050	333.179	156.929
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(1.353.692)	(6.093.701)	(3.361.222)	(5.368.832)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	61.418	324.726	8.942	(196.228)
	Saldo akhir CKPN	5.910.133	9.106.594	4.127.282	10.531.654

2.6.b Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No	Keterangan	31-Des-18		31-Des-17	
		CKPN Individu	CKPN Kolektif	CKPN Individu	CKPN Kolektif
1	Saldo awal CKPN	4.419.429	10.898.677	8.164.248	8.935.654
	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (<i>Net</i>)	2.788.725	5.255.832	(685.831)	8.367.209
2	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	2.681.121	4.707.292	(1.019.010)	8.145.346
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	107.604	548.540	333.179	221.863
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(1.353.692)	(6.480.881)	(3.361.222)	(6.034.722)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	55.670	280.300	10.087	(138.637)
	Saldo akhir CKPN	5.910.132	9.953.928	4.127.282	11.129.504

PENGUKURAN RISIKO KREDIT DENGAN PENDEKATAN STANDAR

PENGGUNAAN PERINGKAT DARI LEMBAGA PEMERINGKAT EKSTERNAL

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016, BNI menggunakan Peringkat Eksternal dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yaitu:

1. Peringkat suatu Bank hanya berlaku untuk Bank tersebut, sehingga walaupun berada dalam satu kelompok usaha peringkat suatu perusahaan tidak dapat digunakan untuk menetapkan bobot risiko dari perusahaan lain.
2. Peringkat domestik (Pefindo, Fitch Indonesia dan ICRA Indonesia) hanya digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam mata uang Rupiah, sedangkan peringkat internasional (Moody's, S&P dan Fitch) digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam valuta asing.
3. Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentuk surat berharga didasarkan pada peringkat dari surat berharga dimaksud (*issue rating*). Dalam hal surat berharga tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko didasarkan pada bobot risiko dari tagihan tanpa peringkat. Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentuk selain surat berharga, didasarkan pada peringkat debitor (*issue rating*). Dalam hal tagihan berbentuk selain surat berharga yang tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko didasarkan pada bobot risiko dari tagihan tanpa peringkat.
4. Peringkat jangka pendek digunakan untuk penetapan bobot risiko dari surat berharga yang memiliki jangka waktu pendek dan diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan Tagihan Kepada Bank atau Tagihan Kepada Korporasi. Dalam hal tagihan jangka pendek tidak mempunyai peringkat jangka pendek, maka penetapan bobot risiko menggunakan peringkat jangka panjang.
5. Apabila suatu eksposur mempunyai lebih dari satu peringkat yang *eligible*, maka yang digunakan adalah peringkat yang memberikan bobot risiko terendah kedua. Dalam hal ini apabila hanya terdapat dua peringkat, maka yang digunakan adalah peringkat yang terendah.

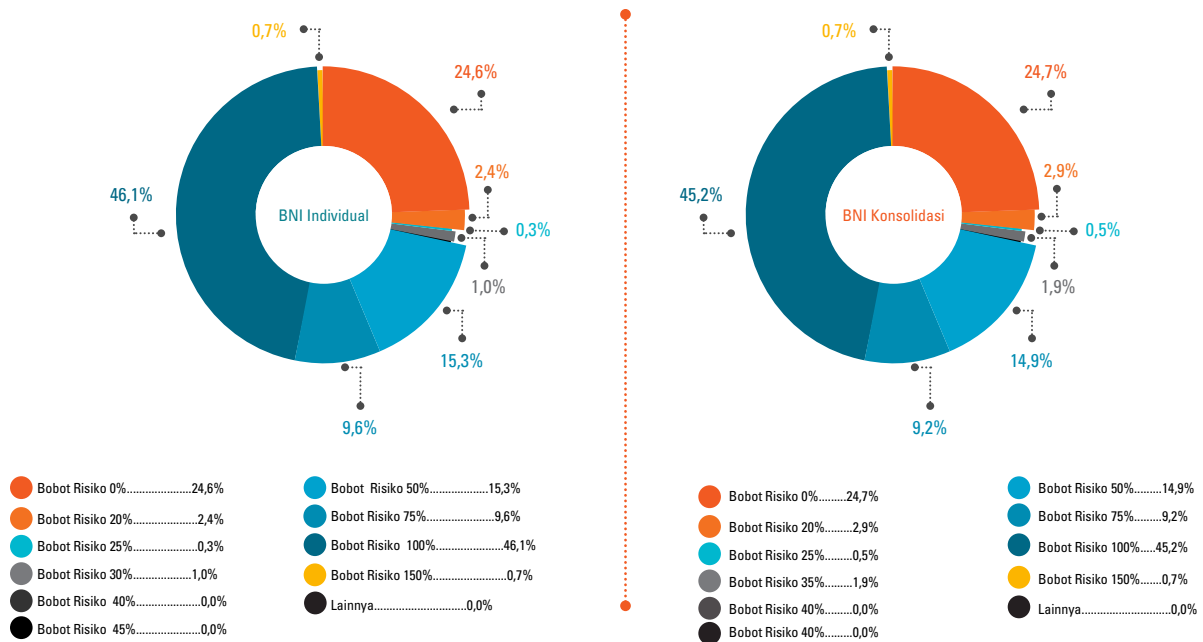


KATEGORISASI PORTOFOLIO YANG MENGGUNAKAN PERINGKAT

Penentuan bobot risiko berdasarkan peringkat eksposur sebagaimana tersebut di atas hanya diberlakukan untuk kategori portofolio sebagai berikut:

1. Tagihan kepada Pemerintah Negara lain.
2. Tagihan kepada Entitas Sektor Publik.
3. Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional.
4. Tagihan kepada Bank (Jangka Panjang dan Jangka Pendek).
5. Tagihan kepada Korporasi (Jangka Panjang dan Jangka Pendek).

Komposisi per eksposur untuk risiko kredit per Bobot Risiko 31 Desember 2018 (%) berdasar peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat.



LEMBAGA PEMERINGKAT YANG DIGUNAKAN

Daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui adalah sebagai berikut:

1. Fitch Ratings
2. Moody's Investor Service
3. Standard and Poor's
4. PT Fitch Ratings Indonesia
5. PT ICRA Indonesia
6. PT Pemeringkat Efek Indonesia



3.1.a Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat Bank Secara Individu

31-Des-2018								
No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang					
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	
		PT. ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA		idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	
		1	Tagihan kepada Pemerintah		7.444.866	1.787.433	699.454	155.667.273
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		1.583.783	25.383	4.232	812.223	484.784	
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank		9.862.518	3.064.041	1.065.843	970.432	184.853	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi		4.084	108.881	57.885	366.831	3.530.117	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		74.050	-	-	61.900	122.642	
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah		-	-	-	-	-	
Total			18.969.301	4.985.738	1.827.414	157.878.659	5.322.018	



(dalam juta Rupiah)

Tagihan Bersih								
		Peringkat Jangka Pendek					Tanpa Peringkat	Total
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
-	-	-	-	-	-	-	-	166.598.648
-	-	-	-	-	-	-	95.532.327	98.442.732
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	32.059.374	47.207.061
-	-	-	-	-	-	-	12.371.631	12.371.631
-	-	-	-	-	-	-	11.832.156	11.832.156
-	-	-	-	-	-	-	555.856	555.856
-	-	-	-	-	-	-	78.406.749	78.406.749
621.750	-	-	-	-	-	-	325.872.516	330.562.064
252	-	-	-	-	-	-	3.728.122	3.986.966
-	-	-	-	-	-	-	46.930.109	46.930.109
-	-	-	-	-	-	-	-	-
622.002	-	-	-	-	-	-	607.288.840	796.893.972



Bank Secara Individu

31-Des-2017

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang						
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-		
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-		
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3		
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)		
		PT. ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-		
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA		idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-		
		1	Tagihan kepada Pemerintah		52.208.665	2.218.316	653.182	88.687.817	44.517
		2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		21.696.657	5.064.528	8.481.352	373.173	625.447
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-		
4	Tagihan kepada Bank		9.702.304	3.634.931	2.077.900	2.478.600	1.520.698		
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-		
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-		
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-	-		
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-		
9	Tagihan kepada Korporasi		-	2.572.222	531.230	2.382.065	3.262.023		
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		73.666	-	-	289	48.115		
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-		
12	Eksposur di Unit Syariah		-	-	-	-	-		
Total			83.681.292	13.489.997	11.743.664	93.921.944	5.500.800		



(dalam juta Rupiah)

Tagihan Bersih								
			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
-	-	-	-	-	-	-	-	143.812.495
-	-	-	-	-	-	-	44.084.616	80.325.773
-	-	-	-	-	-	-	3.025	3.025
-	-	-	-	-	-	-	33.179.785	52.594.218
-	-	-	-	-	-	-	11.822.421	11.822.421
-	-	-	-	-	-	-	9.282.778	9.282.778
-	-	-	-	-	-	-	844.202	844.202
-	-	-	-	-	-	-	62.903.387	62.903.387
898.861	-	-	-	-	-	-	281.673.108	291.319.514
251	-	-	-	-	-	-	157.583	279.904
-	-	-	-	-	-	-	55.874.743	55.874.743
-	-	-	-	-	-	-	-	-
899.112	-	-	-	-	-	-	499.825.651	709.062.460

3.1.b Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

31-Des-2018							
No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang				
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT. ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA		idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
		1	Tagihan kepada Pemerintah		7.444.867	1.787.433	699.454
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		1.583.783	25.383	4.232	812.223	484.784
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank		9.862.517	3.064.041	1.065.843	970.432	184.853
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi		4.084	108.881	57.885	366.831	3.530.117
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		74.050	-	-	61.900	122.642
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Syariah		-	-	-	-	-
Total			18.969.301	4.985.738	1.827.414	157.878.659	5.309.621



(dalam juta Rupiah)

Tagihan Bersih								
			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3		
	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	-	-	-	-	-	-	-	166.586.252
	-	-	-	-	-	-	95.477.892	98.388.296
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	26.143.598	41.291.284
	-	-	-	-	-	-	12.371.631	12.371.631
	-	-	-	-	-	-	11.832.156	11.832.156
	-	-	-	-	-	-	555.856	555.856
	-	-	-	-	-	-	79.532.951	79.532.951
	621.750	-	-	-	-	-	324.522.178	329.211.726
	252	-	-	-	-	-	3.728.122	3.986.966
	-	-	-	-	-	-	48.229.075	48.229.075
	-	-	-	-	-	-	41.163.596	41.163.596
	622.002	-	-	-	-	-	643.557.055	833.149.789



31-Des-2017

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang				
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT. ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA		idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
		1	Tagihan kepada Pemerintah		52.208.665	2.218.316	653.182
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		21.696.657	5.064.528	8.481.352	373.173	625.447
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank		9.702.304	3.634.931	2.077.900	2.478.600	1.520.698
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi		-	2.572.222	531.230	2.382.065	3.262.028
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		73.666	-	-	289	48.115
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Syariah		568.443	-	93.020	-	-
Total			84.249.735	13.489.997	11.836.684	93.921.944	5.500.805



Tagihan Bersih								
			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3		
	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	-	-	-	-	-	-	-	143.812.495
	-	-	-	-	-	-	44.084.618	80.325.775
	-	-	-	-	-	-	3.026	3.026
	-	-	-	-	-	-	33.442.746	52.857.179
	-	-	-	-	-	-	11.822.420	11.822.420
	-	-	-	-	-	-	9.282.778	9.282.778
	-	-	-	-	-	-	844.201	844.201
	-	-	-	-	-	-	63.466.314	63.466.314
	898.861	-	-	-	-	-	281.673.102	291.319.508
	251	-	-	-	-	-	157.583	279.904
	-	-	-	-	-	-	57.692.079	57.692.079
	-	-	-	-	-	-	34.231.651	34.893.114
	899.112	-	-	-	-	-	536.700.518	746.598.793



RISIKO KREDIT PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)

COUNTERPARTY CREDIT RISK

Counterparty credit risk merupakan bagian dari risiko kredit. Counterparty credit risk merupakan risiko akibat kegagalan pihak lawan sebelum penyelesaian akhir dari arus kas pada transaksi tersebut baik dipengaruhi oleh kondisi usaha maupun karena faktor pergerakan nilai wajar atau nilai pasar, misalnya dalam transaksi *derivative*, *repo* maupun *reverse repo*.

Jenis instrumen mitigasi risiko dari counterparty credit risk yang diterima oleh bank antara lain:

1. Uang tunai yang disimpan oleh bank
2. Giro, tabungan, atau deposito yang diterbitkan oleh bank
3. Surat berharga pemerintah Indonesia dan Surat Berharga Syariah Negara

Masing-masing counterparty memiliki limit yang berbeda-beda, dan untuk menentukan besarnya limit dari masing-masing counterparty digunakan aplikasi Counterparty Limit Application Package (CLAP). Asesmen terhadap limit counterparty dilakukan oleh Divisi Risiko Kredit Korporasi dan di-review secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan yang dipengaruhi oleh dinamika bisnis dan tingkat risiko masing-masing counterparty.

Untuk perhitungan kecukupan modal dengan mempertimbangkan hasil perhitungan ATMR pendekatan Standar, maka telah disiapkan perhitungan tambahan ATMR risiko kredit dari Counterparty Risk dengan memasukkan komponen CVA (Credit Valuation Adjustment).

1. TRANSAKSI DERIVATIF

Transaksi derivatif yang dilakukan oleh Bank umumnya adalah transaksi *Forward*, *Cross Currency Swap (CCS)*, dan *Interest Rate Swap (IRS)*. Nasabah Bank yang akan melakukan transaksi derivatif harus memiliki limit transaksi yang ditentukan oleh Unit Bisnis dan Unit Risiko. Dalam kebijakan transaksi derivatif juga ditentukan besarnya marginal deposit minimum yang harus disetor oleh nasabah sesuai dengan jenis dan risiko yang melekat dalam transaksi derivatif. Pengungkapan risiko kredit pihak lawan transaksi derivatif dimuat dalam Tabel 3.2.a Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Derivatif.

3.2.a Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Derivatif

(dalam juta Rupiah)

No	Variabel yang Mendasari	31-Dec-18								
		Notional Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	
		≤1 tahun	>1 thn - ≤5 thn	>5 tahun						
BANK SECARA INDIVIDUAL										
1	Suku Bunga	19.996.408	16.991	-	156.187	-	240.131	-	240.131	
2	Nilai Tukar	8.879.650	16.788.650	-	424.098	-	624.912	-	624.912	
3	Lainnya	558.306	329.213	-	24.963	-	47.006	-	47.006	
TOTAL		29.434.364	17.134.854	-	605.248	-	912.049	-	912.049	
BANK SECARA KONSOLIDASI										
1	Suku Bunga	19.996.408	16.991	-	156.187	-	240.131	-	240.131	
2	Nilai Tukar	8.879.650	16.788.650	-	424.098	-	624.912	-	624.912	
3	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Lainnya	558.306	329.213	-	24.963	-	47.006	-	47.006	
TOTAL		29.434.364	17.134.854	-	605.248	-	912.049	-	912.049	



No	Variabel yang Mendasari	31-Dec-17							
		Notional Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
		≤1 tahun	>1 thn - ≤5 thn	>5 tahun					
BANK SECARA INDIVIDUAL									
1	Suku Bunga	8.615.363	12.753.450	-	77.680	-	141.447	-	141.447
2	Nilai Tukar	18.576.137	1.026	-	116.098	-	301.909	-	301.909
3	Lainnya	389.849	359.099	-	23.092	-	44.945	-	44.945
	TOTAL	27.581.349	13.113.575	-	216.870	-	488.301	-	488.301
BANK SECARA KONSOLIDASI									
1	Suku Bunga	8.615.363	12.753.450	-	77.680	-	141.447	-	141.447
2	Nilai Tukar	18.576.137	1.026	-	116.098	-	301.909	-	301.909
3	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lainnya	389.849	359.099	-	23.092	-	44.945	-	44.945
	TOTAL	27.581.349	13.113.575	-	216.870	-	488.301	-	488.301

2. Transaksi Repo dan Reverse Repo

BNI hanya melakukan transaksi Repo maupun Reverse Repo dengan underlying aset Surat Berharga Pemerintah Republik Indonesia (Surat Utang Negara).

3.2.b.1 Transaksi Repo

Bank Secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Dec-18				31-Dec-17			
		Nilai Wajar SB	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SB	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	20.759.642	-	21.063.665	-	5.279.319	5.304.942	3.013.341	74.736
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	20.759.642	-	21.063.665	-	5.279.319	5.304.942	3.013.341	74.736



3.2.b.2 Transaksi Repo

Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Des-18				31-Des-17			
		Nilai Wajar SB	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SB	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	20.759.642	-	21.063.665	-	5.279.319	5.304.942	3.013.341	74.736
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		20.759.642	-	21.063.665	-	5.279.319	5.304.942	3.013.341	74.736

3.2.c1 Transaksi Reverse Repo

Bank Secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2018			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	387.845	387.845	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
Total		387.845	387.845	-	-



3.2.c2 Transaksi *Reverse Repo*

Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-18			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-17			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	387.845	387.845	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
Total		387.845	387.845	-	-

MITIGASI RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

PENERAPAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT DENGAN PENDEKATAN STANDAR

Jenis agunan utama yang diterima dalam rangka mitigasi risiko kredit adalah objek yang dibiayai oleh Bank. Sedangkan sebagai pelengkap, Bank dapat menerima agunan tambahan. Jenis agunan utama dan tambahan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Agunan, dapat berupa aset fisik (tanah, bangunan, mesin, peralatan, dsb.) maupun aset keuangan (*cash collateral*, marginal deposit, emas, piutang, surat utang maupun surat berharga lainnya). Dalam teknik mitigasi risiko kredit, aset fisik tidak diperhitungkan sebagai teknik mitigasi risiko kredit.
2. Garansi, yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia, Bank koresponden, maupun perusahaan Asuransi. Dalam teknik mitigasi risiko kredit, garansi yang diperhitungkan hanya garansi yang diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan kategori Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia, Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain, Tagihan Kepada Bank serta lembaga penjaminan/asuransi dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan garansi dan penerbit garansi.
3. Asuransi Kredit, yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan polis asuransi, penerbit asuransi dan kategori portofolio penerima asuransi.

BNI mengatur kebijakan, prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan berdasarkan jenis eksposur dan skim pembiayaan yang diberikan. Penilaian kecukupan agunan yang diterima telah memperhitungkan adanya *cash equivalent value*. Untuk eksposur kredit (*loan*), penilaian agunan harus dilakukan secara berkala minimum setiap 24 bulan oleh penilai independen, atau dilakukan oleh staf penilai internal yang independen dalam proses pemberian kredit.



Di samping teknik mitigasi berupa agunan, BNI juga menggunakan garansi/jaminan serta asuransi kredit. Analisis terhadap pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi merupakan bagian dari analisis kelayakan kredit dan mitigasi risiko kredit. Pihak pemberi jaminan tersebut antara lain: (1) Jaminan Pemerintah Republik Indonesia kepada BUMN bidang kelistrikan untuk pembiayaan berupa KMK talangan subsidi dan KI sindikasi, (2) Penjaminan oleh Perusahaan Asuransi Kredit yang merupakan Badan Usaha Milik Negara terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh BNI.

4.1.a Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

Bank Secara Individu

No	Kategori Portofolio						
		0%	20%	25%	35%	40%	
A	EKSPOSUR NERACA						
1	Tagihan kepada Pemerintah	164.648.163	699.454	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	1.609.166	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	14.840.780	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	1.826.873	2.347.676	8.197.082	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	112.965	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	13.681.005	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
Total Eksposur Neraca		178.329.168	19.089.238	2.347.676	8.197.082	-	
B	EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTIJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF						
1	Tagihan kepada Pemerintah	414.466	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	16	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
Total Eksposur TRA		414.466	16	-	-	-	
C	EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)						
1	Tagihan kepada Pemerintah	12.397	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	21.063.665	72.208	-	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		21.076.062	72.208	-	-	-	



Hingga saat ini teknik mitigasi risiko kredit dengan menggunakan agunan masih cukup dominan dan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibanding garansi/penjaminan dari Pemerintah maupun asuransi kredit dari Perusahaan asuransi.

Pengungkapan tagihan bersih Bank secara individu dan konsolidasi berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit dimuat dalam Tabel 4.1.a dan b.

(dalam juta Rupiah)

31 Desember 2018

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	ATMR	Beban Modal
	-	660.465	-	163.703	-	-	633.826	50.706
	-	81.964.316	-	484.784	-	-	41.788.775	3.343.102
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	17.861.520	-	184.853	-	-	12.083.768	966.701
	-	-	-	-	-	-	3.821.272	305.702
	-	-	-	11.832.156	-	-	11.832.156	946.572
	-	555.856	-	-	-	-	277.928	22.234
	-	-	78.152.952	-	-	-	58.614.714	4.689.177
	-	57.885	-	310.847.069	621.750	-	311.831.229	24.946.498
	-	-	-	150.002	3.836.964	-	5.905.448	472.436
	-	-	-	31.672.568	1.576.289	-	34.037.001	2.722.960
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	101.100.041	78.152.952	355.335.135	6.035.003	-	480.826.118	38.466.089
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	14.330.032	-	-	-	-	7.165.016	573.201
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	8.404.115	-	-	-	-	4.202.061	336.165
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	253.797	-	-	-	190.348	15.228
	-	-	-	18.853.000	-	-	18.853.000	1.508.240
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	22.734.146	253.797	18.853.000	-	-	30.410.424	2.432.834
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	95.201	-	-	-	-	47.600	3.808
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	576.601	-	-	-	-	302.742	24.219
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	83.416	-	-	83.416	6.673
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	671.802	-	83.416	-	-	433.759	34.701



31-Dec-2017

No	Kategori Portofolio	Kategori Portofolio				
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit				
		0%	20%	25%	35%	40%
A	EKSPOSUR NERACA					
1	Tagihan kepada Pemerintah	141.888.754	653.182	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	41.737.900	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	125	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	309.621	15.184.148	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	11.822.420	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.424.365	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	190.176	2.572.222	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	41.750	-	-	-	
11	Aset Lainnya	12.481.313	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	200.074.004	18.409.552	-	11.822.420	
B	EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTIJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF					
1	Tagihan kepada Pemerintah	440.881	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	255.061	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	253	44.078	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA	441.134	299.139	-	-	
C	EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)					
1	Tagihan kepada Pemerintah	387.845	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	845.612	633.983	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	1.233.457	633.983	-	-	



	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	ATMR	Beban Modal
-	-	441.834	-	-	-	-	351.553	28.124
-	-	-	-	26.538.851	-	-	26.538.851	2.123.108
-	-	251	-	126	-	-	252	20
-	-	25.566.087	-	673.429	-	-	16.493.302	1.319.464
-	-	-	-	-	-	-	4.137.847	331.028
-	-	-	-	9.282.778	-	-	9.282.778	742.622
-	-	844.201	-	-	-	-	422.101	33.768
-	-	-	48.982.234	10.273.095	-	-	47.009.771	3.760.782
-	-	-	-	269.235.215	695.349	-	270.792.683	21.663.415
-	-	-	-	98.202	139.952	-	308.130	24.650
-	-	-	-	38.899.569	4.493.861	-	45.640.361	3.651.229
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	26.852.373	48.982.234	355.001.265	5.329.162	-	420.977.629	33.678.210
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12.006.818	-	-	-	-	6.003.409	480.273
-	-	2.524	-	-	-	-	1.262	101
-	-	9.004.741	-	-	-	-	4.553.383	364.271
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	223.693	-	-	-	167.770	13.422
-	-	-	-	18.542.882	-	-	18.551.698	1.484.136
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	21.014.083	223.693	18.542.882	-	-	29.277.522	2.342.203
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	42.205	-	-	-	-	21.103	1.688
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	121.536	-	-	248.333	19.867
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	39.334	-	-	39.334	3.147
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	42.205	-	160.870	-	-	308.770	24.702



4.1.b Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No	Kategori Portofolio	31-Dec-2018					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	
A	EKSPOSUR NERACA						
1	Tagihan kepada Pemerintah	175.556.629	699.454	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	2.143.727	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	15.217.898	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	3.837.390	4.270.350	15.980.089	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	119.292	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	30.513	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	2.461.746	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	272.824	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	13.681.005	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
Total Eksposur Neraca		189.237.634	24.782.844	4.270.350	15.980.089	-	
B	EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTIJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF						
1	Tagihan kepada Pemerintah	414.466	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	16	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
Total Eksposur TRA		414.466	16	-	-	-	
C	EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)						
1	Tagihan kepada Pemerintah	128.648	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	21.063.665	72.208	-	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		21.192.313	72.208	-	-	-	



(dalam juta Rupiah)

		45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	ATMR	Beban Modal
		-	660.465	-	163.703	-		633.826	50.706
		-	84.448.019	-	484.784	-		43.137.539	3.451.003
		-	-	-	-	-		-	-
		-	17.866.520	-	184.853	-		12.161.693	972.935
		-	-	-	-	-		7.428.097	594.248
		-	-	-	11.832.156	-		11.856.014	948.481
		-	555.856	-	-	-		284.031	22.722
		-	-	78.152.952	-	-		59.107.063	4.728.565
		-	57.885	-	322.165.396	621.750		323.181.528	25.854.522
		-	-	-	175.139	3.836.964		5.930.585	474.447
		-	-	-	31.672.568	1.576.289		34.037.002	2.722.960
		-	-	-	-	-		-	-
		-	103.588.745	78.152.952	366.678.599	6.035.003	-	497.757.377	39.820.589
		-	-	-	-	-		-	-
		-	14.332.848	-	-	-		7.166.424	573.314
		-	-	-	-	-		-	-
		-	8.404.115	-	-	-		4.202.061	336.165
		-	-	-	-	-		-	-
		-	-	-	-	-		-	-
		-	-	-	-	-		-	-
		-	-	268.928	-	-		201.696	16.136
		-	-	-	18.871.172	-		18.871.172	1.509.694
		-	-	-	-	-		-	-
		-	-	-	-	-		-	-
		-	22.736.963	268.928	18.871.172	-	-	30.441.353	2.435.309
		-	-	-	-	-		-	-
		-	95.201	-	-	-		47.601	3.808
		-	-	-	-	-		-	-
		-	576.601	-	-	-		302.742	24.219
		-	-	-	-	-		-	-
		-	-	-	83.416	-		83.416	6.673
		-	-	-	-	-		-	-
		-	671.802	-	83.416	-	-	433.759	34.700

No	Kategori Portofolio	31-Dec-2017					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	
A	EKSPOSUR NERACA						
1	Tagihan kepada Pemerintah	141.888.754	653.182	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	41.737.900	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	125	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	441.100	15.184.148	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	11.822.420	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.565.097	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	190.176	2.572.222	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	41.750	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	12.102.902	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	18.797.037	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	218.764.841	18.409.552	-	11.822.420	-	
B	EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTIJENSI PADA TRANSAKSI REKUNING ADMINISTRATIF						
1	Tagihan kepada Pemerintah	440.881	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	255.061	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	253	44.078	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	4.685	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA	445.819	299.139	-	-	-	
C	EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)						
1	Tagihan kepada Pemerintah	387.845	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	845.612	633.983	-	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	130.664	-	-	-	-	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	1.364.121	633.983	-	-	-	



	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	ATMR	Beban Modal
	-	441.834	-	-	-		351.553	28.124
	-	-	-	26.538.851	-		26.538.851	2.123.108
	-	251	-	126	-		252	20
	-	25.566.087	-	804.908	-		16.624.781	1.329.983
	-	-	-	-	-		4.137.847	331.028
	-	-	-	9.282.778	-		9.282.778	742.622
	-	844.201	-	-	-		422.101	33.768
	-	-	48.982.234	10.695.290	-		47.431.966	3.794.557
	-	-	-	269.235.214	695.349		270.792.682	21.663.415
	-	-	-	98.202	139.952		308.130	24.650
	-	-	-	41.095.317	4.493.861		47.836.109	3.826.889
	-	-	-	15.896.412	-	-	15.896.412	1.271.713
	-	26.852.373	48.982.234	373.647.098	5.329.162	-	439.623.462	35.169.877
	-	-	-	-	-		-	-
	-	12.006.818	-	-	-		6.003.409	480.273
	-	2.524	-	-	-		1.262	101
	-	9.004.741	-	-	-		4.553.383	364.271
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	223.693	-	-		167.770	13.422
	-	-	-	18.542.882	-		18.551.698	1.484.136
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	64.315	-	-	64.315	5.145
	-	21.014.083	223.693	18.607.197	-	-	29.341.837	2.347.348
	-	-	-	-	-		-	-
	-	42.205	-	-	-		21.103	1.688
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	121.536	-		248.333	19.867
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	39.334	-		39.334	3.147
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	42.205	-	160.870	-	-	308.770	24.702

4.2.a Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Bank Secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2018					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
A	EKSPOSUR NERACA						
1	Tagihan kepada Pemerintah	166.171.785	-	-	-	-	166.171.785
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	84.058.266	19.268	-	-	-	84.038.998
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	32.887.152	2.261	-	-	-	32.884.891
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	12.371.631	1.675	-	-	-	12.369.956
6	Kredit Beragun Properti Komersial	11.832.156	76.374	-	-	-	11.755.782
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	555.856	19	-	-	-	555.837
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	78.152.952	10.000.802	-	-	-	68.152.150
9	Tagihan kepada Korporasi	311.639.669	1.054.311	-	-	-	310.585.358
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.986.966	49.439	-	-	-	3.937.527
11	Aset Lainnya	46.929.862	-	-	-	-	46.929.862
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	748.586.295	11.204.149	-	-	-	737.382.146
B	EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/ KONTIJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF						
1	Tagihan kepada Pemerintah	414.466	-	-	-	-	414.466
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	14.330.032	-	-	-	-	14.330.032
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	8.404.131	-	-	-	-	8.404.131
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	253.797	-	-	-	-	253.797
9	Tagihan kepada Korporasi	18.853.000	-	-	-	-	18.853.000
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	42.255.426	-	-	-	-	42.255.426
C	EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)						
1	Tagihan kepada Pemerintah	12.397	12.397	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	95.201	95.201	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	21.712.474	5.915.777	-	-	-	15.796.697
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	83.416	83.416	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	21.903.488	6.106.791	-	-	-	15.796.697



No	Kategori Portofolio	31-Dec-2017				
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan			Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	
A Eksposur Neraca						
1	Tagihan kepada Pemerintah	142.983.770	-	-	-	142.983.770
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	68.276.751	8.000	-	-	68.268.751
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	501	-	-	-	501
4	Tagihan kepada Bank	41.733.285	1.282	-	-	41.732.003
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	11.822.420	517	-	-	11.821.903
6	Kredit Beragun Properti Komersial	9.282.778	-	-	-	9.282.778
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	844.201	-	-	-	844.201
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	62.679.695	86.411	-	-	62.593.284
9	Tagihan kepada Korporasi	272.692.964	5.053.182	-	-	267.639.782
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	279.905	900.000	-	-	(620.095)
11	Aset Lainnya	55.874.743	1.421.353	-	-	54.453.390
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-
Total Eksposur Neraca		666.471.013	7.470.745	-	-	659.000.268
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan kepada Pemerintah	440.881	-	-	-	440.881
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	12.006.818	-	-	-	12.006.818
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	2.524	-	-	-	2.524
4	Tagihan kepada Bank	9.259.802	-	-	-	9.259.802
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	223.693	-	-	-	223.693
9	Tagihan kepada Korporasi	18.587.213	-	-	-	18.587.213
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		40.520.931	-	-	-	40.520.931
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan kepada Pemerintah	387.845	387.845	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	42.205	-	-	-	42.205
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1.601.132	160.499	-	-	1.440.633
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	39.334	-	-	-	39.334
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		2.070.516	548.344	-	-	1.522.172



4.2.b Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit
Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2018					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
A	EKSPOSUR NERACA						
1	Tagihan kepada Pemerintah	177.080.251	-	-	-	-	177.080.251
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	87.076.531	19.268	-	-	-	87.057.263
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	33.269.270	2.261	-	-	-	33.267.009
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	24.087.829	1.675	-	-	-	24.086.154
6	Kredit Beragun Properti Komersial	11.951.448	76.374	-	-	-	11.875.074
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	586.369	19	-	-	-	586.350
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	80.614.697	10.000.802	-	27.261.590	-	43.352.305
9	Tagihan kepada Korporasi	323.117.854	1.054.311	-	-	-	322.063.543
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4.012.102	49.439	-	-	-	3.962.663
11	Aset Lainnya	46.929.862	-	-	-	-	46.929.862
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	788.726.213	11.204.149	-	27.261.590	-	750.260.474
B	EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/ KONTIJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF						
1	Tagihan kepada Pemerintah	414.466	-	-	-	-	414.466
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	14.332.848	-	-	-	-	14.332.848
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	8.404.131	-	-	-	-	8.404.131
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	268.928	-	-	-	-	268.928
9	Tagihan kepada Korporasi	18.871.172	-	-	-	-	18.871.172
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	42.291.545	-	-	-	-	42.291.545
C	EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)						
1	Tagihan kepada Pemerintah	12.397	12.397	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	95.201	95.201	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	21.712.474	5.915.777	-	-	-	15.796.697
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	83.416	83.416	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	21.903.488	6.106.791	-	-	-	15.796.697



No	Kategori Portofolio	31-Dec-2017				
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan			Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan kepada Pemerintah	142.983.770	-	-	-	142.983.770
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	68.276.751	8.000	-	-	68.268.751
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	501	-	-	-	501
4	Tagihan kepada Bank	41.996.244	1.282	-	-	41.994.962
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	11.822.420	517	-	-	11.821.903
6	Kredit Beragun Properti Komersial	9.282.778	-	-	-	9.282.778
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	844.201	-	-	-	844.201
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	63.242.621	86.411	-	-	63.156.210
9	Tagihan kepada Korporasi	272.692.964	5.053.182	-	-	267.639.782
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	279.905	900.000	-	-	(620.095)
11	Aset Lainnya	57.692.079	1.421.353	-	-	56.270.726
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	34.693.450	-	-	-	34.693.450
	Total Eksposur Neraca	703.807.684	7.470.745	-	-	696.336.939
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan kepada Pemerintah	440.881	-	-	-	440.881
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	12.006.818	-	-	-	12.006.818
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	2.524	-	-	-	2.524
4	Tagihan kepada Bank	9.259.802	-	-	-	9.259.802
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	223.693	-	-	-	223.693
9	Tagihan kepada Korporasi	18.587.213	-	-	-	18.587.213
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	69.000	-	-	-	69.000
	Total Eksposur TRA	40.589.931	-	-	-	40.589.931
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)					
1	Tagihan kepada Pemerintah	387.845	387.845	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	42.205	-	-	-	42.205
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1.601.132	160.499	-	-	1.440.633
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	39.334	-	-	-	39.334
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	130.664	-	-	-	130.664
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	2.201.180	548.344	-	-	1.652.836



SEKURITISASI ASET

Aktivitas sekuritisasi BNI hanya terbatas pada kepemilikan *credit linked notes*, namun demikian per 31 Desember 2018 tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset.

PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT PENDEKATAN STANDAR

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar – Bank secara Individu dimuat dalam Tabel 6.1.1, Tabel 6.1.2, Tabel 6.1.3, dan Tabel 6.1.7

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar – Bank secara Konsolidasi dimuat dalam Tabel 6.2.1, Tabel 6.2.2, Tabel 6.2.3, Tabel 6.2.6 dan Tabel 6.2.7.

1. Eksposur Aset di Neraca

6.1.1 Eksposur Aset di Neraca

Bank secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Dec-18		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	166.171.785	633.826	633.826
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	84.058.265	41.768.392	41.779.141
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	32.887.152	12.083.768	12.082.638
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	12.371.631	3.821.272	3.820.713
6	Kredit Beragun Properti Komersial	11.832.156	11.832.156	11.755.782
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	555.856	277.928	277.919
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	78.152.952	58.614.714	45.158.820
9	Tagihan kepada Korporasi	311.639.668	311.817.209	310.776.919
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.986.966	5.905.448	5.831.289
11	Aset Lainnya	46.929.862	36.784.124	34.037.001
Total		748.586.293	483.538.837	466.154.048

No	Kategori Portofolio	31-Dec-17		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	142.983.770	351.553	351.553
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	68.276.751	26.538.851	26.538.851
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	501	251	251
4	Tagihan kepada Bank	41.733.285	16.493.302	16.493.302
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	11.822.420	4.137.847	4.137.847
6	Kredit Beragun Properti Komersial	9.282.778	9.282.778	9.282.778
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	844.201	422.101	422.101
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	62.679.695	47.009.771	47.009.771
9	Tagihan kepada Korporasi	272.692.964	270.792.685	270.792.685
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	279.905	308.130	308.130
11	Aset Lainnya	55.874.743	-	45.640.360
Total		666.471.013	375.337.269	420.977.629



Tabel 6.2.1 Eksposur Aset di Neraca

Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Dec-18		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	166.171.785	633.826	633.826
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	84.058.266	41.768.392	41.779.141
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	32.887.152	12.083.768	12.082.638
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	12.371.631	3.821.272	3.820.713
6	Kredit Beragun Properti Komersial	11.832.156	11.832.156	11.755.782
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	555.856	277.928	277.919
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	78.152.952	58.614.714	45.158.820
9	Tagihan kepada Korporasi	311.639.669	311.817.209	310.776.919
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.986.966	5.905.448	5.831.289
11	Aset Lainnya	46.929.862	36.784.124	34.037.001
Total		748.586.295	483.538.837	466.154.048

No	Kategori Portofolio	31-Dec-17		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	142.983.770	351.553	351.553
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	68.276.751	26.538.851	26.538.851
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	501	251	251
4	Tagihan kepada Bank	41.996.244	16.624.781	16.624.781
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	11.822.420	4.137.847	4.137.847
6	Kredit Beragun Properti Komersial	9.282.778	9.282.778	9.282.778
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	844.201	422.101	422.101
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	63.242.621	47.431.966	47.431.966
9	Tagihan kepada Korporasi	272.692.964	270.792.685	270.792.685
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	279.905	308.130	308.130
11	Aset Lainnya	57.692.079	-	47.836.107
Total		669.114.234	375.890.943	423.727.050



Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

6.1.2 Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

Bank secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Dec-18			31-Dec-17		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	414.466	-	-	440.881	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	14.330.032	7.165.015	7.165.016	12.006.818	6.003.409	6.003.409
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	2.524	1.262	1.262
4	Tagihan kepada Bank	8.404.131	4.202.061	4.202.061	9.259.802	4.553.383	4.553.383
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	253.797	190.348	190.348	223.693	167.770	167.770
9	Tagihan kepada Korporasi	18.853.000	18.836.181	18.852.999	18.587.213	18.561.773	18.551.697
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total		42.255.426	30.393.605	30.410.424	40.520.931	29.287.597	29.277.521

Tabel 6.2.2 Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Dec-18			31-Dec-17		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	503.956	-	-	440.881	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	12.006.818	6.003.409	6.003.409
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	8.760.711	4.380.355	4.380.355	2.524	1.262	1.262
4	Tagihan kepada Bank	13.079.365	6.539.682	6.539.682	9.259.802	4.553.383	4.553.383
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	18.606.766	18.606.766	18.603.185	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	400.354	300.266	300.266	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	223.693	167.770	167.770
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	18.587.213	18.561.773	18.551.697
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total		41.351.152	29.827.069	29.823.488	40.520.931	29.287.597	29.277.521

2. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

6.1.3 Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

Bank secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Dec-18			31-Dec-17		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	12.397	-	-	387.845	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	95.201	47.600	47.600	42.205	21.103	21.103
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	21.712.474	302.742	302.742	1.601.132	610.534	248.333
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	83.416	83.417	83.417	39.334	39.334	39.334
Total		21.903.488	433.759	433.759	2.070.516	670.971	308.770



6.2.3 Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Dec-18			31-Dec-17		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	12.397	-	-	387.845	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	95.201	47.600	47.600	42.205	21.103	21.103
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	21.712.474	302.742	302.742	1.601.132	610.534	248.333
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	83.416	83.416	83.416	39.334	39.334	39.334
Total		21.903.488	433.758	433.758	2.070.516	670.971	308.770

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*)

Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tidak memiliki Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*)

4. Eksposur Sekuritisasi

6.1.5 Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar : Eksposur Sekuritisasi

Bank secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No.	Jenis Transaksi	31-Dec-18		31-Dec-2017	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR setelah MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR setelah MRK
1	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yg tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum	-	307.604	-	77.390
Total		-	307.604	-	77.390

6.2.5 Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar : Eksposur Sekuritisasi

Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No.	Jenis Transaksi	31-Dec-18		31-Dec-17	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR setelah MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR setelah MRK
1	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yg tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum	-	307.604	-	77.390
Total		-	307.604	-	77.390



5. Eksposur di Unit Usaha Syariah

Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tidak memiliki eksposur di unit usaha syariah.

6. Total Pengukuran Risiko Kredit

6.1.7 Total Pengukuran Risiko Kredit

Bank secara Individu

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31-Dec-18	31-Dec-17
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	491.757.871	450.641.311
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(3.302.541)	-

6.2.7 Total Pengukuran Risiko Kredit

Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31-Dec-18	31-Dec-17
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	511.541.518	469.351.459
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(394.267)	-

RISIKO PASAR

Sebagian besar Risiko Pasar *Trading Book* bersumber dari aktivitas bisnis Tresuri baik Dalam Negeri maupun Kantor Cabang Luar Negeri, sementara Risiko Pasar *Banking Book*, khususnya *Interest Rate Risk in Banking Book* dan Posisi Devisa Neto (PDN) bersumber dari seluruh aktivitas perusahaan. BNI senantiasa memantau dan mengelola risiko pasar secara kontinu dan ketat.

TATA KELOLA DAN ORGANISASI

Dalam rangka pengelolaan risiko pasar yang efektif dan independen, aktivitas bisnis Tresuri dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu *front office*, *middle office*, dan *back office*. *Front office* sebagai unit bisnis berupaya mencapai target bisnis dengan melakukan aktivitas bisnis dan berhubungan dengan nasabah. Namun sebagai bagian dari sistem pengendalian internal, *front office* juga berfungsi sebagai *first line of defense* yang akan berupaya membatasi dan mengantisipasi risiko pasar yang disebabkan perubahan nilai tukar dan suku bunga sesuai limit-limit yang telah ditetapkan. Dalam melakukan aktivitasnya, bisnis Tresuri dibatasi dengan *Risk Appetite* dan *Risk Limit* yang diusulkan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank ke Komite Risiko dan Kapital Sub Komite Manajemen Risiko (KRK-RMC). Limit transaksi Tresuri diusulkan oleh Divisi Tata Kelola Kebijakan melalui Komite Prosedur Perkreditan (KPP), sedangkan *counterparty limit* ditetapkan oleh Unit Risiko Bisnis.

Divisi Manajemen Risiko Bank sebagai *second line of defense* melakukan fungsi pemantauan risiko pasar dan kepatuhan terhadap *limit* risiko baik *limit* risiko pasar, limit kewenangan maupun *limit counterparty*, melakukan validasi terhadap *fixing price*, memeriksa kewajaran harga atas transaksi tresuri dan investigasi terjadinya *off market* dan me-review penggunaan *limit*. Selain itu, untuk melengkapi fungsi manajemen risiko pasar yang telah ada BNI juga memiliki fungsi *Middle Office* yang bertugas melakukan pemantauan, pengendalian dan pelaporan terhadap risiko-risiko pada transaksi Tresuri.

Fungsi *back office* berada di Divisi Operasional yaitu melakukan aktivitas konfirmasi, pembukuan dan *settlement* transaksi Tresuri.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Dalam rangka mendukung target bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, BNI telah memiliki Pedoman Perusahaan untuk Bisnis Tresuri dan Internasional. Selain itu agar pengelolaan Risiko Pasar berjalan efektif, BNI berpedoman pada Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Pasar. Pedoman Perusahaan berisi tentang tata laksana dan metodologi serta model pengelolaan risiko pasar, yang disusun dan di-review serta divalidasi secara periodik oleh Divisi Manajemen Risiko Bank.

PROSES

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar dilakukan oleh unit yang independen dari unit bisnis. Identifikasi Risiko Pasar terutama dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas baru. BNI melakukan pengukuran Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar dan Metode Internal. Metode Standar digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Risiko Pasar, sementara pengelolaan Risiko Pasar harian menggunakan Metode Internal (*Value at Risk*).



Cakupan portofolio yang dihitung dalam KPMM dengan menggunakan Metode Standar adalah portofolio *trading book* untuk risiko suku bunga dan portofolio *trading book* dan *banking book* untuk risiko nilai tukar Dalam Negeri dan Kantor Cabang Luar Negeri.

Eksposur risiko pasar Bank secara individu dan konsolidasi dengan Perusahaan Anak menggunakan metode standar dimuat dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

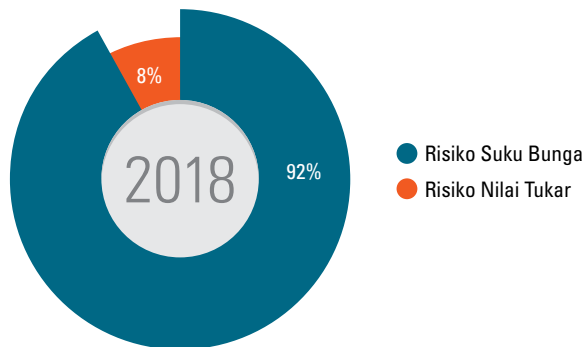
Tabel 7.1 Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

Bank secara Individu dan Konsolidasi

(dalam juta Rupiah)

No	Jenis Risiko	31-Dec-18				31-Dec-17			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
1	Risiko Suku Bunga	17.279	215.983	22.498	281.225	14.423	180.289	17.726	221.580
	a. Risiko Spesifik	-	-	3.884	48.552	-	-	2.458	30.728
	b. Risiko Umum	17.279	215.983	18.614	232.673	14.423	180.289	15.268	190.851
2	Risiko Nilai Tukar	230.201	2.877.514	228.629	2.857.863	175.823	2.197.782	181.419	2.267.731
3	Risiko Ekuitas	-	-	2.393	29.908	-	-	5.196	64.956
4	Risiko Komoditas	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Risiko Option	8.396	104.952	8.396	104.952	-	-	-	-
Total		255.876	3.198.449	261.916	3.273.949	190.246	2.378.070	204.341	2.554.267

Komposisi VaR per Jenis Risiko 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :



Eksposur risiko pasar (*Value at Risk*) Dalam Negeri dan Kantor Cabang Luar Negeri senantiasa dipantau secara harian dan disampaikan kepada Manajemen secara mingguan dan bulanan. Kebijakan valuasi harga yang digunakan saat ini untuk instrumen yang aktif diperdagangkan adalah *mark-to-market* sedangkan metode valuasi untuk instrumen yang kurang aktif diperdagangkan menggunakan harga wajar dari sumber yang independen.

Eksposur risiko pasar Bank secara individu dan konsolidasi dengan menggunakan model internal (*value at risk*) dimuat dalam tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.2 Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Internal (*Value at Risk*/VaR)

(dalam juta Rupiah)

No	Jenis Risiko	31-Dec-2018				31-Dec-2017			
		VaR Rata-rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode	VaR Rata-rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode
1	Risiko Suku Bunga	275.195	389.567	232.498	296.025	214.745	273.540	151.988	245.943
2	Risiko Nilai Tukar	9.712	20.602	5.109	9.112	12.554	23.679	4.846	6.603
3	Risiko Option	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		284.907	410.169	237.607	305.137	227.299	297.219	156.833	252.546

Perkembangan risiko pada portofolio *banking book* secara keseluruhan dipantau ketat secara periodik sesuai metode pengukuran yang ditetapkan regulator, yaitu pemantauan Posisi Devisa Neto (PDN) untuk risiko nilai tukar dan gap risiko suku bunga *banking book* (*interest rate risk in banking book gap*), serta disampaikan kepada manajemen melalui Forum Komite Risiko dan Kapital Sub Komite *Asset & Liability* (KRR-ALCO).

Beberapa informasi terkait pengukuran gap risiko suku bunga *banking book* (*interest rate risk in banking book gap*) antara lain:

1. Perlakuan *Non Maturity Instrument*
Asumsi maturitas untuk kewajiban yang tergolong *core deposit*, seperti giro, tabungan dan deposito, dikelompokkan pada skala waktu tertentu di mana asumsi ini akan dianalisa secara berkala oleh Divisi Tresuri serta didokumentasikan dan disampaikan ke Divisi Manajemen Risiko Bank untuk mendapatkan validasi.
2. Asumsi perubahan suku bunga
Menggunakan standar asumsi perubahan suku bunga sebesar 0,25% dan 0,5% yang bersifat paralel pada seluruh skala waktu (*time band*).
3. Frekuensi Pengukuran
Pengukuran *gap* risiko suku bunga *banking book* (*interest rate risk in banking book gap*) dilakukan secara bulanan.

PERANGKAT DAN METODE

Untuk mendukung proses bisnis dan sejalan dengan pengelolaan risiko pasar, BNI telah memiliki *market risk management tools*. Sedangkan untuk memperoleh data pasar diperoleh dari Reuters, Bloomberg dan sumber independen lainnya. Beberapa limit yang telah ditetapkan untuk mengelola potensi kerugian Risiko Pasar di Divisi Tresuri maupun Kantor Cabang Luar Negeri antara lain sebagai berikut:

1. *Value at Risk Limit* (VaR Limit), yang merupakan maksimum potensi kerugian yang mungkin terjadi pada waktu tertentu di masa datang dengan tingkat kepercayaan tertentu.
2. *Stress Value at Risk Limit* (*Stress VaR Limit*), yang merupakan pengukuran risiko pasar yang disesuaikan dengan kondisi tidak normal di pasar atau maksimum potensi kerugian saat pasar tidak normal.
3. *Budget Loss Limit* yang dipergunakan untuk membatasi realisasi kerugian aktivitas bisnis.
4. *Management Action Trigger* (MAT), yaitu batasan untuk melakukan tindakan terhadap risiko perubahan nilai yang merugi (*early warning signal*). MAT melengkapi *loss limit* berupa persentase tertentu dari *loss limit*.
5. Limit pembelian surat berharga yang digunakan untuk membatasi konsentrasi pembelian surat berharga korporat berdasarkan *rating* dan jenis mata uang surat berharga.

6. *Limit asset dan liability repricing gap* (*Interest Rate Risk in Banking Book*) untuk membatasi risiko suku bunga dalam *banking book*.
7. Nominal *open position limit*, yaitu batas maksimum nominal *open position* yang dapat dilakukan *dealer*.
8. Limit internal PDN keseluruhan (*absolut*), yaitu batas maksimum pengelolaan PDN.

Langkah-langkah memperkuat pengelolaan risiko pasar dalam rangka menghadapi perubahan kondisi ekonomi sepanjang 2018, antara lain melakukan pemantauan secara ketat pergerakan faktor pasar yang berpotensi memberikan dampak pada bank, antara lain nilai tukar, suku bunga, harga saham, dan harga komoditas. Untuk mengetahui potensi dampak pada bank, telah dilakukan *Scenario Analysis dan Stress Testing* secara periodik dan insidental. *Stress Testing* secara periodik menggunakan skenario yang mengacu pada ketentuan regulator dan skenario internal Bank. Sedangkan skenario *Stress Testing* insidental dan *Scenario Analysis* menyesuaikan kondisi faktor makro ekonomi dan faktor pasar pada saat itu. Masing-masing Kantor Cabang Luar Negeri juga melakukan *Stress Testing* sesuai ketentuan internal dan ketentuan regulator setempat. Hasil *stress testing* tersebut digunakan untuk menyiapkan *contingency plan* agar risiko yang terjadi tetap dapat dibatasi dan dikelola dengan baik.

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas berhubungan dengan adanya kemungkinan bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap deposan, investor dan kreditur, serta pemenuhan giro wajib minimum yang di antaranya disebabkan keterbatasan akses pendanaan atau ketidakmampuan untuk melikuidasi aset yang dimiliki dengan harga yang wajar. Pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas, dan membangun kekuatan likuiditas struktural neraca bank untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan.

TATA KELOLA DAN ORGANISASI

Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM), Divisi Tresuri (TRS), dan Kantor Cabang Luar Negeri. Kebijakan dan Prosedur Risiko Likuiditas disusun oleh Divisi ERM, selanjutnya dilaksanakan oleh Divisi TRS dan segenap Kantor Cabang Luar Negeri yang diwujudkan dalam manajemen strategi likuiditas. Divisi ERM juga melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan manajemen likuiditas yang dilakukan oleh Divisi TRS tersebut.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Divisi ERM menyusun Kebijakan Risiko Likuiditas berupa Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas, yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam Prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang berisi panduan pelaksanaan manajemen risiko likuiditas, antara lain berupa:



1. Ketersediaan Alat Likuid: Kas, Giro Wajib Minimum(GWM), *Secondary Reserve*, Indikator Peringatan Dini, *Contingency Plan* Likuiditas *Head Office* maupun Kantor Cabang Luar Negeri, dan lain-lain.
2. Pengukuran Risiko Likuiditas: Rasio Likuiditas, Proyeksi Arus Kas, Profil Maturitas, Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*), *Stress testing*, dan lain-lain.
3. Pemantauan Risiko Likuiditas
4. Pengendalian Risiko Likuiditas
5. Penetapan Limit Likuiditas: limit Pagu Kas BNI Wide, limit *Secondary Reserve Ideal* (SR Ideal), limit Profil Maturitas dan pembatasan Kredit Valas berdasarkan Ketersediaan Dana.

PROSES

Dalam mengelola likuiditas, selain mengelola *primary reserve* (kas dan GWM), BNI menjaga dan mempertahankan *secondary reserve* untuk memastikan likuiditas berada pada level yang aman. Sebagai cadangan *secondary reserve*, BNI menjaga dan mempertahankan *tertiary reserve*. Penetapan dan pemantauan *limit*, yaitu limit Pagu Kas BNI Wide, *limit Secondary Reserve Ideal* (SR Ideal), limit Profil Maturitas, dan pembatasan Kredit Valas berdasarkan Ketersediaan Dana dilakukan secara berkala oleh Divisi ERM. Sedangkan ketersediaan atas keseluruhan *reserve* dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan oleh Divisi TRS dan Divisi ERM.

PERANGKAT DAN METODE

Dalam mengelola risiko likuiditas, BNI menggunakan proyeksi arus kas harian dan profil maturitas bulanan, baik secara kontraktual maupun *behavioral*, agar dapat menetapkan strategi yang sesuai dan akurat untuk mengantisipasi kondisi likuiditas bank di masa mendatang. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valas Bank secara individu dan konsolidasi dimuat dalam tabel 9.1.a dan b, tabel 9.2.a dan b.

Tabel 9.1.a Profil Maturitas Rupiah Tahun 2018
Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio		31-Dec-2018					
			Saldo	Jatuh Tempo				
				≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA							
	A.	Aset						
	1.	Kas	12.968.368	12.968.368	-	-	-	-
	2.	Penempatan pada Bank Indonesia	51.957.966	48.357.966	-	600.000	3.000.000	-
	3.	Penempatan pada bank lain	3.783.777	2.407.670	30.000	640.000	606.107	100.000
	4.	Surat Berharga	68.145.535	2.107.751	3.786.085	3.090.902	3.413.345	55.747.452
	5.	Kredit yang diberikan	387.462.488	54.480.165	29.270.170	41.280.930	29.913.124	232.518.099
	6.	Tagihan lainnya	11.914.819	3.564.905	4.063.344	3.484.191	779.393	22.986
	7.	Lain-lain	25.218.315	2.307.458	349.980	184.869	40.421	22.335.587
		Total Aset	561.451.268	126.194.283	37.499.579	49.280.892	37.752.390	310.724.124
	B.	Kewajiban						
	1.	Dana Pihak Ketiga	454.173.557	146.662.838	54.046.207	6.607.940	3.530.836	243.325.736
	2.	Kewajiban pada Bank Indonesia	534.789	-	-	-	-	534.789
	3.	Kewajiban pada bank lain	1.985.712	989.112	85.199	190.376	719.665	1.360
	4.	Surat Berharga yang diterbitkan	3.098.997	-	-	-	-	3.098.997
	5.	Pinjaman yang diterima	5.894	-	-	-	-	5.894
	6.	Kewajiban lainnya	18.681.840	17.181.723	632.074	404.971	463.072	-
	7.	Lain-lain	10.584.288	249.798	150.344	18.382	9.822	10.155.942
		Total Kewajiban	489.065.077	165.083.471	54.913.824	7.221.669	4.723.395	257.122.718
		Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	72.386.191	(38.889.188)	(17.414.245)	42.059.223	33.028.995	53.601.406



No.	Kategori Portofolio	31-Dec-2018					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
II	REKENING ADMINISTRATIF						
A.	Tagihan Rekening Administratif						
1.	Komitmen	19.493.440	13.662.126	2.145.251	1.648.170	2.037.893	-
2.	Kontinjensi	5.745.560	5.745.560	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		25.239.000	19.407.686	2.145.251	1.648.170	2.037.893	-
B.	Kewajiban Rekening Administratif						
1.	Komitmen	68.685.369	23.611.526	5.887.726	5.665.923	6.200.481	27.319.713
2.	Kontinjensi	33.696.127	8.859.815	5.304.010	3.691.626	5.393.569	10.447.107
Total Kewajiban Rekening Administratif		102.381.496	32.471.341	11.191.736	9.357.549	11.594.050	37.766.820
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(77.142.495)	(13.063.655)	(9.046.485)	(7.709.379)	(9.556.157)	(37.766.820)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]		(4.756.304)	(51.952.842)	(26.460.730)	34.349.844	23.472.838	15.834.586
Selisih Kumulatif			(51.952.842)	(78.413.572)	(44.063.728)	(20.590.890)	(4.756.304)

Tabel 9.1.a Profil Maturitas Rupiah Tahun 2017

Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-2017					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA						
A.	Aset						
1.	Kas	10.791.819	10.791.819	-	-	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	39.242.672	29.571.320	3.250.000	4.541.865	1.879.487	-
3.	Penempatan pada bank lain	5.642.755	4.463.998	280.000	300.000	348.756	250.001
4.	Surat Berharga	69.081.539	2.222.982	5.261.285	2.293.867	2.255.574	57.047.831
5.	Kredit yang diberikan	338.158.262	54.356.567	29.547.258	31.685.017	31.096.416	191.473.004
6.	Tagihan lainnya	10.344.744	3.573.834	2.944.766	3.504.747	319.321	2.076
7.	Lain-lain	20.452.615	1.818.460	299.188	168.365	-	18.166.602
Total Aset		493.714.406	106.798.980	41.582.497	42.493.861	35.899.554	266.939.514
B.	Kewajiban						
1.	Dana Pihak Ketiga	4.134.247	169.761.796	48.026.060	9.745.263	5.302.743	180.588.881
2.	Kewajiban pada Bank Indonesia	9.299	-	-	-	-	9.299
3.	Kewajiban pada bank lain	6.117.254	1.806.676	24.024	2.593.330	815.102	878.122
4.	Surat Berharga yang diterbitkan	2.998.818	-	-	-	-	2.998.818
5.	Pinjaman yang diterima	5.888	-	-	-	-	5.888
6.	Kewajiban lainnya	1.985.632	311.429	363.362	317.558	597.783	395.500
7.	Lain-lain	11.868.708	208.887	119.428	24.234	13.187	11.502.972
Total Kewajiban		436.410.342	172.088.788	48.532.874	12.680.385	6.728.815	196.379.480
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		57.304.064	(65.289.808)	(6.950.377)	29.813.476	29.170.739	70.560.034



No.	Kategori Portofolio		31-Dec-2017					
			Saldo	Jatuh Tempo				
				≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
II	REKING ADMINISTRATIF							
	A.	Tagihan Rekening Administratif						
		1. Komitmen	25.199.356	18.976.859	2.124.075	3.263.257	835.165	-
		2. Kontinjensi	6.105.543	6.105.543	-	-	-	-
		Total Tagihan Rekening Administratif	31.304.899	25.082.402	2.124.075	3.263.257	835.165	-
	B.	Kewajiban Rekening Administratif						
		1. Komitmen	62.483.360	17.023.789	8.336.836	7.398.904	5.065.098	24.658.733
		2. Kontinjensi	30.673.215	11.499.442	386.588	5.198.411	3.966.701	9.622.073
		Total Kewajiban Rekening Administratif	93.156.575	28.523.231	8.723.424	12.597.315	9.031.799	34.280.806
		Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(61.851.676)	(3.440.829)	(6.599.349)	(9.334.058)	(8.196.634)	(34.280.806)
		Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]	(4.547.612)	(68.730.637)	(13.549.726)	20.479.418	20.974.105	36.279.228
		Selisih Kumulatif		(68.730.637)	(82.280.363)	(61.800.945)	(40.826.840)	(4.547.612)

Tabel 9.1.b Profil Maturitas Rupiah 2018

Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio		31 Desember 2018					
			Saldo	Jatuh Tempo				
				≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA							
	A.	Aset						
		1. Kas	13.282.120	13.281.943	-	-	-	177
		2. Penempatan pada Bank Indonesia	56.166.075	52.166.075	-	750.000	3.200.000	50.000
		3. Penempatan pada bank lain	4.669.055	2.807.670	30.000	840.000	806.107	185.278
		4. Surat Berharga	87.285.058	5.217.266	6.286.085	5.631.962	6.445.876	63.703.869
		5. Kredit yang diberikan	388.420.315	54.480.165	29.270.170	41.280.930	29.986.969	233.402.081
		6. Tagihan lainnya	11.966.956	3.617.042	4.063.344	3.484.191	779.393	22.986
		7. Lain-lain	40.555.770	3.307.458	5.549.980	834.869	909.232	29.954.231
		Total Aset	602.345.349	134.877.619	45.199.579	52.821.952	42.127.577	327.318.622
	B.	Kewajiban						
		1. Dana Pihak Ketiga	461.609.124	150.100.296	54.179.620	6.680.990	3.718.883	246.929.335
		2. Kewajiban pada Bank Indonesia	534.789	-	-	-	-	534.789
		3. Kewajiban pada bank lain	2.094.971	1.014.112	110.199	215.376	744.665	10.619
		4. Surat Berharga yang diterbitkan	3.087.417	-	-	-	-	3.087.417
		5. Pinjaman yang diterima	763.257	-	-	-	-	763.257
		6. Kewajiban lainnya	18.733.977	17.181.723	632.074	404.971	463.072	52.137
		7. Lain-lain	22.986.962	452.472	350.344	18.382	9.822	22.155.942
		Total Kewajiban	509.810.497	168.748.603	55.272.237	7.319.719	4.936.442	273.533.496
		Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	92.534.852	(33.870.984)	(10.072.658)	45.502.233	37.191.136	53.785.126



No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2018					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
II REKENING ADMINISTRATIF							
A.	Tagihan Rekening Administratif						
1.	Komitmen	19.493.440	13.662.126	2.145.251	1.648.170	2.037.893	-
2.	Kontinjensi	5.817.015	5.817.015	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		25.310.455	19.479.141	2.145.251	1.648.170	2.037.893	-
B.	Kewajiban Rekening Administratif						
1.	Komitmen	69.863.569	24.773.211	5.887.726	5.665.923	6.200.481	27.336.228
2.	Kontinjensi	33.753.856	8.913.561	5.304.010	3.691.626	5.393.569	10.451.090
Total Kewajiban Rekening Administratif		103.617.425	33.686.772	11.191.736	9.357.549	11.594.050	37.787.318
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(78.306.969)	(14.207.631)	(9.046.485)	(7.709.379)	(9.556.157)	(37.787.318)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]		14.227.883	(48.078.615)	(19.119.143)	37.792.854	27.634.979	15.997.808
Selisih Kumulatif			(48.078.615)	(67.197.758)	(29.404.904)	(1.769.925)	14.227.883

Tabel 9.1.b Profil Maturitas Rupiah 2017

Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-2017					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I NERACA							
A.	Aset						
1.	Kas	11.025.722	11.025.722	-	-	-	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	44.001.259	33.635.571	3.270.000	4.891.201	2.204.487	
3.	Penempatan pada bank lain	6.879.363	5.463.998	480.000	336.000	349.364	
4.	Surat Berharga	86.747.060	13.576.912	7.341.193	3.095.867	2.350.574	
5.	Kredit yang diberikan	338.719.946	53.911.792	29.225.801	32.177.951	31.887.306	
6.	Tagihan lainnya	10.491.320	3.720.410	2.944.766	3.504.747	319.321	
7.	Lain-lain	22.416.627	3.780.403	299.188	168.365	-	
Total Aset		520.281.297	125.114.808	43.560.948	44.174.131	37.111.052	270.320.358
B.	Kewajiban						
1.	Dana Pihak Ketiga	418.678.768	170.282.264	48.233.801	9.902.204	5.704.292	
2.	Kewajiban pada Bank Indonesia	9.299	-	-	-	-	
3.	Kewajiban pada bank lain	6.534.099	2.142.865	24.024	2.593.330	815.102	
4.	Surat Berharga yang diterbitkan	3.482.279	-	-	500.000	-	
5.	Pinjaman yang diterima	514.637	-	-	-	-	
6.	Kewajiban lainnya	2.001.544	311.429	363.362	317.558	597.783	
7.	Lain-lain	22.787.735	708.887	519.428	43.261	13.187	
Total Kewajiban		454.008.361	173.445.445	49.140.615	13.356.353	7.130.364	210.935.584
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		66.272.936	(48.330.637)	(5.579.667)	30.817.778	29.980.688	59.384.774



No.	Kategori Portofolio	31-Dec-2017					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
II	REKENING ADMINISTRATIF						
	A. Tagihan Rekening Administratif						
	1. Komitmen	25.199.356	18.976.859	2.124.075	3.263.257	835.165	-
	2. Kontinjensi	6.175.396	6.175.396	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	31.374.752	25.082.402	2.124.075	3.263.257	835.165	-
	B. Kewajiban Rekening Administratif						
	1. Komitmen	63.531.244	18.071.673	8.336.836	7.398.904	5.065.098	24.658.733
	2. Kontinjensi	30.766.153	11.592.380	386.588	5.198.411	3.966.701	9.622.073
	Total Kewajiban Rekening Administratif	94.297.397	28.523.231	8.723.424	12.597.315	9.031.799	34.280.806
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(62.922.645)	(3.440.829)	(6.599.349)	(9.334.058)	(8.196.634)	(34.280.806)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]	3.350.291	(51.771.466)	(12.179.016)	21.483.720	21.784.054	25.103.968
	Selisih Kumulatif		(51.771.466)	(63.950.482)	(42.466.762)	(20.682.708)	4.421.260

Tabel 9.2.a Profil Maturitas Valas Tahun 2018
Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-2018					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA						
	A Aset						
	1 Kas	712.636	712.636	-	-	-	-
	2 Penempatan pada Bank Indonesia	12.372.153	12.372.153	-	-	-	-
	3 Penempatan pada bank lain	14.467.347	14.046.948	43.140	377.259	-	-
	4 Surat Berharga	44.323.826	7.080.798	6.455.728	1.835.132	13.345	28.938.822
	5 Kredit yang diberikan	82.110.633	12.362.659	4.090.779	8.962.047	1.778.864	54.916.284
	6 Tagihan lainnya	9.103.024	3.825.693	2.179.562	2.228.253	866.337	3.178
	7 Lain-lain	219.506	219.506	-	-	-	-
	Total Aset	163.309.125	50.620.393	12.769.210	13.402.692	2.658.546	83.858.284
	B Kewajiban						
	1 Dana Pihak Ketiga	90.485.986	40.234.515	10.164.100	4.902.732	990.653	34.193.986
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia	297.037	4.558	-	-	292.479	-
	3 Kewajiban pada bank lain	11.430.961	8.521.556	1.824.664	1.019.427	65.314	-
	4 Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5 Pinjaman yang diterima	51.191.754	4.727.066	2.126.888	5.505.067	13.236.848	25.595.886
	6 Kewajiban lainnya	7.518.708	5.277.197	1.134.697	946.650	156.986	3.178
	7 Lain-lain	1.462.825	259.545	356.106	94.577	20.046	732.551
	Total Kewajiban	162.387.271	59.024.437	15.606.456	12.468.452	14.762.325	60.525.601
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	921.854	(8.404.044)	(2.837.246)	934.240	(12.103.779)	23.332.683



No.	Kategori Portofolio	31-Dec-2018					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
II	REKENING ADMINISTRATIF						
A	Tagihan Rekening Administratif						
1	Komitmen	49.897.895	41.377.904	1.480.076	5.287.152	1.752.764	-
2	Kontinjensi	15.874.588	15.874.588	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		65.772.484	57.252.492	1.480.076	5.287.152	1.752.764	-
B	Kewajiban Rekening Administratif						
1	Komitmen	65.209.103	31.644.342	14.248.682	13.455.007	4.276.698	1.584.374
2	Kontinjensi	28.013.612	2.687.478	1.845.788	2.807.652	8.555.338	12.117.356
Total Kewajiban Rekening Administratif		93.222.715	34.331.820	16.094.470	16.262.658	12.832.036	13.701.730
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(27.450.231)	22.920.671	(14.614.394)	(10.975.506)	(11.079.272)	(13.701.730)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]		(26.528.377)	14.516.628	(17.451.640)	(10.041.266)	(23.183.051)	9.630.953
Selisih Kumulatif			14.516.628	(2.935.012)	(12.976.279)	(36.159.330)	(26.528.377)

Tabel 9.2.a Profil Maturitas Valas Tahun 2017

Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-2017					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA						
A	Aset						
1	Kas	538.224	538.224	-	-	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	6.363.497	6.363.497	-	-	-	-
3	Penempatan pada bank lain	24.950.490	24.725.324	203.513	21.654	-	-
4	Surat Berharga	35.508.537	6.400.061	3.611.275	20.663	78.027	25.398.511
5	Kredit yang diberikan	65.058.043	11.162.647	3.069.972	2.173.052	4.270.601	44.381.770
6	Tagihan lainnya	8.675.709	1.579.935	3.611.450	2.174.219	1.282.631	27.474
7	Lain-lain	20.537	20.537				
Total Aset		141.115.037	50.790.225	10.496.210	4.389.588	5.631.259	69.807.755



No.	Kategori Portofolio	31-Dec-2017					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
B	Kewajiban						
1	Dana Pihak Ketiga	74.036.764	32.091.859	8.097.898	4.600.197	601.949	28.644.861
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	116.993	3.378	-	-	113.615	-
3	Kewajiban pada bank lain	5.843.203	5.617.820	224.759	624	-	-
4	Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-
5	Pinjaman yang diterima	44.081.237	1.305.723	3.498.909	2.769.574	3.511.785	32.995.246
6	Kewajiban lainnya	5.009.673	1.086.418	1.036.923	2.537.747	321.116	27.470
7	Lain-lain	2.142.904	165.741	2.591	-	168.305	1.806.267
Total Kewajiban		131.230.774	40.270.938	12.861.081	9.908.142	4.716.769	63.473.844
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		9.884.263	10.519.287	(2.364.871)	(5.518.553)	914.490	6.333.911
II	REKENING ADMINISTRATIF						
A	Tagihan Rekening Administratif						
1	Komitmen	41.320.250	30.905.769	2.378.546	7.233.458	802.477	-
2	Kontinjensi	16.725.543	16.725.543	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		58.045.793	47.631.312	2.378.546	7.233.458	802.477	-
B	Kewajiban Rekening Administratif						
1	Komitmen	63.553.256	41.843.451	8.800.003	9.152.961	2.586.549	1.170.292
2	Kontinjensi	28.702.243	2.629.978	1.806.282	2.747.568	8.372.246	13.146.168
Total Kewajiban Rekening Administratif		92.255.498	44.473.430	10.606.285	11.900.529	10.958.795	14.316.460
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(34.209.706)	3.157.882	(8.227.739)	(4.667.071)	(10.156.318)	(14.316.460)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-II B)]		(24.325.443)	13.677.170	(10.592.610)	(10.185.624)	(9.241.829)	(7.982.549)
Selisih Kumulatif			13.677.170	3.084.559	(7.101.065)	(16.342.894)	(24.325.443)



Tabel 9.2.b Profil Maturitas Valas 2018

Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio		31-Dec-2018					
			Saldo	Jatuh Tempo				
				≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA							
	A	Aset						
	1	Kas	761.726	761.726	-	-	-	-
	2	Penempatan pada Bank Indonesia	12.718.438	12.718.438	-	-	-	-
	3	Penempatan pada bank lain	14.499.233	14.056.948	45.026	397.259	-	-
	4	Surat Berharga	44.731.281	7.285.698	6.635.728	1.835.132	13.345	28.961.377
	5	Kredit yang diberikan	82.110.633	12.362.659	4.090.779	8.962.047	1.778.864	54.916.284
	6	Tagihan lainnya	9.103.024	3.825.693	2.179.562	2.228.253	866.337	3.178
	7	Lain-lain	819.973	819.973	-	-	-	-
	Total Aset		164.744.308	51.831.135	12.951.096	13.422.692	2.658.546	83.880.839
	B	Kewajiban						
	1	Dana Pihak Ketiga	90.563.077	40.263.343	10.165.830	4.903.812	991.458	34.238.634
	2	Kewajiban pada Bank Indonesia	297.037	4.558	-	-	292.479	-
	3	Kewajiban pada bank lain	11.168.610	8.259.205	1.824.664	1.019.427	65.314	-
	4	Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5	Pinjaman yang diterima	51.191.754	4.727.066	2.126.888	5.505.067	13.236.848	25.595.886
	6	Kewajiban lainnya	7.518.708	5.277.197	1.134.697	946.650	156.986	3.178
	7	Lain-lain	1.512.056	259.545	356.106	94.577	20.046	781.782
	Total Kewajiban		162.251.242	58.790.914	15.608.186	12.469.532	14.763.130	60.619.480
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		2.493.066	(6.959.779)	(2.657.090)	953.160	(12.104.584)	23.261.359
II	REKENING ADMINISTRATIF							
	A	Tagihan Rekening Administratif						
	1	Komitmen	49.897.895	41.377.904	1.480.076	5.287.152	1.752.764	-
	2	Kontinjensi	15.874.588	15.874.588	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif		65.772.484	57.252.492	1.480.076	5.287.152	1.752.764	-
	B	Kewajiban Rekening Administratif						
	1	Komitmen	65.213.393	31.645.789	14.251.525	13.455.007	4.276.698	1.584.374
	2	Kontinjensi	28.013.612	2.687.478	1.845.788	2.807.652	8.555.338	12.117.356
	Total Kewajiban Rekening Administratif		93.227.005	34.333.267	16.097.313	16.262.658	12.832.036	13.701.730
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(27.454.521)	22.919.224	(14.617.237)	(10.975.506)	(11.079.272)	(13.701.730)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]		(24.961.455)	15.959.446	(17.274.327)	(10.022.346)	(23.183.856)	9.559.629
	Selisih Kumulatif			15.959.446	(1.314.881)	(11.337.228)	(34.521.084)	(24.961.455)



Tabel 9.2.b Profil Maturitas Valas 2017

Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio		31-Dec-2017					
			Saldo	Jatuh Tempo				
				≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA							
	A	Aset						
	1	Kas	551.942	551.942	-	-	-	-
	2	Penempatan pada Bank Indonesia	6.718.708	6.718.708	-	-	-	-
	3	Penempatan pada bank lain	25.033.071	24.807.905	203.513	21.654	-	-
	4	Surat Berharga	35.923.731	6.795.188	3.611.275	20.663	78.027	25.418.578
	5	Kredit yang diberikan	65.058.043	11.162.647	3.069.972	2.173.052	4.270.601	44.381.770
	6	Tagihan lainnya	8.675.709	1.579.935	3.611.450	2.174.219	1.282.631	27.474
	7	Lain-lain	20.537	20.537				
	Total Aset		141.981.741	51.636.862	10.496.210	4.389.588	5.631.259	69.827.822
	B	Kewajiban						
	1	Dana Pihak Ketiga	74.069.179	32.114.011	8.099.803	4.600.597	602.170	28.652.599
	2	Kewajiban pada Bank Indonesia	116.993	3.378	-	-	113.615	-
	3	Kewajiban pada bank lain	5.642.612	5.417.229	224.759	624	-	-
	4	Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5	Pinjaman yang diterima	44.081.237	1.305.723	3.498.909	2.769.574	3.511.785	32.995.246
	6	Kewajiban lainnya	5.009.673	1.086.418	1.036.923	2.537.747	321.116	27.470
	7	Lain-lain	2.148.691	165.741	2.591	-	168.305	1.812.054
	Total Kewajiban		131.068.385	40.092.499	12.862.986	9.908.542	4.716.989	63.487.369
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		10.913.356	11.544.363	(2.366.776)	(5.518.954)	914.270	6.340.454
II	REKENING ADMINISTRATIF							
	A	Tagihan Rekening Administratif						
	1	Komitmen	41.320.250	30.905.769	2.378.546	7.233.458	802.477	-
	2	Kontinjensi	16.725.543	16.725.543	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif		58.045.793	47.631.312	2.378.546	7.233.458	802.477	-
	B	Kewajiban Rekening Administratif						
	1	Komitmen	63.554.664	41.843.546	8.800.003	9.152.961	2.586.549	1.171.606
	2	Kontinjensi	28.702.242	2.633.036	1.806.282	2.747.568	8.372.246	13.143.110
	Total Kewajiban Rekening Administratif		92.256.907	44.476.582	10.606.285	11.900.529	10.958.795	14.314.716
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(34.211.114)	3.154.730	(8.227.739)	(4.667.071)	(10.156.318)	(14.314.716)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]		(23.297.758)	14.699.093	(10.594.515)	(10.186.025)	(9.242.049)	(7.974.262)
	Selisih Kumulatif			14.699.093	4.104.578	(6.081.447)	(15.323.496)	(23.297.758)

Perhitungan profil maturitas tersebut sesuai dengan ketentuan regulator dan tidak termasuk profil maturitas perusahaan anak yang bergerak dalam bidang asuransi. Salah satu kekuatan dari proses pemantauan risiko BNI adalah ketersediaan informasi profil likuiditas Bank. Informasi tersebut tersedia di aplikasi *Executive Information Management (EIS) LDAP*, yang dapat menyajikan informasi perkembangan dana maupun pinjaman secara harian sehingga dapat pula dihasilkan profil arus kas harian dan profil maturitas bulanan yang dapat digunakan sebagai salah satu sistem pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas bank.



INDIKATOR PERINGATAN DINI

Indikator peringatan dini dijabarkan dalam indikator-indikator *Secondary Reserve* pada kondisi normal, kondisi moderat atau kondisi ketat (*tight*) baik untuk Rupiah maupun valuta asing, antara lain tren tingkat suku bunga BI *7 Days Reverse Repo Rate*, JIBOR, LIBOR, suku bunga rata-rata Deposito Bank Pesaing ataupun *spread Credit Default Swap* (CDS) yang naik signifikan sesuai batasan yang telah ditetapkan, tren cadangan devisa yang turun signifikan sesuai batasan yang telah ditetapkan, tren dana nasabah dominan yang cenderung menurun secara signifikan sesuai batasan yang telah ditetapkan, dan lain-lain. Penetapan SR Ideal dalam kondisi *moderate* atau *tight* dapat dipertimbangkan apabila salah satu kondisi/indikator atau parameter terjadi. Penetapan dilakukan oleh Divisi ERM dengan berpedoman pada indikator-indikator di atas dan data-data yang diperoleh dari Divisi TRS selaku unit bisnis. Selanjutnya penetapan tersebut akan memberlakukan *Liquidity Contingency Plan* (LCP) SR Ideal yang *moderate* atau *tight*. Indikator-indikator di atas dapat di-review secara periodik sesuai perkembangan kondisi eksternal maupun internal sejalan dengan perkembangan ekonomi baik nasional, regional, maupun global.

STRESS TESTING LIKUIDITAS

Untuk mengetahui ketahanan likuiditas di periode krisis, telah dilakukan *stress testing* likuiditas secara periodik. Skenario *stress testing* dilakukan dengan menggunakan skenario spesifik pada bank (*Idiosyncratic Scenario*) dan skenario stres pada pasar (*Market Wide Scenario*). Skenario spesifik pada bank (*Idiosyncratic Scenario*) menggunakan asumsi bank berada dalam kesulitan likuiditas akibat hilangnya kepercayaan investor/deposan pada bank. Sedangkan skenario stres pada pasar (*Market Wide Scenario*) menggunakan asumsi terjadi gangguan pada pasar/sistem keuangan secara keseluruhan yang berakibat pada terganggunya operasional bank.

Hasil *stress testing* dari skenario tersebut akan digunakan untuk *liquidity funding plan* agar risiko yang terjadi tetap dapat dibatasi dan dikelola dengan baik.

RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek, bank melakukan pengelolaan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dengan cara memelihara *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama periode 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario *stress*, sedemikian rupa sehingga bank dapat mempertahankan rasio kecukupan likuiditas tersebut selalu di atas 100%, baik secara Individu (*bank only*) maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak, dengan nilai LCR BNI secara Individu per Desember 2018 sebesar 192%.

RISIKO OPERASIONAL

Dengan meningkatnya keragaman dan kompleksitas produk serta aktivitas perbankan yang ditawarkan kepada nasabah, perkembangan sistem dan teknologi pendukung yang sangat cepat, serta meningkatnya ekspektasi nasabah akan pelayanan yang diberikan oleh bank, maka pengelolaan risiko operasional menjadi hal yang sangat penting.

TATA KELOLA DAN ORGANISASI

Tata kelola manajemen risiko operasional telah diimplementasikan BNI di mana segenap unit bisnis dan unit pendukung baik di dalam maupun di luar negeri, berperan sebagai *Risk Owner* atau *RiskTaker* yang merupakan *first line of defense*. Implementasi tersebut didukung dengan *second line of defense* yang dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Kepatuhan, serta Divisi Tata Kelola Kebijakan sebagai *Risk Control Unit* dan *third line of defense* yaitu Satuan Pengawasan Internal sebagai *Risk Assurance Unit*.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Divisi Manajemen Risiko Bank telah memiliki Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Operasional untuk mendukung implementasi manajemen risiko operasional pada segenap unit baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu:

1. Kebijakan Manajemen Risiko Operasional Dalam Negeri
2. *Operational Risk Management Policy for Overseas Branches*

Kebijakan tersebut dijabarkan lebih rinci dalam Prosedur atau *Standard Operating Procedure* dan Petunjuk Teknis transaksi dan operasional yang *prudent* untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari seperti:

1. Prosedur Manajemen Risiko Operasional Dalam Negeri
2. Prosedur Pelaksanaan *Self Assessment* (SA) Risiko Operasional
3. *Operational Risk Management Procedure for Overseas Branches*
4. *Operational Risk Self Assessment Manual for Overseas Branches*
5. Prosedur Pelaksanaan *Loss Event Database* (LED)
6. Prosedur Pelaksanaan *Key Risk Indicators* (KRI)
7. Pedoman Pelaksanaan Pembukuan Rekening Beban Risiko Operasional (BRO)

PROSES

Manajemen risiko operasional BNI terdiri dari 5 (lima) proses utama yang berkesinambungan yaitu identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian.

1. Identifikasi Risiko
Mekanisme identifikasi risiko operasional dilakukan dengan menerapkan *Macro Process Mapping Assessment* atas proses kerja/aktivitas masing-masing unit untuk menangkap potensi risiko operasional yang dilakukan dengan metode *interview* (*one on one meeting*).



2. Penilaian Risiko

Dilakukan oleh masing-masing unit pemilik risiko melalui metode *operational risk self assessment*, mencakup penilaian atas dampak, frekuensi dan penyebab risiko serta solusinya.

3. Pengukuran Risiko

Sesuai dengan aturan Regulator, pengukuran risiko operasional saat ini menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*).

Tabel 8.1.a Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional

Bank secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No	Pendekatan Yang Digunakan	31-Dec-18			31-Dec-17		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
1	Pendekatan Indikator Dasar	36.524.612	5.478.692	68.483.648	32.743.042	4.911.456	61.393.204
Total		36.524.612	5.478.692	68.483.648	32.743.042	4.911.456	61.393.204

Tabel 8.1.b Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional

Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No	Pendekatan Yang Digunakan	31-Dec-18			31-Dec-17		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
1	Pendekatan Indikator Dasar	38.203.610	5.730.541	71.631.769	34.293.623	5.144.044	64.300.544
Total		38.203.610	5.730.541	71.631.769	34.293.623	5.144.044	64.300.544

4. Pemantauan Risiko

Dilakukan oleh seluruh unit sebagai *first line of defense* terhadap risiko utama pada saat aktivitas sedang berlangsung

Sedangkan Divisi Manajemen Risiko Bank melakukan evaluasi dan laporan/*feedback* atas penilaian risiko berdasarkan hasil *self assessment* serta realisasi atas kerugian risiko operasional yang terjadi, meliputi:

- Feedback report* untuk seluruh divisi/satuan/unit/wilayah/cabang
- Laporan bulanan Pemantauan Beban Risiko Operasional kepada Direksi
- Laporan Profil Risiko Operasional

5. Pengendalian Risiko

Mekanisme mitigasi risiko operasional tergambar pada proses pengendalian internal dengan menerapkan 4 (empat) strategi mitigasi, yaitu hindari, kurangi, transfer dan terima. Keempat strategi mitigasi tersebut tertuang dalam prosedur mitigasi Risiko Operasional yang meliputi prosedur pengendalian, prosedur penyelesaian transaksi, prosedur akuntansi, prosedur penyimpanan asset dan kustodian, prosedur penyediaan produk dan prosedur pencegahan *fraud*.

PERANGKAT DAN METODE

Untuk membantu proses pengelolaan risiko operasional yang dilakukan oleh setiap unit kerja BNI telah mengembangkan perangkat manajemen risiko operasional (*Operational Risk Management tool*) berbasis web (*web-based*) yang diberi nama PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). PERISKOP mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu mensosialisasikan Budaya Risiko serta meningkatkan Kesadaran Risiko karena terdapat 3 (tiga) proses utama dalam pengelolaan risiko operasional yang menggunakan perangkat ini yaitu *Self Assessment*, *Loss Event Database* dan *Key Risk Indicator*.



PERISKOP

<p>Modul Self Assessment</p>	<p><i>Self Assessment (SA)</i> merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara independen oleh setiap unit (<i>risk owner</i>) dalam rangka mengidentifikasi potensi risiko operasional yang terdapat di unitnya, mencari penyebabnya, mengukur potensi kerugian (dampak dan frekuensi) yang mungkin timbul serta mencari solusi untuk mengatasinya. Hasil SA memberikan gambaran potensi risiko yang dihadapi unit untuk 3 (bulan) ke depan yang didasarkan pada data historis 3 (bulan) sebelumnya serta <i>inherent risk</i> (risiko yang melekat).</p>
<p>Modul Loss Event Database</p>	<p>Merupakan <i>database</i> atas seluruh kerugian finansial yang meliputi <i>actual loss</i> dan <i>near miss</i> sejak <i>event</i> terjadi hingga penyelesaiannya akibat risiko operasional yang terjadi diseluruh unit di Bank. Data kerugian yang terkumpul melalui modul LED, selain digunakan untuk pengelolaan risiko operasional yang lebih baik serta mencegah terjadinya kasus serupa juga sebagai dasar pada perhitungan ATMR risiko operasional dalam rangka menghitung kebutuhan modal untuk meng-cover risiko operasional dengan menggunakan metode <i>Advance Measurement Approach (AMA)</i>.</p>
<p>Modul Key Risk Indicator</p>	<p><i>Key Risk indicators</i> merupakan alat ukur untuk mengidentifikasi potensi kerugian risiko operasional yang melekat pada produk dan aktivitas secara dini dan memberikan tanda (<i>early warning signal</i>) jika melebihi suatu <i>threshold</i> tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memonitor eksposur risiko operasional dan efektivitas kontrol Bank.</p>

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Gangguan atau bencana yang diakibatkan oleh faktor alam, perbuatan manusia, maupun sistem dapat terjadi pada fungsi-fungsi usaha BNI yang kritical sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas bisnis dan layanan BNI.

Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka BNI telah menerapkan Manajemen Keberlangsungan Usaha/*Business Continuity Management (BCM)* di segenap unit baik di dalam maupun di luar negeri, yang diharapkan dapat meminimalisir risiko operasional pada saat terjadinya kondisi darurat atau bencana.

Pengembangan perangkat tersebut sejalan dengan peraturan Regulator yang mewajibkan bank untuk melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, serta selaras dengan persyaratan pada dokumen Basel II yang mewajibkan Bank untuk memiliki pengelolaan keberlangsungan usaha dan rencana darurat (*business continuity management* dan *contingency plan*) guna memastikan kemampuan Bank untuk dapat tetap beroperasi dan membatasi kerugian jika terjadi gangguan terhadap aktivitas bisnisnya. Selain peraturan Regulator dan Basel II, untuk Kantor Cabang Luar Negeri, BCM diimplementasikan dengan memenuhi regulasi BCM di negara setempat.

TATA KELOLA DAN ORGANISASI

Dalam kondisi bencana (*disaster*), BNI telah menyiapkan organisasi spesifik berupa *Crisis Management Team (CMT)* dan *Emergency Task Force (ETF)* yang terdiri dari Eksekutif Senior/ Pimpinan Tertinggi Unit sebagai koordinator yang memiliki level kewenangan tertinggi. CMT akan aktif apabila *Executive Management Team (EMT)* selaku pimpinan tertinggi dari CMT menyatakan deklarasi kondisi status bencana.

BNI telah memiliki infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi BCM seperti *Disaster Recovery Center (DRC)*, *Dual Data Center (DDC)*, Lokasi Alternatif Gedung BCM dan *Command Center* yang secara rutin dikelola kesiapannya.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Terkait dengan implementasi *Business Continuity Management (BCM)*, BNI telah menetapkan:

1. Kebijakan *Business Continuity Management (BCM)* Dalam Negeri.
2. Prosedur *Business Continuity Management (BCM)* Dalam Negeri.
3. *Business Continuity Management (BCM) Policy for Overseas Branches*.
4. *Business Continuity Management (BCM) Procedure for Overseas Branches*.
5. Kebijakan *Crisis Management Protocol (CMP)*.
6. Prosedur Tata Kelola Gedung *Business Continuity Management (BCM)*.

PROSES

Setiap langkah *Recovery Strategy* dan *Restoration Strategy* yang dilaksanakan dipantau dan dilaporkan kepada *Crisis Management Team (CMT)* sampai kondisi dinyatakan normal kembali. Untuk memastikan tingkat kesiapan dan evaluasi *Business Continuity Management (BCM)*, BNI melakukan pengujian sistem pada divisi/unit kritical setiap 3 (tiga) bulan sekali, melakukan *site visit* dan simulasi penanganan bencana atas implementasi BCM di seluruh unit operasional yang dilakukan secara rutin tiap tahun untuk mengetahui tingkat kesiapan masing-masing unit, ditinjau dari segi organisasi maupun infrastruktur BCM yang dimilikinya. Hasil evaluasi dan pengujian rutin tersebut terlihat dari penanganan yang sistematis dan terarah dalam menghadapi bencana baik yang disebabkan oleh manusia, alam, maupun oleh sistem sehingga aktivitas operasional BNI di lokasi bencana dapat tetap berjalan pada tingkatan tertentu walaupun beberapa sarana dan prasarana penunjang aktivitas bisnis mengalami gangguan.



RISIKO HUKUM

TATA KELOLA DAN ORGANISASI

Manajemen risiko hukum dilakukan oleh Divisi Hukum di bawah pengawasan aktif Direktur Kepatuhan. Dalam melakukan pengelolaan risiko hukum, Divisi Hukum bekerja sama dengan Unit Pengelolaan Hukum atau staf yang menangani fungsi hukum yang terdapat pada Divisi/Satuan/Unit/Kantor Wilayah atau unit organisasi lainnya di mana Satuan Kerja Bidang Hukum dimaksud berfungsi sebagai *'legal watch'*, yang menyediakan analisis/nasehat hukum kepada unit organisasi dan/atau pegawai pada setiap jenjang organisasi untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan Perundang-undangan dan proses litigasi. Dalam pengelolaan risiko hukum, Divisi Hukum bekerja sama dengan Divisi Manajemen Risiko Bank dalam melakukan penilaian dan pemantauan implementasi Manajemen Risiko Hukum secara berkala.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Implementasi manajemen risiko hukum mengacu pada Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Hukum serta kebijakan lain yang berkaitan dengan pengelolaan risiko hukum.

Guna menghasilkan kebijakan Manajemen Risiko Hukum yang tepat, Divisi Hukum dan Divisi Manajemen Risiko Bank melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

PROSES

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Hukum, BNI menerapkan kebijakan manajemen risiko hukum dalam sebuah alur proses yang terdiri dari:

1. Melakukan identifikasi Risiko Hukum secara berkala dan berkesinambungan. Proses identifikasi risiko hukum dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko hukum yang sekurang-kurangnya dilakukan terhadap risiko hukum dari produk dan aktivitas usaha BNI serta risiko hukum dari produk dan aktivitas baru melalui proses pengendalian manajemen risiko hukum yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
2. Melaksanakan pengukuran Risiko Hukum yang dilakukan dengan menggunakan parameter perbandingan antara nilai perkara yang dihadapi terhadap modal BNI, untuk indikator faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan dan faktor ketiadaan atau perubahan perundang-undangan dalam identifikasi Risiko Hukum. Hasil pengukuran Risiko Hukum tercermin dalam Profil Risiko Hukum.
3. Melakukan pemantauan Risiko Hukum dengan mengevaluasi eksposur risiko hukum yang melekat terutama yang bersifat material atau yang berdampak pada permodalan BNI. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko hukum tersebut disusun dalam suatu Sistem Informasi Manajemen Risiko Hukum (SIM Risiko Hukum) yang menyediakan laporan eksposur risiko hukum secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) termasuk tindak lanjut yang diperlukan.
4. Proses pengendalian Risiko Hukum digunakan terutama terhadap kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BNI. Proses pengendalian Risiko Hukum, dilakukan antara lain dengan:
 - a. Melakukan penilaian/*assessment* berupa kajian yuridis dalam hal terdapat produk baru dan/atau aktivitas baru atau terdapat penambahan/perubahan fitur atas produk BNI.
 - b. Memberikan nasehat hukum dan/atau pendampingan hukum dalam hal terdapat Risiko Hukum dalam aktivitas operasionalnya.
 - c. Melakukan kaji ulang berkala terhadap format standar perjanjian, khususnya perjanjian kredit, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku.
 - d. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara BNI dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforcement* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian yang ada, khususnya untuk perjanjian non standar atau perjanjian yang belum dibakukan dalam Pedoman Perusahaan BNI.
 - e. Melakukan pemantauan secara intensif atas permasalahan hukum, khususnya gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan Bank sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat.



RISIKO STRATEJIK

TATA KELOLA DAN ORGANISASI

Manajemen Risiko Strategik dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis, di bawah pengawasan aktif Direktur Keuangan.

Pengelolaan Risiko Strategik dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan strategis berupa *planning and budgeting* yang mencakup penyelarasan strategi perusahaan dengan strategi unit serta *cascading target bank wide* menjadi target unit yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen perencanaan strategis meliputi:

1. *Corporate Plan*, disusun 5 (lima) tahun sekali
2. Kebijakan Umum Direksi (KUD), disusun 1 (satu) tahun sekali
3. Rencana Bisnis Bank (RBB), disusun 1 (satu) tahun sekali
4. *Business Plan*, disusun 1 (satu) tahun sekali

Mekanisme penyusunan dokumen perencanaan strategis diawali dengan menyusun *Corporate Plan* sebagai acuan penetapan target dan strategi Kebijakan Umum Direksi yang akan dijadikan panduan dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank.

Selanjutnya, Kebijakan Umum Direksi dan Rencana Bisnis Bank akan menjadi acuan penyusunan *Operational Planning* yang dituangkan dalam *Business Plan* Divisi, Wilayah dan Cabang/Sentra. *Business Plan* Wilayah akan menjadi acuan dalam penyusunan *Business Plan* Cabang/Sentra. Melalui mekanisme tersebut, dapat dipastikan bahwa proses *alignment* strategi tetap terjaga mulai dari level *corporate* sampai unit terendah (cabang).

Dokumen *Corporate Plan* wajib di-*review* setiap tahun untuk disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Dokumen Kebijakan Umum Direksi dan Rencana Bisnis Bank, *Business Plan* Unit di-*review* pada Semester I, bahkan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih pendek jika terjadi perubahan lingkungan yang signifikan.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Implementasi manajemen risiko strategik mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Strategik serta Kebijakan dan Prosedur antara lain Prosedur Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru.

PROSES

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Strategik, BNI menerapkan kebijakan manajemen risiko strategik dalam sebuah alur proses yang terdiri dari:

1. Melakukan identifikasi Risiko Strategik secara berkala dan berkesinambungan. Proses identifikasi risiko strategik dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor risiko strategik yang melekat pada setiap aktivitas fungsional

yang berpotensi merugikan BNI, misal karena adanya kebijakan yang tidak tepat, kurang responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, implementasi kebijakan yang tidak sesuai rencana, atau karena implementasinya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Melaksanakan pengukuran Risiko Strategik yang dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) parameter, yaitu: kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi bisnis bank terhadap pesaing dan pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB). Penilaian profil risiko strategik secara detail dituangkan dalam laporan profil risiko strategik dengan berpedoman pada Kebijakan dan Prosedur Penilaian Profil Risiko BNI.
3. Melakukan pemantauan Risiko Strategik antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian pada masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategik dan/atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi.

Untuk ruang lingkup *bank wide*, BNI telah menetapkan satuan kerja yang menganalisa dan memantau realisasi vs target dalam hal ini Divisi Perencanaan Strategis untuk strategi dan Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan untuk target-target keuangan.

Sedangkan untuk ruang lingkup Divisi/Satuan/Unit ditunjuk unit penunjang dan/atau unit tertentu lainnya untuk menganalisa dan memantau realisasi vs target implementasi strategi Divisi/Satuan/Unit tersebut secara berkala.

Mekanisme untuk memantau pencapaian rencana bisnis yang telah ditetapkan, dilakukan dengan membandingkan target terhadap realisasi bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemantauan kinerja dan strategi perusahaan (*bankwide*) dilakukan secara bulanan
 - b. Pemantauan kinerja Divisi dilakukan secara triwulanan
 - c. Pemantauan pencapaian kinerja perusahaan dan seluruh unit dilakukan secara semesteran dalam forum *Business Meeting* di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.
4. Proses pengendalian Risiko Strategik dilakukan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada Direksi. Sistem pengendalian risiko tersebut disetujui dan dikaji ulang secara berkala oleh Direksi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan.



Mekanisme pengendalian risiko strategik dilakukan terhadap hasil-hasil pemantauan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Pencapaian kinerja BNI dibandingkan target proporsional maupun target tahun berjalan secara bulanan dalam forum Rapat Direksi (Radisi) yang dapat mengambil tindakan strategis untuk mengelola risiko strategik.
- b. Realisasi Strategi *Business Plan* tiap-tiap Divisi/ Unit sehingga dapat diidentifikasi permasalahan implementasi strategi dan program kerja untuk segera diperbaiki agar target keuangan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara triwulanan.
- c. Realisasi vs target Rencana Bisnis Bank untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara triwulanan
- d. Pencapaian kinerja perusahaan dan seluruh unit dilakukan secara semesteran dalam forum *Business Meeting* di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.

Direksi selalu memantau realisasi pelaksanaan strategi dan pencapaian target yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) secara berkala. Apabila terdapat pelaksanaan strategi dan pencapaian RBB yang tidak sesuai target maka Direksi meminta unit terkait untuk melakukan perbaikan.

RISIKO KEPATUHAN

TATA KELOLA DAN ORGANISASI

Manajemen Risiko Kepatuhan dilakukan oleh Divisi Kepatuhan (KPN), yang berada di bawah pengawasan aktif Direktur Kepatuhan.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan serta Kebijakan dan Prosedur terkait lainnya antara lain Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Anti *Fraud*, dan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

PROSES

Dalam rangka memberikan kontribusi bagi pertumbuhan bisnis BNI yang sehat dan berkelanjutan, Divisi Kepatuhan membantu Direktur Kepatuhan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan dan melakukan proses manajemen risiko kepatuhan antara lain Pengelolaan Risiko Kepatuhan, meliputi:

1. Identifikasi risiko kepatuhan, dilakukan untuk mengenali seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan BNI, yaitu faktor-faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan seperti:
 - a. Jenis dan kompleksitas kegiatan usaha BNI, termasuk produk dan aktivitas baru.

- b. Jumlah (*volume*) dan materialitas ketidakpatuhan BNI terhadap kebijakan dan prosedur intern, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat.
2. Pengukuran Risiko Kepatuhan, dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter berupa:
 - a. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
 - b. Frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan (*track record* kepatuhan BNI);
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan transaksi keuangan tertentu.

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kepatuhan, indikator/parameter serta besarnya bobot dan rasio yang digunakan untuk mengukur profil risiko kepatuhan ditetapkan oleh Divisi Kepatuhan dengan memperhatikan masukan dari Direksi, Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM) dan Unit lainnya serta ketentuan Regulator.

Penilaian pr.ofil risiko kepatuhan secara detail dituangkan dalam laporan profil risiko kepatuhan dengan berpedoman pada Prosedur Penilaian Profil Risiko BNI. Penilaian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan melakukan *assessment* atau pengujian kepatuhan atas kebijakan yang akan/telah berlaku, produk/aktivitas baru, maupun opini kepatuhan atas transaksi yang akan dilakukan BNI.

3. Pemantauan Risiko Kepatuhan, meliputi pemantauan dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala terhadap:
 - a. Batas Maksimum Pemberian Kredit
 - b. Posisi Devisa Neto.
 - c. Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valas.
 - d. Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif.
 - e. Kredit bermasalah (*non-performing loan*).
 - f. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
 - g. Kewajiban laporan kepada pihak eksternal.
 - h. Pelaksanaan komitmen bank kepada pihak eksternal.
 - i. Tingkat Risiko Kepatuhan.
 - j. Peringkat Risiko Komposit bank.
4. Pengendalian Risiko Kepatuhan, dilakukan dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BNI telah sesuai dengan ketentuan Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan BNI terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Regulator (dhi. OJK dan BI) dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Pengendalian Risiko Kepatuhan tidak hanya dilakukan



terhadap unit organisasi yang ada di dalam negeri tetapi termasuk juga unit organisasi yang ada di luar negeri. BNI harus memastikan memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan di negara kantor cabang BNI.

RISIKO REPUTASI

TATA KELOLA DAN ORGANISASI

Manajemen risiko reputasi dilakukan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan (KMP) yang berada di bawah pengawasan aktif Direktur Utama. Pemantauan terhadap pemberitaan (*news management*) dan pengelolaan krisis komunikasi serta *monitoring* opini/komentar *news media* atau *social media* dilakukan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan. Sedangkan pengelolaan *komplain/keluhan nasabah* dilakukan bekerja sama dengan *BNI Contact Center* (BCC).

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Implementasi manajemen risiko reputasi mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Reputasi serta Kebijakan dan Prosedur terkait lainnya.

PROSES

Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan fungsi dan proses manajemen risiko reputasi, antara lain melalui proses sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Reputasi, dilakukan dari beberapa sumber data/atau informasi antara lain pemberitaan media massa, situs BNI dan analisis jejaring media sosial, pengaduan/komplain nasabah melalui layanan nasabah maupun lewat media massa dan media sosial, serta kuesioner *survey* kepuasan nasabah. BNI harus mencatat dan menatausahakan setiap kejadian yang terkait dengan Risiko Reputasi, termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan kejadian dimaksud dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas tertentu. Masing-masing kelompok data dan /atau informasi ditangani secara berbeda sesuai dengan dampak risiko reputasi yang ditimbulkannya.
2. Pengukuran Risiko Reputasi, dilakukan dengan menggunakan indikator antara lain sebagai berikut:
 - a. Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif terhadap BNI.

Frekuensi, jenis media, dan materialitas pemberitaan negatif terhadap BNI, meliputi juga pengurus bank, dengan melakukan pengukuran dan indikatornya sebagai berikut:

- i. Frekuensi dan skala pemberitaan negatif BNI dan Perusahaan Anak di media cetak dan media *online*.
- ii. Materialisasi pemberitaan negatif dinilai berdasarkan tindak lanjut BNI menanggapi pemberitaan negatif.
- b. Frekuensi dan materialitas Keluhan Nasabah, pengukuran dan indikatornya adalah:
 - i. Frekuensi keluhan nasabah.
 - ii. Penyelesaian Keluhan Nasabah.
 - iii. Materialitas keluhan nasabah.
- c. Frekuensi dan materialitas Pelanggaran Etika Bisnis/norma-norma bisnis yang berlaku secara umum, pengukuran dan indikator, antara lain:
 - i. Frekuensi dan skala pemberitaan negatif terkait Transparansi Informasi Keuangan.
 - ii. Frekuensi dan skala pemberitaan negatif terkait kerja sama bisnis BNI dengan *stakeholder* lainnya.
3. Pemantauan Risiko Reputasi, secara *bank wide* dilakukan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan (KMP), dengan melaporkan Risiko Reputasi yang terjadi kepada Direksi baik secara insidental pada saat kejadian, maupun secara berkala termasuk tindak lanjut yang diperlukan.

Pemantauan terhadap pemberitaan (*news management*) dan pengelolaan krisis komunikasi serta *monitoring* opini/komentar *news media* atau *social media* serta pemilihan strategi untuk merespon opini yang berkembang di *social media* dilakukan berkoordinasi dengan Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan (KMP). Sedangkan pengelolaan *komplain/keluhan nasabah* dilakukan bekerja sama dengan *BNI Contact Center* (BCC).

Evaluasi secara harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan atas risiko reputasi yang dihadapi BNI, dituangkan dalam Laporan Media *Monitoring*.

4. Pengendalian Risiko Reputasi BNI segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi dan juga telah mengembangkan mekanisme dalam melakukan tindakan pengendalian risiko reputasi yang efektif. Secara umum, pengendalian risiko reputasi dilakukan melalui 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. Pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan risiko reputasi.
 - b. Pemulihan reputasi BNI setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko reputasi.



Mitigasi Risiko Reputasi maupun kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan biaya. Meskipun demikian, dapat saja Risiko Reputasi tersebut diterima sepanjang masih sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil.

Beberapa upaya pengendalian risiko adalah dengan:

- a. Melakukan Standardisasi kompetensi staf kehumasan/hubungan media di Divisi Komunikasi Perusahaan, kantor wilayah/regional agar memiliki kemampuan kepekaan dalam merespon isu dan opini yang berkembang.
- b. Menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) sebagai standar kecepatan melakukan respon atas komplain nasabah. Pengelolaan Risiko Reputasi pada saat krisis dilakukan melalui penetapan standar *Crisis Contingency Plan* yang diimplementasikan ketika terjadi krisis dari skala ringan hingga skala berat. *Crisis Contingency Plan* tersebut, terdiri dari:
 - i. Review masalah atau kronologis
 - ii. Alur informasi
 - iii. Penentuan personal *incharge*
 - iv. Penetapan kewenangan dan juru bicara
 - v. Jadwal aktivitas penanganan krisis
 - vi. Alternatif strategi komunikasi
 - vii. Evaluasi

MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI PADA KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

STRUKTUR KELOMPOK USAHA BNI

1. Badan Hukum Pemilik BNI

Berdasar pada komposisi kepemilikan saham, kepemilikan BNI mayoritas adalah Pemerintah RI sebesar 60% , Publik Domestik sebesar 10%, dan Publik Asing (*foreign*) sebesar 30%. Kepemilikan oleh Pemerintah RI direpresentasikan melalui Kementerian BUMN, sedangkan untuk kepemilikan publik asing melalui institusi asing (*foreign institution*). Untuk kepemilikan publik domestik antara lain melalui reksa dana, dana pensiun, yayasan, perusahaan, asuransi, institusi domestik lain serta kepemilikan oleh individu.

2. Ultimate Shareholders

Kepemilikan mayoritas saham BNI adalah Kementerian BUMN sebagai representasi dari Pemerintah RI dalam Rapat Umum Pemegang saham dengan kepemilikan sebesar 60%.

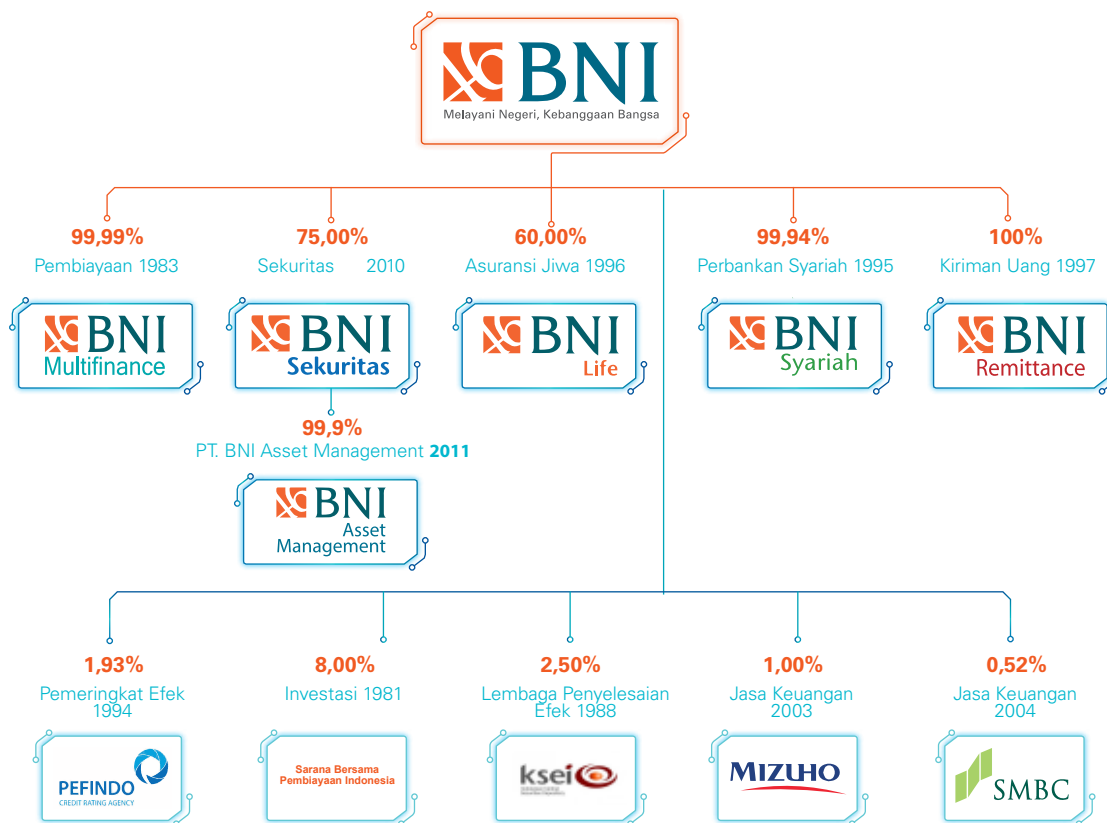
3. Perusahaan Terelasi (*Sister Company*)

Cfm pasal 4 POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014, perusahaan terelasi (*sister company*) adalah beberapa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.

Pemegang saham pengendali utama BNI adalah Pemerintah Republik Indonesia yang juga selaku pemilik mayoritas perusahaan BUMN lainnya yang bergerak dalam industri Lembaga Jasa Keuangan. Namun berdasarkan POJK tersebut hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dikecualikan dari pengertian Konglomerasi Keuangan, sehingga bank-bank Himbara bukanlah *sister company* BNI.

4. Perusahaan Anak

BNI memiliki penempatan modal di 5 (lima) Perusahaan Anak dengan kepemilikan mayoritas dan sebagai entitas pengendali, dan 5 (lima) lembaga jasa keuangan dengan kepemilikan minoritas dan bukan sebagai pengendali, serta 1 (satu) perusahaan cucu. Organ *Holding* Konglomerasi Keuangan BNI adalah sebagai berikut:



Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (KK), Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang masuk dalam KK meliputi jenis LJK bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek dan/atau perusahaan pembiayaan, termasuk perusahaan cucu.

Struktur Konglomerasi Keuangan BNI ditetapkan mempertimbangkan kesesuaian jenis usaha Perusahaan Anak dengan ketentuan OJK serta mempertimbangkan signifikansi penyertaan BNI di masing-masing Perusahaan Anak LJK anggota KK BNI.

Struktur Konglomerasi Keuangan BNI terdiri dari:

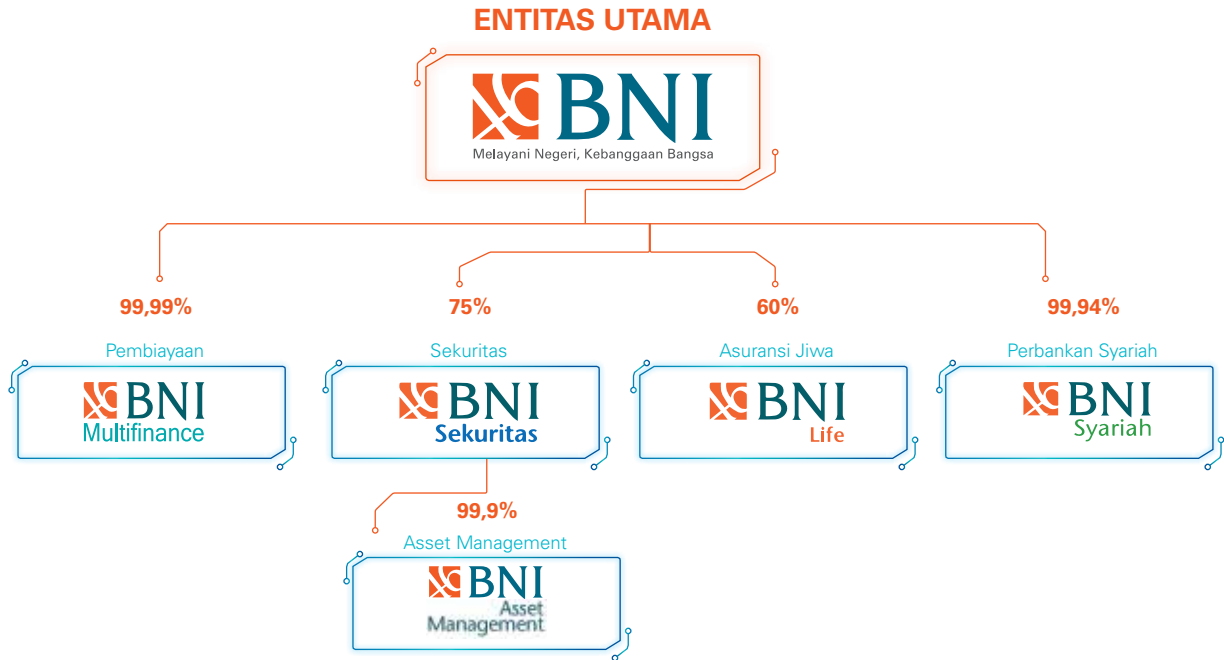
1. Entitas Utama: PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
2. LJK anggota Konglomerasi Keuangan:
 - a. PT BNI Multifinance
 - b. PT BNI Sekuritas
 - c. PT BNI Life Insurance
 - d. PT BNI Syariah
 - e. PT BNI Asset Management

Berdasarkan komposisi kepemilikan saham BNI pada LJK anggota KK BNI per 31 Desember 2018, kepemilikan BNI pada masing-masing LJK anggota KK BNI, yaitu:

1. BNI Multifinance 99,99%
2. BNI Sekuritas 75,00%
3. BNI Life 60,00%
4. BNI Syariah 99,94%
5. BNI Asset Management 99,90%



Berikut ini adalah Struktur Konglomerasi Keuangan BNI:



TRANSAKSI ANTARA BANK DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

1. Hubungan Keuangan

Untuk menilai hubungan keuangan yang material secara *intra-group* antar LJK dalam KK BNI diukur berdasarkan nilai transaksi keuangan BNI dengan LJK anggota KK BNI, maupun antar sesama LJK dalam KK BNI, meliputi transaksi: penyertaan, garansi bank, pinjaman, surat berharga, serta giro. Kontribusi nilai transaksi *intra-group* antar LJK terhadap total transaksi adalah sebagai berikut:

Entitas	Keterkaitan Intra Group (%)					
	BNI	BNI Syariah	BNI Life	BNI Multifinance	BNI Sekuritas	BNI Asset Mngt
BNI	-	21,06%	2,17%	2,80%	0,54%	24,53%
BNI Syariah	0,11%	-	-	-	0,62%	1,04%
BNI Life	-	0,54%	-	0,05%	3,78%	9,13%
BNI Multifinance	0,15%	-	0,04%	-	0,04%	0,01%
BNI Sekuritas	25,42%	-	-	-	-	7,67%
BNI Asset Management	0,29%	-	-	-	-	-

2. Penyertaan Modal

Berdasarkan regulasi perbankan, PBI No. 15/11/PBI/2013 tanggal 22 November 2013, serta POJK No. 36/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal, Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.



Nilai Penyertaan Modal antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI posisi 31 Desember 2018 sebagai berikut:

No	Nama LJK yang melakukan penyertaan (investor)	Nama LJK tujuan penyertaan modal (investee)	Waktu Penyertaan Modal 1)	Porsi Penyertaan Modal 2)	Share Nilai Penyertaan Modal 1) terhadap total (%)
1	BNI	BNI Sekuritas	Maret 1996	75,00%	3,03%
2	BNI	BNI Life Insurance	Agustus 2012	60,00%	11,97%
3	BNI	BNI Syariah	September 2014 Desember 2017	99,99%	75,89%
4	BNI	BNI Multifinance	Juni 2016	99,99%	9,06%
5	BNI Life	BNI Syariah	November 2012	0,70%	0,05%
6	BNI Life	BNI Syariah	September 2014		
Total Penyertaan Modal					100,00%

Keterangan:

Tanggal, bulan dan tahun efektif dimulainya penyertaan modal
 Persentase penyertaan modal (kepemilikan) pada perusahaan investee per posisi laporan
 Nilai penyertaan modal per posisi laporan

3. Dukungan Keuangan antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI

No	Nama LJK yang melakukan Penyediaan Dana	Nama LJK Tujuan Penyediaan Dana	Jenis Penyediaan Dana	Share Nilai Penyediaan Dana Terhadap Total (%)
1	BNI	BNI Syariah	Penyertaan Modal, Garansi Bank, Surat Berharga Peningkatan DPK, Supply Chain Financing, Pengelolaan Dana Haji, Perjanjian Pendampingan Teknis (SLA)	21,06%
2	BNI	BNI Multifinance	Penyertaan Modal, Garansi Bank, Pemberian KMK	2,80%
3	BNI	BNI Life	Penyertaan Modal, Garansi Bank, Corporate Card	2,17%
4	BNI	BNI Sekuritas	Penyertaan Modal, Garansi Bank, Corporate Card	0,54%
5	BNI	BNI Asset Management	Pengelolaan Aset Investasi DPLK BNI, Penjualan Reksadana	24,53%
6	BNI Syariah	BNI	Perjanjian Pendampingan Teknis (SLA)	0,11%
6	BNI Syariah	BNI Sekuritas	Surat Berharga	0,62%
7	BNI Syariah	BNI Asset Management	Reksadana Terpoteksi	1,04%
8	BNI Multifinance	BNI	Operating Lease, Finance Lease	0,15%
8	BNI Multifinance	BNI Asset Management	Operating Lease	0,01%
9	BNI Multifinance	BNI Sekuritas	Operating Lease Kendaraan dan Trading Platform	0,04%
	BNI Multifinance	BNI Life Insurance	Operating Lease	0,04%
10	BNI Life Insurance	BNI Asset Management	Asuransi Kesehatan Pegawai, Reksadana	9,13%
11	BNI Life Insurance	BNI Sekuritas	Asuransi Kesehatan Pegawai, Transaksi Obligasi	3,78%
12	BNI Life Insurance	BNI Multifinance	Asuransi Kesehatan Pegawai, Operating Lease	0,05%
13	BNI Life Insurance	BNI Syariah	Asuransi Kesehatan Pegawai, Pemasaran in Branch, telemarketing, Flexi Umroh	0,54%
	BNI Sekuritas	BNI	Kerja sama Brokerage Obligasi	25,42%
14	BNI Sekuritas	BNI Asset Management	Transaksi Brokerage Surat Berharga, Reksadana	7,67%
	BNI Asset Management	BNI	Investasi DPLK BNI	0,29%
Total Penyediaan Dana				100,00%



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Konglomerasi Keuangan BNI perlu memperhatikan seluruh Risiko melekat dalam Konglomerasi Keuangan yang dapat memengaruhi kelangsungan usahanya.

1. Jenis Risiko dalam Konglomerasi Keuangan BNI

- Dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, BNI sebagai Entitas Utama serta seluruh LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNI wajib mengelola 10 (sepuluh) jenis Risiko, yaitu:
- Risiko Kredit.**
Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Konglomerasi Keuangan.
 - Risiko Pasar.**
Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki Konglomerasi Keuangan.
 - Risiko Likuiditas.**
Risiko akibat ketidakmampuan Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari Konglomerasi Keuangan.
 - Risiko Operasional.**
Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Konglomerasi Keuangan.
 - Risiko Hukum.**
Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan rendahnya pengetahuan/pemahaman atas hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
 - Risiko Strategik.**
Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
 - Risiko Kepatuhan.**
Risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
 - Risiko Reputasi.**
Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan

pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif baik terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan maupun terhadap Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

i. Risiko Transaksi Intra-Grup.

Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana

j. Risiko Asuransi.

Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

2. Potensi Kerugian yang Dihadapi Konglomerasi Keuangan BNI

Untuk mengetahui potensi kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan BNI dilakukan melalui penilaian Profil Risiko Terintegrasi. Berdasarkan hasil *Self Assessment* Profil Risiko Terintegrasi terhadap 10 jenis Risiko posisi 31 Desember 2017, peringkat risiko Konglomerasi Keuangan BNI adalah 2 (*low to moderate*) yang berarti bahwa kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.

3. Mitigasi Risiko

BNI sebagai Entitas Utama melakukan pengendalian risiko secara terintegrasi terutama risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan.

Metode pengendalian Risiko Terintegrasi dilakukan antara lain dengan:

- Menetapkan limit-limit risiko, yaitu:
 - Limit Risiko secara keseluruhan (limit terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI).
 - Limit untuk setiap jenis risiko.
 - Limit Risiko setiap LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNI yang mempunyai eksposur Risiko.
- Mekanisme persetujuan atau eskalasi apabila terjadi pelampauan Limit Risiko secara keseluruhan.
- Mekanisme *feedback/corrective action* atas hasil pemantauan Profil Risiko Terintegrasi



Laporan Keuangan

1072 REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018



**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
dan Entitas Anak/*and Subsidiaries***

Laporan keuangan konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements
As of 31 December 2018 and for the year then ended
with independent auditors' report

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2018
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES**

No. DIR/ 017

No. DIR/ 017

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Achmad Baiquni
Alamat kantor : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta
10220, Indonesia
Nomor telepon : 5728043
Alamat rumah : Jl. Taman Wijaya Kusuma II / 21 C Cilandak,
Jakarta Selatan
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Rico Budidarmo
Alamat kantor : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta
10220, Indonesia
Nomor telepon : 6/28948
Alamat rumah : Jl. Cilandak IV/11 RT.009 RW.003
Cilandak Barat, Jakarta Selatan
Jabatan : Direktur Treasury & International Banking

1. Name : Achmad Baiquni
Office address : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta
10220, Indonesia
Telephone : 5728043
Residential address : Jl. Taman Wijaya Kusuma II / 21C
Cilandak Jakarta Selatan
Title : President Director
2. Name : Rico Budidarmo
Office address : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta
10220, Indonesia
Telephone : 5728948
Residential address : Jl. Cilandak IV/11 RT.009 RW.003
Cilandak Barat, Jakarta Selatan
Title : Managing Director – Treasury &
International Banking

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak.

1. We are responsible for the preparation and the presentation of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements;
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit material information or material facts;
4. We are responsible for PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Directors

Jakarta, 16 JAN 2019


Achmad Baiquni
 Direktur Utama/
 President Director


Rico Budidarmo
 Direktur Treasury & International Banking/
 Managing Director – Treasury & International Banking

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Kantor Pusat
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
 Jakarta 10220, Indonesia
 www.bni.co.id

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2018 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1 - 5	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	6 - 8	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	9 - 10	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	11 - 12	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	13 - 245	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi Keuangan Tambahan	246 - 256	<i>Supplementary Financial Information</i>

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00024/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/2019

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00024/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/2019

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00024/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/I/2019 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00024/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/I/2019 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2018, and for the year then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00024/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/1/2019/2019 (lanjutan)

Hal-hal lain (lanjutan)

Informasi keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai Informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00024/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/1/2019 (continued)

Other matters (continued)

The accompanying financial information of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2018, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements as a whole.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Danil Setiadi Handaja, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008/Public Accountant Registration No. AP.1008

16 Januari 2019/January 16, 2019

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2018	2017	
ASET				ASSETS
Kas	4	14,043,846	11,577,664	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5	35,591,243	32,700,717	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain				Current accounts with other banks
- Pihak berelasi		78,908	1,407,434	Related parties -
- Pihak ketiga		13,058,191	19,931,003	Third parties -
Total giro pada bank lain		13,137,099	21,338,437	Total current accounts with other banks
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(3,271)	(3,287)	Less: Allowance for impairment losses
	6,47b	13,133,828	21,335,150	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia				Placements with other banks and Bank Indonesia
- Pihak berelasi		1,677,584	1,298,627	Related parties -
- Pihak ketiga		37,646,876	27,294,621	Third parties -
Total penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia		39,324,460	28,593,248	Total placements with other banks and Bank Indonesia
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(15)	(510)	Less: Allowance for impairment losses
	7,47c	39,324,445	28,592,738	
Efek-efek				Marketable securities
- Pihak berelasi		8,590,229	6,053,845	Related parties -
- Pihak ketiga		23,772,178	30,305,149	Third parties -
Total efek-efek		32,362,407	36,358,994	Total marketable securities
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(318,137)	(309,095)	Less: Allowance for impairment losses
	8,47d	32,044,270	36,049,899	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	14	-	679,122	Securities purchased under agreements to resell
Wesel ekspor dan tagihan lainnya				Bills and other receivables
- Pihak berelasi		11,707,785	8,510,551	Related parties -
- Pihak ketiga		13,037,421	7,288,619	Third parties -
Total wesel ekspor dan tagihan lainnya		24,745,206	15,799,170	Total bills and other receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(158,344)	(98,245)	Less: Allowance for impairment losses
	9,47f	24,586,862	15,700,925	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.



The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2018	2017	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
Tagihan akseptasi				Acceptances receivables
- Pihak berelasi		5,548,051	5,768,236	Related parties -
- Pihak ketiga		14,926,968	12,502,787	Third parties -
Total tagihan akseptasi		20,475,019	18,271,023	Total acceptances receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(179,742)	(164,611)	Less: Allowance for impairment losses
	10,47g	20,295,277	18,106,412	
Tagihan derivatif				Derivative receivables
- Pihak berelasi		56,317	27,361	Related parties -
- Pihak ketiga		548,931	189,523	Third parties -
Total tagihan derivatif	11,47h	605,248	216,884	Total derivatives receivables
Pinjaman yang diberikan				Loans
- Pihak berelasi		107,404,932	86,415,498	Related parties -
- Pihak ketiga		405,373,565	354,898,068	Third parties -
Total pinjaman yang diberikan		512,778,497	441,313,566	Total loans
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(14,891,609)	(14,523,585)	Less: Allowance for impairment losses
	12,47i	497,886,888	426,789,981	
Obligasi Pemerintah	13,47e	86,791,402	79,849,452	Government bonds
Pajak dibayar dimuka	27a	1,624,418	622,723	Prepaid taxes
Beban dibayar dimuka	15	2,337,403	2,318,516	Prepaid expenses
Penyertaan saham		785,007	785,823	Equity investments
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	47j	(181,084)	(72,400)	Less: Allowance for impairment losses
	16	603,923	713,423	
Aset lain-lain - neto	17	11,900,084	10,380,886	Other assets - net
Aset tetap		34,008,656	30,205,202	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(7,882,148)	(7,400,513)	Less: Accumulated depreciation
	18	26,126,508	22,804,689	
Aset pajak tangguhan - neto	27d	1,676,366	890,903	Deferred tax assets - net
TOTAL ASET		808,572,011	709,330,084	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2018	2017	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	19	4,160,295	4,867,547	Obligations due immediately
Simpanan nasabah				Deposits from customers
- Pihak berelasi		87,463,874	87,756,080	Related parties -
- Pihak ketiga		464,708,328	404,991,868	Third parties -
Total simpanan nasabah	20,47k	552,172,202	492,747,948	Total deposits from customers
Simpanan dari bank lain				Deposits from other banks
- Pihak berelasi		2,968,169	2,246,156	Related parties -
- Pihak ketiga		10,906,326	9,488,051	Third parties -
Total simpanan dari bank lain	21,47l	13,874,495	11,734,207	Total deposits from other banks
Liabilitas derivatif				Derivative payables
- Pihak berelasi		41,234	30,630	Related parties -
- Pihak ketiga		280,794	83,190	Third parties -
Total liabilitas derivatif	11,47o	322,028	113,820	Total derivative payables
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	22	21,524,329	2,390,066	Securities sold under agreements to repurchase
Liabilitas akseptasi				Acceptance payables
- Pihak berelasi		1,253,947	1,160,981	Related parties -
- Pihak ketiga		3,162,666	3,346,350	Third parties -
Total liabilitas akseptasi	23,47r	4,416,613	4,507,331	Total acceptances payables
Beban yang masih harus dibayar	24	876,347	971,479	Accrued expenses
Utang pajak				Taxes payable
- Pajak penghasilan badan		415,756	20,047	Corporate income tax -
- Pajak lainnya		65,308	60,378	Other taxes -
Total utang pajak	27b	481,064	80,425	Total taxes payable
Imbalan kerja	44	3,512,266	4,093,855	Employee benefits
Penyisihan	25	177,519	192,406	Provisions
Liabilitas lain-lain	26	14,608,465	14,730,714	Other liabilities
Efek-efek yang diterbitkan	28,47n	2,987,464	2,986,279	Securities issued
Pinjaman yang diterima	29,47o	52,024,506	44,670,741	Borrowings
Efek-efek subordinasi	30,47p	99,953	-	Subordinated securities
TOTAL LIABILITAS		671,237,546	584,086,818	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.



The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2018	2017	
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Simpanan nasabah				Deposits from customers
Giro <i>Mudharabah</i>	31,47s			Mudharabah current accounts
- Pihak berelasi		209,056	319,334	Related parties -
- Pihak ketiga		957,683	609,829	Third parties -
Total giro <i>Mudharabah</i>		1,166,739	929,163	Total Mudharabah current accounts
Tabungan <i>Mudharabah</i>	32,47u			Mudharabah saving deposits
- Pihak berelasi		16,574	9,522	Related parties -
- Pihak ketiga		9,786,293	8,244,874	Third parties -
Total tabungan <i>Mudharabah</i>		9,802,867	8,254,396	Total Mudharabah saving deposits
Deposito <i>Mudharabah</i>	33,47t			Mudharabah time deposits
- Pihak berelasi		370,527	7,843,403	Related parties -
- Pihak ketiga		15,262,439	6,323,072	Third parties -
Total deposito <i>Mudharabah</i>		15,632,966	14,166,475	Total Mudharabah time deposits
Total simpanan nasabah		26,602,572	23,350,034	Total deposits from customers
Simpanan dari bank lain				Deposits from other banks
Giro <i>Mudharabah</i>	31			Mudharabah current accounts
- Pihak berelasi		-	-	Related parties -
- Pihak ketiga		24,314	21,739	Third parties -
Total giro <i>Mudharabah</i>		24,314	21,739	Total Mudharabah current accounts
Tabungan <i>Mudharabah</i>	32			Mudharabah saving deposits
- Pihak berelasi		-	-	Related parties -
- Pihak ketiga		109,717	143,934	Third parties -
Total tabungan <i>Mudharabah</i>		109,717	143,934	Total Mudharabah saving deposits
Deposito <i>Mudharabah</i>	33			Mudharabah time deposits
- Pihak berelasi		-	-	Related parties -
- Pihak ketiga		224,073	328,255	Third parties -
Total deposito <i>Mudharabah</i>		224,073	328,255	Total Mudharabah time deposits
Total simpanan dari bank lain		358,104	493,928	Total deposits from other banks
Sukuk <i>Mudharabah</i> yang diterbitkan	34,47v			Mudharabah Sukuk issued
- Pihak berelasi		-	259,500	Related parties -
- Pihak ketiga		-	236,500	Third parties -
Total Sukuk <i>Mudharabah</i> yang diterbitkan		-	496,000	Total Mudharabah Sukuk issued
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		26,960,676	24,339,962	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2018	2017	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to equity holders of the parent entity
Modal saham:				Share capital:
- Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp7.500 per saham (dalam Rupiah penuh)				Class A Dwiwarna - Rp7,500 par value per share (in full Rupiah amount)
- Seri B - nilai nominal Rp7.500 per saham (dalam Rupiah penuh)				Class B - Rp7,500 par value per share (in full Rupiah amount)
- Seri C - nilai nominal Rp375 per saham (dalam Rupiah penuh)				Class C - Rp375 par value per share (in full Rupiah amount)
Modal dasar:				Share capital - Authorized:
- Seri A Dwiwarna - 1 saham				Class A Dwiwarna - 1 share
- Seri B - 289.341.866 saham				Class B - 289,341,866 shares
- Seri C - 34.213.162.660 saham				Class C - 34,213,162,660 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				Issued and fully paid:
- Seri A Dwiwarna - 1 saham				Class A Dwiwarna - 1 share
- Seri B - 289.341.866 saham				Class B - 289,341,866 shares
- Seri C - 18.359.314.591 saham	35	9,054,807	9,054,807	Class C - 18,359,314,591 shares
Tambahan modal disetor	35	14,568,468	14,568,468	Additional paid-in capital
Transaksi dengan kepentingan nonpengendali	1i	2,256,999	2,256,999	Transactions with non-controlling interests
Cadangan revaluasi aset	18	14,978,731	12,283,125	Asset revaluation reserve
(Rugi) laba yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak	8,13	(3,913,839)	22,230	Unrealized (losses) gains on available-for-sale marketable securities and Government Bonds, net of tax
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		84,886	93,155	Exchange difference on translation of foreign currency financial statements
Saldo laba				Retained earnings
Sudah ditentukan penggunaannya				Appropriated
Cadangan umum dan wajib	37	2,778,412	2,778,412	General and legal reserves
Cadangan khusus	38	-	-	Specific reserves
Tidak ditentukan penggunaannya		68,268,420	57,535,093	Unappropriated
Total saldo laba		71,046,832	60,313,505	Total retained earnings
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		108,076,884	98,592,289	Total equity attributable to equity holders of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		2,296,905	2,311,015	Non-controlling interests
TOTAL EKUITAS		110,373,789	100,903,304	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		808,572,011	709,330,084	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.



The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December		
		2018	2017	
PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH	39			INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME
Pendapatan bunga		50,571,284	45,003,201	Interest Income
Pendapatan syariah		3,567,329	3,174,648	Sharia Income
TOTAL PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH		54,138,613	48,177,849	TOTAL INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME
BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH	40			INTEREST EXPENSE AND SHARIA EXPENSE
Beban bunga		(17,684,456)	(15,272,144)	Interest Expense
Beban syariah		(1,007,842)	(967,942)	Sharia Expense
TOTAL BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH		(18,692,298)	(16,240,086)	TOTAL INTEREST EXPENSE AND SHARIA EXPENSE
PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH - NETO		35,446,315	31,937,763	INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME - NET
PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI BEBAN KLAIM		5,997,417 (4,285,560)	6,871,380 (5,103,812)	PREMIUM INCOME AND INVESTMENTS RETURN CLAIMS EXPENSE
PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI - NETO		1,711,857	1,767,568	PREMIUM INCOME AND INVESTMENTS RETURN - NET
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Provisi dan komisi lainnya		7,801,854	6,871,907	Other fees and commission
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		1,997,152	1,732,289	Recovery of assets written-off
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan		11,956	(38,254)	Unrealized gains (losses) on changes in fair value of assets held for trading
Keuntungan dari penjualan aset keuangan yang diklasifikasikan tersedia untuk dijual dan dimiliki untuk diperdagangkan		508,516	720,485	Gain on sale of financial assets classified as available-for-sale and held for trading
Laba selisih kurs - neto		493,590	907,958	Foreign exchange gains - net
Lain-lain		799,531	845,674	Others
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		11,612,599	11,040,059	TOTAL OTHER OPERATING INCOME
PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI	6,7,8,9,10 12,16,25b	(7,388,411)	(7,126,335)	ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Gaji dan tunjangan	41,44,47y	(9,518,738)	(9,277,196)	Salaries and employee benefits
Umum dan administrasi	43	(7,667,065)	(6,922,572)	General and administrative
Beban promosi		(1,290,553)	(1,038,713)	Promotion expense
Premi penjaminan simpanan		(970,733)	(877,307)	Deposit guarantee premium
Lain-lain	42	(2,335,872)	(2,280,604)	Others
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		(21,782,961)	(20,396,392)	TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES
LABA OPERASIONAL		19,599,399	17,222,663	OPERATING INCOME

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended 31 December		
		2018	2017	
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO		221,316	(57,276)	NON-OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		19,820,715	17,165,387	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK				TAX EXPENSE
Kini		(4,948,261)	(3,293,379)	Current
Tangguhan		219,309	(101,416)	Deferred
TOTAL BEBAN PAJAK	27c	(4,728,952)	(3,394,795)	TOTAL TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		15,091,763	13,770,592	INCOME FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan revaluasi aset tetap	18	2,815,509	(3,791)	Gain on revaluation of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbangan kerja		601,440	(148,679)	Remeasurement of post employment benefits
Pajak penghasilan terkait		(235,860)	29,736	Related income tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		(8,270)	11,440	Translation adjustment of foreign currency financial statements
(Kerugian) keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		(5,035,413)	2,447,926	(Loss) gain on changes in value of financial assets categorized as available-for-sale
Pajak penghasilan terkait		1,007,083	(489,585)	Related income tax
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(855,511)	1,847,047	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER TAXES
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		14,236,252	15,617,639	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		15,015,118	13,616,476	Equity holders of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		76,645	154,116	Non-controlling interests
TOTAL		15,091,763	13,770,592	TOTAL

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.



The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended 31 December		
		2018	2017	
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		14,250,362	15,403,290	Equity holders of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		(14,110)	214,349	Non-controlling interests
TOTAL		14,236,252	15,617,639	TOTAL
LABA PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (DALAM RUPIAH PENUH)	45	805	730	BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY (IN FULL RUPIAH AMOUNT)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

			(Rugi) laba yang belum direalisasi atas efek-efek dan Divestasi dalam kelompok	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ Exchange difference of foreign currency financial statements	Cadangan penilaian aset/ Asset revaluation reserve	Dicadangkan/ Appropriated	Total ekuitas yang dapat dikapitalisasi/ Total equity attributable to Non-controlling Interests			Total ekuitas/ Total equity
			Unrealized gains on available securities and Government Bonds, net of tax							
			Transaksi dengan kepentingan non-controlling interests							
			Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up capital							
			Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital							
Saldo per 31 Desember 2017	9,084,807	14,568,468	2,256,999	22,230	12,283,725	2,778,412	57,535,093	98,992,289	2,311,015	100,903,304
Labra komprehensif untuk tahun berjalan	8,13	-	-	(3,936,089)	2,685,606	-	15,489,094	14,250,382	(14,110)	14,236,252
Pembagian dividen	36	-	-	-	-	-	(4,765,767)	(4,765,767)	-	(4,765,767)
Saldo per 31 Desember 2018	9,084,807	14,568,468	2,256,999	(3,913,839)	14,978,731	2,778,412	68,268,420	108,0176,884	2,296,905	110,373,789

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak sebesar Rp483,976.

*) Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefits, net of tax amounting to Rp483,976.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.



The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For The Year Ended 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	(Rupiah) laba yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah tersedia untuk dijual, setelah disesuaikan/ Unrealized for-sale securities and Government Bonds, net of tax	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ Exchange difference on translation of foreign financial statements	Cadangan revaluasi aset/ revaluation reserve	Dicadangkan/ Appropriated	Saldo laba/Retained earnings	Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity holders of the parent entity	Keuntungan non-controlling interests	Total ekuitas/ Total equity	
Saldo per 31 Desember 2016	9,054,807	14,568,468	2,256,999	2,778,412	48,019,910	87,157,334	2,096,666	89,254,000	Balance as of 31 December 2016
Laba komprehensif untuk tahun berjalan	8,13	-	-	-	13,489,518	15,403,290	214,349	15,617,639	Comprehensive income for the year
Pembagian dividen									Distribution of dividends
Pelepasan tanah/bangunan yang telah direvaluasi					(3,968,562)	(3,968,562)	-	(3,968,562)	Land/building disposal after revaluation
Saldo per 31 Desember 2017	9,054,807	14,568,468	2,256,999	2,778,412	57,535,093	98,592,289	2,311,015	100,903,304	Balance as of 31 December 2017

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak sebesar Rp132.958.

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak sebesar Rp132.958.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended 31 December			
	Catatan/ Notes	2018		2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	
Penerimaan pendapatan bunga		49,572,508	44,494,561	Receipts from interest income
Penerimaan pendapatan syariah		3,567,329	3,174,648	Receipts from sharia income
Pembayaran beban bunga		(17,367,950)	(15,207,118)	Payments of interest expenses
Pembayaran beban syariah		(1,007,842)	(967,942)	Payments of sharia expenses
Pendapatan premi dan hasil investasi		5,997,417	6,871,380	Premium income and investments return
Beban klaim		(4,285,560)	(5,103,812)	Claims expenses
Pendapatan operasional lainnya		11,540,546	10,118,239	Other operating income
Beban operasional lainnya		(18,924,886)	(18,715,640)	Other operating expenses
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto		221,316	(57,275)	Non-operating income (expenses) - net
Pembayaran pajak penghasilan		(3,932,801)	(3,365,755)	Payment of income tax
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		25,380,077	21,241,286	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				Decrease (increase) in operating assets:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		(941,829)	759,492	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		766,247	(5,941,473)	Marketable securities and Government Bonds at fair value through profit or loss
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	14	679,122	985,628	Securities purchased under agreements to resell
Wesel ekspor dan tagihan lainnya		(8,946,036)	(6,835,671)	Bills and other receivables
Pinjaman yang diberikan		(79,299,503)	(57,434,118)	Loans
Tagihan akseptasi		(2,203,996)	(3,461,795)	Acceptances receivables
Beban dibayar di muka	15	(18,886)	92,375	Prepaid expenses
Aset lain-lain		(2,141,799)	(3,445,990)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	19	(707,252)	1,591,879	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	20	59,424,254	77,294,864	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	21	2,140,288	1,422,104	Deposits from other banks
Beban yang masih harus dibayar	24	(95,132)	(75,760)	Accrued expenses
Imbalan kerja	44	(407,005)	553,693	Employee benefits
Liabilitas akseptasi	23	(90,718)	148,794	Acceptances payables
Utang pajak		4,930	2,031	Taxes payable
Kenaikan efek-efek yang diterbitkan	28	1,185	-	Increase in marketable securities issued
Liabilitas lain-lain	26	(438,756)	3,516,732	Other liabilities
Kenaikan dana <i>syirkah</i> temporer		2,620,714	3,263,207	Increase in deposits from temporary <i>syirkah</i> funds
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi		(4,274,095)	33,677,278	Net cash (used in) provided by operating activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.



The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
For the Year Ended 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended 31 December		
		2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan (pembelian) efek-efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo - neto		2,472,482	(8,672,745)	Sale (purchase) of marketable securities available-for-sale and held-to-maturity - net
Pembelian Obligasi Pemerintah - neto		(10,343,596)	(12,695,997)	Purchases of Government Bonds - net
Penambahan aset tetap	18	(1,945,179)	(1,947,526)	Acquisition of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	18	204,591	41,997	Proceeds from sale of fixed assets
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		(9,611,702)	(23,274,271)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Kenaikan pinjaman yang diterima	59	6,795,949	12,282,239	Increase in borrowings
Penurunan efek-efek yang diterbitkan		-	(3,744,836)	Decrease in marketable securities issued
Kenaikan (penurunan) efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	59	18,478,977	(1,374,895)	Increase (decrease) in securities sold under agreements to repurchase
Kenaikan efek-efek subordinasi	59	99,953	-	Increase in subordinated securities
Pembayaran dividen	36	(4,765,767)	(3,968,562)	Payment of dividends
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan		20,609,112	3,193,946	Net cash provided by financing activities
PENINGKATAN NETO KAS DAN SETARA KAS		6,723,315	13,596,953	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		91,977,278	78,284,151	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		221,439	96,174	Effect of foreign currency exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		98,922,032	91,977,278	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR
KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS:				COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:
Kas	4	14,043,846	11,577,664	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5	35,591,243	32,700,717	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	6	13,137,099	21,338,437	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan		36,149,844	26,360,460	Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months of acquisition date
Total kas dan setara kas		98,922,032	91,977,278	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI" atau "Bank") pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi perusahaan perseroan terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 25 April 2017 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-0010821.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BNI, ruang lingkup kegiatan BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan umum.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment of the Bank

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI" or "Bank") was originally established in Indonesia as the central bank under the name "Bank Negara Indonesia" based on Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 1946 dated 5 July 1946. Subsequently, by virtue of Law No. 17 of 1968, BNI became "Bank Negara Indonesia 1946", and changed its status to a state-owned commercial bank.

Based on Government Regulation No. 19 of 1992, dated 29 April 1992, BNI changed its legal status to a limited liability corporation (Persero). The change in legal status to become a limited liability corporation was covered by Notarial Deed No. 131, dated 31 July 1992 of Muhani Salim, S.H., and was published in Supplement No. 1A of the State Gazette No. 73 dated 11 September 1992.

In compliance with the Indonesian Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007 dated 16 August 2007, BNI's Articles of Association has been amended. The amendment was covered by Notarial Deed No. 46 dated 13 June 2008 of Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta, as approved in the Extraordinary General Shareholders' Meeting on 28 May 2008 and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-AH.01.02-50609 dated 12 August 2008 and published in Supplement No. 29015 of the State Gazette No. 103 dated 23 December 2008.

The latest amendment of BNI's Articles of Association was made regarding, among other matters, realignment of the entire Articles of Association based on Notarial Deed No. 45 dated 25 April 2017 of Fathiah Helmi, S.H. and has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-0010821.AH.01.02 dated 17 May 2017.

According to Article 3 of BNI's Articles of Association, BNI's scope of activity is to engage in general banking services.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada tanggal 28 Oktober 1996, BNI melakukan penawaran umum perdana atas 1.085.032.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) setiap saham dan harga penawaran setiap saham sebesar Rp850 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI) pada tanggal 25 November 1996.

c. Penawaran Umum Saham Terbatas I

Pada tanggal 30 Juni 1999, BNI melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 151.904.480.000 saham Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp25 (nilai penuh) setiap saham. Setiap pemegang 1 saham lama berhak membeli 35 saham baru dengan harga Rp347,58 (nilai penuh) setiap saham. Dari penawaran umum ini, BNI meningkatkan modal sahamnya sebanyak 683.916.500 lembar saham Seri C yang diterbitkan kepada masyarakat umum pada tanggal 21 Juli 1999 dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang BEI). BNI juga menerbitkan 151.220.563.500 lembar saham Seri C kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 7 April 2000 dan 30 Juni 2000 melalui program rekapitalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999.

d. Rekapitalisasi

Pada tanggal 30 Maret 2000, Menteri Keuangan menyetujui rekapitalisasi BNI sebesar Rp61,8 triliun, yang meningkat sebesar Rp9 triliun dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999. Sehubungan dengan peningkatan rekapitalisasi tersebut, yang telah disetujui melalui Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2000, BNI menerbitkan tambahan saham Seri C sebanyak 44.946.404.500 saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Initial Public Offering (IPO)

On 28 October 1996, BNI undertook an initial public offering of 1,085,032,000 Class B shares with a par value per share of Rp500 (full amount) and offering price per share of Rp850 (full amount) to the public in Indonesia. The shares began trading on the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges (currently Indonesia Stock Exchange or IDX) on 25 November 1996.

c. Limited Public Offering I

On 30 June 1999, BNI undertook a Limited Public Offering I ("LPO I") through the issuance of pre-emptive rights of 151,904,480,000 Class C shares with a par value per share of Rp25 (full amount). Each holder of 1 share was entitled to buy 35 new shares for Rp347.58 (full amount) per share. As a result of LPO I, BNI increased its share capital by 683,916,500 Class C shares to the public on 21 July 1999 and the LPO I was listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges (currently IDX). On 7 April 2000 and 30 June 2000, BNI also issued 151,220,563,500 Class C shares to the Government of Indonesia through the recapitalization program under the Government Regulation No. 52 year 1999.

d. Recapitalization

On 30 March 2000, the Ministry of Finance approved BNI's recapitalization amounting to Rp61.8 trillion, which was Rp9 trillion higher than the amount stated in the Government Regulation No. 52 year 1999. In connection with the increase in the recapitalization amount, which was approved in the Government Regulation No. 32 year 2000, BNI issued additional 44,946,404,500 Class C shares without pre-emptive rights.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Rekapitalisasi (lanjutan)

Pada tanggal 20 Juli 2001, modal saham BNI berkurang sebanyak 1.965.701.500 saham Seri C sehubungan dengan pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi kepada Pemerintah Indonesia. Pengembalian tersebut telah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 25 Juni 2001.

e. Kuasi-reorganisasi

Untuk menghilangkan konsekuensi negatif karena dibebani dengan saldo rugi, BNI melakukan kuasi-reorganisasi sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") tanggal 15 Desember 2003.

Penyesuaian kuasi-reorganisasi yang telah dibukukan pada tanggal 30 Juni 2003 adalah sebagai berikut:

Akumulasi kerugian	(58,905,232)	
Cadangan umum dan wajib	432,952	
Cadangan khusus	382,541	
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	1,190,598	
Laba yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	58,660	
Kenaikan penilaian kembali nilai wajar aktiva bersih	2,472,634	
Tambahan modal disetor	54,367,847	
		-

Anggaran Dasar BNI telah mengalami perubahan sehubungan dengan perubahan tambahan modal disetor karena adanya kuasi-reorganisasi sesuai dengan akta notaris Agung Prihatin, S.H., No. 42 tanggal 30 Desember 2003 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-29647.HT.01.07.TH.2003 tanggal 19 Desember 2003 dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 1152 tanggal 30 Januari 2004, Tambahan No. 9.

f. Penawaran Umum Saham Terbatas II

Pada tanggal 30 Juli 2007, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Pemegang Saham telah memutuskan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan sampai dengan sejumlah 1.992.253.110 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 (nilai penuh) setiap lembar saham.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Recapitalization (continued)

On 20 July 2001, BNI's share capital was reduced by 1,965,701,500 Class C shares in connection with the refund of excess recapitalization funds to the Government of Indonesia. The refund was approved by the shareholders at the Extraordinary General Shareholders' Meeting held on 25 June 2001.

e. Quasi-reorganisation

In order for BNI to eliminate the negative consequences of being burdened by accumulated losses, BNI undertook quasi-reorganisation as approved in the Extraordinary General Shareholders' Meeting ("RUPS-LB") on 15 December 2003.

The quasi-reorganisation adjustments which were booked on 30 June 2003 are as follows:

Accumulated losses	
General and legal reserve	
Specific reserve	
Fixed assets revaluation reserve	
Unrealize gain on available-for-sale securities	
Revaluation uplift in the fair value of net assets	
Additional paid-in capital	

BNI's Articles of Association were amended to reflect the changes in additional paid-in capital as a result of the quasi-reorganisation, based on Notarial Deed of Agung Prihatin, S.H., No. 42 dated 30 December 2003 which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-29647.HT.01.07.TH.2003 dated 19 December 2003 and was published in the State Gazette No. 1152, Supplement No. 9 dated 30 January 2004.

f. Limited Public Offering II

On 30 July 2007, the Extraordinary General Shareholders' Meeting approved the issuance of up to 1,992,253,110 new Class C shares through Limited Public Offering II with a par value per share of Rp375 (full amount).



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

**f. Penawaran Umum Saham Terbatas II
(lanjutan)**

Setiap pemegang 20 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BNI pada tanggal 9 Agustus 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai 3 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp2.025 (nilai penuh) setiap saham. Dari Penawaran Umum Terbatas II, BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp747.094 dan tambahan agio saham sebesar Rp3.287.218 dan biaya emisi penerbitan saham sebesar Rp195.280.

Perdagangan perdana dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2007 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI).

g. Penawaran Umum Saham Terbatas III

Pada tanggal 25 November 2010, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Pemegang Saham telah memutuskan antara lain untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor BNI melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan penerbitan HMETD sebesar 3.374.715.948 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 (nilai penuh) setiap lembar saham. HMETD tersebut dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 16 Desember 2010, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Dari PUT III tersebut, BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp1.265.519 dan tambahan agio saham, bersih setelah dikurangkan dengan biaya emisi penerbitan saham, sebesar Rp8.950.869.

h. Organisasi dan Struktur Manajemen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BNI tanggal 20 Maret 2018 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No. 37 tanggal 20 Maret 2018 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI tanggal 16 Maret 2017 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No. 42 tanggal 16 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Limited Public Offering II (continued)

Each owner of 20 old shares whose name was registered in the List of Shareholders of BNI as of 9 August 2007 at 16.00 WIB was entitled to 3 pre-emptive rights where each right entitles the owner to buy a new share at the price of Rp2,025 (full amount) per share. From the Limited Public Offering II, BNI raised Rp747,094 additional share capital and Rp3,287,218 additional paid-in capital and Rp195,280 shares issuance cost.

The initial trading took place on 13 August 2007 at the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange (currently IDX).

g. Limited Public Offering III

On 25 November 2010, at the Extraordinary General Shareholders' Meeting, the shareholders decided, among other matters, to increase the issued and paid-up capital through limited public offering with pre-emptive rights (LPO III) to shareholders for the issuance of 3,374,715,948 new Class C shares with a par value per share of Rp375 (full amount). Such pre-emptive rights can be traded inside and outside the Indonesia Stock Exchange (IDX) starting 10 December 2010 until 16 December 2010, with consideration to the existing capital market regulation. From the LPO III, BNI obtained Rp1,265,519 additional share capital and Rp8,950,869 additional paid-in capital, net of shares issuance cost.

h. Organizational and Management Structure

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of BNI as of 31 December 2018 and 2017 based on BNI's Annual Stockholders' General Meeting held on 20 March 2018, as stated under the Notarial Deed No. 37 dated 20 March 2018 and BNI's Annual Stockholders' General Meeting held on 16 March 2017, as stated under the Notarial Deed No. 42 dated 16 March 2017 are as follows:

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**h. Organisasi dan Struktur Manajemen
(lanjutan)**

**h. Organizational and Management Structure
(continued)**

	<u>2018</u>	
<u>Dewan Komisaris</u>		<u>Board of Commissioners</u>
Komisaris Utama/ Komisaris Independen Wakil Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris	Ari Kuncoro Wahyu Kuncoro Pataniari Siahaan Revrison Baswir Ahmad Fikri Assegaf Sigit Widyawan Bistok Simbolon Joni Swastanto Marwanto Harjowiryo	President Commissioner/ Independent Commissioner Vice President Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner

	<u>2017</u>	
<u>Dewan Komisaris</u>		<u>Board of Commissioners</u>
Komisaris Utama/ Komisaris Independen Wakil Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris	Ari Kuncoro Wahyu Kuncoro Pataniari Siahaan Revrison Baswir Ahmad Fikri Assegaf Bistok Simbolon Joni Swastanto Marwanto Harjowiryo	President Commissioner/ Independent Commissioner Vice President Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
<u>Direksi</u>			<u>Board of Directors</u>
Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Bisnis Korporasi Direktur Treasury & Internasional Banking Direktur Hubungan Kelembagaan Direktur Manajemen Risiko Direktur Bisnis Kecil & Jaringan Direktur Bisnis Ritel Direktur Teknologi Informasi & Operasi Direktur Kepatuhan	Achmad Baiquni Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Putrama Wahyu Setyawan Rico Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Catur Budi Harto Tambok P.S. Simanjuntak Dadang Setiabudi Endang Hidayatullah	Achmad Baiquni Herry Sidharta Rico Budidarmo Putrama Wahyu Setyawan Panji Irawan Adi Sulistyowati Imam Budi Sarjito Catur Budi Harto Anggoro Eko Cahyo Bob Tyasika Ananta -	President Director Vice President Director Managing Director - Finance Managing Director - Corporate Banking Managing Director - Treasury & International Banking Managing Director - Institutional relation Managing Director - Risk Management Managing Director - Small Business & Network Managing Director-Retail Banking Managing Director - Information Technology & Operation Managing Director - Compliance
<u>Komite Audit*)</u>			<u>Audit Committee*)</u>
Ketua Anggota Anggota Anggota	Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Lungguk Gultom	Pataniari Siahaan Ahmad Fikri Assegaf Donnaria Silalahi Bambang Ratmanto	Chairman Member Member Member

*) Pembentukan Komite Audit Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015.

*) The formation of Audit Committee is in accordance with Financial Service Authority rule No.55/POJK.04/2015 dated 29 December 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017,
Sekretaris Perusahaan BNI adalah Kiryanto.

As of 31 December 2018 and 2017, BNI's
Corporate Secretary is Kiryanto.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)

Jumlah pegawai BNI adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	Tetap/ Permanent	Tidak tetap/ Non-permanent	Total	
2018	25,839	1,385	27,224	2018
2017	24,641	3,162	27,803	2017

Kantor pusat BNI berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2018, BNI memiliki 201 kantor cabang, 1.109 kantor layanan serta 929 outlet lainnya (31 Desember 2017: 200 kantor cabang, 1.085 kantor layanan serta 848 outlet lainnya) (tidak diaudit). Selain itu, jaringan BNI juga meliputi 5 kantor cabang luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London dan Seoul serta 1 kantor perwakilan di New York.

i. Entitas Anak

BNI mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak berikut:

Nama Perusahaan/ Company Name	Kegiatan Usaha/ Business Activity	Tahun Mulai Beroperasi Komersial/ Year Started Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Total Aset/ Total Assets	
			2018	2017	2018	2017
PT BNI Life Insurance	Asuransi jiwa/ Life insurance	1997	60.00%	60.00%	17,283,191	16,288,865
PT BNI Multifinance	Pembiayaan/ Financing	1983	99.99%	99.99%	1,322,611	912,422
PT BNI Sekuritas dan Entitas Anak/ Subsidiary	Sekuritas/Securities	1995	75.00%	75.00%	869,813	1,215,169
BNI Remittance Ltd.	Jasa keuangan/ Financial services	1998	100.00%	100.00%	4,931	9,119
PT Bank BNI Syariah	Perbankan/Banking	2010	99.90%	99.90%	41,040,203	34,827,144

Semua Entitas Anak BNI berkedudukan di Jakarta, kecuali BNI Remittance Ltd. berkedudukan di Hong Kong.

PT BNI Life Insurance (“BNI Life”)

BNI Life pada awalnya didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 28 November 1996. Pada tanggal 26 November 2004, PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya telah mengubah nama menjadi PT BNI Life Insurance.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar BNI Life, ruang lingkup kegiatan BNI Life adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang asuransi jiwa termasuk usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah. BNI Life memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-305/KMK.01 7/1997 tanggal 7 Juli 1997.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

h. Organizational and Management Structure (continued)

The number of employees of BNI are as follows (unaudited):

BNI's head office is located at Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta. As of 31 December 2018, BNI has 201 domestic branches, 1,109 sub-branches and 929 other outlets (31 December 2017: 200 domestic branches, 1,085 sub-branches and 848 other outlets) (unaudited). In addition, BNI's network also includes 5 overseas branches located in Singapore, Hong Kong, Tokyo, London and Seoul and 1 agency in New York.

i. Subsidiaries

BNI has direct ownership in the following Subsidiaries:

All of the Subsidiaries of BNI are domiciled in Jakarta, except for BNI Remittance Ltd. which is domiciled in Hong Kong.

PT BNI Life Insurance (“BNI Life”)

BNI Life was originally established under the name PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya based on Notarial Deed No. 24 dated 28 November 1996. On 26 November 2004, PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya changed its name to PT BNI Life Insurance.

In accordance with Article 3 of BNI Life's Articles of Association, the scope of BNI Life's activities is to engage in life insurance business including life insurance business under sharia principle. BNI Life obtained its operating license as a life insurance company based on the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Decree No. Kep-305/KMK.017/1997 dated 7 July 1997.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

PT BNI Life Insurance (“BNI Life”) (lanjutan)

Pada bulan Desember 2007, BNI telah meningkatkan penyertaannya pada BNI Life dari 59,78% menjadi 69,11%.

Pada tanggal 29 Juli 2008, BNI memberikan pinjaman subordinasi kepada BNI Life sebesar Rp50.000 yang dapat dikonversikan menjadi modal saham. Pada tahun 2008, BNI juga memberikan tambahan setoran modal kepada BNI Life sebesar Rp50.000.

Pada bulan Januari 2009, pinjaman subordinasi tersebut dikonversikan menjadi modal saham yang secara efektif meningkatkan investasi BNI dari 69,11% menjadi 85,11%. Tambahan investasi telah diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 3 tanggal 6 Januari 2009 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.07779.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009.

Pada 9 Desember 2011, BNI meningkatkan investasi yang dimiliki pada BNI Life senilai Rp149.999 yang meningkatkan kepemilikan BNI dari 85,11% menjadi 91,52%.

Pada bulan September 2012, BNI mengakuisisi 8,47% saham yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali dengan imbalan pembelian sebesar Rp93.330 sehingga BNI memiliki 99,99% modal saham BNI Life. Selisih antara nilai pembayaran dan nilai buku BNI Life pada tanggal transaksi sebesar Rp62.862 disajikan dalam ekuitas sebagai akun “Transaksi dengan kepentingan nonpengendali”.

Pada tahun 2013, BNI mengumumkan kemitraan strategis dengan Sumitomo Life Insurance Company (“Sumitomo Life”). Kemitraan strategis ini dilakukan melalui akuisisi 40% saham BNI Life oleh Sumitomo Life senilai Rp4,2 triliun.

Pada tanggal 4 Desember 2013, BNI Life telah menerima uang muka sebesar 15% dari nilai akuisisi saham atau ekuivalen sebesar Rp630.000.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. Subsidiaries (continued)

PT BNI Life Insurance (“BNI Life”) (continued)

In December 2007, BNI increased its investment in BNI Life from 59.78% to 69.11%.

On 29 July 2008, BNI granted subordinated loan to BNI Life amounting to Rp50,000 which can be converted to share capital. In 2008, BNI also injected additional paid-up capital to BNI Life amounting to Rp50,000.

In January 2009, the subordinated loan was converted to share capital which effectively increased BNI's investment from 69.11% to 85.11%. The additional investment was notarized by Notarial Deed No.3 dated 6 January 2009 of Fathiah Helmi, S.H., and has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU.07779.AH.01.02.Tahun 2009 dated 16 March 2009.

On 9 December 2011, BNI increased its investment in BNI Life by Rp149,999 which increased BNI's ownership from 85.11% to 91.52%.

In September 2012, BNI acquired 8.47% of shares owned by a non-controlling interest for a purchase consideration of Rp93,330 thereby BNI now holds 99.99% of the equity share capital of BNI Life. The difference between the consideration paid and the book value of BNI Life at the transaction date amounting to Rp62,862 was presented in equity as “Transactions with non-controlling interests”.

In 2013, BNI announced a new strategic partnership with Sumitomo Life Insurance Company (“Sumitomo Life”). The new strategic partnership is through acquisition of 40% shares of BNI Life by Sumitomo Life amounting to Rp4.2 trillion.

On 4 December 2013, BNI Life has received advance payment of 15% from the total acquisition shares value or equivalent to Rp630,000.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

PT BNI Life Insurance (“BNI Life”) (lanjutan)

Pada tanggal 11 Maret 2014, BNI Life telah menerima persetujuan dari OJK mengenai Persetujuan Rencana Perubahan Kepemilikan Saham melalui surat No. S-20/D.05/2014. Pada tanggal 27 Maret 2014, sisa nilai akuisisi saham sebesar Rp3.570.000 telah disetor penuh oleh Sumitomo Life. Seluruh penerimaan dari Sumitomo Life setelah dikurangi dengan biaya transaksi dicatat di dalam akun “transaksi dengan kepentingan nonpengendali”.

Pada tanggal 3 April 2014, akuisisi ini telah diselesaikan dan diaktakan dengan Akta Notaris No.7 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.01557.40.21.2014 tanggal 29 April 2014. Akuisisi ini mengakibatkan kepemilikan saham BNI di BNI Life terdilusi dari sebelumnya 99,99% menjadi 60%.

Kantor pusat BNI Life berlokasi di Centennial Tower, Lantai 9, 10, dan 11 Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, BNI Life memiliki 17 kantor pemasaran dan 47 kantor pemasaran mandiri yang tersebar di beberapa kota di Indonesia dan memiliki karyawan sebanyak 833 orang pada tanggal 31 Desember 2018 (31 Desember 2017: 854 karyawan) (tidak diaudit).

PT BNI Multifinance (“BNI Multifinance”)

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BNI Multifinance, ruang lingkup kegiatan BNI Multifinance adalah menjalankan kegiatan dalam bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multi guna dan sewa operasi.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Juni 2008, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 20 tanggal 23 Desember 2008, pemegang saham telah memberikan persetujuan atas rencana kuasi-reorganisasi BNI Multifinance per tanggal 31 Juli 2008 yang efektif berlaku sejak tanggal 7 Juli 2008.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. Subsidiaries (continued)

PT BNI Life Insurance (“BNI Life”) (continued)

On 11 March 2014, BNI Life has received approval from OJK, concerning the changes of share ownership plan in its letter No.S-20/D.05/2014. On 27 March 2014, the remaining acquisition value amounting to Rp3,570,000 has been fully paid by Sumitomo Life. The total cash received from Sumitomo Life after deducted by the transaction cost is recorded as “Transactions with non-controlling interests”.

On 3 April 2014, the acquisition has been completed and notarized by Notarial Deed No.7 and was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU.01557.40.21.2014 dated 29 April 2014. This acquisition diluted BNI’s ownership in BNI Life from 99.99% to 60%.

BNI Life head office is located in Centennial Tower, 9th, 10th, and 11th floor Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930. As of 31 December 2018 and 2017, BNI Life has 17 marketing offices and 47 personal marketing offices located in various cities in Indonesia and has 833 employees as of 31 December 2018 (31 December 2017: 854 employees) (unaudited).

PT BNI Multifinance (“BNI Multifinance”)

In accordance with Article 3 of BNI Multifinance’s Articles of Association, the scope of the BNI Multifinance’s activities involves investment financing, working capital financing, multipurpose financing and operation lease.

In the General Shareholders’ Meeting on 19 June 2008, as covered in the Notarial Deed No. 20 dated 23 December 2008 of Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., the shareholders approved the planned quasi-reorganization of BNI Multifinance as of 31 July 2008 which became effective on 7 July 2008.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

**PT BNI Multifinance (“BNI Multifinance”)
(lanjutan)**

Berikut adalah mutasi saldo tambahan modal disetor yang terjadi sebelum dan setelah kuasi-reorganisasi:

	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital
Saldo per 31 Juli 2008 (sebelum kuasi-reorganisasi)	
Penurunan nilai nominal saham	387,939
Eliminasi dalam rangka kuasi-reorganisasi	
Koreksi atas pajak tangguhan	(15,208)
Selisih penilaian kembali aset dan liabilitas	(1,473)
Saldo defisit	<u>(370,033)</u>
Saldo per 31 Juli 2008 (setelah kuasi-reorganisasi)	<u><u>1,225</u></u>

Sesuai keputusan pemegang saham BNI Multifinance tanggal 7 Juni 2013, telah disetujui penambahan penyertaan BNI di BNI Multifinance dengan mengkonversi pinjaman subordinasi menjadi penyertaan sebesar Rp75.000.

Atas konversi pinjaman subordinasi tersebut menyebabkan penyertaan BNI pada BNI Multifinance menjadi sebesar Rp95.414 (1.908.279.707 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI Multifinance dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali Anggaran Dasar dan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebesar Rp203.000.000.000 dan seluruhnya sejumlah penerbitan 4.060.000.000 saham Perusahaan oleh BNI sesuai dengan Akta No. 90 tanggal 23 Juni 2016 Notaris I Gede Buda Gunamanta, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0060863 tanggal 24 Juni 2016.

Kantor pusat BNI Multifinance berlokasi di Gedung BNI Life Insurance, lantai 5, Jl. Aipda KS. Tubun No. 67, Jakarta 10260. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, BNI Multifinance memiliki 9 outlet cabang tersebar di beberapa kota di Indonesia dan memiliki karyawan sebanyak 84 orang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (tidak diaudit).

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. Subsidiaries (continued)

**PT BNI Multifinance (“BNI Multifinance”)
(continued)**

The following are the movements of additional paid-in capital that occurred before and after quasi-reorganization:

	Balance as of 31 July 2008 (before the quasi-reorganization)
Decrease in par value of shares	387,939
Elimination related to quasi-reorganization	
Correction of deferred tax	(15,208)
Revaluation of assets and liabilities	(1,473)
Deficit	<u>(370,033)</u>
Balance as of 31 July 2008 (after the quasi-reorganization)	<u><u>1,225</u></u>

In accordance with decisions of BNI Multifinance's shareholders on 7 June 2013, it was approved to increase BNI's investment in BNI Multifinance by converting subordinated loans into equity amounting to Rp75,000.

As a result of the above subordinated loans conversion, BNI's investment in BNI Multifinance become Rp95,414 (1,908,279,707 shares with a nominal value of Rp50 (full amount) per share).

The latest amendment of BNI Multifinance's Articles of Association was made regarding, among other matters, increase in issued and fully paid capital amounting Rp203,000,000,000 and issuance of 4,060,000,000 shares contributed by BNI, based on Notarial Deed No.90 dated 23 June 2016 of I Gede Buda Gunamanta, S.H. and has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0060863 dated 24 June 2016.

BNI Multifinance head office is located in Gedung BNI Life Insurance, 5th floor, Jl. Aipda KS. Tubun No. 67, Jakarta 10260. As of 31 December 2018 and 2017, BNI Multifinance has 9 counters located in various cities in Indonesia and has 84 employees as of 31 December 2018 and 31 December 2017 (unaudited).



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

**PT BNI Sekuritas (“BNI Sekuritas”) dan
Entitas Anak**

BNI Sekuritas didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1995 dari Koesbiono Sarmanhadi, S.H., di Jakarta. Akta tersebut kemudian diubah dengan akta No. 39 dari notaris yang sama tanggal 3 Mei 1995. Akta pendirian dan perubahannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6278.HT.01.01.Th.95 tanggal 19 Mei 1995, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 11 Juli 1995, Tambahan No. 5804.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar BNI Sekuritas, ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi perdagangan efek, termasuk didalamnya bertindak sebagai penjamin dan penasehat investasi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pada bulan Juli 2011, SBI Securities Co. Ltd. memberikan dana untuk penanaman modal di BNI Sekuritas yang mengurangi kepemilikan BNI di BNI Sekuritas dari 99,85% menjadi 75%.

BNI Sekuritas memiliki 99,90% dari jumlah saham PT BNI Asset Management (“BNI Asset Management”), entitas anak yang didirikan tanggal 28 Maret 2011 dan bergerak di bidang manajemen dan penasehat investasi.

BNI Asset Management merupakan hasil pemekaran usaha (*spin-off*) Divisi Manajemen Investasi BNI Sekuritas. Proses pendiriannya telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI Sekuritas tanggal 1 Maret 2011. Pemekaran usaha tersebut dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.11 sebagai lampiran dalam surat keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-480/BL/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. Subsidiaries (continued)

**PT BNI Sekuritas (“BNI Sekuritas”) and
Subsidiary**

BNI Sekuritas was established by virtue of Notarial Deed No. 22 dated 12 April 1995 of Koesbiono Sarmanhadi, S.H., in Jakarta. The deed was amended by Notarial Deed No. 39 dated 3 May 1995 of the same notary. The Deed of Establishment and amendment thereon were approved by the Decision Letter of the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-6278.HT.01.01.Th.95 dated 19 May 1995 and was published in the State Gazette No. 55 dated 11 July 1995, Supplement No. 5804.

In accordance with Article 3 of BNI Sekuritas' Articles of Association, the scope of its business activities comprises securities trading, including investment underwriting and advisory investment and other related activities allowed by Financial Service Authority (OJK), previously the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam and LK) and other regulations.

In July 2011, SBI Securities Co. Ltd. made an equity investment in BNI Sekuritas which reduced BNI ownership in BNI Sekuritas from 99.85% to 75%.

BNI Sekuritas owns 99.90% of the total share capital of PT BNI Asset Management (“BNI Asset Management”), a subsidiary established on 28 March 2011 and engaged in investment management and advisory activities.

BNI Asset Management was established from the spin-off of the Investment Management Division of BNI Sekuritas. The spin-off was approved during BNI Sekuritas Shareholders' Extraordinary General Meeting dated 1 March 2011. The spin-off was conducted in accordance with Bapepam and LK Regulation No. V.D.11 as attached in the decree of the Chairman of Bapepam and LK No. Kep-480/BL/2009 regarding the Guidelines for Investment Manager's Functions.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

**PT BNI Sekuritas (“BNI Sekuritas”) dan
Entitas Anak(lanjutan)**

Kantor pusat BNI Sekuritas berlokasi di Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 16, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2018 BNI Sekuritas memiliki 50 outlet cabang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia (31 Desember 2017: 51 outlet cabang) dan memiliki karyawan sebanyak 211 orang pada tanggal 31 Desember 2018 (31 Desember 2017: 171 karyawan) (tidak diaudit).

**BNI Remittance Ltd. (dahulu BNI
Nakertrans)**

BNI telah menambah modalnya sebesar HKD7.434.944 (nilai penuh) setara dengan Rp10.000 pada tanggal 11 Juni 2009 yang dicatat menggunakan metode biaya. Kantor pusat BNI Remittance Ltd. berada di Causeway Bay, Hong Kong dan memiliki karyawan sebanyak 8 orang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (tidak diaudit).

PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah”)

BNI Syariah didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 160 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai Pengganti Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010.

BNI Syariah adalah bank umum syariah yang merupakan hasil pemekaran usaha (*spin-off*) Unit Usaha Syariah BNI (“UUS BNI”). Proses pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI tanggal 5 Oktober 2009 sesuai akta No. 37 Notaris Fathiah Helmi, S.H. Pemekaran usaha dilakukan dengan mengacu kepada PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dengan cara mendirikan bank umum syariah baru.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. Subsidiaries (continued)

**PT BNI Sekuritas (“BNI Sekuritas”) and
Subsidiary (continued)**

BNI Sekuritas head office is located in Sudirman Plaza Indofood Tower, 16th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia. As of 31 December 2018 BNI Sekuritas has 50 counters located in various cities in Indonesia (31 December 2017: 51 outlets) and has 211 employees as of 31 December 2018 (31 December 2017: 171 employees) (unaudited).

**BNI Remittance Ltd. (formerly BNI
Nakertrans)**

On 11 June 2009 BNI increased its capital by HKD7,434,944 (full amount) equivalent to Rp10,000, which was recorded using the cost method. The main office of BNI Remittance Ltd. is located in Causeway Bay, Hong Kong and has 8 employees as of 31 December 2018 and 2017 (unaudited).

PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah”)

BNI Syariah was established based on Establishment Deed No. 160 dated 22 March 2010 which was notarized by Aulia Taufani, S.H., as the substitute of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta. The Establishment Deed was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010 dated 25 March 2010.

BNI Syariah is a general sharia bank as a result of the spin-off of the Sharia Business Unit of BNI (“UUS BNI”). The establishment process was approved at the Shareholders’ Extraordinary General Meeting of BNI held on 5 October 2009 in accordance with the deed No. 37 of Notary Fathiah Helmi, S.H. The spin-off was conducted in accordance with PBI No. 11/10/PBI/2009 regarding Sharia Business Unit by establishing a new general sharia bank.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

**PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah”)
(lanjutan)**

Pemberitahuan atas rancangan *spin-off* kepada karyawan, nasabah dan pihak ketiga telah diumumkan di surat kabar nasional pada tanggal 12 Agustus 2009 sedangkan pemberitahuan atas rencana pengalihan hak dan liabilitas UUS BNI telah diumumkan di surat kabar nasional pada tanggal 15 Februari 2010. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap yaitu persetujuan izin prinsip usaha dan izin usaha. Pada tanggal 8 Februari 2010 BNI Syariah telah mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia untuk melaksanakan pemisahan UUS Bank BNI berdasarkan surat No. 12/2/DpG/Dpbs. Pemisahan UUS BNI dilakukan dengan Akta Pemisahan Nomor 159 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta.

Pada tanggal 21 Mei 2010, BNI Syariah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Selanjutnya pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 19 Juni 2010, yakni saat pertama kalinya BNI Syariah melakukan kegiatan usaha, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat No. Dir/1/03 tanggal 19 Juni 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

BNI Syariah menjalankan operasional sebagai bank devisa sejak tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010.

Sehubungan dengan telah beroperasinya BNI Syariah, maka Bank Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2010 mencabut izin usaha UUS Bank BNI melalui keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 12/7/KEP.DpG/2010.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. Subsidiaries (continued)

**PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah”)
(continued)**

The announcement to the employees, customers and third parties regarding the planned spin-off was made through a national newspaper on 12 August 2009 while the announcement regarding the transfer of the rights and obligations of UUS BNI was made through a national newspaper on 15 February 2010. The establishment was approved by Bank Indonesia in two stages, which are the approval of the business license in principle and the business license. On 8 February 2010, BNI Syariah received its license in principle from Bank Indonesia to conduct the separation of UUS BNI based on Bank Indonesia letter No. 12/2/DpG/Dpbs. The separation of UUS BNI was made under Separation Deed No. 159 dated 22 March 2010 which was notarized by Aulia Taufani, S.H., as the substitute of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta.

On 21 May 2010, BNI Syariah received its business license from Bank Indonesia, based on the Decision Letter No. 12/41/KEP.GBI/2010 of the Governor of Bank Indonesia. The separation became effective on 19 June 2010, in which BNI Syariah started its operational activity, as reported to Bank Indonesia under letter No. Dir/1/03 dated 19 June 2010 regarding the Report on the Implementation of the Opening of General Sharia Bank Resulting from the Spin-Off.

BNI Syariah started its operational activities as a foreign exchange bank on 9 July 2010 based on the Copy of the Decision Letter No. 12/5/KEP.DpG/2010 of the Deputy Governor of Bank Indonesia dated 9 July 2010.

As BNI Syariah has commenced its operations, UUS BNI's business license was revoked pursuant to the Decision Letter No. 12/7/KEP.DpG/2010 of the Deputy Governor of Bank Indonesia dated 27 August 2010.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

**PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah”)
(lanjutan)**

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI Syariah pada tanggal 18 September 2014 sesuai dengan Akta Notarial No. 53, BNI dan BNI Life masing-masing menambah modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) dan Rp500.000.000 (nilai penuh), secara tunai dengan mengeluarkan saham dari modal dasar sejumlah 500.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Penambahan modal saham ini telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat OJK melalui Pelaksana Harian (Plh) Kepala Departemen Pengawasan Bank I No. S-67/PB.31/2014 tanggal 25 Agustus 2014.

Penambahan setoran modal ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-06781.40.21.2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BNI Syariah.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI Syariah pada tanggal 29 Desember 2017, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menambah modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh), secara tunai dengan mengeluarkan saham dari modal dasar sejumlah 1.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Kantor pusat BNI Syariah berlokasi di Gedung Tempo Pavillion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 11, Kuningan, Jakarta 12950 - Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2018, BNI Syariah memiliki 67 kantor cabang, 196 kantor cabang pembantu dan 91 outlet lainnya yang tersebar di beberapa kota di Indonesia (31 Desember 2017: 68 kantor cabang, 180 kantor cabang pembantu dan 98 outlet lainnya) dan memiliki karyawan sebanyak 4.942 orang pada tanggal 31 Desember 2018 (31 Desember 2017: 4.737 karyawan) (tidak diaudit).

1. GENERAL INFORMATION(continued)

i. Subsidiaries (continued)

**PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah”)
(continued)**

Based on Decision from Shareholders as a replacement of Extraordinary General Shareholders' Meeting of BNI Syariah dated 18 September 2014 in accordance with Notarial Deed No. 53, BNI and BNI Life have increased the issued and fully paid capital amounting to Rp500,000,000,000 (full amount) and Rp500,000,000 (full amount), respectively, in cash through the issuance of shares from authorized capital amounting to 500,500 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

The additional share capital has been approved by OJK based on OJK Letter through Daily Executive Bank Supervision Department I No. S-67/PB.31/2014 dated 25 August 2014.

This additional share capital has been approved by Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-06781.40.21.2014 regarding The Acceptance of Notification on the Amendment of BNI Syariah's Articles of Association.

Based on the Decision of the Shareholders in lieu of the Shareholders' Extraordinary General Meeting of BNI Syariah on 29 December 2017, PT Bank Negara Indonesia Tbk increased its capital issued and fully paid-in capital by Rp1,000,000,000,000 (full amount), in cash by issuing shares of authorized capital of 1,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share

BNI Syariah's head office is located in Gedung Tempo Pavillion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 11, Kuningan, Jakarta 12950 - Indonesia. As of 31 Desember 2018, BNI Syariah has 67 branches, 196 sub-branches and 91 other outlets located in various cities in Indonesia (31 Desember 2017: 68 branches, 180 sub-branches and 98 other outlets) and has 4,942 employees as of 31 Desember 2018 (31 Desember 2017: 4,737 employees) (unaudited).



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan konsolidasian BNI dan Entitas Anak ("Grup") ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 16 Januari 2019.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup adalah seperti dijabarkan dibawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Entitas Anak, BNI Syariah, yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah sesuai dengan PSAK No. 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Musyarakah", PSAK No. 107 tentang "Akuntansi Ijarah" dan PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) dan standar akuntansi keuangan lain yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi oleh revaluasi tanah dan bangunan, aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset dan liabilitas keuangan (termasuk instrumen derivatif) yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta disusun dengan dasar akrual, kecuali bagi hasil dari pembiayaan *Mudharabah* dan *musyarakah* dan laporan arus kas konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements of BNI and Subsidiaries ("the Group") were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 16 January 2019.

The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group are set out below:

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and Bapepam and LK regulation No. VIII.G.7 Attachment of the Chairman of Bapepam and LK's Decree No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012, "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuer or Public Companies".

A Subsidiary, BNI Syariah, which is engaged in sharia banking presents financial statements in conformity with sharia accounting principles in accordance with SFAS No. 101 (Revised 2016), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised 2016) "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105 "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106 (Revised 2016) "Accounting for Musyarakah", SFAS No. 107 "Accounting for Ijarah" and SFAS No. 110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk", Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI Revised 2013) and other Statements of Financial Accounting Standards established by the Indonesian Institute of Accountants.

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, except revaluation of land and buildings, available-for-sale financial assets, and financial assets and liabilities (including derivative instruments) at fair value through profit or loss, and under the accrual basis of accounting, except for profit sharing for *Mudharabah* and *musyarakah* financing and the consolidated statement of cash flows.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

**b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan dan Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan**

Pada tanggal 1 Januari 2018, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- PSAK 111 : Akuntansi Wa'd
- Amandemen PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham: Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi
- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)**

The consolidated statement of cash flows is prepared in the direct method with cash flows classified into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with other banks and Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 months from the date of acquisition, as long as they are not pledged as collateral for borrowings nor restricted.

The reporting currency used for the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp). Unless otherwise stated, all figures presented in the consolidated financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

**b. Changes to Statements of Financial
Accounting Standards and Interpretations
of Statements of Financial Accounting
Standards**

On 1 January 2018, the Group adopted new and revised statements of financial accounting standards ("SFAS") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISFAS") that are mandatory for application from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- SFAS No. 111 : Accounting for Wa'd
- Amendments of SFAS No. 53: Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions
- Amendments of SFAS No. 46: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses
- Amendments of SFAS No. 2: Statement of Cash Flows regarding Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan dan Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan (lanjutan)**

- Penyesuaian 2017 PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Penyesuaian 2017 PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain.

c. Aset dan liabilitas keuangan

(i) Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Pinjaman yang diberikan dan piutang;
- Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo;
- Aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Changes to Statements of Financial
Accounting Standards and Interpretations
of Statements of Financial Accounting
Standards (continued)**

- Annual Improvement 2017 of SFAS No. 15: Investment in Associates and Joint Ventures
- Annual Improvement 2017 of SFAS No. 67: Disclosures of Interest Other Entities.

c. Financial assets and liabilities

(i) Classification

The Group classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

- Financial assets at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets held for trading;
- Loans and receivables;
- Held-to-maturity financial assets;
- Available-for-sale financial assets.

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;
- Other financial liabilities.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur
pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki Grup terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset dan liabilitas dalam kelompok ini dicatat pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Grup untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Grup mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Financial assets and liabilities at fair value
through profit or loss

The sub-classification of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss consists of financial assets and liabilities held for trading which the Group acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

Derivatives are also categorized under this sub-classification unless they are designated as effective hedging instruments. Assets and liabilities classified under this category are carried at fair value in the consolidated statement of financial position, with any gains or losses being recognized in the profit or loss.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- those that the Group intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the Group upon initial recognition designates as of fair value through profit or loss;
- those that the Group upon initial recognition designates as available-for-sale investments; or
- those for which the Group may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables deterioration, which shall be classified as available-for-sale.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Held-to-maturity financial assets

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Aset keuangan yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Held-to-maturity financial assets consist of quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity. Financial assets intended to be held for an undetermined period are not included in this classification.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Available-for-sale-financial assets

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan aset keuangan dihentikan pengakuannya atau sampai aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets. After initial recognition, available-for-sale financial assets are measured at fair value with gains or losses being recognized in other comprehensive income (as part of equity) until the financial assets is derecognized or until the financial assets is determined to be impaired at which time the cumulative gain or loss previously reported in equity is included in the profit or loss.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan nilai tukar dari instrumen utang diakui pada laporan laba rugi. Untuk instrumen ekuitas, keuntungan atau kerugian yang timbul dan perubahan nilai tukar diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas).

Interest income is calculated using the effective interest rate and gains or losses arising from changes in exchange rate from debt instruments are recognized in the profit or loss. For equity instruments, gains and losses arising from change in exchange rate are recognized in other comprehensive income (as part of equity).

Liabilitas keuangan lain

Other financial liabilities

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2014)/ Category as defined by SFAS 55 (Revised 2014)		Golongan (ditentukan oleh Grup)/ Class (as determined by the Group)	Subgolongan/ Subclasses		
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba laoran rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ <i>Financial assets held for trading</i>	Efek-efek/ <i>Marketable securities</i>		
			Obligasi Pemerintah/ <i>Government Bonds</i>		
			Tagihan derivatif - Tidak terkait lindung nilai/ <i>Derivative receivables - Non hedging related</i>		
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Kas/ <i>Cash</i>	Kas pada vendor/ <i>Cash in vendor</i>		
				Giro pada Bank Indonesia/ <i>Current accounts with Bank Indonesia</i>	
				Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i>	
				Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia/ <i>Placements with other banks and Bank Indonesia</i>	
				Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ <i>Securities purchased under agreements to resell</i>	
				Wesel ekspor dan tagihan lainnya/ <i>Bills and other receivables</i>	
				Tagihan akseptasi/ <i>Acceptances receivables</i>	
				Pinjaman yang diberikan/ <i>Loans</i>	
				Aset lain-lain/ <i>Other assets</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>
					Piutang bunga/ <i>Interest receivables</i>
	Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo/ <i>Held-to-maturity investments</i>	Efek-efek/ <i>Marketable securities</i>	Obligasi Pemerintah/ <i>Government Bonds</i>		
Aset keuangan tersedia untuk dijual/ <i>Available-for-sale financial assets</i>	Efek-efek/ <i>Marketable securities</i>	Obligasi Pemerintah/ <i>Government Bonds</i>			
			Penyertaan saham/ <i>Equity investments</i>		



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2014)/ Category as defined by SFAS 55 (Revised 2014)		Golongan (ditentukan oleh Grup)/ Class (as determined by the Group)	Subgolongan/ Subclasses	
	Derivatif lindung nilai/ <i>Hedging derivatives</i>	Lindung nilai atas nilai arus kas/ <i>Hedging instruments in cash flow hedges</i>	Tagihan derivatif - terkait lindung nilai atas arus kas/ <i>Derivative receivables - hedging instruments in cash flow hedges related</i>	
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial liabilities at fair value through profit or loss</i>	Liabilitas keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ <i>Financial liabilities held for trading</i>	Liabilitas derivatif - tidak terkait lindung nilai/ <i>Derivative payables - non hedging related</i>	
		Liabilitas segera/ <i>Obligation due immediately</i>		
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>		
		Simpanan dari bank lain/ <i>Deposits from other banks</i>		
		Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/ <i>Securities sold under agreements to repurchase</i>		
		Liabilitas akseptasi/ <i>Acceptances payables</i>		
		Beban yang masih harus dibayar/ <i>Accrued expenses</i>		
		Liabilitas lain-lain/ <i>Other liabilities</i>	Setoran jaminan/ <i>Security deposits</i>	
			Utang bunga/ <i>Interest payable</i>	
			Utang nasabah/ <i>Payable to customers</i>	
Lain-lain/ <i>Others</i>				
	Efek-efek yang diterbitkan/ <i>Marketable securities issued</i>			
	Pinjaman yang diterima/ <i>Borrowings</i>			
	Efek-efek subordinasi/ <i>Subordinated securities</i>			
Derivatif lindung nilai/ <i>Hedging derivatives</i>	Lindung nilai atas nilai arus kas/ <i>Hedging instruments in cash flow hedges</i>	Liabilitas derivatif - Terkait lindung nilai atas arus kas/ <i>Derivative payables - Hedging instruments in cash flow hedges related</i>		
Kontrak jaminan keuangan/ <i>Financial guarantee contract</i>	<i>Letters of credit</i> yang tidak dapat dibatalkan/ <i>Irrevocable letters of credit</i>			
	Garansi bank yang diberikan/ <i>Bank Guarantees issued</i>			
	<i>Standby letters of credit</i>			

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Pengakuan awal

(ii) Initial recognition

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

- a. Purchase or sale of financial assets that requires delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular purchases) is recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

- b. Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.

Grup, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

The Group, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

- the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or
- the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or
- the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but unable to measure the embedded derivative separately.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

(iii) Subsequent measurement

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities held at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Loans and receivables and held-to-maturity financial assets and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

(iv) Penghentian pengakuan

(iv) Derecognition

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

a. Financial assets are derecognized when:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

- the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
- the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Grup yang berkelanjutan atas aset tersebut.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

a. Financial assets are derecognized when: (continued)

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Group and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

b. Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

(v) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on available-for-sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost, are recognized in the profit or loss using the effective interest rate method.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities classified as fair value through profit or loss are included in the profit or loss.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban
(lanjutan)

(v) *Income and expense recognition
(continued)*

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Gains and losses arising from changes in the fair value of available-for-sale financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchange rate for debt instrument.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

(vi) *Reclassification of financial assets*

Grup tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada "Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi", jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

The Group is not allowed to reclassify any financial instrument out of or into the "Fair Value through Profit and Loss", if the initial recognition of financial instrument is determined as measured at fair value through profit and loss.

Grup tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

The Group cannot classify financial assets as held-to-maturity investments, if the entity has, during the current financial year or during the 2 preceding financial years, sold or reclassified a significant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than insignificant in relation to the total amount of held-to-maturity investments) other than sales or reclassifications that:

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

- a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- b. terjadi setelah Grup telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Grup telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Grup, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Grup.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) *Reclassification of financial assets (continued)*

- a. *are so close to maturity or the financial asset's repurchase date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial asset's fair value;*
- b. *occur after the Group has collected substantially all of the original principal of the financial assets through scheduled payments or prepayments; or*
- c. *are attributable to an isolated event that is beyond the Group's control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the Group.*

Reclassifications of financial assets from held-to-maturity classification to available-for-sale are recorded at fair value. The unrealized gains or losses are recorded in equity section until the financial assets are derecognized, at which time the accumulative gain or loss previously recognized in equity shall be recognized as current year profit/loss.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification are recorded at carrying amount. The unrealized gains or losses are amortised by using effective interest rate up to the maturity date of that instrument.

(vii) *Offsetting*

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(vii) Saling hapus (lanjutan)

(vii) Offsetting (continued)

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

(viii) Amortized cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(ix) Pengukuran nilai wajar

(ix) Fair value measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association (IDMA)* atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh *broker (quoted price)* dari *Bloomberg* atau *Reuters* pada tanggal pengukuran.

When available, the Group measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Grup menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

If a market for a financial instrument is not active, the Group establishes fair value using a valuation technique.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Grup menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Grup menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter, unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Grup. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti *model risk*, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah direview dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

The Group uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

For more complex instruments, the Group uses internally developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-the-counter market, unlisted debt securities (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become illiquid.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

The output of a valuation technique is an estimation or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that the Group holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risk, liquidity risk and counterparty credit risk. Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the consolidated statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

In cases when the fair value of *unlisted equity instruments* cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following:

- Level 1: Quoted prices in active market for the same/identical financial asset or liability;
- Level 2: Inputs other than quoted market prices included in Level 1 that are observable for the financial asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price);
- Level 3: Inputs for the financial assets or liability that are not based on observable market data (unobservable information).

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

- (x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Grup untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial assets and liabilities (continued)

- (x) Allowance for impairment losses on financial assets

At each consolidated statement of financial position date, the Group assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Group to determine that there is objective evidence of impairment include:

- a) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- b) a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- c) the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
- d) it becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;
- e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- f) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has yet been identified individually in the portfolio, including:



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

- 1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
- 2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

- 1) adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
- 2) national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 to 12 months, for exceptional cases, longer periods are needed.

Grup pertama kali menentukan apakah aset keuangan signifikan secara individual. Apabila aset keuangan signifikan secara individual, maka Grup akan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan. Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

The Group first assesses whether the financial asset is individually significant. If the financial asset considered individually significant, the Group will determine whether there is an objective evidence of individual impairment exist or not. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

A) Financial assets carried at amortised cost

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Individual impairment calculation

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individual (lanjutan)

1. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
2. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah yang direstrukturisasi.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

A) Financial assets carried at amortised cost (continued)

Individual impairment calculation (continued)

1. Loans which individually have significant value and objective evidence of impairment; or
2. Restructured loans which individually have significant value.

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for: (a) Corporate and middle loans which collectibility are classified as substandard, doubtful and loss; or (b) Restructured corporate and middle loans.

The amount of impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan or held-to-maturity financial assets has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individual (lanjutan)

Jika persyaratan pinjaman yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
2. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
3. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

A) Financial assets carried at amortised cost (continued)

Individual impairment calculation (continued)

If the terms of the loans, receivables or held-to-maturity marketable securities are renegotiated or otherwise modified because of financial difficulties of the borrower or issuer, impairment is measured using the original effective interest rate before the modification of terms.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

1. Loans which individually have insignificant value;
2. Loans which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment; or
3. Restructured loans which individually have insignificant value.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar usaha kecil dan konsumen.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Pinjaman yang diberikan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode analisis model statistik seperti, *migration analysis method* dan *roll rates analysis method*, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai.

Bank menerapkan *roll rate method* untuk pinjaman kartu kredit dengan menggunakan data historis selama 3 tahun dalam menghitung *Probability of Default (PD)* dan *Loss Given Default (LGD)*. Untuk pinjaman selain kartu kredit, Bank menerapkan *migration analysis method* dengan menggunakan data historis selama 5 tahun dalam menghitung PD dan LGD.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

A) Financial assets carried at amortised cost (continued)

Collective impairment calculation (continued)

Based on the above criteria, the Bank performs collective assessment for: (a) Corporate and middle loans which collectibility are classified as current and special mention, and have never been restructured; or (b) Retail and consumer loans.

Calculation of allowance for impairment losses on loans are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank applies statistical model analysis method, which are migration analysis and roll rate analysis methods, to assess the allowance for impairment losses.

The Bank applies roll rate method for credit card loans using 3 years historical data to compute the Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD). For loans other than credit card loans, the Bank applies migration analysis method using 5 years historical data to compute the PD and LGD.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

- (x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

- A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Grup menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan; atau
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Sebagai panduan praktis, Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial assets and liabilities (continued)

- (x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

- A) Financial assets carried at amortised cost (continued)

Collective impairment calculation (continued)

The Group uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

1. Loans are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral; or
2. Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.

As a practical guideline, the Group may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price. Losses are recognized in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortised cost. Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized is reversed through profit or loss.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

- (x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

B) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Dalam hal instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi, di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan diakui pada periode terjadinya.

Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi atas investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tidak dapat dibalik melalui laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial assets and liabilities (continued)

- (x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

B) Financial assets classified as available-for-sale

For financial assets classified as available-for-sale, the Bank assesses at each consolidated statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

In the case of equity instruments classified as available-for-sale financial assets, a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. Impairment losses on available-for-sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

If in a subsequent period, the fair value of debt instrument classified as available-for-sale securities increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss is reversed and recognized in the period it occurred.

Impairment losses recognised in profit or loss for an investment in an equity instrument classified as available - for - sale shall not be reversed through profit or loss.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

C) Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

d. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BNI beserta seluruh Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian BNI.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

C) Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

d. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of BNI and all its Subsidiaries that are controlled by BNI.

Where Subsidiaries either began or ceased to be controlled during the year, the results of operations of those Subsidiaries are included in the consolidated financial statements only from the date that the control has commenced or up to the date that the control has ceased.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

d. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Grup memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atas entitas anak, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain. Grup juga menilai keberadaan pengendalian ketika Grup tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional secara *de-facto*. Pengendalian *de-facto* dapat timbul ketika jumlah hak suara yang dimiliki Grup, secara relatif terhadap jumlah dan penyebaran kepemilikan hak suara pemegang saham lain memberikan Grup kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasi, serta kebijakan lainnya.

Seluruh saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antara BNI dan Entitas Anak yang signifikan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian BNI dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan Entitas Anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak tersebut.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham nonpengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas Entitas Anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham nonpengendali pada Entitas Anak tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Principles of consolidation (continued)

Subsidiaries are all entities (including special purpose entities) over which the Group has the power to govern the financial and operating policies generally accompanying a shareholding of more than one half of the voting rights. The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible are considered when assessing whether the Group controls another entity. The Group also assesses existence of control where it does not have more than 50% of the voting power but is able to govern the financial and operating policies by virtue of de-facto control. De-facto control may arise in circumstances where the size of the Group's voting rights relative to the size and dispersion of holdings of other shareholders give the Group the power to govern the financial, operating and other policies.

All significant balances and transactions, including unrealized gains/losses among BNI and Subsidiaries are eliminated to reflect the consolidated financial position and results of operations of BNI and its Subsidiaries as a single entity.

The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for transactions and events in similar circumstances. If the Subsidiaries' financial statements use accounting policies different from those adopted in the consolidated financial statements, appropriate adjustments are made to the Subsidiaries' financial statements.

The non-controlling interest is presented in the equity of the consolidated statement of financial position and represents the non-controlling stockholders' proportionate share in the income for the year and equity of the Subsidiaries based on the percentage of ownership of the non-controlling stockholders in the Subsidiaries.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**e. Transaksi dalam mata uang asing dan
penjabaran**

**e. Foreign currency transactions and
translations**

Transaksi dalam mata uang asing

Transactions denominated in foreign
currencies

BNI dan Entitas Anak yang berdomisili di Indonesia menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah, kecuali untuk BNI Remittance yang pembukuan akuntansinya dilakukan dalam Dollar Amerika Serikat. Transaksi-transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang terjadi di sepanjang tahun dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

BNI and its Subsidiaries domiciled in Indonesia maintain their accounting records in Rupiah, except for BNI Remittance which its accounting records is maintained in United States Dollar. Transactions during the year involving currencies other than Rupiah are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions were made.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Reuters pada pukul 16:00 WIB. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

At consolidated statement of financial position date, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah using the Reuters middle rate at 16:00 Western Indonesian Time (WIB). The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

Penjabaran aset dan liabilitas dalam mata
uang asing

Translation of assets and liabilities
denominated in foreign currencies

Pada tanggal dan 31 Desember 2018 dan 2017, kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

As of 31 December 2018 and 2017, the foreign currency exchange rates used for translation of foreign currencies to Rupiah are as follows (amounts in full Rupiah):

	2018	2017	
1 Pound Sterling Inggris	18,312	18,236	British Pound Sterling 1
1 Euro	16,441	16,236	Euro 1
1 Dolar Amerika Serikat	14,380	13,568	United States Dollar 1
1 Dolar Hong Kong	1,836	1,736	Hong Kong Dollar 1
1 Yen Jepang	131	121	Japanese Yen 1

Penjabaran laporan keuangan sehubungan
dengan konsolidasian laporan cabang BNI
yang berkedudukan di luar negeri

Translation of financial statements relating to
consolidation of BNI branches domiciled
outside of Indonesia

Cabang BNI yang berkedudukan di luar negeri menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang negara tempat kedudukannya.

BNI's branches domiciled outside of Indonesia maintain their accounting records in their respective domestic currencies.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**e. Transaksi dalam mata uang asing dan
penjabaran (lanjutan)**

Untuk tujuan konsolidasian, laporan keuangan cabang BNI tersebut dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Saldo akun-akun aset, liabilitas, komitmen dan kontinjensi dijabarkan dengan menggunakan kurs *spot* Reuters jam 16:00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian;
- Saldo akun-akun laba rugi setiap bulannya dijabarkan dengan menggunakan kurs *spot* Reuters jam 16:00 WIB rata-rata untuk bulan yang bersangkutan. Saldo untuk tahun berjalan merupakan jumlah dari penjabaran bulanan tersebut;
- Akun ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis; dan
- Selisih yang timbul sebagai akibat dari penjabaran ini disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai bagian dari ekuitas pada akun "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing".

f. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia

Giro pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Entitas Anak yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**e. Foreign currency transactions and
translations (continued)**

For consolidation purposes, the financial statements of such branches domiciled outside of Indonesia are translated into Rupiah as follows:

- *Assets, liabilities, commitments and contingencies accounts are translated using the Reuters spot rates at 16:00 WIB at the consolidated statement of financial position date;*
- *Revenues and expenses accounts are translated on a monthly basis using the average month-end Reuters spot rate at 16:00 WIB. The balances for the year represent the sum of those monthly translations;*
- *Equity accounts are recorded using the historical rates; and*
- *Differences arising from translation are presented in the consolidated statement of financial position balance as part of equity under "Exchange Difference on Translation of Foreign Currency Financial Statements".*

**f. Current accounts with other banks and
Bank Indonesia**

The current accounts with other banks and Bank Indonesia are classified as loans and receivables. Current accounts with other banks and Bank Indonesia are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Subsidiary that engages in sharia banking presents current accounts with Bank Indonesia and other banks at their outstanding balance net of allowance for impairment losses.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**g. Penempatan pada bank lain dan Bank
Indonesia**

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), *call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia, unit penyertaan reksa dana, obligasi, obligasi subordinasi dan instrumen utang lainnya yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

Obligasi Pemerintah terdiri dari Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan kepada BNI dan bank lainnya berkaitan dengan program rekapitalisasi Pemerintah dan obligasi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan negara lainnya yang tidak berkaitan dengan program rekapitalisasi yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

Pada saat pengakuan awal, efek-efek dan Obligasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu aset keuangan tersedia untuk dijual, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo atau nilai wajar melalui laporan laba rugi serta disajikan sebesar nilai wajarnya

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**g. Placements with other banks and Bank
Indonesia**

Placements with other banks and Bank Indonesia consist of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), call money and time deposits.

Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as loans and receivables. Placements with other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

**h. Marketable securities and Government
Bonds**

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificates of Deposits of Bank Indonesia, mutual fund units, bonds, subordinated bonds and other debt instruments traded in the money market and stock exchanges.

Government Bonds consist of Government Recapitalization Bonds issued to BNI and other banks with respect to the recapitalization program of the Government and other bonds issued by the Government of Indonesia and other countries, that are not related to the recapitalization program, acquired through the primary and secondary markets.

At initial recognition, the securities and Government Bonds are recorded according to their category, i.e., available-for-sale financial assets, held-to-maturity financial assets or at fair value through profit or loss and initially measured at fair value

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following sharia principles.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah
(lanjutan)**

Bank menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
- 3) Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada surat berharga.

**i. Efek-efek yang dibeli/dijual dengan janji
dijual/dibeli kembali**

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Marketable securities and Government
Bonds (continued)**

The Bank defined the classification of investment in marketable securities, specifically sukuk, based on business model in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.
- 2) At fair value securities are stated at fair values through profit or loss. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.
- 3) At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortised over the period until maturity.

Allowance for possible losses are recognised in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

**i. Securities purchased/sold under
agreements to resell/repurchase**

Securities purchased under agreements to resell are classified as loans and receivables.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**i. Efek-efek yang dibeli/dijual dengan janji
dijual/dibeli kembali (lanjutan)**

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar di muka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

j. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Wesel ekspor dan tagihan lainnya terdiri atas tagihan dari *Letters of Credit* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada eksportir.

Wesel ekspor dan tagihan lainnya dicatat pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Wesel ekspor dan tagihan lainnya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Securities purchased/sold under
agreements to resell/repurchase
(continued)**

Securities purchased under agreements to resell are presented as assets in the consolidated statement of financial position, at the resale price net of unamortized interest income and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold using effective interest rate method.

Securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the consolidated statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using effective interest rate method.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

j. Bills and other receivables

Bills and other receivables consist of receivables from Letters of Credit and Domestic Documentary Letters of Credit to exporters.

Bills and other receivables are stated at amortized cost less allowance for impairment losses.

Bills and other receivables are classified as loans and receivables.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

k. Instrumen keuangan derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, swap mata uang asing, swap atas suku bunga, dan transaksi spot untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kenaikan nilai wajar kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing dan *cross currency swap* dan tingkat suku bunga *swap* dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

l. Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari fasilitas *trade finance* yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Derivative financial instruments

In the normal course of its business, BNI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, interest rate swaps, and spot transactions to manage exposures on market risks, such as currency risk and interest rate risks.

Derivatives financial instruments are recognized in the consolidated statement of financial position at fair value. Each increase in fair value derivative contract is carried as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative

Derivatives receivables and payables are classified as financial assets and liabilities at fair value through profit or loss.

Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in profit or loss.

The fair value of derivative instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics.

Foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, and cross currency and interest rate swaps are for funding and trading purposes.

l. Loans

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents thereof, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities which have not been settled within 15 days.

Loans are classified as loans and receivables.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

1. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Grup.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit meliputi modifikasi persyaratan kredit, konversi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya.

Untuk restrukturisasi kredit bermasalah dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi kredit diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya, adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

BNI menyusun ketentuan internal mengenai debitur yang berakhir masa restrukturisasinya yaitu debitur yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Debitur mampu memenuhi syarat-syarat sesuai Perjanjian Kredit Restrukturisasi dengan mempertimbangkan kemampuan debitur untuk memenuhi penilaian prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar;
- 2) Kredit berada pada kualitas kredit lancar (kolektibilitas 1) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan
- 3) Debitur mampu membayar bunga di atas tingkat bunga tertentu minimal 3 (tiga) bulan atau periode angsuran berturut-turut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

1. Loans (continued)

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borne by the Group.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Loan restructuring

Loan restructuring may involve a modification of the terms of the loans, conversion of loans into equity or other financial instruments and/or a combination of both.

For non-performing loan restructuring which involves a conversion of loan into equity or other financial instrument, a loss on loan restructuring is recognized only if the fair value of the equity investment or other financial instrument received, reduced by estimated costs to sell the equity or other financial instrument, is less than the carrying value of the loan.

The Bank formed internal regulation regarding the debtors who ended their restructuring period, namely debtors who had met the following criteria:

- 1) *The debtor is able to fulfill the conditions under the Restructuring Credit Agreement by considering the ability of the debtor to fulfill the business performance assessment, performance and ability to pay;*
- 2) *Credit's quality is in current (collectibility 1) in accordance with Bank Indonesia regulations and*
- 3) *Debtors are able to pay interest above a certain interest rate of at least 3 (three) months or a period of successive installments.*

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

I. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman berdasarkan prinsip syariah

Pinjaman yang diberikan meliputi pembiayaan syariah yang terutama terdiri dari piutang syariah, pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad *ijarah*, *murabahah* dan *qardh*.

Ijarah adalah sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (*hibah*) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang *murabahah* yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Piutang *murabahah* mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Loans (continued)

Sharia financing

Loans include sharia financing, which consists mainly of sharia receivables, *Mudharabah* financing and *musyarakah* financing.

Sharia receivables arise from transactions based on *ijarah*, *murabahah*, and *qardh* agreements.

Ijarah is a leasing arrangement of goods and/or services between the owner of a leased object (lessor) and lessee including the right to use the leased object, for the purpose of obtaining a return on the leased object. *Ijarah muntahiyah bittamlik* is a leasing arrangement between the lessor and lessee to obtain profit on the leased object being leased with an option to transfer ownership of the leased object through purchase/sale or giving (*hibah*) at certain time according to the lease agreement (akad).

Murabahah is sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on effective rate of return method less allowance for impairment losses.

At each consolidated statement of financial position date, the Bank assesses whether there is objective evidence that *Murabahah* receivables not carried at fair value through profit or loss are impaired. *Murabahah* receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition, and the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

1. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman berdasarkan prinsip syariah
(lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
- c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - 1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - 2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

1. Loans (continued)

Sharia financing (continued)

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

- a) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- b) a breach of contract, such as a default or delinquency in principal or margin payments;
- c) the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
- d) it becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;
- e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- f) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has not yet been identified individually in the portfolio, including:
 - 1) adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
 - 2) national or local conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months to 12 months; in exceptional cases, longer periods are warranted.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

1. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman berdasarkan prinsip syariah
(lanjutan)

Bank pertama kali menentukan apakah piutang *murabahah* jumlahnya signifikan secara individual. Apabila piutang *murabahah* jumlahnya signifikan secara individual, maka Bank akan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas piutang *murabahah*. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas piutang *murabahah* yang dinilai secara individual, terlepas piutang *murabahah* tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok piutang *murabahah* yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Piutang *murabahah* yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Pinjaman *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* meliputi *hawalah* dan *rahn*.

Hawalah merupakan akad pemindahan utang piutang nasabah kepada Bank dan atas transaksi ini Bank mendapat *ujrah* (imbalan) dan diakui pada saat diterima.

Rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian *qardh* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

1. Loans (continued)

Sharia financing (continued)

The Bank first assesses whether the *Murabahah* receivables is individually significant. If the *Murabahah* receivables considered individually significant, the Bank will determine that objective evidence of impairment exist or not. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed *Murabahah* receivables, whether significant or not, it includes the asset in a group of *Murabahah* receivables with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. *Murabahah* receivables that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Funds of qardh is borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods. *Funds of qardh* consists of *hawalah* and *rahn*.

Hawalah is a transfer of debt from the indebted parties (customers) to the Bank and for this transaction the Bank obtained an *ujrah* (fee) and is recognised upon receipt.

Rahn is the pawn of goods or assets from customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and in exchange for the Bank to obtain *ujrah* (benefits) and are recognised based on accrual basis.

Funds of qardh is recognised at the amount lent at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a *qardh* is recognised as revenue upon realization. *Funds of qardh* is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses on *qardh* based on the review of the quality of individual outstanding balances.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

1. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman berdasarkan prinsip syariah
(lanjutan)

Pembiayaan *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi laba (*profit sharing*) atau metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*).

Pembiayaan *Mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan *Mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *Mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan *Mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

1. Loans (continued)

Sharia financing (continued)

Mudharabah financing is investment of funds from the owner of funds (shahibul maal) to the fund manager (mudharib) to conduct certain business activity, with profit sharing or net revenue sharing method between the two parties based on a mutually agreed predetermined ratio. The Bank uses profit sharing scheme based on gross profit margin method.

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account. In the event that a portion of the mudharabah financing is lost prior to the start of operations due to damage or any other reasons without negligence or error on the part of the fund manager, the loss shall be deducted from mudharabah financing balance and shall be recognised as a loss by the Bank. If part of financing is lost after the commencement of business without negligence or fault of the fund manager, such loss is calculated during profit sharing. Loss on mudharabah financing due to negligence or error on the part of the fund manager is charged to the fund manager and not deducted from the mudharabah financing balance.

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

m. Kontrak jaminan keuangan

Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mengharuskan penerbit untuk melakukan pembayaran yang ditetapkan untuk mengganti uang pemegang kontrak atas kerugian yang terjadi karena debitur tertentu gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan dari instrumen utang. Jaminan keuangan tersebut diberikan kepada bank-bank, lembaga keuangan dan badan-badan lainnya atas nama debitur untuk menjamin kredit dan fasilitas-fasilitas perbankan lainnya.

Jaminan keuangan diakui awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal jaminan diberikan. Nilai wajar dari jaminan keuangan pada saat dimulainya transaksi pada umumnya sama dengan provisi yang diterima untuk jaminan diberikan dengan syarat dan kondisi normal. Setelah pengakuan awal, liabilitas atas jaminan tersebut diukur pada jumlah yang lebih tinggi antara jumlah awal, dikurangi amortisasi provisi dan estimasi terbaik dari jumlah yang diharapkan akan terjadi untuk menyelesaikan jaminan tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan pengalaman transaksi yang sejenis dan kerugian historis masa lalu, dilengkapi dengan penilaian manajemen. Pendapatan provisi yang diperoleh diamortisasi selama jangka waktu jaminan menggunakan metode garis lurus.

Setelah pengakuan awal kontrak, jaminan keuangan dicatat pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar amortisasi dengan *present value* atas pembayaran kewajiban yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan menjadi *probable*).

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit dihitung berdasarkan kerugian historis.

n. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss incurred because a specified debtor defaulted to make payments when due, in accordance with the terms of a debt instrument. Such financial guarantees are given to banks, financial institutions and other institutions on behalf of customers to secure loans and other banking facilities.

Financial guarantees are initially recognised at fair value on the date the guarantee was given. The fair value of a financial guarantee at inception is likely to equal the premium received because all guarantees are agreed on arm's length terms. Subsequent to initial recognition, the bank's liabilities under such guarantees are measured at the higher of the initial amount, less amortisation of fees recognised, and the best estimate of the amount required to settle the guarantee. These estimates are determined based on experience of similar transactions and history of past losses, supplemented by the judgement of management. The fee income earned is amortised over the period of guarantees using the straight line method.

Subsequently they are measured at the higher of amortised amount and the present value of any expected payment (when a payment under the guarantee has become probable).

Allowances for impairment on financial guarantee contracts with credit risk are calculated based on historical experience.

n. Acceptances receivables and payables

Acceptances receivables are classified as loans and receivables. Acceptances payables are classified as other financial liabilities.

Acceptances receivables and payables are stated at amortized cost. Acceptances receivables are stated net of allowance for impairment losses.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

o. Penyertaan saham

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan non-publik yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk tujuan jangka panjang.

Investasi dalam saham yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual dicatat sebesar biaya perolehan setelah pengakuan awalnya karena terdiri dari efek ekuitas tanpa harga kuotasi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, kecuali untuk investasi dalam saham tertentu yang memiliki harga kuotasi dicatat sebesar nilai wajar setelah pengakuan awalnya.

Investasi dimana BNI mempunyai persentase kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau di perusahaan asosiasi dimana Bank mempunyai pengaruh signifikan dicatat dengan metode ekuitas. Dengan metode ekuitas, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan disesuaikan dengan bagian BNI atas laba atau rugi neto perusahaan asosiasi sesuai dengan jumlah persentase kepemilikan dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal perolehan.

Investasi dengan persentase kepemilikan dibawah 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dicatat dengan metode biaya dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyertaan saham dengan metode biaya terdiri dari efek ekuitas tanpa harga kuotasi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dan diukur dengan menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai.

Penyertaan sementara pada perusahaan debitur timbul akibat konversi pinjaman yang diberikan menjadi saham. Pada saat pengakuan awal, saham yang diterima diakui dengan nilai wajar. Selanjutnya, saham tersebut dinilai dengan menggunakan metode ekuitas apabila BNI memiliki pengaruh signifikan terhadap *investees* dan metode biaya atau nilai wajar apabila BNI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *investees*. Kerugian penurunan nilai diakui apabila terdapat penurunan permanen atas penyertaan sementara dengan menggunakan metode *individual assessment*.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Equity investments

Equity investments represent investments in the form of shares of stock, in non-public companies engaged in financial services held for long-term purposes.

Investments in shares classified as available-for-sale financial asset is carried at cost after its initial recognition as it consist of unquoted equity securities whose fair value cannot be reliably measured, except for certain investment in shares that has quoted price which is accounted for at fair value after initial recognition.

Investments in which BNI has an ownership interest of 20% to 50% or an associated company in which the Bank has significant influence are recorded based on the equity method. Under equity method, investments are stated at cost and adjusted for BNI's share in net income or losses of the associated companies based on its percentage of ownership and reduced by dividends received since the date of acquisition.

Investments with an ownership interest below 20% and have no significant influence are carried at cost reduced by an allowance for impairment losses.

Equity investments at cost method consist of unquoted equity shares whose fair value can not be reliably measured, are classified as available-for-sale investments and are carried at cost less impairment.

Temporary investments in debtor companies arise from conversion of loans to shares/equity. At initial recognition, shares received were recognized at fair value. Subsequently, the shares are recognized using equity method if BNI has significant influence over the investees or at costs/fair value if BNI does not have significant influence over the investees. Loss from permanent decline in investment values of temporary investments are recognized using the individual assessment method.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

o. Penyertaan saham (lanjutan)

Penyertaan sementara dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian apabila telah melampaui jangka waktu 5 tahun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum", sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/2/2009 tanggal 29 Januari 2009. Sejak 24 Oktober 2012, Grup mengikuti PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

p. Aset tetap dan penyusutan

Grup menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan menggunakan model biaya.

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi paling kurang 3 tahun sekali.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Equity investments (continued)

Temporary investment is written-off from the consolidated statement of financial position if it is held for more than 5 years in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 7/2/PBI/2005 dated 20 January 2005 on "Asset Quality Ratings for Commercial Banks", as amended by Bank Indonesia Regulation No. 11/2/PBI/2009 dated 29 January 2009. Since 24 October 2012, the Group follows Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 dated 24 October 2012 regarding "Asset Quality Rating for Commercial Banks" and Circular Letter of Bank Indonesia No.15/28/DPNP dated 31 July 2013 regarding Asset Quality Ratings for Commercial Banks.

p. Fixed assets and depreciation

The Group applies revaluation model as accounting policy for land and buildings. For fixed assets other than land and buildings, it applies cost model.

Land and buildings are shown at fair value, less subsequent depreciation for buildings. Valuation of land and buildings are performed by external independent valuers with certain qualification. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset, and the net amount is restated to the revalued amount of the asset.

Appraisal of land and buildings is carried out by a certified external independent appraiser. Assessment of these assets are conducted regularly to ensure that the fair value of the revalued asset is not materially different from its carrying value.

If the fair value of the revalued asset change significantly, it is necessary to revalue on an annual basis, whereas if the fair value of the revalued asset does not change significantly, it is necessary to revalue at a minimum every 3 years.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

p. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Cadangan Revaluasi Aset" dan disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain", maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Aset tetap selain tanah dan bangunan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Semua aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

	Tarif Penyusutan/ Depreciation Rate
Bangunan	6.67%
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	20.00%

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Fixed assets and depreciation (continued)

Increases in the carrying amount arising on revaluation of land and buildings are recorded in "Asset Revaluation Reserve" and presented as "Other Comprehensive Income". Decrease in carrying amount as the result of revaluation is recorded as expense in the current year. If the asset does have balance on its "Gain on Revaluation of Fixed Assets", loss from revaluation of fixed asset is charged to "Gain on Revaluation of Fixed Assets" which is presented as "Other Comprehensive Income" and the rest of the amount is charged to current year's expenses.

Fixed assets besides land and buildings are stated at historical cost less accumulated depreciation.

Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition.

All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or loss upon occurrence. At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

All fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

	Tahun/Years	
	15	<i>Buildings</i>
	5	<i>Office equipment and motor vehicles</i>

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

p. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi dan dicatat sebagai "Aset dalam Penyelesaian". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait pada saat proses konstruksi atau pemasangan telah selesai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Fixed assets and depreciation (continued)

Office equipment consists of furniture and fixtures, installation, Automatic Teller Machines (ATM), computer software and hardware, communication and other office equipment.

All costs incurred in connection with the acquisition of land right are recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost incurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Land right is not depreciated unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land right is likely or definitely not obtainable.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.

When fixed assets are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss.

The accumulated costs of construction of fixed assets are capitalized and recognized as "Construction in progress". These costs are reclassified to the related fixed assets account when the construction or installation is completed.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

q. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain".

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh BNI dan entitas anak, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi liabilitasnya kepada BNI dan entitas anak. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada "Aset lain-lain".

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai *outstanding* kredit yang diberikan, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

r. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat liabilitas kepada masyarakat maupun kepada bank lain timbul.

Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Foreclosed collaterals

Foreclosed collaterals are included in the "Other Assets" account.

Foreclosed collaterals represent assets acquired by BNI and Subsidiaries, both from auction and non-auction based on voluntary transfer by the debtor or based on debtor's approval to sell the collateral where the debtor could not fulfill its obligations to BNI and Subsidiaries. Foreclosed collaterals represent loan collateral that were taken over as part of loans settlement and presented in "Other Assets".

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value or stated at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed collaterals less the estimated costs to sell the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged to allowance for impairment losses. The difference between the recorded amount of the foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as a gain or loss at the time of sale.

Maintenance and repair costs related to foreclosed collaterals are charged as an expense in profit or loss when incurred.

If there is permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognise such permanent decline in value and any such write-down is recognized in profit or loss.

r. Obligations due immediately

Obligations due immediately are recorded at the time obligations to public customers or other banks arise.

This account is classified as other financial liabilities and is measured at amortized cost.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

s. Simpanan Nasabah

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, atau dengan cara pemindah bukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah di BNI dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau dengan cara pemindahbukuan melalui *SMS Banking*, *Phone Banking* dan *Internet Banking* jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di BNI dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan BNI dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan.

Termasuk di dalam simpanan adalah simpanan syariah yang terdiri dari giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yad adh-dhamanah* yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan BNI Syariah. Giro *wadiah* dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro *wadiah*.

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*Athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas BNI Syariah kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Deposits from customers

Current accounts represent funds deposited by customers whereby the withdrawal can be done at any time by using a cheque or through transfer with a bank draft or other forms of payment order.

Savings account represent deposits of customers in BNI and a Subsidiary engaged in banking that may only be withdrawn over the counter and via ATMs or fund transfers by SMS Banking, Phone Banking and Internet Banking when certain agreed conditions are met, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

Time deposits represent customer's deposits in BNI and a Subsidiary engaged in banking that may be withdrawn at a certain time based on the agreement between the depositor and BNI and a Subsidiary engaged in banking.

Deposits include sharia deposits consisting of wadiah deposit and saving deposit. Wadiah deposit is a wadiah yad adh-dhamanah deposit in which the depositor is entitled to receive bonus income based on the policy of BNI Syariah. Wadiah demand deposits are stated at the amount payable to customers.

Saving deposits represent third party funds that can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of (Athaya) is voluntary on the part of Banks.

Deposits from customers are classified as other financial liabilities which are measured at amortized cost using effective interest rate method except sharia deposits which are stated at the amount payable by BNI Syariah to customers. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers are deducted from the amount of deposits.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

t. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, deposito berjangka, dan sertifikat deposito.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas BNI Syariah kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

u. Efek-efek yang diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan terdiri dari obligasi yang diterbitkan oleh Grup.

Efek-efek yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan efek dikurangkan dari jumlah efek-efek yang diterbitkan.

Obligasi yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

v. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to local and overseas banks, in the form of current accounts, inter-bank call money with original maturities of 90 days or less, time deposits and certificates of deposits.

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah demand deposits and saving deposits.

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities which are measured at amortised cost using effective interest rate method except sharia deposits which are stated at the amounts payable by BNI Syariah to the customers. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the amount of deposits.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

u. Securities issued

Securities issued consist of bonds issued by the Group.

Securities issued are classified as other financial liabilities which are measured at amortized cost. Incremental costs directly attributable to the issuance of marketable securities are deducted from the amount of securities issued.

Bonds issued are presented at nominal value net of unamortized discount. Costs incurred related to the bonds issuance are presented as deduction from the proceeds of bonds issued and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

v. Borrowings

Borrowings are funds received from other banks, Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

v. Pinjaman yang diterima (lanjutan)

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

w. Dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/BNI Syariah) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan sukuk *mudharabah*.

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo giro dan tabungan nasabah di Bank.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Borrowings (continued)

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate method.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

w. Temporary *syirkah* funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/BNI Syariah) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah current accounts, mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits and mudharabah sukuk issued.

Mudharabah current accounts and saving deposits represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah current accounts and savings deposits are stated based on the customer's current accounts and savings deposit balance in the Bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

w. Dana syirkah temporer (lanjutan)

w. Temporary syirkah funds (continued)

Sukuk mudharabah yang diterbitkan merupakan sukuk yang menggunakan akad mudharabah. Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk mudharabah disajikan dalam aset sebagai biaya yang ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang jangka waktu sukuk menggunakan garis lurus. Penerbitan sukuk dan perdagangan sukuk berdasarkan akad syariah, termasuk adanya aset/aktivitas yang mendasari. Pemilik sertifikat sukuk mudharabah mendapatkan bagi hasil.

Mudharabah sukuk issued is a sukuk using the contract of mudharabah. Sukuk mudharabah is recognized when the entity becomes a party in the issuance of contract mudharabah sukuk. Sukuk mudharabah is recognized at nominal value. Transaction costs are recognised separately from the sukuk mudharabah. Transaction costs for the issuance of sukuk mudharabah are presented as deferred expenses and amortized over the term of sukuk using the straight-line method. Sukuk issuance and trading of sukuk are based on the principles of sharia, including any underlying assets/activities. The holders of mudharabah sukuk certificate receive profit sharing.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. BNI Syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. BNI Syariah does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to BNI Syariah's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment accounts.

Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang ditetapkan.

The owners of temporary syirkah funds receive a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor (*gross profit margin*).

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

w. Dana syirkah temporer (lanjutan)

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deponan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

x. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah, beban bunga dan beban syariah

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang dikenakan suku bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (*impairment*).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

w. Temporary syirkah funds (continued)

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners and depositors as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely allocated to the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

x. Interest income and sharia income, interest expense and sharia expense

Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets and financial liabilities (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Loans for which the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to its timely collection, are generally classified as impaired loans.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

x. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah, beban bunga dan beban syariah (lanjutan)

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan dan beban syariah. Pendapatan syariah terdiri dari marjin *murabahah*, pendapatan *ijarah* (sewa), bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta pendapatan *qardh*. Beban syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*.

Marjin *Murabahah* dan pendapatan *ijarah* diakui selama periode akad berdasarkan konsep akrual. Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati. Pendapatan dari transaksi *qardh* diakui pada saat diterima.

Beban syariah merupakan bagi hasil untuk dana pihak ketiga dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah*.

y. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan operasional lainnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

x. Interest income and sharia income, interest expense and sharia expense (continued)

If a financial asset or group of similar financial assets' value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the effective interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

Interest income and expense include sharia income and expense. Sharia income represents profit from murabahah margin, lease income from ijarah, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing and income from qardh. Sharia expenses consist of mudharabah profit sharing expenses and wadiah bonus expenses.

Murabahah margin and ijarah income are recognized over the period of the agreement based on accrual basis. Mudharabah and musyarakah income is recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah). Qardh income is recognized upon receipt.

Sharia expense represents revenue sharing for third party fund using the revenue sharing principle based on pre-determined nisbah in accordance with mudharabah mutlaqah principle.

y. Fees and commission income

Fees and commissions directly related to lending activities, or fees and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of contract using the effective interest rate method and classified as part of interest income in profit or loss.

Fees and commissions income which are not related to lending activities or a specific period are recognised as revenues on the transaction date as other operating income.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

z. Kontrak asuransi

Kontrak asuransi adalah kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dimana pada saat penerbitan polis perusahaan asuransi menerima risiko asuransi yang signifikan dari pemegang polis.

Risiko asuransi yang signifikan adalah kemungkinan untuk membayar manfaat secara signifikan kepada pemegang polis apabila suatu kejadian yang diasuransikan terjadi dibandingkan dengan manfaat minimum yang akan dibayarkan apabila risiko yang diasuransikan tidak terjadi. Skenario-skenario yang diperhatikan adalah skenario yang mengandung unsur komersial.

BNI Life mendefinisikan risiko asuransi yang signifikan sebagai kemungkinan membayar manfaat pada saat terjadinya suatu kejadian yang diasuransikan, yang setidaknya 10% lebih besar dari manfaat yang dibayarkan jika kejadian yang diasuransikan tidak terjadi. Jika suatu kontrak asuransi tidak mengandung risiko asuransi yang signifikan, maka kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai kontrak investasi. Ketika sebuah kontrak telah diklasifikasi sebagai kontrak asuransi, reklasifikasi terhadap kontrak tersebut tidak dapat dilakukan kecuali ketentuan perjanjian kemudian diamandemen.

BNI Life menerbitkan kontrak asuransi untuk produk asuransi tradisional dan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Kedua jenis produk ini mempunyai risiko asuransi yang signifikan.

Produk-produk dari BNI Life dibagi berdasarkan kategori utama sebagai berikut:

Tipe polis/ Policy type	Deskripsi manfaat/ Description of benefits
1) Produk tradisional/ <i>Traditional products</i>	Produk yang memberikan perlindungan untuk menutupi risiko kematian, kecelakaan, penyakit kritis, dan kesehatan dari pemegang polis. Total uang pertanggungan akan dibayarkan pada saat terjadinya risiko yang ditanggung/ <i>Products which provide protection to cover the risk of death, accident, critical illness, and health of the insured. The basic sum insured will be paid upon the occurrence of the risks covered.</i>

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Insurance contract

Insurance contract is contract issued by insurance company which accepts significant insurance risk from policyholder upon the issuance of the policy.

Significant insurance risk is the possibility of paying significantly more benefit to the policyholder upon the occurrence of insured event compared to the minimum benefit payable in a scenario where the insured event does not occur. Scenarios considered are those with commercial substance.

BNI Life defines significant insurance risk as the possibility of having to pay benefits on the occurrence of an insured event of at least 10% more than the benefits payable if the insured event did not occur. If the insurance contract does not contain significant insurance risk, the contract will be deemed as an investment contract. Once a contract has been classified as an insurance contract, no reclassification is subsequently performed unless the terms of the agreement are later amended.

BNI Life issues insurance contracts for traditional insurance products and investment linked insurance products. These products have significant insurance risk.

BNI Life's products may be divided into the following main categories:



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

z. Kontrak asuransi (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Insurance contract (continued)

Tipe polis/ <i>Policy type</i>	Deskripsi manfaat/ <i>Description of benefits</i>
<p>2) Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi/<i>Investment linked insurance products</i></p> <p>Produk asuransi unit link/<i>Unit-linked insurance products</i></p>	<p>Produk yang memberikan manfaat untuk risiko kematian dari uang pertanggungan dan akumulasi nilai tunai yang berasal dari pengembangan premi yang dibayar/<i>Products which provide benefit to cover the risk of death from sum insured and accumulated cash value from investment yield from paid premium.</i></p> <p>Nilai dana investasi akan dihitung berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang diterima dari aset dasar tergantung dari tipe pendanaan yang dipilih oleh pemegang polis/<i>The investment fund value will be measured based on the yield of return from the underlying assets depending on the fund type which is chosen by the policyholders.</i></p>

BNI Life memisahkan komponen deposit dari kontrak unit link seperti yang disyaratkan oleh PSAK No. 62 hanya jika kondisi-kondisi dibawah ini terpenuhi:

- BNI Life dapat mengukur komponen "deposit" secara terpisah (termasuk opsi penyerahan melekat, yaitu tanpa memperhitungkan komponen "asuransi"); dan
- Kebijakan akuntansi BNI Life tidak mensyaratkan untuk mengakui semua hak dan kewajiban yang timbul dari komponen "deposit".

Karena hanya kondisi pertama di atas terpenuhi, maka BNI Life tidak memisahkan komponen deposit dari kontrak unit link.

Pengujian kecukupan liabilitas

Untuk asuransi jiwa, liabilitas kepada pemegang polis khususnya kewajiban untuk klaim masa depan diuji untuk menentukan apakah liabilitas tersebut cukup untuk menutupi semua arus kas keluar di masa depan termasuk semua manfaat yang dijamin dan manfaat tambahan yang dijamin, manfaat partisipasi yang tidak dijamin (jika ada), semua biaya untuk penerbitan polis dan pemeliharaan polis, serta mencerminkan arus kas masuk masa depan, yaitu premi yang diterima di masa depan.

BNI Life unbundles the deposit component of unit-linked contract as required by PSAK No. 62 only when both of the following conditions are met:

- *BNI Life can measure separately the "deposit" component (including any embedded surrender option, i.e. without taking into account the "insurance" component); and*
- *BNI Life's accounting policies do not otherwise require to recognise all obligations and rights arising from the "deposit" component.*

Since only the first condition above is met, therefore BNI Life does not unbundle the deposit component of unit-linked contracts.

Liability adequacy tests

For life insurance, the liabilities to policyholder in particular the liabilities for future claim is tested to determine whether they are sufficient to cover all related future cash out flow including all guaranteed benefits and guaranteed embedded additional benefits, non-guaranteed participation benefits feature (if any), all the expense for policies issuance and maintaining the policies, as well as reflecting the future cash inflow, i.e. premium receipt in the future.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

z. Kontrak asuransi (lanjutan)

Pengujian kecukupan liabilitas (lanjutan)

Liabilitas dihitung berdasarkan diskonto dari arus kas untuk semua arus kas yang terkait yaitu arus kas keluar dan arus kas masuk seperti yang disebutkan di atas dengan menggunakan asumsi-asumsi aktuarial berdasarkan estimasi terbaik terkini yang ditetapkan oleh aktuaris BNI Life, termasuk asumsi mortalitas/morbiditas, *lapse*, biaya dan inflasi serta margin atas risiko pemburukan.

BNI Life menerapkan metode *Gross Premium Valuation* dalam perhitungan liabilitas kepada pemegang polis dengan menggunakan asumsi aktuarial berdasarkan asumsi estimasi terbaik dan margin atas risiko pemburukan.

Premi bruto

Premi atau ujarah/fee kontrak jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi total proteksi asuransi yang diberikan. Premi ujarah/fee kontrak jangka panjang diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis.

Premi reasuransi bruto diakui sebagai beban pada saat dibayarkan atau pada tanggal di mana polis tersebut efektif.

BNI Life menghitung cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dengan menggunakan metode amortisasi harian.

Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan hanya diterapkan terhadap premi yang mempunyai risiko (asuransi jangka warisa, kecelakaan diri, dan kesehatan) yang periode asuransinya tidak lebih dari satu tahun.

Perubahan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Premi yang diterima sebelum diterbitkannya polis asuransi dicatat sebagai titipan premi pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Insurance contract (continued)

Liability adequacy tests (continued)

The liabilities are calculated based on discounted cash flow basis for all related cash flows i.e. both of cash outflows and cash inflows as mentioned above using a set of most recent best estimate actuarial assumptions which is set by BNI Life's actuary, including mortality/morbidity assumptions, lapse assumptions, expense assumptions and inflation assumptions as well as margin for adverse deviation assumptions.

BNI Life applies the Gross Premium Valuation method to calculate the policyholder liabilities based on actuarial assumptions which is based on best estimate assumptions and margin for adverse deviation.

Gross premiums

Premiums or ujarah/fee received from short-term insurance contracts are recognized as income within the contract period based on the insurance coverage provided. Premiums or ujarah/fee received from long-term insurance contracts are recognized as income when these are due.

Gross reinsurance premiums are recognized as an expense when payable or on the date in which the policy becomes effective.

BNI Life calculates unearned premium reserves using daily amortization method.

Unearned premium reserves only apply for premiums that are short-term with less than one year insurance period which have risk component only (term life, personal accident and health insurance).

Changes in unearned premium reserves is recognised in the current year's profit or loss.

Premiums received prior to the issuance of insurance policies is recorded as policyholders' deposit in the consolidated statement of financial position.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

z. Kontrak asuransi (lanjutan)

Reasuransi

BNi Life mereasuransikan sebagian porsi risikonya kepada perusahaan reasuradur. Total premi yang dibayar atau porsi premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sesuai dengan proporsi total proteksi reasuransi yang diterima berdasarkan kontrak reasuransi.

Aset reasuransi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi untuk *ceded* liabilitas manfaat polis masa depan, *ceded* estimasi liabilitas klaim dan *ceded* premi yang belum merupakan pendapatan. Total manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

BNi Life menyajikan aset reasuransi secara terpisah sebagai aset atas liabilitas manfaat polis masa depan, premi yang belum merupakan pendapatan, dan estimasi liabilitas klaim.

Jika aset reasuransi mengalami penurunan nilai, Perusahaan mengurangi nilai tercatat dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika ada bukti obyektif, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, bahwa Perusahaan tidak dapat menerima seluruh total karena di bawah syarat-syarat kontrak, dan dampak pada total yang akan diterima dari reasuradur dapat diukur secara andal.

Klaim dan manfaat polis

Klaim dan manfaat polis terdiri dari klaim yang telah diselesaikan, klaim dalam proses penyelesaian dan estimasi atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR). Klaim dan manfaat polis diakui sebagai beban pada saat terjadinya liabilitas untuk memberikan proteksi. Klaim reasuransi yang diperoleh dari BNi Life reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang klaim dan manfaat polis pada periode yang sama dengan periode pengakuan klaim dan manfaat polis.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Insurance contract (continued)

Reinsurance

BNi Life reinsures a portion of its risk with reinsurance companies. The amount of premium paid or portion of premium from prospective reinsurance transactions is recognized over the reinsurance contract in proportion with the protection received.

Reinsurance assets include balances expected to be recovered from reinsurance companies for *ceded* liability for future policy benefits, *ceded* estimated claim liabilities and *ceded* unearned premiums. Amounts recoverable from reinsurers are estimated in a manner consistent with the liability associated with the reinsured policy.

BNi Life presents separately reinsurance assets of future policy benefit liabilities, unearned premium, and estimated claim liabilities.

If a reinsurance asset is impaired, the Company reduces the carrying amount and recognises the impairment loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. A reinsurance asset is impaired if there is objective evidence, as a result of an event that occurred after initial recognition of the reinsurance asset, that the Company may not receive all amounts due to it under the terms of the contract, and the impact of the amounts that the Company will receive from the reinsurer can be reliably measured.

Claims and policy benefits

Claims and policy benefits consist of settled claims, claims that are still in process of completion and estimated claims incurred but not yet reported (IBNR). Claims and policy benefits are recognised as expenses when the liabilities to cover claims are incurred. Reinsurance claims recoveries from reinsurance companies are recognised and recorded as deduction from claims and policy benefits consistent in the same period with the claims and policies benefits recognition.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

z. Kontrak asuransi (lanjutan)

Klaim dan manfaat polis (lanjutan)

Total klaim dalam penyelesaian, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan, dinyatakan berdasarkan estimasi menggunakan teknik perhitungan teknis oleh aktuaris yang dilaporkan sebagai bagian dari "Estimasi liabilitas klaim" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim, sebagai hasil dari evaluasi lebih lanjut dan perbedaan antara estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai biaya tambahan atau pengurang biaya pada periode terjadinya perubahan.

Liabilitas manfaat polis masa depan

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan nilai sekarang estimasi manfaat polis masa depan yang akan dibayarkan kepada pemegang polis atau ahli warisnya dikurangi dengan nilai sekarang dari estimasi premi masa depan yang akan diterima dari pemegang polis dan diakui secara konsisten pada saat pengakuan pendapatan premi. Liabilitas manfaat polis masa depan ditentukan dan dihitung dengan menggunakan rumus tertentu oleh aktuaris BNI Life.

BNI Life menghitung liabilitas manfaat polis masa depan dengan menggunakan metode *Gross Premium Valuation* yang mencerminkan nilai sekarang estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai sekarang estimasi seluruh biaya yang dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan.

Perubahan liabilitas manfaat polis masa depan diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Untuk produk unit link, liabilitas kepada pemegang polis unit link diakui pada saat penerimaan dana dikonversi menjadi unit setelah dikurangi biaya-biaya dan akan bertambah atau berkurang sesuai dengan nilai aset bersih efektif yang berlaku. Risiko investasi terkait ditanggung oleh pemegang polis unit link.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Insurance contract (continued)

Claims and policy benefits (continued)

Total claims in process, including claims incurred but not yet reported, are stated at estimated amounts determined based on the actuarial technical insurance calculations which is reported as part of "Estimated claim liabilities" in the consolidated statement of financial position. Changes in estimated claim liabilities as a result of further evaluation and the difference between estimated claims and paid claims are recognised as addition to or deduction from expenses in the period the changes occurred.

Liability for future policy benefits

The liabilities for future policy benefits represent the present value of estimated future policy benefits to be paid to policyholders or their heirs less present value of estimated future premiums to be received from the policyholders and recognised consistently with the recognition of premium income. The liabilities for future policy benefits are determined and computed based on certain formula by BNI Life's actuary.

BNI Life calculates the liabilities for future policy benefits using *Gross Premium Valuation* method that reflects the present value of estimated payments throughout the guaranteed benefits including all the embedded options available, the estimated present value of all handling costs incurred and also considering the future premium receipt.

Changes in the liabilities for future policy benefits are recognized in the current year's profit or loss.

For unit-linked products, the liabilities to unit-linked policy holders is recognised at the time the funds received are converted into units, net of related expenses and will increase or decrease in accordance with effective net assets value. Related investment risk are borne by the unit-linked policyholders.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

z. Kontrak asuransi (lanjutan)

Liabilitas manfaat polis masa depan (lanjutan)

Penerimaan dana dari nasabah untuk produk non syariah diakui sebagai pendapatan premi bruto di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Liabilitas kepada pemegang polis unit link diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian yang termasuk di dalam liabilitas manfaat polis masa depan sebesar jumlah yang diterima setelah dikurangi dengan bagian premi yang merupakan pendapatan Entitas Anak, disertai dengan pengakuan kenaikan liabilitas kepada pemegang polis unit link di laba rugi.

Setiap bunga, keuntungan atau kerugian dari kenaikan atau penurunan nilai pasar investasi dicatat sebagai pendapatan atau beban, disertai dengan pengakuan kenaikan atau penurunan liabilitas manfaat polis masa depan di laba rugi dan liabilitas manfaat polis masa depan di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penerimaan dana dari peserta untuk produk Syariah diakui sebagai pendapatan kontribusi dari dana tabarru' sesuai dengan akad asuransinya dan bukan merupakan pendapatan entitas pengelola atau perusahaan, karena entitas pengelola sebagai wakil para peserta untuk mengelola dana tabarru'. Bagian kontribusi untuk ujah entitas pengelola dalam rangka mengelola dana tabarru' diakui sebagai pendapatan ujah pada laporan laba rugi. Bagian penerimaan dana dari peserta untuk investasi dari akad mudharabah diakui sebagai dana investasi mudharabah dan penerimaan dari peserta untuk investasi dari akad wakalah diakui sebagai dana investasi wakalah di laporan posisi keuangan Dana Peserta.

aa. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Insurance contract (continued)

Liabilities for future policy benefits (continued)

Funds received from customers for non-sharia products are recognised as gross premiums income in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income. Liabilities to unit-linked policy holders are recognised in the consolidated statement of financial position which is included in the liabilities for future policy benefits for the amount received net of the portion of premium representing Subsidiary's revenue, with corresponding profit or loss recognition for the increase in liabilities to unit-linked policyholders.

Any interest, gain or loss due to increases or decreases in market value of investments are recorded as income or expense, with a corresponding recognition of increase or decrease in liabilities for future policy benefits in the profit or loss and liabilities for future policy benefits in the consolidated statement of financial position.

Funds received from participant for Sharia unit products is recognized as contributions income from tabarru fund' according to the insurance contract and not as income for operator/company, as the operator only act as a representative of the participant to manage the tabarru' funds'. The contribution portion for operator's ujah in effort to manage the tabarru' funds is recognized as ujah income in profit or loss. Portion of fund received from participant for investment of mudharabah contract is recognized as mudharabah investment fund and receipt from wakalah contract is recognized as wakalah investment fund in the statement of financial position for Participant Funds.

aa. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax are recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

aa. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode posisi keuangan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak dimasa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

aa. Taxation (continued)

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the financial position method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ab. Imbalan kerja

ab. Employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Short-term employee benefits are recognised when they accrued to the employees.

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya

Pension benefits and other post-employment

BNI memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

BNI has defined benefit and defined contribution pension plans.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun").

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension that will be received by the employee on becoming entitled to a pension, which usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation. This plan is managed by Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun").

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Bank akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki liabilitas hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK").

A defined contribution plan is a pension plan under which the Bank pays fixed contributions into a separate entity (pension fund) and has no legal or constructive obligation to pay further contributions. This plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK").

BNI diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

BNI is required to provide minimum pension benefits as stipulated by Law No. 13/2003 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labor Law represent defined benefit plans.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

ab. Imbalan kerja (lanjutan)

**Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja
lainnya (lanjutan)**

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Grup juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Dana Pensiun

Bank memberikan manfaat bulanan (anuitas) yang didefinisikan berdasarkan gaji dan periode kepesertaan yang terkait dengan masa kerja.

Berdasarkan skema program, risiko yang mempengaruhi hasil perhitungan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Tingkat imbal hasil atas Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) (hasil investasi DPPK yang lebih rendah dari asumsi akan meningkatkan nilai kini kewajiban imbalan pasti).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ab. Employee benefits (continued)

**Pension benefits and other post-
employment benefits (continued)**

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

The Group also provides other post-employment benefits, such as service pay and separation pay. The service pay benefit vests when the employees reach their retirement age. The separation pay benefit is paid to employees in the case of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

Pension Fund

The Bank provides a monthly benefit pension (annuity) which is defined by salary and period of membership.

The plan design means that the risks most commonly affecting the reported financial results are expected to be:

- Investment risk (strong investment returns tending to improve the balance sheet position, whilst poor or negative investment returns tending to weaken the position).



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ab. Imbalan kerja (lanjutan)

ab. Employee benefits (continued)

Dana Pensiun (lanjutan)

Pension Fund (continued)

- Risiko atas tingkat suku bunga (kewajiban imbalan pasti yang dihitung berdasarkan PSAK 24 menggunakan tingkat diskonto berdasarkan imbalan hasil pasar atas bunga obligasi. Apabila imbal hasil pasar atas bunga obligasi menurun, nilai kini kewajiban imbalan pasti akan meningkat).
- Risiko atas pengunduran diri (program memberikan manfaat terbesar ketika peserta mencapai usia pensiun. Apabila tingkat pengunduran diri sebelum pensiun meningkat. Nilai kini kewajiban imbalan pasti cenderung menurun karena jumlah peserta yang mencapai usia pensiun lebih sedikit).
- Risiko atas tingkat kenaikan gaji (tingkat kenaikan gaji aktual yang lebih tinggi dari asumsi akan meningkatkan nilai kini kewajiban imbalan pasti).

- *Interest rate risk (the defined benefit obligation calculated under SFAS 24 uses a discount rate based on bond yields. If bond yields fall, the defined benefit obligation will tend to increase).*
- *Changes in turnover (the plan only provides benefits upon reaching retirement. Therefore, if turnover rates increase prior to retirement, then the liability will tend to fall significantly as fewer employees reach retirement age).*
- *Salary inflation risk (higher than expected increases in salary will increase the defined benefit obligation).*

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Defined Contribution (DC) Plan

Program memberikan manfaat sekaligus (*lump sum*) yang didefinisikan berdasarkan gaji dan periode kepesertaan yang terkait dengan masa kerja. Namun, akumulasi saldo program iuran pasti (DPLK) akan mengurangi kewajiban Bank. Laporan ini menghitung pembayaran yang harus dilakukan Bank (apabila ada) jika manfaat pasti yang dijanjikan perusahaan melebihi akumulasi saldo DPLK. Kontribusi perusahaan ke DPLK dicatat secara terpisah dan tidak disajikan dalam laporan ini.

The Bank provides a defined benefit lump sum benefit pension which is defined by salary and period of membership. However, the Bank's obligation is reduced by the proceeds of a separate defined contribution plan (DPLK). These disclosures measure the Bank's additional payment required (if any) if the defined benefit exceeds the proceeds of that defined contribution plan. The Bank expenses the contribution it pays into the defined contribution on cash basis, and separately to the amount shown in these disclosures.

Berdasarkan skema program, risiko yang mempengaruhi hasil perhitungan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The plan design means that the risk most commonly affecting the consolidated financial statement are expected to be :

- Tingkat imbal hasil atas DPLK (hasil investasi DPLK yang lebih rendah dari asumsi akan meningkatkan nilai kini kewajiban imbalan pasti).
- Risiko atas tingkat suku bunga (kewajiban imbalan pasti yang dihitung berdasarkan PSAK 24 menggunakan tingkat diskonto berdasarkan imbalan hasil pasar atas bunga obligasi. Apabila imbal hasil pasar atas bunga obligasi menurun, nilai kini kewajiban imbalan pasti akan meningkat).

- *Net investment return on DC fund (lower than expected return will increase the defined benefit obligation).*
- *Interest rate risk (the defined benefit obligation calculated under SFAS 24 uses a discount rate based on bond yields. If bond yields fall, the defined benefit obligation will tend to increase).*

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ab. Imbalan kerja (lanjutan)

ab. Employee benefits (continued)

**Dana Pensiun Lembaga Keuangan
(lanjutan)**

Defined Contribution Plan (continued)

- Risiko atas tingkat kenaikan gaji (tingkat kenaikan gaji aktual yang lebih tinggi dari asumsi akan meningkatkan nilai kini kewajiban imbalan pasti).
- Risiko atas pengunduran diri (program memberikan manfaat terbesar ketika peserta mencapai usia pensiun. Apabila tingkat pengunduran diri sebelum pensiun meningkat. Nilai kini kewajiban imbalan pasti cenderung menurun karena jumlah peserta yang mencapai usia pensiun lebih sedikit).

- *Salary inflation risk (higher than expected increases in salary will increase the defined benefit obligation).*
- *Changes in turnover. The plan only provides benefit upon reaching retirement. Therefore if turnover rates increase prior to retirement, then the liability will tend to fall significantly as fewer employees reach retirement age.*

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laporan laba rugi.

Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and change in actuarial assumption are charged or credited to profit or loss.

ac. Laba per saham dasar

ac. Basic earnings per share

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang tersedia bagi pemegang saham biasa (*laba residual*) dengan jumlah rata-rata tertimbang lembar saham biasa yang beredar selama tahun berjalan.

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year available to shareholders of ordinary shares (residual income) by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the current year.

ad. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

ad. Transactions with related parties

BNI dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak - pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang didefinisikan antara lain:

BNI and Subsidiaries enter into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS No. 7 regarding "Related Party Disclosures" and Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies", which are defined, among others, as:



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**ad. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

- (i) perusahaan di bawah pengendalian BNI dan Entitas Anak;
- (ii) perusahaan asosiasi;
- (iii) investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
- (iv) perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam Catatan iii di atas;
- (v) karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
- (vi) entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah yaitu Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

ae. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

af. Pelaporan segmen

BNI dan Entitas Anak menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

Grup mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**ad. Transactions with related parties
(continued)**

- (i) entities under the control of BNI and Subsidiaries;
- (ii) associated companies;
- (iii) investors with voting rights that gives them significant influence;
- (iv) entities controlled by investors under Note iii above;
- (v) key employees and family members; and
- (vi) entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government, which is defined as the Minister of Finance or Provincial Government who has share ownership in the entity.

All significant transactions with related parties have been disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

ae. Dividends

Dividend distribution to the shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the shareholders.

af. Segment reporting

BNI and Subsidiaries determine and present operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

The Group defines an operating segment as a component of an entity:

- a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- c) for which discrete financial information is available.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

af. Pelaporan segmen (lanjutan)

Grup mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi Korporasi, Komersial dan Kecil, Konsumer dan Ritel, Tresuri dan Institusi Keuangan, Kantor Pusat dan Entitas Anak.

ag. Biaya emisi penerbitan saham

Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahkan Modal Disetor - Neto", sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

af. Segment reporting (continued)

The Group discloses its operating segments based on operating segments that consist of Corporate, Commercial and Small, Consumer and Retail, Treasury and Financial Institution, Head Office and Subsidiaries.

ag. Shares issuance costs

Costs related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction of "Additional Paid-In Capital - Net" account, under equity section in the consolidated statement of financial position.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGMENTS**

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the consolidated financial statements these require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regards to future events.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

b. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Grup menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2c. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGMENTS (continued)**

Although these estimates and assumption are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowances for impairment losses of financial assets

In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well are the estimated future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

b. Determining fair values of financial instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Group uses the valuation techniques as described in Note 2c. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

**b. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)**

Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup *feedback* model atas likuiditas volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

c. Imbalan kerja karyawan

Present value atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Grup menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

d. Provisi perpajakan

Grup menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba atau rugi.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGMENTS (continued)**

Key sources of estimation uncertainty: (continued)

**b. Determining fair values of financial instruments
(continued)**

The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.

c. Employee benefits

The present value of the employee benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefits liability.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

d. Provision for taxes

The Group provides for tax provision based on estimates whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit or loss.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

e. Liabilitas asuransi untuk kontrak asuransi

Cadangan teknis Entitas Anak dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai bagian dari "Liabilitas lain-lain" berdasarkan perhitungan teknis asuransi dengan menggunakan asumsi-asumsi aktuarial yaitu asumsi estimasi terbaik dan margin atas risiko pemburukan. Termasuk dalam cadangan teknis adalah liabilitas manfaat polis masa depan, estimasi liabilitas klaim, dan premi yang belum merupakan pendapatan. Entitas Anak menggunakan metode *Gross Premium Reserve* yang menghitung liabilitas manfaat polis masa depan berdasarkan asumsi estimasi terbaik dan margin atas risiko pemburukan.

f. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

g. Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

h. Konsolidasian Entitas Terstruktur

Dalam menentukan tingkat pengendalian yang dimiliki, Grup mempertimbangkan apakah entitas tersebut memenuhi definisi Entitas Terstruktur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia yang dijabarkan dalam Catatan 2d dan apakah Grup, secara substansi, mengendalikan entitas tersebut.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGMENTS (continued)**

Key sources of estimation uncertainty (continued)

e. Insurance liabilities on insurance contracts

Technical reserves of a Subsidiary recorded in the consolidated statement of financial position as part of "Other liabilities" are calculated based on insurance technical calculation using certain actuarial assumptions which are based on best estimate assumptions and margin for adverse risk. Included in the technical reserves are liability for future policy benefits, estimated claim liabilities, and unearned premium income. The Subsidiary uses Gross Premium Reserve method in calculating liability for future policy benefits which are based on best estimate assumptions and margin for adverse risk.

f. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary differences. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

g. Fixed Assets Revaluation

The Bank's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Bank's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

h. Consolidation of Structured Entities

In determining the degree of control exercised, the Group considers whether these entities meet the definition of Structured Entities in accordance with applicable Financial Accounting Standard in Indonesia as set out in Note 2d and whether the Group, in substance, controls such entities.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

h. Konsolidasian Entitas Terstruktur (lanjutan)

Ketika Grup, secara substansi, mengendalikan entitas terstruktur tersebut, entitas tersebut dikonsolidasikan oleh Grup.

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGMENTS (continued)**

Key sources of estimation uncertainty (continued)

**h. Consolidation of Structured Entities
(continued)**

When the Group, in substance, controls the entity to which the financial assets have been transferred, the entity is consolidated by the Group.

i. Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of assets whenever events or changes in circumstances would indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

- a) significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- b) significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- c) significant negative industry or economic trends.

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or cash-generating unit's) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS

Kas terdiri dari:

	31 Desember/December	
	2018	2017
Rupiah	13,282,121	11,025,722
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	350,566	275,409
Dolar Singapura	228,256	126,759
Yuan China	60,491	21,841
Euro	37,043	31,946
Real Arab Saudi	25,779	23,294
Dolar Australia	14,161	19,192
Yen Jepang	12,171	13,782
Dolar Hong Kong	11,288	17,493
Ringgit Malaysia	6,843	10,777
Pound Sterling Inggris	4,253	6,828
Dirham Uni Emirat Arab	3,871	900
Franc Swiss	3,612	1,158
Dolar Brunei	1,179	1,242
Dolar Kanada	725	481
Won Korea Selatan	674	356
Dolar Taiwan	671	358
Baht Thailand	142	126
Total	14,043,846	11,577,664

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sejumlah Rp5.087.355 dan Rp4.972.026 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

4. CASH

Cash consists of the following:

	31 Desember/December	
	2018	2017
Rupiah	13,282,121	11,025,722
Mata uang asing		
United States Dollar	350,566	275,409
Singapore Dollar	228,256	126,759
Chinese Yuan	60,491	21,841
Euro	37,043	31,946
Saudi Arabian Real	25,779	23,294
Australian Dollar	14,161	19,192
Japanese Yen	12,171	13,782
Hong Kong Dollar	11,288	17,493
Malaysian Ringgit	6,843	10,777
Great Britain Pound Sterling	4,253	6,828
United Arab Emirates Dirham	3,871	900
Swiss Franc	3,612	1,158
Brunei Dollar	1,179	1,242
Canadian Dollar	725	481
South Korean Won	674	356
Taiwan Dollar	671	358
Thailand Baht	142	126
Total	14,043,846	11,577,664

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automatic Teller Machines) of Rp5,087,355 and Rp4,972,026 as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

	31 Desember/December	
	2018	2017
Rupiah	27,877,724	26,321,196
Dolar Amerika Serikat	7,713,519	6,379,521
Total	35,591,243	32,700,717

Bank dan Entitas Anak dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan syariah, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember/December	
	2018	2017
Rupiah	27,877,724	26,321,196
United States Dollar	7,713,519	6,379,521
Total	35,591,243	32,700,717

The Bank and Subsidiaries are required to maintain minimum statutory reserves (GWM) in Rupiah for conventional and sharia banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

BNI

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No.17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015, PBI No.17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, PBI No.18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No.18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 dan PBI No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, yang masing-masing sebesar:

	31 Desember/December	
	2018	2017
Rupiah		
- GWM Primer	6.50%	6.50%
Harian*)	3.50%	5.00%
Rata-rata*)	3.00%	1.50%
- GWM Sekunder**)	-	4.00%
- PLM***)	4.00%	-
Mata uang asing	8.00%	8.00%

*) Mulai berlaku per 16 Juli 2018

**) Per 1 Juli 2017, excess GWM tidak diperhitungkan sebagai pemenuhan GWM Sekunder.

***) Per 16 Juli 2018, berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, istilah GWM Sekunder berubah menjadi PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) dan GWM LFR berubah menjadi RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial)

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau excess reserve yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer, GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). GWM LFR dan RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM Bank dibawah minimum LFR dan RIM target Bank Indonesia (80%) atau jika di atas maksimum LFR dan RIM target BI (92%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

BNI

As of 31 December 2018 and 2017, the Bank's Minimum Statutory Reserve complies with Bank Indonesia (BI) Regulation No. 15/15/PBI/2013 dated 24 December 2013 which have been further amended with PBI No. 17/11/PBI/2015 dated 25 June 2015, PBI No.17/21/PBI/2015 dated 26 November 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 dated 10 March 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 dated 18 August 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 dated 17 April 2017 and PBI No. 20/3/PBI/2018 dated 29 March 2018 concerning Minimum Statutory Reserve of Commercial Banks with BI in Rupiah and foreign currency, which are as follows:

	31 Desember/December	
	2018	2017
Rupiah		
- Primary Minimum Statutory Reserve - Daily*)	6.50%	6.50%
Average*)	3.50%	5.00%
Average*)	3.00%	1.50%
- Secondary Minimum - Statutory Reserve**)	-	4.00%
- PLM***) - Foreign Currencies	4.00%	-
Mata uang asing	8.00%	8.00%

*) Effective on 16 July 2018

**) Starting 1 July 2017, excess GWM is not considered as Secondary Minimum Statutory Reserve.

***) As of 16 July 2018, based on PBI No.20/4/PBI/ 2018 dated 29 March 2018, the term GWM Secondary changed to PLM (Macroprudential Liquidity Buffer) and the LFR GWM changed to RIM (Macroprudential Intermediation Ratio)

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Secondary Minimum Statutory Reserve and Macroprudential Liquidity Buffer are the minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprised of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Government Debenture Debt (SUN), Sharia Government Securities (SBSN), and/or excess reserve which represent the excess reserve of the Bank's Current Accounts in Rupiah over the Primary Minimum Statutory Reserve, Minimum Statutory Reserve on LFR and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). Minimum Statutory Reserve on LFR and RIM is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's LFR and RIM is below the minimum of LFR and RIM targeted by Bank Indonesia (80%) or if the Bank's LFR and RIM is above the maximum of LFR and RIM targeted by BI (92%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio Giro Wajib Minimum untuk rekening Rupiah dan mata uang asing (BNI saja) pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah			Rupiah
- GWM Primer	6.53%	6.57%	Primary Minimum Statutory Reserve -
Harian	3.50%	5.00%	Daily
Rata-rata	3.03%	1.57%	Average
- GWM Sekunder	-	15.18%	Secondary Minimum Statutory Reserve -
- PLM	12.53%	-	PLM -
Mata uang asing	8.01%	8.01%	Foreign currencies

BNI Syariah

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) untuk rekening Rupiah dan mata uang asing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah	5.13%	7.25%	Rupiah
Mata uang asing	1.64%	1.45%	Foreign currencies

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang "Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah" sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, PBI No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan PBI No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, setiap bank diwajibkan memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan masing-masing sebesar 5,00% dan 1,00% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan GWM dari Bank Indonesia.

BNI Syariah telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM per tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

BNI Syariah menempatkan dana pada Bank Indonesia dengan rata-rata tingkat bonus tahunan sebagai berikut:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	4.09%	3.50%	Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	5.99%	5,62%	Bank Indonesia Sharia Certificate
Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	1.90%	1,07%	Bank Indonesia Sharia Term Deposit

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The ratio of the Minimum Statutory Reserve requirement (BNI only) for its Rupiah and foreign currencies accounts as of 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah			Rupiah
- GWM Primer	6.53%	6.57%	Primary Minimum Statutory Reserve -
Harian	3.50%	5.00%	Daily
Rata-rata	3.03%	1.57%	Average
- GWM Sekunder	-	15.18%	Secondary Minimum Statutory Reserve -
- PLM	12.53%	-	PLM -
Mata uang asing	8.01%	8.01%	Foreign currencies

BNI Syariah

The Ratio of Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") for its Rupiah and foreign currencies as of 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah	5.13%	7.25%	Rupiah
Mata uang asing	1.64%	1.45%	Foreign currencies

Based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.6/21/PBI/2004 dated 3 August 2004 regarding "Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Commercial Banks under Sharia Principle" as amended, by PBI No. 8/23/PBI/2006 dated 5 October 2006, PBI No. 10/23/PBI/2008 dated 16 October 2008 which has revoked and amended with PBI No. 15/16/PBI/2013 dated 24 December 2013, each bank is required to maintain Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) in Rupiah and foreign currencies equivalent to 5.00% and 1.00% of its third party funds denominated in Rupiah and foreign currencies, respectively.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to meet GWM from Bank Indonesia.

BNI Syariah has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the GWM as of 31 December 2018 and 2017.

BNI Syariah placed its fund with Bank Indonesia with average annual bonuses as follows:

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. GIRO PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah	289,649	343,537	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	6,196,149	17,163,340	United States Dollar
Yuan China	2,542,238	929,878	Chinese Yuan
Yen Jepang	2,075,662	690,009	Japanese Yen
Euro	1,171,986	1,073,590	Euro
Dolar Singapura	479,448	636,990	Singapore Dollar
Dolar Hong Kong	206,950	221,024	Hong Kong Dollar
Pound Sterling Inggris	67,557	166,828	Great Britain Pound Sterling
Dirham Uni Emirat Arab	39,081	29,436	United Arab Emirates Dirham
Dolar Australia	23,492	25,505	Australian Dollar
Dolar Kanada	19,006	46,423	Canadian Dollar
Franc Swiss	11,037	2,179	Swiss Franc
Ringgit Malaysia	4,834	-	Malaysian Ringgit
Won Korea Selatan	4,799	8,087	South Korean Won
Real Arab Saudi	3,199	766	Saudi Arabian Real
Baht Thailand	2,012	845	Thailand Baht
	12,847,450	20,994,900	
Total	13,137,099	21,338,437	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,271)	(3,287)	Allowance for impairment losses
Neto	13,133,828	21,335,150	Net

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah	656	5,736	Rupiah
Mata uang asing	78,252	1,401,698	Foreign currencies
Total pihak berelasi	78,908	1,407,434	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	288,993	337,801	Rupiah
Mata uang asing	12,769,198	19,593,202	Foreign currencies
Total pihak ketiga	13,058,191	19,931,003	Total third parties
Total	13,137,099	21,338,437	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,271)	(3,287)	Allowance for impairment losses
Neto	13,133,828	21,335,150	Net

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

c. By Bank Indonesia collectibility

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diklasifikasikan lancar.

All current accounts with other banks as of 31 December 2018 and 2017 are classified as current.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

**6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
(continued)**

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

d. Allowance for impairment losses

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Saldo awal (Pembalikan) penyisihan selama tahun berjalan	3,287 (186)	1,748 1,420	Beginning balance (Reversal) provision during the year
Penyesuaian karena penjabaran laporan keuangan	170	119	Foreign exchange translation adjustment
Saldo akhir	3,271	3,287	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

e. Tingkat suku bunga per tahun

e. Annual interest rates

	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	Yuan China/ Chinese Yuan %	
2018	0.01 - 2.50	2.00	2018
2017	0.01 - 1.50	2.50	2017

Giro pada bank lain selain dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Yuan China tidak mendapat bunga.

Current accounts with other banks stated in currency other than United States Dollar and Chinese Yuan do not earn interest.

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA

7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah			Rupiah
Bank Indonesia - FASBI	28,288,351	17,680,063	Bank Indonesia - FASBI
<i>Call Money</i>			<i>Call Money</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	500,000	150,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500,000	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	350,000	500,000	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Nationalnobu Tbk	250,000	-	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank DKI	200,000	-	PT Bank DKI
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	150,000	150,000	PT Bank Pembangunan Daerah Riau
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta	100,000	-	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch
PT Bank ICBC Indonesia	100,000	-	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Victoria Internasional Tbk	90,000	75,000	PT Bank Victoria Internasional Tbk
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	60,000	60,000	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank Mega Tbk	60,000	-	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Yudha Bhakti Tbk	45,000	50,000	PT Bank Yudha Bhakti Tbk

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK
INDONESIA (lanjutan)**

**7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND
BANK INDONESIA (continued)**

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah (lanjutan)			Rupiah (continued)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	500,000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	-	500,000	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	400,000	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	350,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Bukopin Tbk	-	300,000	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	220,000	PT Bank BNP Paribas Indonesia Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Bank ANZ Indonesia	-	200,000	PT Bank ANZ Indonesia
Deutsche Bank Cabang Jakarta	-	198,000	Deutsche Bank Jakarta Branch
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	-	100,000	PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	-	100,000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	-	100,000	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	100,000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	-	100,000	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	75,000	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	-	50,000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	-	50,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	50,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Lain-lain	47,205	46,300	Others
Subtotal	2,452,205	4,524,300	Subtotal
Negotiable Certificate of Deposit			Negotiable Certificate of Deposit
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	419,082	209,229	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	223,972	215,639	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia	133,247	53,511	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	125,835	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Commonwealth	123,160	9,566	PT Bank Commonwealth
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	106,023	189,446	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	83,672	44,022	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	74,830	190,830	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank KEB Hana Indonesia	56,719	197,070	PT Bank KEB Hana Indonesia
Lain-lain	29,567	9,444	Others
Subtotal	1,376,107	1,118,757	Subtotal
Deposito berjangka	551,093	892,768	Time deposits
	32,667,756	24,215,888	



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK
INDONESIA (lanjutan)**

**7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND
BANK INDONESIA (continued)**

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Mata uang asing			Foreign currencies
Bank Indonesia - FASBI	5,004,920	339,188	Bank Indonesia - FASBI
<i>Call Money</i>			<i>Call Money</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	359,500	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
DZ Bank AG London	230,080	-	DZ Bank AG London
LandesBank Baden-Wuerttemberg	-	678,375	LandesBank Baden-Wuerttemberg
DZ Bank Singapore	-	746,213	DZ Bank Singapore
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	407,025	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	-	271,350	PT Bank BNP Paribas Indonesia
Subtotal	589,580	2,102,963	Subtotal
Deposito berjangka			Time deposits
KEB Hana Bank, Seoul	577,060	508,629	KEB Hana Bank, Seoul
Bank of Nova Scotia, Hong Kong	215,700	-	Bank of Nova Scotia, Hong Kong
KB Kookmin Bank, Seoul	180,880	178,360	KB Kookmin Bank, Seoul
DZ Bank AG, Singapura	-	474,863	DZ Bank AG, Singapore
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	-	271,350	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
The Bank of Tokyo Mitsubishi	-	203,513	The Bank of Tokyo Mitsubishi
Woori Bank, Seoul	-	91,728	Woori Bank, Seoul
Industrial Bank of Korea	43,140	124,141	Industrial Bank of Korea
Lain-lain	45,424	82,625	Others
Subtotal	1,062,204	1,935,209	Subtotal
	6,656,704	4,377,360	
Total	39,324,460	28,593,248	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15)	(510)	Allowance for impairment losses
Neto	39,324,445	28,592,738	Net

Perincian penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Placements with other banks and Bank Indonesia based on currencies are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah	32,667,756	24,215,888	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	6,279,440	3,916,172	United States Dollar
Won Korea Selatan	377,264	461,188	South Korean Won
	6,656,704	4,377,360	
Total	39,324,460	28,593,248	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15)	(510)	Allowance for impairment losses
Neto	39,324,445	28,592,738	Net

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA (continued)

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah			Rupiah
Call Money	500,000	200,000	Call Money
Negotiable Certificate Deposit	643,054	424,868	Negotiable Certificate Deposit
Deposito berjangka	153,308	205,768	Time deposits
	1,296,362	830,636	
Mata uang asing			Foreign currencies
Call Money	359,500	407,025	Call Money
Deposito berjangka	21,722	60,966	Time deposits
	381,222	467,991	
Total pihak berelasi	1,677,584	1,298,627	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Bank Indonesia - FASBI	28,288,351	17,680,063	Bank Indonesia - FASBI
Call Money	1,952,205	4,324,300	Call Money
Negotiable Certificate Deposit	733,053	693,889	Negotiable Certificate Deposit
Deposito berjangka	397,785	687,000	Time deposits
	31,371,394	23,385,252	
Mata uang asing			Foreign currencies
Bank Indonesia - FASBI	5,004,920	339,188	Bank Indonesia - FASBI
Call Money	230,080	1,695,938	Call Money
Deposito berjangka	1,040,482	1,874,243	Time deposits
	6,275,482	3,909,369	
Total pihak ketiga	37,646,876	27,294,621	Total third parties
Total	39,324,460	28,593,248	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15)	(510)	Allowance for impairment losses
Neto	39,324,445	28,592,738	Net

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

c. By Bank Indonesia collectibility

Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diklasifikasikan sebagai lancar.

All placements with other banks and Bank Indonesia as of 31 December 2018 and 2017 are classified as current.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

d. Allowance for impairment losses

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Saldo awal	510	500	Beginning balance
Pembalikan selama tahun berjalan	(495)	(12)	Reversal during the year
Penyesuaian karena penjabaran laporan keuangan	-	22	Foreign exchange translation adjustment
Saldo akhir	15	510	Ending balance



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

e. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

f. Tingkat suku bunga per tahun

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	Won Korea/ Korean Won %	Yuan China/ Chinese Yuan %	
2018	0.00 - 10.00	0.00 - 4.20	0.20 - 2.15	2.00	2018
2017	0.00 - 8.40	0.01 - 2.97	1.43 - 1.79	2.50	2017

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain selain dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Won Korea Selatan dan Yuan China tidak mendapat bunga.

7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA (continued)

d. Allowance for impairment losses (continued)

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

e. Placements with other banks pledged as collateral

There were no placements with other banks pledged as collateral as of 31 December 2018 and 2017.

f. Annual interest rates

Placements with Bank Indonesia and other banks stated in currency other than Rupiah, United States Dollar, South Korean Won and Chinese Yuan do not earn interest.

8. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	31 Desember/December				
	2018		2017		
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					Fair value through profit or loss
Rupiah					Rupiah
Reksadana	4,012,920	4,014,594	3,928,671	3,930,025	Mutual funds
Obligasi	2,105,701	2,106,061	2,484,552	2,487,170	Bonds
Obligasi subordinasi	674,095	673,956	1,599,506	1,600,139	Subordinated bonds
Efek lainnya	480,589	416,297	408,167	361,399	Other securities
	7,273,305	7,210,908	8,420,896	8,378,733	
Mata uang asing					Foreign currencies
Reksadana	38,196	38,475	50,972	50,972	Mutual funds
	38,196	38,475	50,972	50,972	
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi	7,311,501	7,249,383	8,471,868	8,429,705	Total fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual					Available-for-sale
Rupiah					Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia	3,000,000	2,866,423	-	-	Certificates of Bank Indonesia
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	2,000,000	1,983,417	11,671,352	11,531,047	Certificates of Deposits of Bank Indonesia
Obligasi	7,322,500	7,120,068	5,369,100	5,635,710	Bonds
Reksadana	2,054,212	1,577,924	1,668,372	1,385,155	Mutual funds
Obligasi subordinasi	855,400	843,183	674,500	706,029	Subordinated bonds
Efek beragunan aset	314,370	307,604	618,550	386,948	Asset backed security
	15,546,482	14,698,619	20,001,874	19,644,889	

8. MARKETABLE SECURITIES

a. By type and currency

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

	31 Desember/December				
	2018		2017		
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	
Tersedia untuk dijual (lanjutan)					Available-for-sale (continued)
Mata uang asing					Foreign currencies
Sertifikat Bank Indonesia	4,692,453	4,639,014	5,540,058	5,507,990	Certificates of Bank Indonesia
Obligasi	1,165,035	1,088,710	922,830	919,395	Bonds
Reksadana	3,231,997	3,341,941	1,105,841	733,395	Mutual funds
	9,089,485	9,069,665	7,568,729	7,160,780	
Total tersedia untuk dijual	24,635,967	23,768,284	27,570,603	26,805,669	Total available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo					Held-to-maturity
Rupiah					Rupiah
Obligasi, setelah dikurangi premi yang belum diamortisasi sebesar Rp24.493 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp66 pada tanggal 31 Desember 2017	1,362,000	1,337,507	1,116,924	1,116,858	Bonds, net of unamortized premium Rp24,493 as of 31 December 2018 and Rp66 as of 31 December 2017
Mata uang asing					Foreign currencies
Obligasi	7,241	7,233	6,756	6,762	Bonds
Total dimiliki hingga jatuh tempo	1,369,241	1,344,740	1,123,680	1,123,620	Total held-to-maturity
Total efek-efek	33,316,709	32,362,407	37,166,151	36,358,994	Total marketable securities
Cadangan kerugian penurunan nilai		(318,137)		(309,095)	Allowance for impairment losses
Efek-efek - neto		32,044,270		36,049,899	Marketable securities - net

Perincian efek-efek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Marketable securities based on currencies are as follow:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah	23,247,034	29,140,480	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	9,115,373	7,218,514	United States Dollar
Total	32,362,407	36,358,994	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(318,137)	(309,095)	Allowance for impairment losses
Neto	32,044,270	36,049,899	Net

Harga pasar efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual berkisar antara 88,99% - 103,47%, dan berkisar antara 99,25% - 102,04% masing-masing dari nilai nominal pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. BNI mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas peningkatan atau penurunan nilai pasar efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual (neto setelah pajak) sebesar Rp507.953 (rugi) dan Rp88.971 (untung) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017.

The market value of the available-for-sale securities as of 31 December 2018 and 2017, ranged between 88.99% - 103.47%, and between 99.25% - 102.04% of the nominal amounts, respectively. BNI recognized the unrealized gains or loss from increase or decrease in the market value of marketable securities categorized as available-for-sale (net of taxes) in the amount of Rp507,953 (loss) and Rp88,971 (gain) for the year ended 31 December 2018 and 2017, respectively.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia masing-masing dengan jumlah nominal Rp2.000.000 dan Rp100.000 telah dijual dengan janji dibeli kembali hingga jatuh tempo. (lihat Catatan 22).

b. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/December	
	2018	2017
Pihak berelasi		
Rupiah	7,880,541	5,667,735
Mata uang asing	709,688	386,110
Total pihak berelasi	8,590,229	6,053,845
Pihak ketiga		
Rupiah	15,366,493	23,472,745
Mata uang asing	8,405,685	6,832,404
Total pihak ketiga	23,772,178	30,305,149
Total	32,362,407	36,358,994
Cadangan kerugian penurunan nilai	(318,137)	(309,095)
Neto	32,044,270	36,049,899

c. Berdasarkan penerbit

	31 Desember/December	
	2018	2017
Korporasi	16,283,877	13,717,670
Bank	6,589,677	5,602,287
Bank Indonesia	9,488,853	17,039,037
Total	32,362,407	36,358,994
Cadangan kerugian penurunan nilai	(318,137)	(309,095)
Neto	32,044,270	36,049,899

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. By type and currency (continued)

As of 31 December 2018, Certificates of Bank Indonesia and Certificates Deposits of Bank Indonesia has been sold under agreements to repurchase to maturity with nominal amount to Rp2,000,000 and Rp100,000, respectively. (refer to Note 22).

b. By relationship

	31 Desember/December	
	2018	2017
Related parties		
Rupiah	7,880,541	5,667,735
Foreign currencies	709,688	386,110
Total related parties	8,590,229	6,053,845
Third parties		
Rupiah	15,366,493	23,472,745
Foreign currencies	8,405,685	6,832,404
Total third parties	23,772,178	30,305,149
Total	32,362,407	36,358,994
Allowance for impairment losses	(318,137)	(309,095)
Net	32,044,270	36,049,899

c. By issuer

	31 Desember/December	
	2018	2017
Corporates	16,283,877	13,717,670
Banks	6,589,677	5,602,287
Bank Indonesia	9,488,853	17,039,037
Total	32,362,407	36,358,994
Allowance for impairment losses	(318,137)	(309,095)
Net	32,044,270	36,049,899

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. Berdasarkan peringkat

d. By rating

31 Desember/December 2018			
Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying Value	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			Fair value through profit or loss
Rupiah			Rupiah
Reksadana	-	4,014,594	Mutual funds
Obligasi	Pefindo (AA-) – (AAA)	2,106,061	Bonds
Obligasi subordinasi	Pefindo (A+) – (AA+)	673,956	Subordinated bonds
Efek lainnya	Pefindo (A+) – (AAA)	416,297	Other securities
		7,210,908	
Mata uang asing			Foreign currencies
Reksadana	-	38,475	Mutual funds
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi			Total fair value through profit and loss
		7,249,383	
Tersedia untuk dijual			Available-for-sale
Rupiah			Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia	-	2,866,423	Certificates of Bank Indonesia
Sertifikat Deposito Bank Indonesia Reksadana	-	1,983,417	Certificates of Deposits of Bank Indonesia
Obligasi subordinasi	Pefindo (A-) – (AA+)	1,577,924	Mutual funds
Efek beragunan aset Obligasi	Pefindo idAAA(sf)	843,183	Subordinated bonds
Bank Rakyat Indonesia BRI-7.6/20	Pefindo idAAA	307,604	Asset backed security
Hutama Karya HUTAMA2027	Pefindo idAAA	364,298	Bonds
Hutama Karya HUTAMA2022	Pefindo idAAA	351,760	Bank Rakyat Indonesia BRI-7.6/20
Bank Tabungan Negara BTN-8.7C/24	Pefindo idAAA	291,908	Hutama Karya HUTAMA2027
Bank Tabungan Negara BTN-8.5B/22	Pefindo idAAA	254,703	Hutama Karya HUTAMA2022
Bank Rakyat Indonesia BRI-25/05/19	Pefindo idAAA	246,170	Bank Tabungan Negara BTN-8.7C/24
Bank CIMB Niaga BNGAIJ-2022	Pefindo idAAA	207,923	Bank Tabungan Negara BTN-8.5B/22
Bank Jabar Banten BJB-2021	Pefindo idAAA	200,246	Bank Rakyat Indonesia BRI-25/05/19
Bank Mandiri Thp I th 2016 Seri C	Pefindo idAAA	197,744	Bank CIMB Niaga BNGAIJ-2022
Bank Rakyat Indonesia BRI-8.0/22	Pefindo idAAA	176,274	Bank Jabar Banten BJB-2021
Bank OCBC NISP NISPIJ-2021	Pefindo idAAA	146,783	Bank Mandiri Thp I th 2016 Seri C
Waskita Karya Thp II Th 2018 Seri B	Pefindo idAAA	144,252	Bank Rakyat Indonesia BRI-8.0/22
Bank Ekspor Indonesia BEXI-2019	Pefindo idAAA	129,845	Bank OCBC NISP NISPIJ-2021
Bank OCBC NISP NISPIJ-2020	Pefindo idAAA	125,504	Waskita Karya Thp II Th 2018 Seri B
Sumitomo Bank MTN-SUMIBK	Pefindo idAAA	104,556	Bank Ekspor Indonesia BEXI-2019
Bank Mandiri MANDIRI/8.00	Pefindo idAAA	103,790	Bank OCBC NISP NISPIJ-2020
OBL MTN II Bank Jambi 2017	Pefindo idA	102,118	Sumitomo Bank MTN-SUMIBK
Bank Rakyat Indonesia BRI-01/12/19	Pefindo idAAA	100,000	Bank Mandiri MANDIRI/8.00
Bank Ekspor Indonesia BEXI-2020	Pefindo idAAA	99,884	OBL MTN II Bank Jambi 2017
Adira Finance Thp II Th 2018 Seri D	Pefindo idAAA	99,410	Bank Rakyat Indonesia BRI-01/12/19
Bank Ekspor Indonesia BEXI-2023	Pefindo idAAA	97,629	Bank Ekspor Indonesia BEXI-2020
Bank Keb Hana MTN	Fitch idAAA	97,467	Adira Finance Thp II Th 2018 Seri D
Bank Mandiri MANDIRI/-8.5B	Pefindo idAAA	96,899	Bank Ekspor Indonesia BEXI-2023
Bank Sulselbar Thp II Th 2016	Pefindo id A+	96,829	Bank Keb Hana MTN
Maybank Finance Thp I 2017 B	Fitch idAAA	96,350	Bank Mandiri MANDIRI/-8.5B
Bank Ekspor Indonesia BEXI-2019	Pefindo idAAA	96,139	Bank Sulselbar Thp II Th 2016
PT PLN (Persero) PLNIIJ-2027C	Pefindo idAAA	95,212	Maybank Finance Thp I 2017 B
Bank Panin PNBNIJ-7.60	Pefindo idAA	93,044	Bank Ekspor Indonesia BEXI-2019
Bank Panin PNBNIJ-2021	Pefindo idAA	92,646	PT PLN (Persero) PLNIIJ-2027C
Waskita Karya Thp II Th 2016	Pefindo id A-	88,485	Bank Panin PNBNIJ-7.60
MTN VI Bank Resona Perdania 2016	Pefindo idAA-	88,164	Bank Panin PNBNIJ-2021
Bank Mandiri BBMRI-ZERO	Pefindo idAAA	84,500	Waskita Karya Thp II Th 2016
Bank Tabungan Negara BTN-8A/19	Pefindo idAAA	83,090	MTN VI Bank Resona Perdania 2016
Bank Mandiri Taspen	Pefindo idAA+	74,111	Bank Mandiri BBMRI-ZERO
Bank Ekspor Indonesia BEXI-2021	Pefindo idAA	73,202	Bank Tabungan Negara BTN-8A/19
Bank Jateng MTN-Jateng20	Pefindo idAAA	71,988	Bank Mandiri Taspen
BTN tahap I 2017 B	Pefindo idAA-	68,821	Bank Ekspor Indonesia BEXI-2021
Bank Mandiri BMRIJ-2023	Pefindo AA+	67,915	Bank Jateng MTN-Jateng20
Maybank Finance Thp III 2016 B	Fitch idAAA	65,190	BTN tahap I 2017 B
Maybank Finance Thp III 2016 C	Fitch idAAA	54,965	Bank Mandiri BMRIJ-2023
Bank Jabar Banten BJB-2020	Pefindo idAA+	53,853	Maybank Finance Thp III 2016 B
Bank Rakyat Indonesia BRI-25/05/21	Pefindo idAA-	52,939	Maybank Finance Thp III 2016 C
	Pefindo idAAA	52,371	Bank Jabar Banten BJB-2020
		52,371	Bank Rakyat Indonesia BRI-25/05/21



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

d. By rating (continued)

		31 Desember/December 2018			
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying Value		Nilai tercatat/ Carrying Value
Tersedia untuk dijual (lanjutan)				Available-for-sale (continued)	
Rupiah (lanjutan)				Rupiah (continued)	
Bank CIMB Niaga BNGAIJ-2019	Pefindo	idAAA	50,008	Bank CIMB Niaga BNGAIJ-2019	50,008
PT Telkom MTN-TELKOM	Pefindo	idAAA	49,415	PT Telkom MTN-TELKOM	49,415
Summarecon Tahap II 2017	Pefindo	idA	48,870	Summarecon Tahap II 2017	48,870
Maybank Finance Thp II 2016 SR B	Pefindo	idAA+	48,263	Maybank Finance Thp II 2016 SR B	48,263
Pegadaian PGD-MTN2021	Pefindo	idAAA	48,037	Pegadaian PGD-MTN2021	48,037
PNM Tahap I Seri B 2017	Pefindo	id A	47,811	PNM Tahap I Seri B 2017	47,811
Exim Bank III Thp V 2017 Seri C	Pefindo	idAAA	47,486	Exim Bank III Thp V 2017 Seri C	47,486
Bank Ekspor Indonesia BEXI14/2/21N	Pefindo	idAAA	47,471	Bank Ekspor Indonesia BEXI14/2/21N	47,471
OBL BKLTJ III PLN Tahap I 2018 seri B	Pefindo	idAAA	47,306	OBL BKLTJ III PLN Tahap I 2018 seri B	47,306
Waskita Karya thp I th 2017 seri B	Pefindo	idA-	47,214	Waskita Karya thp I th 2017 seri B	47,214
PT PLN (Persero) PLNIJ-2022A	Pefindo	idAAA	47,026	PT PLN (Persero) PLNIJ-2022A	47,026
OBL BKLTJ bank Panin III 2018	Pefindo	idAA	46,323	OBL BKLTJ bank Panin III 2018	46,323
PT PLN (Persero) PLNIJ-2024B	Pefindo	idAAA	46,222	PT PLN (Persero) PLNIJ-2024B	46,222
Bank Ekspor Indonesia BEXI-14/2/23	Pefindo	idAAA	45,744	Bank Ekspor Indonesia BEXI-14/2/23	45,744
Bank Rakyat Indonesia BRI-6.65/23	Pefindo	idAAA	45,542	Bank Rakyat Indonesia BRI-6.65/23	45,542
Sarana Multigriya				Sarana Multigriya	
Finansial Thp VI Th 2016	Pefindo	idAAA	45,043	Finansial THP VI TH 2016	45,043
Bank Tabungan Negara BTN-8.3A/20	Pefindo	idAA	42,826	Bank Tabungan Negara BTN-8.3A/20	42,826
Adira Finance Thp III Th 2018 Seri C	Pefindo	idAAA	42,509	Adira Finance Thp III Th 2018 Seri C	42,509
Indosat Tahap I Thn 2014 Seri D	Pefindo	idAAA	41,196	Indosat Tahap I Thn 2014 Seri D	41,196
Maybank Finance Thp II Th 2016 Seri A	Pefindo	idAA+	40,177	Maybank Finance Thp II Th 2016 Seri A	40,177
Adira Finance Thp I Th 2015 Seri B	Pefindo	idAAA	38,915	Adira Finance Thp I Th 2015 Seri B	38,915
Bank Maybank Indonesia BNIIIJ-2023	Pefindo	idAAA	37,535	Bank Maybank Indonesia BNIIIJ-2023	37,535
Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I 2016 Seri B	Pefindo	idAAA(sy)	33,706	Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I 2016 Seri B	33,706
Bank Tabungan Negara BTN-2020B	Pefindo	idAA+	31,774	Bank Tabungan Negara BTN-2020B	31,774
Indosat VIII 2012 A	Pefindo	idAAA	31,130	Indosat VIII 2012 A	31,130
XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri B	Pefindo	idAA+	30,056	XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri B	30,056
PNM tahap II th 2018 Seri B	Pefindo	idA	27,602	PNM tahap II th 2018 Seri B	27,602
Indosat Tahap I Thn 2014 Seri B	Pefindo	idAAA	25,448	Indosat Tahap I Thn 2014 Seri B	25,448
PT Jasa Marga JM/XIV-20-U	Pefindo	idAA	25,331	PT Jasa Marga JM/XIV-20-U	25,331
Bank Ekspor Indonesia BEXI-8/11/21	Pefindo	idAAA	25,142	Bank Ekspor Indonesia BEXI-8/11/21	25,142
Maybank Indonesia Tahap I 2017 Seri A	Pefindo	idAA+	24,661	Maybank Indonesia Tahap I 2017 Seri A	24,661
Bank Tabungan Negara BTN-7.9/23	Pefindo	idAA+	24,439	Bank Tabungan Negara BTN-7.9/23	24,439
Bank Tabungan Negara BTN-7.9/22	Pefindo	idAA+	23,243	Bank Tabungan Negara BTN-7.9/22	23,243
PLN PLNIJ-2023A	Pefindo	idAAA	22,641	PLN PLNIJ-2023A	22,641
PLN XII Tahun 2010 Seri B	Pefindo	idAAA	20,651	PLN XII Tahun 2010 Seri B	20,651
Ijarah I Telkom Tahun 2018 Seri C	Pefindo	idAAA	20,000	Ijarah I Telkom Tahun 2018 Seri C	20,000
Bank Panin PNBNIJ-9.15	Pefindo	idAAA	19,943	Bank Panin PNBNIJ-9.15	19,943
Pelindo I Gerbang				Pelindo I Gerbang	
Nusantara 2016 B	Pefindo	idAA	19,888	Nusantara 2016 B	19,888
Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri D	Pefindo	idAAA		Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri D	
Bank Tabungan Negara BTN-8B/8/21N	Pefindo	idAA+	19,867	Bank Tabungan Negara BTN-8B/8/21N	19,867
Bank DKI BDKIJ-2021	Pefindo	idAA-	19,824	Bank DKI BDKIJ-2021	19,824
Bank Panin Tahap II 2016	Pefindo	idAAA	19,663	Bank Panin Tahap II 2016	19,663
Sukuk Ijarah PLN Tahap II 2018 Sr B	Pefindo	idAAA	16,597	Sukuk Ijarah PLN Tahap II 2018 Sr B	16,597
Mandiri Tunas Finance Tahap II 2016 B	Pefindo	AA+	15,085	Mandiri Tunas Finance Tahap II 2016 B	15,085
Indonesia Eximbank III Thp V Th 2017 SR A	Pefindo	AAA	19,650	Indonesia Eximbank III Thp V Th 2017 SR A	19,650
Bank CIMB Niaga BNGAIJ-8.15	Pefindo	idAAA	19,209	Bank CIMB Niaga BNGAIJ-8.15	19,209
BPD Maluku dan Maluku BMALIJ-2020	Fitch	idA	16,963	BPD Maluku dan Maluku BMALIJ-2020	16,963
Waskita Karya Thp I Th 2016	Pefindo	idA-	14,995	Waskita Karya Thp I Th 2016	14,995
Maybank Finance Thp III 2016 A	Pefindo	idAA+	14,993	Maybank Finance Thp III 2016 A	14,993
Indosat Thp IV Tahun 2016 Seri E	Pefindo	idAAA	14,704	Indosat Thp IV Tahun 2016 Seri E	14,704
Mandiri Tunas Finance Thp II 2017 B	Pefindo	idAA+	14,558	Mandiri Tunas Finance Thp II 2017 B	14,558
Bank BTN Tahun 2010	Pefindo	idAA+	12,300	Bank BTN Tahun 2010	12,300
Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri C	Pefindo	idAAA	10,372	Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri C	10,372
Indosat Thp II Th 2015 Seri C	Pefindo	idAAA	10,201	Indosat Thp II Th 2015 Seri C	10,201
Bank BTN Tahun 2011	Pefindo	idAA+	10,073	Bank BTN Tahun 2011	10,073
Adira Finance Thp IV Th 2016 Seri C	Pefindo	idAAA	10,067	Adira Finance Thp IV Th 2016 Seri C	10,067
Bank Ekspor Indonesia BEXI-15/8/20	Pefindo	idAAA	10,057	Bank Ekspor Indonesia BEXI-15/8/20	10,057
Mitra Adiperkasa Tahap II 2014 SR B	Pefindo	idAA	10,056	Mitra Adiperkasa Tahap II 2014 SR B	10,056
Astra Sedaya Thp I Th 16 Seri B	Pefindo	idAAA	10,031	Astra Sedaya Thp I Th 16 Seri B	10,031
Bank Maybank Indonesia BNIIIJ-2022	Pefindo	idAA+	9,676	Bank Maybank Indonesia BNIIIJ-2022	9,676
Bank Maybank Indonesia BNIIIJ-2024	Pefindo	idAA+	9,133	Bank Maybank Indonesia BNIIIJ-2024	9,133

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

d. By rating (continued)

31 Desember/December 2018				
Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying Value		
Tersedia untuk dijual (lanjutan)				Available-for-sale (continued)
Rupiah (lanjutan)				Rupiah (continued)
Bank Tabungan Negara BTN-28/06/21	Pefindo	idAA+	8,058	Bank Tabungan Negara BTN-28/06/21
Bank Tabungan Negara BTN-9.875/20	Pefindo	idAA+	5,088	Bank Tabungan Negara BTN-9.875/20
Bank OCBC NISP NISPIJ-2021	Pefindo	idAAA	4,978	Bank OCBC NISP NISPIJ-2021
PT PLN (Persero) PLN	Pefindo	idAAA	4,821	PT PLN (Persero) PLN
Lainnya	Beragam/Various	Beragam/Various	93,478	Others
Subtotal			7,120,068	Subtotal
			14,698,619	
Mata uang asing				Foreign currencies
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	4,639,014	Certificates of Bank Indonesia
Reksadana			3,341,941	Mutual Funds
Obligasi lainnya				
PLBIJ-II/25	S&P	BBB-	328,705	PLBIJ-II/25
Bank BRI	Moodys	BBB-	284,971	Bank BRI
Pertamina 2023	S&P	BBB-	72,973	Pertamina 2023
Bank of America	Moodys	Baa2	65,823	Bank of America
Suntrust USA	Moodys	Baa2	62,050	Suntrust USA
Corestates Cap III / Wells Fargo	Fitch	BBB	62,004	Corestates Cap III / Wells Fargo
M&T Bank USA	Moodys	Baa2	61,899	M&T Bank USA
Huntington USA	Moodys	Baa2	60,591	Huntington USA
JP Morgan Chase USA	Moodys	Baa2	59,851	JP Morgan Chase USA
ICBC ASIA LTD	Fitch	Baa2	29,588	ICBC ASIA LTD
Lainnya	Beragam/Various	Beragam/Various	255	Others
Subtotal			1,088,710	Subtotal
			9,069,665	
Total tersedia untuk dijual			23,768,284	Total available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo				Held-to-maturity
Rupiah				Rupiah
Obligasi				Bonds
PT Intan Baruprana Finance IBFI-17	-	-	275,528	PT Intan Baruprana Finance IBFI-17
MTN Syariah Mudharabah Pegadaian I Tahun 2018	Pefindo	idAAA(sy)	250,000	MTN Syariah Mudharabah Pegadaian I 2018
MTN Syariah Bio Farma 2018	Pefindo	idAAA(sy)	100,000	MTN Syariah Bio Farma 2018
MTN Ijarah I Telkom Tahun 2018 Seri A	Pefindo	idAAA(sy)	100,000	MTN Ijarah I Telkom 2018 Seri A
Indonesia Eximbank II 2018 SR A	Pefindo	idAAA(sy)	100,000	Indonesia Eximbank II 2018 SR A
MTN Syariah Ijarah Posindo-01 2018	Pefindo	idA-(sy)	50,000	MTN Syariah Ijarah Posindo-01 2018
Sukuk Mudharabah Maybank Tahap II	Pefindo	idAAA(sy)	50,000	Sukuk Mudharabah Maybank Tahap II
Sukuk Mudharabah Subordinasi BSM 2016	Pefindo	idAA-(sy)	50,000	Sukuk Mudharabah Subordinated Sukuk Mudharabah BSM 2016
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I 2018 Seri A	Pefindo	idAAA(sy)	50,000	Continues Sukuk Mudharabah I Sarana Infrastructure Step I 2018 Seri A
Sukuk Mudharabah Subordinasi BRIS 2016	Fitch	idA+(sy)	46,000	Subordinated Sukuk Mudharabah BRIS 2016
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I 2018 Seri A	Fitch	idAAA(idn)	38,000	Continues Sukuk Ijarah II XL Axiata Tahap I 2018 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan Indosat Thp IV 2016 B	Pefindo	idAAA(sy)	30,000	Continues Sukuk Ijarah Indosat Step IV 2016 B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan Indosat Tahap II 2017 B	Pefindo	idAAA(sy)	30,000	Continues Sukuk Ijarah Indosat Step II 2017 B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan Timah Tahap I 2017 Seri A	Pefindo	idA+(sy)	28,000	Continues Sukuk Ijarah Timah Step I 2017 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II 2017 Seri B	Fitch	idAAA(sy)	25,000	Continues Sukuk Ijarah I XL Axiata Step II 2017 Seri B
MTN Syariah Mudharabah I Bank Jambi Tahun 2017	Pefindo	idAAA(sy)	20,000	MTN Syariah Mudharabah I Bank Jambi Tahun 2017



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

d. By rating (continued)

31 Desember/December 2018			
Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying Value	
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)			Held-to-maturity (continued)
Rupiah (lanjutan)			Rupiah (continued)
Sukuk Mudharabah Eximbank Thp I	Pefindo	idAAA(sy)	20,000
XL Axiata Tahap I 2018 Seri B	Pefindo	idAA+	18,000
Indosat V/2012	Pefindo	idAAA	16,982
Sukuk Ijarah Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014	Pefindo	idA+(sy)	15,000
Lainnya	Beragam/Various	Beragam/Various	24,997
Subtotal			1,337,507
Mata uang asing			Foreign currencies
Obligasi			Bonds
Majapahit Holding BV	Moody's	AA+	7,233
Total dimiliki hingga jatuh tempo			1,344,740
Total efek-efek			32,362,407
Cadangan kerugian penurunan nilai			(318,137)
Efek-efek - neto			32,044,270

31 Desember/December 2017			
Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying Value	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			Fair value through profit or loss
Rupiah			Rupiah
Reksadana	-	-	3,930,025
Obligasi	Pefindo	(AA-) - (AAA)	2,487,170
Obligasi subordinasi	Pefindo	(A+) - (AA+)	1,600,139
Efek lainnya	Pefindo	(A+) - (AAA)	361,399
			8,378,733
Mata uang asing			Foreign currencies
Reksadana	-	-	50,972
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi			8,429,705
Tersedia untuk dijual			Available-for-sale
Rupiah			Rupiah
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-	11,531,047
Reksadana	-	-	1,385,155
Obligasi subordinasi	Pefindo	(A-) - (AA+)	706,029
Efek beragunan aset	Pefindo	idAAA(sf)	386,948
Obligasi			
Hutama Karya HUTAMA2027	Pefindo	idAAA	386,274
Bank Rakyat Indonesia BRI-7.6/20	Pefindo	idAAA	356,601
Hutama Karya HUTAMA2022	Pefindo	idAAA	312,068
Bank Tabungan Negara BTN-8.7C/24	Pefindo	idAA+	273,510
Bank Tabungan Negara BTN-8.5B/22	Pefindo	idAA+	259,108
Bank CIMB Niaga BNGAIJ-2022	Pefindo	idAAA	214,687
Bank Rakyat Indonesia BRI-25/05/19	Pefindo	idAAA	211,117
Bank Mandiri Thp I Th 2016 SERI C	Pefindo	idAAA	180,432
Bank Rakyat Indonesia BRI-8.0/22	Pefindo	idAAA	152,924
Bank Mandiri MANDIRI/8.00	Pefindo	idAAA	109,451
Bank OCBC NISP NISPIJ-2020	Pefindo	idAAA	107,126
PLN Tho II 8.2 2027C	Pefindo	idAAA	103,457
Bank Mandiri MANDIRI-8.5B	Pefindo	idAAA	103,403
Bank Ekspor Indonesia BEXI-2023	Pefindo	idAAA	103,381
Bank Ekspor Indonesia BEXI-2020	Pefindo	idAAA	103,208

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

d. By rating (continued)

		31 Desember/December 2017			
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying Value		
Tersedia untuk dijual (lanjutan)				Available-for-sale (continued)	
Rupiah				Rupiah	
Bank Rakyat Indonesia BRI-01/12/19	Pefindo	idAAA	101,584	Bank Rakyat Indonesia BRI-01/12/19	
BJB MTN-BJB	Pefindo	idAA-	100,051	BJB MTN-BJB	
Bank Resona Perdania VI Th 2016	Pefindo	AA-(idn)	100,000	Bank Resona Perdania VI Th 2016	
MTN II Bank Jambi 2017	Pefindo	A(idn)	100,000	MTN II Bank Jambi 2017	
Bank Sulselbar Thp II Th 2016	Pefindo	idA+	99,954	Bank Sulselbar Thp II Th 2016	
Bank Ekspor Indonesia BEXI-2019	Pefindo	idAAA	96,543	Bank Ekspor Indonesia BEXI-2019	
Bank Panin PNBNIJ-2021	Pefindo	idAA	91,934	Bank Panin PNBNIJ-2021	
Waskita Karya Thp II Th 2016	Pefindo	idA-	90,580	Waskita Karya Thp II Th 2016	
				Sarana Multigriya Financial	
Sarana Multigriya Financial Thp VI Th 2016	Pefindo	idAAA	83,405	Thp VI Th 2016	
Bank Mandiri BBMRI-ZERO	Pefindo	idAAA	78,712	Bank Mandiri BBMRI-ZERO	
Bank Jateng MTN-JATENG20	Pefindo	idAA-	74,822	Bank Jateng MTN-JATENG20	
Bank Tabungan Negara BTN-8A/19	Pefindo	idAAA+	74,797	Bank Tabungan Negara BTN-8A/19	
Bank Ekspor Indonesia BEXI-2021	Pefindo	idAAA	74,503	Bank Ekspor Indonesia BEXI-2021	
				Bank Mandiri Taspen	
Bank Mandiri Taspen Pos MANTAP20AN	Pefindo	AA(idn)	74,004	Pos MANTAP20AN	
Maybank Finance Thp III Th 2016 B	Pefindo	AA+(idn)	72,155	Maybank Finance Thp III Th 2016 B	
Sumitomo Bank MTN-SUMIBK	Pefindo	idAAA	61,526	Sumitomo Bank MTN-SUMIBK	
Bank Jabar Banten BJB-2020	Pefindo	idAA-	55,144	Bank Jabar Banten BJB-2020	
Bank Rakyat Indonesia BRI-25/05/21	Pefindo	idAAA	54,672	Bank Rakyat Indonesia BRI-25/05/21	
Waskita Karya Thp I Th 2017 seri B	Pefindo	idA-	51,286	Waskita Karya Thp I Th 2017 seri B	
Indonesia Eximbank III	Pefindo	idAAA	50,940	Indonesia Eximbank III	
BTN Thp I Th 2017 B	Pefindo	AA(idn)	50,731	BTN Thp I Th 2017 B	
PLN Thp II 7.2 2022	Pefindo	idAAA	50,326	PLN Thp II 7.2 2022	
PLN Tho II 7.5 2024B	Pefindo	idAAA	50,258	PLN Tho II 7.5 2024B	
Maybank Finance Thp II Th 2016 Seri B	Pefindo	AA+(idn)	50,186	Maybank Finance Thp II Th 2016 B	
Obligasi Berkelanjutan II Summarecon	Pefindo	idA+	49,995	Obligasi Berkelanjutan II Summarecon	
Adira Finance Thp III Th 2016 Seri C	Pefindo	idAAA	45,113	Adira Finance Thp III Th 2016 C	
Maybank Finance Thp II Th 2016 Seri A	Pefindo	AA+(idn)	41,031	Maybank Finance Thp II Th 2016 A	
Adira Finance Thp I Th 2015	Pefindo	idAAA	40,585	Adira Finance Thp I Th 2015	
Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I 2016 Seri B	Pefindo	Pefindo	36,019	Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I 2016 B	
Bank Tabungan Negara BTN-8.3A/20	Pefindo	idAAA+	32,638	Bank Tabungan Negara BTN-8.3A/20	
Bank Tabungan Negara BTN-2020B	Pefindo	idAAA+	28,718	Bank Tabungan Negara BTN-2020B	
Indosat Thp I Th 2014 Seri B	Pefindo	idAAA	26,395	Indosat Thp I Th 2014 Seri B	
Jasa Marga JM/XIV-20-U	Pefindo	idAA	25,922	Jasa Marga JM/XIV-20-U	
Bank Tabungan Negara BTN-7.9/23	Pefindo	idAAA+	25,515	Bank Tabungan Negara BTN-7.9/23	
PNM Thp II Th 2016 Seri B	Pefindo	idA	25,047	PNM Thp II Th 2016 Seri B	
Bank Tabungan Negara BTN-7.9/2022	Pefindo	idAAA+	24,491	Bank Tabungan Negara BTN-7.9/2022	
Indosat Thp I Th 2014 Seri D	Pefindo	idAAA	21,766	Indosat Thp I Th 2014 Seri D	
Bank CIMB Niaga BNGAIJ-8.15	Pefindo	idAAA	20,713	Bank CIMB Niaga BNGAIJ-8.15	
Bank Panin PNBNIJ-9.15	Pefindo	idAA	20,690	Bank Panin PNBNIJ-9.15	
Pelindo I Gerbang Nusantara 2016 B	Pefindo	idAA	20,590	Pelindo I Gerbang Nusantara 2016 B	
Indosat Thp VIII Th 2012 A	Pefindo	idAAA	20,490	Indosat Thp VIII Th 2012 A	
Bank Panin Thp II Th 2016	Pefindo	idAA	20,430	Bank Panin Thp II Th 2016	
Indonesia Eximbank III Thp V th2017 Seri A	Pefindo	idAAA	20,414	Indonesia Eximbank III Thp V 2017 A	
Bank Tabungan Negara BTN-8B/8/21N	Pefindo	idAAA+	20,336	Bank Tabungan Negara BTN-8B/8/21N	
BTN Thp I Th 2017 B	Pefindo	AA(idn)	20,293	BTN Thp I Th 2017 B	
Bank DKI BDKIJ-2021	Pefindo	idA+	20,171	Bank DKI BDKIJ-2021	
BPD Maluku dan Maluku BMALIJ-2020	Pefindo	idA	17,332	BPD Maluku dan Maluku BMALIJ-2020	
Telkom Tahap I	Pefindo	idAAA	16,970	Telkom Tahap I	
Indosat Thp IV Th 2016 Seri E	Pefindo	idAAA	15,935	Indosat Thp IV Th 2016 Seri E	
Mandiri Tunas Finance Thp II Th 2016 B	Pefindo	idAAA+	15,461	Mandiri Tunas Finance Thp II 2016 B	
Maybank Finance Thp III 2016 A	Pefindo	AA+(idn)	15,195	Maybank Finance Thp III 2016 A	
Indosat Thp II Th 2015 Seri B	Pefindo	idAAA	14,181	Indosat Thp II Th 2015 Seri B	
Indosat VIII Th 2012 Seri A	Pefindo	idAAA	11,810	Indosat VIII Th 2012 Seri A	
Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri C	Pefindo	idAAA	11,003	Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri C	
Indonesia Eximbank Thp VII Th 2016 C	Pefindo	idAAA	10,609	Indonesia Eximbank Thp VII 2016 C	
Indosat Thp II Th 2015 Seri C	Pefindo	idAAA	10,588	Indosat Thp II Th 2015 Seri C	
BII Finance Thp I Th 2015 Seri A	Pefindo	AA+(idn)	10,297	BII Finance Thp I Th 2015 Seri A	
Astra Sedaya Thp I Th 16 Seri B	Pefindo	AAA(idn)	10,269	Astra Sedaya Thp I Th 16 Seri B	
Bank Ekspor Indonesia BEXI-15/8/20	Pefindo	idAAA	10,207	Bank Ekspor Indonesia BEXI-15/8/20	
Bank Maybank Indonesia BNIIIJ-2022	Pefindo	idAAA	10,115	Bank Maybank Indonesia BNIIIJ-2022	
PNM Thp II Th 2016 SERI A	Pefindo	idA	10,009	PNM Thp II Th 2016 SERI A	
Bank Maybank Indonesia BNIIIJ-2024	Pefindo	idAAA	9,809	Bank Maybank Indonesia BNIIIJ-2024	
Bank Tabungan Negara BTN-28/06/21	Pefindo	idAAA+	8,273	Bank Tabungan Negara BTN-28/06/21	
Bank Tabungan Negara BTN-9.875/20	Pefindo	idAAA+	5,255	Bank Tabungan Negara BTN-9.875/20	



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

d. By rating (continued)

31 Desember/December 2017				
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying Value	
Tersedia untuk dijual (lanjutan)				Available-for-sale (continued)
Rupiah (lanjutan)				Rupiah (continued)
Bank OCBC NISP NISPIJ-2019	Pefindo	idAAA	5,045	Bank OCBC NISP NISPIJ-2019
PLN Sukuk 7.70 II/07	Pefindo	idAAA	5,077	PLN Sukuk 7.70 II/07
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat tahap II 2017 Seri A	Pefindo	idAA-	5,001	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II 2017 Seri A
Lainnya	Beragam/Various	Beragam/Various	35,047	Others
Subtotal			5,635,710	Subtotal
			19,644,889	
Mata uang asing				Foreign currencies
Sertifikat Bank Indonesia Reksadana Obligasi	Beragam/Various	Beragam/Various	5,507,990	Certificates of Bank Indonesia Mutual Funds Bonds
PLBIJ-II/25	S&P	BBB-	297,678	PLBIJ-II/25
Pertamina 2023	S&P	BBB-	72,303	Pertamina 2023
Bank Boston USA	Moodys	Baa3	67,788	Bank Boston USA
Suntrust USA	Moodys	Baa2	67,785	Suntrust USA
Huntington USA	Moodys	Baa2	67,265	Huntington USA
M&T Bank USA	Moodys	Baa2	66,039	M&T Bank USA
Bank of America	Moodys	Baa2	65,365	Bank of America
Corestates Cap III / Wells Fargo	FITCH	BBB	63,560	Corestates Cap III / Wells Fargo
JP Morgan Chase USA	S&P	BBB-	61,837	JP Morgan Chase USA
Korea Development Bank	Moodys	Aa2	33,902	Korea Development Bank
ICBC ASIA LTD	FITCH	Baa2	28,603	ICBC ASIA LTD
SHINHAN BANK	S&P	A	27,029	SHINHAN BANK
Lainnya	Beragam/Various	Beragam/Various	241	Others
Subtotal			919,395	Subtotal
			7,160,780	
Total tersedia untuk dijual			26,805,669	Total available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo				Held-to-maturity
Rupiah				Rupiah
Obligasi				Bonds
PT Intan Baruprana Finance IBFI-17	Pefindo	idBBB-	286,750	PT Intan Baruprana Finance IBFI-17
Garuda Indonesia 1A	Pefindo	idBBB+	136,000	Garuda Indonesia 1A
Bank Tabungan Negara BTN-IA/2015	Pefindo	idAA+	120,000	Bank Tabungan Negara BTN-IA/2015
Bank Panin Thp II Th 2017	Pefindo	idA+	101,174	Bank Panin Thp II Th 2017
Indosat	Pefindo	idAAA(sy)	50,000	Indosat
Sukuk Mudharabah Maybank Tahap II	Pefindo	idAAA(sy)	50,000	Sukuk Mudharabah Maybank Tahap II
Sukuk Mudharabah BSM 2016	Pefindo	idAA-(sy)	50,000	Sukuk Mudharabah BSM 2016
Sukuk Mudharabah BRIS 2016	Pefindo	idA+(sy)	46,000	Sukuk Mudharabah BRIS 2016
Sukuk Ijarah Indosat Thp IV Th 2016 Seri B	Pefindo	idAAA(sy)	30,000	Sukuk Ijarah Indosat Thp IV 2016 B
Sukuk Ijarah Indosat Thp II Th 2017 Seri B	Pefindo	idAAA(sy)	30,000	Sukuk Ijarah Indosat Thp II 2017 B
Sukuk Ijarah Timah Thp I Th 2017 Seri A	Pefindo	idA+(sy)	28,000	Sukuk Ijarah Timah Thp I Th 2017 A
Adira Multifinance	Pefindo	idAAA(sy)	25,000	Adira Multifinance
Sukuk Ijarah XL Axiata Thp II Th 2017 Seri A	Pefindo	idAAA(sy)	25,000	Sukuk Ijarah XL Axiata Thp II 2017 A
Sukuk Ijarah XL Axiata Thp II Th 2017 Seri B	Pefindo	idAAA(sy)	25,000	Sukuk Ijarah XL Axiata Thp II 2017 B
MTN Syariah Mudharabah I Bank Jambi th 2017	Pefindo	idAAA(sy)	20,000	MTN Syariah Mudharabah I Bank Jambi Th 2017
Sukuk Ijarah Indosat Thp II Th 2017 Seri A	Pefindo	idAAA(sy)	20,000	Sukuk Ijarah Indosat Thp II 2017 A
Indosat V/2012	Pefindo	idAAA(sy)	16,951	Indosat V/2012
Sukuk Ijarah Summarecon Agung thp II Th 2014	Pefindo	idA+(sy)	15,000	Sukuk Ijarah Summarecon Agung Thp II Th 2014
Bank Muamalat 2013	Pefindo	idA-(sy)	10,000	Bank Muamalat 2013
Lainnya	Beragam/Various	Beragam/Various	31,983	Others
Subtotal			1,116,858	Subtotal

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

d. By rating (continued)

31 Desember/December 2017			
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying Value
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)			
Mata uang asing			
Obligasi			
Majapahit Holding BV	Pefindo	AAA	6,762
Total dimiliki hingga jatuh tempo			1,123,620
Total efek-efek			36,358,994
Cadangan kerugian penurunan nilai			(309,095)
Efek-efek - neto			36,049,899

Held-to-maturity (continued)

Foreign currencies

Bonds

Majapahit Holding BV

Total held-to-maturity securities

Total marketable securities

Allowance for impairment losses

Marketable securities - net

Underlying aset utama dari reksa dana yang dimiliki oleh Grup adalah deposito dan Obligasi Pemerintah.

The main underlying assets of the Group's mutual funds consist of deposits and government bonds.

e. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

e. By Bank Indonesia collectibility

	31 Desember/December			
	2018		2017	
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses
Lancar	31,797,196	(10,691)	35,787,371	(6,618)
Kurang lancar	289,431	(31,918)	284,622	(15,727)
Macet	275,780	(275,528)	287,001	(286,750)
	32,362,407	(318,137)	36,358,994	(309,095)

*Current
Substandard
Loss*

f. Cadangan kerugian penurunan nilai

f. Allowance for impairment losses

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/December	
	2018	2017
Saldo awal	309,095	91,107
Penyisihan selama tahun berjalan	7,794	219,366
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	1,248	(1,378)
Saldo akhir	318,137	309,095

Beginning balance

*Provison during the year
Foreign exchange translation
adjustments*

Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

g. Tingkat suku bunga per tahun

g. Annual interest rates

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	
Suku Bunga Kontrak:			<i>Contractual Rate:</i>
2018	0.08 - 10.25	0.50 - 7.75	2018
2017	5.80 - 10.55	1.46 - 7.75	2017
Suku Bunga Efektif:			<i>Effective Interest Rate:</i>
2018	5.06 - 9.35	2.61 - 10.10	2018
2017	5.80 - 10.35	0.86 - 10.10	2017

9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA

9. BILLS AND OTHER RECEIVABLES

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah			Rupiah
Surat Keterangan Berdokumen			<i>Domestic Documentary</i>
Dalam Negeri (SKBDN)	2,966,740	534,264	<i>Letters of Credit</i>
Wesel Ekspor	1,990,794	1,861,929	<i>Export Bills</i>
Tagihan lainnya:			<i>Other receivables:</i>
- <i>Open account financing</i> dan			<i>Open account financing and -</i>
<i>Supply chain financing</i>	10,400,242	8,417,238	<i>Supply chain financing</i>
	15,357,776	10,813,431	
Mata uang asing			Foreign currencies
Wesel Ekspor	8,404,532	4,295,076	<i>Export Bills</i>
Surat Keterangan Berdokumen			<i>Domestic Documentary</i>
Dalam Negeri (SKBDN)	20,278	-	<i>Letters of Credit</i>
Tagihan lainnya:			<i>Other receivables:</i>
- <i>Open account financing</i>	579,321	132,249	<i>Open account financing -</i>
- Tagihan transaksi <i>L/C Sight</i>	383,299	558,414	<i>L/C Sight receivables -</i>
	9,387,430	4,985,739	
Total	24,745,206	15,799,170	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(158,344)	(98,245)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	24,586,862	15,700,925	Net

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA
(lanjutan)**

9. BILLS AND OTHER RECEIVABLES (continued)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

Perincian wesel ekspor dan tagihan lainnya berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Bills and other receivables based on currencies are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah	15,357,776	10,813,431	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	9,153,568	3,300,774	United States Dollar
Yuan Cina	227,324	1,662,533	Chinese Yuan
Euro	3,750	20,284	Euro
Yen Jepang	2,788	2,148	Japanese Yen
	9,387,430	4,985,739	
Total	24,745,206	15,799,170	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(158,344)	(98,245)	Allowance for impairment losses
Neto	24,586,862	15,700,925	Net

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah	10,989,239	8,455,928	Rupiah
Mata uang asing	718,546	54,623	Foreign currencies
Total pihak berelasi	11,707,785	8,510,551	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	4,368,537	2,357,503	Rupiah
Mata uang asing	8,668,884	4,931,116	Foreign currencies
Total pihak ketiga	13,037,421	7,288,619	Total third parties
Total	24,745,206	15,799,170	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(158,344)	(98,245)	Allowance for impairment losses
Neto	24,586,862	15,700,925	Net

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

c. By Bank Indonesia collectibility

	31 Desember/December				
	2018		2017		
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
Lancar	24,745,206	(158,344)	15,799,170	(98,245)	Current



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA
(lanjutan)**

9. BILLS AND OTHER RECEIVABLES (continued)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

d. Allowance for impairment losses

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Saldo awal	98,245	31,268	Beginning balance
Penyisihan selama tahun berjalan	75,664	15,485	Provision during the year
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(15,565)	51,492	Foreign exchange translation adjustment
Saldo akhir	158,344	98,245	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.

e. Tingkat suku bunga per tahun

e. Annual interest rates

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	Euro %	
2018	7.00 - 9.18	1.50 - 7.89	1.50 - 3.15	2018
2017	7.98 - 8.98	1.00 - 5.19	1.00 - 3.01	2017

10. TAGIHAN AKSEPTASI

10. ACCEPTANCES RECEIVABLES

a. Berdasarkan pihak dan mata uang

a. By party and currency

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah			Rupiah
Debitur non-bank	11,928,168	9,783,946	Non-bank debtors
Bank	26,089	26,769	Banks
	11,954,257	9,810,715	
Mata uang asing			Foreign currencies
Debitur non-bank	6,944,536	6,441,950	Non-bank debtors
Bank	1,576,226	2,018,358	Banks
	8,520,762	8,460,308	
Total	20,475,019	18,271,023	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(179,742)	(164,611)	Allowance for impairment losses
Neto	20,295,277	18,106,412	Net

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

10. ACCEPTANCES RECEIVABLES (continued)

a. Berdasarkan pihak dan mata uang (lanjutan)

a. By party and currency (continued)

Perincian tagihan akseptasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Acceptances receivables based on currencies are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah	11,954,257	9,810,715	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	7,747,966	7,836,023	United States Dollar
Euro	432,363	248,112	Euro
Dolar Singapura	151,207	219,070	Singapore Dollar
Yen Jepang	71,965	82,006	Japanese Yen
Yuan Cina	49,280	57,227	Chinese Yuan
Dolar Australia	44,279	3,964	Australian Dollar
Pound Sterling Inggris	23,702	1,997	Great Britain Pound Sterling
Franc Swiss	-	11,909	Franc Swiss
	8,520,762	8,460,308	
Total	20,475,019	18,271,023	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(179,742)	(164,611)	Allowance for impairment losses
Neto	20,295,277	18,106,412	Net

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah	4,876,636	4,949,978	Rupiah
Mata uang asing	671,415	818,258	Foreign currencies
Total pihak berelasi	5,548,051	5,768,236	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	7,077,621	4,860,737	Rupiah
Mata uang asing	7,849,347	7,642,050	Foreign currencies
Total pihak ketiga	14,926,968	12,502,787	Total third parties
Total	20,475,019	18,271,023	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(179,742)	(164,611)	Allowance for impairment losses
Neto	20,295,277	18,106,412	Net

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

c. By Bank Indonesia collectibility

	31 Desember/December				
	2018		2017		
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
Lancar	20,475,019	(179,742)	18,266,177	(163,606)	Current Special mention
Dalam perhatian khusus	-	-	4,846	(1,005)	
	20,475,019	(179,742)	18,271,023	(164,611)	



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

10. ACCEPTANCES RECEIVABLES (continued)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

d. Allowance for impairment losses

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Saldo awal	164,611	84,834	Beginning balance
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan	(500)	107,574	Provision (reversal) during the year
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	15,631	(27,797)	Foreign exchange translation adjustment
Saldo akhir	179,742	164,611	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

11. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES

Dalam melakukan usaha bisnis, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, swap mata uang asing, swap atas suku bunga dan transaksi spot untuk keperluan pembiayaan, perdagangan dan lindung nilai.

In the normal course of business, BNI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, currency swaps, interest rate swaps and spot transactions for financing, trading and hedging purposes.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

Instrumen	31 Desember/December 2018			Instruments
	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ Notional amount foreign currency (full amount)	Nilai wajar/Fair values		
		Tagihan derivatif/ Derivative receivables	Liabilitas derivatif/ Derivative payables	
Terkait Nilai Tukar				Exchange Rate Related
Kontrak berjangka - beli				Forward contract - buy
USD	239,031,000	2,565	(26,092)	USD
Kontrak berjangka - jual				Forward contract - sell
USD	466,832,415	84,598	(2,594)	USD
CNY	12,100,000	312	-	CNY
Swap mata uang asing - beli				Foreign currency swaps - buy
EUR	59,068,329	2,699	(12,776)	EUR
JPY	600,492,755	5,752	-	JPY
USD	734,914,068	8,415	(220,572)	USD
GBP	500,000	-	(36)	GBP
Swap mata uang asing - jual				Foreign currency swaps - sell
AUD	4,700,000	165	-	AUD
EUR	2,900,000	1,259	(44)	EUR
GBP	3,500,000	36	(336)	GBP
CNY	20,688,068	33	-	CNY
JPY	1,050,862,321	1,512	(29)	JPY
HKD	423,790,330	-	(531)	HKD
USD	683,686,726	298,097	(15,686)	USD
Spot mata uang asing - beli				Foreign currency spots - buy
USD	119,225,000	-	(16,305)	USD
EUR	2,300,000	-	(40)	EUR

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF
(lanjutan)**

**11. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES
(continued)**

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

Instrumen	31 Desember/December 2018			Instruments
	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ Notional amount foreign currency (full amount)	Nilai wajar/Fair values		
		Tagihan derivatif/ Derivative receivables	Liabilitas derivatif/ Derivative payables	
Spot mata uang asing - jual				Foreign currency spots - sell
EUR	2,800,000	79	-	EUR
JPY	6,600,000	3	-	JPY
SGD	100,000	6	-	SGD
USD	108,691,079	14,956	-	USD
Option mata uang asing - beli				Foreign currency option - buy
USD	8,550,000	5	(3,834)	USD
Option mata uang asing - jual				Foreign currency option - sell
USD	23,550,000	3,605	(1,355)	USD
Terkait Suku Bunga				Interest Rate Related
Swap atas suku bunga				Interest rate swaps
USD	1,862,000,000	156,187	(1,303)	USD
Terkait Nilai Tukar dan Suku Bunga				Exchange and Interest Rate Related
Swap mata uang asing dan suku bunga				Cross currency swaps and interest rate
USD	120,028,426	24,964	(20,495)	USD
		605,248	(322,028)	

Instrumen	31 Desember/December 2017			Instruments
	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ Notional amount foreign currency (full amount)	Nilai wajar/Fair values		
		Tagihan derivatif/ Derivative receivables	Liabilitas derivatif/ Derivative payables	
Terkait Nilai Tukar				Exchange Rate Related
Kontrak berjangka - beli				Forward contract - buy
USD	62,957,000	547	(1,339)	USD
Kontrak berjangka - jual				Forward contract - sell
JPY	7,796,500	-	(1)	JPY
USD	199,540,743	856	(1,731)	USD
Swap mata uang asing - beli				Foreign currency swaps - buy
EUR	22,786,049	3,468	(850)	EUR
USD	677,118,232	7,815	(45,827)	USD
Swap mata uang asing - jual				Foreign currency swaps - sell
AUD	4,400,000	-	(570)	AUD
CNY	26,045,766	326	-	CNY
EUR	6,967,492	847	(743)	EUR
GBP	9,000,000	-	(1,406)	GBP
USD	1,473,201,692	72,995	(9,860)	USD
HKD	9,500,000	-	(177)	HKD
Spot mata uang asing - beli				Foreign currency spots - buy
EUR	220,000	11	-	EUR
USD	33,500,000	232	-	USD



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF
(lanjutan)**

**11. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES
(continued)**

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

Instrumen	31 Desember/December 2017			Instruments
	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ Notional amount foreign currency (full amount)	Nilai wajar/Fair values		
		Tagihan derivatif/ Derivative receivables	Liabilitas derivatif/ Derivative payables	
Spot mata uang asing - jual USD	5,000,000	-	(105)	Foreign currency spots - sell USD
Option mata uang asing - beli USD	110,000,000	29,015	-	Foreign currency option - buy USD
Option mata uang asing - jual USD	110,000,000	-	(29,015)	Foreign currency option - sell USD
Terkait Nilai Tukar dan Suku Bunga				Exchange and Interest Rate Related
Swap mata uang asing dan suku bunga USD	110,403,244	23,092	(17,708)	Cross currency swaps and interest rate USD
Swap atas suku bunga USD	1,775,000,000	77,680	(4,488)	Interest rate swaps USD
		216,884	(113,820)	

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Tagihan derivatif			Derivatives receivables
Pihak berelasi			Related parties
Mata uang asing	56,317	27,361	Foreign currencies
Pihak ketiga			Third parties
Mata uang asing	548,931	189,523	Foreign currencies
Total	605,248	216,884	Total
Liabilitas derivatif			Derivatives payables
Pihak berelasi			Related parties
Mata uang asing	41,234	30,630	Foreign currencies
Pihak ketiga			Third parties
Mata uang asing	280,794	83,190	Foreign currencies
Total	322,028	113,820	Total

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen Bank, seluruh tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 digolongkan lancar.

Based on the Bank's management review and evaluation, all derivatives receivable as of 31 December 2018 and 2017, are classified as current.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

12. LOANS

Informasi mengenai pinjaman yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 47i.

Loans to related parties are disclosed in Note 47i.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah			Rupiah
Modal kerja	200,861,551	166,903,782	Working capital
Investasi	94,933,675	80,791,157	Investment
Konsumen	90,346,035	80,840,866	Consumer
Sindikasi	38,242,652	41,546,968	Syndicated
Karyawan	3,881,001	3,795,666	Employee
Program pemerintah	500,275	613,289	Government programs
	428,765,189	374,491,728	
Mata uang asing			Foreign currencies
Modal kerja	52,064,095	39,780,349	Working capital
Investasi	19,305,058	16,482,229	Investment
Sindikasi	12,491,467	10,365,068	Syndicated
Konsumen	149,554	190,518	Consumer
Karyawan	3,134	3,674	Employee
	84,013,308	66,821,838	
Total	512,778,497	441,313,566	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14,891,609)	(14,523,585)	Allowance for impairment losses
Neto	497,886,888	426,789,981	Net

Perincian pinjaman yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Loans based on currencies are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah	428,765,189	374,491,728	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	80,593,610	64,134,866	United States Dollar
Yuan China	1,292,564	1,510,464	Chinese Yuan
Yen Jepang	1,135,551	578,175	Japanese Yen
Euro	551,468	235,448	Euro
Dolar Hong Kong	186,948	69,576	Hong Kong Dollar
Dolar Singapura	85,891	247,439	Singapore Dollar
Pound Sterling Inggris	59,784	45,870	Great Britain Pound Sterling
Won Korea Selatan	90,472	-	South Korean Won
Dolar Australia	17,020	-	Australian Dollar
	84,013,308	66,821,838	
Total	512,778,497	441,313,566	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(14,891,609)	(14,523,585)	Allowance for impairment losses
Neto	497,886,888	426,789,981	Net



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

12. LOANS (continued)

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah			Rupiah
Sindikasi	29,667,497	33,666,390	Syndicated
Modal kerja	51,326,597	34,948,985	Working capital
Investasi	8,653,413	6,547,993	Investment
Karyawan	111,057	34,803	Employee
Konsumen	121,004	79,919	Consumer
	89,879,568	75,278,090	
Mata uang asing			Foreign currencies
Modal kerja	14,301,831	7,728,185	Working capital
Investasi	2,541,167	2,957,345	Investment
Sindikasi	682,366	451,878	Syndicated
	17,525,364	11,137,408	
Total pihak berelasi	107,404,932	86,415,498	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Modal kerja	149,534,954	131,954,797	Working capital
Konsumen	90,225,031	80,760,947	Consumer
Investasi	86,280,262	74,243,164	Investment
Sindikasi	8,575,155	7,880,578	Syndicated
Karyawan	3,769,944	3,760,863	Employee
Program pemerintah	500,275	613,289	Government programs
	338,885,621	299,213,638	
Mata uang asing			Foreign currencies
Modal kerja	37,762,264	32,052,164	Working capital
Investasi	16,763,891	13,524,884	Investment
Sindikasi	11,809,101	9,913,190	Syndicated
Konsumen	149,554	190,518	Consumer
Karyawan	3,134	3,674	Employee
	66,487,944	55,684,430	
Total pihak ketiga	405,373,565	354,898,068	Total third parties
Total	512,778,497	441,313,566	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14,891,609)	(14,523,585)	Allowance for impairment losses
Neto	497,886,888	426,789,981	Net

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

12. LOANS (continued)

c. Berdasarkan sektor ekonomi

c. By economic sector

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah			Rupiah
Perdagangan, restoran dan hotel	81,170,924	69,006,446	Trading, restaurants and hotels
Perindustrian	70,283,716	61,482,580	Manufacturing
Pertanian	46,713,831	43,734,138	Agriculture
Jasa dunia usaha	44,030,393	33,817,932	Business services
Konstruksi	33,411,040	27,176,926	Construction
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	26,978,325	22,305,039	Transportation, warehousing and communications
Listrik, gas dan air	15,346,098	19,635,329	Electricity, gas and water
Jasa pelayanan sosial	13,901,702	10,592,072	Social services
Pertambangan	3,167,703	3,317,470	Mining
Lain-lain	93,761,457	83,423,796	Others
	428,765,189	374,491,728	
Mata uang asing			Foreign currencies
Perindustrian	27,750,005	21,261,646	Manufacturing
Pertambangan	15,132,942	8,631,055	Mining
Jasa dunia usaha	8,544,915	8,491,137	Business services
Listrik, gas dan air	8,833,267	7,131,453	Electricity, gas and water
Perdagangan, restoran dan hotel	8,579,946	7,384,470	Trading, restaurants and hotels
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	4,372,833	3,680,746	Transportation, warehousing and communications
Pertanian	2,471,195	3,153,510	Agriculture
Jasa pelayanan sosial	2,130,814	1,556,711	Social services
Konstruksi	1,062,597	321,925	Construction
Lain-lain	5,134,794	5,209,185	Others
	84,013,308	66,821,838	
Total	512,778,497	441,313,566	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14,891,609)	(14,523,585)	Allowance for impairment losses
Neto	497,886,888	426,789,981	Net

d. Berdasarkan penilaian secara kolektif dan individual

d. By assessment as collective and individual

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Pokok			Principal
Individual	24,263,929	17,386,268	Individual
Kolektif	488,514,568	423,927,298	Collective
	512,778,497	441,313,566	
Cadangan kerugian penurunan nilai			Allowance for impairment losses
Individual	(5,633,713)	(4,127,282)	Individual
Kolektif	(9,257,896)	(10,396,303)	Collective
	(14,891,609)	(14,523,585)	
Neto	497,886,888	426,789,981	Net



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

12. LOANS (continued)

e. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

e. By Bank Indonesia collectibility

	31 Desember/December				
	2018		2017		
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
Lancar	482,491,878	(5,529,803)	414,371,396	(5,224,347)	Current
Dalam perhatian khusus	20,248,317	(3,861,292)	16,844,595	(2,487,024)	Special mention
Kurang lancar	2,028,042	(559,763)	1,271,410	(441,408)	Substandard
Diragukan	3,009,125	(1,674,812)	1,592,039	(903,295)	Doubtful
Macet	5,001,135	(3,265,939)	7,234,126	(5,467,511)	Loss
Total	512,778,497	(14,891,609)	441,313,566	(14,523,585)	

f. Pinjaman bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi

f. Non-performing loans and allowance for impairment losses by economic sector

	31 Desember/December				
	2018		2017		
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
Perindustrian	3,146,149	(1,749,203)	3,195,226	(2,485,040)	Manufacturing
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	306,593	(126,133)	159,303	(93,711)	Transportation, warehousing and communications
Perdagangan, restoran dan hotel	2,054,515	(1,209,169)	1,945,244	(1,249,841)	Trading, restaurants and hotels
Pertambangan	1,373,912	(767,640)	1,077,020	(744,888)	Mining
Jasa dunia usaha	567,553	(309,930)	866,365	(666,056)	Business services
Konstruksi	340,102	(147,766)	396,012	(166,709)	Construction
Pertanian	85,164	(50,949)	247,900	(183,096)	Agriculture
Jasa pelayanan sosial	60,633	(34,389)	98,532	(69,531)	Social services
Listrik, gas dan air	658	(260)	3,655	(357)	Electricity, gas and water
Lain-lain	2,103,023	(1,105,075)	2,108,318	(1,152,985)	Others
Total	10,038,302	(5,500,514)	10,097,575	(6,812,214)	Total

Rasio kredit bermasalah BNI dan Entitas Anak secara gross (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 1,96% dan 2,29% (rasio untuk BNI saja 1,90% dan 2,26% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017), sedangkan rasio kredit bermasalah BNI dan Entitas Anak secara neto pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 0,88% dan 0,74% (rasio untuk BNI saja 0,85% dan 0,70% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017).

The non-performing loans ratio of BNI and Subsidiaries on a gross basis, (before deducting the allowance for impairment losses), as of 31 December 2018 and 2017, were 1.96% and 2.29%, respectively (the ratios for BNI only were 1.90% and 2.26% as of 31 December 2018 and 2017, respectively), while the non-performing loans ratio of BNI and Subsidiaries on a net basis as of 31 December 2018 and 2017, were 0.88% and 0.74%, respectively (the ratios for BNI only were 0.85% and 0.70% as of 31 December 2018 and 2017, respectively).

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

12. LOANS (continued)

g. Tingkat suku bunga per tahun

g. Annual interest rates

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	Yuan Cina/ Chinese Yuan %	Yen Jepang/ Japanese Yen %	
Bunga kontrak					Contractual rates
2018	5.00 - 22.00	1.43 - 12.50	7.00	1.39 - 6.05	2018
2017	4.00 - 26.95	0.54 - 10.00	7.00	0.76 - 2.51	2017
Bunga efektif					Effective interest rate
2018	7.08 - 23.90	3.36 - 21.23	7.56 - 7.68	0.50 - 6.05	2018
2017	6.00 - 19.13	3.04 - 8.00	7.12 - 7.12	0.76 - 2.51	2017

h. Pinjaman yang direstrukturisasi

h. Restructured loans

Berikut ini adalah jenis dan jumlah kredit yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2018 dan 2017:

Below is the type and amount of restructured loans as of 31 December 2018 and 2017:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Perpanjangan jangka waktu kredit	3,520,600	5,577,088	Extension of loan maturity dates
Perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga kredit	11,583,217	11,871,689	Extension of loan maturity dates and reduction of interest rates
Perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga kredit, dan program restrukturisasi lain-lain*)	14,094,852	12,977,598	Extension of loan maturity dates, reduction of interest rates and other restructuring programs*)
Total	29,198,669	30,426,375	Total

*) Program restrukturisasi lain-lain terutama terdiri dari penambahan fasilitas kredit, Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) dan *Interest Balloon Payment (IBP)*.

*) *Other restructuring scheme mainly includes additions of loan facilities, debt settlement agreements (PPH) and Interest Balloon Payments (IBP).*

Jumlah kredit yang telah direstrukturisasi dan dalam kategori kredit bermasalah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp4.871.572 dan Rp4.212.426.

Restructured loans and categorized as non-performing loan amounted to Rp4,871,572 and Rp4,212,426, as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

i. Pinjaman sindikasi

i. Syndicated loans

Pinjaman sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Syndicated loans represent loans provided to debtors based on syndication agreements with other banks.

Keikutsertaan BNI dalam pinjaman sindikasi dengan bank-bank lain adalah sebesar Rp50.734.119 dan Rp51.912.036 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

BNI's participation in syndicated loans with other banks amounted to Rp50,734,119 and Rp51,912,036 as of 31 December 2018 and 2017, respectively.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

12. LOANS (continued)

i. Pinjaman sindikasi (lanjutan)

Persentase bagian BNI dalam pinjaman sindikasi, dimana BNI bertindak sebagai pimpinan sindikasi adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	31 Desember/December		
	2018	2017	
% Partisipasi	16.11% - 93.00%	21.15% - 93.00%	% Participation

Keikutsertaan BNI dalam pinjaman sindikasi, dimana BNI bertindak sebagai anggota sindikasi adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	31 Desember/December		
	2018	2017	
% Partisipasi	0.23% - 46.00%	0.00% - 64.43%	% Participation

j. Cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Saldo awal	14,523,585	16,680,865	Beginning balance
Penyisihan selama tahun berjalan	7,067,553	6,604,196	Provision during the year
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	656,144	555,042	Recovery of written off loans
Penghapusan selama tahun berjalan	(7,834,572)	(9,395,944)	Write-offs during the year
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	478,899	79,426	Foreign exchange translation adjustment
Saldo akhir	14,891,609	14,523,585	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

i. Syndicated loans (continued)

BNI's percentage shares in syndicated loans, in which BNI acts as the lead arranger, is as follows (unaudited):

BNI's participation in syndicated loans, in which BNI acts as the syndication member, is as follows (unaudited):

j. Allowance for impairment losses

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses above is adequate.

k. Kredit dihapusbukukan

Kredit yang telah dihapusbukukan oleh BNI dicatat sebagai kredit ekstra-komtabel di dalam rekening administratif.

k. Loans written off

The loans written off by BNI are recorded as extra-comptable in the administrative account.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

i. Fasilitas pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan

BNI memiliki perjanjian pembiayaan dengan beberapa lembaga pembiayaan untuk membiayai kepemilikan kendaraan bermotor sebesar Rp2.356.402 dan Rp2.808.674 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Perjanjian pembiayaan hak *recourse* di atas, dengan perusahaan pembiayaan terkait adalah sebesar 100% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dari jumlah kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut. Apabila terjadi wanprestasi atas debitur, BNI memiliki hak *recourse* terhadap perusahaan pembiayaan yang terkait.

m. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan

Grup memiliki agunan atas pinjaman yang diberikan dalam bentuk kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotik, garansi serta jaminan dalam bentuk aset lainnya.

Pinjaman yang diberikan dalam pembiayaan syariah masing-masing sebesar Rp28.386.197 dan Rp23.596.718 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Pinjaman karyawan adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga sebesar 3% - 5% per tahun yang ditujukan untuk pembelian rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai 20 tahun. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Kredit Program Pemerintah terdiri dari Kredit Ketahanan Pangan (KKP), *Two Steps Loan* (TSL), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), dan Revitalisasi Perkebunan yang dapat didanai sebagian dan/atau seluruhnya oleh Pemerintah.

12. LOANS (continued)

i. Financing arrangements with multi-finance companies

BNI has financing arrangements with several multi-finance companies with respect to motor vehicles financing amounting to Rp2,356,402 and Rp2,808,674 as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

As of 31 December 2018 and 2017, the above recourse arrangements with the respective multi-finance companies represent 100% of the total loans under the respective financing arrangements. In case of default by the borrowers, BNI has recourse against the respective multi-finance companies.

m. Other significant information relating to loans

The Group holds collateral against loans in the form of cash, deposits, registered mortgages, guarantees and other assets held as collaterals.

Loans include sharia receivables amounting to Rp28,386,197 and Rp23,596,718 as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

Loans to employees which carried interest rate of 3% - 5% per annum are intended for purchase of houses and other necessities with 1 year to 20 years time period. The loan principal and interest payments are settled through monthly payroll deductions.

Government Program Loans consist of Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Two Steps Loan (TSL), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) and Revitalisasi Perkebunan which are partially and/or fully funded by the Government.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

m. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak berelasi dan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Rasio kredit usaha mikro dan kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan BNI per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 9,95% dan 9,07%, sedangkan bila rasio tersebut ditambahkan dengan kredit menengah maka rasionya menjadi sebesar 19,52% dan 18,29% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

13. OBLIGASI PEMERINTAH

Seluruh transaksi Obligasi Pemerintah merupakan pihak berelasi.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

12. LOANS (continued)

m. Other significant information relating to loans (continued)

As of 31 December 2018 and 2017, there was not any breach nor violation of Legal Lending Limit (LLL) to related parties and third parties as required by Bank Indonesia regulations.

The micro and small scale loans to total loans ratio for BNI and the small scale loans to total loans ratio for BNI as of 31 December 2018 and 2017 is 9.95% and 9.07%, respectively, whereas if that ratio is added with middle scale loans, the ratio will become 19.52% and 18.29% as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

13. GOVERNMENT BONDS

All Government Bonds transactions are with related parties.

a. By type and currency

	31 Desember/December				
	2018		2017		
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi Rupiah					Fair value through profit or loss Rupiah
Tingkat bunga tetap	3,291,380	3,257,825	2,917,363	2,931,614	Fixed rate
Mata uang asing					Foreign currencies
Tingkat bunga tetap	97,425	92,670	4,749	4,806	Fixed rate
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi	3,388,805	3,350,495	2,922,112	2,936,420	Total fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual Rupiah					Available-for-sale Rupiah
Tingkat bunga tetap	40,790,537	39,639,434	32,777,125	34,161,597	Fixed rate
Tingkat bunga mengambang	4,018,659	3,977,751	4,641,870	4,638,545	Floating rate
	44,809,196	43,617,185	37,418,995	38,800,142	
Mata uang asing					Foreign currencies
Tingkat bunga tetap	15,259,754	15,065,157	15,998,760	16,347,662	Fixed rate
Tingkat bunga mengambang	1,606,279	1,600,558	1,031,130	1,088,973	Floating rate
	16,866,033	16,665,715	17,029,890	17,436,635	
Total tersedia untuk dijual	61,675,229	60,282,900	54,448,885	56,236,777	Total available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo Rupiah					Held-to-maturity Rupiah
Tingkat bunga tetap, setelah diskonto/premi yang belum diamortisasi, sebesar Rp238.588 per 31 Desember 2018 dan Rp351.839 per 31 Desember 2017	12,783,679	12,545,091	14,102,603	13,750,764	Fixed rate, net of unamortized discount/premium of Rp238,588 as of 31 December 2018 and Rp351,839 as of 31 December 2017

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

13. GOVERNMENT BONDS (continued)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

	31 Desember/December				
	2018		2017		
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)					<i>Held-to-maturity (continued)</i>
Mata uang asing					Foreign currencies
Tingkat bunga tetap, setelah diskonto/premi yang belum diamortisasi sebesar Rp124,346 per 31 Desember 2018 dan Rp182,554 per 31 Desember 2017	10,080,015	10,204,361	6,424,014	6,606,568	<i>Fixed rate, net of unamortized discount/premium of Rp124,346 as of 31 December 2018 and Rp182,554 as of 31 December 2017</i>
Tingkat bunga mengambang	402,640	408,555	312,053	318,923	<i>Floating rate</i>
	10,482,655	10,612,916	6,736,067	6,925,491	
Total dimiliki hingga jatuh tempo	23,266,334	23,158,007	20,838,670	20,676,255	Total held-to-maturity
Total Obligasi Pemerintah	88,330,368	86,791,402	78,209,667	79,849,452	Total Government Bonds

Jumlah nominal Obligasi Pemerintah yang diterima BNI dari program rekapitalisasi masing-masing sebesar Rp2.962.860 dan Rp4.641.870 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

The total outstanding nominal amount of Government Bonds received by BNI from the recapitalization program amounted to Rp2,962,860 and Rp4,641,870 as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

Jumlah Obligasi Pemerintah yang dikelompokkan sebagai tersedia untuk dijual yang dijual selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The total available-for-sale Government Bonds sold during the current year are as follows:

	Total dijual/ Sold	Kepada pihak ketiga/ To third parties		
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai nominal/ Nominal value	Harga jual/ Selling price	
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	10,183,325	5,805,310	6,443,603	Year ended 31 December 2018
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	9,368,258	7,470,386	8,426,595	Year ended 31 December 2017

Jumlah Obligasi Pemerintah yang telah jatuh tempo dalam tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp9.690.696 (nilai nominal) dan Rp7.034.613 (nilai nominal).

Total Government Bonds which have matured amounted to Rp9,690,696 (nominal value) and Rp7,034,613 (nominal value) during 2018 and 2017, respectively.

Untuk obligasi tingkat bunga mengambang, harga pasar Obligasi Pemerintah berkisar antara 99,55% sampai dengan 99,87% dan antara 99,84% sampai dengan 99,95% masing-masing pada 31 Desember 2018 dan 2017 dari nilai nominal.

For floating interest rate bonds, the market price of Government Bonds ranged from 99.55% to 99.87% and from 99.84% to 99.95% as of 31 December 2018 and 2017, respectively, of the nominal amounts.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

13. GOVERNMENT BONDS (continued)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

Untuk tingkat bunga tetap, harga pasar Obligasi Pemerintah berkisar antara 76,01% sampai dengan 122,15% dan antara 96,70% sampai dengan 136,51% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

For fixed interest rate bonds, the market price of Government Bonds ranged from 76.01% to 122.15% and from 96.70% to 136.51% as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

BNI mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai pasar Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual (neto setelah pajak) sebesar Rp2.477.246 (rugi) dan Rp191.656 (untung) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang dicatat pada bagian ekuitas laporan posisi keuangan konsolidasian.

BNI recognized the unrealized gains or losses from the changes in the market value of the Government Bonds categorized as available-for-sale (net of taxes) in the amount of Rp2,477,246 (loss) and Rp191,656 (gain) for the year ended 31 December 2018 and 2017, respectively, both recorded in the equity section of the consolidated statement of financial position.

Pada 31 Desember 2018 dan 2017 Obligasi pemerintah dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah nominal Rp21.304.918 dan Rp2.674.950 telah dijual dengan janji dibeli kembali hingga jatuh tempo (lihat Catatan 22).

As of 31 December 2018 and 2017, the fixed rate government bonds has been sold under agreements to repurchase to maturity with nominal amount of Rp21,304,918 and Rp2,674,950, respectively. (refer to Note 22).

b. Berdasarkan kisaran tanggal jatuh tempo dan jenis bunga

b. Based on maturity date and type of interest rate

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Diperdagangkan	10/03/2019 -	04/01/2018 -	Trading Fixed rate bonds
Obligasi tingkat bunga tetap	11/01/2048	11/01/2048	
Tersedia untuk dijual	02/01/2019 -	01/02/2018 -	Available-for-sale Fixed rate bonds
Obligasi tingkat bunga tetap	17/01/2042	17/01/2042	
Obligasi tingkat bunga mengambang	04/03/2019 -	25/01/2018 -	Floating rate bonds
	15/05/2048	18/07/2027	
Dimiliki hingga jatuh tempo	15/01/2019 -	25/01/2018 -	Held-to-maturity Fixed rate bonds
Obligasi tingkat bunga tetap	15/04/2043	15/04/2043	
Obligasi tingkat bunga mengambang	04/03/2019 -	21/11/2018 -	Floating rate bonds
	20/09/2028	29/03/2026	

c. Tingkat suku bunga tetap tahunan

c. Annual fixed interest rates

	Rupiah	Amerika Serikat/ United States Dollar	Dolar Singapura/ Singapore Dollar	
	%	%	%	
Suku bunga kontrak:				Contractual interest rate:
2018	5.11 - 12.03	1.81 - 7.75	2.25 - 3.25	
2017	5.11 - 12.04	1.50 - 7.75	2.25 - 3.25	2017
Suku bunga efektif:				Effective interest rate:
2018	5.11 - 12.02	0.82 - 4.81	1.14 - 2.01	
2017	5.42 - 10.14	2.80 - 4.51	1.08	2017

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

13. GOVERNMENT BONDS (continued)

d. Tingkat suku bunga mengambang tahunan

d. Annual floating interest rates

	Tingkat suku bunga per tahun/ Annual interest rates	
2018	7.18% - 7.53%	2018
2017	4.93% - 4.96%	2017

**14. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI
DIJUAL KEMBALI**

**14. SECURITIES PURCHASED
AGREEMENTS TO RESELL UNDER**

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2017 terdiri dari:

Securities purchased under agreements to resell as of 31 December 2017 is as follows:

31 Desember/December 2017

Counterparty	Jenis Sekuritas/ Type of Securities	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Start Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Nilai Penjualan Kembali/ Resale Amount	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ Unrealized Interest	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Pihak ketiga/Third parties							
Bank Indonesia	OBN	250,000	06/12/2017	03/01/2018	268,405	103	268,302
Bank Indonesia	OBN	93,750	27/12/2017	24/01/2018	119,909	366	119,543
PT Bank BNP Paribas	OBN	100,000	29/12/2017	03/01/2018	92,650	34	92,617
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	OBN	100,000	28/12/2017	11/01/2018	68,096	100	67,996
Bank Indonesia	SPN-S	130,233	12/06/2017	01/03/2018	130,233	431	130,664
		673,983			679,293	1,034	679,122

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tersebut di atas diklasifikasikan sebagai lancar.

Securities purchased under agreements to resell are classified as current.

Tingkat suku bunga tetap tahunan:

Annual fixed interest rates:

	Rupiah %	
Suku bunga kontrak: 2017	4.35 - 4.80	Contractual interest rate: 2017

15. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

15. PREPAID EXPENSES

Beban dibayar dimuka terdiri dari :

Prepaid expenses consist of:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Sewa dibayar dimuka	1,235,011	1,223,023	Prepaid rent
Biaya tanggungan	354,396	351,170	Deferred expenses
Perbaikan dan pemeliharaan	318,535	310,229	Service and maintenance
Asuransi	215,579	181,616	Insurance
Promosi	114,586	95,612	Promotion
Lainnya	99,296	156,866	Others
	2,337,403	2,318,516	



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PENYERTAAN SAHAM

16. EQUITY INVESTMENTS

Penyertaan jangka panjang

Long-term equity investments

	<i>Nilai Tercatat/ Carrying Value</i>		
	31 Desember/December		
	2018	2017	
Klasifikasi tersedia untuk dijual	785,007	785,823	<i>Classified as available-for-sale</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(181,084)	(72,400)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	603,923	713,423	Net

*) Termasuk penyertaan sementara Bank pada PT PANN Pembiayaan Maritim (pihak berelasi) sebesar Rp724.338 per 31 Desember 2018 dan 2017.

*) Included temporary equity investment of the Bank in PT PANN Pembiayaan Maritim (related party) amounting to Rp724,338, as of 31 December 2018 and 2017.

Penyertaan jangka panjang berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia adalah:

The classification of long-term equity investments based on Bank Indonesia collectibility are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
	Lancar	60,669	
Kurang lancar	724,338	-	<i>Substandard</i>
Total	785,007	785,823	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(181,084)	(72,400)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	603,923	713,423	Net

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
	Saldo awal	72,400	
Pembentukan tahun berjalan	108,684	72,400	<i>Provision during the year</i>
Neto	181,084	72,400	Net

Penyertaan pada perusahaan asosiasi adalah sebagai berikut:

The long-term equity investments to associated companies are as follows:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha/ Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Company's Name
		2018	2017	
Diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual				<i>Classified as available-for-sale</i>
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Investasi/Investment	8.00%	8.00%	<i>PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia</i>
PT Swadharma Nusantara Pembiayaan (dahulu PT Swadharma Surya Finance)	Pembiayaan/Financing	7.35%	7.35%	<i>PT Swadharma Nusantara Pembiayaan (formerly PT Swadharma Surya Finance)</i>
PT Bursa Efek Indonesia	Bursa efek/Stock exchange	1.20%	1.20%	<i>PT Bursa Efek Indonesia</i>
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga penyelesaian efek/ Settlement and depository	2.50%	2.50%	<i>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia</i>
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Persero)	Pemeringkat efek/ Credit rating agency	1.93%	1.93%	<i>PT Pemeringkat Efek Indonesia (Persero)</i>
PT Bank Mizuho Indonesia	Bank/Banking	1.00%	1.00%	<i>PT Bank Mizuho Indonesia</i>
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Bank/Banking	0.52%	0.52%	<i>PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia</i>
PT PANN Pembiayaan Maritim	Pembiayaan/Financing	48.4%	48.4% *)	<i>PT PANN Pembiayaan Maritim</i>
) Tidak diaudit				<i>)Unaudited</i>

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. ASET LAIN-LAIN - NETO

Aset lain-lain - neto terdiri dari :

	31 Desember/December	
	2018	2017
Piutang bunga	4,253,128	3,254,353
Piutang lain-lain	3,429,531	2,813,466
Piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit	2,278,107	2,766,507
Agunan yang diambil alih setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp148.581 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp49.887 pada tanggal 31 Desember 2017	960,001	385,792
Persediaan kantor	236,902	261,592
Piutang premi asuransi	17,723	71,388
Beban ditangguhkan	91,111	97,778
Lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp34.789 pada tanggal 31 Desember 2018 (31 Desember 2017: Rp35.166)	633,581	730,010
Total	11,900,084	10,380,886

Pada tanggal 31 Desember 2018, piutang bunga sebagian besar merupakan bunga yang berasal dari pinjaman yang diberikan dan Obligasi Pemerintah masing-masing sebesar Rp2.544.329 dan Rp964.462 (31 Desember 2017: Rp1.991.848 dan Rp823.987).

BNI telah melakukan upaya penyelesaian atas agunan yang diambil alih dengan melakukan upaya penjualan dalam bentuk lelang atau pengambilalihan agunan oleh investor atas agunan yang diambil alih.

Properti terbengkalai termasuk di dalam pos lain-lain sebesar Rp1.930 dan Rp1.890 setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp28.746 dan Rp28.786 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

BNI telah melakukan upaya penyelesaian atas properti terbengkalai dalam bentuk pemanfaatan untuk kegiatan operasional Bank (kantor, outlet, galeri, rumah dinas dan gudang kearsipan).

17. OTHER ASSETS - NET

Other assets - net consist of:

3,254,353	<i>Interest receivables</i>
2,813,466	<i>Other receivables</i>
2,766,507	<i>Receivables from transactions related to ATM and credit card</i>
385,792	<i>Foreclosed collaterals, net of allowance for impairment losses of Rp148,581 as of 31 December 2018 and Rp49,887 as of 31 December 2017</i>
261,592	<i>Office supplies</i>
71,388	<i>Insurance premium receivables</i>
97,778	<i>Deferred expenses</i>
730,010	<i>Others, net of allowance for impairment losses of Rp34,789 as of 31 December 2018 (31 December 2017: Rp35,166)</i>
10,380,886	Total

As of 31 December 2018, interest receivables are mostly comprised of interest from loans and Government Bonds amounting to Rp2,544,329 and Rp964,462, respectively (31 December 2017: Rp1,991,848 and Rp823,987).

BNI has made efforts to settle foreclosed collaterals by making an attempt to sell in the form of an auction or take over collateral by investors on foreclosed collaterals.

Abandoned properties are included in "Others" amounting to Rp1,930 and Rp1,890, net of allowance for impairment losses of Rp28,746 and Rp28,746, as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

BNI has made efforts to resolve abandoned properties in the form of utilization for the Bank's operational activities (offices, outlets, gallery, official houses and warehouse).



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. ASET LAIN-LAIN - NETO (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas aset-aset yang disebutkan di atas telah memadai.

17. OTHER ASSETS - NET (continued)

Management believes that the allowance for impairment losses on the respective assets outlined above is adequate.

18. ASET TETAP

Aset tetap kepemilikan langsung:

18. FIXED ASSETS

Direct ownership of fixed assets:

31 Desember/December 2018							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Kenaikan penilaian kembali aset tetap/ Increase arising on revaluation of properties	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan							Cost
Tanah	13,856,982	79,551	-	206,533	1,413,627	15,556,693	Land
Bangunan	4,252,129	145,920	-	482,899	731,320	5,612,268	Buildings
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	9,136,107	307,217	(286,672)	939,684	-	10,096,336	Office equipment and motor vehicles
Total biaya perolehan	27,245,218	532,688	(286,672)	1,629,116	2,144,947	31,265,297	Total cost
Aset dalam penyelesaian	2,959,984	1,412,491	-	(1,629,116)	-	2,743,359	Construction in progress
Total biaya perolehan	30,205,202	1,945,179	(286,672)	-	2,144,947	34,008,656	Total cost
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Bangunan	783,226	264,535	-	-	(634,147)	413,614	Buildings
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	6,617,287	936,759	(85,512)	-	-	7,468,534	Office equipment and motor vehicles
Total akumulasi penyusutan	7,400,513	1,201,294	(85,512)	-	(634,147)	7,882,148	Total accumulated depreciation
Nilai buku neto	22,804,689					26,126,508	Net book value
31 Desember/December 2017							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification		Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan							Cost
Tanah	13,828,710	28,596	(324)	-	-	13,856,982	Land
Bangunan	3,850,033	206,165	(27,825)	223,756	425,219	4,252,129	Buildings
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	8,145,672	888,007	(123,506)	225,934	9,136,107	9,136,107	Office equipment and motor vehicles
Total biaya perolehan	25,824,415	1,122,768	(151,655)	449,690	27,245,218	27,245,218	Total cost
Aset dalam penyelesaian	2,601,313	824,758	(16,397)	(449,690)	2,959,984	2,959,984	Construction in progress
Total biaya perolehan	28,425,728	1,947,526	(168,052)	-	30,205,202	30,205,202	Total cost
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Bangunan	545,900	250,808	(13,482)	-	783,226	783,226	Buildings
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	5,907,605	808,983	(99,301)	-	6,617,287	6,617,287	Office equipment and motor vehicles
Total akumulasi penyusutan	6,453,505	1,059,791	(112,783)	-	7,400,513	7,400,513	Total accumulated depreciation
Nilai buku neto	21,972,223					22,804,689	Net book value

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended 31 December		
	2018	2017	
Harga jual	204,591	41,997	Proceeds
Nilai buku	(201,160)	(38,872)	Book value
Keuntungan	3,431	3,125	Gain

Jumlah beban penyusutan aset tetap sebesar Rp1.201.294 dan Rp1.059.791 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Details of gain on sale of fixed assets are as follows:

The balances of depreciation amounted to Rp1,201,294 and Rp1,059,791 as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

Aset tetap yang telah terdepresiasi penuh namun masih digunakan oleh Grup sebesar Rp5.407.460 dan Rp4.802.038 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, antara lain berupa perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor.

The fixed assets that have been fully depreciated but still in use by the Group amounting to Rp5,407,460 and Rp4,802,038 as of 31 December 2018 and 2017, respectively, include, among others, office equipment and motor vehicles.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Grup selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Group during the year because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

Aset tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2018 diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian dengan nilai pertanggungan sebesar Rp12.063.498 (31 Desember 2017: Rp9.641.311) (tidak diaudit). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tersebut.

As of 31 December 2018, the fixed assets of the Bank were insured against risk of fire and theft with sum insured amounting to Rp12,063,498 (31 December 2017: Rp9,641,311) (unaudited). Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Construction in progress as of 31 December 2018 and 2017 are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Tanah	40,148	45,774	Land
Bangunan	1,362,874	1,607,514	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1,340,337	1,306,696	Office equipment and motor vehicles
Total	2,743,359	2,959,984	Total

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2018 adalah berkisar 7% - 34% dan 31 Desember 2017: 5% - 18% (tidak diaudit).

The estimated percentage of completion of construction in progress as of 31 December 2018 is between 7% - 34% and 31 December 2017: 5% - 18% (unaudited).



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai wajar tanah dan bangunan yang dimiliki Grup pada tanggal 31 Desember 2018 tidak berbeda jauh dengan nilai tercatat karena Grup melakukan penilaian pada tanah dan bangunan pada tanggal 30 September 2018.

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan.

Pada tanggal 30 September 2015, Grup melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dan bangunan dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi.

Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik butir 27.e, dengan mempertimbangkan nilai buku aset tetap (tanah dan bangunan) yang telah dilakukan revaluasi pada tahun 2015, maka per tanggal 30 September 2018 Grup telah menugaskan perusahaan jasa penilai terdaftar untuk melaksanakan penilaian (revaluasi) aset tetap (tanah dan bangunan). Grup melakukan penilaian kembali atas tanah dan bangunan tersebut bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk pemenuhan ketentuan Bapepam dan LK tersebut.

Penilaian atas tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal sebagai berikut:

- KJPP Toha Okky Heru dan Rekan
- KJPP Rengganis Hamid dan Rekan
- KJPP Benedictus Darmapusita dan Rekan
- KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar, metode biaya dan metode pendapatan. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

- Jenis dan hak yang melekat pada properti
- Kondisi pasar
- Lokasi
- Karakteristik fisik
- Karakteristik dalam menghasilkan pendapatan
- Karakteristik tanah

18. FIXED ASSETS (continued)

There is no significant difference between fair value and carrying value of land and building owned by the Group as of 31 December 2018 because the Group performed revaluation over land and buildings on 30 September 2018.

There were no fixed assets pledged as collateral.

On 30 September 2015, the Group changed their accounting policy of land and buildings from cost model to revaluation model.

Based on Decision of Chairman of Bapepam and LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012, about the presentation and disclosure in financial report of issuer or a public company in point 27.e, by considering the book value of fixed assets (land and buildings) that have been conducted revaluation in 2015, therefore on 30 September 2018, the Group assigned registered independent appraisers to appraise (revalue) its fixed assets (land and buildings). The Group has revalued the value of that land and buildings not for tax purpose rather for the compliance of the aforementioned Bapepam and LK regulation.

The valuations of land and buildings are performed by the following external independent appraisers:

- KJPP Toha Okky Heru dan Rekan*
- KJPP Rengganis Hamid dan Rekan*
- KJPP Benedictus Darmapusita dan Rekan*
- KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan*

Valuations are performed based on Indonesian Valuation Standards, determined based on reference to recent market transactions done on arm's length terms and appropriate requirements. The valuation methods used are market value approach, cost approach and income approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets, among others are as follows:

- Types and rights attached to the property*
- Market condition*
- Location*
- Physical characteristics*
- Income producing characteristics*
- Land characteristics*

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. ASET TETAP (lanjutan)

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 untuk kelompok aset tanah dan bangunan Grup di Indonesia dan luar negeri adalah sebagai berikut:

18. FIXED ASSETS (continued)

Information on revaluation of land and buildings of the Group on 31 December 2018 located in Indonesia and overseas are as follows:

	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ Carrying Amount Before Revaluation	Nilai Buku Setelah Revaluasi/ Carrying Amount after Revaluation	Keuntungan Revaluasi/ Gain Revaluation	
Tanah	14,097,701	15,511,328	1,413,627	Land
Bangunan	3,823,459	5,188,926	1,365,467	Buildings
Jumlah	17,921,160	20,700,254	2,779,094	Total

Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp1.413.627 yang terdiri dari kenaikan nilai tanah yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp1.418.055 dan penurunan nilai tanah yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp4.428.

The revaluation of land resulted in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp1,413,627 which consists of the increase in the carrying amount of land recognised as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp1,418,055 and a decrease in carrying amount recognised in the current year expenses amounting to Rp4,428.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi bangunan dicatat sebesar Rp1.365.467. Kenaikan ini terdiri dari kenaikan nilai bangunan yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp1.397.454 dan penurunan nilai bangunan yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp31.987.

Increase in carrying amount of buildings from the revaluation of building is recorded at Rp1,365,467. The increase consists of the increase in the carrying amount of buildings recognised in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp1,397,454 and decrease in the carrying amount of buildings recognised in the current year expenses amounting to Rp31,987.

Secara total kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" adalah sebesar Rp2.815.509. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan adalah sebesar Rp36.415.

In total, the increase in the carrying amount from revaluation of land and buildings is recognised in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp2,815,509. The decrease of carrying amount from revaluation results recognised in current year expenses amounted to Rp36,415.

Jika tanah dan bangunan dicatat sebesar harga perolehan, maka dicatat dalam jumlah sebagai berikut:

If land and buildings are recorded using historical cost basis, the amount would be as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Tanah	1,784,880	1,760,337	Land
Bangunan			Buildings
Harga perolehan	2,771,897	2,749,071	Cost
Akumulasi penyusutan	(2,171,163)	(2,017,491)	Accumulated depreciation
Nilai buku bangunan	600,734	731,580	Net book amount
Jumlah nilai buku bersih	2,385,614	2,491,917	Total net book value



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. ASET TETAP (lanjutan)

Perubahan cadangan revaluasi aset neto setelah pajak adalah sebagai berikut:

18. FIXED ASSETS (continued)

The movements in the asset revaluation reserve net of tax are as follows:

	Cadangan revaluasi aset, neto setelah pajak/ Asset revaluation reserve, net of tax	
Saldo per 31 Desember 2017	12,283,125	<i>Balance as of 31 December 2017</i>
Laba komprehensif untuk tahun berjalan	2,695,606	<i>Comprehensive income for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2018	14,978,731	<i>Balance as of 31 December 2018</i>

Pada tanggal 31 Desember 2017, selain tanah dan bangunan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

As of 31 December 2017, there is no significant difference between the fair value and carrying value of fixed assets other than land and buildings.

Pada tahun 2015, Bank juga melakukan penilaian kembali atas tanah dan bangunan di Indonesia untuk tujuan perpajakan. Penilaian kembali dilakukan atas tanah dan bangunan dengan nilai buku pajak sebelum revaluasi sebesar Rp1.917.157 dan menghasilkan keuntungan revaluasi sebesar Rp6.337.806. Pembayaran pajak final atas keuntungan revaluasi sebesar Rp190.134 dicatat mengurangi "Cadangan Revaluasi Aset".

In 2015, The Bank also performed revaluation for tax purposes over land and buildings located in Indonesia. The revaluation of the land and buildings with fiscal book value before revaluation amounting to Rp1,917,157 resulted in gain on revaluation amounting to Rp6,337,806. The payment of final tax over the gain on revaluation amounting to Rp190,134 was recorded as a deduction of "Asset Revaluation Reserve".

Penilaian kembali tanah dan bangunan untuk tujuan perpajakan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-2547/WPJ.19/2015 tanggal 18 Desember 2015. BNI melakukan penilaian kembali aset tetap dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 233/PMK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015.

Revaluation of land and buildings for tax purposes is performed after approval from Directorate General of Tax through its letter No. KEP-2547/WPJ.19/2015 dated 18 December 2015. BNI performed revaluation of fixed assets in accordance with the Finance Minister Regulation (PMK) No. 191/PMK.010/2015, dated 15 October 2015, with its amendments (PMK No. 233/PMK.03/2015) dated 21 December 2015.

Ketentuan penyusutan fiskal aset tetap setelah penilaian kembali dengan tujuan perpajakan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2016.

The provision on the fiscal depreciation of fixed assets after revaluation for tax purposes is valid from 1 January 2016.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. LIABILITAS SEGERA

19. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah			Rupiah
Kewajiban sebagai <i>issuer</i> bank (ATM)	1,526,144	2,005,480	Obligation as issuer bank (ATM)
Simpanan sementara yang belum diselesaikan	838,187	805,800	Temporary deposit transactions not yet settled
Kerjasama pihak ketiga	784,269	807,975	Third party agreements
Setoran pajak sebagai bank persepsi	268,614	227,162	Tax collection received by BNI as collecting bank
Dana setoran smartpay	110,958	76,610	Fund deposits for smartpay
Dana setoran cek	47,944	49,884	Fund deposits for cheques
Kiriman uang	24,061	30,137	Money transfers
Dana <i>Trust</i>	13,857	4,046	Fund deposits for trust
Transaksi kliring	1,766	2,551	Items for clearing
Utang Dividen	637	637	Dividend payable
Transaksi inkaso	11	30	Items for inkaso
Lainnya	31,151	62,332	Others
	3,647,599	4,072,644	
Mata uang asing			Foreign currencies
Dana <i>Trust</i>	441,270	362,919	Fund deposits for trust
Kiriman uang	22,917	398,798	Money transfers
Simpanan sementara yang belum diselesaikan	22,016	17,735	Temporary deposit transactions not yet settled
Setoran pajak sebagai bank persepsi	19,416	9,233	Tax collection received by BNI as collecting Bank
Kerjasama pihak ketiga	7,077	5,949	Third party agreements
Lainnya	-	269	Others
	512,696	794,903	
Total	4,160,295	4,867,547	Total

20. SIMPANAN NASABAH

20. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

Informasi mengenai simpanan berdasarkan pihak yang berelasi diungkapkan pada Catatan 47k.

Information with respect to transactions with related parties are disclosed in Note 47k.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah			Rupiah
Giro	125,756,778	107,973,174	Current accounts
Tabungan	181,330,603	160,401,299	Savings accounts
Deposito berjangka	154,521,744	150,304,296	Time deposits
	461,609,125	418,678,769	
Mata uang asing			Foreign currencies
Giro	42,350,175	34,259,482	Current accounts
Tabungan	14,922,998	13,639,310	Savings accounts
Deposito berjangka	33,289,904	26,170,387	Time deposits
	90,563,077	74,069,179	
Total	552,172,202	492,747,948	Total



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Perincian simpanan nasabah berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2018	2017
Rupiah	461,609,125	418,678,769
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	85,946,948	71,367,594
Euro	3,109,510	1,613,801
Dolar Singapura	556,653	483,395
Yen Jepang	515,368	436,192
Yuan China	215,094	30,320
Pound Sterling Inggris	113,893	61,289
Dolar Hong Kong	47,694	60,013
Dolar Australia	32,014	15,697
Franc Swiss	20,022	41
South Korean Won	2,994	814
Ringgit Malaysia	2,120	-
Real Arab Saudi	767	23
	90,563,077	74,069,179
Total	552,172,202	492,747,948

Simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah termasuk di dalamnya adalah giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah.

Giro wadiah dan tabungan wadiah merupakan simpanan wadiah yad-dhamanah dimana pemilik dana akan memperoleh pendapatan bonus. Jumlah giro wadiah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp2.352.084 dan Rp1.836.895, sedangkan jumlah tabungan wadiah masing-masing sebesar Rp6.482.550 dan Rp4.132.674.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

20. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

a. By type and currency (continued)

Deposits from customers based on currencies are as follows:

31 Desember/December		
2018	2017	
Rupiah	418,678,769	Rupiah
		Foreign currencies
		United States Dollar
		Euro
		Singapore Dollar
		Japanese Yen
		Chinese Yuan
		Great Britain Pound Sterling
		Hong Kong Dollar
		Australian Dollar
		Swiss Franc
		South Korean Won
		Malaysian Ringgit
		Saudi Arabian Real
	74,069,179	
Total	492,747,948	Total

Deposits from customers based on sharia principles include wadiah current accounts, wadiah savings, Mudharabah savings and Mudharabah deposits.

Wadiah current accounts and wadiah savings represent a wadiah yad-dhamanah deposit in which the customers are entitled to receive bonus income. The balances of wadiah current accounts as of 31 December 2018 and 2017 were Rp2,352,084 and Rp1,836,895, respectively, while the balances of wadiah savings were Rp6,482,550 and Rp4,132,674, respectively.

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Government Regulation No. 3 dated 13 October 2008, the Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criteria.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

20. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000 untuk per nasabah per bank.

Based on Government Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposits covered by LPS is customer deposits up to Rp2,000 per depositor per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, BNI adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

As of 31 December 2018 and 2017, BNI was a participant of above guarantee program.

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah			Rupiah
Giro	33,071,175	28,015,394	Current accounts
Tabungan	1,355,852	416,711	Savings accounts
Deposito berjangka	24,092,593	35,889,666	Time deposits
	58,519,620	64,321,771	
Mata uang asing			Foreign currencies
Giro	17,760,645	11,112,418	Current accounts
Tabungan	38,330	105,062	Savings accounts
Deposito berjangka	11,145,279	12,216,829	Time deposits
	28,944,254	23,434,309	
Total pihak berelasi	87,463,874	87,756,080	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Giro	92,685,603	79,957,780	Current accounts
Tabungan	179,974,751	159,984,588	Savings accounts
Deposito berjangka	130,429,151	114,414,630	Time deposits
	403,089,505	354,356,998	
Mata uang asing			Foreign currencies
Giro	24,589,530	23,147,064	Current accounts
Tabungan	14,884,668	13,534,248	Savings accounts
Deposito berjangka	22,144,625	13,953,558	Time deposits
	61,618,823	50,634,870	
Total pihak ketiga	464,708,328	404,991,868	Total third parties
Total	552,172,202	492,747,948	Total



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

20. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

c. Tabungan berdasarkan jenis

c. Savings accounts by type

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Tabungan BNI	189,050,601	169,105,299	BNI savings accounts
Tabungan Syariah	4,821,308	2,850,286	Sharia savings accounts
Tabungan Haji	2,381,692	2,085,024	Haji savings accounts
Total	196,253,601	174,040,609	Total

d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan

d. Deposits blocked and pledged as collateral

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Giro	25,268,697	21,252,227	Current accounts
Tabungan	30,755,886	31,751,511	Savings accounts
Deposito berjangka	7,181,151	8,056,585	Time deposits
Total	63,205,734	61,060,323	Total

e. Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun

e. Annual interest rates and profit sharing

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	Dolar Singapura/ Singapore Dollar %	Euro %	Yen Jepang/ Japanese Yen %	
2018	0.00 - 9.50	0.00 - 4.00	0.00 - 0.50	0.00 - 3.68	0.01 - 0.45	2018
2017	0.00 - 8.10	0.00 - 2.35	0.00 - 0.75	0.00 - 0.10	0.00 - 0.40	2017

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Informasi mengenai simpanan berdasarkan pihak yang berelasi diungkapkan pada Catatan 47I.

Information with respect to transactions with related parties are disclosed in Note 47I.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah			Rupiah
Pinjaman pasar uang antar bank	-	20,000	Interbank money market
Giro	989,135	1,132,324	Current accounts
Deposito berjangka	107,931	105,591	Time deposits
Negotiable Certificate of Deposit	938,665	4,247,857	Negotiable Certificate of Deposits
Simpanan lainnya	436,681	534,399	Other deposits
	2,472,412	6,040,171	
Mata uang asing			Foreign currencies
Pinjaman pasar uang antar bank	8,458,845	3,332,300	Interbank money market
Giro	1,138,965	1,237,780	Current accounts
Deposito berjangka	1,214,741	407,185	Time deposits
Simpanan lainnya	589,532	716,771	Other deposits
	11,402,083	5,694,036	
Total	13,874,495	11,734,207	Total

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Simpanan dari bank lain berdasarkan prinsip syariah termasuk di dalamnya adalah giro wadiah dan deposito *Mudharabah*.

Giro *wadiah* merupakan simpanan *wadiah yad-dhamanah* dimana pemilik dana akan memperoleh pendapatan bonus. Jumlah giro *wadiah* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp16.731 dan Rp47.756.

Perincian simpanan dari bank lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2018	2017
Rupiah	2,472,412	6,040,171
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	7,646,966	3,568,734
Yen Jepang	2,934,473	1,544,904
Dolar Singapura	705,051	534,165
Euro	80,581	33,715
Dolar Hong Kong	18,166	11,248
Pound Sterling Inggris	13,244	1,233
Real Arab Saudi	1,100	19
Franc Swiss	1,090	5
Dolar Australia	724	10
Dolar Kanada	600	3
Won Korea Selatan	88	-
	11,402,083	5,694,036
Total	13,874,495	11,734,207

b. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/December	
	2018	2017
Pihak berelasi		
Rupiah		
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	144,010	982,024
Giro	1,690	21,990
	145,700	1,004,014
Mata uang asing		
Pinjaman pasar uang antar bank	2,704,878	1,151,881
Giro	117,591	90,261
	2,822,469	1,242,142
Total pihak berelasi	2,968,169	2,246,156

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

a. By type and currency (continued)

Deposits from other banks based on sharia principles include wadiah current accounts and *Mudharabah* deposits.

Wadiah current accounts represent a wadiah yad-dhamanah deposit in which the customers are entitled to receive bonus income. The balances of wadiah current accounts as of 31 December 2018 and 2017 were Rp16,731 and Rp47,756, respectively.

Deposits from other banks based on currencies are as follows:

31 Desember/December	
2018	2017
Rupiah	6,040,171
Foreign currencies	
United States Dollar	3,568,734
Japanese Yen	1,544,904
Singapore Dollar	534,165
Euro	33,715
Hong Kong Dollar	11,248
Great Britain Pound Sterling	1,233
Saudi Arabian real	19
Swiss Franc	5
Australian Dollar	10
Canadian Dollar	3
South Korean Won	-
	5,694,036
Total	11,734,207

b. By relationship

	31 Desember/December	
	2018	2017
Related parties		
Rupiah		
<i>Negotiable Certificate of Deposits</i>	144,010	982,024
Current accounts	1,690	21,990
	145,700	1,004,014
Foreign currencies		
Interbank money market	2,704,878	1,151,881
Current accounts	117,591	90,261
	2,822,469	1,242,142
Total related parties	2,968,169	2,246,156



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

b. Berdasarkan hubungan (lanjutan)

b. By relationship (continued)

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Pihak ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	794,655	3,265,833	<i>Negotiable Certificate of Deposits</i>
Giro	987,445	1,110,334	<i>Current accounts</i>
Deposito berjangka	107,931	105,591	<i>Time deposits</i>
Simpanan lainnya	436,681	534,399	<i>Other deposits</i>
Pinjaman pasar uang antar bank	-	20,000	<i>Interbank money market</i>
	2,326,712	5,036,157	
Mata uang asing			Foreign currencies
Pinjaman pasar uang antar bank	5,753,967	2,180,419	<i>Interbank money market</i>
Giro	1,021,374	1,100,197	<i>Current accounts</i>
Deposito berjangka	1,214,741	407,185	<i>Time deposits</i>
Simpanan lainnya	589,532	764,093	<i>Other deposits</i>
	8,579,614	4,451,894	
Total pihak ketiga	10,906,326	9,488,051	<i>Total third parties</i>
Total	13,874,495	11,734,207	Total

c. Berdasarkan tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun

c. By annual interest rates and profit sharing

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	Yen Jepang/ Japanese Yen %	Dolar Singapura/ Singapore Dollar %	
2018	0.00 - 8.40	0.00 - 3.39	0.08 - 0.33	0.00 - 2.11	2018
2017	0.00 - 8.40	0.00 - 2.21	0.19 - 0.28	1.61 - 2.00	2017

d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan

d. Deposits blocked and pledged as collateral

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Giro	7,048	59,482	<i>Current accounts</i>
Tabungan	31,858	61,131	<i>Savings accounts</i>
Deposito berjangka	35,752	35,210	<i>Time deposits</i>
Total	74,658	155,823	Total

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI**

**22. SECURITIES SOLD UNDER AGREEMENTS TO
REPURCHASE**

a. Berdasarkan jenis

a. By type

31 Desember/December 2018

Counterparty	Jenis Sekuritas/ Type of Securities	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Start Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Nilai Pembelian Kembali/ Repurchase Amount	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expenses	Nilai Bersih/ Net Value
Pihak berelasi/Related parties							
Rupiah							
Bank Mandiri	SDBI	100,000	05/12/2018	07/01/2019	87,608	105	87,503
Pihak ketiga/Third parties							
Rupiah							
BNP Paribas Jakarta	OBN	395,500	09/09/2016	15/11/2020	561,956	126,273	435,683
Bank Indonesia	SBI	2,000,000	07/12/2018	04/01/2019	1,759,132	1,019	1,758,113
Bank Indonesia	OBN	6,000,000	07/12/2018	04/01/2019	5,741,348	3,326	5,738,022
Bank Indonesia	OBN	10,000,000	19/12/2018	16/01/2019	9,206,782	26,670	9,180,112
		18,395,500			17,269,218	157,288	17,111,930
Mata uang asing/Foreign currencies							
BNP Paribas Paris	OBN	3,830,918	28/03/2018	28/02/2019	3,470,529	15,140	3,455,389
Goldman Sachs	OBN	287,600	27/11/2018	21/11/2019	219,583	1,675	217,908
ING Bank N.V., Amsterdam	OBN	431,400	20/12/2018	21/03/2019	364,803	2,940	361,863
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	OBN	359,500	26/09/2018	03/04/2019	294,072	4,336	289,736
		4,909,418			4,348,987	24,091	4,324,896
Total pihak ketiga/Third parties		22,514,018			21,618,205	181,379	21,436,826
Total		23,404,918			21,705,813	181,484	21,524,329

31 Desember/December 2017

Counterparty	Jenis Sekuritas/ Type of Securities	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Start Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Nilai Pembelian Kembali/ Repurchase Amount	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expenses	Nilai Bersih/ Net Value
Pihak ketiga/Third parties							
Rupiah							
PT Bank BNP Paribas	OBN	395,500	09/09/2016	15/11/2020	561,956	153,976	407,980
PT Bank BNP Paribas	OBN	582,500	09/09/2016	15/09/2018	661,904	47,280	614,624
		978,000			1,223,860	201,256	1,022,604
Mata uang asing/Foreign currencies							
PT Bank BNP Paribas	OBN	1,696,950	19/08/2014	15/05/2018	1,407,382	39,920	1,367,462
Total		2,674,950			2,631,242	241,176	2,390,066



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**22. SECURITIES SOLD UNDER AGREEMENTS TO
REPURCHASE (continued)**

Tingkat suku bunga tetap tahunan :

Annual fixed interest rates :

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	Contractual interest rate: 2018 2017
Suku bunga kontrak: 2018	6.99 - 7.55	2.77 - 3.25	
2017	7.44 - 7.55	2.66	

23. LIABILITAS AKSEPTASI

23. ACCEPTANCES PAYABLES

a. Berdasarkan pihak dan mata uang

a. By party and currency

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah			Rupiah
Bank	1,337,288	773,640	Banks
Kreditur non-bank	167,970	188,022	Non-bank creditors
	1,505,258	961,662	
Mata uang asing			Foreign currencies
Bank	2,860,755	3,325,614	Banks
Kreditur non-bank	50,600	220,055	Non-bank creditors
	2,911,355	3,545,669	
Total	4,416,613	4,507,331	Total

Perincian liabilitas akseptasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Acceptances payables based on currencies are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah	1,505,258	961,662	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	2,554,941	3,359,749	United States Dollar
Euro	251,018	143,395	Euro
Yen Jepang	54,405	-	Japanese Yen
Dolar Australia	25,470	-	Australian Dollar
Yuan Cina	23,410	19,246	Chinese Yuan
Dolar Singapura	2,111	11,370	Singapore Dollar
Franc Swiss	-	11,909	Swiss Franc
	2,911,355	3,545,669	
Total	4,416,613	4,507,331	Total

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

23. ACCEPTANCES PAYABLE (continued)

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah	647,390	461,444	Rupiah
Mata uang asing	606,557	699,537	Foreign currencies
Total pihak berelasi	1,253,947	1,160,981	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	857,868	500,218	Rupiah
Mata uang asing	2,304,798	2,846,132	Foreign currencies
Total pihak ketiga	3,162,666	3,346,350	Total third parties
Total	4,416,613	4,507,331	Total

24. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

24. ACCRUED EXPENSES

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari:

Accrued expenses consist of the following:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Biaya teknologi dan telekomunikasi	264,109	193,247	Technology and telecommunication expenses
Biaya kantor	307,159	383,168	Office expenses
Biaya <i>loyalty</i>	89,411	83,974	Loyalty expenses
Kewajiban sebagai bank penerbit kepada <i>merchant</i>	73,778	166,770	Liabilities as issuing bank to merchants
Deposito <i>Mudharabah</i>	46,899	49,305	Mudharabah time deposits
Biaya promosi	27,786	35,502	Sales promotion expenses
Sukuk <i>Mudharabah</i>	-	4,436	Mudharabah sukuk
Lain-lain	67,205	55,077	Others
Total	876,347	971,479	Total

25. PENYISIHAN

25. PROVISIONS

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	131,403	145,918	Estimated losses from commitments and contingencies
Penyisihan atas perkara hukum	46,116	46,488	Provision for legal cases
Total	177,519	192,406	Total

a. Perubahan penyisihan atas perkara hukum adalah sebagai berikut:

a. The movements of the provision for legal cases are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Saldo awal	46,488	47,608	Beginning balance
Pembalikan selama tahun berjalan	(372)	(1,120)	Reversal during the year
Saldo akhir	46,116	46,488	Ending balance



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

25. PENYISIHAN (lanjutan)

- a. Perubahan penyisihan atas perkara hukum adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Bank saat ini masih menghadapi permasalahan hukum diantaranya dengan debitur, pemilik dana dan/atau pihak ketiga. Saat ini permasalahan hukum tersebut masih dalam proses/upaya hukum.

Jumlah klaim terhadap Bank dan estimasi biaya penyelesaian perkara atas tuntutan hukum yang belum selesai pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp33.275 dan Rp44.726. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Bank telah membentuk cadangan masing-masing sebesar Rp46.116 dan Rp46.488.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan atas perkara hukum di atas telah memadai.

- b. Perubahan estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2018	2017
Saldo awal (Pembalikan)/penyisihan selama tahun berjalan	145,918	108,511
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(23,954)	42,940
	9,439	(5,533)
Saldo akhir	131,403	145,918

Manajemen berpendapat bahwa estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi di atas telah memadai.

25. PROVISION (continued)

- a. The movements of the provision for legal cases are as follows: (continued)

The Bank has a number of outstanding litigation cases, including lawsuits with debtors, fund owners and/or third parties. Currently, litigation cases are still in the legal process.

The Bank's total potential financial exposure and estimation on settlement of legal cases arising from outstanding lawsuits as of 31 December 2018 and 2017 amounted to Rp33,275 and Rp44,726, respectively. As of 31 December 2018 and 2017, the Bank recorded a provision amounting to Rp46,116 and Rp46,488, respectively.

Management believes that the provision for legal cases is adequate.

- b. The movements of estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

Management believes that the estimated losses on commitments and contingencies are adequate.

26. LIABILITAS LAIN-LAIN

26. OTHER LIABILITIES

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Utang ke pemegang polis	10,963,857	10,295,901	Obligation to policy holders
Utang bunga	927,446	610,940	Interest payable
Kewajiban pada pihak ketiga	571,156	473,475	Liability to third parties
Setoran jaminan	444,764	1,658,972	Guarantee deposits
Utang nasabah - Entitas anak	310,216	530,879	Payable to customers - Subsidiary
Rekening dalam penyelesaian	260,513	199,014	Unsettled account
Pendapatan yang belum diakui	164,019	86,919	Unearned income
Utang reasuransi dan komisi	127,812	53,391	Reinsurance payable and commission
Lain - lain*	838,682	821,223	Others*
Total	14,608,465	14,730,714	Total

*) Termasuk di dalamnya pencadangan atas akun *suspense*.

*) Including the allowance of *suspense account*.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. PERPAJAKAN

27. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Pajak penghasilan badan			Corporate income tax
BNI	1,623,560	619,751	BNI
Entitas Anak	858	2,972	Subsidiaries
Total	1,624,418	622,723	Total

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Pajak penghasilan badan			Corporate income tax
BNI			BNI
Pasal 29	398,615	6,044	Article 29
Entitas Anak			Subsidiaries
Pasal 25	859	7,396	Article 25
Pasal 29	16,282	6,607	Article 29
Total pajak penghasilan badan	415,756	20,047	Total corporate income tax
Pajak lainnya			Other taxes
BNI	35,367	25,910	BNI
Entitas Anak	29,941	34,468	Subsidiaries
Total pajak lainnya	65,308	60,378	Total other taxes
Total	481,064	80,425	Total

c. Beban pajak

c. Tax expense

	31 Desember/December		
	2018	2017	
BNI			BNI
Kini	3,986,253	3,143,534	Current
Hasil pemeriksaan pajak tahun lalu	781,881	-	Prior year tax examination
Tangguhan	(188,370)	138,115	Deferred
Pajak penghasilan - BNI	4,579,764	3,281,649	Income tax - BNI
Entitas Anak			Subsidiaries
Kini	180,127	149,845	Current
Tangguhan	(30,939)	(36,699)	Deferred
Pajak penghasilan - Entitas Anak	149,188	113,146	Income tax - Subsidiaries
Total	4,728,952	3,394,795	Total



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

27. TAXATION (continued)

c. Beban pajak (lanjutan)

c. Tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the profit before income tax is as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	19,820,715	17,165,387	Consolidated income before income tax
Laba sebelum pajak penghasilan dari entitas anak	(778,789)	(837,893)	Income before income tax of subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan - BNI	19,041,926	16,327,494	Income before income tax - BNI
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	3,808,385	3,265,500	Tax calculated at applicable tax rates
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak			Expenses not deductible for tax purposes
- Kenikmatan karyawan	36,310	35,263	Employees' fringe benefits -
- Keuntungan atas reksadana	(69,274)	(63,250)	Gain on mutual fund -
- Lain-lain	22,462	44,136	Others -
Beban pajak BNI	3,797,883	3,281,649	Tax expense - BNI
Koreksi hasil pemeriksaan pajak penghasilan tahun sebelumnya - BNI	781,881	-	Correction of income tax assessment on previous year - BNI
Beban pajak anak	149,188	113,146	Tax expense - Subsidiaries
	4,728,952	3,394,795	

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi BNI dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the income before tax as shown in BNI's profit and loss and estimated taxable income is as follows:

Grup	31 Desember/December		
	2018	2017	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	19,820,715	17,165,387	The Group Consolidated income before income tax
Laba sebelum pajak penghasilan dari Entitas Anak	(778,789)	(837,893)	Income before income tax of Subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan - BNI	19,041,926	16,327,494	Income before income tax - BNI
Beda waktu			Timing differences
- Penyusutan aset tetap	10,740	(34,293)	Depreciation of fixed assets -
- Pencadangan (pembalikan) kerugian penurunan nilai aset produktif - pinjaman yang diberikan	919,158	(1,133,731)	Provision for (reversal of) impairment losses on earning assets - loans

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

27. TAXATION (continued)

c. Beban pajak (lanjutan)

c. Tax expense (continued)

	31 Desember/December		
	2018	2017	
- Pembalikan cadangan hukum, kecurangan (<i>fraud</i>) dan lainnya	(2,562)	(1,975)	Reversal of allowance for legal, fraud and others -
- Laba yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan dan transaksi derivatif	(207,859)	(304,924)	Unrealized gain on trading securities and derivative transactions -
- (Pembalikan) penambahan cadangan imbalan kerja	(54,970)	461,835	(Reversal of) provision for allowance employee benefits -
- Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif selain pinjaman yang diberikan	277,342	322,510	Provison for impairment earning assets - other than loans -
	941,849	(690,578)	
Beda tetap			Permanent differences
- Kenikmatan karyawan	181,551	176,313	Employees' fringe benefits -
- Keuntungan atas reksadana	(346,370)	(316,250)	Gain on mutual funds -
- Lain-lain	112,307	220,685	Others -
	(52,512)	80,748	
Penghasilan kena pajak - BNI	19,931,263	15,717,664	Taxable income - BNI

Beban pajak penghasilan tahun berjalan dan taksiran utang pajak penghasilan BNI adalah sebagai berikut:

Taxable income for the current year and the estimated corporate income tax payable are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Beban pajak penghasilan sesuai tarif pajak yang berlaku			Income tax based on the applicable tax rates
20% x Rp19.931.263	3,986,253	-	20% x Rp19,931,263
20% x Rp15.717.664	-	3,143,534	20% x Rp15,717,664
	3,986,253	3,143,534	Corporate income tax expense
Beban pajak penghasilan Pajak dibayar di muka	(3,587,638)	(3,137,490)	Prepaid tax
Utang pajak penghasilan - BNI	398,615	6,044	Corporate income tax payable - BNI



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak (lanjutan)

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2007 tertanggal 28 Desember 2007, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh PP No. 77 Tahun 2013 tertanggal 21 November 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka mengatur bahwa perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi pajak penghasilan yang ada dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yaitu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian, saham tersebut harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak serta masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh.

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2015, Pemerintah menerbitkan PP No. 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. PP ini merubah persyaratan untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi pajak penghasilan yang ada dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yaitu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, saham tersebut harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak serta masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh tahun pajak.

27. TAXATION (continued)

c. Tax expense (continued)

Based on UU No. 36 Year 2008 regarding Income Tax, Government Regulation (GR) No. 81 Year 2007 dated 28 December 2007 which subsequently has been revoked and replaced by GR No. 77 Year 2013 dated 21 November 2013 regarding Reduction of Tax Rate of Income Tax Resident Corporate Tax Payers and Regulation of the Minister of Finance No. 238/PMK.03/2008 dated 30 December 2008 regarding Procedures for Implementing and Supervising the Granting of Reduction of the Tax Rate of Income Tax Resident Corporate Tax Payers in the Form of Public Listed Company, a public listed company in Indonesia can obtain a reduction of income tax rate by 5% lower from the highest income tax rate by fulfilling several requirements, which include at the minimum 40% of total issued and fully paid in capital shares are traded in Indonesia Stock Exchange and must be recorded in depository and settlement institution and the shares are owned by at least 300 parties and each party can only own less than 5% of the total issued and fully paid shares.

The above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred and eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year.

Subsequently on 3 August 2015, the Government issued GR No. 56 Year 2015 regarding the Changes on GR No. 77 Year 2013 regarding the Reduction of Tax Rate of Income Tax Resident Corporate Tax Payers. This GR changed the requirements to obtain a reduction of income tax rate by 5% lower from the highest income tax rate by fulfilling several requirements, which include at the minimum 40% of total issued and fully paid in capital shares are traded in Indonesia Stock Exchange and the shares are owned by at least 300 parties and each party can only own less than 5% of the total issued and fully paid shares.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak (lanjutan)

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu)

Berdasarkan Laporan Bulanan Kepemilikan Saham No DE/I/2019-0021 dan Formulir No. X.H.I-2 tanggal 3 Januari 2019 dan 3 Januari 2018 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom, atas kepemilikan saham BNI selama tahun 2018 dan 2017, semua kriteria untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut di atas telah terpenuhi.

Pajak penghasilan badan BNI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak 20%.

d. Aset pajak tangguhan - neto

Aset pajak tangguhan pada tanggal-tanggal tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 merupakan pengaruh beda pajak dengan rincian sebagai berikut:

27. TAXATION (continued)

c. Tax expense (continued)

The above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred and eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year.

Based on the Monthly Shareholding Report Number DE/I/2019-0021 and Form Number X.H.I-2 dated 3 January 2019 and 3 January 2018 from the Registrar, Datindo Entrycom, regarding BNI's shares during the years 2018 and 2017, BNI has met all criteria mentioned above to obtain a facility of tax rate reduction.

BNI's corporate income tax for the year ended 31 December 2018 and 2017 are calculated using the tax rate of 20%.

d. Deferred tax assets - net

The deferred tax assets as 31 Desember 2018 and 2017 represent the tax effects on the following:

31 Desember/December 2018					
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian/ Credited/ (charged) to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance	
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual	(5,511)	-	796,682	791,171	Unrealized (gain) loss on available-for-sale-securities
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif- pinjaman yang diberikan	285,159	183,832	-	468,991	Allowance for impairment losses on earning assets - loans
Cadangan imbalan kerja	405,674	(10,994)	(125,650)	269,030	Allowance for employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain pinjaman yang diberikan	183,518	55,468	-	238,986	Allowance for impairment losses on earning assets - other than loans
Cadangan hukum, kecurangan (fraud) dan lainnya	10,770	(512)	-	10,258	Allowance for legal, fraud and others
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan dan transaksi derivatif	(74,331)	(41,572)	-	(115,903)	Unrealized (gain) loss on trading securities and derivative transactions
Penyusutan aset tetap	(40,979)	2,148	(108,947)	(147,778)	Depreciation of fixed assets
Aset pajak tangguhan BNI - neto	764,300	188,370	562,085	1,514,755	Net deferred tax assets - BNI
Aset pajak tangguhan Entitas Anak - neto	126,603			161,611	Net deferred tax assets - Subsidiaries
Aset pajak tangguhan konsolidasian - neto	890,903			1,676,366	Net consolidated deferred tax assets



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

27. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan - neto (lanjutan)

d. Deferred tax assets - net (continued)

31 Desember/December 2017					
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian/ Credited/ (charged) to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance		
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual	378,771	-	(384,282)	(5,511)	Unrealized (gain) loss on available-for-sale securities
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif- pinjaman yang diberikan	511,905	(226,746)	-	285,159	Allowance for impairment losses on earning assets - loans
Cadangan imbalan kerja	276,083	92,367	37,224	405,674	Allowance for employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain pinjaman yang diberikan	119,016	64,502	-	183,518	Allowance for impairment losses on earning assets - other than loans
Cadangan hukum, kecurangan (fraud) dan lainnya	11,165	(395)	-	10,770	Allowance for legal, fraud and others
(Laba)rugi yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan dan transaksi derivatif	(13,347)	(60,984)	-	(74,331)	Unrealized (gain) loss on trading securities and derivative transactions
Penyusutan aset tetap	(34,120)	(6,859)	-	(40,979)	Depreciation of fixed assets
Aset pajak tangguhan BNI - neto	1,249,473	(138,115)	(347,058)	764,300	Net deferred tax assets - BNI
Aset pajak tangguhan Entitas Anak - neto	82,035			126,603	Net deferred tax assets - Subsidiaries
Aset pajak tangguhan konsolidasian - neto	1,331,508			890,903	Net consolidated deferred tax assets

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan seluruhnya.

Management believes that deferred tax assets are fully realisable.

e. Surat ketetapan pajak

e. Tax assessment letters

Pada tanggal 5 Februari 2018, BNI telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh pasal 21, PPN dan Surat Tagihan Pajak ("STP") untuk tahun fiskal 2015 sebesar Rp74.892 (termasuk denda). Pada tanggal 2 Maret 2018, BNI telah melakukan pembayaran penuh atas seluruh SKPKB tersebut dan tidak mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

On 5 February 2018, BNI received SKPKB which stated there was an under payment of PPh article 21, PPN and Tax Collection Letter ("STP") for fiscal year 2015 amounting to Rp74,892 (including penalties). On 2 March 2018, BNI made a full payment for the above SKPKB and no objection was filed to the Directorate General of Tax.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Pada tanggal 5 Februari 2018, BNI telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2015 sebesar Rp2.461.364 (termasuk denda) dan disetujui BNI sebesar Rp162.130. Pada tanggal 2 Maret 2018, BNI telah melakukan pembayaran sebagian SKPKB sebesar Rp1.785.691. Pada tanggal 4 Mei 2018, BNI mengajukan surat keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ke Direktorat Jenderal Pajak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan atas surat keberatan yang diajukan oleh BNI tersebut. Bank berkeyakinan bahwa keberatan atau banding yang diajukan dapat dikabulkan sehingga Bank tidak membentuk cadangan atas SKPKB tersebut.

Pada tanggal 15 Juni 2017 BNI telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan, PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh Pasal 26, PPh pasal 4 ayat (2) dan Surat Tagihan Pajak ("STP") untuk tahun fiskal 2014 sebesar Rp145.330 (termasuk denda). Pada tanggal 14 Juli 2017, BNI telah melakukan pembayaran penuh atas seluruh SKPKB tersebut dan tidak mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tanggal 16 Desember 2014, BNI menerima SKPKB atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2013 sebesar Rp619.751 (termasuk denda). Pada tanggal 30 Desember 2014, BNI telah melakukan pembayaran penuh atas SKPKB tersebut. Pada tanggal 12 Maret 2015, BNI telah mengajukan surat keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak terhadap SKPKB PPh tersebut. Pada tanggal 7 Maret 2016, BNI menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang menolak keberatan atas SKPKB PPh Badan tersebut. Atas keputusan penolakan keberatan tersebut. Pada tanggal 3 Juni 2016, BNI telah mengajukan permohonan banding atas penolakan keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak. Pada bulan Januari 2018, BNI menerima salinan putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding BNI.

Pada tanggal 16 Maret 2018, BNI telah mengajukan Memori Peninjauan Kembali (PK) atas penolakan banding tersebut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) melalui Pengadilan Pajak.

27. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

On 5 February 2018, BNI received tax assesment for underpayment of tax (SKPKB) which stated there was an under payment of corporate income tax for fiscal year 2015 amounting to Rp2,461,364 (including penalties) which is partially agreed by BNI for amount of Rp162,130. On 2 March 2018, BNI made a partial payment for amount Rp1,785,691. On 4 May 2018, BNI submitted objection letter for these SKPKB to the Directorate General of Tax. Up to the date of this consolidated financial statements, Directorate General of Tax has not yet issued any decision on the objection letter filed by BNI. The Bank believes the tax objection or appeal submitted will be accepted therefore Bank did not provide any provision for the SKPKB.

On 15 June 2017, BNI received SKPKB which stated there was an under payment of corporate income tax, PPN, PPh article 21, PPh article 22, PPh article 23, PPh article 26, PPh article 4 paragraph (2) and Tax Collecttion Letter ("STP") for fiscal year 2014 amounting to Rp145,330 (including penalties). On 14 July 2017, BNI has made a full payment for the above SKPKB and no objection was filed to the Directorate General of Tax.

On 16 December 2014, BNI received SKPKB which stated that there was an underpayment of corporate income tax for fiscal year 2013 amounting to Rp619,751 (including penalties). On 30 December 2014, BNI made a full payment for the above SKPKB. On 12 March 2015, BNI submitted an objection letter to the Directorate General of Tax for the above underpayment. On 7 March 2016, BNI received a letter from Directorate General of Tax which rejected the objection of the above SKPKB corporate income tax. On 3 June 2016, BNI submitted the request for appeal on the rejection of the above objection to the Tax Court. In January 2018, BNI received a copy of the Tax Court Decision which rejected BNI's appeal.

On 16 March 2018, BNI filed a Memorandum of Review against the appeal rejection to The Supreme Court through The Tax Court.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Berdasarkan informasi website resmi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 2018, majelis hakim telah menolak permohonan peninjauan kembali dari BNI. Bank telah membebaskan estimasi tagihan pajak penghasilan ini di beban pajak kini tahun berjalan.

Pada tanggal 28 November 2012, BNI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan Badan ("PPH Badan") untuk tahun fiskal 2010 sebesar Rp1.633.716 (termasuk denda). Pada tanggal 26 Desember 2012, BNI telah melakukan pembayaran sebagian atas SKPKB PPh Badan sebesar Rp9.798. Pada tanggal 19 Februari 2013, BNI telah mengajukan surat keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak terhadap sisa SKPKB PPh Badan tersebut. Pada tanggal 26 Februari 2013, BNI telah melakukan pembayaran sebagian atas sisa SKPKB PPh Badan sebesar Rp816.858. Pada tanggal 21 Februari 2014, BNI menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang menolak keberatan atas SKPKB PPh Badan tersebut. Pada tanggal 16 Mei 2014, BNI telah mengajukan permohonan banding atas penolakan keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 16 Maret 2016, Pengadilan Pajak telah membacakan putusan banding yang mengabulkan permohonan banding BNI.

Pada tanggal 8 April 2016, BNI menerima salinan putusan banding. Terhadap pembayaran sebesar Rp816.858 atas SKPKB telah dikompensasikan ke PPh Pasal 29 PPh Badan tahun pajak 2015, angsuran PPh Pasal 25 bulan April, Mei, dan Juni 2016.

Direktorat Jenderal Pajak mengajukan Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Juni 2016 kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak terhadap Putusan Pengadilan Pajak tanggal 16 Maret 2016. Sehubungan dengan diterimanya Memori Peninjauan Kembali tersebut, maka BNI memberikan jawaban dalam bentuk Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui surat pada tanggal 9 Mei 2017 yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung tanggal 30 Agustus 2017, majelis hakim telah menolak permohonan peninjauan kembali Direktorat Jenderal Pajak tersebut.

27. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

Based on information of The Supreme Court's official website dated 25 October 2018, the Panel Judges has rejected the application review of BNI. Bank has recognized the expense of estimated claim for tax refund as current tax expense during the current financial year.

On 28 November 2012, BNI received Tax Assessment Letter ("SKPKB") which stated that there was an underpayment of corporate income tax for fiscal year 2010 amounting to Rp1,633,716 (including penalties). On 26 December 2012, BNI made a partial payment amounting to Rp9,798. On 19 February 2013, BNI submitted an objection letter to the Directorate General of Tax for the remaining underpayment. On 26 February 2013, BNI has made a partial payment of the remaining underpayment amounting to Rp816,858. On 21 February 2014, BNI received a letter from the Directorate General of Tax which rejected the objection of the above SKPKB. On 16 May 2014, BNI submitted the request for appeal on the rejection of the above objection to the Tax Court. On 16 March 2016, the Tax Court has read out the decision on appeal which granted BNI's appeal.

On 8 April 2016, BNI received a copy of the appeal decision. The payment of Rp816,858 on the SKPKB has been compensated against the Article 29 of the Corporate income tax year 2015, Installment of Income Tax Article 25 of April, May, and June 2016.

The Directorate General of Tax filed a Memorandum of Review dated 28 June 2016 to the Supreme Court through the Tax Court on Tax Court Decision on 16 March 2016. In relation to the receipt of such a Recognition Memory, BNI provided a response in the form of Counter Memory Review back to the Supreme Court through letter dated 9 May 2017 stating that the decision of the Tax Court is clearly in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. Based on Supreme Court Decision Letter dated 30 August 2017, the Panel Judges has rejected the application review of the Directorate General of Tax.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

28. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

28. SECURITIES ISSUED

a. Berdasarkan jenis

a. By type

	31 Desember/December			
	2018		2017	
	Saldo/ Balance	Peringkat/ Rating *)	Saldo/ Balance	Peringkat/ Rating *)
Obligasi-BNI, setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp956 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp1.182 pada tanggal 31 Desember 2017.	2,987,464	idAAA*)	2,986,279	idAAA*)

*Bonds-BNI, net of
unamortized issuance cost amounting to
Rp956 as of 31 December 2018
and Rp1,182 as of 31 December 2017,
respectively*

*) *Pefindo*

*) *Pefindo*

Pada tanggal 22 Juni 2017, BNI telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK melalui surat nomor S-349/D.04/2017 untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BNI Rupiah Tahap I Tahun 2017 ("Obligasi"). Nilai obligasi yang diterbitkan sebesar Rp3.000.000, jangka waktu 5 tahun, dengan kupon sebesar 8% per tahun yang akan dibayarkan secara triwulanan. Obligasi BNI diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2017. Pembayaran kupon pertama kepada para pemegang obligasi telah dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017.

On 22 June 2017, BNI obtained an effective statement from OJK through letter number S-349/D.04/2017 to issue Continuous Bonds I BNI Rupiah Phase I Year 2017 ("Bonds"). The value of bonds issued amounted to Rp3,000,000 with term of 5 years and coupon of 8% per annum to be paid quarterly. BNI Bonds was issued on 11 July 2017 and listed on the Indonesia Stock Exchange on 12 July 2017. The first coupon payment to bondholders has been made on 11 October 2017.

Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT BCA Sekuritas. Bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Acting as Underwriters are PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas and PT BCA Sekuritas. Acting as Trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sesuai dengan POJK No. 07/2017 dan Peraturan No.IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, BNI telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") untuk periode 25 April 2017 sampai dengan 1 April 2018 sesuai dengan suratnya No. RC-393/PEF-DIR/IV/2017 tanggal 25 April 2017, dengan peringkat idAAA (Triple A). BNI akan melakukan pemeringkatan atas obligasi yang diterbitkan setiap tahun selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas.

In accordance with POJK No. 07/2017 and Regulation No.IX.C.11, for the issuance of this Bond, BNI obtained the rating of long-term debt from PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") for the period 25 April 2017 until 1 April 2018, through letter No. RC-393/PEF-DIR/IV/2017 dated 25 April 2017, with idAAA rating (Triple A). BNI will obtain a rating of the bonds issued annually as long as the obligations on such securities have not been paid off.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

28. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

28. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

a. By type (continued)

Dana obligasi setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan bank untuk ekspansi bisnis terutama penyaluran kredit.

Proceeds from the issuance of the bond after deducting expenses was used by the Bank for business expansion, in particular for loan granting.

Selama jangka waktu obligasi dan seluruh jumlah pokok obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah bunga obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, BNI berjanji dan mengikatkan diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

During the term of the bonds and the entire principal amount of the bonds has not been fully repaid and/or the full amount of bonds interest and other payment obligations (if any) have not been fully paid under the terms of the Trustee Agreement, BNI promises and binds that without the written approval of the Trust Agent, will not do the following:

- melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi; atau
- mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi; yang secara material akan mempunyai akibat negatif.

- merger, consolidation and/or acquisition; or
- permit or give consent to Subsidiaries (if any) for merger, consolidation and/or acquisition; which will materially have negative consequences.

b. Berdasarkan mata uang

b. By currency

	31 Desember/December	
	2018	2017
Rupiah Obligasi-BNI, setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp956 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp1.182 pada tanggal 31 Desember 2017	2,987,464	2,986,279

Rupiah
Bonds-BNI,
net of unamortized discount cost of
Rp956 as of 31 December 2018
and Rp1,182 as of
31 December 2017

c. Berdasarkan hubungan

c. By relationship

	31 Desember/December	
	2018	2017
Pihak berelasi		
Rupiah	1,268,596	644,746
Pihak ketiga		
Rupiah	1,718,868	2,341,533
Total	2,987,464	2,986,279

Related parties
Rupiah

Third parties
Rupiah

Total

d. Tingkat suku bunga per tahun

d. Annual interest rates

	Rupiah/ Rupiah %	
2018	8.00	2018
2017	8.00	2017

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. PINJAMAN YANG DITERIMA

29. BORROWINGS

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Rupiah			Rupiah
Pinjaman penerusan	10,639	11,694	Two step loans
Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya	951	951	Liquidity credit for members of primary cooperatives credit
Lain-lain	757,596	511,291	Others
	<u>769,186</u>	<u>523,936</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
Pinjaman bilateral	37,009,775	36,822,835	Bilateral loans
Bankers acceptance	14,181,979	7,258,402	Bankers acceptance
Pinjaman penerusan	62,188	63,676	Two step loans
Lain-lain	1,378	1,892	Others
	<u>51,255,320</u>	<u>44,146,805</u>	
Total	52,024,506	44,670,741	Total

Pinjaman bilateral

Bilateral loans

BNI memiliki pinjaman bilateral sebagai salah satu strategi pendanaan Bank untuk menjaga komposisi pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Termasuk di dalam pinjaman bilateral adalah fasilitas pinjaman di bawah ini:

BNI has bilateral loan which is one of the Bank's strategy to maintain funding profile between short term and long term funding. Bilateral loans include the following borrowing facilities:

- Pinjaman bilateral dalam negeri dengan Standard Chartered Bank Jakarta sebesar USD200 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun dan tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah 1,95% dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar USD200 juta atau ekuivalen Rp2.876.000 dan USD200 juta atau ekuivalen Rp2.713.500.
- Pinjaman bilateral luar negeri dengan China Development Bank sebesar USD700 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun serta tingkat suku bunga LIBOR 6 bulan ditambah 2,85% dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman setelah dikurangi dengan biaya penerbitan yang belum diamortisasi masing-masing sebesar USD651 juta atau ekuivalen Rp9.355.986 dan USD697 juta atau ekuivalen Rp9.450.311.

- Onshore bilateral loan with Standard Chartered Bank Jakarta amounting to USD200 million with tenor of 5 years and with interest of 3 months LIBOR plus 1.95% and will mature on 19 September 2019. As of 31 December 2018 and 2017, the outstanding loan balance under this facility amounted to USD200 million or equivalent Rp2,876,000 and USD200 million or equivalent Rp2,713,500, respectively.
- Offshore bilateral loan with China Development Bank amounting to USD700 million with tenor of 10 years and with interest of 6 months LIBOR plus 2.85% and will mature on 16 September 2025. As of 31 December 2018 and 2017, outstanding loan less unamortised is amounted to USD651 million or equivalent Rp9,355,986 and USD697 million or equivalent Rp9,450,311, respectively.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

29. BORROWINGS (continued)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

Pinjaman bilateral (lanjutan)

Bilateral loans (continued)

- c) Pinjaman bilateral luar negeri dengan China Development Bank sebesar CNY1,9 miliar dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun serta tingkat suku bunga SHIBOR 6 bulan ditambah 3,30% dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman setelah dikurangi dengan biaya penerbitan yang belum diamortisasi masing-masing sebesar CNY1.776 juta atau ekuivalen Rp3.712.855 dan CNY1.903 juta atau ekuivalen Rp3.964.867
- d) Pinjaman bilateral luar negeri dengan konsorsium bank yang terdiri dari ANZ, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Commerzbank, CTBC, DBS, OCBC, dan UOB sebesar USD250 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 3 tahun serta tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah 1% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman setelah dikurangi dengan biaya penerbitan yang belum diamortisasi masing-masing sebesar USD248 juta atau ekuivalen Rp3.569.080 dan USD248 juta atau ekuivalen Rp3.358.892.
- e) Pinjaman bilateral luar negeri dengan konsorsium bank yang terdiri dari ANZ, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Commerzbank, CTBC, DBS, OCBC, dan UOB sebesar USD500 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun serta tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah 1,21% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman setelah dikurangi dengan biaya penerbitan yang belum diamortisasi masing-masing sebesar USD497 juta atau ekuivalen Rp7.142.254 dan USD495 juta atau ekuivalen Rp6.719.773.

- c) *Offshore bilateral loan with China Development Bank amounting to CNY1.9 billion with tenor of 10 years and with interest of 6 months SHIBOR plus 3.30% and will mature on 16 September 2025. As of 31 December 2018 and 2017, outstanding loan less unamortised amounted to CNY1,776 million or equivalent Rp3,712,855 and CNY1,903 million or equivalent Rp3,964,867, respectively.*
- d) *Offshore bilateral loan with consortium of banks consisting of ANZ, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Commerzbank, CTBC, DBS, OCBC, and UOB amounting to USD250 million with tenor of 3 years and with interest of 3 months LIBOR plus 1% per annum and will mature on 22 December 2019. As of 31 December 2018 and 2017, outstanding loan less unamortised issuance costs amounted to USD248 million or equivalent Rp3,569,080 and USD248 million or equivalent Rp3,358,892, respectively.*
- e) *Offshore bilateral loan with consortium of banks consisting of ANZ, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Commerzbank, CTBC, DBS, OCBC, and UOB amounting to USD500 million with tenor of 5 years and with interest of 3 months LIBOR plus 1.21% per annum and will mature on 22 December 2021. As of 31 December 2018 and 2017, outstanding loan less unamortised issuance costs amounted to USD497 million or equivalent Rp7,142,254 and USD495 million or equivalent Rp6,719,773, respectively.*

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pinjaman bilateral (lanjutan)

- f) BNI, melalui BNI cabang London memiliki pinjaman bilateral luar negeri dengan konsorsium bank yang terdiri dari Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, BNP Paribas, Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd, Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd, United Overseas Bank Ltd, dan Westpack Banking Co sebesar USD500 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun dan tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah marjin 1,2% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2022. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar USD500 juta atau ekuivalen Rp7.190.000 dan USD500 juta atau ekuivalen Rp6.783.750.
- g) BNI, melalui BNI cabang New York memiliki pinjaman bilateral luar negeri dengan Bank of America N.A sebesar USD40 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 335 hari dan tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah 0,8% sehingga menjadi 3,57% dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Agustus 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo pinjaman fasilitas tersebut sebesar USD40 juta atau ekuivalen Rp575.200.
- h) BNI, melalui BNI cabang New York memiliki empat pinjaman bilateral luar negeri dengan CoBank Greenwood Village Colorado US sebesar USD80 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 357 - 359 hari dan tingkat suku bunga 2,88% - 3,55% dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2019, 29 Maret 2019, 10 Mei 2019 dan 4 Desember 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo pinjaman fasilitas tersebut sebesar USD80 juta atau ekuivalen Rp1.150.400.
- i) BNI, melalui BNI cabang Tokyo memiliki pinjaman bilateral luar negeri dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebesar USD100 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 3 - 6 Bulan dan tingkat suku bunga 2,94% - 3,14% dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2019 dan 25 Maret 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo pinjaman fasilitas tersebut sebesar USD100 juta atau ekuivalen Rp1.438.000.

29. BORROWINGS (continued)

a. By type and currency (continued)

Bilateral loans (continued)

- f) BNI, through its London branch, has offshore bilateral loan with consortium of banks consisting of Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, BNP Paribas, Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd, Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd, United Overseas Bank Ltd, and Westpack Banking Co amounting to USD500 million with tenor of 5 years and with interest of 3 months LIBOR plus margin 1.2% per annum and will mature on 30 August 2022. As of 31 December 2018 and 2017, the outstanding loan balance under this facility amounted to USD500 million or equivalent Rp7,190,000 and USD500 million or equivalent Rp6,783,750, respectively.
- g) BNI, through its New York branch, has offshore bilateral loan with Bank of America amounting to USD40 million with tenor of 335 days and with interest of 3 months LIBOR plus spread 0.8% with all in rate 3.57% and will mature on 12 August 2019. As of 31 December 2018, the outstanding loan balance under this facility amounted to USD40 million or equivalent Rp575,200.
- h) BNI, through its New York branch, has four offshore bilateral loan with CoBank Greenwood Village Colorado US amounting to USD80 million with tenor of 357 - 359 days and with all in interest rate of 2.88% to 3.55% and will mature on 11 January 2019, 29 March 2019, 10 May 2019 and 4 December 2019. As of 31 December 2018, the outstanding loan balance under this facility amounted to USD80 million or equivalent Rp1,150,400.
- i) BNI, through its Tokyo branch, has offshore bilateral loan with Sumitomo Mitsui Banking Corporation amounting to USD100 million with tenor of 3 - 6 months and with interest of 2.94% to 3.14% and will mature on 20 March 2019 and 25 March 2019. As of 31 December 2018, the outstanding loan balance under this facility amounted to USD100 million or equivalent Rp1,438,000.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

29. BORROWINGS (continued)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

Pinjaman bilateral (lanjutan)

Bilateral loans (continued)

- j) Pinjaman bilateral luar negeri dengan Societe Generale Paris sebesar USD50 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 4 tahun dan tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah 2,30% dan jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2018. Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo pinjaman fasilitas tersebut sebesar USD50 juta atau ekuivalen Rp678.375.

- j) Offshore bilateral loan with Societe Generale Paris amounting to USD50 million with tenor of 4 years and with interest of 3 months LIBOR plus 2.30% and matured on 17 December 2018. As of 31 December 2017, the outstanding loan balance under this facility amounted to USD50 million or equivalent Rp678,375.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

The significant requirements (*financial covenants*) in the Bank's loan agreement include the following:

- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%.
- Nilai Rasio Modal Inti (*Tier 1 Ratio*) minimum 6%.
- Nilai Rasio Modal Inti Utama (*Core Tier 1 Ratio*) minimum 5%.
- Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) minimum 8%.
- Rasio *Return on Average Assets* minimum 0,6%, dengan ketentuan bahwa nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sama dengan atau lebih besar dari 12,5%.

- *Non-Performing Loan* (NPL) ratio maximum of 5%.
- *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%.
- *Tier 1 Ratio* minimum of 6%.
- *Core Tier 1 Ratio* minimum of 5%.
- *Minimum Statutory Reserve* minimum of 8%.
- *Return on Average Assets* ratio minimum of 0.6%, provided that *Capital Adequacy Ratio* (CAR) is equal to or greater than 12.5%.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, Bank telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.

During the years ended 31 December 2018 and 2017, the Bank has fulfilled the terms required set forth in the agreements.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pinjaman penerusan

Pinjaman penerusan pada tanggal-tanggal tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 mencakup pinjaman penerusan dari *Kreditanstalt für Wiederaufbau* untuk pembiayaan *Industrial Efficiency and Pollution Control Phase I* dan *II* yang diterima pada tahun 2001 dan 2004.

Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara BNI dan Departemen Keuangan No. SLA-1145/DP3/2001 tertanggal 30 Maret 2001 dan SLA-1174/DP3/2004 tertanggal 25 Agustus 2004, Pemerintah telah menyetujui BNI sebagai bank pelaksana dengan jumlah fasilitas masing-masing tidak melebihi DM11.700.000 dan EUR9 juta. Tanggal terakhir penarikan pinjaman adalah masing-masing pada tanggal 30 Juni 2001 dan 30 Desember 2007. Jangka waktu pinjaman penerusan ini adalah masing-masing selama 12 tahun termasuk masa tenggang 2 tahun dan 40 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo pinjaman penerusan masing-masing adalah sebesar Rp5.230 dan EUR3,8 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo pinjaman penerusan masing-masing adalah sebesar Rp5.807 dan EUR4 juta.

Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia terutama ditujukan untuk debitur BNI sehubungan dengan program kredit Pemerintah untuk pinjaman investasi usaha kecil, pinjaman modal kerja dan pinjaman pengusaha kecil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, manajemen program kredit likuiditas telah dialihkan ke PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Badan Usaha Milik Negara, yang akan jatuh tempo dalam beberapa tanggal, berdasarkan penyelesaian dari program-program tersebut.

29. BORROWINGS (continued)

a. By type and currency (continued)

Two step loans

Two step loans as of 31 December 2018 and 2017 are step loans from Kreditanstalt für Wiederaufbau to finance Industrial Efficiency and Pollution Control Phase I and II that was received in 2001 and 2004.

Based on the two step loans agreements between BNI and the Ministry of Finance No. SLA-1145/DP3/2001 dated 30 March 2001 and SLA-1174/DP3/2004 dated 25 August 2004, the Government appointed BNI as an executor bank with total facilities for each not exceeding DM11,700,000 and EUR9 million. Latest withdrawal date were on 30 June 2001 and 30 December 2007, respectively. The terms of the two step loans are 12 years including 2 years grace period and 40 years including 10 years grace period, respectively.

As of 31 December 2018, two step loans amounted to Rp5,230 and EUR3.8 million, respectively.

As of 31 December 2017, two step loans amounted to Rp5,807 and EUR4 million, respectively.

Liquidity credit for members of primary cooperatives credit

This is a credit facility provided by Bank Indonesia specifically for BNI's debtors in relation to the Government's loan program for small investment loans, working capital loans and small business loans. In accordance with the Government Regulation, the management of this liquidity loan program was transferred to PT Permodalan Nasional Madani (Persero), a state-owned enterprise. The loan will mature on various dates based on the completion of such programs.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya (lanjutan)

Tingkat bunga atas fasilitas ini berkisar antara 3,00% sampai dengan 7,00% per tahun.

Bankers acceptance

Bankers acceptance merupakan pinjaman antarbank yang diperoleh BNI dari bank-bank luar negeri yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas dengan jangka waktu pinjaman 3 sampai dengan 6 bulan.

29. BORROWINGS (continued)

a. By type and currency (continued)

Liquidity credit for members of primary cooperatives credit (continued)

Interest rates on the facility range from 3.00% to 7.00% per annum.

Bankers acceptance

Bankers acceptance represents interbank borrowings for liquidity purposes obtained by BNI from various foreign banks with borrowing period from 3 to 6 months.

	31 Desember/December		
	2018	2017	
CoBank	2,516,500	1,899,450	CoBank
Standard Chartered Bank, Hongkong Oversea Chinese Banking Corp. Limited, Singapura	1,179,160	203,513	Standard Chartered Bank, Hongkong Oversea Chinese Banking Corp. Limited, Singapura
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Singapura	1,438,000	1,492,425	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Singapura
United Overseas Bank Limited, Singapura	1,438,000	-	United Overseas Bank Limited, Singapura
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura	1,366,100	1,065,049	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura
Citibank N.A., Singapura	1,186,350	-	Citibank N.A., Singapura
DBS Bank Ltd, Singapura	1,078,500	271,350	DBS Bank Ltd, Singapura
CTBC Bank Co., Ltd., Singapura	834,040	-	CTBC Bank Co., Ltd., Singapura
Bank of Montreal	738,413	-	Bank of Montreal
Deutsche Bank AG, Singapura	719,000	-	Deutsche Bank AG, Singapura
Standard Chartered Bank, Singapura	719,000	-	Standard Chartered Bank, Singapura
Standard Chartered Bank, London	672,984	678,375	Standard Chartered Bank, London
PT Bank Central Asia Tbk	295,932	-	PT Bank Central Asia Tbk
Citibank N.A., Hong Kong	-	542,700	Citibank N.A., Hong Kong
Bank of America National Trust and Savings Association, Hong Kong	-	407,025	Bank of America National Trust and Savings Association, Hong Kong
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	325,620	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	135,675	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bank of America N.A.	-	135,675	Bank of America N.A.
	-	101,545	Bank of America N.A.
Total	14,181,979	7,258,402	Total

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain

PT BNI Multifinance (BNIMF)

**PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
(dahulu PT Bank Pundi Indonesia Tbk)**

Pada tanggal 21 Maret 2017, PT BNI Multifinance (BNIMF) memperoleh fasilitas pinjaman berjangka *revolving* (fasilitas modal kerja) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp40.000 dan Rp10.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2020.

Pada tanggal 20 Agustus 2018, PT BNI Multifinance (BNIMF) telah melunasi salah satu fasilitas pinjaman berjangka *revolving* (fasilitas modal kerja) dengan maksimum fasilitas Rp40.000.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp4.833 dan Rp48.041.

PT Bank Capital Indonesia Tbk

Pada tanggal 29 Maret 2017, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 87, PT Bank Capital Indonesia Tbk setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000 yang digunakan sebagai tambahan modal kerja yang berlaku sampai 30 Maret 2018.

Perjanjian ini telah diperpanjang pada tanggal 28 Maret 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah sebesar Rp100.000.

29. BORROWINGS (continued)

a. By type and currency (continued)

Others

PT BNI Multifinance (BNIMF)

**PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
(formerly PT Bank Pundi Indonesia Tbk)**

On 21 March 2017, PT BNI Multifinance (BNIMF) obtained a revolving loan facility (working capital facility) from PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk with maximum facility amounting to Rp40,000 and Rp10,000 with terms of 3 years and will mature on 21 March 2020.

On 20 August 2018, PT BNI Multifinance (BNIMF) paid off one of the revolving loan facility (working capital facility) with maximum facility amounting to Rp40,000.

As of 31 December 2018 and 2017, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp4,833 and Rp48,041, respectively.

PT Bank Capital Indonesia Tbk

On 29 March 2017, based on the Credit Agreement No. 87, PT Bank Capital Indonesia Tbk agreed to provide a working capital loan facility with a maximum available fund amounting to Rp100,000, which was used as an additional working capital that matured on 30 March 2018.

This agreement has been extended dated 28 March 2018 and will mature on 30 March 2019.

As of 31 December 2018 and 2017, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp100,000.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF) (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tanggal 14 Juni 2017, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dengan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan maksimum fasilitas sebesar Rp50.000 dan jangka waktu pinjaman selama 42 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2020.

Pada tanggal 15 Agustus 2018, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan maksimum fasilitas sebesar Rp50.000 dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak tanggal penarikan tiap fasilitas kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp69.839 dan Rp42.167.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 28 Agustus 2018, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp250.000 dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah sebesar Rp117.110.

29. BORROWINGS (continued)

a. By type and currency (continued)

Others (continued)

PT BNI Multifinance (BNIMF) (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

On 14 June 2017, BNIMF obtained working capital loan facility from PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta with maximum facility amounting to Rp50,000 and tenor of 42 months and will mature on 14 December 2020.

On 15 August 2018, BNIMF obtained additional working capital facility loan with maximum facility amounting to Rp50,000 and tenor of 36 months from the date of withdrawal of each credit facility.

As of 31 December 2018 and 2017, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp69,839 and Rp42,167, respectively.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On 28 August 2018, BNIMF obtain working capital facility loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with maximum facility amounting to Rp250,000 and tenor of 60 months and will mature on 28 August 2023.

As of 31 December 2018, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp117,110.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF) (lanjutan)

PT Bank Victoria International Tbk

Pada tanggal 20 September 2017, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman *fixed loan line limit - non revolving* dengan PT Bank Victoria International Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp200.000 dan jangka waktu pinjaman selama 4 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp105.208 dan Rp138.542.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 28 November 2017, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Central Asia Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp200.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp148.889 dan Rp25.000.

PT Bank DKI

Pada tanggal 21 Desember 2017, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank DKI dengan maksimum fasilitas sebesar Rp50.000 dan jangka waktu pinjaman selama 30 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2020.

Pada tanggal 2 Oktober 2018, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank DKI dengan maksimum fasilitas sebesar Rp50.000 dengan jangka waktu pinjaman 30 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp73.738 dan Rp15.000.

29. BORROWINGS (continued)

a. By type and currency (continued)

Others (continued)

PT BNI Multifinance (BNIMF) (continued)

PT Bank Victoria International Tbk

On 20 September 2017, BNIMF obtained fixed loan line limit - non revolving loan with PT Bank Victoria International Tbk from maximum facility amounting to Rp200,000 and tenor of 4 years and will mature on 20 September 2021.

As of 31 December 2018 and 2017, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp105,208 and Rp138,542, respectively.

PT Bank Central Asia Tbk

On 28 November 2017, BNIMF obtained working capital loan facility from PT Bank Central Asia Tbk with maximum facility amounting to Rp200,000 and tenor of 3 years and will mature on 29 November 2020.

As of 31 December 2018 and 2017, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp148,889 and Rp25,000, respectively.

PT Bank DKI

On 21 December 2017, BNIMF obtained working capital facility loan from PT Bank DKI with maximum facility amounting to Rp50,000 and tenor of 30 months and will mature on 21 June 2020.

On 2 October 2018, BNIMF obtained working capital facility loan with PT Bank DKI with maximum facility amounting to Rp50,000 and tenor of 30 months and will mature on 21 June 2020.

As of 31 December 2018 and 2017, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp73,738 and Rp15,000, respectively.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF) (lanjutan)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pada tanggal 11 Januari 2018, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan maksimum fasilitas sebesar Rp50.000 dan jangka waktu pinjaman selama 42 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah sebesar Rp37.804.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 25 Oktober 2018, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp300.000 dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah sebesar Rp100.000.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, BNIMF telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian tersebut.

29. BORROWINGS (continued)

a. By type and currency (continued)

Others (continued)

PT BNI Multifinance (BNIMF) (continued)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

On 11 January 2018, BNIMF obtained working capital facility loan from Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia with maximum facility amounting to Rp50,000 and tenor of 42 months and will mature on 11 July 2021.

As of 31 December 2018, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp37,804.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

On 25 October 2018, BNIMF obtained working capital loan facility with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with maximum facility amounting to Rp300,000 and tenor of 12 months and will mature on 25 October 2019.

As of 31 December 2018, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp100,000.

During the years ended 31 December 2018 and 2017, BNIMF has fulfilled the terms required set forth in the agreements.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Sekuritas (BNIS)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

PT BNI Sekuritas (BNIS) memperoleh fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* (PBMM) dan Bank Garansi (BG) dari BCA yang perjanjiannya telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir dengan surat No. 40646/GBK/2017 tanggal 16 November 2017 dengan total *limit* fasilitas sebesar Rp100.000 dan jangka waktu penarikan sampai dengan 18 Februari 2018. Tingkat suku bunga akan ditentukan pada saat penarikan, berdasarkan suku bunga pasar. Tidak ada jaminan untuk fasilitas pinjaman ini.

Selama periode pinjaman, BNIS memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

- a. Mempertahankan kepemilikan saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada BNIS dan minimum 51%.
- b. BNIS tidak diperbolehkan memberikan agunan untuk fasilitas pasar uang yang sudah dan akan diterima dari Bank/Lembaga keuangan lainnya dan BNIS harus membuat surat pernyataan bahwa BNIS tidak akan menjaminkan asetnya (*Negative Pledge of All Assets*).
- c. BNIS harus menjaga *outstanding* pinjaman dari masing-masing Bank maksimal 25% dari modal BNIS dan total *outstanding* pinjaman dari seluruh bank tidak boleh melebihi modal BNIS.

Pada tanggal 31 Desember 2017 saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah sebesar Rp50.000.

29. BORROWINGS (continued)

a. By type and currency (continued)

Others (continued)

PT BNI Sekuritas (BNIS)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

PT BNI Sekuritas (BNIS) obtained Term Credit Money Market (TCMM) and Bank Guarantee (BG) facilities from BCA which agreement has been extended several time with the latest extension letter No. 40646/GBK/2017 dated 16 November 2017 with total limit facility amounting to Rp100,000 and the period of facility withdrawal maturing on 18 February 2018. Interest rate will be determined at the time of withdrawal, based on money market rate. The loan is unsecured.

During the loan period, BNIS has to comply with the terms of the loan agreement which includes the following:

- a. Maintain PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk shares ownership at BNIS and minimum 51%.
- b. BNIS is not allowed to provide collateral for money market which already and will be received from Bank/other financial institution and BNIS must make a statement letter which stated that BNIS will not collateralized its assets (*Negative Pledge of All Assets*).
- c. BNIS should maintain outstanding bank loan from each bank maximum 25% from BNIS's total capital and total outstanding loan from all banks should no exceed BNIS's total capital.

As of 31 December 2017 the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp50,000.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Sekuritas (BNIS) (lanjutan)

PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana)

BNIS memperoleh fasilitas Money Market Line dari Hana yang perjanjiannya telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan dan penambahan limit fasilitas terakhir dengan surat No. 2017/011/SPPK/CB tanggal 28 April 2017 dengan limit fasilitas menjadi sebesar Rp100.000 dari sebelumnya Rp50.000, dan jangka waktu penarikan sampai dengan 30 Mei 2018. Tingkat suku bunga akan ditentukan pada saat penarikan, berdasarkan suku bunga pasar. Tidak ada jaminan untuk fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2017 saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah sebesar Rp40.000.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT Bank Sumut)

Berdasarkan akta perjanjian kredit No 002/KC19-LAK/LK/PK/2017 tanggal 28 Desember 2017, BNIS memperoleh fasilitas *Revolving Credit Facility (RCF)-Uncommitted Line* dengan limit fasilitas Rp50.000 dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan atau sampai dengan tanggal 27 Desember 2017. Tidak ada jaminan untuk fasilitas pinjaman ini.

Selama periode pinjaman, BNIS memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

- Mempertahankan kecukupan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sesuai peraturan yang berlaku.
- Menjaga *Current Ratio* (CR) minimum sebesar 100%

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah sebesar Rp50.000.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, BNIS telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.

29. BORROWINGS (continued)

a. By type and currency (continued)

Others (continued)

PT BNI Sekuritas (BNIS) (continued)

PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana)

BNIS obtained Money Market Line Facility from Hana which agreement has been extended several time with the latest extension and additional letter limit facility No. 2017/011/SPPK/CB dated 28 April 2017 with limit facility amounting to Rp100,000 from previously Rp50,000, and the period of facility drawdown date maturing on 30 May 2018. Interest rate will be determined at the drawdown date, based on money market rate. The loan is unsecured.

As of 31 December 2017 the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp40,000.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT Bank Sumut)

Based on Loan agreement No. 002/KC19-LAK/LK/PK/2017 dated 28 December 2017, BNIS obtained *Revolving Credit Facility (RCF)-Uncommitted Line* with facility limit amounted to Rp50,000. The maximum period of facility is 12 months or until 27 December 2017. The loan is unsecured.

During the loan period, BNIS has to comply with the terms of the loan agreement which includes the following:

- Maintain adequate of Net Adjusted Working Capital (MKBD) as required by applicable regulation.
- Maintain Current Ratio (CR) minimum 100%

As of 31 December 2017, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp50,000.

During the year ended 31 December 2017, BNIS has fulfilled the terms required set forth in the agreements.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

29. BORROWINGS (continued)

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah	254,914	-	Rupiah
Mata uang asing	-	407,025	Foreign currencies
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	514,272	523,936	Rupiah
Mata uang asing	51,255,320	43,739,780	Foreign currencies
Total pihak ketiga	51,769,592	44,263,716	Total third parties
Total	52,024,506	44,670,741	Total

c. Tingkat suku bunga per tahun

c. Annual interest rates

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	Euro %	Yuan Cina/ Chinese Yuan %	
2018	6.99 - 11.50	0.00 - 5.35	0.09 - 0.47	3.22	2018
2017	5.70 - 10.50	0.00 - 4.40	0.09 - 0.10	3.30	2017

30. EFEK-EFEK SUBORDINASI

30. SUBORDINATED SECURITIES

a. Berdasarkan jenis

a. By type

	31 Desember/December 2018		
	Saldo/ Balance	Peringkat/ Rating *)	
MTN Subordinasi, setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp47 pada tanggal 31 Desember 2018	99,953	idAA*)	Subordinated MTN net of unamortized issuance cost amounting Rp47 as of 31 December 2018

*) *Pefindo*

*) *Pefindo*

Pada tanggal 8 Juni 2018, BNI telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK melalui surat nomor S-73/PB.31/2018 untuk menerbitkan Medium Term Notes Subordinasi I BNI Tahun 2018 ("MTN Subordinasi"). Nilai MTN Subordinasi yang diterbitkan sebesar Rp100.000, jangka waktu 5 tahun, dengan kupon sebesar 8% per tahun yang akan dibayarkan secara triwulanan. MTN Subordinasi BNI diterbitkan dengan penawaran terbatas. Pembayaran kupon pertama kepada para pemegang MTN Subordinasi telah dilakukan pada tanggal 10 November 2018.

On 8 June 2018, BNI obtained an effective statement from OJK through letter number S-73/PB.31/2018 to issue Continuous Subordinated Medium Term Notes I BNI Year 2018 ("Subordinated MTN"). The value of subordinated MTN issued amounted to Rp100,000 with the term of 5 years and coupon of 8% per annum to be paid quarterly. BNI Subordinated MTN was issued with limited offering. The first coupon payment to Subordinated MTN holders was made on 10 November 2018.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

30. EFEK-EFEK SUBORDINASI (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Penggunaan dana hasil penerbitan MTN Subordinasi digunakan oleh BNI untuk memperkuat modal pelengkap (tier 2) dan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur dana jangka panjang, sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 dan selanjutnya akan digunakan oleh BNI untuk mendukung peningkatan aset produktif.

Berdasarkan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia No.RC-728/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 BNI telah memperoleh hasil pemeringkatan nasional idAA untuk MTN Subordinasi.

MTN Subordinasi ini dapat mengalami *write down* dan ditangguhkan pembayaran pokok dan bunganya apabila OJK menetapkan bahwa BNI berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan peraturan OJK no. 11/POJK.03/2016 yang diubah dengan peraturan OJK no. 34/POJK.03/2016. *Point of non-viability* terjadi akibat bank mencapai *trigger level* pada indikator permodalan yang ditetapkan OJK, sesuai SEOJK no. 20/SEOJK.03/2016 Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 2018
Rupiah MTN Subordinasi, setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp47 pada tanggal 31 Desember 2018	99,953

c. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/December 2018
Pihak berelasi Rupiah	24,988
Pihak ketiga Rupiah	74,965
Total	99,953

30. SUBORDINATED SECURITIES (continued)

a. By type (continued)

The proceeds from Subordinated MTN issuance used by BNI to strengthen tier 2 capital and working capital in the context of business development, especially loan granting and increase in the composition of the long-term fund structure, in accordance with OJK Regulation No.11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks as amended by OJK Regulation No.34/POJK.03/2016 and will then be used by BNI to support increased in productive assets.

Based on PT Pemeringkat Efek Indonesia letter No.RC-728/PEF-DIR/VII/2018 dated 6 July 2018, BNI has obtained national idAA ratings for Subordinated MTN.

This Subordinated MTN can experience *write down* and the payment of principal and interest will be postponed if the OJK stipulates that BNI has the potential to be subject to business continuity issues (*point of non-viability*) in accordance with OJK regulations No.11/POJK.03/2016 amended by OJK regulation No.34/POJK.03/2016. *Point of non-viability* occurs due to a bank achieving a trigger level in the capital indicator set by OJK, according to SEOJK No.20/SEOJK.03/2016 Conversion Features into Common Shares or Write Down of Additional Core Capital Instruments and Supplementary Capital.

b. By currency

Rupiah Subordinated MTN net of unamortized issuance cost amounting Rp47 as of 31 December 2018	99,953
--	--------

c. By relationship

Related parties Rupiah	24,988
Third parties Rupiah	74,965
Total	99,953

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

30. EFEK-EFEK SUBORDINASI (lanjutan)

30. SUBORDINATED SECURITIES (continued)

d. Tingkat suku bunga per tahun

d. Annual interest rates

	Rupiah/ Rupiah %	
2018	8.00	2018

31. DANA SYIRKAH TEMPORER - GIRO MUDHARABAH

**31. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS - MUDHARABAH
CURRENT ACCOUNTS**

a. Berdasarkan jenis produk

a. By product

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Bukan Bank			Non-Bank
Giro iB Hasanah (Mudharabah)	1,166,739	929,163	iB Hasanah (Mudharabah) current accounts
Bank			Bank
Giro iB Hasanah (Mudharabah)	24,314	21,739	iB Hasanah (Mudharabah) current accounts
	1,191,053	950,902	

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Bukan Bank			Non-Bank
Pihak berelasi	209,056	319,334	Related parties
Pihak ketiga	957,683	609,829	Third parties
	1,166,739	929,163	
Bank			Bank
Pihak ketiga	24,314	21,739	Third parties
	1,191,053	950,902	

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk giro Mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah current accounts for the years ended 31 December 2018 and 2017 are as follows:

	2018		
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)	
Giro Mudharabah	3 : 97	0.08 - 0.28	Mudharabah current accounts
	2017		
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)	
Giro Mudharabah	3 : 97	0.30	Mudharabah current accounts

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**32. DANA SYIRKAH TEMPORER - TABUNGAN
MUDHARABAH (lanjutan)**

**32. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS - MUDHARABAH
SAVINGS DEPOSITS (continued)**

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	2017		
	<i>Nisbah (%)/ Ratio (%)</i>	<i>Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)</i>	
Tabungan iB <i>Hasanah</i>	1 : 99 - 40:60	0.10 - 3.96	<i>iB Hasanah Savings Deposit</i>

**33. DANA SYIRKAH TEMPORER - DEPOSITO
MUDHARABAH**

**33. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS - MUDHARABAH
TIME DEPOSITS**

a. Berdasarkan hubungan

a. By relationship

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Bukan Bank			<i>Non-Bank</i>
Pihak berelasi	370,527	7,843,403	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	15,262,439	6,323,072	<i>Third parties</i>
	15,632,966	14,166,475	
Bank			<i>Bank</i>
Pihak ketiga	224,073	328,255	<i>Third parties</i>
	15,857,039	14,494,730	

b. Berdasarkan jangka waktu kontrak

b. By contractual period

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Bukan Bank			<i>Non-Bank</i>
<1 bulan	9,238,340	8,783,780	<i><1 month</i>
1 - <3 bulan	822,535	742,221	<i>1 - <3 months</i>
3 - <6 bulan	385,913	457,723	<i>3 - <6 months</i>
6 - 12 bulan	5,186,178	4,182,751	<i>6 - 12 months</i>
	15,632,966	14,166,475	
Bank			<i>Bank</i>
<1 bulan	18,100	60,100	<i><1 month</i>
1 - <3 bulan	124,052	126,152	<i>1 - <3 months</i>
3 - <6 bulan	82	32	<i>3 - <6 months</i>
6 - 12 bulan	81,839	141,971	<i>6 - 12 months</i>
	224,073	328,255	
	15,857,039	14,494,730	



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**33. DANA SYIRKAH TEMPORER - DEPOSITO
MUDHARABAH (lanjutan)**

**33. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS - MUDHARABAH
TIME DEPOSITS (continued)**

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

c. By remaining period to maturity

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Bukan Bank			Non-Bank
< 1 bulan	7,675,378	8,396,909	< 1 month
1 - <3 bulan	3,669,972	2,235,830	1 - <3 months
3 - <6 bulan	1,220,739	1,021,062	3 - <6 months
6 - 12 bulan	2,930,484	2,407,142	6 - <12 months
>12 bulan	136,393	105,532	>12 months
	15,632,966	14,166,475	
Bank			Bank
< 1 bulan	78,702	144,002	< 1 month
1 - <3 bulan	123,841	148,750	1 - <3 months
3 - <12 bulan	5,061	3,932	3 - <12 months
6 - 12 bulan	16,469	31,571	6 - <12 months
>12 bulan	-	-	>12 months
	224,073	328,255	
	15,857,039	14,494,730	

d. Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Entitas Anak atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

d. *Mudharabah time deposits* represent investments from other parties who receive share in the income derived by a Subsidiary from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for *Mudharabah time deposits* for the years ended 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	31 Desember/December				
	2018		2017		
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)	
1 Bulan	46 : 54	4.23	46 : 54	4.70	1 month
3 Bulan	47 : 53	4.33	47 : 53	4.80	3 months
6 Bulan	49 : 51	4.51	49 : 51	5.00	6 months
12 Bulan	50 : 50	4.60	50 : 50	5.11	12 months

e. Deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp286.827 dan Rp186.739 (tidak diaudit).

e. *Mudharabah deposits* that were used as collateral for the Bank's receivables and financing for the year ended 31 December 2018 and 2017 amounting to Rp286,827 and Rp186,739, respectively (unaudited).

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

34. SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN

Pada tanggal 26 Mei 2015, Entitas Anak menerbitkan sukuk *Mudharabah* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah nilai nominal Rp500 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2018. Tingkat bagi hasil sukuk *Mudharabah* adalah sebesar 9,25% per tahun. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap triwulanan, sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil sukuk *Mudharabah*. Pembayaran pendapatan bagi hasil sukuk *Mudharabah* pertama dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2015, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil sukuk *Mudharabah* terakhir sekaligus jatuh tempo sukuk *Mudharabah* adalah tanggal 26 Mei 2018. Tanggal 26 Mei 2018 juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*. Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah meliputi pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif, dan pembiayaan mikro yang merupakan bagian dari kegiatan usaha Entitas Anak.

Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan diakui sebesar nilai nominal. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan sukuk dicatat secara terpisah sebagai biaya yang ditanggungkan dan diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk *Mudharabah*. Jumlah biaya yang diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2017 Rp1.014.

Prinsip pembagian hasil usaha menggunakan prinsip *revenue sharing*, dimana pendapatan yang diperoleh dari pendapatan kas seluruh portofolio dihitung berdasarkan alokasi Portofolio sebesar 5 (lima) kali Dana Sukuk *Mudharabah* dalam mata uang rupiah yang dimiliki Entitas Anak.

Perhitungan bagi hasil berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang sukuk *Mudharabah* dengan pendapatan yang dibagikan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Entitas Anak kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan 3 (tiga) periode posisi keuangan bulanan (tidak diaudit). Nisbah untuk pemegang sukuk *Mudharabah* adalah sebesar 15,35%.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk *Mudharabah* ini. BRI adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan BNI Syariah melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

34. MUDHARABAH SUKUK ISSUED

On 26 May 2015, a Subsidiary issued *Mudharabah sukuk*, listed on the Indonesian Stock Exchange, with a nominal value of Rp500 billion that will mature on 26 May 2018. The indicative level of the sukuk's yield is 9.25% per annum. The revenue from profit-sharing is paid on quarterly basis, in accordance with the payment date of Sukuk *Mudharabah's* profit-sharing. The first payment *Mudharabah Sukuk* revenue profit-sharing was distributed on 26 August 2015, while the last payment of the revenue will be distributed on 26 May 2018. 26 May 2018 will also be the date of the repayment of *Mudharabah sukuk* fund. All of the funds generated from the issuance of the *Mudharabah sukuk*, after being deducted by all of the emission costs, will be used entirely to support the sharia financing activities, such as consumer financing, productive financing, and micro financing, as a part of the Subsidiary's business activities.

The value of *Mudharabah sukuk* issued is recognized at its nominal value. All costs related to the issuance process of the Sukuk is separately recorded as accrued expenses and will be amortized using straight line method during the period of *Mudharabah sukuk*. Total amortized expense amounted to Rp1,014 as of 31 December 2017.

The profit-sharing uses revenue-sharing principle, where revenue generated from cash-revenue of all portfolios is calculated based on portfolio allocation as many as 5 (five) times of Sukuk *Mudharabah* funds owned by the Subsidiary in Rupiah currency.

The method used for the revenue sharing calculation is based on the multiplication of the revenue-sharing portion of the *Mudharabah sukuk* holders with the revenue that can be shared. The calculation is based on the information provided by the Subsidiary to the Trustee about the explanation of the calculation of the Revenue Sharing calculation-method using three (3) (unaudited) financial positions period. The Nisbah of the Sukuk *Mudharabah* holders is 15.35%.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") was appointed as the Trustee of the *Mudharabah Sukuk* issuance. BRI is an indirectly-affiliated party of BNI Syariah through the share ownership by the Republic of Indonesia.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN
(lanjutan)**

34. MUDHARABAH SUKUK ISSUED (continued)

Pada tanggal 26 Mei 2018 Sukuk Mudharabah yang diterbitkan telah jatuh tempo dan dilunasi.

As of 26 May 2018 Mudharbah Sukuk Issued has matured and paid off.

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan jangka waktu kontrak

a. By type, currency and contractual period

31 Desember/December 2017

	Saldo/ Balance	Peringkat/ Rating	Pemeringkat/ Rating Agencies	Jangka waktu/ Period	
Sukuk Mudharabah	496,000	id AA+(Sy)	Pefindo	3 tahun/year	Mudharabah Sukuk

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

**31 Desember 2017/
31 December 2017**

Bukan Bank		Non-Bank
Pihak berelasi	259,500	Related parties
Pihak ketiga	236,500	Third parties
	496,000	

Selama periode Sukuk *Mudharabah*, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Entitas Anak tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut, diantaranya:

During the Sukuk *Mudharabah* period, unless prior written consent of Trustee is obtained, the *Subsidiary* is not allowed to carry-out the following, among others:

- Menggunakan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Entitas Anak yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang di luar kegiatan usaha Entitas Anak.
- Melaksanakan perubahan bidang usaha utama.
- Mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia dan/atau otoritas moneter di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia).

- Use a portion or all of the *Subsidiary's* current and future income or assets for other than the *Subsidiary's* main business activities.
- Change its nature of business.
- Reduce its authorized and paid-up share capital, unless the reduction is done based on a request/command from the government of the Republic of Indonesia and/or other authorized institutions (including, but not limited to, Bank of Indonesia, Financial Services Authority, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia and/or monetary authority in accordance with the applicable regulations in the Republic of Indonesia).

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN
(lanjutan)**

- d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan Entitas Anak lain yang menyebabkan bubarnya Entitas Anak, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap usaha Entitas Anak kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Semua syarat dan kondisi Sukuk *Mudharabah* dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Entitas Anak bukan merupakan perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sukuk *Mudharabah*;
- ii. Perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang perbankan maka Entitas Anak cukup menyampaikan pemberitahuan kepada wali amanat.
- e. Mempertahankan tingkat kesehatan Bank minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik" sesuai penilaian internal berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Entitas Anak telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan penerbitan Sukuk *Mudharabah*.

**35. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL
DISETOR**

Modal Saham

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kepemilikan modal saham BNI adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 2018				
Pemegang saham	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Amount	Shareholders
Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	-	-	Class A Dwiwarna share Republic of Indonesia
Saham Seri B Negara Republik Indonesia	217,006,399	1.16	1,627,548	Class B shares Republic of Indonesia
Karyawan Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	6,500,267 65,835,200	0.03 0.35	48,752 493,764	Employees Public (ownership less than 5% each)
Total saham Seri B	289,341,866	1.54	2,170,064	Total Class B shares

34. MUDHARABAH SUKUK ISSUED (continued)

- d. Merge, consolidate or to be acquired by another Subsidiary which results in the dissolution of the Subsidiary or might affect the Subsidiary's operation negatively, unless the following conditions are met:
- i. All *Mudharabah Sukuk's* terms and conditions as stipulated in the agreement and any other related documents are still valid and completely bind the surviving company, in case the Subsidiary is not the surviving company, the surviving company has to have enough assets and adequate ability to guarantee the payment of the *Mudharabah Sukuk*;
- ii. One of the surviving company's businesses has to operate in the banking sector, therefore it is enough for the Subsidiary to inform the trustee of the changes.
- e. Maintain the overall condition and soundness of the bank to be at composite 3 rating, at the minimum, which is categorized as "Good Enough", according to the internal assessment based on the prevailing banking regulations.

As of 31 December 2017, the Subsidiary has complied with all important covenants as required in the terms of issuance of Sukuk *Mudharabah*.

**35. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN
CAPITAL**

Share Capital

As of 31 December 2018 and 2017, BNI's share capital ownership are as follows:



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**35. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL
DISETOR (lanjutan)**

**35. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN
CAPITAL (continued)**

Modal Saham (lanjutan)

Share Capital (continued)

31 Desember/December 2018

Pemegang saham	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Amount	Shareholders
Saham Seri C				Class C shares
Negara Republik Indonesia	10,972,187,475	58.85	4,114,570	Republic of Indonesia
Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1,599,966,692	8.58	599,988	Limited liability (ownership less than 5% each)
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	5,375,741,388	28.83	2,015,903	Foreign investment entities (ownership less than 5% each)
Anggoro Eko Cahyo (Direktur)	153,526	0.00	58	Anggoro Eko Cahyo (Director)
Putrama Wahyu Setyawan (Direktur)	138,442	0.00	52	Putrama Wahyu Setyawan (Director)
Bob Tyasika Ananta (Direktur)	82,891	0.00	31	Bob Tyasika Ananta (Director)
Endang Hidayatullah (Direktur)	51,368	0.00	19	Endang Hidayatullah (Director)
Tambok P.S Simanjuntak (Direktur)	24,880	0.00	9	Tambok P.S Simanjuntak (Director)
Adi Sulistyowati (Direktur)	324	0.00	-	Adi Sulistyowati (Director)
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	410,967,605	2.20	154,113	Public (ownership less than 5% each)
Total saham Seri C	18,359,314,591	98.46	6,884,743	Total Class C shares
Total	18,648,656,458	100.00	9,054,807	Total

31 Desember/December 2017

Pemegang saham	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Amount	Shareholders
Saham Seri A Dwiwarna				Class A Dwiwarna share
Negara Republik Indonesia	1	-	-	Republic of Indonesia
Saham Seri B				Class B shares
Negara Republik Indonesia	217,006,399	1.16	1,627,548	Republic of Indonesia
Karyawan	6,500,267	0.03	48,752	Employees
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	65,835,200	0.35	493,764	Public (ownership less than 5% each)
Total saham Seri B	289,341,866	1.54	2,170,064	Total Class B shares
Saham Seri C				Class C shares
Negara Republik Indonesia	10,972,187,475	58.84	4,114,570	Republic of Indonesia
Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	986,699,395	5.29	370,012	Limited liability (ownership less than 5% each)
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	6,125,210,143	32.86	2,296,954	Foreign investment entities (ownership less than 5% each)
Anggoro Eko Cahyo (Direktur)	153,526	0.00	58	Anggoro Eko Cahyo (Director)
Putrama Wahyu Setyawan (Direktur)	138,442	0.00	52	Putrama Wahyu Setyawan (Director)
Imam Budi Sarjito (Direktur)	117,074	0.00	44	Imam Budi Sarjito (Director)
Bob Tyasika Ananta (Direktur)	82,891	0.00	31	Bob Tyasika Ananta (Director)
Adi Sulistyowati (Direktur)	324	0.00	-	Adi Sulistyowati (Director)
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	274,725,321	1.47	103,022	Public (ownership less than 5% each)
Total saham Seri C	18,359,314,591	98.46	6,884,743	Total Class C shares
Total	18,648,656,458	100.00	9,054,807	Total

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**35. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL
DISETOR (lanjutan)**

Modal Saham (lanjutan)

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, perubahan Anggaran Dasar, menyetujui pembubaran dan likuidasi, penggabungan, dan pengambil alihan BNI dan semua hak-hak lainnya yang dimiliki saham Seri B dan saham Seri C. Saham Seri A Dwiwarna tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Saham Seri B dan Saham Seri C adalah saham biasa atas nama yang memiliki hak yang sama.

Pada tanggal 13 Agustus 2007, Pemerintah Republik Indonesia, melakukan divestasi sebesar 3.475.231.980 saham Seri C, mewakili 22,54% dari kepemilikan di BNI melalui Penawaran Umum Saham Kedua.

Sesuai Keterbukaan Informasi dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan/atau Pegawai dalam bentuk program Bonus Saham yang diterbitkan Bank pada tanggal 30 Oktober 2015, Bank melakukan pembelian kembali saham Bank yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Program ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("POJK No.02/POJK.04/2013") dan Surat Edaran OJK No. 22/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Pembelian kembali saham Bank telah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2015 sampai dengan 28 Desember 2015, sesuai dengan tanggal Keterbukaan Informasi. Bank melakukan pembelian kembali Saham Seri C sejumlah 1.505.375 lot atau sebanyak 150.537.500 lembar saham dengan rata-rata biaya perolehan rata-rata sebesar Rp4.982 (nilai penuh) per lembar saham. Namun demikian sehubungan dengan adanya proses pencatatan transaksi saham di bursa yang dilakukan pada T+3 maka jumlah saham pada saham treasury yang dicatat per tanggal 30 Desember 2015 sebanyak 150.100.000. Dengan demikian pada tanggal 31 Desember 2015, Bank mencatatkan total saham treasury senilai Rp749.979.

**35. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN
CAPITAL (continued)**

Share Capital (continued)

The Class A Dwiwarna share is a share that gives the holder preferred rights to approve the appointment and dismissal of Commissioners and Directors, amend the Articles of Association, approve the dissolution and liquidation, merger, and takeover of BNI and all other rights of Class B and Class C shares. The Class A Dwiwarna share may not be transferred to other parties.

Class B and Class C shares are ordinary shares that have the same rights.

On 13 August 2007, the Government of the Republic of Indonesia divested 3,475,231,980 Class C shares, representing 22.54% of shareholding in BNI through a Second Initial Public Offering (IPO).

In accordance to the Disclosure of Information in relation to the Management and/or Employees Stock Ownership Plan in the form of Bonus Shares Program issued by the Bank on 30 October 2015, the Bank repurchased shares issued by the Bank and listed in the Indonesia Stock Exchange ("IDX"). This program is consistent with Regulation of Financial Services Authority ("FSA") No.02/POJK.04/2013 dated 23 August 2013 on the Repurchase of Shares Issued by the Issuer or Public Company in market conditions which fluctuate significantly ("POJK No.02/POJK.04/2013") and FSA Circular Letter No.22/SEOJK.04/2015 dated 21 August 2015 on Another Condition As Market Conditions that Fluctuate Significantly.

The repurchase of shares was executed on 2 November 2015 to 28 December 2015, consistent with the date of Disclosure of Information. The Bank repurchased 1,505,375 lots of Class C Shares, or 150,537,500 shares with an average acquisition cost amounting to Rp4,982 (full amount) per share. However, in relation to the recording process of share transactions in stock exchange which is done on T+3, the number of shares recorded as treasury shares as of 30 December 2015 is 150,100,000. Therefore, as of 31 December 2015, the Bank recorded total of treasury shares amounting to Rp749,979.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**35. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL
DISETOR (lanjutan)**

Modal Saham (lanjutan)

Pada tahun 2016, Bank melakukan alokasi saham treasuri senilai Rp749.979 sebagai Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Pegawai Perseroan dalam bentuk Saham Bonus.

Tambahan Modal Disetor

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Saldo pada tanggal 1 Januari 2010	591,156
Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas I pada tahun 2000 (lihat Catatan 1c)	56,883,826
	57,474,982
Pengurangan tambahan modal disetor akibat pengembalian dana rekaptalisasi kepada Pemerintah Indonesia (lihat Catatan 1d)	(581,474)
	56,893,508
Dieliminasi dengan akumulasi kerugian dalam rangka kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003 (lihat Catatan 1e)	(54,367,847)
	2,525,661
Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas II pada tahun 2007 (lihat Catatan 1f)	3,287,218
Biaya emisi penerbitan saham	(195,280)
	5,617,599
Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas III pada tahun 2010 (lihat Catatan 1g)	9,196,100
Biaya emisi penerbitan saham	(245,231)
	14,568,468

**35. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN
CAPITAL (continued)**

Share Capital (continued)

In 2016, the Bank allocated treasury shares amounted to Rp749,979 as Share Ownership Program for Management and Company's Employees in the form of Share Bonus.

Additional Paid in Capital

The movements in additional paid in capital are as follows:

Balance as of 1 January 2010	591,156
Additional paid in capital due to Right Issue I in 2000 (refer to Note 1c)	56,883,826
Reduction of paid in capital due to refund of excess recapitalization funds to the Government of Indonesia (refer to Note 1d)	(581,474)
Elimination against accumulated losses in relation to the quasi-reorganization as of 30 June 2003 (refer to Note 1e)	(54,367,847)
Additional paid in capital due to Right Issue II in 2007 (refer to Note 1f) Shares issuance cost	3,287,218 (195,280)
Additional paid in capital due to Right Issue III in 2010 (refer to Note 1g) Shares issuance cost	9,196,100 (245,231)
	14,568,468

36. PENGGUNAAN LABA NETO

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Maret 2018 dan 16 Maret 2017, pengalokasian laba neto masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Pembagian dividen	4,765,767	3,968,562
Saldo laba	8,850,709	7,370,186
Total	13,616,476	11,338,748

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui pembagian dividen dari laba neto tahun 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp4.765.767 dan Rp3.968.562.

36. APPROPRIATION OF NET INCOME

In accordance with the resolutions of the Annual General Shareholders' Meetings held on 20 March 2018 and 16 March 2017, the allocation of the net income for the years ended 31 December 2017 and 2016, respectively, are as follows:

	2017	2016
Distribution of dividends	4,765,767	3,968,562
Retained earnings	8,850,709	7,370,186
Total	13,616,476	11,338,748

General Shareholders' Meeting has approved the dividend distribution of Rp4,765,767 and Rp3,968,562 from the 2017 and 2016 net income, respectively.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. CADANGAN UMUM DAN WAJIB

Cadangan umum dan wajib pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007 pasal 70), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

38. CADANGAN KHUSUS

Sehubungan dengan adanya penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum" yang mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016 ("tanggal diundangkan"), untuk menjaga struktur permodalannya, Bank telah melakukan reklasifikasi atas saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya (Cadangan Khusus) menjadi laba di tahan yang tidak ditentukan penggunaannya yaitu cadangan khusus sebesar Rp5.613.100 dan cadangan wajib cabang luar negeri sebesar Rp92.276 per 31 Desember 2016. Reklasifikasi atas saldo laba tersebut telah mendapatkan persetujuan melalui berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.42 tanggal 16 Maret 2017.

39. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended 31 December	
	2018	2017
Pinjaman yang diberikan	42,918,932	39,184,406
Obligasi Pemerintah	4,171,593	3,401,046
Marjin, pendapatan bagi hasil dan bonus syariah	3,567,329	3,174,648
Efek-efek	1,024,505	901,791
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	873,753	629,419
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	666,898	427,728
Lain-lain	915,603	458,811
Jumlah	54,138,613	48,177,849

37. GENERAL AND LEGAL RESERVES

The general and legal reserves were originally provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) (later superseded by Limited Liability Company Law No. 40/2007 article 70), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up share capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

38. SPECIFIC RESERVES

In relation with implementation of Regulation of the Financial Services Regulatory Authority ("POJK") No. 34/POJK.03/2016 dated September 22, 2016 on Amendments to POJK No. 11/POJK.03/2016 concerning "Minimum Capital Requirement for Commercial Bank" which came into force on 26 September 2016 ("date of enactment"), to maintain its capital structure, the Bank has reclassified retained earnings that has been appropriated (specific reserve) into the unappropriated retained earnings amounting Rp5,613,100 and legal reserve of overseas branch amounting Rp92,276 as of 31 December 2016. The reclassification of retained earnings has been approved through Annual General Shareholders Meeting No. 42 dated 16 March 2017.

39. INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME

Loans
Government Bonds
Margin, profit-sharing revenue and sharia bonus
Marketable securities
Placements with other banks and Bank Indonesia
Bills and other receivables
Others
Total



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH (lanjutan)

Termasuk dalam pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan adalah pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan yang mengalami penurunan nilai secara individual untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp289.353 dan Rp211.695.

39. INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME (continued)

Included in interest income from loans is interest income from individually impaired loans for the years ended 31 December 2018 and 2017 amounting to Rp289,353 and Rp211,695, respectively.

40. BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH

40. INTEREST EXPENSE AND SHARIA EXPENSE

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended 31 December	
	2018	2017
Simpanan nasabah dan bank lain	13,951,682	13,171,815
Pinjaman yang diterima	3,487,781	1,875,364
Bagi hasil <i>Mudharabah</i>	987,442	918,643
Efek-efek yang diterbitkan	242,896	215,822
Lain-lain	22,497	58,442
Total	18,692,298	16,240,086

*Deposits from customers and other banks
Borrowings
Mudharabah profit-sharing expense
Securities issued
Others*

Total

41. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

41. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended 31 December	
	2018	2017
Gaji, upah dan tunjangan pajak	4,253,185	3,899,338
Tunjangan hari raya, kesehatan, kesejahteraan dan lainnya	2,346,779	2,767,645
Bonus, insentif dan tantiem	1,828,209	1,815,008
Pendidikan dan pelatihan	418,239	404,097
Lainnya	672,326	391,108
Total	9,518,738	9,277,196

*Salaries, wages and tax allowance
Yearly allowance, medical, welfare and others
Bonus, incentives and tantiem
Training and development
Others*

Total

Jumlah gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, imbalan kerja jangka panjang yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit serta *Senior Executive Vice President (SEVP), Executive Vice President (EVP), dan Senior Vice President (SVP)* masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Total gross salaries and allowances, bonus/tantiem, long-term employment benefits paid to the Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Senior Executive Vice President (SEVP), Executive Vice President (EVP), and Senior Vice President (SVP) for the year ended 31 December 2018 and 2017 are as follows:

	31 Desember/December 2018			
	Gaji dan tunjangan/ Salaries and allowances	Bonus/tantiem/ Bonus/tantiem	Imbalan kerja jangka panjang/ Long-term employment benefits	Jumlah/ Total
Dewan Komisaris	17,592	45,143	3,422	66,157
Direksi	47,837	128,478	8,848	185,163
Komite Audit	840	-	-	840
SEVP, EVP dan SVP	101,022	18,835	-	119,857
	167,291	192,456	12,270	372,017

*Board of Commissioners
Board of Directors
Audit Committee
SEVP, EVP and SVP*

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN (lanjutan)

41. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE (continued)

	31 Desember/December 2017				
	Gaji dan tunjangan/ Salaries and allowances	Bonus/tantiem/ Bonus/tantiem	Imbalan kerja jangka panjang/ Long-term employment benefits	Jumlah/ Total	
Dewan Komisaris	13,639	53,923	3,634	71,196	Board of Commissioners
Direksi	37,951	134,573	7,951	180,475	Board of Directors
Komite Audit SEVP, EVP dan SVP	600	-	-	600	Audit Committee SEVP, EVP and SVP
	95,671	18,598	-	114,269	
	147,861	207,094	11,585	366,540	

Sesuai dengan kebijakan Bank, selain gaji, pegawai juga mendapatkan fasilitas dan tunjangan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), fasilitas kesehatan, sumbangan kematian, tunjangan cuti, fasilitas jabatan untuk jabatan tertentu, program pensiun untuk pegawai tetap, insentif sesuai dengan kinerja Bank dan pegawai, dan manfaat untuk pegawai yang berhenti bekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Under the Bank's policy, in addition to salaries, employees are entitled to allowances and benefits, such as yearly allowance (THR), medical reimbursements, death allowance, leave allowance, functional allowance for certain levels, pension plan for permanent employees, incentives based on the Bank and employees' performance, and post-employment benefits in accordance with prevailing Labor Law.

42. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

42. OTHER OPERATING EXPENSES – OTHERS

Akun ini terdiri dari beban kerjasama dengan pihak ketiga terkait transaksi ATM dan kartu kredit, beban pungutan tahunan OJK dan lain-lain.

This account represents partnership expenses with third parties related to ATM and credit card transactions, annual fees to OJK and others.

43. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

43. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended 31 December		
	2018	2017	
Beban tenaga alih daya	1,771,819	1,458,402	Outsourcing expenses
Biaya sewa	1,249,442	1,244,116	Rental expenses
Penyusutan (Catatan 18)	1,201,294	1,059,791	Depreciation (Notes 18)
Komunikasi	1,129,315	1,028,867	Communications
Perlengkapan kantor	684,939	655,669	Office supplies
Perbaikan dan pemeliharaan	582,837	527,272	Repairs and maintenance
Listrik dan air	374,259	366,920	Electricity and water
Transportasi	302,222	265,473	Transportation
Penelitian dan pengembangan	95,454	62,399	Research and development
Jasa profesional	62,364	50,868	Professional services
Teknologi informasi	23,374	23,422	Information technology
Beban lain-lain	189,746	179,373	Other expenses
Total	7,667,065	6,922,572	Total



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

44. IMBALAN KERJA

	2018
Imbalan kerja jangka pendek	1,558,288
Imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya	
BNI	1,345,125
Entitas Anak	608,853
	1,953,978
Liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian	3,512,266

Program ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun"). Kontribusi pegawai adalah sebesar 7,5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh BNI.

Program pensiun manfaat pasti

Penilaian aktuarial atas manfaat pensiun pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuarial terdaftar, PT Towers Watson Purbajaga, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun berdasarkan laporan aktuarial PT Towers Watson Purbajaga tanggal 5 Januari 2019 dan 12 Januari 2018 disajikan sebagai berikut:

	2018
Nilai wajar aset dana pensiun (tidak diaudit)	6,771,120
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(6,448,951)
Selisih lebih (kurang) pendanaan	322,169
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	(322,169)
Kewajiban - neto	-

Per tanggal 31 Desember 2018, tidak ada aset yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian karena ketentuan untuk pengakuan aset dari selisih lebih pendanaan yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

44. EMPLOYEE BENEFITS

	2017	
	1,732,867	Short-term employee benefits
		Post-employments and Other long-term employee benefits
	2,028,372	BNI
	332,616	Subsidiaries
	2,360,988	
Liability recognized in the consolidated statement of financial position	4,093,855	

This plan is managed by Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun"). The employees' contributions are 7.5% of the employee's pension salary-based and the remaining amounts required to fund the program/pension plan are contributed by BNI.

Defined benefit pension plan

The actuarial calculations of pension benefits for the years ended 31 December 2018 and 2017 are prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Towers Watson Purbajaga, using the "Projected Unit Credit" method.

A reconciliation of the funding status of the pension plan based on the actuarial reports of PT Towers Watson Purbajaga dated 5 January 2019 and dated 12 January 2018 are as follows:

	2017	
	6,666,701	Fair value of pension plan assets (unaudited)
	(7,186,720)	Present value of funded defined benefit obligation
	(520,019)	Funding surplus (deficit)
	-	Asset adjustment
Liabilities - net	(520,019)	

As of 31 December 2018, there were no recognition of assets in the consolidated statement of financial position as the funding surplus did not meet the recognition criteria of assets under the accounting standards.

The movements in the present value of funded defined benefit obligations of the year are as follows:

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

44. IMBALAN KERJA (lanjutan)

44. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Defined benefit pension plan (continued)

	2018	2017	
Pada awal tahun	7,186,720	6,001,564	<i>At beginning of the year</i>
Biaya jasa kini	142,808	398,697	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	495,178	465,273	<i>Interest cost</i>
	<u>7,824,706</u>	<u>6,865,534</u>	
Pengukuran kembali: (Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(868,382)	537,050	<i>Remeasurements: Actuarial (gains) losses from changes in financial assumption</i>
Kerugian aktuarial yang timbul karena penyesuaian atas pengalaman	22,160	317,909	<i>Actuarial losses from changes in experience</i>
	<u>(846,222)</u>	<u>854,959</u>	
Pembayaran dari program: luran peserta	24,347	24,464	<i>Payments from plan: Employees' contributions</i>
Imbalan yang dibayar	(553,880)	(558,237)	<i>Benefits paid</i>
	<u>(529,533)</u>	<u>(533,773)</u>	
Pada akhir tahun	<u>6,448,951</u>	<u>7,186,720</u>	<i>At end of the year</i>

Rekonsiliasi atas perubahan aset neto selama tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian dana pensiun adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the movements of the net assets during the year ended 31 December 2018 and 2017 recognized in the pension fund's consolidated statement of financial position is as follows:

	2018	2017	
Kewajiban neto pada awal tahun	520,019	-	<i>Net liabilities at beginning of year</i>
Beban tahun berjalan	142,808	398,697	<i>Current year expenses</i>
Kontribusi pemberi kerja	(82,578)	(86,167)	<i>Employer's contributions</i>
Jumlah yang diakui pada pendapatan komprehensif lain	(580,250)	207,489	<i>Total amount recognized in other comprehensive income</i>
	<u>-</u>	<u>520,019</u>	
Kewajiban neto pada akhir tahun	<u>-</u>	<u>520,019</u>	<i>Net liabilities at end of year</i>

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

The movements in the fair value of plan assets of the years are as follows: (unaudited)

	2018	2017	
Pada awal tahun	6,666,701	6,383,827	<i>At beginning of the year</i>
Hasil dari aset program	495,178	476,077	<i>Return on plan assets</i>
Kerugian aktuarial	56,196	254,403	<i>Actuarial losses</i>
Kontribusi pemberi kerja	82,578	86,167	<i>Employer's contributions</i>
Kontribusi pekerja	24,347	24,464	<i>Employees' contributions</i>
Imbalan yang dibayar dan beban administrasi	(553,880)	(558,237)	<i>Benefits paid and administrative expenses paid</i>
	<u>(53,759)</u>	<u>(53,759)</u>	
Pada akhir tahun	<u>6,771,120</u>	<u>6,666,701</u>	<i>At end of the year</i>



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

44. IMBALAN KERJA (lanjutan)

44. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Defined benefit pension plan (continued)

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Pension expenses recognized in profit or loss, are as follows:

	2018	2017	
Biaya jasa kini	142,057	142,707	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	-	253,258	<i>Past service cost</i>
Bunga bersih	751	2,732	<i>Net interest</i>
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	142,808	398,697	<i>Expense recognized in profit or loss</i>
Biaya yang dilaporkan pada Laporan Laba rugi	142,808	398,697	<i>Expense recognized in profit or loss</i>
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(580,250)	207,489	<i>Remeasurement effect recognized in other comprehensive income</i>
Biaya imbalan pasti	(437,442)	606,186	<i>Defined benefit cost</i>

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah:

The key assumptions used in the above calculation are:

	2018	2017	
Asumsi ekonomi:			<i>Economic assumptions:</i>
Tingkat diskonto per tahun sebelum usia pensiun normal	8.25%	7.00%	<i>Annual discount rate before normal retirement age</i>
Tingkat diskonto per tahun setelah usia pensiun normal:			<i>Annual salary growth rate after normal retirement age:</i>
Pembayaran bulanan	8.25%	7.00%	<i>Monthly payment</i>
20% sekaligus	10.00%	10.50%	<i>20% lumpsum</i>
Tingkat kenaikan gaji	7.00%	7.00%	<i>Rate of salary increases</i>
Pendapatan dari dana pensiun iuran pasti	7.00%	7.50%	<i>Interest credited to refined contribution fund</i>
Tingkat kenaikan manfaat pensiun	3% per tahun berkala dan 4% per tahun untuk tahun 2017-2019/3% annual periodically and 4% annually for year 2017-2019	3% per tahun berkala dan 4% per tahun untuk tahun 2017-2019/3% annual periodically and 4% annually for year 2017-2019	<i>Pension increase rate</i>
Manfaat lain	2,500,000	2,500,000	<i>Other benefits</i>
	Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan sebesar manfaat pensiun bulanan yang dibayarkan dua kali setahun selama tahun 2017-2019/ <i>Welfare Allowance for pensioner amounted to monthly pension benefit that will be paid twice a year during year 2017-2019</i>	Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan sebesar manfaat pensiun bulanan yang dibayarkan dua kali setahun selama tahun 2017-2019/ <i>Welfare Allowance for pensioner amounted to monthly pension benefit that will be paid twice a year during year 2017-2019</i>	

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

44. IMBALAN KERJA (lanjutan)

44. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Defined benefit pension plan (continued)

	2018	2017	
Asumsi lainnya:			Other assumptions:
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat kematian	Modifikasi Tabel Mortalita/ Adjusted Mortality Table Indonesia 2011 (TMI2011)	Modifikasi Tabel Mortalita/ Adjusted Mortality Table Indonesia 2011 (TMI2011)	Mortality rate
Tingkat cacat	10% dari tingkat/ kematian/10% from mortality rate	10% dari tingkat/ kematian/10% from mortality rate	Disability rate
Tingkat pengunduran diri			Turnover rate
Umur 20-29	4.2%	4%	Age 20-29
Umur 30-34	2.8%	2%	Age 30-34
Umur 35-39	3.0%	1.2%	Age 35-39
Umur 40-50	1.7%	0.8%	Age 40-50
Umur 51-52	1.3%	0.4%	Age 51-52
Umur >52	0%	0%	Age >52

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut:

The sensitivity of defined benefit obligation to changes in the weighted assumptions is as follow:

**Dampak terhadap kewajiban manfaat pasti/
Impact on defined benefit obligation**

2018	Perubahan Asumsi/ Change in Assumption	Nilai kini kewajiban manfaat pasti/ Present value of benefit obligation	Biaya jasa kini/ Current service cost	2018
Tingkat diskonto	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	(570,106) 678,582	(1,780) 6,927	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	148,970 (137,261)	2,068 (1,893)	Salary increase rate

**Dampak terhadap kewajiban manfaat pasti/
Impact on defined benefit obligation**

2017	Perubahan Asumsi/ Change in Assumption	Nilai kini kewajiban manfaat pasti/ Present value of benefit obligation	Biaya jasa kini/ Current service cost	2016
Tingkat diskonto	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	(706,695) 854,568	(20,429) 25,737	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	204,082 (186,153)	12,075 (10,728)	Salary increase rate



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

44. IMBALAN KERJA (lanjutan)

44. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Defined benefit pension plan (continued)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analysis are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

Aset program terdiri dari: (tidak diaudit)

Plan assets comprise the following: (unaudited)

	2018			2017			
	Dikutip/ Quoted	Tidak dikutip/ Unquoted	Jumlah/ Total	Dikutip/ Quoted	Tidak dikutip/ Unquoted	Jumlah/ Total	
Instrumen Ekuitas							Equity instruments
Saham							Stocks
Keuangan	1,009,856	-	1,009,856	1,008,150	-	1,008,150	Financial
Reksadana	167,904	-	167,904	147,285	-	147,285	Mutual Funds
Penempatan Langsung Perdagangan, Jasa, dan Investasi	-	1,279,294	1,279,294	-	1,170,950	1,170,950	Direct Placement Trade, Services, and Investment
Instrumen Utang							Debt Instruments
Obligasi	-	1,883,930	1,883,930	-	1,889,721	1,889,721	Bonds
Surat Berharga Pemerintah	-	1,644,562	1,644,562	-	1,644,426	1,644,426	Government bonds
Properti	188,102	116,447	304,549	165,474	97,231	262,705	Property
Kas dan setara Kas							Cash and cash equivalents
Deposito on call	-	19,931	19,931	-	35,482	35,482	Deposit on call
Deposito	-	461,094	461,094	-	507,982	507,982	Deposit
Jumlah	1,365,862	5,405,258	6,771,120	1,320,909	5,345,792	6,666,701	Total

Investasi telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang. Diyakini bahwa instrumen utang memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima. Untuk program manfaat pasti sebagian besar instrumen surat utang merupakan portofolio obligasi Pemerintah Republik Indonesia dan obligasi korporasi di Indonesia.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact to the overall group of assets. The largest proportion of assets are invested in debt instruments. Debt instruments are expected to contribute best yields in the long term at an acceptable risk level. For defined benefit program, most of the debt instruments are Government of Indonesia bonds and corporate bonds.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset yang mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas dan properti mencerminkan tingkat imbal hasil jangka panjang aktual yang terjadi untuk tiap-tiap pasar.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets in accordance to the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as of the reporting date. Expected returns on equity and property investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

44. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pasca kerja untuk tahun 2019 adalah Rp106.408 (tidak diaudit).

Bank terespos beberapa risiko atas program imbalan kerja antara lain:

Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi dibawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada Dana Pensiun.

Untuk memastikan bahwa posisi investasi yang telah diatur dalam kerangka *Asset Liability Matching* (ALMA), Bank melakukan pemantauan terhadap investasi atas program pensiun (baik iuran pasti maupun manfaat pasti) dan memastikan tingkat investasi dimaksud mencapai tingkat diskonto yang digunakan. Selain itu, dilakukan implementasi kebijakan penyesuaian gaji sesuai dengan asumsi yang telah digunakan dalam perhitungan aktuarial untuk mengurangi selisih hasil perhitungan atas proyeksi imbalan kerja pasca kerja dengan realisasinya.

Rata-rata durasi kewajiban manfaat pasti adalah 9,67 tahun.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto untuk Entitas Induk adalah sebagai berikut:

	Kurang dari 1 tahun/ Less than a year	2 sampai 5 tahun/ Between 2 to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Jumlah/ Total	
2018					2018
Pensiun	572,020	2,313,512	24,009,000	26,894,532	Pension
Cuti besar	80,971	500,794	2,572,473	3,154,238	Long leave
Penghargaan masa kerja	31,063	229,640	2,337,623	2,598,326	Gratuity
Jumlah	684,054	3,043,946	28,919,096	32,647,096	Total
2017					2017
Pensiun	514,069	1,990,169	24,080,689	26,584,927	Pension
Cuti besar	13,463	109,631	1,674,321	1,797,415	Long leave
Penghargaan masa kerja	120,373	665,430	3,524,357	4,310,160	Gratuity
Jumlah	647,905	2,765,230	29,279,367	32,692,502	Total

44. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Defined benefit pension plan (continued)

Expected contributions to post-employment benefit plans for the year 2019 is amounted Rp106,408 (unaudited).

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans as follows:

The exposed risks in defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in benefit paid to Pension Fund.

To ensure that the result of investments is consistent with the Asset Liability Management (ALMA) framework, the Bank performs monitoring over the investment for the pension program (for both defined benefit and contribution plans) and performs action to ensure the return of investments will meet the applicable discount rate. Apart from that, implementation of salary adjustment policy has been performed in accordance to the assumptions used by actuarial calculation to reduce the gap on the calculation of projected post-employment benefits with its realization.

The average duration of the defined benefit obligation is 9.67 years.

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit for Parent Only is as follows:



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

44. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti

Bank juga memiliki program pensiun iuran pasti, untuk karyawannya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dimana kontribusi iuran bank adalah sebesar 1,5% sampai dengan 6,5% dari gaji karyawan sesuai jabatan karyawan, sedangkan kontribusi iuran karyawan adalah sebesar 0,5% dari upah yang ditetapkan oleh Bank untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sebelum tanggal 1 September 2005. Untuk karyawan tetap yang dipekerjakan mulai tanggal 1 September 2005, kontribusi Bank dan karyawan adalah masing-masing sebesar iuran 11,5% dan 3,5% dari gaji karyawan.

Karyawan tetap yang bergabung dengan Bank sebelum bulan September 2005, memiliki hak atas program pensiun manfaat pasti ditambah dengan program pensiun iuran pasti, atau imbalan kerja yang disediakan sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

Risiko yang terekspos pada program iuran pasti adalah hasil investasi dibawah tingkat diskonto. Hal ini akan mengakibatkan akumulasi iuran aktual lebih kecil dari nilai yang diasumsikan sehingga mengakibatkan selisih pembayaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan akan meningkat dan berdampak pada beban dan liabilitas yang akan meningkat pula.

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebesar Rp110.738 dan Rp73.258 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Liabilitas atas imbalan pasca kerja lainnya meliputi uang jasa, uang pisah dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 dan kompensasi lainnya.

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

44. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Defined contribution pension plan

The Bank also has a defined contribution pension plan for its employees which is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, whereby the contribution of the Bank are 1.5% to 6.5% of the employees' salaries according to the position of each employee, while the contribution of employees is 0.5% of the employees' salaries, determined by the Bank for employees hired before 1 September 2005. For employees hired after 1 September 2005, the Bank and its employees contribute 11.5% and 3.5%, respectively, of the employees' salaries.

Permanent employees who joined the Bank prior to September 2005 are entitled to defined benefits pension plan plus defined contribution pension plan, or the benefits provided for under the Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

The exposed risks in defined contribution plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and therefore, will cause the accumulated actual contribution to be lower than its assumption, increase the difference in the amount of contribution based on Labor Law, and will also increase the amount of the related expenses and liabilities.

Defined contribution pension expense that was charged to profit or loss amounted to Rp110,738 and Rp73,258 for the years ended 31 December 2018 and 2017, respectively.

Post employment benefits and other long-term employee benefits

The liability for post employment benefits consisted of service payments, severance and termination benefits based on Labor Law No. 13/2003 and other compensations.

Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

44. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuarial terdaftar PT Towers Watson Purbajaga, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 5 Januari 2019 dan 12 Januari 2018.

Perubahan liabilitas imbalan kerja yang diakui Bank pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2018	2017	
Liabilitas neto pada awal tahun	1,508,353	1,380,419	<i>Net liability at the beginning of the year</i>
Biaya selama tahun berjalan	9,495	284,282	<i>Expense recognized during the current year</i>
Jumlah yang diakui pada laba komprehensif lain	(48,006)	(21,371)	<i>Total amount recognized in other comprehensive income</i>
Pembayaran imbalan	(124,717)	(134,977)	<i>Actual benefit payments</i>
Liabilitas yang diakui oleh Bank	1,345,125	1,508,353	<i>Liability recognized by the Bank</i>

Biaya imbalan kerja yang dibebankan Bank pada laporan laba rugi:

	2018	2017	
Biaya jasa kini	54,955	129,032	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	103,427	102,189	<i>Interest cost</i>
(Keuntungan)/kerugian aktuarial tahun berjalan - neto	(148,887)	53,061	<i>Net actuarial (gains)/losses recognized in current year</i>
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	9,495	284,282	<i>Expense recognized in profit or loss</i>
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	9,495	284,282	<i>Expense reconized in profit or loss</i>
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(48,006)	(21,371)	<i>Remeasurement effect recognized in other comprehensive income</i>
Biaya imbalan pasti	(38,511)	262,911	<i>Defined benefit cost</i>

44. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Post employment benefits and other long-term employee benefits (continued)

The actuarial valuation of other long-term employee benefits for the years ended 31 December 2018 and 2017 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Towers Watson Purbajaga, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated 5 January 2019 and 12 January 2018

The movements of the employee benefits liability recognized by the Bank in the consolidated statement of financial position are as follows:

Employee benefits expense recognized by Bank in profit or loss:



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

44. IMBALAN KERJA (lanjutan)

44. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Post employment benefits and other long-term employee benefits (continued)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah:

The key assumptions used in the above calculation are:

	2018	2017	
Asumsi ekonomi:			Economic assumptions:
Tingkat diskonto per tahun:			Annual discount rate:
Kewajiban imbalan pasti	8.25%	7.00%	Define benefit obligation
Beban manfaat pasti	7.00%	8.00%	Net benefit cost
Tingkat kenaikan gaji	7.00%	7.00%	Rate of salary increases
Pendapatan dari dana pensiun iuran pasti	7.00%	7.50%	Interest credited to refined contribution fund
Asumsi lainnya:			Other assumptions:
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat kematian	Tabel Mortalita yang disesuaikan/ Adjusted Mortality Table Indonesia 2011 (TMI2011)	Tabel Mortalita yang disesuaikan/ Adjusted Mortality Table Indonesia 2011 (TMI2011)	Mortality rate
Tingkat cacat	10% dari tingkat/kematian/10% from mortality rate	10% dari tingkat/kematian/10% from mortality rate	Disability rate
Tingkat pengunduran diri			Turnover rate
Umur 20-29	4.2%	4%	Age 20-29
Umur 30-34	2.8%	2%	Age 30-34
Umur 35-39	3.0%	1.2%	Age 35-39
Umur 40-50	1.7%	0.8%	Age 40-50
Umur 51-52	1.3%	0.4%	Age 51-52
Umur >52	0%	0%	Age >52

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut:

The sensitivity of defined benefit obligation to changes in the actuarial assumptions is as follows:

**Dampak program pensiun manfaat pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya/
Impact on defined benefit pension plan and other long-term employee benefits**

2018	Perubahan Asumsi/ Change in Assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Biaya jasa kini/ Current service cost	2018
Tingkat diskonto	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	(98,323) 61,802	(3,676) 2,715	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	170,341 (199,993)	4,820 (5,301)	Salary increase rate

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

44. IMBALAN KERJA (lanjutan)

44. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Post employment benefits and other long-term employee benefits (continued)

Dampak program pensiun manfaat pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Impact on defined benefit pension plan and other long-term employee benefits				
2017	Perubahan Asumsi/ Change in Assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Biaya jasa kini/ Current service cost	2017
	Kenaikan/increase 1%	(14,173)	(4,703)	
Tingkat diskonto	Penurunan/decrease 1%	31,034	6,216	Discount rate
	Kenaikan/increase 1%	145,023	16,318	
Tingkat kenaikan gaji	Penurunan/decrease 1%	(115,840)	(12,114)	Salary increase rate

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analysis are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

45. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

45. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY

Laba tahun berjalan per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of shares of outstanding common shares during the related year.

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December		
	2018	2017	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	15,015,118	13,616,476	<i>Income for the year attributable to owners of the parent entity</i>
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar	18,648,656,458	18,648,656,458	<i>Weighted average number of ordinary shares outstanding</i>
Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah penuh)	805	730	<i>Basic earnings per share attributable to equity holders of the parent entity (in full Rupiah amount)</i>



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

46. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Tagihan komitmen			Commitment receivables
Pembelian berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	68,881,070	66,057,248	Unsettled purchased of foreign currency futures
Lain-lain	510,266	462,358	Others
Total	69,391,336	66,519,606	Total
Liabilitas komitmen			Commitment payables
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	54,227,735	49,963,012	Unused loan facilities
<i>Irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan	12,455,507	11,630,453	Outstanding irrevocable letters of credit
Penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	68,772,241	66,017,293	Sales of foreign currency futures unresolved
Total	135,455,483	127,610,758	Total
Tagihan kontinjensi			Contingent receivables
Garansi bank yang diterima	17,433,672	18,032,492	Bank guarantees received
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	4,063,886	4,705,325	Interest receivable on non performing assets
Lainnya	194,046	163,123	Others
Total	21,691,604	22,900,940	Total
Liabilitas kontinjensi			Contingent payables
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:			Guarantees issued in the form of:
<i>Performance bonds</i>	29,754,657	29,759,951	Performance bonds
<i>Advance payment bonds</i>	10,678,899	10,832,142	Advance payment bonds
<i>Standby letters of credit</i>	9,215,238	8,268,777	Standby letters of credit
Garansi bank lainnya	7,940,361	7,124,287	Other bank guarantees
<i>Bid bonds</i>	4,174,201	3,481,480	Bid bonds
<i>Shipping guarantee</i>	4,112	1,731	Shipping guarantee
<i>Risk sharing</i>	-	28	Risk sharing
Total	61,767,468	59,468,396	Total

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal Bank yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

Commitments and contingent transactions in the normal course of the Bank's activities that have credit risk are as follows:

	31 Desember/December		
	2018	2017	
Garansi bank yang diterbitkan Pihak yang berelasi (Catatan 47w) Pihak ketiga	26,924,576 34,842,892	23,743,394 35,725,002	Bank guarantees issued Related parties (Note 47w) Third parties
<i>Irrevocable letters of credit</i> Pihak yang berelasi (Catatan 47x) Pihak ketiga	8,169,836 4,285,671	6,659,731 4,970,722	Irrevocable letters of credit Related parties (Note 47x) Third parties
Total	74,222,975	71,098,849	

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2018	2017
Lancar	73,854,670	68,946,524
Dalam perhatian khusus	293,988	2,140,019
Kurang lancar	73,967	5
Diragukan	-	-
Macet	350	12,301
Total	74,222,975	71,098,849

46. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Commitments and contingent transactions that have credit risk by collectibility are as follows:

Current
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss

Total

47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

a. Jenis hubungan

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham utama

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan

Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia

Adhi Karya dan Entitas Anak
Amarta Karya
Aneka Tambang dan Entitas Anak
Angkasa Pura I dan Entitas Anak
Angkasa Pura II dan Entitas Anak
ASABRI
ASDP Ferry Indonesia
Asuransi Jasa Indonesia
Asuransi Jasa Raharja dan Entitas Anak
Asuransi Jiwasraya
Asuransi Kredit Indonesia dan Entitas Anak
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Entitas Anak
Balai Pustaka
Bank Mandiri dan Entitas Anak
Bank Rakyat Indonesia
Bank Tabungan Negara
Barata Indonesia
Berdikari dan Entitas Anak

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

a. Type of relationships

Related party relationship as the controlling shareholder

The Government of Republic of Indonesia through the Ministry of Finance

Control through The Government of The Republic of Indonesia

Adhi Karya and subsidiaries
Amarta Karya
Aneka Tambang and subsidiaries
Angkasa Pura I and subsidiaries
Angkasa Pura II and subsidiaries
ASABRI
ASDP Ferry Indonesia
Asuransi Jasa Indonesia
Asuransi Jasa Raharja and subsidiaries
Asuransi Jiwasraya
Asuransi Kredit Indonesia and subsidiaries
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia and subsidiaries
Balai Pustaka
Bank Mandiri and subsidiaries
Bank Rakyat Indonesia
Bank Tabungan Negara
Barata Indonesia
Berdikari and subsidiaries



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

a. Type of relationships (continued)

**Pengendalian melalui Pemerintah Republik
Indonesia**

**Control through The Government of The
Republic of Indonesia**

Bhanda Ghara Reksa dan Entitas Anak
Bina Karya
Biofarma
Biro Klasifikasi Indonesia
Boma Bisma Indra
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
Brantas Abipraya
Bulog dan Entitas Anak
Dahana
Damri
Danareksa dan Entitas Anak
Dirgantara Indonesia dan Entitas Anak
Djakarta Lloyd dan Entitas Anak
Dok & Perkapalan Kodja Bahari
Dok dan Perkapalan Surabaya
Garam
Garuda Indonesia dan Entitas Anak
Hotel Indonesia Natour
Hutama Karya dan Entitas Anak
IGLAS
Indah Karya
Indofarma dan Entitas Anak
Indonesia Asahan Aluminium
Indra Karya
Industri Kapal Indonesia
Industri Kereta Api dan Entitas Anak
Industri Sandang Nusantara
Industri Telekomunikasi Indonesia
Istaka Karya
Jaminan Kredit Indonesia
Jasa Marga dan Entitas Anak
Jasa Tirta I
Jasa Tirta II
Kawasan Berikat Nusantara
Kawasan Industri Makassar

*Bhanda Ghara Reksa and subsidiaries
Bina Karya
Biofarma
Biro Klasifikasi Indonesia
Boma Bisma Indra
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
Brantas Abipraya
Bulog and subsidiaries
Dahana
Damri
Danareksa and subsidiaries
Dirgantara Indonesia and subsidiaries
Djakarta Lloyd and subsidiaries
Dok & Perkapalan Kodja Bahari
Dok dan Perkapalan Surabaya
Garam
Garuda Indonesia and subsidiaries
Hotel Indonesia Natour
Hutama Karya and subsidiaries
IGLAS
Indah Karya
Indofarma and subsidiaries
Indonesia Asahan Aluminium
Indra Karya
Industri Kapal Indonesia
Industri Kereta Api and subsidiaries
Industri Sandang Nusantara
Industri Telekomunikasi Indonesia
Istaka Karya
Jaminan Kredit Indonesia
Jasa Marga and subsidiaries
Jasa Tirta I
Jasa Tirta II
Kawasan Berikat Nusantara
Kawasan Industri Makassar*

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

a. Type of relationships (continued)

**Pengendalian melalui Pemerintah Republik
Indonesia**

**Control through The Government of The
Republic of Indonesia**

Kawasan Industri Medan
Kawasan Industri Wijayakusuma
Kementerian Keuangan
Kereta Api Indonesia dan Entitas Anak
Kertas Kraft Aceh
Kertas Leceh
Kimia Farma dan Entitas Anak
Kliring Berjangka Indonesia
K Krakatau Steel dan Entitas Anak
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
LEN Industri dan Entitas Anak
LKBN Antara
Merpati Nusantara Airlines
PAL Indonesia dan Entitas Anak
PANN dan Entitas Anak
Pegadaian dan Entitas Anak
Pelabuhan Indonesia I dan Entitas Anak
Pelabuhan Indonesia II dan Entitas Anak
Pelabuhan Indonesia III dan Entitas Anak
Pelabuhan Indonesia IV dan Entitas Anak
Pelayaran Nasional Indonesia dan Entitas Anak
Pembangunan Perumahan dan Entitas Anak
Percetakan Negara Republik Indonesia
Percetakan Uang Republik Indonesia dan Entitas Anak
Perhutani dan Entitas Anak
Perikanan Indonesia
Perikanan Nusantara
Perkebunan Nusantara III dan Entitas Anak
Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak
Pertamina dan Entitas Anak
Pertani
Perumnas
Perusahaan Gas Negara dan Entitas Anak
Perusahaan Listrik Negara dan Entitas Anak
Perusahaan Pengelola Aset dan Entitas Anak
Perusahaan Perdagangan Indonesia
Pindad dan Entitas Anak

Kawasan Industri Medan
Kawasan Industri Wijayakusuma
Kementerian Keuangan
Kereta Api Indonesia and subsidiaries
Kertas Kraft Aceh
Kertas Leceh
Kimia Farma and subsidiaries
Kliring Berjangka Indonesia
K Krakatau Steel and subsidiaries
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
LEN Industri and subsidiaries
LKBN Antara
Merpati Nusantara Airlines
PAL Indonesia and subsidiaries
PANN and subsidiaries
Pegadaian and subsidiaries
Pelabuhan Indonesia I and subsidiaries
Pelabuhan Indonesia II and subsidiaries
Pelabuhan Indonesia III and subsidiaries
Pelabuhan Indonesia IV and subsidiaries
Pelayaran Nasional Indonesia and subsidiaries
Pembangunan Perumahan and subsidiaries
Percetakan Negara Republik Indonesia
Percetakan Uang Republik Indonesia and subsidiaries
Perhutani and subsidiaries
Perikanan Indonesia
Perikanan Nusantara
Perkebunan Nusantara III and subsidiaries
Permodalan Nasional Madani and subsidiaries
Pertamina and subsidiaries
Pertani
Perumnas
Perusahaan Gas Negara and subsidiaries
Perusahaan Listrik Negara and subsidiaries
Perusahaan Pengelola Aset and subsidiaries
Perusahaan Perdagangan Indonesia
Pindad and subsidiaries



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

a. Type of relationships (continued)

**Pengendalian melalui Pemerintah Republik
Indonesia**

**Control through The Government of The
Republic of Indonesia**

Pos Indonesia dan Entitas Anak
Primissima
Pupuk Indonesia Holding Company dan Entitas Anak
Rajawali Nusantara Indonesia dan Entitas Anak
Reasuransi Indonesia Utama dan Entitas Anak
Sang Hyang Seri
Sarana Karya
Sarana Multigriya Finansial
Sarinah dan Entitas Anak
Semen Baturaja
Semen Indonesia dan Entitas Anak
Sucofindo dan Entitas Anak
Surveyor Indonesia
Tambang Batubara Bukit Asam dan Entitas Anak
Taspen dan Entitas Anak
Telekomunikasi Indonesia dan Entitas Anak
Timah dan Entitas Anak
Varuna Tirta Prakasya
Virama Karya
Waskita Karya dan Entitas Anak
Wijaya Karya dan Entitas Anak
Yodya Karya

Pos Indonesia and subsidiaries
Primissima
Pupuk Indonesia Holding Company and subsidiaries
Rajawali Nusantara Indonesia and subsidiaries
Reasuransi Indonesia Utama and subsidiaries
Sang Hyang Seri
Sarana Karya
Sarana Multigriya Finansial
Sarinah and subsidiaries
Semen Baturaja
Semen Indonesia and subsidiaries
Sucofindo and subsidiaries
Surveyor Indonesia
Tambang Batubara Bukit Asam and subsidiaries
Taspen and subsidiaries
Telekomunikasi Indonesia and subsidiaries
Timah and subsidiaries
Varuna Tirta Prakasya
Virama Karya
Waskita Karya and subsidiaries
Wijaya Karya and subsidiaries
Yodya Karya

Pengendalian Kegiatan Perusahaan

Control on Company's Activities

Manajemen Kunci

Key Management

**Berdasarkan Kepemilikan dan/atau
Kepengurusan**

By Ownership and/or Management

Dana Pensiun BNI

Dana Pensiun BNI

Asuransi Tripakarta

Asuransi Tripakarta

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

b. Giro pada bank lain

b. Current accounts with other banks

	2018	2017	
Bank Mandiri	78,796	1,407,206	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia	112	228	Bank Rakyat Indonesia
Total	78,908	1,407,434	Total

c. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia

c. Placements with other banks and Bank Indonesia

	2018	2017	
Bank Mandiri	1,103,975	261,052	Bank Mandiri
Bank Tabungan Negara	538,387	292,534	Bank Tabungan Negara
Bank Rakyat Indonesia	35,222	138,016	Bank Rakyat Indonesia
LPEI	-	607,025	LPEI
Total	1,677,584	1,298,627	Total

d. Efek-efek

d. Marketable securities

	2018	2017	
Bank Rakyat Indonesia	1,316,320	485,542	Bank Rakyat Indonesia
Danareksa	930,484	948,009	Danareksa
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	906,213	1,279,920	Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Bank Tabungan Negara	852,752	163,629	Bank Tabungan Negara
LPEI	827,413	1,784,242	LPEI
Bank Mandiri	740,081	247,592	Bank Mandiri
Hutama Karya	690,400	-	Hutama Karya
Permodalan Nasional Madani	505,971	300,964	Permodalan Nasional Madani
PLN	392,070	40,579	PLN
Pegadaian	302,999	1,000	Pegadaian
Pelabuhan Indonesia II	285,548	269,225	Pelabuhan Indonesia II
Waskita Karya	280,484	141,672	Waskita Karya
Telekomunikasi Indonesia	171,412	1,892	Telekomunikasi Indonesia
Lain-lain	388,082	389,579	Others
Total	8,590,229	6,053,845	Total

e. Obligasi Pemerintah

e. Government Bonds

	2018	2017	
Pemerintah Republik Indonesia	86,791,402	79,849,452	The Government of The Republic of Indonesia

f. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

f. Bills and other receivables

	2018	2017	
Waskita Karya	2,773,748	2,372,248	Waskita Karya
Adhi Karya	2,729,825	2,263,439	Adhi Karya
Brantas Abipraya	1,511,881	1,240,420	Brantas Abipraya
Wijaya Karya	1,118,976	1,033,111	Wijaya Karya
Bank Mandiri	941,616	133,191	Bank Mandiri
Hutama Karya	817,363	728,665	Hutama Karya
Garuda Indonesia	667,532	-	Garuda Indonesia
Bank Rakyat Indonesia	402,678	142,442	Bank Rakyat Indonesia
Krakatau Steel	235,672	-	Krakatau Steel
Lain-lain	508,494	597,035	Other
Total	11,707,785	8,510,551	Total



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

g. Tagihan akseptasi

g. Acceptances receivables

	2018	2017	
PLN	1,121,858	1,632,474	PLN
Garuda Indonesia	1,078,895	1,530,945	Garuda Indonesia
Adhi Karya	811,520	824,332	Adhi Karya
Pembangunan Perumahan	793,789	432,663	Pembangunan Perumahan
Hutama Karya	530,997	141,396	Hutama Karya
Pindad	249,080	302,617	Pindad
Waskita Karya	199,077	-	Waskita Karya
Wijaya Karya	151,949	61,863	Wijaya Karya
Dahana	145,812	73,498	Dahana
Krakatau Steel	103,992	-	Krakatau Steel
LPEI	64,858	15,984	LPEI
Petrokimia Gresik	63,476	40,485	Petrokimia Gresik
Nindya Karya	44,448	76,772	Nindya Karya
Perum Percetakan Negara RI	41,170	15,912	Perum Percetakan Negara RI
LEN Industri	40,854	42,645	LEN Industri
Barata Indonesia	38,662	16,315	Barata Indonesia
Dirgantara Indonesia	33,989	40,401	Dirgantara Indonesia
Lain-lain	33,625	519,934	Others
Total	5,548,051	5,768,236	Total

h. Tagihan derivatif

h. Derivative receivables

	2018	2017	
Pertamina	46,137	335	Pertamina
Krakatau Steel	8,122	440	Krakatau Steel
Garuda Indonesia	-	13,327	Garuda Indonesia
PLN	-	11,660	PLN
Lain-lain	2,058	1,599	Others
Total	56,317	27,361	Total

i. Pinjaman yang diberikan

i. Loans

	2018	2017	
PLN	14,414,539	18,626,608	PLN
Perum Bulog	12,599,313	3,815,351	Perum Bulog
Pertamina	8,888,804	2,251,796	Pertamina
Jasa Marga	7,825,356	5,129,498	Jasa Marga
Waskita Karya	6,641,236	5,835,011	Waskita Karya
Telkom	6,191,700	6,228,509	Telkom
Krakatau Steel	4,583,740	4,131,607	Krakatau Steel
Pegadaian	4,563,915	5,095,844	Pegadaian
Semen Gresik	4,300,618	84,912	Semen Gresik
Petrokimia Gresik	4,108,777	4,360,190	Petrokimia Gresik
Kementerian Keuangan	3,257,073	2,665,106	Kementerian Keuangan
Perkebunan Nusantara III	2,634,126	2,737,673	Perkebunan Nusantara III
Perkebunan Nusantara VII	2,222,540	2,165,434	Perkebunan Nusantara VII
Bukit Asam	1,822,209	2,106,006	Bukit Asam
Kereta Api Indonesia	1,738,875	1,820,071	Kereta Api Indonesia
Hutama Karya	1,469,190	553,459	Hutama Karya
Pupuk Indonesia	1,056,335	459,153	Pupuk Indonesia
Wijaya Karya	1,046,434	1,508,178	Wijaya Karya
Pupuk Iskandar Muda	1,011,972	1,014,000	Pupuk Iskandar Muda
Rajawali Nusindo	1,108,824	1,094,772	Rajawali Nusindo
Antam	977,840	-	Antam
Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia	974,873	752,338	Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia
Pelabuhan Indonesia I	944,584	461,717	Pelabuhan Indonesia I
Perkebunan Nusantara XI	924,818	465,949	Perkebunan Nusantara XI
PAL Indonesia	915,692	888,561	PAL Indonesia
Garuda Indonesia	904,015	1,249,914	Garuda Indonesia

196

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

i. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

i. Loans (continued)

	2018	2017	
Semen Baturaja	863,904	863,904	Semen Baturaja
Angkasa Pura II	700,000	185,985	Angkasa Pura II
Permodalan Nasional Madani	679,972	503,328	Permodalan Nasional Madani
LEN Industri	638,896	90,267	LEN Industri
Pindad	624,403	660,387	Pindad
Dirgantara Indonesia	589,750	633,703	Dirgantara Indonesia
Pupuk Sriwijaya	561,008	1,066,948	Pupuk Sriwijaya
Perum Peruri	541,512	227,765	Perum Peruri
Perkebunan Nusantara IV	471,189	471,189	Perkebunan Nusantara IV
Adhi Karya	430,000	249,950	Adhi Karya
Perkebunan Nusantara V	416,318	513,975	Perkebunan Nusantara V
Pos Indonesia	331,861	364,000	Pos Indonesia
Lain-lain	3,428,721	5,082,440	Others
Total	107,404,932	86,415,499	Total

j. Penyertaan saham

j. Equity investments

	2018	2017	
PT PANN Pembiayaan Maritim	724,338	724,338	PT PANN Pembiayaan Maritim

k. Simpanan nasabah

k. Deposits from customers

	2018	2017	
Entitas dikendalikan melalui Pemerintah Republik Indonesia	87,220,328	87,581,384	Entities controlled through The Government of Republic of Indonesia
Manajemen Kunci	243,546	174,696	Key Management
	87,463,874	87,756,080	

l. Simpanan dari bank lain

l. Deposits from other banks

	2018	2017	
Entitas dikendalikan melalui Pemerintah Republik Indonesia	2,968,169	2,246,156	Entities controlled through The Government of Republic of Indonesia

**m. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli
kembali**

**m. Securities sold under agreements to
repurchase**

	2018	
Bank Mandiri	87,503	Bank Mandiri

n. Efek-efek yang diterbitkan

n. Securities issued

	2018	2017	
Bank Rakyat Indonesia	456,854	265,896	Bank Rakyat Indonesia
Taspen	419,866	-	Taspen
Dana Pensiun BNI	229,927	229,909	Dana Pensiun BNI
Bank Mandiri	148,952	148,941	Bank Mandiri
Lain-lain	12,997	-	Others
Total	1,268,595	644,746	Total



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

o. Pinjaman yang diterima

o. Borrowings

	2018	2017	
Bank Mandiri	117,110	271,350	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia	100,000	135,675	Bank Rakyat Indonesia
LPEI	37,804	-	
Total	254,914	407,025	Total

p. Efek-efek subordinasi

p. Subordinated securities

	2018	
Asuransi Tripakarta	24,988	Asuransi Tripakarta

q. Liabilitas derivatif

q. Derivative payables

	2018	2017	
Bank Mandiri	33,390	11,591	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia	6,913	-	Bank Rakyat Indonesia
PLN	-	17,474	PLN
Lain-lain	931	1,565	Lain-lain
Total	41,234	30,630	Total

r. Liabilitas akseptasi

r. Acceptances payables

	2018	2017	
Pembangunan Perumahan Hutama Karya	306,422	184,761	Pembangunan Perumahan Hutama Karya
Pindad	280,584	41,963	Pindad
Dahana	241,525	296,189	Dahana
Garuda Indonesia	144,327	76,283	Garuda Indonesia
Petrokimia Gresik	71,483	125,801	Petrokimia Gresik
Perum Percetakan Negara RI	63,476	40,485	Perum Percetakan Negara RI
Wijaya Karya	41,170	15,912	Wijaya Karya
Nindya Karya	28,459	26,769	Nindya Karya
Krakatau Steel	14,746	44,350	Krakatau Steel
Semen Indonesia	12,234	60,433	Semen Indonesia
Barata Indonesia	9,821	14,808	Barata Indonesia
Cambrics Primissima	8,921	16,315	Cambrics Primissima
Boma Bisma Indra	5,760	-	Boma Bisma Indra
LEN Industri	5,620	-	LEN Industri
Waskita Karya	5,573	14,757	Waskita Karya
Pertamina	5,424	12,290	Pertamina
Lain-lain	-	118,455	Others
	8,402	71,410	
Total	1,253,947	1,160,981	Total

s. Dana Syirkah Temporer - Giro Mudharabah

**s. Temporary Syirkah Funds - Mudharabah
Current Accounts**

	2018	2017	
Entitas dikendalikan melalui Pemerintah Republik Indonesia	209,056	319,334	Entities controlled through The Government of Republic of Indonesia

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

**t. Dana Syirkah Temporer - Deposito
Mudharabah**

**t. Temporary Syirkah Funds - Mudharabah
Deposit Accounts**

	2018	2017	
Entitas dikendalikan melalui Pemerintah Republik Indonesia	357,052	7,824,499	<i>Entities controlled through The Government of Republic of Indonesia Key Management</i>
Manajemen kunci	13,475	18,904	
Total	370,527	7,843,403	Total

**u. Dana Syirkah Temporer - Tabungan
Mudharabah**

**u. Temporary Syirkah Funds - Mudharabah
Saving Accounts**

	2018	2017	
Manajemen kunci	16,545	9,499	<i>Key Management Entities controlled through The Government of Republic of Indonesia</i>
Entitas dikendalikan melalui Pemerintah Republik Indonesia	29	23	
Total	16,574	9,522	Total

v. Sukuk Mudharabah yang diterbitkan

v. Sukuk Mudharabah Issued

	2017	
Bank Syariah Mandiri	100,000	<i>Bank Syariah Mandiri Dana Pensiun BNI Bank Rakyat Indonesia Syariah Danareksa Penjaminan Infrastruktur Indonesia Asuransi Tripakarta</i>
Dana Pensiun BNI	45,000	
Bank Rakyat Indonesia Syariah	68,500	
Danareksa	25,000	
Penjaminan Infrastruktur Indonesia	20,000	
Asuransi Tripakarta	1,000	
Total	259,500	Total

w. Garansi bank yang diterbitkan

w. Bank guarantees issued

	2018	2017	
Hutama Karya	3,205,967	3,039,526	<i>Hutama Karya Wijaya Karya</i>
Wijaya Karya	2,742,572	2,243,749	
Adhi Karya	2,403,442	1,276,520	<i>Adhi Karya Pembangunan Perumahan</i>
Pembangunan Perumahan	1,932,559	1,882,482	
Pertamina	1,606,975	1,352,499	<i>Pertamina Rekayasa Industri</i>
Rekayasa Industri	1,599,659	1,570,803	
Nindya Karya	1,598,651	1,726,262	<i>Nindya Karya PLN</i>
PLN	1,457,433	806,742	
Waskita Karya	1,448,595	1,989,558	<i>Waskita Karya Garuda Indonesia</i>
Garuda Indonesia	1,372,821	80,295	
Telkom	1,350,365	1,477,346	<i>Telkom Brantas Abipraya</i>
Brantas Abipraya	1,007,708	810,321	
Bank Mandiri	891,354	937,064	<i>Bank Mandiri Petrokimia Gresik</i>
Petrokimia Gresik	857,687	272,932	
Industri Kereta Api	613,723	-	<i>Industri Kereta Api LPEI</i>
LPEI	404,415	1,532,547	
Dirgantara Indonesia	280,164	337,725	<i>Dirgantara Indonesia Kereta Api Indonesia</i>
Kereta Api Indonesia	265,759	1,571	
Perum Peruri	255,046	6,580	<i>Perum Peruri Perusahaan Gas Negara</i>
Perusahaan Gas Negara	246,313	231,016	
Barata Indonesia	234,627	34,087	<i>Barata Indonesia PAL Indonesia</i>
PAL Indonesia	173,127	280,742	
LEN Industri	141,693	195,886	<i>LEN Industri Pindad</i>
Pindad	122,465	14,184	
Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia	102,274	195,928	<i>Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia</i>
Rajawali Nusindo	98,466	80,724	
Semen Indonesia	91,834	90,865	<i>Semen Indonesia Others</i>
Lain-lain	418,882	1,275,440	
Total	26,924,576	23,743,394	Total

199



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

x. Letters of Credit

x. Letters of Credit

	2018	2017	
PLN	1,328,363	975,941	PLN
Kereta Api Indonesia	1,038,299	678,194	Kereta Api Indonesia
Pembangunan Perumahan	850,133	611,572	Pembangunan Perumahan
Industri Kereta Api	766,065	-	Industri Kereta Api
Krakatau Steel	688,541	339,279	Krakatau Steel
Hutama Karya	633,118	65,275	Hutama Karya
Pertamina	614,719	635,584	Pertamina
Pindad	544,579	315,440	Pindad
Pelabuhan Indonesia I	287,648	532,690	Pelabuhan Indonesia I
Barata Indonesia	241,207	36,595	Barata Indonesia
LEN Industri	146,001	420,885	LEN Industri
Semen Gresik	139,734	86,825	Semen Gresik
Dahana	127,152	148,850	Dahana
Garuda Indonesia	120,095	26,073	Garuda Indonesia
Nindya Karya	119,760	87,740	Nindya Karya
Perkebunan Nusantara V	79,848	73,746	Perkebunan Nusantara V
Dirgantara Indonesia	69,782	365,684	Dirgantara Indonesia
Pupuk Iskandar Muda	62,154	28,686	Pupuk Iskandar Muda
Petrokimia Gresik	50,334	239,582	Petrokimia Gresik
Semen Indonesia	49,340	-	Semen Indonesia
Adhi Karya	46,480	-	Adhi Karya
Wijaya Karya	34,528	25,909	Wijaya Karya
Lain-lain	131,956	965,181	Others
Total	8,169,836	6,659,731	Total

y. Gaji dan tunjangan

y. Salaries and benefits

	2018			Total	
	Imbalan kerja jangka pendek/ short-term benefit	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ other long- term benefit	Pesangon pemutusan kontrak kerja/ termination benefit		
Dewan Komisaris	17,592	45,143	3,422	66,157	Board of Commissioners
Direksi	47,837	128,478	8,848	185,163	Board of Directors
Komite Audit	840	-	-	840	Audit Committee
SEVP, EVP dan SVP	119,857	-	-	119,857	SEVP, EVP and SVP
	186,126	173,621	12,270	372,017	
	2017			Total	
	Imbalan kerja jangka pendek/ short-term benefit	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ other long- term benefit	Pesangon pemutusan kontrak kerja/ termination benefit		
Dewan Komisaris	14,712	52,850	3,634	71,196	Board of Commissioners
Direksi	40,376	132,148	7,951	180,475	Board of Directors
Komite Audit	600	-	-	600	Audit Committee
SEVP, EVP dan SVP	114,269	-	-	114,269	SEVP, EVP and SVP
	169,957	184,998	11,585	366,540	

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

The details balances of transactions with related parties as of 31 December 2018 and 2017 are as follows:

	2018	2017	
<u>Aset</u>			<u>Assets</u>
Giro pada bank lain	78,908	1,407,434	Current accounts with other bank
Penempatan pada bank lain	1,677,584	1,298,627	Placements with other banks
Efek-efek	8,590,229	6,053,845	Marketable securities
Obligasi Pemerintah	86,791,402	79,849,452	Government bonds
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	11,707,785	8,510,551	Bills and other receivables
Tagihan akseptasi	5,548,051	5,768,236	Acceptances receivables
Tagihan derivatif	56,317	27,361	Derivative receivables
Pinjaman yang diberikan	107,404,932	86,415,498	Loans
Penyertaan saham	724,338	724,338	Equity investments
Jumlah aset kepada pihak-pihak berelasi	222,579,546	190,055,342	Total assets with related parties
Jumlah aset konsolidasian	808,572,011	709,330,084	Total consolidation assets
Persentase jumlah aset kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset konsolidasian	27.5%	26.8%	Percentage of total assets with related parties to total consolidated assets
<u>Liabilitas</u>			<u>Liabilities</u>
Simpanan nasabah	87,463,874	87,756,080	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2,968,169	2,246,156	Deposit from other banks
Efek-efek yang diterbitkan	1,268,596	644,746	Securities issued
Efek-efek subordinasi	24,988	-	Subordinated securities
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	739,103	-	Securities sold under agreements to repurchase
Pinjaman yang diterima	254,914	407,025	Borrowings
Liabilitas derivatif	41,234	30,630	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	1,253,947	1,160,981	Acceptances payables
Jumlah liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	94,014,825	92,245,618	Total liabilities with related parties
Jumlah liabilitas konsolidasian	671,237,546	584,086,818	Total consolidation liabilities
Persentase jumlah liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset konsolidasian	14.0%	15.8%	Percentage of total liabilities with related parties to total consolidated liabilities
<u>Dana Syirkah Temporer</u>			<u>Temporary Syirkah Funds</u>
Simpanan Mudharabah	596,157	8,172,259	Mudharabah Saving
Sukuk Mudharabah	-	259,500	Mudharabah Sukuk
Jumlah Dana Syirkah Temporer Pihak-pihak berelasi	596,157	8,431,759	Total Temporary Syirkah Funds with related parties
Jumlah Dana Syirkah Temporer	26,960,676	24,339,962	Total Temporary Syirkah Funds
Persentase jumlah Dana Syirkah Temporer kepada pihak-pihak Berelasi terhadap jumlah Dana Syirkah Temporer konsolidasian	2.2%	34.6%	Percentage of total temporary syirkah funds with related parties to total consolidated Temporary syirkah funds



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

48. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi Grup dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, sebagai berikut: Korporasi, Komersial dan Kecil, Konsumer dan Ritel, Tresuri dan Institusi Keuangan, Kantor Pusat dan Entitas Anak. Dalam menentukan hasil segmen, beberapa akun aset dan liabilitas dan pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen. Transaksi antar segmen usaha diperlakukan seperti transaksi pihak ketiga yang dicatat ke dalam masing-masing segmen dan dieliminasi di tingkat Bank.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank:

- **Korporasi:** termasuk kredit yang diberikan, simpanan nasabah dan transaksi-transaksi lainnya atas nasabah korporasi.
- **Komersial dan Kecil:** termasuk kredit yang diberikan, simpanan nasabah dan transaksi-transaksi lainnya atas nasabah dengan skala kecil hingga menengah.
- **Konsumer dan Ritel:** termasuk kredit pembiayaan konsumsi antara lain kredit kepemilikan rumah, kartu kredit dan transaksi-transaksi lain atas nasabah konsumer, serta termasuk kredit yang diberikan kepada individu dengan skala ritel.
- **Tresuri dan Institusi Keuangan:** terkait dengan kegiatan tresuri Bank termasuk transaksi valuta asing, *money market*, *capital market* dan *fixed income*, termasuk antara lain bisnis perbankan internasional dan cabang luar negeri.
- **Kantor Pusat:** merupakan penyediaan jasa secara sentralisasi kepada segmen lainnya.
- **Entitas Anak:** seluruh transaksi yang dilakukan oleh Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan syariah, asuransi, pembiayaan konsumen dan sekuritas.

Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direview oleh Manajemen Bank. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Grup disajikan dalam tabel di bawah ini:

48. SEGMENT INFORMATION

The Group's operating segments represent the key customers and product groups, as follows: Corporate, Commercial and Small, Consumer and Retail, Treasury and Financial Institution, Head Office and Subsidiaries. In determining the segment results, certain assets and liabilities items and related revenues and expenses are attributed to each segment based on internal management reporting policies. Transactions between business segments are recorded within the segment as if they are third party transactions and are eliminated at the Bank level.

The following summary describes the operations in each of the Bank's reportable segments:

- **Corporate:** includes loans, deposits and other transactions and balances with corporate customers.
- **Commercial and Small:** includes loans, deposits and other transactions and balances with small to middle size customers.
- **Consumer and Retail:** includes consumer loan such as housing loans, credit cards and other transactions with consumer loans, and including loans to retail customers.
- **Treasury and Financial Institution:** treasury activities including foreign exchange, money market, capital market and fixed income, also including international banking and overseas branch.
- **Head Office:** represent centralized services for other segments.
- **Subsidiaries:** all transactions from Subsidiaries in sharia banking, insurance, consumer financing and securities.

Performance is measured based on segment profit before income tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Bank's Management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.

Information concerning the operating segments of the Group are set out in the tables below:

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

48. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

48. SEGMENT INFORMATION (continued)

	2018								
	Korporasi/ Corporate	Komersial dan Kecil/ Commercial and Small	Konsumer dan Ritel/ Consumer and Retail	Tresuri dan Insitusi Keuangan/ Treasury and Financial Institution	Kantor Pusat/ Head Office	Entitas Anak/ Subsidiaries	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination**)	Konsolidasi/ Consolidation	
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah - neto *)	12,813,111	8,571,831	10,775,890	2,086,897	-	2,694,534	(1,495,948)	35,446,315	Interest income and sharia income - net *)
Pendapatan premi - neto	-	-	-	-	-	1,711,857	-	1,711,857	Premium income - net
Pendapatan operasional lainnya	3,376,656	1,306,501	6,580,492	2,950,936	-	518,529	(3,120,515)	11,612,599	Other operating income
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(1,431,145)	(3,787,622)	(1,285,949)	(145,055)	(148,812)	(589,828)	-	(7,388,411)	Allowance for impairment losses
Beban operasional lainnya	(5,541,492)	(2,547,390)	(8,941,323)	(1,947,361)	-	(3,459,580)	654,185	(21,782,961)	Other operating expenses
Laba operasional	9,217,130	3,543,320	7,129,110	2,945,417	(148,812)	875,512	(3,962,278)	19,599,399	Operating income
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	21	184	14,074	2,697	294,131	(78,287)	(11,504)	221,316	Non operating income/(expenses) - net
Laba sebelum beban pajak	9,217,151	3,543,504	7,143,184	2,948,114	145,319	797,225	(3,973,782)	19,820,715	Income before tax expense
Total aset	258,869,706	135,308,561	78,206,547	275,552,690	50,593,543	60,520,749	(50,479,785)	808,572,011	Total assets
Total liabilitas	270,621,130	14,658,291	259,917,921	103,149,183	5,291,501	50,249,007	(32,649,487)	671,237,546	Total liabilities
	2017								
	Korporasi/ Corporate	Komersial dan Kecil/ Commercial and Small	Konsumer dan Ritel/ Consumer and Retail	Tresuri dan Insitusi Keuangan/ Treasury and Financial Institution	Kantor Pusat/ Head Office**)	Entitas Anak/ Subsidiaries	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination***)	Konsolidasi/ Consolidation	
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah - neto *)	12,428,601	6,807,866	9,558,035	1,860,111	-	2,324,741	(1,041,591)	31,937,763	Interest income and sharia income - net *)
Pendapatan premi - neto	-	-	-	-	-	1,767,568	-	1,767,568	Premium income - net
Pendapatan operasional lainnya	2,803,803	1,159,012	5,875,743	3,213,069	-	474,071	(2,485,639)	11,040,059	Other operating income
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(2,107,854)	(2,306,273)	(1,538,979)	(73,992)	(476,065)	(623,172)	-	(7,126,335)	Allowance for impairment losses
Beban operasional lainnya	(4,166,494)	(2,702,085)	(8,961,270)	(2,035,563)	-	(3,064,612)	533,632	(20,396,392)	Other operating expenses
Laba operasional	8,958,056	2,958,520	4,933,529	2,963,625	(476,065)	878,596	(2,993,598)	17,222,663	Operating income
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	(7)	22	16,352	(1,356)	(27,696)	(42,514)	(2,077)	(57,276)	Non operating income/(expenses) - net
Laba sebelum beban pajak	8,958,049	2,958,542	4,949,881	2,962,269	(503,761)	836,082	(2,995,675)	17,165,387	Income before tax expense
Total aset	215,887,752	121,160,933	69,216,585	246,499,835	43,033,752	53,252,719	(39,721,492)	709,330,084	Total assets
Total liabilitas	248,980,052	121,311	237,864,259	74,321,428	10,372,129	43,303,477	(30,875,838)	584,086,818	Total liabilities

*) termasuk komponen internal transfer pricing antar segmen operasi
 **) termasuk eliminasi internal transfer pricing atau reklasifikasi antar segmen operasi dan eliminasi terhadap entitas anak
 ***) format penyajian 2017 disesuaikan dengan 2018

*) Includes componen of internal transfer pricing between operating segment
 **) Includes elimination of internal transfer pricing or reclassification between operating segment and elimination of subsidiaries
 ***)The 2017 presentation format is reclassified to align with 2018



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

48. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

48. SEGMENT INFORMATION (continued)

Informasi yang berkaitan dengan segmen geografis BNI dan Entitas Anak disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the geographical segments of BNI and Subsidiaries are set out in the tables below:

	2018						
	Indonesia	New York	Eropa/ Europe	Asia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasi/ Consolidated	
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah - neto	34,942,070	155,115	176,445	182,385	(9,700)	35,446,315	Interest income and sharia income - net
Pendapatan premi - neto	1,711,857	-	-	-	-	1,711,857	Premium income - net
Pendapatan operasional lainnya	12,264,695	78,624	123,630	213,694	(1,068,044)	11,612,599	Other operating income
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(7,321,672)	(15,678)	(646)	(50,415)	-	(7,388,411)	Allowance for impairment losses
Beban operasional lainnya	(21,183,932)	(128,255)	(105,163)	(365,611)	-	(21,782,961)	Other operating expenses
Laba operasional	20,413,018	89,806	194,266	(19,947)	(1,077,744)	19,599,399	Operating income
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	215,725	(11)	(550)	2,870	3,282	221,316	Non operating income/(expenses) - net
Laba sebelum beban pajak	20,628,743	89,795	193,716	(17,077)	(1,074,462)	19,820,715	Income before tax expense
Beban pajak						(4,728,952)	Tax expense
Laba bersih						15,091,763	Net income
Total aset	743,710,818	13,441,559	9,532,597	52,510,321	(10,623,284)	808,572,011	Total assets
Total liabilitas	598,014,810	13,509,917	9,566,788	52,538,384	(2,392,353)	671,237,546	Total liabilities
	2017						
	Indonesia	New York	Eropa/ Europe	Asia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasi/ Consolidated	
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah - neto	31,142,962	130,948	158,442	507,488	(2,077)	31,937,763	Interest income and sharia income - net
Pendapatan premi - neto	1,767,568	-	-	-	-	1,767,568	Premium income - net
Pendapatan operasional lainnya	11,774,879	63,987	43,698	193,404	(1,035,909)	11,040,059	Other operating income
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(7,049,506)	(2,828)	-	(74,001)	-	(7,126,335)	Allowance for impairment losses
Beban operasional lainnya	(20,339,348)	(103,366)	(78,994)	(341,648)	466,964	(20,396,392)	Other operating expenses
Laba operasional	17,296,555	88,741	123,146	285,243	(571,022)	17,222,663	Operating income
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	(53,646)	(4,581)	(1,035)	(91)	2,077	(57,276)	Non operating income/(expenses) - net
Laba sebelum beban pajak	17,242,909	84,160	122,111	285,152	(568,945)	17,165,387	Income before tax expense
Beban pajak						(3,394,795)	Tax expense
Laba bersih						13,770,592	Net income
Total aset	660,944,862	11,616,832	6,592,212	39,964,454	(9,788,276)	709,330,084	Total assets
Total liabilitas	528,128,961	11,629,742	6,573,922	39,726,016	(1,971,823)	584,086,818	Total liabilities

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

49. MANAJEMEN RISIKO

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu potensi kejadian, baik yang diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank, termasuk upaya untuk memitigasi dan/atau meminimalkan kerugian finansial maupun non-finansial yang mungkin timbul dari produk atau aktivitas bank, hubungan antara bank dengan nasabah maupun dalam internal bank.

Penerapan manajemen risiko di BNI berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 7 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dan pada Peraturan OJK (POJK) No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, mengingat Bank merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang memiliki beberapa perusahaan anak yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan, serta secara internasional berpedoman pada dokumen dari Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

Penerapan Manajemen Risiko didasari oleh kebutuhan akan keseimbangan fungsi bisnis dengan pengelolaan risiko, dimana Manajemen Risiko menjadi *strategic partner* dari Unit Bisnis untuk mengoptimalkan pendapatan dari Unit Bisnis secara keseluruhan.

49. RISK MANAGEMENT

Risks in the context of banking is a potential event, which is either estimated (expected) and not estimated (unexpected) that can give negative impact to the Bank's earnings and capital.

Risk management is a set of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor, or control the risks arising from the entire Bank's business activities, including the efforts to mitigate and/or minimize financial or non-financial losses that may arise from products or activities of the Bank, the relationship between the Bank and its customer and also within the internal Bank.

The implementation of risk management in BNI is based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016, Financial Services Authority regulation (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 dated 7 September 2016 about the implementation of Risk Management for Commercial Bank, and the Financial Services Authority regulations POJK No. 17/POJK.03/2014 dated November 18 2014 also SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 dated May 25 2015 about the implementation of integrated Risk Management for Financial Conglomeration, considering that the Bank is part of the financial services sector that has several subsidiary companies incorporated in a financial conglomerate, and also internationally uses the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) documents as guidelines.

The Risk Management implementation is based on the need to maintain balance between the business functions with the risk management, where Risk Management becoming a strategic partner for the Business Units to optimize the revenue from the Business Unit as a whole.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

49. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Implementasi manajemen risiko dilakukan melalui 4 (empat) pilar penerapan manajemen risiko yaitu: (i) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; (ii) Kecukupan kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; (iii) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan (iv) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko di BNI secara umum terangkum dalam kerangka (*framework*) manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta diaplikasikan dalam perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko agar sesuai dengan perkembangan bisnis dan perubahan regulasi.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif, BNI menyusun *Risk Governance* sebagai bagian dari sistem Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) yang fokus pada struktur, proses dan pendekatan pengelolaan risiko dalam upaya pencapaian tujuan bisnis.

Inisiatif dan langkah-langkah penyempurnaan telah dilakukan untuk meletakkan landasan yang kuat dalam manajemen risiko di BNI yang mencakup aspek-aspek organisasi, strategi, sistem informasi dan operasi, serta pengembangan sumber daya manusia. BNI juga telah melakukan langkah-langkah antisipatif yang menyentuh aspek humanis dan personal setiap individu BNI, yaitu dengan membangun budaya risiko yang kuat yang merupakan bagian dari budaya perusahaan BNI. BNI terus berupaya untuk meningkatkan budaya risiko segenap insan BNI agar tercipta budaya risiko yang kuat.

Terkait dengan produk atau aktivitas baru yang akan diterbitkan, penilaian (*assessment*) yang komprehensif dilakukan terhadap risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa potensi risiko yang mungkin timbul telah dimitigasi dengan baik.

49. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management ie. implemented through the 4 (four) pillars of risk management: (i) Active control from board of directors and board of Commissioners; (ii) The adequacy of policies and risk management procedures and, ie. risk limit determination; (iii) The adequacy of identification, measurement, monitoring, and risk control and Risk Management Information Systems, and (iv) Internal control systems. Implementation of risk management in BNI is undertaken within the risk management framework. This risk management framework is outlined in the policies, procedures, transaction limits, authorities and other regulations as well as being applied in the risk management tools, which is applicable in the whole scope of business activities.

Periodic evaluation is applied to Risk Management Policies and Procedures to ensure it reflects the Bank's current business and regulations.

Risk Governance is formed to enforce the effectiveness of Risk Management Implementation, and as a part of Corporate Governance system, which focuses on structure, process and approach to risk management in achieving the business goals.

Initiatives and corrective actions have been taken to build a solid foundation for BNI's risk management, covering aspect of organization, strategies, information system and operations, and human capital. BNI has taken some anticipatory actions related to humanity and personal aspects of each individual of BNI by implementing risk culture enhancement to build a strong risk culture that is part of the BNI's company culture. BNI constantly strive to improve employee's risk culture in order to create a strong risk culture.

Related to new product or activity, a comprehensive assessment for each of inherent risk in those new product or activity is done to ensure the potential risk that may occur is mitigated.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

49. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan operasional BNI sebagaimana diuraikan pada Catatan 50 sampai dengan Catatan 53 adalah sesuai dengan definisi dari Regulator.

BNI juga melakukan pengelolaan terhadap risiko lainnya sesuai aturan Regulator, yaitu (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.; (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank; (iii) risiko strategik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah:

- Mengelola Pedoman Perusahaan untuk manajemen risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan;
- Melakukan analisis aspek risiko hukum dan uji kepatuhan terhadap produk atau aktivitas *existing* dan baru;
- Melakukan supervisi dan review secara berkala terhadap perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh unit-unit bisnis;
- Mengelola dan mengoptimalkan fungsi sarana *Online Customer Complaint* (OCC) serta pelaporannya, selanjutnya menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengelola jumlah pemberitaan negatif yang ada di media, baik media cetak maupun media elektronik dan menindaklanjuti pemberitaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan perencanaan strategis melalui serangkaian proses untuk penyesuaian strategi perusahaan dengan strategi unit;
- Melakukan sertifikasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

49. RISK MANAGEMENT (continued)

The management of BNI's credit, liquidity, market and operational risks, as described in Notes 50 to 53 are consistent with Regulator's definition.

BNI also has risk management for other risks as regulated by Regulator, as follows (i) legal risk to minimize possible losses from lawsuits or weakness in juridical aspects such as the absence of laws and regulations, or weaknesses such as noncompliance with the terms of the engagements validity of contracts or binding of imperfect collaterals; (ii) reputation risk to minimize possible losses due to stakeholder's declining levels of trust which comes from the negative perception of the Bank; (iii) strategic risk to minimize possible losses arising from inappropriate or improper implementation of Bank's strategy and business decisions, or strategy that is not responsive to external changes; and (iv) compliance risk to minimize possible losses of the Bank from non-compliance or failure to implement the prevailing laws and regulations.

The initiatives taken to manage legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk as described above, among others, are as follows:

- *Manage Operational Guidance Manual for legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk;*
- *Analysis of the legal aspects and compliance test for existing and new product or activities;*
- *Conduct assessment and analysis of the agreements or contracts entered into and executed by the business units;*
- *Manage and optimize Online Customer Complaint (OCC), including its reporting, in order to solve such problems based on prevailing policies;*
- *Managing the amounts of negative news on media, whether printed or electronic media, and follow up the proclamation in accordance with the prevailing policies.*
- *The strategic planning done through a series of strategic planning process to align the corporate strategy and strategy unit;*
- *Compliance certification to all policies and procedures in accordance with applicable regulations.*



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

49. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2015, BNI selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Tujuan penerapan manajemen risiko terintegrasi tersebut yaitu untuk mengelola seluruh risiko yang melekat pada aktivitas/kegiatan usaha konglomerasi keuangan BNI serta menciptakan keunggulan kompetitif dan memelihara pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan nilai (*shareholder value*) konglomerasi keuangan BNI secara keseluruhan.

Secara umum seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota Konglomerasi Keuangan BNI, baik BNI sebagai LJK Induk (Entitas Utama) dan masing-masing LJK Anak telah menerapkan manajemen risiko, antara lain dengan membentuk unit risiko pada masing-masing LJK. Manajemen risiko pada masing-masing LJK Anak secara operasional dilakukan terpisah dari unit bisnis dan menjalankan fungsinya secara independen. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, pada organisasi LJK Anak juga dibentuk unit/ fungsi intern yang melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kontrol internal secara rutin dan berkala.

Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi pada masing-masing LJK Anak secara aktif juga melakukan pemantauan, dan evaluasi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap LJK Anak untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pada LJK Anak.

BNI selaku Entitas Utama telah melakukan koordinasi dengan LJK Anak untuk menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain dengan melakukan pemantauan dan pengukuran risiko yang dituangkan dalam bentuk penilaian Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasi, KPMM Terintegrasi, penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) konsolidasi, serta penilaian Profil Risiko Konsolidasi dan penilaian Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI.

Penilaian profil risiko BNI menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (*inherent risk*) termasuk kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk masing-masing jenis risiko. Penilaian Profil Risiko BNI telah dilakukan sesuai dengan lampiran SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

49. RISK MANAGEMENT (continued)

In accordance with the Circular Letter of Financial Services Authority regulations (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2015, BNI as parent entity financial conglomeration have to implement the integrated risk management comprehensively and effectively. The purpose of the implementation of integrated risk management implementation is to manage the whole inherent risks in financial conglomeration business activity, also to create competitive advantages and maintain sustainable growth, so that it can increase the financial conglomeration shareholder value of BNI as a whole.

Generally, all of the Financial Services Institutions (FSI) as part of the BNI Financial Conglomeration, where BNI as the Parent FSI (Main Entity) and each Subsidiaries FSI have implemented risk management, among others by establishing a risk unit in each FSI. Risk management in each FSI is operating separately from the business unit and conducts its function independently. To support the implementation of risk management, the FSI have established internal control units/function in their organizational structure, which monitor the compliance with internal controls regularly and periodically on a regular basis.

In addition, the Boards of Commissioners and Directors of the respective Subsidiaries actively monitor and evaluate the internal controls of the Subsidiaries, through the reports submitted by the respective Subsidiaries, as a basis in formulating and developing appropriate policies for the Subsidiaries.

As the Parent Entity, BNI coordinates with its FSI Subsidiaries regarding the implementation of risk management policies as defined by Indonesia Financial Services Authority, among others by implementing risk monitoring and measurement in the form of consolidated Capital Adequacy Ratio (CAR) assessment, integrated Capital Adequacy Ratio (CAR) assessment, Bank's consolidated soundness rating consolidated assessment, and also integrated risk profile assessment on BNI Financial Conglomeration.

The risk profile assessment of BNI reflects the inherent risk of the Bank's business, including the risk control system for each type of risk. The risk profile of BNI has been performed based on attachment of SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 about the Bank's soundness rating assessment.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

49. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Penilaian Profil Risiko Terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terintegrasi. Kesepuluh jenis Risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Penilaian Profil Risiko BNI Terintegrasi tersebut telah dilakukan sesuai dengan lampiran SE OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Penilaian Profil Risiko Terintegrasi dilakukan Semesteran. Berdasarkan hasil laporan terakhir secara penilaian sendiri (*self assessment*), peringkat risiko inheren posisi 31 Desember 2018 adalah *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai (*satisfactory*) sehingga peringkat komposit Profil Risiko Konglomerasi Keuangan BNI adalah 2 (*low to moderate*) (tidak diaudit).

50. RISIKO KREDIT

Pengelolaan kredit Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi kredit dan mengelola kualitas setiap kredit sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi untuk mencegah kredit tersebut menjadi kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*). Pengelolaan kredit yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

Tujuan pengelolaan risiko kredit BNI selain untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk mengelola kemungkinan kerugian yang timbul akibat debitur gagal bayar atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya seminimal mungkin, baik pada tingkat individu maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

49. RISK MANAGEMENT (continued)

Integrated Risk Profile assessment is the assessment of the 10 (ten) types of risks based on on Inherent Risks and the integrated Implementation of Risk Management Quality (KPMR). The ten types of risks being assessed are Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Intra Group Transactions Risk and Risk Insurance. Assessment of the Integrated Risk Profile has complied with the SE OJK No. 14/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 about Integrated Risk Management Implementation for Financial Conglomerate.

Integrated risk profile assessment is conducted semi annually. Based on the results of the last self-assessment, the inherent risk rank of BNI as of as of 31 December 2018 is low to moderate with the quality of the risk management implementation rank is satisfactory, therefore the composite rank of BNI's Risk Profile as financial conglomeration is 2 (low to moderate) (unaudited).

50. CREDIT RISK

The Bank's loan management is aimed to support the loan expansion and to manage the quality of each loan from the time the loan was granted until the loan is fully repaid by the debtors, to prevent the loan becoming a Non-Performing Loan (NPL). Effective loan management is intended to minimize the risk of losses and optimize the use of capital allocated for credit risk.

The purpose of BNI's credit risk management other than to comply with Bank Indonesia and Financial Services Authority regulations is to manage the possible losses resulting from the debtors failure to pay loans or credit facility and other financial contracts at the minimum level, both on the individual and loan portfolio level.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. RISIKO KREDIT (lanjutan)

BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur perkreditan serta manajemen risiko kredit, yang diputuskan melalui forum Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Prosedur Perkreditan (KPP), Komite Risiko dan Kapital sub Komite Manajemen Risiko (KRK-RMC) yang beranggotakan Direksi dan beberapa anggota manajemen senior serta Rapat Direksi (Radisi) dan disetujui oleh Dewan Komisaris, juga secara tertulis dituangkan dalam Pedoman Perusahaan (PP) Perkreditan dan Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Kredit.

Pedoman Perusahaan (PP) Perkreditan tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen kredit dari saat pengajuan kredit, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian penyelamatan/ restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah, sehingga kualitas kredit dapat terjaga dengan tetap memperhatikan target bisnis yang ditetapkan.

Dalam rangka mendukung proses pemberian kredit yang lebih hati-hati, BNI melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan perkreditan dan kebijakan manajemen risiko kredit secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

Pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat individu dan tingkat portofolio. Pada tingkat individu pinjaman untuk kredit produktif, setiap usulan pemberian kredit dilakukan melalui proses analisis kredit oleh Unit Bisnis dan direview oleh unit risiko kredit. Mekanisme persetujuan kredit dilakukan melalui rapat Komite Kredit. Komite Kredit merupakan lembaga pemutus kredit yang beranggotakan pemutus dari Unit Bisnis dan Unit Risiko Bisnis, dengan demikian proses pemberian kredit menjadi lebih komprehensif dan hati-hati.

Untuk mempercepat proses ekspansi bisnis segmen Kecil, fungsi pemasaran dan proses analisa kredit dilakukan oleh Relationship Manager yang berada di bawah unit bisnis yaitu dengan melakukan analisa bisnis dan analisa Risiko serta memberikan mitigasi Risiko yang diperlukan terhadap calon debitur yang diusulkan.

Adapun untuk segmen Menengah dan Korporasi dilakukan oleh Senior Relationship Manager dan Relationship Manager yang berada di unit bisnis dengan tugas memproses usulan dari calon debitur, sementara analisis dan review risiko calon debitur di segmen Korporasi dan Menengah dilakukan oleh fungsi *Credit Risk Manager* yang berada di bawah Unit Risiko.

50. CREDIT RISK (continued)

BNI already has loan policies, credit and credit risk management procedures that was decided in the Credit Policy Committee (KKP) and Credit Procedures Committee (KPP), Risks and Capital Committee sub division of Risk Management (KRK-RMC) consisting of Board of Directors and several members of senior management, and also Board of Directors meetings, also as written in the Credit Company Guidelines (PP) and Credit Risk Management Company Guidelines.

These Credit Company Guidelines (PP) provide complete and detailed guidance on loan management activities from loan proposal, analysis process, approval, monitoring, documentation, controls, restructuring and the settlements of non-performing loans, so that credit quality can be maintained by taking into account the business targets set.

To support a prudent loan granting process, BNI conducts periodic reviews and enhances its loan and credit risk management policies in line with current business developments.

Credit risk management is implemented both at the individual and portfolio level. At the individual level, for productive loans, each loan proposal is made through a process of analysis by the Business Unit and being review by the credit risk unit. The credit approval process mechanism is through a credit committee meeting. The credit committee constitutes the decision maker for credit approval, which consists of representatives from Business Units and representatives from the Credit Risk Unit, so then the loan granting process become more comprehensive and cautious.

To accelerate the process of business expansion in a small segment, the marketing and credit function is performed by the Relationship Manager under the business unit by conducting business analysis and risk analysis as well as providing risk mitigation against the proposed debtor candidate.

As for the Middle and Corporate segment are performed by Senior Relationship Managers and Relationship Managers who are in the business unit have the task of processing the proposals from perspective debtors, while the analysis and risk review of prospective debtors in the Corporate and Middle segment are performed by Credit Risk Manager who is under the Risk Unit.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Penerapan *four eyes principles* dalam proses perkreditan di BNI diimplementasikan dalam proses persetujuan kredit yang dilakukan melalui Komite Kredit, yaitu forum bersama pejabat pemutus kredit yang mempunyai wewenang memutus kredit yang diusulkan sesuai dengan limit yang ditetapkan. Anggota Komite Kredit terdiri dari pejabat unit bisnis dan unit risiko bisnis. Dengan demikian proses pemberian kredit menjadi lebih komprehensif dan hati-hati

Unit bisnis dan unit risiko bisnis berperan sebagai *first line of defense (risk owner)* yang bertugas mengelola dan mengendalikan risiko kredit pada kegiatan operasional harian unit tersebut.

Proses analisis dan persetujuan kredit dilakukan melalui serangkaian proses penilaian tingkat risiko kredit calon debitur, yang diantaranya dengan menggunakan internal rating system (untuk kredit produktif) dan scoring system (untuk kredit konsumtif dan kredit produktif segmen ritel), sekaligus juga strategi mitigasi risikonya. Hasil proses analisis dan penilaian tingkat risiko kredit kemudian diajukan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan persetujuan.

Kredit yang bermasalah dikelola oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Korporasi untuk segmen Korporasi dan Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial dan Usaha Kecil untuk segmen menengah dan kecil, agar penyelamatan/ penyelesaian kredit dapat dilakukan secara lebih baik dan memampukan Unit Usaha untuk dapat fokus pada pengelolaan debitur lancar dan melakukan ekspansi kredit.

Untuk menjaga agar portofolio bank tidak terkonsentrasi pada debitur dan sektor ekonomi tertentu, maka telah ditetapkan pembatasan kredit sesuai *risk appetite*, sedangkan untuk mengantisipasi pelampauan BMPK BNI telah menetapkan limit BMPK yang disebut *house limit* dengan batas yang lebih *prudent* dibandingkan limit BMPK sesuai ketentuan regulator.

50. CREDIT RISK (continued)

The application of *four eyes principles* in the lending process at BNI is implemented in the credit approval process through credit committees, which joint forum of credit decision makers who have the authority to decide the credit in accordance with the specified limit. The members of the credit committee consist of business unit officers and business risk unit officers. Thus the process of granting credit becomes more comprehensive and cautious.

Business units and business risk units act as *first line of defense (risk owner)* in charge of managing and controlling credit risk in daily operations of the unit.

Loan analysis and approval process is conducted through several assessment processes of the applicant's credit risks, i.e. through internal rating system (for productive loans) and scoring system (for consumer and retail loans), followed by the related risk mitigation strategy. The results of the credit analysis and risk assessment process will be forwarded to the Credit Committee for approval.

Non-performing loan is managed by a Corporate Remedial and Recovery Division for corporate segment and Commercial Remedial and Recovery Division for middle and small segment, to ensure better credit recovery and settlement, and to enable the Business Unit to focus on the management of performing debtors and loan expansion.

To prevent the Bank portfolio from being concentrated to certain debtors and economic sectors, credit restrictions have been set according to the risk appetite, while to anticipate exceeding the Legal Lending Limit, BNI has set limits on the Maximum Limit of Credit License called House Limit with a more prudent limit than the limit of Maximum Credit Granting in accordance with the provisions of the regulator.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Untuk mengatur komposisi portofolio pinjaman BNI, setiap tahun sekali ditetapkan batas maksimum pinjaman (Loan Exposure Limit) yang bertujuan untuk mendiversifikasi portofolio pinjaman berdasarkan sektor industri untuk mengoptimalkan pendapatan dengan mempertimbangkan risiko di masing-masing sektor industri serta mengurangi risiko konsentrasi. Dalam penentuan konsentrasi tiap sektor industri yang optimal, Bank mengembangkan metode Credit Portofolio Optimisation (CPO) dengan memperhitungkan korelasi risk-return dari tiap sektor industri. Selanjutnya Bank memonitor status kelonggaran ekspansi pinjaman (space available) secara periodik berdasar Loan Exposure Limit (LEL).

Pengembangan manajemen risiko kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Khusus untuk pengukuran risiko kredit, BNI menggunakan metode standar. Selanjutnya, BNI juga mempersiapkan dan mengembangkan metodologi rating internal. Saat ini BNI sedang mempersiapkan parameter risiko yang akan digunakan dalam perhitungan risiko kredit seperti *Probability of Default*, *Loss Given Default* dan *Exposure at Default*.

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit dan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan faktor makro yang berpengaruh pada bank, BNI secara berkala melakukan *stress testing* risiko kredit untuk menilai perubahan portofolio kredit dan pengaruhnya bagi bank serta kemampuan bank menghadapi kondisi tersebut

- (i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya

50. CREDIT RISK (continued)

To manage the composition of BNI portfolio, the loan exposure limit is determined annually to diversify loan portfolio among different industry sectors in order to optimize return regarding risk in each sector and to reduce concentration risk. In the determination of optimal concentration in industry sectors, the Bank has developed a method of Credit Portfolio Optimisation by calculating the correlation of risk return from each industry sectors. Furthermore, the Bank monitors the status of the space available based on Loan Exposure Limit (LEL) periodically.

The development of credit risk management is conducted in stages, and inline with the framework set by Bank Indonesia/Financial Services Authority. Specifically for measuring credit risk, BNI utilizes the standardized approach methodology. Furthermore, BNI also prepares and develops internal ratings-based methodology. Currently BNI prepares risk parameters, which will be used in the calculation of credit risk such as *Probability of Default*, *Loss Given Default* and *Exposure at Default*.

As part of the measurement of credit risk and to anticipate the occurrence of macro-factor changes affecting the Bank, BNI periodically performs stress testing of credit risk to assess changes in loan portfolio and its impact to the bank and the Bank's ability to face the condition.

- (i) Maximum exposure of the credit risk before collateral held and other credit enhancements

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. RISIKO KREDIT (lanjutan)

- (i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Eksposur risiko kredit terhadap aset-neto sesudah cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Eksposur maksimum/ Maximum exposure		Description
	2018	2017	
Giro pada Bank Indonesia	35,591,243	32,700,717	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	13,133,828	21,335,150	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	39,324,445	28,592,738	Placements with other banks and Bank Indonesia
Efek-efek			Marketable securities
- Nilai wajar melalui laporan laba rugi	7,249,384	8,429,705	Fair value through profit or loss -
- Tersedia untuk dijual	23,736,028	26,788,760	Available-for-sale -
- Dimiliki hingga jatuh tempo	1,058,858	831,434	Held-to-maturity -
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	679,122	Securities purchased under agreements to resell
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	24,586,862	15,700,925	Bills and other receivables
Tagihan akseptasi	20,295,277	18,106,412	Acceptances receivables
Tagihan derivatif	605,248	216,884	Derivative receivables
Pinjaman yang diberikan	497,886,888	426,789,981	Loans
Obligasi Pemerintah			Government Bonds
- Nilai wajar melalui laporan laba rugi	3,350,496	2,936,420	Fair value through profit or loss -
- Tersedia untuk dijual	60,282,900	56,236,777	Available-for-sale -
- Dimiliki hingga jatuh tempo	23,158,006	20,676,255	Held-to-maturity -
Penyertaan saham	603,923	713,423	Equity investments
Aset lain-lain - neto*)	9,978,489	8,905,714	Other assets - net*)
Neto	760,841,875	669,640,417	Net

*) Aset lain-lain - neto terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain dan piutang premi asuransi.

*) Other assets - net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and insurance premium receivables.

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif konsolidasian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposures relating to consolidated administrative accounts items as of 31 December 2018 and 2017, are as follows:

Keterangan	Eksposur maksimum/ Maximum exposure		Description
	2018	2017	
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan (committed) Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	689,594	1,085,328	Unused loan facilities (committed) Outstanding irrevocable letters of credit
Garansi bank yang diterima	12,455,507	11,630,453	Bank guarantees received
Garansi yang diterbitkan	17,433,672	18,032,492	Guarantees issued
	61,767,468	59,468,396	
Total	92,346,241	90,216,669	Total



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. RISIKO KREDIT (lanjutan)

- (i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat neto seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar 65,44% dan 63,73% adalah jumlah eksposur risiko kredit maksimum terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang berasal dari pinjaman yang diberikan.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Proses peningkatan pengelolaan kredit secara berkelanjutan melalui penyempurnaan proses kredit, pengembangan produk penyempurnaan organisasi perkreditan, peningkatan kemampuan SDM di bidang perkreditan dan pengembangan perangkat kredit berbasis teknologi.
- BNI telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.
- BNI telah menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang selaras dengan sasaran strategis Bank, yang digunakan sebagai acuan tingkat risiko yang akan diambil Bank dalam pencapaian sasaran bisnis.
- BNI telah melakukan *stress test* risiko kredit untuk menilai kemampuan Bank bertahan dalam kondisi tidak normal serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan Bank.

50. CREDIT RISK (continued)

- (i) *Maximum exposure of the credit risk before collateral held and other credit enhancements (continued)*

The table above represents credit risk exposures of the Group as of 31 December 2018 and 2017, without taking into account any collaterals held or other credit enhancements. For assets on the consolidated statement of financial position, the exposures set out above are based on net carrying value as reported in the consolidated statement of financial position.

As of 31 December 2018 and 2017, the total maximum credit risk exposure in the consolidated statement of financial position from loans is 65,44% and 63.73%, respectively.

Management is confident in its ability to control and sustain exposure of credit risk to the Bank resulting from its loans based on the following:

- *The process of improving credit management in a sustainable manner by improving credit processes, product development credit organization improvement, credit capability improvement of human resources and development of technology based for credit application.*
- *BNI has documented credit policies and manual procedures that cover all aspects of the Bank's lending activities. Each loan transaction must adhere to the requirements of the Bank's policy.*
- *BNI has set risk appetite and risk tolerance in accordance with the Bank's strategic objectives, which are used as a reference level of risk to be taken by the Bank in achieving business goals.*
- *BNI has performed stress test on credit risk to assess the ability of Bank to stay in the non-normal condition and as an instrument for decision making for the Bank.*

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. RISIKO KREDIT (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

- BNI telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "early warning system" dan pemantauan yang disiplin.
- Seluruh kredit diberikan dengan agunan kecuali untuk jenis kredit tertentu seperti kartu kredit, *personal loans* dan fasilitas antar bank.

(ii) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

BNI menentukan struktur kredit termasuk penentuan covenant yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi debitur, sehingga kredit yang diberikan benar-benar efektif dan menguntungkan bagi debitur maupun Bank. Jenis agunan yang dimiliki oleh Bank adalah kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotik dan hak tanggungan, garansi/penjaminan pihak ketiga (termasuk penjaminan kredit oleh perusahaan asuransi) serta jaminan dalam bentuk aset lainnya. Perkiraan nilai wajar dari agunan yang digunakan oleh Bank didasarkan pada nilai agunan yang dinilai oleh penilai internal maupun eksternal

Ketentuan coverage atau kecukupan agunan untuk tiap segmen ditentukan sebagai berikut:

50. CREDIT RISK (continued)

(i) Maximum exposure of the credit risk before collateral held and other credit enhancements (continued)

- BNI has an early problem detection system through "early warning system" and disciplined monitoring.
- All loans are secured by collaterals, except for certain loans such as credit cards, *personal loans* and interbank loans.

(ii) Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collateral and other credit risk mitigation.

BNI sets loan structure for every debtor through appropriate covenants that aligns with debtor needs and condition. This is to ensure the debtor uses the loan according to original purpose so that the Bank and the debtor's interest are fulfilled. Collateral types held by the Bank are cash, deposits, registered mortgages, guarantees and other registered securities over assets. Estimates of fair value of collaterals held by the Bank is based on the value of collaterals assessed internally or externally by the independent appraisers

The collateral coverage criteria for each segment is divided as follows:

Segmen/Segment	Jenis Agunan/Collateral	Jumlah Coverage Minimal* / Minimum Coverage Amount
Korporasi/ Wholesale	Aset tetap/Fixed Asset	100% dari limit kredit/from credit limit
	Kas/Cash	
	SBLC	
	Tanah dan Bangunan/Land and Building	
	Piutang/Receivable	
	Kendaraan/Vehicle	
Menengah/ Middle	Agunan lain yang diterima oleh Bank/Other collaterals held by the Bank	125% dari limit kredit/from credit limit
	Aset tetap/Fixed Asset	
	Kas/Cash	
	SBLC	
	Tanah dan Bangunan/Land and Building	
	Piutang/Receivable	
Kecil/Retail	Kendaraan/Vehicle	110% dari limit kredit/from credit limit
	Agunan lain yang diterima oleh Bank/Other collaterals held by the Bank	
	Aset tetap/Fixed Asset	
	Kas/Cash	
	SBLC	



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. RISIKO KREDIT (lanjutan)

- (ii) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada umumnya menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

Tabel dibawah ini menunjukkan eksposur maksimum neto atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017.

50. CREDIT RISK (continued)

- (ii) Maximum exposure of the credit risk before collateral held and other credit enhancements (continued)

The carrying amounts of financial assets other than bank loans and securities purchased under agreements to resell is generally equal to the maximum exposure of credit risk.

The table below shows the net maximum exposure to credit risk on securities purchased under agreements to resell on 31 December 2017:

31 Desember/December 2017				
Keterangan	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	Agunan/ Collateral	Eksposur Neto/ Net Exposure	Description
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	679,122	703,735	-	Securities purchased under agreements to resell

- (iii) Informasi kualitas kredit atas aset keuangan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

- (iii) The information on the credit quality of financial assets as of 31 December 2018 and 2017 are as follows:

31 Desember/December 2018									
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired (tidak diaudit/unaudited)					Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total	
	Grup 1/ Group 1	Grup 2/ Group 2	Grup 3/ Group 3	Grup 4/ Group 4	Grup 5/ Group 5				
Giro pada Bank Indonesia	-	35,591,243	-	-	-	-	-	35,591,243	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	13,137,099	-	-	-	-	-	13,137,099	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	5,214,444	34,110,016	-	-	-	-	-	39,324,460	Placements with other banks and Bank Indonesia
Efek-efek	7,596,796	24,200,400	-	-	-	-	565,211	32,362,407	Marketable securities
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	9,310,463	15,434,743	-	-	-	-	-	24,745,206	Bills and other receivables
Tagihan akseptasi	8,945,731	11,440,549	45,875	-	42,864	-	-	20,475,019	Acceptances receivables
Tagihan derivatif	-	605,248	-	-	-	-	-	605,248	Derivative receivables
Pinjaman yang diberikan									Loans
Modal kerja	101,485,273	122,868,710	5,562,138	157,079	6,088,566	10,949,461	5,814,419	252,925,646	Working capital
Investasi	36,489,595	64,597,341	4,354,341	260,746	2,590,674	4,162,661	1,783,375	114,238,733	Investment
Konsumen	17,863,082	53,575,962	11,270,844	196,815	2,315,530	3,212,325	2,061,031	90,495,589	Consumer
Sindikasi	15,125,638	30,307,560	4,906	-	3,064,759	1,894,897	336,359	50,734,119	Syndicated
Karyawan	1,300,933	1,240,897	1,151,321	3,348	115,545	28,973	43,118	3,884,135	Employee
Program Pemerintah	-	418,242	82,033	-	-	-	-	500,275	Government programs
Obligasi Pemerintah	9,816,075	76,975,327	-	-	-	-	-	86,791,402	Government Bonds
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	-	785,007	Equity investments
Aset lain-lain - neto*)	-	9,978,490	-	-	-	-	-	9,978,490	Other assets - net*)
Total	213,148,030	494,481,827	22,471,458	617,988	14,217,938	20,248,317	11,388,520	776,574,078	
Cadangan kerugian penurunan nilai								(15,732,202)	Allowance for impairment losses
Neto								760,841,876	Net

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. RISIKO KREDIT (lanjutan)

50. CREDIT RISK (continued)

(iii) Informasi kualitas kredit atas aset keuangan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut: (lanjutan)

(iii) The information on the credit quality of financial assets as of 31 December 2018 and 2017 are as follows: (continued)

		31 Desember/December 2017										
		Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired (tidak diaudit/unaudited)					Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not impaired		Mengalami penurunan nilai/ Impaired		Total	
Grup 1/ Group 1	Grup 2/ Group 2	Grup 3/ Group 3	Grup 4/ Group 4	Grup 5/ Group 5								
Giro pada Bank Indonesia	-	32,700,717	-	-	-	-	-	-	-	32,700,717	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	-	21,338,437	-	-	-	-	-	-	-	21,338,437	Current accounts with other banks	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	23,604,109	4,989,139	-	-	-	-	-	-	-	28,593,248	Placements with other banks and Bank Indonesia	
Efek-efek	19,761,264	16,285,107	-	-	-	-	-	312,623	-	36,358,994	Marketable securities	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	679,122	-	-	-	-	-	-	-	-	679,122	Securities purchased under agreements to resell	
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	5,141,343	10,657,827	-	-	-	-	-	-	-	15,799,170	Bills and other receivables	
Tagihan akseptasi	2,703,959	15,101,101	431,989	-	33,974	-	-	-	-	18,271,023	Acceptances receivables	
Tagihan derivatif	-	216,884	-	-	-	-	-	-	-	216,884	Derivatives receivables	
Pinjaman yang diberikan											Loans	
Modal kerja	16,381,711	152,811,106	13,954,087	139,478	8,214,476	8,431,086	6,752,187	206,684,131			Working capital	
Investasi	7,024,293	73,273,020	4,947,252	53,716	6,049,676	4,769,624	1,155,805	97,273,386			Investment	
Konsumen	9,981,104	52,143,126	10,652,639	226,370	2,587,166	3,369,491	2,071,488	81,031,384			Consumer	
Sindikasi	691,241	44,478,120	3,706,967	-	2,703,671	243,500	88,537	51,912,036			Syndicated	
Karyawan	123,556	3,226,261	360,013	5,218	24,986	30,348	28,958	3,799,340			Employee	
Program Pemerintah	-	286,327	162,286	-	163,530	546	600	613,289			Government programs	
Obligasi Pemerintah	22,977,057	56,872,395	-	-	-	-	-	79,849,452			Government Bonds	
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	-	785,823			Equity investments	
Aset lain-lain - neto*)	-	8,905,714	-	-	-	-	-	8,905,714			Other assets - net*)	
Total	109,068,759	493,285,281	34,215,233	424,782	19,777,479	16,844,595	11,196,021	684,812,150				
Cadangan kerugian penurunan nilai								(15,171,733)			Allowance for impairment losses	
Neto								669,640,417			Net	

*) Aset lain-lain - neto terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain dan piutang premi asuransi.

*) Other assets - net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and insurance premium receivables.

- **Grup 1** : Debitur baru (kurang dari 6 bulan).
- **Grup 2** : Nasabah lama yang tidak memiliki historis pernah menunggak dalam 3 tahun terakhir.
- **Grup 3** : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak (dibawah 90 hari) dalam 3 tahun terakhir.
- **Grup 4** : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak diatas 90 hari dalam 3 tahun terakhir.
- **Grup 5** : Nasabah lama yang pinjamannya pernah/terlah direstrukturisasi.

- **Group 1** : New customers (less than 6 months).
- **Group 2** : Existing customers with no history of overdue for the past 3 years.
- **Group 3** : Existing customers with history of overdue below 90 days in the past 3 years.
- **Group 4** : Existing customers with history of default more than 90 days in the past 3 years.
- **Group 5** : Existing customers with loans that was/has been restructured.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. RISIKO KREDIT (lanjutan)

50. CREDIT RISK (continued)

(iv) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

(iv) The aging analysis of past due but not impaired loans as of 31 December 2018 and 2017:

	31 Desember/December 2018				
	Kurang dari 30 hari/ Less than 30 days	31 sampai 60 hari/ 31 to 60 days	Lebih dari 60 hari/ More than 60 days	Total	
Modal kerja	1,831,848	556,173	8,561,440	10,949,461	Working capital
Investasi	2,668	35,565	4,124,428	4,162,661	Investment
Konsumen	650,301	552	2,561,472	3,212,325	Consumer
Sindikasi	-	-	1,894,897	1,894,897	Syndication
Karyawan	112	1	28,860	28,973	Employee
Program pemerintah	-	-	-	-	Government programs
Total	2,484,929	592,291	17,171,097	20,248,317	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(625,376)	(149,436)	(3,086,480)	(3,861,292)	Allowance for impairment losses
Neto	1,859,553	442,855	14,084,617	16,387,025	Net

	31 Desember/December 2017				
	Kurang dari 30 hari/ Less than 30 days	31 sampai 60 hari/ 31 to 60 days	Lebih dari 60 hari/ More than 60 days	Total	
Modal kerja	1,190,806	879,875	6,360,405	8,431,086	Working capital
Investasi	7,398	12,870	4,749,356	4,769,624	Investment
Konsumen	703,944	5,826	2,659,721	3,369,491	Consumer
Sindikasi	-	243,500	-	243,500	Syndication
Karyawan	139	7	30,202	30,348	Employee
Program pemerintah	-	-	546	546	Government programs
Total	1,902,287	1,142,078	13,800,230	16,844,595	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(387,549)	(129,784)	(1,969,691)	(2,487,024)	Allowance for impairment losses
Neto	1,514,738	1,012,294	11,830,539	14,357,571	Net

(v) Konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur risiko kredit

(v) Concentration of risks of consolidated financial assets with credit risk exposure

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Grup pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Untuk tabel ini, Grup telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

The following table provides details of the Group's credit exposures at their carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorized by geographical region as of 31 December 2018 and 2017. For this table, the Group has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

50. RISIKO KREDIT (lanjutan)

50. CREDIT RISK (continued)

31 Desember/December 2018								
	Jawa & Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Indonesia Timur/ East Indonesia	Lain-lain *)/ Others *)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	33,867,589	-	-	-	-	1,723,654	35,591,243	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	8,110,569	5	719	121	24	5,025,661	13,137,099	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	34,606,363	-	-	-	-	4,718,097	39,324,460	Placements with other banks and Bank Indonesia
Efek-efek								Marketable securities
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	7,249,383	-	-	-	-	-	7,249,383	Fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual	19,407,205	-	-	-	-	4,361,079	23,768,284	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	1,344,740	-	-	-	-	-	1,344,740	Held-to-maturity
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	-	-	-	Securities purchased under agreements to resell
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	17,867,992	35,835	12,117	4,115	-	6,825,147	24,745,206	Bill and other receivables
Tagihan akseptasi	14,482,999	135,872	157	56,879	-	5,789,112	20,475,019	Acceptances receivables
Tagihan derivatif	595,402	-	-	-	-	9,846	605,248	Derivative receivables
Pinjaman yang diberikan	350,990,894	45,397,054	20,658,318	22,054,283	4,398,558	69,279,390	512,778,497	Loans
Obligasi pemerintah								Government Bonds
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	2,558,283	-	-	-	-	792,212	3,350,495	Fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual	43,098,498	-	-	-	-	17,184,404	60,282,902	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	11,372,894	-	-	-	-	11,873,299	23,246,193	Held-to-maturity
Penyertaan saham	785,007	-	-	-	-	-	785,007	Equity Investment
Aset lain-lain - neto**)	9,268,605	236,665	25,150	27,260	5,688	415,123	9,978,491	Other assets - net**)
Total	555,616,423	45,805,431	20,696,461	22,142,658	4,404,270	127,997,024	776,662,267	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai							(15,732,202)	Allowance for impairment losses
Neto							760,930,065	Net

31 Desember/December 2017								
	Jawa & Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Indonesia Timur/ East Indonesia	Lain-lain *)/ Others *)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	30,611,107	-	-	-	-	2,089,610	32,700,717	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	15,534,594	98	766	5,014	28,092	5,769,873	21,338,437	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	22,694,782	-	-	-	-	5,898,466	28,593,248	Placements with other banks and Bank Indonesia
Efek-efek								Marketable securities
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	-	-	-	8,429,705	8,429,705	Fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual	24,603,450	-	-	-	-	2,202,219	26,805,669	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	542,750	-	-	-	-	580,870	1,123,620	Held-to-maturity
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	548,458	-	-	-	-	130,664	679,122	Securities purchased under agreements to resell
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	13,476,665	2,246	2,312	1,163	2,330	2,314,454	15,799,170	Bill and other receivables
Tagihan akseptasi	13,014,611	110,341	-	190,231	-	4,955,840	18,271,023	Acceptances receivables
Tagihan derivatif	216,542	-	-	-	-	342	216,884	Derivative receivables
Pinjaman yang diberikan	300,291,863	43,235,866	18,803,322	20,334,370	3,746,979	54,901,166	441,313,566	Loans
Obligasi pemerintah								Government Bonds
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	2,498,201	-	-	-	-	438,219	2,936,420	Fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual	40,392,463	-	-	-	-	15,844,314	56,236,777	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	12,518,208	-	-	-	-	8,158,047	20,676,255	Held-to-maturity
Penyertaan saham	785,823	-	-	-	-	-	785,823	Equity Investment
Aset lain-lain - neto**)	8,274,654	95,691	24,512	27,167	5,203	478,487	8,905,714	Other assets - net**)
Total	486,004,171	43,444,242	18,830,912	20,557,945	3,782,604	112,192,276	684,812,150	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai							(15,171,733)	Allowance for impairment losses
Neto							669,640,417	Net

*) Termasuk kantor cabang luar negeri dan Entitas Anak
**) Aset lain-lain - neto terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain dan piutang premi asuransi.

*) Includes overseas branches and Subsidiaries
**) Other assets - net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and insurance premium receivables.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

51. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas berhubungan dengan adanya kemungkinan bank tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap deposan, investor dan kreditur, serta pemenuhan giro wajib minimum (GWM) yang diantaranya disebabkan keterbatasan akses pendanaan atau ketidakmampuan untuk melikuidasi aset yang dimiliki dengan harga yang wajar.

Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM), Divisi Tresuri (TRS), dan Kantor Cabang Luar Negeri. Kebijakan dan Prosedur Risiko Likuiditas disusun oleh Divisi ERM, selanjutnya dilaksanakan oleh Divisi TRS dan segenap Kantor Cabang Luar Negeri, yang diwujudkan dalam manajemen strategi likuiditas.

Divisi ERM juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan manajemen likuiditas yang dilakukan oleh Divisi TRS tersebut.

Divisi ERM menyusun Kebijakan Risiko Likuiditas berupa Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas, yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam Prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang berisi panduan pelaksanaan manajemen risiko likuiditas, antara lain berupa :

- a. Ketersediaan Alat Likuid: Kas, GWM, *Secondary Reserve*, Indikator Peringatan Dini, *Liquidity Contingency Plan Head Office* maupun Kantor Cabang Luar Negeri, dll
- b. Pengukuran Risiko Likuiditas : Rasio Likuiditas, Proyeksi Arus Kas, Profil Maturitas, Rasio Kecukupan Likuiditas, Stress testing, dll
- c. Pemantauan Risiko Likuiditas
- d. Pengendalian Risiko Likuiditas
- e. Penetapan Limit Likuiditas: Pagu Kas Wilayah, Pagu Kas *Bank Wide*, SR Ideal, Limit Profil Maturitas, Limit Kredit Valas berdasarkan ketersediaan likuiditas.

Divisi ERM juga menyusun *risk appetite* dan *risk tolerance* Risiko Likuiditas yang selaras dengan sasaran strategis Bank, yang digunakan sebagai acuan tingkat risiko yang akan diambil Bank dalam pencapaian sasaran bisnis.

Dalam mengelola likuiditas, selain mengelola *primary reserve* (kas dan GWM), BNI menjaga dan mempertahankan *secondary reserve* untuk memastikan likuiditas berada pada level yang aman. Sebagai antisipasi pemenuhan *secondary reserve* yang ideal, BNI menjaga dan mempertahankan *tertiary reserve*.

51. LIQUIDITY RISK

Liquidity risk relates to the possibility that the Bank will be unable to meet short-term obligations to depositors, investors and creditors, as well as fulfill Statutory Reserve Requirements due to, among others, limited access to financing or the inability to liquidate assets at reasonable prices.

Liquidity Risk Management is carried out by the Bank's Risk Management Division (ERM), Treasury Division (TRS), and Branch Offices of Foreign Affairs. Liquidity Risk Policies and Procedures were prepared by the Division ERM, subsequently implemented by the Division of TRS and all Branch Offices of Foreign Affairs, which is manifested in the liquidity management strategy.

ERM Division also monitors the implementation of the liquidity management performed by the Treasury Division.

ERM Division prepares Liquidity Risk Policy Guidelines in Liquidity Risk Management Implementation Guidelines, which is further elaborated into the Liquidity Risk Management Procedures which contains guidelines for liquidity risk management practices, which include:

- a. *Availability Liquidity Tools: Cash, Statutory Reserve Requirement, Secondary Reserve, Early Warning Indicators, Liquidity Contingency Plan Head Office or Branch Office of Foreign Affairs, etc.*
- b. *Measurement of Liquidity Risk: Liquidity Ratio, Cash Flow Projection, Maturity Profile, Liquidity Adequacy Ratio, Stress testing, etc.*
- c. *Liquidity Risk Monitoring*
- d. *Liquidity Risk Management*
- e. *Determination of Liquidity Limit: Cash Ceiling for Regional Area, Cash Ceiling Bank Wide, Ideal SR, Maturity Profile Limit, Credit in Foreign Currency Limit based on the availability of liquidity.*

ERM Division also prepares risk appetite and risk tolerance for Liquidity Risk in accordance with the Bank's strategic objectives, which are used as a reference level of risk to be taken by the Bank in achieving business goals

In managing liquidity, beside addition to managing primary reserve (cash and statutory reserve requirement), BNI keeps and maintains secondary reserve to ensure liquidity is at a safe level. In anticipation of fulfilling the ideal secondary reserve, BNI preserves and maintains a tertiary reserve.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

51. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Penetapan dan pemantauan limit, yaitu *Secondary Reserve Ideal* (SR Ideal) dan limit ketersediaan kredit valas dilakukan secara berkala oleh Divisi ERM. Sedangkan ketersediaan atas keseluruhan *reserve* dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan oleh Divisi TRS dan Divisi ERM.

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada *undiscounted cash flows*.

51. LIQUIDITY RISK (continued)

The setting and monitoring of limits, i.e. *Ideal Secondary Reserve (Ideal SR)* and credit availability in foreign currency limit is conducted periodically by the ERM Division. While the availability of the whole reserve is monitored daily, weekly, and monthly by the Treasury Division and the ERM Division.

The table below shows the remaining contractual maturities of the financial liabilities based on *undiscounted cashflows*.

31 Desember/December 2018

	Kurang dari 1 Bulan/ Less than 1 Month	1 - 3 Bulan/ Months	3 - 6 Bulan/ Months	6 - 12 Bulan/ Months	Lebih dari 12 Bulan/ More than 12 Months	Total	
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera	4,160,295	-	-	-	-	4,160,295	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	468,179,465	59,581,249	19,261,180	4,598,241	1,983,860	553,603,995	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	9,968,627	1,909,864	1,209,802	784,975	1,227	13,874,495	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	322,028	-	-	-	-	322,028	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	1,008,073	1,766,766	1,351,618	224,561	65,595	4,416,613	Acceptances payables
Efek-efek yang diterbitkan	60,000	2,000	62,000	124,000	3,730,000	3,978,000	Securities issued
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	18,000,000	3,930,428	-	-	561,867	22,492,295	Securities sold under agreements to repurchase
Pinjaman yang diterima	2,046,202	5,788,133	4,938,366	13,388,740	26,538,796	52,700,237	Borrowings
Liabilitas lain-lain*)	14,608,465	-	-	-	-	14,608,465	Other liabilities*)
Total	518,353,155	72,978,440	26,822,966	19,120,517	32,881,345	670,156,423	Total
Total aset lancar **)	113,692,582	896,686	1,674,151	3,062,284	69,562,346	188,888,048	Total liquid assets**)
KOMITMEN DAN KONTINJENSI							COMMITMENT AND CONTINGENCIES
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	54,227,735	-	-	-	-	54,227,735	Unused loan facilities
Irrevocable letter of credit yang masih berjalan	3,263,367	2,134,394	2,075,538	2,559,084	2,423,124	12,455,507	Outstanding irrevocable letters of credit
Garansi yang diterbitkan	12,650,000	10,508,330	7,011,326	9,188,479	22,409,333	61,767,468	Guarantees issued
Total	70,141,102	12,642,724	9,086,864	11,747,563	24,832,457	128,450,710	Total

31 Desember/December 2017

	Kurang dari 1 Bulan/ Less than 1 Month	1 - 3 Bulan/ Months	3 - 6 Bulan/ Months	6 - 12 Bulan/ Months	Lebih dari 12 Bulan/ More than 12 Months	Total	
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera	5,465,750	-	-	-	24,965	5,490,715	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	417,493,240	57,385,700	14,124,979	7,299,527	29,871,210	526,174,656	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	7,476,685	247,762	2,594,971	815,102	878,121	12,012,641	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	113,820	-	-	-	-	113,820	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	1,255,337	1,400,288	1,487,832	336,403	27,470	4,507,330	Acceptances payables
Efek-efek yang diterbitkan	61,333	-	560,000	122,000	3,912,667	4,656,000	Securities issued
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	1,407,382	561,956	661,904	2,631,242	Securities sold under agreements to repurchase
Pinjaman yang diterima	1,483,192	3,760,918	2,043,624	3,953,671	37,427,188	48,668,593	Borrowings
Liabilitas lain-lain*)	14,739,160	4,607	-	-	9,201	14,752,968	Other liabilities*)
Total	448,088,517	62,799,275	22,218,788	13,088,659	72,812,726	619,007,965	Total
Total aset lancar **)	95,808,076	743,096	2,127,482	1,498,203	73,882,661	174,059,518	Total liquid assets**)

*) Liabilitas lain-lain terdiri dari utang ke pemegang polis, setoran jaminan, nota kredit dalam penyelesaian, utang reasuransi dan komisi, serta utang nasabah - Entitas Anak.

**) Aset lancar terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia dan obligasi pemerintah

*) Other liabilities consist of obligation to policy holders, guarantee deposits, credit memo in process, reinsurance payable and commission, and payable to customer - Subsidiary.

**) Liquid assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placement with other banks and Bank Indonesia and government bonds.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

51. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

51. LIQUIDITY RISK (continued)

31 Desember/December 2017						
Kurang dari 1 Bulan/ Less than 1 Month	1 - 3 Bulan/ Months	3 - 6 Bulan/ Months	6 - 12 Bulan/ Months	Lebih dari 12 Bulan/ More than 12 Months	Total	
KOMITMEN DAN KONTINJENSI						COMMITMENT AND CONTINGENCIES
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	49,963,012	-	-	-	49,963,012	Unused loan facilities
<i>Irrevocable letter of credit</i> yang masih berjalan	3,957,847	1,297,508	1,435,477	2,197,475	11,630,453	Outstanding irrevocable letters of credit
Garansi yang diterbitkan	17,104,830	5,407,118	5,853,274	10,496,402	59,468,396	Guarantees issued
Total	71,025,689	6,704,626	7,288,751	12,693,877	121,061,861	Total

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas, BNI menerapkan perhitungan rasio kecukupan likuiditas yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan mengelola rasio Kecukupan Likuiditas tersebut sesuai ketentuan regulator, baik secara individu (*bank only*) maupun konsolidasi dengan perusahaan anak.

In order to increase liquidity resilience, BNI implements Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) calculations and manages the Liquidity Adequacy Ratio subject to regulators, either individually (bank only) or consolidated with subsidiaries.

LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek dengan memelihara *High Quality Liquid Assets* (HQLA) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BNI selama periode 30 hari ke depan dalam kondisi *stress*, sedangkan NSFR bertujuan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan BNI mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan.

LCR aims to improve the Bank's short-term liquidity resilience by maintaining High Quality Liquid Assets (HQLA) to meet liquidity needs over the next 30 days under stress conditions, while NSFR aims to reduce liquidity risk related to longer term funding sources requiring BNI to fund activities with sufficient stable funding sources in order to mitigate future financial hardship risks.

Laporan rasio Kecukupan Likuiditas BNI tersebut dilaporkan secara bulanan dan triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BNI Liquidity Adequacy Ratio are reported monthly and quarterly to the Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

52. RISIKO PASAR

52. MARKET RISK

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang timbul akibat perubahan faktor pasar yang tidak sesuai dengan posisi yang diambil oleh BNI baik pada posisi aset dan liabilitas keuangan dan rekening administratif. Risiko Pasar melekat pada hampir seluruh aktivitas Bank, baik *trading book* maupun *banking book* yang mencakup Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar.

Market risk is the risk of loss due to the adverse volatility of market price movements against BNI's financial assets and liabilities (on balance sheet) including administrative accounts (off balance sheet). Market risk is embedded in the Bank's business activities, both in trading and banking books, which cover Interest Rate risks and Foreign Exchange risks.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

52. RISIKO PASAR (lanjutan)

Pengelolaan Risiko Pasar BNI dilakukan melalui koordinasi beberapa Divisi terkait, yaitu Divisi Manajemen Risiko Bank (Divisi ERM) yang bertanggung jawab kepada Direktur Manajemen Risiko (Dir. MR), Divisi Tata Kelola Perusahaan (Divisi PGV) yang bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Utama (Wadiu), Divisi Tresuri (Divisi TRS) dan Kantor Cabang Luar Negeri dalam pengawasan Divisi Internasional (Divisi INT) yang bertanggung jawab kepada Direktur Tresuri dan Internasional (Dir. TS). Dalam mengelola Risiko Pasar, Direksi didukung oleh *Risk Management Committee* (RMC) dan Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) serta dalam pengawasannya didukung oleh Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

BNI telah memiliki Aplikasi Manajemen Risiko Pasar untuk mendukung proses pengelolaan Risiko Pasar. Pengukuran potensi Risiko Pasar untuk pengendalian internal BNI dilakukan secara harian menggunakan Model Internal - *Value at Risk (VaR) Methodology*, sedangkan pengukuran Risiko Pasar dalam rangka perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dilakukan secara bulanan menggunakan Metode Standar. BNI juga melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga pada *banking book* secara bulanan menggunakan *Assets & Liabilities Gap Report* serta pengukuran Risiko Nilai Tukar pada *banking book* melalui perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) secara harian dan bulanan sesuai ketentuan Regulator.

Sehubungan dengan penggunaan Model Internal (VaR) dalam pengukuran Risiko Pasar, BNI telah melakukan proses validasi melalui *Back Testing* secara periodik untuk menilai akurasi pengukuran VaR yang digunakan. Selain itu, BNI telah melakukan proses *Stress Testing* terhadap instrumen keuangan yang terekspos Risiko Nilai Tukar dan Risiko Suku Bunga (portofolio obligasi) untuk menilai ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan faktor pasar yang ekstrim pada saat kondisi pasar abnormal. *Stress Testing* dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau periode yang lebih pendek jika terjadi kondisi abnormal.

52. MARKET RISK (continued)

Market Risk Management is done through coordination with BNI's several related divisions such as: Enterprise Risk Management Division (ERM) and Policy Governance Division (PGV) which report to the Director of Risk Management; and Treasury Division (TRS) as well as Overseas branches supervised by the International Division (INT) which report to the Director of Treasury and International. The Market Risk Management is also supported by Risk Management Committee (RMC) and Assets and Liabilities Committee (ALCO) and supervised by the Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee.

BNI has market risk tools to support the implementation of the Market Risk Process. The measurement of potential market risk, for internal control purposes, is conducted on a daily basis using an Internal Model - Value at Risk (VaR) Methodology. On the other hand, the market risk measurement for Capital Adequacy Ratio purposes, is conducted on a monthly basis using the Standard Method. BNI also conducts on a monthly basis the measurement of interest rate risk on banking book using Assets & Liabilities Gap Report (A/L Gap Report) and the measurement for foreign exchange risk on banking book by calculating the Net Open Position (NOP) both daily and monthly in accordance with Regulator regulation.

In line with the use of the Internal Model (VaR) in measuring market risk, BNI conducts Back Testing periodically to assess the accuracy of the VaR methodologies used. Stress Testing has also been conducted for the financial instruments that are exposed to foreign exchange risk and interest rate risk (limited to bond positions) in order to assess the Bank's resilience in encountering extreme change of risk factors in abnormal market conditions. Stress Testing is done every 6 (six) months or whichever is earlier in case there is an abnormal condition.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

52. RISIKO PASAR (lanjutan)

Limit Risiko Pasar BNI sebagai bagian dari proses pengendalian Risiko Pasar ditetapkan dan dikaji ulang secara periodik oleh Divisi ERM dan Divisi PGV yang independen terhadap *risk taking units* (Divisi TRS dan kantor cabangluar negeri). Limit-limit Risiko Pasar adalah sebagai berikut:

- a. Limit Risiko Pasar pada *trading book*:
- (i) Limit *Value at Risk* (VaR) dan limit *Stressed Value at Risk* (SVaR)
 - (ii) Limit nominal transaksi
 - (iii) Limit nominal *open position*
 - (iv) Limit kerugian

Limit ditetapkan pada masing-masing *desk* (*Currencies Trading, Rates Trading, Banking Management - Surat Berharga Available-For-Sale, Funding and Gapping - Surat Berharga Likuiditas*).

- b. Limit Risiko Pasar pada *banking book*:
- (i) Limit Gap Aset & Liabilitas - Rupiah
 - (ii) Limit Gap Aset & Liabilitas - Valuta Asing
 - (iii) Limit Posisi Devisa Neto internal BNI.

Divisi ERM juga menyusun *risk appetite* dan *risk tolerance* Risiko Pasar yang selaras dengan sasaran strategis Bank, yang digunakan sebagai acuan tingkat risiko yang akan diambil Bank dalam pencapaian sasaran bisnis.

Pemantauan Risiko Pasar dilakukan melalui laporan yang memberikan informasi mengenai eksposur risiko pasar dan kepatuhan terhadap limit-limit. Laporan VaR diberikan kepada manajemen BNI secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) melalui laporan sirkulasi atau forum RMC. Khusus terkait dengan laporan perkembangan Risiko Suku Bunga pada *banking book* disampaikan kepada manajemen setiap bulan melalui forum *Asset & Liabilities Committee* (ALCO).

BNI menggunakan model *Value at Risk* (VaR) untuk menghitung potensi risiko pasar yang timbul akibat perubahan faktor pasar yang dapat mempengaruhi nilai pasar pada portofolio produk Bank. Cakupan Risiko Pasar adalah sebagai berikut:

- a. Risiko Nilai Tukar pada *trading book* dan *banking book*.
- b. Risiko Suku Bunga pada *trading book* dan *banking book* (tidak termasuk aset-aset/investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo).

52. MARKET RISK (continued)

BNI Market Risk limit as a part of the risk controlling process is set and reviewed periodically by ERM and PGV which are independent from risk taking units (TRS and overseas branches). The Market Risk limits are as follows:

- a. *Market Risk limits on trading book:*
- (i) *Value at Risk (VaR) limit and Stressed Value at Risk (SVaR) limit*
 - (ii) *Transaction nominal limit*
 - (iii) *Open position limit*
 - (iv) *Loss limit*

These limits are performed for each trading desk (Currencies Trading, Rates Trading, Banking Management - Available-For-Sale Bonds, Funding and Gapping - Liquidity Bonds).

- b. *Market Risk limits on banking book:*
- (i) *Gap Asset & Liability Limit - Indonesian Rupiah*
 - (ii) *Gap Asset & Liability Limit - Foreign Currency*
 - (iii) *Internal BNI Net Open Position Limit.*

ERM Division also prepares risk appetite and risk tolerance for Liquidity Risk in accordance with the Bank's strategic objectives, which are used as a reference level of risk to be taken by the Bank in achieving business goals.

Market Risk monitoring is conducted through reports which give information about the market risk exposures and the limit compliance. The VaR reports are submitted to BNI management on a periodic basis (daily, weekly, and monthly) through circular reports or RMC forum. Specifically the report for interest rate risk on banking book is submitted to management on a monthly basis through the ALCO forum.

BNI uses Value at Risk model (VaR) to measure potential market risk arising from possible changes of market factors which can affect the market value of the Bank portfolio. The scope of Market Risk are as follows:

- a. *Foreign exchange risk on trading book and banking book.*
- b. *Interest rate risk on trading book and banking book (excluding held-to-maturity assets/investments).*

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

52. RISIKO PASAR (lanjutan)

Metode untuk menghitung VaR yang digunakan BNI adalah *Variance Covariance/Risk Metrics*. Metode ini menggunakan formula dengan memasukkan parameter-parameter seperti volatilitas dan korelasi. Metode ini mengasumsikan bahwa segala perubahan dalam faktor risiko yang mempengaruhi kondisi pasar normal akan mengikuti distribusi normal. Sedangkan untuk kondisi pasar harian yang tidak normal, dilakukan perhitungan *Stressed VaR*.

VaR tidak menyediakan informasi potensi laba atau rugi pada kondisi pasar yang ekstrim atau *stress*. BNI melakukan *stress testing* untuk kondisi pasar yang ekstrim tersebut.

Pengukuran VaR adalah estimasi maksimum potensi kerugian Risiko Pasar untuk 1 (satu) hari ke depan dengan tingkat keyakinan 99% dengan posisi portofolio yang dimiliki tidak berubah. Penggunaan tingkat keyakinan 99% berarti dalam rentang waktu satu hari, kerugian harian yang melebihi VaR dalam kondisi pasar normal tidak akan terjadi lebih dari 1 (satu) kali dalam 100 hari.

Karena VaR adalah bagian dari pengelolaan Risiko Pasar Bank, limit-limit VaR telah dibentuk untuk seluruh *trading operation* dan eksposur perlu direview oleh manajemen secara harian terhadap limit-limit.

Tabel dibawah ini menunjukkan VaR agregat pada portofolio *trading book* dan *banking book* milik Bank:

	31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/ 31 December 2018 and the year then ended			
	Risiko mata uang asing/ Foreign exchange risk	Risiko nilai wajar suku bunga/ Fair value interest rate risk		
		Trading book	Banking book	
2018 - 31 Desember	9,112	2,498	293,529	2018 - 31 December
2018 - Rata-rata harian	9,708	4,558	270,637	2018 - Average daily
2018 - Tertinggi	20,602	8,535	381,031	2018 - Highest
2018 - Terendah	5,109	1,653	230,845	2018- Lowest
	31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/ 31 December 2017 and the year then ended			
	Risiko mata uang asing/ Foreign exchange risk	Risiko nilai wajar suku bunga/ Fair value interest rate risk		
		Trading book	Banking book	
2017 - 31 Desember	6,603	5,555	240,388	2017 - 31 December
2017 - Rata-rata harian	12,554	2,939	211,806	2017 - Average daily
2017 - Tertinggi	23,679	7,457	266,083	2017 - Highest
2017 - Terendah	4,846	476	151,511	2017- Lowest

52. MARKET RISK (continued)

The VaR method used in BNI is *Variance Covariance/Risk Metrics*. This method uses formulas with some parameters such as volatility and correlation. It assumes that any changes that occurs in the risk factors affecting the normal market conditions will follow normal distribution. For abnormal market condition, *Stressed VaR* calculation is applied.

VaR does not provide information for potential gain or loss in the extreme or stress market condition. BNI performs stress testing in the extreme market condition.

The VaR calculation is an estimate using a 99% confidence level of the potential loss that is not expected to be exceeded if the current market risk positions were to be held unchanged for one day. The use of a 99% confidence level means that, within a one day horizon, losses exceeding the VaR figure should occur, on average under normal market conditions, not more than once every hundred days.

Since VaR is an integral part of the Bank's market risk management, VaR limits have been established for all trading operations and exposures are required to be reviewed daily against the limits by management.

The table below presents the aggregate VaR on the Bank's trading book and banking book portfolio:



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

52. RISIKO PASAR (lanjutan)

(i) Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga timbul pada instrumen keuangan yang mempunyai kemungkinan kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga yang akan berdampak pada arus kas masa depan atau nilai wajar instrumen keuangan.

Komite Risiko dan Kapital Sub Komite Manajemen Risiko (KRK-RMC) BNI, bertanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan serta menjaga kebijakan pengelolaan risiko tingkat suku bunga sesuai dengan pedoman umum BNI. Tujuan utama Komite Risiko dan Kapital Sub Komite Manajemen Risiko (KRK-RMC) BNI adalah memaksimalkan hasil usaha BNI dengan tetap memperhatikan *limit* risiko yang ditetapkan.

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas konsolidasian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

52. MARKET RISK (continued)

(i) Interest rate risk

Interest rate risks arise from financial instruments which have the loss possibilities from changes in interest rates that will affect future cash flows or fair value of the financial instruments.

BNI's Risk and Capital Committee sub Committee Risk Management (KRK-RMC) which consists of members of the Board of Directors and selected members of senior management held responsible for determining, executing and overseeing the interest rate risk management policy in accordance with the overall guidelines of BNI. The main objective of the Risk and Capital Committee sub Committee Risk Management (KRK-RMC) is to maximize BNI's returns within the predetermined risk limits.

The tables below summarize the range of contractual interest rates per annum for significant consolidated assets and liabilities as of 31 December 2018 and 2017:

31 Desember/December 2018

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	Euro %	Yen Jepang Japanese Yen %	Dolar Singapura/ Singapore Dollar %	Won Korea Selatan/ South Korean Won %	Yuan China/ Chinese Yuan %	
ASET								ASSETS
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	0.00-10.00	0.00-4.20	-	-	-	0.20-2.15	2.00	Placements with other banks and Bank Indonesia
Efek-efek	0.08-10.25	0.50-7.75	0.00-1.78	0.86-1.16	4.63-5.25	-	0.00-6.00	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	-	-	-	Securities purchased under agreements to resell
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	7.00-9.18	1.50-7.89	1.50-3.15	-	-	-	-	Bills and other receivables
Pinjaman yang diberikan	5.00-22.00	1.43-5.00	1.84-6.50	1.39-6.05	4.00-7.00	2.50-3.75	7.00	Loans
Obligasi Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	Government Bonds
- Tingkat bunga tetap	5.11-12.03	1.81-7.75	1.78	0.86-2.90	2.25-3.25	-	-	Fixed interest rate -
- Tingkat bunga mengambang	7.18-7.53	-	-	-	-	-	-	Floating interest rate -
LIABILITAS								LIABILITIES
Simpanan nasabah	0.00-9.50	0.00-4.00	0.00-3.68	0.01-0.45	0.00-0.50	-	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	0.00-8.40	0.00-3.39	-	0.08-0.33	0.00-2.11	-	-	Deposits from other banks
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	6.99-7.55	2.77-3.25	-	-	-	-	-	Securities sold under agreements to repurchase
Efek-efek yang diterbitkan	8.00	-	-	-	-	-	-	Securities issued
Pinjaman yang diterima	6.99-11.50	0.00-5.35	0.09-0.47	-	-	-	3.22	Borrowings

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

52. RISIKO PASAR (lanjutan)

52. MARKET RISK (continued)

(i) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

31 Desember/December 2017

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	Euro %	Yen Jepang Japanese Yen %	Dolar Singapura/ Singapore Dollar %	Won Korea Selatan/ South Korean Won %	Yuan China/ Chinese Yuan %	
ASET								ASSETS
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	0.00-8.40	0.01-2.97	-	-	-	1.43-1.79	2.50	Placements with other banks and Bank Indonesia
Efek-efek	5.80-10.55	1.46-7.75	-	-	-	-	-	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	4.35-4.80	-	-	-	-	-	-	Securities purchased under agreements to resell
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	7.98-8.98	1.00 -5.19	1.00 -3.01	4.20	2.75	-	-	Bills and other receivables
Pinjaman yang diberikan	4.00-26.95	0.54-10.00	0.75 -4.33	0.76-2.51	2.09 -6.25	-	7.00	Loans
Obligasi Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	Government Bonds
- Tingkat bunga tetap	5.11-12.04	1.50-7.75	-	0.51-1.16	2.25-3.25	-	-	Fixed interest rate -
- Tingkat bunga mengambang	4.93-4.96	-	-	-	-	-	-	Floating interest rate -
LIABILITAS								LIABILITIES
Simpanan nasabah	0.00-8.10	0.00-2.35	0.00-0.10	0.00-0.40	0.00-0.75	-	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	0.00-8.40	0.00-2.21	-	0.19-0.28	1.61-2.00	-	-	Deposits from other banks
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	7.44-7.55	2.66	-	-	-	-	-	Securities sold under agreements to repurchase
Efek-efek yang diterbitkan	8.00	-	-	-	-	-	-	Securities issued
Pinjaman yang diterima	5.70-10.50	0.00-4.40	0.09-0.10	-	1.20-1.25	-	3.30	Borrowings

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan suku bunga dalam Rupiah yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi Bank. Sensitivitas laporan laba rugi adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel kurva hasil.

The following tables demonstrate the sensitivity to a reasonable possible change in IDR interest rates, with all other variables held constant, in the Bank's profit or loss. The sensitivity of profit or loss is the effect of the changes in interest rates assumptions on the profit or loss for the period. The total sensitivity of profit or loss is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

31 Desember/December 2018

Perubahan presentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap laporan laba rugi/ Impact to profit or loss
±25	151,857 ±
±50	303,713 ±

31 Desember/December 2017

Perubahan presentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap laporan laba rugi/ Impact to profit or loss
±25	142,237 ±
±50	284,474 ±

BNI memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya. BNI telah melakukan penilaian atas dampak dari risiko tingkat suku bunga tersebut dan hasilnya tidak signifikan.

BNI has other exposure to interest rate risks in Singapore Dollar, United States Dollar, Euro and others. BNI assessed that the impact of those interest rate risks is not significant.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

52. RISIKO PASAR (lanjutan)

52. MARKET RISK (continued)

(ii) Risiko mata uang

(ii) Currency risk

Risiko valuta asing timbul sebagai akibat adanya aset dan liabilitas keuangan dalam valuta asing dan rekening administratif konsolidasian baik pada sisi aset konsolidasian maupun liabilitas konsolidasian. Posisi valuta asing BNI dapat dikelompokkan dalam dua aktivitas yaitu: *trading book*, yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan transaksi valuta asing, dan *banking book*, yang dilakukan dalam rangka mengendalikan Posisi Devisa Neto BNI secara keseluruhan.

Foreign currency risks arise from consolidated financial assets and liabilities and administrative accounts in foreign currency positions, both on the consolidated assets and liabilities. BNI's foreign currency position is divided into two activities: the *trading book*, which is prepared to generate profit from the exchange rate, and the *banking book*, which is prepared to control BNI's overall Net Open Position.

BNI memiliki kebijakan untuk menjaga eksposur mata uang asing dalam batas yang wajar dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Manajemen berkeyakinan bahwa saat ini eksposur mata uang asing atas aset dan liabilitas masih dalam batas yang konservatif.

BNI's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits and within existing regulatory guidelines. The Management believes that its current profile of foreign currency exposure on its assets and liabilities is within conservative limits.

Berikut adalah Posisi Devisa Neto (PDN), dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 31 Desember 2018 per mata uang, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia:

Presented below is the Net Open Position (NOP), in absolute amounts, of BNI as of 31 December 2018 by currency, based on Bank Indonesia regulations:

31 Desember 2018/31 December 2018

Mata Uang	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	Currencies
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)				AGGREGATE (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)
Yuan China	4,389,802	4,370,232	19,570	Chinese Yuan
Dolar Amerika Serikat	318,797,036	319,516,200	719,164	United States Dollar
Euro	9,909,085	10,460,790	551,705	Euro
Yen Jepang	5,435,493	5,488,347	52,854	Japanese Yen
Dolar Singapura	2,799,501	2,760,675	38,826	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	664,213	723,265	59,052	British Pound Sterling
Dolar Hongkong	914,169	770,044	144,125	Hong Kong Dollar
Lain-lain	1,470,565	984,598	485,967 *)	Others
Total			2,071,263	Total
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Dolar Amerika Serikat	189,588,890	186,444,056	3,144,834	United States Dollar
Euro	3,034,302	4,501,231	1,466,929	Euro
Yen Jepang	4,185,630	3,806,994	378,636	Japanese Yen
Dolar Singapura	2,246,743	1,826,478	420,265	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	218,409	185,904	32,505	British Pound Sterling
Dolar Hongkong	527,306	215,621	311,685	Hong Kong Dollar
Yuan China	4,312,696	4,174,084	138,612	Chinese Yuan
Lain-lain	1,220,789	581,974	638,815 *)	Others
Total			6,532,281	Total
Total Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada Entitas Anak (Catatan 55)			104,254,095	Total Tier I and II Capital less investment in Subsidiaries (Note 55)
Rasio PDN (Keseluruhan)			1.99%	NOP Ratio (Aggregate)
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			6.27%	NOP Ratio (Statement of Financial Position)

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan liabilitas dari beberapa mata uang asing lainnya

*) Sum of the absolute values of the difference between assets and liabilities of some foreign currencies

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

52. RISIKO PASAR (lanjutan)

52. MARKET RISK (continued)

(ii) Risiko mata uang (lanjutan)

(ii) Currency risk (continued)

Berikut adalah Posisi Devisa Neto (PDN), dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 31 Desember 2017 per mata uang, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia:

Presented below is the Net Open Position, in absolute amounts, of BNI as of 31 December 2017 by currency, based on Bank Indonesia regulations:

31 Desember 2017/31 December 2017

Mata Uang	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	Currencies
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)				AGGREGATE (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)
Yuan China	4,373,864	4,331,700	42,164	Chinese Yuan
Dolar Amerika Serikat	241,453,607	242,662,820	1,209,213	United States Dollar
Euro	8,004,223	8,148,384	144,161	Euro
Yen Jepang	2,776,974	2,886,915	109,941	Japanese Yen
Dolar Singapura	1,836,797	1,954,677	117,880	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	554,616	578,001	23,385	British Pound Sterling
Dolar Hongkong	590,072	433,169	156,903	Hong Kong Dollar
Lain-lain	993,296	406,002	587,294 *)	Others
Total			2,390,941	Total
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Dolar Amerika Serikat	132,733,735	121,798,305	10,935,430	United States Dollar
Euro	1,642,442	2,047,673	405,231	Euro
Yen Jepang	1,966,989	2,016,513	49,524	Japanese Yen
Dolar Singapura	1,520,211	1,561,870	41,659	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	244,178	84,299	159,879	British Pound Sterling
Dolar Hongkong	351,671	86,737	264,934	Hong Kong Dollar
Yuan China	4,197,758	4,043,782	153,976	Chinese Yuan
Lain-lain	677,537	43,339	634,198 *)	Others
Total			12,644,831	Total
Total Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada Entitas Anak (Catatan 55)			95,306,890	Total Tier I and II Capital less investment in Subsidiaries (Note 55)
Rasio PDN (Keseluruhan)			2.51%	NOP Ratio (Aggregate)
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			13.27%	NOP Ratio (Statement of Financial Position)

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan liabilitas beberapa mata uang asing lainnya

*) Sum of the absolute values of the difference between assets and liabilities of some foreign currencies



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

53. RISIKO OPERASIONAL

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko operasional, BNI mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan serta *International Best Practices*. Pengelolaan risiko operasional meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional.

1. **Identifikasi Risiko**
Mekanisme identifikasi risiko operasional dilakukan dengan menerapkan *Macro Process Mapping Assessment* atas proses kerja/ aktivitas masing-masing unit untuk menangkap potensi risiko operasional yang dilakukan dengan metode interview (*one on one meeting*).
2. **Penilaian Risiko**
Dilakukan oleh masing-masing unit pemilik risiko melalui metode *operational risk self assessment*, mencakup penilaian atas dampak, frekuensi dan penyebab risiko serta solusinya.
3. **Pengukuran Risiko**
Pengukuran risiko operasional saat ini menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*).
4. **Pemantauan Risiko**
Dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja sebagai *first line of defense* pada saat aktivitas operasional berlangsung.
Divisi Manajemen Risiko Bank melakukan evaluasi dan laporan/ *feedback* atas penilaian risiko berdasarkan hasil *self assessment* serta realisasi atas kerugian risiko operasional yang terjadi, meliputi:
 - *Feedback report* untuk seluruh divisi/ satuan/ unit/ wilayah/ cabang
 - Laporan bulanan Pemantauan Beban Risiko Operasional kepada Direksi
 - Laporan Profil Risiko Operasional
5. **Pengendalian Risiko**
Mekanisme mitigasi risiko operasional tergambar pada proses pengendalian internal dengan menerapkan 4 (empat) strategi mitigasi, yaitu hindari, kurangi, transfer dan terima. Keempat strategi mitigasi tersebut tertuang dalam prosedur mitigasi risiko operasional yang meliputi prosedur pengendalian, prosedur penyelesaian transaksi, prosedur akuntansi, prosedur penyimpanan aset dan kustodian, prosedur penyediaan produk dan prosedur pencegahan *fraud*.

53. OPERATIONAL RISK

In order to implement operational risk management, BNI made reference to Bank Indonesia or Financial Authority Regulations, also International Best Practices. Operational risk management encompasses the identification, measurement, monitoring and operational control processes.

1. **Risk Identification**
The operational risk identification mechanism is carried out by applying a macro process mapping assessment of the work processes/ activities of each unit to capture the potential operational risks conducted by interview method (one-on-one meeting).
2. **Risk Assessment**
Performed by individual risk owner unit through the operational risk self assessment method, including assessment of the impact, frequency, and causes of risk and their solutions.
3. **Risk Measurement**
Current operational risk measurement uses the Basic Indicator Approach method.
4. **Risk Monitoring**
Performed by all units as the first line of defense at the time of operational activity on the main risks in ongoing activities. Enterprise Risk Management Division evaluates and report/feedback on risk assessment based on self assessment result and realization of loss of operational risk that happened, consisting of :
 - *Feedback report for all divisions/units/ regions/branches.*
 - *Operational Risk Expenses monthly reports to the Board of Directors.*
 - *Operational Risk Profile report.*
5. **Risk Control**
Operational risk mitigation mechanism are reflected in the internal control process by implementing 4 (four) mitigation strategies, ie.avoid, mitigate, transfer, and accept. The four mitigation strategies are carried out in operational risk mitigation procedures that include control procedures, transaction settlement procedures, accounting procedures, asset storage procedures and custodians, product supply procedures and fraud prevention procedures.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

53. RISIKO OPERASIONAL (lanjutan)

Salah satu perangkat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan risiko operasional di BNI adalah PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). PERISKOP terdiri dari tiga (3) modul utama, yaitu:

- Modul *Self Assessment*, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya risiko operasional di suatu unit. Metode ini terdiri dari serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan sendiri (*self assessment*) oleh setiap unit pemilik risiko (*risk owner*) secara independen dalam mengidentifikasi, menilai, mengontrol dan memantau risiko operasional yang terjadi di unitnya. Modul *self assessment* wajib diisi oleh segenap unit setiap tiga bulan sekali, dengan melakukan pengukuran terhadap frekuensi dan dampak setiap *risk issue* di unitnya serta mencari penyebab risiko tersebut timbul.
- *Loss Event Database*, merupakan sarana yang digunakan untuk mencatat setiap peristiwa risiko operasional yang menimbulkan dampak finansial yang meliputi *actual loss* dan *near miss* secara langsung. Setiap kali unit pemilik risiko (*risk owner*) mengalami kerugian risiko operasional, maka unit tersebut harus melakukan input dalam modul *Loss Event Database* tersebut. Dari modul ini akan diketahui tipe risiko yang terjadi, penyebab kejadian tersebut, lokasi (lini bisnis) tempat terjadinya risiko serta besarnya (*amount*) risiko yang terjadi atau liabilitas hukum yang terjadi serta pengembalian kerugian (*recovery*). Sarana ini sangat penting untuk memonitor profil risiko operasional secara teratur. Data yang diperoleh dari *Loss Event Database* (LED) merupakan input data utama bila Bank akan mengaplikasikan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA) dalam pengukuran kecukupan modal minimum risiko operasional.
- *Key Risk Indicator*, merupakan serangkaian parameter yang ditetapkan untuk mengidentifikasi potensi kerugian risiko operasional yang utama/ dominan, yang berpotensi mengganggu pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) unit kerja, sebelum peristiwa risiko operasional tersebut terjadi. Perangkat tersebut akan memberikan *warning/alert* jika nilainya sudah di luar *range/threshold* yang ditetapkan sebelumnya (*early warning signal*) yang menuntut adanya tindak lanjut manajemen unit untuk mengatasi permasalahan tersebut.

53. OPERATIONAL RISK (continued)

One of the tools used to perform risk management at BNI is PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). Periskop consists of three (3) main modules:

- *Self Assessment Module*, is a methodology to detect the possibility that an operational risk has occurred. This method is a self-assessment process conducted by every risk owner independently in identifying, assessing, controlling and monitoring operational risk in each unit. Self Assessment module should be filed by all units, once every three-month; by conducting an assessment of the existing risk issue frequency and impacts; and finding solutions to mitigate emerging operational risks.
- The *Loss Event Database* is a system to identify and record every operational risk that causes direct financial impact. Each time the risk owner unit experience financial loss from operational risk, the unit should record it in the *Loss Event Database* module. The module will generate information such as type of risk, cause of risk, location where the risk emerge and the amount of risk or legal obligation and the recovery (if any). This system is very important to monitor operational risk exposure and profile in an orderly manner. The data gathered from the *Loss Event Database* will become the main input when the Bank applies advance approaches to measure its minimum operational risk capital adequacy ratio.
- *Key Risk Indicators*, is a series of parameters established to identify main potential loss from operational risk, that potentially interfere the achievement of *Key Performance Indicator* (KPI) before it happens. The module will give a warning/alert when the exposure exceeds a predetermined range/threshold that has been set and requires follow up from unit's management to overcome the problems.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

53. RISIKO OPERASIONAL (lanjutan)

Selain PERISKOP, BNI saat ini telah memiliki rekening Beban Risiko Operasional (BRO) serta *Recovery* BRO, yang digunakan untuk membukukan kerugian atau *recovery* yang disebabkan oleh risiko operasional. Setiap bulan dilakukan monitoring terhadap rekening BRO dan *Recovery* BRO ini guna mitigasi risiko operasional.

Terkait dengan kelangsungan usaha bila terjadi kondisi *disaster* (bencana), BNI juga sudah mempunyai kebijakan *Business Continuity Management* (BCM), yaitu suatu mekanisme formal yang merupakan kombinasi antara strategi, kebijakan, prosedur, dan organisasi yang dikembangkan untuk memastikan kelangsungan operasional dari fungsi-fungsi usaha yang kritis pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadi gangguan atau bencana. Kebijakan ini mencakup semua unit usaha yang ada di BNI, baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

BNI memiliki infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi BCM seperti *Disaster Recovery Center* (DRC), *Dual Data Center* (DDC), Lokasi Alternatif Gedung BCM dan *Command Center*. Secara rutin BNI melakukan pengujian sistem dan aplikasi pada divisi/unit kritis setiap 6 (enam) bulan sekali, melakukan site visit dan simulasi pada cabang dan wilayah guna memastikan kesiapan menghadapi bencana.

54. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan disajikan per kategori dari instrumen keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

	31 Desember/December				
	2018		2017		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas	14,043,846	14,043,846	11,577,664	11,577,664	Cash
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	7,249,383	7,249,383	8,429,705	8,429,705	Marketable securities
Obligasi Pemerintah	3,350,495	3,350,495	2,936,420	2,936,420	Government Bonds
Tagihan derivatif	605,248	605,248	216,884	216,884	Derivative receivables
	11,205,126	11,205,126	11,583,009	11,583,009	

53. OPERATIONAL RISK (continued)

Besides PERISKOP, BNI has Operational Risk Expense (Beban Risiko Operasional (BRO)) and BRO Recovery accounts, which will be used to record losses or recoveries caused by operational risks. To mitigate the operational risk, BRO account and recovery will be monitored monthly.

Regarding the business resilience when disaster occurs, BNI has Business Continuity Management (BCM) policies, which is a formal mechanism which combined strategies, policies, procedures and organizations developed to ensure operational continuity of critical functions under certain levels of services when a disturbance or disaster is encountered. This policy is applied for all business units in BNI for both domestic and overseas.

BNI has the infrastructure needed to implement BCM such as Disaster Recovery Center (DRC), Dual Data Center (DDC), BCM alternative building and Command Center. Regularly BNI perform a system and application testing on critical Division/Unit every 6 (six) months, do a site visit and simulation to the branch and region to ensure the disaster readiness.

54. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The next table summarises the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities presented per category of financial instruments. The fair values disclosed are based on relevant information available as of 31 December 2018 and 2017, and not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after this date.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**54. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS
KEUANGAN (lanjutan)**

**54. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continued)**

	31 Desember/December				
	2018		2017		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	
Tersedia untuk dijual					Available-for-sale
Efek-efek	23,736,028	23,736,028	26,788,760	26,788,760	Marketable securities
Obligasi Pemerintah	60,282,900	60,282,900	56,236,777	56,236,777	Government Bonds
Penyertaan saham	651,938	651,938	651,938	651,938	Equity investments
	84,670,866	84,670,866	83,677,475	83,677,475	
Dimiliki hingga jatuh tempo					Held-to-maturity
Efek-efek	1,058,858	1,069,212	831,434	839,051	Marketable securities
Obligasi Pemerintah	23,158,006	23,263,187	20,676,255	22,177,162	Government Bonds
	24,216,864	24,332,399	21,507,689	23,016,213	
Total	134,136,702	134,252,237	128,345,837	129,854,361	Total
Pinjaman dan piutang					Loans and receivables
Pinjaman yang diberikan	497,886,888	497,886,888	426,789,981	426,789,981	Loans
Tagihan akseptasi	20,295,277	20,295,277	18,106,412	18,106,412	Acceptances receivables
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	24,586,862	24,586,862	15,700,925	15,700,925	Bills and other receivables
Giro pada Bank Indonesia	35,591,243	35,591,243	32,700,717	32,700,717	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	13,133,828	13,133,828	21,335,150	21,335,150	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	39,324,445	39,324,445	28,592,738	28,592,738	Placements with other banks and Bank Indonesia
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	679,122	679,122	Securities purchased under agreements to resell
Penyertaan saham	603,923	603,923	713,423	713,423	Equity investments
Aset lain-lain - neto*)	9,978,489	9,978,489	8,905,714	8,905,714	Other assets - net)
	641,400,955	641,400,955	553,524,182	553,524,182	
Total	775,537,657	775,653,192	681,870,019	683,378,543	Total
Liabilitas keuangan Nilai wajar melalui laporan laba rugi					Financial liabilities Fair value through profit or loss
Liabilitas derivatif	322,028	322,028	113,820	113,820	Derivative payables
Liabilitas keuangan lainnya					Other financial liabilities
Liabilitas segera	4,160,295	4,160,295	4,867,547	4,867,547	Obligation due immediately
Simpanan nasabah					Deposits from customers
Giro	168,106,953	168,106,953	142,232,656	142,232,656	Current accounts
Tabungan	196,253,601	196,253,601	174,040,609	174,040,609	Savings account
Deposito berjangka	187,811,648	187,811,648	176,474,683	176,474,683	Time deposits
Simpanan dari bank lain					Deposits from other banks
Pinjaman pasar uang antar bank	8,458,845	8,458,845	3,352,300	3,352,300	Inter-bank call money
Giro	2,128,100	2,128,100	2,370,104	2,370,104	Current accounts
Deposito berjangka	1,322,672	1,322,672	512,776	512,776	Time deposit
Negotiable Certificate of Deposit	938,665	938,665	4,247,857	4,247,857	Negotiable Certificate of Deposit
Simpanan lainnya	1,026,213	1,026,213	1,251,170	1,251,170	Other deposits
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	21,524,329	21,524,329	2,390,066	2,390,066	Securities sold under agreements to repurchase
Liabilitas akseptasi	4,416,613	4,416,613	4,507,331	4,507,331	Acceptances payables
Efek-efek yang diterbitkan	2,987,464	2,937,060	2,986,279	3,059,340	Securities issued
Pinjaman yang diterima	52,024,506	52,024,506	44,670,741	44,670,741	Borrowings
Efek-efek subordinasi	99,953	99,953	-	-	Subordinated securities
Liabilitas lain-lain**)	12,107,162	12,107,162	12,738,157	12,738,157	Other liabilities**)
	663,367,019	663,316,615	576,642,276	576,715,337	
Total	663,689,047	663,638,643	576,756,096	576,829,157	Total

*) Aset lain-lain - neto terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain dan piutang premi asuransi.

*) Other assets - net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and insurance premium receivables.

***) Liabilitas lain-lain terdiri dari utang ke pemegang polis, setoran jaminan, nota kredit dalam penyelesaian, utang reasuransi dan komisi, serta utang nasabah - Entitas Anak.

***) Other liabilities consist of obligation to policy holders, guarantee deposits, credit memo in process, reinsurance payable and commission, and payable to customers - Subsidiary.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**54. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS
KEUANGAN (lanjutan)**

**54. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continued)**

Bank menggunakan hirarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

The Bank adopts the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- (i) Tingkat 1: Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
- (ii) Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas keuangan, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga);
- (iii) Tingkat 3: input untuk aset atau liabilitas keuangan yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

- (i) Level 1: Quoted prices in active market for the same/identical financial asset or liability;
- (ii) Level 2: Inputs other than quoted market prices included in Level 1 that are observable for the financial asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price);
- (iii) Level 3: Inputs for the financial assets or liability that are not based on observable market data (unobservable information).

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hirarki nilai wajar:

The table below show the financial instruments measured at fair value grouped according to the fair value hierarchy:

31 Desember/December 2018

	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/Fair value			
		Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
Aset Keuangan					Financial Assets
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	7,249,383	-	7,249,383	-	Marketable securities
Obligasi Pemerintah	3,350,495	3,350,495	-	-	Government Bonds
Tagihan derivatif	605,248	-	605,248	-	Derivative receivables
	11,205,126	3,350,495	7,854,631	-	
Tersedia untuk dijual					Available-for-sale
Efek-efek	23,736,028	17,203,144	6,532,884	-	Marketable securities
Obligasi Pemerintah	60,282,900	51,440,068	8,842,832	-	Government Bonds
Penyertaan saham	651,938	-	-	651,938	Equity investments
	84,670,866	68,643,212	15,375,716	651,938	
Dimiliki hingga jatuh tempo					Hold to maturity
Efek-efek	1,058,858	1,069,212	-	-	Marketable securities
Obligasi Pemerintah	23,158,006	23,263,187	-	-	Government Bonds
	24,216,864	24,332,399	-	-	
Pinjaman yang diberikan	497,886,888	-	479,256,672	18,630,216	Loans
Aset tetap	20,755,347	-	20,755,347	-	Fixed Assets
Total	638,735,091	96,326,106	523,242,366	19,282,154	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					Fair value through profit or loss
Liabilitas derivatif	322,028	-	322,028	-	Derivative payables
Total	322,028	-	322,028	-	Total

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**54. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS
KEUANGAN (lanjutan)**

**54. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continued)**

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hirarki nilai wajar: (lanjutan)

The table below show the financial instruments measured at fair value grouped according to the fair value hierarchy: (continued)

	31 Desember/December 2017				
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/Fair value			
		Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
Aset Keuangan					Financial Assets
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	8,429,705	-	8,429,705	-	Marketable securities
Obligasi Pemerintah	2,936,420	2,936,420	-	-	Government Bonds
Tagihan derivatif	216,884	-	216,884	-	Derivative receivables
	11,583,009	2,936,420	8,646,589	-	
Tersedia untuk dijual					Available-for-sale
Efek-efek	26,788,760	26,776,137	12,623	-	Marketable securities
Obligasi Pemerintah	56,236,777	43,952,760	12,284,017	-	Government Bonds
Penyertaan saham	651,938	-	-	651,938	Equity investments
	83,677,475	70,728,897	12,296,640	651,938	
Dimiliki hingga jatuh tempo					Hold to maturity
Efek-efek	831,434	839,051	-	-	Marketable securities
Obligasi Pemerintah	20,676,255	22,177,162	-	-	Government Bonds
	21,507,689	23,016,213	-	-	
Pinjaman yang diberikan	426,789,981	-	413,530,995	13,258,986	Loans
Aset tetap	17,325,885	-	17,325,885	-	Fixed Assets
Total	560,884,039	96,681,530	451,800,109	13,910,924	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					Fair value through profit or loss
Liabilitas derivatif	113,820	-	113,820	-	Derivative payables
Total	113,820	-	113,820	-	Total



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**54. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS
KEUANGAN (lanjutan)**

Tidak terdapat perpindahan antara tingkat 1 dan tingkat 2 hirarki nilai wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif (contohnya surat berharga yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual), ditentukan dengan berdasarkan harga pasar yang dikutip pada tanggal pelaporan. Suatu pasar dianggap aktif apabila informasi mengenai harga kuotasi dapat diakses dengan mudah dan tersedia secara berkala dari suatu bursa, pedagang efek, broker, kelompok penilai harga pasar industri tertentu, regulator dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan regular pada tingkat yang wajar. Harga pasar dikutip untuk aset keuangan yang dimiliki Grup adalah harga penawaran (*bid price*). Instrumen-instrumen tersebut digolongkan dalam Tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam Tingkat 1 umumnya meliputi investasi yang diklasifikasikan sebagai surat berharga yang dimiliki untuk diperdagangkan dan tersedia untuk dijual.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (contohnya derivatif *over-the-counter*) ditentukan dengan teknik penilaian. Teknik-teknik penilaian tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi dan sedapat mungkin meminimalisir penggunaan estimasi spesifik dari entitas. Apabila seluruh input yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan dapat diobservasi, maka instrumen keuangan tersebut dikategorikan dalam Tingkat 2. Sebaliknya, jika salah satu atau lebih data tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, instrumen ini termasuk dalam Tingkat 3.

Teknik penilaian spesifik yang digunakan untuk melakukan penilaian pada instrumen keuangan, antara lain:

- Harga yang dikutip dari pasar atau pedagang efek instrumen serupa
- Nilai wajar dari swap tingkat suku bunga yang diperhitungkan sebagai nilai kini dari estimasi arus kas masa datang berdasarkan kurva imbal hasil yang dapat diobservasi
- Nilai wajar dari kontrak berjangka valuta asing yang ditentukan berdasarkan kurs berjangka pada tanggal pelaporan keuangan, dan
- Teknik-teknik lainnya, seperti analisis arus kas diskontoan yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya

**54. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continued)**

There is no transfer between level 1 and level 2 of the fair value hierarchy.

The fair value of financial instruments traded in an active market (i.e. traded and available-for-sale securities), is based on quoted market price at reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from exchange, dealer or broker, industry group pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The quoted market price used for financial asset held by group is bid price. These instruments are included in Level 1. Instruments included in Level 1 comprise primarily of securities classified as held-for-trading and available-for-sale.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (i.e. over-the-counter derivatives) is determined by using valuation techniques. These valuation technique maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required for the fair value of an instrument are observable, the instrument is included in Level 2. Otherwise, if one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- *Quoted market prices or dealer quotes for similar instruments*
- *Fair value of interest rate swap is calculated as the present value of estimated future cashflow based on observable yield curves*
- *Fair value of foreign exchange contracts is determined using forward exchange rates at reporting date, and*
- *Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for other financial instrument*

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**54. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS
KEUANGAN (lanjutan)**

- (i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, penyertaan saham, tagihan akseptasi dan aset lain-lain.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia merupakan penanaman dana dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), FASBI syariah, *call money*, penempatan "*fixed term*", deposito berjangka dan lain-lain.

Estimasi nilai wajar terhadap penyertaan saham sementara ditetapkan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan akseptasi dan aset lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, wesel ekspor, tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali, tagihan akseptasi dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- (ii) Pinjaman yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan pinjaman yang diberikan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Pinjaman yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari pinjaman yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Nilai tercatat dari pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

**54. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continued)**

- (i) *Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks and Bank Indonesia, marketable securities, bills and other receivables, equity investments, acceptances receivables, securities purchases under agreements to resell and other assets.*

Placements with other banks and Bank Indonesia represent placements in the form of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), sharia FASBI, call money, "fixed-term" placements, time deposits and others.

The estimated fair value of temporary equity investments were based on valuation done by an independent appraiser.

The carrying amount of cash and cash equivalents, as well as placements with floating rates are a reasonable approximation of fair value.

The estimated fair values of fixed interest bearing placements, marketable securities, bills and other receivables, acceptances receivables and other assets were based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of fixed rate placements, bills and other receivables, acceptances receivables, securities purchased under agreements to resell and other assets were a reasonable approximation of their fair value.

- (ii) *Loans*

Generally, the Bank's portfolio consists of loans with floating interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

The carrying amount of floating rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**54. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS
KEUANGAN (lanjutan)**

- (iii) Liabilitas segera, simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas akseptasi ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo dibawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- (iv) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Nilai wajar untuk efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian.

- (v) Efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali dan efek-efek subordinasi.

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva *yield* terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya.

55. MANAJEMEN MODAL

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

**54. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continued)**

- (iii) Obligations due immediately, deposits from customers and deposits from other banks, acceptances payables and other liabilities

The estimated fair value of obligations due immediately, deposits with no stated maturity, which include non-interest bearing deposits, are the amounts repayable on demand.

The estimated fair values of fixed interest-bearing deposits and acceptances payables are based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of fixed rate deposits, acceptances payable and other liabilities are the reasonable approximation of their fair values.

- (iv) Marketable securities and Government Bonds

The fair value for held-to-maturity marketable securities and Government Bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

- (v) Securities issued, borrowings, securities sold under agreements to repurchase and subordinated securities.

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current yield curve appropriate for the remaining term to maturity.

55. CAPITAL MANAGEMENT

The Bank's capital management objective is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

55. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio* (CAR)) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (*Risk - Weighted Assets* (RWA)). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 dan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, sejak akhir bulan September 2016, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank.

Rasio Kecukupan Modal (hanya BNI) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

55. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

As of 31 December 2018 and 2017, the Bank has complied with all capital requirements.

Capital Adequacy Ratio

The *Capital Adequacy Ratio* (CAR) is the ratio of the Bank's capital over its *Risk - Weighted Assets* (RWA). Based on Bank Indonesia regulations, the total capital for credit risk consists of core capital (Tier I) and supplementary capital (Tier II) less investments in Subsidiaries. In accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 and OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks and OJK Circular Letter No.43/SEOJK.03/2016 on Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report, since the end of the month of September 2016, Specific Reserves can no longer be taken into account as a component of Capital Bank.

The CAR of BNI (BNI only) as 31 December 2018 and 2017 are as follows:

	2018	2017	
BNI - tanpa memperhitungkan risiko pasar			BNI - without considering market risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko	491,757,871	450,705,555	<i>Risk Weighted Assets</i>
Total Modal	104,254,095	95,306,890	<i>Total Capital</i>
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum BNI	21.20%	21.15%	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	9.90%	9.90%	<i>Minimum Capital Adequacy Ratio required by Bank Indonesia</i>
BNI - dengan memperhitungkan risiko pasar			BNI - considering market risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko	494,956,320	453,083,625	<i>Risk Weighted Assets</i>
Total Modal	104,254,095	95,306,890	<i>Total Capital</i>
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum BNI	21.06%	21.04%	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	9.90%	9.90%	<i>Minimum Capital Adequacy Ratio required by Bank Indonesia</i>
BNI - dengan memperhitungkan risiko operasional, mulai berlaku sejak 1 Januari 2010			BNI - considering operational risk, effective since 1 January 2010
Aset Tertimbang Menurut Risiko	563,439,969	514,476,829	<i>Risk Weighted Assets</i>
Total Modal	104,254,095	95,306,890	<i>Total Capital</i>
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum BNI	18.50%	18.53%	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	9.90%	9.90%	<i>Minimum Capital Adequacy Ratio required by Bank Indonesia</i>



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

56. AKTIVITAS JASA LAINNYA

BNI menyediakan jasa kustodi, *trustee*, pengelolaan investasi dan reksadana kepada pihak-pihak ketiga. Aset yang terdapat dalam aktivitas jasa lainnya tidak termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian ini. Jumlah komisi yang diterima dari pemberian jasa ini adalah masing-masing sebesar Rp83.696 dan Rp65.862 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Kegiatan Jasa Kustodian

Jasa Kustodian BNI mendapat izin operasi oleh Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-162/PM/1991 tertanggal 9 Desember 1991. Kustodian BNI merupakan bagian dari Divisi Operasional, dimana jasa-jasa yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

- Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi (*administration*) atas efek-efek maupun dokumen berharga lainnya;
- Penyelesaian transaksi (*settlement*) jual dan beli efek berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scriptless*);
- Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*);
- Perwakilan (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi;
- Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (*information*) yang terkait dengan efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh Kustodian BNI.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan investasi pada berbagai instrumen efek-efek, Kustodian BNI memfasilitasinya dengan menyediakan beragam layanan:

- Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada instrumen pasar modal dan pasar uang di Indonesia;
- Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi pada Surat Utang Negara (SUN - Obligasi Pemerintah atau Surat Perbendaharaan Negara) serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- Kustodian reksadana (*mutual fund*) dan kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*) yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi;

56. OTHER ACTIVITIES

BNI provides custodian, *trustee*, investment management and mutual fund services to third parties. Assets that are held in other activities are not included in these consolidated financial statements. Total fees received from these services amounted to Rp83,696 and Rp65,862 for the years ended 31 December 2018 and 2017, respectively.

Custodian Services

BNI Custodian Services has obtained an operating license based on the Decision Letter of Bapepam and LK No. KEP-162/PM/1991 dated 9 December 1991. BNI's Custodian Department, which is part of the Operational Division, provides a full range of custodian services such as:

- Safekeeping and administration of marketable securities and other valuable assets;*
- Settlement and handling services for script and scriptless trading transactions;*
- Corporate action services related to the rights of the marketable securities;*
- Proxy services for its customers' shareholder meetings and bond holder meetings;*
- Generate reports and information regarding customers' marketable securities which are kept and administered by BNI's custodian department.*

In order to fulfil the investors' needs in investing in various marketable securities and instruments, BNI's Custodian Operations facilitates various services as follows:

- General custodian which provides services to investors investing in capital markets or money markets in Indonesia;*
- Sub-Registry service provider for settlement of Government Debenture Debt (SUN - either Government Bonds or Surat Perbendaharaan Negara) and SBI transactions;*
- Custodian for mutual funds and discretionary funds issued and managed by investment manager;*

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

56. AKTIVITAS JASA LAINNYA (lanjutan)

Kegiatan Jasa Kustodian (lanjutan)

- d. Kustodian *Euroclear* bagi nasabah yang akan melakukan investasi dan penyelesaian transaksi efek-efek yang tercatat di *Euroclear Operations Centre*, Brussels. Kustodian BNI merupakan anggota langsung dari *Euroclear*.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Kustodian BNI memiliki 138 nasabah (tidak diaudit) dan 264 nasabah (tidak diaudit). Nasabah utama terdiri dari dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, yayasan, perusahaan sekuritas, reksadana, institusi/badan hukum lain dan perseorangan. Nilai portofolio yang disimpan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp215.012.511 (tidak diaudit) dan Rp204.510.680 (tidak diaudit).

BNI mengasuransikan portofolio nasabah yang disimpan di Kustodian terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari penyimpanan dan pemindahan efek-efek sesuai dengan ketentuan OJK, dahulu Bapepam dan LK.

Kegiatan Wali Amanat

BNI mendapat izin operasi untuk kegiatan wali amanat berdasarkan Surat Keputusan No. 01/STTD-WA/PM/1996 tertanggal 27 Maret 1996. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh wali amanat adalah sebagai berikut:

- Jasa Wali Amanat untuk obligasi dan *medium-term notes* (MTN)
- Jasa Agen Pengelola Rekening Penampungan
- Jasa Agen Pembayaran
- Jasa Penampungan Dana IPO
- Jasa Agen Penjaminan

BNI selaku Wali Amanat telah mengelola 23 emisi dengan nilai emisi (obligasi dan MTN) sebesar Rp64.544.000 (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 emisi dengan nilai emisi (obligasi dan MTN) sebesar Rp45.450.652 (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2017.

57. RENCANA BARANG MODAL

BNI memiliki komitmen barang modal terkait dengan pembangunan gedung kantor cabang serta pengadaan perlengkapan komputer dan ATM adalah sebesar Rp2.128.416 dan Rp1.473.887 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (tidak diaudit).

56. OTHER ACTIVITIES (continued)

Custodian Services (continued)

- d. *Euroclear Custodian* for customer who is conducting investment and settlement of securities transactions listed in *Euroclear Operations Center*, Brussels. BNI Custodian is a direct member of *Euroclear*.

As of 31 December 2018 and 2017, BNI's custodian operations has 138 customers (unaudited) and 264 customers (unaudited), respectively. The customers are primarily pension funds, insurance companies, banks, foundations, securities companies, mutual funds, other institutions/legal entities and individual customers with a total portfolio value as of 31 December 2018 and 2017 of Rp215,012,511 (unaudited) and Rp204,510,680 (unaudited), respectively.

BNI carries insurance on custodian services against potential losses from safekeeping and transit of securities in accordance with OJK, previously Bapepam and LK regulation.

Trust Operations

BNI has obtained the operating license for trustee services based on Decision Letter of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency No. 01/STTD-WA/PM/1996 dated 27 March 1996. The Trustee Services Business (TSB) provides a full range of the following services:

- Trustee for bond and medium-term notes (MTN)
- Escrow Account Agent
- Paying Agent
- Initial Public Offering / IPO Receiving Bank
- Security Agent

BNI as a Trustee, has 23 bonds and MTN issued amounting to Rp64,544,000 (unaudited) as of 31 December 2018 and 31 trusteeship arrangements with the total value of bonds and MTN issued amounting to Rp45,450,652 (unaudited) as of 31 December 2017.

57. CAPITAL EXPENDITURE COMMITMENTS

BNI has capital expenditure plans in relation to the construction of branch offices and procurement of computer equipment and ATMs amounting to Rp2,128,416 and Rp1,473,887 as of 31 December 2018 and 2017 (unaudited), respectively.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

58. KREDIT KELOLAAN

BNI mengelola dana yang langsung dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (didanai oleh kreditur luar negeri) yang ditujukan kepada penerima pinjaman untuk keperluan pembiayaan proyek tertentu. Penerima pinjaman ini telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pembayaran yang diterima oleh BNI dari penerima pinjaman dikembalikan lagi ke Pemerintah. BNI tidak menanggung risiko kredit atas transaksi-transaksi tersebut. Pinjaman tersebut bukan merupakan aset BNI dan dana yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia bukan merupakan liabilitas BNI, pinjaman tersebut tidak dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian BNI. BNI memperoleh pendapatan atas pengelolaan pinjaman tersebut sebesar 0,25% dari rata-rata saldo baki debit pinjaman dalam mata uang Rupiah dan 0,15% dari rata-rata saldo baki debit pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Jumlah kredit yang dikelola oleh BNI atas nama Pemerintah tersebut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Sektor		
Listrik, gas dan air	4,098	4,098
Pertanian	2,881	2,881
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	2,747	2,747
Perdagangan, restoran dan hotel	2,273	2,279
Jasa pelayanan sosial	1,876	1,876
Jasa dunia usaha	1,680	1,680
Perindustrian	1,131	1,132
Konstruksi	6	6
Lain-lain	9,457	9,462
Total	26,149	26,161

59. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2018/ 1 January 2018	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange	31 Desember 2018/ 31 December 2018
Pinjaman yang diterima	44,670,741	6,795,949	557,816	52,024,506
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2,390,066	18,478,977	655,286	21,524,329
Efek-efek Subordinasi	-	99,953	-	99,953
Total	47,060,807	25,374,879	1,213,102	73,648,788

58. CHANNELING LOANS

BNI administers loans directly disbursed by the Government of the Republic of Indonesia (financed by overseas creditors) to the borrowers of certain specified projects. These borrowers are approved by the Government of the Republic of Indonesia. Payments received by BNI from borrowers are remitted back to the Government. BNI bears no credit risk on these transactions. These loans are not the assets of BNI and funds received from the Government of Republic of Indonesia are not the liabilities of BNI. These loans are not recognized in BNI's consolidated financial statements. BNI receives fees for administering the loans of 0.25% from the average of loans outstanding balance in Rupiah and 0.15% of the average of loan outstanding balance in United States Dollar.

Following is the outstanding loans balance administered by BNI on behalf of the Government as of 31 December 2018 and 2017 (unaudited):

	2018	2017
Sektor		
Electricity, gas and water	4,098	4,098
Agriculture	2,881	2,881
Transportation, warehouse and communications	2,747	2,747
Trading, restaurant and hotel	2,273	2,279
Social services	1,876	1,876
Business services	1,680	1,680
Manufacturing	1,131	1,132
Construction	6	6
Others	9,457	9,462
Total	26,149	26,161

59. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated cash flow statement are as follows:

	1 Januari 2018/ 1 January 2018	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange	31 Desember 2018/ 31 December 2018
Borrowings	44,670,741	6,795,949	557,816	52,024,506
Securities sold under agreements to repurchase	2,390,066	18,478,977	655,286	21,524,329
Subordinated Securities	-	99,953	-	99,953
Total	47,060,807	25,374,879	1,213,102	73,648,788

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

60. STANDAR AKUNTANSI BARU

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara Dewan Standar Akuntansi Internasional dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

60. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants (DSAK - IAI), but not yet effective for current financial statements are disclosed below.

- *SFAS 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted.*

This SFAS provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.

- *PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.*

This PSAK is a single standards that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analyzing before recognizing the revenue.

- *SFAS 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted, but not before an entity applies SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers.*

This SFAS establish the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.



**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

60. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

- Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71 Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 Kontrak Asuransi, berlaku efektif 1 Januari 2020.

Amandemen ini mengizinkan asuradur yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 (*deferral approach*) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (*overlay approach*) untuk aset keuangan yang ditetapkan

- Amendemen PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program, berlaku efektif 1 Januari 2019

Amendemen PSAK 24 memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK 24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

- ISAK 33 – Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

ISAK 33 mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

- ISAK 34 : Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

60. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS (continued)

- *Amendments to SFAS 62: Insurance Contract on Applying PSAK 71 Financial Instruments with SFAS 62 Insurance Contract, effective 1 January 2020.*

This amendments allows those who meet certain criteria to apply a temporary exclusion of SFAS 71 (deferral approach) or choose to implement overlay approach for financial assets designated.

- *Amendments to PSAK 24: Employee Benefits regarding Amendments, Curtailmen, or Program Settlement, effective January 1, 2019*

Amendments to PSAK 24 provide clearer guidance for entities in recognizing past service costs, settlement gains and losses, current service costs and net interest after amendments, curtailments, or completion of programs because they use the latest actuarial assumptions (previously using actuarial assumptions at the beginning of the reporting period annual). In addition, the Amendment to PSAK 24 also clarifies how the accounting requirements for amendments, curtailments, or program completion can affect the asset boundary requirements as seen from the reduction in surplus which causes the impact of the asset limit to change.

- *ISAK 33 – Foreign currency Transaction and Advance Consideration, effective 1 January 2019 with earlier application is permitted.*

ISAK 33 clarify the use of the transaction date to determine the exchange rate used in the initial recognition of the related asset, expense or income at the time the entity has received or paid advance consideration in the foreign currency.

- *SFAS No 34: Uncertainty over Income Tax Treatments, effective 1 January 2019 with earlier application is permitted.*

This SFAS is to clarifies and guidance of uncertainty over Income tax treatments at financial report

As at the authorisation date of this consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Group's consolidated financial statements.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

61. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rincian reklasifikasi akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

61. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2017 have been reclassified to conform with the presentation of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2018.

The details of the accounts reclassification are as follows:

	2017 Laporan keuangan konsolidasian/ Consolidated financial statements			
	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassifications	Reklasifikasi/ Reclassifications	Setelah reklasifikasi/ After reclassifications	
<u>Laporan posisi keuangan</u>				<u>Statement of financial position</u>
LIABILITAS				LIABILITIES
Simpanan dari bank lain	11,682,783	51,424	11,734,207	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	44,722,165	(51,424)	44,670,741	Borrowings
TOTAL LIABILITAS	584,086,818	-	584,086,818	TOTAL LIABILITIES
<u>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</u>				<u>Statement of profit or loss and other comprehensive income</u>
Pendapatan Provisi dan komisi lainnya	7,314,262	(442,355)	6,871,907	Other fee and commission income
Pendapatan operasional lainnya	870,284	(24,610)	845,674	Other operating income
Beban operasional lainnya	(2,747,569)	466,965	(2,280,604)	Other operating expenses
LABA TAHUN BERJALAN	13,770,596	-	13,770,596	INCOME FOR THE YEAR
<u>Laporan Arus Kas</u>				<u>Statement of Cash Flows</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pendapatan operasional lainnya	10,585,204	(466,965)	10,118,239	Other operating income
Beban operasional lainnya	(19,182,605)	466,965	(18,715,640)	Other operating expenses
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	21,241,286	-	21,241,286	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				Increase (decrease) in operating liabilities:
Simpanan dari bank lain	1,370,680	51,424	1,422,104	Deposits from other banks
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	33,625,854	51,424	33,677,278	Net cash provided from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Kenaikan pinjaman yang diterima	12,333,663	(51,424)	12,282,239	Increase in borrowings
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	3,245,370	(51,424)	3,193,946	Net cash provided from financing activities
PENINGKATAN NETO KAS DAN SETARA KAS	13,596,952	-	13,596,952	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS



The original supplementary financial statements included herein are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Schedule 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/December		
	2018	2017	
ASET			ASSETS
Kas	13,681,004	11,330,043	Cash
Giro pada Bank Indonesia	33,867,589	30,611,107	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	12,841,692	21,019,282	Current accounts with other banks
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	Less: Allowance for impairment losses
	12,841,692	21,019,282	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	35,871,963	24,569,026	Placements with other banks and Bank Indonesia
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	Less: Allowance for impairment losses
	35,871,963	24,569,026	
Efek-efek	27,292,142	29,729,231	Marketable securities
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(307,730)	(303,782)	Less: Allowance for impairment losses
	26,984,412	29,425,449	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	548,458	Securities purchased under agreements to resell
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	Less: Allowance for impairment losses
	-	548,458	
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	24,745,206	15,799,170	Bills and other receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(158,344)	(98,245)	Less: Allowance for impairment losses
	24,586,862	15,700,925	
Tagihan akseptasi	20,422,882	18,255,111	Acceptances receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(179,221)	(164,452)	Less: Allowance for impairment losses
	20,243,661	18,090,659	
Tagihan derivatif	605,248	216,884	Derivatives receivables
Pinjaman yang diberikan	483,421,821	417,151,310	Loans
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(14,059,789)	(13,935,005)	Less: Allowance for impairment losses
	469,362,032	403,216,305	

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Schedule 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/December		
	2018	2017	
ASET (lanjutan)			ASSETS (continued)
Obligasi Pemerintah	72,087,759	68,393,187	Government Bonds
Pajak dibayar di muka	1,623,560	619,751	Prepaid taxes
Beban dibayar dimuka	2,114,901	2,096,716	Prepaid expenses
Penyertaan saham	4,081,332	4,081,332	Equity investments
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(181,084)	(72,400)	Less: Allowance for impairment losses
	3,900,248	4,008,932	
Aset lain-lain - neto	9,795,844	8,741,143	Other assets - net
Aset tetap	32,954,473	29,333,004	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(7,460,793)	(7,026,798)	Less: Accumulated depreciation
	25,493,680	22,306,206	
Aset pajak tangguhan - neto	1,514,755	764,300	Deferred tax assets - net
TOTAL ASET	754,575,210	661,658,373	TOTAL ASSETS



The original supplementary financial statements included herein are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Schedule 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/December		
	2018	2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
Liabilitas segera	4,115,403	4,834,397	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	544,659,543	487,461,508	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	14,179,005	12,011,881	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	322,028	113,820	Derivatives payable
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	21,524,329	2,390,066	Securities sold under agreements to repurchase
Liabilitas akseptasi	4,364,479	4,491,419	Acceptances payable
Beban yang masih harus dibayar	670,013	700,093	Accrued expenses
Utang pajak			Taxes payable
- Pajak penghasilan badan	398,615	6,044	Corporate income tax -
- Pajak lainnya	35,367	25,910	Other taxes -
Total utang pajak	433,982	31,954	Total taxes payable
Imbalan kerja	2,903,413	3,761,240	Employee benefits
Penyisihan	176,219	190,881	Provision
Liabilitas lain-lain	3,271,580	4,493,047	Other liabilities
Efek-efek yang diterbitkan	2,999,044	2,998,818	Securities issued
Pinjaman yang diterima	51,267,143	44,161,992	Borrowings
Efek-efek subordinasi	99,953	-	Subordinated Securities
TOTAL LIABILITAS	650,986,134	567,641,116	TOTAL LIABILITIES

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Schedule 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/December		
	2018	2017	
EKUITAS			EQUITY
Modal saham:			Share capital:
- Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp7.500 per saham (dalam Rupiah penuh)			Class A Dwiwarna - Rp7,500 par value per share (in full Rupiah amount)
- Seri B - nilai nominal Rp7.500 per saham (dalam Rupiah penuh)			Class B - Rp7,500 par value per share (in full Rupiah amount)
- Seri C - nilai nominal Rp375 per saham (dalam Rupiah penuh)			Class C - Rp375 par value per share (in full Rupiah amount)
Modal dasar:			Share capital - Authorized:
- Seri A Dwiwarna - 1 saham			Class A Dwiwarna - 1 share -
- Seri B - 289.341.866 saham			Class B - 289,341,866 shares -
- Seri C - 34.213.162.660 saham			Class C - 34,213,162,660 shares -
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			Issued and fully paid:
- Seri A Dwiwarna - 1 saham			Class A Dwiwarna - 1 share -
- Seri B - 289.341.866 saham			Class B - 289,341,866 shares -
- Seri C - 18.359.314.591 saham	9,054,807	9,054,807	Class C - 18,359,314,591 shares -
Tambahan modal disetor	14,568,468	14,568,468	Additional paid-in capital
Cadangan revaluasi aset	14,836,707	12,189,730	Asset revaluation reserve
(Rugi)/laba yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak	(2,985,199)	280,627	Unrealized (losses)/gains on available-for-sale marketable securities and Government Bonds, net of tax
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	84,951	93,279	Exchange difference in translation of foreign currency financial statements
Saldo laba			Retained earnings
Sudah ditentukan penggunaannya			Appropriated
Cadangan umum dan wajib	2,778,412	2,778,412	General and legal reserves
Cadangan khusus	-	-	Specific reserves
Tidak ditentukan penggunaannya	65,250,930	55,051,934	Unappropriated
	<u>68,029,342</u>	<u>57,830,346</u>	
TOTAL EKUITAS	<u>103,589,076</u>	<u>94,017,257</u>	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>754,575,210</u>	<u>661,658,373</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY



The original supplementary financial statements included herein are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran 2
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Schedule 2
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December		
	2018	2017	
PENDAPATAN BUNGA	50,270,825	44,839,446	INTEREST INCOME
BEBAN BUNGA	(17,614,932)	(15,230,292)	INTEREST EXPENSE
PENDAPATAN BUNGA - NETO	32,655,893	29,609,154	INTEREST INCOME - NET
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			OTHER OPERATING INCOME
Provisi dan komisi lainnya	8,353,459	7,372,139	<i>Other fee and commission</i>
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	1,997,152	1,732,289	<i>Recovery of assets written off</i>
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan	32,967	6,777	<i>Unrealized gain (losses) from financial assets held for trading</i>
Keuntungan dari penjualan aset keuangan yang diklasifikasikan tersedia untuk dijual dan dimiliki untuk diperdagangkan	534,686	710,954	<i>Gain on sale of financial assets classified as available-for-sale and held for trading</i>
Laba selisih kurs - neto	485,278	899,931	<i>Foreign exchange gains - net</i>
Lain-lain	389,497	377,511	<i>Others</i>
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	11,793,039	11,099,601	TOTAL OTHER OPERATING INCOME
PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI	(6,798,584)	(6,503,163)	ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			OTHER OPERATING EXPENSES
Gaji dan tunjangan	(8,106,388)	(8,124,341)	<i>Salaries and employees' benefits</i>
Umum dan administrasi	(6,908,898)	(6,209,154)	<i>General and administrative</i>
Beban promosi	(1,101,141)	(864,323)	<i>Promotion expense</i>
Premi penjaminan	(970,733)	(877,307)	<i>Guarantee premium</i>
Lain-lain	(1,824,150)	(1,790,289)	<i>Others</i>
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(18,911,310)	(17,865,414)	TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES
LABA OPERASIONAL	18,739,038	16,340,178	OPERATING INCOME
PENDAPATAN/(BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO	302,888	(12,684)	NON-OPERATING INCOME/(EXPENSES) - NET
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	19,041,926	16,327,494	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK			TAX EXPENSE
Kini	(4,768,134)	(3,143,534)	<i>Current</i>
Tangguhan	188,370	(138,115)	<i>Deferred</i>
TOTAL BEBAN PAJAK	(4,579,764)	(3,281,649)	TOTAL TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	14,462,162	13,045,845	INCOME FOR THE YEAR

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran 2
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Schedule 2
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December		
	2018	2017	
LABA TAHUN BERJALAN	14,462,162	13,045,845	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan revaluasi aset tetap	2,755,924	(227)	Gain on revaluation of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	628,250	(186,118)	Remeasurement of post employment benefit
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	(234,596)	37,224	Income tax relating to components of other comprehensive income
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that will be reclassified to profit or loss
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(8,328)	11,564	Translation adjustment of foreign currency financial statements
(Kerugian) keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(4,082,282)	1,912,357	(Losses) gain on changes in value of financial assets categorized as available-for-sale
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	816,456	(384,282)	Income tax relating to components of other comprehensive income
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(124,576)	1,390,518	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER TAXES
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	14,337,586	14,436,363	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR



The original supplementary financial statements included herein are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran 3
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Schedule 3
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	(Rugi) laba yang belum direalisasi atau dik-errek dan Obligasi perantara dalam kelompok tersedia untuk dijual/ setelah pajak/ Unrealized (losses) gain on available-for-sale marketable securities and Government Bonds, net of tax	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ Exchange difference from translation of foreign currency financial statements	Cadangan revaluasi aset/ Asset revaluation reserve	Cadangan umum dan wajib/ General and legal reserves	Tidak dicadangkan/ Unappropriated ^{*)}	Total ekuitas/ Total equity
Saldo per 31 Desember 2017	9,054,807	14,566,468	280,627	93,279	12,189,730	2,778,412	55,051,934	94,017,257
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	(3,265,826)	(8,328)	2,646,977	-	14,964,763	14,337,586
Pembagian dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(4,765,767)	(4,765,767)
Saldo per 31 Desember 2018	9,054,807	14,566,468	(2,985,199)	84,951	14,836,707	2,778,412	65,250,930	103,569,076
								Balance as of 31 December 2017
								Comprehensive income for the year
								Distribution of cash dividends
								Balance as of 31 December 2018

^{*)} Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak sebesar Rp502.801.

^{*)} Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefit, net of tax amounting to Rp502,801.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The original supplementary financial statements included herein are in the Indonesian language.

Lampiran 3
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Schedule 3
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For The Year Ended 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up capital	Tambahannya modal disetor/ Additional paid-in capital	(Rugi) laba yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam keompok dalam keompok dan keompok kur's karena perbedaan nilai keuangannya dalam mata uang asing/ Exchange difference from translation of foreign currency financial statements	Cadangan revaluasi aset/ Asset revaluation reserve	Saldo laba/Retained earnings		Tidak dicadangkan/ Unappropriated ^{*)}	Total ekuitas/ Total equity	Balance as of 31 December 2016
					Dicadangkan/ Appropriated	umum dan wajib/ General and legal reserves			
Saldo per 31 Desember 2016	9,054,807	14,568,468	(1,247,448)	81,715	12,189,957	2,778,412	46,123,318	83,549,229	Balance as of 31 December 2016
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	1,528,075	11,564	(227)	-	12,896,951	14,436,363	Comprehensive income for the year
Pembagian dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(3,988,562)	(3,988,562)	Distribution of cash dividends
Pelepasan tanah/bangunan yang telah direvaluasi	-	-	-	-	-	-	227	227	Land/Building disposal after revaluation
Saldo per 31 Desember 2017	9,054,807	14,568,468	280,627	93,279	12,189,730	2,778,412	55,051,934	94,017,257	Balance as of 31 December 2017

^{*)} Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak sebesar Rp148,894.

^{*)} Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post-employment benefit, net of tax amounting to Rp148,894.



INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran 4
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Schedule 4
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December		
	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pendapatan bunga	49,424,527	44,517,273	Interest incomes
Beban bunga	(17,301,553)	(15,165,266)	Interest expenses
Pendapatan operasional lainnya	11,847,043	10,804,408	Other operating incomes
Beban operasional lainnya	(16,209,388)	(17,435,483)	Other operating expenses
Pendapatan/(beban) bukan operasional - bersih	302,889	(12,684)	Non-operating income/(expense) - net
Pembayaran pajak penghasilan	(3,755,813)	(3,210,791)	Payment of income tax
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	24,307,705	19,497,457	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan/(kenaikan) aset operasi:			Decrease (increase) in operating assets:
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	350,201	551,069	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(60,082)	(2,000,717)	Marketable securities and Government Bond at fair value through profit or loss
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	(8,946,037)	(7,200,107)	Bills and other receivables
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	548,458	776,802	Securities purchased under agreements to resell
Pinjaman yang diberikan	(73,717,903)	(53,925,776)	Loans
Tagihan akseptasi	(2,167,771)	(3,450,738)	Acceptances receivable
Biaya dibayar di muka	(18,185)	115,201	Prepaid expenses
Aset lain-lain	(1,831,966)	(3,097,456)	Other assets
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:			Increase/(decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	(718,994)	1,591,838	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	57,198,035	75,313,941	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2,167,124	1,558,071	Deposits from other banks
Beban yang masih harus dibayar	(30,080)	(149,574)	Accrued expenses
Imbalan kerja	(683,241)	647,953	Employee benefits
Liabilitas akseptasi	(126,940)	137,737	Acceptances payable
Utang pajak	9,457	(19,245)	Taxes payable
Kenaikan efek-efek yang diterbitkan	226	-	Increase in marketable securities issued
Liabilitas lain-lain	(1,534,844)	723,758	Other liabilities
Kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(5,254,837)	31,070,214	Net cash (used in)/provided from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan/(pembelian) efek-efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo - neto	2,336,344	(8,946,739)	Sale/(purchase) of marketable securities available-for-sale and held-for-maturity - net
Pembelian Obligasi Pemerintah - neto	(7,027,069)	(11,677,380)	Purchases sales of Government Bond - net
Penambahan aset tetap	(1,747,025)	(1,764,157)	Acquisition of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	197,315	10,040	Proceeds from sale of fixed assets
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(6,240,435)	(22,378,236)	Net cash used in investing activities

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran 4
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Schedule 4
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended 31 December 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended Decem		
	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Kenaikan pinjaman yang diterima	6,547,335	11,873,491	Increase in borrowings
Penurunan efek-efek yang diterbitkan	-	(3,732,297)	Decrease in marketable securities issued
Kenaikan/(penurunan) efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	18,478,976	(1,374,895)	Increase/(decrease) in securities sold under agreements to repurchase
Kenaikan efek-efek subordinasi	99,953	-	Increase in subordinates securities
Pembayaran dividen	(4,765,767)	(3,968,562)	Payment of dividends
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	20,360,497	2,797,737	Net cash provided from financing activities
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	8,865,225	11,489,715	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	85,455,451	73,869,860	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	217,767	95,876	Effect of foreign currency exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	94,538,443	85,455,451	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS:			COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:
Kas	13,681,004	11,330,043	Cash
Giro pada Bank Indonesia	33,867,589	30,611,107	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	12,841,692	21,019,282	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	34,148,158	22,495,019	Placement with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months of acquisition date
Total kas dan setara kas	94,538,443	85,455,451	Total cash and cash equivalents

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement is as follows:

	1 Januari 2018/ 1 January 2018	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange	31 Desember 2018/ 31 December 2018	
Pinjaman yang diterima	44,161,992	6,547,335	557,816	51,267,143	Borrowings
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2,390,066	18,478,976	655,287	21,524,329	Securities sold under agreements to repurchase
Efek-efek subordinasi	-	99,953	-	99,953	Subordinated securities
Total	46,552,058	25,126,264	1,213,103	72,891,425	Total



INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - ENTITAS INDUK

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - PARENT ENTITY

As of 31 December 2018
and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk.

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No.4 (revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No.4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto investee.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak yang disajikan pada biaya perolehan.

2. Penyertaan Saham

Informasi mengenai entitas anak yang dimiliki Bank diungkapkan pada Catatan 1i atas laporan keuangan konsolidasian.

1. Significant Accounting Policy

Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity.

The separate financial statements of parent entity are prepared in accordance with the statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") No.4 (revised 2013), "Separate Financial Statements".

PSAK No.4 (Revised 2013) regulates that when an entity presents the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent entity, in which the investments are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries which are stated at cost.

2. Equity Investment

Information pertaining to subsidiaries of the Bank is disclosed in Note 1i to the consolidated financial statements.

REFERENSI SILANG

KRITERIA ARA 2018

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
I	Umum		
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris		v
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca		v
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas		v
5	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman. 	v
4	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.		v
II	Ikhtisar Data Keuangan Penting		
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): <ol style="list-style-type: none"> a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan : <ol style="list-style-type: none"> a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali. 4. Laba (rugi) per saham. <p>Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.</p>	16-18
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. 	16-18
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	19-20



	Kriteria	Penjelasan	Halaman
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah saham yang beredar; Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: <ol style="list-style-type: none"> Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. <p>untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.</p>	25-26
5	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	<p>Informasi memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); Tingkat bunga/imbalan; Tanggal jatuh tempo; dan Peringkat obligasi/sukuk tahun 2017 dan 2018 <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.</p>	28
III Laporan Dewan Komisaris dan Direksi			
1	Laporan Dewan Komisaris	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. 	36-43
2	Laporan Direksi	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> kebijakan strategis; perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; Analisis tentang prospek usaha; Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. 	47-55
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. 	56-57

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
IV	Profil Perusahaan		
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan situs web.	61
2	Riwayat singkat perusahaan	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	62-63
3	Bidang usaha	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	65-68
4	Struktur Organisasi	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah direksi.	74-75
5	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	76-79
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	80-88
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	89-99
8	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	117-127
9	Komposisi Pemegang saham	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	128-130



	Kriteria	Penjelasan	Halaman
10	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). 	131-135
11	Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	134
12	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); dan 3. Nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.</p>	137-138
13	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.</p>	142
14	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang	Informasi memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. 	143
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). 	144-150
16	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan.</p>	151-153
17	Informasi pada Situs Website Perusahaan	Meliputi paling kurang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/<i>Charter</i> Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. 	154-155

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
18	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan</p>	156-171
V Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan			
1	Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas. 	181-223
2	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan 5. Arus kas. 	236-261
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	Penjelasan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan membayar utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang. 	272-274
4	Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)	Penjelasan atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal. 	270-261
5	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.</p>	285-286
6	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.</p>	286-287



	Kriteria	Penjelasan	Halaman
7	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk 1 (satu) tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	287-288
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	305
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	231-234
10	Uraian tentang aspek pemasaran	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	224-230
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	293
12	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	293-295
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	288-293
14	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	284
15	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.	306-311

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
16	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	310-313
17	Informasi kelangsungan usaha	<p>Pengungkapan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i>. <p>Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.</p>	316-317
VI	Good Corporate Governance		
1.	Uraian Dewan Komisaris	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). 	412-452
2.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	<p>Meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. 	425-424
3.	Uraian Direksi	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 4. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 5. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). 	454-497
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. <p>Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2016, agar diungkapkan.</p>	375-382
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). <p>Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.</p>	448-450, 492-494



	Kriteria	Penjelasan	Halaman
6.	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	432-444, 469-490
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	658
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	422- 423,465
9.	Komite Audit	Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	501-511
10.	Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	511-522
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	522-539
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	539-548

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
13.	Uraian mengenai unit audit internal	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	549-557
14.	Akuntan Publik	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	574-575
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	576-597
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>); dan 3. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	597-601
17.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait tatakelola Tanggung jawab sosial	1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial 2. Informasi mengenai methoda dan lingkup due diligent terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan 3. Informasi tentang <i>stakeholder</i> penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan 4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya <i>stakeholders engagement</i> dan meningkatkan <i>value</i> untuk <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial	688-692
18.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia	1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Asasi Manusia 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia	693-694



	Kriteria	Penjelasan	Halaman
19.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Operasi yang adil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Operasi yang adil 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> operasi yang adil 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil 	695
20.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup.	<p>Penyampaian informasi tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan 7. Informasi tentang dampak dan risiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan 8. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 9. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan 10. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup 11. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 12. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. 	700-704
21	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja.	<p>Mencakup antara lain informasi tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> ketenagakerjaan 14. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan 15. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan 16. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut 17. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan <i>gender</i> dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain. 	705-707
22	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen,	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanganan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. 	715-719
23	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan masyarakat	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> pengembangan sosial dan masyarakat 2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan 3. Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan masyarakat 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 7. Biaya yang dikeluarkan 8. Terkait pengembangan sosial dan masyarakat, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. 	708-715

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
24	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). <p>Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.</p>	610-614
25	Akses informasi dan data perusahaan	<p>Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui situs web (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.</p>	624-640
26	Bahasan mengenai kode etik	<p>Memuat uraian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan</p>	641-642
27	Pengungkapan mengenai whistleblowing system	<p>Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan</p>	646-649
28.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	<p>Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.</p>	417-421, 461-462



	Kriteria	Penjelasan	Halaman
VII	Informasi Keuangan		
1	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	811
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan		814
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor izin KAP dan nomor izin Akuntan Publik.	813-815
4.	Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	816-1071
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	821-823
6.	Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	826-827
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	841-900
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	1006-1016

	Kriteria	Penjelasan	Halaman
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	958-965
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	943-947
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi*	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	1017-1019
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Kebijakan manajemen risiko; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	828-1071
13.	Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. SS	815



Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

■ Kantor Pusat :
Gedung BNI
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220, Indonesia

■ Online
Email : BNI@46.co.id
Website : bni.co.id

■ Phone & Fax
Solution Center : 1500 046
Phone : 021 - 2511 946 , 572 8387
Fax : 021 - 572 8295 , 572 8053

